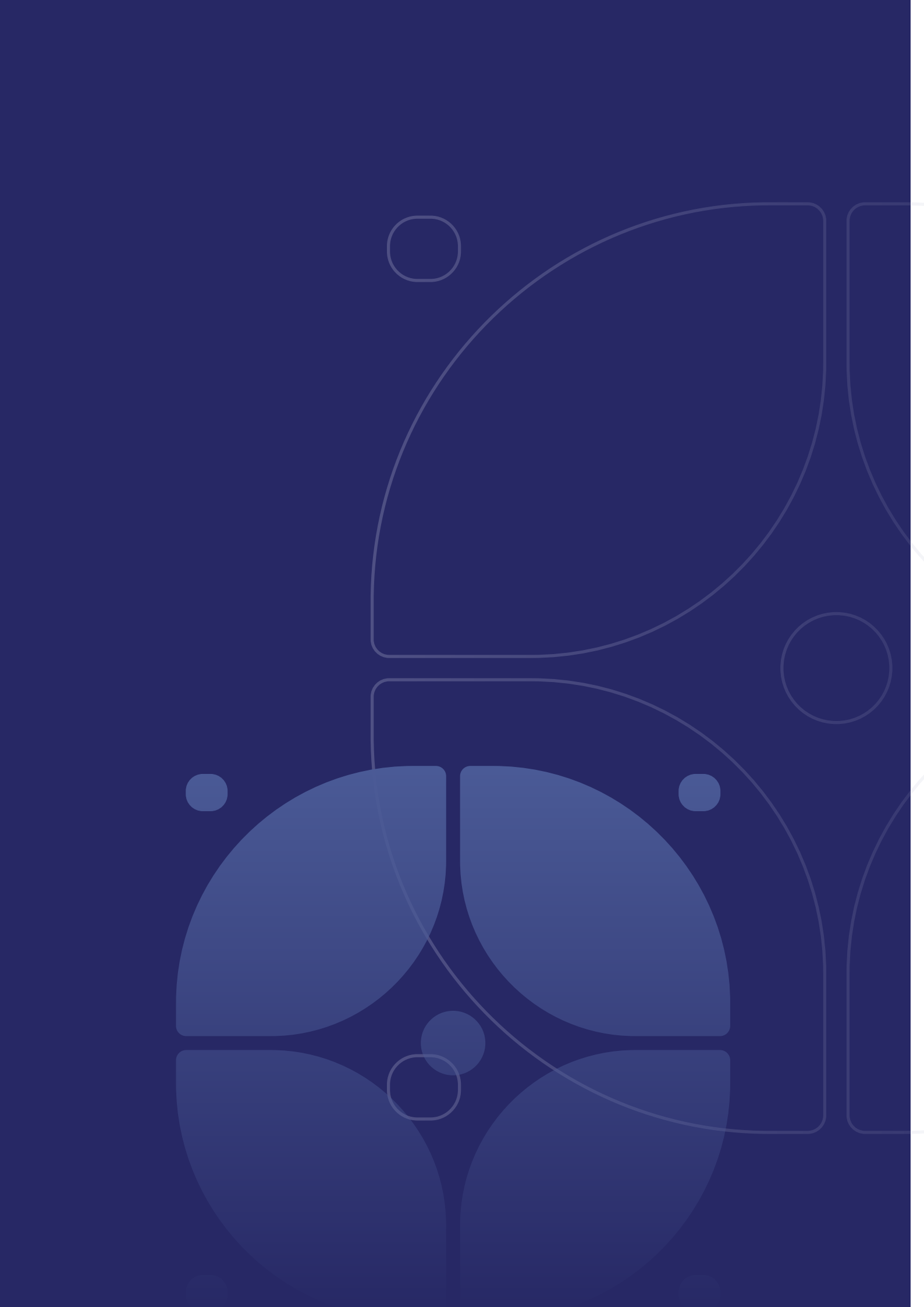


SUPPORTING EXPORT ECOSYSTEM STRENGTHENING COLLABORATIONS





SUPPORTING EXPORT ECOSYSTEM STRENGTHENING COLLABORATIONS

Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan RI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senantiasa membangun ekosistem guna mendorong pertumbuhan ekspor melalui kerjasama, kolaborasi dan sinergi antar lembaga Pemerintah, Daerah dan instansi terkait lainnya.

Dukungan LPEI terhadap ekosistem ekspor nasional juga diwujudkan dengan menjadi narasumber maupun kontributor aktif dalam program Kementerian/ Lembaga seperti *sharing knowledge* tentang *international trend* dan *shifting global trend in trade*, mitigasi risiko transaksi melalui produk dan layanan perbankan dan topik-topik aktual lainnya dalam rangka pemulihan dan penguatan ekspor nasional.

LPEI membangun sinergi kelembagaan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta lembaga terkait lainnya dalam Program Desa Devisa dan program *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) yang dilakukan secara sistematis dan bertahap untuk mencetak para eksportir baru.

Indonesia Eximbank, functioning as a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, is actively developing a conducive ecosystem to foster export growth through cooperation, partnerships, and synergy among governmental, regional, and other relevant institutions.

Indonesia Eximbank's commitment to fortify the domestic export ecosystem is demonstrated by its participation as a resource and dynamic contributor in the various programs of Ministries/ Institutions. This includes sharing insights on the latest global trends in trade, mitigating transaction risks through banking products and services, and addressing other pertinent issues in the current context of revitalizing and strengthening national exports.

Indonesia Eximbank intertwines strategic institutional synergy including with the Central and Regional Governments and other relevant entities, to implement the Desa Devisa Program and the Coaching Program for New Exporters (CPNE) in a systematic and gradual manner. These initiatives aim to cultivate new exporters.

Melalui Produk Daur Ulang

Bringing Batik Culture Globally Through Recycled Products

Produksi lebih dari

1.000 unit
dan mampu mencetak
omset ratusan juta
rupiah setiap bulannya.

Production of more than 1,000
units and able to print a turnover
of hundreds of millions of rupiah
every month



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI dalam peningkatan ekspor nasional memiliki mandat untuk berupaya menciptakan eksportir baru. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan program CPNE, sehingga Wastraloka dapat melakukan ekspor ke sejumlah negara di dunia dengan berbagai produk daur ulang..

Saat ini, Wastraloka telah mampu melakukan ekspor ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Uni Emirat Arab. Kapasitas produksinya telah meningkat hingga mampu memproduksi lebih dari 1.000 unit dan mampu mencetak omset ratusan juta rupiah setiap bulannya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia or Indonesia Eximbank, as the Special Mission Vehicle (SMV) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, has a mandate to promote national exports and foster the growth of new exporters. To achieve this goal, the CPNE program is implemented, enabling Wastraloka to export a variety of recycled products to several countries worldwide.

Currently, Wastraloka has been able to export to several countries, including the United States, Malaysia, Singapore, Hong Kong, and the United Arab Emirates. Wastraloka has increased its production capacity, now capable of producing over 1,000 units, and generating a monthly turnover of hundreds of millions of rupiah.



Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso, mengatakan “Dengan mengikuti program CPNE Wastraloka ikut mendapatkan manfaat besar terlebih untuk membantu pemilihan jenis produk yang produksi sesuai dengan *demand*, akses pasar, menghitung harga jual dan belajar proses dari pengiriman produk hingga sampai ke negara tujuan.”

Selain program CPNE, LPEI juga telah melibatkan Wastraloka di sejumlah Pameran dan *Business Matching* untuk perluasan akses pasar. Wastraloka telah mengikuti salah satu pameran dagang terbesar di Indonesia yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) pada tahun 2018 dan berkolaborasi bersama Sarinah dalam rangka perluasan akses pasar.

Wastraloka merupakan UKM asal Yogyakarta yang telah dirintis oleh Eni Anjayani sejak tahun 2014. Produk kerajinan daur ulang premium seperti kaleng kerupuk, *traditional teapot*, *tray*, *candle holder*, *stool*, *tumbler* yang dilukis motif batik tangan oleh seniman lokal menjadi keunggulan tersendiri dari Wastraloka. UKM asal Klaten, Yogyakarta ini juga memiliki misi pelestarian lingkungan dan budaya Indonesia hingga ke mancanegara.

Executive Director of Indonesia Eximbank, Riyani Tirtoso, said “By participating in the CPNE program, Wastraloka also gets great benefits, particularly to help select the type of product manufactured according to demand, market access, selling prices and learn the process from product delivery to the destination country.”

In addition to the CPNE program, Indonesia Eximbank has also engaged Wastraloka in a number of exhibitions and business matching to expand market access. Wastraloka has participated in one of the largest trade exhibitions in Indonesia, namely Trade Expo Indonesia (TEI) in 2018 and collaborated with Sarinah in order to expand market access.

Wastraloka is a SME from Yogyakarta that has been pioneered by Eni Anjayani since 2014. Premium recycled handicraft products such as cracker cans, traditional teapots, trays, candle holders, stools, tumblers painted with hand batik motifs by local artists are the distinct advantages of Wastraloka. This SME from Klaten, Yogyakarta also has a mission to preserve the environment and Indonesian culture to foreign countries.



LPEI Pamerkan Produk Mitra Binaan Pada Pameran Road to G20 Bali

Indonesia Eximbank Showcases Products of
Fostered Partners at Road to G20 Bali Exhibition



LPEI berpartisipasi pada acara penyambutan G20 yang diselenggarakan di Bali sejak tanggal 13 sampai 17 Juli 2022. Dukungan LPEI pada kesempatan tersebut yakni membawa beragam produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berorientasi ekspor yang telah menjadi mitra binaan CPNE sejak 2017 hingga sekarang dan juga beberapa debitur UMKM untuk ditampilkan di hadapan seluruh delegasi negara yang menjadi anggota G20.

Indonesia Eximbank participated in the G20 welcoming event held in Bali from 13 to 17 July 2022. On this occasion, Indonesia Eximbank provided support by showcasing a diverse range of export-oriented micro, small, and medium enterprises (MSMEs) products, which have been fostered through the CPNE program since 2017 to date. Several MSME debtors were also exhibited to all delegations from G20 member countries.



Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso mengatakan “Program ini memiliki tujuan untuk menciptakan eksportir baru dan memajukan komoditas ekspor suatu daerah, LPEI bangga bisa berpartisipasi dalam ajang bersejarah ini.”

Executive Director of Indonesia Eximbank, Riyani Tirtoso said “This program aims to create new exporters and advance the export commodities of a region, Indonesia Eximbank is proud to be able to participate in this historic event.”

UMKM yang ikut dalam pameran tersebut diantaranya: MSMEs participating in the exhibition include:

• Maharani Craft

Bali, yang menawarkan keunikan yang premium untuk kerajinan yang berfungsi sebagai hiasan untuk rumah (home décor), produk Maharani Craft telah berhasil ekspor produk mereka ke Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, Jepang dan Korea Selatan, lalu UD Kamasan – Bali, yang bergerak dalam bidang Industri pengecoran logam atau uang kepeng dan aksesoris lainnya yang memiliki nilai seni, industri uang kepeng kamasan Bali ini berhasil ekspor ke Negara Malaysia.

• Runa Jewelry

Bali, yang memproduksi kerajinan berbahan dasar perak, Runa berhasil mengeksport produknya berupa aksesoris ke negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Italia, selanjutnya UMKM CV Dharma Siadja berdiri sejak tahun 1940 yang memproduksi *handicraft*/hiasan rumah khas adat Bali dengan kualitas tinggi, produk mereka telah berhasil mencuri perhatian negara Amerika dan Eropa.

• PT Arum Jaya Perdana

Bali, yang menghasilkan produk ramah lingkungan berupa sedotan bambu yang terbuat dari bambu alami dan diproses secara alami, produk Arum saat ini telah berhasil di ekspor ke negara Inggris dan Singapura. Selain itu ada Bali Tangi – Desa Padangsambian Kaja, Denpasar merupakan produsen peralatan spa yang menggunakan bahan-bahan herbal, produk yang ditawarkan antara lain berupa *essential oil*, *natural body scrub* dan telah di ekspor ke negara Australia.

• PT Asia Garment Internasional

Denpasar, yang memproduksi sarung batik buatan tangan, kain batik, pakaian batik *leisure* dengan 100% rayon dan 100% bahan katun yang saat ini telah di ekspor ke tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Italia. Selain pelaku usaha berasal dari Bali, LPEI pun membawa pelaku usaha dari Yogyakarta dan sekitarnya yaitu Shiroshima – Yogyakarta, merupakan peserta CPNE tahun 2022, *brand fashion* yang menjadikan batik sebagai pakaian *ready to wear* dengan menggabungkan unsur tradisional dan modern kontemporer; dan UMKM Haveltea – Malang, merupakan pembuat minuman yang berasal dari campuran daun teh murni dengan rempah-rempah dan juga buah-buahan, metode dalam membuat produknya mendukung dampak ekonomi yang lebih baik terhadap petani lokal dan perempuan yang tinggal di sekitar pabrik Haveltea.

• Maharani Craft

Bali, which offers a premium uniqueness for handicrafts that function as decorations for the home (home décor), Maharani Craft products have successfully exported their products to the United States, Saudi Arabia, Egypt, Japan and South Korea, then UD Kamasan – Bali, which is engaged in the foundry industry or kepeng money and other accessories that have artistic value, the Bali kepeng kamasan money industry has successfully exported to Malaysia.

• Runa Jewelry

Bali, which produces environmentally friendly products such as bamboo straws made from natural bamboo and processed naturally. Arum products have now been successfully exported to the UK and Singapore. In addition, Bali Tangi - Padangsambian Kaja Village, Denpasar is a manufacturer of spa equipment that uses herbal ingredients, the products offered include essential oils, natural body scrubs and have been exported to Australia.

• PT Arum Jaya Perdana

Bali, yang menghasilkan produk ramah lingkungan berupa sedotan bambu yang terbuat dari bambu alami dan diproses secara alami, produk Arum saat ini telah berhasil di ekspor ke negara Inggris dan Singapura. Selain itu ada Bali Tangi – Desa Padangsambian Kaja, Denpasar merupakan produsen peralatan spa yang menggunakan bahan-bahan herbal, produk yang ditawarkan antara lain berupa *essential oil*, *natural body scrub* dan telah di ekspor ke negara Australia.

• PT Asia Garment Internasional

Denpasar, which produces handmade batik sarongs, batik fabrics, leisure batik clothing with 100% rayon and 100% cotton materials that have currently been exported to three countries, the United States, the United Kingdom and Italy. In addition to businesses from Bali, Indonesia Eximbank also brought business communities from Yogyakarta and its surroundings, namely Shiroshima – Yogyakarta, as participants of CPNE 2022, a fashion brand that makes batik as ready-to-wear clothing by combining contemporary traditional and modern elements; and MSME Haveltea – Malang, a beverage maker that produces a mixture of pure tea leaves with spices as well as fruits. The method of making its products supports a better economic impact on local farmers and women living around the Haveltea factory.

KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY

2022



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) secara aktif membangun kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga baik pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga mampu mengembangkan produk berorientasi ekspor, serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional. LPEI berperan sebagai fasilitator dan akselerator guna menjembatani kepentingan aktivitas dan pelaku ekspor dengan instansi terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan ekspor serta mempermudah aktivitas ekspor yang mengalami hambatan regulasi di negara tujuan ekspor. Selain itu, LPEI memberikan dukungan berupa layanan finansial dan layanan non-finansial kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor.

Indonesia Eximbank actively collaborates with various local and central government institutions and agencies to enhance the capabilities of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) for developing export-driven products and fostering a favorable business environment to boost national exports. Serving as a mediator and expeditor, Indonesia Eximbank connects exporters and export-related agencies to address barriers and facilitate export operations that encounter regulatory impediments in the destination countries. Additionally, Indonesia Eximbank extends financial and non-financial assistance to MSME communities with a focus on export-oriented ventures.

Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyediakan penjaminan atas kredit modal kerja yang disalurkan oleh perbankan kepada pelaku usaha korporasi melalui program Penjaminan Pemerintah atau JaMINaH dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. terkait dengan hal tersebut, LPEI memiliki tiga peran penting dalam rangka meningkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional dan ekspor nasional sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) kementerian keuangan yang meliputi Penjaminan Pemerintah untuk pelaku usaha korporasi; pelaksana pada program investasi pemerintah; dan penugasan khusus ekspor atau PKE dengan tujuan menyediakan pembiayaan ekspor.

Indonesia Eximbank has been given the mandates by the government to provide guarantees for working capital loans disbursement by banks to corporate business practitioners through the government guarantee program or JaMINaH in the framework of national economic recovery. as such, Indonesia Eximbank has three key roles in order to improve the national economic recovery and enhance the national exports as a *Special Mission Vehicles* (SMV) of the Ministry of Finance which includes government guarantees for corporate business players; the executor of government investment programs; and export-specific assignments or PKE with the aim at providing export financing.

2021



2020



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengimbangi masa pandemi di tahun 2020 melalui penguatan fondasi dengan misi "Regain Our Footing". tujuannya agar LPEI tetap menjadi penggerak pembangunan di masa pandemi. LPEI juga berupaya menjadi Lembaga yang penuh aspirasi menuju resiliensi dengan ketangkasan. Oleh karenanya di tahun 2020, LPEI memfokuskan pada tiga aspek agar mampu cepat beradaptasi dan tetap tangkas dalam situasi sulit. ketiga aspek tersebut yaitu melakukan restrukturisasi dan efisiensi, menjalankan mandat dan bisnis secara selektif termasuk Jasa konsultasi, dan penguatan proses Internal. ketiga aspek ini kemudian dituangkan menjadi sembilan prioritas utama, serta sekaligus menjadi strategi pengembangan bisnis LPEI di tahun 2020

Indonesia Eximbank navigated the crisis in 2020 by strengthening its foundation through its "Regain Our Footing" mission in order to continue propelling the nation during the pandemic. Indonesia Eximbank also aspires toward resilience with agility. to that end, in 2020 Indonesia Eximbank focused on three improvement areas that would accelerate its capability to adapt and staying agile amid a difficult situation. These areas were restructuring and efficiency, selective exercise of mandate and business activities including the advisory Services, and internal process strengthening. these aspects have been translated into nine key priorities that also formed Indonesia Eximbank's business development strategies in 2020.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2019



LPEI terus berupaya mengoptimalkan perannya menjadi lembaga yang berstatus sui generis mampu berkontribusi besar bagi peningkatan ekspor nasional dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola Perusahaan yang Baik, serta manajemen risiko yang baik dan kehati-hatian guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan. dukungan LPEI terhadap peningkatan ekspor nasional selama tahun 2019, dilakukan melalui penyaluran fasilitas pembiayaan, penjaminan dan asuransi; penyediaan tingkat suku bunga yang terjangkau bagi eksportir terutama untuk segmen UKM berorientasi ekspor (ukME); pembiayaan kepada komoditi ekspor potensial dan jasa; serta penambahan jumlah eksportir baru (ukME) melalui program *Coaching Program For New Exporters* dari kegiatan jasa konsultasi. LPEI juga memberikan catatan positif, khususnya dalam hal dampak ekonomi dan sosial (*developmental impacts*) yang diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran dampak ekonomi dan sosial (*developmental impacts*), fasilitas pembiayaan yang disalurkan LPEI dapat berkontribusi terhadap kenaikan ekspor sebesar 3,6 kali Pembiayaan dan kenaikan Produk domestik Bruto (PdB) sebesar 2,7 kali Pembiayaan

Indonesia Eximbank continued to optimize its role as an institution sui generis that is able to contribute to the sustainable growth of national exports while upholding the principles of good governance, rigorous risk management, and prudence. the Company's support in enhancing national export during 2019 is manifested through financing, guaranteeing, and insurance facilities, provided competitive interest rate to exporters particularly in the export-oriented SMEs segment, financing to potential export commodities and services, and contributed in increasing the number of new exporters by holding a coaching program as part of Indonesia Eximbank's advisory segment. Indonesia Eximbank also delivered positive outcome, specifically in terms of developmental impacts in both economy and social aspects. Based on the measurement of developmental impacts, Indonesia Eximbank was able to contribute through financing facility an increase in export by 3.6 times Financing and an increase of gross domestic Product (gdp) by 2.7 times Financing.

Pengembangan ekosistem ekspor merupakan salah satu pilar utama dari strategi akselerasi peningkatan ekspor nasional Indonesia. Sebagai lembaga yang mendapatkan amanat untuk menjadi katalis ekspor Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melakukan upaya-upaya berkesinambungan untuk memperkokoh posisinya dalam ekosistem ekspor nasional. upaya-upaya tersebut mencakup peningkatan fokus pembiayaan ke sejumlah lembaga komoditi unggulan pemerintah, penetrasi ke pasar ekspor non-tradisional, mendorong UKM berorientasi ekspor, serta melaksanakan penugasan khusus bersinergi dengan beberapa BuMN. kesemua upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan LPEI terhadap pengembangan ekspor nasional.

The development of the export ecosystem represents one of the core pillars of the strategies for acceleration of Indonesia's national exports. as the institution with the mandate to be a catalyst for Indonesian export, Indonesia Eximbank engages in continuing efforts to solidify its position within the national export ecosystem. these efforts include increased focus on financing a number of governments designated leading export commodities, penetration to non-traditional export markets, encouraging growth of export-oriented MSMEs, and the implementation of special-assignment export projects in synergy with a number of other SOEs. In these ways, Indonesia Eximbank is optimizing support to the development of Indonesia's national export

2018



2017



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tetap fokus pada upaya meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global dan terus memperluas negara tujuan ekspor non tradisional. untuk mencapai target tersebut, Indonesia Eximbank menerapkan tiga lembaga strategi yaitu menjaga kualitas produk dan jasa; memberikan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi untuk para eksportir; serta memberikan pelayanan prima (*service excellence*).

Indonesia Eximbank continued to focus on driving Indonesia's export competitiveness in the global market and expanding the destinations of non-traditional exports. to achieve its goals, Indonesia Eximbank applies three prong strategies, namely maintaining product and service quality, providing financing, guarantee, insurance, and advisory services for exporters, and providing service excellence

Gejolak perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir ini berdampak pada stagnasi dan bahkan pelemahan kinerja ekspor Indonesia yang merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. keadaan ini semakin menggarisbawahi pentingnya penguatan peran Indonesia Eximbank, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah yang diberi mandat untuk menyukseskan program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi.

The global economic turmoil in recent years has had an impact on the stagnation and even weakening of Indonesia's export performance, which is one of the driving growth of the national economic. this situation further underscores the importance of strengthening the role of Indonesia Eximbank, as an extension of the government which is mandated to succeed the national export program through financing, guarantees, and insurance facilities.



2016

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

6	Kesinambungan Tema Theme Continuity
8	Daftar Isi Table of Contents

IKHTISAR UTAMA Highlights

12	IKHTISAR KEUANGAN 2022 2022 Financial Highlights
14	IKHTISAR OBLIGASI Bonds Highlights
17	PERISTIWA PENTING Events Highlights

LAPORAN MANAJEMEN Management Reports

24	LAPORAN DEWAN DIREKTUR Board of Directors Report
38	DEWAN DIREKTUR Board of Directors
40	LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF- DIREKTUR PELAKSANA Executive Director & Managing Directors Report
58	DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA Executive Director & Managing Directors
60	LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH Sharia Supervisory Board Report
63	DEWAN PENGAWAS SYARIAH Sharia Supervisory Board
64	PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2022 OLEH DEWAN DIREKTUR Statement of Accountability of 2022 Annual Report by The Board of Directors
65	PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2022 OLEH DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA Statement of Accountability of 2022 Annual Report by The Executive Director & Managing Directors

PROFIL PERUSAHAAN Company Profile

68	IDENTITAS PERUSAHAAN Corporate Identity
68	SKALA USAHA Business Scale
70	DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI Associates Memberships
71	SEKILAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Indonesia Eximbank at a Glance
73	BIDANG USAHA BERDASARKAN DASAR HUKUM PENDIRIAN Business Activities Based on Legal Basis of Establishment
75	PRODUK DAN JASA Products and Services
77	JEJAK LANGKAH Milestones
80	VISI, MISI & NILAI PERUSAHAAN Vision, Mission & Corporate Value
83	Anggota Board of Management Members of Board of Management
84	STRUKTUR ORGANISASI Organization Structure
86	PROFIL DEWAN DIREKTUR Board of Directors' Profile
94	PROFIL DIREKTUR PELAKSANA Managing Directors' Profile
104	MANAJEMEN SENIOR Senior Management
115	DEMOGRAFI PEGAWAI Employees Demography
116	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM Shareholders Composition
117	ENTITAS ANAK & ENTITAS ASOSIASI Subsidiaries & Associates
118	STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN Corporate Structure Shareholding
118	STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN Company Group Structure
119	KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN Other Stocks Listing Chronology
122	INFORMASI AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) Public Accountant and Public Accountant Firm
124	LEMBAGA PROFESI PENUNJANG Supporting Professional Institutions
126	PENGHARGAAN Awards
127	INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN Information on Company Website
129	AKSES INFORMASI Information Disclosure

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion & Analysis

132	TINJAUAN PEREKONOMIAN Economic Review
143	TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN EKSPOR Export Financing Industry Review
148	PROSPEK USAHA Business Prospect
149	ASPEK PEMASARAN Marketing Aspect
151	STRATEGI BISNIS Business Strategy
157	TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA Business Segment Operational Review
208	TINJAUAN KEUANGAN Financial Review
222	KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG Solvency and Receivables Collectability
225	STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL Capital Structure and Management Policy on Capital Structure
228	IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL Material Commitment for Capital Goods Investment
229	REALISASI INVESTASI/BELANJA BARANG MODAL Investment Realization/Capital Expenditures
229	PERBANDINGAN ANTARA TARGET & REALISASI TAHUN 2022 SERTA PROYEKSI 2023 Comparison Between 2022 Target & Realization as Well as 2023 Projection
230	INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN Material Information Subsequent Events
230	KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA Dividend Policy and Distribution
231	PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM UNTUK KARYAWAN/MANAJEMEN Share Ownership Program for Employee/ Management
231	PENGUNAAN DANA IPO Use of IPO Proceeds
232	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI Transaction with Conflicts of Interest and Affiliates Transactions
232	INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI Investment, Expansion, Divestment, Acquisition and Restructuring
233	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN Regulatory Changes That Have a Material Impact on The Company

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

234	PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Changes in Accounting Policies Application
235	KONTRIBUSI KEPADA NEGARA Contribution to The State
235	INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA Business Continuity Information
237	TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

242	TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance
256	STRUKTUR DAN ARSITEKTUR GCG GCG Structure and Architecture
259	KERANGKA TATA KELOLA (STRUKTUR, PROSES, DAN HASIL TATA KELOLA) GCG Framework (Governance Structure, Process, and Outcome)
261	PENILAIAN GCG GCG Assessment
262	RAPAT PENGESAHAN Ratification Meetings
264	DEWAN DIREKTUR Board of Directors
271	DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA Executive Director and Managing Directors
281	RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA Board of Directors Meetings, and Executive Director & Managing Directors Meetings
305	PROGRAM PELATIHAN DIREKSI Board of Directors Training Program
309	INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI Information on Ultimate and Controlling Shareholders
310	KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA Policy on The Diversity of The Composition of The Board of Directors, Executive Director, and Managing Director
311	HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR LAIN DAN DIREKTUR PELAKSANA Financial Relationships and Family Relationship of The Board of Directors Members with Other Members of The Board of Directors and The Managing Directors
312	PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA GCG Assessment for The Board of Directors and Executive
316	REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors
323	DEWAN PENGAWAS SYARIAH Sharia Supervisory Board

332	ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director
348	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Remuneration and Nomination Committee
357	KOMITE PEMANTAU RISIKO Risk Monitoring Committee
366	ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF Executive Director Supporting Organs
367	KOMITE MANAJEMEN RISIKO Risk Management Committee
372	KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK Product Development Committee
379	KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN Policy and Guidelines Committee
385	KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT Assets and Liabilities Management Committee
393	KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI Information Systems Technology Committee
397	KOMITE PENGADAAN Procurement Committee
403	KOMITE JASA KONSULTASI Advisory Services Committee
407	KOMITE PEMBIAYAAN Financing Committee
420	KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources Committee
423	SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR Secretary to The Board of Directors
426	SEKRETARIS LEMBAGA Corporate Secretary
428	UNIT AUDIT INTERNAL Internal Audit Unit
443	AKUNTAN PUBLIK Public Accountant
447	FUNGSI KEPATUHAN Compliance Function
455	MANAJEMEN RISIKO Risk Management
475	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System
478	JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM & UPAYA PENYELESAIAN OLEH LPEI Litigation & Its Resolutions
482	AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN Information Access and Corporate Data
483	KODE ETIK Code of Conduct
488	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Whistleblowing System
498	PENERAPAN PEDOMAN GCG GCG Guidelines Application
508	PENGADAAN BARANG DAN JASA Goods & Services Procurement
512	PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) Implementation of Anti Money Laundering (AML) and Counter Terrorism Financing (CTF)
517	TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA Financial and Non-Financial Transparency of The Institution
519	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI Anti Corruption Policy & Procedures

527	BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI Share Buy Back and Bond Buy Back
527	RENCANA STRATEGIS LEMBAGA Institution's Strategic Plan
528	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR Distribution of Fund To Related Parties and Large Exposures
529	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEPENTINGAN POLITIK Funding for Social Activities and Political Interests

LAPORAN KEBERLANJUTAN
Sustainability Report

532	IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN Sustainability Performance Overview
535	KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN Framework and Strategy
560	KINERJA EKONOMI Economic Performance
581	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH Responsibility Towards Products, Services and Customers
592	KINERJA ASPEK LINGKUNGAN Environmental Performance
605	KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Community Development and Empowerment Performance
613	MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA Human Resource Competencies Management and Development
651	ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [OJK F.21] Occupational Health and Safety Aspects [OJK F.21]
659	TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN About Sustainability Report
670	INDEKS GRI STANDARD 2021 GRI Standard 2021 Index
677	DAFTAR INDEKS REFERENSI POJK 51/2017 POJK 51/2017 Index References

LAPORAN KEUANGAN 2022
Financial Statements 2022



IKHTISAR UTAMA HIGHLIGHTS

01





IKTISAR KEUANGAN 2022

2022 FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	2022	2021	2020	2019	2018	CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Total Aset	83.815.752	89.040.921	92.084.560	108.701.725	120.071.057	Total Assets
Portofolio Tresuri - Bruto	14.711.957	17.877.638	14.110.026	18.466.036	12.422.358	Treasury Portfolio - Gross
Portofolio Pembiayaan dan Piutang - Bruto	83.636.003	83.963.162	90.408.073	97.806.606	108.858.667	Financing and Receivables Portfolio- Gross
Tagihan Derivatif	-	6	-	1.410	1.283	Derivatives Receivable
Piutang Asuransi dan Penjaminan	288.989	285.656	34.631	1.400	5.415	Insurances Receivable
Aset Reasuransi	3.544	2.615	1.284	4.853	3.728	Reinsurances Assets
Tagihan Akseptasi	147.338	458.630	558.417	658.289	1.407.413	Acceptances Receivable
Total Liabilitas	56.947.507	58.920.543	67.288.011	89.762.973	98.881.645	Total Liabilities
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan - Bruto	25.311.700	27.743.500	36.524.500	45.209.502	44.169.595	Debt Securities Issued - Gross
Pinjaman yang Diterima	29.297.065	28.799.571	28.599.773	41.492.912	49.858.784	Fund Borrowings
Utang Asuransi	6.306	4.055	2.563	2.150	3.061	Insurances Payable
Utang Penjaminan	61.715	62.363	560	497	572	Guarantee Payable
Liabilitas Asuransi	7.961	6.390	3.230	6.515	4.109	Insurances Liabilities
Total Ekuitas	26.868.245	30.120.378	24.796.549	18.938.752	21.189.412	Total Equity

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2022	2021	2020	2019	2018	CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan Operasional - Neto	961.951	1.421.725	1.157.483	1.709.727	2.463.674	Total Operating Income - Net
Pendapatan Bunga	3.711.851	4.263.520	5.102.881	7.061.466	7.541.717	Interest Income
Beban Bunga	(2.936.114)	(3.057.215)	(4.262.993)	(5.646.218)	(5.415.182)	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	775.737	1.206.305	839.888	1.415.248	2.126.535	Net Interest Income
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(2.107.596)	(257.752)	(423.080)	(6.681.341)	(1.700.719)	Provision for Impairment Losses on Financial Assets Value
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan	(652)	(114)	(1.946)	6.802	(5.578)	Provision for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim
Beban Operasional - Neto	(762.488)	(758.763)	(676.887)	(691.234)	(661.614)	Total Operating Expense - Net
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	16.420	3.943	6.152	21.188	14.458	Non-Operating Income (Expense) - Net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(1.892.365)	409.039	61.722	(5.634.858)	110.221	Profit (Loss) Before Tax
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(3.114.554)	387.396	288.388	(4.710.849)	171.673	Profit (Loss) After Tax
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain -Neto	(26.784)	14.890	109.837	15.982	25.330	Other Comprehensive Income (Expense) - Net
Laba (Rugi) Komprehensif	(3.141.338)	402.286	398.225	(4.694.867)	197.003	Comprehensive Income (Loss)

IKTISAR KEUANGAN 2022
2022 FINANCIAL HIGHLIGHTS

KOMITMEN & KONTINJENSI	2022	2021	2020	2019	2018	COMMITMENT & CONTINGENCIES
Irrevocable L/C Masih Berjalan	395.071	379.096	164.415	280.657	1.052.563	Outstanding Irrevocable L/C
Penjaminan yang Diberikan	12.428.806	13.136.226	9.908.992	10.127.895	11.307.056	Guarantee Facility
Asuransi Ekspor	16.782.700	10.938.409	8.108.726	8.178.647	11.322.172	Export Insurance

RASIO KEUANGAN (%)	2022	2021	2020	2019	2018	FINANCIAL RATIO (%)
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit	32,93	38,19	29,47	17,62	17,57	Credit Risk - Capital Adequacy Ratio (CAR)
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit dan Pasar	32,74	37,19	28,07	17,32	17,43	Market & Credit Risk - Capital Adequacy Ratio (CAR)
NPL Gross	26,61	21,03	26,08	23,39	13,73	NPL Gross
NPL Neto	10,39	7,12	11,49	13,96	10,31	NPL Net
Pengembalian atas Aktiva (ROA)	-2,19	0,46	0,06	-4,84	0,10	Return on Assets (ROA)
Pengembalian atas Ekuitas (ROE)	-10,49	1,54	1,41	-21,63	0,81	Return on Equity (ROE)
Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM)	0,78	1,17	0,77	1,18	1,83	Net Interest Income to Earning Assets (NIM)
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	148,58	90,87	98,86	179,63	100,51	Operating Expenses to Operating Income
Posisi Devisa Neto	1,74	7,07	16,96	9,7	4,68	Net Open Position
Kewajiban terhadap Ekuitas (kali)	2,12	1,96	2,71	4,74	4,67	Liabilities to Equity (times)
Kewajiban terhadap Aset (kali)	0,68	0,66	0,73	0,83	0,82	Liabilities to Assets (times)

IKHTISAR OBLIGASI

BONDS HIGHLIGHTS

Indonesia Eximbank telah menerbitkan obligasi dan sukuk korporasi yang belum jatuh tempo hingga 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Lists of corporate bonds and sukuk that have been issued by Indonesia Eximbank and not yet matured as of 31 December 2022 are as follows:

Daftar obligasi korporasi Indonesia Eximbank | Indonesian Eximbank's Corporate Bonds

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2021 Total Outstanding as of 31 December 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase III - 2016	D	1,038	8,50%	22-Nov-16	22-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase IV of 2017	C	748	8.90%	23-Feb-17	23-Feb-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,007	9.20%	23-Feb-17	23-Feb-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	1,266	9.40%	23-Feb-17	23-Feb-27	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase V of 2017	B	436	7.90%	15-Aug-17	15-Aug-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,786	8.25%	15-Aug-17	15-Aug-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase VI of 2018	B	1,650	6.70%	14-Feb-18	14-Feb-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	206	6.90%	14-Feb-18	14-Feb-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase I of 2018	B	35	7.70%	06-Jun-18	6-Jun-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,756	8.30%	06-Jun-18	6-Jun-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase II of 2018	C	276	8.40%	05-Sep-18	5-Sep-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,324	8.75%	05-Sep-18	5-Sep-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase III of 2018	C	28	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	380	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

IKHTISAR OBLIGASI
BONDS HIGHLIGHTS

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2021 Total Outstanding as of 31 December 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
8	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase IV of 2019	B	935	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1.523	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	278	9.25%	23-Apr-19	23-Apr-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	349	9.50%	23-Apr-19	23-Apr-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		F	625	9.80%	23-Apr-19	23-Apr-34	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
9	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase V of 2019	B	621	8.45%	09-Jul-19	9-Jul-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	330	8.70%	09-Jul-19	9-Jul-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	737	9.20%	09-Jul-19	9-Jul-28	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
10	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VI of 2019	B	15	7.80%	03-Sep-19	03-Sep-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	6	8.10%	03-Sep-19	03-Sep-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	714.5	8.50%	03-Sep-19	03-Sep-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
11	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VII of 2019	B	101.3	7.80%	29-Oct-19	29-Oct-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	25.5	8.10%	29-Oct-19	29-Oct-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	112	8.50%	29-Oct-19	29-Oct-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	219.75	8.75%	29-Oct-19	29-Oct-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
12	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VIII of 2019	A	88	7.50%	06-Dec-19	06-Dec-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		B	1.551	7.90%	06-Dec-19	06-Dec-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	22.5	8.20%	06-Dec-19	06-Dec-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

IKHTISAR OBLIGASI
BONDS HIGHLIGHTS

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2021 Total Outstanding as of 31 December 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
13	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds V Phase I of 2020		48	7.60%	08-Jul-20	08-Jul-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi Total Bonds			20,237.25					

Daftar sukuk Indonesia Eximbank | Indonesian Eximbank's Sukuk

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2021 Total Outstanding as of 31 December 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018	C	14	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
	Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	D	155	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019	B	145	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
	Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase III of 2019	C	66	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Sukuk Total Sukuk			380					

Peringkat Lembaga | Institution Rating

No.	Lembaga Pemeringkat Rating Agency	Peringkat Rating	Outlook
1	Moody's	Baa2	Stable
2	Fitch	BBB	Stable
3	Pefindo	idAAA	Stable

PERISTIWA PENTING

EVENTS HIGHLIGHTS



3 Januari
January



Peresmian PT IPA Inauguration of PT IPA

Peresmian PT IEB Prima Aset.
Inauguration of PT IEB Prima Aset.

4 Januari
January



Pelantikan DE LPEI Inauguration of Executive Director

Pelantikan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI yang baru, Ibu Riyani Tirtoso menggantikan Bapak D. James Rompas.
The appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently the new Executive Director of Indonesia Eximbank, Mrs. Riyani Tirtoso replacing Mr. D. James Rompas.

15-18 Februari
February



Partisipasi G20 Jakarta G20 Jakarta Participation

LPEI Berpartisipasi dalam kegiatan G20 di Jakarta.
Indonesia Eximbank Participated in G20 activities in Jakarta.

9 Maret
March



Kolaborasi dengan Kemendes PDDT Collaboration with Kemendes PDDT

Kolaborasi tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama tentang program pemberdayaan dan pengembangan desa berorientasi ekspor di seluruh Indonesia.

The collaboration is outlined in a joint agreement on export-oriented village empowerment and development programs throughout Indonesia.

25 Maret
March



Signing dengan Bank BJB Signing with Bank BJB

Kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) untuk meningkatkan ekspor nasional menjalin kerja sama Penjaminan Kredit.
Cooperation with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten (Bank BJB) to increase national exports established Credit Guarantee cooperation.

31 Maret
March



Bersinergi dengan Bank BSI Synergize with Bank BSI

Kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dituangkan dalam nota kesepahaman mengenai penyediaan dan pemanfaatan layanan & produk perbankan syariah dan perjanjian kerja sama akad pembiayaan *wholesale* yang akan digunakan untuk mendukung pembiayaan ekspor dengan skema syariah yang dilakukan LPEI.
Cooperation with Bank Syariah Indonesia (BSI) as outlined in a memorandum of understanding on the provision and utilization of sharia banking services & products and a wholesale financing agreement which will be used to support export financing with sharia schemes carried out by Indonesia Eximbank.

PERISTIWA PENTING
EVENTS HIGHLIGHTS

8 April

**Signing dengan Bank Mandiri**
Signing with Bank Mandiri

Kerja sama untuk mendorong pemanfaatan transaksi nasional mendukung kegiatan ekspor yang meliputi penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan, penjaminan kredit dan pelayanan bank bagi nasabah LPEI.

Cooperation to promote the utilization of national transactions supports export activities which include the provision and utilization of banking services, credit guarantees and bank services for Indonesia Eximbank customers.

13 April

**Signing dengan Bank BRI**
Signing with Bank BRI

Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding terkait dengan Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.

Memorandum of Understanding related to the Provision and Utilization of Banking Services.

25 April

**Signing dengan Bank BNI**
Signing with Bank BNI

Penandatanganan *Nota Kesepahaman Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan, Kerja Sama Penjaminan Kredit serta Kerja Sama Pengembangan UMKM* melalui *Coaching Program for New Exporter (CPNE)* bagi para pelaku UMKM.

The signing of a *Memorandum of Understanding* on the Provision and Utilization of Banking Services, Credit Guarantee Cooperation and MSME Development Cooperation through the *Coaching Program for New Exporter (CPNE)* for MSME communities.

20 Mei

Webinar Perempuan Tangguh Dalam Ekspor Berkelanjutan. Road to W20 : Setara Bangkit Bersama
Webinar on Resilient Women in Sustainable Exports. Road to W20: Jointly Rise Equally

LPEI bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan lembaga pemerintah terkait serta komunitas UMKM Berorientasi Ekspor untuk mengembangkan potensi perempuan Indonesia dalam kegiatan ekspor yang berkelanjutan dengan tujuan #SetaraBangkitBersama.

Indonesia Eximbank synergizes with the Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs and related government agencies as well as the Export-Oriented MSME community to develop the potential of Indonesian women in sustainable export activities with the aim of #SetaraBangkitBersama.

30 Mei

**Peresmian Desa Devisa Gula Semut Purbalingga**
Inauguration of Purbalingga Ant Sugar Desa Devisa

LPEI & Kemenperin berkolaborasi dengan menandatangani kerja sama melalui Program Desa Devisa.

Indonesia Eximbank & the Ministry of Industry collaborated by signing a cooperation through the Desa Devisa Program.

PERISTIWA PENTING
EVENTS HIGHLIGHTS06 Juni
June**Signing dengan IBK Bank**
Signing with IBK Bank

LPEI menjalin kerjasama dengan PT Bank IBK Indonesia Tbk untuk pemberian penjaminan kredit dan asuransi ekspor.
Indonesia Eximbank cooperates with PT Bank IBK Indonesia Tbk to provide credit guarantees and export insurance.

27 Juni
June**Peresmian Desa Devisa Lada Lampung**
Inauguration of Lampung Pepper Desa Devisa

LPEI bersama Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya lada melalui program Desa Devisa Lada Lampung.
Indonesia Eximbank and the Ministry of Finance are committed to optimizing pepper resources through the Lampung Pepper Desa Devisa program.

15 Juli
July**Peresmian Desa Devisa Kluster Udang Situbondo**
Inauguration of Situbondo Shrimp Cluster Desa Devisa

LPEI mendukung penguatan ekosistem ekspor tersebut dengan membentuk Desa Devisa Kluster Udang di Situbondo, Jawa Timur.
Indonesia Eximbank supports the strengthening of the export ecosystem by establishing a Shrimp Cluster Desa Devisa in Situbondo, East Java.

19 Juli
July**Partisipasi dalam acara W20 Summit, Sumatera Utara**
Participation in W20 Summit, North Sumatra

Berkolaborasi dengan LPEI, XL Axiata, UN Women, Program *Together Digital*, Gobi Partners dan Ozora Yaktrapaktaja serta Wanwir Femina, W20 Summit Indonesia menyelenggarakan *Business Mentorship for Women-owned Micro, Small, and Medium Enterprises*.
In collaboration with Indonesia Eximbank, XL Axiata, UN Women, *Together Digital* Program, Gobi Partners and Ozora Yaktrapaktaja and Wanwir Femina, W20 Summit Indonesia held *Business Mentorship for Women-owned Micro, Small, and Medium Enterprises*.

19 September

**Signing dengan LDKPI**
Signing with LDKPI

Mendukung ekspor nasional melalui paket kerjasama pembiayaan ekspor dan pemberian dana hibah terutama ke negara-negara non tradisional.
Supporting national exports through export financing cooperation packages and grants, particularly to non-traditional countries.

19-23 Oktober
October**Trade Expo Indonesia**
Indonesia Trade Expo

Pameran Internasional.
International Exhibition.

PERISTIWA PENTING
EVENTS HIGHLIGHTS24 Oktober
October**Signing dengan DJKN**
Signing with DJKN

Pelaksanaan lelang eksekusi sesuai pasal 6 undang-undang hak tanggungan dan lelang eksekusi jaminan fidusia.

Execution auction in accordance with article 6 of the liability law and fiduciary guarantee execution auction.

03 November

**Peresmian Desa Devisa di Jawa Timur**
Inauguration of Desa Devisa in East Java

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) meresmikan enam Desa Devisa baru di Jawa Timur pada gelaran *East Java Export Festival*, Selasa (1/11/2022). Keenam Desa Devisa tersebut yaitu Desa Parengan (Tenun Ikat) di Kab. Lamongan, Desa Punjung (Olahan Jahe) di Kab. Pacitan, Desa Minggirsari (Kendang Jimbe) di Kab. Blitar, Desa Ngubalan (Kerajinan Akar Jati) di Kab. Ngawi dan dua Desa Batik dan Tenun Gedog di Kab. Tuban yaitu Desa Margorejo dan Desa Kedungrejo.

The East Java Provincial Government and Indonesia Eximbank inaugurated six new Desa Devisa in East Java at the East Java Export Festival, Tuesday (11/1/2022). The six Desa Devisa are Parengan Village (Ikat Weaving) in Lamongan Regency, Punjung Village (Processed Ginger) in Pacitan Regency, Minggirsari Village (Kendang Jimbe) in Blitar Regency, Ngubalan Village (Teak Root Craft) in Ngawi Regency and two Batik and Gedog Weaving Villages in Tuban Regency namely Margorejo Village and Kedungrejo Village.

10 November

**Partisipasi G20 Bali**
G20 Bali Participation

LPEI bersama 10 mitra binaan terpilih turut serta dalam kegiatan G20 Bali.

Indonesia Eximbank together with 10 selected fostered partners participated in G20 Bali activities.

PERISTIWA PENTING
EVENTS HIGHLIGHTS

09 Desember
December



Peresmian Desa Devisa Lada Sambas Kalbar
Inauguration of West Kalimantan Sambas Pepper Desa Devisa

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menghadirkan Program Desa Devisa yang menysasar petani di Desa Sendoyan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dalam rangka membuka peluang ekspor lada Sambas. Program ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditas yang sesuai dengan standar ekspor, LPEI berkolaborasi bersama BNI dan Rumah BUMN Wilayah Kalbar.

Indonesia Eximbank presents the Desa Devisa Program targeting farmers in Sendoyan Village, Sambas Regency, West Kalimantan to open up opportunities for Sambas pepper exports. This program is to improve the quality and quantity as well as the competitiveness of commodities in accordance with export standards, a collaboration of Indonesia Eximbank with BNI and Rumah BUMN in West Kalimantan Region.

12 Desember
December



Signing dengan Bank BRI
Signing with Bank BRI

LPEI dan Bank BRI berkolaborasi dalam Asuransi Proteksi Piutang Dagang.

Indonesia Eximbank and Bank BRI collaborate in Accounts Receivable Protection Insurance.

16 Desember
December



Joint Event TJSL SMV Kemenkeu
Joint Event SMV Ministry of Finance on CSR

Special Mission Vehicle (SMV)
Kemenkeu berkolaborasi, berupaya menciptakan manfaat dan dampak yang lebih luas di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

The Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV) collaborates, striving to create wider benefits and impacts in the social, economic, and environmental aspects.



LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORTS

02





LAPORAN DEWAN DIREKTUR

BOARD OF DIRECTORS REPORT

Rijani
Tirtoso

Ketua Dewan Direktur
merangkap Direktur
Eksekutif
Chairman of BOD
concurrently
Executive Director





Dewan Direktur mendukung beragam langkah transformasi yang dijalankan oleh LPEI untuk meningkatkan kinerja seperti peningkatan *performance good bank*, penguatan jasa konsultasi, penguatan kemampuan dan infrastruktur TI, optimalisasi likuiditas, dan perbaikan NPL. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas implementasi strategi Lembaga, Dewan Direktur merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI dengan berpedoman kepada UU No. 2 tahun 2009. Terkait dengan implementasi strategi LPEI di tahun 2022, Dewan Direktur memberikan arahan, melakukan pemantauan dan selanjutnya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis selain persetujuan/rekomendasi atas tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Direktur.

The Board of Directors endorses several transformation initiatives conducted by Indonesia Eximbank to enhance its performance, including enhancing good bank performance, reinforcement of advisory services, strengthening of IT capabilities and infrastructure, optimizing liquidity, and improvement of NPLs. The Board of Directors also formulates and establishes policies to supervise the implementation of the Institution's strategy in line with Law No. 2 of 2009. The Board of Directors provides direction, monitors, and subsequently evaluates the implementation of basic and strategic policies for the Institution's strategy implementation in 2022, in addition to approval/ recommendation for actions within the scope of its authority.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (selanjutnya disebut "LPEI" atau "Lembaga") berhasil melalui tahun 2022 dengan upaya maksimal dan memberikan kontribusi positif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh krisis geopolitik global di saat dunia masih berada di fase pemulihan akibat pandemi di tahun 2022. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan laporan pelaksanaan

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude to God Almighty, for the blessings of His mercy and grace, the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (hereinafter referred to as "Indonesia Eximbank" or "Institution") was able to navigate through 2022 with maximum efforts and made a positive contribution in facing global economic uncertainty triggered by the global geopolitical crisis when the world was still in the recovery phase due to the pandemic in 2022. On this occasion, as the Board of Directors, we submit a report

LAPORAN DEWAN DIREKTUR BOARD OF DIRECTORS REPORT

tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Direktur kepada Pemangku Kepentingan terkait pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI untuk tahun buku 2022.

Tinjauan Ekonomi dan Industri Tahun 2022

Dunia menghadapi tantangan yang semakin rumit dan kompleks di sepanjang tahun 2022. Ketika masih berada di fase pemulihan akibat pandemi, dunia menghadapi tekanan tambahan akibat ketidakpastian geopolitik global yang dipicu oleh krisis geopolitik di Ukraina. Eskalasi krisis yang meningkat akhirnya berujung perang antara Ukraina dan Rusia yang menimbulkan efek domino yang masih berlanjut. Disrupsi pasokan pangan, pupuk, dan energi telah memicu kenaikan tajam berbagai harga komoditas dunia.

Sebagai dampak dari kenaikan harga berbagai komoditas dunia tersebut, berbagai negara di dunia menghadapi tekanan inflasi yang meningkat secara signifikan. Suku bunga acuan Fed pada tahun 2022 ditutup di level 4,5%, sekaligus merupakan *borrowing cost* tertinggi sejak 2008. Kebijakan kenaikan suku bunga acuan ini diikuti oleh berbagai Bank Sentral di dunia termasuk Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan secara bertahap sebesar 200bps menjadi 5,50% per Desember 2022. Kebijakan kenaikan suku bunga acuan ini ditempuh di antaranya untuk mengatasi tekanan inflasi, yang telah mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, memitigasi dampak rambatan dari masih kuatnya Dolar AS, serta masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kondisi ini akhirnya berdampak kepada penurunan permintaan dunia atas beragam komoditas di tengah penguatan Dolar AS. Akumulasi dari berbagai sentimen negatif global tersebut adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. *International Monetary Fund* (IMF) melalui *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis pada bulan Januari 2023, mengestimasi perekonomian dunia tahun 2022 tumbuh 3,4% yoy atau lebih lambat dari tahun sebelumnya sebesar 6,2% yoy. Perlambatan ekonomi dunia ini juga dipengaruhi oleh kebijakan *Renewed lockdowns*

on the implementation of duties and responsibilities to Stakeholders on our supervisory role in overseeing Indonesia Eximbank's operational activities during the fiscal year of 2022.

Economic and Industry Review 2022

In 2022, the world faces increasingly complex and intricate challenges. While still in the phase of recovery from the pandemic, the geopolitical crisis in Ukraine has added to the global geopolitical unpredictability. The escalation of the crisis ultimately resulted in the conflicts between Ukraine and Russia, which triggered a domino effect that still exists today. Various global commodity prices have sharply increased as a result of disruptions in food, fertilizer, and energy supplies.

As a result of the increase in commodity prices on the global market, many countries are experiencing significant inflationary pressures. The Federal Reserve's benchmark interest rate closed at 4.5% in 2022, marking the highest borrowing cost since 2008. In response, central banks around the world, including Bank Indonesia, gradually raised their benchmark interest rates, reaching 5.50% by December 2022. This policy was implemented to overcome inflationary pressures, which had reached its highest levels in decades, and to mitigate the impact of a strong US dollar and the high levels of uncertainty in the global financial markets.

This condition eventually had an impact on decreasing global demand for various commodities amid the strengthening of the US Dollar. The accumulation of negative global sentiments, such as the slowdown in global economic growth, also contributed to this. The International Monetary Fund (IMF) recently released the World Economic Outlook (WEO) in January 2023, projecting a slower global economy growth rate of 3.4% yoy in 2022 compared to the previous year's 6.2% yoy. Moreover, the Renewed lockdowns policy due to the high

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

akibat tingginya penularan COVID-19 di sejumlah daerah padat penduduk di Tiongkok menyebabkan perlambatan ekonomi negara tersebut.

Di tengah ketidakpastian perekonomian global tersebut, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik dengan pertumbuhan impresif di level 5,3% yoy di tengah sejumlah tantangan global tersebut. Perkembangan ekonomi global cukup mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang tumbuh 26,70% menjadi US\$291,98 miliar. Pencapaian ini didukung oleh *windfall* profit dari tingginya harga komoditas. Harga komoditas andalan Indonesia seperti batu bara, feronikel, dan minyak sawit mengalami kenaikan signifikan dan berkontribusi terhadap 32,94% total nilai ekspor Indonesia.

Realisasi ekspor batu bara mengalami kenaikan sebesar 73,36% yoy, didorong oleh permintaan yang tinggi akibat krisis energi di sejumlah negara sehingga memicu tingginya harga batu bara global. Ekspor feronikel juga melonjak hingga 92,88% yoy di tengah permintaan dunia yang tinggi, khususnya dari Tiongkok, India, Taiwan, dan Korea Selatan. Sebaliknya, ekspor minyak sawit hanya tumbuh tipis sebesar 3,78% yoy dipengaruhi oleh kebijakan larangan ekspor minyak goreng (termasuk CPO) pada bulan April-Mei 2022.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan ekspor Indonesia di tahun 2022, kinerja kredit sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 11,35% yoy dibandingkan 11,26% yoy pada tahun sebelumnya. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) kredit ini juga terjaga di level 2,44%. Namun demikian, kredit ekspor menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 4,62% yoy. Hal ini dipengaruhi oleh utilitas/kebutuhan kredit ekspor yang melemah seiring dengan eskalasi tantangan global. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan bisnis berorientasi ekspor yang lebih *soft* seiring prospek ekonomi global yang menantang.

Penilaian Kinerja Usaha

Mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik, terutama terkait dengan *trend* kenaikan suku

transmission of COVID-19 in densely populated areas in China also caused the country's economic slowdown.

Amidst the global economic uncertainty, Indonesia's economic fundamentals remained well maintained with impressive growth at the level of 5.3% yoy amidst a number of global challenges. Global economic developments are enough to affect Indonesia's export performance which grew 26.70% to US\$291.98 billion. This achievement was supported by windfall profits from high commodity prices. Prices of Indonesia's mainstay commodities such as coal, ferronickel, and palm oil posted a significant increase and contributed to 32.94% of Indonesia's total export value.

The realization of coal exports increased by 73.36% yoy, driven by high demand due to the energy crisis in a number of countries, triggering high global coal prices. Ferronickel exports also soared to 92.88% yoy amid high global demand, especially from China, India, Taiwan and South Korea. In contrast, palm oil exports only grew slightly by 3.78% yoy influenced by the cooking oil export ban policy (including CPO) in April-May 2022.

In line with Indonesia's economic and export growth in 2022, loan performance in the banking sector showed solid growth of 11.35% yoy compared to 11.26% yoy in the previous year. The Non-Performing Loan (NPL) ratio was also maintained at 2.44%. Nevertheless, export credit posted negative growth of 4.62% yoy. This was influenced by the weakening utility/need for export credit in line with the escalation of global challenges. This is inseparable from softer export-oriented business activities in line with the challenging global economic outlook.

Business Performance Assessment

Considering global and domestic economic conditions, particularly related to the trend of rising foreign exchange

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

bunga valas dan inflasi, LPEI memprioritaskan beberapa program utama untuk mendukung pengembangan ekspor nasional secara optimal. Hal ini dilandasi oleh fungsi LPEI yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi *fiscal tool* secara berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas usaha dan pelaksanaan penugasan umum LPEI dan pelaksanaan tugas khusus.

Pengembangan kapasitas usaha dan pelaksanaan penugasan umum LPEI dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan secara selektif kepada nasabah eksisting maupun calon nasabah dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik serta *monitoring* yang ketat untuk mitigasi risiko. Selain itu, LPEI meningkatkan pembiayaan kepada UKMK melalui skema *business linkage* dan *supply chain financing*. LPEI juga melakukan pemerataan mandat dengan mendorong pengembangan bisnis penjaminan, asuransi, dan *trade finance* untuk mendorong ekspor nasional

Di sisi lain, LPEI juga mendukung pemerintah sebagai *fiscal tool* melalui pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Penyaluran PKE dilakukan antara lain pada program PKE kepada UKM, *Trade Finance*, Pariwisata, Alat Transportasi, Kawasan dan Penerbangan serta PKE lainnya sesuai arahan Pemerintah.

Terlepas dari beragam upaya yang telah dilakukan oleh LPEI, tantangan yang masih harus diselesaikan oleh Lembaga adalah perbaikan aset. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Dewan Direktur menilai Direktur Pelaksana telah melakukan upaya maksimal dan memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di sepanjang tahun 2022.

Adapun capaian yang dibukukan di tahun buku 2022 dilihat dari posisi keuangan LPEI adalah pencapaian total aset sebesar Rp83,82 triliun atau 94,29% dari target dipengaruhi oleh realisasi pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan target. Selain itu, pelunasan dari segmen korporasi yang mencapai Rp3,5 triliun turut memengaruhi

rates and inflation, Indonesia Eximbank prioritizes several main programs to support optimal national export development. This is based on the function of the Institution, which is expected to promote economic growth and become a sustainable fiscal tool through business capacity development and implementation of the Institution's general assignments and implementation of special tasks.

Business capacity development and implementation of the Institution's general assignments are carried out by selectively disbursing financing to existing and prospective customers by taking into account aspects of prudence and good governance as well as strict monitoring for risk mitigation. Moreover, Indonesia Eximbank increases financing to SMEs through business linkage and supply chain financing schemes. Indonesia Eximbank also equalizes its mandate by enforcing the development of guarantee, insurance, and trade finance businesses to promote national exports

On the other hand, Indonesia Eximbank also supports the government as a fiscal tool through the implementation of Export-National Interest Account (Export-NIA). Export-NIA distribution is carried out, among others, for SMEs, Trade Finance, Tourism, Transportation Equipment, Regions and Aviation and others according to Government directions.

Despite the various efforts made by Indonesia Eximbank, the challenge that remains to be resolved by the Institution is asset improvement. Taking these matters into consideration, the Board of Directors acknowledges the Managing Director's maximum efforts in addressing the challenges and delivering a positive impact throughout 2022.

On Indonesia Eximbank's financial standing, the achievements in the 2022 fiscal year are reflected by the total assets amounting to Rp83.82 trillion, or 94.29% of the set target, which was impacted by lower-than-expected financing realization. In addition, repayments from the corporate segment which reached Rp3.5 trillion

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

penurunan *outstanding* pembiayaan menjadi Rp83,64 triliun atau 94,79% dari target. Di tengah kondisi tersebut, Dewan Direktur mengapresiasi atas pencapaian penyaluran total penjaminan dan plafon asuransi per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp12,43 triliun dan Rp16,78 triliun, atau 108,63% dan 138,70% dari target yang ditetapkan. Capaian *trade finance* volume juga tercatat sebesar Rp16,97 triliun atau jauh di atas target yang sebesar Rp9,35 triliun.

Namun demikian, LPEI menghadapi tantangan kolektibilitas yang memburuk sebesar Rp4,2 triliun, lebih tinggi dari target senilai Rp3,4 triliun. Kondisi ini diperburuk dengan tambahan pemburukan kolektibilitas selama proses Audit 2022 sebesar Rp2,75 triliun. Sebaliknya, LPEI hanya membukukan perbaikan kolektibilitas sebesar Rp55 miliar dari target yang ditetapkan senilai Rp1,43 triliun dan capaian *collection* sebesar Rp236 miliar atau lebih rendah dari target sebesar Rp244 miliar. Akibatnya, rasio NPL gross dan NPL neto masing-masing sebesar 26,61% dan 10,39% per 31 Desember 2022 atau lebih buruk dibandingkan target sebesar 16,35% dan 7,05%.

Di sisi lain, Program Investasi Pemerintah mencapai Rp2,95 triliun atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,25 triliun. Pencapaian lain yang melebihi target dibukukan oleh LPEI terkait kinerja Jasa Konsultasi yang mampu membukukan pengembangan desa devisa sebanyak 151 desa di tahun 2022 dibandingkan target sebanyak 10 desa. LPEI juga berhasil mencetak 145 eksportir baru dari target yang ditetapkan sebanyak 100 eksportir baru.

Capaian yang lebih rendah dari target di laporan posisi keuangan LPEI terefleksi di laporan laba rugi Lembaga dengan membukukan rugi bersih sebesar Rp3,11 triliun per 31 Desember 2022. Pencapaian ini jauh lebih rendah dari target laba bersih sebesar Rp456,36 miliar atau turun 904,0% yoy. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pembentukan CKPN sebesar Rp2,03 triliun akibat dari tambahan pemburukan debitur sebesar Rp2,75 triliun selama proses audit tahun 2022.

also influenced the decrease in outstanding financing to Rp83.64 trillion or 94.79% of the target. In the midst of these conditions, the Board of Directors appreciates the achievement of the total distribution of guarantees and insurance ceilings as of December 31, 2022 of Rp12.43 trillion and Rp16.78 trillion, respectively, or 108.63% and 138.70% of the set targets. The achievement of trade finance volume stood at Rp16.97 trillion, far above the target of Rp9.35 trillion.

However, Indonesia Eximbank faced worsening collectability challenges of Rp4.2 trillion, higher than the target of Rp3.4 trillion. This condition was exacerbated by the additional deterioration of collectability during the 2022 Audit process of Rp2.75 trillion. In contrast, Indonesia Eximbank only recorded collectability improvements of Rp55 billion from the set target of Rp1.43 trillion and collection achievements of Rp236 billion or lower than the target of Rp244 billion. As a result, gross NPL and net NPL ratios were 26.61% and 10.39% respectively as of December 31, 2022, worse than the targets of 16.35% and 7.05%.

Meanwhile, the Government Investment Program surpassed its target of Rp2.25 trillion, reaching Rp2.95 trillion, which is equivalent to 120% of the target. Furthermore, Indonesia Eximbank exceeded its set target in terms of Advisory performance by developing desa devisa in 151 villages in 2022, compared to the target of only 10 villages. Additionally, the institution successfully onboarded 145 new exporters, surpassing the goal of 100 new exporters.

The lower achievement than the target in Indonesia Eximbank's statement of financial position is reflected in the Institution's income statement by posting a net loss of Rp3.11 trillion as of December 31, 2022. This achievement is much lower than the net profit target of Rp456.36 billion or down 904.0% yoy. This is due to the additional formation of Allowance for Impairment Losses of Rp2.03 trillion due to the additional deterioration of debtors of Rp2.75 trillion during the audit process in 2022.

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Capaian tersebut di atas berpengaruh terhadap realisasi rasio permodalan (CAR) sebesar 32,70% atau lebih rendah dibandingkan target sebesar 34,78%. Selain itu, sejalan dengan pembukuan rugi tahun berjalan di tahun 2022, rasio rentabilitas (ROA, ROE, NIM) berada di zona negatif masing-masing sebesar -2,19%, ROE -10,49%, dan NIM 0,78%. Ketiga rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan masing-masing sebesar 0,52%; 1,50%; dan NIM 1,50%.

Mengacu kepada kondisi tersebut, LPEI memprioritaskan pada langkah-langkah perbaikan aset. LPEI menempuh langkah penyelesaian NPL secara organik melalui restrukturisasi, *collections*, dan hapus buku, disamping berpartisipasi aktif melakukan eksplorasi terhadap alternatif penyelesaian NPL secara *inorganic*.

Dewan Direktur berpandangan bahwa LPEI perlu melakukan perbaikan kualitas aset, penguatan *risk management*, penyeimbangan pertumbuhan pembiayaan dengan risiko yang ada, melakukan terobosan dalam percepatan penyaluran penjaminan Pemerintah, penguatan proses internal, penerapan rencana aksi keuangan berkelanjutan, *penguatan corporate culture*, penguatan dari aspek remunerasi dan organisasi, implementasi strategi sesuai tahapan pada perubahan RJP, penguatan strategi komunikasi, peningkatan kolaborasi dengan instansi lainnya, dan penguatan likuiditas.

Secara umum, Dewan Direktur menilai kinerja Direktur Pelaksana berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk RKAT LPEI Tahun 2022. Dari empat sasaran strategis yang ditetapkan, pencapaian skor Dewan Pelaksana yang melebihi 100% adalah perspektif *stakeholder* dan *customer* dengan skor 115% dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan skor 108%. Bobot kedua skor tersebut adalah 15% dan 10%. Dua sasaran strategis lainnya dengan bobot masing-masing sebesar 35% dan 40% memperoleh skor 92% dan 72%. Secara kumulatif, total skornya adalah 89%.

The above records affect the realization of the capital ratio (CAR) of 32.70% or lower than the target of 34.78%. In addition, in line with the current year's loss in 2022, profitability ratios (ROA, ROE, NIM) were in the negative zone of -2.19%, ROE -10.49%, and NIM 0.78%, respectively. These three ratios are lower than the target set at 0.52% each; 1.50%; and NIM 1.50%.

Referring to these conditions, Indonesia Eximbank prioritizes asset improvement measures. The Institution takes measures to complete NPL organically through restructuring, collections, and write-offs, in addition to actively participating in exploring alternatives to NPL settlement inorganically.

The Board of Directors considers that Indonesia Eximbank needs to improve asset quality, strengthen risk management, balance financing growth with existing risks, make breakthroughs in accelerating the distribution of government guarantees, strengthening internal processes, implementing sustainable finance action plans, strengthening corporate culture, strengthening of remuneration and organizational aspects, implementation of strategies according to stages in changes in Corporate Plan, strengthening communication strategies, increasing collaboration with other agencies, and strengthening liquidity.

The Managing Director's performance is in general evaluated by the Board of Directors based on the Key Performance Indicators (IKU) established for the 2022 Annual Work Plan & Budget. From across four strategic targets, the Executive Board's stakeholder and customer perspective exceeded 100% with a score of 115%, while the learning and growth perspective achieved a score of 108%. These two scores carry weights of 15% and 10%, respectively. However, the other two strategic goals, with weights of 35% and 40%, scored 92% and 72%, respectively. In total, the cumulative score is 89%.

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT**Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi**

Dewan Direktur mendukung beragam langkah transformasi yang dijalankan oleh LPEI untuk meningkatkan kinerja seperti peningkatan *performance good bank*, penguatan jasa konsultasi, penguatan kemampuan dan infrastruktur TI, optimalisasi likuiditas, dan perbaikan NPL. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas implementasi strategi Lembaga, Dewan Direktur merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI dengan berpedoman kepada UU No. 2 tahun 2009. Terkait dengan implementasi strategi LPEI di tahun 2022, Dewan Direktur memberikan arahan, melakukan pemantauan dan selanjutnya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis selain persetujuan/rekomendasi atas tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Direktur.

Pengawasan dan pemberian persetujuan/rekomendasi oleh Dewan Direktur dilakukan melalui mekanisme pembahasan dalam Rapat Dewan Direktur. Dewan Direktur melakukan telaah atas pelaksanaan kegiatan operasional lembaga yang dijalankan oleh Direktur Eksekutif dan telaah untuk pemberian persetujuan/rekomendasi melalui proses pembahasan Dewan Direktur yang dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Direktur. Dalam proses persetujuan, Dewan Direktur memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Direktur telah didukung dengan analisis risiko yang memadai. Proses penelaahan yang dilakukan oleh Dewan Direktur dapat menggunakan perangkat terkait Dewan Direktur, yaitu Komite Dewan Direktur.

Secara umum, Dewan Direktur memandang strategi bisnis LPEI dan implementasinya sejalan dengan kebijakan Pemerintah. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) LPEI berpedoman pada arah strategi Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional yaitu diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri dan meningkatkan kapasitas produksi

Oversight on Strategy Implementation

The Board of Directors endorses several transformation initiatives conducted by Indonesia Eximbank to enhance its performance, including enhancing good bank performance, reinforcement of advisory services, strengthening of IT capabilities and infrastructure, optimizing liquidity, and improvement of NPLs. The Board of Directors also formulates and establishes policies to supervise the implementation of the Institution's strategy in line with Law No. 2 of 2009. The Board of Directors provides direction, monitors, and subsequently evaluates the implementation of basic and strategic policies for the Institution's strategy implementation in 2022, in addition to approval/recommendation for actions within the scope of its authority.

The Board of Directors exercises supervision and approval/recommendation through discussions held during the Board of Directors Meeting. The Board of Directors reviews the implementation of the operational activities of the institution carried out by the Executive Director and reviews the approval/recommendation through the Board of Directors discussion process as outlined in the minutes of the Board of Directors Meeting. During the approval process, the Board of Directors ensures that strategic actions that require approval or recommendations have undergone adequate risk analysis. To carry out the review process, the Board of Directors may utilize tools such as the Committee of the Board of Directors.

The Board of Directors generally perceives that the Institution's business strategy and implementation align with the Government's policy. The Annual Work Plan & Budget is guided by the National Export Financing strategy's direction, as stated in Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank and Government Regulation No. 43 of 2019 on Basic Policy of National Export Financing. This strategy aims to engage in activities that generate foreign exchange, conserve domestic foreign exchange, and enhance the national production capacity, which

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

nasional termasuk peningkatan fungsi sebagai fasilitator, akselerator, *aggregator*, dan *arranger*.

Selain itu, penyusunan RKAT LPEI berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sesuai dengan arahan Menteri Keuangan. RKAT lembaga juga selaras dengan rencana jangka panjang LPEI dan kebijakan Kementerian Keuangan.

Terkait dengan pencapaian kinerja tahun 2022, Dewan Direktur memberikan rekomendasi beberapa langkah perbaikan guna peningkatan kinerja antara lain:

- Peningkatan *performance good bank* dengan menjadi *collaborator* bukan *competitor* melalui kerjasama dengan bank umum ataupun LJK maupun SMV lainnya untuk produk pembiayaan komersial, pembiayaan NIA, syariah, penjaminan maupun asuransi;
- Penguatan Jasa konsultasi melalui platform digital yang mumpuni untuk mempercepat konversi pelaku usaha menjadi eksportir dan berkolaborasi dengan pihak ekosistem, memperluas akses *National Export Dashboard*, memperluas pemasaran produk dan referensi produk siap ekspor;
- Penguatan kemampuan dan infrastruktur IT dengan pengembangan IT *platform* yang terintegrasi yang sejalan dengan fokus bisnis dan dapat mengakomodir seluruh proses bisnis yang dimiliki LPEI;
- Melakukan negosiasi dengan debitur *performing* untuk melakukan penyesuaian suku bunga pembiayaan mengikuti tren kenaikan suku bunga dan mengutamakan penyediaan pembiayaan berbasis suku bunga mengambang dengan menggunakan *reference rate*;
- Optimalisasi likuiditas dengan memanfaatkan tresuri aset yang dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan jangka pendek serta memperbanyak *line facility* yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk menekan biaya bunga;
- Perbaikan NPL selain melalui penyelesaian secara organik seperti restrukturisasi, *collections* dan hapus

includes serving as a facilitator, accelerator, aggregator, and arranger.

Moreover, the preparation of the Annual Work Plan & Budget refers to the National Medium-Term Development Plan **Business Prospects in Perspective** for 2020-2024 in line with the direction of the Minister of Finance. The Annual Work Plan & Budget is also aligned with the Institution's long-term plan and Ministry of Finance's policy.

The Board of Directors provides recommendations for several corrective measures to improve performance achievement in 2022, as follows:

- Improving good bank performance by becoming a non-competitor collaborator through cooperation with commercial banks or other Financial Services and SMVs for commercial financing products, NIA financing, sharia, guarantees and insurance;
- Strengthening advisory services through a qualified digital platform to accelerate the conversion of businesses into exporters and collaborate with the ecosystem, expand access to the National Export Dashboard, expand product marketing and reference products ready for export;
- Strengthening IT capabilities and infrastructure by developing an integrated IT platform that is in line with business focus and can accommodate all business processes owned by the Institution;
- Negotiate with performing debtors for adjustments to financing interest rates following the trend of rising interest rates and prioritize the provision of floating rate-based financing using reference rates;
- Liquidity optimization by utilizing asset treasury used for short-term financing and increasing line facilities that can be used at any time to reduce interest costs;
- NPL improvement in addition to organic solutions such as restructuring, collections and book write-offs,

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

buku, serta melakukan eksplorasi terhadap alternatif penyelesaian NPL secara in-organik.

Pandangan terhadap Prospek Usaha

Dewan Direktur telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2023 yang disusun oleh Direktur Eksekutif beserta jajaran Direktur Pelaksana. Disamping berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan arahan dari Kementerian Keuangan, penyusunan RKAT mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan indikator fundamental ekonomi lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Kami menilai prospek tahun 2023 masih cukup menantang dengan memperhatikan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan dibayangi oleh kemungkinan resesi global karena situasi geopolitik luar negeri yang masih mempengaruhi *supply* dan *demand* dunia, inflasi yang masih tinggi dan suku bunga yang masih pada level tinggi untuk mengimbangi inflasi. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia diperkirakan oleh Pemerintah mampu tumbuh solid sebesar 5,3% yang kuat. Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mewaspadai potensi tekanan yang terjadi di pasar keuangan global, terutama akibat dari kebijakan moneter di AS yang diprediksi akan berada di level tinggi pada jangka panjang untuk meredam laju inflasi.

Menghadapi tantangan tersebut, Dewan Direktur terus mencermati perubahan lingkungan bisnis baik dari sisi internal maupun sisi eksternal yang berdampak kepada LPEI. Upaya penguatan internal dan perbaikan tata kelola menjadi fokus utama LPEI diperlukan untuk menopang langkah transformasi kelembagaan dan merespon beragam tantangan tersebut. LPEI mengacu kepada 5 (lima) pedoman utama yang ditetapkan (*Key Guiding Principles*) sebagai landasan dalam menyusun strategi ke depan, sebagaimana tercantum RJP LPEI, yaitu pertumbuhan bisnis yang progresif melalui ekosistem ekspor, penyelesaian isu terkait LAR dan peningkatan kualitas aset, investasi pada keterampilan dan kemampuan

as well as explore alternatives to NPL solutions in-organically.

Business Prospects in Perspective

The Board of Directors has approved the 2023 Annual Work Plan and Budget prepared by the Executive Director and the Managing Director. Apart from being guided by applicable laws and regulations and in line with the direction of the Ministry of Finance, the preparation of the Annual Work Plan and Budget considers Indonesia's economic growth projections and other fundamental economic indicators as contained in the 2023 State Budget Plan.

We consider the outlook for 2023 to be quite challenging considering the ongoing Covid-19 pandemic and the possibility of a global recession looms large due to the geopolitical situation, which impacts global supply and demand. High inflation and interest rates, which need to keep pace with inflation, add to the challenge. However, despite these conditions, the Indonesian economy is expected to grow solidly by 5.3% according to the Government's estimate. The Government and Bank Indonesia will remain vigilant in monitoring potential pressures on global financial markets, especially due to the high monetary policy in the US that is predicted to continue in the long term to mitigate inflation.

In the face of these challenges, the Board of Directors is keeping a close watch on changes in the business environment, both internal and external, that may affect the Institution. Strengthening internal operations and enhancing governance are crucial for Indonesia Eximbank to support its institutional transformation efforts and mitigate these challenges. Indonesia Eximbank adheres to 5 (five) key guiding principles as the foundation for its future strategies, as outlined in its Corporate Plan. These principles include progressive business growth through the export ecosystem, addressing LAR-related issues, and improving asset quality, investing in future skills and capabilities, strengthening its role as an SMV (government

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

di masa depan, penguatan peran LPEI sebagai SMV (perpanjangan tangan pemerintah untuk alat fiskal), dan terus memperkuat *Balance Sheet*.

Kelima *key guiding principles* tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi LPEI ke depan dalam mencapai aspirasinya yaitu *Enabling Export, Empowering Nation*. Strategi LPEI ke depan tersebut mengutamakan pertumbuhan portofolio secara bertahap yang memiliki *developmental impact* dan kinerja yang sehat, kolaborasi dengan ekosistem ekspor, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan dan cakupan bisnis LPEI yang selanjutnya dituangkan dalam RKAT LPEI.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Lembaga

LPEI sedang melakukan *gap analysis* antara kondisi eksisting dengan parameter-parameter yang menjadi aspek penilaian menindaklanjuti pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI. Selain itu, LPEI menjalin komunikasi dan diskusi bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) sebagai *assessor* untuk penilaian GCG pada tahun 2022. Dari hasil penilaian GCG tersebut akan diidentifikasi kekuatan LPEI dan perbaikan yang diperlukan untuk penyempurnaan implementasi GCG.

Selain itu, LPEI juga sedang melakukan pengkinian dan perubahan peraturan internal untuk mengakomodir kondisi LPEI terkini pasca terbitnya PMK dan POJK tersebut sekaligus menyelaraskannya dengan perubahan peraturan eksternal yang mengatur kegiatan LPEI.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Direktur

Dewan Direktur memiliki komite-komite yang bertugas membantu pelaksanaan pengawasan dalam lingkup

extension for fiscal tools), and further fortifying its Balance Sheet.

The five key guiding principles serve as a reference for formulating the Institution's future strategies in realizing its vision of Enabling Export, Empowering Nation. Indonesia Eximbank's strategy moving forward emphasizes a measured portfolio growth that delivers sound developmental impact and performance, collaboration with the export ecosystem, and utilizing technology to improve its services and business coverage which is further outlined in the Annual Work Plan & Budget.

Perspective of Institution Governance Practices

Indonesia Eximbank is conducting a gap analysis between existing conditions and parameters that are aspects of assessment following up after the issuance of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles as well as Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 9/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank. The communication and discussions with the Directorate General of State Wealth of the Ministry of Finance and the Government Audit Agency as assessors for GCG assessment in 2022 was also established. From the GCG assessment results, the strength of Indonesia Eximbank will be identified and the improvements needed to improve GCG implementation.

In addition, Indonesia Eximbank is also updating and changing internal regulations to accommodate the latest conditions of the Institution after the issuance of PMK and POJK as well as align them with changes in external regulations governing its activities.

Performance Assessment of the Board of Directors' Committees

The Board of Directors has committees tasked with assisting the implementation of supervision within the

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

bidang dan fungsi tertentu dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait pengawasan. Komite-komite yang membantu Dewan Direktur dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Program Penugasan Khusus. Selain rapat internal masing-masing komite, diselenggarakan pula rapat gabungan yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang bersifat integrasi antar fungsi.

Dewan Direktur menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Direktur selama 2022 telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai berikut:

- Komite Audit bertugas membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor ekstern dan intern. Selama tahun 2022, komite ini telah menyelenggarakan 24 kali rapat.
- Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Direktur dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang Risiko dalam hubungannya dengan pembiayaan ekspor nasional. Komite ini telah mengadakan 25 kali rapat di sepanjang tahun 2022.
- Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Direktur dalam menentukan kebijakan remunerasi dan nominasi telah menyelenggarakan 28 kali rapat.
- Komite Program Penugasan Khusus bertugas membantu Dewan Direktur dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyaluran dana program penugasan khusus dan melakukan pengkajian dan penyusunan laporan serta rekomendasi program penugasan khusus kepada Dewan Direktur. Komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali di sepanjang tahun 2022.

Komite-komite tersebut juga menyelenggarakan 5 kali rapat gabungan antar komite di bawah Dewan Direktur di sepanjang tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan

scope of certain fields and functions in order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities related to supervision. The committees that assist the Board of Directors in carrying out the supervisory function are the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and National Interest Account Committee. In addition to internal meetings of each committee, joint meetings were also held aimed at coordinating and consulting that was integrated between functions.

The Board of Directors considers that its committees have carried out their duties and responsibilities effectively during 2022, as follows:

- The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of duties of external and internal auditors. During 2022, the committee has held 24 meetings.
- The Risk Monitoring Committee assists the Board of Directors in conducting periodic assessments and providing recommendations on Risks in relation to national export financing. The committee has held 25 meetings throughout 2022.
- The Remuneration and Nomination Committee which assists the Board of Directors in determining remuneration and nomination policies has held 28 meetings.
- The National Interest Account Committee is tasked with assisting the Board of Directors in supervising and evaluating the distribution of national interest account program funds and reviewing and preparing reports and recommendations for national interest account programs to the Board of Directors. This committee has met 12 times throughout 2022.

These committees also held 5 joint meetings between committees under the Board of Directors throughout 2022 in order to carry out coordination and consultation

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

koordinasi dan konsultasi yang bersifat integrasi antar fungsi.

Pandangan atas Penerapan Whistleblowing System

Dewan Direktur memiliki pandangan yang positif terhadap penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di LPEI. WBS adalah wujud dari komitmen Lembaga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari implementasi GCG. WBS juga merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja serta menjaga integritas lembaga.

Oleh karena itu, Dewan Direktur berkomitmen kuat dan memberikan dukungan terhadap implementasi WBS dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam seluruh lini bisnis LPEI melalui penetapan kebijakan Peraturan Dewan Direktur No. 0004/PDD/05/2011 tentang Kebijakan Manajemen Risiko LPEI sebagai landasan dari Peraturan Direktur Eksekutif No. 0018/PDE/03/2021 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI. Selain itu, Dewan Direktur secara berkala menerima laporan terkait pelaksanaan WBS dan kegiatan sosialisasi di LPEI sebagai bagian dari laporan Fungsi Kepatuhan yang ditembuskan kepada Dewan Direktur.

Perubahan Komposisi Dewan Direktur

Pada Tahun 2022, komposisi Dewan Direktur LPEI mengalami 1 (satu) kali perubahan, sebagai berikut:

that is integrated between functions.

Perspective on Whistleblowing System Practices

The Board of Directors holds a positive view on the implementation of the *Whistleblowing System* (WBS) at Indonesia Eximbank. The WBS is a reflection of the Institution's commitment to promoting transparency and accountability as part of its GCG framework. WBS is also one of the important instruments in ensuring the safety and welfare of employees and maintaining the integrity of the institution.

As such, the Board of Directors is strongly committed and provides support for the implementation of WBS in order to enforce transparency, accountability, and integrity in all Institution business lines, which is done by establishing policies of the Board of Directors Regulation No. 0004/PDD/05/2011 on Indonesia Eximbank Risk Management Policy as the basis of Executive Director Regulation No. 0018/PDE/03/2021 on Indonesia Eximbank *Whistleblowing System* Manual. In addition, the Board of Directors periodically receives reports related to the implementation of WBS and socialization activities at the Institution as part of the Compliance Function report transcribed to the Board of Directors.

Changes in the Board of Directors' Composition

The composition of Indonesia Eximbank's Board of Directors underwent a change in 2022, as detailed below:

Komposisi Periode 1 Januari – 6 Januari 2022 | Composition for the Period of 1 January – 6 January 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Apppointment
Daniel James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	KMK 933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 530/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 934/KMK.06/2019

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Komposisi Periode 7 Januari – 31 Desember 2022 | Composition for the Period of 7 January – 31 December 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	KMK 552/KMK.06/2021
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 530/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 522/KMK.06/2018
Daniel James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 552/KMK.06/2021

KMK : Keputusan Menteri Keuangan | Decree of the Minister of Finance

Apresiasi

Dewan Direktur mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendorong ekspor nasional. Dukungan ini diberikan antara lain melalui dukungan *regulatory framework*, Penyertaan Modal Negara, dan ijin pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV). Kami juga memberikan penghargaan kepada segenap insan LPEI atas dedikasi dan kerja kerasnya serta kontribusi positif dalam menghadapi tantangan eksternal yang lebih kompleks di tengah kondisi pemulihan ekonomi akibat pandemi untuk menjaga keberlangsungan usaha Lembaga.

Demikian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Direktur kami sampaikan. Kami optimis Manajemen mampu melanjutkan langkah perbaikan dan penguatan internal disamping pelaksanaan mandat dan peran LPEI dalam ekosistem ekspor di tahun mendatang.

Appreciation

The Board of Directors acknowledges the Government's trust and support in empowering Indonesia Eximbank to fulfill its duties and functions in promoting national exports. The Government provides support by creating a regulatory framework, participating in State Capital, and granting permits for Special Purpose Vehicles (SPVs). We also extend our gratitude to all Indonesia Eximbank employees for their commitment, hard work, and valuable contributions in addressing increasingly complex external challenges while ensuring the Institution's business sustainability amid economic recovery conditions due to the pandemic.

Hereby we submit the report on the implementation of duties and responsibilities as our Board of Directors. We are optimistic that Management will continue to improve and strengthen the internal operations while fulfilling Indonesia Eximbank's mandate and role in the export ecosystem in the upcoming year.

Jakarta, April 2023

Atas Nama Dewan Direktur

On Behalf of the Board of Directors



Rijani Tirtoso

Ketua Dewan Direktur

Chairman of the Board of Directors



DEWAN DIREKTUR BOARD OF DIRECTORS



D. JAMES ROMPAS

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors



RIJANI TIRTOSO

Ketua Dewan Direktur merangkap
Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors
concurrently Executive Director



FELIA SALIM

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors





SUMINTO

Anggota Dewan Direktur

Member of the Board of Directors



ARUS GUNAWAN

Anggota Dewan Direktur

Member of the Board of Directors



KASAN

Anggota Dewan Direktur

Member of the Board of Directors



LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA

EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

Rijani
Tirtoso

Ketua Dewan Direktur
merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of BOD concurrently
Executive Director





Perkembangan perekonomian dunia masih menjadi tantangan besar bagi LPEI dalam melaksanakan mandatnya. Oleh karena itu, LPEI terus menyesuaikan strategi untuk dapat bertahan dan terus tumbuh pada kondisi ekonomi yang masih belum stabil. LPEI tetap fokus pada penyediaan fasilitas pembiayaan secara selektif, pemerataan mandat dengan peningkatan penyaluran penjaminan dan asuransi serta *trade finance*, percepatan perbaikan kualitas aset, kolaborasi dengan ekosistem ekspor, manajemen risiko yang mumpuni, konsolidasi internal baik dari sisi proses bisnis, tata kelola, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperkuat Teknologi Sistem Informasi.

The global economic climate remains a significant challenge for Indonesia Eximbank in fulfilling its mandate. Consequently, Indonesia Eximbank continues to adapt its strategies to sustain growth and thrive amidst the unstable economic conditions. Indonesia Eximbank remains focused on providing selective financing facilities, equitable distribution of mandates by increasing the distribution of guarantees and insurance as well as trade finance, accelerating asset quality improvement, collaboration with the export ecosystem, qualified risk management, internal consolidation in terms of business processes, governance, Human Resources (HR) development and strengthening Information System Technology.

**Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
yang Terhormat,**

Sepanjang 2022, dunia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat pandemi harus menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks akibat ketegangan geopolitik global. Gangguan rantai pasok, telah mempengaruhi kenaikan harga makanan dan energi sehingga menimbulkan dampak lanjutan: peningkatan inflasi di negara-negara secara signifikan. Suku bunga acuan kebijakan moneter global meningkat tajam sebagai respons atas kenaikan inflasi tersebut, seperti yang terjadi pada *Fed Funds Rate* (FFR) Amerika Serikat (AS).

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Throughout 2022, the world, which is still in the recovery phase due to the pandemic, must face new, more complex challenges due to global geopolitical tensions. Supply chain disruptions have led to rising food and energy prices, leading to a further impact: significantly increased inflation in countries. The benchmark global monetary policy rate increased sharply in response to the increase in inflation, as happened to the Fed Funds Rate (FFR) of the United States (US). This caused the US dollar to strengthen and put pressure on many world currencies, including the

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

Hal tersebut menyebabkan mata uang dolar AS menguat dan memberikan tekanan pada banyak mata uang dunia, termasuk Rupiah dan adanya persepsi risiko investor global yang tinggi dan menyebabkan investor menarik dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai perkembangan yang mengemuka telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi berbagai negara dunia mengalami perlambatan bahkan mengarah pada risiko resesi.

Menjadi suatu kehormatan bagi kami selaku Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (selanjutnya disebut “LPEI” atau “Lembaga”) dapat menyampaikan laporan pengelolaan LPEI untuk tahun buku 2022. Melalui laporan tahunan ini, kami memaparkan pencapaian kinerja Lembaga sepanjang tahun 2022 sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pengelolaan LPEI kepada Pemegang Saham beserta seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. Laporan Tahunan ini juga merupakan bentuk transparansi pengelolaan LPEI sebagai salah satu implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tinjauan Makro Ekonomi dan Industri Tahun 2022

Perekonomian dunia mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh penerapan kebijakan *Hawkish* atau kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga di tengah kenaikan inflasi akibat disrupsi pasokan berbagai komoditas dunia karena krisis geopolitik di Ukraina. Kebijakan *The Fed* menaikkan suku bunga acuan hingga mencapai 4,5% di akhir tahun 2022 berdampak pada depresiasi berbagai mata uang dunia sehingga berpengaruh negatif terhadap perdagangan dunia. *Renewed lockdowns* akibat tingginya penularan COVID-19 di sejumlah daerah padat penduduk di Tiongkok menyebabkan perlambatan ekonomi negara tersebut sehingga sisi *demand*/permintaan barang dan jasa dari Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia masih tumbuh terbatas.

Rupiah and the high-risk perception of global investors and caused investors to withdraw funds from developing countries, including Indonesia. Various developments have caused economic growth in various world countries to slow down and even lead to the risk of recession.

As the Executive Director and Managing Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (hereafter referred to as “Indonesia Eximbank” or “Institution”), it is an honor for us to present the Institution’s management report for the fiscal year 2022. This report highlights the Institution’s achievements throughout the year, demonstrating our commitment to accountability to our shareholders and stakeholders. Moreover, this Annual Report emphasizes the transparency in Indonesia Eximbank’s management, which aligns with the principles of Good Corporate Governance.

2022 Macroeconomic and Industrial Review

In 2022, the global economy experienced a slowdown in growth compared to the previous year, influenced by the implementation of *Hawkish* policy or tight monetary policy, which increased interest rates amid rising inflation caused by supply disruptions of various global commodities resulting from the geopolitical crisis in Ukraine. The Fed’s decision to raise the benchmark interest rate to 4.5% by the end of 2022 led to the depreciation of several world currencies, impacting global trade negatively. The resurgence of COVID-19 in densely populated regions of China resulted in renewed lockdowns, which led to a slowdown in the country’s economy. As a result, the demand for goods and services from China, which is the world’s second-largest economic power, was constrained.

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

Sementara itu, dari sisi *supply*, perlambatan pertumbuhan ekonomi di dunia dipengaruhi oleh tingginya volatilitas harga komoditas energi dan pangan, berlanjutnya disrupsi rantai pasok, dan ketatnya pasar tenaga kerja. Ketiga faktor ini menyebabkan inflasi global tetap berada di level tinggi, meski memiliki tren melandai menjelang akhir tahun. Perekonomian dunia tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,4% yoy atau lebih lambat dari tahun sebelumnya sebesar 6,2% yoy oleh *International Monetary Fund* (IMF) melalui *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis pada bulan Januari 2023.

Meski dibayangi oleh kenaikan inflasi hingga 5,51% dan kenaikan suku bunga acuan (BI7DRR) sebesar 200bps menjadi 5,50% di akhir tahun 2022, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh lebih kuat sebesar 5,31% yoy di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya 3,70%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang akomodatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan aktivitas usaha dan mendorong iklim investasi yang inklusif dan berkualitas.

Sebagai salah satu faktor kunci pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, nilai ekspor Indonesia di sepanjang tahun 2022 mencapai US\$291,98 miliar dengan pertumbuhan sebesar 26,07% yoy. Kenaikan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan atas harga komoditas ekspor. Peningkatan nilai ekspor Indonesia ini juga didorong oleh pertumbuhan volume ekspor sebesar 4,13% yoy dan kontribusi signifikan atas komoditas ekspor non-migas Indonesia.

Analisa Kinerja Tahun 2022

Perkembangan perekonomian dunia masih menjadi tantangan besar bagi LPEI dalam melaksanakan mandatnya. Oleh karena itu, LPEI terus menyesuaikan strategi untuk dapat bertahan dan terus tumbuh pada kondisi ekonomi yang masih belum stabil. LPEI tetap fokus pada penyediaan fasilitas pembiayaan secara selektif, pemerataan mandat dengan peningkatan

Meanwhile, from the supply side, sluggish global economic growth is influenced by high volatility in energy and food commodity prices, continued supply chain disruptions, and tight labor markets. These three factors caused global inflation to remain at high levels, despite a downward trend towards the end of the year. The global economy in 2022 is estimated to grow 3.4% yoy or slower than the previous year of 6.2% yoy by the International Monetary Fund (IMF) through the World Economic Outlook (WEO) released in January 2023.

Despite being overshadowed by rising inflation to 5.51% and an increase in the benchmark interest rate (BI7DRR) by 200bps to 5.50% at the end of 2022, Indonesia's economy managed to grow stronger by 5.31% yoy in 2022 compared to the previous year's 3.70%. This is strongly influenced by the implementation of strategic government policies that are accommodative, effective, and relevant to the needs of the community so as to increase business activities and promote an inclusive and quality investment climate.

As one of the key factors driving Indonesia's economic growth, Indonesia's export value throughout 2022 reached US\$291.98 billion with a growth of 26.07% yoy. This increase was mainly driven by a significant increase in export commodity prices. The increase in Indonesia's export value was also driven by export volume growth of 4.13% yoy and a significant contribution to Indonesia's non-oil and gas export commodities.

2022 Performance Analysis

The global economic climate remains a significant challenge for Indonesia Eximbank in fulfilling its mandate. Consequently, Indonesia Eximbank continues to adapt its strategies to sustain growth and thrive amidst the unstable economic conditions. Indonesia Eximbank remains focused on providing selective financing facilities, equitable distribution of mandates by increasing the distribution

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

penyaluran penjaminan dan asuransi serta *trade finance*, percepatan perbaikan kualitas aset, kolaborasi dengan ekosistem ekspor, manajemen risiko yang mumpuni, konsolidasi internal baik dari sisi proses bisnis, tata kelola, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperkuat Teknologi Sistem Informasi.

Berbagai upaya terbaik tersebut telah dilakukan oleh segenap insan LPEI di tengah ketidakpastian ekonomi dunia di sepanjang tahun 2022. Adapun capaian kinerja LPEI per 31 Desember 2022 dapat dilihat dari berbagai aspek yakni realisasi *outstanding* pembiayaan sebesar Rp83,6 triliun atau setara dengan 95% dari target yang ditetapkan mencapai Rp88,2 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh pelunasan di segmen Korporasi sebesar Rp3,5 triliun di Desember 2022. Namun demikian, LPEI mencatat penarikan pembiayaan mencapai Rp27,8 triliun di tahun 2022 yang terdiri dari debitur *rollover* Rp9,5 triliun, kenaikan debitur *eksisting* Rp8,9 triliun dan debitur baru Rp9,5 triliun atau lebih tinggi Rp4,7 triliun dari penarikan selama tahun 2021.

Dalam hal penjaminan, LPEI membukukan realisasi penjaminan mencapai Rp12,43 triliun per Desember 2022 yang terdiri dari Penjaminan Umum sebesar Rp8,67 triliun dan Penjaminan PEN sebesar Rp3,76 triliun. Secara kumulatif, realisasi penjaminan ini mencapai 108,63% dari target Rp11,44 triliun dengan pencapaian Penjaminan Umum sebesar 88,32% dari target Rp9,81 triliun dan Penjaminan PEN sebesar 226,92% dari target Rp1,63 triliun. Realisasi Penjaminan PEN yang diberikan LPEI sangat bergantung dari pengajuan penjaminan oleh pelaku usaha melalui perbankan.

Terkait produk Asuransi, LPEI membukukan realisasi nilai pertanggungan atas penutupan risiko yang tercantum dalam polis asuransi LPEI mencapai sebesar Rp16.783 miliar atau 138,70% dari target sebesar Rp12.100 miliar.

Segmen usaha lainnya yakni Jasa Konsultasi telah menyelenggarakan 57 kali pelatihan yang dihadiri oleh

of guarantees and insurance as well as trade finance, accelerating asset quality improvement, collaboration with the export ecosystem, qualified risk management, internal consolidation in terms of business processes, governance, Human Resources (HR) development and strengthening Information System Technology.

Despite the global economic uncertainty throughout 2022, all Indonesia Eximbank personnel have made these utmost effort to overcome the challenges. The achievement of the Institution's performance as of December 31, 2022 can be seen from various aspects, namely the realization of outstanding financing of Rp83.6 trillion or equivalent to 95% of the target set to reach Rp88.2 trillion. This decline was mainly influenced by repayments in the Corporate segment of Rp3.5 trillion in December 2022. However, Indonesia Eximbank recorded financing withdrawals of Rp27.8 trillion in 2022 consisting of rollover debtors of Rp9.5 trillion, an increase in existing debtors of Rp8.9 trillion and new debtors of Rp9.5 trillion or Rp4.7 trillion higher than withdrawals during 2021.

In terms of guarantees, Indonesia Eximbank recorded guarantee realization of Rp12.43 trillion as of December 2022, consisting of General Guarantees of Rp8.67 trillion and PEN Guarantees of Rp3.76 trillion. Cumulatively, the realization of this guarantee reached 108.63% of the target of Rp11.44 trillion with the achievement of General Guarantee of 88.32% of the target of Rp9.81 trillion and PEN Guarantee of 226.92% of the target of Rp1.63 trillion. The realization of the PEN Guarantee provided by Indonesia Eximbank is highly dependent on the application for guarantees by businesses through banks.

On insurance products, Indonesia Eximbank recorded the realization of the insured value for closing risks listed in the Institution's insurance policy at Rp16,783 billion or 138.70% of the target of Rp12,100 billion.

Other business segments, namely Advisory Services, has held 57 trainings attended by 1,035 SMEs and has acquired

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

1.035 UKM dan telah menghasilkan 145 eksportir baru serta pelaksanaan 23 *business matching* dengan 158 transaksi baru yang dihasilkan. Hingga akhir tahun 2022, LPEI telah meresmikan sebanyak 178 Desa Devisa (akumulasi).

Sementara itu, dilihat dari posisi keuangan Lembaga, sejalan dengan realisasi pembiayaan di bawah target, total aset LPEI di tahun 2022 sebesar Rp83,2 triliun atau 94,29% dari target. Penurunan pembiayaan ini berdampak kepada realisasi ekuitas LPEI sebesar Rp26.868 miliar atau setara dengan 87,72% dari target sebesar Rp30.630 miliar.

Penurunan pembiayaan dan peningkatan pembiayaan dan piutang bermasalah berdampak kepada kenaikan signifikan atas pembentukan CKPN yang mencapai Rp2,02 triliun. Hal ini berakibat pada rugi tahun berjalan sebesar Rp3,11 triliun dibandingkan target laba tahun berjalan sebesar Rp456,36 miliar. Pembukuan rugi bersih tahun berjalan juga disebabkan aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal tahun 2019 dan 2020.

Kebijakan Strategis Tahun 2022

Menghadapi beragam tantangan eksternal terjadi di sepanjang tahun 2022 sebagai dampak dari ketidakstabilan politik global, LPEI terus melanjutkan transformasi untuk memperkuat bisnis. Transformasi yang dilakukan LPEI mencakup antara lain, peningkatan Jasa Konsultasi dengan pendekatan baru seperti *Coaching Program for New Exporters* (CPNE) secara berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta asosiasi atau komunitas ekspor. LPEI juga menciptakan eksportir baru melalui *E-commerce* global & lokal, B2B *Business Matching*, dan pameran berskala Internasional serta pengembangan Desa Devisa secara berkolaborasi dengan K/L & Pemda serta *stakeholder* lainnya. LPEI juga berkolaborasi dengan perbankan baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan. LPEI juga telah memperkuat model bisnis kolaborasi, dengan ekosistem ekspor yang mulai menunjukkan hasil seperti optimalisasi likuiditas dan desa devisi.

145 new exporters and carried out 23 business matching with 158 new transactions generated. By the end of 2022, Indonesia Eximbank has launched accumulatively 178 Desa Devisa.

Meanwhile, based on the financial position of the Institution, in line with the realization of financing below the target, the Institution's total assets in 2022 stood at Rp83.2 trillion or 94.29% of the target. This decrease in financing has an impact on the realization of Indonesia Eximbank equity of Rp26,868 billion or equivalent to 87.72% of the target of Rp30,630 billion.

The decrease in financing and the increase in non-performing financing and receivables resulted in a significant increase in the formation of Allowance for Impairment Losses which reached Rp2.02 trillion. This resulted in a loss for the current year of Rp3.11 trillion compared to the current year's profit target of Rp456.36 billion. The current year's net loss was also attributable to deferred tax assets derived from accumulated fiscal losses in 2019 and 2020.

2022 Strategic Policies

Amid the various external challenges in 2022 due to global political instability, Indonesia Eximbank continued its transformation to fortify its business. The transformation carried out by Indonesia Eximbank includes, among others, improving Advisory Services with new approaches such as the Coaching Program for New Exporters (CPNE) in collaboration with Ministries/Institutions and Local Governments as well as export associations or communities. Indonesia Eximbank also creates new exporters through global & local E-commerce, B2B Business Matching, and international exhibitions as well as the development of Desa Devisa in collaboration with Ministries/Institutions & Local Government and other stakeholders. Indonesia Eximbank also collaborates with banks both in terms of financing and funding. Indonesia Eximbank has also strengthened its collaboration business model, with the export ecosystem starting to show results such as liquidity optimization and desa devisi.

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

Selain itu, LPEI juga menetapkan kebijakan strategis yang sesuai dengan visi dan misi LPEI. Strategi utama Lembaga tahun 2022 masih melanjutkan penguatan fondasi melalui 5 prioritas utama yakni pelaksanaan mandat, perbaikan kualitas aset, penguatan proses internal, penguatan sumber daya manusia, dan pengembangan bisnis.

Pelaksanaan mandat oleh LPEI terkait dengan *outstanding* pembiayaan, penjaminan komersial, plafon asuransi, volume *trade finance* dan jasa konsultasi. Terkait dengan perbaikan aset, LPEI berkomitmen memperbaiki kualitas aset melalui penyelesaian NPL secara organik seperti restrukturisasi, *collections* dan hapus buku selain melakukan eksplorasi terhadap alternatif penyelesaian NPL secara *inorganic*.

Lembaga juga melakukan penguatan internal yang dilakukan dengan pengembangan MIS dan penguatan IT serta operasional melalui peningkatan jumlah *dashboard* untuk menunjang bisnis. LPEI juga melakukan penguatan GRC berupa *risk management*, *credit underwriting*, penerapan *whistle blowing system*, *early warning detection*, *Compliance* dan lain-lain serta pengkinian Kebijakan dan SOP.

Penguatan Sumber Daya Manusia LPEI selama tahun 2022 dilakukan dalam bentuk penajaman *Corporate Values* dengan peresmian 'APIK' (*Agile*, Profesionalisme, Integritas dan Kreatif), mengimplementasikan cara kerja yang baru yaitu XWOW dan implementasi *green office*. Sementara itu, terkait dengan prioritas pengembangan bisnis, LPEI melakukan *refocusing* kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian model bisnis LPEI antara lain dengan melakukan *roadshow* ke perbankan dengan tujuan memperkenalkan pola kerja baru LPEI yang berfokus pada kolaborasi dan berkoordinasi dengan K/L untuk melakukan sosialisasi Penugasan Khusus Ekspor (PKE) kepada beberapa pelaku usaha baik swasta maupun BUMN.

Indonesia Eximbank also establishes strategic policies that align with its vision and mission. The Institution's primary strategy in 2022 focused on reinforcing the foundation through five main priorities, including fulfilling mandates, improving asset quality, fortifying internal processes, enhancing human resources, and business development.

The implementation of Indonesia Eximbank's mandate is related to outstanding financing, commercial guarantees, insurance ceilings, trade finance volumes and advisory services. On asset improvement, Indonesia Eximbank is committed to improving asset quality through organic NPL settlement such as restructuring, collection and book write-offs in addition to exploring alternatives for inorganic NPL settlement.

The Institution pursued internal strengthening efforts by enhancing Management Information Systems (MIS) and bolstering IT and operations by increasing the number of dashboards to support the business. Furthermore, Indonesia Eximbank fortified Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) by implementing risk management, credit underwriting, whistle-blowing systems, early warning detection, compliance measures, and others, including updating policies and SOPs.

In 2022, Indonesia Eximbank prioritized strengthening its Human Resources by refining its Corporate Values with the inauguration of 'APIK' (Agile, Professionalism, Integrity, and Creative), implementing a new way of working, known as XWOW, and establishing green office practices. Regarding business development priorities, Indonesia Eximbank is redirecting its activities to align with its business model by conducting roadshows to banks to introduce new work patterns that emphasize collaboration and coordinating with Ministries/ Institutions to raise awareness of Export-National Interest Account (Export-NIA) to various businesses, both private and SOEs.

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT**Kendala dan Langkah Penyelesaian**

LPEI memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan mandat yang diberikan disamping berupaya secara maksimal untuk mencapai target melalui implementasi strategi yang telah ditetapkan dalam RKAT. Namun demikian, dalam implementasi strategi tersebut, LPEI menyadari adanya kendala eksternal yang di luar kendali Lembaga. Dunia yang sedang menjalani fase pemulihan akibat pandemi dihadapkan tantangan baru yang kompleks berupa ketidakpastian geopolitik global yang dipicu oleh krisis politik di Ukraina. Dampak lanjutan dari krisis politik yang menyebabkan disrupsi pasokan adalah kenaikan tajam inflasi yang diikuti oleh peningkatan suku bunga acuan yang berujung pada perlambatan ekonomi dunia.

Kondisi tersebut memberikan dampak pada proses transformasi LPEI yang sedang berjalan khususnya terkait dengan perbaikan kualitas aset, penguatan infrastruktur dan model bisnis baru. Menyikapi hal tersebut, LPEI tetap fokus pada penyediaan fasilitas pembiayaan secara selektif, pemerataan mandat dengan peningkatan penyaluran penjaminan dan asuransi serta *trade finance*, percepatan perbaikan kualitas aset, kolaborasi dengan ekosistem ekspor, manajemen risiko yang mumpuni, konsolidasi internal baik dari sisi proses bisnis, tata kelola, pengembangan Sumber Daya Manusia dan memperkuat Teknologi Sistem Informasi.

Prospek Usaha 2023

LPEI memperkirakan situasi ekonomi yang terjadi di tahun 2022 masih akan berlangsung hingga 2023. Outlook perekonomian dunia masih akan dibayangi sejumlah tantangan, antara lain (i) perang antara Rusia dan Ukraina serta efek domino yang masih berlanjut; (ii) pelemahan ekonomi Tiongkok; (iii) tekanan inflasi tinggi yang meluas secara global; dan (iv) kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara yang *hawkish* di tengah tren inflasi yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diperkirakan tetap solid di tengah gejolak ekonomi, geopolitik, dan ekologi di kisaran 5,3%, ditopang fundamental makro ekonomi yang kuat disertai laju inflasi diproyeksikan mengalami moderasi ke level 3,6%.

Constraints and Resolve Measures

Indonesia Eximbank is strongly committed to fulfilling its mandate and endeavors to achieve its targets by implementing the strategy outlined in the Corporate Work Plan & Budget. However, the Institution acknowledges that external factors exist beyond its control in implementing the strategy. The world is still undergoing a recovery phase due to the pandemic, and is currently facing a new and complex challenge in the form of global geopolitical uncertainty arising from the political crisis in Ukraine. The impact of this crisis, which has caused supply disruptions, has led to a sharp increase in inflation followed by an increase in the benchmark interest rate, resulting in a slowdown of the global economy.

This condition has an impact on the Institution's ongoing transformation process, particularly related to improving asset quality, strengthening infrastructure and new business models. As such, Indonesia Eximbank remains focused on providing selective financing facilities, equitable distribution of mandates by increasing the distribution of guarantees and insurance as well as trade finance, accelerating asset quality improvement, collaboration with the export ecosystem, qualified risk management, internal consolidation both in terms of business processes, governance, Human Resources development and strengthening Information System Technology.

2023 Business Outlook

Indonesia Eximbank anticipates that the economic situation that occurred in 2022 will persist into 2023. The global economic outlook will continue to be clouded by several challenges, including (i) ongoing conflicts between Russia and Ukraine and their domino effect; (ii) China's economic fragility; (iii) high inflationary pressures across the globe; and (iv) hawkish monetary policies by central banks in various countries, despite persistently high inflation. Amidst economic, geopolitical and ecological turmoil, Indonesia's economic growth in 2023 is predicted to remain solid in the range of 5.3%, supported by strong macroeconomic fundamentals accompanied by inflation projected to moderate to a level of 3.6%.

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik serta tantangan dari sisi internal sasaran yang hendak dicapai LPEI di tahun 2023 adalah *“fixing the fundamental”*. Sasaran ini akan dicapai melalui pertumbuhan bisnis yang kuat; pertumbuhan pendanaan yang kuat; serta percepatan perbaikan kualitas aset organik dan in-organik. Selain itu, LPEI akan mengembangkan kolaborasi dengan ekosistem ekspor; GRC yang kuat dan modern, optimalisasi struktur organisasi, SDM dan budaya serta penguatan kemampuan dan infrastruktur IT yang dilengkapi dengan manajemen komunikasi dan *stakeholder*.

Terkait dengan kolaborasi dengan ekosistem ekspor, LPEI memprioritaskan pada perluasan jangkauan pasar melalui kolaborasi dengan *stakeholder* kunci di dalam ekosistem yang diperkuat dengan peran LPEI dalam ekosistem yang lebih *outreach* dan *market-chasing*, memperkuat jasa konsultasi, *partnership* dan kolaborasi dengan ECA/ Eximbank-lain. Selain itu, LPEI berkomitmen menyediakan *export resources* secara lengkap dalam aktivitas ekspor nasional melalui kerja sama dengan *key stakeholders* secara bertahap untuk memastikan efektivitas program agar memiliki dampak signifikan.

Selanjutnya, LPEI akan memperluas *touchpoint* dan meningkatkan penetrasi pasar melalui teknologi dengan bekerja sama dengan platform digital terkemuka untuk meningkatkan *outreach* dalam menunjang peran untuk pemenuhan mandat. LPEI juga akan melakukan penajaman mandat dalam mengeksekusi strategi bisnis dan menjadi *“top of mind”* dari ekspor dan penjamin melalui koneksi dan fasilitas kepada eksportir serta *supply chain*-nya.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

LPEI dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di tahun 2022 berpedoman pada Undang-Undang No. 2/2009 (Pasal 17) tentang LPEI dan PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.

Taking into account global and domestic economic conditions as well as internal challenges, Indonesia Eximbank's target in 2023 is *“fixing the fundamentals”*. This target will be achieved through strong business growth; strong funding growth; as well as acceleration of improvement in the quality of organic and in-organic assets. In addition, Indonesia Eximbank will develop collaboration with the export ecosystem; strong and modern GRC, optimization of organizational structure, HR and culture as well as strengthening IT capabilities and infrastructure equipped with communication and stakeholder management.

Indonesia Eximbank gives priority to expanding its market reach by collaborating with key stakeholders in the export ecosystem. The institution strengthens its role in creating a wider outreach and market-purchasing ecosystem, strengthening its advisory services, partnerships, and collaborations with other ECAs and Eximbanks. Indonesia Eximbank is committed to gradually cooperating with key stakeholders to provide complete export resources in national export activities, with the aim of ensuring the program's effectiveness and having a significant impact.

Furthermore, Indonesia Eximbank will expand touchpoints and increase market penetration through technology by collaborating with leading digital platforms to increase outreach in supporting roles for mandate fulfillment. The Institution will also sharpen its mandate in executing business strategies and become the *“top of mind”* of exports and guarantors through connections and facilities for exporters and their supply chains.

Good Corporate Governance Practices

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2022 refers to Law No. 2 of 2009 (Article 17) on Indonesia Eximbank and PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

Implementasi dari kedua regulasi tersebut dijabarkan antara lain melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Selanjutnya, berpedoman pada PMK tersebut pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik LPEI diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana. Implementasi GCG di LPEI juga diwujudkan melalui kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal di samping penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, audit eksternal, dan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.

Penerapan GCG juga direalisasikan dalam pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan. LPEI juga memprioritaskan implementasi GCG melalui transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, dan pelaporan internal dan benturan kepentingan. Adapun pencapaian penting terkait implementasi GCG di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan Pelaporan LHKPN 100% dimana LPEI menduduki peringkat ke 4 dari 19 Lembaga secara nasional.
- Penyempurnaan Struktur Organisasi LPEI.
- Pengukuhan nilai-nilai Budaya LPEI yang baru yakni *Agile*, Profesionalisme, Integritas, dan Kreatif yang diformulasikan dalam sebuah kata "APIK".
- Penyusunan Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite Di Bawah Direktur Eksekutif.
- Pengkinian Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI; Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI; Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI; Piagam Komite Audit LPEI; dan Piagam Audit Internal LPEI.
- Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.

The report describes the implementation of two regulations, which include the application of good governance, risk management, and know your customer principles. Additionally, the PMK provides guidance for the implementation of good governance principles by the Board of Directors, Executive Director, and Managing Director of the institution. The implementation of good governance is also evident through the completeness and implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board, committees, and work units that perform internal control functions. The implementation of compliance, internal audit, external audit, and risk management functions, including the internal control system.

GCG practices is also evident in the procurement of goods and services, as well as in the preparation of long-term plans, work plans, and annual budgets. Indonesia Eximbank also prioritizes GCG implementation through the transparency of financial and non-financial conditions, as well as internal reporting and conflict of interest management. The important achievements of GCG implementation in 2022, were as follows:

- Fulfillment of 100% LHKPN Reporting where Indonesia Eximbank is ranked 4th out of 19 institutions nationally.
- Improvement of Indonesia Eximbank's organizational structure.
- Strengthening the new Culture values of Agile, Professionalism, Integrity, and Creative formulated in a word "APIK".
- Preparation of Standard Operating Guidelines of nine committees under the Executive Director.
- Updating the Sharia Supervisory Board Charter; the Remuneration and Nomination Committee Charter; Risk Monitoring Committee Charter; Audit Committee Charter; and Internal Audit Charter.
- Submission of Report on the Implementation of Compliance Function and AML-CFT to the Board of Directors and Executive Director.

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

- Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi Online (GOL) KPK dan penyampaian dan pemenuhan rencana dan realisasi kerja atas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2022 kepada KPK.
- Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (*Vendor*), Mitra, dan Nasabah.
- Pelaksanaan survei penerapan Gratifikasi dan WBS kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI.
- Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI, termasuk juga sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI.
- Implementation and submission of gratification reports to the KPK through the KPK Online Gratification reporting system (GOL) and submission and fulfillment of plans and work realization of the 2022 Gratification Control Program (PPG) to the KPK.
- Dissemination of Circular to Employees, Partners/Associates, and Customers/Debtors on the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from Indonesia Eximbank Employees as well as to Associates, Goods/Services Providers (Vendors), Partners, and Customers.
- Conducting surveys on the application of Gratification and WBS to all Management and employees.
- Socialization of Good Corporate Governance by independent consultants to all employees, including continuous socialization related to WBS and Gratification to all employees.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif memiliki komite-komite yang bertugas membantu pelaksanaan pengelolaan Lembaga. Komite-komite yang membantu Direktur Eksekutif adalah Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite Assets & Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Sumber Daya Manusia.

Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite-Komite di bawah Direktur Eksekutif selama 2022 telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif atas penyusunan strategi dan program penerapan manajemen risiko serta perubahannya. Selain itu komite juga memberikan rekomendasi atas penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur dan melakukan evaluasi atas penilaian tingkat Kesehatan perusahaan anak.

Performance Assessment of Executive Directors' Committees

The Executive Director has established committees to assist in the management of the Institution. The committees are the Risk Management Committee, Product Development Committee, Policy and Guidelines Committee, Assets & Liabilities Management Committee, Information Systems Technology Committee, Procurement Committee, Advisory Services Committee, Financing Committee, and Human Resources Committee.

The Executive Director considers that the Committees have carried out their duties and responsibilities effectively during 2022, as follows:

- The Risk Management Committee has provided recommendations to the Executive Director on the preparation of strategies and programs for the implementation of risk management and its changes, in addition the committee also provides recommendations on the determination of matters related to business decisions that deviate from procedures and evaluates the assessment of the

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

Selama tahun 2022, komite ini melaksanakan rapat sebanyak 14 kali.

- Komite Pengembangan Produk telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal rancangan maupun penyempurnaan peraturan terkait produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan LPEI. Selain itu komite juga memberikan rekomendasi penyusunan standar pedoman produk (SPP) dan ketentuan lain yang terkait dengan produk/program bisnis secara *end to end*, termasuk mekanisme pemutusan pembiayaan dengan memperhatikan target *market* dan/atau fitur produk tertentu. Selama tahun 2022, komite ini menyelenggarakan rapat sebanyak 15 kali.
- Komite Kebijakan dan Pedoman telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait rancangan peraturan internal LPEI dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi. Komite ini menyelenggarakan rapat sebanyak 15 kali di tahun 2022.
- Komite *Assets & Liabilities Management* telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait penetapan kebijakan pengelolaan risiko, penetapan kebijakan, Batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan asset dan liabilities dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. Komite ini melaksanakan rapat sebanyak 29 kali di tahun 2022.
- Komite Teknologi Sistem Informasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penyusunan rencana pengembangan teknologi system informasi berikut dengan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi system informasi yang telah dilakukan. Komite ini menyelenggarakan rapat sebanyak 2 kali di tahun 2022.
- Komite Pengadaan telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal proses pengadaan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite ini melaksanakan rapat sebanyak 106 kali di tahun 2022.

sound level of the subsidiary. During 2022, this committee held 14 meetings.

- The Product Development Committee has provided recommendations to the Executive Director in terms of design and improvement of regulations related to products/business programs and activities of the Institution. In addition, the committee also provides recommendations for the preparation of product guideline standards (SPP) and other provisions related to end-to-end business products/programs, including the mechanism of termination of financing by taking into account the target market and/or certain product features. During 2022, this committee held 15 meetings.
- The Policy and Guidelines Committee has provided recommendations to the Executive Director regarding the draft internal regulations of the Institution and supervision of the implementation of internal regulations and formulated solutions to the any obstacles. This committee held 15 meetings in 2022.
- The Assets & Liabilities Management Committee has provided recommendations to the Executive Director regarding the establishment of risk management policies, policy determination, limitations and guidelines for asset and liabilities management strategies by considering external and internal conditions. This committee held 29 meetings in 2022.
- The Information System Technology Committee has provided recommendations to the Executive Director in terms of preparing an information system technology development plan along with supervision and evaluation of the development and application of information system technology that has been carried out. This committee held 2 meetings in 2022.
- The Procurement Committee has provided recommendations to the Executive Director in terms of an effective and efficient procurement process and in accordance with applicable regulations. This committee held 106 meetings in 2022.

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

- Komite Jasa Konsultasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif atas persetujuan prinsip untuk program jasa konsultasi dengan tetap memperhatikan *good judgment*, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite ini menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali di tahun 2022.
- Komite Pembiayaan telah memberikan keputusan atas proposal pembiayaan, penjaminan dan asuransi dan treasuri serta *non bank financial line*, *bank line*, treasuri *line* dan penugasan khusus termasuk didalamnya penetapan *account strategy*. Komite pembiayaan juga mengambil keputusan atas proposal penanganan pembiayaan bermasalah dan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produk sesuai dengan limit masing-masing komite pembiayaan. Komite ini melaksanakan rapat sebanyak 398 kali (rapat segmen UKM) dan 323 kali (rapat segmen non-UKM) di tahun 2022.
- Komite Sumber Daya Manusia telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan SDM yang berkualitas. Selain itu Komite juga memastikan kebijakan SDM dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan strategi Lembaga berikut menentukan pengembangan nilai-nilai Lembaga (corporate value). Komite ini melaksanakan rapat sebanyak 3 kali di tahun 2022.
- The Advisory Services Committee has provided recommendations to the Executive Director on in-principle approval for the advisory services program while still paying attention to good judgment, risk mitigation, and not contrary to applicable laws and regulations. This committee held 5 meetings in 2022.
- The Financing Committee has given decisions on proposals for financing, guarantee and insurance and treasury as well as non-bank financial line, bank line, treasury line and special assignments including the establishment of account strategy. The financing committee also takes decisions on proposals for handling non-performing financing and decisions on proposals for determining the quality level of product assets in accordance with the limits of each financing committee. This committee held 398 meetings (SME segment) and 323 meetings (non-SME segment) in 2022.
- The Human Resources Committee has provided recommendations to the Executive Director in terms of establishing strategies to maintain and develop quality human resources. In addition, the Committee also ensures that HR policies are implemented in accordance with the objectives and strategies of the Institution and determine the development of corporate values. This committee held 3 meetings in 2022.

Perubahan Komposisi Manajemen

LPEI melaporkan perubahan komposisi Direktur Pelaksana per Desember 2022 dengan perubahan nomenklatur dan susunan sebagai berikut:

Changes in Management Composition

As of December 2022, Indonesia Eximbank reported changes in the Managing Directors composition with changes in nomenclature and structure as follows:

Nomenklatur & Komposisi per 31 Desember 2022 Nomenclature & Composition as of 31 December 2022		Nomenklatur & Komposisi per 31 Desember 2021 Nomenclature & Composition as of 31 December 2021	
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	D. James Rompas
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana I Managing Director I	Dikdik Yustandi

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

Nomenklatur & Komposisi per 31 Desember 2022 Nomenclature & Composition as of 31 December 2022		Nomenklatur & Komposisi per 31 Desember 2021 Nomenclature & Composition as of 31 December 2021	
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Maqin U. Norhadi	Direktur Pelaksana II Managing Director II	Maqin U. Norhadi
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations	Chesna F. Anwar	Direktur Pelaksana III Managing Director III	Agus Windiarto
Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Acting Managing Director of Credit & Risk Management	Agus Windiarto (Plt.)	Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Henry Sihotang
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional Managing Director of Finance & Operations	Agus Windiarto	Direktur Pelaksana V Managing Director V	Chesna F. Anwar

**MEWUJUDKAN DUKUNGAN PENCAPAIAN TUJUAN
KEBERLANJUTAN**

Meyakini misi khusus yang dijalankan dalam mendorong kemajuan produk barang dan jasa di pasar ekspor juga dapat mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dari pembangunan Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), LPEI bertekad mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan dan penyelesaian program-program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) demi memaksimalkan kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara berimbang.

Untuk mendukung pencapaian komitmen RAN TPB melalui optimalisasi realisasi RAKB Lembaga tersebut, di tahun pelaporan LPEI berfokus pada pelaksanaan empat inisiatif strategis, yakni: penguatan infrastruktur tata kelola keberlanjutan; peningkatan kompetensi keuangan berkelanjutan jajaran internal; edukasi dan pemberdayaan masyarakat; serta intensifikasi penerapan kebijakan *Green Office* LPEI.

Penguatan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan keuangan berkelanjutan, selain menetapkan penanggung jawab program-program yang terdapat dalam RKAB, di

**REALIZING SUPPORT FOR ACHIEVING SUSTAINABILITY
GOALS**

Driven by the belief that promoting the export of goods and services can also contribute to Indonesia's sustainable development goals, as outlined in the National Action Plan (NAP) for the Sustainable Development Goals (SDGs), Indonesia Eximbank is committed to enhancing the quality of Sustainable Finance Action Plan (RAKB) programs to achieve a balanced performance across economic, social, and environmental aspects in a timely manner.

To foster SDGs NAP achievement by optimizing its RAKB, Indonesia Eximbank has prioritized four strategic initiatives in the current reporting year, which are strengthening the infrastructure for sustainability governance, enhancing the sustainable finance capabilities of its internal staff, empowering local communities through education, and intensifying the implementation of its Green Office policy.

Strengthening Sustainable Finance Policy

To improve the quality of sustainable finance implementation, apart from determining the person in charge of the RAKB programs, we have completed the

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

tahun pelaporan kami telah menyelesaikan penyusunan Kebijakan *Environmental Social and Governance* (ESG) dan Manual Operasional ESG. Sebelum diresmikan pemberlakuannya di akhir tahun 2022, pembahasan kebijakan dimaksud masih menggunakan nama Kebijakan *Environmental and Social Management System* (ESMS) dan Manual Operasional ESMS.

Dengan mulai diberlakukannya Kebijakan ESG tersebut, kami kini dan ke depan dapat semakin meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan dan penutupan asuransi ramah lingkungan secara terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan ESG dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan.

Pemberlakuan Kebijakan ESG dimaksud, membuat kami akan dapat memantau ketaatan para nasabah dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang lingkungan sebagai bagian dari *covenant* pemberian dukungan pembiayaan, penjaminan maupun penutupan asuransi, juga memberi kepastian bagi penanggung jawab program keuangan berkelanjutan untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya yang berarti LPEI telah melangkah semakin maju dalam mewujudkan komitmen untuk menjalankan prinsip *sustainable financing* sebagaimana mestinya.

Meningkatkan Kinerja Keberlanjutan

Implementasi berbagai inisiatif strategis tersebut, membuat kami dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan baik pada aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan, di tengah kurang kondusifnya perekonomian global akibat terjadinya ketegangan geopolitik, namun kondisi perekonomian nasional tetap menunjukkan *trend* pemulihan yang menguat.

Pada aspek ekonomi, kami berhasil meningkatkan distribusi perolehan nilai ekonomi sebesar 0,3% hingga senilai Rp3,89 triliun kepada seluruh pemangku kepentingan. Kami bahkan berhasil meningkatkan

preparation of the Environmental Social and Governance (ESG) Policy and ESG Operational Manual in the reporting year. Prior to its official implementation at the end of 2022, the policy discussion still uses the name Environmental and Social Management System (ESMS) Policy and ESMS Operational Manual.

The implementation of the ESG Policy enables us to enhance the quality of implementing financing facilities, guarantees, and environmentally friendly insurance by integrating ESG management policies into our financial product and service offerings today and in the future.

The implementation of the ESG Policy allows us to monitor the compliance of customers in fulfilling the provisions of laws and regulations in the environmental sector as part of the covenant providing financing support, guarantee and insurance closing, as well as providing certainty for those in charge of sustainable finance programs to carry out their duties as well as possible, which means that Indonesia Eximbank has moved forward in realizing its commitment to sustainable financing principles.

Improving Sustainability Performance

Despite geopolitical tensions that have impacted the global economy, our implementation of these strategic initiatives has enhanced our sustainability performance across economic, social, and environmental aspects. This progress has been achieved amidst challenging conditions, as the national economy continues to exhibit a strong recovery trend.

In the economic aspect, we succeeded in increasing the distribution of economic value acquisition by 0.3% to Rp3.89 trillion to all stakeholders. We also managed to increase our direct economic contribution to the

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

kontribusi ekonomi langsung kepada Pemerintah total sebesar Rp186,60 miliar, naik 9,7% dari tahun sebelumnya dimana sebagian besar berupa Pembayaran Pajak, dan sebagian kecil lainnya berupa Bagian Laba Pemerintah.

Pada aspek sosial, melalui program Desa Devisa yang dilaksanakan dengan melibatkan K/L & Pemda serta *stakeholder* lainnya, kami berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai Desa di seluruh Indonesia melalui kegiatan pemberdayaan potensi wilayah masing-masing dalam bentuk kluster-kluster usaha dan membukakan pasar ekspor bagi produk-produk yang dihasilkan. Di tahun pelaporan tidak kurang 144 desa dengan total 13.425 petani/petambak tercakup dalam 6 kelompok program Desa Devisa yang dijalankan. Kami juga kembali merealisasikan tidak kurang 24 program pemberdayaan *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) yang diikuti oleh 1.035 peserta. Melalui Program CPNE ini, kami berhasil melahirkan 161 eksportir baru dari berbagai sektor usaha.

Sementara pada aspek lingkungan, selain berhasil menerbitkan Kebijakan ESG dan Manual Operasional ESG, serta konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkan Program *Green Office*, membuat kami berhasil mempertahankan intensitas konsumsi energi listrik di kisaran 0,20 GJoule/M2 dan intensitas emisi GRK di kisaran 0,05Ton CO₂eq/M₂ ditengah meningkatnya aktivitas operasional. Untuk meningkatkan kualitas penerapan program *Green Office*, kami menginisiasi peluncuran program XWoW atau *Eximbank New Way of Working* – termasuk pilihan kerja secara hybrid bagi pegawai, penerapan *smart spending* dan memaksimalkan *online training*, selain tetap menjalankan program-program di tahun sebelumnya.

Kami juga konsisten meningkatkan kompetensi jajaran pada aspek keuangan berkelanjutan dengan mengirimkan tidak kurang 86 orang pegawai maupun manajemen untuk berpartisipasi pada berbagai program peningkatan kompetensi aspek keuangan berkelanjutan.

government amounted to Rp186.60 billion, representing a 9.7% increase from the previous year. The majority of this contribution came in the form of tax payments, with a smaller portion allocated to Government Profit Shares.

In the social aspect, our Desa Devisa program has made significant strides towards improving the welfare of communities across various villages in Indonesia. This program, which involves participation from Ministries/ Institutions, Local Governments, and other stakeholders, empowers regions through the establishment of business clusters and export markets for locally manufactured products. In the current reporting year, we have implemented the Desa Devisa program in 144 villages, benefiting a total of 13,425 farmers across 6 groups. We have also conducted 24 Coaching Program for New Exporter (CPNE) sessions, with a total of 1,035 participants. As a result of this CPNE Program, we have successfully created 161 new exporters across a range of business sectors.

While on the environmental aspect, our success in issuing the ESG Policies and ESG Operational Manuals, and our consistent efforts to implement the Green Office Program across all levels of the organization, has enabled us to maintain our electrical energy consumption intensity at 0.20 GJoule/M2 and our GHG emissions intensity at 0.05 Ton CO₂eq/M2, amid increased operational activities. To enhance the quality of our Green Office program, we have launched the XWoW or Eximbank New Way of Working program, which includes hybrid work options for employees, smart spending initiatives, and maximizing online training, in addition to continuing the programs from the previous year.

We have made a concerted effort to consistently enhance the sustainable finance capabilities of our staff by sending 86 employees and management to participate in various competency improvement programs in the aspects of sustainable finance.

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

Seluruh realisasi inisiatif strategis yang dijalankan dan kinerja aspek keberlanjutan tersebut menunjukkan kuatnya tekad kami dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan yang dijalankan Pemerintah Indonesia maupun warga dunia lainnya.

Apresiasi

Kami mengapresiasi dukungan seluruh Pemangku Kepentingan dan Dewan Direktur dalam memberikan arahan atas tindakan Lembaga di tengah tantangan ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada perdagangan dunia sehingga berpengaruh kepada kinerja Lembaga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen dan segenap insan LPEI yang telah menunjukkan kerja keras di tengah dinamika tantangan selama tahun 2022, sehingga LPEI mampu melaluinya dengan kondisi tetap baik dan terjaga.

Demikian laporan atas kegiatan kepengurusan LPEI ini kami sampaikan. Kami yakin mampu menerapkan strategi yang cermat dan memiliki tim yang tepat untuk senantiasa mengatasi berbagai tantangan yang kami hadapi dan memanfaatkan berbagai peluang guna mengembangkan

Our successful implementation of these strategic initiatives, and the progress in sustainability performance, reflect our strong commitment to supporting the achievement of sustainability goals set by the Government of Indonesia and the global community.

Appreciation

We would like to express our appreciation to all stakeholders and the Board of Directors for their valuable support in guiding Indonesia Eximbank during the challenging times of global geopolitical uncertainty which has impacted world trade and consequently, the performance of the Institution. We also would like to extend our gratitude to the management and all personnel who have demonstrated dedication and hard work amidst dynamic challenges throughout 2022, enabling Indonesia Eximbank to navigate the situation while maintaining good conditions.

We are pleased to present a report on the management activities of Indonesia Eximbank. We are confident that we will be able to implement a well-thought-out strategy and have a competent team to address the challenges and capitalize on opportunities to support the government's

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS REPORT

bisnis kami di masa mendatang dalam menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Demikian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana kami sampaikan. Kami optimis Manajemen mampu melanjutkan langkah perbaikan dan penguatan internal disamping pelaksanaan mandat dan peran LPEI dalam ekosistem ekspor di tahun mendatang.

policies in promoting national export programs. We herewith submit a report on our duties and responsibilities as the Executive Director and Managing Directors. We are optimistic that the Management will continue to improve and strengthen the Institution's internal processes and successfully fulfill its mandate in the export ecosystem in the upcoming year.

Jakarta, April 2023

Atas Nama Direktur Eksekutif-Direktur Pelaksana
On Behalf of Executive Director-Managing Directors



Rijani Tirtoso
Direktur Eksekutif
Executive Director

DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA

Executive Director & Managing Directors

- 1 RIJANI TIRTOSO**
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

- 2 DIKDIK YUSTANDI**
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan
Managing Director of Financing

- 3 MAQIN U. NORHADI**
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis
Managing Director of Business Development



4

HENRY SIHOTANG*

Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit
Managing Director of Credit & Management Risk

6

AGUS WINDIARTO**

Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional
merangkap Plt. Direktur Pelaksana Bidang
Manajemen Risiko dan Kredit
Managing Director of Finance & Operations
concurrently Acting Managing Director of Credit and
Risk Management

5

CHESNA FIZETTY ANWAR

Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan
Managing Director of Institutional Relations

catatan | Note:

*Hingga 5 Desember 2022 | Until December 5, 2022

**Rangkap jabatan sejak 13 Desember 2022 | Concurrent position since December 13, 2022





LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SHARIA SUPERVISORY BOARD REPORT

Kanny
Hidaya, SE., MA

Ketua Dewan
Pengawas Syariah
Chairman of Sharia
Supervisory Board



LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD REPORT

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh produk, kebijakan, dan kegiatan usaha Syariah LPEI untuk memastikan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan perundang-undangan terkait LPEI yang berlaku.

The National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama's (DSN-MUI) fatwa, as well as any applicable laws and regulations pertaining to Indonesia Eximbank, were taken into consideration when the Sharia Supervisory Board carried out its oversight function of all Indonesia Eximbank Sharia products, policies, and business activities to ensure that they adhere to sharia principles.

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakatuh

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan dengan baik. *Shalawat* beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Pengawas Syariah (DPS) LPEI senantiasa melakukan pengawasan, pemberian nasihat serta rekomendasi dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kinerja LPEI. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPS berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah sebagai bagian dari komitmen LPEI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakatuh

All praise and gratitude we offer the presence of Allah SWT for His gifts and mercy bestowed on us, which enables us to effectively carry out our entrusted duties and responsibilities. *Shalawat* and greetings we convey to the Prophet Muhammad *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

As part of its duties and responsibilities, Indonesia Eximbank's Sharia Supervisory Board (DPS) continues to supervise, provide advice and recommendations with the aim of fostering Indonesia Eximbank's performance growth. In carrying out its supervisory function, DPS is guided by sharia principles as part of Indonesia Eximbank's commitment in implementing good corporate governance and maintaining the trust of all stakeholders.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD REPORT

Pengawasan yang dilakukan DPS juga sejalan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dimana LPEI dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kami juga memastikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah diterapkan dalam seluruh kegiatan operasional LPEI serta menjalin kerja sama yang baik dengan jajaran manajemen dan segenap insan LPEI dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Pengawas Syariah berdasarkan PDD Nomor: 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI.

Selama tahun 2022, kami menilai kinerja kegiatan usaha syariah LPEI berjalan dengan baik, dimana kegiatan pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah berjalan selaras dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI, ketentuan dari Otoritas/Regulator sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta ketentuan syariah dalam Fatwa DSN MUI serta opini DPS dan Kebijakan Umum Kepatuhan Syariah LPEI.

Kegiatan usaha LPEI berbasis syariah tersebut meliputi transaksi pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Modal Kerja Ekspor dan Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan untuk pelaku usaha yang berada di dalam/luar negeri.

DPS juga menjalankan berbagai aktivitas pengawasan diantaranya mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta seluruh kebijakan, pedoman operasional, produk, transaksi dan laporan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh LPEI.

The oversight is also in line with Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank where the Institution can conduct business activities based on sharia principles. We also ensure that the Fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has been implemented in all operational activities of Indonesia Eximbank and establishes good cooperation with the management and all personnel in order to carry out their duties and responsibilities as the Sharia Supervisory Board, as referring to PDD No.: 0013/PDD/10/2022 on the Sharia Supervisory Board Charter of Indonesia Eximbank.

During 2022, we evaluated the Indonesia Eximbank's sharia business activities that performed satisfactorily, where export financing activities based on sharia principles are performing in line with Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, the provisions of the Authority/Regulator as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK), and sharia provisions in the MUI DSN Fatwa, as well as DPS opinions and Indonesia Eximbank's General Sharia Compliance Policy.

The sharia-based business activities of Indonesia Eximbank encompass export financing services, such as Export Working Capital Financing and Export Investment Financing based on sharia principles intended for domestic and international businesses.

DPS also carries out various supervisory activities including evaluating risk management and compliance policies related to the fulfillment of sharia principles, as well as all policies, operational guidelines, products, transactions and Sharia financial statements issued by Indonesia Eximbank.

Jakarta, April 2023

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah
On behalf of the Sharia Supervisory Board



Kanny Hidayat, SE., MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

DEWAN PENGAWAS SYARIAH SHARIA SUPERVISORY BOARD



Dr. Yulizar D. Sanrego MEC
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board



Kanny Hidayat, SE., MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2022 OLEH DEWAN DIREKTUR

STATEMENT OF ACCOUNTABILITY OF 2022 ANNUAL REPORT BY THE BOARD OF DIRECTORS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Lembaga.

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2022 Annual Report of Indonesia Eximbank has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Institution's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 2023

DEWAN DIREKTUR BOARD OF DIRECTORS

Rijani Tirtoso

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Suminto

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Kasan

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Arus Gunawan

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Felia Salim

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

D. James Rompas

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2022 OLEH DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

STATEMENT OF ACCOUNTABILITY OF 2022 ANNUAL REPORT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Lembaga.

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2022 Annual Report of Indonesia Eximbank has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Institution's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

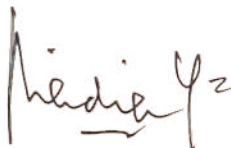
Jakarta, April 2023

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS



Rijani Tirtoso

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director



Dikdik Yustandi

Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan
Managing Director of Financing



Maqin U. Norhadi

Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis
Managing Director of Business Development



Chesna F. Anwar

Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan
Managing Director of Institutional Relations



Agus Windiarto

Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional
merangkap Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen
Risiko dan Kredit
Managing Director of Finance & Operations concurrently
Acting Managing Director of Credit and
Risk Management



PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY
PROFILE

03



IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan Company Name

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Indonesia Eximbank

Perubahan Identitas Perusahaan Identity Changes of Entity

Sejak didirikan tanggal 1 September 2009, tidak pernah terjadi perubahan identitas seperti perubahan nama dan status hukum.

Since its establishment on 1 September 2009 there were no changes on the Company's identity, name or legal status

Tanggal Pendirian Date of Establishment

1 September 2009

Jenis/Badan Hukum Perusahaan Legal Status of Entity

Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009.

Special Financial Institution established under the Act No. 2 of 2009.

Bidang Usaha Line of Business

Lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) melalui penyediaan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, serta Jasa Konsultasi baik secara konvensional, maupun berdasarkan prinsip syariah baik di dalam, maupun di luar negeri.

A Financial Institution established specifically to provide the National Export Financing in the form of Financing, Guarantee and Insurance as well as Advisory Services conventionally and on sharia principle-based, domestically or overseas.

Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4957

Act of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 on Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Addition of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4957

Modal Dasar Authorized Capital Rp4.321.586.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid In Capital Rp33.280.843.825.687

Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition

100% milik Pemerintah Indonesia dan tidak terbagi atas saham.

100% Government-owned and not divided into shares.

Bursa Efek Stock Exchange

Obligasi LPEI dicatat dan diperdagangkan pada:

1. Bursa Efek Indonesia (IDX) dan
2. Bursa Efek Singapura (SGX)

Indonesia Eximbank Bonds are listed and traded at:
1. Indonesia Stock Exchange (IDX); and
2. Singapore Stock Exchange (SGX)

SKALA USAHA

BUSINESS SCALE



Jumlah Aset Total Assets

Rp83,82
triliun | trillion



Rugi/Laba Bersih Net Loss/Profit

(Rp3,11)
triliun | trillion



Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Rp56,95
triliun | trillion



Jumlah Ekuitas Total Equity

Rp26,87
triliun | trillion

**Situs Web Perusahaan**
Corporate Website

www.indonesiaeximbank.go.id

**Alamat Email Perusahaan**
Corporate Email Address

corpsec@indonesiaeximbank.go.id

Alamat Kantor
Office Address

Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190,
Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Kantor Wilayah
Regional Offices**Kantor Wilayah I**

Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190,
Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03600

Kantor Wilayah II

LPEI Kantor Cabang Surakarta,
Gedung Indonesia Eximbank
Jl. Dr. Radjiman No 457, Bumi, Laweyan,
Surakarta 57148, Jawa Tengah
Tlp: 0271-740999

Kantor Wilayah III

Intiland Tower 2nd Floor, Suite 1
Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271,
Indonesia
Tel. : (62-31) 534 9382
Fax. : (62-31) 534 9383

Kantor Cabang
Branch Offices**Medan**

B&G Tower, J.W. Marriott 6th Floor, Unit 12
Jl. Putri Hijau No. 10, Medan 20111, Indonesia
Tel. : (62-61) 800 10098
Fax. : (62-81) 800 10096

Makassar

Wisma Kalla Building 6th Floor
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar 90125,
Indonesia
Tel. : (62-411) 852 916
Fax. : (62-411) 852 917

Surakarta

Gedung Indonesia Eximbank
Jl. Dr. Radjiman No.457, Bumi, Laweyan
Surakarta 57148, Jawa Tengah
Tlp : 0271-740999

Kantor Pemasaran
Representative Offices**Balikpapan**

Grand Sudirman Building
Panin Tower, Main Lobby 203
Jl. Jend. Sudirman No. 7, Balikpapan 76411,
Indonesia
Tel. : (62-542) 721 9810
Fax. : (62-542) 721 9820

Batam

Graha Pena Batam Building 7th Floor, Unit 704
Jl. Raya Batam Center, Batam 29461, Indonesia
Tel. : (62-778) 461 414
Fax. : (62-778) 460 125

Denpasar

Jl. Raya Puputan No. 160 Renon, Denpasar
80235, Indonesia
Tel. : (62-361) 262 612
Fax. : (62-361) 262 613

**Jumlah Pegawai**
Number of
Employees

549

**Kantor Pusat**
Head Office

1

**Kantor Wilayah**
Regional Offices

3

**Kantor Cabang**
Branch Offices

3

**Kantor Pemasaran**
Representative Offices

3



DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI

ASSOCIATES MEMBERSHIPS

No	Nama Forum Forum Name	Keterangan Description	Tahun Bergabung Year of Joining
1	AEBF	<i>Asian EXIM Banks Forum</i> (AEBF) merupakan forum yang beranggotakan Eximbank-Eximbank di Asia dan Oceania. Forum AEBF diadakan sebagai upaya dalam meningkatkan kerjasama dan menciptakan bagi anggota Eximbank dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi global. Asian EXIM Banks Forum (AEBF) is a forum with members of Eximbanks from Asia and Oceania. AEBF Forum was established to improve collaboration and creation of global trading and investment for Eximbank members.	1999
2	G-NEXID	<i>Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions</i> (G-NEXID) merupakan organisasi <i>non-profit</i> yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral antara anggota dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan investasi pada negara <i>South-South</i> (negara berkembang). Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID) is a non-profit organization aims at improving bilateral and multilateral collaboration between members with the goals to promote the trading and investment of developed countries.	2007
3	Berne Union	<i>Berne Union</i> adalah organisasi internasional untuk lembaga global <i>export credit and investment insurance</i> (ECA) yang bertujuan untuk mendukung perkembangan produk dan skema fasilitas asuransi kredit dan asuransi investasi. Berne Union is an international organization for global export credit and investment insurance (ECA) institutions that aims a supporting the development of credit and investment insurance facilities product and scheme.	2015
4	Aman Union	Aman Union merupakan <i>forum commercial</i> dan <i>non-commercial risk insurers</i> dan <i>reinsurers</i> bagi negara-negara anggota <i>Organization of Islamic Cooperation</i> (OIC). Aman Union is a commercial and non-commercial forum for insurers and reinsurers of members countries of Organization of Islamic Cooperation (OIC).	2018
5	AAUI	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) merupakan organisasi yang menjadi wadah perkumpulan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi di Indonesia. Indonesian General Insurance Association (AAUI) is an organization catered as a forum of all general insurance and reinsurance companies in Indonesia.	2017
6	FCI	<i>Factor Chain International</i> (FCI) merupakan asosiasi internasional yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda yang menaungi Bank dan/atau Lembaga Keuangan pelaku usaha <i>Factoring</i> yang menawarkan solusi <i>cross-border receivables finance</i> kepada membernya untuk mengembangkan bisnis <i>trade finance</i>. Factor Chain International (FCI) is an international association with head office in Amsterdam, Holland that manage the Banks and/or Financial Institutions engage in Factoring that offers cross-border receivables finance solution to its members to develop trade finance business.	2019

SEKILAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

INDONESIA EXIMBANK AT A GLANCE



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan sebagai lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia. Pendirian LPEI berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009. LPEI memiliki fungsi menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam mendorong program ekspor nasional.

Indonesia Eximbank is a specialized financial institution owned by the Government of the Republic of Indonesia that was established pursuant to the Law No. 2 of 2009. Indonesia Eximbank has the functions to implement the National Export Financing (PEN), which aims to support the Government's policy in promoting the national export programs.

Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) disalurkan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi yang diberikan kepada badan usaha termasuk perseorangan berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Juga kepada badan usaha yang berdomisili di dalam, maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia dan termasuk perorangan. Penyaluran PEN oleh LPEI dapat dilakukan baik secara konvensional, maupun berdasarkan prinsip syariah.

The National Export Financing is disbursed in the form of Financing, Guarantee, and/or Insurance to enterprises, both legal and non-legal entities, including individuals who are domiciled either inside or outside the territory of the Republic of Indonesia. The disbursements of National Export Financing by Indonesia Eximbank are carried out in either conventional financings or on Sharia principles-based.

SEKILAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA INDONESIA EXIMBANK AT A GLANCE

Dalam menjalankan fungsinya, LPEI memiliki tugas untuk:

- Menyalurkan pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi dalam rangka ekspor, maupun menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;
- Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan
- Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/ atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Selain itu, LPEI juga melakukan bimbingan dan Jasa Konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan UU. No. 2/2009.

Dewan Direktur merupakan organ tertinggi di LPEI. Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

Kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana. Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun. Modal tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

In carrying out its functions, the duties of Indonesia Eximbank are as follows:

- Disbursement of financing, guarantee and/or insurance for exports or producing goods and services and/or other businesses supporting export;
- Providing financing for the transactions or projects that falls into the category that cannot be financed by banks, but has the prospects to increase the national exports; and
- Assisting in overcoming the barriers encountered by the Banks or Financial Institutions in providing financing for Exporters that are commercially potential and/or important in Indonesia's economic development.

Indonesia Eximbank also provides Advisory Services to the Banks, Financial Institutions, Exporters, export goods producers, particularly in the micro, small and medium enterprises segment, and cooperatives; and carries out other activities that support the duties and authorities of Indonesia Eximbank that are in line with Law No. 2/2009.

The Board of Directors is the sole organ of Indonesia Eximbank. The Board of Directors is responsible for formulating and establishing policies, as well as supervising the operations of Indonesia Eximbank.

The Executive Director performs Indonesia Eximbank's operational activities, and is assisted by a maximum of 5 (five) Managing Directors. The initial capital of Indonesia Eximbank was set at a minimum of Rp4.00 trillion. The capital consists of state treasury that is separated and is not divided into shares.



BIDANG USAHA BERDASARKAN DASAR HUKUM PENDIRIAN

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON LEGAL BASIS OF ESTABLISHMENT

Kegiatan usaha Lembaga sesuai mandat Undang-Undang No. 2/2009, LPEI dibentuk untuk mendukung Program Ekspor nasional dengan memberikan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang terdiri dari penyediaan Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi. Bidang usaha yang dijalankan adalah:

- a. Pembiayaan yang diberikan dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor dan/atau pembiayaan investasi ekspor.
- b. Penjaminan yang diberikan dapat berupa:
 - Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
 - Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
 - Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan
 - Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.
- c. Asuransi dapat diberikan dalam bentuk:
 - Asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
 - Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
 - Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dapat memberikan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan prinsip syariah.

Di samping memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada nasabah, LPEI dapat melakukan bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, serta

As mandated by Law No. 2/2009, Indonesia Eximbank was established to support the National Export Program by providing the National Export Financing (PEN), which consists of Financing, Guarantee and/or Insurance. Therefore, the business sectors carried out are:

- a. The financing disbursements are provided in the form of export working capital financing and investment export financing.
- b. The guarantees are provided in the form of:
 - Guarantee for Indonesian exporters on payments received from the overseas buyer of goods and/or services;
 - Guarantee for Indonesian importer of goods and services abroad for the payment of which has been provided to Indonesian exporters to finance export contracts on the sale of goods and/or services or fulfilment of work or services carried out by the Indonesian companies;
 - Guarantee to Bank's partner in providing financing export transaction that has been provided to the Indonesian Exporters; and/or
 - Guarantee in the framework of tenders related to the implementation of projects that partly or entirely support export activities.
- c. Insurances are provided in the form of:
 - Insurance to cover the risk of failure on export;
 - Insurance to cover the risk of payment failure;
 - Insurance to cover the investment by Indonesian companies abroad, and/or
 - Insurance to cover the political risk in the country's export destinations.

Other than conventional business activities, Indonesia Eximbank also provides the National Export Financing of the Sharia principles-based.

Apart from providing financing, guarantee, and insurance to customers, Indonesia Eximbank also provides mentoring and advisory services to Banks, Financial Institutions, exporters, export goods manufacturers, as well as carries

BIDANG USAHA BERDASARKAN DASAR HUKUM PENDIRIAN BUSINESS ACTIVITIES BASED ON LEGAL BASIS OF ESTABLISHMENT

melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor (Eximbank) di negara lain antara lain penyediaan *Counter Guarantee* (kontra garansi), *Joint Guarantee* (penjaminan bersama), pembiayaan substitusi impor, serta pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

LPEI dapat menjalankan Penugasan Khusus Pemerintah atau *National Interest Account*, yaitu penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Sumber dana LPEI diperoleh dari:

- Penerbitan surat berharga;
- Pinjaman jangka pendek, menengah, dan/ atau panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank dan serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam, maupun luar negeri, dan Pemerintah;
- Hibah;
- Penempatan dana oleh Bank Indonesia; dan
- Penyertaan Modal Negara.

out other activities commonly conducted by the Export Financing Institution (Eximbank) in other countries, among others counter guarantee, joint guarantee, import substitution financing, as well as imports of raw materials financing implemented to meet the national needs.

Indonesia Eximbank is also able to carry out the Government Special Assignment or the National Interest Account. This is an assignment from the government to Indonesia Eximbank to provide Export Financing for transactions or projects that are commercially difficult to implement, but considered necessary by the Government to support the export policies or programs.

Indonesia Eximbank source of funds can be obtained from:

- The issuance of securities/bonds;
- Short-term, medium and/or long-term borrowings from foreign governments, multilateral institutions, banks and financial institutions, and the Government;
- Grants;
- Placements by Bank Indonesia, and;
- Government Capital Injection

PRODUK DAN JASA PRODUCTS AND SERVICES



PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE)
 - a. *Cash Loan/Financing*;
 - b. *Non Cash Loan/Financing*
2. Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE);
3. Produk Pembiayaan Lain:
 - a. *Trade Finance*;
 - b. *Buyer's Credit*;
 - c. Plasma Perkebunan;
 - d. Plasma Pertambakan;
 - e. *Supply Chain Financing*;
 - f. Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE); dan
 - g. Kredit Usaha Rakyat di Luar Negeri (KURLN).
4. Akad Syariah Produk Pembiayaan Ekspor Nasional, antara lain:
 - a. Akad Murabahah;
 - b. Akad Musyarakah;
 - c. Akad Musyarakah Mutanaqishah;
 - d. Akad Ijarah Munthahiya Bittamlik (IMBT);
 - e. Akad Wakalah bil Ujah dan Qardh;
 - f. Akad Hawalah bil Ujah; dan
 - g. Akad Kafalah bil Ujah.

PENJAMINAN

- Penjaminan Proyek;
- Jaminan Kepabeanan; dan
- Penjaminan Kredit/Pembiayaan
 - *Sovereignty Basis*;
 - *Commercial Basis*.

ASURANSI

- Proteksi Piutang Dagang;
- *Marine Cargo*; dan
- Asuransi Investasi Luar Negeri.

JASA KONSULTASI

1. Pelatihan Ekspor (*Coaching Program for New Exporter - CPNE*);
2. *Marketing Handholding*;

FINANCING

1. Export Working Capital Financing (PMKE)
 - a. *Cash Loan/Financing*;
 - b. *Non-Cash Loan Financing*
2. Export Investment Financing (PIE);
3. Other Financing Products:
 - a. *Trade Finance*;
 - b. *Buyer's Credit*;
 - c. *Plantation Plasma*;
 - d. *Aquaculture Plasma*;
 - e. *Supply Chain Financing*;
 - f. *Export Oriented Microfinancing (KURBE)*; and
 - g. *Overseas Microfinancing (KURLN)*.
4. National Export Financing Product Sharia Contract, such as:
 - a. *Murabahah Contract*;
 - b. *Musyarakah Contract*;
 - c. *Musyarakah Mutanaqishah Contract*;
 - d. *Ijarah Munthahiya Bittamlik (IMBT) Contract*;
 - e. *Wakalah bil Ujah and Qardh Contract*;
 - f. *Hawalah bil Ujah Contract*; and
 - g. *Kafalah bil Ujah Contract*.

GUARANTEE

- Project Guarantee;
- Custom Bond; and
- Credit Guarantee/Financing
 - *Sovereignty Basis*;
 - *Commercial Basis*.

INSURANCE

- *Trade Credit Insurance*;
- *Marine Cargo*; and
- *Overseas Investment Insurance*.

ADVISORY SERVICES

1. Export Coaching (*Coaching Program for new Exporter - CPNE*);
2. *Marketing Handholding*;

PRODUK DAN JASA PRODUCTS AND SERVICES

3. *Community Development* (Desa Devisa); dan
4. Rumah Ekspor.

PROGRAM KEMITRAAN

PENUGASAN KHUSUS DAN PENUGASAN PEMERINTAH LAINNYA

Penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung Program Ekspor Nasional atas biaya Pemerintah.

3. *Community Development* (Desa Devisa); and
4. Export Enabler.

PARTNERSHIP PROGRAM

NATIONAL INTEREST ACCOUNT AND OTHER ASSIGNMENTS

Special assignment of the Government to support the National Export Program upon the expense of the Government.

JEJAK LANGKAH

MILESTONES



Pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan UU No. 2/2009 dan membubarkan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

The Government of Indonesia established the Indonesian Export Financing Institution (Indonesia Eximbank) under Act No. 2/2009 and dissolved PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

LPEI meluncurkan program Pendidikan Calon Pegawai angkatan I sebagai salah satu strategi pemenuhan SDM Lembaga.

Indonesia Eximbank launched the first batch of Employees Candidate Education as one of the strategies to address the Institution's HR fulfilment.

Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,00 triliun kepada LPEI untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya dalam mendukung program ekspor nasional.

The Government granted the State Capital Participation of Rp1.00 trillion to Indonesia Eximbank to increase the capacity of its business activities in supporting the national export programs.

2009

2010

2011

2012

2014

- Penerbitan obligasi pertama, Obligasi Indonesia Eximbank I, senilai Rp3,00 triliun.
- Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2,00 triliun.
- The first bond issuance, Indonesia Eximbank I Bonds, amounted to Rp3.00 trillion.
- State Capital Participation amounted to Rp2.00 trillion.

- LPEI menerbitkan *Euro Medium Terms Notes (EMTN) Programme 2012 Reg. S Only* senilai USD500 juta.
- LPEI memberi fasilitas *Overseas Project Financing* pertama kepada PT Waskita Karya atas proyek pembangunan bandara Suai Timor Leste.
- Indonesia Eximbank issued Euro Medium Terms Notes (EMTN) Programme 2012 Reg. S Only amounted to USD500 million.
- Indonesia Eximbank provided the first Overseas Project Financing to PT Waskita Karya for the development of Suai Timor Leste airport

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp4,00 triliun yang terdiri atas Rp2,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2,00 triliun untuk penugasan khusus.
- LPEI mendapatkan Penugasan Khusus dari pemerintah sebagai berikut:
 - pembiayaan ekspor gerbong penumpang kereta api.
 - pembiayaan ekspor pesawat udara.
 - mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika.
- The government provided the State Capital Participation of Rp4.00 trillion, consisted of Rp2.00 trillion for operational capacity improvement and Rp2.00 trillion for the National Interest Account.
- Indonesia Eximbank received the National Interest Account for:
 - export financing for the passengers' train carriages.
 - export financing of aircrafts.
 - fostering export to the African countries.

- LPEI menerima Penugasan Khusus Ekspor Pesawat Udara.
- Meluncurkan *National Export Dashboard*.
- Meluncurkan *University Network for Indonesia Export Development (UNIED)*.
- Indonesia Eximbank received the Export National Interest Account for Aircrafts.
- Launching National Export Dashboard.
- Launching University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

2015

2016

2017

2018

- LPEI meluncurkan *Coaching Program for New Exporters (CPNE)*.
- LPEI meluncurkan produk asuransi baru, *Marine Cargo Insurance* untuk memberikan perlindungan atas pengiriman barang ekspor.
- Melalui program *Corporate Social Responsibility*, LPEI berkontribusi dalam Program Penghijauan Berbasis *Agroforestry* dengan menanam 10 ribu bibit pohon Sengon di Wonogiri, Jawa Tengah.
- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,00 triliun kepada LPEI untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya dalam mendukung program ekspor nasional.
- LPEI menerima Penugasan Khusus Ekspor kereta ke Bangladesh
- Indonesia Eximbank launched Coaching Program for New Exporters (CPNE).
- Indonesia Eximbank launched a new insurance product, Marine Cargo Insurance to provide protection for the delivery of export goods.
- Through its Corporate Social Responsibility, Indonesia Eximbank contributed to the Agroforestry-Based Green Program by planting 10 thousand of sengon tree seedlings in Wonogiri, Central Java.
- The Government granted the State Capital Participation of Rp1.00 trillion to Indonesia Eximbank to increase the capacity of its business activities in supporting the national export programs.
- Indonesia Eximbank received the Export National Interest Account for train carriages to Bangladesh.

- LPEI meluncurkan fasilitas KURBE (Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor) sebagai dukungan terhadap paket kebijakan ekonomi jilid XI.
- LPEI membuka Kantor Pemasaran di Batam dan Denpasar sebagai upaya untuk menjangkau potensi ekspor UKM di wilayah Sumatera dan Bali.
- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3,20 triliun yang terdiri atas Rp1,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2,20 triliun untuk penugasan khusus.
- Indonesia Eximbank launched the Export Oriented Small Business Loan (KURBE) facility in support of the Government's economic policy package series XI.
- Indonesia Eximbank established the Marketing at Batam and Denpasar in an effort to reach the export potential of SMEs in Sumatra and Bali.
- The Government granted the State Capital Participation of Rp3.20 trillion of which Rp1.00 trillion to increase business capacity and Rp2.00 trillion for the National Interest Accounts.

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

- Penerimaan PMN total sebesar Rp10 triliun untuk penugasan umum, Penugasan Khusus Ekspor dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Terlibat dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19 melalui:
 - Restrukturisasi debitur yang terdampak Covid-19
 - Program JAMINAH (Penjaminan Pemerintah)
- Penerimaan Penugasan Khusus Ekspor (NIA) dari Pemerintah, sebagai berikut:
 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
 - UKM berorientasi ekspor
 - Industri Penerbangan
 - PKE Trade Finance
- Received State Capital Participation of Rp10 trillion for general assignments, Export National Interest Accounts and National Economic Recovery Programs.
- Engaged in Accelerating National Economic Recovery due to the COVID-19 Pandemic through:
 - Restructuring debtors affected by Covid-19
 - JAMINAH Program (Government Guarantee)
- Indonesia Eximbank received the National Interest Account for:
 - Special Economic Zones Development
 - Export-oriented SMEs
 - Aviation Industry
 - NIA Trade Finance

- LPEI meluncurkan Program “Rumah Ekspor”.
- LPEI mendirikan anak perusahaan pertama PT Indonesia Eximbank Prima Aset.
- LPEI meluncurkan program *X-Way of Working (XWOW)*.
- LPEI meluncurkan *corporate culture* baru APIK (*Agile, Profesionalisme, Integritas, Kreatif*).
- Indonesia Eximbank launched “Rumah Ekspor” Program.
- Indonesia Eximbank established first subsidiary PT Indonesia Eximbank Prima Aset.
- Indonesia Eximbank launched X-Way of Working (XWOW) program.
- Indonesia Eximbank launched new corporate culture APIK (*Agile, Professionalism, Integrity, Creative*).

2019

2020

2021

2022

- Peresmian lokasi kantor pusat LPEI ke Prosperity Tower, SCBD, Jakarta.
- Peluncuran “Desa Devisa”, program Jasa Konsultasi dalam bentuk pengembangan masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekspor, dengan Desa Devisa pertama: Desa Devisa Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) dan Desa Devisa Koperasi Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI).
- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2,50 triliun yang terdiri atas Rp1,50 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1,00 triliun untuk penugasan khusus.
- LPEI menerima Penugasan Khusus Ekspor Pariwisata.

- Inauguration of the relocation of Indonesia Eximbank head office in Prosperity Tower, SCBD, Jakarta.
- The launch of “Desa Devisa”, an Advisory program on community development aimed at increasing exports, with the first Desa Devisa: Kerta Semaya Samaniya Cooperative Desa Devisa (KSS) and Indonesian People’s Handicraft Industry Development Association Cooperative Desa Devisa (APIKRI).
- The Government granted State Capital Participation of Rp2.50 trillion, consisted of Rp1.50 trillion to increase business capacity and Rp1.00 trillion for the National Interest Accounts.
- Indonesia Eximbank received the Export National Interest Accounts for Tourism.

Penerimaan PMN total sebesar Rp5 triliun untuk penugasan umum dan Penugasan Khusus Ekspor.

Received State Capital Participation of Rp5 trillion for general assignments and Export National Interest Accounts.



VISI, MISI & NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION & CORPORATE VALUE

Visi Vision

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.

To become an Eximbank that is credible and excels in promoting national export with high competitiveness on the global level.

Penjelasan Pernyataan Visi

- LPEI memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai mana diamanatkan dalam UU No. 2/2009 dan memposisikan LPEI menjadi mitra ekonomi global yang dapat dipercaya.
- LPEI ikut berperan dalam menjadikan eksportir Indonesia sebagai pelaku usaha yang disegani di tataran global, karena mampu menghasilkan produk dan jasa ekspor yang berkelas dunia.

Explanation of Vision Statement

- Indonesia Eximbank has a role in promoting Indonesian exporters as capable business players in the global markets with world-class export products and services.
- Indonesia Eximbank has the roles in promoting Indonesian exporters as respectful business players in the global markets with world-class export products and services.

Misi Mission

- Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.
- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya

- Encourage the sustainability of conducive business climate for the sustainable growth of national export.
- Provide national export financing services and consultancy services as the solution to the needs of Indonesian export.
- Improve the ability of business perpetrators, including the small and medium enterprises, to produce superior and competitive export-oriented products.

Penjelasan Pernyataan Misi

- LPEI menjadi penggerak dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk menciptakan lingkungan ekspor yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi bernilai tambah terhadap kebutuhan ekspor yang spesifik.
- LPEI mendapatkan mandat untuk menggerakkan pelaku usaha di Indonesia, termasuk usaha kecil dan menengah yang mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor yang berdaya saing.

Explanation of Mission Statement

- Indonesia Eximbank is the driving force in the coordination with other government agencies in the creation of conducive export environment towards sustainable growth of Indonesia's exports.
- Providing high-quality financing, guarantee, insurance and consultation services as a value-added solution to specific export needs.
- Indonesia Eximbank has a mandate to mobilize businesses in Indonesia, including the Small and Medium Enterprise sector, to be capable of producing competitive export-oriented products.

Budaya Kerja Lembaga

Corporate Culture

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Lembaga telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai budaya Lembaga untuk dapat menjadi dasar dan acuan bagi seluruh Eximbanker dalam bersikap dan berperilaku guna mendukung dan meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui proses penyelarasan bersama seluruh Dewan Direktur dan Manajemen serta Pejabat Struktural, yang disebut dengan *Redefining Us* dengan melalui tahapan proses :

1. *Diagnostic Findings & Condition Assessment*
2. *Senior Leaders' Workshop*
3. *Leaders Workshop Detailing*
4. *Small Group Fine-tuning*
5. Persetujuan Rabom

Nilai budaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ditetapkan dalam PDE Nomor 0010/PDE/07/2022 tentang Nilai-Nilai Budaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022. Adapun nilai budaya LPEI adalah APIK (*Agile, Professional, Integritas, Kreatif*) dengan penjelasan sebagai berikut:



AGILE

Setiap Eximbanker harus bertindak secara tangkas, gesit, dan lincah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Each Eximbanker must act with agility to present service excellence to the stakeholders.



PROFESIONAL PROFESSIONAL

Setiap Eximbanker harus bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.

Each Eximbanker must work thoroughly and accurately based on the best competence, full responsibility, and high commitment.



INTEGRITAS INTEGRITY

Setiap Eximbanker harus berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan baik dan benar, serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Each Eximbanker must think, speak, behave, act properly and correctly, and always adhere to the code of ethics and moral principles.



KREATIF CREATIVE

Setiap Eximbanker secara bersama-sama melakukan perbaikan dengan penciptaan gagasan atau terobosan yang solutif guna mendukung pelaksanaan mandat Lembaga

Each Eximbanker collaborates together in order to make improvements by creating solutions or breakthrough ideas to support the implementation of the Institution's mandate.

catatan:

Eximbanker adalah anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, Head of, Pegawai dan setiap insan di dalam organisasi LPEI.

VISI, MISI & NILAI PERUSAHAAN VISION, MISSION & CORPORATE VALUE

Pada penerapannya, Budaya LPEI wajib dimengerti, dipahami, dan diterapkan dengan baik oleh setiap Eximbanker. Lebih lanjut, dalam mendukung program penguatan nilai Budaya LPEI dilakukan berdasarkan pilar-pilar penerapan Budaya LPEI antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Budaya eksekusi secara berkolaborasi

Utamakan perilaku disiplin dan fokus dalam mengeksekusi target untuk pelaksanaan mandat Undang-undang dengan mengasah kemampuan secara tepat guna dan tepat sasaran.

2. Budaya berkinerja tinggi

Pencapaian unggul melalui disiplin monitoring kinerja secara sistematis, membangun sistem penilaian kinerja yang dapat diandalkan dan objektif.

3. Budaya sadar tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan

Disiplin taat azas, meningkatkan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional Lembaga serta membangun budaya kesadaran terhadap risiko dan kepatuhan.

4. Budaya pembelajaran berkelanjutan

Pedoman Perilaku yang mengedepankan pembaharuan kapabilitas yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar melalui berbagai metode, seperti *sharing knowledge*, *coaching & mentoring* dengan berbasis kompetensi.

Furthermore, to support the LPEI cultural value strengthening program, it is referred to the pillars of Indonesia Eximbank Culture Implementation which are included in but not limited to:

1. Collaborative execution culture

Prioritize disciplined behavior and focus on executing targets for the implementation of the mandate of the Law (Act of the Republic of Indonesia Number 2 of 2009) by honing skills in an effective and proper manner.

2. Performance driven culture

Excellent achievement through the systematic performance monitoring discipline, building a reliable and objective performance appraisal system.

3. Governance, risk & compliance culture

Adherence to principles, improves compliance with the Institution's operational systems and procedures, and builds awareness culture to risk and compliance.

4. Learning culture

A code of conduct that emphasizes renewal capabilities according to market trends and needs through various methods, such as sharing knowledge, competency-based coaching & mentoring.

ANGGOTA BOARD OF MANAGEMENT

MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT



1 PAUL SETIAWAN HASJIM

Head of Operasional & TI
Head of Operational & IT

2 SALOMI ADRIANA

Plt. Head of Penjaminan & Asuransi
Acting Head of Guarantee & Insurance

3 TITIEK SETIYOWATI

Head of Manajemen Risiko & Kredit
Head of Risk Management & Credit

4 ANWAR HARSONO

Head of Keuangan & Perencanaan Strategis
Head of Finance & Strategic Planning

5 ANTON HERDIANTO

Head of Head of Wilayah
Head of Region

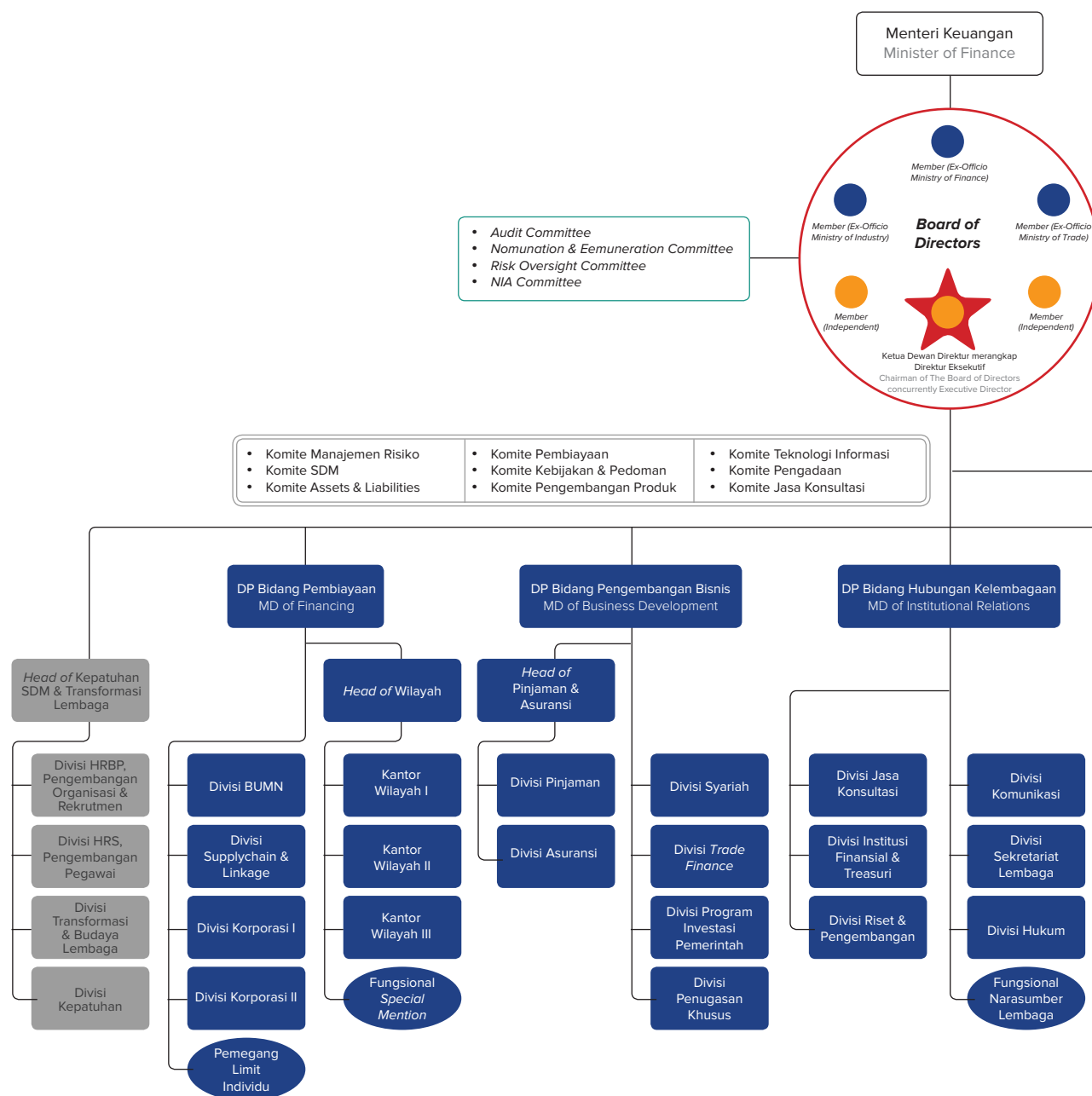
6 WAHYU P. WIBOWO

Head of Kepatuhan, SDM & Transformasi Organisasi
Head of Compliance, HR & TO

7 I NYOMAN GEDE SUARJA

Head of Internal Audit

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE



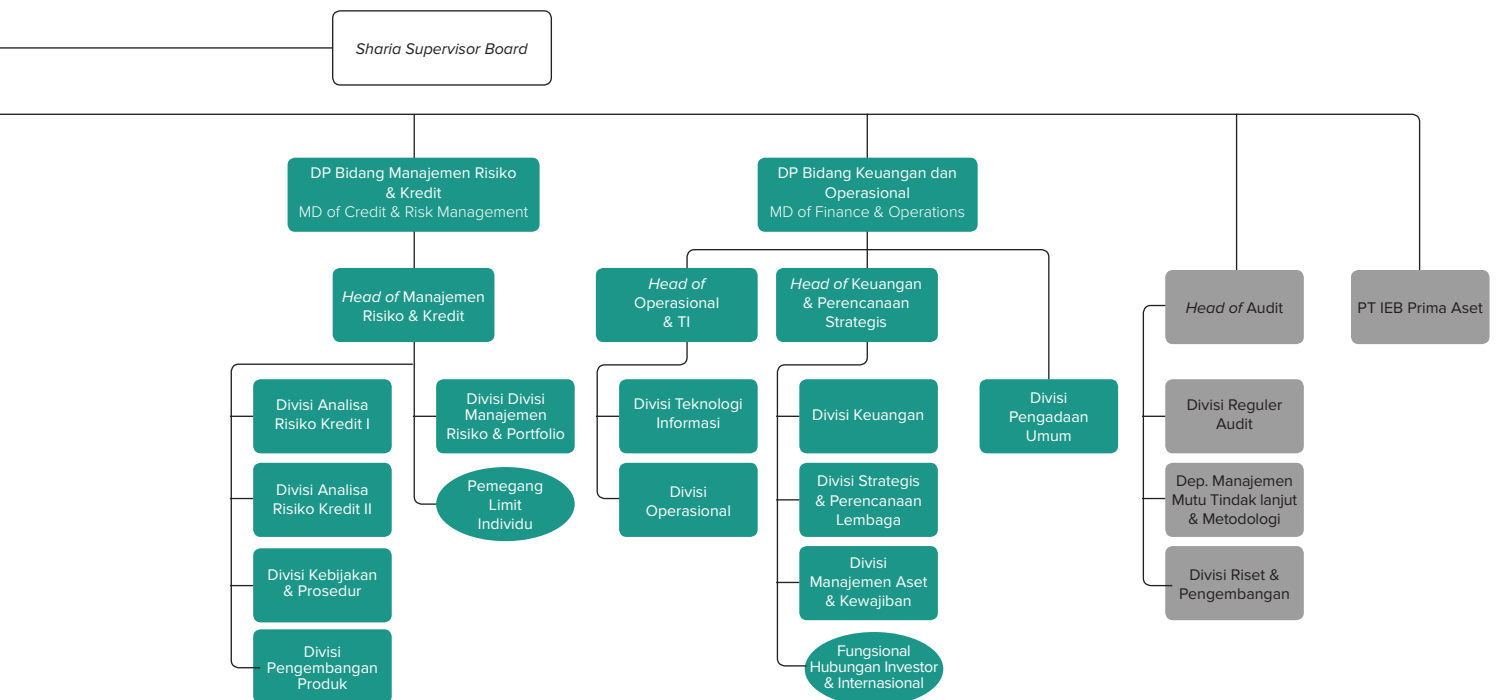
STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE



Struktur Organisasi yang berlaku sampai 31 Desember 2022 sesuai dengan Keputusan Direktur Eksekutif No. 0063/KDE/12/2022 tentang Pembentukan Jabatan *Head of Manajemen Risiko & Kredit*.

Organizational Structure is valid until 31 December 2022 in accordance with Executive Director Decree No. 0063/KDE/12/2022 on the Establishment of the Position of Head of Risk Management & Credit.



PROFIL DEWAN DIREKTUR

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Rijani Tirtoso

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of The Board of Directors concurrently Executive Director

61 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Master of Business Administration University of Illinois At Urbana-Champaign, 1994
- Sarjana (S-1) Keahlian Tanah, Institut Pertanian Bogor, Indonesia, 1984
- Master of Business Administration University of Illinois At Urbana-Champaign, 1994
- Bachelor Degree in Soil Experts, Institute of Agriculture Bogor, Indonesia, 1984

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis

Menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif sejak 7 Januari 2022 berdasarkan KMK No. 552/KMK.06/2021.
Chairman of the Board of Directors and Executive Director since 7 January 2022 pursuant to KMK No. 552/KMK.06/2021.

Pengalaman Kerja Professional Experience

- Anggota Dewan Direktur LPEI (Desember 2019 – 6 Januari 2022) | Member of LPEI's Board of Directors (December 2019 – 6 January 2022)
- Project Advisor of Business Process Reengineering Bank Mandiri (2019)
- SEVP Retail Risk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2019)
- SEVP Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2015)
- Group Head Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008)
- Group Head Corporate Credit Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2008)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan
No concurrent position

Hubungan Afiliasi Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training

- Senior Leader Workshop "Redefining Us", Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 1 April 2022.
- Indonesia Economic Outlook 2023, PT SMI, 20 Desember 2022.
- Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah, Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi, 20 Desember 2022.
- Senior Leader Workshop "Redefining Us", Indonesia Eximbank, 1 April 2022.
- Indonesia Economic Outlook 2023, PT SMI, 20 Desember 2022.
- Training on Sharia Finance Concept and Implementation, Karim Consulting & Economic Society Central Board, 20 Desember 2022.

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Suminto

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

50 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Doktor di bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Ritsumeikan Asia Pacific, Jepang (2012)
- Magister Sains Keuangan Pembangunan dari Universitas Hiroshima, Jepang (2002)
- Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (1995).
- Doctorate degree in Development Economics from Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan (2012)
- Master degree in Development Finance from Hiroshima University, Japan (2002)
- Bachelor degree in International Relations from Airlangga University (1995).

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak tanggal 1 September 2018 berdasarkan KMK No. 554/KMK.06/2018
Member of the Board of Directors since 1 September 2018 pursuant to KMK No. 554/KMK.06/2018

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan RI (Agustus 2021 – Oktober 2022)
- Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional (Oktober 2019-Juli 2021)
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (Juli 2018- Oktober 2019)
- Kepala Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (2020-2021)
- Direktur Eksekutif, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (2019-2021)
- Gubernur dan Ketua Dewan Gubernur, International Fund for Agricultural Development (IFAD) (2019 – 2021)
- Deputi G20 Finance (2019-2021)
- Pelaksana Tugas Direktur Pinjaman dan Hibah (2017-2018)
- Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Februari 2015–Juli 2018)
- Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian (Oktober 2014–Februari 2015)
- Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Januari 2013–Oktober 2014)
- Berbagai penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

- Expert Staff for Financial Services and Capital Market, Ministry of Finance of RI (August 2021-October 2022)
- Expert Staff of Finance Minister for Macro Economy and International Finance (October 2019-July 2021)
- Expert Staff of Finance Minister for Government Expenditures (July 2018-October 2019)
- Head of Secretariat, National Islamic Economic and Finance Committee (KNEKS) (2020-2021)
- Director, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (2019-2021)
- Governor and Chairman of Governing Council Bureau, International Fund for Agricultural Development (IFAD), (2019 – 2021)
- G20 Finance Deputy (2019-2021)
- Acting Director for Loans and Grants, Ministry of Finance (2017-2018)
- Director of Islamic Financing, Directorate General of Financing and Risk Management (February 2015-July 2018)
- Director of Islamic Financing, Directorate General of Debt Management (October 2014-February 2015)
- Deputy Director of Debt Planning and Strategy, Directorate General of Debt Management (January 2013-October 2014)
- Various assignments in the Directorate General of Budget, Directorate General of Treasury, Secretariat General, Directorate General of Debt Management, and Directorate General of Financing and Risk Management.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI (November 2022 – sekarang)
- Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan RI (Agustus 2021 – sekarang)
- Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) (Agustus 2021 - sekarang)
- Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais (2020 - sekarang)
- Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (2020 - sekarang)
- Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (2019 - sekarang)
- Director General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance of RI (November 2022 – present)
- Expert Staff of Finance Minister for Financial Sector Policy (August 2021 - present)
- Executive Secretary, Financial System Stability Committee (KSSK) (August 2021 - present)
- Supervisory Board of Dharmais Hospital (2020 - present)
- Commissioner of National Board of Zakat (Baznas) (2020 - present)
- Commissioner, National Social Security Council (2019 - present)

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

Directorship Program 'High Performance Boards', Pertamina Training & Consulting, 22-25 March 2022

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE**Kasan**

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

56 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Doktor Ilmu Ekonomi Pertanian, di bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2012)
- Magister Manajemen, di bidang Manajemen Internasional dari Universitas Indonesia (1998)
- Sarjana Pertanian di bidang Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya dari Institut Pertanian Bogor (1989)
- Doctorate of Agriculture Economics Science, in Agricultural Economy from Institute of Agriculture Bogor (2012)
- Master of Management, in International Management from University of Indonesia (1998)
- Bachelor of Agriculture, in Agricultural Economy and Resources from Institute of Agriculture Bogor (1989)

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis

Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 8 Juni 2020 berdasarkan KMK No. 274/KMK.06/2020
Member of the Board of Directors since 8 June 2020 pursuant to KMK No. 274/KMK.06/2020

Pengalaman Kerja Professional Experience

- Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Mei 2021 – Mei 2022)
- Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI (April 2020 - Mei 2021)
- Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (2019 – 2020)
- Anggota *Board of Directors International Rubber Consortium Limited* (IRco) – *The International Tripartite Rubber Council* (ITRC), (2018 – 2020)
- Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (Januari 2017 - April 2020)
- Staf Ahli bidang Hubungan Internasional, Kementerian Perdagangan RI (2016)
- Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan, Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (2010-2016)
- Berbagai penugasan di lingkungan Kementerian Perdagangan RI
- Head of Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (May 2021 – May 2022)
- Director General National Export Development, Ministry of Trade of RI (April 2020 - May 2021)
- Member of the Supervisory Board for the Palm Oil Plantations Fund Management Agency, (2019-2020)
- Member of Board of Directors International Rubber Consortium Limited (IRco) – The International Tripartite Rubber Council (ITRC), (2018 – 2020)
- Head of Trade Research & Development of Indonesia (2017-April 2020)
- International Expert Staff, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (2016)
- Director of Centre for Foreign Trade Policy (TREDA), Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (2010-2016)
- Various assignments in the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

Rangkap Jabatan Concurrent Position	Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (Juni 2022 - Sekarang). Head of Trade Policy Agency , Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (June 2022 - present).
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	Directorship Program 'High Performance Boards', Pertamina Training & Consulting, 22-25 March 2022

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE**Arus Gunawan**

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

57 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Sarjana Teknik Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional (1993)
Bachelor of Electrical Engineering, Institute of National Science and Technology (1993)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 25 November 2020 berdasarkan KMK No. 530/KMK.06/2020
Member of the Board of Directors since 25 November 2020 pursuant to KMK No. 530/KMK.06/2020

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (Maret 2020-Januari 2021)
- Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (November 2018-Maret 2020)
- Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, Kementerian Perindustrian RI (Desember 2016-November 2018)
- Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian RI (Januari 2016-Desember 2016)
- Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (2014 – 2016)
- Inspector General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (March 2020-January 2021)
- Inspector I, Inspectorate General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (November 2018-March 2020)
- Director of Industrial Area Development I, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (December 2016-November 2018)
- Director of Machinery and Agricultural Machinery Equipment Industry, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (January 2016-December 2016)
- Secretary to Inspectorat General, the Ministry of Industry of the Republic Indonesia (2014 - 2016)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (2021-sekarang)
Head of Industrial Human Resources Development Agency (2021-present)

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

Sepanjang tahun 2022 tidak mengikuti pelatihan
No training during 2022

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

Felia Salim

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

65 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- The Aspen Institute Fellow, Colorado, USA (2014)
- MIT Sloan School of Management Fellow, USA (2010)
- Georgetown University Fellow, Washington DC, USA (2003)
- Sarjana Fakultas Ekonomi dan Politik, Carleton University, Ottawa Canada (1983)
- The Aspen Institute Fellow, Colorado, USA (2014)
- MIT Sloan School of Management Fellow, USA (2010)
- Georgetown University Fellow, Washington DC, USA (2003)
- Bachelor Degree of Economics and Politic Faculty, Carleton University, Ottawa Canada (1983)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 25 Juli 2018 berdasarkan KMK No. 522/KMK.06/2018
Member of the Board of Directors since 25 July 2018 pursuant to KMK No. 522/KMK.06/2018

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- Wakil Direktur Utama/Direktur Transformasi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (2006–2015)
- Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang bertanggungjawab memimpin Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan (2003-2005)
- Ketua Komite sekretariat keuangan berlanjut sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2002)
- Direktur Bursa Efek Jakarta (1994-1999)
- Vice President Director/Transformation Director of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (2004–2015)
- Independent Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk who is responsible for leading the Risk and Compliance Management Committee (2003-2005)
- Chairperson of the financial secretariat committee and as Deputy Chairperson of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2002)
- Director of Jakarta Stock Exchange (1994-1999)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Anggota Dewan Direktur dan AndGreen Fund (2017 - sekarang)
Member of the Board of Directors and AndGreen Fund (2017 - present)

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

- Webinar Nasional dengan topik 'Perempuan Tangguh dalam Ekspor Berkelanjutan, Road to W20: Setara Bangkit Bersama', Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, May 20, 2022. | National Webinar with the topic 'Resilient Women in Sustainable Exports, Road to W20: Rises Together Equally', Indonesia Eximbank, 20 May 2022.
- *Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable*, G20 Indonesia, 14 July 2022, Ministry of Finance, Indonesia
- *G20 Infrastructure Dialogue: Leveraging Private Sector Participation in Sustainable Infrastructure Investment*, G20 Indonesia 15 July 2022. *The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), D20 Long-Term Investors Club and Global Infrastructure Hub (GIH).*

PROFIL DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE**D. James Rompas**

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

64 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Sarjana Ekonomi, Universitas Jayabaya, Jakarta (1984).
Bachelor Degree of Economics, University of Jayabaya, Jakarta (1984).

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur berdasarkan No. KMK 552/KMK.06/2021 (Januari 2022 – sekarang)
Serves as Member of the Board of Directors since January 2022 pursuant to KMK No. 552/KMK.06/2021

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (23 Desember 2019 – 6 Januari 2022)
- Wakil Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga (2006-2016) | Vice President Director PT Bank CIMB Niaga (2006-2016)
- Direktur Bisnis PT Bank Niaga (2000-2006) | Business Banking Director PT Bank Niaga (2000-2006)
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Niaga (1999-2000) | Risk Management Director PT Bank Niaga (1999-2000)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Komisaris Utama PT IEB Prima Aset (Januari 2022 – sekarang)
President Commissioner of PT IEB Prima Aset (January 2022 – present)

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

Sepanjang tahun 2022 tidak mengikuti pelatihan
No training during 2022

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA

MANAGING DIRECTORS' PROFILE



Dikdik Yustandi

Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan
Managing Director of Financing

60 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background

- *Magister Manajemen*, Universitas Satyagama, Jakarta (1997)
- Sarjana Perikanan, Institut Pertanian Bogor (1987)
- Master of Management, University of Satyagama, Jakarta (1997)
- Bachelor degree, Fishery Faculty, Institute of Agriculture Bogor (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis

Menjabat sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0010/KDD/08/2019
Serves as Managing Director since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0010/KDD/08/2019

Pengalaman Kerja Professional Experience

- Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 Januari 2022 - Sekarang)
- Direktur Pelaksana I Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (1 Sept 2019 – 31 Desember 2021)
- Direktur Pelaksana II Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (29 Mar 2019 – 31 Agustus 2019)
- *Senior Executive Vice President Large Corporate Banking, Corporate Banking*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Maret 2018 - 28 Maret 2019)
- Komisaris, Bank Mandiri Syariah (15 Januari 2018 - 29 Maret 2019)
- *Advisor*, Bank Mandiri Syariah (Mei 2018 - 13 Desember 2018)
- *Senior Vice President Corporate Banking 2*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Februari 2016 - 26 Maret 2018)
- *Director Marketing and Distribution* PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Oktober 2014 - Febuari 2016)
- *General Manager* Bank Mandiri Group Hong Kong, Corporate Banking III, • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Desember 2010 - Oktober 2014)
- *Regional Manager VIII Surabaya*, Regional Network Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Januari 2010 - November 2010)
- Managing Director of Financing, Indonesia Eximbank (1 January 2022 - Present)
- Managing Director I, Indonesia Eximbank (1 September 2019 – 31 December 2021)
- Managing Director II, Indonesia Eximbank (29 Maret 2019 – 31 August 2019)
- Managing Director LPEI (29 March 2019 - 31 August 2019)
- Senior Executive Vice President Large Corporate Banking, Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (March 2018 - 28 March 2019)
- Komisaris, Bank Mandiri Syariah (15 January 2018 - 29 March 2019)
- Advisor, Bank Mandiri Syariah (May 2018 - 13 December 2018)
- Senior Vice President Corporate Banking 2, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Feb 2016 - 26 March 2018)
- Director Marketing and Distribution PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (October 2014 - February 2016)
- General Manager Bank Mandiri Group Hong Kong, Corporate Banking III, PT Bank Mandiri (Persero) Tb. (December 2010 - October 2014)
- Regional Manager VIII Surabaya,

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE

Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• Mandiri <i>Investment</i> Forum, PT Bank Mandiri, 09 February 2022 • Pelatihan Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, 11 Februari 2022 • FGD Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis PKE, Kementerian Keuangan, 18 Februari 2022 • FGD Kuliner Siap Ekspor dalam Rangka Mendukung Program Indonesia <i>Spice Up The World</i>, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 24 Maret 2022 • <i>Senior Leader Workshop "Redefining Us"</i>, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 01 April 2022 • Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah, Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Islam, December 22, 2022 • Mandiri Investment Forum, PT Bank Mandiri, 09 February 2022 • Training on Procedures for Filling E-LHKPN Applications, Corruption Eradication Commission, 11 February 2022 • FGD Discusses NIA Strategic Plan Preparation, Ministry of Finance, 18 February 2022 • FGD Culinary Ready for Export in Support of Indonesia Spice Up the World Program, Indonesia Eximbank, 24 March 2022 • Senior Leader Workshop "Redefining Us", Indonesia Eximbank, 01 April 2022 • Training on Sharia Finance Concept and Implementation, Karim Consulting & Central Board of Islamic Economic Society, 22 December 2022

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE

Maqin U. Norhadi

Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis
Managing Director of Business Development

52 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Master of Management, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1999)
Master of Management, University of Gajah Mada, Yogyakarta (1999)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

Menjabat sebagai Direktur Pelaksana sejak 12 April 2021 berdasarkan KDD No. 0004/KDD/04/2021
Serves as Managing Director since 12 April 2021 pursuant to KDD No. 0004/KDD/04/2021

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 Januari 2022 - Sekarang)
- Direktur Pelaksana II, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (12 April 2021 - 31 Desember 2021)
- Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Mei 2020 – Februari 2021)
- Ketua Komite Manajemen Risiko PT Kereta Commuter Indonesia (Juni 2020 – Februari 2021)
- Presiden Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia (Juni 2020 – Februari 2021)
- Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Februari 2020 – Mei 2020)
- Direktur Regional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (March 2016 - April 2020)
- Managing Director of Business Development, Indonesia Eximbank (1 Januari 2022 - Present)
- Managing Director, Indonesia Eximbank (12 April 2021 - 31 December 2021)
- Managing Director of Commerce PT Kereta Api Indonesia (Persero) (May 2020 – February 2021)
- Chairman of Risk Management Committee PT Kereta Commuter Indonesia (June 2020 – February 2021)
- President Commissioner PT Kereta Commuter Indonesia (June 2020 – February 2021)
- Member of the Board of Commissioner PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (February 2020 – May 2020)
- Director of Regional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (March 2016 – April 2020)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan
No concurrent position

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILEPendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

- *Workshop* Program Kerja 2022 - Penjaminan dan Asuransi, LPEI, 21 Januari 2022.
 - Undangan Narasumber Buisness Gathering ASEI, ASEI, 26 Januari 2022.
 - *Workshop* Program Kerja 2022 – Pembiayaan (Korporasi, BUMN) & Penugasan Khusus 2022, LPEI, 28 Januari 2022.
 - Narasumber acara PKE “Peran LPEI dalam Mendukung Ekspor Nasional/Sosialisasi PMK 183.08/2021, DJPPR, 03 Februari 2022.
 - FGD Perumusan Renstra PKE, DJPPR, 17 Maret 2022.
 - *Senior Leaders Workshop ‘Redefining Us’*, LPEI, 01 April 2022.
 - Narasumber pada Mid-Year Senior Leaders Team Building 2022 dengan tema “APIK Team, EPIC Dream”, LPEI, 12 Agustus 2022.
 - Undangan Mengikuti Seminar “Cara APIK Melawan Fraud & Money Laundering”, LPEI, 23 September 2022.
 - Narasumber dalam acara *9th Indonesia Islamic Economic Forum* dengan tema “Strategi Penguatan Ekosistem Halal Global Dalam Upaya Mendukung Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia”, MES, 07 Oktober 2022.
 - Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah, LPEI, 21 Desember 2022.
 - Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah, Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Islam, 22 Desember 2022.
-
- Work Program Workshop 2022 - Guarantee and Insurance, LPEI, 21 January 2022.
 - Invitation as the Speaker of the ASEI Business Gathering, ASEI, 26 January 2022.
 - Work Program Workshop 2022 – Financing (Corporations, SOEs) & Special Assignments 2022, LPEI, 28 January 2022.
 - PKE event Speaker “The Role of LPEI in Supporting National Exports/PMK Socialization 183.08/2021, DJPPR, 03 February 2022.
 - FGD Formulation of PKE Strategic Plan, DJPPR, 17 March 2022.
 - Senior Leaders Workshop ‘Redefining Us’, LPEI, 01 April 2022.
 - The Speaker at Mid-Year Senior Leaders Team Building 2022 with the theme “APIK Team, EPIC Dream”, LPEI, 12 August 2022.
 - Invitation to attend the seminar “How to Fight Fraud & Money Laundering”, LPEI, 23 September 2022.
 - The Speaker at the 9th Indonesia Islamic Economic Forum with the theme “Strategy to Strengthening the Global Halal Ecosystem in an Effort to Support Indonesia as the Center of the World Sharia Economy”, MES, 07 October 2022.
 - Training on Sharia Finance Concepts and Implementation, LPEI, 21 December 2022.
 - Training on Sharia Finance Concepts and Implementation, Karim Consulting & Central Board of the Islamic Economic Society, 22 December 2022.

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE



Chesna F. Anwar

Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan
Managing Director of Institutional Relations

60 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Sarjana Ekonomi dari University of Maryland, Amerika Serikat (1983)
Bachelor of Economics from University of Maryland, United State, 1983

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

Menjabat sebagai Direktur Pelaksana V sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0014/KDD/08/2019
Serves as Managing Director V since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0014/KDD/08/2019

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 Januari 2022 - Sekarang)
- Direktur Pelaksana V, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (1 Mei 2019 - 31 Desember 2021)
- Direktur Kepatuhan, Standard Chartered Bank Indonesia (2010-April 2019)
- Direktur *Internal Affairs*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006-2010)
- Direktur Kepatuhan, Citibank, N.A. (2004-2005)
- *Senior Compliance Officer*, Citibank, N.A (Juni 2001 – Desember 2004)
- *Security Service Country Manager*, Citibank, N.A (Januari 1997 – Mei 2001)
- *Operation Head, Global Securities Service*, Citibank, N.A (Juli 1994 – Desember 1996)
- *Branch Manager* Pondok Indah & Head Preferred Banking, Bank Universal (Desember 1992 – Juni 1994)
- *Manager Priority Banking*, Standard Chartered Bank (Mei 1991 – Juni 1992)
- *Manager Custodial Services*, Standard Chartered Bank (Mei 1990 – Februari 1991)
- Managing Director of Institutional Relations, Indonesia Eximbank (1 January 2022 - Present)
- Managing Director V, Indonesia Eximbank (1 May 2019 - 31 December 2021)
- Managing Banking Operation, Standard Chartered Bank (Oktober 1989 – Mei 1990)
- Managing Director LPEI (1 May 2019 – present)
- Compliance Director, Standard Chartered Bank Indonesia (2010-April 2019)
- Internal Affairs Director, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006-2010)
- Compliance Director, Citibank, N.A. (2004-2005)
- Senior Compliance Officer, Citibank, N.A (June 2001 – December 2004)
- Security Service Country Manager, Citibank, N.A (January 1997 – May 2001)
- Operation Head, Global Securities Service, Citibank, N.A (July 1994 – December 1996)
- Branch Manager Pondok Indah & Head Preferred Banking, Bank Universal (December 1992 – June 1994)
- Manager Priority Banking, Standard Chartered Bank (May 1991 – June 1992)
- Manager Custodial Services, Standard Chartered Bank (May 1990 – February 1991)
- Managing Banking Operation, Standard Chartered Bank (October 1989 – May 1990)

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE

Rangkap Jabatan Concurrent Position	Sekretaris Lembaga Corporate Secretary
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• <i>Senior Leader Workshop "Redefining Us"</i>, LPEI, 01 April 2022. • <i>Perempuan Tangguh dalam Ekspor Berkelanjutan, Road to W20: Setara Bangkit Bersama</i>, LPEI, 20 Mei 2022. • <i>Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah</i>, Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Islam, 22 Desember 2022. • <i>Senior Leader Workshop "Redefining Us"</i>, LPEI, 01 April 2022. • <i>Resilient Women in Sustainable Exports, Road to W20: Rises Together Equally</i>, LPEI, 20 May 2022. • <i>Training on Sharia Finance Concepts and Implementation</i>, Karim Consulting & Central Board of the Islamic Economic Society, 22 December 2022.

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE

Agus Windiarto

Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional
Managing Director of Finance and Operations
Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit
Acting Managing Director of Risk Management & Credit

59 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- *Master in Business Administration (MBA)*, Middlesex University, London, UK (1998)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1988)
- Master of Business Administration (MBA) from Middlesex University, London, UK (1998)
- Bachelor of Economics from Krisnadwipayana University, Jakarta (1988)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

- Menjabat sebagai Direktur Pelaksana V sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0012/KDD/08/2019
- Merangkap sebagai Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan Kredit sejak tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan KDD No. 0003/KDD/12/2022
- Serves as Managing Director V since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0012/KDD/08/2019
- Concurrent position as Acting Managing Director of Credit & Risk Management since 13 December 2022 pursuant to KDD No. 0003/KDD/12/2022

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 Januari 2022 - Sekarang)
- Direktur Pelaksana III, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (29 Maret 2019 – 31 Desember 2021)
- Plt. Direktur Pelaksana LPEI (Januari-9 Maret 2019)
- Kepala Divisi *Corporate Planning and Finance* LPEI (Januari 2018-Januari 2019)
- Kepala Divisi Akunting dan SIE (Mei 2013-Desember 2017)
- Plt. Kepala Divisi Tresuri (Februari 2013-April 2013)
- Kepala Divisi Manajemen Perencanaan dan Strategis (2011-2013)
- Kepala Divisi Perencanaan, Riset, dan Pengembangan (Februari 2010-Desember 2011)
- Managing Director of Finance & Operation, Indonesia Eximbank (1 Januari 2022 - Present)
- Managing Director III Indonesia Eximbank (29 March-31 August 2019)
- Acting Managing Director III Indonesia Eximbank (January-9 March 2019)
- Head of Corporate Planning and Finance of Indonesia Eximbank (January 2018-January 2019)
- Head of Accounting and SIE Division (May 2013-December 2017)
- Acting as Head of Treasury Division (February 2013-April 2013)
- Head of Planning and Strategic Division (2011-2013)
- Head of Planning, Research and Development Division (February 2010-December 2011)

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE

Rangkap Jabatan Concurrent Position	Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan Kredit Acting Managing Director of Credit & Risk Management
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• Senior Leader Workshop "Redefining Us", LPEI, 01 April 2022. • Monetary and Financial Sector to Support Stability and Recovery, Bank Indonesia, 17 Juli 2022. • Seminar Perluasan Ekspor melalui Pemberian Hibah Kepada Pemerintah/Lembaga Asing, LDKPI, 02 November 2022. • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, BARA, 05 November 2022. • 27th CEO Annual Meeting of The Asian Exim Banks Forum (AEBF), AEBF, 15-17 November 2022. • Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah, Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Islam, 22 Desember 2022. • Senior Leader Workshop "Redefining Us", LPEI, 01 April 2022. • Monetary and Financial Sector to Support Stability and Recovery, Bank Indonesia, 17 July 2022. • Export Expansion Seminar through Provision of Grant to Foreign Governments/ Institutions, LDKPI, 02 November 2022. • Risk Management Certification Level 5, BARA, 05 November 2022. • 27th CEO Annual Meeting of The Asian Exim Banks Forum (AEBF), AEBF, 15-17 November 2022. • Training on Sharia Finance Concepts and Implementation, Karim Consulting & Central Board of the Islamic Economic Society, 22 December 2022.

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE


Henry Sihotang

Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko & Kredit
Managing Director of Credit & Risk Management

62 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Master Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama (2000)
- Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Krisnadwipayana (1987)
- Master of Financial Management, Universitas Satyagama (2000)
- Bachelor of Management Economics, Krisnadwipayana University (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis

Menjabat sebagai Direktur Pelaksana IV sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0014/KDD/08/2019 hingga Diberhentikan Secara Hormat pada tanggal 6 Desember 2022 berdasarkan KDD No. 0002/KDD/12/2022

Serves as Managing Director IV since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0014/KDD/08/2019 until Honorably Dismissed on 6 December 2022 pursuant to KDD No. 0002/KDD/12/2022

Pengalaman Kerja Professional Experience

- Direktur Utama, PT IEB Prima Aset (06 Desember 2022 – saat ini)
- Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko & Kredit, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 September 2019 – 05 Desember 2022)
- Direktur Utama, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (November 2017 – Mei 2019)
- Direktur, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Mei 2014 – Agustus 2019)
- Komisaris Utama, PT PPA Kapital (Juli 2018 – Agustus 2019)
- Komisaris Utama, PT PPA Finance (Februari 2015 – Juni 2018)
- Executive Vice President, Corporate Credit Risk II Group, PT Bank Mandiri (Persero) (Februari 2010 – Mei 2014)
- Komisaris (Rangkap Jabatan), PT Pengelola Investama Mandiri (Oktober 2009 – Juli 2014)
- Non-Executive Director (Rangkap Jabatan), Bank Mandiri European Ltd, London (Juni 2010 – Desember 2012)
- Senior Vice president – Credit Recovery II Group, PT Bank Mandiri (Persero) (November 2008 – Januari 2010)
- Vice President – Loan Workout Department, PT Bank Mandiri (Persero) (April 2006 – Oktober 2008)
- Vice President – Commercial Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) (Oktober 2004 – April 2006)
- Vice President – Operational Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) (Juli 2003 – Oktober 2004)
- Assistant Vice President, CRM – Corporate Credit & Financial Institution, PT Bank Mandiri (Persero) (Agustus 1999-Juli 2003)

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
MANAGING DIRECTORS' PROFILE

	• President Director, PT IEB Prima Aset (06 December 2022 – present) • Managing Director of Credit & Risk Management, Indonesia Eximbank (1 September 2019 – 05 December 2022) • President Director, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (November 2017 – May 2019) • Director, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (May 2014 – August 2019) • President Commissioner, PT PPA Kapital (July 2018 – August 2019) • President Commissioner, PT PPA Finance (February 2015 – June 2018) • Executive Vice President, Corporate Credit Risk II Group, PT Bank Mandiri (Persero) (February 2010 – May 2014) • Commissioner (Concurrent Position), PT Pengelola Investama Mandiri (October 2009 – July 2014) • Non-Executive Director (Concurrent Position), Bank Mandiri Eropcan Ltd, London (June 2010 – December 2012) • Senior Vice president – Credit Recovery II Group, PT Bank Mandiri (Persero) (November 2008 – January 2010) • Vice President – Loan Workout Department, PT Bank Mandiri (Persero) (April 2006 – October 2008) • Vice President – Commercial Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) (October 2004 – April 2006) • Vice President – Operational Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) (July 2003 – October 2004) • Assistant Vice President, CRM – Corporate Credit & Financial Institution, PT Bank Mandiri (Persero) (August 1999-July 2003)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap jabatan No concurrent position
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training	• [Leadership Session] Penguatan Karakter Pemimpin Unggul yang Berakhlak bersama Prof. Dr. Djokosantoso M., LPEI on 11 February 2022 • WEBINAR: Sustainable Finance Discussion, Standard Chartered on 18 March 2022 • Workshop Pelaksanaan Perumusan Budaya LPEI, LPEI on 30 March 2022 • Senior Leaders Workshop 'Redefining Us, LPEI on 1 April 2022 • Perempuan Tangguh dalam Ekspor Berkelanjutan, Road to W20: Setara Bangkit Bersama, LPEI on 20 May 2022 • [Leadership Session] Strengthening the Character of Excellent Leaders with Prof. Dr. Djokosantoso M., LPEI on 11 February 2022 • WEBINAR: Sustainable Finance Discussion, Standard Chartered on 18 March 2022 • LPEI Cultural Formulation Implementation Workshop, LPEI on 30 March 2022 • Senior Leaders Workshop 'Redefining Us, LPEI on 1 April 2022 • Resilient Women in Sustainable Exports, Road to W20: Setara Bangkit Bersama, LPEI on 20 May 2022

PROFIL MANAJEMEN SENIOR

SENIOR MANAGEMENT PROFILE



Salomi Adriana

Plt. *Head of Penjaminan & Asuransi*
Acting Head of Guarantee & Insurance

52 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan Educational Background

- *Magister Manajemen* dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994)
- Master of Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1997)
- Bachelor of Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1994)

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis

KDE No.: KDE 0009/KDE/02/2022 sejak 1 Januari 2022
KDE No.: KDE 0009/KDE/02/2022 since 1 January 2022

Pengalaman Kerja Professional Experience

- Plt. *Head of Penjaminan & Asuransi* (2022)
- Plt. *Head of Penjaminan* (2021)
- Kepala Divisi Asuransi (2021)
- Perangkapan: Plt. *Senior Executive VP I* (2020-2021)
- Kepala Divisi Penjaminan dan Asuransi (2019-2020)
- Pj. Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (Januari 2019-Maret 2019)
- Pj. Kepala Divisi Penjaminan dan Asuransi (2018-2019)
- Kepala Departemen Pengembangan Organisasi dan Sistem Prosedur (Januari 2018-Mei 2018)
- Kepala Departemen Pengembangan SDM (2013-2018)
- Kepala Departemen Hub. Kelembagaan & Pembiayaan FI (2010-2013)
- Pj. Kepala Departemen Pembiayaan Kembali & Hubungan Kelembagaan (2009-2010)
- Act. Head of Guarantee & Insurance (2022)
- Act. Head of Guarantee (2021)
- Head of Insurance Division (2021)
- Concurrently: Act. *Senior Executive VP I* (2020-2021)
- Head of Guarantee and Insurance Division (2019-2020)
- Acting Head of Small, Medium Enterprises and Commercial Financing Division (January 2019-March 2019)
- Acting Head of Guarantee and Insurance Division (2018- 2019)
- Head of Organizational Development and Procedure System Department (January 2018-May 2018)
- Head of HR Development Department (2013-2018)
- Head of Institutional Relations & FI Financing Department (2010-2013)
- Acting Head of Refinancing & Institutional Relations Department (2009-2010)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan
No concurrent position

Hubungan Afiliasi Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan Workshop/Training

- *Senior Leader Team Building*
- Penguatan Budaya Lembaga
- Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian dan Pelaporan LHKPN
- *ESG Trend & Economy Outlook*
- Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Tambahkan translate :
- Senior Leader Team Building
- Strengthening Institutional Culture
- Technical Guidance on LHKPN Completion and Reporting Procedures
- ESG Trend & Economy Outlook
- Concept and Implementation of Sharia Finance of Indonesia Eximbank

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE**Anwar Harsono**

Head of Keuangan & Perencanaan Strategis
Head of Finance & Strategic Planning

50 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- *Magister Finance* dari Cleveland State University (2003)
- *Sarjana Accounting* dari Universitas Trisakti, Jakarta (1997)
- *Master of Finance* dari Cleveland State University (2003)
- *Bachelor of Accounting* from Trisakti University, Jakarta (1997)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

KDE 0064/KDE/09/2020 sejak 1 Oktober 2020
KDE 0064/KDE/09/2020 since October 1st 2020

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- *Head of Keuangan & Perencanaan Strategis*, Indonesia Eximbank (2022)
- *Head of Finance & Strategic Planning*, Indonesia Eximbank (2021)
- *Senior Executive Vice President III*, Indonesia Eximbank (2020 – 2021)
- *Country CFO/Finance Director*, Standard Chartered Bank Indonesia (2018-2020)
- *Head of Finance & Strategy*, Bank CIMB Niaga Tbk (2013-2018)
- *Board of Commissioner Member*, CIMB Niaga Pension Funds (2015-2017)
- *Bankwide Management Acct & Financial Acct Group Head*, Bank CIMB Niaga Tbk (2010-2013)
- *Bankwide Management Acct & Fin Analysis Div Head*, Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2010)
- *Corporate Finance & Analysis Dept Head*, Bank CIMB Niaga Tbk (2004-2008)
- *Accounting, Budget & Financial Analyst*, Astra Otoparts Tbk (1997-2000)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan
No concurrent position

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

- *Senior Leader Team Building*
- *Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian dan Pelaporan LHKPN*
- *ESG Trend & Economy Outlook*
- *Penguatan Budaya Lembaga*
- *Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
- *Senior Leader Team Building*
- *Technical Guidance on LHKPN Completion and Reporting Procedures*
- *ESG Trend & Economy Outlook*
- *Strengthening Institutional Culture*
- *Concept and Implementation of Sharia Finance of Indonesia Eximbank*

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE

Wahyu P. Wibowo

Head of Kepatuhan, SDM & Transformasi Organisasi
Head of Compliance, HR & TO

58 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S2 *Strategic Management* dari Konstanz University (2004)
- S2 Manajemen dari Swiss German University (2004)
- S1 *Social Philosophy* dari STF Driyarkara Jakarta (1991)
- Master of Strategic Management from Konstanz University (2004)
- Master of Management from Swiss German University (2004)
- Bachelor of Social Philosophy from STF Driyarkara Jakarta (1991)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

PJ.0030/HCH/02/2022 (17 Februari 2022 – 16 Februari 2025)
PJ.0030/HCH/02/2022 (February 17th 2022 – February 16th 2025)

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- *Head of Compliance, HR & Transformation Office* (2021)
- *Senior Executive Vice President IV*, Indonesia Eximbank (2020)
- *Managing Director, Chief Learning & Development Officer*, Prudential Life Assurance (2017-2020)
- *EVP, Head of HRBP & Employee Engagement*, CIMB Niaga (2012-2017)
- *Director, Human Capital*, Sinarmas Land (2010-2011)
- *Director, HR & Corp. Affair*, PAM Lyonnaise Jaya (2004-2010)
- *Director, HR & Legal*, Allianz Life Indonesia (2002-2004)
- *General Manager, HR*, Allianz Life Indonesia (2001-2002)
- *Manager, HR*, AXA Indonesia (2000-2001)
- *Supervisor, HR & International Service Personnel Administrator*, General Motors Indonesia (1997-2000)
- *Officer, Industrial Relation*, Excelcomindo Pratama (1995-1996)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan
No concurrent position

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

- *Senior Leader Team Building*
- *Leadership Season: Mengungkap yang Belum Terungkap*
- *ESG Trend & Economy Outlook*
- Penerapan GRC Terpadu (Era - New Normal)
- AML: Cara APIK Melawan *Fraud & Money Laundering*
- Penguatan Budaya Lembaga
- Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Kelas Persiapan Manajemen Risiko Level 5
- Senior Leader Team Building
- *Leadership Season: Uncovering the Untold*
- *ESG Trend & Economy Outlook*
- Implementation of Integrated GRC (Era – New Normal)
- Strengthening Institutional Culture
- Concept and Implementation of Sharia Finance of Indonesia Eximbank
- Basic Class of Risk Management Level 5

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE**Titiek Setiyowati**

Head of Manajemen Risiko & Kredit
Head of Risk Management & Credit

60 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Jember, Jawa Timur (1989)
Bachelor of Agriculture Economics Social from Jember University, East Java (1989)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

PJ No: PJ.0086/HCH/12/2022 (6 Desember 2022 – 31 Desember 2024)
PJ No: PJ.0086/HCH/12/2022 (December 6th, 2022 – December 31st 2024)

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- *Head of Manajemen Risiko & Kredit* (2022)
- *Direktur Utama IEB Prima Aset* (2022)
- *Head of Credit Risk*, Indonesia Eximbank (2021)
- *Senior Executive Vice President VI*, Indonesia Eximbank (2020)
- *Advisory, Coach, Trainer* di Mandiri University Group, PT Bank Mandiri (2019-2020)
- *Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun* | *Chairman of Pension Fund Supervisory Board*, Bank Mandiri 2 (Eks. BDN) – (2016-2020)
- *SVP, Group Head Commercial*, PT Bank Mandiri (2017-2019)
- *SVP, Group Head Policy & Procedure*, PT Bank Mandiri (2015-2016)
- *SVP, Chief Auditor*, PT Bank Mandiri (2010-2014)
- *VP, Dept. Head Corporate Risk*, PT Bank Mandiri (2007-2010)
- *VP, Pemegang Kewenangan Kredit Segmen Commercial Risk* | *Loan Authority Manager of Commercial Risk Segment*, PT Bank Mandiri (2006)
- *VP, Dept. Head Corporate Credit Risk*, PT Bank Mandiri (2004-2005)
- *AVP, Credit Risk Manager*, PT Bank Mandiri (2002-2003)
- *Sr. Credit Risk Manager*, PT Bank Mandiri (1999-2001)
- *ARM*, Bank Dagang Negara (1995-1998)
- *Credit Analyst*, Bank Dagang Negara (1990-1994)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan
No concurrent position

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

- *Senior Leader Team Building*
- *Penguatan Budaya Lembaga*
- *Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
- *Senior Leader Team Building*
- *Strengthening Institutional Culture*
- *Concept and Implementation of Sharia Finance of Indonesia Eximbank*

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE

I Nyoman Gede Suarja
Head of Internal Audit

61 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S2, Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1999)
- S1, *Economy*, Universitas Brawijaya (1987)
- Master of Management, Universitas Gadjah Mada (1999)
- Bachelor Degree, *Economy*, Universitas Brawijaya (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

PJ No: PJ.0094/HCH/12/2021 (1 Januari 2022 – 31 Desember 2022)
PJ No: PJ.0094/HCH/12/2021 (1 January 2022 – 31 December 2022)

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- Direktur, PT Bank Mandiri (Europe) (2016 – 2021)
- Direktur Pelaksana, PT Mandiri Sekuritas (2013 - 2016)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan
No concurrent position

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

- AML: Cara APIK Melawan *Fraud & Money Laundering*
- *New Hire Orientation*
- *Leadership Season*: Mengungkap yang Belum Terungkap
- *ESG Trend & Economy Outlook*
- Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Penerapan GRC Terpadu (*Era - New Normal*)
- Penguatan Budaya Lembaga
- Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- AML: APIK Way to Fight Fraud & Money Laundering
- New Hire Orientation
- Leadership Season: Uncovering the Untold
- ESG Trend & Economy Outlook
- Basic Class and Certification Exam of Risk Management Level 5
- Implementation of Integrated GRC (*Era – New Normal*)
- Strengthening Institutional Culture
- Concept and Implementation of Sharia Finance of Indonesia Eximbank

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE**Paul Setiawan Hasjim**

Head of Operasional & TI
Head of Operational & IT

63 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S2, Administrasi Bisnis, RMIT University (2002)
- S1, Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer, Jakarta (1986)
- Master of Business Administration, RMIT University (2002)
- Bachelor of Informatics Management, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer (1986)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

PJ No. 0005/SV4/03/2021 (15 Maret 2021 – 14 Maret 2023) dan KDE 0009/KDE/09/2022 Sejak 1 Januari 2022

PJ No. 0005/SV4/03/2021 (March 15th 2021 - March 14th 2023) and KDE 0009/KDE/02/2022 since 1 January 2022

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- *Head of Operation & IT*, Indonesia Eximbank (2021)
- *Head of IT & Operations*, Rabobank International (2018-2021)
- *IT Advisor to Director of IT*, BPJS Ketenagakerjaan (2016 – 2017)
- *Director of Operations & IT*, Commonwealth Bank (2013-2016)
- *Chief of Operations & IT*, Commonwealth Bank (2012-2013)
- *Executive IT Consultant*, PT Jasa Cendikia (2012)
- *Operations & IT Director*, Bank CIMB Niaga (2008-2012)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan
No concurrent position

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

- *Senior Leader Team Building*
- *Leadership Season: Mengungkap yang Belum Terungkap*
- *AML: Cara APIK Melawan Fraud & Money Laundering*
- *ESG Trend & Economy Outlook*
- *Penguatan Budaya Lembaga*
- *Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
- *Senior Leader Team Building*
- *Leadership Season: Uncovering the Untold*
- *AML: APIK Way to Fight Fraud & Money Laundering*
- *ESG Trend & Economy Outlook*
- *Strengthening Institutional Culture*
- *Concept and Implementation of Sharia Finance of Indonesia Eximbank*

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE

Anton Herdianto

Head of Wilayah
Head of Region

54 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S2, Keuangan & Akuntansi, Universitas Indonesia (2001)
- S1, Akuntansi, Universitas Padjajaran (1993)
- Master of Accounting & Finance, Universitas Indonesia (2001)
- Bachelor of Economy, Universitas Padjajaran (1993)

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Basis

KDE No.: KDE 0041/KDE/06/2022
KDE No.: KDE 0041/KDE/06/2022

Pengalaman Kerja
Professional Experience

- *Chief Finance Office*, PT Aneka Tambang (2019-2021)
- *SEVP Finance*, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (2018 – 2019)
- *SVP Head of SME Business*, PT Bank Mandiri (2017 – 2018)
- *SVP Head of Strategy & Performance Management*, PT Bank Mandiri (2014 – 2017)
- *Chief Finance Office*, PT Mandiri Tunan Finance (2010 – 2014)
- *VP Change Management Office*, PT Bank Mandiri (2006 – 2010)
- *AVP Corporate Development Group*, PT Bank Mandiri (2005 – 2006)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan
No concurrent position

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan/Pelatihan
Workshop/Training

- *Senior Leader Team Building*
- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko
- *ESG Trend & Economy Outlook*
- Penguatan Budaya Lembaga
- Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Kelas Persiapan Manajemen Risiko Level 5
- Senior Leader Team Building
- Refreshment for Risk Management Certification
- ESG Trend & Economy Outlook
- Strengthening Institutional Culture
- Concept and Implementation of Sharia Finance of Indonesia Eximbank
- Basic Class of Risk Management Level 5

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILEKomposisi Manajemen Senior per 31 Desember 2022
Senior Management Composition as of 31 December 2022

No	Nama, Umur Name, Age	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Jabatan Sebelumnya Previous position	Jenjang Pendidikan Education
1	Sumarno, 51	Kepala Divisi <i>Transformation Office</i> Head of Transformation Office Division	2 Juli 2021 2 July 2021	Kepala Divisi Kepatuhan Head of Compliance Division	S2, Ilmu Manajemen Master Degree, Management Science
2	Rudi Rinardi, 50	Kepala Divisi Restrukturisasi Aset II Head of Assets Restructuring II Division	29 Desember 2021 29 December 2021	Kepala Divisi Restrukturisasi Aset III Head of Assets Restructuring III Division	S1, Administrasi Niaga Bachelor Degree, Commerce Administration
3	T. Dyza Rovina Aziz Rochadi, 51	Kepala Divisi <i>Office of The Board</i> Head of Office of The Board Division	1 Juli 2020 1 July 2020	Kepala Divisi Trade Finance Head of Trade Finance Division	S2, Keuangan dan Perbankan Master Degree, Finance and Banking
4	Sunu Widi Purwoko, 51	Fungsional Narasumber Lembaga Knowledge Retainer Specialist	20 Mei 2022 20 May 2022	Kepala Divisi Hukum Head of Legal Division	S2, Ilmu Hukum Master Degree, Law Science
5	Alexander Halim, 53	Kepala Kantor Cabang Medan Acting Head of Branch Office Medan	11 April 2022	VP <i>Commercial Banking</i> area Sumatera I Sumatra I Team Head Commercial Banking	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
6	Yoseph Tri Purnomosidi, 53	Kepala Divisi Litigasi I Head of Litigation I Division	29 Desember 2021 29 December 2021	Kepala Divisi Restrukturisasi Aset II Head of Assets Restructuring II Division	S2, Manajemen Master Degree, Management
7	Emalia Tisnamisastra, 51	Kepala Divisi Institusi Finansial & Tresuri Head of Financial Institution & Treasury Division	1 Oktober 2022 1 October 2022	Kepala Divisi <i>Middle Office Treasury</i> Head of Middle Office Treasury Division	S1, Ekonomi Bachelor Degree, Economics
8	Eka Achdiatna Supriana, 43	Fungsional <i>Business Finance</i> Business Finance Specialist	1 Oktober 2022 1 October 2022	<i>Decision Support</i> Direktorat II Decision Support Directorate II	S2, Keuangan Master Degree, Applied Finance
9	Wahyu Bagus Yuliantok, 45	Pj. Kepala Divisi Penugasan Khusus Head of Special Financing Division	11 Mei 2022 11 May 2022	<i>Team Leader</i> Penugasan Khusus Special Financing Team Leader	S1, Teknik Sipil Bachelor Degree, Civil Engineering
10	Maryani Saswidianti, 51	Fungsional Narasumber Lembaga Knowledge Retainer Specialist	20 Mei 2022	Kepala Divisi <i>Product Development</i> Head of Product Development Division	S2, Manajemen Master Degree, Management
11	Hendi Wibawa, 41	Kepala Divisi Pengadaan dan Umum Head of Procurement & General Services	2 Juli 2021	Kepala Divisi Keuangan Head of Finance Division	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
12	Raden Gerald Setiawan Grisanto, 39	Kepala Divisi Jasa Konsultasi Head of Advisory Services Division	1 Juli 2020	Kepala Divisi Pembiayaan Khusus Head of Special Financing Division	S2, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE

No	Nama, Umur Name, Age	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Jabatan Sebelumnya Previous position	Jenjang Pendidikan Education
13	Damianus Ledjo Hufat, 59	Kepala Divisi Korporasi II Head of Corporate II Division	1 Maret 2021 1 March 2021	Kepala Divisi Bisnis Korporasi II & Special Mention Head of Corporate Business II Division & Special Mention	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
14	Koerniawan Prijambodo, 55	Kepala Kantor Wilayah III Head of Regional Office III	1 Maret 2021 1 March 2021	Manajer Area <i>Commercial Banking</i> Jatim Bali Nusra CIMB Area Manager Commercial Banking Jatim Bali Nusra CIMB	S2, Manajemen Master Degree, Management
15	Yanti Sudjarwo, 50	Kepala Divisi HRBP, OD & Recruitment Head of HRBP, OD & Recruitment Division	1 Maret 2021 1 March 2021	<i>Co Founder Harper Production</i>	S1, Teknik Industri Bachelor Degree, Industrial Engineering
16	Pretty Halim, 48	Kepala Divisi Pengembangan Produk Head of Product Development Division	20 Mei 2022 20 May 2022	Kepala Kantor Wilayah I Head of Regional Office I	S2, <i>Applied Finance</i> Master Degree, Applied Finance
17	Farid Maruf, 59	Kapala Divisi Credit Reviewer II Head of Credit Reviewer II Division		<i>SVP Corporate Risk Group</i> Bank Mandiri	S1, Pertanian Bachelor Degree, Agricultural
18	Rini Satriani, 39	Kepala Divisi Riset & Pengembangan Head of IEB Institute Division	29 Maret 2019 29 March 2019	Kepala Departemen Riset & Pengembangan Head of Research & Development Department	S2, Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan Peraturan Master Degree, Economics Planning and Development Policy
19	Rusdi Dahardin, 57	Kepala Divisi Bisnis Syariah Head of Sharia Business Division	3 Januari 2022 3 January 2022	Kepala Divisi Bisnis Syariah & Special Mention Head of Sharia Business & Special Mention Division	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
20	Thio Sucy, 53	Kepala Divisi Kepatuhan Head of Compliance Division	1 Maret 2021 1 March 2021	Direktur Kepatuhan Bank Commonwealth Compliance Director Commonwealth Bank	S1, Keuangan Bachelor Degree, Finance
21	Sigit Wicaksono Nugroho, 52	Fungsional Business Finance Business Finance Specialist	1 Oktober 2022 1 October 2022	Decision Support Direktorat I Decision Support Directorate I	S2, Manajemen Master Degree, Management
22	Komarruzaman, 53	Kepala Divisi Program Investasi Pemerintah Head of Governance Invest Program Division	8 Februari 2021 8 February 2021	Kepala Divisi Bisnis I Head of Business I Division	S3, Ekonomi Doctorate Degree, Economics
23	Saeful Hendra, 43	Kepala Divisi Special Audit Head of Special Audit Division	2 Juli 2021 2 July 2021	Kepala Departemen Special Audit Head of Special Audit Department	S2, Bisnis Master Degree, Business
24	Pandu Wiguno, 59	Pemegang Limit Individu Individual Limit Owner	11 Maret 2022 11 March 2022	Kepala Divisi Reviewer Penjaminan Head of Guarantee Reviewer Division	S2, Manajemen Master Degree, Management

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE

No	Nama, Umur Name, Age	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Jabatan Sebelumnya Previous position	Jenjang Pendidikan Education
25	Yoda Ditria, 41	Kepala Divisi <i>Strategic & Corporate Planning</i> Head of Strategic and Corporate Planning Division	29 Maret 2021 29 March 2021	Retail Business Finance Standard Chartered Bank	S2, Manajemen Master Degree, Management
26	Irwan Prasetyawan, 44	Kepala Kantor Cabang Surakarta Head of Surakarta Branch Office	27 April 2021	Manajer Area <i>Commercial Banking</i> Jateng Area Manager Commercial Banking Central Java	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management
27	Christiati E. Sianipar, 54	Kepala Divisi Operasional Head of Operational Division	28 Mei 2021 28 May 2021	Kepala Divisi Corporate Secretary Bank J Trust Head of Corporate Secretary J Trust Bank	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
28	Sidik Mahanda, 41	Kepala Divisi <i>Risk & Portfolio Management</i> Head of Risk & Portfolio Management Division	28 Mei 2021 28 May 2021	SVP Risk Governance HSBC	S2, Manajemen Master Degree, Management
29	Sofyan Irianto N., 58	Kepala Divisi Bisnis BUMN Head of BUMN Business		VP Corporate Banking Group Bank Mandiri	S2, Manajemen Master Degree, Management
30	Rony Kuntadi, 57	Kepala Divisi Penjaminan Head of Guarantee Division	3 Januari 2022 3 January 2022	Kepala Divisi Penjaminan II Head of Guarantee II Division	S2, Keuangan Master Degree, Finance
31	Andre Sucahya, 40	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division	1 Oktober 2022 1 October 2022	Kepala Divisi MIS & <i>Business Finance</i> Head of MIS & Business Finance Division	S1, Teknologi Informasi Bachelor Degree, Information Technology
32	Ninik Martini, 56	Kepala Kantor Wilayah II Head of Regional Office II		<i>Head of Marketing</i> CIMB Niaga	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accountancy
33	Saur Maria Sidabutar, 51	Kepala Divisi <i>Communication & Stakeholder Engagement</i> Head of Communication & Stakeholder Engagement Division	29 Juli 2021 29 July 2021	<i>Head of Corporate Communication</i> Asian Agri Group	S2, Public Relations Master Degree, Public Relations
34	Lianawaty Mihadja, 43	Kepala Divisi <i>Finance</i> Head of Finance Division	26 Oktober 2021 26 October 2021	Manajer Perencanaan Strategi Bisnis Bank Danamon Business Planning Strategy Manager Bank Danamon	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accountancy
35	Marsinta Mutiara Marpaung, 48	Kepala Divisi Asuransi Head of Insurance Division	21 Oktober 2021 21 October 2021	SVP <i>Financial & Professional Services</i> PT Marsh Indonesia	S1, Perbankan Bachelor Degree, Banking
36	Firdaus Effendi, 42	Kepala Divisi Credit Reviewer I Head of Credit Reviewer II Division	28 Desember 2021 28 December 2021	SVP <i>Analyst Bank</i> CIMB Niaga	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
 SENIOR MANAGEMENT PROFILE

No	Nama, Umur Name, Age	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Jabatan Sebelumnya Previous position	Jenjang Pendidikan Education
37	Suharyanto, 57	Kepala Divisi <i>Trade Finance</i> Head of Trade Finance		VP <i>Wholesale Transaction</i> Banking Group Bank Mandiri	S2, Manajemen Master Degree, Management
38	Nurrohmanudin, 38	Kepala Divisi Korporasi I Head of Corporate I Division	27 Oktober 2022 27 October 2022	Wakil Divisi Korporasi I Deputy Head of Corporate I Division	S2, Ekonomi Master Degree, Economy
39	Salem Assagaf, 60	Pemegang Limit Individu Individual Limit Holder		<i>Commercial Risk Head</i> Pekanbaru	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management
40	Titiek Litasari, 50	Kepala Divisi Reguler Audit Head of Reguler Audit Division		Manajer Audit Bank Mandiri Audit Manager Bank Mandiri	S2, Manajemen Keuangan Master Degree, Financial Management
41	Nury Sriandjani, 56	Kepala Divisi Prosedur & Kebijakan Head of Policy & Procedure Division		<i>Head of Improvement Project</i> Bank Mandiri	S2, Manajemen Internasional Master Degree, International Management
42	R. Bambang Sadnur Cahyo, 55	Kepala Kantor Wilayah I Head of Region I		<i>Executive Credit Officer</i> Bank Mandiri	S2, Manajemen Master Degree, Management
43	Retno Dyah Pujiastuti, 59	Kepala Divisi Hukum Head of Legal Division			S2, Notariat Master Degree, Notary
44	Sigit Arnanto, 60	Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Head of Information Technology Division			S1, Teknik Elektro Bachelor of Electro Engineering

DEMOGRAFI PEGAWAI

EMPLOYEES DEMOGRAPHY



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin	2021 Orang Person	2022 Orang Person	Gender
Laki-laki	338	327	Male
Perempuan	229	222	Female
Jumlah Pegawai	567	549	Total Employees

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Employee Composition Based on Position

Jabatan	2021 Orang Person	2022 Orang Person	Position
Senior Executive Vice President	6	7	Senior Executive Vice President
Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah	51	44	Division Head
Kepala Departemen	119	114	Department Head
Eksekutif	223	233	Executives
Pelaksana	168	151	Executors
Jumlah Pegawai	567	549	Total Employees

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Employee Composition Based on Age

Generasi	2021 Orang Person	2022 Orang Person	Generation
X & Baby Boomers	125	75	X & Baby Boomers
Millenials & Gen Z	442	474	Millenials & Gen Z
Jumlah Pegawai	567	549	Total Employees

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition Based on Education

Tingkat Pendidikan	2021 Orang Person	2022 Orang Person	Education
Doktor	1	1	Doctorate
Master	140	144	Master Degree
Sarjana	425	403	Bachelor Degree
Diploma	1	1	Diploma
Jumlah Pegawai	567	549	Total Employee

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Employee Composition Based on Employment Status

Status Ketenagakerjaan	2021 Orang Person	2022 Orang Person	Employment Status
Tetap	531	516	Permanent
Probation	6	4	Probation
PKWT	30	29	PKWT
Jumlah Pegawai	567	549	Total Employees



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Secara Langsung Direct Ownership (%)	Kepemilikan Secara Tidak Langsung Indirect Ownership (%)
Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Shareholder Owns 5% or More Shares			
Pemerintah Republik Indonesia Government of RI	LPEI tidak terbagi atas saham No shares allocation	100%	
Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham Public Shareholders Who Have Less Than 5% Shares			
Masyarakat (di bawah 5%) Public (below 5%)	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Owning Shares			
Dewan Direktur/fungsi Dewan Komisaris Board of Directors/ Board of Commissioners	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Direktur Pelaksana/fungsi Direksi Managing Directors/Board of Directors function	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Total		100%	

ENTITAS ANAK & ENTITAS ASOSIASI

SUBSIDIARIES & ASSOCIATES



Anak perusahaan LPEI dengan nama PT IEB Prima Aset didirikan pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset disingkat PT IEBPA nomor 154 di Jakarta dan persetujuan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0081370.Ah.01.01. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset pada tanggal 20 Desember 2021.

Penyertaan modal PT IEB Prima Aset telah disetujui Menteri Keuangan pada tanggal 6 Desember 2021 dengan surat keputusan Nomor S-1097/MK.06/2021 dengan nilai Rp50 miliar. Dana ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional PT IEB Prima Aset.

PT IEB Prima Aset bergerak dalam jasa konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor. Kepemilikan LPEI pada PT IEB Prima Aset adalah sebesar 99,98%. Sisa kepemilikan sebesar 0,02% dimiliki oleh Koperasi Konsumen Pegawai LPEI.

The Indonesia Eximbank subsidiary under the name PT IEB Prima Aset was established on December 17, 2021 based on the deed of Establishment of a Limited Liability Company PT IEB Prima Aset abbreviated as PT IEBPA number 154 in Jakarta and the approval of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number Ahu-0081370.Ah.01.01. 2021 concerning the Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity PT IEB Prima Asset on 20 December 2021.

PT IEB Prima Asset's capital injection has been approved by the Minister of Finance on 6 December 2021, No S-1097/MK.06/2021 amounted to Rp50 billion. This fund will be used to finance the PT IEB Asset's operational activities.

PT IEB Prima Asset is engaged in consulting services, including consulting on export-oriented activities. LPEI ownership in PT IEB Prima Asset is 99.98%. The remaining 0.02% ownership is owned by the LPEI Employee Consumer Cooperative.



STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

CORPORATE STRUCTURE SHAREHOLDING



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional di mana 100% (seratus persen) kepemilikannya dipegang oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Indonesia Eximbank is a financial institution established specifically to perform the National Export Financing where 100% (one hundred percent) ownership is held by the Government of the Republic of Indonesia.

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

IEB
PRIMA ASET

KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

OTHER STOCKS LISTING CHRONOLOGY



Selama tahun 2022, Indonesia Eximbank tidak melakukan penerbitan efek bersifat utang. Adapun *outstanding* efek Indonesia Eximbank per Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

During 2022, Indonesia Eximbank did not issue debt securities. The outstanding securities of Indonesia Eximbank as of Fiscal Year 2022 are as follows:

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2022 Total Outstanding as of 31 December 2022 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
A. Obligasi dalam mata uang Rupiah Bonds denominated in Rupiah								
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering Bonds III – 2016	D	1,038	8.50%	22-Nov-16	22-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase IV of 2017	D	1,007	9.20%	23-Feb-17	23-Feb-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	1,266	9.40%	23-Feb-17	23-Feb-27	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase V of 2017	C	1,786	8.25%	15-Aug-17	15-Aug-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase VI of 2018	B	1,650	6.70%	14-Feb-18	14-Feb-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	206	6.90%	14-Feb-18	14-Feb-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase I of 2018	B	35	7.70%	06-Jun-18	6-Jun-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,756	8.30%	06-Jun-18	6-Jun-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase II of 2018	C	275.70	8.40%	05-Sep-18	5-Sep-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,324	8.75%	05-Sep-18	5-Sep-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase III of 2018	C	28	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	380	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN
OTHER STOCKS LISTING CHRONOLOGY

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2022 Total Outstanding as of 31 December 2022 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
8	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase IV of 2019	C	1,523	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	278	9.25%	23-Apr-19	23-Apr-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	349	9.50%	23-Apr-19	23-Apr-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		F	625	9.80%	23-Apr-19	23-Apr-34	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
9	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase V of 2019	C	330	8.70%	09-Jul-19	9-Jul-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	737	9.20%	09-Jul-19	9-Jul-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
10	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VI of 2019	C	6	8.10%	03-Sep-19	3-Sep-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	714.5	8.50%	03-Sep-19	3-Sep-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
11	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VII of 2019	C	25.5	8.10%	29-Oct-19	29-Oct-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	112	8.50%	29-Oct-19	29-Oct-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	219.75	8.75%	29-Oct-19	29-Oct-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
12	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VIII of 2019	B	1,551	7.90%	06-Dec-19	6-Dec-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	22.5	8.20%	06-Dec-19	6-Dec-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
13	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds V Phase I of 2020	—	48	7.60%	08-Jul-20	8-Jul-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi Total Bonds			17,292.95					

KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN
OTHER STOCKS LISTING CHRONOLOGY

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2022 Total Outstanding as of 31 December 2022 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
B. Sukuk dalam mata uang Rupiah Sukuk denominated in Rupiah								
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018	C	14	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
	Indonesia Eximbank Shelf Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	D	155	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Sukuk Mudharabah I Phase III of 2019	C	66	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Sukuk Total Sukuk			235					



INFORMASI AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTANT FIRM

Nama dan Alamat Name and Address	Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Plaza Asia Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190
Periode Penugasan Assignment Period	15 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2023 15 August 2022 to 14 August 2023
Biaya Jasa Fees	Biaya jasa audit untuk tahun buku 2022 sebesar Rp4.578.750.000 Audit services fee for fiscal year 2022 of Rp4,578,750,000

Jasa yang Diberikan

Melakukan audit umum LPEI tahun buku 2022 yang terdiri dari:

- Melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian LPEI dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Audit umum tersebut termasuk melakukan:
 - Reviu pembukuan Kantor Wilayah dan Penugasan Khusus;
 - Reviu mengenai asumsi-asumsi yang digunakan, data-data yang disiapkan dan digunakan LPEI untuk menentukan nilai *discounted future cashflow* dalam rangka penentuan cadang kerugian penurunan nilai (CKPN) secara individual;
 - Reviu atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dalam format laporan publikasi koran.
- Melakukan audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Melakukan Jasa pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 sebagai implementasi Standar Audit 600 dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 untuk LPEI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Services Rendered

General audit for Indonesia Eximbank for fiscal year 2022, consisted of:

- Audit on consolidated financial statements of LPEI and subsidiary for the years ended on 31 December 2022, which was drafted based on Financial Accounting Standard in Indonesia, which consisted of consolidated statement of financial position as of December 31, 2022, consolidated profit or loss and other comprehensive income, consolidated changes of equity and consolidated statement of cash flows for the years ended on the said date, and significant accounting policy summary and other explanation information. General audit also consist of:
 - Review on Regional Office and National Interest Account bookkeeping
 - Review of the assumptions used, data prepared and used by LPEI to determine the value of discounted future cashflows in order to determine individual allowance for impairment losses (CKPN).
 - Review of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022 in the format of a newspaper publication report.
- Audit on the compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the years ended on December 31, 2022.
- Audit on Financial Statements Year 2022 as the 600 Audit Standard implementation in the context of auditing of Central Government Financial Report year 2022 for LPEI by the Audit Board of RI (BPK).

INFORMASI AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTANT FIRM

4. Melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT IEB Prima Aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
5. Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Jasa Non-Audit

1. Melakukan penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Triwulan IV Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022.
2. Melakukan asurans terbatas atas laporan pinjaman industrial *Efficiency and Pollution Control* (IEPC) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Melakukan asurans terbatas atas laporan pinjaman dari *the Export Import Bank of China* (CHEXIM) posisi 30 September 2022.
4. Melakukan asurans terbatas atas Laporan pelaksanaan investasi pemerintah PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) oleh LPEI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
5. Melakukan reviu atas Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
6. Melakukan reviu atas *Internal Control Operation* dan *Information Technology* (IT) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
7. Melakukan reviu atas Informasi Keuangan Penugasan Khusus (PKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
8. Melakukan reviu Laporan Keuangan Divisi Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

4. Audit of PT IEB Prima Aset's Financial Statements for the year ended on December 31, 2022 which was prepared based on Indonesian Financial Accounting Standards.
5. Audit of the Partnership Program's Financial Statements for the year ended on December 31, 2022 which were prepared based on the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (ETAP)

Non-Audit Services

1. Carried out agreed procedures to the Prudential Principles Application Activity Report (KPPK) Quarter IV Year 2022 as of December 31, 2022.
2. Carried out limited assurance on Industrial *Efficiency and Pollution Control* (IEPC) loans report position for the years ended on December 31, 2022.
3. Carried out limited assurance agreement on Borrowing Facility Report from Export Import Bank of China as of September 30, 2022
4. Carried out limited assurance on Government Investment Implementation Report (PEN) to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) by LPEI for the years ended on December 31, 2022.
5. Review on Main Performance Indicators Realization Report (IKU) for the years ended on December 31, 2022.
6. Review on Internal Control Operation and Information Technology (IT) for the years ended on December 31, 2022.
7. Reviewed the Export National Interest Account Financial Statements for the years ended on December 31, 2022.
8. Reviewed the LPEI Sharia Financial Statements for the years ended on December 31, 2022.



LEMBAGA PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Berikut ini lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan LPEI.

The following are capital market supporting agencies and professions for the issuance of Indonesia Eximbank Shelf Bonds and Sukuk.

No	Nama Pihak Names	Alamat Address	Peran Assignments
a	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Equity Tower 30th Floor SCBD, Lot.9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (021) 509 68469 Fax. (021) 509 68468	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
b	PT. Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 0515 Fax. (021) 515 0330	Lembaga Pencatatan Emisi Efek Indonesia Eximbank Listing Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
c	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 2855 Fax. (021) 5299 1199	Lembaga Kustodi dan Penyelesaian di Pasar Modal atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Custodian Agency and Settlement in the Capital Market for Securities issued by Indonesia Eximbank
d	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Plaza Mandiri, Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38. Jakarta 12190 Telp. (021) 527 5370 Fax. (021) 526 8201	Wali Amanat atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Trustee for Securities issued by Indonesia Eximbank
e	Konsultan Hukum Warens & Partners	Millenium Centennial Center Lantai 1, Unit C Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan	Konsultan Hukum atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Law Firm for Securities issued by Indonesia Eximbank
f	Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH	JL. Panglima Polim V/11 Kebayoran Baru Jakarta 12160 Tel : (021) 724 4650 Fax : (021) 726 5090	Notaris Emisi atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Notary for Securities issued by Indonesia Eximbank
g	KAP "Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali"	Sentra Bisnis Harapan Indah Blok SS 11 No. 6-7 Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi, 17132 Tel. (021) 88866199 Fax. (021) 88865750	Auditor Penjatahan atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Allocation Auditor for Securities issued by Indonesia Eximbank

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG)
SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Berikut ini lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk penerbitan EMTN LPEI.

The following are capital market supporting agencies and professions for the issuance of Indonesia Eximbank EMTN.

No	Nama Pihak Names	Alamat Address	Peran Assignments
1	HSBC Corporate Trust and loan Agency	Level 30, HSBC Main Building 1 Queen's Road Central Hong Kong Tel. (852) 2822 4443	Wali Amanat dan Agen Pembayar atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Trustee and Paying Agent for Securities issued by Indonesia Eximbank
2	Herbert Smith LLP	50 Raffles Place #24-01, Singapore Land Tower Singapore 048623 Tel. (65) 6868 8085	Konsultan Hukum Internasional atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank International legal counsel for Securities issued by Indonesia Eximbank
3	Hiswara Bunjamin & Tandjung	23rd Floor, Gedung BRI II Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Tel. (021) 5744 010	Konsultan Hukum Domestik atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Domestic legal counsel for Securities issued by Indonesia Eximbank
4	Ernst & Young (Purwantono, Suherman & Surja)	Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 7TH Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10290 Tel. (021) 5289 4171	Auditor atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Auditor for Securities issued by Indonesia Eximbank
5	Fitch Ratings Singapore Pte Ltd	One Raffles Quay, South Tower #22-11 Singapore 048583 Tel. (65) 6796 7200	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
6	Moody's Investors Service Singapore Pte Ltd	50 Raffles Place 23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 Tel. (65) 6398 8300	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
7	Singapore Exchange Securities Trading Limited	SGX Centre Office 2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1 Singapore 068804 Tel. (65) 6236 8888	Lembaga Pencatatan Emisi Efek Indonesia Eximbank Listing Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank



PENGHARGAAN AWARDS

1. *1st Best Brand All Over BUMN di Bawah Kementerian Keuangan, 11th Digital Bank Awards oleh Infobank*
2. *Recognition in Employee Commitment & Recognition in Employee Satisfaction, Stellar Award 2022*

1. 1st Best Brand All Over SOEs Under the Ministry of Finance, 11th Digital Bank Awards by Infobank
2. Recognition in Employee Commitment & Recognition in Employee Satisfaction, Stellar Award 2022



INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMATION ON COMPANY WEBSITE



LPEI memiliki situs web resmi yang dapat diakses di www.indonesiaeximbank.go.id, yang tersedia dalam dua pilihan bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pada situs web Indonesia disajikan informasi dan data mengenai LPEI yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, maupun masyarakat umum sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.

Situs web LPEI telah memenuhi berbagai ketentuan yang relevan baik eksternal, maupun internal, termasuk:

- a. Undang-Undang RI No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun bukan berstatus Perusahaan Publik, LPEI senantiasa berupaya menjaga standar transparansi dan keterbukaan informasi khususnya serta praktik-praktik tata kelola perusahaan pada umumnya, yang setara dengan perusahaan-perusahaan publik yang terbaik.

Oleh karenanya, komponen situs web LPEI juga telah memenuhi cakupan informasi yang wajib dimuat dalam situs web Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015, terkecuali untuk item-item yang spesifik untuk sebuah Perusahaan Publik.

Secara garis besar, informasi pada situs web terdiri dari:

- Informasi umum tentang LPEI yang terdiri dari Profil Perusahaan, Visi dan Misi, Sejarah Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, Jaringan Kantor dan Wilayah Kerja.
- Informasi terkait kegiatan bisnis, produk-produk, serta informasi seputar kegiatan pengadaan.
- Informasi seputar kegiatan LPEI dalam bentuk *News Release*, *News update*, sambutan/pidato manajemen, publikasi *digital*, *event*, serta pengumuman pengadaan lelang pengadaan produk jasa yang diselenggarakan oleh LPEI.

The official website of Indonesia Eximbank is accessible at www.indonesiaeximbank.go.id and is available in both Indonesian and English languages. The Indonesian website provides stakeholders and the public with transparent and informative data about Indonesia Eximbank, in line with the principles of transparency and disclosure.

Indonesia Eximbank's website has fulfilled various relevant provisions both externally, and internally, including:

- a. Law of the Republic of Indonesia No. 14/2008 on Public Information Transparency.
- b. Law of the Republic of Indonesia No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions.

Indonesia Eximbank, while not being a public company, is committed to upholding high standards of transparency and disclosure in its corporate governance practices, comparable to the best public companies.

As such, the Indonesia Eximbank website includes all the necessary information required by the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015, except for items that pertain specifically to public companies.

In general, the information on the website consists of:

- General information about Indonesia Eximbank consisting of Company Profile, Vision and Mission, Corporate History, Corporate Governance, Board of Directors, Executive Director and Managing Director, Office Network and Operating Regions.
- Information related to business activities, products, and information about procurement activities.
- Information on Indonesia Eximbank's activities in the form of News Releases, News updates, management speeches, digital publications, events, and announcements of procurement auctions for service product procurement organized by Indonesia Eximbank.

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN
INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

- Informasi terkait Hubungan Investor yang terdiri dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Keberlanjutan, Informasi Efek, Peringkat Efek, dan Obligasi.
- Informasi terkait aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Information related to Investor Relations consisting of Annual Reports, Financial Statements, Sustainability Reports, Securities Information, Securities Ratings, and Bonds.
- Information related to Corporate Social Responsibility activities.

Dari waktu ke waktu, LPEI selalu berupaya untuk menyempurnakan situs web lembaga agar menjadi lebih informatif, mudah diakses, mudah dinavigasi serta ramah bagi penggunaannya.

Indonesia Eximbank regularly strives to enhance the user experience of its website by making it more informative, user-friendly, accessible, and easy to navigate.



AKSES INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE



LPEI menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, oleh karena itu, LPEI menyediakan sarana dan fasilitas yang memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi secara tepat waktu dan akurat menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan kepada regulasi, LPEI juga melakukan pelaporan informasi melalui media surat-menyurat dan *e-reporting* kepada pihak regulator, serta situs Lembaga. Seluruh Informasi dan laporan Lembaga dapat diperoleh melalui sarana yang mudah diakses, diantaranya:

1. Siaran Pers

LPEI secara berkala menerbitkan Siaran Pers sebagai transparansi informasi kepada publik mengenai aksi korporasi penting dan strategis yang dilakukan LPEI.

2. Media Sosial

LPEI juga aktif memberikan informasi kepada publik melalui akun:



indonesiaeximbank



Indonesia Eximbank



indonesiaeximbank



EximbankID



indonesia-eximbank

3. Intranet

LPEI memiliki portal informasi internal yaitu intranet. Intranet dapat diakses oleh seluruh pegawai untuk membantu menjalankan aktivitas.

In line with its commitment to transparency and information disclosure, Indonesia Eximbank provides various facilities to enable stakeholders to obtain timely and accurate information, in accordance with relevant rules and regulations.

Moreover, in compliant with regulations, Indonesia Eximbank also communicates information through correspondence and electronic reporting channels to regulators, in addition to its website. All of the institution's information and reports are readily accessible through various means, including:

1. Press Release

Indonesia Eximbank regularly issues Press Releases as transparency of information to the public regarding important and strategic corporate actions carried out by the Institution.

2. Social Media

Indonesia Eximbank also actively provides information to the public through the following accounts:

3. Intranet

Indonesia Eximbank has an internal information portal, namely intranet. Intranet can be accessed by all employees to help carry out activities.



ANALISIS &
PEMBAHASAN
MANAJEMEN

MANAGEMENT
DISCUSSION &
ANALYSIS

04



TINJAUAN PEREKONOMIAN

ECONOMIC REVIEW

Perekonomian Global

Paska pertumbuhan tinggi di tahun 2021, pertumbuhan PDB Dunia di tahun 2022 mengalami perlambatan menuju rata-rata jangka panjangnya. *International Monetary Fund* (IMF) melalui *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis pada bulan Januari 2023, mengestimasi perekonomian dunia tahun 2022 tumbuh 3,4% yoy atau lebih lambat dari periode sebelumnya yang tercatat *rebound* (2021: 6,2%) pasca kontraksi akibat merebaknya COVID-19 pada tahun 2020 tetapi masih berada pada rata-rata pertumbuhan selama 10 tahun sebelum pandemi (2010-2019:3,7%). Perlambatan ini dialami baik oleh kelompok negara maju maupun berkembang. Pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju tercatat sebesar 2,7% yoy (dari 5,4% yoy pada tahun 2021), sementara itu kelompok negara *emerging* dan berkembang sebesar 3,9% yoy (dari 6,7% yoy pada tahun 2021).

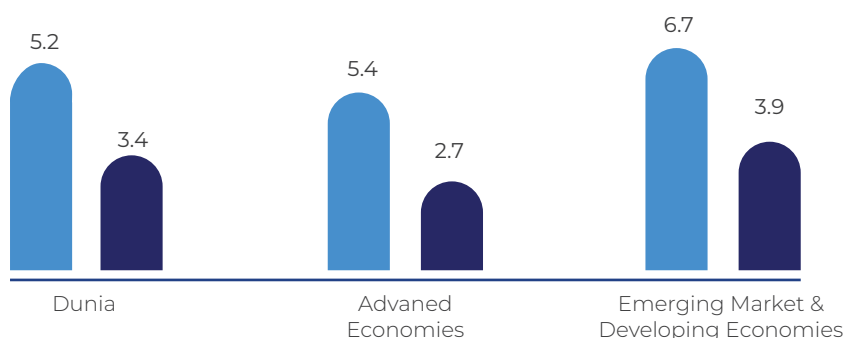
Upaya pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 global selama tahun 2022 tertahan oleh sejumlah faktor: (i) perang antara Rusia dan Ukraina diikuti efek domino yang masih berlanjut; (ii) *renewed lockdowns* akibat tingginya penularan COVID-19 di sejumlah daerah padat penduduk di Tiongkok yang menyebabkan perlambatan ekonomi negara tersebut; (iii) tekanan inflasi tinggi yang meluas secara global; diikuti (iv) pengetatan kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara guna mendinginkan inflasi. Sejumlah faktor ini juga diperkirakan masih akan terus berlanjut dan memengaruhi perkembangan ekonomi tahun 2023.

Global Economy

Following a robust growth in 2021, the global GDP growth rate in 2022 decelerated towards its long-term average. The International Monetary Fund (IMF) through the World Economic Outlook (WEO) released in January 2023, estimates that the global economy is projected to grow by 3.4% year-on-year (yoy) in 2022, which is slower than the previous year's rebound (2021: 6.2% yoy) after the pandemic-induced contraction in 2020, but aligns with the average growth rate for the decade before the pandemic (2010-2019: 3.7%). This slowdown was observed across both developed and developing nations. The advanced countries saw a growth rate of 2.7% yoy (from 5.4% yoy in 2021), whereas the emerging and developing countries posted a growth rate of 3.9% yoy (from 6.7% yoy in 2021).

Economic recovery efforts from the global COVID-19 pandemic during 2022 were held back by a number of factors: (i) the conflicts between Russia and Ukraine followed by a domino effect that still continues; (ii) reimposition of lockdowns due to high transmission of COVID-19 in a number of densely populated regions in China resulting in the country's economic deceleration; (iii) widespread high inflationary pressures globally; followed by (iv) implementation of tighter monetary policies by central banks in various countries to counter inflation. Some of these factors are expected to persist and impact economic growth in 2023.

PDB Dunia dan Kelompok Ekonomi
World GDP and Economic Group



Sumber: WEO, IMF rilis bulan Januari 2023 | Source: WEO, IMF released in January 2023

TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW

Inflasi tinggi dan peningkatan suku bunga kebijakan menjadi tema besar yang menahan pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh kelompok ekonomi. Di kelompok *advanced economies*, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) melambat dari 5,9% yoy (2021) menjadi 2,1% yoy pada tahun 2022, terutama disebabkan penurunan investasi properti di tengah lonjakan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa juga melambat menjadi 3,5% yoy tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya (2021: 5,3% yoy), dipicu dampak perang Ukraina yang menyebabkan gangguan rantai pasok dan krisis energi, sehingga mendorong kenaikan harga serta berimbas pada melemahnya konsumsi rumah tangga dan melambatnya ekspansi bisnis. Tidak jauh berbeda dengan Uni Eropa, pertumbuhan ekonomi Inggris juga melambat pada tahun 2022 hanya tumbuh 4,0% yoy (dari 7,6% yoy pada 2021) karena melemahnya konsumsi dan disrupsi aktivitas industri. Ekonomi Jepang juga hanya mencatatkan pertumbuhan 1,3% yoy pada 2022 (melambat dari 2,2% yoy pada 2021) karena konsumsi di dalam negeri yang lemah akibat inflasi yang tinggi memangkas pendapatan rumah tangga secara riil. Lemahnya konsumsi Jepang juga berpengaruh terhadap permintaan eksternal (impor) negara tersebut.

High inflation levels and rising policy rates are significant factors hampering economic growth across all economic groups. In the advanced economies group, the economic growth of the United States (US) decelerated from 5.9% yoy in 2021 to 2.1% yoy in 2022, primarily due to declining property investments amid surging inflation and tightening monetary policies. The European Union's economic growth also slowed to 3.5% yoy in 2022 from the previous year (5.3% yoy in 2021), triggered by the impact of the Ukraine war, which disrupted supply chains and led to an energy crisis that pushed up prices, weakening household consumption and slowing business expansion. The UK's economic growth also decelerated in 2022, registering only 4.0% yoy growth (from 7.6% yoy in 2021) due to weakened consumption and disruptions to industrial activity. Japan's economy also recorded sluggish growth of only 1.3% yoy in 2022 (from 2.2% yoy in 2021), as high inflation levels reduced household incomes in real terms, leading to weak domestic consumption. Japan's weak consumption also impacted the country's external demand (imports).

Indikator Makroekonomi Kunci berdasarkan Kelompok Ekonomi

Key Macroeconomic Indicators by Economic Group

Negara/Kawasan Country/Region	Pertumbuhan Ekonomi* Economic Growth*		Inflasi IHK (% yoy)** CPI inflation (% yoy)**	Kenaikan Suku Bunga** Interest Rate Increase**	Level Suku Bunga Interest Rate Level
	2021	2022E	Dec-22	%Δ pada 2022	31-Dec-22
Advanced Economies					
Amerika Serikat United States	5.9	2.1	6.45	4.25	4.50
Uni Eropa European Union	5.3	3.5	10.39	2.50	2.50
Jerman German	2.6	1.9	8.12	2.50	2.50
Prancis French	6.8	2.6	5.85	2.50	2.50
Jepang Japan	2.2	1.3	4.00	-	(0.10)
Inggris United Kingdom	7.6	4	10.50	3.25	3.50
Kanada Canada	5.0	3.4	6.32	4.00	4.25

TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW

Negara/Kawasan Country/Region	Pertumbuhan Ekonomi* Economic Growth*		Inflasi IHK (% yoy)** CPI inflation (% yoy)**	Kenaikan Suku Bunga** Interest Rate Increase**	Level Suku Bunga Interest Rate Level
	2021	2022E	Dec-22	%Δ pada 2022	31-Dec-22
Emerging Market & Developing Economies					
Tiongkok I China	8.5	3.0	1.80	(0.20)	2.75
India	8.9	6.7	5.72	2.25	6.25
Brazil	5.3	3.0	5.79	4.50	13.75
Meksiko I Mexico	4.9	3.1	7.82	5.00	10.50
Arab Saudi	3.9	8.7	3.30	4.00	5.00

Sumber: (i) GDP: Oxford Economics, (ii) Inflasi IHK: CEIC Data; dan (iii) Suku Bunga: CEIC Data, diolah
Source: (i) GDP: Oxford Economics, (ii) CPI inflation: CEIC Data; and (iii) Interest Rates: CEIC Data, processed

Di kelompok *emerging market & developing economies*, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprediksi hanya akan tumbuh sebesar 3,0% pada tahun 2022, melambat signifikan dari tahun sebelumnya (2021: 8,5%), akibat menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi serta tingkat *confidence* di tengah kebijakan *COVID Zero Policy* yang ketat serta memburuknya krisis di industri properti. Meskipun tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya (2021: 8,9% yoy), pertumbuhan ekonomi India tetap mampu tumbuh 6,7% yoy tahun 2022. Sejalan dengan itu, di kawasan Amerika Latin, Brazil dan Meksiko juga menunjukkan perlambatan ekonomi pada tahun 2022. Sementara dari Timur Tengah, Saudi Arabia justru mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi (dari 3,9% yoy pada 2021) ke level 8,7% yoy pada 2022 ditopang oleh kenaikan harga minyak.

Suku bunga acuan *Fed* pada tahun 2022 ditutup di level 4,5%, sekaligus merupakan *borrowing cost* tertinggi sejak 2008. Mayoritas bank sentral di dunia juga telah melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Kebijakan kenaikan suku bunga acuan tersebut ditempuh di antaranya untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan inflasi—yang telah mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, memitigasi dampak rambatan dari masih kuatnya dolar AS, serta masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi keuangan yang lebih ketat dan kekhawatiran mengenai potensi resesi global pada gilirannya memengaruhi *capital flow*, terutama memberikan dampak negatif di pasar negara *emerging* dan berkembang.

In emerging markets & developing economies, China's economic growth is predicted to grow only 3.0% in 2022, slowing significantly from the previous year (2021: 8.5%), due to declining production and consumption activities and confidence amid the COVID Zero Policy tightening as well as worsening crisis in the property industry. Despite slower growth compared to the previous year (2021: 8.9% yoy), India's economic growth was still able to grow 6.7% yoy in 2022. Correspondingly, Latin America, Brazil and Mexico also showed an economic slowdown in 2022. Meanwhile, from the Middle East, Saudi Arabia actually experienced an increase in economic growth (from 3.9% yoy in 2021) to a level of 8.7% yoy in 2022 supported by rising oil prices.

The Fed's benchmark interest rate in 2022 closed at 4.5%, the highest borrowing cost since 2008. The majority of central banks in the world have also made adjustments to benchmark interest rates. The policy of raising the benchmark interest rate was taken, among others, to ensure the continued decline in inflation, which has reached its highest point in recent decades, mitigating the impact of propagation from the still strong US dollar, as well as high global financial market uncertainty. Tighter financial conditions and concerns about a potential global recession have in turn affected capital flows, particularly in emerging and developing markets.

TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW

Ketidakpastian pasar keuangan global juga turut memengaruhi depresiasi berbagai mata uang dunia terhadap USD. Mata uang Uni Eropa (EUR) terdepresiasi sebesar 6,23% pada penutupan bulan Desember 2022 dibandingkan posisi akhir tahun 2021. Di periode yang sama, nilai tukar mata uang negara maju lain seperti Inggris dan Jepang terdepresiasi lebih dalam masing-masing sebesar 11,96% dan 13,94% terhadap Dolar AS. Realisasi rata-rata nilai tukar Rupiah pada tahun 2022 yaitu Rp14.854 per USD.

Global financial market uncertainty also influenced the depreciation of various world currencies against the USD. The European Union (EUR) currency depreciated by 6.23% at the close of December 2022 compared to where it was at the end of 2021. In the same period, the exchange rates of other developed countries such as the United Kingdom and Japan depreciated further by 11.96% and 13.94% respectively against the US Dollar. The realization of the average Rupiah exchange rate in 2022 was Rp14,854 per USD.

Perkembangan Nilai Tukar terhadap Dolar AS

Exchange Rate Development against the US Dollar

Negara Country	Mata Uang Currency	Per USD		Apresiasi/Depresiasi, Kurs Rata-rata Appreciation/Depreciation, Average Exchange Rate (%yoy)
		2021	2022	2022
Argentina	Peso	95.1	130.5	-37.24%
Brazil	Real	5.4	5.2	4.44%
Chile	Peso	759.1	873.2	-15.03%
Tiongkok China	Yuan	6.5	6.7	-4.34%
Colombia	Peso	3,744.2	4,256.2	-13.67%
Ceko (Republik) Czech (Republic)	Koruna	21.7	23.4	-7.75%
Ghana	Cedi	5.9	9.1	-52.87%
Hungaria	Forint	303.1	372.6	-22.91%
India	Ruppee	73.9	78.6	-6.34%
Indonesia	Rupiah	14,291.7	14,851.5	-3.92%
Kenya	Shilling	109.6	117.9	-7.51%
Malaysia	Ringgit	4.1	4.4	-6.28%
Meksiko Mexico	Peso	20.3	20.1	0.89%
Nigeria	Naira	409.4	426.8	-4.24%
Peru	New Sol	3.9	3.8	1.03%
Filipina Philippines	Peso	49.3	54.5	-10.62%
Polandia Polish	Zloty	3.9	4.5	-15.54%
Romania	Lei	4.2	4.7	-12.74%
Rusia Russia	Rouble	73.7	68.5	6.98%
Arab Saudi	Riyal	3.8	3.8	0.00%
Afrika Selatan South Africa	Rand	14.8	16.4	-10.76%
Korea Selatan South Korea	Won	1,144.0	1,291.5	-12.89%
Thailand	Baht	32.0	35.1	-9.63%
Turki Turkish	YeniTKLira	8.9	16.6	-86.81%
Uni Emirat Arab United Arab Emirates	Dirham	3.7	3.7	0.00%
Vietnam	Dong	22,921.8	23,399.2	-2.08%

Sumber: Oxford Economics, diolah | Source: Oxford Economics, processed

TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW

Dari sisi perkembangan harga komoditas global, sejumlah komoditas global berada di level tinggi dan cenderung *volatile* sepanjang tahun 2022. Pada kelompok komoditas energi, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan, sebagai dampak terganggunya pasokan akibat adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Harga minyak jenis *Brent* tercatat sebesar USD99,0 per barel sepanjang tahun 2022. Sementara itu, harga batubara juga terus meningkat di tengah lonjakan permintaan untuk mengkompensasi terhambatnya *supply* gas di Kawasan Eropa. Pada tahun 2022, harga batubara secara rata-rata mencapai USD358 per MT.

In terms of global commodity price developments, a number of global commodities are at high levels and tend to be volatile throughout 2022. In the energy commodity group, world crude oil prices increased, as a result of supply disruptions due to the conflict between Russia and Ukraine. Brent oil prices were recorded at USD99.0 per barrel throughout 2022. Meanwhile, coal prices also continue to increase amid a surge in demand to compensate for the hampered gas supply in the European Region. In 2022, coal prices averaged USD358 per MT.

Perkembangan Harga Komoditas
Commodity Price Development

Energi Energy	Unit	Realisasi Realization					Growth (% yoy)	Rata-Rata Average 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Minyak (<i>Brent</i>) Oil (<i>Brent</i>)	\$/bbl	72	64	43	71	99	39.8%	70
Gas Alam Natural gas	\$/MMBTU	3.1	2.5	2.1	3.7	6.5	75.9%	3.6
Batubara Coal	\$/MT	107	78	60	136	358	162.5%	148

Logam Metal	Unit	Realisasi Realization					Growth (% yoy)	Rata-Rata Average 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Tembaga Copper	\$/MT	6,545	6,024	6,195	9,292	8,807	-5.2%	7,373
Aluminium	\$/MT	2,114	1,813	1,731	2,485	2,714	9.2%	2,171
Bijih Besi Iron Ore	\$/MT	69	93	108	159	121	-24.0%	110
Timah Tin	\$/MT	20,071	18,585	17,107	31,145	31,071	-0.2%	23,596
Nikel Nickel	\$/MT	13,178	13,943	13,862	18,452	26,233	42.2%	17,134
Seng Iron	\$/MT	2,893	2,507	2,280	3,008	3,450	14.7%	2,828
Timbal Lead	\$/MT	2,248	2,004	1,837	2,188	2,148	-1.8%	2,085

Pertanian dan Bahan Makanan Agriculture and Food	Unit	Realisasi Realization					Growth (% yoy)	Rata-Rata Average 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Gandum Wheat	cts/bu.	495	494	550	702	901	28.4%	628
Jagung Corn	cts/bu.	368	383	364	582	694	19.4%	478
Beras Rice	\$/cwt	12	11	14	13	17	23.8%	13
Kedelai Soybean	cts/bu.	932	890	954	1,375	1,551	12.9%	1,140
Minyak Kedelai Soybean Oil	cts/lb	30	29	31	58	71	22.6%	44
Minyak Sawit Palm Oil	RM/MT	2,252	2,173	2,794	4,461	5,132	15.0%	3,362
Gula Sugar	cts/lb	12	12	13	18	19	5.4%	15
Kopi Coffee	cts/lb	113	101	111	169	215	27.2%	142
Biji Kakao Cocoa Beans	\$/MT	2,307	2,388	2,519	2,493	2,460	-1.3%	2,433
Kapas Cotton	cts/lb	82	67	64	93	113	20.7%	84

Sumber: *Bloomberg*, diolah | Source: *Bloomberg*, processed

TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW

Kelompok komoditas logam juga mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan bahkan sejak paruh kedua tahun 2020. Harga nikel secara rata-rata meningkat menjadi USD26.233 per MT pada tahun 2022.

The metal commodity group has also posted a very significant price increase even since the second half of 2020. The average nickel price increased to USD26,233 per MT in 2022.

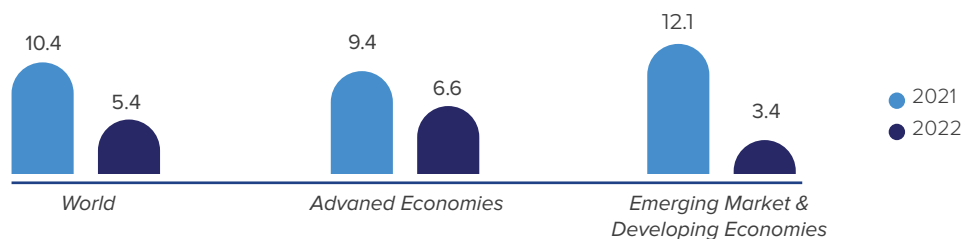
Pada kelompok komoditas pertanian, harga minyak sawit melonjak pesat, dengan harga rata-rata menembus level RM5.132 per MT sepanjang tahun 2022. Perkembangan tersebut didukung sentimen negatif dari invasi Rusia ke Ukraina. Konflik tersebut berdampak secara tidak langsung pada harga minyak sawit, karena lebih dulu memengaruhi kenaikan harga substitusinya seperti minyak kedelai, *rapeseed oil*, dan *canola oil*, sehingga harga minyak sawit turut terdongkrak naik.

In the agricultural commodity group, palm oil prices have soared rapidly, with the average price breaking through the RM5,132 per MT level throughout 2022. This development is supported by negative sentiment from Russia's invasion of Ukraine. The conflict had an indirect impact on palm oil prices, because it first affected the increase in substitute prices such as soybean oil, rapeseed oil, and canola oil, making palm oil prices to also boosted.

Volume perdagangan global diproyeksikan melambat ke level 5,4% yoy pada tahun 2022 dari level tinggi pada tahun 2021(10,4% yoy); diakibatkan gangguan rantai pasok global, meskipun indeks *Global Supply Chain Pressure* yang dirilis oleh *Federal Reserve Bank of New York* telah mereda di posisi terkini seiring dengan penurunan *supply delivery times* dari Tiongkok.

Global trade volume is projected to slow to 5.4% yoy in 2022 from a high level in 2021 (10.4% yoy); Due to global supply chain disruptions, although the Global Supply Chain Pressure index released by the Federal Reserve Bank of New York has eased to its current position as supply delivery times from China decline.

Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (% yoy)
World Trade Volume Growth (% yoy)



Sumber: WEO, IMF, rilis bulan Januari 2023 | Source: WEO, IMF, January 2023 release

Perekonomian Indonesia

Ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh impresif di level 5,3%, sejalan dengan proyeksi pemerintah. Fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik di tengah tantangan global akibat pandemi dan krisis geopolitik di Ukraina. Kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia didukung oleh

Economy of Indonesia

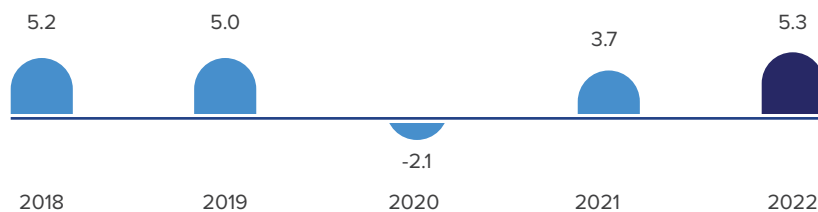
Indonesia's economy in 2022 grew impressively at 5.3%, in line with the government's projection. Indonesia's economic fundamentals remained well maintained amidst global challenges due to the pandemic and geopolitical crisis in Ukraine. Investor confidence in Indonesia's economic fundamentals is supported by economic growth

TINJAUAN PEREKONOMIAN ECONOMIC REVIEW

pertumbuhan ekonomi yang memang sudah lebih kuat sejak kuartal II tahun 2021 hingga sekarang—meski belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor barang merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022.

that has indeed been stronger since the second quarter of 2021 until now, although it has not fully recovered from the impact of the pandemic. Household consumption expenditure, gross fixed capital formation, and goods exports are the main drivers of Indonesia's economic growth in 2022.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) Indonesia's Economic Growth (%)

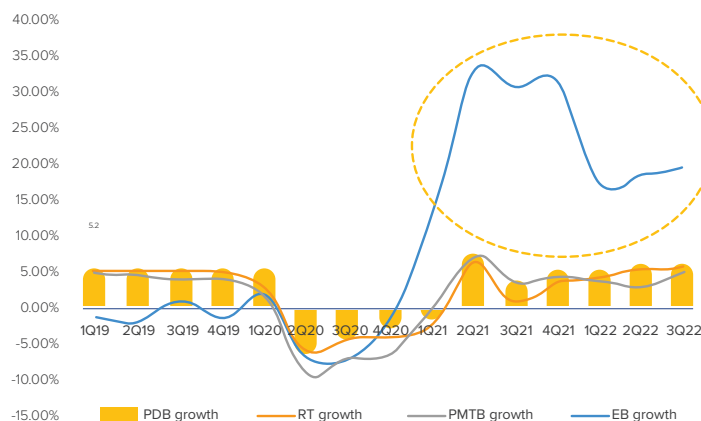


Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik rilis bulan Februari 2023, diolah
Source: Central Bureau of Statistics, Official Statistical News released in February 2023, processed

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketiga komponen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari sisi pengeluaran tersebut berkontribusi besar dan membawa Indonesia membukukan pertumbuhan PDB tahun 2022 yang signifikan (dibandingkan 3,70% yoy pada tahun 2021). Adapun tren pertumbuhan tahunan setiap kuartal dari PDB, ekspor barang (EB), pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT), dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) ditunjukkan pada grafik di bawah ini:

The Central Statistics Agency (BPS) stated that the three components of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) in terms of expenditure contributed greatly and brought Indonesia to record significant GDP growth in 2022 (compared to 3.70% yoy in 2021). The quarterly annual growth trend of GDP, goods exports (EB), household consumption expenditure (RT), and Gross Domestic Fixed Capital Formation (PMTB) is shown in the graph below:

Pertumbuhan PDB Indonesia Indonesia's GDP Growth



Sumber: Badan Pusat Statistik & Bank Indonesia, diolah | Source: Central Statistics Agency & Bank Indonesia, processed

TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW

Dari sisi *demand*, seluruh komponen PDB menurut pengeluaran tumbuh positif kecuali Konsumsi Pemerintah. Secara rinci, 80,95% PDB tahun 2022 berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi Fisik). Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga didukung pulihnya mobilitas dan aktivitas dunia usaha yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Membaiknya pendapatan masyarakat mendorong penguatan seluruh kelompok konsumsi, terutama pada kelompok konsumsi transportasi-komunikasi serta restoran-hotel. Fenomena *pent-up demand* juga masih ada—baik pada kelompok masyarakat menengah atas yang banyak mengonsumsi kebutuhan tersier, maupun pada kelompok masyarakat bawah yang ditopang bantuan sosial serta subsidi energi. Selain itu, masih berlakunya program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) meningkatkan penjualan salah satunya kendaraan bermotor.

Laju investasi secara bertahap juga menguat di tahun 2022. Penanaman Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) tumbuh 3,9% yoy secara tahunan (2021: 3,8%). Minat investor untuk melanjutkan hilirisasi lanjutan ke produk-produk turunan telah mendorong investasi ke arah yang lebih produktif. Hal ini ditunjukkan dengan investasi mesin dan kendaraan yang masing-masing tumbuh 22,4% dan 10,3% (yoy). Sementara, kontributor investasi terbesar yaitu bangunan tumbuh relatif moderat di tengah tingginya harga bahan bangunan dan masih lesunya penjualan properti, khususnya untuk ruang kantor dan hunian kelas atas.

Sementara itu, kinerja ekspor yang impresif didukung oleh *windfall* kenaikan harga komoditas dunia yang masih berlanjut—meskipun cenderung melambat akibat *high-based effect* tahun 2021. Konsumsi Pemerintah tumbuh negatif seiring dengan lebih terkendalinya pandemi COVID-19, menyebabkan beban pengeluaran pemerintah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menurun.

Dari sisi *supply*, seluruh komponen PDB menurut Lapangan Usaha (LU) juga mencatatkan pertumbuhan

From the demand side, all components of GDP according to expenditure grew positively except Government Consumption. In detail, 80.95% of GDP in 2022 derived from Household Consumption and Gross Fixed Capital Formation (Physical Investment). The increase in household consumption is supported by the recovery of mobility and business activities which ultimately increase people's income. Improving public income has strengthened all consumption groups, particularly in the transportation-communication and restaurant-hotel consumption groups. The phenomenon of pent-up demand also still exists, both in the upper middle class who consume a lot of tertiary needs, and in the lower community groups supported by social assistance and energy subsidies. In addition, the relaxation program of Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) has increased sales, one of which is motor vehicles.

The pace of investment has also gradually strengthened in 2022. Gross Domestic Fixed Capital Investment (PMTB) grew 3.9% yoy on an annual basis (2021: 3.8%). Investor interest in continuing further downstream into derivative products has promoted investment in a more productive direction. This is indicated by investment in machinery and vehicles which grew 22.4% and 10.3% (yoy) respectively. Meanwhile, the largest investment contributor is building growth relatively moderate amid high prices of building materials and sluggish property sales, especially for office space and high-end residences.

Meanwhile, the impressive export performance was supported by the windfall of rising world commodity prices, although it tended to slow down due to the high-based effect in 2021. Government consumption grew negatively in line with the more controlled COVID-19 pandemic, causing the burden of government spending for the National Economic Recovery (PEN) program to decrease.

From the supply side, all components of GDP according to Business Sector also recorded positive growth. In

TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW

positif. Secara rinci, 65,58% PDB tahun 2022 berasal dari *leading sectors* Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Pertambangan, dan Konstruksi. Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan didukung industri berorientasi domestik seperti produksi mobil dan motor serta permintaan eksternal terutama ditopang komoditas minyak sawit dan logam dasar. Sementara itu, LU Pertambangan didukung oleh solidnya permintaan dan harga komoditas batubara.

Adapun LU dengan kinerja pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 yaitu: (1) LU transportasi dan pergudangan yang membukukan pertumbuhan 29,87% yoy; (2) LU penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,97% yoy. Pertumbuhan signifikan kedua LU tersebut ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta naiknya kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Dampak positif lanjutan dari kuatnya ekspor Indonesia adalah posisi cadangan devisa yang masih tinggi. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa per Desember 2022 pada level USD137,2 miliar. Ketersediaan cadangan devisa yang tinggi tersebut memberikan ruang kepada bank sentral untuk melakukan intervensi terhadap pergerakan Rupiah, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global (di samping untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah). Kurs Rupiah terhadap Dolar AS ditutup melemah 9,23% per akhir tahun 2022 dibandingkan posisi akhir tahun 2021. Di saat yang sama, cadangan devisa Indonesia memang menurun dari level tahun 2021 sebesar USD144,9 miliar (menjadi USD137,2 miliar pada tahun 2022), sebagian diindikasikan digunakan dalam rangka intervensi pasar guna meredam depresiasi Rupiah lebih dalam.

Pengakuan atas kondisi terkini ekonomi Indonesia juga berasal dari lembaga-lembaga pemeringkat (*rating agencies*) yang memberikan *sovereign credit rating* Pemerintah Indonesia dengan *outlook* stabil.

detail, 65.58% of GDP in 2022 derived from the leading sectors of the Manufacturing, Trade, Agriculture, Mining, and Construction Industries. The improved performance of the Manufacturing Industry is supported by domestic-oriented industries such as car and motorcycle production as well as external demand, mainly supported by palm oil and base metals. Meanwhile, Mining is supported by solid demand and coal commodity prices.

The business sector with the highest growth performance in 2022 were: (1) transportation and warehousing sector which posted growth of 29.87% yoy; (2) Accommodation and food and beverage sector grew 11.97% yoy. The significant growth of the two sectors was supported by increased public mobility and increased tourist arrivals both from within and outside the country.

The continued positive impact of Indonesia's strong exports is the position of foreign exchange reserves that are still high. Bank Indonesia reported the position of reserve assets as of December 2022 at a level of USD137.2 billion. The high availability of foreign exchange reserves provides room for central banks to intervene in rupiah movements, in line with high uncertainty in global financial markets (in addition to servicing government external debt). The Rupiah exchange rate against the US Dollar closed down 9.23% at the end of 2022 compared to the position at the end of 2021. At the same time, Indonesia's foreign exchange reserves have indeed decreased from the level in 2021 of USD144.9 billion (to USD137.2 billion in 2022), partly indicated to be used for market intervention to reduce deeper rupiah depreciation.

Recognition of the current condition of the Indonesian economy also comes from rating agencies that provide sovereign credit ratings of the Government of Indonesia with a stable outlook.

TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW

Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Tanggal Date	Rating Actions	Sovereign Credit Rating per 31 Desember 2022
Moody's Investor Service	10 Februari 2022 10 February 2022	Moody's affirms Indonesia's Baa2 issuer rating; maintains stable outlook	Baa2/stable outlook
S&P Global Ratings	27 April 2022	Indonesia Outlook Revised To Stable From Negative; 'BBB/A-2' Ratings Affirmed	BBB/stable outlook
Fitch Ratings	14 Desember 2022 14 December 2022	Fitch Affirms Indonesia at 'BBB'; Outlook Stable	BBB/stable outlook
Rating & Investment Information (R&I)	4 Juli 2022 4 July 2022	Foreign Currency Issuer Rating: BBB+, Affirmed Rating Outlook: Stable	BBB+/stable outlook
Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)	27 Juli 2022 27 July 2022	Foreign Currency Long-term Issuer Rating: BBB+, Outlook: Stable Local Currency Long-term Issuer Rating: A-, Outlook: Stable	BBB+/stable outlook

Sumber: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan | Source: Bank Indonesia and the Ministry of Finance

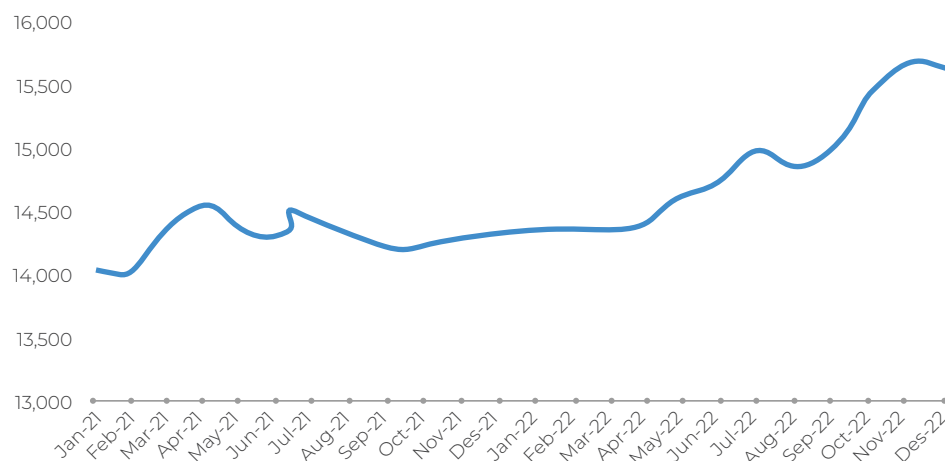
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap solid di tengah gejolak ekonomi, geopolitik, dan ekologi yang berdampak pada *outlook* global pada tahun 2023. Pemerintah melalui APBN memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 di kisaran 5,3%, ditopang fundamental makro ekonomi yang *robust*.

Dalam asumsi makroekonomi APBN 2023, nilai tukar Rupiah diasumsikan sebesar Rp14.800,- per Dolar AS. Namun demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mewaspadai potensi tekanan yang terjadi di pasar keuangan global, terutama berasal dari kebijakan moneter di AS yang diprediksi akan berada di level tinggi pada jangka panjang untuk meredam laju inflasi.

Furthermore, economic growth is expected to remain solid amid economic, geopolitical, and ecological turmoil impacting the global outlook in 2023. The government through the State Budget projects Indonesia's economic growth in 2023 in the range of 5.3%, supported by robust macroeconomic fundamentals.

In the macroeconomic assumptions of the 2023 State Budget, the Rupiah exchange rate is assumed to be Rp14,800 per US Dollar. Nevertheless, the Government and Bank Indonesia will continue to be vigilant of potential pressures on global financial markets, primarily stemming from monetary policy in the US which is predicted to be at a high level in the long term to dampen inflation.

Nilai Tukar Rupiah Rupiah Exchange Rates



Sumber: Bloomberg, diolah | Source: Bloomberg, processed

TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW

Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) posisi Desember 2022 tercatat sebesar 5,51% yoy (meningkat dibandingkan posisi 2021 senilai 1,87% yoy). Inflasi IHK 2022 lebih tinggi dari sasaran $3,0 \pm 1\%$, terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi per September 2022. Dalam asumsi makroekonomi APBN 2023, laju inflasi diproyeksikan mengalami moderasi ke level 3,6%. Dalam rangka mencapai angka inflasi 2023 tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi pangan dan energi, serta intervensi dari sisi harga.

Adapun asumsi tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SUN) 10 (sepuluh) tahun diperkirakan mencapai 7,9%, didukung fundamental makro ekonomi yang terjaga baik serta strategi pembiayaan yang prudent dan kredibel, sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar domestik.

Sementara itu, sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia, rata-rata harga minyak mentah diperkirakan mencapai USD90 per barel pada tahun 2023. Sementara itu, *lifting* minyak mentah diperkirakan mencapai 660.000 barel per hari, sedangkan *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.050.000 barel setara minyak per hari. Upaya-upaya untuk meningkatkan *lifting* migas nasional akan terus dilakukan melalui (i) percepatan proyek-proyek migas baru; (ii) menjaga level produksi lapangan *existing*; serta (iii) perbaikan regulasi dan insentif fiskal.

Meanwhile, Consumer Price Index (CPI) inflation in December 2022 stood at 5.51% yoy (up from 1.87% yoy in 2021). CPI inflation in 2022 is higher than the target corridor of $3.0 \pm 1\%$, primarily influenced by subsidized fuel price adjustments as of September 2022. In the macroeconomic assumptions of the 2023 State Budget, the inflation rate is projected to moderate to a level of 3.6%. In order to achieve the 2023 inflation figure, various efforts have been made by Bank Indonesia and the Government to ensure the availability of supply, efficient distribution of food and energy, and price interventions.

The assumption of the interest rate on 10 (ten) year Government Securities (SUN) is estimated at 7.9%, supported by well-maintained macroeconomic fundamentals and prudent and credible financing strategies, which is expected to maintain domestic financial market stability and investor confidence to invest in the domestic market.

Meanwhile, in line with world commodity price movements, the average crude oil price is estimated to reach USD90 per barrel in 2023. Meanwhile, crude oil lifting is estimated at 660,000 barrels per day, while gas lifting is estimated at 1,050,000 barrels of oil equivalent per day. Efforts to increase national oil and gas lifting will continue to be carried out through (i) acceleration of new oil and gas projects; (ii) maintaining existing field production levels; and (iii) improving regulations and fiscal incentives.

TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN EKSPOR

EXPORT FINANCING INDUSTRY REVIEW



Keterangan Description	Nilai Ekspor (Miliar USD) Export Value (USD Bilion)					Perubahan (%) Growth (%)			Peran terhadap total nilai ekspor Jan-Des 2022 (%)
	Des-21	Nov-22	Des-22	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022	Des-22	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022	
						%mtm	%yoy	%yoy	
						(a)	(b)	(c)	
Total Nilai Ekspor Total Export Value	22.36	24.09	23.83	231.61	291.98	-110%	6.58%	26.07%	100.00%
Migas Oil and Gas	1.08	1.10	1.48	12.25	16.02	33.86%	37.13%	30.77%	5.49%
Non Migas Non Oil and Gas	21.28	22.99	22.35	219.36	275.96	-2.78%	5.03%	25.80%	94.51%
Berdasarkan Sektor Non Migas By Sector non-oil and gas									
Pertanian Agriculture	0.40	0.42	0.37	4.24	4.69	-12.11%	-7.24%	10.61%	1.61%
Industri Pengolahan Manufacturing Industry	17.08	16.68	16.47	177.20	206.35	-1.25%	-3.59%	16.45%	70.67%
Pertambangan dan lainnya Mining and Others	3.80	5.89	5.51	37.92	64.92	-6.49%	44.95%	71.20%	22.23%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik rilis bulan Januari 2023, diolah
Source: Central Statistics Agency, Official Statistical News released in January 2023, processed

Proyeksi Pemulihan Komoditas

Commodity Recovery Projections

Komoditas Commodity	Turunan Derivative	Nilai Ekspor Indonesia (USD Juta) Indonesia Export Value (USD Million)						Growth Nilai Ekspor Indonesia Indonesia Export Value Growth (%yoy)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023F	2019	2020	2021	2022	2023F
Mineral dan Logam Minerals and Metals												
Batubara Coal	Batubara Coal	23,984	21,783	16,527	31,560	54,713	60,194	-9.2%	-24.1%	91.0%	73.4%	10.0%
Logam Metal	Emas Gold	2,032	3,552	5,542	1,520	1,028	1,049	74.8%	56.0%	-72.6%	-32.4%	2.1%
	Feronikel Ferronickel	1,368	2,601	4,745	7,107	13,708	14,709	90.1%	82.5%	49.8%	92.9%	7.3%
Perkebunan Plantation												
Minyak Sawit Palm Oil	Minyak Sawit Palm Oil	16,530	14,716	17,364	26,755	27,766	33,852	-11.0%	18.0%	54.1%	3.8%	21.9%
Karet Alam Natural Rubber	Karet Alam Natural Rubber	3,952	3,527	3,012	4,017	3,545	3,615	-10.7%	-14.6%	33.4%	-11.8%	2.0%
	Ban Tire	1,612	1,648	1,485	1,729	1,850	1,890	2.2%	-9.9%	16.4%	7.0%	2.1%
Perikanan												
Perikanan Fishery	Ikan Fish	1,159	1,253	1,375	1,364	1,607	1,743	8.1%	9.8%	-0.8%	17.8%	8.5%
	Udang & Moluska Shrimp and Molluscs	2,060	2,016	2,138	2,344	2,408	2,525	-2.1%	6.0%	9.6%	2.8%	4.9%
	Olahan Ikan & Udang Processed Fish & Shrimp	1,253	1,225	1,305	1,556	1,484	1,526	-2.3%	6.6%	19.2%	-4.6%	2.8%
Manufaktur												
Tekstil dan Produk Tekstil	Benang Thread	3,871	3,883	2,782	3,826	3,532	3,661	0.3%	-28.3%	37.5%	-7.7%	3.7%
	Kain Cloth	555	526	469	528	556	583	-5.2%	-10.9%	12.8%	5.3%	4.8%
	Pakaian Jadi Apparel	8,788	8,420	7,298	8,694	9,745	10,629	-4.2%	-13.3%	19.1%	12.1%	9.1%
Alas Kaki Footwear	Alas Kaki Footwear	5,113	4,409	4,804	6,186	7,742	8,232	-13.8%	9.0%	28.8%	25.2%	6.3%
Pulp dan Kertas Pulp and Paper	Pulp	2,649	2,783	2,536	3,285	3,702	3,921	5.0%	-8.9%	29.5%	12.7%	5.9%
	Kertas Paper	4,477	4,370	4,193	4,220	4,807	5,129	-2.4%	-4.1%	0.7%	13.9%	6.7%

TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN EKSPOR

EXPORT FINANCING INDUSTRY REVIEW

Komoditas Commodity	Turunan Derivative	Nilai Ekspor Indonesia (USD Juta) Indonesia Export Value (USD Million)						Growth Nilai Ekspor Indonesia Indonesia Export Value Growth (%yoy)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023F	2019	2020	2021	2022	2023F
Produk Kimia (termasuk Farmasi)	Produk Kimia	12,417	11,400	10,639	16,252	19,968	22,859	-8.2%	-6.7%	52.8%	22.9%	14.5%
Plastik	Plastik dan Barang dari Plastik	2,589	2,453	2,602	2,893	2,913	3,066	-5.2%	6.1%	11.2%	0.7%	5.2%
Kendaraan Bermotor Motor vehicle	Kendaraan Bermotor	7,552	8,188	6,603	8,636	10,981	10,860	8.4%	-19.4%	30.8%	27.1%	-1.1%
Kayu dan Furnitur Wood and Furniture	Bahan Kayu Wood Material	4,434	3,838	3,790	4,925	4,661	4,920	-13.4%	-1.3%	30.0%	-5.4%	5.6%
	Furnitur Furniture	1,797	2,064	2,287	3,018	2,939	3,036	14.9%	10.8%	31.9%	-2.6%	3.3%
Peralatan Elektronik Electronic Equipment	Permesinan dan Peralatan Elektronik Electronic Machinery and Equipment	14,722	14,555	14,437	18,084	21,508	23,738	-1.1%	-0.8%	25.3%	18.9%	10.4%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Oxford Economics, LPEI, diolah | Source: Central Bureau of Statistics, Oxford Economics, LPEI, processed

Kinerja Ekspor Indonesia

Di tengah eskalasi berbagai risiko global, total nilai ekspor Indonesia secara kumulatif (Januari hingga Desember) tahun 2022 kembali tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dengan valuasi sebesar USD291,98 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 26,07% yoy (2021: USD231,61 miliar). Perkembangan tersebut masih ditopang oleh kenaikan ekspor migas dan non-migas—memanfaatkan *windfall profit* dari tingginya harga komoditas—dengan peningkatan masing–masing hingga *double digit* yaitu 30,77% yoy untuk migas (menjadi USD16,02 miliar) dan 25,80% yoy untuk non-migas (menjadi USD275,96 miliar). Selain itu, peningkatan nilai ekspor pada tahun 2022 juga diikuti kenaikan volume ekspor sebesar 4,13% yoy.

Berdasarkan sektor, ekspor migas dan non-migas berkontribusi sebesar 5,49% dan 94,51% dari total nilai ekspor Indonesia di tahun 2022. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang ekspor non-migas terbesar dengan porsi mencapai 70,67%, diikuti pertambangan dan lainnya (porsi: 22,23%) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (porsi: 1,61%). Secara kumulatif tahunan, seluruh sektor berhasil mencatatkan pertumbuhan positif, masih ditopang oleh kenaikan ekspor batubara, feronikel, dan minyak sawit yang berkontribusi terhadap 32,94% total nilai ekspor Indonesia. Realisasi ekspor batubara mengalami kenaikan sebesar 73,36% yoy, didorong

Indonesia’s Export Performance

Amidst the escalation of various global risks, Indonesia’s total cumulative export value (January to December) in 2022 was again recorded as the highest in history with a valuation of USD291.98 billion, or an increase of 26.07% yoy (2021: USD231.61 billion). Such developments are still supported by increasing oil and gas and non-oil and gas exports, taking advantage of windfall profits from high commodity prices, with double-digit increases of 30.77% yoy for oil and gas (to USD16.02 billion) and 25.80% yoy for non-oil and gas (to USD275.96 billion). In addition, the increase in export value in 2022 was also followed by an increase in export volume by 4.13% yoy.

By sector, oil and gas and non-oil and gas exports contributed 5.49% and 94.51% of Indonesia’s total export value in 2022. The processing industry is still the largest contributor to non-oil and gas exports with a portion reaching 70.67%, followed by mining and others (portion: 22.23%) and agriculture, forestry, and fisheries (portion: 1.61%). Cumulatively, all sectors managed to record positive growth, still supported by an increase in exports of coal, ferronickel, and palm oil which contributed to 32.94% of Indonesia’s total export value. The realization of coal exports increased by 73.36% yoy, driven by high demand due to (a) energy crises in a number of countries,

TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN EKSPOR
EXPORT FINANCING INDUSTRY REVIEW

permintaan yang tinggi akibat (a) krisis energi di sejumlah negara, dan (b) tingginya harga batubara global. Ekspor feronikel juga melonjak hingga 92,88% yoy di tengah *demand* yang tinggi, khususnya dari Tiongkok, India, Taiwan, dan Korea Selatan. Sebaliknya, ekspor minyak sawit hanya tumbuh tipis sebesar 3,78% yoy seiring dengan sempat adanya larangan ekspor minyak goreng (termasuk CPO) pada April-Mei 2022.

Ekspor produk yang memiliki *value added* juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 ditopang oleh *demand* dari negara mitra dagang yang masih tinggi. Sejumlah produk manufaktur seperti kain dan pakaian jadi pada kelompok Tekstil dan Produk Tekstil, produk alas kaki, *pulp* dan kertas, produk kimia, plastik, kendaraan bermotor, hingga peralatan elektronik mencatatkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2022. Namun demikian, pertumbuhan ekspor manufaktur Indonesia diperkirakan melambat pada tahun 2023 seiring dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai potensi resesi global, sehingga berisiko mendisrupsi *demand* secara umum.

Berdasarkan negara tujuan, Tiongkok masih mendominasi pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia tahun 2022 dengan porsi sebesar 23,03% atau senilai USD63,55 miliar. Ekspor non-migas ke Tiongkok mencatatkan kenaikan yang solid sebesar 24,35% yoy dibandingkan tahun sebelumnya (2021: USD51,11 miliar), ditopang oleh penjualan batubara, feronikel, dan minyak sawit. Selanjutnya, Amerika Serikat (AS) dan India menjadi tujuan ekspor non-migas Indonesia terbesar lainnya dengan porsi masing-masing sebesar 10,22% dan 8,44% serta valuasi USD28,20 miliar dan USD23,30 miliar.

Secara spasial, tiga provinsi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total ekspor Indonesia sepanjang tahun 2022 yaitu Jawa Barat dengan porsi sebesar 13,22%, diikuti Kalimantan Timur (12,49%), dan Jawa Timur (8,48%). Secara kumulatif, ketiga provinsi tersebut berkontribusi terhadap 34,19% dari total ekspor nasional.

and (b) high global coal prices. Ferronickel exports also soared to 92.88% yoy amid high demand, particularly from China, India, Taiwan and South Korea. In contrast, palm oil exports only grew slightly by 3.78% yoy in line with the ban on cooking oil exports (including CPO) in April-May 2022.

Exports of value-added products also increased in 2022, supported by high demand from trading partner countries. A number of manufactured products such as fabrics and apparel in the Textile and Textile Products group, footwear products, pulp and paper, chemical products, plastics, motor vehicles, to electronic equipment recorded an increase in growth in 2022. However, Indonesia's manufacturing export growth is expected to slow in 2023 in line with growing concerns about a potential global recession, risking disruption to demand in general.

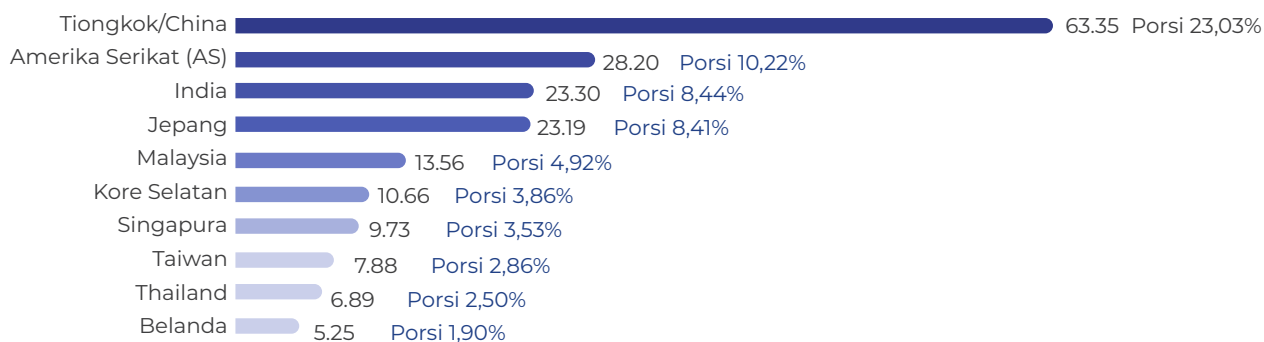
Based on destination countries, China still dominates Indonesia's non-oil and gas export market share in 2022 with a portion of 23.03% or valued at USD63.55 billion. Non-oil and gas exports to China recorded a solid increase of 24.35% yoy compared to the previous year (2021: USD51.11 billion), supported by sales of coal, ferronickel and palm oil. Furthermore, the United States (US) and India became the other largest Indonesian non-oil and gas export destinations with portions of 10.22% and 8.44% respectively and valuations of USD28.20 billion and USD23.30 billion.

Spatially, the three provinces that contributed the most to Indonesia's total exports throughout 2022 were West Java with a portion of 13.22%, followed by East Kalimantan (12.49%), and East Java (8.48%). Cumulatively, the three provinces contribute to 34.19% of total national exports.

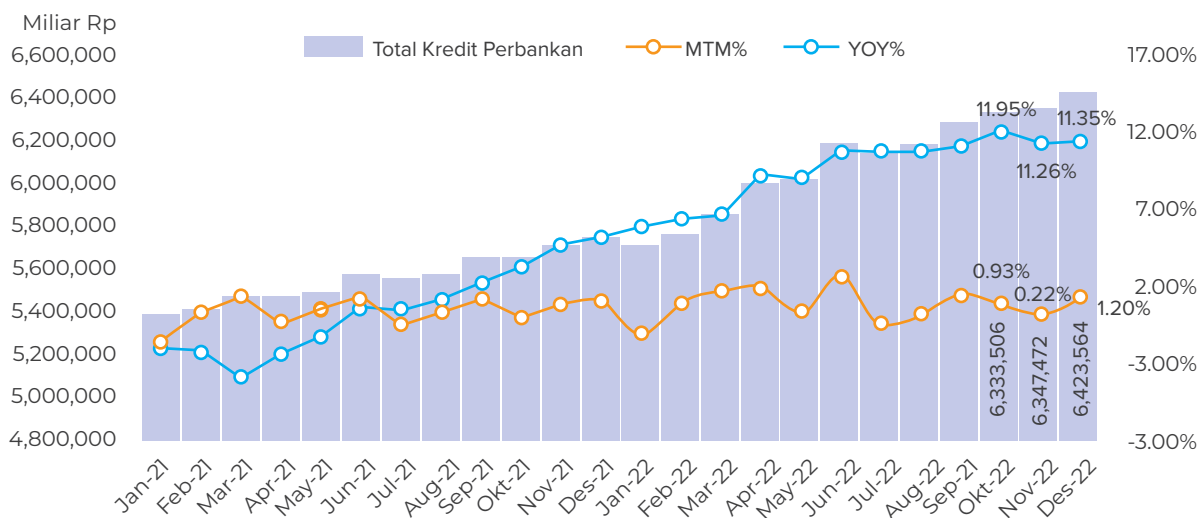
TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN EKSPOR
EXPORT FINANCING INDUSTRY REVIEW

Sepanjang Januari–Desember 2022, surplus pada sektor non-migas sebetulnya mencapai USD78,85 miliar, tetapi tereduksi oleh defisit pada sektor migas sebesar USD24,39 miliar. Dengan demikian, surplus perdagangan secara total tercatat sebesar USD54,46 miliar; memperpanjang catatan surplus perdagangan Indonesia selama 32 bulan beruntun per Desember 2022.

During January–December 2022, the surplus in the non-oil and gas sector actually reached USD78.85 billion, however was reduced by a deficit in the oil and gas sector of USD24.39 billion. Thus, the total trade surplus was recorded at USD54.46 billion; extended Indonesia's record trade surplus for 32 consecutive months as of December 2022.

Pasar Ekspor Non-Migas Indonesia (USD Miliar)
Indonesia's Non-Oil & Gas Export Market (USD Billion)


Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik rilis bulan Januari 2023, diolah
Source: Central Statistics Agency, Official Statistical News released in January 2023, processed

Perkembangan Kredit Perbankan di Indonesia
Development of Banking Loans in Indonesia


Sumber: Siaran Pers OJK, Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, Uang Beredar (M2) BI, diolah
Source: OJK Press Release, OJK Indonesian Banking Statistics (SPI), BI Money Supply (M2), processed

TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN EKSPOR
EXPORT FINANCING INDUSTRY REVIEW

Penyaluran kredit perbankan Indonesia hingga bulan Desember 2022 mencapai Rp6.424 triliun atau secara tahunan meningkat 11,35% yoy (lebih baik dari bulan sebelumnya yang hanya sebesar 11,26% yoy). Berdasarkan data Jumlah Uang Beredar, secara khusus Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja / KMK dan Kredit Investasi / KI) bulan Desember 2022 tumbuh 11,63% yoy, turun tipis dari pertumbuhan bulan sebelumnya (11,72% yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang pertumbuhan KMK (11,73% yoy) dan KI (11,46% yoy). Adapun Kredit Konsumsi / KK juga mengalami kenaikan 9,37% yoy di bulan Desember 2022. Sementara itu, Kredit Ekspor terkini yaitu per bulan Desember 2022 tumbuh negatif di level -4,62% yoy sejalan dengan tren perlambatan kinerja ekspor Indonesia disertai dengan *high-based effect* karena pertumbuhan yang sangat tinggi di tahun 2021.

Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) bank umum di bulan Desember 2022 berada di level 2,44%, turun dari bulan sebelumnya (2,65%). Rasio NPL terbesar per bulan Desember 2022 berdasarkan jenis penggunaan berasal dari Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar 3,25%, diikuti Kredit Investasi (KI) sebesar 1,97%, sehingga menempatkan rasio NPL Kredit Produktif (KMK+KI) di level 2,78%. Sementara itu, rasio NPL Kredit Ekspor per bulan Desember 2022 berada di level 2,91%. Meskipun rasio NPL masih terjaga, tetapi risiko gagal bayar kredit atau *loan at risk* (LAR) patut diwaspadai fluktuasinya di tengah berlangsungnya program restrukturisasi kredit—yang baru saja diperpanjang hingga 31 Maret 2024. Adapun likuiditas dan tingkat kesehatan per bulan Desember 2022 masih terjaga dengan baik, tercermin dari nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di level 25.68%.

Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sistem keuangan masih terjaga, seiring dengan fungsi intermediasi yang tumbuh melebihi ekspektasi—didorong oleh jenis kredit modal kerja dan kredit korporasi—sejalan dengan kinerja perekonomian domestik yang membaik.

Indonesia's bank lending until December 2022 reached Rp6,424 trillion, an annual increase of 11.35% yoy (improved than the previous month of only 11.26% yoy). Based on data on the Money Supply, in particular, productive loans (Working Capital Loans and Investment Loans) in December 2022 grew 11.63% yoy, slightly decreased from the previous month's growth (11.72% yoy). This growth was supported by Working Capital Loans (11.73% yoy) and Investment Loans (11.46% yoy) growth. Meanwhile, Consumer Loans also increased 9.37% yoy in December 2022. Meanwhile, the latest Export Credit as of December 2022 grew negatively at the level of -4.62% yoy in line with the slowing trend in Indonesia's export performance accompanied by a high-based effect due to very high growth in 2021.

Commercial banks' Non-Performing Loan (NPL) ratio in December 2022 stood at 2.44%, down from 2.65% the month earlier. The largest NPL ratio as of December 2022 based on the type of use derived from Working Capital Loans (KMK) at 3.25%, followed by Investment Loans (KI) at 1.97%, thus placing the NPL ratio of Productive Loans (KMK + KI) at 2.78%. Meanwhile, the NPL ratio of Export Loans as of December 2022 was at 2.91%. Although the NPL ratio being kept stable, the risk of loan at risk (LAR) requires close monitoring for fluctuations amid the ongoing credit restructuring program, which has just been extended until 31 March 2024. Meanwhile, liquidity and health levels as of December 2022 are still well maintained, reflected in the Capital Adequacy Ratio (CAR) value at 25.68%.

The Financial Services Authority considers financial system stability to be maintained, in line with the intermediation function that grew beyond expectations, driven by working capital loans and corporate loans, in line with improving domestic economic performance.



PROSPEK USAHA

BUSINESS PROSPECT

Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2022 sebesar 5,3% yoy memberikan fondasi yang kuat bagi kesinambungan ekonomi Indonesia di tahun 2023 meski masih menghadapi tantangan global terutama akibat krisis geopolitik di Ukraina yang masih berlanjut hingga saat ini. Pemerintah dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% dengan inflasi yang lebih terkendali yang mencapai 3,6%. Sejalan dengan tingkat inflasi yang diperkirakan lebih terkendali, tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun diproyeksikan sebesar 7,9% seiring dengan risiko ketidakpastian pasar keuangan dan berlanjutnya pengetatan moneter global. Di sisi lain, kurs Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan sebesar Rp14.800 yang diperkuat dengan *lifting* minyak mentah dan gas bumi masing-masing sebesar 660 ribu barel per hari dan 1.100 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, ekspor barang dan jasa diperkirakan tumbuh 6,8%-8,0%. Secara spesifik, Pertumbuhan ekspor industri pengolahan diperkirakan tumbuh 11,18%.

Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa diprakirakan akan tumbuh 6,6%-7,8%, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.

Sejalan dengan target pemerintah di atas, LPEI optimis atas prospek usaha di tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, LPEI menetapkan strategi dan prioritas yang menjadi acuan dalam mengembangkan bisnis di tahun 2023 sebagai berikut:

- Pertumbuhan Bisnis sesuai Mandat;
- Pertumbuhan Pendanaan yang Optimal;

Indonesia's GDP growth of 5.3% yoy in 2022 provides a strong foundation for Indonesia's economic sustainability in 2023 even though remain facing the global challenges, particularly due to the prolonged geopolitical crisis in Ukraine. The government in the State Budget and Expenditure Plan (RAPBN) targets economic growth of 5.3% with more controlled inflation reaching 3.6%. In line with the controlled inflation rate, the 10-Year SUN Interest Rate is projected at 7.9% in line with the risk of financial market uncertainties and continued global monetary tightening. On the other hand, the Rupiah exchange rate against the US Dollar is estimated at Rp14,800, which is strengthened by the lifting of crude oil and natural gas at 660 thousand barrels per day and 1,100 thousand barrels of oil equivalent per day, respectively.

Meanwhile, the Government expects economic growth of 5.3%-5.9% as stated in the Government's Work Plan (RKP) for 2023. Investment and exports are expected to be the driving force for economic growth in 2023 to increase the productive capacity of the Indonesian economy. To achieve this target, exports of goods and services are estimated to grow by 6.8%-8.0%. Specifically, the export growth of the manufacturing industry is expected to grow by 11.18%.

The recovery in global demand and optimism for a continued economic recovery are the driving factors for high export growth. Meanwhile, imports of goods and services are projected to grow 6.6%-7.8%, reflecting stronger domestic economic activity. This is driven by the increasing need for raw materials/auxiliaries for the manufacturing industry, capital goods for investment, and domestic consumption.

In line with the above government's target, Indonesia Eximbank is optimistic on the business prospects in 2023. In this regard, Indonesia Eximbank has set strategies dan priorities that become a reference in developing the business in 2023 as follows:

- Business Growth in accordance with the Mandate;
- Optimal Funding Growth;

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

- Percepatan Perbaikan Kualitas Aset Organik;
- Percepatan Perbaikan Kualitas Aset Inorganik;
- Kolaborasi dengan Ekosistem Ekspor;
- GRC yang Kuat dan Modern;
- Optimalisasi Struktur Organisasi, SDM dan Budaya;
- Penguatan Kemampuan dan Infrastruktur IT;
- Manajemen Komunikasi dan *Stakeholder*.

Dukungan aspek finansial melalui pembiayaan, penjaminan dan asuransi akan diberikan oleh LPEI selain mendorong dan meningkatkan kelas UKM Indonesia melalui program jasa konsultasi. Disamping itu, LPEI akan melanjutkan kolaborasi dengan kementerian/ lembaga ataupun pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan edukasi untuk para calon eksportir serta *community development* melalui program Desa Devisa yang bertujuan untuk terus mendorong kontribusi UKM Indonesia dalam rangka peningkatan ekspor.

- Acceleration of Organic Asset Quality Improvement;
- Acceleration of Inorganic Asset Quality Improvement;
- Collaboration with Export Ecosystem;
- Robust and Modern GRC;
- Optimization of Organizational Structure, HR and Culture;
- Strengthening IT Capabilities and Infrastructure;
- Stakeholder Communication and Management.

zvw The financial aspect support through financing, guarantee and insurance will be provided by Indonesia Eximbank in addition to promoting and improving the class of Indonesian SMEs through advisory programs. Moreover, Indonesia Eximbank will continue to collaborate with the ministries/institutions or other stakeholders to improve education for prospective exporters and community development through the *Desa Devisa* program, which aims at continuing to promote the contribution of Indonesian SMEs in enhancing exports.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT

LPEI didirikan dengan tujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir. Pembiayaan dapat diberikan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM. Selain itu, LPEI merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penjaminan Pemerintah selama pandemi.

Dalam menjalankan beragam mandat yang diberikan oleh Pemerintah tersebut di atas, LPEI menjalankan beragam strategi pemasaran sebagai berikut:

Indonesia Eximbank was established with the aim of supporting Government policies to promote the national export programs. Indonesia Eximbank provides financing, guarantee, insurance, and advisory services for exporters. Financing can be provided, both conventionally and based on sharia principles to corporations and SMEs. In addition, Indonesia Eximbank assists the Government in implementing the National Economic Recovery (PEN) program through Government guarantees during the pandemic.

In carrying out the various mandates given by the Government as stated above, Indonesia Eximbank carries out various marketing strategies as follows:

ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECT

- Peningkatan penyaluran pembiayaan ekspor melalui skema pembiayaan konvensional maupun syariah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah sehingga mampu mendukung kegiatan ekspor serta membiayai segmen UKME dan pembiayaan korporasi dengan memperhatikan pengelolaan risiko secara sehat.
 - Enhancing export financing through conventional and sharia financing schemes while still prioritizing the principle of prudence both domestically and abroad. The financing disbursement is carried out in accordance with customer needs so as to be able to support export activities and finance the SME-Export-Oriented segment and corporate financing by taking into account sound risk management.
 - Peningkatan penyaluran pinjaman melalui koordinasi dengan regulator terutama dalam hal penyesuaian beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas ruang gerak penjaminan yang diberikan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian disamping penyediaan penjaminan bagi UKME agar mudah memperoleh akses pembiayaan.
 - Enhancing lending through coordination with regulators, particularly in terms of regulatory provisions adjustment to expand the scope of guarantees while still prioritizing the principle of prudence in addition to providing guarantees for SMEs' easy access to financing.
 - Penjaminan yang diberikan LPEI meliputi penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.
 - The guarantees provided by Indonesia Eximbank include guarantees for Indonesian exporters for payments received from buyers of goods/services abroad, guarantees for importers of Indonesian goods/services abroad for payments that have been settled, guarantees for banks that provide export transaction financing to Indonesian exporters, as well as guarantees for tenders related to projects implementation that fully or partly support exports activities.
- LPEI juga menyediakan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program penjaminan korporasi padat karya (JAMINAH) untuk perbankan agar pemberian kredit dapat terus berjalan sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat.
- Indonesia Eximbank also provides Government Guarantees for the National Economic Recovery through the labour-intensive corporation guarantee program (JAMINAH) for banks loans disbursement to accelerate economic recovery.
- Peningkatan penyaluran asuransi dengan melakukan koordinasi dengan regulator terkait dengan penyesuaian beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas ruang gerak asuransi disamping penyediaan asuransi bagi UKM agar mudah memperoleh akses pembiayaan. Asuransi ekspor
 - Enhancing insurance disbursement by coordinating with regulators related to regulatory adjustments to expand insurance capacity in addition to providing insurance for SMEs' easy access to financing. Export insurance includes insurance for the risk of export failure, insurance for the risk of default, insurance for

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT

meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

- Peningkatan peran jasa konsultasi dengan berfokus pada peningkatan kapasitas *business advisory* serta perluasan akses pasar baik secara konvensional maupun *digital commerce*. Terkait dengan hal ini, LPEI memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas jasa konsultasi, LPEI meningkatkan kapasitas baik secara komprehensif maupun secara tematik yang dapat diaplikasikan melalui pemangku kepentingan eksternal.

investments made by Indonesian companies abroad, and/or insurance for political risks in a country that is the export destination.

- Enhancing the role of advisory services by focusing on business advisory capacity improvement and market access expansion, both conventionally and in digital commerce. In this regard, Indonesia Eximbank provides guidance and advisory to the banks, financial institutions, exporters, producers of export goods, particularly micro, small, medium enterprises and cooperatives to help overcome obstacles faced by the banks/financial institutions in providing financing for exporters who are commercially has the potential and/or key for the development of the Indonesian economy. As such, in improving the quality of its advisory services, Indonesia Eximbank improves the capacity both comprehensively and thematically that can be applied through external stakeholders.

STRATEGI BISNIS
BUSINESS STRATEGY

Di tengah kondisi perekonomian global dan nasional yang dinamis selama 2022, LPEI senantiasa tetap fokus dalam menjalankan mandat *Enabling Export* dan *Empowering Nation*. Selain itu, di waktu yang bersamaan, LPEI juga terus berupaya memperbaiki kondisi bisnis maupun kinerja keuangan agar optimal dalam mendorong peningkatan ekspor nasional yang kokoh dan berkelanjutan serta bermanfaat luas.

Amidst the dynamic global and national economic conditions during 2022, Indonesia Eximbank remains focused on carrying out its mandate of Enabling Export and Empowering the Nation. At the same time, Indonesia Eximbank also strives to improve business conditions and financial performance by promoting towards strong and sustainable national exports with extensive benefits.

STRATEGI BISNIS
BUSINESS STRATEGY

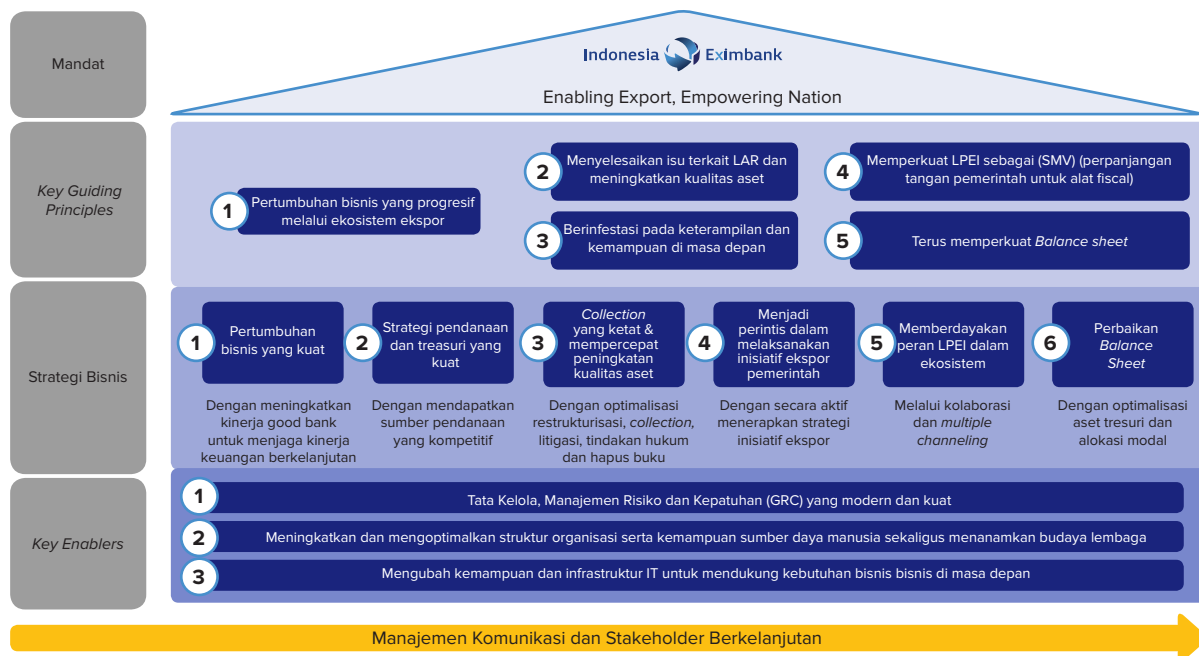
Dalam melaksanakan mandat *Enabling Export* dan *Empowering Nation*, LPEI telah melakukan revitalisasi dengan menerapkan lima *key guiding principles* yaitu:

1. Pertumbuhan bisnis yang progresif melalui ekosistem ekspor.
2. Menyelesaikan isu terkait *Loan to Asset Ratio* (LAR) dan meningkatkan kualitas aset.
3. Berinvestasi pada keterampilan dan kemampuan di masa depan.
4. Memperkuat peran LPEI sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Terus memperkuat *Balance Sheet*.

In carrying out the mandate of *Enabling Export* and *Empowering the Nation*, Indonesia Eximbank has revitalized by implementing five key guiding principles:

1. Progressive business growth through the export ecosystem.
2. Resolving issues related to *Loan to Asset Ratio* (LAR) and improving asset quality.
3. Investing in skills and abilities in the future.
4. Strengthening the role of Indonesia Eximbank as a *Special Mission Vehicle* (SMV) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
5. Continue to strengthen the Balance Sheet.

Strategi LPEI | Indonesia Eximbank Strategies



Untuk mewujudkan mandat dan penerapan kelima *key guiding principles* tersebut selama 2022, LPEI juga telah menyusun dan mengimplementasikan enam strategi bisnis utama dengan titik berat pada penguatan bisnis dan kualitas aset. Ada pun keenam strategi bisnis utama LPEI dimaksud adalah sebagai berikut:

To realize the mandate and implementation of the five key guiding principles in 2022, Indonesia Eximbank has also compiled and implemented six main business strategies with a major emphasis on strengthening business and asset quality. The six main business strategies are as follows:

STRATEGI BISNIS
BUSINESS STRATEGY

1. Pertumbuhan bisnis yang kuat dengan meningkatkan kinerja *good bank* untuk menjaga kinerja keuangan secara berkelanjutan. Hasil penerapan strategi ini telah membuahkan sejumlah hasil yang positif untuk LPEI di 2022. Diantaranya adalah tren pembiayaan kembali meningkat dengan adanya kolaborasi dengan perbankan; *trade finance volume* dan asuransi dapat tumbuh signifikan dengan adanya kolaborasi dan melakukan *cross selling* bersama unit Pembiayaan; serta pendekatan baru Jasa Konsultasi dengan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian/Lembaga (K/L), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan swasta berhasil membuat peningkatan secara signifikan dalam mencetak Desa Devisa dan Eksportir baru.
2. Strategi pendanaan dan treasury yang kuat dengan memastikan mendapat sumber pendanaan yang kompetitif serta pemanfaatan likuiditas secara optimal.
3. *Collection* yang ketat dan mempercepat peningkatan kualitas aset dengan optimalisasi restrukturisasi, *collection*, litigasi, tindakan hukum dan hapus buku.
4. Menjadi perintis dalam melaksanakan inisiatif ekspor pemerintah dengan secara aktif menerapkan strategi inisiatif ekspor pemerintah.
5. Memberdayakan peran LPEI dalam ekosistem melalui kolaborasi dan *multiple channeling* guna menciptakan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta mengikutsertakan ESG (*Environmental, Social and Governance*) agar dapat membuka lebih banyak peluang untuk kemajuan ekspor Indonesia.
6. Perbaikan *Balance Sheet* dengan optimalisasi aset treasury dan alokasi modal.

Selain keenam strategi bisnis utama tersebut, LPEI juga mengaplikasikan tiga strategi bisnis yang bersifat sebagai *key enablers* yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (GRC) yang modern dan kuat. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat fondasi

1. Strong business growth by improving good bank performance to maintain sustainable financial performance. The implementation of this strategy has resulted in a number of positive performances for Indonesia Eximbank in 2022. Among them is the increase trend of refinancing that collaborate with the banks; significant growth of trade finance volume and insurance that collaborate and cross-selling with financing units; and a new approach of Advisory Services that collaborate with local governments (local municipalities), ministries/ institutions (K/L), Group of State-Owned Banks (Himbara), and the private sector has succeeded in making significant improvements in creating new *Desa Devisa* and exporters.
2. A strong funding and treasury strategy by ensuring competitive funding sources and optimal utilization of liquidity.
3. Strict collection and accelerate asset quality improvement by optimizing restructuring, collection, litigation, legal action and write-offs.
4. Becoming a pioneer in implementing government export initiatives by actively implementing the government's export initiative strategy.
5. Empowering the role of Indonesia Eximbank in the ecosystem through collaboration and multiple channelling to create extensive and sustainable benefits for the community, as well as ESG (Environmental, Social and Governance) in order to open more opportunities for the advancement of Indonesia's exports.
6. Balance Sheet improvement by optimizing treasury assets and capital allocation.

In addition to the six main business strategies, Indonesia Eximbank also applies three business strategies as key enablers, as follows:

1. Improving modern and robust governance, risk management and compliance (GRC). This is pivotal to strengthen the foundation of Indonesia Eximbank in

STRATEGI BISNIS
BUSINESS STRATEGY

LPEI dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian serta mitigasi risiko hukum.

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan struktur organisasi serta kemampuan sumber daya manusia sekaligus menanamkan budaya Lembaga.
3. Mengubah kemampuan dan infrastruktur IT untuk mendukung kebutuhan bisnis di masa depan.

Seiring dengan pertumbuhan organisasi, LPEI juga terus melakukan transformasi yang sudah dimulai sejak 2020 hingga 2021 yang dikenal dengan *Regain our Footing*, dimana upaya transformasi yang telah dilakukan selama periode ini antara lain fokus pada perbaikan kualitas aset yang dilakukan secara bertahap, mendukung pemulihan ekonomi terdampak Covid-19, dan penguatan internal yang dilakukan secara intensif termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi.

promoting sustainable business growth by prioritizing compliance and prudential aspects, as well as mitigating legal risks.

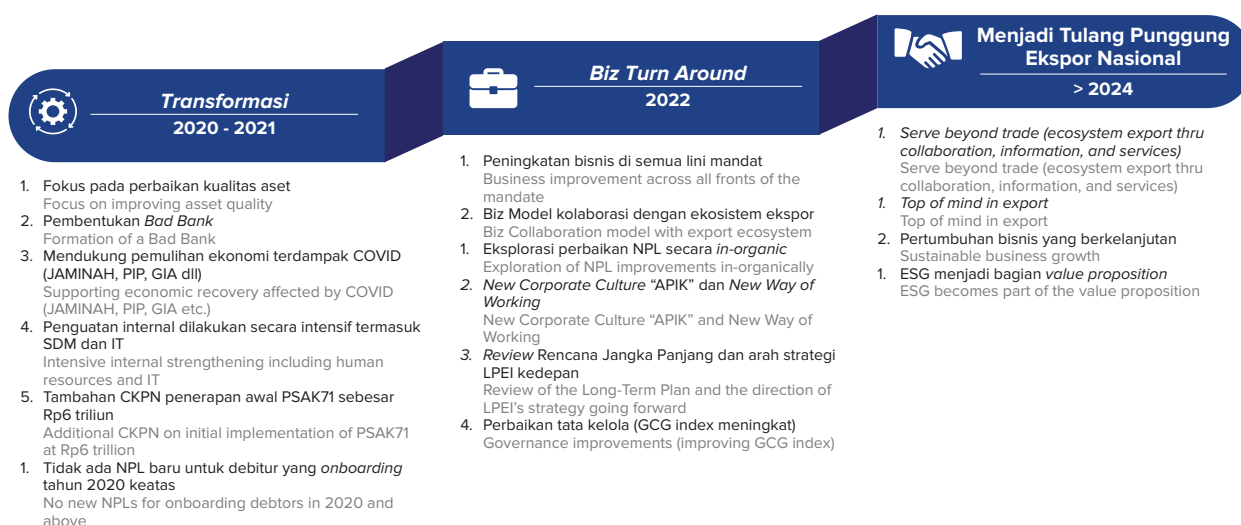
2. Improving and optimising the organizational structure and capabilities of human resources while instilling the culture of the Institution.
3. Transforming IT capabilities and infrastructure to foster future business needs.

Align with the organization growth, Indonesia Eximbank also continues to carry out transformations that have started from 2020 to 2021 known as *Regain our Footing*, in which the transformations that have been carried out during this period include to focusing on gradually improving asset quality, supporting the economic recovery affected by the Covid-19, and intensive internal strengthening including human resources and information technology.

Biz Turn Around is the transformation carried out by

Transformasi LPEI Periode 2020 - 2024

Indonesia Eximbank Transformation Period of 2020 - 2024



Sedangkan untuk periode 2022, LPEI mengusung tema transformasi dengan sebutan *Biz Turn Around* dengan penekanan pada percepatan bisnis yang berkelanjutan. Transformasi yang telah dilakukan LPEI di periode ini setidaknya ada enam upaya yaitu:

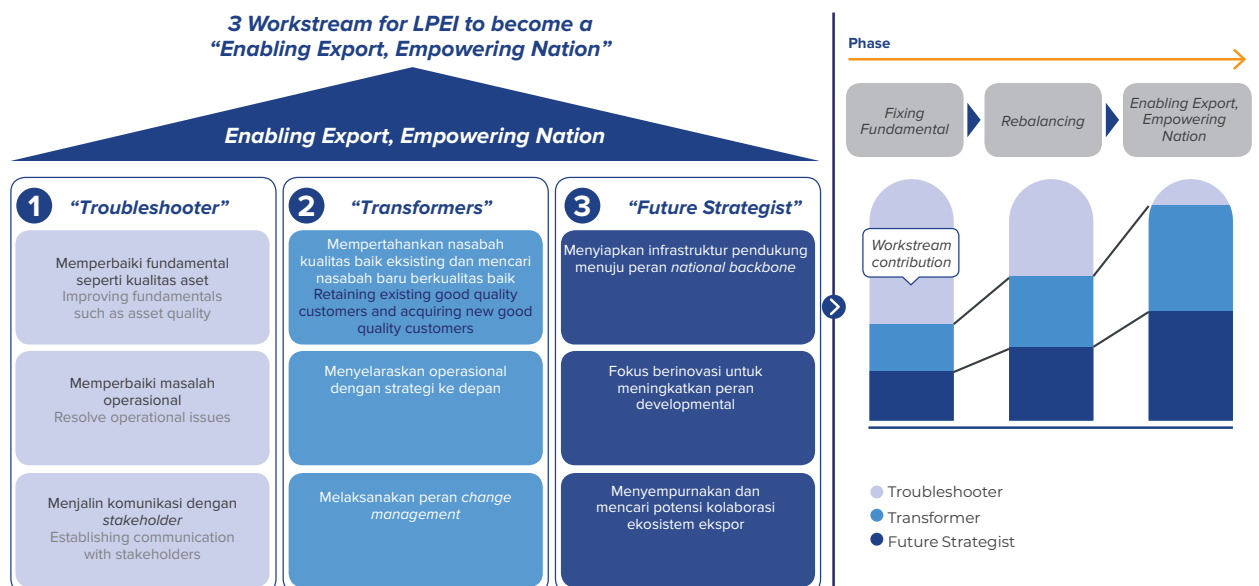
Indonesia Eximbank in 2022, with an emphasis on accelerating sustainable business. This transformation has been carried out by Indonesia Eximbank through at least six efforts, as follows:

STRATEGI BISNIS
BUSINESS STRATEGY

1. Peningkatan bisnis di semua lini mandat (Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi).
2. Model bisnis kolaborasi dengan ekosistem ekspor.
3. Eksplorasi perbaikan *non performing loan* (NPL) secara *in-organic*. Strategi yang dilakukan LPEI dalam hal ini antara lain terus melakukan *monitoring* secara ekstensif sarana akun *watchlist* dan optimalisasi *early warning detection*, melakukan restrukturisasi dan *recovery* agunan, serta hapus buku. Mengenalkan dan menerapkan *new corporate culture* yang dikenal dengan "APIK" (*Agile*, Profesionalisme, Integritas, dan Kreativitas) serta *new way of working* sebagai *Core Values* LPEI dalam rangka meningkatkan kinerja dan layanan terutama dalam menjalankan mandat mendorong ekspor nasional.
4. Melakukan *review* rencana jangka panjang dan arah strategi LPEI ke depan.
5. Melakukan perbaikan tata kelola sehingga GCG *index* dapat meningkat.

1. Business improvement across all lines of mandate (Financing, Guarantee, Insurance and Advisory Services).
2. Business model collaboration with export ecosystem.
3. Exploration of non-performing loans (NPL) improvements in-organically. Indonesia Eximbank's strategies were continue to extensively monitoring the watchlist accounts and optimizing early warning detection, restructuring and recovering collateral, and write-offs.
4. Introducing and applying a new corporate culture known as "APIK" (Agile, Professionalism, Integrity, and Creativity), as well as a new way of working as the Core Values of Indonesia Eximbank in order to improve performance and services, particularly in carrying out the mandate to promote the national exports.
5. Reviewing the long-term plan and the direction of Indonesia Eximbank's strategy going forward.
6. Making improvements in governance to increase GCG index.

Transformation Operating Model

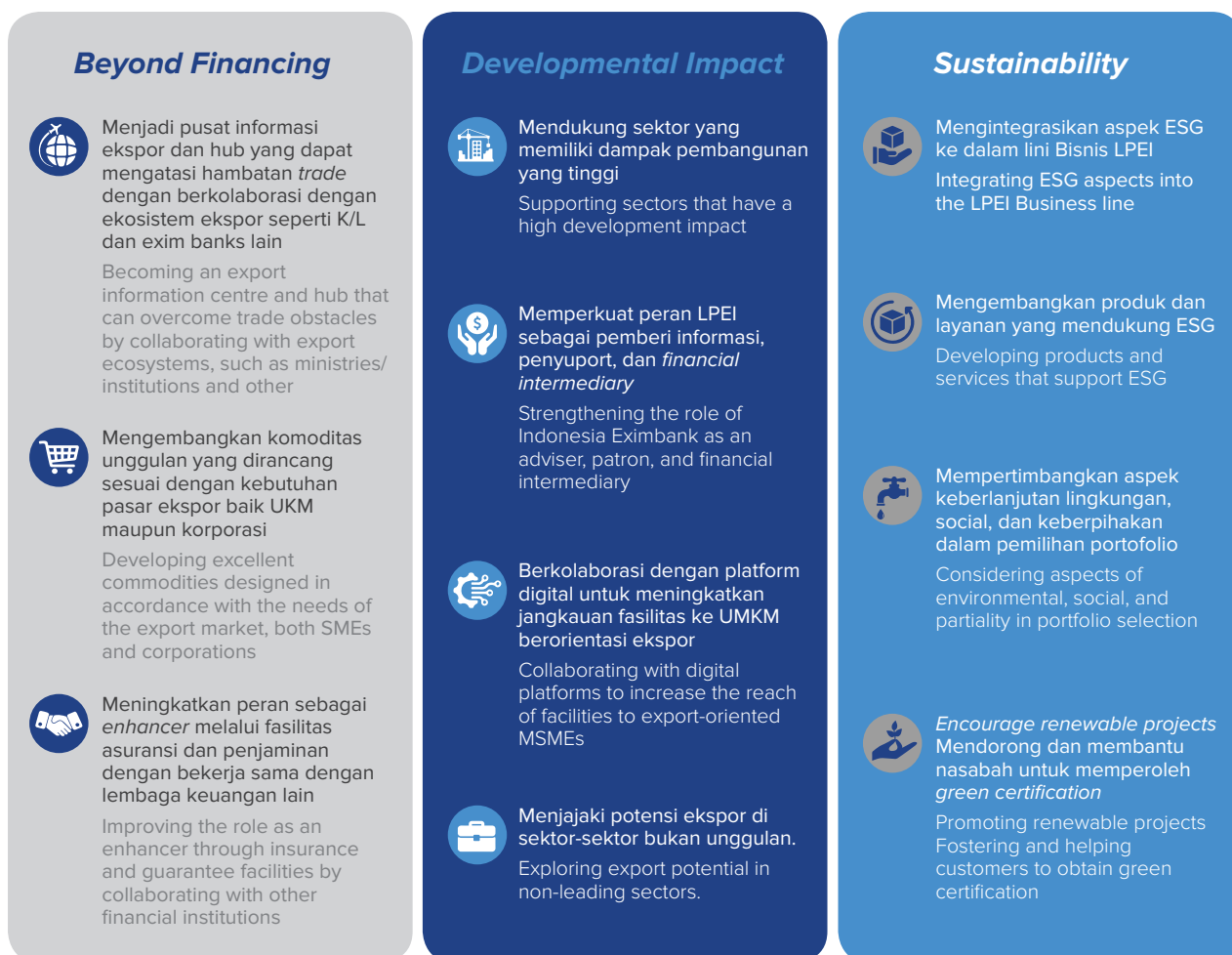


STRATEGI BISNIS
BUSINESS STRATEGY

Selaku lembaga yang *Sui Generis* atau memiliki misi khusus dan unik untuk menjalankan misi pembangunan serta mendorong ekspor nasional, LPEI juga terus memperkuat *value proposition*-nya ke dalam strategi bisnis sehingga lebih adaptif terhadap dinamika global. Ada pun *value proposition* yang dimiliki LPEI dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

As a *Sui Generis* institution or has a special and unique mission to carry out the development missions and promote the national exports, Indonesia Eximbank also continues to strengthen its proposition value into business strategies to be more adaptive to global dynamics. The proposition value is illustrated in the chart below:

LPEI Value Proposition



TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

BUSINESS SEGMENT OPERATIONAL REVIEW



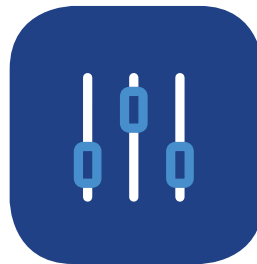
.01
PEMBIAYAAN
FINANCING



.02
PENJAMINAN
GUARANTEE



.03
ASURANSI
INSURANCE



.04
TRADE
FINANCE
TRADE
FINANCE



.05
TREASURY
TREASURY



.06
JASA
KONSULTANSI
ADVISORY SERVICES



.07
PENUGASAN KHUSUS
NATIONAL INTEREST ACCOUNT



.01

PEMBIAYAAN FINANCING

LPEI terus memperkuat perannya dalam mendukung kegiatan ekspor nasional dengan memberikan pembiayaan inovatif yang menjangkau seluruh segmen. Selain itu, LPEI juga meningkatkan kerjasama dengan ekosistem ekspor termasuk perbankan swasta dan lembaga keuangan lainnya guna meningkatkan akses pembiayaan bagi eksportir Indonesia. Dengan demikian, diharapkan LPEI dapat membantu para eksportir dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Indonesia Eximbank continues to strengthen its role in fostering national export activities by providing innovative financing that reaches all segments. Moreover, Indonesia Eximbank also increases cooperation with the export ecosystem including private banks and other financial institutions to increase access to financing for Indonesian exporters. As such, it is expected that Indonesia Eximbank can assist exporters in meeting the financing needs to increase the competitiveness of Indonesian export products in the international market.

PEMBIAYAAN KORPORASI

LPEI berperan aktif memberikan dukungan dalam pembiayaan korporasi untuk terus mendorong peningkatan perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi signifikan dari korporasi terhadap ekspor Indonesia yang merupakan salah satu elemen penting dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, pembiayaan kepada korporasi yang merupakan salah satu katalis bagi perekonomian menjadi primadona utama produk LPEI dan penyumbang pendapatan dengan menargetkan pelaku ekspor yaitu perusahaan-perusahaan korporasi yang melakukan kegiatan ekspor langsung (*direct export*) maupun secara tidak langsung (*indirect export*).

Pembiayaan yang disalurkan LPEI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor langsung maupun tidak langsung dalam skema pembiayaan kredit investasi ekspor seperti pembiayaan CAPEX, dan *project financing*, serta Kredit Modal Kerja Ekspor maupun transaksi *trade financing* (*pre* dan *post Shipment Financing*). Langkah LPEI dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur maupun calon debitur dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan pada akhirnya meningkatkan ekspor Indonesia dalam konteks pendapatan devisa negara yang lebih optimal.

Fokus Pembiayaan di Tahun 2022

Dalam menyediakan pembiayaan kepada korporasi, LPEI menitikberatkan pertumbuhan pembiayaan korporasi yang sesuai dengan mandat sebagaimana diamanatkan dalam UU LPEI No. 02 tahun 2009. LPEI juga mengedepankan implementasi fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam Penugasan Khusus Ekspor (*National Interest Account*) serta penyaluran pembiayaan yang tumbuh sehat, berkualitas dan menghasilkan. Dengan demikian, peran LPEI sebagai *special mission vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan sebagai wakil Pemerintah Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, LPEI dalam memberikan pembiayaan ini fokus kepada sektor industri yang sehat dan bertumbuh.

CORPORATE FINANCING

Indonesia Eximbank takes an active role in supporting corporate financing to boost the national economy. This is inseparable from the significant contribution of companies to Indonesia's exports, which is an essential component of the country's Gross Domestic Product (GDP). Consequently, corporate financing, which is one of the catalysts for the economy, has become Indonesia Eximbank's flagship product and a revenue generator by targeting exporters, specifically corporate entities that conduct direct or indirect export activities.

Indonesia Eximbank's financing is intended to improve a company's operational capabilities in direct and indirect export activities, through export investment credit financing schemes, such as CAPEX financing and project financing, as well as export working capital credit and trade financing transactions (*pre*- and *post*-shipment financing). By directing financing to debtors and potential debtors, Indonesia Eximbank aims to enhance overall business performance, ultimately leading to increased exports and more favourable foreign exchange earnings for Indonesia.

Focus on Financing in 2022

Indonesia Eximbank prioritizes the growth of corporate financing align with its mandate under Law No. 02 of 2009 when providing financing to companies. The Institution also gives priority to implementing its function as an extension of the government's arm in the Export Special Assignment (National Interest Account), as well as financing that promotes healthy, high-quality and produced deliverables. By doing so, Indonesia Eximbank is able to effectively carry out its role as a Special Mission Vehicle (SMV) for the Ministry of Finance and represent the Indonesian Government accordingly.

Moreover, Indonesia Eximbank places emphasis on financing healthy and growing industrial sectors, with a

PEMBIAYAAN
FINANCING

Penetrasi pembiayaan diutamakan kepada sektor yang memiliki dampak besar dalam nilai ekspor nasional seperti sektor pertambangan, manufaktur & minyak sawit. LPEI juga melakukan diversifikasi pembiayaan kepada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dan industri baterai seiring dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya aspek *environmental, social, and governance* (ESG).

Tantangan dan Implementasi Strategi di Tahun 2022

LPEI menghadapi beragam tantangan eksternal di sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

- Pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan utama bagi perekonomian global pada tahun 2022. Varian baru virus dan lambatnya program vaksinasi di beberapa negara dapat memperpanjang dampak ekonomi dari pandemi.
- Ketidakpastian geopolitik dan ketegangan antar negara dapat mempengaruhi pasar keuangan dan perdagangan global seperti perang Rusia dan Ukraina. Kondisi politik yang tidak stabil di beberapa negara dapat memperburuk situasi ekonomi global.
- Perubahan kebijakan pemerintah di beberapa negara terkait tarif, pajak, dan regulasi dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan investasi. Negara-negara juga dapat mengambil tindakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri mereka.
- Inflasi yang meningkat dan kenaikan suku bunga dapat memperburuk kondisi ekonomi global. Kebijakan moneter yang ketat dapat mengurangi daya beli konsumen dan investasi perusahaan.
- Ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik di beberapa negara. Negara-negara perlu mengatasi masalah ketimpangan dan memperkuat kesetaraan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Strategi di Tahun 2022

LPEI menitikberatkan pembiayaan tahun 2022 pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Selain itu, LPEI juga menetapkan beragam strategi di bawah ini untuk menghadapi tantangan di sepanjang tahun 2022:

priority given to sectors that significantly contribute to the national export value, including mining, manufacturing, and palm oil sectors. Indonesia Eximbank also has expanded its financing portfolio to include the new and renewable energy (NRE) sector and the battery industry, in line with the increasing recognition of the importance of environmental, social, and governance (ESG) aspects.

Challenges and Strategy Implementation in 2022

In 2022, Indonesia Eximbank encounters a range of external challenges, as follows:

- The COVID-19 pandemic, which poses a significant challenge to the global economy in 2022. New variants of the virus and the slow pace of vaccination programs in several countries may prolong the economic impact of the pandemic.
- Geopolitical uncertainty and tensions between countries can affect global financial and trade markets, such as the conflicts between Russia and Ukraine. Unstable political conditions in several countries may worsen the global economic situation.
- Changes in government policies in various countries regarding tariffs, taxes and regulations can affect international trade and investment. Countries may also adopt protectionist measures to protect their domestic industries.
- Rising inflation and interest rates could worsen global economic conditions. Tight monetary policies can reduce consumer purchasing power and business investment.
- Higher economic inequality can exacerbate social and political instability in some countries. Countries need to address inequality and strengthen economic equity to achieve sustainable growth.

Strategy in 2022

Indonesia Eximbank's focus in 2022 is on financing sectors that have a substantial impact on national exports. To address challenges in 2022, Indonesia Eximbank has also identified the following strategies:

- Penajaman mandat dengan mengkaji portofolio LPEI saat ini berdasarkan justifikasi ekspor dan “exit strategy” berupa kondisi keuangan dan/atau *rate* yang marginal. Penetapan justifikasi ekspor (*bankwide*) dan *risk appetite sector* penting untuk dibenahi sebagai acuan yang tepat dalam menjalankan strategi ini.
- *Growth by Design* yang ditempuh dengan cara:
 - a. Strategi yang diarahkan pada aktivitas debitur maupun calon debitur *Direct* dan *Indirect Export*.
 - b. Menentukan target industri, dimana tetap mengacu pada sektor-sektor unggulan yang didorong/ditetapkan Pemerintah Indonesia.
 - a. Menentukan kriteria calon debitur yang jelas meliputi *Targeted Customer* dengan *Reputable Sponsor* dan mempunyai *track record* baik di “market” serta untuk BUMN selektif yang sesuai mandat dan memiliki kinerja keuangan baik.
- *Pipeline Managemet* yang dilakukan oleh LPEI melalui:
 - a. Optimalisasi eksisting debitur/ perusahaan di Grup Usaha debitur yang belum menjadi *new customer* LPEI, tentunya dengan kinerja keuangan yang harus baik.
 - b. Debitur baru dapat merupakan *referral* dari K/L terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, maupun lembaga/ kementerian lainnya yang sesuai dengan mandat LPEI.
 - c. Sektor pembiayaan yang akan menjadi *target market* disesuaikan dengan sektor industri unggulan ekspor pemerintah RI dengan memperhatikan isu-isu ESG (*Environmental, Social, and Governance*), dan *Climate Change*.
 - d. Berkerjasama aktif dengan partner Business Unit yaitu *Credit Reviewer* untuk menyeleksi *pipeline* dengan melaksanakan *Name Clearance* secara periodik.
- Pengembangan bisnis melalui kerjasama dengan unit UKM dan Kantor Wilayah antara lain produk
- Reviewing Indonesia Eximbank’s current portfolio based on export justifications and an “exit strategy” for marginal financial conditions and/or rates, in order to sharpen the mandate. Improving the determination of export justifications (bank-wide) and sector risk appetite is key for these to be suitable references in implementing this strategy.
- Growth by Design, which is driven by:
 - a. Strategies aimed at debtor and potential debtor activities in direct and indirect export.
 - b. Determining target industries, while still referring to the leading sectors driven/established by the Government of Indonesia.
 - c. Establishing clear criteria of prospective debtors, including a Targeted Customer with a Reputable Sponsor and a good track record in the market, as well as selected SOEs that meet the mandate and have good financial performance.
- Indonesia Eximbank carries out the pipeline management through the following:
 - a. Optimising the potential of current debtors/ companies within the debtor’s Business Group who have not yet become the Institution’s new customer, with strong financial performance.
 - b. New debtors may be referred by related ministries/ institutions such as the Ministry of Commerce, Ministry of Industry or other institutions/ministries in line with Indonesia Eximbank’s mandate.
 - c. The target market for financing will align with the Indonesian government’s leading export industry sector, while taking into account ESG (Environmental, Social, and Governance) issues and climate change.
 - d. Actively work with business unit partners, namely credit reviewers, to select pipelines by periodically conducting name clearance.
- Developing business through collaborations with SME units and regional offices, which includes SCF (Supply

PEMBIAYAAN
FINANCING

SCF (*Supply Chain Financing*), serta mendorong eksisting debitur/calon debitur memanfaatkan produk LPEI lainnya seperti *Trade Finance*, Asuransi dan Penjaminan.

Rencana Strategis Tahun 2023

LPEI memandang tahun 2023 akan menjadi tahun yang menantang akibat inflasi yang masih tinggi yang akan memberikan dampak terhadap kenaikan harga produk sehingga berakibat kepada perlambatan ekonomi dunia. Namun demikian, menurut World Bank, ekonomi Indonesia akan bertumbuh sebesar 5% pada tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh konsumsi domestik, ekspor dan investasi. Berdasarkan estimasi tersebut, sektor pembiayaan akan tetap akan bertumbuh seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di dalam negeri.

Oleh karena itu, pertumbuhan bisnis yang kuat diperoleh dengan memberdayakan peran LPEI dalam ekosistem, diharapkan menghasilkan pertumbuhan bisnis yang progresif melalui ekosistem ekspor. Untuk mencapai hal tersebut pembiayaan korporasi menerapkan prinsip MSBM (Mandat, Sehat, Berkualitas, dan Menghasilkan) sebagai berikut:

- Sektor Industri sesuai mandat baik *direct/indirect* atau penunjang ekspor yang memiliki prospek baik dan didukung dengan kajian.
- Percepatan proses pembiayaan yang terukur dan percepatan pelaksanaan *name clearance* untuk debitur baru yang efektif dan produktif.
- Menggunakan skema bilateral, sindikasi/*club deal*, program linkage (termasuk SCF) dan *Joint Financing*.
- Co-Financing Collaboration* dengan HIMBARA dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- Percepatan *booking (Front Loading)* untuk memaksimalkan *interest income*.

PEMBIAYAAN UKM

LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pembiayaan

Chain Financing) products, and promoting the use of other LPEI products such as trade finance, insurance, and guarantees by existing and potential debtors.

Strategic Plans in 2023

While Indonesia Eximbank expects 2023 to present challenges due to high inflation, resulting in an increase in product prices and a slowdown in the global economy, the World Bank forecasts Indonesia's economy to grow by 5% in the same year, largely driven by domestic consumption, exports, and investment. Accordingly, the financing sector is expected to continue growing in tandem with Indonesia's domestic economic growth.

To that end, strong business growth is achieved by empowering Indonesia Eximbank's role in the ecosystem, which is expected to result in progressive business growth through the export ecosystem. To achieve this, corporate financing applies the MSBM (Mandate, Healthy, Quality, and Productive) principles as follows:

- Industry sectors that align with the mandate, either directly or indirectly supporting exports, which have good prospects, and supported with studies.
- Acceleration of a measurable financing process and name clearance implementation for effective and productive new debtors.
- Use of bilateral, syndication/*club deals*, linkage programs (including SCF) and joint financing schemes.
- Co-financing Collaboration with HIMBARA and other financial institutions.
- Front loading to maximize interest income.

SME FINANCING

Indonesia Eximbank provides financing facilities, both conventionally and based on sharia principles to corporations and Small and Medium Enterprises (SMEs).

UKM memiliki arti yang sangat penting bagi LPEI sejalan dengan mandat dari Pemerintah untuk menyediakan porsi pembiayaan segmen UKM sebesar 30%.

Fokus Pembiayaan UKM Tahun 2022

Divisi SCL (dahulu Divisi UMKM) memfokuskan usahanya pada tahun 2022 melalui pembiayaan Plasma dan pembiayaan *Supply Chain*. Pembiayaan plasma adalah pembiayaan yang diberikan kepada UKM plasma khususnya berupa pembiayaan plasma petani kelapa sawit yang tergabung dalam koperasi binaan perusahaan inti. Plasma tersebut telah menjadi debitur LPEI atau perusahaan inti dengan kategori *big name company*. Sementara itu, pembiayaan *supply chain* adalah pembiayaan kepada *supplier* dari prinsipal yang telah menjadi debitur LPEI atau prinsipal dengan kategori *big name company*.

LPEI menyediakan kedua pembiayaan ini untuk memperkuat ikatan antara debitur dengan LPEI.

Tantangan Di Tahun 2022

Divisi SCL menghadapi tantangan pada tahun 2022 yang terkait dengan pembiayaan plasma adalah struktur pembiayaan dan tingkat bunga. Divisi ini mengidentifikasi terdapat lembaga keuangan lain yang mampu memberikan fasilitas IDC tanpa bunga serta tingkat bunga tetap. Selain itu, terdapat perbankan swasta yang menawarkan pembiayaan plasma tanpa adanya jaminan aset tetap dari plasma atau cukup berupa *corporate guarantee* dari inti/sponsor dengan suku bunga yang ditawarkan lebih kompetitif.

Sedangkan untuk pembiayaan *supply chain*, Divisi SCL mengidentifikasi tantangan berupa kebutuhan sistem pembiayaan SCF karena beberapa perusahaan korporasi mensyaratkan SCF dengan sistem selain ketersediaan jaminan yang disyaratkan kepada pemasok.

Implementasi Strategi Tahun 2022

LPEI memiliki rencana pembiayaan UKM pada tahun 2022 yang berfokus kepada plasma sawit, grup besar dan SCF. Terkait dengan hal tersebut strategi yang dijalankan

SME financing is pivotal for Indonesia Eximbank in line with the mandate from the Government to provide a 30% portion of SME segment financing.

SME Financing Focus in 2022

The SCL Division (formerly the MSME Division) focuses its business in 2022 through Plasma financing and Supply Chain financing. Plasma financing is financing provided to plasma SMEs, particularly on plasma financing for oil palm farmers who are members of cooperatives assisted by its core companies. The plasma has become a borrower of Indonesia Eximbank or a core company under the major company categories. Meanwhile, supply chain financing is a financing to suppliers from principals who have become the Indonesia Eximbank borrowers or principals under the major company categories.

Indonesia Eximbank provides these financings to strengthen its engagement with the borrowers.

Challenges in 2022

The challenges in 2022 were related to plasma financing in terms of financing structure and interest rates. The SCL Division identified other financial institutions capable of providing IDC facilities with no interest and at fixed interest rates. Moreover, there are private banks that offer plasma financing without a fixed asset guarantee from plasma or simply a corporate guarantee from the core/sponsor that offered more competitive interest rates.

On supply chain financing, the SCL Division identified challenges on SCF financing system needs as some of the corporations require the SCF with a system apart from the availability of guarantees required to suppliers.

Strategy Implementation in 2022

Indonesia Eximbank has an SME financing plan in 2022 that focuses on palm plasma, large groups and SCF. In this regard, the strategy is to target plasma and supply

PEMBIAYAAN
FINANCING

adalah menargetkan pembiayaan plasma dan *supply chain* kepada perusahaan inti dan prinsipal yang memiliki kategori *big name* dan debitur eksisting LPEI.

Rencana Strategis Tahun 2023

Untuk meningkatkan pembiayaan di tahun mendatang, LPEI melakukan pendekatan kepada grup besar perkebunan kelapa sawit melalui Divisi Korporasi. Selain itu, Divisi SCF berkolaborasi dengan Divisi Korporasi dalam mempersiapkan *pipeline* sehingga pada saat pengajuan pembiayaan oleh Divisi Korporasi langsung diberikan fasilitas SCF. Selanjutnya, LPEI mengembangkan sistem SCF dan sistem pembiayaan *executing* dan *channeling* untuk mempermudah pengembangan pasar.

PEMBIAYAAN SYARIAH

LPEI menyediakan pembiayaan dengan skema syariah sebagai dukungan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya pembiayaan berorientasi ekspor yang memiliki keunggulan baik komparatif maupun kompetitif. Adapun tujuan dan fungsi Pembiayaan Syariah adalah menjalankan mandat sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 2009.

Fokus Pembiayaan Syariah Tahun 2022

LPEI dalam menyediakan Pembiayaan Syariah pada tahun 2022 menitikberatkan pada perbaikan infrastruktur pembiayaan syariah, seperti sistem dan teknologi informasi, tata kelola, perbaikan struktur dokumentasi akad pembiayaan syariah dan persiapan pencatatan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh OJK IKNB Syariah. Selain itu, LPEI memperbaiki dan memperkuat kualitas aset pembiayaan syariah melalui fokus penetrasi target pasar pada 1) Negara-negara anggota OKI, 2) Eksportir Produk Halal, dan 3) *Joint Financing* dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, dan memperkuat permodalan Syariah di LPEI.

chain financing to core companies and principals under the major company categories and existing borrowers.

Strategic Plans for 2023

To enhance financing going forward, the Institution approaches large groups of oil palm plantations through the Corporate Division. Moreover, the SCF Division collaborates with the Corporate Division in preparing the pipeline in which during the financing application by the Corporate Division, the SCF facilities will immediately be provided. The Institution also developed an SCF system and an executing and channelling financing system to facilitate market development.

SHARIA FINANCING

Indonesia Eximbank provides financing with sharia schemes as a support in the development of the sharia economy in Indonesia, particularly export-oriented financing that has both comparative and competitive advantages. The purpose and function of Sharia Financing is to carry out its mandate in accordance with Law No. 2 of 2009.

Sharia Financing Focus in 2022

The focus of Sharia Financing in 2022 was to emphasize on improving sharia financing infrastructure, such as information systems and technology, governance, improvement of documentation structure of sharia financing agreements and preparation of the listing of Sharia Business Units (UUS) by OJK IKNB Syariah. In addition, Indonesia Eximbank improves and strengthens the quality of Sharia financing assets through a focus on penetrating target markets in 1) OIC member countries, 2) Halal product exporters, and 3) Joint financing with other Sharia financial institutions, and strengthens Sharia capitalization at Indonesia Eximbank.

Tantangan yang Dihadapi di Tahun 2022

Dalam Pembiayaan Syariah, LPEI menghadapi tantangan berupa infrastruktur yang belum mendudukkan beberapa transaksi syariah. LPEI juga melakukan penyempurnaan dokumentasi akad-akad Pembiayaan Syariah agar sesuai dengan kepatuhan syariah. Selain itu, mayoritas portofolio pembiayaan Syariah di segmen korporasi yang sangat sensitif terhadap *pricing* menjadi tantangan lainnya bagi LPEI.

Implementasi Strategi Tahun 2022

LPEI telah menetapkan strategi penyempurnaan tata kelola dan infrastruktur syariah. Terkait dengan strategi ini rencana strategis yang dilaksanakan adalah mengimplementasikan tata kelola syariah yang berkelanjutan, melakukan penyempurnaan dokumen akad syariah terhadap nasabah yang belum dilakukan penyempurnaan, dan penyempurnaan atas pedoman dan aturan teknis operasional produk-produk syariah. Selain itu, LPEI juga selalu menjaga kualitas asset pembiayaan syariah yang *eksisting* dan baru.

Atas implementasi strategi yang efektif, pencapaian non finansial yang berhasil diraih LPEI adalah:

- Tata kelola syariah telah dilakukan beragam pemenuhan dan penyempurnaan seperti implementasi dan *review* tata kelola syariah yang berkelanjutan, pengawasan pemenuhan prinsip syariah oleh DPS secara berkelanjutan, pembaharuan piagam DPS, penyempurnaan struktur akad pembiayaan syariah, dan penyempurnaan ketentuan internal terkait syariah.
- Sumber Daya Manusia baik yang berada di Divisi Syariah maupun LPEI secara keseluruhan telah mendapatkan *training* bertajuk syariah *knowledge sharing* secara berkelanjutan di 2022.
- Telah dilakukan standarisasi dokumen legal syariah untuk produk pembiayaan, penjaminan, dan *trade finance*.
- Ketentuan peraturan dan pedoman atas seluruh produk syariah telah disatukan dan disempurnakan ke

Challenges in 2022

The challenges in Sharia Financing were infrastructure that has not yet accommodated several sharia transactions. Indonesia Eximbank also improves the documentation of Sharia Financing contracts to comply with sharia compliance. In addition, the majority of sharia financing portfolios in the corporate segment, which are very sensitive to pricing, pose another challenge for Indonesia Eximbank.

Strategy Implementation in 2022

Indonesia Eximbank has established a strategy to improve sharia governance and infrastructure. Subsequently, the strategic plan serves to implement sustainable sharia governance, improve sharia contract documents for customers that have not been refined, as well as enhance the operational technical guidelines and rules of sharia products. In addition, Indonesia Eximbank also always maintains the quality of existing and new Sharia financing assets.

For its effective strategy implementation, the following were non-financial achievements by the Institution:

- Various fulfilments and improvements on sharia governance have been carried out, such as the implementation and review of sustainable sharia governance, continuous supervision of the fulfilment of sharia principles by DPS, renewal of the DPS charter, refinement of the structure of sharia financing agreements, and refinement of internal provisions related to sharia.
- Human Resources both in the Sharia Division and Indonesia Eximbank as a whole have received training on sharia knowledge sharing sustainably in 2022.
- Standardization of sharia legal documents for financing, guarantee, and trade finance products has been carried out.
- The regulatory provisions and guidelines for all sharia products have been unified and refined into

PEMBIAYAAN
FINANCING

dalam Standar Pedoman Produk Pembiayaan Ekspor Nasional (SPP PEN) berdasarkan Prinsip Syariah.

- Skemapendanaan untuk bisnis syariah disempurnakan dari yang sebelumnya menggunakan akad *Qardh* menjadi menggunakan akad *Wakalah Bil Istithmar* (WBI), dan menjadi Lembaga Keuangan pertama di Indonesia yang menggunakan akad tersebut.
- Di tahun 2022 juga telah dilakukan penyempurnaan dan pengembangan pada sistem *core banking* untuk produk pembiayaan syariah dan penjaminan syariah.

Adapun pencapaian finansial Pembiayaan Syariah adalah sebagai berikut:

- Total pembiayaan syariah tahun 2022 mencapai sekitar Rp11,4 triliun atau 13,6% dari total pembiayaan LPEI dengan total *net profit after tax* (PAT) bisnis Syariah terjaga positif sebesar Rp303 miliar.
- Alokasi Modal untuk Syariah di tahun 2022 mendapatkan penambahan alokasi modal sebesar Rp1,5 triliun (sebelumnya Rp300 miliar) sehingga total alokasi modal untuk Syariah saat ini adalah sebesar Rp1,8 triliun.
- Pada 2022 sebanyak 6 nasabah ($\pm$ Rp1,9 triliun) di *phase-out* dengan tujuan pemurnian mandat agar nasabah yang ada di Syariah lebih sesuai lagi dengan mandat LPEI.
- Pembiayaan Syariah juga berhasil menginisiasi kolaborasi di 2022 baik dengan internal maupun eksternal. Kolaborasi internal dilakukan dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah berkolaborasi dengan unit bisnis di LPEI yaitu Kantor Wilayah Satu, Kantor Wilayah Dua, Pembiayaan Satu, dan Pembiayaan Dua. Kolaborasi Eksternal dilakukan dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

the National Export Financing Product Guidelines Standard (SPP PEN) based on Sharia Principles.

- The funding scheme for sharia businesses was refined from previously using the *Qardh* contract to using the *Wakalah Bil Istithmar* (WBI) contract, and became the first Financial Institution in Indonesia to use the contracts.
- In 2022, improvements and developments have also been made to the core banking system for sharia financing and sharia guarantee products.

The financial achievements of Sharia Financing were as follows:

- Total sharia financing in 2022 reached Rp11.4 trillion or 13.6% of the total financing of Indonesia Eximbank with positive total net profit after tax (PAT) sharia business at Rp303 billion.
- The Capital Allocation for Sharia in 2022 received an additional capital of Rp1.5 trillion (previously Rp300 billion), making the current total capital allocation for Sharia amounted to Rp1.8 trillion.
- In 2022, 6 customers ($\pm$ Rp 1.9 trillion) were phased-out with the aim of refining the mandate to align the Sharia customers with the mandate of Indonesia Eximbank.
- Sharia Financing has also succeeded in initiating collaboration in 2022 both internally and externally. Internal collaboration was carried out by providing financing based on Sharia principles in collaboration with business units within the Institution, namely Regional Office One, Regional Office Two, Financing One, and Financing Two. External Collaboration was carried out by entering into a Cooperation Agreement (PKS) with Bank Syariah Indonesia (BSI) and the Sharia Economic Community (MES).

Rencana Strategis Tahun 2023

Rencana Strategis LPEI pada tahun 2023 adalah melakukan kolaborasi dimana UUS nantinya akan berperan sebagai *enhancer* untuk mendukung perputaran ekspor syariah. Kolaborasi akan dilakukan secara internal dan eksternal. Dari sisi internal, kolaborasi akan dilakukan dengan unit bisnis dan *enabler* di LPEI dalam memasarkan produk-produk syariah sesuai dengan target dan segmen yang telah ditetapkan oleh manajemen. Sedangkan sisi eksternal, kolaborasi akan dilakukan dengan beragam asosiasi pengusaha atau ekonomi islam dan lembaga-lembaga keuangan islam lainnya.

Selain itu, pada tahun 2023 Syariah akan berfokus memasarkan produk-produk seperti Pembiayaan Syariah dan Penjaminan Syariah, serta produk baru yang sedang dalam tahap pengembangan yaitu Asuransi Syariah, dan *Trade Finance* Syariah. Produk-produk tersebut akan didukung oleh beragam akad syariah seperti *Murabahah*, *Musyarakah*, *MMQ*, *IMBT*, *Wakalah bil Ujrah*, *Qard*, *Hawalah bil Ujrah*, *Kafalah bil Ujrah*, dan *Tabarru*, termasuk Akad *Salam* yang akan dikembangkan di 2023. Selanjutnya, produk-produk tersebut akan dipasarkan pada segmen pasar Korporasi, UMBE, dan UKM dengan target pasarnya yaitu pelaku ekspor produk-produk halal, ekspor tujuan negara anggota OKI dan Kawasan, *Co-financing* dengan bank syariah, dan kolaborasi-sinergi dengan *Business Unit* (BU) dan *Business Enabler* (BE).

Strategic Plans for 2023

The Strategic Plan in 2023 is to collaborate where UUS will later act as an enhancer to support sharia export turnover. Collaboration will be carried out internally and externally. Internally, collaboration will be carried out with business units and enablers in Indonesia Eximbank on the marketing of its sharia products in accordance with the targets and segments set by the management. Externally, collaborations will be made with various associations of Islamic entrepreneurs or economists and other Islamic financial institutions.

Moreover, in 2023 Shariah will focus on marketing products, such as Sharia Financing and Sharia Guarantee, as well as new products that are currently under development, namely Sharia Insurance and Sharia Trade Finance. These products will be supported by various Sharia contracts such as *Murabahah*, *Musyarakah*, *MMQ*, *IMBT*, *Wakalah bil Ujrah*, *Qard*, *Hawalah bil Ujrah*, *Kafalah bil Ujrah*, and *Tabarru*, including the *Salam* contract that will be developed in 2023. Furthermore, these products will be marketed to the Corporate, UMBE, and SME segments, targeting halal product exporters, exports to OIC and Regional member countries, co-financing with Sharia banks, and collaboration-synergy with Business Units (BU) and Business Enablers (BE).



.02 PENJAMINAN GUARANTEE



Selain menjalankan bisnis penjaminan secara komersial, pada tahun 2022, LPEI juga telah melaksanakan tugas khusus dari pemerintah untuk membantu para pelaku usaha, baik eksportir maupun non eksportir, yang usahanya masih terdampak Covid-19 melalui Program Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (JAMINAH) Gen 2 yang merupakan perpanjangan dari Program JAMINAH Gen 1 yang telah berakhir pada 17 Desember 2021. Meskipun dari sisi volume dan jumlah pelaku usaha yang ikut Program JAMINAH Gen 2 lebih rendah dari pada JAMINAH Gen 1, penurunan ini dapat dipandang sebagai indikator bahwa ekonomi Indonesia dan portofolio kredit perbankan nasional terus membaik pasca pandemi Covid-19.

Apart from performing a commercial guarantee business, in 2022, Indonesia Eximbank has also carried out a special task from the government to assist business accountants, both exporters and non-exporters, whose businesses are still affected by Covid-19 through the Government Guarantee Program in the context of National Economic Recovery (JAMINAH) Gen 2, which is an extension of JAMINAH Gen 1 Program that ended on December 17, 2021. Although in terms of volume and number of businesses participating in the JAMINAH Gen 2 Program is lower than JAMINAH Gen 1, this decline can be viewed as an indicator that the Indonesian economy and national bank credit portfolio continue to improve after the Covid-19 pandemic.

Penjaminan merupakan salah satu pilar mandat LPEI dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Penjaminan yang diterbitkan oleh LPEI pada tahun 2022 telah mendukung banyak pihak yang berada di dalam ekosistem ekspor termasuk para pelaku usaha lokal dan perbankan. Pelaku usaha lokal memperoleh bank garansi yang diterbitkan LPEI dalam rangka mengerjakan proyek-proyek di dalam negeri yang berorientasi ekspor, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, bank garansi yang diterbitkan oleh LPEI telah digunakan oleh beberapa pengusaha lokal untuk mengerjakan proyek-proyek di luar negeri yang semuanya bermuara kepada perolehan devisa negara.

Di samping para pengusaha lokal, perbankan di Indonesia juga memperoleh manfaat dalam bentuk *credit enhancer* dengan adanya penjaminan dari LPEI. Bank merasa lebih aman dalam menyalurkan pembiayaan kepada para debitur eksportirnya karena penjaminan kredit LPEI memberikan *coverage* yang signifikan kepada perbankan dalam memitigasi risiko gagal bayar dari debiturnya, baik bunga maupun hutang pokoknya.

Pada tahun 2022, LPEI juga telah melaksanakan tugas khusus dari pemerintah untuk membantu para pelaku usaha, baik eksportir maupun non eksportir, yang usahanya masih terdampak Covid-19 melalui Program Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (JAMINAH) Gen 2 yang merupakan perpanjangan dari Program JAMINAH Gen 1 yang telah berakhir pada 17 Desember 2021. Meskipun dari sisi volume dan jumlah pelaku usaha yang ikut Program JAMINAH Gen 2 lebih rendah dari pada yang terjadi pada JAMINAH Gen 1, realisasi pencapaian JAMINAH Gen 2 ini dapat dipandang sebagai indikator bahwa ekonomi Indonesia dan portofolio kredit perbankan nasional terus membaik pasca pandemi Covid-19.

Fokus Penjaminan Tahun 2022

LPEI melakukan penjaminan yang menitikberatkan pada penjaminan proyek dengan pola Kontra Bank Garansi (KBG) yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan

Guarantee is one of the pillars of Indonesia Eximbank's mandate in promoting the national export growth. The Guarantee issued by Indonesia Eximbank in 2022 has supported many parties in the export ecosystem, including local businesses and banks. Local businesses obtain the bank guarantees issued by Indonesia Eximbank in order to carry out export-oriented domestic projects, either directly or indirectly. Moreover, the bank guarantees issued by Indonesia Eximbank have been used by several local entrepreneurs to carry out projects overseas, all of which directing to earning the country's foreign exchange.

Apart from local entrepreneurs, the banks in Indonesia also benefitted by credit enhancers with guarantees from Indonesia Eximbank. The banks are in a better position in disbursing financing to the borrowers as Indonesia Eximbank credit guarantees provide significant coverage to the banks in mitigating the non-performing risk from their borrowers, either interest or principal debt.

In 2022, Indonesia Eximbank has also carried out a special assignment from the government to help businesses, both exporters and non-exporters, in which businesses are still affected by the Covid-19 through the Government Guarantee Program for the National Economic Recovery (JAMINAH) Gen 2, which is an extension of the JAMINAH Gen 1 Program that has ended on 17 December 2021. Although in terms of volume and number of businesses participating in the JAMINAH Gen 2 Program is lower than in JAMINAH Gen 1, the realization of the JAMINAH Gen 2 achievement can be seen as an indicator that the Indonesian economy and the national banking credit portfolio continue to improve after the Covid-19 pandemic.

Guarantee Focus in 2022

Indonesia Eximbank's Guarantee focused on project guarantees with a Counter Bank Guarantee (CBG) scheme issued by the Institution's partner insurance companies.

PENJAMINAN
GUARANTEE

asuransi rekanan LPEI. Hal ini terlihat dari realisasi Penjaminan LPEI tahun 2022 lebih dari 60% berupa penjaminan proyek KBG. Selain itu, LPEI juga terus meningkatkan transaksi penjaminan kredit mengingat potensi di pasar yang masih cukup besar di sepanjang tahun 2022.

Tantangan Yang Dihadapi Tahun 2022

LPEI menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat eksternal maupun terkait langsung dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kondisi ekonomi global pasca Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih diperburuk oleh perang Rusia – Ukraina sehingga pasar reasuransi mengalami tekanan dan menurunkan kapasitas yang tersedia secara signifikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan-perusahaan asuransi nasional dalam melakukan *underwriting*, dan akibatnya menurunkan jumlah KBG yang dapat diterbitkan kepada LPEI.
- Beberapa perusahaan asuransi yang selama ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bisnis penjaminan proyek KBG mengalami kendala internal sehingga tidak dapat menerbitkan KBG sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
- Penundaan proyek-proyek yang telah direncanakan untuk mulai dikerjakan pada tahun 2022 karena berbagai hal, sehingga penerbitan bank garansi yang dibutuhkan mengalami penundaan.
- Perbaikan kualitas portofolio kredit perbankan seiring membaiknya kondisi pandemi Covid-19 berdampak kepada permintaan penjaminan kredit lebih rendah seperti produk JAMINAH Gen 2.

Implementasi Strategi Tahun 2022

Dalam rangka menjalankan mandat yang ditetapkan oleh Pemerintah, LPEI memasarkan produk penjaminan secara intensif kepada bank penerima jaminan dan perusahaan asuransi rekanan serta meningkatkan jumlah *customer base* dengan menambah jumlah bank untuk kerja sama dalam bisnis penjaminan. LPEI juga melakukan sosialisasi dan memasarkan JAMINAH (Gen 2) yang diperpanjang sampai dengan 16 Desember 2022 secara intensif. Terkait dengan produk, LPEI mengembangkan produk

This can be seen from the realization of Guarantee of more than 60% in 2022 on CBG project guarantees. Indonesia Eximbank also continued to increase credit guarantee transactions considering the potential in the market, which remained quite large throughout 2022.

Challenges in 2022

Indonesia Eximbank encountered several challenges either external or directly related to business activities as follows:

- The post-Covid-19 global economic conditions that have not yet fully recovered were exacerbated by the Russia – Ukraine war, making the reinsurance market to be under pressure and significantly lowered its capacities. This greatly impacts the ability of national insurance companies to underwrite, and consequently reduces the number of CBG that can be issued to Indonesia Eximbank.
- Several insurance companies that have made significant contributions to the CBG project guarantee business have experienced internal obstacles hence were unable to issue CBG as in the previous years.
- The postponement of projects that had been planned to commence in 2022 due to various reasons, has delayed the issuance of the required bank guarantee.
- Improvement of the bank's credit portfolio quality in line with the improving conditions of the Covid-19 pandemic has an impact on lower demand for credit guarantees, such as the JAMINAH Gen 2 product.

Strategy Implementation in 2022

To carry out the mandate set by the Government, Indonesia Eximbank intensively markets its Guarantee products to guarantee the recipient banks and partner insurance companies and increases the number of customer bases by expanding the number of banks for the collaboration in the guarantee business. Indonesia Eximbank also conducts intensive dissemination and markets the JAMINAH (Gen 2), which is extended until 16 December 2022. On products, Indonesia Eximbank develops guarantee cofinancing

PENJAMINAN
GUARANTEE

cofinancing penjaminan melalui kolaborasi dengan tim *Trade Finance* disamping pengembangan produk penjaminan syariah melalui kolaborasi dengan tim syariah.

LPEI juga memberlakukan *internal rating* untuk JAMINAH Gen 2, menggantikan sistem *rating* PBK. Strategi lain yang dijalankan adalah membuat *prototype* sistem penjaminan untuk mendukung operasional *front end* Penjaminan. Selanjutnya, LPEI melakukan penyempurnaan manual produk dan proses Penjaminan disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan dinamika organisasi.

through collaboration with the Trade Finance team in addition to the development of sharia guarantee products in collaboration with the sharia team.

Indonesia Eximbank also applies an internal rating for JAMINAH Gen 2, replacing the PBK rating system. Another strategy was to create a prototype guarantee system to support the front-end operations of the Guarantee. Furthermore, Indonesia Eximbank improves the Guarantee product manual and process in accordance with the market needs and organizational dynamics.

	Target Targets	Pencapaian Realization
Penjaminan Komersial Commercial Guarantee	Rp9,8 Triliun Trillion	Rp8,7 Triliun Trillion
JAMINAH	Rp1,6 Triliun Trillion	Rp3,7 Triliun Trillion
Perolehan Fee Fees Acquisition	Rp70 Miliar Billion	Rp102,2 Miliar Billion

Rencana Strategis Tahun 2023

Didukung oleh prospek ekonomi dan prospek ekspor Indonesia tahun 2023, LPEI telah menetapkan beberapa rencana strategi untuk tahun 2023. Rencana-rencana strategi tersebut diantaranya adalah berkolaborasi dengan Bank dan L/K *Partner* untuk meningkatkan peran LPEI sebagai *credit enhancer*. LPEI akan melakukan sosialisasi berkala kepada calon bank partner untuk meningkatkan jumlah PKS dan aliansi strategis dengan Lembaga Keuangan/Asuransi/Penjaminan untuk referral potensi penjaminan.

Selain itu, LPEI berkomitmen meningkatkan bisnis Penjaminan Proyek melalui skema fasilitas dan Kontra Garansi serta meningkatkan *product holding* debitur eksisting. Di samping itu, LPEI mengembangkan dan memasarkan produk penjaminan syariah, *custom bond*, dan *bundling cofinancing* penjaminan serta mengembangkan sistem *Front-End* Penjaminan untuk otomatisasi penerbitan sertifikat dan *monitoring*.

Strategi lain yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan *servicing* yang dilakukan oleh Korporasi & Kantor Wilayah, menyempurnakan manual operasional Penjaminan serta meningkatkan kapasitas SDM melalui sertifikasi & *training* mengenai Penjaminan, *Leadership & Sales*.

2023 Strategic Plans

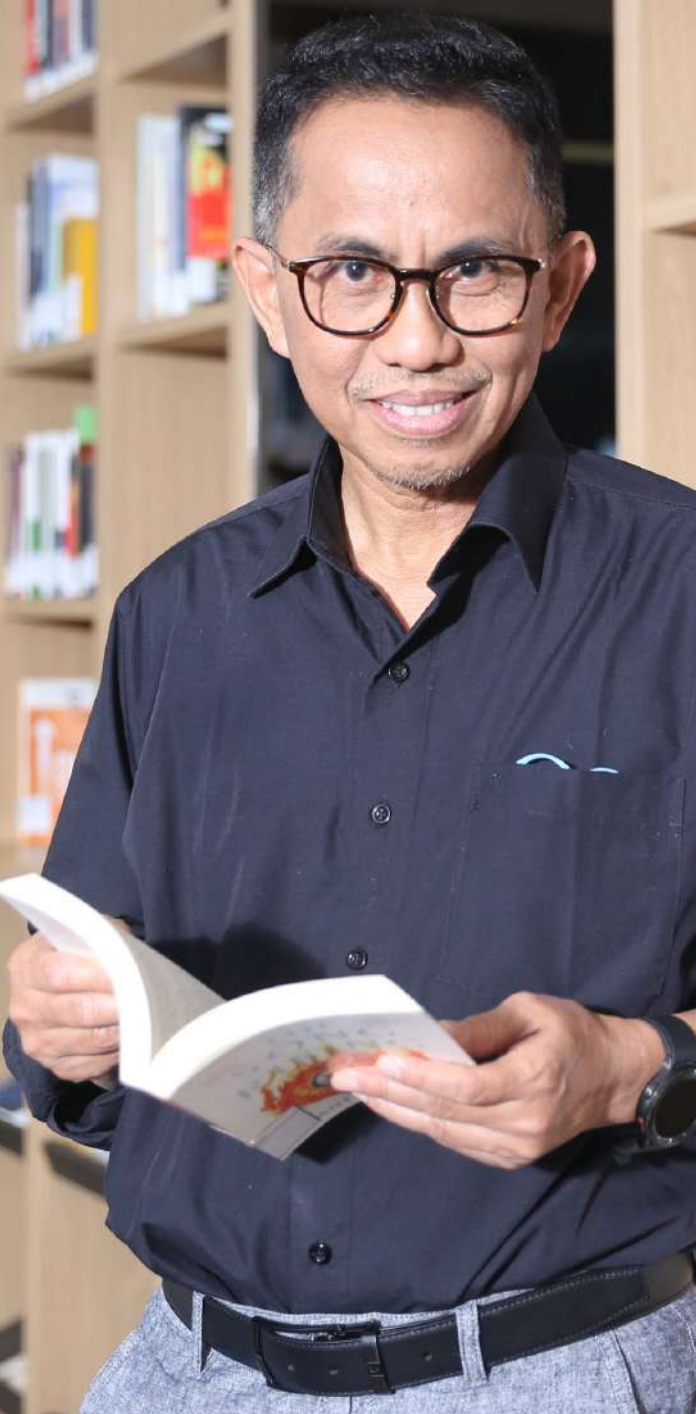
Supported by Indonesia's economic and export prospects in 2023, Indonesia Eximbank has set several strategic plans for 2023. These strategic plans include collaborating with the Banks and Ministries/Institutions Partners to upgrade Indonesia Eximbank's role as a credit enhancer. Indonesia Eximbank will conduct periodic dissemination to prospective partner banks to expand the number of PKS and strategic alliances with Financial/Insurance/Guarantee Institutions for potential guarantee referrals.

Indonesia Eximbank is also committed to expanding the Project Guarantee business through facility and Counter Guarantee schemes, as well as expanding existing borrower product holdings. Moreover, Indonesia Eximbank develops and markets the sharia guarantee products, custom bonds, and bundling cofinancing guarantees, as well as developing a Front-End Guarantee system to automate certificate issuance and monitoring.

Another strategy that will be executed is leveraging servicing by Corporations and Regional Offices, completing the Guarantee operating manual, and expanding HR capacity through certification and training regarding Guarantee, Leadership and Sales.



.03 ASURANSI INSURANCE



Pertumbuhan plafond Asuransi yang signifikan pada tahun 2022 mencerminkan proses transformasi yang saat ini dijalankan LPEI, yang mana salah satu strategi utama transformasi adalah pemerataan pelaksanaan mandat. LPEI fokus membantu para eksportir baik yang merupakan tertanggung eksisting maupun tertanggung baru. LPEI akan terus memperkuat bisnis asuransi melalui ekosistem ekspor dan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Kementerian/Lembaga, asosiasi usaha dan *Export Credit Agency* negara lain.

The significant growth of the Insurance ceiling in 2022 reflects the transformation process currently carried out by Indonesia Eximbank, in which one of the main transformation strategies is equitable implementation of mandates. Indonesia Eximbank focuses on helping exporters, both existing insured and new insured. Indonesia Eximbank will continue to strengthen the insurance business through the export ecosystem and cooperate with Bank and Non-Bank Financial Institutions, Ministries/ Institutions, business associations and Export Credit Agencies of other countries.

ASURANSI
INSURANCE

LPEI menyediakan layanan Asuransi disamping Pembiayaan dan Penjaminan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 pasal 3. Asuransi yang diberikan memberikan perlindungan atas risiko kegagalan ekspor; asuransi atas risiko kegagalan bayar; asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Fokus Asuransi Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pemenuhan mandat yang diberikan oleh Pemerintah yaitu mendukung eksportir Indonesia, maka Indonesia Eximbank tetap berupaya untuk mempertahankan *credit limit*/asuransi yang telah diberikan kepada eksportir dengan melakukan monitoring secara berkala untuk transaksi *buyer* dan kondisi politik negara *buyer*.

Jika penarikan *credit limit* (*freeze credit limit*) *buyer* tidak dapat dihindari, maka penarikan hanya akan dilakukan apabila terdapat informasi politik yang sedang bergejolak baik dari media atau dari *partner* internasional Indonesia Eximbank di negara-negara *buyer existing* dan atas saran/*advise* dari *partner* internasional. Indonesia Eximbank juga akan segera menyampaikan kepada Tertanggung/ Eksportir untuk mengambil kebijakan penjualan dan menarik *credit limit buyer* dimaksud. Indonesia Eximbank tetap akan menanggung seluruh transaksi yang sudah terjadi sebelum penarikan *credit limit* tersebut.

LPEI juga memperhatikan saran/*advise* dari *partner* internasional terkait klasifikasi sektor usaha yang terdampak Covid-19 dan yang akan terdampak oleh resesi, sehingga dalam melakukan upaya pengembangan bisnis asuransi Indonesia Eximbank fokus pada sektor usaha yang bukan merupakan kategori *high exposure* (*red category*).

Tantangan Tahun 2022

LPEI akan selalu berusaha mendapatkan kapasitas *coverage* dari partner reasuransi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, *credit limit* yang telah diberikan kepada tertanggung dapat dipertahankan selama tahun 2023 di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu serta adanya bayang-bayang resesi di tahun 2023.

Indonesia Eximbank provides Insurance services in addition to Financing and Guarantees as stipulated in Law No. 2 of 2009 article 3. The Insurance provides protection against the risk of export failure; insurance against the risk of default; insurance for investments made by Indonesian companies overseas; and/or insurance against political risks in a country of export destination.

Insurance Focus in 2022

To support the fulfillment of the mandate given by the Government to fostering Indonesian exporters, Indonesia Eximbank strives to maintain the credit limit/ insurance provided to exporters by conducting regular monitoring of buyer transactions and the political condition of the buyer countries.

If the buyer's freeze credit limit withdrawal cannot be avoided, then the withdrawal will only be made if there is political conditions information either from the media or from international partner of Indonesia Eximbank in the existing buyer countries and on advice from international partners. Indonesia Eximbank will also immediately convey to the Insured/Exporter to take a sales policy and withdraw the buyer's credit limit. Indonesia Eximbank will still bear all transactions that have occurred prior to the credit limit withdrawal.

Indonesia Eximbank also takes into account the advice from international partners on the classification of business sectors affected by the Covid-19 and those that will be impacted by the recession, thereby in developing the insurance business, Indonesia Eximbank focuses on the business sectors that are not under a high exposure category (red category).

Challenges in 2022

Indonesia Eximbank strives to attain coverage capacity from reinsurance partners both from within the country and overseas. As such, the credit limit provided to the insured can be maintained during 2023 amidst uncertain global economic conditions and the forecast of a recession in 2023.

ASURANSI
INSURANCE**Implementasi Strategi Tahun 2022**

LPEI melakukan analisa lebih mendalam terhadap negara-negara yang akan terdampak efek resesi di tahun 2023. LPEI dapat memberikan *advice* kepada tertanggung dan dapat lebih berhati-hati dalam menerima risiko dari negara yang akan terdampak efek resesi. Selain itu, pertumbuhan Tertanggung dengan adanya penerbitan polis pada masa pandemi dan pada masa resesi yang akan datang, tetap memperhatikan proses *underwriting* yang *prudent* dan berdasarkan data yang faktual.

Selama tahun 2022, LPEI fokus membantu para eksportir baik eksportir tersebut merupakan tertanggung yang sudah menjadi tertanggung LPEI maupun eksportir yang merupakan tertanggung baru. Dukungan yang diberikan kepada tertanggung Indonesia Eximbank yang eksisting salah satunya adalah mempertahankan *credit limit* dan *coverage* yang sudah diberikan maupun *terms and condition* yang lebih kompetitif. Sedangkan dukungan yang diberikan kepada tertanggung baru Indonesia Eximbank antara lain pemberian *credit limit* serta *terms and condition* yang menyesuaikan kebutuhan eksportir. Pada tahun 2022 sudah mulai terlihat peningkatan transaksi ekspor dan meningkatnya permintaan produksi barang maupun jasa dari Indonesia terutama dari sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Rencana Strategis Tahun 2023

Indonesia Eximbank telah menetapkan rencana strategis untuk tahun depan yang diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha serta kelancaran dalam menjalankan mandat yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan *customer base* Asuransi, LPEI akan memperkuat kerjasamanya dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Kementerian/Lembaga, asosiasi usaha dan *Export Credit Agency* negara lain. Khusus untuk kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank, Indonesia Eximbank memiliki program kerjasama Asuransi Proteksi Piutang Dagang baru dimana Lembaga Keuangan Bank yang bekerjasama bisa menjadi tertanggung produk asuransi tersebut. Selain itu Lembaga Keuangan yang bekerjasama dengan Indonesia Eximbank menggunakan program baru tersebut akan mendapatkan keuntungan

Strategy Implementation in 2022

Indonesia Eximbank conducted a more in-depth analysis of the countries that will be affected by the impacts of the recession in 2023. Indonesia Eximbank provides advice to the insured and to be prudent in accepting risks from countries that will be affected by the impacts of the recession. Moreover, the Insured growth with the issuance of policies during the pandemic and the upcoming recession, still takes into account the prudent underwriting process and based on factual data.

During 2022, Indonesia Eximbank focused on assisting both insured and or new insured exporters. One of the supports was maintaining the credit limit and coverage that has been provided, as well as more competitive terms and conditions. Meanwhile, the support to the new insured includes the provision of credit limits and terms and conditions that are adjusted to the needs of exporters. In 2022, an increase in export transactions and an increase in demand for the production of goods and services from Indonesia were recorded, particularly from the Small and Medium Enterprises (SMEs) sector.

Strategic Plans for 2023

Indonesia Eximbank has set a strategic plan for 2023, which is expected to foster business activities and efficient implementation of the set mandate.

To increase the insurance customer base, Indonesia Eximbank will strengthen its cooperation with the Bank and Non-Bank Financial Institutions, Ministries/ Institutions, business associations and Export Credit Agencies of other countries. Specifically for cooperation with the Bank Financial Institutions, Indonesia Eximbank has a new Trade Receivable Protection Insurance cooperation program where the cooperating Bank Financial Institutions can become the insured of the insurance product. In addition, Financial Institutions that cooperate with Indonesia Eximbank using the new program will attain

ASURANSI
INSURANCE

lainnya yaitu waktu tunggu masa klaim yang lebih rendah dibandingkan jika Lembaga Keuangan tidak menggunakan skema kerjasama dengan Indonesia Eximbank.

Peningkatan pemasaran *Product Holding* (asuransi) juga dilakukan kepada nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan Indonesia Eximbank. Salah satunya adalah dengan adanya *bundling* produk asuransi proteksi piutang dagang dengan pembiayaan PKE UMKM. Selain itu penjualan produk Asuransi Indonesia Eximbank akan dilakukan secara bersama-sama dengan produk pembiayaan, sehingga selain pertumbuhan asuransi akan lebih optimal, kolaborasi internal antar unit bisnis Indonesia Eximbank akan semakin lebih baik.

LPEI selalu melakukan perbaikan dalam hal memperluas *coverage* pelayanan asuransi ekspor untuk mendukung peningkatan nilai ekspor nasional. Salah satu upaya perbaikan yang dilakukan Indonesia Eximbank adalah meningkatkan *coverage* reasuransi yang sesuai dengan kebutuhan dari eksportir Indonesia. Strategi ini terutama difokuskan untuk negara-negara tujuan ekspor serta tujuan investasi yang potensial baik di negara-negara yang termasuk *low risk country* maupun *high risk country*. Dengan demikian, eksportir bisa memiliki lebih banyak pilihan *buyer* dalam melakukan kegiatan ekspor.

Strategi lainnya adalah melakukan pengembangan produk asuransi antara lain: *Buyers Credit Insurance* (*Medium Long Term Insurance*) dan Asuransi dengan skema syariah. Pengembangan produk asuransi tersebut memiliki tujuan agar Indonesia Eximbank dapat memenuhi kebutuhan ekportir terkait pengelolaan risiko terutama guna menghadapi risiko resesi yang diproyeksikan akan terjadi di tahun 2023.

Selain itu guna meningkatkan pelayanan kepada tertanggung, LPEI juga akan meluncurkan portal baru berbasis Teknologi Informasi yaitu E-Marine dan E-TCI. Portal ini akan langsung terkoneksi dengan sistem Indonesia Eximbank sehingga pelayanan yang dapat diberikan kepada tertanggung asuransi Indonesia Eximbank dapat menjadi lebih baik serta transaksi asuransi dapat dilakukan secara *real time*.

another benefit, which is a lower claim period waiting time compared to using other schemes.

Product Holding (insurance) marketing improvement is also carried out to customers who have obtained the Indonesia Eximbank financing facilities. One of them is the bundling of accounts receivable protection insurance products with NIA MSME financing. In addition, the sale of Insurance products will be carried out jointly with financing products, hence apart from a more optimal insurance growth, internal collaboration between Indonesia Eximbank business units will also be improved.

Indonesia Eximbank always makes improvements in terms of expanding the coverage of export insurance services to support the value improvement of national exports. One of the improvements was to increase reinsurance coverage in accordance with the needs of Indonesian exporters. This strategy is mainly focused on export destination countries, as well as potential investment destinations in countries including low-risk countries and high-risk countries. As such, more choices of buyers are available for exporters in carrying out export activities.

Another strategy is to develop insurance products, including: Buyers Credit Insurance (Medium Long-Term Insurance) and Insurance with sharia schemes. The development of the insurance product aims to enable Indonesia Eximbank to meet the needs of exporters related to risk management, particularly to address the risk of recession that projected to occur in 2023.

Moreover, to improve the services to the insured, Indonesia Eximbank will also launch new Information Technology-based portals, namely E-Marine and E-TCI. This portal will be directly connected to the Indonesia Eximbank system, hence the services to the insured will be improved and insurance transactions can be carried out in real time.



.04

TRADE FINANCE

TRADE FINANCE



Selama tahun 2022 volume *Trade Finance* tumbuh 180% yang diikuti dengan pertumbuhan *customer base*. Dukungan pembiayaan *trade finance* kepada segmen UMKM terus meningkat, sejalan dengan dukungan pembiayaan kepada segmen korporasi yang berkontribusi sebesar 80% dari pencapaian *volume trade finance* LPEI.

During 2022, Trade Finance volume grew 180% followed by customer base growth. Trade finance financing support to the MSME segment continues to increase, in line with financing support to the corporate segment which contributes 80% of Indonesia Eximbank trade finance volume achievement.

Pada tahun 2022, LPEI melakukan penguatan produk, layanan dan infrastruktur *trade finance* berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing eksportir Indonesia dan kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

Unit kerja *Trade Finance* berperan penting dalam pengembangan bisnis *trade finance* Lembaga yang bertujuan untuk memfasilitasi para eksportir dalam meningkatkan penjualan dan kontribusi terhadap nilai ekspor nasional.

Sebagai upaya mewujudkan *one stop solution services* kepada eksportir, *Trade Finance* mendukung penyediaan fasilitas pembiayaan, baik untuk *pre-shipment* (termasuk di dalamnya *post-import*) hingga *post-shipment*, sesuai dengan kebutuhan nasabah atau calon nasabah. Unit kerja *Trade Finance* melakukan kolaborasi internal dan eksternal melalui pemasaran bersama, pendampingan dan penyusunan struktur fasilitas, pemrosesan dan pemantauan utilisasi fasilitas, perluasan fitur dan pengembangan skema dan produk baru, penyusunan kebijakan biaya layanan *trade finance*, serta penguatan sistem dan infrastruktur pendukung *trade finance*.

Fokus Kegiatan Usaha Tahun 2022

Sejalan dengan mandat Lembaga dalam pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi baik melalui penugasan umum komersial maupun dalam rangka penugasan khusus (*National Interest Account*), *Trade Finance* fokus dalam penyediaan fasilitas *trade finance* yang sesuai dengan model bisnis atau kebutuhan eksportir dalam rangka pengembangan bisnis maupun pemulihan kondisi usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Pengembangan fitur produk eksisting dan produk baru juga dilakukan untuk dapat memperluas cakupan layanan kepada eksportir dalam bentuk pembiayaan rantai pasok dan percepatan piutang dagang kepada pembeli.

Dalam periode waktu pemulihan ekonomi nasional, *Trade Finance* konsisten melanjutkan upaya penguatan

Indonesia Eximbank enhances its sustainable trade finance products, services, and infrastructure in 2022, with the aim of improving the competitiveness of Indonesian exporters and supporting the country's economic recovery.

The Trade Finance business unit holds a significant role in the development of the institution's trade finance business, which aims to facilitate exporters to increase sales and contribute to the value of national exports.

Trade Finance supports the provision of financing facilities, both pre-shipment (including post-import) and post-shipment, according to the needs of customers or potential customers, in an effort to realize one-stop solution services for exporters. The Trade Finance Business Unit conducts internal and external cooperation through joint marketing, supporting and preparing facility structures, processing and monitoring facility utilization, expanding functions and developing new programs and products, preparing trade finance service fee policies, and strengthening trade finance support systems and infrastructure.

Focus of Business Activities in 2022

Aligned with the institution's mission to provide financing, guarantees, insurance, and advisory services for national exports, both through general commercial mandates and special mandates (National Interest Accounts), the Trade Finance focuses on delivering trade finance facilities that cater to the business model or requirements of exporters, with the aim of business growth and recovery from the Covid-19 pandemic's impact on trade conditions.

The institution is developing both existing product features and new products to expand its services to exporters, including supply chain financing and expediting trade receivables to buyers.

Trade Finance continued its efforts to strengthen its front, middle- and back-end strategies with a focus on wallet

TRADE FINANCE
TRADE FINANCE

strategi baik *front end*, *middle end* dan *back end* dengan fokus peningkatan *wallet share*, *customer base*, *product features*, *risk management*, dan *human capital enhancement*. Konsistensi penerapan *Service Level Agreement* (SLA) yang terukur dalam setiap transaksi *Trade Finance* juga turut berperan penting dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada para eksportir.

Tantangan Yang Dihadapi Di Tahun 2022

Dalam menjalankan penyediaan jasa *trade finance* tersebut, tantangan yang dihadapi LPEI adalah pandemi Covid-19 yang masih mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional pada tahun 2022. Kenaikan tingkat suku bunga pasar mempengaruhi tingkat harga pembiayaan dalam mata uang Rupiah maupun US Dolar. Strategi pengelolaan likuiditas, pengelolaan aset dan liabilitas juga harus menyesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi. Dibutuhkan penguatan dalam aktivitas pemantauan nasabah eksisting maupun analisa pemberian fasilitas nasabah baru, karena sebagian bisnis eksportir terdampak penundaan pembayaran dari *buyer* atau penurunan permintaan.

Dalam perencanaan struktur fasilitas *trade finance*, selain risiko komersial dan operasional, risiko-risiko dalam transaksi *cross-border* juga diperhitungkan secara cermat oleh LPEI. Seperti risiko *sovereign*, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko pasar atas fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, risiko likuiditas, dan *credit risk default*.

Menghadapi dinamika situasi ekonomi global dan tantangan yang dihadapi, mendorong LPEI untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan jaringan yang luas untuk kerjasama produk pendukung *trade finance*, mitigasi risiko dan optimasi *funding* berbasis *trade finance* sehingga diharapkan dapat diperoleh biaya dana dan struktur *pricing* yang lebih efisien.

LPEI terus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas proses bisnis yang *prudent* dan berdasar pada *trade cycle* Eksportir. Pengembangan

share, customer base, product features, risk management and human capital enhancement during the period of national economic recovery. Consistent implementation of measurable Service Level Agreements (SLAs) on each Trade Finance transaction also plays an important role in efforts to best serve exporters.

Challenges in 2022

Indonesia Eximbank encounters a challenge in providing trade finance services due to the Covid-19 pandemic that still affects global trade operations in 2022. The pricing of Rupiah and US Dollar denominated financing has been affected by the increasing market interest rates. Liquidity, asset, and liability management strategies must also adjust to manage risks effectively. The monitoring of existing customer activities must be reinforced, and the provision of facilities to new customers should be analysed. Some exporters are affected with payment delays from buyers or reduced demand.

In addition to commercial and operational risks, Indonesia Eximbank prudently calculates the risks associated with cross-border transactions when planning the structure of the trade finance facility. These include sovereign risk, legal risk, compliance risk, reputational risk, foreign exchange and interest rate market risk, liquidity risk and credit default risk.

The constant dynamic global economy and its associated challenges prompt Indonesia Eximbank to maximize the use of its vast network for product collaboration that bolsters trade finance, manages risks, and optimizes financing based on trade finance. This, in turn, is expected to lead to a more efficient cost of funds and pricing structure.

Indonesia Eximbank strives to enhancing and refining the quality of its business processes, which are prudent and tailored to the exporter's business cycle. This objective

dan peningkatan kualitas yang dimaksud diantaranya dalam hal proses penyediaan fasilitas kepada nasabah, pelaksanaan proses transaksi yang sesuai dengan standar di pasar domestik dan internasional, pemantauan dan evaluasi fasilitas, *technical assistance* dan *advisory* oleh *certified and professional trade advisor*, penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip kepatuhan, serta kehati-hatian yang selalu mengikuti isu-isu *international compliance*.

Implementasi Strategi Tahun 2022

Lembaga menyediakan fasilitas *trade finance* melalui penugasan umum komersial maupun penugasan khusus untuk mendukung aktifitas *pre-shipment* dan *post-shipment* eksportir. Fasilitas pembiayaan *trade finance* diberikan melalui *pre-shipment financing* untuk melakukan pembelian bahan baku dan *post-shipment financing* untuk percepatan perputaran piutang dagang.

Beberapa produk unggulan *pre-shipment trade finance* diantaranya: penerbitan instrumen *Letter of Credit* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, pembiayaan *Pre-Export Financing*, *Account Payable Financing*. Beberapa produk unggulan *Post-Shipment Trade Finance* diantaranya: *Account Receivable Financing*, Pengambilalihan Wesel Ekspor dan *Correspondent Bank Bill Discounting*.

Beberapa strategi utama yang diterapkan pada tahun 2022 dalam mendorong pertumbuhan ekspor antara lain:

- Dukungan fasilitas atas sinergi antara debitur Segmen Korporasi dengan Segmen UMKM melalui *Supply Chain Financing* untuk menjaga rantai pasok bahan baku bagi eksportir besar sehingga dapat menjaga performanya dalam memenuhi order dari *buyer* di luar negeri.
- Dukungan fasilitas percepatan piutang dagang kepada *supplier* di dalam negeri dalam rangka pemenuhan bahan baku ekspor eksportir melalui produk *Auto Purchase*, melengkapi produk *Account Receivable Financing*, Pengambilalihan Wesel Ekspor dan *Correspondent Bank Bill Discounting*.

of quality development and improvement encompasses several areas such as providing facilities to customers, adhering to domestic and international market standards for transaction processes, monitoring and assessing facilities, providing technical assistance and advice from certified and professional trade consultants, reinforcing risk management, and following international compliance issues by implementing the principles of compliance and prudence.

2022 Strategy Implementation

The Institution provides trade finance facilities to support exporters' pre-shipment and post-shipment activities through general commercial assignments and special assignments. Pre-shipment financing for purchasing raw materials and post-shipment financing for expediting trade receivables turnover are among the trade finance financing facilities provided.

Pre-Shipment Trade Finance's flagship products include letter of credit instruments and domestic letters of credit issuance, pre-export financing, and accounts payable financing. Post-Shipment Trade Finance's prominent products consist of Account Receivable Financing, Export Bill Acceptance, and Correspondent Bank Bill Discounting.

The following are some of the key strategies adopted in 2022 to promote export growth:

- Fostering synergy between corporate and MSME segment borrowers by offering supply chain financing. This aims to sustain the supply chain of raw materials for large exporters, enabling them to meet the demand of overseas buyers efficiently.
- Supporting the acceleration of trade receivables facilities to domestic suppliers for the fulfilment of export raw materials for exporters through Auto Purchase products, complementary to Account Receivable Financing products, Export Bill Acceptance and Correspondent Bank Bill Discounting.

TRADE FINANCE
TRADE FINANCE

- c. Dukungan pembelian bahan baku untuk proses produksi barang yang diekspor dalam bentuk penerbitan instrumen *Letter of Credit* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, pembiayaan *Pre-Export Financing*, *Account Payable Financing*.
- d. Dukungan fasilitasi UMKM Go Global, melalui *Business Matching* antara UMKM khususnya alumni CPNE LPEI (*Coaching Program for New Exporter*) dengan pembeli potensial di luar negeri melalui sinergi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kantor Dagang Industri dan *stakeholders* terkait lainnya. Dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan untuk UMKM yang siap ekspor.
- e. Dukungan penyaluran pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor *Trade Finance* ke sejumlah debitur eksportir baru dalam bentuk *pre-shipment financing* dan/atau *post shipment financing*.
- f. Perluasan jaringan layanan *trade finance* untuk mempermudah eksportir mendapatkan layanan *trade finance* LPEI. Layanan ini dikembangkan dengan memaksimalkan fungsi kantor wilayah dan cabang LPEI serta kerjasama dengan bank devisa dalam negeri akan dibentuk.
- g. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan dalam hal *trade-based funding*, produk *trade finance*, *sharing knowledge*.

Selain strategi utama dalam rangka pelaksanaan penugasan umum, LPEI menjalankan peran strategis dalam hal pelaksanaan mandat Program Penugasan Khusus Ekspor *Trade Finance* (PKE TF) yang diperpanjang sampai dengan tahun 2024, dengan fokus kepada sektor industri prioritas pemerintah atau produk-produk unggulan yang masih mempunyai permintaan tinggi di Luar Negeri di masa pandemi.

Komoditas yang dapat dibiayai PKE TF yaitu sektor agrikultur (pertanian, kehutanan, dan perikanan) dan/atau sektor pengolahan dengan komoditas ekspor yaitu 1) produk karet, 2) produk kopi termasuk kopi *specialty*, 3) furnitur, 4) produk alas kaki, 5) makanan olahan termasuk

- c. Supporting the purchase of raw materials for the production process of exported goods by issuing Letters of Credit and Domestic Letters of Credit, *Pre-Export Financing*, *Account Payable Financing*.
- d. Supporting MSMEs to go global by connecting MSMEs, particularly CPNE LPEI alumni, with potential foreign buyers through synergies with the Ministry of Commerce, Ministry of Foreign Trade, Industrial Trade Office and other related stakeholders. Support can also be provided through financing facilities for MSMEs that are ready to export.
- e. Supporting the financing disbursement of Export Trade Finance Special Assignment to several new exporter borrowers through pre-shipment financing and/or post-shipment financing.
- f. Expanding the trade finance service network, making it more accessible for exporters to acquire the institution's trade finance services. The functions of Indonesia Eximbank's regional offices and branches will be maximized, and collaborations with domestic foreign exchange banks will be established.
- g. Synergy and collaboration with financial institutions in terms of trade-based funding, trade finance products, and knowledge sharing.

Apart from the main strategy in executing general assignments, Indonesia Eximbank assumes a strategic role in executing the Export Trade Finance National Interest Account Program (NIA TF) mandate, which has been extended until 2024. The focus of this program is on the government's priority industrial sectors or high-end products that continue to have demand overseas amidst the pandemic.

Commodities that can be financed under the NIA TF are the agricultural sector (agriculture, forestry and fisheries) and/or the manufacturing sector with export commodities, namely 1) rubber products, 2) coffee products including specialty coffee, 3) furniture, 4) footwear, 5) processed

produk ikan, udang, makanan laut (*seafood*), 6) tekstil dan produk tekstil, 7) produk perhiasan termasuk permata, 8) produk teh, rempah-rempah, 9) produk kayu, 10) produk kerajinan, 11) produk elektronik, 12) produk kimia, dan/atau 13) Produk otomotif dan suku cadang kendaraan bermotor. Pembiayaan dapat diberikan dengan skema *pre shipment* dan *post shipment financing*.

Pada tahun 2022 *Trade Finance* menyusun rencana strategis sejalan dengan sasaran strategis Lembaga baik dalam hal perspektif keuangan, perspektif nasabah dan seluruh pemangku kepentingan, perspektif penguatan proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Rencana kerja disusun untuk dapat mengoptimalkan penyediaan fasilitas kepada eksportir dalam sistem rantai pasok yang terintegrasi dan mempertimbangkan *trade cycle* kepada Eksportir sehingga dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi Eksportir dan para pemasoknya. Fasilitas yang diberikan diharapkan menciptakan peluang bisnis baru atau peningkatan penjualan bagi para pemasok, yang berdampak positif dalam hal bertambahnya kesempatan lapangan kerja serta dapat berkontribusi bagi peningkatan taraf hidup pada masyarakat sekitar.

Adapun capaian yang berhasil diraih di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dari perspektif keuangan, selama tahun 2022 volume *Trade Finance* tumbuh 180% yang diikuti dengan pertumbuhan *customer base* dan pendapatan baik dari *interest* maupun *fee*. Dukungan pembiayaan *trade finance* kepada segmen UMKM terus meningkat, sejalan dengan dukungan pembiayaan kepada segmen korporasi yang berkontribusi sebesar 80% dari pencapaian volume *trade finance* lembaga.

Dari perspektif nasabah dan *stakeholders* LPEI telah melakukan pengembangan fitur produk dan peluncuran

food including fish, shrimp, seafood, 6) textiles and textile products, 7) jewellery including gems, 8) tea products, spices, 9) wood products, 10) handicrafts, 11) electronic products, 12) chemical products, and/or 13) automotive products and parts. Financing can be provided with pre-shipment and post-shipment financing programs.

Trade Finance formulated a strategic plan in 2022 that aligns with the institution's strategic objectives, encompassing the financial perspective, the perspective of customers and stakeholders, the perspective of strengthening internal business processes, and the perspective of learning and growth.

To deliver added value and benefits to exporters and their suppliers, work plans are developed to enhance the provision of facilities to exporters in an integrated supply chain system, considering the trade cycle of exporters. These facilities are anticipated to generate new business opportunities or increased sales for suppliers, resulting in a favourable impact on employment opportunities and ultimately contributing to the betterment of the standard of living in the surrounding community.

The results achieved in 2022 were as follows:

From a financial perspective, trade finance volume grew by 180% in 2022. This was followed by growth in customer base and interest and fee income. In line with financing support to the corporate segment, which contributes 80% of the Institution's trade finance volume achievement, trade finance financing support to the MSME segment continues to grow.

From the perspective of customers and stakeholders, Indonesia Eximbank has developed product features

TRADE FINANCE
TRADE FINANCE

produk baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan Eksportir, melakukan penguatan dan pengkinian kebijakan internal, penyempurnaan kebijakan *risk-based pricing* dan *fee*, organisasi kerja dan kewenangan sesuai dengan tingkat risiko. LPEI secara aktif melakukan inisiasi kerjasama untuk sinergi dan kolaborasi dengan perbankan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan layanan dan jasa perbankan untuk nasabah LPEI, *forfaiting/ bill purchase, risk participation, co-financing* dan penjaminan pembiayaan, *cash management, virtual account, collection, trade-based funding* serta *technical assistance*.

LPEI juga memanfaatkan hubungan baik dengan ECA/ Eximbank/Lembaga Multilateral dalam hal *sharing knowledge* terkait dengan *structured trade finance* dan ESG (*Environmental, Social, Governance*) *trade finance*.

Dukungan LPEI terhadap ekosistem ekspor nasional juga diwujudkan dengan menjadi narasumber maupun kontributor aktif dalam program Kementerian/ Lembaga seperti *sharing knowledge* tentang *international trend* dan *shifting global trend in trade*, mitigasi risiko transaksi melalui produk dan layanan perbankan dan topik-topik aktual lainnya dalam rangka pemulihan dan penguatan ekspor nasional.

Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, LPEI secara konsisten melaksanakan program pengembangan *hard skills* dan *soft skills* pegawai. Pelaksanaan program pengembangan dilakukan baik melalui seminar, *training, workshop* dan program sertifikasi baik dalam bidang antara lain *trade finance*, manajemen risiko, analisa pembiayaan, komoditi unggulan ekspor, penguasaan teknologi pendukung, negosiasi dan komunikasi.

Rencana Strategis 2023

Di tengah tantangan perekonomian global yang baru mulai pulih dari tekanan dan ketidakpastian selama pandemi Covid-19, pada tahun 2023 *Trade Finance* akan

and launched new products that can meet the needs of exporters. It has also strengthened and updated internal policies, refined risk-based pricing and fee policies, work organization and authorities according to the level of risk. Indonesia Eximbank actively initiates cooperation for synergy and collaboration with banks by signing Memorandum of Understanding and Cooperation Agreements regarding the use of banking services and services for its clients, *forfaiting/bill purchase, risk participation, co-financing* and financing guarantees, cash management, virtual accounts, collections, trade-based financing and technical assistance.

Indonesia Eximbank also leveraged on its good relationship with ECA/Eximbank/Multilateral Institutions in terms of knowledge sharing related to structured trade finance and ESG (Environmental, Social, Governance) trade finance.

Indonesia Eximbank's support to the national export ecosystem is also realized by being sources or active contributor in ministries/agencies programs such as knowledge sharing on international trends and changing global trends in trade, mitigation of transaction risk through banking products and services and other topical issues related to the recovery and strengthening of national exports.

From a learning and growth perspective, Indonesia Eximbank consistently implemented programs to develop the hard and soft skills of its employees. Development programs in trade finance, risk management, financing analysis, excellent export commodities, mastery of supporting technology, negotiation and communication are implemented through seminars, training, workshops and certification programs.

Strategic Plans 2023

Amidst the ongoing global economic difficulties, which are gradually recuperating from the strains and uncertainties caused by the Covid-19 pandemic, Trade Finance will

melakukan upaya konsisten sejalan dengan mandat utama Lembaga dalam pengembangan ekspor nasional.

Trade Finance memperluas fitur produk dan pengembangan produk sebagai alternatif dengan mempertimbangkan kebutuhan eksportir dan sektor industri. Selain fokus pada penugasan umum, LPEI juga fokus dalam pelaksanaan penugasan khusus pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional pada sektor industri prioritas Pemerintah.

Secara umum *Trade Finance* akan meneruskan beberapa strategi utama pada tahun 2022 yang relevan untuk dilanjutkan pada tahun 2023. *Trade Finance* konsisten melanjutkan upaya penguatan strategi baik *front end*, *middle end* dan *back end* dengan fokus peningkatan *wallet share*, *customer base*, *product features*, *risk management*, dan *human capital enhancement*.

Fokus strategi pada 2023 antara lain:

- Sinergi dengan perbankan melalui program *Co-financing* yaitu pembiayaan bersama antara LPEI dengan mitra perbankan yang diperkuat dengan dukungan penjaminan pembiayaan oleh LPEI.
- Dukungan fasilitas pembiayaan rantai pasok kepada debitur di Segmen Korporasi maupun Segmen UMKM melalui produk *Supply Chain Financing* dan *Approved Payable Financing*.
- Dukungan fasilitas pembiayaan tagihan (*Account Receivable Financing*) yang dilengkapi dengan asuransi proteksi piutang dagang (*Trade Credit Insurance*) untuk mitigasi risiko gagal bayar *buyer*.
- Dukungan fasilitasi UMKM Go Global, melalui *Business Matching* antara UMKM khususnya alumni CPNE LPEI (*Coaching Program for New Exporter*) dengan pembeli potensial di luar negeri melalui sinergi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kantor Dagang Industri dan *stakeholder* terkait lainnya ataupun via *marketplace*. Dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan untuk UMKM yang siap ekspor.

strive to make steadfast endeavours in 2023 to fulfil the Institute's main objective of promoting national exports.

Taking into account the needs of exporters and the industrial sector, Trade Finance will expand product features and product development as an alternative. Apart from focusing on general mandates, Indonesia Eximbank also focuses on the implementation of special government mandates under the national economic recovery program in the government's priority industrial sectors.

In general, Trade Finance will continue with various key strategies in 2023 that were pertinent to carry forward from 2022. Trade Finance will continue its efforts to strengthen its front-end, middle-end and back-end strategies. It will focus on increasing its wallet share, customer base, product features, risk management and human capital.

The focus of the 2023 strategy includes:

- Synergy with the banking sector through the co-financing program, namely joint financing between Indonesia Eximbank and banking partners, strengthened by the support of financing guarantees.
- Support for corporate and MSME segment debtors through supply chain financing and approved credit financing products.
- Support for Account Receivable Financing (ARF) facilities, supplemented by trade credit insurance, to mitigate the risk of non-payment by the buyer.
- Support for MSME Go Global facilitation through business matchmaking between MSMEs, particularly CPNE LPEI (Coaching Program for New Exporters) graduates, with potential overseas buyers through synergy with Ministry of Commerce, Ministry of Foreign Affairs, Industrial Trade Office and other related stakeholders or marketplace. Support for export-ready MSMEs can also be provided through financing facilities.

TRADE FINANCE
TRADE FINANCE

- e. Pengembangan inisiatif baru dalam hal tata kelola bisnis diantaranya penguatan titik layanan kepada nasabah *Trade Finance* melalui *Business Solution Desk*, Implementasi tata kelola Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diamanatkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), evaluasi berkala kebijakan *risk-based pricing trade finance*, *trade-based funding* yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan eksportir melalui program penugasan khusus ekspor maupun penugasan umum.
 - f. Perluasan produk *trade finance* syariah untuk melengkapi kebutuhan eksportir dalam hal pembiayaan syariah.
 - g. Menjaga kualitas proses kerja yang efektif dan efisien untuk dapat memberikan *service excellent* kepada eksportir dengan tingkat risiko yang terukur dan termitigasi dengan baik.
 - h. Penguatan dan pengembangan sistem dilakukan antara lain atas *Trade Finance System*, *Obligo Monitoring System*, *Supply Chain Financing Management System*, dan *DHE Reporting System*.
 - i. Program pengembangan bagi seluruh pegawai *Trade Finance* maupun LPEI melalui program *training* dan sertifikasi.
 - j. Perluasan jaringan layanan *trade finance* LPEI untuk mempermudah eksportir mendapatkan layanan *trade finance*. Layanan ini dikembangkan dengan memaksimalkan fungsi kantor wilayah dan cabang LPEI serta kerjasama dengan bank devisa dalam negeri.
 - k. Penguatan peran LPEI dalam mengisi ceruk pasar (*filling the market gap*) melalui peningkatan kerja sama dengan mitra Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank untuk memfasilitasi Eksportir Indonesia yang merupakan nasabah lembaga keuangan dimaksud.
 - l. Dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, LPEI akan melanjutkan pelaksanaan mandat Program Penugasan Khusus Ekspor *Trade Finance*, dan mendukung penuh agenda Pemerintah untuk melakukan penetrasi pasar
- e. Developing new initiatives in terms of business governance, including strengthening the service points for trade finance customers through the *Business Solution Desk*, implementing the governance of export proceeds (DHE) as mandated by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), periodic evaluation of risk-based pricing trade finance policies, competitive trade-based financing according to the needs of exporters through special export allocation programs and general allocations.
 - f. Expanding sharia trade finance products to meet exporters' sharia financing needs.
 - g. Providing excellent service to exporters with well measured and mitigated risk levels by maintaining the quality of effective and efficient work processes.
 - h. Strengthening and developing systems including trade finance system, obligation monitoring system, supply chain financing management system, and DHE reporting system.
 - i. Development programs for all Trade Finance and Indonesia Eximbank employees through training and certification programs.
 - j. Expanding Trade Finance Service Network to make it easier for exporters to obtain trade finance services. This service has been developed by maximizing the functions of regional offices and branches as well as the cooperation with domestic foreign exchange banks.
 - k. Strengthen Indonesia Eximbank's role in filling the market gap by increasing cooperation with bank and non-bank financial institution partners to facilitate Indonesian exporters who are customers of these institutions.
 - l. In support of the National Economic Recovery Program, Indonesia Eximbank will continue to implement the mandate of the Export Trade Finance National Interest Accounts and will fully support the government's agenda to penetrate markets in non-

TRADE FINANCE
TRADE FINANCE

ke negara-negara non-tradisional dengan menjalin hubungan melalui perbankan dan lembaga keuangan yang dapat mendukung transaksi ke negara-negara non-tradisional. LPEI juga secara aktif mendukung proses penjajakan fasilitasi transaksi imbal dagang yang diinisiasi oleh Komite PKE melalui PKE TF.

- m. Pelaksanaan *sharing knowledge* dan *technical assistance* terkait dengan fasilitas *trade finance* dan *international trade* kepada para pemangku kepentingan, baik internal dan eksternal secara konsisten.

traditional countries by establishing relationships through banks and financial institutions that can support transactions to other non-traditional countries. Indonesia Eximbank, through the PKE TF, also actively supports the process initiated by the PKE Committee to explore the facilitation of counter-trade transactions.

- m. Providing consistent knowledge sharing and technical assistance related to trade finance and international trade facilities to internal and external stakeholders.



.05

TREASURY

TREASURY

Pada tahun 2022, LPEI memfokuskan kegiatan bisnis pada upaya pendanaan yang diutamakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo serta mencari sumber pendanaan yang lebih efisien. LPEI melakukan efisiensi biaya dana dengan optimalisasi *balance sheet*. Selain itu, Tresuri juga berkomitmen mengelola rasio PDN secara keseluruhan pada level $\pm 1\%$ dalam rangka pengelolaan risiko pasar (nilai tukar) di tengah kondisi trend penguatan *index USD*

In 2022, Indonesia Eximbank focuses business activities on funding efforts that are prioritized to pay overdue obligations as well as find more efficient funding sources. Indonesia Eximbank optimizes the balance sheet to ensure cost efficiency of the fund. Additionally, Treasury also committed to managing the overall GDP ratio at the level of $\pm 1\%$ while managing market risk (exchange rate) amid the strengthening trend of the USD index.



LPEI memiliki Divisi *Financial Institution and Treasury* yang berperan penting dalam operasional LPEI karena memiliki kewenangan strategis dari masing-masing departemen berikut.

1. *Dealing Room*

- Mengelola Likuiditas Lembaga, baik jangka pendek dan jangka panjang.
- Melakukan penempatan dana pada instrumen yang memiliki risiko terkendali dan likuid.
- Melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah.
- Pengelolaan Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) secara *prudent*.

2. *Financial Institution*

- Fokus terhadap *Counterparty Bank* atau Lembaga Keuangan Non Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).
- Melakukan *set up & annual review interbank limit*.
- Melakukan penggalangan dana melalui *loan market bilateral (term loan, revolving loan, BA Financing), syndication/club deal* dan *capital market* yaitu penerbitan obligasi valas.
- Melakukan hubungan korespondensi; *Set Up & Annual Review RMA*, melakukan *KYC/AML Due Diligence* dan *Nostro Account maintaining*.

3. *Pendanaan*

- Fokus terhadap *Counterparty Bank* atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).
- Melakukan *set up & annual review interbank limit*.
- Melakukan penggalangan dana melalui *loan market bilateral (term loan, revolving loan, BA Financing, Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek), syndication/club deal* dan *capital market* yaitu penerbitan obligasi rupiah.
- Melakukan hubungan korespondensi; *Set Up & Annual Review RMA*, melakukan *KYC/AML Due Diligence* dan *Nostro Account maintaining*.

The Financial Institution and Treasury Division of Indonesia Eximbank plays a critical role in its operations, as it has been vested with strategic authority from each of these departments.

1. *Dealing Room*

- Manage short or long term liquidity.
- Place funds in controlled risk and liquid instruments.
- Execute foreign exchange buying and selling transactions for client needs.
- Prudent management of Net Open Position (NOP) ratio.

2. *Financial Institutions*

- Focus on Counterparty Banks or Non-State/Regional Owned Enterprises (BUMN/D) Financial Institutions.
- Conduct set up & annual review of interbank limits.
- Conduct fundraising through bilateral loan markets (term loans, revolving loans, BA Financing), syndication/club deals and capital markets, namely the issuance of foreign currency bonds.
- Perform correspondence relations; Set Up & Annual Review RMA, perform KYC/AML Due Diligence and maintain Nostro Account.

3. *Funding*

- Focus on Counterparty Banks or Non-State/Regional Owned Enterprises (BUMN/D) Financial Institutions.
- Conduct set up & annual review of interbank limits.
- Conduct fundraising through bilateral loan markets (term loans, revolving loans, BA Financing), syndication/club deals and capital markets, namely the issuance of foreign currency bonds.
- Perform correspondence relations; Set Up & Annual Review RMA, perform KYC/AML Due Diligence and maintain Nostro Account.

TREASURY
TREASURY

Fokus Tresuri di Tahun 2022

Di sepanjang tahun 2022, LPEI memfokuskan kegiatan bisnis pada upaya pendanaan yang diutamakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo serta mengganti dana berbiaya mahal dengan dana berbiaya lebih efisien. Selain itu, Tresuri juga mengatur posisi likuiditas yang optimal dengan pengelolaan portofolio tresuri sehingga dapat mengoptimalkan *interest income*. Selain itu, LPEI juga melakukan efisiensi biaya dana dengan optimalisasi *balance sheet*. Tresuri juga berkomitmen mengelola rasio PDN secara keseluruhan pada level $\pm 1\%$ dalam rangka pengelolaan risiko pasar (nilai tukar) di tengah kondisi *trend* penguatan *index* USD (pelemahan nilai tukar Rupiah).

Tantangan dan Langkah Penyelesaian di Tahun 2022

LPEI menghadapi beberapa tantangan eksternal di sepanjang tahun 2022 yang berpengaruh terhadap kinerjanya. Faktor eksternal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Pandemi Covid-19**
Belum pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19 menyebabkan kebutuhan penggunaan fasilitas pembiayaan oleh debitur belum maksimal sehingga berdampak pada turunnya kebutuhan pendanaan untuk ekspansi pembiayaan.
- **Konflik Ukraina dan Rusia**
Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia secara tidak langsung menyebabkan ketidakpastian pasar uang dan perdagangan internasional. Hal ini berdampak pada tingginya inflasi akibat kenaikan harga energi sehingga menyebabkan kenaikan suku bunga yang signifikan.
- **Trend kenaikan suku bunga**
Sepanjang tahun 2022 terdapat *trend* kenaikan suku bunga di pasar yang cukup signifikan sehingga nilai pembayaran kewajiban atas sumber dana dan sumber dana baru menjadi lebih tinggi.

Treasury Focus in 2022

In 2022, Indonesia Eximbank prioritized funding initiatives to meet maturing obligations and replaced high-cost funding with more lower-cost funding. The Treasury division was responsible for managing the treasury portfolio to maximize interest income and maintain an optimal liquidity position. Additionally, Indonesia Eximbank optimized the balance sheet to ensure cost efficiency of the Fund. The Treasury division also committed to managing the overall PDN ratio within a range of $\pm 1\%$ while managing market risk in the context of the strengthening USD index and weakening rupiah exchange rate trend.

Challenges and Its Resolutions in 2022

During 2022, Indonesia Eximbank faced several external challenges that impacted its performance. These external factors are as follows:

- **Covid-19 Pandemic**
The economy is still grappling with the aftermath of the Covid-19 pandemic, causing debtors to refrain from fully utilizing financing facilities and consequently decreasing the demand for expansion financing.
- **The Ukrainian and Russian Conflicts**
The conflict between Ukraine and Russia has caused a ripple effect of uncertainty in financial markets and international trade, indirectly leading to high inflation primarily driven by energy prices. This has resulted in a notable surge in interest rates.
- **The trend of rising interest rates**
In 2022, there was a notable trend of rising interest rates in the market, which will result in higher payment obligations for existing and new sources of funds.

TREASURY
TREASURY

Ketiga faktor eksternal tersebut mempengaruhi kinerja LPEI yang tidak sesuai harapan yang dipengaruhi oleh penurunan kebutuhan pendanaan dan *trend* kenaikan suku bunga.

Merespon kondisi tersebut, LPEI menetapkan strategi untuk menjaga kinerjanya melalui *Rebalancing Maturity Profile*. Penetapan strategi ini bertujuan untuk mengelola profil jatuh tempo yang lebih terukur sehingga menghindari penumpukan jatuh tempo kewajiban di waktu yang bersamaan. Adapun rencana yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan negosiasi tingkat suku bunga atas seluruh pinjaman eksisting.
- Masuk pasar dalam rangka penggalangan dana yaitu melalui instrumen sindikasi, bilateral, *stand by facility*, dan instrumen lainnya.
- Mengoptimalkan pengelolaan sumber dana melalui penambahan baik dari jumlah bank dan *limit money market*.
- Melakukan pelunasan dipercepat dalam rangka mengelola kecukupan sumber dana yang lebih optimal.

LPEI juga menetapkan langkah strategis untuk menambah jumlah kreditur *on-shore*. Strategi ini dilakukan dalam rangka diversifikasi sumber dana yang lebih efisien melalui:

- Peningkatan hubungan koresponden dengan bank asing eksisting untuk mendapatkan sumber dana *on-shore*.
- Intensifikasi pembukaan hubungan koresponden dengan bank baru untuk mendapatkan sumber dana *on-shore*.

Implementasi atas berbagai strategi tersebut secara efektif dan tepat sasaran mampu mendukung pencapaian LPEI sebagai berikut:

Due to a decrease in funding needs and a rising interest rate trend, the Institution's performance was impacted by the three external factors mentioned above, leading to unmet expectations.

Indonesia Eximbank has formulated a plan in response to these circumstances, aimed at sustaining its performance by rebalancing its maturity profile. The objective of this strategy is to manage a more measurable maturity profile, while also avoiding the accumulation of overdue liabilities. The measures that have been put into place include:

- Negotiating interest rates on all existing loans.
- Going to the market to raise funds through syndicated, bilateral, stand-by and other instruments.
- Optimizing the management of funding sources by increasing both the number of banks and money market limits.
- Accelerating repayments to better manage the adequacy of funding sources.

Indonesia Eximbank also taken strategic steps to increase its onshore creditors. This strategy will be implemented as part of a more efficient diversification of funding sources through:

- Increasing correspondent relationships with existing foreign banks to obtain onshore funding sources.
- Intensifying the opening of correspondent relationships with new banks to obtain onshore funding sources.

The effective and targeted implementation of various strategies is capable of supporting the following achievements of Indonesia Eximbank:

TREASURY
TREASURY

No.	Pencapaian	Achievements in 2022
1	Pertumbuhan beban bunga tetap di bawah laju <i>trend</i> pertumbuhan suku bunga di pasar di tengah tren kenaikan suku bunga yang signifikan di tahun 2022.	Interest expense growth remains below the market's interest rate growth trend amid a trend of significant interest rate increases in 2022.
2	Keberhasilan memperoleh dana sindikasi (USD450 juta) secara bilateral baik dalam dan luar negeri serta diperolehnya kreditur baru baik konvensional maupun syariah.	Success in raising bilateral syndicated funds (USD450 million) either domestically or internationally, as well as attracting new conventional and Sharia lenders.
3	Kenaikan jumlah bank koresponden baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menerima penempatan LPEI.	Increase in the number of correspondent banks, either domestic or international, that can accept LPEI placements.
4	<i>Reprofiling</i> melalui pelunasan dipercepat atas salah satu fasilitas sindikasi sebesar USD420 juta yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2023.	Reprofiling by accelerating the repayment of a USD420 million syndicated facility due in 2023.
5	Pemenuhan seluruh kewajiban jatuh tempo (pinjaman dan obligasi) secara tepat waktu dan <i>full payment</i> di tahun 2022.	Meet all maturing obligations (loans and bonds) on time and pay in full in 2022.
6	- Pinjaman yang diterima posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp29.297 Miliar atau mencapai 93.95% dari target sebesar Rp31.182 miliar yang terdiri atas pinjaman dalam valas sebesar Rp22.154 miliar dan rupiah sebesar Rp7.143 miliar. - Total pinjaman yang diterima meningkat sebesar 1.73% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.	- Borrowings received as of 31 December 2022 amounted to Rp29,297 billion or reached 93.95% of the target of Rp31,182 billion, which consisted of foreign currency loans of Rp22,154 billion and Rp7,143 billion. - Total loans received increased by 1.73% compared to the same period in the previous year.

No.	Pencapaian	Achievements in 2022
7	Pemenuhan kewajiban hutang jatuh tempo valas sebesar USD700 Juta, Obligasi Jatuh Tempo sebesar Rp3.09 Triliun, jatuh tempo pinjaman rupiah sebesar Rp1.25 Triliun, serta pelunasan dipercepat sebesar USD420 atas fasilitas sindikasi 2018 dengan: - Perolehan pinjaman bilateral dalam bentuk multi-currency (IDR dan USD) dari 11 Bank, termasuk diantaranya 1 Bank Syariah. - Pengelolaan aset treasury yang optimal untuk menjaga likuiditas yang efisien.	The fulfilment of obligations for matured foreign currency debts of USD700 million, matured bond obligations of Rp3.09 trillion, matured rupiah loans of Rp1.25 trillion, as well as early repayment of USD420 on the 2018 syndication facility by: - Obtaining multi-currency (IDR and USD) bilateral loans from 11 banks, including 1 Sharia Bank. - Optimal management of treasury assets to maintain efficient liquidity.
8	Pendapatan treasury atas pengelolaan portofolio treasury mencapai Rp367 Miliar per 31 Desember 2022.	Treasury income from treasury portfolio management at Rp367 billion as of 31 December 2022.
9	Rasio PDN posisi 31 Desember 2022 terjaga di level 0.68%.	The PDN ratio for the position of 31 December 2022 was maintained at the level of 0.68%.

Rencana Strategis Tahun 2023

LPEI telah menetapkan beragam rencana strategis untuk tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

- Pengelolaan *funding lines* secara memadai dalam pengelolaan risiko likuiditas dan dukungan ekspansi pembiayaan dengan biaya yang efisien.
- Perluasan sumber pendanaan baru tidak hanya bertumpu pada *wholesale funding* namun juga menasar *retail funding*.
- Interest Income* yang optimal dan *interest expense* yang efisien dari pengelolaan portofolio *treasury*.
- Keragaman *counterparties* untuk mendukung operasional penyaluran pembiayaan, penetrasi pasar bagi eksportir baru dan perluasan bisnis asuransi dan penjaminan.

Strategic Plans for 2023

Indonesia Eximbank has established various strategic plans for 2023, including the following:

- Appropriate management of funding lines to manage liquidity risk and support funding expansion at an efficient cost.
- Expansion of new funding sources not only relies on wholesale funding but also targets retail funding.
- Optimal interest income and efficient interest expense through treasury portfolio management.
- Diversity of counterparties to support funding distribution, market penetration for new exporters and expansion of insurance and guarantee business.



.06

JASA KONSULTANSI

ADVISORY SERVICES



Melalui *Coaching Program for New Exporters*, LPEI berupaya mencetak eksportir-eksportir baru di seluruh Indonesia dengan memberikan pendampingan secara intensif kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor hingga dapat menjual produknya ke pasar luar negeri. LPEI juga melakukan kegiatan community development dengan mendirikan Desa Devisa di daerah yang memiliki komoditas unggulan dan berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya

Through the *Coaching Program for New Exporters*, Indonesia Eximbank seeks to produce new exporters throughout Indonesia by providing intensive assistance to export-oriented MSME players the enable them to sell their products to foreign markets. Indonesia Eximbank also conducts community development activities by establishing Desa Devisa in areas that have flagship commodities and have the potential to be developed to improve the welfare of the surrounding community.

LPEI menyediakan Jasa Konsultasi yang diberikan kepada pihak terkait dalam rangka memberikan bantuan dan mengatasi hambatan ekspor serta penyediaan Pembiayaan Ekspor Nasional. Berpedoman kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI, LPEI menjalankan fungsinya dengan memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung program ekspor nasional.

Selain itu, penyediaan Jasa Konsultasi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KD PEN). Berdasarkan peraturan tersebut, jasa konsultasi diberikan dalam bentuk konsultasi, pemberdayaan, pengembangan kapasitas, advokasi, dan/atau jasa konsultasi lainnya yang termasuk didalamnya kegiatan dari pendampingan calon eksportir baru.

Dalam memberikan jasa konsultasi tersebut, *value proposition* LPEI adalah sebagai berikut:

- Mempermudah Proses Ekspor (terutama UKM)
- Membuka Peluang pasar tujuan ekspor
- Mendampingi eksportir yang tidak dapat menjangkau perbankan konvensional
- Berkoordinasi dan bersinergi dengan K/L terkait, BUMN, Bank BUMN dalam mendorong ekspor nasional.
- Menjaga *Financial Sustainability* Lembaga dengan *Fiscal Responsibility*.

Melalui penyediaan Jasa Konsultasi tersebut LPEI mengharapkan pelaksanaan mandat dan penguatan persepsi lembaga, pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang berkelanjutan, dan meningkatkan *Developmental impact*.

Fokus Kegiatan Usaha Tahun 2022

Kegiatan Jasa Konsultasi melalui *Coaching Program for New Exporters* (CPNE) merupakan program khusus rintisan eksportir baru yang melatih dan mempersiapkan pelaku UKM untuk menjadi eksportir baru melalui

Indonesia Eximbank provides Advisory to relevant parties to assist in overcoming export obstacles and facilitate National Export Financing. Pursuant to Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, the Institution executes its functions by providing guidance and advisory services to banks, financial institutions, exporters, and manufacturers of export goods, particularly those in the micro, small, and medium-sized enterprise sector, to support the national export initiative.

Furthermore, the advisory services conforms to the regulations set forth in Government Regulation No. 43 of 2019 on the fundamental principles of national export financing policy in Indonesia (KD PEN). As per the regulation, advisory services are rendered in various forms, such as consultation, empowerment, capacity enhancement, advocacy, and other consultancy services. These services include activities aimed at supporting new exporters.

The following are Indonesia Eximbank value proposition for the advisory services:

- Facilitating the export process (particularly for SMEs)
- Opening up export markets opportunities
- Assisting exporters who cannot access conventional banking services
- Coordinating and synergizing with relevant government agencies, state-owned enterprises, and state-owned banks in promoting national exports.
- Maintaining the financial sustainability of the institution with fiscal responsibility.

Indonesia Eximbank aims to achieve the implementation of mandates, strengthening of the institution's perception, sustainable National Export Financing (PEN), and increased developmental impact through its advisory.

Focus of Business Activities in 2022

The Advisory through the Coaching Program for New Exporters (CPNE) is a unique initiative designed to help new exporters in their preparation and training through socialization, training, exhibitions, mentoring, and other

JASA KONSULTANSI
ADVISORY SERVICES

sosialisasi, pelatihan, pameran, bimbingan dan kegiatan lainnya kepada *cluster* (komunitas pelaku usaha) dan *non cluster* (individu UKM). Melalui CPNE ini, LPEI berupaya mencetak eksportir-eksportir baru di seluruh Indonesia dengan memberikan pendampingan secara intensif kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor hingga dapat menjual produknya ke pasar luar negeri.

LPEI juga memfasilitasi peserta CPNE mengikuti pameran berskala internasional sebagai sarana untuk meningkatkan peluang bisnis agar dapat “*go international*”. Jasa Konsultasi juga mengadakan sosialisasi terkait ekspor dengan tema khusus pada kegiatan yang berada di Rumah Ekspor dengan tujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan memotivasi para pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Selain itu, LPEI juga melakukan kegiatan *community development* berupa pendampingan Desa Devisa di daerah yang memiliki komoditas unggulan dan berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Terkait dengan Jasa Konsultasi yang diberikan tersebut fokus LPEI di tahun 2022 adalah pembentukan komunitas ekspor, penciptaan eksportir baru, peningkatan jumlah Desa Devisa, dan penguatan kolaborasi dengan K/L dan SMV.

Implementasi Strategi Tahun 2022

Dalam menjalankan penyediaan Jasa Konsultasi tersebut, tantangan yang dihadapi LPEI adalah standarisasi implementasi pelaksanaan pengembangan pemangku kepentingan UMKM daerah dengan LPEI; memfasilitasi hubungan dengan pemangku kepentingan di daerah; pemanfaatan infrastruktur pemangku kepentingan daerah (ruang pelatihan, narasumber, dan dukungan lainnya); dan pemantauan bersama atas terlaksananya program.

Untuk meningkatkan layanan Jasa Konsultasi dan menghadapi tantangan tersebut strategi yang ditetapkan oleh LPEI adalah sebagai berikut:

- UMKM binaan LPEI baik eksportir baru maupun eksisting eksportir membutuhkan akses dan ekspansi pasar untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor

activities, targeted towards both clusters (business communities) and non-clusters (individual SMEs). Indonesia Eximbank aims to use CPNE to intensively assist export-oriented MSMEs until they are able to sell their products in foreign markets and create new exporters across the country.

CPNE participants are enabled by Indonesia Eximbank to take part in global exhibitions to enhance their prospects of going global. Furthermore, the Advisory arranges themed socialization events regarding exports at the Export House, aimed at providing information, knowledge, and inspiring businesses to participate in exports. Moreover, Indonesia Eximbank provides community development services through coaching *Desa Devisa* in regions that have great commodities and the potential for development, for the purpose of uplifting the welfare of the surrounding community.

Indonesia Eximbank’s Advisory priorities for 2022 involved establishing an export community, creating new exporters, expanding the number of *Desa Devisa*, and reinforcing partnerships with ministries/agencies and the SMV.

Strategy Implementation In 2022

Indonesia Eximbank faces various challenges while providing Advisory, including the need to standardize the implementation of MSMEs stakeholder development in the region with the Institution, establishing and fostering relationships with stakeholders in the region, utilizing the infrastructure available to stakeholders in the region, such as training rooms, speakers, and other forms of support, and monitoring program implementation collaboratively.

To improve Advisory and address these challenges, Indonesia Eximbank carries out the following strategies:

- Mentored MSMEs by Indonesia Eximbank, regardless of new or existing exporters, need to enhance visual and tangible marketing strategies to attract foreign

melalui penguatan cara pemasaran secara visual dan *tangible* sehingga menarik pembeli dari luar negeri.

- Dalam mengelola permintaan pemangku kepentingan LPEI terkait dengan program kolaborasi bersama untuk pemberdayaan UMKM, dibutuhkan integrasi program inhouse CPNE yang disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
- UMKM binaan LPEI baik eksportir baru maupun eksisting eksportir membutuhkan akses pembiayaan untuk meningkatkan ekspornya sehingga dibutuhkan skema pembiayaan dengan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan kemampuan UMKM.
- Untuk mewakili LPEI menjadi narasumber sesuai dengan permintaan pemangku kepentingan, dapat disinergikan melalui *outsourcing* tim narasumber yang berasal Alumni pegawai maupun staf ahli LPEI.

Dalam menjalankan strategi tersebut, LPEI telah menyusun rencana kerja yakni menjalankan program-program Jasa Konsultasi (CPNE, *Marketing Handholding*, *Desa Devisa*, Rumah Ekspor, dan Program Kemitraan) dengan fokus kepada Pembentukan komunitas ekspor, Penciptaan eksportir baru, peningkatan jumlah *Desa Devisa*, dan penguatan kolaborasi dengan K/L dan SMV.

Adapun capaian yang berhasil diraih di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- CPNE telah dilakukan di 7 Kota (Semarang, Jakarta, Aceh, Surabaya, Bandung, Lampung, dan Banten), sebanyak 57 kali pelatihan yang dihadiri oleh 1.035 UKM, dan telah menghasilkan 145 eksportir baru;
- *Community Development* sampai dengan 31 Desember 2022 telah menghasilkan total 151 *Desa Devisa* Baru yang berdampak langsung dan tidak langsung kepada 13.425 petani, pengrajin, dan petambak penerima manfaat. Selain itu, telah dilaksanakan pendampingan kepada 6 *Desa Devisa* Eksisting (Kakao Jembrana, Agrowisata Ijen, Kopi Subang, Tenun Gresik, Garam Kusamba dan Rumput Laut Sidoarjo);

buyers, thus allowing them to expand access to markets and increase the value and volume of exports.

- In managing requests from Indonesia Eximbank stakeholders for joint cooperation programmes to strengthen MSMEs, CPNE's internal programme integration needs to be tailored to stakeholder needs.
- Mentored MSMEs by Indonesia Eximbank, regardless of new or existing exporters, require financing to enhance export capabilities. Hence, it is crucial to establish a financing program with suitable requirements and criteria that are aligned with the abilities of MSMEs.
- To fulfil stakeholder requests for Indonesia Eximbank representation as a resource person is by outsourcing a synergy of team of experts, which include former employees and expert staff from Indonesia Eximbank.

Indonesia Eximbank has created a plan to execute this strategy, which involves advisory programs such as CPNE, *Marketing Handholding*, *Desa Devisa*, Export Houses, and Partnership Program. The main aim is to establish export communities, creating new exporters, increase the number of *Desa Devisa*, and enhance cooperation with ministries/agencies and SMV.

The following was achievements in 2022:

- CPNE has been conducted in 7 cities (Semarang, Jakarta, Aceh, Surabaya, Bandung, Lampung and Banten), 57 training sessions have been conducted with the participation of 1,035 SMEs and 145 new exporters have been created;
- As of 31 December 2022, the Community Development has resulted in a total of 151 new *Desa Devisa* with direct and indirect impacts on 13,425 beneficiary farmers, artisans and fish farmers. In addition, 6 Existing *Desa Devisa* (Jembrana Cocoa, Ijen Agrotourism, Subang Coffee, Gresik Weaving, Kusamba Salt and Sidoarjo Seaweed) have been mentored;

JASA KONSULTANSI
ADVISORY SERVICES

- *Marketing handholding* sampai dengan 31 Desember 2022, telah dilaksanakan 23 *Business Matching*, dengan total 158 transaksi baru yang dihasilkan;
- Rumah Ekspor sampai dengan 31 Desember 2022, telah dilaksanakan 2 kegiatan *Focus Group Discussion* dengan tema Fashion Batik dan Kuliner yang menghadirkan narasumber dan expert pada industri tersebut. Rumah Ekspor telah dilaksanakan di 2 Kota (Solo dan Jakarta) yang dihadiri oleh 302 UKM secara *hybrid (online & offline)*, dan telah dilaksanakan pelatihan bersama di Rumah Ekspor Jakarta, hasil kolaborasi antara LPEI dan PT Sarinah (Persero).

Rencana Strategis 2023

Jasa konsultasi telah menetapkan beberapa rencana strategis untuk meningkatkan peran LPEI dalam mengembangkan ekspor Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- Memanfaatkan *platform* digital dan *channel e-commerce* untuk mempercepat konversi pelaku usaha menjadi eksportir.
- Menambah jumlah desa devisa dan eksportir baru dan/atau menjaga keberlanjutan usaha ekspor.
- Menciptakan inovasi produk baru sebagai potensi *income generator*.
- Program kemitraan diselaraskan dengan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan, terintegrasi dan bersinergi dengan program-program di Kementerian Keuangan, serta mendukung bisnis inti LPEI.
- Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau SMV, serta pihak swasta dalam rangka menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia untuk mendorong Pertumbuhan Ekspor Nasional.
- Mengoptimalkan peran Kedutaan Besar Indonesia di seluruh dunia, dalam rangka membuka akses pasar dan meningkatkan *export competitiveness*.
- Berkolaborasi dengan *Platform* digital ekspor terkemuka untuk memperluas skala pendampingan kepada pelaku usaha.

- As of 31 December 2022, under Marketing handholding, 23 business matching have been conducted with a total of 158 new transactions generated;
- As of 31 December 2022, Export Houses carried out 2 Focus Group Discussions with the theme of Fashion Batik and Culinary, where speakers and experts in the industry were presented. Export Houses were held in 2 cities (Solo and Jakarta) with 302 SMEs attending in a hybrid manner (online & offline), and joint training was held at the Jakarta Export House as a result of the collaboration between Indonesia Eximbank and PT Sarinah (Persero).

2023 Strategic Plans

The Advisory has developed several strategic plans to enhance Indonesia Eximbank's role in boosting Indonesia's exports, including the following:

- Utilizing digital platforms and e-commerce channels to accelerate the conversion of businesses into exporters.
- Increasing the number of new *Desa Devisa* and exporters and/or maintaining the sustainability of export businesses.
- Creating new product innovations as a potential income generator.
- Partnership programs are aligned with the priorities of sustainable development goals, integrated and synergized with programs at the Ministry of Finance, and support Indonesia Eximbank's core business.
- Increasing collaboration and synergy with ministries, local governments, state-owned enterprises (SOEs) and/or SMV, as well as private parties to reach more regions in Indonesia in enforcing national export growth.
- Optimizing the role of Indonesian embassies worldwide to open up market access and enhance export competitiveness.
- Collaborating with leading digital export platforms to expand the scale of assistance provided to businesses.



.07

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Pada tahun 2022, Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) memfokuskan aktivitasnya pada pelaksanaan 7 (tujuh) program berupa pemanfaatan alokasi dana serta monitoring pemberian fasilitas LPEI atas masing-masing program PKE, antara lain: PKE Industri Penerbangan, PKE Pariwisata Mandalika, PKE Usaha Kecil Menengah, PKE *Trade Finance*, PKE Kawasan, PKE Alat Transportasi, dan PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas

In 2022, Export National Interest Account (NIA) focuses its activities on the implementation of 7 (seven) programs to utilizing fund allocations and monitoring the provision of Indonesia Eximbank facilities for each of NIA program, as follows: NIA Aviation Industry, NIA Mandalika Tourism, NIA Small and Medium Enterprises, NIA Trade Finance, NIA Region, NIA Transportation Equipment and NIA Super Priority Tourism Destinations.

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau *National Interest Account* (NIA) adalah penugasan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI sehingga mampu berperan dalam mendukung pelaku usaha ekspor, dengan memberikan pembiayaan ekspor. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaku usaha ekspor dalam melakukan penetrasi barang/jasa dari Indonesia ke pasar non-tradisional dan/atau memiliki *country risk* yang tinggi. Pemerintah menganggap hal ini perlu guna menunjang ekspor nasional serta penugasan khusus terkait ekspor barang/jasa dan pengembangan sektor pariwisata, sektor UKM dan/atau industri tertentu yang memiliki peranan besar bagi perekonomian nasional, dan mendorong terciptanya eksportir baru yang berkelanjutan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 tanggal 14 Desember 2021 mengatur tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, Penugasan Khusus melalui LPEI menyediakan pembiayaan ekspor (*Financing, Insurance, Guarantee*) atas transaksi atau proyek kepada pelaku ekspor yang sulit mendapat pembiayaan dari bank/ lembaga keuangan komersial atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional.

Fokus Penugasan Khusus Tahun 2022

Pada tahun 2022, PKE memfokuskan aktivitasnya pada pelaksanaan 7 (tujuh) program berupa pemanfaatan alokasi dana serta *monitoring* pemberian fasilitas LPEI atas masing-masing program PKE, antara lain:

1. PKE Industri Penerbangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 428/KMK.08/2020 (KMK No.428) tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk mendukung industri penerbangan Indonesia.

2. PKE Pariwisata Mandalika/MDK

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.685/KMK.08/2019 (KMK No.685) tanggal 27 Agustus

The Export Special Assignment or the National Interest Account (NIA) is an assignment given by the Government to Indonesia Eximbank to foster export businesses through export financing. This is done to reinforce export businesses in penetrating goods/services from Indonesia into the non-traditional markets and/or high-risk countries. The Government considers this necessary to reinforce the national exports and special assignments related to the export of goods/services and the development of tourism sector, the SME sector and/or certain industries that have a large role in the national economy, as well as enforcing the creation of new sustainable exporters.

The Minister of Finance Regulation (PMK) No. 183/PMK.08/2021 dated 14 December 2021 regulates the Special Assignment to Indonesia Eximbank. Based on the regulation, NIA through Indonesia Eximbank provides export financing (Financing, Insurance, Guarantee) for transactions or projects to exporters that have difficulties in obtaining financing from the commercial banks/ financial institutions for transactions or projects that are commercially difficult to implement, however deemed necessary by the Government to support the national export policies.

Focus of the National Interest Accounts in 2022

In 2022, NIA focuses its activities on the implementation of 7 (seven) programs to utilizing fund allocations and monitoring the provision of Indonesia Eximbank facilities for each of NIA program, as follows:

1. NIA Aviation Industry

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 428/KMK.08/2020 (KMK No. 428) dated 23 September 2020 on Special Assignment to Indonesia Eximbank to foster the Indonesian aviation industry.

2. NIA Mandalika Tourism/MDK

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.685/KMK.08/2019 (KMK No.

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

2019 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam rangka pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. KMK dimaksud kemudian direvisi melalui KMK No. 387/KMK.08/2022 tanggal 23 September 2022.

3. PKE Usaha Kecil Menengah/UKM

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 372/KMK.08/2020 (KMK No.372) tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam rangka mendukung sektor usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan KMK No. 409/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021.

4. PKE *Trade Finance*/TFC

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.526/KMK.08/2019 (KMK No.526) tanggal 11 November 2011 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Untuk Menyediakan Fasilitas *Trade Finance* Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan KMK No. 410/KMK.08/2021. KMK 410/2022 telah diperpanjang dengan KMK No. 494/KMK.08/2022 tanggal 14 Desember 2022.

5. PKE Kawasan/KWS

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 787/KMK.08/2017 (KMK No.787) tanggal 06 November 2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Mendorong Ekspor Ke Negara Kawasan Afrika sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan KMK No.001/KMK.08/2019 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Mendorong Ekspor Ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

6. PKE Alat Transportasi/ATP

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.406/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang

685) dated 27 August 2019 on Special Assignment to Indonesia Eximbank to developing tourism in the Mandalika Special Economic Zone. The KMK was then amended through KMK No. 387/KMK.08/2022 dated 23 September 2022.

3. NIA Small and Medium Enterprises/SMEs

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 372/KMK.08/2020 (KMK No. 372) dated 11 August 2020 on Special Assignments to Indonesia Eximbank to foster the export-oriented small and medium enterprises sector as has been revoked and replaced with KMK No. 409/KMK.08/2021 dated 21 September 2021.

4. NIA *Trade Finance*/TFC

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 526/KMK.08/2019 (KMK No. 526) dated 11 November 2011 on Special Assignment to Indonesia Eximbank to Provide Trade Finance Facilities in Order to Support the National Economic Recovery as has been revoked and replaced with KMK No. 410/KMK.08/2021. The KMK 410/2022 has been extended with KMK No. 494/KMK.08/2022 dated 14 December 2022.

5. NIA Region/KWS

The Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 787/KMK.08/2017 (KMK No. 787) dated 6 November 2017 on Special Assignment to Indonesia Eximbank to Promote Exports to African Countries as has been revoked and replaced with KMK No. 001/KMK.08/2019 on Special Assignments to Indonesia Eximbank to Promote Exports to Countries in the African, South Asian, and Middle East Regions.

6. NIA Transportation Equipment/ATP

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 406/KMK.08/2021 dated 21

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk menyediakan pembiayaan ekspor Dalam Rangka Mendukung Industri Alat Transportasi.

7. PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas/DPSP
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.272/KMK.08/2022 tanggal 05 Juli 2022 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Pengembangan Infrastruktur Marina dan Penunjang Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Tantangan Tahun 2022

Penugasan khusus menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan kegiatan usahanya di sepanjang tahun 2022, antara lain:

1. Proses bisnis dan tata kelola pelaksanaan program Penugasan Khusus yang terus dievaluasi dan memerlukan penyempurnaan.
2. Dalam memperoleh kontrak penjualan ekspor khususnya di pasar non-tradisional, persaingan dengan kompetitor relatif ketat (misal: *pricing* yang relatif murah, *freight cost* yang cenderung meningkat, *insurance cover* dengan fee yang relatif rendah serta tenor fasilitas yang panjang).
3. Kesiapan *underlying* kontrak yang akan dibiayai. Terkait dengan *underlying* juga sangat ditentukan dalam proses perumusan program PKE yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
4. Terdapat beberapa kontrak yang bersifat *multi years* sehingga penarikan fasilitas pembiayaan tidak dapat dilakukan sekaligus karena disesuaikan dengan kebutuhan *cashflow* atau progres proyek setiap tahunnya.

Implementasi Strategi Tahun 2022

Inisiatif dan strategi yang telah dilakukan oleh LPEI untuk penyempurnaan pelaksanaan program PKE dan percepatan pemanfaatan dana Penugasan Khusus di tahun 2022 adalah Proaktif dalam Bersinergi Menjalankan

September 2021 on Special Assignment to Indonesia Eximbank to provide export financing in order to support the Transportation Equipment Industry.

7. NIA Super Priority Tourism Destinations/DPSP
Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 272/KMK.08/2022 dated 5 July 2022 on Special Assignments to Indonesia Eximbank for Marina Infrastructure Development and Tourism Support in Super Priority Tourism Destinations.

Challenges in 2022

NIA encountered several challenges in carrying out its business activities throughout 2022, among others:

1. The business processes and governance of the NIA programs are continuously evaluated and require improvements.
2. In obtaining export sales contracts, particularly in non-traditional markets, competition is relatively tight (for example: relatively low pricing, increasing freight costs, insurance cover with relatively low fees and long facility tenors).
3. Readiness of underlying contracts for financing. The underlying is very much depending on the formulation process of NIA programs proposed by the relevant Ministries/Institutions.
4. Several contracts are multi-year in nature, hence the withdrawal of financing facilities is done partially as it is adjusted to the needs of cashflow or project progress every year.

Strategy Implementation in 2022

Indonesia Eximbank initiatives and strategies to improve the implementation of NIA programs and at the same time to accelerate the utilization of NIA funds in 2022 were being Proactive in Synergizing to Perform the Mandate, by

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

Mandat, dengan mengoptimalkan fungsi *product specialist*, *business development*, dan *stakeholder relationship*.

optimizing the functions of product specialists, business development, and stakeholder relationships.

Untuk menjalankan strategi tersebut, Penugasan khusus telah menetapkan 2 (dua) strategi utama di tahun 2022 sebagai berikut:

To implement the strategy, NIA has determined 2 (two) main strategies in 2022 as follows:

1. Penugasan khusus meningkatkan pelaksanaan fungsi *Product Specialist & Business Development* dengan cara sebagai berikut:

1. NIA improves the implementation of Product Specialist & Business Development function in the following ways:

- Meningkatkan *customer base* sesuai dengan target pelanggan;
- Melakukan sosialisasi bulanan bersama Kementerian/Lembaga dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/Kota dalam rangka menggali potensi *pipeline*;
- Melakukan disiplin *periodic pipeline-monitoring* dan mengimplementasikan *Pipeline Monitoring Dashboard*;
- Melakukan *joint-marketing* bersama-sama dengan *business unit* dalam memasarkan program PKE;
- Memastikan pelaksanaan program PKE telah sesuai dengan ketentuan PMK dan KMK PKE dan tetap melaksanakan *close monitoring* terhadap debitur PKE;
- Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan program PKE.

- Increasing customer base in accordance with the target customer;
- Conducting monthly socialization with Ministries/ Institutions and Provincial/City Industry and Commerce Offices in order to explore potential pipelines;
- Discipline periodic pipeline-monitoring and implement the Pipeline Monitoring Dashboard;
- Conducting joint-marketing with the business unit in marketing the NIA programs;
- Ensuring that the NIA programs implementation is in accordance with the provisions of PMK and KMK NIA and continue to carry out close monitoring of NIA borrowers;
- Coordinating with external parties related to the NIA programs implementation.

2. Penugasan khusus meningkatkan pelaksanaan fungsi *Stakeholder Relationship* dengan cara:

2. NIA improves the implementation of stakeholder relationship functions by:

- Melakukan pendampingan kepada Kementerian/ Lembaga Pengusul dalam penyusunan usulan program PKE baru;
- Memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan Komite PKE Kementerian/ Lembaga yang menggunakan Dana Operasional PKE (antara lain Sosialisasi, FGD Renstra, Site Visit, dll);

- Providing mentoring to the Ministries/ Institutions in the preparation of new NIA program proposals;
- Providing support for the implementation of the NIA Committee of Ministries/ Institutions activities that utilize NIA Operational Funds (including Socialization, FGD Strategy Plan, Site Visit, etc.);

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR NATIONAL INTEREST ACCOUNT

- Melakukan *monitoring-evaluation* dan pelaporan periodik atas pelaksanaan program PKE.

Implementasi yang efektif atas strategi dan rencana tersebut di atas pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. KMK No. 001/KMK.08/2019 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah (“PKE Kawasan (KWS)”);

KMK tersebut merupakan perluasan lingkup dari KMK sebelumnya No. 787/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika. Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada eksportir yang memiliki penjualan ekspor ke kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp1,6 triliun dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2023. Realisasi *disbursement* selama tahun 2022 adalah sebesar Rp1,52 triliun.

2. KMK No. 387/KMK.08/2022 tentang Perubahan KMK No. 685/KMK.08/2019 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (“PKE Mandalika (MDK)”);

Melalui KMK tersebut pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada eksportir dalam rangka pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp1,2 triliun dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2023. Namun melalui KMK Perubahan dimaksud alokasi dana ditambahkan sebesar Rp400 miliar sehingga total menjadi Rp1,6 triliun dengan jangka waktu penugasan diperpanjang hingga Desember 2024. Realisasi penyaluran selama tahun 2022 adalah sebesar Rp52,65 miliar.

- Periodic monitoring-evaluation and reporting on the NIA programs implementation.

The effective implementation of the aforementioned strategies and plans in 2022 is as follows:

1. KMK No. 001/KMK.08/2019 on Special Assignment to Indonesia Eximbank to Promote Exports to Countries in the African, South Asian, and Middle East Regions (“PKE Kawasan (KWS)”);

The KMK is an extension of the scope of the previous KMK No. 787/KMK.08/2017 on Special Assignments to Indonesia Eximbank to Promote Exports to African Region Countries. The Government mandates Indonesia Eximbank for the financing to exporters who have export sales to the African, South Asian and Middle Eastern regions. The funds allocated for this activity amounted to Rp1.6 trillion with an assignment period until December 2023. The realization of disbursements during 2022 was Rp1.52 trillion.

2. KMK No. 387/KMK.08/2022 on Amendments to KMK No. 685/KMK.08/2019 regarding Special Assignment to Indonesia Eximbank for the Tourism Development of Special Economic Zones (SEZ) (“PKE Mandalika (MDK)”);

Through the KMK, the Government gave a mandate to Indonesia Eximbank for the financing to exporters in developing tourism in the Mandalika Special Economic Zone. The funds originally allocated for this activity was Rp1.2 trillion with an assignment period of up to December 2023. However, through the KMK Amendment, the allocation of funds was added by Rp400 billion, bringing the total to Rp1.6 trillion with the assignment period extended to December 2024. The realization of disbursements during 2022 was Rp52.65 billion.

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR
NATIONAL INTEREST ACCOUNT**3. KMK No. 409/KMK.08/2021 tentang Perubahan KMK No. 372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI dalam rangka mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor ("PKE UKM");**

Penugasan ini berfokus pada peningkatan kapasitas ekspor dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Melalui KMK ini dana PMN yang dialokasikan menjadi sebesar Rp1 triliun untuk seluruh sektor ekonomi/komoditas dengan maksimal imbalan pembiayaan sebesar 6% p.a. Realisasi *disbursement* selama tahun 2022 adalah sebesar Rp360,84 miliar.

4. KMK No. 428/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia ("PKE GIA");

Berdasarkan KMK ini, dana PMN yang dialokasikan sebesar Rp1 triliun untuk penguatan sektor ekonomi transportasi dan pergudangan, khususnya jasa angkutan udara dengan kriteria pelaku ekspor sesuai dengan persyaratan dalam KMK. Pada tanggal 06 Oktober 2020 telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara LPEI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan dukungan pembiayaan modal kerja dengan plafon pembiayaan sebesar Rp1 triliun.

5. KMK No. 410/KMK.08/2021 tentang Perubahan KMK No. 526/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk menyediakan fasilitas Trade Finance dalam rangka mendukung pemulihan ekspor nasional ("PKE TFC");

Penugasan khusus ini difokuskan untuk mendukung sektor industri atau komoditas unggulan ekspor agar dapat tetap tumbuh di tengah tantangan global akibat pandemi Covid-19. Dukungan Diberikan kepada 13 (tiga belas) komoditas/produk unggulan tersebut antara lain produk karet, produk kopi (termasuk kopi *specialty*), furnitur, produk alas kaki, makanan olahan (termasuk produk ikan, udang, *seafood*), tekstil dan produk tekstil, produk perhiasan/permata, produk teh dan rempah-rempah, produk kayu, produk kerajinan,

3. KMK No. 409/KMK.08/2021 on Amendments to KMK No. 372/KMK.08/2020 regarding Special Assignments to Indonesia Eximbank to foster the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector ("PKE UKM");

This assignment focuses on enhancing the export capacity of Small and Medium Enterprises (SMEs). Through this KMK, the allocated PMN funds reached Rp1 trillion for all the economic/commodity sectors with a maximum financing return of 6% p.a. The realization of disbursements during 2022 was Rp360.84 billion.

4. KMK No. 428/KMK.08/2020 on Special Assignment to Indonesia Eximbank to Support the Indonesian Aviation Industry ("PKE GIA");

Based on this KMK, PMN funds allocated was Rp1 trillion to strengthen the transportation and warehousing economic sector, particularly air transportation services with the exporters criteria in accordance with KMK requirements. On 6 October 2020, a Credit Agreement was signed between Indonesia Eximbank and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk related to working capital financing support with a financing ceiling of Rp1 trillion.

5. KMK No. 410/KMK.08/2021 on Amendments to KMK No. 526/KMK.08/2020 regarding Special Assignment to Indonesia Eximbank to provide Trade Finance facilities to support the national export recovery ("PKE TFC");

This special assignment is focused on supporting the continuous growth of industrial sector or export leading commodities amid the global challenges due to the Covid-19 pandemic. The support is provided for 13 (thirteen) flagship commodities/ products including rubber, coffee (including specialty coffee), furniture, footwear, processed foods (including fish, shrimp, seafood), textiles and textile products, jewelries/ gems, tea and spices, wood products, handicrafts, electronic, chemical products and automotives

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

produk elektronika, produk kimia dan produk otomotif (termasuk suku cadang kendaraan bermotor). Alokasi dana PMN untuk PKE *Trade Finance* sebesar Rp1 triliun dengan jangka waktu penugasan hingga 31 Desember 2022. Realisasi *disbursement* selama tahun 2022 adalah sebesar Rp2,02 triliun. Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu penugasan PKE *Trade Finance* pada 31 Desember 2022, telah diterbitkan KMK 494/KMK.08/2022 pada tanggal 14 Desember 2022 sebagai bentuk perpanjangan KMK PKE *Trade Finance* dimana jangka waktu penugasan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2024.

6. KMK No. 406/KMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Dalam Rangka Mendukung Alat Transportasi (“PKE ATP”);

Penugasan ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dengan produk/komoditas strategis antara lain perkapalan, perkeretaapian, kedirgantaraan, alat transportasi khusus, komponen alat transportasi dan/atau jasa pendukung alat transportasi. Alokasi dana PMN untuk PKE Alat Transportasi ini sebesar Rp1,5 triliun dengan jangka waktu penugasan 5 (lima) tahun hingga 31 Desember 2026. Telah diterbitkan Penjaminan atas 1 pelaku usaha (terjamin) sebesar USD4,22 juta.

7. KMK No. 272/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI dalam rangka Pengembangan Infrastruktur Marina & Penunjang Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas (“PKE DPSP”);

Penugasan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada sektor pariwisata yang menjadi fokus Pemerintah. Di mana pelaku usaha yang turut melakukan pengembangan infrastruktur marina dan penunjang pariwisata pada destinasi pariwisata super prioritas (salah satunya adalah Labuan Bajo), bisa mendapatkan dukungan fasilitas dari LPEI. Alokasi dana PMN untuk PKE ini sebesar Rp500 miliar dengan jangka waktu penugasan hingga Desember

(including motor vehicle parts). PMN’s fund allocation for PKE Trade Finance was Rp1 trillion with an assignment period of up to 31 December 2022. The realization of disbursements during 2022 was Rp 2.02 trillion. With regards to the expiration of the PKE Trade Finance assignment period on 31 December 2022, the KMK 494/KMK.08/2022 has been issued on 14 December 2022 for the extension of KMK PKE Trade Finance in which the assignment period is extended until 31 December 2024.

6. KMK No. 406/KMK.08/2021 on Special Assignment to Indonesia Eximbank to Provide Export Financing to Support Transportation Equipment (“PKE ATP”);

This assignment is intended to support the development of the manufacturing industry with strategic products/commodities including shipping, railways, aerospace, special transportation equipment, transportation equipment components and/or transportation equipment support services. The allocation of PMN funds was Rp1.5 trillion with an assignment period of 5 (five) years until 31 December 2026. Guarantee has been issued for 1 business (guaranteed) amounting to USD4.22 million.

7. KMK No. 272/KMK.08/2022 on Special Assignment to Indonesia Eximbank for Marine Infrastructure Development & Tourism Support in Super Priority Tourism Destinations (“PKE DPSP”);

This assignment is intended to provide support to the tourism sector that the Government focuses on. The businesses participating in the development of marina infrastructure and in supporting the super priority tourism destinations (one of which is Labuan Bajo), can attain facility from Indonesia Eximbank. The allocation of PMN funds was Rp500 billion with an assignment period until December 2024. A potential pipeline is currently undergoing with intensive coordination with

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

2024. Terdapat potensi *pipeline* yang mana saat ini LPEI sedang melakukan koordinasi intensif dengan pengembang Kawasan marina DPSP Labuan Bajo. Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah kemungkinan terlaksananya skema *blended financing*.

Rencana Strategis Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Ketua Komite Penugasan Khusus Ekspor No. 83/PR/2022 tentang Rencana Strategis Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2023-2024, maka Rencana Strategis Penugasan Khusus adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Penugasan Khusus Ekspor

Penugasan Khusus Ekspor (PKE) lebih jauh diharapkan dapat lebih berperan terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan atau penghematan devisa yang berasal dari Program PKE. Dalam upaya mencapai hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dicapai sebagai sasaran dalam periode tahun 2023-2024, antara lain:

- Peningkatan dukungan fasilitas Pembiayaan PKE terhadap 3P (pelaku, produk dan pasar);
- Diversifikasi atas penyaluran fasilitas Pembiayaan Ekspor tidak hanya melalui dukungan pembiayaan, namun juga dalam bentuk penjaminan dan/atau asuransi;
- Optimalisasi utilisasi/pemanfaatan PKE yang sudah ditetapkan; dan
- Peningkatan *monitoring* kinerja PKE berbasis sistem informasi teknologi (IT).

2. Strategi Penugasan Khusus Ekspor

Untuk mencapai sasaran tersebut, beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Komite Penugasan Khusus Ekspor, antara lain:

- Untuk sasaran “Peningkatan dukungan fasilitas Pembiayaan PKE terhadap 3P (pelaku, produk dan pasar)”, strateginya melalui:

the developer of the DPSP Labuan Bajo marina area. One of the initiatives being developed is the possibility of implementing a blended financing scheme.

Strategic Plans for 2023

Based on the Decree of the Director General of Financing and Risk Management as the Chairman of NIA Export Committee No. 83/PR/2022 on the NIA Export Strategic Plan for 2023-2024, the NIA Strategic Plan is as follows:

1. NIA Export Objectives

The NIA Export is expected to take on a more key role in the national economy through the creation or saving of foreign exchange derived from the NIA Programs. As such, the following are targets achievements in the 2023-2024 period:

- Enhancing support for NIA Financing facilities for 3P (players, products and markets);
- Diversification of export financing disbursement not only through financing support, but also through guarantees and/or insurance;
- Optimization of predetermined NIA utilization; and
- Improving INA performance monitoring based on information technology (IT) systems.

2. NIA Export Strategies

To achieve the objectives, several strategies will be carried out by the NIA Export Committee, among others:

- The target to “Enhance support of NIA Financing to 3P (players, products and markets)”, is carried out by:

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

- a. Melakukan identifikasi potensi calon nasabah PKE kategori UKM dan UMBE;
- b. Menjalin kerjasama dengan K/L dan Pemda terkait sosialisasi program PKE;
- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga jasa keuangan untuk menyasar calon debitur yang wilayahnya sulit dijangkau oleh LPEI;
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga jasa keuangan atau perusahaan penjaminan/asuransi kredit dalam rangka melakukan mitigasi risiko kredit;
- e. Melakukan identifikasi lembaga jasa keuangan (perbankan, penjaminan dan atau asuransi) di wilayah potensial ekspor kategori UKM dan UMBE di Indonesia;
- f. Melakukan pemetaan atas produk non-utama yang memiliki nilai tambah (*added value*) dan penguatan nilai TKDN pasar;
- g. Memberikan dukungan kepada kegiatan yang menghasilkan barang/jasa yang sebelumnya diimpor dalam rangka menghemat devisa (substitusi impor atau Imbal dagang);
- h. Melakukan identifikasi produk jasa selain sektor pariwisata yang memiliki potensi ekspor tinggi;
- i. Mendukung penetrasi pasar non-utama yang telah memiliki kerja sama dagang dengan Pemerintah Indonesia;
- j. Memprioritaskan dukungan ekspor dengan tujuan ke pasar non-utama; dan
- k. Memprioritaskan dukungan fasilitasi pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi PKE pada transaksi ekspor melalui skema imbal dagang.

Untuk sasaran “Melakukan diversifikasi atas penyaluran fasilitas Pembiayaan Ekspor tidak hanya pemberian dukungan pembiayaan, namun juga dalam bentuk penjaminan dan/atau asuransi”, strateginya melalui melakukan sinergi

- a. Identifying potential NIA customers in the SME and UMBE categories;
- b. Collaborating with Ministries/Institutions and Municipalities regarding the socialization of the NIA programs;
- c. Collaborating with financial service institutions to target prospective borrowers whose areas are difficult to reach by Indonesia Eximbank;
- d. Establishing cooperation with financial service institutions or credit guarantee/insurance companies to mitigate credit risk;
- e. Identifying financial service institutions (banking, guarantee and or insurance) in potential export areas of the SME and UMBE categories in Indonesia;
- f. Mapping non-main products that have added value and strengthening the TKDN value of the market;
- g. Providing support to goods/services that were previously imported in order to save foreign exchange (import substitution or trade returns);
- h. Identifying service products apart from the tourism sector that have high export potential;
- i. Supporting the penetration of non-major markets that already have trade cooperation with the Government of Indonesia;
- j. Prioritizing export support to non-key markets; and
- k. Prioritizing support for NIA financing, guarantees, and/or insurance on export transactions through the return scheme.

The target of “ Diversification of export financing disbursement not only through financing support, but also through guarantees and/or insurance “, is carried out through synergy and collaboration with the banks/ financial service institutions in

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR
NATIONAL INTEREST ACCOUNT

dan kolaborasi dengan perbankan/lembaga jasa keuangan dalam memberikan fasilitas pembiayaan ekspor melalui skema *blended financing*.

- Untuk sasaran “Mengoptimalkan utilisasi/ pemanfaatan PKE yang sudah ditetapkan”, strateginya melalui:
 - a. Melakukan validasi terkait potensi pipeline atas usulan program PKE yang disampaikan Kementerian/ Lembaga;
 - b. Melakukan pergeseran alokasi dana antar program PKE;
 - c. Sinergi dan kerjasama pelaksanaan sosialisasi PKE yang sudah ditetapkan dengan K/L dan Pemerintah Daerah yang memiliki potensi ekspor besar; dan
 - d. Melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan PKE.
- Untuk sasaran “Meningkatnya *monitoring* kinerja PKE berbasis sistem informasi teknologi (IT)”, strateginya melalui:
 - a. Menyiapkan *User Requirement* kebutuhan sistem informasi PKE;
 - b. Melaksanakan *User Acceptance Test* (UAT) aplikasi/sistem informasi dalam monitor kinerja PKE; dan
 - c. Mengevaluasi kinerja aplikasi/sistem *monitoring* kinerja PKE.

providing export financing through blended financing schemes.

- The target of “Optimization of predetermined NIA utilization”, is carried out through:
 - a. Validation of NIA programs potential pipelines proposal submitted by the Ministries/ Institutions;
 - b. Shifting fund allocations between NIA programs;
 - c. Synergy and cooperation in NIA socialization that has been determined with the Ministries/ Institutions and Regional Governments that have large export potential; and
 - d. Monitoring and evaluation activities for the NIA implementation.
- The target of “Improving INA performance monitoring based on information technology (IT) systems”, is carried out through:
 - a. Preparing User Requirements for NIA information system needs;
 - b. Carrying out a User Acceptance Test (UAT) application/information system in the NIA performance monitor; and
 - c. Evaluating the performance of NIA applications/ performance monitoring systems.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Tinjauan keuangan yang membahas tentang analisa dan pembahasan kinerja keuangan disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan bertujuan khusus dimana untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sedangkan untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi, dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga setelah Restrukturisasi dalam Perhitungan CKPN.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota jaringan RSM Global) telah mengaudit laporan keuangan tersebut dan ditandatangani oleh auditor Bimo Iman Santoso dengan Izin Akuntan Publik No. AP.1298 tertanggal 24 Maret 2023.

Menurut opini KAP tersebut, laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Entitas Anaknya tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan bertujuan khusus dimana untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sedangkan untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang

The financial review, which discusses the analysis and discussion of financial performance, is presented based on the consolidated financial statements of Indonesia Eximbank and its Subsidiaries as of 31 December 2022, which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, prepared and presented in special purpose financial reporting framework in which the other elements of the consolidated financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards while the Allowance for Impairment Losses (CKPN) for restructured National Interest Account financing is calculated based on the Letter of the Minister of Finance of the Republic Indonesia, No.S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN.

Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member firm of RSM global network) audited the financial statements and signed by auditor Bimo Iman Santoso with Public Accountant License No. AP.1298 dated March 24, 2023.

In KAP's opinion, the consolidated financial statements of Indonesia Eximbank and its Subsidiaries present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its subsidiaries as at 31 December 2022, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, prepared and presented in special purpose financial reporting framework in which the other elements of the consolidated financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards while the Allowance for Impairment Losses (CKPN) for restructured National Interest Account financing is calculated based on the Letter of the Minister of Finance of the Republic Indonesia, No.S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

direstrukturasikan, dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga setelah Restrukturisasi dalam Perhitungan CKPN.

Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN.

Laporan Posisi Keuangan | Statement of Financial Position

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Kas	65	38	-27	-41,54%	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.318	426	-1.892	-81,62%	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank - Neto	674.106	180.646	-493.460	-73,20%	Current Account with Banks - Net
Penempatan pada Bank - Neto	16.638.946	12.560.255	-4.078.691	-24,51%	Placements with Banks - Net
Efek-Efek	560.050	1.970.120	1.410.070	251,78%	Securities
Tagihan Derivatif	6	-	-6	-100,00%	Derivative Receivable
Pembiayaan dan Piutang	83.963.162	83.636.003	-327.159	-0,39%	Financing and Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Pembiayaan dan Piutang	-17.948.183	-17.882.949	65.234	-0,36%	Allowance for Impairment Losses - Financing and Receivables
Piutang Lainnya	298.034	325.532	27.498	9,23%	Other receivables
CKPN - Piutang Lainnya	-40.159	-43.865	-3.706	9,23%	Allowance for Impairment Losses - Other Receivables
Pajak Dibayar Dimuka	76.671	865	-75.806	-98,87%	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	15.782	15.129	-653	-4,14%	Prepaid Expenses
Piutang Asuransi dan Penjaminan - Neto	285.656	288.989	3.333	1,17%	Insurance and Guarantees Receivables - Net
Aset Reasuransi	2.615	3.544	929	35,53%	Reinsurance Assets
Tagihan Akseptasi - Neto	458.630	150.917	-307.713	-67,09%	Acceptances Receivables- Net
Aset Tetap - Neto	1.103.425	997.835	-105.590	-9,57%	Fixed Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan – Neto	2.767.613	1.552.978	-1.214.635	-43,89%	Deferred Tax Assets - Net
Aset Lain-Lain	182.184	59.289	-122.895	-67,46%	Other Assets
Jumlah Aset	89.040.921	83.815.752	-5.225.169	-5,87%	Total Assets

ASET

LPEI membukukan penurunan total aset sebesar 5,87% dari Rp89,04 triliun di tahun 2021 menjadi Rp83,82 triliun di tahun 2022. Penurunan total aset ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penempatan pada bank (neto) sebesar 24,51% menjadi Rp12,56 triliun di tahun 2022 dibandingkan Rp16,64 triliun di tahun sebelumnya. Berkurangnya penempatan pada bank ini untuk aktivitas operasi. Penempatan pada bank adalah penanaman dana pada bank berupa penempatan pada pasar uang (*interbank call money*) dan deposito berjangka.

ASSETS

Indonesia Eximbank recorded a 5.87% decrease in total assets from Rp89.04 trillion in 2021 to Rp83.82 trillion in 2022. This decrease in total assets was mainly due to a decrease in placements with banks (net) by 24.51% to Rp12.56 trillion in 2022 compared to Rp16.64 trillion in the previous year. This reduced placement with banks will be used for operating activities. Placements with banks represent funds in banks in the form of interbank call money and time deposits.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Penempatan pada bank tersebut terbagi menjadi dua sesuai dengan kegiatan usaha LPEI yaitu penugasan umum dan penugasan khusus. Kedua jenis penempatan pada bank sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan masing-masing sebesar Rp9,0 juta dan Rp500,00 juta di tahun 2022 mencapai Rp2,18 triliun dan Rp10,38 triliun. Kedua jumlah tersebut masing-masing mengalami penurunan sebesar 54,56% dan 12,35% dari sebelumnya sebesar Rp4,80 triliun dan Rp11,84 triliun di tahun 2021.

The placements with the bank are divided into two types according to the business activities of Indonesia Eximbank, namely the general placements and the National Interest Account. The two types of placements with banks before deducting allowance for impairment losses amount to Rp9.0 million and Rp500.00 million respectively in 2022, standing at Rp2.18 trillion and Rp10.38 trillion. These two amounts decreased 54.56% and 12.35% respectively from Rp4.80 trillion and Rp11.84 trillion in 2021.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Penempatan pada Bank					Placements with Banks
Penugasan Umum	4.799.155	2.180.664	-2.618.491	-54,56%	General Assignment
Penugasan Khusus	11.842.000	10.380.100	-1.461.900	-12,35%	National Interest Account
Total (gross)	16.641.155	12.560.764	-4.080.391	-24,52%	Total (gross)

Sementara itu, berdasarkan jenis dan mata uang, penempatan pada bank berupa deposito berjangka dalam mata uang Dollar AS mengalami penurunan terbesar 69,43% menjadi Rp1,06 triliun di tahun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,46 triliun. Deposito berjangka dalam mata uang Rupiah juga berkurang 17,76% dari Rp12,91 triliun di tahun 2021 menjadi Rp10,61 triliun di tahun 2022. Di sisi lain, penempatan pada bank berupa Call Money dalam Dollar AS meningkat 227,68% menjadi Rp887,35 miliar di tahun 2022 dari hanya Rp270,80 miliar di tahun sebelumnya.

Meanwhile, based on type and currency, bank placements in the form of US Dollar time deposits experienced the largest decrease of 69.43% to Rp1.06 trillion from Rp3.46 trillion last year. Rupiah time deposits also dropped by 17.76% from Rp12.91 trillion in 2021 to Rp10.61 trillion in 2022. On the other hand, deposits with banks in the form of call money in US dollars soared by 227.68% to Rp887.35 billion in 2022 from only Rp270.80 billion in the previous year.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Deposito berjangka - Rupiah	12.907.000	10.614.827	- 2.292.173	-17,76%	Deposito berjangka - Rupiah
Deposito berjangka - Dollar AS	3.463.358	1.058.590	- 2.404.768	-69,43%	Deposito berjangka - Dollar AS
Call Money - Dollar AS	270.797	887.347	616.550	227,68%	Call Money - Dollar AS
Total	16.641.155	12.560.764	- 4.080.391	-24,52%	Total

LPEI melakukan penilaian terhadap penempatan pada bank secara kolektif dengan menggunakan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

Indonesia Eximbank evaluates bank placements collectively using qualitative and quantitative information and analysis based on historical experience and credit assessment including future information.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Tidak terdapat penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Akun lain yang mengalami penurunan adalah aset pajak tangguhan – Neto yang berkurang 43.89% dari Rp2,77 triliun di tahun 2021 menjadi Rp1,55 triliun di tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan karena adanya pembebanan rugi fiskal di tahun buku 2022 sebesar Rp1,04 triliun.

Pembiayaan dan Piutang

Secara kumulatif, pembiayaan dan piutang LPEI sebelum cadangan kerugian penurunan (*gross*) sedikit mengalami penurunan sebesar 0,39% menjadi Rp83,64 triliun di tahun 2022 dibandingkan Rp83,96 triliun di tahun sebelumnya. Penurunan ini seiring dengan pembiayaan penugasan umum yang diberikan mengalami penurunan sebesar 1,08% menjadi Rp80,14 triliun. LPEI membukukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan dan piutang mencapai Rp17,88 triliun di tahun 2022 dan Rp17,95 triliun di tahun sebelumnya.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

There are no placements with banks pledged as collateral as of December 31, 2022 and 2021.

Another account that experienced a decrease was deferred tax assets - net, which plunged by 43.89% from Rp2.77 trillion in 2021 to Rp1.55 trillion in the 2022. This was mainly due to imposing a fiscal loss amounting to Rp1.04 trillion in fiscal 2022.

Financing and Receivables

Cumulatively, Indonesia Eximbank's financing and receivables before allowance for impairment losses (*gross*) decreased slightly by 0.39% to Rp83.64 trillion in 2022 compared to Rp83.96 trillion in the previous year. This decrease was in line with general assignment financing and receivables which dropped by 1.08 percent to Rp80.14 trillion. Indonesia Eximbank recorded a provision for impairment losses on financing and receivables to reach Rp17.88 trillion in 2022 and Rp17.95 trillion in the previous year.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Penugasan Umum					General Assignment
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	68.583.154	68.673.657	90.503	0,13%	Financing and Receivables
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	12.431.504	11.469.720	- 961.784	-7,74%	Financing and Shariah Receivables
Sub -Total	81.014.658	80.143.377	- 871.281	-1,08%	Sub-Total
Penugasan Khusus					National Interest Account
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2.948.504	3.489.399	540.895	18,34%	Financing and Receivables
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	-	3.227	3.227		Financing and Shariah Receivables
Sub -Total	2.948.504	3.492.626	544.122	18,45%	Sub-Total
Total	83.963.162	83.636.003	- 327.159	- 0,39%	Total

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Dilihat dari sisi kolektabilitasnya, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) bruto mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 26,61% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 21,03%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pembiayaan dan piutang yang masuk dalam kategori bermasalah sebesar 26,03% menjadi Rp22,26 triliun di tahun 2022 dari Rp17,66 triliun di tahun 2021.

In terms of collectability, the gross non-performing financing (NPF) ratio hiked to 26.61% in 2022 from 21.03% in the previous year. This increase was due to a hike in the financing and receivables classified as non-performing by 26.03% to Rp22.26 trillion in 2022 from Rp17.66 trillion in 2021.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Lancar	41.776.862	41.670.009	-106.853	-0,26%	Current
Dalam perhatian khusus	24.525.011	19.706.942	-4.818.069	-19,65%	Special mention
Kurang lancar	1.836.833	4.949.842	3.113.009	169,48%	Substandard
Diragukan	653.922	1.946.657	1.292.735	197,69%	Doubtful
Macet	15.170.534	15.362.553	192.019	1,27%	Loss
Total	83.963.162	83.636.003	-327.159	-0,39%	Total
Non Performing Finance (NPF)	17.661.289	22.259.052	4.597.763	26,03%	Non Performing Finance (NPF)
NPF (%) - bruto	21,03%	26,61%			NPF (%) - gross

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) neto atau dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya NPF gross. Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah neto mencapai Rp8,69 triliun atau naik 45,29% dari tahun 2021 sebesar Rp5,98 triliun. Hal ini berdampak kepada peningkatan rasio NPF neto dari 10,39% di tahun 2022 menjadi 7,12% di tahun sebelumnya.

Non-performing financing (NPF) - net or deducted by provision for impairment losses, also hiked in line with an increase in the gross NPF. The total non-performing financing and receivables – net stood at Rp8.69 trillion, a 45.29% increase from Rp5.98 trillion in 2021. This has an impact on the hike of NPF ratio - net to 10.39% in 2022 from 7.12% in the previous year.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Lancar	40.878.357	41.145.447	267.090	0,65%	Current
Dalam perhatian khusus	19.157.279	15.919.979	- 3.237.300	-16,90%	Special mention
Kurang lancar	1.473.746	3.320.468	1.846.722	125,31%	Substandard
Diragukan	456.942	1.161.370	704.428	154,16%	Doubtful
Macet	4.048.655	4.205.790	157.135	3,88%	Loss
Total	66.014.979	65.753.054	- 261.925	-0,40%	Total
NPF Neto	5.979.343	8.687.628	2.708.285	45,29%	NPF Neto
Total Pembiayaan dan piutang yang diberikan	83.963.162	83.636.003	- 327.159	-0,39%	Total Financing and Receivables
NPF (%) - neto	7,12%	10,39%			NPF (%) - net

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

LPEI menyalurkan pembiayaan dan piutang ke berbagai sektor usaha dengan porsi terbesar kepada sektor perindustrian (*manufacture*) dengan selama dua tahun terakhir masing-masing sebesar 46,92% dan 46,47% di tahun 2022 dan 2021. Sektor lain yang memiliki kontribusi *double digit* adalah pertanian, perburuan dan sarana pertanian dengan kontribusi 16,65% serta sektor pertambangan 14,54% di tahun 2022. Dari ketiga sektor tersebut, sektor manufaktur dan pertambangan masing-masing membukukan pertumbuhan 0,58% dan 85,90% menjadi Rp39,24 triliun dan Rp12,16 triliun.

Indonesia Eximbank distributes financing and receivables to various economic sectors. The largest share goes to the industrial sector (manufacturing) with 46.92% and 46.47% in 2022 and 2021, respectively. Other sectors that have a double-digit contribution are agriculture, hunting and agricultural services with a contribution of 16.65% and the mining sector 14.54% in 2022. Among the three sectors, the manufacturing sector and the mining sector managed to grow by 0.58% and 85.90% respectively to Rp39.24 trillion and Rp12.16 trillion.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021		2022		Perubahan Change		Description
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	
Perindustrian	39.018.849	46,47%	39.243.536	46,92%	224.687	0,58%	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	15.781.858	18,80%	13.927.315	16,65%	-1.854.543	-11,75%	Agriculture, hunting and agriculture services
Konstruksi	4.007.886	4,77%	3.318.116	3,97%	-689.770	-17,21%	Construction
Listrik, gas dan air	4.249.923	5,06%	2.255.513	2,70%	-1.994.410	-46,93%	Electricity, gas and water
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	5.391.819	6,42%	5.279.768	6,31%	-112.051	-2,08%	Transportation, warehousing and communication hotels
Perdagangan, restoran dan hotel	3.561.710	4,24%	3.259.276	3,90%	-302.434	-8,49%	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	4.470.373	5,32%	3.532.352	4,22%	-938.021	-20,98%	Business services
Pertambangan	6.539.449	7,79%	12.156.937	14,54%	5.617.488	85,90%	Mining
Jasa-jasa sosial/ masyarakat	814.898	0,97%	397.481	0,48%	-417.417	-51,22%	Social. services/society
Lain-lain	126.397	0,15%	265.709	0,32%	139.312	110,22%	Others
Total pembiayaan dan piutang	83.963.162	100,00%	83.636.003	100,00%	-327.159	-0,39%	Total

Dari penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor tersebut, total pembiayaan dan piutang bermasalah mencapai Rp22,26 triliun di tahun 2022, atau naik 26,03% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17,66 triliun di tahun 2021. Total pembiayaan dan piutang bermasalah tersebut setara dengan 26,61% dan 21,03% dari total pembiayaan dan piutang (*gross*) yang disalurkan oleh LPEI ke semua sektor usaha sebesar Rp83,64 triliun di tahun 2022 dan Rp83,96 triliun di tahun 2021. Rasio NPF bruto sebesar 26,61% di tahun 2022 dan 21,03% di tahun 2021. Dari semua sektor usaha yang menerima pembiayaan dan piutang dari LPEI serta tidak membukukan pembiayaan dan piutang bermasalah adalah sektor listrik, gas, dan air.

From the financing distribution based on this sector, the total non-performing financing and receivables stood at Rp22.26 trillion in 2022, which rose 26.03% compared to the previous year of Rp17.66 trillion in 2021. The total non-performing financing and receivables is equivalent to 26.61% and 21.03% of the total financing and receivables (*gross*) disbursed by Indonesia Eximbank to all business sectors of Rp83.64 trillion in 2022 and Rp83.96 trillion in 2021, respectively. The gross NPF ratio was 26.61% in 2022 and 21.03% in 2021. Among all business sectors that receive financing and receivables from Indonesia Eximbank and do not record non-performing financing and receivables is the electricity, gas and water sector.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Gross		Perubahan Change		Description
	2021	2022	Nominal	%	
Perindustrian	9.465.693	12.258.651	2.792.958	29,51%	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	2.492.339	4.355.512	1.863.173	74,76%	Agriculture, hunting and agriculture services
Konstruksi	391.151	410.925	19.774	5,06%	Construction
Listrik, gas dan air	-	-	-	-	Electricity, gas and water
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	469.793	602.901	133.108	28,33%	Transportation, warehousing and communication hotels
Perdagangan, restoran dan hotel	2.242.479	1.963.878	-278.601	-12,42%	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	1.072.265	1.123.187	50.922	4,75%	Business services
Pertambangan	1.510.643	1.526.414	15.771	1,04%	Mining
Jasa-jasa sosial/masyarakat	16.926	17.584	658	3,89%	Social. services/society
Total pinjaman dan piutang	83.963.162	83.636.003	-327.159	-0,39%	Total Financing and Receivables
NPF	17.661.289	22.259.052	4.597.763	26,03%	NPF
NPF (%)	21,03%	26,61%			NPF (%)

LIABILITAS

Sejalan dengan penurunan aset yang terjadi di tahun 2022, liabilitas LPEI juga berkurang sebesar 3,35% di tahun 2022 menjadi Rp56,95 triliun. Pada tahun sebelumnya liabilitas LPEI mencapai Rp58,92 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya efek-efek yang diterbitkan – neto atau setelah dikurangi biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi sebesar 8,74% menjadi Rp25,29 triliun di tahun 2022 dari Rp27,71 triliun di tahun 2021.

LIABILITIES

In line with a decrease in assets in 2022, Indonesia Eximbank's liabilities also decreased by 3.35% to Rp56.95 trillion in 2022. In the previous year, Indonesia Eximbank's liabilities stood at Rp58.92 trillion. This decrease was mainly due to a reduction of securities issued - net or after deduction of unamortized bond issuance costs by 8.74% to Rp25.29 trillion in 2022 from Rp27.71 trillion in 2021.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Liabilitas Segera	32.570	46.046	13.476	41,38%	Current Liabilities
Liabilitas Akseptasi	460.540	151.161	-309.379	-67,18%	Acceptances Payable
Utang Pajak	12.950	11.267	-1.683	-13,00%	Taxes Payable
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan - Neto	27.712.389	25.290.672	-2.421.717	-8,74%	Debt Securities Issued - Net
Liabilitas Derivatif	-	56	56	-	Derivatives Payable
Pinjaman yang Diterima	28.799.571	29.297.065	497.494	1,73%	Fund Borrowings
Utang Asuransi	4.055	6.306	2.251	55,51%	Insurance Payable
Utang Penjaminan	62.363	61.715	-648	-1,04%	Guarantee Payable
Liabilitas Asuransi	6.390	7.961	1.571	24,59%	Insurance Liabilities
Estimasi Klaim Penjaminan	392.559	478.657	86.098	21,93%	Estimated Guarantee Claim
Liabilitas Imbalan Kerja	157.675	144.514	-13.161	-8,35%	Liability for Employee Benefits
Liabilitas Sewa	10.980	5.553	-5.427	-49,43%	Lease Liabilities
Liabilitas Lain-Lain	1.268.501	1.446.534	178.033	14,03%	Other Liabilities
Total Liabilitas	58.920.543	56.947.507	-1.973.036	-3,35%	Total Liabilities

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Terdapat 7 (tujuh) seri obligasi korporasi LPEI yang jatuh tempo di sepanjang tahun 2022 senilai Rp2,84 triliun dan 1 (satu) seri sukuk korporasi senilai Rp145,00 miliar. Pembayaran semua efek bersifat utang ini berasal dari dana operasional.

There are 7 (seven) series of Rp2.84 trillion LPEI corporate bonds due 2022 and 1 (one) series of Rp145.00 billion corporate sukuk. Payment for all of these bonds comes from the fund of operating.

Daftar obligasi LPEI jatuh tempo tahun 2022

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2021 Total Outstanding as of 31 December 2021 (Rp Miliar Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase IV of 2017	C	748	8.90%	23-Feb-17	23-Feb-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase V of 2017	B	436	7.90%	15-Aug-17	15-Aug-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase IV of 2019	B	935	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase V of 2019	B	621	8.45%	09-Jul-19	9-Jul-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VI of 2019	B	15	7.80%	03-Sep-19	03-Sep-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VII of 2019	B	101.3	7.80%	29-Oct-19	29-Oct-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VIII of 2019	A	88	7.50%	06-Dec-19	06-Dec-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi Total Bonds			2.843					

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Daftar sukuk Indonesia LPEI jatuh tempo tahun 2022

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2021 Total Outstanding as of 31 December 2021 (Rp Miliar Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase III of 2019	B	145	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Sukuk Total Sukuk			145					

Penurunan liabilitas lainnya dipengaruhi oleh berkurangnya liabilitas akseptasi sebesar 67,18% dari Rp460,54 miliar di tahun 2021 menjadi Rp151,16 miliar. Berkurangnya akun ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas dari pihak ketiga dari Rp300,87 miliar di tahun 2021 menjadi Rp3,42 miliar di tahun 2022.

The decrease in other liabilities was affected by a 67.18% decrease in acceptances payable from Rp460.54 billion in 2021 to Rp151.16 billion. The decrease in this account was mainly due to a decline in the liabilities of third parties from Rp300.87 billion in 2021 to IRp3.42 billion in 2022.

Di sisi lain, LPEI membukukan kenaikan pinjaman diterima menjadi Rp29,30 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,73% di tahun 2022. Kenaikan ini terutama berasal dari pinjaman bilateral yang tumbuh 49,99% dari Rp12,89 triliun di tahun 2022 menjadi Rp19,33 triliun di tahun 2021. Pinjaman bilateral dalam mata uang asing meningkat signifikan 41,94% menjadi Rp13,68 triliun di tahun 2022.

On the other hand, Indonesia Eximbank recorded an increase in fund borrowings to Rp29.30 trillion with a growth of 1.73% in 2022. This increase was mainly due to bilateral loans, which soared by 49.99% from Rp12.89 trillion in 2022 to Rp19.33 trillion in 2021. Bilateral foreign currency loans increased significantly by 41.94% to Rp13.68 trillion in 2022.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Pinjaman					Borrowings
Sindikasi	15.912.055	8.474.260	-7.437.795	-46,74%	Syndicated
Bilateral	12.887.516	19.329.517	6.442.001	49,99%	Bilateral
Pinjaman Syirkah	-	1.493.288	1.493.288	-	Syirkah Fund
Total	28.799.571	29.297.065	497.494	1,73%	Total

EKUITAS

Disamping total aset dan total liabilitas, LPEI juga membukukan penurunan ekuitas 10,80% dari Rp30,12 triliun di tahun 2021 menjadi Rp26,87 triliun 2022. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan defisit saldo yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 41,28% menjadi Rp11,93 triliun seiring dengan pembukuan rugi bersih tahun berjalan di tahun 2022.

EQUITY

Indonesia Eximbank recorded a 10.80% decrease in equity from Rp30.12 trillion in 2021 to Rp26.87 trillion in 2022, in addition to total assets and total liabilities. This decrease was mainly influenced by an increase in the unappropriated balance deficit by 41.28% to Rp11.93 trillion in line with a net loss for the year of 2022.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Kontribusi modal Pemerintah					Government Capital Contribution
Penugasan Umum	23.640.939	23.589.123	-51.816	-0,22%	General Assignment
Penugasan Khusus	13.700.000	14.013.308	313.308	2,29%	National Interest Account
	37.340.939	37.602.431	261.492	0,70%	
(Kerugian)/Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. setelah pajak tangguhan	26.462	-3.391	-29.853	-112,81%	Unrealized (loss)/gain gain of financial assets at fair value through other comprehensive income. net of deferred tax
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasti - Neto Setelah Pajak Tangguhan	119.529	122.598	3.069	2,57%	Remeasurement of defined benefit obligation. net of deferred tax
Saldo Laba					Retained earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya					Appropriated:
Cadangan Umum	322.161	322.161	-	0,00%	General reserve
Cadangan Tujuan	758.235	758.235	-	0,00%	Specific reserve
	1.080.396	1.080.396	-	0,00%	
Belum ditentukan penggunaannya	-8.446.949	-11.933.790	-3.486.841	41,28%	Unappropriated
Kepentingan non-pengendali	1	1	-	0,00%	Non-controlling interest
Total Ekuitas	30.120.378	26.868.245	-3.252.133	-10,80%	Total Equity

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIANCONSOLIDATED PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME STATEMENTS

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Pendapatan dan Beban Operasional					Expenses from Operations
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah	4.263.520	3.711.542	-551.978	-12,95%	Interest Income and Income from Sharia
Pendapatan Usaha dari Ujrah	-	309	-	-	Income from Ujrah
Beban Bunga	-3.057.215	-2.936.114	121.101	-3,96%	Interest Expense
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah - Neto	1.206.305	775.737	-430.568	-35,69%	Interest Income and Income from Sharia - Net
Pendapatan Operasional Lainnya					Other Operating Income
Pendapatan dari Asuransi	12.357	23.129	10.772	87,17%	Income from Insurance
Premi Reasuransi	-7.568	-10.053	-2.485	32,84%	Reinsurance Premiums
(Kenaikan)pada Liabilitas Asuransi	-3.190	-1.444	1.746	-54,73%	(Increase) in Insurance Liabilities
Kenaikan Pada Aset Reasuransi	1.348	903	-445	-33,01%	Increase In Reinsurance Assets
Beban Klaim Asuransi dan Lainnya	-1.074	-994	80	-7,45%	Claim Expense from Insurance and Other
Pendapatan Dari Penjaminan	79.353	115.552	36.199	45,62%	Income from Guarantee
(Kerugian)/Keuntungan Transaksi Mata uang asing - neto	24.715	-35.302	-60.017	-242,84%	(Loss)/gain on Foreign Exchange transactions - net
Provisi dan Komisi Selain dari Pembiayaan dan Piutang	71.443	51.176	-20.267	-28,37%	Non financing and receivables related fees and commission

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Lain-lain	38.036	43.247	5.211	13,70%	Others
Pendapatan Operasional Lainnya - Net	215.420	186.214	-29.206	-13,56%	Total Other Operating Income - Net
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	-257.752	-2.107.596	-1.849.844	717,68%	Provision for Impairment Losses on Financial Assets
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan	-114	-652	-538	471,93%	Provision for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim
Beban Operasional Lainnya					Other Operating Expenses
Gaji dan Tunjangan	-467.309	-468.623	-1.314	0,28%	Salaries and benefits
Umum dan Administrasi	-269.077	-270.380	-1.303	0,48%	General and administrative
Lain-Lain	-22.377	-23.485	-1.108	4,95%	Others
Jumlah Beban Operasional Lainnya	-758.763	-762.488	-3.725	0,49%	Total Other Expenses
(Rugi) Laba Operasional	405.096	-1.908.785	-2.313.881	-571,19%	(Loss)/Profit From Operations
Pendapatan Bukan Operasional - Neto	3.943	16.420	12.477	316,43%	Non-Operating Income – Net
(Rugi) Laba Sebelum Beban Pajak	409.039	-1.892.365	-2.301.404	-562,64%	(Loss) Income Before Tax Expense
Manfaat Pajak	-21.643	1.222.189	1.243.832	-5747,04%	Tax Benefit
(Rugi) Laba Tahun Berjalan	387.396	-3.114.554	-3.501.950	-903,97%	(Loss) Income for The Year
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain – Neto Setelah Pajak	14.890	-26.784	-41.674	-279,88%	Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	402.286	-3.141.338	-3.543.624	-880,87%	Total Comprehensive (Loss) Income for the year

Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah

Pendapatan bunga dan usaha syariah mengalami penurunan 12,95% menjadi Rp3,71 triliun di tahun 2022 dari Rp4,26 triliun di tahun sebelumnya. Penugasan umum dengan kontribusi dominan sebesar 89,08% atau mencapai Rp3,31 triliun mengalami penurunan 14,19% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,85 triliun. Di sisi lain penugasan khusus dengan porsi 10,92% berkurang, 1,24% menjadi Rp405,44 miliar dari Rp410,23 miliar.

Dari pendapatan yang diperoleh penugasan umum tersebut, penurunan terbesar dibukukan oleh pendapatan usaha syariah sebesar 35,44% menjadi Rp594,44 miliar di tahun 2022. Sementara itu, pendapatan dari pembiayaan dan piutang berkurang 7,63% menjadi Rp2,66 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,88 triliun. Kedua hal tersebut yang menjadi faktor utama penurunan pendapatan bunga dan usaha syariah.

Interest Income and Sharia Business

Interest income and income from sharia interest income dropped by 12.95% to Rp3.71 trillion from Rp4.26 trillion last year. From the previous year's Rp3.85 trillion, General Assignment with a dominant contribution of 89.08% or reaching Rp3.31 trillion experienced a decrease of 14.19%. On the other hand, National Interest Account with 10.92% share fell 1.24% from Rp405.44 billion to Rp410.23 billion.

Among the income generated from this General Assignment, the largest decrease was recorded by income from Sharia with a 35.44% decrease to Rp594.44 billion in 2022. Meanwhile, income from financing and receivables dropped by 7.63% from Rp2.66 trillion compared to the previous year of Rp2.88 trillion. These two things were the key factors causing interest income and Sharia business to decline.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Penugasan Umum					General Assignment
Pembiayaan dan piutang	2.877.059	2.657.499	-219.560	-7,63%	Financing and receivables
Pendapatan Usaha Syariah	920.739	594.439	-326.300	-35,44%	Income from sharia
Penempatan pada bank	28.874	27.829	-1.045	-3,62%	Placements with banks
Efek-efek. Obligasi Pemerintah	26.176	25.967	-209	-0,80%	Securities. Government bonds
Giro pada bank	441	682	241	54,65%	Current accounts with banks
Sub-total	3.853.289	3.306.416	-546.873	-14,19%	Sub-total
Penugasan Khusus					National Interest Account
Deposito berjangka	317.269	268.294	-48.975	-15,44%	Time deposit
Pembiayaan dan piutang	90.670	93.493	2.823	3,11%	Financing and receivables
Pendapatan Usaha Syariah	-	148	148	-	Income from sharia
Efek-efek Obligasi Pemerintah	-	42.830	42.830	-	Securities Government bonds
Giro pada bank	2.292	361	-1.931	-84,25%	Current accounts with banks
Sub-total	410.231	405.126	-5.105	-1,24%	Sub-total
Total	4.263.520	3.711.542	-551.978	-12,95%	Total

Beban Bunga

LPEI membukukan total beban bunga sebesar Rp2,94 triliun di tahun 2022 atau turun 3,96% dibandingkan tahun 2021 senilai Rp3,06 triliun di tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya beban bunga dari efek-efek yang diterbitkan menjadi Rp1,90 triliun di tahun 2022 dari Rp2,35 triliun. Hal ini didukung oleh jatuh tempo beberapa seri obligasi dan sukuk LPEI di sepanjang tahun 2022. Sementara itu, beban bunga dari pinjaman yang diterima naik signifikan 47,48% menjadi Rp1,04 triliun di tahun 2022 dari tahun sebelumnya senilai Rp703,43 miliar seiring dengan peningkatan pinjaman yang diterima.

Interest Expense

Indonesia Eximbank recorded a total interest expense of Rp2.94 trillion in 2022, a decrease of 3.96% compared to the interest expense of Rp3.06 trillion in 2021 of the previous year. This decrease was mainly influenced by the reduction of interest expense from the issued securities to Rp1.90 trillion in 2022 from Rp2.35 trillion in 2021. This is supported by the maturity of several series of Indonesia Eximbank bonds and Sukuk throughout 2022. Meanwhile, in line with the increase in loans received, interest expenses from borrowings will increase significantly by 47.48% to Rp1.04 trillion in 2022 from Rp703.43 billion in the previous year.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Efek-efek utang yang diterbitkan	2.353.782	1.898.703	-455.079	-19,33%	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	703.433	1.037.411	333.978	47,48%	Fund borrowing
Total	3.057.215	2.936.114	-121.101	-3,96%	Total

Pendapatan Operasional Lainnya

LPEI mencatat pendapatan operasional lainnya – net turun 13,56% dari Rp215,42 triliun di tahun 2021 menjadi Rp186,21 triliun di tahun 2022. Penurunan ini terutama

Other Operating Expenses

Indonesia Eximbank recorded a 13.56% decrease in other operating income - net from Rp215.42 trillion to Rp186.21

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

disebabkan oleh kerugian transaksi mata uang asing – neto sebesar Rp35,30 miliar di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya berupa keuntungan transaksi mata uang asing- neto tahun sebelumnya senilai Rp24,71 miliar.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

LPEI melaporkan kenaikan signifikan atas pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan menjadi Rp2,11 triliun dari hanya Rp257,75 miliar. Kenaikan signifikan atas CKPN ini dipengaruhi oleh peningkatan pembiayaan dan piutang bermasalah sebesar 26,03% menjadi Rp22,26 triliun di tahun 2022 dari Rp17,66 triliun. Rasio NPF gross meningkat sebesar 26,61% di tahun 2022 dari 21,03%.

Beban Operasional Lainnya

Secara kumulatif, LPEI membukukan kenaikan beban operasional sebesar 0,49% menjadi Rp762,49 miliar di tahun 2022. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan beban gaji dan tunjangan, umum dan administrasi serta lain-lain di tahun tersebut.

Laba/(Rugi) Operasional

Penurunan pendapatan pembiayaan dan piutang yang disertai dengan berkurangnya pendapatan operasional lainnya di tahun 2022 yang dikombinasikan dengan peningkatan beban pembentukan CKPN dan beban operasionalnya berdampak rugi operasional yang signifikan menjadi Rp1,90 triliun di tahun 2022 dibandingkan Rp405,10 miliar di tahun sebelumnya.

Rugi Tahun Berjalan

LPEI membukukan rugi tahun berjalan melonjak menjadi Rp3,11 triliun di tahun 2022 dibandingkan laba tahun berjalan senilai Rp387,40 miliar di tahun sebelumnya.

Rugi Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Dengan memperhitungkan beban komprehensif lain – neto setelah pajak sebesar Rp26,78 miliar total rugi penghasilan komprehensif tahun berjalan mencapai

trillion in 2022. This decrease was mainly due to foreign currency transaction losses - net of Rp35.30 billion in 2022 compared to net foreign currency transaction gains of Rp24.71 billion in the previous year.

Provision for Impairment Losses on Financial Assets

Indonesia Eximbank reported a significant increase in the allowance for impairment losses (CKPN) on financial assets from only Rp257.75 billion to Rp2.11 trillion. This significant increase in CKPN was influenced by an increase in non-performing loans and receivables by 26.03% from Rp17.66 trillion to Rp22.26 trillion in 2022. The gross NPF ratio hiked from 21.03% to 26.61% in 2022.

Other Operating Expenses

Cumulatively, Indonesia Eximbank recorded a 0.49% increase in the operating expenses to Rp762.49 billion in 2022. This hike was in line with the increase in salaries and benefits, general and administrative expenses, and other operating expenses in the same year.

Profit/(Lost) From Operations

A decrease in the income from financing and receivables accompanied by declining other operating income in 2022, combined with an increase in the provision of CKPN and operating expenses, resulted in a significant operating loss of Rp1.90 trillion in 2022, compared to Rp405.10 billion in the previous year.

Loss (Profit) for the Year

Compared to profit for the year of Rp387.40 billion in the previous year, Indonesia Eximbank posted a current year loss of Rp3.11 trillion in 2022.

Comprehensive Income (Loss) for the Year

The total loss of comprehensive loss for the year stood at Rp3.14 trillion in 2022, compared to the comprehensive income for the previous year worth Rp402.29 billion,

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Rp3,14 triliun di tahun 2022 dibandingkan laba penghasilan komprehensif tahun 2021 senilai Rp402,29 miliar.

taking into account other comprehensive expenses - net of tax standing at Rp26.78 billion.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Kas Neto (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Operasi	7.466.129	-371.945	7.838.074	-104,98%	Net Cash (Used In)/Provided By Operating Activities
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	-48.527	-1.459.883	1.411.356	2.908,39%	Net Cash Used In Investing Activities
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	-3.663.516	-2.708.648	-954.868	-26,06%	Net Cash Used In Financing Activities
(Penurunan)/Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	3.778.801	-4.575.778	8.354.579	-221,09%	Net (Decrease)/Increase In Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	13.538.852	17.317.653	-3.778.801	27,91%	Cash and Cash Equivalent at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	17.317.653	12.741.875	4.575.778	-26,42%	Cash and Cash Equivalent at End of Year

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

LPEI membukukan kas netto digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp371,94 miliar di tahun 2022. Kondisi ini berlawanan dengan tahun sebelumnya dengan kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai Rp7,47 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset operasi berupa pembiayaan dan piutang sebesar Rp2,68 triliun di tahun 2022. Di tengah kenaikan ini, LPEI membukukan penerimaan bunga, provisi, dan komisi lebih rendah menjadi Rp3,10 triliun di tahun 2022 dibandingkan Rp3,34 triliun di tahun sebelumnya.

Arus Kas dari Kegiatan Investasi

LPEI membukukan kas netto digunakan untuk aktivitas investasi meningkat tajam menjadi Rp1,46 triliun di tahun 2022 dibandingkan hanya Rp48,53 miliar di tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan ini terutama digunakan untuk pembelian efek-efek senilai Rp1,48 triliun di tahun 2022 tersebut.

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

LPEI membukukan peningkatan penerimaan pinjaman yang diterima menjadi Rp70,21 triliun di tahun 2022 dibandingkan Rp38,34 triliun di tahun 2021 ketika LPEI

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW

Cash Flows from Operating Activities

Indonesia Eximbank recorded a net cash used in operating activities of Rp371.94 billion in 2022. This condition is in contrast to the previous year when the net cash provided by operating activities amounted to Rp7.47 trillion. This is mainly due to an increase in the operating assets in the form of financing and receivables of Rp2.68 trillion in the year of 2022. In the midst of this increase, Indonesia Eximbank recorded a lower income from interest, fees and commissions to Rp3.10 trillion in 2022 as compared to Rp3.34 trillion in the previous year.

Cash Flows from Investing activities

Indonesia Eximbank recorded that net cash used in investing activities increased sharply to Rp1.46 trillion in 2022 from only Rp48.53 billion last year. This significant increase was mainly used to purchase securities worth Rp1.48 trillion in 2022.

Cash Flows from financing activities

Indonesia Eximbank recorded an increase in proceeds from fund borrowings to Rp70.21 trillion in 2022, compared to Rp38.34 trillion in 2021, when Indonesia Eximbank had

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

harus melakukan pembayaran atas pinjaman yang diterima senilai Rp69,72 triliun. Di tahun yang sama LPEI juga harus melakukan pembayaran terhadap efek utang yang mencapai Rp3.09 triliun dan jatuh tempo di tahun 2022. Secara kumulatif, kas neto digunakan untuk aktivitas aktivitas pendanaan mencapai Rp2,71 triliun di tahun 2022 dari Rp3,66 triliun di tahun sebelumnya.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Kas dan setara kas LPEI sebesar Rp12,74 triliun atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17,32 triliun di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena LPEI membukukan penurunan kas dan setara kas senilai Rp4,58 triliun di tahun 2022 dari tahun sebelumnya yang mampu mencatatkan kenaikan kas dan setara kas Rp3,78 triliun.

to make payments on fund borrowings amounting to Rp69.72 trillion. Indonesia Eximbank also had to make payments on Rp3.09 trillion of debt securities maturing in 2022 in the same year. Cumulatively, the net cash used in financing activities stood at Rp2.71 trillion in 2022. This is down from Rp3.66 trillion in the previous year.

Cash and cash equivalents at the end of the year

The cash and cash equivalents of Indonesia Eximbank amounted to Rp12.74 trillion or lower than the previous year's Rp17.32 trillion in 2021. This was because Indonesia Eximbank recorded net decrease in cash and equivalents worth Rp4.58 trillion in 2022 from the previous year which recorded net increase in cash and equivalents of Rp3.78 trillion.



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY

Kemampuan Membayar Utang

Dari sudut pandang eksternal, penilaian kemampuan LPEI dalam memenuhi seluruh kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek berupa peringkat (*rating*) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat PT Pefindo. Pefindo telah memberikan peringkat idAAA atau peringkat terbaik atas semua efek utang yang diterbitkan oleh LPEI baik berupa obligasi korporasi dan sukuk.

Menurut Pefindo, peringkat idAAA berarti LPEI memiliki kemampuan superior untuk memenuhi semua kewajiban yang didukung oleh status LPEI sebagai sebuah lembaga pemerintah, profil permodalan yang kuat dan posisinya

Solvency

From an external perspective, a rating assigned by a rating agency of PT Pefindo provides an assessment of Indonesia Eximbank's ability to meet all of its long and short-term obligations. Pefindo has assigned idAAA or the highest rating to all of Indonesia Eximbank's debt securities issued in the form of corporate bonds and sukuk.

According to Pefindo, the idAAA rating signifies that LPEI has a superior ability to meet all obligations, supported by Indonesia Eximbank's status as a government institution, strong capital profile and strong position in the provision

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

yang kuat dalam penyediaan pembiayaan ekspor meski dihadapkan tantangan atas kualitas aset dan profitabilitas yang masih lemah. Peringkat atas efek utang yang ditetapkan Pefindo dapat dilihat di bagian ikhtisar obligasi.

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

LPEI mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah sebagai pembiayaan dengan kolektibilitas Kurang lancar, Diragukan, dan Macet. Pembiayaan lancar LPEI mengalami penurunan sebesar 7,43% menjadi Rp61,38 triliun di tahun 2022. Di saat bersamaan, pembiayaan bermasalah menunjukkan peningkatan 26,03% menjadi Rp22,26 triliun. Hal ini berpengaruh terhadap kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai yang meningkat 16,16% menjadi Rp13,57 triliun atau naik 16,16%.

Kenaikan pembiayaan bermasalah dan CKPN ini berdampak kepada peningkatan rasio NPF gross dan NPF net menjadi 26,61% dan 10,39% di tahun 2022 atau tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Di tahun 2022, kedua rasio tersebut masing-masing sebesar 21,03% dan 7,12%.

of export financing, despite challenges with weak asset quality and profitability. Please refer to the bond overview section for the ratings assigned by Pefindo.

Financing Collectability Level

Indonesia Eximbank classifies non-performing financing as financing with a collectability level of substandard, doubtful and loss. Indonesia Eximbank's current financing decreased by 7.43% to Rp61.38 trillion in 2022. At the same time, non-performing loans rose 26.03% to reach Rp22.26 trillion. This affected a 16.16% increase in the provision for impairment losses to Rp13.57 trillion.

Higher non-performing financing and CKPN has an impact on the increase in the gross NPF and net NPF ratios to 26.61% and 10.39% in 2022, the highest in the last three years. In 2022, both ratios are 21.03% and 7.12%.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2021	2022	Perubahan Change		Description
			Nominal	%	
Pembiayaan Lancar	66.301.873	61.376.951	-4.924.922	-7,43%	Current Financing
Lancar	41.776.862	41.670.009	-106.853	-0,26%	Current
Dalam perhatian khusus	24.525.011	19.706.942	-4.818.069	-19,65%	Special Mention
Pembiayaan Bermasalah	17.661.289	22.259.052	4.597.763	26,03%	Non-Performing Financing
Kurang lancar	1.836.833	4.949.842	3.113.009	169,48%	Substandard
Diragukan	653.922	1.946.657	1.292.735	197,69%	Doubtful
Macet	15.170.534	15.362.553	192.019	1,27%	Loss
Total Pembiayaan dan Piutang	83.963.162	83.636.003	-327.159	-0,39%	Total Financing and Receivables
CKPN NPF	-11.681.946	-13.571.424	-1.887.325	16,16%	NPF CKPN
NPF gross	21,03%	26,61%			NPF gross
NPF neto	7,12%	10,39%			NPF neto

Pada tahun 2021, LPEI masih mengacu kepada POJK No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, yang menyebutkan bahwa LPEI dilarang memiliki Pembiayaan dengan kategori

In 2021, Indonesia Eximbank still refers to POJK No. 40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI, states that LPEI is not allowed to have Financing with a Non-Performing

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY

kualitas Pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, lebih dari 5% (lima persen) dari total Pembiayaan.

Per tanggal 23 Juni 2022, OJK telah menerbitkan POJK No.9 tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menggantikan POJK No. 40 tahun 2015. Berdasarkan Pasal 55 No. 3 dari POJK ini, LPEI wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa membaik dengan menjaga agar nilai pembiayaan bermasalah berada pada level yang terkendali.

Rasio Kecukupan Permodalan

LPEI membukukan rasio-rasio kecukupan permodalan yang lebih rendah di tahun 2022, meski masih lebih tinggi dibandingkan rasio kecukupan modal yang diwajibkan. *Capital to Adequacy Ratio* (CAR) LPEI sebesar 32,74% di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 37,19%. Posisi permodalan ini memberikan dukungan terhadap pengembangan portofolio pembiayaan LPEI di masa mendatang.

Financing (NPF) category less allowance for impairment losses, more than 5% (five percent) of the total Financing.

As of June 23, 2022, OJK has issued POJK No. 9 of 2022 concerning Supervision of Indonesia Eximbank which replaces POJK No. 40 of 2015. Based on Article 55 No. 3 of this POJK, Indonesia Eximbank is obliged to assess, monitor, and take the necessary steps so that asset quality always improves by keeping the value of non-performing financing at a controlled level.

Capital Adequacy Ratio

Indonesia Eximbank recorded lower capital adequacy ratios in 2022, although they are still higher than the required capital adequacy ratio. The Capital Adequacy Ratio (CAR) of Indonesia Eximbank in 2022 was 32.74% compared to 37.19% in the previous year. This capital position supports the development of Indonesia Eximbank's financing portfolio in the future.

Uraian (Rp Juta)	2021	2022	Description (Rp Million)
Kecukupan Permodalan			Capital Adequacy
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	37,19%	32,74%	Capital to Adequacy Ratio (CAR)
Kualitas Aset			Asset Quality
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan - gross	21,03%	26,61%	Non-Performing Loans to Total Financing - gross (Gross NPL)
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan - net	7,12%	10,39%	Non-Performing Loans to Total Financing - net (Net NPL)
Rentabilitas			Earnings
Tingkat Pengembalian Atas Aset	0,46%	-2,19%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Atas Ekuitas	1,54%	-10,49%	Return on Equity (ROE)
Marjin Bunga Bersih	1,17%	0,78%	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	90,87%	148,57%	Operating Expense to Operating Income (BOPO)
Rasio Kepatuhan			Compliance Ratio
Posisi Devisa Neto (PDN)	7,07%	1,74%	Net Open Position (NOP)
Utang terhadap Ekuitas (DER) - x	1,88	1,98	Debt to Equity Ratio - x

Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)

LPEI menghadapi tantangan pengelolaan pembiayaan dan piutang bermasalah yang meningkat di tahun 2022.

Non-Performing Financing (NPF) Ratio

Indonesia Eximbank faces challenges in managing non-performing financing and receivables, which have

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rasio NPF *gross* dan NPF net LPEI menjadi 26,61% dan 10,39% di tahun 2022 dibandingkan 21,03% dan 7,12% di tahun sebelumnya.

Rentabilitas

Laba tahun berjalan LPEI mengalami penurunan tajam dan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp3,11 triliun di tahun 2022 dibandingkan laba tahun berjalan senilai Rp387,40 miliar di tahun sebelumnya. Rugi tahun berjalan yang berada di zona negatif ini tidak terlepas dari beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp2,11 triliun di tahun 2022 dibandingkan Rp257,75 miliar di tahun sebelumnya. Faktor lainnya adalah LPEI membukukan penurunan pendapatan bunga dan usaha syariah sebesar 12,95% menjadi Rp3,71 triliun di tahun 2022 sehingga berdampak kepada penurunan pendapatan bunga dan usaha syariah – neto sebesar 35,69%.

increased in 2022. This is evidenced by an increase in Indonesia Eximbank's gross NPF and net NPF ratios to 26.61% and 10.39% in 2022 compared to 21.03% and 7.12% in the prior year.

Profitability

Indonesia Eximbank's profit for the year decreased sharply and recorded a loss for the year of Rp3.11 trillion in 2022 compared to a profit for the year worth Rp387.40 billion in the previous year. The loss for the year, which is in the negative zone, is inextricably linked to the burden of establishing an allowance for impairment losses on financial assets of Rp2.11 trillion in 2022 compared to Rp257.75 billion in the previous year. Another factor is that Indonesia Eximbank recorded a 12.95% decline in income to Rp3.71 trillion in 2022, resulting in a 35.69% decline in interest income and income from Sharia.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Struktur Permodalan

LPEI membukukan penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pembiayaan dan piutang bermasalah di tahun 2022 yang terefleksi dengan kenaikan rasio NPF *gross* dan NPF neto.

Rasio KPM dengan memperhitungkan risiko kredit mengalami penurunan menjadi 32,93% di tahun 2022 dibandingkan 38,19% di tahun sebelumnya. Selain itu, rasio KPM untuk risiko kredit dan pasar juga menjadi lebih rendah menjadi sebesar 32,74%.

Capital Structure

Indonesia Eximbank recorded a decrease in the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) in 2022 as compared to 2021. This was influenced by an increase in the non-performing financing and receivables in 2022. It was reflected in higher ratios of gross NPF and net NPF.

The CAR ratio, which takes into account credit risk, decreases to 32.93% in 2022. This compares to 38.19% in the previous year. In addition, the CAR ratio for both credit risk and market risk was also lower, at 32.74%.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Struktur Permodalan (Rp Juta)	2021	2022	Capital Structure (Rp Million)
Modal			Capital
Modal Inti	29.807.150	26.745.646	Core Capital
Modal Pelengkap	898.504	524.562	Supplementary Capital
Modal Inti dan Pelengkap	30.705.654	27.270.208	Core and Supplementary Capital
Total Modal Untuk Risiko Kredit	30.705.654	27.270.208	Total Capital for Credit Risk
Total Modal Untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	30.705.654	27.270.208	Total Capital for Credit Risk and Market Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	80.400.905	82.808.170	Risk Weighted Assets (RWA) Credit Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	2.167.852	472.528	Risk Weighted Assets (RWA) Market Risk
Rasio Kecukupan Modal Yang Tersedia Untuk Risiko Kredit	38,19%	32,93%	CAR With Credit Risk
Rasio Kecukupan Modal Yang Tersedia Untuk Risiko Kredit dan Pasar	37,19%	32,74%	CAR With Credit and Market Risk
Rasio Kecukupan Modal Yang Diwajibkan	8,00%	8,00%	Required CAR

Kebijakan Struktur Modal

LPEI menerima penambahan PMN dari Pemerintah sebesar Rp5,0 triliun selama tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 117 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5,0 triliun.

Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2,5 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan sebesar Rp2,5 triliun digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus Ekspor. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021. Terdapat kapitalisasi modal di tahun 2021 sebesar Rp194,66 miliar dan sebesar Rp261,49 miliar di tahun 2022.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI adalah sebesar Rp37,60 triliun dan Rp37,34 triliun.

Dasar Penetapan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan minimal

Capital Structure Policy

Indonesia Eximbank received an additional PMN of Rp5.0 trillion from the Government in 2021. On the basis of Government Regulation No. 117 Year 2021 dated December 15, 2021 on the Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Equity of the Indonesian Export Financing Institution, it is stated that the State of the Republic of Indonesia has provided additional state equity of Rp5.0 trillion.

The aforementioned additional equity participation consists of Rp2.5 trillion to increase Indonesia Eximbank's business capacity and Rp2.5 trillion for the Export Special Assignment program. This capital was effectively received and recorded by Indonesia Eximbank on December 29, 2021 and December 30, 2021. There is a share capitalization of Rp194.66 billion in 2021 and Rp261.49 billion in 2022.

As of December 31, 2022 and 2021, the capital contribution from the Government of the Republic of Indonesia in Indonesia Eximbank amounted to Rp37.60 trillion and Rp37.34 trillion, respectively.

Basis for Determining Management Policy on Capital Structure

Based on Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 on Indonesia Eximbank, the initial capital of Indonesia Eximbank

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Rp4 triliun. Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan mekanisme yang berlaku jika modal LPEI berkurang dari Rp4 triliun. Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal ditetapkan dengan PP.

LPEI telah beberapa kali menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam bentuk PMN sebagai perwujudan dukungan kuat Pemerintah RI kepada LPEI. PMN yang telah disetorkan kepada LPEI diantaranya sebesar Rp2 triliun pada tahun 2010, Rp1 triliun pada tahun 2014; Rp1 triliun pada tahun 2015; Rp4 triliun pada tahun 2016; Rp3,2 triliun pada tahun 2017; Rp2,5 triliun pada tahun 2019; Rp10 triliun pada tahun 2020; dan Rp5 triliun pada tahun 2021. Tahun 2022, LPEI tidak menerima PLM dari Pemerintah.

is set at a minimum of Rp4 trillion. The government covers the shortfall from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) based on the applicable mechanism when the capital of Indonesia Eximbank is reduced from Rp4 trillion. Topping up Indonesia Eximbank's capital to cover the shortfall is stipulated in the PP.

Indonesia Eximbank has received several capital contributions from the Government of the Republic of Indonesia in the form of PMN. This is a manifestation of the Government of the Republic of Indonesia's strong support for Indonesia Eximbank. The PMN deposited to Indonesia Eximbank includes Rp2 trillion in 2010, Rp1 trillion in 2014, Rp1 trillion in 2015, Rp4 trillion in 2016, Rp3.2 trillion in 2017, Rp2.5 trillion in 2019, Rp10 trillion in 2020 and Rp5 trillion in 2021. In 2022, Indonesia Eximbank did not accept PLM from the government.

Tahun Year	PMN Peningkatan Kapasitas Usaha Business Capacity Enhancement (Rp miliar) (Rp billion)	PMN Penugasan Khusus Special Assignment (Rp miliar) (Rp billion)	PMN Dalam Rangka PEN PEN (Rp miliar) (Rp billion)	Total PMN (Rp miliar) (Rp billion)	Dasar Hukum Legal Basis
2010	2.000			2.000	Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2010 Government Regulation No. 73 Year 2010
2014	1.000			1.000	Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014 Government Regulation No. 86 Year 2014
2015	1.000			1.000	Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015 Government Regulation No. 67 Year 2015
2016	2.000	2.000		4.000	Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016 Government Regulation No. 81 Year 2016
2017	1.000	2.200		3.200	Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017 Government Regulation No. 55 Year 2017
2019	1.500	1.000		2.500	Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019 Government Regulation No. 44 Year 2019

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Tahun Year	PMN Peningkatan Kapasitas Usaha Business Capacity Enhancement	PMN Penugasan Khusus Special Assignment	PMN Dalam Rangka PEN PEN	Total PMN	Dasar Hukum Legal Basis
	(Rp miliar) (Rp billion)	(Rp miliar) (Rp billion)	(Rp miliar) (Rp billion)	(Rp miliar) (Rp billion)	
2020	4.000	1.000		5.000	Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020 Government Regulation No. 40 Year 2020
2020			5.000	5.000	Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2020 Government Regulation No. 78 Year 2020
2021	2.500	2.500		5.000	Peraturan Pemerintah No.117 tahun 2021 Government Regulation No. 117 Year 2021
Jumlah	15.000	8.700	5.000	28.700	Total



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Di sepanjang tahun 2022, LPEI tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, LPEI tidak menyajikan informasi terkait tujuan dari ikatan tersebut; sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; mata uang yang menjadi denominasi; dan langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Throughout 2022, Indonesia Eximbank did not have any material commitments for capital expenditures with various parties. Therefore, Indonesia Eximbank did not provide information regarding the purpose of the bond, the source of funds expected to be used to meet the commitment, the currency denominated, and the steps planned to protect against the risks of the related foreign currency positions.

REALISASI INVESTASI/BELANJA BARANG MODAL

INVESTMENT REALIZATION/CAPITAL EXPENDITURES

Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal

Realisasi belanja modal LPEI mengalami penurunan di tahun 2022 dari Rp46,47 miliar di tahun 2021 menjadi Rp13,14 miliar di tahun 2022. Belanja modal tersebut bertujuan untuk operasional kegiatan usaha LPEI di sepanjang tahun 2022 berupa gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian.

Dengan penambahan ini, maka jumlah aset tetap sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp1,53 triliun di tahun 2022 atau relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut informasi investasi belanja barang modal LPEI pada tahun 2022 dan 2021:

Type, Purpose and Investment Value of Capital Expenditures

The realization of Indonesia Eximbank's capital expenditure in 2022 decreased from Rp46.47 billion in 2021 to Rp13.14 billion in 2022. This capital expenditure is aimed at operating Indonesia Eximbank's business activities throughout 2022. It is in the form of buildings, office equipment and supplies, motorized vehicles, and construction in progress.

With this addition, the total amount of fixed assets before accumulated depreciation worth Rp1.53 trillion in 2022, which is relatively the same as compared to the previous year. The following is information on Indonesia Eximbank's capital expenditure in 2022 and 2021:

Investasi Barang Modal (Rp Juta)	2021	2022	Capital Expenditure (Rp Millions)
Gedung	-	-	Building
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.620	2.676	Office Furniture and and fixtures
Kendaraan Bermotor	7.200	-	Motor vehicles
Aset Dalam Penyelesaian	34.925	4.208	Construction in progress
Aset Hak Guna	1.727	6.256	Right of use asset
Total Investasi Barang Modal	46.472	13.140	Total Capital Expenditure

PERBANDINGAN ANTARA TARGET & REALISASI TAHUN 2022 SERTA PROYEKSI 2023

COMPARISON BETWEEN 2022 TARGET & REALIZATION AS WELL AS 2023 PROJECTION

Indikator (Rp Juta)	2022			Proyeksi 2023 2023 Projection	
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievements		
Total Aset	88.896.131	83.815.752	94.29%	78.835.534	Total Assets
Total Pembiayaan	88.231.361	83.636.003	94.79%	83.607.176	Total Financing
Total Penjaminan (termasuk PEN)	11.441.609	12.428.806	108.63%	13.456.232	Total Guarantee (including PEN)
Total Asuransi (Plafond)	12.100.241	16.782.701	138.70%	23.495.781	Total Insurance
Total Ekuitas	30.629.927	26.868.245	87.72%	26.579.516	Total Equity
(Rugi) Laba Bersih	456.362	(3.114.554)	682.47%	157.823	Net (Loss) Profit



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION SUBSEQUENT EVENTS

Pada tanggal 6 Maret 2023, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor S-194/MK/08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN. Surat tersebut menyebutkan bahwa perhitungan CKPN dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung dengan menggunakan metode perhitungan arus kas yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga sebesar 0,1%.

On March 6, 2023, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Letter No. S-194/MK/08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumptions Based on Interest Rates After Restructuring in Calculating CKPN. The Letter stated that the calculation of CKPN for financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk using the discounted cash flow method at a discount rate of 0.1%.



KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Kebijakan Dividen

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015, surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, dan bagian laba Pemerintah. Persentase alokasi surplus ditetapkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus dan jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus. Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pembagian Dividen

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-662/MK.06/2022 tanggal 14 Agustus 2022, Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2021 sebesar Rp387,40 miliar untuk alokasi cadangan umum dan tujuan sebesar Rp348,66 miliar,

Dividend Policy

According to article 21 of Republic of Indonesia Law No. 2 Year 2009 regarding LPEI and Regulation of the Minister of Finance No. 260/PMK.06/2015, the surplus gained by Indonesia Eximbank in 1 (one) year operation shall be used for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, and the Government's profit share. The surplus allocation percentage shall be determined as follows: general reserve and special purpose reserve shall be 90% (ninety percent) of the surplus and performance bonus and tantiem and the Government's profit share shall be 10% (ten percent) of the surplus. The percentage amount for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, including Government's profit share shall be determined by the Ministry of Finance.

Dividend Distribution

According to the Letter of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-662/MK.06/2022 dated August 14, 2022, the Ministry of Finance determined the business surplus for the year ended 2021 amounting to Rp387.40 billion for the allocation of general and special

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA
DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

jasa produksi sebesar Rp15,11 miliar, dan bagian laba Pemerintah sebesar Rp23,63 miliar.

purpose reserve amounting to Rp348.66 billion bonus amounting to Rp15.11 billion and Government's profit share amounting to Rp23.63 billion.

Jasa produksi, tantiem, dan bagian laba Pemerintah tahun buku 2021 telah dibayarkan pada bulan Agustus 2022.

Bonus, tantiem, and Government's profit share for 2021 were paid in August 2022.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM UNTUK KARYAWAN/MANAJEMEN

SHARE OWNERSHIP PROGRAM FOR EMPLOYEE/MANAGEMENT



LPEI melaporkan tidak terdapat program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) mengingat kedudukan LPEI sebagai lembaga yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah.

Indonesia Eximbank reports that, given its position as a wholly government-owned entity, it does not have an employee and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP).

PENGUNAAN DANA IPO

USE OF IPO PROCEEDS



LPEI tidak menyajikan informasi terkait penggunaan dana hasil penawaran umum karena LPEI tidak melakukan penerbitan efek bersifat utang di sepanjang tahun 2022.

Indonesia Eximbank does not provide information regarding the use of proceeds from public offerings as Indonesia Eximbank did not issue debt during 2022.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

TRANSACTION WITH CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATES TRANSACTIONS

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Indonesia Eximbank menyatakan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun pelaporan yang berakhir akhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Dalam kegiatan normal usaha, LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Penjelasan lengkap terkait transaksi material dengan pihak berelasi selama tahun 2022 terdapat pada Catatan No. 39 atas Laporan Keuangan Audited.

Significant Transactions Involving Conflicts of Interest

Indonesia Eximbank reported that during the year ended December 31, 2022, it did not engage in any transactions involving conflicts of interest.

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, Indonesia Eximbank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the terms and conditions agreed by the parties.

A full explanation of the material transactions with related parties during 2022 can be found in note 39 to the audited financial statements.

INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION AND RESTRUCTURING

Investasi

LPEI melakukan aktivitas investasi terkait pembelian efek-efek. Efek-efek terdiri atas efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, berupa Obligasi Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan obligasi korporasi.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.

Investment

Securities consist of securities traded on the stock exchanges and in the money market, in the form of bonds of the Republic of Indonesia, Certificates of Bank Indonesia (SBI), and corporate bonds.

The valuation of securities is stated based on the classification as follows:

1. Gains and losses from changes in fair value are recognized directly in the statement of profit or loss other comprehensive income.

INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI
INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION AND RESTRUCTURING

2. Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs diakui pada laba rugi.

LPEI melakukan investasi berupa efek utang yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mata uang Rupiah senilai Rp1,66 triliun termasuk di dalamnya *Green Bond* yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk dan dalam valuta asing sebesar Rp307,70 miliar.

LPEI tidak melakukan ekspansi, divestasi, akuisisi dan restrukturisasi di sepanjang tahun 2022. Oleh karena itu, Indonesia Eximbank tidak menyajikan informasi terkait hal tersebut seperti tanggal, nilai, dan objek transaksi; nama pihak yang melakukan transaksi; sifat hubungan afiliasi (jika ada); penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan pemenuhan ketentuan terkait.

2. Interest income is recognized in profit or loss using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses are recognized in profit or loss.

Indonesia Eximbank invested IRp1.66 trillion in rupiah-denominated debt securities issued by the government, including green bonds issued by PT Bank Negara Indonesia Tbk, and Rp307.70 billion in foreign currencies.

Throughout the year 2022, Indonesia Eximbank did not undertake any expansion, divestment, acquisition or restructuring. Therefore, Indonesia Eximbank did not provide related information such as the date, value and subject matter of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the related party relationship (if any), the explanation of the fairness of the transaction and the fulfillment of related provisions.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

REGULATORY CHANGES THAT HAVE A MATERIAL IMPACT ON THE COMPANY

LPEI senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan baru maupun amandemen dari peraturan yang telah ada sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2022 untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari perubahan ketentuan tersebut dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

Indonesia Eximbank continually reviews the potential impact of and compliance with new regulations, as well as amendments to existing regulations, that was issued in 2022.

Jenis Peraturan Types of Regulations	Keterangan Remark	Dampak terhadap LPEI Impact on Indonesia Eximbank
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.05/2022 Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 9/POJK.05/2022	Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Supervision of Indonesia Eximbank	Tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Does not have a material impact on the consolidated financial statements
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 15/SEOJK.05/2022 tahun 2022 Financial Services Authority Circular No 15/SEOJK.05/2022 of 2022	Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Soundness Level Assessment of Indonesia Eximbank	Tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Does not have a material impact on the consolidated financial statements



PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLICATION

Perubahan Kebijakan Akuntansi

LPEI telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2022, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi terkait kontrak yang merugi - biaya memenuhi kontrak. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan terkait imbalan dalam pengujian 10 persen untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): "Sewa". Penyesuaian ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

Dampak Terhadap Laporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi baru ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Accounting Standards Changes

As of January 1, 2022, Group have implemented revised accounting standards that are relevant to consolidated financial statements, which are as follows:

- PSAK 22 Amendment: Business Combination of Reference to Conceptual Framework;
- Amendment PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets related to onerous contracts –onerous costs of fulfilling the contract. This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is onerous;
- PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments related to the consideration in the 10 percent test for the termination of financial liabilities. The amendment clarify the costs that are included in the entity when assessing whether the terms of a new or modified financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability.
- PSAK 73 (Annual Improvement 2020): "Lease". This amendment clarifies the measurement by the lease and the recording of changes in the lease term regarding "rental properties repair".

Impact on Financial Statements

Implementation of new accounting standards has no significant impact to the consolidated financial statements.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

CONTRIBUTION TO THE STATE



LPEI melakukan pembayaran kepada Pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp87,16 miliar di tahun 2022 dibandingkan Rp64,89 miliar yang telah disetorkan ke kas Negara di tahun sebelumnya.

Indonesia Eximbank paid Rp87.16 billion to the government in 2022 in the form of non-tax government revenue (PNBP). This compares to Rp64.89 billion paid into the government treasury in the previous year.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION



LPEI memiliki komitmen untuk memperbaiki dan menguatkan kinerja keuangan agar usaha tetap tumbuh berkelanjutan. Hal ini tidak terlepas dari keyakinan manajemen bahwa LPEI memiliki keyakinan atas sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan usaha LPEI di masa mendatang secara berkelanjutan. Namun demikian, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Indonesia Eximbank is committed to improving and strengthening its financial performance so that it can continue to grow sustainably. This is inextricably linked to management's belief that Indonesia Eximbank has the resources and capabilities to continue Indonesia Eximbank's business in a sustainable manner in the future. However, management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on Indonesia Eximbank's ability to continue as a going concern.

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Lembaga

Berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No.2/2009, LPEI dapat dibubarkan dengan Undang-Undang. Selain itu, LPEI juga tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan. LPEI juga tidak sedang menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kondisi kinerja operasional dan keuangan LPEI pada tahun 2022.

Matters that have the potential to significantly affect the business continuity of the institution

Pursuant to Article 39 of Law No. 2/2009, Indonesia Eximbank may be dissolved by operation of law. In addition, Indonesia Eximbank cannot be declared bankrupt under the provisions of the Bankruptcy Law. Indonesia Eximbank is also not faced with matters that have a significant impact on the continuity of its business, taking into account the state of Indonesia Eximbank's operational and financial performance in 2022.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Asesmen Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Lembaga

Manajemen telah melakukan kajian prospek ekonomi baik dalam jangka pendek maupun menengah dan pengaruhnya terhadap kondisi operasional dan keuangan LPEI di masa mendatang. Hal ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam rencana kerja tahunan Lembaga. Meski demikian, Manajemen tidak mengetahui akan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Lembaga untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen

LPEI menggunakan berbagai indikator ekonomi dalam APBN 2022 diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, proyeksi ekspor, dan pergerakan kurs. Berbagai kajian ekonomi yang diterbitkan oleh lembaga internasional seperti IMF, World Bank dan OECD yang membahas berbagai aspek perekonomian dunia seperti pertumbuhan PDB negara-negara di dunia terutama yang merupakan tujuan ekspor Indonesia disamping perkembangan harga komoditas utama dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan dunia.

Secara internal, dengan menggunakan pendekatan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) LPEI menganalisis kinerja operasional dan kinerja keuangan Lembaga serta pelaksanaan tata kelola di internal Lembaga.

Management's Assessment of Matters with the Potential to Materially Affect the Institution's Business Continuity

Management has conducted a study of the short- and medium-term economic outlook and its impact on Indonesia Eximbank's future operating and financial conditions. This is also one of the discussions in the Institute's annual work plan. However, management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern.

Assumptions Made by Management in Performing the Assessments

Indonesia Eximbank uses various economic indicators in the 2022 State Budget, including economic growth, inflation, export projections and exchange rate movements. Various economic studies published by international institutions such as the IMF, World Bank and OECD discussing various aspects of the global economy such as GDP growth of countries around the world, especially Indonesia's export destinations, price trends of major commodities and factors affecting global trade.

Internally, Indonesia Eximbank analyzes the operational and financial performance of the institution as well as the implementation of the institution's internal governance using the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Challenges (SWOT) approach.

TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY



Teknologi Informasi merupakan salah satu kunci keberhasilan yang berpengaruh dalam mendukung pencapaian sasaran LPEI. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu alat bantu dalam mengembangkan usaha, dan memberikan dampak pada produktivitas dan efisiensi proses untuk menjalankan kegiatan usaha LPEI. Selain itu, teknologi Informasi memiliki tugas atas terlaksananya penyediaan informasi dan teknologi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan menggunakan biaya dan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana strategis.

Information Technology is one of the keys to influential success in supporting the achievement of Indonesia Eximbank's goals. Communication and information technology is one of the tools in developing a business, and has an impact on the productivity and efficiency of the process to perform business activities. Moreover, Information technology has the task of implementing the integrated and sustainable information and technology by using effective and efficient costs and resources in accordance with the strategic plan.

Fokus Teknologi Informasi Tahun 2022

Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2022 memfokuskan aktivitasnya antara lain melakukan pembaharuan dan peningkatan kapasitas atas infrastruktur Teknologi Informasi yang berkelanjutan, melakukan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis LPEI, serta meningkatkan keamanan jaringan dan perangkat untuk memastikan seluruh lingkungan Teknologi Informasi di LPEI terlindungi dari berbagai macam ancaman.

Information Technology Focus in 2022

During the year, Information Technology (IT) focused its activities by updating and increasing capacity for sustainable Information Technology infrastructure, developing systems that are in accordance with the needs and business development of Indonesia Eximbank, and improving network and tools security to ensure that the entire Information Technology environment in Indonesia Eximbank is safeguarded from various threats.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY**Tantangan Yang Dihadapai Tahun 2022**

LPEI menghadapi beragam tantangan antara lain pelaksanaan pengembangan baik dari sisi *Hardware* dan *Software* yang harus dilakukan sesuai dengan *IT Strategic Plan* yang telah disusun. Pengembangan tersebut harus dikaji kembali dan diselaraskan dengan revisi Rencana Jangka Panjang (RJP) LPEI yang disusun di tahun 2022.

Implementasi Strategi Tahun 2022

Sesuai dengan roadmap pengembangan TSI, kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan atas regulasi yang terkait, keselarasan dengan rencana jangka panjang LPEI, kondisi terkini LPEI, serta perkembangan teknologi dan industri.

Roadmap pengembangan TSI ditetapkan dalam 3 (tiga) besaran fase yaitu :

- Fase-1: Penataan dan Penguatan TI (2021-mid 2022)
- Fase-2: Peningkatan Berkelanjutan TI (mid 2022-2023)
- Fase-3: Pemberdayaan Strategis TI (2024)

Rencana dan kegiatan yang direalisasikan hingga Triwulan III tahun 2022 ini mencapai 66.53% antara lain terkait :

1. Pembaruan infrastruktur seperti peremajaan perangkat *server intel based*, dan upgrade perangkat *Dealing Phone Telephony*.
2. Pengembangan aplikasi seperti implementasi *learning management system*, dan *new expense system*.
3. Penutupan vulnerabilitas aplikasi dengan melakukan *re-engineering* aplikasi *surrounding*.

Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun 2022

TI berkomitmen memenuhi tata kelola teknologi informasi yang baik melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Pemisahan kewenangan (*Segregation of Duties*) antara "*Development*" dengan "*Operasional*" IT.

Challenges in 2022

Indonesia Eximbank encountered various challenges, including the development of *Hardware* and *Software* that shall be carried out in accordance with the set forth *IT Strategic Plan*. The development must be reviewed and aligned with the revision of the Corporate Long-Term Plan (RJP) prepared in 2022.

Strategy Implementation in 2022

Referring to the TSI development roadmap, information technology requirements that support business strategies are prepared by considering the fulfillment of related regulations, alignment with corporate long-term plan, the latest conditions of the Institution, as well as technological and industrial developments.

The TSI development roadmap is set in 3 (three) phases, which are:

- Phase-1: IT Structuring and Strengthening (2021-mid 2022)
- Phase-2: IT Continuous Improvement (mid 2022-2023)
- Phase-3: IT Strategic Empowerment (2024)

The plans and activities realized until the third quarter of 2022 reached 66.53%, among others related to:

1. Infrastructure updates, such as intel-based server device, and Dealing Phone Telephony device upgrade.
2. Application development, such as the implementation of learning management systems, and new expense systems.
3. Closing application vulnerability by re-engineering the surrounding application.

Information Technology Governance in 2022

IT is committed to fulfilling good information technology governance through the following measures:

1. Segregation of Duties between IT "*Development*" and "*Operations*".

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

2. Implementasi *Change Management*, seluruh perubahan di lingkungan produksi wajib melewati kajian dan persetujuan *Change Advisory Board (CAB)*.
3. Pengkinian kebijakan/manual operasional/PTO TSI serta kajian secara periodik sesuai dengan regulasi.
4. Pelaksanaan IT *Steering Committee* sebagai mekanisme pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan IT.
5. Pemenuhan SDM untuk fungsi IT *Security* dan IT *Project Management*.
6. Revitalisasi DRC sesuai standar.

Rencana Strategis Tahun 2023

Divisi TSI telah melakukan koordinasi dengan Unit-Unit Kerja terkait dalam melakukan penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dengan memperhatikan Asas, Tujuan dan Kebijakan Ekspor Nasional, serta mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan LPEI serta arahan dari Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

Divisi TSI juga melakukan penilaian atas kondisi dan kapabilitas Teknologi Sistem Informasi saat ini dengan bantuan tenaga konsultan yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan usulan inisiatif yang dapat mendukung Revisi Rencana Jangka Panjang (RJP) LPEI sesuai dengan *strategic house*.

2. Implementation of *Change Management*, all changes in the production environment shall pass the review and approval of the *Change Advisory Board (CAB)*.
3. Update of TSI operational policies/manuals/PTO, and periodic studies in accordance with regulations.
4. Implementation of the IT *Steering Committee* as a supervisory mechanism for the IT implementation.
5. HR recruitments for IT *Security* and IT *Project Management* functions.
6. Revitalization of DRC according to standards.

Strategic Plans for 2023

The TSI Division has coordinated with relevant Work Units in preparing the Annual Budget Work Plan (RKAT) proposal by taking into account the National Export Principles, Objectives and Policies, and referring to the Vision, Mission and Objectives of Indonesia Eximbank, as well as directives from the Executive Director and Managing Directors.

The Division also carries out the assessment on the current condition and capability of Information System Technology assisted by external consultants that expected to provide recommendations and proposals initiatives to support the Revision of the Corporate Long-Term Plan (RJP) in accordance with the *strategic house*.





TATA KELOLA
PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

05



TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE



LPEI meyakini bahwa praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan akan membantu memenuhi mandatnya dalam mendukung program ekspor Indonesia, yang sangat penting untuk mengembangkan kegiatan bisnis yang berkualitas tinggi berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan lembaga.

Indonesia Eximbank believes that best practices in corporate governance will help it fulfill its mandate to support the nation's export program, which is crucial for developing high-quality business activities based on prudential principles and giving ethics and integrity top priority in the institution's management.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

LPEI berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola kelembagaan yang baik pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Komitmen ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Lembaga secara berkelanjutan serta memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan.

LPEI meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, merupakan salah satu pilar yang kokoh untuk menopang Lembaga dalam menghadapi setiap tantangan. Bagi LPEI, implementasi GCG bukan hanya sekedar kewajiban, namun merupakan suatu kebutuhan dan fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha serta dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pengurusan Lembaga kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sehingga, diharapkan LPEI dapat melaksanakan mandat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang pembentukan LPEI sebagai lembaga yang sui generis.

DASAR-DASAR PELAKSANAAN GCG

Penerapan GCG pada LPEI berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 2/2009 (Pasal 17) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.

LPEI menerapkan prinsip-prinsip "Good Corporate Governance" (GCG) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip

COMMITMENT TO CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

At all organizational levels, Indonesia Eximbank is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG). This commitment is made to acquire stakeholders' trust and sustainably improve the Institution's performance.

Indonesia Eximbank believes that one of the reliable pillars supporting the Institution in meeting any challenges is the adoption of Good Corporate Governance. To conduct business activities and uphold the management's and the Institution's management's transparency and accountability to all stakeholders, Indonesia Eximbank views the implementation of the GCG as more than merely a requirement.

As a result, it is anticipated that Indonesia Eximbank will be able to fulfill the requirements set forth in the Law designating Indonesia Eximbank as a sui generis institution.

GCG LEGAL REFERENCES

The foundations for GCG's implementation at Indonesia Eximbank are:

1. Law No. 2/2009 (Article 17) on Indonesia Eximbank (LPEI)
2. Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank applies the principles of "Good Corporate Governance" (GCG) as confirmed in Article 17 paragraphs 1 and 2 of the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 which states that in carrying out its duties, Indonesia Eximbank must apply the principles

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

tata kelola yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

Prinsip tata kelola tersebut kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.06/2021 yang mengatur tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.

Mengacu kepada (PMK) Nomor 208/PMK.06/2021, pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik LPEI diwujudkan dalam:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana;
2. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
3. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
4. penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian internal;
5. pengadaan barang dan jasa;
6. penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
7. transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan; dan
8. pelaporan internal dan benturan kepentingan.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan seluruh pegawai LPEI berkomitmen untuk mengimplementasikan standar tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Seluruh insan LPEI juga akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha

of good governance, the principles of risk management implementation, and the principle of knowing the customer.

The Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021, which governs the Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank, reaffirms the governance principles.

Referring to (PMK) No. 208/PMK.06/2021, the implementation of Institution's good governance principles is realized in:

1. implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Director, Managing Director;
2. the completeness and implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board and committees and units carrying out the internal control function;
3. implementation of compliance, internal audit, and external audit functions;
4. implementation of Risk Management including internal control system;
5. procurement of goods and services;
6. preparation of long-term plans and annual work plans and budgets;
7. transparency of financial and non-financial conditions; and
8. internal reporting and conflict of interest.

GCG PRINCIPLES

The Board of Directors, Executive Director, Managing Director and all employees of Indonesia Eximbank are committed to implementing high standards in the implementation of GCG principles. These principles become a reference for responsible decision making, avoiding conflicts of interest, optimizing performance, and increasing accountability. All Indonesia Eximbank personnel will also continue to improve the quality of implementation of GCG principles in all aspects of business

bisnis dan operasional. Seiring berkembangnya best practices pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada industri jasa keuangan, sebagai Special Mission Vehicle milik Pemerintah Republik Indonesia yang juga terdaftar di pasar modal, LPEI memahami bahwa penerapan dan pengembangan GCG memiliki manfaat yang sangat besar bagi LPEI. Dengan adanya penerapan dan pengembangan GCG, LPEI memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap stakeholder. Keselarasan antara stakeholder dan LPEI akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan Lembaga yang berujung pada peningkatan sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan LPEI.

Implementasi GCG di lingkungan LPEI senantiasa berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola dapat terlaksana pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas LPEI serta seluruh kegiatan operasional Lembaga dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan Tata Kelola di LPEI berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan juga Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan LPEI, sudah disepakati oleh Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan seluruh pegawai LPEI guna menciptakan Lembaga yang senantiasa tumbuh serta kuat dan bertahan dalam menjalankan roda bisnisnya.

Adapun penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI dapat diuraikan sebagai berikut:

and operational activities. Along with the development of best practices for the implementation of Corporate Governance in the financial services industry, as a Special Mission Vehicle owned by the Government of the Republic of Indonesia which is also listed in the capital market, Indonesia Eximbank understands that the implementation and development of GCG has enormous benefits for the Institution. With the implementation and development of GCG, Indonesia Eximbank has guidelines in carrying out its business activities, allowing it to be always in line with the goals and needs of each stakeholder. Harmony between stakeholders and Indonesia Eximbank will foster mutual trust and conducive attitudes within the Institution which leads to an increase in the nature of excellent work and professionalism in every Indonesia Eximbank employee.

The implementation of GCG within the Institution is always based on strong integrity, enabling the principles of Governance to be implemented at every level of the organization, and implemented in every activity of Indonesia Eximbank and all operational activities of the Institution can consistently and continuously run. The implementation of Governance in run is based on the basic principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. The application of these principles within Indonesia Eximbank has been agreed upon by the Board of Directors, Executive Director and all employees of Indonesia Eximbank in order to create an Institution that continues to grow and is strong and survives in performing its business.

The application of Indonesia Eximbank's Good Governance principles can be described as follows:

TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE



Keterbukaan Transparency

Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

A state of implementation of Indonesia Eximbank's business activities that ensures transparency in the decision-making process regarding the implementation of Indonesia Eximbank's business activities in accordance with the provisions of laws and regulations and generally accepted practices.



Akuntabilitas Accountability

Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

A state of implementation of Indonesia Eximbank's business activities that can explain the functions of each party related to Indonesia Eximbank in accordance with the provisions of laws and regulations and generally accepted practices.



Tanggung Jawab Responsibility

Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.

A state of implementation of Indonesia Eximbank's business activities that can affirm and explain the role and status of each party related to Indonesia Eximbank for each policy making and implementation process at Indonesia Eximbank.



Kemandirian Independence

Suatu keadaan di mana LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

A state where Indonesia Eximbank is managed professionally that is free from conflicts of interest and/or influence or pressure from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations and generally accepted practices.



Kewajaran Fairness

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fairness and equality in fulfilling the rights of each party arising under the agreement and in accordance with the provisions of laws and regulations.

PENERAPAN GCG TAHUN 2022

Sesuai dengan PMK Nomor 208/PMK.06/2021, penerapan prinsip Tata Kelola yang baik LPEI diwujudkan dalam:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana;
2. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
3. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
4. penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian internal;
5. pengadaan barang dan jasa;

GCG IMPLEMENTATION IN 2022

In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021, the application of Indonesia Eximbank's Good Governance principles is manifested in:

1. implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Director, Managing Director;
2. completeness and implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board and committees and work units that carry out internal control functions;
3. implementation of compliance, internal audit, and external audit functions;
4. implementation of Risk Management including internal control system;
5. procurement of goods and services;

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

6. penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
7. transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan; dan
8. pelaporan internal dan benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2022, LPEI telah melaksanakan implementasi GCG sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *self-assessment* GCG LPEI posisi tahun 2021.
2. Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip tata kelola yang baik posisi tahun 2021 oleh PT Sinergi Daya Prima. Hasil penilaian tingkat kecukupan menunjukkan peningkatan penilaian menjadi sebesar 83,94% (Predikat “Baik”) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 83,75%;
3. Pemenuhan Pelaporan LHKPN 100% dimana LPEI menduduki peringkat ke 4 dari 19 Lembaga secara nasional.
4. Penyempurnaan Struktur Organisasi LPEI.
5. Pembentukan jabatan Head of Manajemen Risiko & Kredit LPEI.
6. Pengukuhan nilai-nilai Budaya LPEI yang baru yakni Agile, Profesionalisme, Integritas, dan Kreatif yang diformulasikan dalam sebuah kata “APIK”.
7. Penyusunan Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite Di Bawah Direktur Eksekutif.
8. Pengkinian Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI; Piagam Komite Renumerasi dan Nominasi LPEI; Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI; Piagam Komite Audit LPEI; dan Piagam Audit Internal LPEI.
9. Penyusunan Piagam Komite Penugasan Khusus LPEI.
10. Pengkinian Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LPEI.
11. Pengkinian peraturan internal tentang Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Lapori.
12. Pengkinian peraturan internal tentang pengendalian Gratifikasi LPEI.

6. preparation of long-term plans as well as annual work plans and budgets;
7. transparency of financial and non-financial conditions; and
8. internal reporting and conflicts of interest.

Throughout 2022, Indonesia Eximbank has conducted the following GCG implementations:

1. Indonesia Eximbank GCG self-assessment as of 2021.
2. Independent assessment of good governance principles as of 2021 by PT Sinergi Daya Prima. The results of the adequacy level assessment showed an increase in the rating to 83.94% (Predicate “Good”) compared to the previous year’s 83.75%;
3. Fulfillment of 100% LHKPN Reporting where Indonesia Eximbank ranks 4th out of 19 institutions nationally.
4. Completion of the Organizational Structure.
5. Formation of the position of Head of Risk & Credit Management.
6. Reaffirmation of the new Corporate Culture, Agile, Professionalism, Integrity and Creative which are formulated in the word “APIK”.
7. Preparation of Standard Operational Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director.
8. Update of the Charters of Sharia Supervisory Board; Indonesia Eximbank Remuneration and Nomination Committee Charter; Risk Monitoring Committee Charter; Audit Committee Charter; and Internal Audit Charter.
9. Preparation of the National Interest Account Committee Charter
10. Update of Code of Ethics and Code of Conduct for Employees.
11. The update of internal regulations regarding the Mandatory Reporting Obligation of State Administration Wealth Reports (LHKPN) for Officials.
12. Update of internal regulations regarding Gratification control.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

13. Pengkinian peraturan internal tentang Pengadaan Barang/Jasa LPEI. 14. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif 15. Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI. 16. Pelatihan New Hire Orientation (NHO), dan Pelatihan Relationship Manager Development Program (RMDP). 17. Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dengan pembicara langsung dari KPK. 18. Pelatihan <i>Computer Based Training</i> (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI. 19. Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI 20. Keikutsertaan dalam e-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan. 21. Pelaksanaan survey WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI. 22. Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi Online (GOL) KPK. 23. Penyampaian dan pemenuhan rencana dan realisasi kerja atas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2022 kepada KPK. 24. Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/ Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah. 25. Sosialisasi melalui email blast, flyer, dan screensaver terkait larangan praktik Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI. 26. Persiapan pencatatan Unit Usaha Syariah berdasarkan POJK, dilengkapi dengan audiensi dengan OJK Bagian Pengawas Syariah. 27. Focus Group Discussion beserta sosialisasi PMK 208/2021 antara LPEI, BPKP, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJKN.	13. Update of internal regulations regarding the Procurement of Goods/Services. 14. Submission of Compliance Function Implementation and AML-CFT Reports to the Board of Directors and Executive Directors 15. Dissemination of Good Corporate Governance by independent consultants to all employees. 16. New Hire Orientation (NHO) Training, and Relationship Manager Development Program (RMDP) Training. 17. Training on Procedures for Filling in LHKPN with speakers directly from the KPK. 18. Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Institutional Work Culture for all employees. 19. Continuous dissemination regarding WBS and Gratification to all employees 20. Participation in e-learning on Increased Understanding of Gratification from KPK by all employees of the Compliance Work Unit. 21. Implementation of WBS and Gratification surveys for all Indonesia Eximbank Management and employees. 22. Implementation and submission of gratification reports to the KPK through the KPK Online Gratification reporting system (GOL). 23. Submission and fulfillment of work plans and realization of the 2022 Gratification Control Program (PPG) to the KPK. 24. Dissemination of circulars to Employees, Partners/ Partners, and Customers/Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving, and giving gratuities to/from Employees as well as to Partners, Goods/ Services Providers (Vendors), Partners, and Customers. 25. Dissemination via email blasts, flyers, and screensavers regarding the prohibition of Gratuity practices to all employees. 26. Preparation for recording of Sharia Business Units based on the POJK, supplemented by an audience with the OJK Sharia Supervisory Section. 27. Focus Group Discussion along with dissemination of PMK 208/2021 between Indonesia Eximbank, BPKP, and the Ministry of Finance represented by DJKN.

Fokus dan Penerapan GCG di tahun 2023

Pelaksanaan GCG LPEI pada tahun 2022 akan difokuskan pada penyempurnaan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) dan Proses Tata Kelola (*Governance Process*).

Penyempurnaan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) dari sisi infrastruktur peraturan internal akan dilakukan dengan penyederhanaan dan harmonisasi seluruh peraturan internal LPEI, serta pembentukan Peraturan Penyusunan Peraturan (Kebijakan, Standar Pedoman Operasional dan Petunjuk Teknis) sebagai payung peraturan dan pedoman pembentukan aturan internal. Selain itu Penyempurnaan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) tentunya juga akan dilakukan terhadap penyempurnaan struktur organisasi yang lebih efektif sesuai kebutuhan lembaga serta pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk penyempurnaan Proses Tata Kelola (*Governance Process*) akan dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi masing-masing organ dan unit kerja lembaga khususnya Unit-unit dibidang pengendalian internal (*Risk, Compliance, dan Audit Internal*). Selain itu perbaikan penyempurnaan Proses Tata Kelola (*Governance Process*) juga akan difokuskan dengan melakukan perbaikan data dan *reporting* yang tentunya perlu ditunjang oleh sistem informasi yang memadai.

Focus and Implementation of GCG in 2023

GCG implementation in 2022 will be focused on improving the Governance Structure and Governance Process.

The improvement of the Governance Structure in terms of internal regulatory infrastructure will be done by simplifying and harmonizing all internal regulations, as well as establishing Regulations (Policies, Standard Operating Guidelines and Technical Guidelines) as the umbrella regulations and guidelines for the formation of internal regulations. In addition, improvements to the Governance Structure will certainly be carried out to improve the organizational structure that is more effective according to the needs of the institution as well as the fulfillment of Human Resources (HR).

The improvement of the Governance Process will be done by optimizing the implementation of the functions of each organ and work unit of the institution, especially the units in the field of internal control (*Risk, Compliance, and Internal Audit*). In addition, improvements to the Governance Process will also be focused on improving data and reporting, which would certainly need to be supported by an adequate information system.

GCG ROADMAP

Tahun Year	Kegiatan Activities
2009	- Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. - Penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang: Pembinaan dan Pengawasan; Prinsip Tata Kelola; Manajemen Risiko; dan Prinsip Mengenal Nasabah di LPEI. - Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI - Establishment of the Indonesia Eximbank through Law Number 2 of 2009. - Stipulation of Regulation of the Minister of Finance concerning: Guidance and Supervision; Governance Principles; Risk management; and Know Your Customer Principles at Indonesia Eximbank. - Issuance of Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures for the Proposal, Appointment, and Dismissal of the Indonesia Eximbank Managing Director
2010	- Terbitnya regulasi tentang Kebijakan Akuntansi LPEI - Ditetapkannya regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDD) - Issuance of regulations concerning the Indonesia Eximbank Accounting Policies - Stipulation of internal regulations regarding the Work Guidelines for the Board of Directors and Executive Directors (PDD)

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Tahun Year	Kegiatan Activities
2011	- Pengembangan regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif - Penetapan tentang SOP Pengadaan Barang / Jasa LPEI - Development of internal regulations regarding the Work Guidelines for the Board of Directors and Executive Directors - Determination of Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement SOP
2012	- Diterbitkannya peraturan internal mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) LPEI - Evaluasi terhadap implementasi Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan - Pelaksanaan Pelaporan Keuangan LPEI yang telah distandardisasi. - Issuance of internal regulations regarding the Whistleblowing System - Evaluation of the implementation of the Procedure for Submission of Suspicious Financial Transaction Reports and Cash Financial Transaction Reports for Financial Service Providers - Implementation of standardized Financial Reporting.
2013	- Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI sesuai dengan regulasi, dan ditetapkan pedoman internal penyusunan LHKPN - Penyempurnaan Peraturan Internal tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI - Compilation of State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials in accordance with regulations, and the establishment of internal guidelines for the preparation of LHKPN - Improvement of the Internal Regulations concerning Procedures for the Proposal, Appointment, and Dismissal of the Managing Director
2014	- Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI - Implementasi Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI - Ditetapkannya Ketentuan Internal Perihal Penilaian Efektifitas Sistem Pengendalian Internal LPEI - Completion of Provisions and Implementation Procedures on the Division of Duties and Authorities of Reporting Obligations to External Parties - Implementation of Internal Control Verification of Troubled Financing Audit - Stipulation of Internal Provisions Regarding Assessment of the Effectiveness of the Internal Control System
2015	- Review Kebijakan Regulator (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Perihal Pembinaan dan Pengawasan LPEI - Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI - Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI berdasarkan Surat Himbauan dari KPK. - Regulatory Policy Review (Financial Services Authority Regulations) Regarding Indonesia Eximbank Guidance and Supervision - Indonesia Eximbank Employee Training and Development Program - Gratuity Control within the Indonesia Eximbank Environment based on an Appeal Letter from the KPK.
2016	- Penetapan Regulasi Internal Perihal Disiplin Pegawai LPEI - Penyempurnaan tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan - Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara - Sosialisasi teknis Penyampaian Dan Pengelolaan LHKPN - Stipulation of Internal Regulations Regarding Discipline for Indonesia Eximbank Employees - Improvements on Procedures for Registration, Announcement, and - Examination of State Administrators' Assets - Technical socialization of LHKPN Submission and Management
2017	- Penyempurnaan regulasi Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI - Pengisian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. - Ditetapkannya regulasi mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan - Refinement of regulations on the Obligation to Submit LHKPN for Indonesia Eximbank Officials - Completion of internal regulations regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs (APU & PPT) of Indonesia Eximbank. - Stipulation of regulations regarding the Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements

Tahun Year	Kegiatan Activities
2018	• Diterbitkannya peraturan internal mengenai <i>Know Your Employee</i> di LPEI • Ditetapkannya Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI • Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Manajemen Risiko LPEI; Komite Pengembangan Produk LPEI; Komite Personalia LPEI • Penyempurnaan Manual Operasional Pengadaan Barang / Jasa LPEI • Penyempurnaan Regulasi Internal perihal Disiplin Pegawai LPEI • Implementasi Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pegawai LPEI • Issuance of internal regulations regarding Know Your Employee at Indonesia Eximbank • Stipulation of Limit of Authority for Approval for Use of Indonesia Eximbank Budget • Improvement of regulations regarding the Risk Management Committee; Product Development Committee; Personnel Committee • Improvement of the Goods/Services Procurement Operational Manual • Improvement of Internal Regulations regarding Employee Discipline • Implementation of the Risk Management Certification Program for Employees
2019	• Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI; Komite Teknologi Sistem Informasi; Komite Asset dan Liability LPEI; Komite Kebijakan Bisnis LPEI; & Komite Manajemen Risiko LPEI • Penyempurnaan peraturan internal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI • Sosialisasi dari Unsur <i>Top Management (Tone of The Top)</i> dengan tema Budaya Kerja; Kode Etik dan Anti Gratifikasi • Pengisian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI • Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI • Ditetapkannya Peraturan <i>Internal mengenai Strategi Anti-Fraud</i> LPEI • Melanjutkan Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh Pegawai di LPEI • Diterbitkannya Piagam Audit Internal dan <i>Updating</i> peraturan internal mengenai Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI • Diterbitkannya Piagam Kepatuhan mengenai penerapan Fungsi Kepatuhan di LPEI • Completion of regulations regarding the Financing Committee; Export Special Assignment Financing Committee; Information System Technology Committee; Asset and Liability Committee; Business Policy Committee; & Risk Management Committee • Improvement of the internal regulations for Gratification Control within the Indonesia Eximbank • Socialization of Top Management Elements (Tone of The Top) with the theme of Work Culture; Code of Ethics and Anti-Gratification • Completion of internal regulations regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs (APU & PPT) • Completion of Provisions and Implementation Procedures on the Division of Duties and Authorities of Reporting Obligations to External Parties • Stipulation of Internal Regulations regarding Anti-Fraud Strategy • Continuing the Risk Management certification program for all Employees at Indonesia Eximbank • Issuance of the Internal Audit Charter and Updating of internal regulations regarding the Implementation of the Internal Audit Function • Issuance of the Compliance Charter regarding the implementation of the Compliance Function at Indonesia Eximbank

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Tahun
Year

Kegiatan | Activities

- 2020**
- Penerbitan Peraturan Tata Tertib Kerja Dewan Direktur (*Board Manual*)
 - Penyempurnaan / Perubahan Peraturan mengenai proses bisnis diantaranya Komite Manual Produk Penugasan Khusus LPEI; Komite Assets & Liabilities Management LPEI; Manual Operasional Pembiayaan LPEI; *Standard Operating Procedure Credit File*; Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Khusus LPEI; Limit
 - Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI;
 - Perpanjangan Sementara Fasilitas Pembiayaan; Tata Cara Pelaksanaan AYDA; Addendum Perpanjangan Fasilitas Sementara *Global Line*; Pencairan Fasilitas Debitur; Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur terdampak COVID-19
 - Penerbitan Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Bisnis dan *Support*
 - Penyempurnaan Peraturan mengenai Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI
 - Penggunaan *New Employee Self Service System*
 - Perubahan susunan Dewan Direktur, dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur LPEI
 - Penerbitan Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
 - Penerapan dan penyempurnaan *Digital Signature*
 - Implementasi POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
 - Implementasi PMK Nomor 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI
 - Sosialisasi mengenai Tata Kelola Pembiayaan kepada seluruh pegawai Unit Bisnis dan *Support* di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah
 - Penyempurnaan Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI
 - Penerbitan Kebijakan Kegiatan Ekspor, Penunjang Ekspor dan Kegiatan Lain terkait Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
 - Penerbitan Manual Produk Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
 - Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI
 - Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus *Trade Finance* dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
 - Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus *Trade Finance* dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
 - Penerbitan Manual Produk Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
 - Penerbitan Peraturan Mengenai Penerapan *Know Your Employee* (KYE) LPEI.
 - Penerbitan Peraturan mengenai Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran LPEI
 - Penerbitan Keputusan Direktur Eksekutif Perihal Komite Etik dan Disiplin Pegawai
 - Pengembangan *Computer Based Training* (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga
 - Issuance of Work Rules for the Board of Directors (*Board Manual*)
 - Improvements/Changes to Regulations regarding business processes including the Special Assignment Product Manual Committee; Assets & Liabilities Management Committee; Financing Operational Manual; Standard Operating Procedures for Credit Files; Financing Committee; Special Financing Committee; Limit
 - Authority to Approve the Use of Budget;
 - Temporary Extension of Financing Facilities; AYDA Implementation Procedures; Global Line Temporary Facility Extension Addendum; Disbursement of Debtor Facilities; Follow-up on the Management of Debtors Affected by COVID-19
 - Issuance of Policies and Procedures regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs and socialization to all Business and Support Units
 - Completion of Regulations regarding the Guidelines and Work Procedures of the Organization
 - Use of the New Employee Self Service System
 - Changes in the composition of the Board of Directors, with the dismissal and appointment of members of the Board of Directors
 - Issuance of Policy on Fund Management of the Ex-PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Partnership Program
 - Digital Signature implementation and enhancement
 - Implementation of POJK Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policies on the Impact of the Spread of COVID-19 for Non-Bank Financial Services Institutions
 - Implementation of PMK Number 58/PMK.06/2020 concerning Indonesia Eximbank Guidance and Supervision
 - Dissemination of Financing Governance to all Business and Support Unit employees at the Head Office and Regional Offices
 - Completion of the Indonesia Eximbank Sharia Supervisory Board Charter
 - Issuance of Policy on Export Activities, Export Support and Other Activities related to Government Guarantees for Corporate Business Actors in the Framework of Implementing the Indonesia Eximbank National Economic Recovery Program
 - Issuance of Government Credit Guarantee Product Manual for Corporate Business Actors in the Implementation of the National Economic Recovery Program

Tahun Year	Kegiatan Activities
	• Issuance of Special Assignment Product Manuals to Support the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector Indonesia Eximbank • Issuance of a Trade Finance Special Assignment Product Manual to Support National Economic Recovery • Issuance of a Trade Finance Special Assignment Product Manual to Support National Economic Recovery • Issuance of Government Investment Product Manual in the Context of National Economic Recovery • Issuance of Regulations Regarding the Implementation of Indonesia Eximbank's Know Your Employee (KYE). • Issuance of Regulations regarding Discipline Enforcement and Determination of Sanctions for Violations • Issuance of the Executive Director's Decision Regarding the Committee on Ethics and Employee Discipline • Development of Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Institutional Work Culture
2021	• Penyempurnaan peraturan tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI. • Penerbitan peraturan tentang Penyesuaian Organisasi LPEI. • Penetapan Anggota Komite Penjaminan Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan PEN. • Penerbitan manual Produk Program Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI. • Penerbitan manual produk terkait Program Kemitraan LPEI. • Pembentukan dan peresmian <i>Governance, Risk, Compliance (GRC) Champion</i> LPEI. • Penguatan sistem pengendalian internal dengan peluncuran <i>Whistleblowing System (WBS)</i> dan Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. • Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI bersama Itjen Kemenkeu dan Pusintek Kemenkeu. • Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dan Perubahan Peraturan KPK tentang LHKPN. • Pelatihan Computer Based Training (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI. • Penerbitan Standar Pedoman Operasional Penyusunan Peraturan Edisi 1. • Penetapan anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor. • Penetapan anggota Komite Pembiayaan <i>Supplier Chain Financing</i>. • Implementasi dan penunjukan <i>Person in Charge (PIC)</i> pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK. • Penunjukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online (GOL)</i> KPK • Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online (GOL)</i>. • Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh pihak eksternal. • Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI. • Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (<i>Vendor</i>), Mitra, dan Nasabah. • Sosialisasi melalui flyer terkait larangan praktek Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI • Pembentukan dan Peresmian <i>Special Purpose Vehicle (SPV)</i> LPEI. • Penerapan Manajemen Risiko melalui sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko dan sertifikasi kompetensi kerja pegawai LPEI. • Penerbitan peraturan tentang Komite Pengadaan LPEI. • Penerbitan Manual Operasional Teknologi Sistem Informasi LPEI. • Penetapan struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko LPEI. • Completion of regulations regarding the Organizational Guidelines and Work Procedures. • Publication of regulations regarding Organization Adjustments. • Determination of Guarantee Committee Members for Corporate Business Actors for the Implementation of PEN. • Publication of a manual for the Special Assignment Program Product in Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector of Indonesia Eximbank. • Publication of product manuals related to the Partnership Program. • Establishment and inauguration of the Indonesia Eximbank Governance, Risk, Compliance (GRC) Champion. • Strengthening the internal control system by launching a Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Ministry of Finance. • Ongoing dissemination regarding WBS and Gratification to all employees together with the Inspector General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance's Pusintek. • Training on Procedures for Filling in LHKPN and Amendment to KPK Regulations on LHKPN. • Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Institutional Work Culture for all employees. • Publication of Standard Operational Guidelines for Regulatory Preparation Edition 1. • Appointment of members of the Financing Committee for the Special Export Assignment Program in the Framework of Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Tahun
Year

Kegiatan | Activities

- Appointment of members of the Supplier Chain Financing Committee.
- Implementation and appointment of Person in Charge (PIC) on the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK).
- Appointment of the Gratification Control Unit (UPG) for the KPK's Online Gratification Reporting System (GOL)
- Implementation and submission of gratification reports to the KPK through the Online Gratification reporting system (GOL).
- Implementation of an independent assessment of the principles of good governance by external parties.
- Dissemination of Good Corporate Governance by independent consultants to all employees.
- Dissemination of Circular Letters to Employees, Partners/Partners, and Customers/Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from Employees as well as to Partners, Goods/Services Providers (Vendors), Partners, and Customers.
- Socialization through flyers regarding the prohibition of gratification practices to all employees
- Establishment and Inauguration of the Special Purpose Vehicle (SPV).
- Implementation of Risk Management through Risk Management competency certification and employee competency certification.
- Issuance of regulations regarding the Procurement Committee.
- Issuance of the Information System Technology Operational Manual.
- Determination of the structure and membership of the Risk Management Committee.

2022

- Pelaksanaan *self-assessment* GCG LPEI posisi tahun 2021.
- Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh pihak eksternal.
- Pemenuhan Pelaporan LHKPN.
- Penyempurnaan Struktur Organisasi LPEI.
- Pembentukan jabatan Head of Manajemen Risiko & Kredit LPEI.
- Pengukuhan nilai-nilai Budaya LPEI yang baru yakni Agile, Profesionalisme, Integritas, dan Kreatif yang diformulasikan dalam sebuah kata "APIK".
- Penyusunan Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite Di Bawah Direktur Eksekutif.
- Pengkinian Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI, Piagam Komite Renumerasi dan Nominasi LPEI, Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI, Piagam Komite Audit LPEI, dan Piagam Audit Internal LPEI.
- Penyusunan Piagam Komite Penugasan Khusus LPEI
- Pengkinian Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LPEI.
- Pengkinian peraturan internal tentang Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Lapo.
- Pengkinian peraturan internal tentang pengendalian Gratifikasi LPEI.
- Pengkinian peraturan internal tentang Pengadaan Barang/Jasa LPEI.
- Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT semester I 2022.
- Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI.
- Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dengan pembicara langsung dari KPK.
- Pelatihan *Computer Based Training* (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI.
- Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI, termasuk sosialisasi larangan praktik Gratifikasi melalui *email blast*, *flyer*, dan *screensaver* kepada seluruh pegawai LPEI.
- Keikutsertaan dalam *e-learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan.
- Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi Online (GOL) KPK.
- Penyampaian pemenuhan rencana kerja dan realisasi atas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2022 kepada KPK.
- Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah.
- Persiapan pencatatan Unit Usaha Syariah berdasarkan POJK, dilengkapi dengan audiensi dengan OJK Bagian Pengawas Syariah.
- *Focus Group Discussion* beserta sosialisasi PMK 208/2021 antara LPEI, BPKP, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJKN.
- Penyusunan roadmap dan framework Governance, Risk dan Compliance (GRC) LPEI.
- Pelaksanaan Webinar: Cara APIK Melawan Fraud dan Anti Money Laundering, dengan Pembicara dari PPATK dan Transparansi Internasional Indonesia.

Tahun
Year

Kegiatan | Activities

- The implementation of GCG self-assessment of Indonesia Eximbank's position in 2021.
- Implementation of independent assessment of good governance principles by external parties.
- Fulfillment of LHKPN Reporting.
- Improvement of Indonesia Eximbank's organizational structure.
- Establishment of Head of Risk & Credit Management of Indonesia Eximbank.
- Strengthening the new Indonesia Eximbank Cultural values of Agile, Professionalism, Integrity, and Creative formulated in a word "APIK".
- Preparation of standard operational guidelines of nine committees under the Executive Director.
- Updating the Charter of the Sharia Supervisory Board of LPEI, the Charter of the Remuneration and Nomination Committee of Indonesia Eximbank, the Charter of the Risk Monitoring Committee of Indonesia Eximbank, the Charter of the Audit Committee of Indonesia Eximbank, and the Charter of Internal Audit of Indonesia Eximbank.
- Drafting of the Special Assignment Committee Charter of Indonesia Eximbank.
- Update of Indonesia Eximbank Employee Code of Ethics and Code of Conduct.
- Updating internal regulations on the Obligation of State Administration Property Report (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials Must Report.
- Updating internal regulations on Indonesia Eximbank Gratification control.
- Update of internal regulations on Procurement of Goods/Services of Indonesia Eximbank.
- Submission of the Report on the Implementation of the Compliance Function and AML-CFT in the first semester of 2022.
- Socialization of Good Corporate Governance by independent consultants to all Indonesia Eximbank employees.
- Training on LHKPN Filling Procedures with direct speakers from the KPK.
- Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Work Culture of the Institution to all LPEI employees.
- Continuous socialization related to WBS and Gratification to all Indonesia Eximbank employees, including socialization of the prohibition of Gratification practices through email blasts, flyers, and screensavers to all Indonesia Eximbank employees.
- Participation in e-learning Increasing Gratification Understanding from the KPK by all employees of the Compliance Unit.
- Implementation and submission of gratification reports to the KPK through the KPK's Online Gratification reporting system (GOL).
- Submission of the fulfillment of the work plan and realization of the 2022 Indonesia Eximbank Gratification Control Program (PPG) to the KPK.
- Dissemination of Circular Letter to Indonesia Eximbank Employees, Partners/Partners, and Customers/Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from Indonesia Eximbank Employees as well as to Partners, Goods/Services Providers (Vendors), Partners, and Customers.
- Preparation for the recording of Sharia Business Units based on POJK, complemented by hearings with the OJK Sharia Supervisory Section.
- Focus Group Discussion along with socialization of PMK 208/2021 between Indonesia Eximbank, BPKP, and the Ministry of Finance represented by DJKN.
- Preparation of Indonesia Eximbank's Governance, Risk and Compliance (GRC) roadmap and framework.
- Webinar: How APIK Fights Fraud and Anti Money Laundering, with Speakers from PPATK and Transparency International Indonesia.

SISTEM TATA KELOLA

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009, sistem Tata kelola LPEI adalah "One Board System", di mana Dewan Direktur merupakan organ tunggal organisasi. Dewan Direktur sebagai organ tunggal perusahaan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

GOVERNANCE SYSTEM

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009, The Governance System of Indonesia Eximbank is a "One Board System", where the Board of Directors acts the organization's sole organ. The Board of Directors as the sole organ whose principal duties and function are to formulate, set the policies, and carries out oversight on the Company's operations.

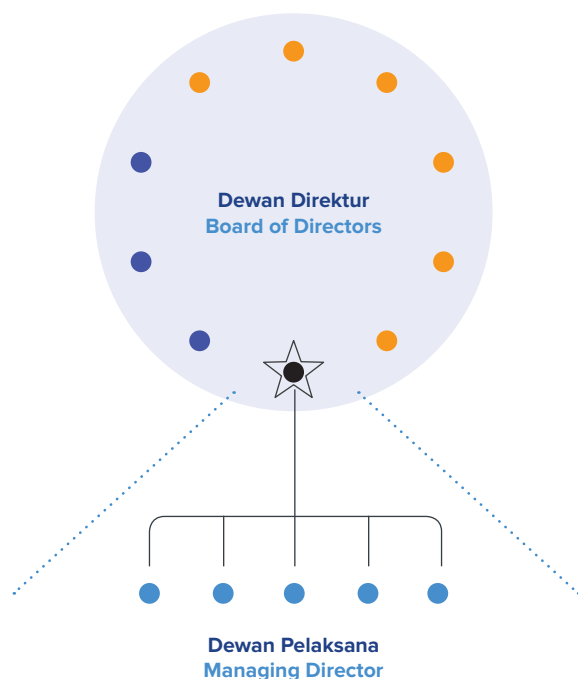


STRUKTUR DAN ARSITEKTUR GCG

GCG STRUCTURE AND ARCHITECTURE

Struktur GCG

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 di dalam sistem tata kelola atau *governance* LPEI adalah *"One Board System"*, dimana Dewan Direktur merupakan organ tunggal organisasi. Dewan Direktur sebagai organ tunggal mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI, dengan uraian sebagai berikut:



Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, komposisi Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari:

- 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal.
- 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan.
- 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian.
- 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.

GCG structure

According to the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2009, the Indonesia Eximbank governance system is a *"One Board System,"* with the Board of Directors serving as the organization's sole organ. As the sole organ, the Board of Directors is responsible for formulating, establishing policies, and supervising Indonesia Eximbank's operational activities, with the following explanation:

- **Ex Officio**
 - Fiskal (3 orang) | Fiscal (3 persons)
 - Perdagangan (1 orang) | Trade (1 person)
 - Perindustrian (1 orang) | Industry (1 person)
 - Pertanian (1 orang) | Agriculture (1 person)
- **Independen | Independent**
 - Berasal dari luar LPEI paling banyak 3 Orang dan 1 orang dari dalam LPEI | Comes from outside the Indonesia Eximbank at most 3 people and 1 person from inside the Indonesia Eximbank
- ★ **Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently
Executive Director**
- **Managing Director / Direktur Pelaksana yang terdiri dari para profesional dan membantu Direktur Eksekutif**
Managing Director consists of professionals and assists the Executive Director

Referring to the provisions above, the composition of the Board of Directors is no more than 10 (ten) people, consisting of:

- 3 (three) government officials from the institution or department in charge of fiscal.
- 1 (one) government officials from the institution or department in charge of trade.
- 1 (one) government officials from the institution or department in charge of industry.
- 1 (one) government officials from the institution or department in charge of agriculture.

STRUKTUR DAN ARSITEKTUR GCG
GCG STRUCTURE AND ARCHITECTURE

- e. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana dimana paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul dari Direktur Eksekutif.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Direktur membentuk paling kurang komite-komite, antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Masing-masing Komite bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewajibannya yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Eksekutif (KDE).

Arsitektur GCG

Arsitektur penyusunan kebijakan dan prosedur berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan mengamanatkan adanya Kebijakan dan Prosedur tertulis, sebagaimana skema berikut:



- e. A maximum of 3 (three) persons from external Indonesia Eximbank and 1 (one) person from within the Indonesia Eximbank.

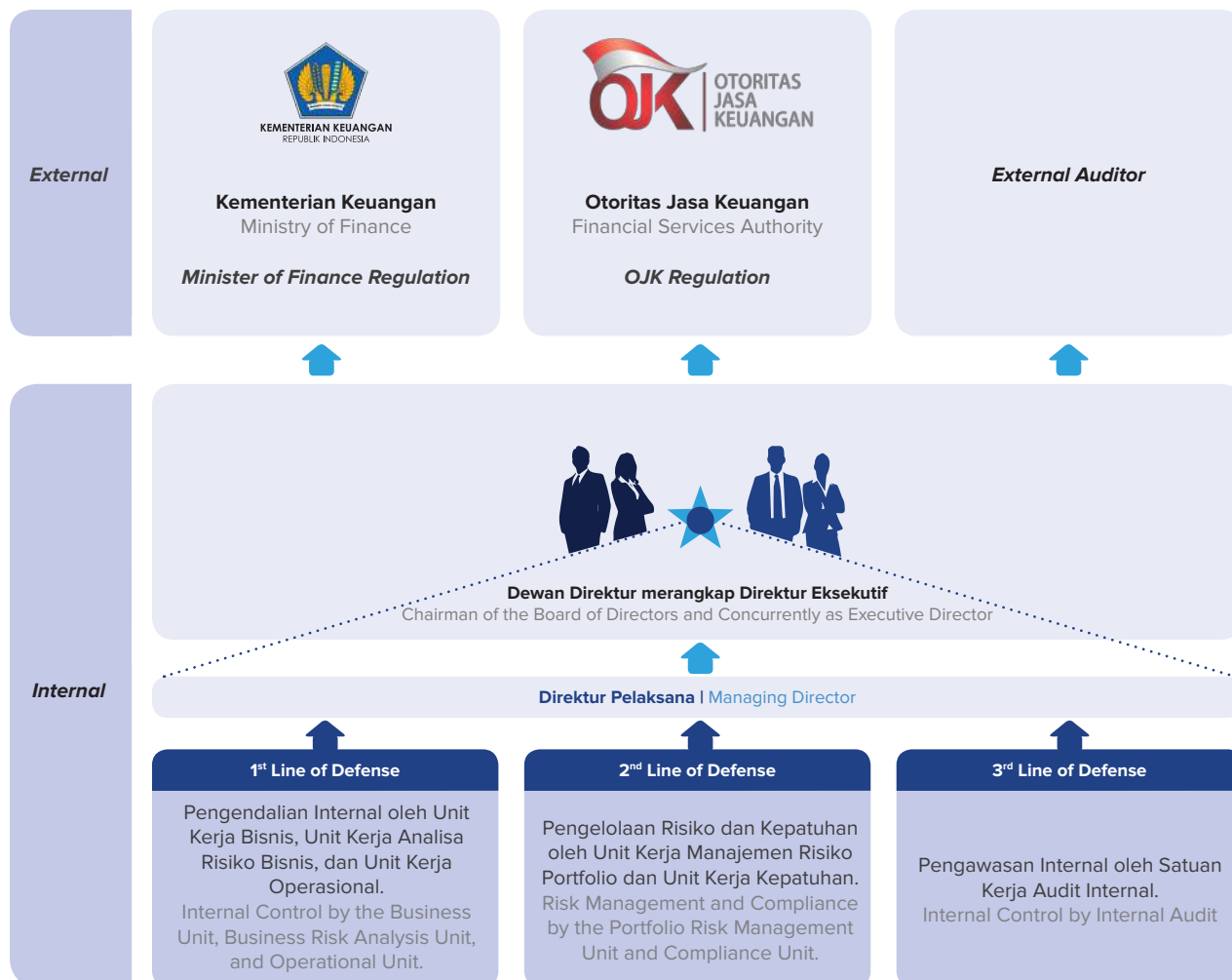
The Minister appoints one of the Board of Directors members to serve as Chairman of the Board of Directors and Executive Director. The Executive Director is assisted in carrying out its duties by a maximum of 5 (five) Managing Directors, with a maximum of 4 (four) people coming from within the Indonesia Eximbank. The Board of Directors appoints and dismisses the Managing Director based on the Executive Director's recommendation.

The Board of Directors establishes at least the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee to support the effectiveness of carrying out these duties and responsibilities. Each Committee operates within the scope of duties and responsibilities established by the Executive Director's Decision (KDE).

GCG Architecture

The Company's policy development and procedures that are based on the principles of GCG are mandated through the following written schemes:

STRUKTUR DAN ARSITEKTUR GCG GCG STRUCTURE AND ARCHITECTURE



KERANGKA TATA KELOLA (STRUKTUR, PROSES, DAN HASIL TATA KELOLA)

GCG FRAMEWORK (GOVERNANCE STRUCTURE, PROCESS, AND OUTCOME)



LPEI menjalankan komitmen implementasi Tata Kelola (*governance commitment*) yang diwujudkan dengan komitmen Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, beserta seluruh unit kerja LPEI untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola LPEI. Efektivitas implementasi GCG dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek governance system yaitu Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome.

Indonesia Eximbank follows through on its governance commitment, which is realized by the Board of Directors, Executive Directors, Managing Directors, and all Indonesia Eximbank work units' commitment to implement and enforce Indonesia Eximbank Governance. The alignment of three (three) governance system aspects, namely Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome, demonstrates the effectiveness of GCG implementation.

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Governance Structure yaitu terkait dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Lembaga. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, Komite-Komite, dan Satuan Kerja. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

1. Governance Structure

Governance Structure is related to the adequacy of the Corporate Governance Structure and Infrastructure, so that the process of implementing Good Governance Principles produces outcomes that meet the expectations of the Institution's Stakeholders. The governance organs are organized into the Board of Directors, Executive Directors, Managing Directors, Committees, and Work Units. Meanwhile, policies and procedures, management information systems, and the primary tasks and functions of each organizational structure are all part of the Governance infrastructure.

2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Governance Process merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

LPEI senantiasa memastikan proses tata kelola dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* yang memenuhi prinsip Tata Kelola.

2. Governance Process

Governance Process is the effectiveness of the process of implementing good governance principles, which is supported by the adequacy of Corporate Governance structure and infrastructure to produce outcomes that meet the expectations of all stakeholders. Indonesia Eximbank always ensures that the governance process is carried out using structured and systematic procedures and mechanisms to produce outcomes that meet the Governance principles.

3. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Governance Outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dicapai melalui proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola.

3. Governance Outcome

Governance outcomes that meet stakeholder expectations are achieved through the process of implementing Good Governance principles, which is supported by adequate Governance structures

KERANGKA TATA KELOLA (STRUKTUR, PROSES, DAN HASIL TATA KELOLA)
GCG FRAMEWORK (GOVERNANCE STRUCTURE, PROCESS, AND OUTCOME)

Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure*. Adanya permasalahan pada *Governance Structure* menimbulkan kelemahan pada *Governance Process*. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance Process* berdampak pada *Governance Outcome*.

and infrastructure. Thus, the Governance Outcome is the end result of putting the Governance Process into action and receiving adequate support from the Governance Structure. The presence of flaws in the Governance Structure leads to flaws in the Governance Process. On the other hand, the presence of flaws in the Governance Process affects the Governance Outcome.



PENILAIAN GCG
GCG ASSESSMENT

Program penilaian tata kelola yang baik dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.06/2021. Dalam rangka untuk mengidentifikasi pelaksanaan tata kelola yang baik di LPEI, dilakukan penilaian atas penerapan tata kelola yang baik secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pihak independen. Penilaian GCG di tahun 2023 atas implementasi sepanjang tahun 2022 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun hasil penilaian atas penerapan prinsip tata kelola yang baik pada tahun 2022, sampai dengan laporan tahunan ini dikeluarkan, masih dalam proses penilaian akhir oleh BPKP.

Laporan hasil penilaian GCG LPEI dapat diakses di website LPEI www.indonesiaeximbank.go.id

The good governance assessment is conducted according to Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021. To determine the level of good governance being practiced at Indonesia Eximbank, an independent party conducts periodic assessments annually. The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) is conducting the GCG assessment in 2023 based on the 2022 implementation. The results of the assessment for the implementation of good governance principles in 2022, up until the issuance of this annual report, are still under review by BPKP.

Indonesia Eximbank's GCG assessment report can be accessed on the Institution's website www.indonesiaeximbank.go.id





RAPAT PENGESAHAN

RATIFICATION MEETINGS

LPEI dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. LPEI wajib menyusun RJP dan RKAT setiap tahun untuk mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui mekanisme Rapat Pengesahan (Fungsi RUPS). Selain untuk memberikan persetujuan atas RKAT LPEI, Rapat Pengesahan juga dilakukan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan atas kinerja LPEI di tahun berjalan.

Landasan Hukum dan Tahapan Pelaksanaan

Rapat Pengesahan Berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan:

- Pasal 36: Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
- Pasal 37:
 - Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang sebagai rencana strategis yang memuat sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan.
 - Direktur Eksekutif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
 - Tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.”

Hak-hak Pemegang Saham

LPEI tidak terbagi atas saham dan 100% milik Pemerintah.

Kesetaraan Perlakuan terhadap Pemegang Saham

LPEI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Indonesia Eximbank is wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia and responsible to the Minister of Finance. Indonesia Eximbank is required to prepare Corporate Plan and Annual Work Plan & Budget every year to obtain approval from the Minister of Finance through the mechanism of the Ratification Meeting (GMS Function). In addition to giving approval to Annual Work Plan & Budget, an Endorsement Meeting was also held to obtain approval from the Minister of Finance for the Institution's performance in the current year.

Legal References and Stages of the Ratification Meetings

Pursuant to Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesia Eximbank's Fourth Part Work Plan and Annual Budget:

- Article 36: Indonesia Eximbank Fiscal Year and Financial Year begin from 1 January to 31 December Annual Work Plan and Budget.
- Article 37:
 - The Executive Director prepares a Long-Term Plan as a strategic plan that contains the objectives to be achieved by the Company within a 5 (five) year period.
 - The Executive Director prepares an Annual Work Plan and Budget as an annual translation of the Long-Term Plan.
 - The procedures for the preparation, submission, and amendment of the Long-Term Plan and Work Plan and Annual Budget are stipulated in a Ministerial Regulation.

Shareholders Rights

Indonesia Eximbank is wholly owned (100%) by the Government and is not divided into shares.

Equality in Treatment of the Shareholders

Indonesia Eximbank is 100% Government ownership and not divided into shares.

RAPAT PENGESAHAN)
RATIFICATION MEETINGS**Pelaksanaan Rapat Pengesahan Tahun 2022**

Laporan Rapat Pengesahan LPEI telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat No. S-53/MK.06/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kontrak Manajemen, dan Program Kemitraan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Ratification Meetings in 2022

Indonesia Eximbank Ratification Meeting Report has been approved by the Minister of Finance through letter No. S-53/MK.06/2022 dated January 3, 2022 concerning the Ratification of Annual Work Plan and Budget, Management Contract, and Partnership Program of Indonesia Eximbank, which includes the following:

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan**Ratification Meetings Resolutions**

No	Hasil Keputusan Rapat Pengesahan Ratification Meeting Resolutions
1	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Kontrak Manajemen, dan Program Kemitraan LPEI Tahun 2022. Ratifying the Indonesia Eximbank Annual Work Plan and Budget (RKAT), Management Contract, and Partnership Program for 2022.
2	Hal-hal yang perlu mendapat perhatian: a. Menjadikan RKAT sebagai pedoman dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan LPEI dengan tetap melaksanakan disiplin anggaran serta memperhatikan pelaksanaan mandat berdasarkan UU No.2/2009 dan PP No.43/2019 b. RKAT tahun 2022 dicapai dengan langkah yang optimis, inovatif, prudent, hati-hati, itikad baik, kewajaran dan penuh tanggung jawab, dalam rangka mencapai target dan tujuan LPEI. c. Efisiensi belanja modal, beban administrasi dan umum serta beban tenaga kerja agar terus dijaga. d. Prioritas program kerja meliputi: penguatan pelaksanaan mandat, selektif dan optimal dalam pembiayaan baru, membangun internal komunikasi yang kuat, optimalisasi program Penugasan Khusus Ekspor, penguatan peran Jasa Konsultasi secara prudent, bersinergi dengan Special Mission Vehicle, optimalisasi penyaluran Program Kemitraan, menyalurkan pembiayaan pada ekspor produk jasa. e. Antisipasi potensi NPL dari Penugasan Khusus Ekspor. f. Memastikan pengelolaan LPEI sebaik-baiknya. Issues Requiring Attention: a. Making the RKAT a guideline in carrying out the management and supervision of Indonesia Eximbank while still implementing budget discipline and paying attention to the implementation of the mandate based on Law No. 2 of 2009 and PP No. 43 of 2019 b. The RKAT in 2022 was achieved with optimistic, innovative, prudent, careful, good faith, fairness and sense of responsibility, in order to achieve Indonesia Eximbank's targets and objectives. c. Efficiency of capital expenditure, administrative and general expenses as well as labor expenses to be maintained. d. Work program priorities include: strengthening mandate implementation, selective and optimal in new financing, building strong internal communication, optimizing the Export National Interest Account program, strengthening the role of Advisory Services prudently, synergizing with Special Mission Vehicles, optimizing the distribution of Partnership Programs, disbursing financing to export service products. e. Anticipate potential NPLs from Export National Interest Accounts. f. Ensure the best management of Indonesia Eximbank.
Realisasi Realization Pelaksanaan poin-poin di atas telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat BS.0050/CEO/03/2023 The implementation of the above points has been conveyed to the Minister of Finance through letter BS.0050/CEO/03/2023	
Selesai Completed	

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan Tahun Buku Sebelumnya 2021

Seluruh keputusan Rapat Pengesahan Tahun Buku 2021 telah selesai dan telah direalisasikan.

Ratification Meetings Resolutions in the Previous Fiscal Year 2021

All resolutions from the fiscal year 2021 Ratification Meetings have been completed and fully realized.



DEWAN DIREKTUR BOARD OF DIRECTORS

Sesuai pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2009, Dewan Direktur (Fungsi Dewan Komisaris) merupakan organ dalam LPEI. Dewan Direktur memiliki tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

DASAR HUKUM

Pembentukan Dewan Direktur LPEI berdasarkan pada peraturan-peraturan berikut:

Peraturan Internal

PDD No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI (*Board Manual*).

Peraturan Eksternal

- UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022 Tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

KOMPOSISI DEWAN DIREKTUR

Sesuai ketentuan pasal 25 ayat (2) UU No. 2/2009, bahwa Anggota Dewan Direktur terdiri dari unsur:

- 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.

Pursuant to the article 26 paragraph (1) of the Law No. 2/2009, the Board of Directors (Board of Commissioners' Function) serves as the single organ of Indonesia Eximbank. The Board of Directors is in charge to formulate and stipulate the policy, as well as conduct oversight on Indonesia Eximbank operations activity.

LEGAL REFERENCES

The establishment of Indonesia Eximbank's Board of Directors refers to:

Internal Regulations

BOD Decree No. 0007/PDD/12/2020 on the Indonesia Eximbank Board of Directors Charter (*Board Manual*).

External Regulations

- Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank.
- Minister of Finance Regulation (PMK) No. 58/PMK.06/2020 concerning Guidance and Supervision of the Indonesia Eximbank.
- Finance Ministry of RI Regulation No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
- Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.05/2022 regarding Supervision of Indonesia Eximbank.

BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

Pursuant to the article 25 paragraph (2) Law No. 2/2009, Member of the Board of Directors consists of the following elements:

- 3 (three) officials from the institution or department in charge of fiscal, 1 (one) official from the institution or department in charge of commerce, 1 (one) official from the institution or department in charge of industry, and 1 (one) official from the institution or department in charge of agriculture.

DEWAN DIREKTUR)
BOARD OF DIRECTORS

b. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

b. At the most 3 (three) members from the external Indonesia Eximbank and 1 (one) member from the internal Indonesia Eximbank.

Pada Tahun 2022, komposisi Dewan Direktur LPEI mengalami 1 (satu) kali perubahan.

In 2022, Indonesia Eximbank Board of Directors underwent 1 (one) change.

Komposisi Periode 1 Januari – 6 January 2022**Composition for the Period of 1 January – 6 January 2022**

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Apppointment
Daniel James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	KMK 933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 530/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 934/KMK.06/2019

Komposisi Periode 7 Januari – 31 Desember 2022**Composition for the Period of 7 January – 31 December 2022**

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Apppointment
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	KMK 552/KMK.06/2021
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 530/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 522/KMK.06/2018
Daniel James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	KMK 552/KMK.06/2021

KMK : Keputusan Menteri Keuangan | Decree of the Minister of Finance

DEWAN DIREKTUR)
BOARD OF DIRECTORS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sebagaimana tercantum pada PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur diatur sebagai berikut:

1. Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik.
2. Dewan Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
3. Dewan Direktur wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
4. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal LPEI, auditor ekstern, hasil pengawasan Menteri, dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR TAHUN 2022

- Dewan Direktur bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan serta melakukan pengawasan terhadap operasional LPEI. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan melalui pelaksanaan rapat Dewan Direktur yang diwajibkan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Rapat Dewan Direktur menjadi wadah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis manajemen di LPEI sekaligus memastikan ditindaklanjutinya hasil temuan audit.
- Adapun selama tahun 2022, Rapat Dewan Direktur telah diselenggarakan 30 kali atau secara rata-rata sekitar dua kali per bulan. Rapat Dewan Direktur diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

As stated in PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank, the Board of Directors duties and responsibilities are as follows:

1. The Board of Directors shall ensure the implementation of good governance principles.
2. The Board of Directors shall exercise oversight on the Executive Directors' duties and responsibilities implementation, and provide advisory to the Executive Director.
3. In carrying out its oversight duty, the Board of Directors shall direct, monitor and evaluate the implementation of basic and strategic policies.
4. The Board of Directors shall ensure the Executive Director has followed up on audit findings and recommendations from the internal audit unit, external auditor, results of the Minister's supervision, and/or results of certain supervision by other authorities.

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

- The Board of Directors is responsible for formulating and determining as well as supervising Indonesia Eximbank operations. One form of supervision is carried out through the Board of Directors meeting which is required at least once a month. The Board of Directors meeting serves as a forum for monitoring and evaluating strategic management policies at Indonesia Eximbank while ensuring that audit findings are followed up.
- In 2022, the Board of Directors Meeting has been held 30 times or an average of about two times per month. The meetings of the Board of Directors are held for the purpose of supervision and/or decision

DEWAN DIREKTUR)
BOARD OF DIRECTORS

pengawasan dan/atau pengambilan keputusan. Arahan dan keputusan Dewan Direktur didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Direktur.

Ada pun persentase kehadiran Dewan Direktur dalam Rapat Dewan Direktur tahun 2022 sebagai berikut:

- Rijani Tirtoso: 100%
- D. James Rompas: 97%
- Kasan: 97%
- Felia Salim: 100 %
- Suminto: 87 %
- Arus Gunawan: 93 %.

Pelaksanaan rapat dengan pencapaian lebih dari 75% bagi setiap anggota Dewan Direktur tersebut menunjukkan keseriusan Dewan Direktur dalam melakukan tugas pengawasan kepada LPEI.

- Komite dibawah Dewan Direktur melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, serta untuk membantu pelaksanaan pengawasan, Dewan Direktur membentuk tiga komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Masing-masing komite diketuai oleh anggota Dewan Direktur. Koordinasi dilakukan melalui rapat berkala.

Ada pun pelaksanaan Rapat Komite Dewan Direktur selama tahun 2022 sebagai berikut:

- Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 25 kali.
- Rapat Komite Audit sebanyak 24 kali.
- Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 8 kali.

Pelaksanaan rapat komite dilakukan secara efektif dan selalu dihadiri oleh ketua dan anggota komite.

Disamping hal tersebut, RUPS di LPEI berbentuk Rapat Pengesahan untuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang dilakukan setiap lima tahun sekali dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahunnya.

making. The instructions and decisions of the Board of Directors are documented in the Minutes of Meeting of the Board of Directors.

The percentage of attendance of the Board of Directors at the 2022 Board of Directors Meeting was as follows:

- Rijani Tirtoso: 100%
- D. James Rompas: 97%
- Kasan: 97%
- Felia Salim: 100%
- Suminto: 87 %
- Arus Gunawan: 93 %.

The meetings with the attendance of more than 75% for each member of the Board of Directors indicates the seriousness of the Board of Directors in carrying out its supervisory duties to the Company.

- Committees under the Board of Directors carry out their duties and responsibilities well, and to assist in the implementation of supervision, the Board of Directors has established three committees, the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee. Each committee is chaired by a member of the Board of Directors. Coordination is carried out through regular meetings.

The Board of Directors Committee Meeting during 2022 were as follows:

- Risk Monitoring Committee meeting 25 times.
- The Audit Committee Meeting 24 times.
- Remuneration and Nomination Committee Meeting 8 times

Committee meetings are carried out effectively and are always attended by the chairman and committee members.

In addition, the GMS at Indonesia Eximbank takes the form of a Ratification Meeting for the Long-Term Plan (RJP) which is held every five years and the Annual Work Plan and Budget (RKAT) every year.

DEWAN DIREKTUR)
BOARD OF DIRECTORS

PENGUNGKAPAN MENGENAI BOARD CHARTER

Pedoman tata kerja Dewan Direktur diatur dalam Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI yang merupakan Pengkinian atas Board Manual yang ditetapkan sebelumnya yaitu PDD Nomor 0016/PDD/12/2010. Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur dimaksud meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, etika dan waktu kerja, rapat Dewan Direktur, sekretariat komite-komite dan staf ahli Dewan Direktur, hubungan Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana serta tata kerja Direktur Eksekutif.

INDEPENDENSI DEWAN DIREKTUR

PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengatur bahwa Dewan Direktur wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Anggota Dewan Direktur wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Direktur lain. Sebagai implementasi penerapan hal-hal tersebut, anggota Dewan Direktur LPEI telah menandatangani surat pernyataan independensi dan pakta integritas yang didokumentasikan dengan baik oleh LPEI.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN DIREKTUR

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direktur telah membentuk komite-komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite dan Nominasi dan Remunerasi.

Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur.

DISCLOSURE OF BOARD CHARTER

The Board of Directors Charter is regulated in the Board of Directors Regulation (PDD) No. 007/PDD/12/2020 on Indonesia Eximbank Board of Directors Charter, which is an update on the previously established Board Manual, PDD No. 0016/PDD/12/2010. The Board of Directors Charter include duties, authorities and responsibilities, rights and obligations, ethics and working hours, meetings of the Board of Directors, secretariat of the committees and expert staff of the Board of Directors, the relationship between the Board of Directors and the Executive Director and the Managing Directors as well as the work ethics of the Directors.

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank stipulates that the Board of Directors shall carry out its duties and responsibilities independently. Members of the Board of Directors must disclose their share ownership in other companies, both domiciled at home and abroad, as well as financial relationships and family relationships of other members of the Board of Directors. As the implementation of these matters, members of the Company's Board of Directors have signed a statement of independence and an integrity pact which is well documented by the Company.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' COMMITTEES

In assisting effectiveness of its duties and responsibilities, the Board of Directors has established the committees, which are the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

The appointment of committee members is carried out by the Executive Director following the decision of the

DEWAN DIREKTUR)
BOARD OF DIRECTORS

Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Komite juga wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

Indikator yang digunakan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja komite-komite meliputi kontribusi komite serta pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Direktur. Berikut adalah penilaian seluruh komite pada tahun 2022.

Komite Audit

Komite Audit telah melakukan supervisi, memberikan konsultasi, dan kolaborasi dalam menanggapi tindak lanjut temuan auditor eksternal. Selain itu, Komite Audit telah memfasilitasi peningkatan kapabilitas dan kapasitas fungsi Internal audit dan meningkatkan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Rapat Komite Audit telah terlaksana sebanyak 24 kali.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap fungsi manajemen risiko untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang baik dan pengendalian risiko yang memadai. Memantau kecukupan kebijakan dan prosedur, terutama terhadap 2 risiko utama yakni risiko pembiayaan dan operasional, seperti monitoring proses kredit, risiko integritas data serta optimalisasi alokasi resources. Rapat Komite Pemantau Risiko telah terlaksana 25 kali.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi aktif mendukung penguatan organisasi termasuk di dalamnya perbaikan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM). Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah terlaksana 8 kali.

**PROGRAM PENGENALAN DEWAN
DIREKTUR BARU**

Tidak terdapat anggota baru pada jajaran Dewan Direktur pada periode tahun berjalan, sehingga program

Board of Directors' meeting. The Board of Directors shall ensure effective implementation of duties by the appointed committees. The committees shall also develop the committee charter.

The performance assessment to the committees is carried out by using indicators of contributions to the Board of Directors as well as the implementation of assigned duties. The following is the assessment of all committees in 2022.

Audit Committee

The Audit Committee has supervised, consulted, and collaborated in responding to the follow-up to the external auditors' findings. In addition, the Audit Committee has facilitated increased capability and capacity of the Internal audit function and increased cooperation with the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The Audit Committee meetings have been held 24 times.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee carried out oversight on risk management function to ensure the implementation of good governance and adequate risk control. Monitors the adequacy of policies and procedures, particularly on 2 main risks namely financing and operational risks, such as monitoring loan process, data integrity risk, including optimization of resources allocation. The Risk Monitoring Committee has held 25 meetings.

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee actively supports the organizational strengthening, including improvements to Human Resources (HR) policies. The Remuneration and Nomination Committee Meetings have been held 8 times.

**NEW BOARD OF DIRECTORS
INTRODUCTION PROGRAM**

There were no new members of the Board of Directors in the current year, thereby there were no induction

DEWAN DIREKTUR)
BOARD OF DIRECTORS

pengenalan tidak dilaksanakan pada tahun buku 2022.

PROGRAM PENGEMBANGAN DEWAN DIREKTUR

Rincian tentang program pengembangan Dewan Direktur disampaikan pada bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

LPEI merupakan lembaga keuangan khusus (*sui generis*) yang didirikan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI. UU LPEI tidak menggunakan terminologi komisaris independen. Anggota Dewan Direktur LPEI berasal dari unsur pejabat dari instansi atau lembaga dan unsur dari dalam atau dari luar LPEI.

Syarat minimal untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur LPEI sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2009 yaitu:

1. Warga negara Indonesia;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;
5. Tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;
6. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
7. Memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan
8. Tidak pernah dinyatakan pailit.

programs carried out for fiscal year 2022.

BOARD OF DIRECTORS DEVELOPMENT PROGRAM

Details of the Board of Directors’ development program are presented in the Company Profile section in this Annual Report.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Indonesia Eximbank is a special financial institution (*sui generis*) established based on Law No. 2 of 2009, which stipulates that the Board of Directors is the sole organ of the Company. The Law does not use the term independent commissioner. Members of the Company’s Board of Directors come from elements of executives from agencies or institutions and from internal and external of the Company.

The following are minimum requirements to be appointed as the Company’s Board of Directors as stipulated in Law No. 2 of 2009:

1. Indonesian citizen;
2. Able to carry out legal actions;
3. Physically and mentally healthy;
4. Has integrity, leadership, good behaviour, and high dedication;
5. Not included in the list of failures, either compiled by the banking authority or the capital market authority and financial institutions;
6. Never committed a criminal act in the banking and economic sector;
7. Having expertise and experience in one of the fields under the scope of the Company’s activities; and
8. Have never been declared bankrupt.

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS



Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana.

Mengacu pada pasal 25 ayat (5) UU No. 2/2009, Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), Direktur Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional dan mewakili LPEI baik di dalam, maupun di luar pengadilan.

DASAR HUKUM

Pembentukan Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana LPEI berdasarkan pada sejumlah regulasi, yaitu:

Peraturan Internal

- Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.
- PDE No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana.

Peraturan Eksternal

- Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022 Tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pursuant to Law No. 2 of 2009 regarding the Indonesia Eximbank, the Executive Director shall carry out Indonesia Eximbank's operational activity. In implementing its duties, the Executive Director is assisted by Managing Director.

Referring to Article 25 paragraph (5) of Law No. 2 of 2009, Indonesia Eximbank Executive Director is one of members of the Board of Directors determined by the Minister of Finance as Chairman of the Board of Directors concurrently as the Executive Director. Furthermore, in Article 29 paragraph (1) and Article 30 paragraph (1), the Executive Director carries out operational activities and represents Indonesia Eximbank both inside and outside the court.

LEGAL REFERENCES

The establishment of Indonesia Eximbank's Executive Director - Managing Directors refers to:

Internal Regulations

- Board of Directors Regulation (PDD) No. 0007/PDD/12/2020 concerning Indonesia Eximbank Board of Directors Charter.
- PDE No. 0041/PDE/11/2011 concerning Managing Director Charter.

External Regulations

- Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank.
- Minister of Finance Regulation (PMK) No. 58/PMK.06/2020 on Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank.
- Finance Ministry of RI Regulation No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
- Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.05/2022 regarding Supervision of Indonesia Eximbank.

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

KOMPOSISI DIREKTUR EKSEKUTIF –
DIREKTUR PELAKSANA

Berikut komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana per 31 Desember 2022:

EXECUTIVE DIRECTOR – MANAGING
DIRECTORS COMPOSITION

The following are the composition of Executive Directors - Managing Directors as of 31 December 2022:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of Duties
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	- Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan - Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis - Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan - Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit - Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional - Membidangi seluruh unit kerja di bawah <i>Head of Compliance</i>, HR & TO - Membidangi seluruh unit kerja di bawah <i>Head of Audit</i> - In charge of all work units under the Managing Director of Financing - In charge of all work units under the Managing Director for Business Development - In charge of all work units under the Managing Director for Institutional Relations - In charge of all work units under the Managing Director of Risk &; Credit Management - In charge of all work units under the Managing Director of Finance &; Operations - Responsible for all work units under the Head of Compliance, HR & TO - In charge of all work units under the Head of Audit
	Chairman of the Board of Directors Concurrently Executive Director	
	<i>Head of Compliance, HR & TO</i>	- Membidangi Unit Kerja Kepatuhan - Membidangi Unit Kerja <i>Transformation Office & Culture</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Human Resources Business Partner, Organization Development & Recruitment</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Human Resources Service & People Development</i> - In charge of the Compliance Unit - In charge of the Transformation Office & Culture Unit - In charge of the Human Resources Business Partner Unit, Organization Development & Recruitment - In charge of Human Resources Service & People Development Unit
	<i>Head of Audit</i>	- Membidangi Unit Kerja <i>Reguler Audit</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Special Audit</i> - Membidangi Unit Kerja <i>QA, Follow Up & Methodology</i> - In charge of the Audit Regular Unit - In charge of the Special Audit Unit - In charge of QA Unit, Follow Up & Methodology

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of Duties
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	- Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah <i>Head of Wilayah</i> - Membidangi Unit Kerja Bisnis Korporasi I - Membidangi Unit Kerja Bisnis Korporasi II - Membidangi Unit Kerja Bisnis BUMN - Membidangi Unit Kerja UMKM - In charge of all work units under the Head of Regional - In charge of Corporate Business Unit I - In charge of Corporate Business Unit II - In charge of BUMN Business Unit - In charge of MSME Unit
	<i>Head of Wilayah</i> Head of Regional	- Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah I - Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah II - Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah III - In charge of Regional Office Unit I - In charge of Regional Office Unit II - In charge of Regional Office Unit III
Maqin Norhadi	Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	- Membidangi Unit Kerja yang berada di bawah <i>Head of Penjaminan & Asuransi</i> - Membidangi Unit Kerja Syariah - Membidangi Unit Kerja <i>Trade Finance</i> - Membidangi Unit Kerja Program Investasi Pemerintah - Membidangi Unit Kerja Penugasan Khusus - In charge of the Work Unit under the Head of Guarantee & Insurance - In charge of Sharia Unit - In charge of Trade Finance Unit - In charge of the Government Investment Program Unit - In charge of the Special Assignment Unit
	<i>Head of Penjaminan & Asuransi</i> Head of Guarantee & Insurance	- Membidangi Unit Kerja Penjaminan - Membidangi Unit Kerja Asuransi - In charge of the Guarantee Unit - In charge of the Insurance Unit
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional Managing Director of Finance & Operations	- Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah <i>Head of Operasional & TI</i> - Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah <i>Head of Keuangan & Perencanaan Strategis</i> - Membidangi Unit Kerja Pengadaan dan Umum - In charge of all work units under the Head of Operations & IT - In charge of all units under the Head of Finance & Strategic Planning - In charge of Procurement and General Unit
	<i>Head of Keuangan & Perencanaan Strategis</i> Head of Finance & Strategic Planning	- Membidangi Unit Kerja <i>Finance</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Strategic & Corporate Planning</i> - Membidangi Unit Kerja <i>MIS & Business Finance</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Middle Office Treasury</i> - In charge of Finance Unit - In charge of Strategic & Corporate Planning Unit - In charge of MIS & Business Finance Unit - In charge of the Treasury Middle Office Unit
	<i>Head of Operasional & TI</i> Head of Operations & TI	- Membidangi Unit Kerja Teknologi Informasi - Membidangi Unit Kerja Operasional - Membidangi Unit Kerja Operasional Penjaminan - Membidangi Unit Kerja Bisnis Operasional & Supervisi Bisnis - In charge of Information Technology Unit - In charge of operational units - In charge of the Guarantee Operational Unit - In charge of Business Unit, Operations & Business Supervision

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of Duties
Henry Sihotang (hingga 5 (Hingga 5 Desember 2022 Until December 5, 2022)	Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Credit & Risk Management	- Membidangi Unit Kerja <i>Credit Reviewer I</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Credit Reviewer II</i> - Membidangi Unit Kerja Analisa Risiko Penjaminan - Membidangi Unit Kerja Pengembangan Produk - Membidangi Unit Kerja Manajemen Risiko & Portofolio - Membidangi Unit Kerja Pemegang Limit Individu - Membidangi Unit Kerja Kebijakan & Prosedur - In charge of Credit Reviewer I Unit - In charge of Credit Reviewer II Unit - In charge of the Guarantee Risk Analysis Unit - In charge of the Product Development Unit - In charge of Risk & Portfolio Management Unit - In charge of the work unit of individual limit holders - In charge of the Policy & Procedure Unit
Agus Windiarto (Plt. sejak 13 Desember 2022 Acting as of December 13, 2022)		
Chesna F Anwar	Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations	- Membidangi Unit Kerja Jasa Konsultasi - Membidangi Unit Kerja Riset & Pengembangan - Membidangi Unit Kerja <i>Financial Institution & Treasury</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Communication & Stakeholder Engagement</i> - Membidangi Unit Kerja Sekretariat Lembaga - Membidangi Unit Kerja Hukum - Responsible for Advisory Unit - In charge of Research & Development Unit - In charge of Financial Institution & Treasury Unit - In charge of Communication & Stakeholder Engagement Unit - In charge of the Work Unit of the Secretariat of the Institution - In charge of the Legal Unit

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN
DIREKTUR PELAKSANA TAHUN 2022

- Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana bertugas melakukan operasional LPEI. Koordinasi dilakukan secara intens dan sistematis. Rapat-rapat rutin yang dilaksanakan adalah rapat direksi satu kali dalam satu minggu, rapat ALCO satu kali dalam satu bulan, rapat bulanan kinerja satu kali dalam satu bulan. Selain itu, Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur melaksanakan rapat koordinasi lainnya untuk memastikan operasional LPEI berjalan dengan baik.
- Selama tahun 2022 telah dilakukan Rapat antara Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sebanyak 61 kali.
- Direktur Eksekutif aktif melakukan komunikasi dengan Dewan Direktur sebagai organ pengawas di LPEI. Keputusan strategis diambil melalui mekanisme

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND
RESPONSIBILITIES OF THE EXECUTIVE
DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS IN
2022

- The Executive Director is assisted by the Managing Director in charge of conducting Indonesia Eximbank operations. Coordination is carried out intensely and systematically. Routine meetings held are board of directors meeting once a week, ALCO meeting once a month, monthly performance meeting once a month. In addition, the Executive Director and the Board of Directors hold other coordination meetings to ensure proper operations.
- During 2022, there have been 61 meetings between the Executive Director and the Managing Director.
- The Executive Director actively communicates with the Board of Directors as the supervisory organ at Indonesia Eximbank. Strategic decisions

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

rapat dan didokumentasikan secara baik. Dalam pelaksanaan operasional, dibentuk pula komite di bawah Direktur Eksekutif.

- Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, *auditor eksternal*, dan/atau hasil pengawasan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain dengan dibantu *monitoring* oleh Komite Audit.

are taken through a meeting mechanism and are well documented. In operational implementation, a committee is also formed under the Executive Director.

- The Executive Director and Managing Director have followed up on audit findings and recommendations from SKAI, external auditors, and/or the results of supervision of the Minister of Finance and/or results of certain supervision by other authorities with the assistance of monitoring by the Audit Committee.

BOARD CHARTER

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur. Pedoman dan tata tertib kerja tersebut menjabarkan antara lain mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, tata tertib pelaksanaan rapat, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Rapat Pengesahan.

BOARD CHARTER

In performing its duties, the Chairman of Board of Directors, concurrently serves as Executive Director, has the charter as stipulated in the Board of Directors Regulation No. 0007/PDD/12/2020 regarding Board of Directors Charter. The Board Charter elaborates the duties, authorities, obligations, responsibilities, work divisions, work hours, work ethics, meeting procedures, and duties implementation related with the Ratification Meeting.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKTUR EKSEKUTIF

Pada tahun 2022, penilaian kinerja komite-komite di bawah Direktur Eksekutif secara umum telah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Komite-komite dimaksud adalah:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Pengembangan Produk
3. Komite Kebijakan dan Pedoman
4. Komite *Assets dan Liabilities Management*
5. Komite Teknologi Sistem Informasi
6. Komite Pengadaan
7. Komite Jasa Konsultasi
8. Komite Pembiayaan
9. Komite Sumber Daya Manusia

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEES UNDER EXECUTIVE DIRECTOR

In 2022, the performance of the committees under the Executive Director in general has met the assigned duties and responsibilities. The committees are:

1. Risk Management Committee
2. Product Development Committee
3. Policy and Guidelines Committee
4. Assets and Liabilities Management Committee
5. Information Technology Systems Committee
6. Procurement Committee
7. Advisory Services Committee
8. Financing Committee
9. Human Resources Committee

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

Berikut ini penilaian dari pelaksanaan tugas komite-komite pada tahun 2022:

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya. Selain itu, Komite juga memberikan rekomendasi atas perbaikan Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, dan penetapan terhadap hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum cukup diatur dalam prosedur.

Komite Pengembangan Produk

Komite Pengembangan Produk telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal pengembangan dan penyempurnaan produk dan aktivitas/ kegiatan di LPEI serta pengembangan dan penyempurnaan atas manual produk, *Standard Operating Procedure* (SOP) dan ketentuan lain terkait produk dan aktivitas/kegiatan di LPEI.

Komite Kebijakan dan Pedoman

Komite Kebijakan dan Pedoman telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal rancangan peraturan internal LPEI, serta telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI.

Komite Assets & Liabilities Management

Komite Assets & Liabilities Management telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan kebijakan pengelolaan risiko, penetapan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan asset dan liabilities dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

Komite Teknologi Sistem Informasi

Komite Teknologi Sistem Informasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal

The following are the assessment and implementation of duties during 2022:

Risk Management Committee

The Risk Management Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the policies, strategies, and risk management guidelines as well as its changes. In addition, the Committee also provided recommendations on improvement or refinement of risk management periodically based on the implementation of evaluation, and stipulation on matters related to business decisions that are not yet sufficiently regulated within the procedures.

Product Development Committee

The Product Development Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the Company's product development and refinement and activities, as well as product manual development and refinement, Standard Operating Procedures (SOP) and other rules related to the Company's product and activities.

Policy and Guidelines Committee

The Policy and Guidelines Committee has provided recommendations to the Executive Director on the draft internal regulations of Indonesia Eximbank, and has supervised the implementation of internal regulations.

Assets & Liabilities Management Committee

The Assets & Liabilities Management Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the risk management policy stipulation, policy stipulation, assets and liabilities thresholds and management strategy guidelines, by considering the external and internal conditions.

Information Technology System Committee

The Information Technology System Committee has provided the recommendations to the Executive Director

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang, rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi, dan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan.

Komite Pengadaan

Komite Pengadaan telah memberikan rekomendasi kepada manajemen dalam hal proses pengadaan yang efektif dan efisien serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Komite Jasa Konsultasi

Komite Jasa Konsultasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai Program Jasa Konsultasi pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan telah memberikan Keputusan atas proposal Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi, serta *Credit Line* termasuk *Country Limit* dan penempatan dana Tresuri. Komite Pembiayaan juga telah mengambil keputusan atas proposal penanganan pembiayaan bermasalah, dan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif sesuai dengan limit masing-masing komite pembiayaan.

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Personalia telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan sumber daya manusia dan pengembangan nilai-nilai lembaga (*corporate values*).

PROGRAM PENGENALAN DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA BARU

Tidak terdapat anggota baru pada jajaran Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana pada periode tahun berjalan, sehingga program pengenalan tidak dilaksanakan pada tahun buku 2022.

on the medium- and long-term information technology system development policies, information technology system investment plans, and oversight and evaluation on the applied information technology system development and implementation.

Procurement Committee

The Procurement Committee has offered recommendations to management on the effective and efficient procurement process according to the applicable regulations.

Advisary Services Committee

The Advisory Services Committee has provided recommendations to the Executive Director regarding the Advisory Services Program in the current year as stipulated in the Annual Work Plan and Budget (RKAT).

Financing Committee

The Financing Committee has provided the Decisions on Financing, Guarantee, and Insurance proposals, as well as Credit Line including the Country Limit and placement of treasury funds. The Committee has also provided the decisions on the non-performing financing handling proposal, and decision on the stipulation of earnings assets quality level in accordance with the threshold of each financing committee.

Human Resources Committee

The Human Resources Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the direction, changes, and refinement of human resources policies, and corporate values development.

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR

There were no new members of the Executive Directors and Managing Directors in the current year, thereby there were no induction programs carried out for fiscal year 2022.

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

PROGRAM PENGEMBANGAN DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

Rincian tentang program pengembangan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana disampaikan pada bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI

Seluruh anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang mengungkapkan diantaranya:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (untuk Dewan Direktur) dan berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri (untuk Direktur Pelaksana).
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksu atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain (untuk Direktur Pelaksana).

EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS DEVELOPMENT PROGRAM

Details of the Executive Director and Managing Director development program are presented in the Company Profile section in this Annual Report.

DECLARATION OF INDEPENDENCE

All members of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Director, have signed a Declaration of Independence which states, among others:

1. Do not have share ownership in other companies that have the potential to cause a conflict of interest (for the Board of Directors) and are domiciled both at home and abroad (for the Managing Director).
2. Has no financial relationship and family relationship with the Board of Directors and the Managing Director, either directly or indirectly.
3. Will not use the Indonesia Eximbank for personal, family or party interests that can harm or reduce the profits of the Indonesia Eximbank, either directly or indirectly.
4. Not taking and/or receiving personal benefits from the Indonesia Eximbank other than remuneration and other facilities that have been determined by the Minister of Finance or other applicable provisions.
5. Not holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers in other companies and/or institutions (for the Managing Director).

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

Direksi/Direktur / Board of Directors


 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
 Property House, Lantai 3
 Gedung A, SCS 1st St
 Jl. Jend. Sudirman No. 50-51
 Jakarta 12166
 Telp. +62 (21) 393 0000
 Fax. +62 (21) 393 0000
 www.lpeid.co.id/lpeid

Surat Pernyataan

Yang Berhenda dengan di bawah ini:

Nama : Agus Guntawan
 Jabatan : Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain (baik yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam kedudukan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga atau semacamnya sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari keluarga, rekanan, pejabat/pejabat Pemerintah, atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2022
 Yang Membuat Pernyataan


 Agus Guntawan

Direksi/Direktur / Board of Directors


 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
 Property House, Lantai 3
 Gedung A, SCS 1st St
 Jl. Jend. Sudirman No. 50-51
 Jakarta 12166
 Telp. +62 (21) 393 0000
 Fax. +62 (21) 393 0000
 www.lpeid.co.id/lpeid

Surat Pernyataan

Yang Berhenda dengan di bawah ini:

Nama : Daniel James Rompas
 Jabatan : Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain (baik yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam kedudukan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga atau semacamnya sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari keluarga, rekanan, pejabat/pejabat Pemerintah, atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2022
 Yang Membuat Pernyataan


 Daniel James Rompas

Direksi/Direktur / Board of Directors


 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
 Property House, Lantai 3
 Gedung A, SCS 1st St
 Jl. Jend. Sudirman No. 50-51
 Jakarta 12166
 Telp. +62 (21) 393 0000
 Fax. +62 (21) 393 0000
 www.lpeid.co.id/lpeid

Surat Pernyataan

Yang Berhenda dengan di bawah ini:

Nama : Fella Salim
 Jabatan : Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain (baik yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam kedudukan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga atau semacamnya sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari keluarga, rekanan, pejabat/pejabat Pemerintah, atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2022
 Yang Membuat Pernyataan


 Fella Salim

Direksi/Direktur / Board of Directors


 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
 Property House, Lantai 3
 Gedung A, SCS 1st St
 Jl. Jend. Sudirman No. 50-51
 Jakarta 12166
 Telp. +62 (21) 393 0000
 Fax. +62 (21) 393 0000
 www.lpeid.co.id/lpeid

Surat Pernyataan

Yang Berhenda dengan di bawah ini:

Nama : Kusan
 Jabatan : Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain (baik yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam kedudukan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga atau semacamnya sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari keluarga, rekanan, pejabat/pejabat Pemerintah, atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2022
 Yang Membuat Pernyataan


 Kusan

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

Demikian Direktur / Kepala Eksekutif

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Properti/Tanah: Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman No. 22-25
Jakarta 10130
Telp. +62 (21) 551-5500
Fax. +62 (21) 551-5500
www.indonesiainbank.go.id

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Tirtoso
Jabatan : Ketua Dewan Direksi mewakili Direktur Eksekutif
Alamat : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain baik yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam kedudukan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga atau sumbu sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau memeras dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku
5. Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung secara nyata atau tidak nyata, atau dari pihak lain, jabatan, pekerjaan, atau fasilitas, atau pihak ketiga lainnya untuk memperoleh atau sebagai imbalan atas jasa yang telah dilaksanakannya dan/atau lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan

Rizki Tirtoso

Demikian Direktur / Kepala Eksekutif

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Properti/Tanah: Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman No. 22-25
Jakarta 10130
Telp. +62 (21) 551-5500
Fax. +62 (21) 551-5500
www.indonesiainbank.go.id

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumitro
Jabatan : Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain baik yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam kedudukan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga atau sumbu sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau memeras dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku
5. Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung secara nyata atau tidak nyata, atau dari pihak lain, jabatan, pekerjaan, atau fasilitas, atau pihak ketiga lainnya untuk memperoleh atau sebagai imbalan atas jasa yang telah dilaksanakannya dan/atau lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan

Sumitro

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS



RAPAT DEWAN DIREKTUR TAHUN 2022

FREKUENSI PELAKSANAAN RAPAT DEWAN DIREKTUR

Frekuensi rapat Dewan Direktur LPEI diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.06/2021, berdasarkan PMK tersebut, pelaksanaan rapat Dewan Direktur diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan, dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur, dan dapat dilakukan secara fisik, telekonferensi, dan/atau media elektronik lainnya.

RAPAT DEWAN DIREKTUR (FUNGSI KOMISARIS)

Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur dan harus dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam hal Ketua Dewan Direktur dan/atau pengganti sementara Ketua Dewan Direktur berhalangan sehingga tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Direktur atau pengganti sementara Ketua Dewan Direktur menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk memimpin rapat. Dalam hal Ketua Dewan Direktur dan/atau pengganti sementara Ketua Dewan Direktur berhalangan sehingga tidak dapat memimpin rapat dan tidak menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk memimpin rapat, pimpinan rapat dipilih secara musyawarah untuk mufakat.

Pengambilan keputusan Dewan Direktur dilaksanakan melalui rapat Dewan Direktur berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, selanjutnya dilaksanakan pemungutan suara dengan keputusan suara terbanyak. Anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur. Segala keputusan Dewan Direktur bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direktur.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

FREQUENCY OF BOARD OF DIRECTOR MEETINGS

The frequency of Indonesia Eximbank Board of Director meetings is regulated in Article 12 of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021, based on the PMK, the Board of Director meetings are held regularly at least 1 (one) time a month, chaired by the Chairman of the Board of Directors, and can be conducted physically, teleconference, and/or other electronic media.

BOARD OF DIRECTORS MEETING (COMMISSIONER FUNCTION)

Meetings of the Board of Directors are chaired by the Chairman of the Board of Directors and must be attended by all members of the Board of Directors at least 4 (four) times a year. If the Chairman of the Board of Directors and/or his/her temporary replacement is unable to chair the meeting, the Chairman of the Board of Directors or his/her temporary replacement shall appoint another member of the Board of Directors to chair the meeting. If the Chairman of the Board of Directors and/or the temporary replacement of the Chairman of the Board of Directors is unable to chair the meeting and does not appoint another member of the Board of Directors to chair the meeting, the chairman of the meeting shall be elected by deliberation for consensus.

Decision-making of the Board of Directors shall be conducted through meetings of the Board of Directors based on deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not achieved, then a vote is held with a majority vote decision. Members of the Board of Directors appointed by the Minister as Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director shall not have voting rights in the Board of Directors meeting. All decisions of the Board of Directors are binding for all members of the Board of Directors.

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

Rapat Dewan Direktur terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu rapat Dewan Direktur untuk pengambilan keputusan kebijakan dan isu-isu strategis dan rapat Dewan Direktur untuk pengawasan operasional LPEI. Agenda rapat Dewan Direktur untuk pengambilan keputusan kebijakan dan isu-isu strategis diutamakan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan serta pembahasan isu-isu strategis LPEI. Sedangkan agenda rapat Dewan Direktur untuk pengawasan operasional LPEI diutamakan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan kegiatan operasional LPEI.

Peserta rapat adalah anggota Dewan Direktur, dan dalam hal diperlukan rapat Dewan Direktur dapat mengikutsertakan peserta undangan yang dapat berasal dari Direktur Pelaksana, pegawai LPEI, atau peserta undangan lain. Peserta undangan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan Dewan Direktur. Demi menjaga tertib administrasi dan dokumentasi yang baik, semua hasil rapat dituangkan secara jelas dalam risalah rapat, termasuk jika terjadi perbedaan pendapat beserta alasan-alasannya.

Per 31 Desember 2022, telah terselenggara 30 (tiga puluh) kali rapat Dewan Direktur, dengan susunan agenda, frekuensi rapat, dan jumlah kehadiran dari setiap anggota Dewan Direktur sebagai berikut:

Meetings of the Board of Directors consist of 2 (two) types, namely meetings of the Board of Directors for policy decision making and strategic issues and meetings of the Board of Directors for operational supervision of Indonesia Eximbank. The agenda of the Board of Directors meeting for policy decision making and strategic issues is prioritised for policy decision making and evaluation of policy implementation and discussion of Indonesia Eximbank's strategic issues. While the agenda of the Board of Directors meeting for Indonesia Eximbank operational supervision is prioritised in the context of carrying out the task of supervising Indonesia Eximbank's operational activities.

Meeting participants are members of the Board of Directors, and if necessary, the Board of Directors meeting may include invited participants who can come from the Managing Director, Indonesia Eximbank employees, or other invited participants. Invited participants do not have voting rights in the decision making of the Board of Directors. In order to maintain good administration and documentation, all meeting results are clearly stated in the minutes of the meeting, including any dissenting opinions and their reasons.

As of 31 December 2022, 30 (thirty) meetings of the Board of Directors have been held, with the following agendas, frequency of meetings, and attendance of each member of the Board of Directors:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors and Executive Director	30	30	100%
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	30	26	87%
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	30	29	97%
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	30	28	93%
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	30	30	100%
D. James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	30	29	97%

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
1	10-Jan-22	- Update terkait kepegawaian - Update Kinerja Keuangan - Permohonan Persetujuan Kinerja Keuangan Posisi 31 Desember 2021	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
2	17-Jan-22	- Pemaparan Asset and Liabilities Committee - Pemaparan Laporan Hapus Buku Aktiva Tetap - Pelaporan Dewan Direktur - Agenda Lain-lain	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
3	27-Jan-22	- Laporan Pelaksanaan Hapus Buku Triwulan IV 2021 - Permohonan Persetujuan Laporan Dewan Direktur: - Laporan Pemantauan Perkembangan Pembiayaan Bermasalah Triwulan IV 2021 - Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan RKAT LPEI Semester II 2021 - Pemaparan Ringkasan PMK 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Felia Salim D. James Rompas
4	09-Feb-22	- Report on the Implementation of the Fourth Quarter of 2021 Write-off - Request for Approval of the Board of Director's Report: - Monitoring Report on the Development of Non-Performing Financing for the fourth quarter of 2021 - Monitoring Report of Indonesia Eximbank Business Plan and RKAT Semester II 2021 - Presentation of Summary of PMK 208 / PMK.06 / 2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
5	09-Feb-22	- Permohonan Persetujuan Hapus Buku - Request for Write-off Approval	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
6	22-Feb-22	- Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Tahun 2021 - Rancangan Laporan Pengawasan RKAT Semester II 2021 - Laporan <i>Monitoring</i> Kualitas Aset - Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan IV 2021 - Permohonan Hapus Buku <i>Batch 2</i> - Ratifikasi	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Audit Report on Financial Statements (Audited) Year 2021 - Draft RKAT Supervision Report Semester II 2021 - Monitoring Report on the Asset Quality - Soundness Report for the fourth quarter of 2021 - Request for Batch 2 of Writes-off - Ratification	
7	9-Mar-22	- Laporan Pelaksanaan RUPS PT IEB Prima Aset - Persetujuan Update kebijakan LPEI - Persetujuan Hapus Buku Piutang LPEI (<i>batch I</i>) - Persetujuan Laporan Keuangan posisi 28 Februari 2022 - Ratifikasi Rapat Dewan Direktur	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Report on the GMS of PT IEB Prima Aset - Approval of Indonesia Eximbank's policies update - Approval of Indonesia Eximbank's Accounts Receivable Write-off (batch I) - Approval of the Financial Report position 28 February 2022 - Ratification of Board of Director Meeting	
8	18-Mar-22	- Permohonan Keputusan Hapus Buku Piutang <i>Batch II</i> - Update Regulasi Lembaga - Permohonan Persetujuan RPDD Pengadaan Barang dan Jasa - Laporan Status Piutang PKE GIA - Laporan Progress Usulan LPEI terkait <i>Omnibus Law</i> Sektor Jasa Keuangan - Laporan Progres Penyusunan <i>Annual Report</i> Tahun 2021 - Diskusi <i>Sustainable Finance</i> - Pemaparan pemetaan sertifikasi komoditas Ekspor sektor Kehutanan - Ratifikasi Rapat Dewan Direktur	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Request for Batch II Accounts Receivable Write-off Decision - Institution Regulation Update - Request for Approval of RPDD for Procurement of Goods and Services - PKE GIA Receivables Status Report - Progress Report on Indonesia Eximbank Proposal related to Omnibus Law on Financial Services Sector - Progress Report on the Preparation of Annual Report for 2021 - Sustainable Finance Discussion - Exposure of Forestry sector Export commodity certification mapping - Ratification of Board Meeting	
9	31-Mar-22	- RPOJK Pengawasan LPEI & Tanggapan atas RSEOJK Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI - Penggantian Staff Ahli Dewan Direktur - Penyampaian Informasi Pengangkatan Head of Regions	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- RPOJK Indonesia Eximbank Supervision & Response to RSEOJK Indonesia Eximbank Soundness Level Assessment - Replacement of Expert Staff of the Board of Directors - Submission of Information on Appointment of Head of Regions	

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
10	8-Apr-22	- Laporan Realisasi Kerja Komite Audit TW IV 2021 - Laporan Kinerja Keuangan posisi 31 Maret 2022 - Laporan Keuangan PKE, PEN, dan Syariah - Ratifikasi Rapat Dewan Direktur	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Audit Committee Work Realisation Report Q IV 2021 - Financial Performance Report position 31 March 2022 - PKE, PEN, and Sharia Financial Reports - Ratification of Board of Director Meeting	
11	22-Apr-22	- Laporan Komite - Persetujuan Laporan Profil Risiko Triwulan I 2022 - Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan I 2022 - Laporan Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Laporan Arahan Wamen BUMN tentang Roadmap & Strategi Ekspor Nasional - Pemaparan Staf Ahli DD - Pemaparan <i>Trade Credit Insurance</i>	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Committee's Reports - Approval of Risk Profile Report for the first quarter of 2022 - Report of the Risk Monitoring Committee for the first quarter of 2022 - Letter from the Supreme Audit Agency (BPK) - SOE Deputy Minister's Briefing Report on National Export Roadmap & Strategy - Exposure of DD Expert Staff - Exposure of Trade Credit Insurance	
12	10-May-22	- Management Letter LPEI Tahun 2021 - Laporan Kinerja Keuangan Posisi 30 April 2022	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Indonesia Eximbank Management Letter 2021 - Financial Performance Report 30 April 2022	
13	3-Jun-22	- Laporan Tingkat Kesehatan LPEI Triwulan I 2022 - Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Ratifikasi Rapat Dewan Direktur	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Felia Salim D. James Rompa
		- Indonesia Eximbank Soundness Level Report for the first quarter of 2022 - Approval of the Draft Board of Directors Regulation on the Goods/Services Procurement Policy of the Indonesia Eximbank - Ratification of the Board of Directors Meeting	
14	11-Jun-22	- Kinerja Keuangan Posisi Mei 2022 - Persiapan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2021 - Laporan Hasil Evaluasi auditor eksternal Tahun 2021 dan Permohonan Persetujuan Penunjukan Auditor untuk Tahun Buku 2022.	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Financial Performance May 2022 Position - Preparation of 2021 Performance Accountability Report - Report on External Auditor Evaluation Results and Request for the Approval of Auditor Appointment for Financial Year 2022.	

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
15	25-Jun-22	- Pembahasan Isu Strategis dan Progres Penyusunan RJP - Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Direktur dan Peraturan Direktur Eksekutif - Update Status Restrukturisasi	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Discussion of Strategic Issues and Progress of RJP Preparation - Request for Approval of Draft Board of Director Regulations and Executive Director Regulation - Update on Restructuring Loans	
16	4-Jul-22	- Laporan Keuangan Posisi Juni 2022 - Pembahasan Isu Strategis dan Progres Penyusunan RJP - Laporan Publikasi Media Monitoring	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Financial Statement as at June 2022 - Discussion of Strategic Issues and Progress of RJP Preparation - Media Monitoring Publication Report	
17	27-Jul-22	- Permohonan Persetujuan Rancangan Laporan Monitoring Pembiayaan Bermasalah dan Pelaksanaan Hapus Buku Triwulan II 2022 - Permohonan Persetujuan Rancangan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan RKAT periode Semester I 2022 - Update Manajemen risiko - Permohonan Persetujuan Rancangan Hasil Stress Testing - Permohonan Persetujuan Alokasi Modal Syariah - Ratifikasi	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
		- Request for Approval of the Draft Troubled Financing Monitoring Report and the Implementation of the 2022 Second Quarter Write-off - Request for Approval of the Draft Report on the Supervision of Business Plan and RKAT for Semester I period 2022 - Presentation of the Draft Risk Profile Report for the Second Quarter of 2022 - Request for Approval of Stress Testing Results Draft - Request for Approval of Sharia Capital Allocation - Ratification	
18	1-Aug-22	Pembahasan Usulan Penggunaan Dana Cadangan Umum dan Tujuan LPEI Discussion on the Proposed Use of General Reserve Fund and Purpose of Indonesia Eximbank	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompas
19	10-Aug-22	- Pemaparan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang Baik Tahun 2021. - Pemaparan Kinerja Keuangan Posisi Juli 2022. - Permohonan Persetujuan Rancangan Perubahan Rencana Jangka Panjang (RJP) LPEI.	- Rijani Tirtoso - Suminto - Kasan - Arus Gunawan - Felia Salim D. James Rompa
		- Presentation of Evaluation Results on the Implementation of Good Governance Principles in 2021. - Presentation of Financial Performance Position July 2022. - Request for Approval of the Draft Amendment to Indonesia Eximbank Long Term Plan (RJP).	

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
20	24-Aug-22	1. Permohonan Persetujuan RPDD Kebijakan TSI 2. Pemaparan Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan II 2022 3. Laporan Penyampaian Tanggapan Berita Acara Hasil Evaluasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian/Kepatuhan oleh Itjen Kemenkeu 4. Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan II 2022 5. Laporan Komite Audit Triwulan II 2022	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
		1. Request for Approval of TSI Policy RPDD 2. Presentation of Soundness Level Report for the second quarter of 2022 3. Report on the Submission of Responses to the Minutes of the Evaluation Results of Governance, Risk Management, and Control/Compliance by the Ministry of Finance's Inspectorate General 4. Report of the Risk Monitoring Committee for the Second Quarter of 2022 5. Audit Committee Report for the Second Quarter of 2022	
21	9-Sep-22	1. Laporan Kick off Audit Laporan Keuangan KAP RSM 2. Laporan Persetujuan Penghapusan Piutang Kewenangan DD oleh Menkeu 3. Laporan Hasil Evaluasi atas Tata Kelola Manajemen Risiko / Kepatuhan oleh Itjen Kemenkeu 4. Laporan Hasil Audit OJK	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
		1. RSM KAP Financial Statement Audit Kick off Report 2. DD Authority Receivables Write-off Approval Report by the Minister of Finance 3. Evaluation Report on Risk Management/Compliance Governance by Ministry of Finance Inspectorate General 4. OJK Audit Report	
22	30-Sep-22	1. Pemaparan Konsultan Skema Penanganan Pembiayaan 2. Laporan RDP dan Agenda Penyusunan RKAT 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
		1. Consultant Presentation of Financing Handling Scheme 2. Report of the hearing and agenda for the preparation of the 2023 RKAT	
23	3-Oct-22	Pemaparan Skema Penanganan Pembiayaan Presentation of Financing Handling Schemes	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
24	7-Oct-22	1. Laporan Keuangan in-house September 2022 2. Usulan aspek keuangan dan non keuangan RKAT 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Arus Gunawan 3. Felia Salim 4. D. James Rompas
		1. In-house Financial Report September 2022 2. Proposed financial and non-financial aspects of 2023 RKAT	
25	17-Oct-22	1. Permohonan Persetujuan Pengajuan Hapus Buku dalam RKAT 2023. 2. Permohonan Persetujuan Rancangan Tanggapan Audit BPKP atas Jaminah. 3. Usulan Risk Appetite Statement 2023. 4. Update Kebijakan LPEI	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim
		1. Request for Approval of the Submission of Delete Book in RKAT 2023. 2. Request for Approval of Draft BPKP Audit Response on Jaminah. 3. Proposed Risk Appetite Statement 2023. 4. Update on Indonesia Eximbank Policies	

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
26	11-Nov-22	Persetujuan Skema Penanganan Pembiayaan Approval of Financing Handling Scheme	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. Felia Salim 5. D. James Rompas
27	30-Nov-22	Persetujuan Rancangan Rencana Bisnis dan Rencana Keuangan Berkelanjutan LPEI Tahun 2023 Approval of Indonesia Eximbank Year 2023 Business Plan and Sustainable Financial Plan Draft	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
28	2-Dec-22	1. Laporan Tingkat Kesehatan TWIII 2022 2. Laporan Komite Audit 3. Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Direktur 1. Soundness Level Report Q III 2022 2. Audit Committee Report 3. Request for Approval of Draft Board of Director Regulations	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. Felia Salim 5. D. James Rompas
29	9-Dec-22	1. Laporan Kinerja Keuangan per 30 Nov 2022 dan Deviasi Realisasi RKAT 2022 2. Laporan Komite Pemantau Risiko TW III 2022 3. Laporan Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) 4. Persetujuan Perubahan Usulan Hapus Buku RKAT 2023 1. Financial Performance Report as of 30 Nov 2022 and Deviation of 2022 RKAT Realization 2. Risk Monitoring Committee Report Q III 2022 3. Report on the Establishment of Sharia Business Unit (UUS) 4. Approval of Amendment to the Proposal of Write-offs on the 2023 RKAT Book	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
30	23-Dec-22	Pemaparan KAP RSM – Audit Umum atas Laporan Keuangan 31 Desember 2022 a. Komparasi POJK Mengenai Pengawasan Terhadap LPEI b. Proses Penetapan Kolektibilitas c. Proses penetapan CKPN KAP RSM Presentation - General Audit of Financial Statements 31 December 2022 a. Comparison of POJK on Supervision on Indonesia Eximbank b. Collectibility Determination Process c. The process of determining CKPN	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas

RAPAT BOARD OF MANAGEMENT

Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana bertugas melakukan operasional LPEI. Koordinasi dilakukan secara intens dan sistematis. Rapat-rapat rutin yang dilaksanakan adalah rapat Direksi satu kali dalam satu minggu, rapat ALCO satu kali dalam satu bulan, rapat bulanan kinerja satu kali dalam satu bulan. Selain itu, Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur melaksanakan rapat koordinasi lainnya untuk memastikan operasional LPEI berjalan dengan baik.

BOARD OF MANAGEMENT MEETINGS

The Executive Director assisted by the Managing Director is in charge of conducting the Company operations with intense and systematic coordination. Routine meetings that are held are Board of Directors meetings once a week, ALCO meetings once a month, and monthly performance meetings. In addition, the Executive Director and the Board of Directors hold other coordination meetings to ensure operations are performed well.

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

Selama tahun 2022 telah dilakukan Rapat antara Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sebanyak 66 kali. Dengan agenda sebagai berikut:

During 2022, 66 meetings were held between the Executive Director and the Managing Directors, with the following agenda:

DAFTAR RAPAT BOARD OF MANAGEMENT TAHUN 2022
YEAR 2022 BOARD OF MANAGEMENT MEETING LIST

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
1	MR.0001/OTB/01/2022	10 Jan 2022	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. <i>PDO Report Update & FS Performance 31 Dec 2021</i>; 3. Laporan Hasil <i>Employee Engagement Survey</i>;	Seluruh manajemen, kecuali Dikdik Yustandi tidak hadir karena cuti All management, except Dikdik Yustandi was absence due to taking a leave
2	MR.0002/OTB/01/2021	13 Jan 2022	1. Daftar Kewajiban Pelaporan Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif; 1. Usulan Nomenklatur Direksi; 2. <i>Leader for Tomorrow (LFT-1) Job Attachment</i>;	Seluruh manajemen All management
3	MR.0003/OTB/01/2022	19 Jan 2022	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update; 3. Pokok-Pokok Pembahasan PMK 208 Tahun 2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI;	Seluruh manajemen All management
4	MR.0004/OTB/01/2022	24 Jan 2022	1. Laporan perkembangan pengelolaan pembiayaan bermasalah Desember 2021 2. Laporan realisasi rencana bisnis, laporan pengawasan rencana bisnis, laporan realisasi RKAT dan laporan pengawasan RKAT 3. IKU 2021 dan IKU 2022 4. Memorandum prosedur 5. Ratifikasi	Seluruh Manajemen, kecuali Chesna F. Anwar yang berhalangan hadir karena cuti All management, except Chesna F. Anwar was absence due to taking a leave

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
5	MR.0001/MDI/01/2022	31 Jan 22	- Laporan profil risiko LPEI TW IV tahun 2021 - Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan APU PPT Semester II tahun 2021 - Indonesia Eximbank Q IV 2021 risk profile report - Report on the implementation of the compliance function and the implementation of APU PPT Semester II of 2021	Seluruh Manajemen, kecuali I All management, except Dikdik Yustandi tidak hadir karena sakit I absence due to taking a sick leave Chesna F. Anwar tidak hadir karena cuti I absence due to taking a leave Agus Windiarjo tidak hadir karena sakit I absence due to taking a sick leave
6	MR.0002/MDI/02/2022	7 Feb 22	<i>Economic outlook</i> - PDO report update & financial highlight - Laporan partisipasi LPEI dalam kegiatan presidensi G20 - Laporan performance management initiative tahun 2021 - Economic outlook - PDO report updates & financial highlights - Report on the participation of Indonesia Eximbank in the G20 presidency activities - Performance management initiative report for 2021	Seluruh manajemen All management
7	MR.0003/MDI/02/2022	14 Feb 22	- Revisi usulan 3 kebijakan (RPDD) LPEI 2022 - Kebijakan pengadaan barang dan jasa - Kebijakan teknologi system informasi - Pencabutan kebijakan BI RTGS - Konsep customer gathering LPEI - Update progress audit - Revision of the proposed 3 policies (RPDD) of Indonesia Eximbank 2022 - Goods and services procurement policy - Information system technology policy - Revocation of the BI RTGS policy - Indonesia Eximbank customer gathering concept - Update audit progress	Seluruh Manajemen, kecuali Chesna F. Anwar yang berhalangan hadir karena cuti All management, except Chesna F. Anwar was absence due to taking a leave
8	MR.0004/MDI/02/2022	16 Feb 22	- Percepatan Disclosure PT IEB Prima Aset (IPA) - PT IEB Prima Aset (IPA) Disclosure Acceleration	Seluruh Manajemen, kecuali Chesna F. Anwar yang berhalangan hadir karena cuti All management, except Chesna F. Anwar was absence due to taking a leave

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
9	MR.0005/MDI/02/2022	21 Feb 22	- Rancangan laporan tingkat Kesehatan LPEI TW IV tahun 2021 - Informasi cuti bersama KP Denpasar - Laporan persiapan-persiapan pelaksanaan customer gathering	Seluruh manajemen All management
10	MR.0006/MDI/03/2022	1 Mar 22	- Draft report on Indonesia Eximbank Soundness level Q IV 2021 - KP Denpasar joint leave information - Report on preparations for the implementation of customer gathering	
10	MR.0006/MDI/03/2022	1 Mar 22	- Rencana kerja sama kelembagaan dan program jasa konsultasi - PDO report update dan prognosa keuangan Feb 2022	Seluruh manajemen All management
11	MR.0007/MDI/03/2022	7 Mar 22	- Institutional cooperation plan and advisory services program - PDO report update and financial prognosis Feb 2022	
11	MR.0007/MDI/03/2022	7 Mar 22	- Perkembangan dan proyeksi ekspor, serta perbankan & IKNB - Laporan hasil pemetaan ESG sektor kehutanan - Pemaparan strategi komunikasi - Laporan program kemitraan - Strategi Divisi Asuransi tahun 2022 - Pemaparan omnibus law	Seluruh manajemen All management
12	MR.0008/MDI/03/2022	15 Mar 22	- Export developments and projections, as well as banking & NBFIs - Forestry sector ESG mapping report - Communication strategy presentation - Partnership program report - Assurance Division strategy for 2022 - Presentation of omnibus law	
12	MR.0008/MDI/03/2022	15 Mar 22	- Pengajuan RPDD akuntansi - Pengajuan RPDE standar pedoman penyusunan operasional RKAT, Renbis dan RJP - Pemaparan poin usulan omnibus law - Laporan progress annual report - Pemaparan strategi komunikasi: penguatan hubungan media & publikasi - Pemaparan strategi manajemen risiko 2022	Seluruh manajemen All management
			- Accounting RPDD submission - Submission of RPDE standard guidelines for operational preparation of RKAT, Renbis and RJP - Presentation of omnibus law proposal points - Progress annual report - Exposure of communication strategy: strengthening media relations & publication - Exposure of risk management strategy 2022	

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
13	MR.0009/MDI/03/2022	22 Mar 22	- Persetujuan RPDD kebijakan akuntansi LPEI - Persetujuan usulan rancangan SPO penyusunan RKAT, Renbis dan RJP - Strategi efisiensi	Seluruh manajemen All management
			- Approval of Indonesia Eximbank accounting policy RPDD - Approval of the proposed draft SPO for the preparation of RKAT, Renbis and RJP - Efficiency strategy	
14	MR.0010/MDI/03/2022	29 Mar 22	- Persetujuan laporan keuangan NIA - Hasil penilaian Z-Score - TCI dengan skema bank sebagai pemegang polis - Usulan project management initiative 2022 - Penetapan konsultan strategi jangka Panjang	Seluruh manajemen All management
			- Approval of NIA financial statements - Z-Score assessment results - TCI with bank as policyholder scheme - Proposed project management initiative 2022 - Long-term strategy consultant appointment	
15	MR.0011/MDI/04/2022	5 Apr 22	- Laporan hasil <i>enhancement collateral dashboard</i> - Ratifikasi & laporan pelaksanaan komite - Usulan rancangan MPO perubahan SOP penerbitan surat berharga - PDE komite-komite dibawah Direktur Eksekutif - Standar pedoman produk tresuri	Seluruh manajemen All management
			- Collateral dashboard enhancement report - Committee implementation ratification & report - Proposed draft MPO amendment to SOP on securities issuance - PDE of committees under the Executive Director - Standard treasury product guidelines	
16	MR.0012/MDI/04/2022	12 Apr 22	- Perkembangan ekonomi global dan domestik - Laporan audit RSM - Kick off jasa konsultasi penyusunan RJP dan FGD pembahasan strategi LPEI - Prognosa keuangan 2022 - Penetapan WFH dan WFO di lingkungan LPEI - Kapasitas email dan internet - RPDD piagam komite DD	Seluruh manajemen All management
			- Global and domestic economic developments - RSM audit report - Kick off of consulting services for RJP preparation and FGD on Indonesia Eximbank strategy discussion - Financial forecast 2022 - Determination of WFH and WFO in Indonesia Eximbank environment - Email and internet capacity - DD committee charter RPDD	

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
17	MR.0013/MDI/04/2022	14 Apr 22	- Permohonan persetujuan rancangan peraturan Dewan Direktur (RPDD): - Dewan pengawas syariah (DPS) - Komite pemantau risiko (KPR) - Komite audit - RPDE piagam audit internal	Seluruh manajemen All management
18	MR.0014/MDI/04/2022	19 Apr 22	- Laporan profil risiko TW1 tahun 2022 - Usulan portofolio guidelines tahun 2022	Seluruh manajemen All management
19	MR.0015/MDI/04/2022	20 Apr 22	- TCI dengan skema bank sebagai pemegang polis / tertanggung - Persiapan jaminan generasi 2 - SPP trade finance – produk autopurchase LC/ SKBDN Intra LPEI - Penjelasan atas tindak lanjut rancangan PDE penyusunan RKAT, Renbis dan RJP	Seluruh manajemen All management
20	MR.0016/MDI/04/2022	25 Apr 22	- Tunjangan hari raya (THR) - Cuti Bersama	Seluruh Manajemen, kecuali Chesna F. Anwar yang berhalangan hadir karena cuti All management, except Chesna F. Anwar was absence due to taking a leave
21	MR.0017/MDI/04/2022	26 Apr 22	- Laporan Hasil Benchmarking Kebijakan AYDA - Ratifikasi Rapat Board of Management dan Laporan Pelaksanaan Komite - Usulan Revisi PDD Kebijakan Akuntansi LPEI 2022	Seluruh manajemen All management

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
22	MR.0018/MDI/05/2022	10 May 22	Profil Keuangan April 2022	Seluruh manajemen
			April 2022 Financial Profile	All management
23	MR.0019/MDI/05/2022	11 May 22	1. Usulan portofolio guidelines 2022 2. Laporan realisasi RKAT TW I Tahun 2022	Seluruh manajemen
			1. Proposed portfolio guidelines 2022 1. RKAT Q I Year 2022 realization report	All management
24	MR.0020/MDI/05/2022	17 May 22	1. Laporan keuangan <i>segmented</i> 2. <i>Update</i> optimalisasi likuiditas sampai dengan akhir tahun 3. Update forecast 2022 4. Usulan policy lending pembiayaan UMKM melalui skema two-step loans 5. Akad wakalah bil istismar dalam funding tresuri	Seluruh Manajemen, kecuali Dikdik Yustandi yang berhalangan hadir karena cuti
			1. Segmented financial report 2. Update on liquidity optimization until the end of the year 3. 2022 forecast update 4. Proposed policy on MSME financing lending through two-step loans scheme 5. Akad wakalah bil istismar in treasury funding	All management, except Dikdik Yustandi was absence due to taking a leave
25	MR.0021/MDI/05/2022	18 May 22	1. <i>Update</i> Jaminah Gen 2 2. Laporan hasil self-assessment GCG 3. Usulan revisi RPDD kebijakan asuransi	Seluruh Manajemen, kecuali Dikdik Yustandi yang berhalangan hadir karena cuti, Maqin Norhadi berhalangan hadir karena dinas luar kota
			1. Jaminah Gen 2 Update 2. GCG self-assessment result report 3. Proposed revision of insurance policy RPDD	All management, except Dikdik Yustandi was absence due to taking a leave, Maqin Norhadi was absence due to taking a business trip
26	MR.0022/MDI/05/2022	24 May 22	1. Pemaparan Tingkat Kesehatan LPEI TW1 Tahun 2022; 2. Konsep Pelaksanaan <i>Enterprise Risk Assessment</i> (ERA) Tahun 2022; 3. <i>Grand Strategy</i> Divisi Jasa Konsultasi; 4. Usulan <i>Relayout Working Space</i> Kantor Pusat LPEI;	Seluruh Manajemen, kecuali Dikdik Yustandi yang berhalangan hadir karena cuti
			1. Presentation of Indonesia Eximbank QI Soundness Level in 2022; 2. Concept of Enterprise Risk Assessment (ERA) Implementation in 2022; 3. Grand Strategy of Consulting Services Division; 4. Indonesia Eximbank Head Office Working Space Relayout Proposal;	All management, except Dikdik Yustandi was absence due to taking a leave

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
27	MR.0023/MDI/05/2022	31 May 22	- Perkembangan dan proyeksi makroekonomi dan pasar keuangan Juni 2022 - Update ALCO - Usulan persetujuan komite jasa konsultasi - Usulan rancangan MPO optimalisasi dana penugasan khusus pada penugasan umum - Usulan RPDE tentang SPO pengendalian gratifikasi di lingkungan LPEI - Konsultasi pembahasan produk program <i>New Corporate Culture</i> LPEI	Seluruh manajemen All management
28	MR.0024/MDI/06/2022	2 Jun 22	- Macroeconomic and financial market developments and projections June 2022. - ALCO update - Proposed approval of advisory services committee - Proposed draft MPO on optimization of special assignment fund on general assignment - Proposed RPDE on SPO on gratification control within Indonesia Eximbank. - Consultation on program product discussion - New Corporate Culture of Indonesia Eximbank	Seluruh manajemen All management
29	MR.0025/MDI/06/2022	7 Jun 22	- Rancangan RJP LPEI Indonesia Eximbank RJP Draft - Usulan perpanjangan dan penyesuaian MPO manual proteksi piutang dagang - Konsep pelaksanaan enterprise risk assessment (ERA) - Financial update - Usulan relay layout ruang kerja - Pembentukan taskforce RJP LPEI	Seluruh manajemen All management
30	MR.0026/MDI/06/2022	14 Jun 22	- MPO on the extension and adjustment of the MPO on the provisions of Indonesia Eximbank's short-term export working capital financing products. - Concept of enterprise risk assessment (ERA) implementation - Financial update - Proposed workspace relay layout - Formation of Indonesia Eximbank RJP taskforce	Seluruh manajemen All management
			- Pemaparan Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka PEN sesuai PMK No 27 Tahun 2022 Penjaminan PEN Gen 2; - Laporan Realisasi RKAT PT IEB Prima Aset Triwulan I Tahun 2022; - Usulan konsep Eximbank <i>New Way of Working</i> (XWoW).	Seluruh manajemen All management
			- Exposure of Government Credit Guarantee for Corporate Business Actors in the framework of PEN in accordance with PMK No. 27 of 2022 PEN Gen 2 Guarantee; - T IEB Prima Aset RKAT Realization Report for the first quarter of 2022; - Proposed concept of Eximbank New Way of Working (XWoW).	

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
31	MR.0027/MDI/06/2022	21 Jun 22	- Skema <i>Co-Financing</i> LPEI dan Himbara <i>Stakeholder Engagement</i>	Seluruh manajemen All management
			- Indonesia Eximbank and Himbara Co-Financing Scheme - Stakeholder Engagement	
32	MR.0028/MDI/06/2022	27 Jun 22	Persetujuan Policy Lending Lending Policy Approval	Seluruh manajemen All management
33	MR.0029/MDI/07/2022	28 Jun 22	- Kerangka Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (ESG); - LPEI di Kegiatan Presidensi G-20; - Financial Highlights;	Seluruh manajemen All management
			- Policy Framework for Sustainable Finance (ESG); - Indonesia Eximbank at G-20 Presidency Activities; - Financial Highlights;	
34	MR.0030/MDI/07/2022	5 Jul 22	- Usulan perubahan Budaya Lembaga; - Pemeringkatan oleh Lembaga Pemeringkat Internasional Moody's kepada LPEI; - Update agenda showcasing dan partisipasi LPEI dalam agenda Presidensi G20; - Rencana kunjungan Yogyakarta Wakil Menteri Keuangan;	Seluruh manajemen All management
			- Proposed changes to Institutional Culture; - Rating by Moody's International Rating Agency to Indonesia Eximbank; - Update on Indonesia Eximbank's showcasing agenda and participation in the G20 Presidency agenda; - Yogyakarta visit plan of Deputy Minister of Finance;	
35	MR.0031/MDI/07/2022	12 Jul 22	<i>Launching X-WoW</i> dan Budaya Lembaga Baru; - RPDE tentang SPO Penggunaan Tanda Tangan Elektronik; - Economic Outlook; - Konsultan Strategi.	Seluruh Manajemen, kecuali Chesna F. Anwar yang berhalangan hadir karena cuti
			- Launching of X-WoW and New Institute Culture; - RPDE on SPO for Electronic Signature Usage; - Economic Outlook; - Strategy Consultant.	All management, except Chesna F. Anwar was absence due to taking a leave
36	MR.0032/MDI/07/2022	19 Jul 22	- Laporan perkembangan pengelolaan pembiayaan bermasalah Triwulan II tahun 2022; - Laporan pengawasan dan realisasi RKAT dan Renbis Triwulan II 2022; - Hasil evaluasi atas pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik LPEI Tahun 2021; - Penyelenggaraan Rangkaian Acara Hari Ulang Tahun LPEI ke-13.	Seluruh manajemen All management

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			- Report on the progress of non-performing financing management for the second quarter of 2022; - Report on supervision and realization of RKAT and Renbis for the second quarter of 2022; - Evaluation results on the implementation of Indonesia Eximbank's good governance principles in 2021; - Organization of Indonesia Eximbank 13th Anniversary Series of Events.	
37	MR.0033/MDI/07/2022	26 Jul 22	- Persetujuan laporan Profil Risiko TW II Tahun 2022; - Persetujuan penambahan modal bisnis Syariah LPEI;	Seluruh Manajemen, kecuali Dikdik Yustandi yang berhalangan hadir karena dinas luar kota
			- Approval of the Risk Profile report Q II Year 2022; - Approval of additional business capital Indonesia Eximbank Sharia business capital increase;	All management, except Dikdik Yustandi was absence due to taking a business trip
38	MR.0034/MDI/08/2022	03 Aug 22	<i>Financial Highlight Juli 2022</i> <i>Update Website Enhancement</i> <i>Media Monitoring</i> <i>Agenda Lembaga</i>	Seluruh manajemen
			- Financial Highlight July 2022 - Website Enhancement Update - Media Monitoring - Institution Agenda	All management
39	MR.0035/MDI/08/2022	09 Aug 22	- Permohonan persetujuan Sponsorship Trade Expo Indonesia (TEI) 2022; - Rancangan Kunjungan Menteri Keuangan ke Situbondo; - Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Jangka Panjang (RJP) LPEI	Seluruh manajemen
			- Request for approval of Trade Expo Indonesia (TEI) 2022 Sponsorship; - Draft of Minister of Finance Visit to Situbondo; - Request for Approval of Indonesia Eximbank's Long Term Plan (RJP) Proposal	All management
40	MR.0036/MDI/08/2022	16 Aug 22	- Catatan DE terhadap pelaksanaan <i>Senior Leaders Team Building</i>; - Usulan Laporan Tingkat Kesehatan TW II Tahun 2022; - Konsep Perayaan HUT LPEI ke 13;	Seluruh manajemen
			- ED notes on the implementation of the Senior Leaders Team Building; - Proposed Soundness Level Report Q II Year 2022; - Indonesia Eximbank 13th Anniversary Celebration Concept;	All management

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
41	MR.0037/MDI/08/2022	18 Aug 22	- Rancangan Acara HUT LPEI ke -13; - Rancangan Revisi RJP LPEI tahun 2023 2033.	Seluruh manajemen All management
			- Draft Event of the 13th Anniversary of Indonesia Eximbank; - Draft Revision of Indonesia Eximbank's RJP 2023 2033.	
42	MR.0038/MDI/08/2022	23 Aug 22	- Laporan rencana penyusunan RKAT 2023; - Usulan Standar Pedoman Produk Penjaminan; - Tindak lanjut arahan Menteri Keuangan dalam SMV CEO Meeting; - Jasa Produksi 2021.	Seluruh manajemen All management
			- RKAT 2023 preparation plan report; - Proposed Standard Guidelines for Guarantee Products; - Follow-up of the Minister of Finance's direction in the SMV CEO Meeting; - Production Services 2021.	
43	MR.0039/MDI/08/2022	30 Aug 22	- Kick off Audit Laporan Keuangan LPEI tahun 2022; - Laporan Penyaluran Pembiayaan Debitur Dampak Covid (Surat OJK) - Pipeline Pembiayaan untuk Pencapaian Target Desember 2022 - Persiapan RKAT 2023; - Laporan Annual Meeting Moody's;	Seluruh manajemen All management
			- Kick off of Indonesia Eximbank Financial Statement Audit in 2022; - Report on Financing Disbursement of Covid Impact Debtors (OJK Letter) - Financing Pipeline for Achievement of Target December 2022 - Preparation of 2023 RKAT; - Moody's Annual Meeting report;	
44	MR.0040/MDI/09/2022	7 Sep 22	- Laporan Tax Audit; - Financial Highlight posisi Agustus 2022;	Seluruh Manajemen, kecuali Chesna F. Anwar yang berhalangan hadir karena sakit
			- Tax Audit Report; - Financial Highlight position August 2022;	All management, except Chesna F. Anwar was absence due to taking a sick leave
45	MR.0041/MDI/09/2022	13 Sep 22	- Kajian road map GRC; - Tindak lanjut RJP.	Seluruh manajemen
			- Review of GRC road map; - RJP follow-up.	All management
46	MR.0042/MDI/09/2022	15 Sep 22	Pengalihan fungsi litigasi hukum pidana PT IPA ke LPEI	Seluruh manajemen
			Transfer of PT IPA's criminal law litigation function to Indonesia Eximbank	All management

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
47	MR.0043/MDI/09/2022	20 Sep 22	- Laporan partisipasi LPEI pada Trade Expo Indonesia ke-37; - Update rencana pemanfaatan aset DJBC Makassar sebagai Rumah Ekspor; - Report on Indonesia Eximbank's participation in the 37th Trade Expo Indonesia; - Update on the Makassar DGCE asset utilization plan as an Export House;	Seluruh manajemen All management
48	MR.0044/MDI/09/2022	27 Sep 22	- Perkembangan & Proyeksi Makroekonomi dan Pasar Keuangan Oktober 2022; <i>Financial highlights</i>; <i>Action plan penyusunan RKAT 2023</i>; <i>Small & Medium Enterprises (SMEs) Financing Network</i>; - Komite Personalia; - Macroeconomic and Financial Market Developments & Projections October 2022; - Financial highlights; - Action plan for the preparation of the 2023 RKAT; - Small & Medium Enterprises (SMEs) Financing Network; - Personnel Committee;	Seluruh Manajemen, kecuali Henry Sihotang yang berhalangan hadir karena sakit All management, except Henry Sihotang was absence due to taking a sick leave
49	MR.0045/MDI/10/2022	4 Oct 22	- Persetujuan RPDD Pembiayaan; - Persetujuan rancangan SPO Pembiayaan; - Usulan RPDD Tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI; - Usulan RPDD Kebijakan Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI; <i>Financial highlight</i>; - Agenda lembaga. - Approval of RPDD Financing; - Approval of the draft Financing SPO; - Proposed RPDD on Compliance Function Policy and Implementation of Indonesia Eximbank AML/CFT Program; - Proposed RPDD on Policy on Implementation of Internal Audit Function of Indonesia Eximbank; - Financial highlights; - Institution agenda.	Seluruh manajemen All management
50	MR.0046/MDI/10/2022	6 Oct 22	- Pembahasan dan Kesepakatan Hasil Audit atas Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Kredit Modal Kerja (IJP KMK) dalam rangka PEN Tahun 2021 pada LPEI dan PT PII; - Laporan Keuangan 30 September 2022 dan Prognosa 31 Desember 2022 - Discussion and Agreement on Audit Results on Payment of Working Capital Credit Guarantee Fees (IJP KMK) in the framework of PEN 2021 at Indonesia Eximbank and IIGF; - Financial Statements for September 30, 2022 and Prognosis for December 31, 2022.	Seluruh manajemen All management

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
51	MR.0047/MDI/10/2022	11 Oct 22	- Pemaparan Agenda Strakom oleh Konsultan Komunikasi; - Permohonan persetujuan RPDD Penjaminan; - Permohonan Persetujuan SPO Penjaminan; - Agenda lain-lain: Desa Devisa Kopi Aceh.	Seluruh manajemen All management
52	MR.0048/MDI/10/2022	17 Oct 22	Persetujuan daftar hapus buku untuk RKAT 2023;	Seluruh manajemen
			Approval of the write-off list for RKAT 2023;	All management
53	MR.0049/MDI/10/2022	18 Oct 22	- Persetujuan SPP Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan Prinsip Syariah; - Pemaparan hasil <i>Stress Test</i> (Posisi Agustus 2022); - Usulan alur kerja sama LPEI dan Kementerian Luar Negeri RI; - Pemaparan program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan; <i>Financial highlights</i>; - Laporan pengelolaan NPL TW III/ 2022;	Seluruh Manajemen, kecuali Dikdik Yustandi yang berhalangan hadir karena izin All management, except Dikdik Yustandi was absence due to taking a permission
54	MR.0050/MDI/10/2022	20 Oct 22	- Laporan progress pengadaan konsultan Aset Swap Securities; - Laporan progres pengadaan konsultan hukum	Seluruh manajemen All management
			- Securities Asset Swap consultant procurement progress report; - Progress report on procurement of legal consultant	
55	MR.0051/MDI/10/2022	25 Oct 22	<i>Kick off IT Health Check</i>; - Pengadaan Jasa Agensi <i>Annual dan Sustainability Report</i> Indonesia Eximbank 2022; <i>Financial Highlight</i>; - Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2022; - Usulan Rencana Kerja dan Kemitraan; - Usulan Revisi Kebijakan <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> LPEI; - Ratifikasi, Agenda Lembaga dan Laporan Komite;	Seluruh Manajemen, kecuali Riyani Tirtoso yang berhalangan hadir karena izin All management, except Riyani Tirtoso was absence due to taking a permission

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			- Kick off IT Health Check; - Procurement of Indonesia Eximbank Annual and Sustainability Report 2022 Agency Services; - Financial Highlight; - Risk Profile Report for the third quarter of 2022; - Proposed Work Plan and Partnership; - Proposed Revision of Indonesia Eximbank Enterprise Risk Management (ERM) Policy; - Ratification, Agency Agenda and Committee Report;	
56	MR.0052/MDI/11/2022	8 Nov 22	- Laporan tingkat kesehatan LPEI TW III tahun 2022; - Persetujuan Laporan Keuangan 31 Oktober 2022; - Persetujuan Dukungan <i>Sponsorship</i> dan Partisipasi Presidensi G20; - Komite Personalia;	Seluruh manajemen All management
			- Report on the soundness level of Indonesia Eximbank Q III in 2022; - Approval of October 31, 2022 financial statements; - Approval of Sponsorship Support and G20 Presidency Participation; - Personnel Committee;	
57	MR.0052/MDI/11/2022	11 Nov 22	<i>Asset Swap Securities (Project Nexus)</i>	Seluruh manajemen All management
58	MR.0054/MDI/11/2022	15 Nov 22	- PDO report Update; <i>Financial Highlight</i>; <i>Update</i> Standar Pedoman Operasional Pembiayaan; - Standar Pedoman Produk Pembiayaan;	Seluruh Manajemen, kecuali Maqin Norhadi berhalangan hadir karena cuti, Agus Windiarto berhalangan hadir karena dinas luar kota
			- PDO report update; - Financial Highlight; - Update on Financing Operational Guideline Standard; - Standard Financing Product Guidelines;	All management, except Maqin Norhadi was absence due to taking a leave, Agus Windiarto was absence due to taking a business trip
59	MR.0055/MDI/11/2022	22 Nov 22	- Persetujuan Usulan Revisi Kebijakan Sistem Pengendalian Internal; - Persetujuan Usulan Revisi PDD Kebijakan Asuransi; - Persetujuan usulan RPDE <i>Business Continuity Management</i>; - Sentralisasi & standarisasi pengelolaan dokumen wilayah; - Laporan 27th <i>AEBF Annual Meeting</i>, Kuala Lumpur Malaysia; - Laporan rangkaian pertemuan dengan Kemenlu dan usulan rencana kerja sama LPEI – Kemenlu 2023; - Laporan Partisipasi G20;	Seluruh manajemen All management

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			- Approval of the Proposed Revision of the Internal Control System Policy; - Approval of Proposed Revision of Insurance Policy PDD; - Approval of the proposed RPDE Business Continuity Management; - Centralization & standardization of regional document management; - Report on 27th AEBF Annual Meeting, Kuala Lumpur Malaysia; - Report on series of meetings with the Ministry of Foreign Affairs and proposed cooperation plan for Indonesia Eximbank - Ministry of Foreign Affairs 2023; - G20 Participation Report;	
60	MR.0056/MDI/11/2022	23 Nov 22	Evaluasi dan usulan reformat Sorak Serentak Serempak Prajurit Ekspor Indonesia Evaluation and proposed reformat of the Sorak Serentak Serempak Prajurit Ekspor Indonesia	Seluruh Manajemen, kecuali Maqin Norhadi berhalangan hadir karena izin All management, except Maqin Norhadi was absence due to taking a permission
61	MR.0057/MDI/11/2022	29 Nov 2022	- Persetujuan Rencana Bisnis LPEI Tahun 2023 - Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan - PDO Report Update - Financial Highlight - Persetujuan RPDD Jasa Konsultasi - Persetujuan BPKP sebagai pemeriksa GCG LPEI Tahun 2023 - Approval of Indonesia Eximbank Business Plan 2023 - Approval of Sustainable Finance Action Plan - PDO Report Update - Financial Highlight - Approval of Advisory Services RPDD - Approval of BPKP as Indonesia Eximbank's GCG examiner for the year 2023.	Seluruh manajemen All management
62	MR.0058/MDI/12/2022	6 Dec 2022	- Laporan Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) LPEI; - Persetujuan Basis Perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 71; - Laporan Progres <i>IT Health Check</i>; - Laporan PDO; <i>Financial Highlight</i>; - Lain-lain: Steering Committee Komunikasi. - Report on the Establishment of Indonesia Eximbank Sharia Business Unit (UUS); - Approval of CKPN Calculation Basis based on PSAK 71; - IT Health Check Progress Report; - PDO Report; - Financial Highlight; - Others: Steering Committee Communication.	Seluruh Manajemen, kecuali Chesna F. Anwar berhalangan hadir karena izin All management, except Chesna F. Anwar was absence due to taking a permission

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
63	MR.0059/MDI/12/2022	13 Dec 2022	- Laporan hasil <i>Steering Committee Strategi</i> Komunikasi; - Penetapan Pelaksanaan Tugas Direktur Pelaksana; <i>PDO Report Update</i>; <i>Financial Highlight</i>; - Usulan rancangan SPO Penempatan Dana dan Pengelolaan Aktivitas Produk Tresuri; - Rancangan PDE SPO Penerapan Keuangan Berkelanjutan LPEI; - Usulan revisi PDE tentang SPO 9 Komite di Bawah Direktur Eksekutif;	Seluruh Manajemen, kecuali Dikdik Yustandi berhalangan hadir karena dinas luar kota, Agus Windiarto berhalangan hadir karena cuti All management, except Dikdik Yustandi was absence due to taking a business trip, Agus Windiarto was absence due to taking a leave
z			- Communication Strategy Steering Committee result report; - Determination of the Implementation of the Managing Director's Duties; - PDO Report Update; - Financial Highlight; - Proposed draft SPO of Fund Placement and Treasury Product Activity Management; - PDE draft of SPO Implementation of Indonesia Eximbank Sustainable Finance; - Proposed revision of PDE on SPO 9 Committees under the Executive Director;	
64	MR.0060/MDI/12/2022	20 Dec 2022	- Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah bulan November 2022; <i>Financial Highlight</i>; - Rencana Strategis Penugasan Khusus Ekspor (NIA) tahun 2023 – 2024; - Persetujuan pembiayaan <i>Trade Finance</i> ke <i>Financial Institution</i>; - Update aturan internal	Seluruh manajemen All management
			- Non-Performing Financing Management Progress Report for the month of November 2022; - Financial Highlight; - Strategic Plan for Special Export Assignment (NIA) for 2023 - 2024; - Approval of Trade Finance financing to Financial Institution; - Internal Regulations Update	
65	MR.0061/MDI/12/2022	26 Dec 2022	<i>End of Year Gathering</i>; - Protokol Rapat Dewan Direktur (RDD); - Konsultan implementasi RJP - Laporan Keuangan posisi Desember 2022 un-audited;	Seluruh manajemen All management
			- End of Year Gathering; - Board of Director Meeting (RDD) Protocol; - RJP implementation consultant - Financial statements as of December 2022 un-audited;	

RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, AND EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS MEETINGS

No	No. Risalah Minute No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
66	MR.0062/MDI/12/2022	27 Dec 2022	- Laporan Hasil Perhitungan Aspek Budgeting IT Health Check - Persetujuan Prinsip Implementasi Strategy - Persetujuan Publikasi Penghapusbukuan Debitur LPEI tahun 2022 - Ratifikasi Rabom, Laporan Pelaksanaan Komite dan Agenda Lembaga	Seluruh manajemen All management
			- Report on the Calculation Results of IT Health Check Budgeting Aspects - Approval of Strategy Implementation Principles - Publication Approval for Debtor Bookkeeping in 2022 - Board Meeting Ratification, Committee Implementation Report and Institutional Agenda	

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS TRAINING PROGRAM



Pada tahun 2022, Direksi mengikuti program-program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, sebagai berikut:

The Board of Directors took part in the following training programs in 2022 to improve their competence:

No	Nama Direksi Director Name	Tanggal Date	Judul Pelatihan / Seminar / Workshop Training / Seminar / Workshop Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer
1	Riyani Tirtoso	01-Apr-22	Senior Leader Workshop "Redefining Us"	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
2		20-Dec-22	Indonesia Economic Outlook 2023	Ritz Carlton	PT SMI
3		22-Dec-22	Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Islamic Finance Concept and Implementation Training	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Islam Karim Consulting & Management Center of the Islamic Economic Community
4	Dikdik Yustandi	09-Feb-22	Mandiri Investment Forum	Online/Zoom	Bank Mandiri
5		11-Feb-22	Pelatihan Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN Training on Procedures for Filling in the E-LHKPN Application	Online/Zoom	KPK
6		18-Feb-22	FGD Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis PKE FGD Discussion of Compilation of PKE Strategic Plans	Online/Zoom	Kemenkeu
7	Dikdik Yustandi	24-Mar-22	FGD Kuliner Siap Ekspor dalam Rangka Mendukung Program Indonesia Spice Up the World Culinary FGD Ready for Export in the Context of Supporting the Indonesia Spice Up the World Program	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
8		01-Apr-22	Senior Leader Workshop "Redefining Us"	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
9		22-Dec-22	Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Islamic Finance Concept and Implementation Training	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Islam Karim Consulting & Management Center of the Islamic Economic Community
10	Maqin U. Norhadi	21-Jan-22	Workshop Program Kerja 2022 - Penjaminan dan Asuransi 2022 Work Program Workshop - Underwriting and Insurance	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
11		26-Jan-22	Undangan Narasumber Business Gathering ASEI Invitation to ASEI Business Gathering Speaker.	Kempinski Hotel Jakarta	ASEI
12		28-Jan-22	Workshop Program Kerja 2022 - Pembiayaan (Korporasi, BUMN) & Penugasan Khusus 2022 2022 Work Program Workshop - Financing (Corporate, BUMN) & Special Assignments 2022	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS TRAINING PROGRAM

No	Nama Direksi Director Name	Tanggal Date	Judul Pelatihan / Seminar / Workshop Training / Seminar / Workshop Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer
13		03-Feb-22	Narasumber acara PKE "Peran LPEI dalam Mendukung Ekspor Nasional / Sosialisasi PMK 183.08/2021 PKE event resource person "The Role of LPEI in Supporting National Exports / Dissemination of PMK 183.08/2021"	Transluxury Hotel Bandung	DJPPR
14		17-Mar-22	FGD Perumusan Renstra PKE PKE Strategic Plan Formulation FGD	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	DJPPR
15		01-Apr-22	Senior Leaders Workshop 'Redefining Us'	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
16		12-Aug-22	Narasumber pada Mid-Year Senior Leaders Team Building 2022 dengan tema "APIK Team, EPIC Dream". Speaker at Mid-Year Senior Leaders Team Building 2022 with the theme "APIK Team, EPIC Dream".	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
17		23-Sep-22	Undangan Mengikuti Seminar "Cara APIK Melawan Fraud & Money Laundering" Invitation to Participate in the Seminar on "APIK Ways to Fight Fraud and Money Laundering"	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
18		07-Oct-22	Narasumber dalam acara 9th Indonesia Islamic Economic Forum dengan tema "Strategi Penguatan Ekosistem Halal Global Dalam Upaya Mendukung Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia" Speaker at the 9th Indonesia Islamic Economic Forum with the theme "Strategy to Strengthen the Global Halal Ecosystem in an Effort to Support Indonesia as a World Sharia Economic Center"	JCC	MES
19		21-Dec-22	Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Islamic Finance Concept and Implementation Training	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
20		22-Dec-22	Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Islamic Finance Concept and Implementation Training	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Islam Karim Consulting & Management Center of the Islamic Economic Community

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS TRAINING PROGRAM

No	Nama Direksi Director Name	Tanggal Date	Judul Pelatihan / Seminar / Workshop Training / Seminar / Workshop Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer
21	Agus Windiarto	01-Apr-22	Senior Leader Workshop "Redefining Us"	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
22		17-Jul-22	Monetary and Financial Sector to Support Stability and Recovery	Hotel Borobudur	Bank Indonesia
23		03-Nov-22	Seminar Perluasan Ekspor melalui Pemberian Hibah Kepada Pemerintah / Lembaga Asing Seminar on Export Expansion through Giving Grants to Foreign Governments/ Institutions	Kemenkeu Ministry of Finance	LDKPI
24		05-Nov-22	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Level 5 Risk Management Certification	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	BARA
25		15 -17-Nov-22	27th CEO Annual Meeting of The Asian Exim Banks Forum (AEBF)	Malaysia	AEBF
26		22-Dec-22	Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Islamic Finance Concept and Implementation Training	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Islam Karim Consulting & Management Center of the Islamic Economic Community
27	Chesna F. Anwar	01-Apr-22	Senior Leader Workshop "Redefining Us"	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
28		20-May-22	Perempuan Tangguh dalam Ekspor Berkelanjutan, Road to W20: Setara Bangkit Bersama Resilient Women in Sustainable Exports, Road to W20: Rising Together Equally	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
29		22-Dec-22	Pelatihan Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Islamic Finance Concept and Implementation Training	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	Karim Consulting & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Islam Karim Consulting & Management Center of the Islamic Economic Community
30	Henry Sihotang	11-Feb-22	[Leadership Session] Penguatan Karakter Pemimpin Unggul yang Berakhlak bersama Prof. Dr. Djoko Santoso M. [Leadership Session] Strengthening the Character of Excellent Leaders with Action with Prof. Dr. Djoko Santoso M.	Online/Zoom	LPEI Indonesia Eximbank
31		18-Mar-22	WEBINAR: Sustainable Finance Discussion	Online/Zoom	Standard Chartered
32		30-Mar-22	Workshop Pelaksanaan Perumusan Budaya LPEI Indonesia Eximbank Culture Formulation Implementation Workshop	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
33		01-Apr-22	Senior Leaders Workshop 'Redefining Us'	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank
34		20-May-22	Perempuan Tangguh dalam Ekspor Berkelanjutan, Road to W20: Setara Bangkit Bersama Resilient Women in Sustainable Exports, Road to W20: Rising Together Equally	Kantor Pusat LPEI Indonesia Eximbank Head Office	LPEI Indonesia Eximbank

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS TRAINING PROGRAM

No	Nama Direksi Director Name	Tanggal Date	Judul Pelatihan / Seminar / Workshop Training / Seminar / Workshop Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer
35	Suminto		Directorship Program “High Performance Boards”	Jakarta	Pertamina Training & Consulting
36	Kasan		Directorship Program “High Performance Boards”	Jakarta	Pertamina Training & Consulting

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

INFORMATION ON ULTIMATE AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara di mana 100% (seratus persen) saham dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia Eximbank is a State-Owned Enterprise in which all Company shares are 100% fully owned by the Government of the Republic of Indonesia, which represented by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.



Pemerintah Negara Republik Indonesia
Government of the Republic of Indonesia

100%

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)



KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA

POLICY ON THE DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR, AND MANAGING DIRECTOR

Keberagaman komposisi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI diatur dalam Pasal 25 UU No. 2/2009.

The diversity of the composition of the Company's Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors is regulated in Article 25 of Law No. 2/2009.

Anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 orang dan paling sedikit 4 orang. Komposisi Dewan Direktur LPEI terdiri dari unsur *Ex-Officio* instansi atau lembaga dan unsur profesional.

Total members of the Board of Directors are 10 members and at least 4 members. The composition of the Company's Board of Directors consists of Ex-Officio elements from agencies or institutions and professional elements.

Komposisi anggota Dewan Direktur dari unsur *Ex-Officio* instansi atau lembaga yaitu 3 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, 1 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.

The composition of the members of the Board of Directors is from the Ex-Officio agency or institution, namely 3 officials from an agency or institution in charge of fiscal affairs, 1 official from an agency or institution in charge of commerce, 1 official from an agency or institution in charge of industry, 1 official from the agency or institution in agriculture.

Komposisi anggota Dewan Direktur dari unsur profesional yaitu paling banyak 3 orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 orang dari dalam LPEI. PMK Nomor 58/PMK.06/2020 mengatur bahwa calon anggota Dewan Direktur wajib memiliki paling sedikit keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang diperlukan oleh LPEI, yaitu keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, penjaminan, asuransi, perdagangan internasional dan/ atau hukum.

The composition of members of the Board of Directors from the professional element is a maximum of 3 people from external of the Company and 1 person from internal. PMK No. 58/PMK.06/2020 stipulates that prospective member of the Board of Directors must have at least the expertise and experience in one of the fields required by the Company, namely expertise and experience in economics, finance, banking, underwriting, insurance, international trade and/ or law.

Komposisi Composition	Kebijakan Keberagaman Policy of Diversity
Dewan Direktur Board of Directors	Anggota Dewan Direktur LPEI berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari pejabat yang membidangi fiskal, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan kalangan profesional. Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Total members of the Board of Directors of Indonesia Eximbank are the most consisted of 10 (ten) members that include the executives in charge of fiscal, trade, industry, agriculture, and professionals. One of members of the Board of Directors is stipulated by the Finance Minister as the Chairman of the Board of Directors and Executive Director.
Direktur Eksekutif Executive Director	Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan kegiatan operasional Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana. One of members of the Board of Directors is stipulated by the Finance Minister as the Chairman of the Board of Directors and Executive Director. In implementing operational activity, the Executive Director is assisted by the Managing Directors.
Direktur Pelaksana Managing Director	Direktur Pelaksana LPEI paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam Lembaga. Total members of the Managing Directors of Indonesia Eximbank are the most consisted of 5 (five) members and at the most 4 (four) members from internal Institution.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR LAIN DAN DIREKTUR PELAKSANA

FINANCIAL RELATIONSHIPS AND FAMILY RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS WITH OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGING DIRECTORS

Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana.

The Board of Directors with other Members of the Board of Directors and the Managing Director do not have financial and family relations up to the second degree or in-laws with members of the Board of Directors and the Managing Director.

Nama Name	Hubungan Afiliasi dengan: Affiliation with:							
	Dewan Direktur Board of Directors		Direktur Eksekutif Executive Directors		Direktur Pelaksana Managing Directors		Pemegang Saham Utama Ultimate Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director		✓		✓		✓		✓
Suminto Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		✓		✓		✓		✓
Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		✓		✓		✓		✓
Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		✓		✓		✓		✓
Felia Salim Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		✓		✓		✓		✓
Daniel James Rompas Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors		✓		✓		✓		✓
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana bidang Pembiayaan Managing Director of Financing		✓		✓		✓		✓
Maqin U. Norhadi Direktur Pelaksana bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development		✓		✓		✓		✓
Agus Windiarto Direktur Pelaksana bidang Keuangan dan Operasional Managing Director of Finance and Operations		✓		✓		✓		✓
Henry Sihotang* Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko dan Kredit Managing Director of Risk and Credit Management		✓		✓		✓		✓
Chesna F. Anwar Direktur Pelaksana bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations		✓		✓		✓		✓

(*) Menjabat pada 1 Januari s.d 5 Desember 2022 | Served from 1 January to 5 December 2022



PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA

GCG ASSESSMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR - MANAGING DIRECTORS

Secara umum dasar kebijakan penilaian kinerja dari Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif - Direktur Pelaksana mengacu kepada mandat LPEI sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2009. Setiap tahun, Menteri Keuangan menetapkan Kontrak Manajemen yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut target yang hendak dicapai oleh Dewan Direktur termasuk Direktur Eksekutif.

Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dilakukan oleh Menteri Keuangan pada Rapat Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Proses Pelaksanaan Asesmen Kinerja

Atas capaian kinerja pada tahun berjalan, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana diberikan tantiem. Hal ini sesuai Pasal 21 UU No. 2/2009 surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk:

- Cadangan umum;
- Cadangan tujuan;
- Jasa produksi dan tantiem; dan
- Bagian laba pemerintah.

Ketentuan mengenai penetapan remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana berupa pemberian tantiem dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 396/KMK.06/2021 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, Dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Penetapan Jasa Produksi dan Tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Surplus;
- Capaian Indikator Kinerja Utama;
- Pelaksanaan penugasan Pemerintah; dan
- Faktor-faktor lain yang relevan

In general, the basis of performance assessment policy for the Board of Directors and Executive Director - Managing Directors refers to the Company mandate as stated in Law No. 2 of 2009. The Minister of Finance sets out the Management Contract every year that contains the Key Performance Indicators (KPI) and targets to be achieved by the Board of Directors and the Executive Director.

Assessments

The Minister of Finance carries out the performance assessment of the Board of Directors and Executive Directors at the Annual Work Plan and Budget (RKAT) Ratification Meeting.

Performance Assessment Procedures

The tantiem is granted to the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors for the achievements in the current year, which is based on the article 21 Law No. 2/2009 that the surplus achieved by Indonesia Eximbank in 1 (one) year can be allocated for:

- General reserves;
- Specific reserves;
- Performance bonus and tantiem; and
- Government profit share.

The determination of tantiem for the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors remuneration refers to Decree of the Minister of Finance No. 396/KMK.06/2021 on the Determination of Basic Salary, Income, and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank.

The determination of Performance Bonus and Tantiem is considered by:

- Surplus;
- Key Performance Indicators Achievement;
- National interest account implementation; and
- Other relevant factors.

PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF- DIREKTUR PELAKSANA
GCG ASSESSMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR - MANAGING DIRECTORS

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana

Penilaian Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi:

Performance Assessment Criteria of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors

The performance assessment of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors uses the KPI which includes:

Sasaran Strategis Strategic Goals	No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achieved
Perspektif Mandat dan Keuangan Mandate and Financial Perspectives						92%
IEB-1 Penugasan Umum General Assignments	1	Pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) berupa: The implementation of National Export Financing (PEN) is in the form of:	%	100%		104%
	a.	Outstanding Pembiayaan Outstanding Financing	Rp miliar billion	88.231	83.636	95%
	b.	Outstanding Penjaminan Komersial Outstanding Commercial Guarantee	Rp miliar billion	9.812	8.666	88%
	c.	Plafon Asuransi Insurance Ceiling	Rp miliar billion	12.100	16.783	120%
	d.	Volume Trade Finance Trade Finance Volume	Rp miliar billion	9.350	16.966	120%
IEB-2 Penugasan Khusus National Interest Accounts	2	Efektivitas Pelaksanaan Penugasan Khusus berupa: The effectiveness of the implementation of National Interest Accounts in the form of:	%	100%		113%
	a.	New Disbursement Penugasan Khusus (NIA) New Disbursement of National Interest Accounts (NIA)	Rp miliar billion	3.000	4.056	120%
	b.	Peningkatan utilisasi pembiayaan Penugasan Khusus (NIA) Increased utilization of NIA financing	%	25%	20,1%	100%
IEB-3 Perbaikan kinerja keuangan yang berkelanjutan Continuous improvement of financial performance	3	Optimalisasi kinerja keuangan berupa: Optimization of financial performance in the form of:	%	100%		55%
	a.	Net Profit	Rp miliar billion	456	(3.115)	0%
	b.	Perbaikan komposisi pendanaan (CoF Market - IDR) Improved funding composition (CoF Market - IDR)	%	7,5%	7,4%	110%
Perspektif Stakeholder dan Customer Stakeholder and Customer Perspectives						115%
IEB-4 Penguatan Jasa Konsultasi Strengthening Advisory Services	4	Peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM melalui: Increasing the role of Indonesia Eximbank in developing MSMEs through:	%	100%		120%
	a.	Penciptaan Eksportir baru (tidak termasuk eksportir Desa Devisa) Creation of new exporters (excluding Desa Devisa exporters)	Jumlah Total	100	145	120%
	b.	Peningkatan jumlah Desa Devisa Increase in the number of Desa Devisa	Jumlah Total	10	151	120%
	c.	Pembentukan komunitas/ekosistem ekspor Establishment of export communities/ecosystems	%	100%	1300%	120%
	d.	Top of Mind posisi LPEI sebagai penunjang ekspor (jumlah viewers) Top of Mind Institution's position as export support (number of viewers)	Jumlah Total (viewers)	8.000	10.633	120%
IEB-5 Optimalisasi Sinergi BUMN/ Lembaga Keuangan Optimization of Synergy of SOEs/ Institutions of the Ministry of Finance	5	Kegiatan Joint Program yang melibatkan seluruh BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint Program activities involving all SOEs/Institutions under the Ministry of Finance	Jumlah Total	1	1	100%
IEB-6 Peningkatan daya ungkit kepada ekspor nasional Increased leverage to national exports	6	Developmental Impact LPEI terhadap Ekspor barang Indonesia Eximbank's Developmental Impact on Export of Goods	Kali Times	3,55	3,90	110%

PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF- DIREKTUR PELAKSANA

GCG ASSESSMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR - MANAGING DIRECTORS

Sasaran Strategis Strategic Goals		No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators		Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achieved	
Perspektif Proses Bisnis Internal Internal Business Process Perspectives								72%	
Perbaikan Kualitas Aset Assets Quality Improvement								55%	
IEB-7	Perbaikan kualitas asset Improved assets quality	7	Terlaksananya perbaikan kualitas aset Lembaga berupa: Improvements in the quality of the Institution's assets in the form of:			%	100%	55%	
		α.	Non Performing Loan (NPL) amount			Rp miliar billion	14.430	22.259	46%
		β.	Rasio NPL Netto Net NPL Ratio			%	7,05%	10,39%	53%
		γ.	Optimalisasi SPV SPV Optimization			Rp miliar billion	3.796	2.967	78%
		-	Upgrade account			Rp miliar billion	1.431	55	4%
		-	Recovery / Collection / AYDA			Rp miliar billion	244	236	96%
		-	Hapus Buku Write-Offs			Rp miliar billion	3.157	2.677	85%
Proses Bisnis Internal Internal Business Processes								100%	
IEB-8	Penyempurnaan risk awareness dan Compliance Improved risk awareness and compliance	8	Terlaksananya Risk Awareness dan Compliance Lembaga melalui: Implementation of Risk Awareness and Compliance of Institutions through:			%	100%	99%	
		α.	Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Lembaga Assessment results of the Institution Governance Practices			%	85%	83,9%	99%
		β.	Perbaikan proses credit underwriting yang robust Robust credit underwriting process improvements			%	100%	100%	100%
IEB-9	Pemenuhan tindak lanjut temuan audit Fulfillment of audit findings follow-up	9	Pemenuhan tindak lanjut temuan audit Fulfillment of audit findings follow-up			%	100%	94%	94%
IEB-10	Proses operasional yang efisien dan efektif Efficient and effective operational processes	10	Penguatan teknologi, operasional dan Management Information System (MIS) Strengthening technology, operations and Management Information System (MIS)			%	100%	107%	107%
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growth Perspectives								108%	
IEB-11	Penguatan Struktur Organisasi Lembaga dan Special Purpose Vehicle (SPV) Strengthening the Organizational Structure of Institution and Special Purpose Vehicle (SPV)	11	Penataan Struktur Organisasi dan SPV sesuai dengan mandate Structuring the Organizational Structure and SPV in accordance with the mandate			%	100%	100%	100%
IEB-12	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkinerja tinggi Competent and high-performing Human Resources (HR)	12	Pemenuhan kapabilitas dan succession plan untuk posisi kunci Fulfillment of capabilities and succession plans for key positions			%	100%	120%	120%
IEB-13	Penguatan budaya kerja Lembaga Strengthening the work culture of the Institution	13	Penguatan budaya kerja: risk awareness, kepatuhan, integritas dan profesionalisme pada setiap pegawai Strengthening work culture: risk awareness, compliance, integrity and professionalism in each employee			%	100%	110%	110%
Total								89%	

PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF- DIREKTUR PELAKSANA
GCG ASSESSMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR - MANAGING DIRECTORS

Sasaran Strategis Strategic Goals	No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achieved
Perspektif IKU IKU Perspective						Capaian Achieved
	I	Perspektif Mandat dan Keuangan Mandate and Financial Perspectives				92%
		- Pelaksanaan Mandat Mandate Implementation				107%
		- Keuangan Finance				55%
	II	Perspektif Stakeholder dan Customer Stakeholders and Customer Perspectives				115%
	III	Perspektif Proses Bisnis Internal Internal Business Process Perspectives				72%
		- Perbaikan Kualitas Aset Asset Quality Improvement				55%
		- Proses Bisnis Internal Internal Business Processes				100%
	IV	Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growth Perspectives				108%
		Total				89%

Pelaksanaan Asesmen

Pelaksanaan Asesmen kinerja Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dilakukan dalam Rapat Pengesahan oleh Menteri Keuangan.

The Assessment

The Minister of Finance carries out the performance assessment of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors in the Ratification Meeting.



REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan: gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kebijakan besaran gaji pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana diatur melalui KMK No. 396/KMK.06/2021 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Sebagaimana telah uraikan pada bagian Direktur Eksekutif pada buku laporan tahunan ini, bahwa Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur. Dengan demikian prosedur penetapan remunerasi Direktur Eksekutif sama dengan penetapan remunerasi Dewan Direktur.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Usulan remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan unit kerja Sumber Daya Manusia untuk melakukan *benchmarking* terhadap penghasilan *Top Management* baik dari industri perbankan, maupun lembaga keuangan non-bank.

Hasil tersebut akan disampaikan kepada Dewan Direktur melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya, Dewan Direktur akan mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan RI.

Prosedur penetapan Remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, sebagai berikut:

Remuneration Policy

Remuneration policy refers to Law No. 2/2009 on Indonesia Eximbank, Article 26 paragraph (3) stating that the Finance Minister of the Republic of Indonesia stipulates the salary, income, and other benefits of the Board of Directors and Managing Directors.

The policy on the amount of basic salary for the Board of Directors and Managing Directors refers to KMK No. 396/KMK.06/2021 on the Basic Salary, Income, and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank.

As elaborated in the Executive Director section in this annual report, the Executive Director of Indonesia Eximbank is one of members of the Board of Directors assigned by the finance minister as Chairman of the Board of Directors. As such, the procedure of remuneration for the Executive Director is the same as for the Board of Directors

Remuneration Procedures

The remuneration for the Board of Directors and Managing Directors is proposed by the Remuneration and Nomination Committee coordinating with Human Resources to carry out benchmarking for the Top Managements income either from banking or non-banking financial institution.

The result will be provided to the Board of Directors through the Remuneration and Nomination Committee, and further will be proposed to the Minister of Finance.

The remuneration procedures for the Board of Directors and Managing Directors, are as follows:

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration & Nomination Committee	Dewan Direktur Board of Directors	Komite Remunerasi & Nominasi Minister of Finance
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur	Mengajukan usulan remunerasi kepada Menteri Keuangan	- Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi - Melakukan proses persetujuan - Menerbitkan putusan melalui Keputusan Menteri Keuangan
Provide recommendation for the Board of Directors	Submit the proposal of Remuneration to the Minister of Finance	- Evaluate the proposal of remuneration - Perform the approval process - Issued the decision through the Minister of Finance Decision

Struktur Remunerasi dan Fasilitas

Struktur remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan panjang atau pasca kerja setiap anggota Dewan Direktur, maupun Direktur Pelaksana, berdasarkan KMK No. 396/KMK.06/2021 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, Dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah sebagai berikut:

Remuneration Structure and Facility

The remuneration structure of the Board of Directors and Managing Directors includes the types and amount of short term and long term incentives or post tenure of each member of the Board of Directors or Managing Directors based on KMK No. 396/KMK.06/2021 on the Basic Salary, Income, and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank are as follows:

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur**Remuneration Structure and other Facilities for Executive Director and Chairman of the Board of Director**

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium Salary	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 100% Executive Director concurrently as Chairman of the Board of Directors 100%
2	Tunjangan Allowances	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium tahunan Insurance scheme with maximum premium of 25% of annual salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (<i>at cost</i>) Provided at cost
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Diberikan <i>lumpsum</i> , maksimal 30% dari gaji per bulan. Diberikan apabila tidak diberikan fasilitas rumah jabatan Provided lumpsum, maximum 30% of salary per month. Provided if there is no housing allowance
3	Fasilitas Facilities	
	Kendaraan Dinas Transportation Allowance	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung LPEI Provided 1 (one) unit of vehicle, maximum volume 2500 cc with operational lease and maintenance to be borne by Indonesia Eximbank

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan Maximum of 3 (three) associations
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
	Club Membership Club Membership	Maksimal pada 2 (dua) club Maximum at 2 (two) clubs
	Biaya Representasi Representation Cost Facility	Diberikan dalam bentuk <i>Corporate Credit Card</i> Provided in the form of Corporate Credit Card
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Business Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel
5	Pajak PPh atas Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/ Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur

Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium Salary	Anggota Dewan Direktur 50% (atau: 50% dari Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur) Members of the Board of Directors of 50% (or: 50% from Executive Director concurrently Chairman of the Board of Directors)
2	Tunjangan Allowances	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x honorarium Maximum 1x honorarium
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium tahunan Insurance scheme with maximum premium of 25% of annual salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (<i>at cost</i>) Provided at cost
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month
3	Fasilitas Facilities	

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan indakan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan Maximum of 3 (three) associations
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi indakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Business Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel
5	Pajak PPh atas Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/ Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana

Remuneration Structure and Facilities for Managing Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium Salary	Direktur Pelaksana 90% (atau: 90% dari Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur) Managing Director of 90% (Or: 90% from Executive Director concurrently Chairman of the Board of Directors)
2	Tunjangan Allowance	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium tahunan Insurance scheme with maximum premium of 25% of annual salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (<i>at cost</i>) Provided at cost
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month
3	Fasilitas Facilities	
	Kendaraan Dinas Transportation Allowance	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung LPEI Provided 1 (one) unit of vehicle, maximum volume 2500 cc with operational lease and maintenance to be borne by Indonesia Eximbank

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Business Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur

Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah yang Diterima Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana dalam 1 tahun Amount Received by Executive Director & Managing Director in 1 year	
	Orang Person	Jumlah Amount
Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances	6	Rp23.342.644.755
Tantiem	6	-
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other facilities in kind	6	Rp2.552.511.032
Total	6	Rp25.895.155.787

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Anggota Dewan Direktur

Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah yang Diterima Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana dalam 1 tahun Amount Received by Executive Director & Managing Director in 1 year	
	Orang Person	Jumlah Amount
Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances	4	Rp10.352.651.689
Tantiem	4	-
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other facilities in kind	4	Rp1.057.168.549
Total	4	Rp11.409.820.238

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS**Kelompok Jumlah Remunerasi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana**
Group of Remuneration for Executive Director and Managing Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Orang Total Personnel
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	6
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Between Rp1 billion to Rp2 billion	0
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Between Rp500 million to Rp1 billion	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	0

Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Direktur
Group of Remuneration for Members of the Board of Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Orang Total Personnel
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	5
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Between Rp1 billion to Rp2 billion	0
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Between Rp500 million to Rp1 billion	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	0

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

LPEI senantiasa memperhatikan rasio gaji tertinggi dan terendah di lingkungan Lembaga, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2022, rasio ini meliputi :

Highest Salary and Lowest Salary Ratio

As part of the implementation of good corporate governance, Indonesia Eximbank always pays attention to the highest and lowest salary ratios within the Institution. In 2022, this ratio includes:

No.	Rasio Gaji Salary Ratio	Gaji Pokok Basic Salary	Take Home Pay (THP)
1	Gaji pegawai terendah dibanding tertinggi Lowest employee salary compared to highest	38,5	19.33
2	Gaji Direktur Pelaksana terendah dibanding tertinggi Managing Director salaries lowest compared to highest	1	1
3	Gaji Dewan Direktur terendah dibanding tertinggi Board of Directors salary lowest compared to highest	1	1
4	Gaji Direktur Pelaksana terhadap pegawai tertinggi Managing Directors salary to the highest employee	1,3	1,3

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTORS

Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana untuk Penetapan Remunerasi

Penetapan Indikator Kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilakukan di awal tahun melalui mekanisme rapat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan dalam Kontrak manajemen antara Dewan Direktur dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya kontrak manajemen tersebut diturunkan (*Cascading*) antara Direktur Pelaksana dengan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Penilaian Kinerja Direksi tercermin dari realisasi atas capaian indikator kinerja pada kontrak manajemen yang merupakan bagian dari target-target yang terdapat pada RKAT. Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersedia di halaman 313 di Bab Tata Kelola ini.

Executive Director & Managing Directors Performance Indicators for Remuneration

Stipulation The performance indicators of the Executive Director and Managing Directors are stipulated in the beginning Work & Budget Plan as stated in the management Contract between the Board of Directors and Minister of Finance c.q. Director General of State Treasury. Furthermore, the management contract cascades between the Managing Directors and Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director.

The Director's performance assessment is reflected from the realization of performance indicators achievements in the management contract which is part of the targets set forth in the Annual Work & Budget Plan. Detailed Key Performance Indicators (KPI) is presented on page 313 in this GCG Chapter.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH SHARIA SUPERVISORY BOARD



“Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh produk, kebijakan, dan kegiatan usaha Syariah LPEI untuk memastikan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan perundang-undangan terkait LPEI yang berlaku.

The National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama's (DSN-MUI) fatwa, as well as any applicable laws and regulations pertaining to Indonesia Eximbank, were taken into consideration when the Sharia Supervisory Board carried out its oversight function of all Indonesia Eximbank Sharia products, policies, and business activities to ensure that they adhere to sharia principles.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut, LPEI wajib menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna membantu Direktur Eksekutif dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan PDD Nomor: 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tugas dan tanggung jawab DPS tercantum pada Pasal 10 dan 11 yang diatur sebagai berikut:

Pasal 10:

DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran (advisory) kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi seluruh kegiatan usaha syariah LPEI agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 11:

DPS mempunyai tugas tanggung jawab antara lain:

- mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- menganalisa laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Pelaksana, pelaksana fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas pelaksanaan bisnis yang menggunakan Prinsip Syariah;
- menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas seluruh kebijakan, pedoman operasional, produk, transaksi dan laporan keuangan syariah yang dikeluarkan LPEI;

Pursuant to Law No. 2/2009, Indonesia Eximbank can conduct Sharia-based business activities. In performing business activities based on Sharia principles, and implementing the principles of GCG, the Sharia Supervisory Board (SSB) shall support the Executive Director.

Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

The obligations of the DPS are outlined in Articles 10 and 11 of PDD Number: 0013/PDD/10/2022, which governs the Charter of the Sharia Supervisory Board of the Indonesia Eximbank, and are governed as follows:

Article 10:

The DPS is tasked with advising the Executive Director and supervising all Indonesia Eximbank sharia business activities to ensure that they adhere to Sharia Principles.

Article 11:

DPS is accountable for, among other things:

- evaluating the Risk Management policy related to the fulfilment of Sharia Principles;
- evaluating the accountability of the Executive Director for the implementation of Risk Management policies related to the fulfilment of Sharia Principles as referred to in letter a;
- analysing reports submitted by and/or requested from the Executive Director and/or the Managing Director, the internal audit function and/or the compliance function to determine the quality of the implementation of the fulfilment of Sharia Principles on the implementation of business using Sharia Principles;
- assessing and ensuring the fulfilment of Sharia Principles on all policies, operational guidelines, products, transactions, and sharia financial statements issued by Indonesia Eximbank;

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

- e. mengawasi, memberikan masukan dan nasihat atas pengembangan produk syariah baru agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
- f. merekomendasikan kepada LPEI untuk mengajukan fatwa kepada DSNMUI untuk produk syariah baru LPEI yang belum ada fatwanya;
- g. melakukan review secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha syariah LPEI;
- h. melakukan edukasi dan pembinaan kepada staf-staf LPEI dan nasabah-nasabah yang direkomendasikan oleh LPEI;
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir periode pelaporan; dan

Dewan Pengawas Syariah melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur.

Mekanisme pemberian saran Dewan Pengawas Syariah

Cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di LPEI dilakukan melalui mekanisme Rapat DPS. Berdasarkan PDD No. 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mekanisme rapat DPS tercantum pada Pasal 15 yang diatur sebagai berikut :

Mekanisme rapat DPS adalah sebagai berikut:

- I. rapat DPS dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali atau dalam hal dianggap perlu, rapat dapat dilakukan lebih cepat sesuai kebutuhan.
- II. pemanggilan rapat disampaikan oleh Departemen Konsultasi Syariah kepada setiap DPS maksimal 2 (dua) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- III. rapat dapat dilakukan secara fisik, telekonferensi, dan/ atau media elektronik lainnya.

- e. supervise, provide input and advice on the development of new sharia products to be in accordance with the fatwa of DSN-MUI;
- f. recommending to Indonesia Eximbank to submit fatwa to DSNMUI for Indonesia Eximbank 's new sharia product which has no fatwa;
- g. conducting periodic review at least 1 (one) time in 3 (three) months on the fulfilment of Sharia Principles on the implementation of Indonesia Eximbank 's sharia business activities;
- h. conducting education and guidance to Indonesia Eximbank staff and customers recommended by Indonesia Eximbank;
- i. prepare and submit the DPS Supervisory Report to the Executive Director with a copy to the Board of Directors periodically at least once every 3 (three) months and submitted no later than 7 (seven) working days after the end of the reporting period; and

The Sharia Supervisory Board reports the activities and results of the assignments it receives to the Executive Director with a copy to the Board of Directors.

Sharia Supervisory Board advisory mechanism

The DPS Meeting process is used to provide recommendations and oversee how the sharia principles are being followed at Indonesia Eximbank. The DPS meeting procedure is mentioned in Article 15 of PDD No. 0013/PDD/10/2022, which is the Charter of the Sharia Supervisory Board of the Indonesia Eximbank, and is regulated as follows:

The DPS meeting mechanism is as follows:

- I. DPS meetings are held periodically at least once a month or in cases deemed necessary, meetings can be held more quickly as needed
- II. the invitation for the meeting is submitted by the Sharia Consultation Department to each DPS a maximum of 2 (two) days before the meeting is held.
- III. the meeting may be conducted physically, teleconference, and/or other electronic media.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

- IV. rapat yang tidak dihadiri secara fisik dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- V. rapat dipimpin oleh Ketua DPS, dalam hal Ketua DPS tidak hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota DPS lain.
- VI. pengambilan keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dianggap sah serta mengikat apabila dihadiri dan disetujui minimal 2 (dua) DPS yang sedang menjabat.
- VII. keputusan rapat DPS dituangkan ke dalam lembar opini DPS I Risalah Rapat I dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu, sebagai bukti sah keputusan yang diambil.
- VIII. lembar opini DPS I Risalah Rapat dibuat oleh Departemen Konsultasi Syariah dan kemudian ditandatangani oleh ketua DPS dan seluruh anggota DPS yang hadir.
- IX. lembar opini DPS I Risalah Rapat diadministrasikan dengan baik oleh Syariah Advisory.

Keanggotaan

Per 31 Desember 2022, anggota Dewan Pengawas Syariah LPEI adalah sebagai berikut:

Ketua: Kanny Hidayat, SE., MA

Anggota Tetap: Dr. Yulizar D. Sanrego, MEd

- IV. meetings that are not physically attended may be conducted through teleconference, video conference or other electronic media facilities that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
- V. the meeting is chaired by the DPS Chairman, in the absence of the DPS Chairman, the meeting is chaired by one of the other DPS members.
- VI. decision making in the DPS meeting is carried out based on deliberation for consensus and is considered valid and binding if attended and approved by at least 2 (two) incumbent DPS.
- VII. the decision of the DPS meeting is stated in the DPS opinion sheet I Minutes of Meeting I other documents that can be equated with it, as valid evidence of the decisions taken.
- VIII. the DPS opinion sheet I Minutes of Meeting is prepared by the Sharia Consultation Department and then signed by the chairman of the DPS and all DPS members present.
- IX. the DPS opinion sheet I Minutes of Meeting is properly administered by Syariah Advisory.

Membership

As of 31 December 2022, membership of Sharia Supervisory Board is as follows:

Chairman: Kanny Hidayat, SE., MA

Permanent Member: Dr. Yulizar D. Sanrego, MEd

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Member Profile

	Kanny Hidayat, SE., MA Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board
Tempat / Tanggal Lahir Place / Date of Birth	Jakarta, 8 Juni 1966 Jakarta, 8 June 1966
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/07/2020 Executive Director Decree No. 0044/KDE/07/2020
Periode Jabatan Position Period	1 Agustus 2020 – 31 Juli 2023 1 August 2020 – 31 July 2023
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Anggota Badan Pelaksana Harian – Dewan Syariah Nasional-MUI (2000 – sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2012 – Sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2020 – Sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah – PT AXA Mandiri Financial Services (2012 – Sekarang) • Dewan Pengawas Syariah – PT Asuransi Mega Umum (2006 – Sekarang) • Member of Daily Executive Board – National Sharia Council-MUI (2000 – present) • Chairman of Sharia Supervisory Board – Indonesia Eximbank (2012 – Present) • Chairman of Sharia Supervisory Board - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2020 – Present) • Member of Sharia Supervisory Board – PT AXA Mandiri Financial Services (2012 – Present) • Sharia Supervisory Board – PT Asuransi Mega Umum (2006 – Present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia (1993) • Magister Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2004. • Bachelor of Economics in Accounting, University of Indonesia (1993) • Master of Islamic Economics at Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN), Jakarta, in 2004.

	Dr. Yulizar D. Sanrego MEd Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Supervisory Board
Tempat / Tanggal Lahir Place / Date of Birth	Bogor, 4 Juli 1973 Bogor, 4 July 1973
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/07/2020 Executive Director Decree No. 0044/KDE/07/2020
Periode Jabatan Position Period	1 Agustus 2020 – 31 Juli 2023 1 August 2020 – 31 July 2023

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Pengalaman Kerja Professional Experience	- Head Department of Islamic Economics-Tazkia Islamic Business School, Bogor -Indonesia (2005-2007) - Vice Chairman, Academic & Student Affairs – Tazkia Islamic Business School, Bogor-Indonesia (2006-2008) - Invited Researcher (Fellow Researcher) at Center for Central banking Education and Studies, Central Bank of Indonesia (PPSK-BI) (2006-2008) - Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) STEI Tazkia (2009 – 2017) - Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (2011 – sekarang) - Anggota Dewan Pengawas Syariah Panin Asset Management (2011-2016) - Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank CIMB Niaga Syariah (2013 – sekarang) - Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Bogor Tegar Beriman (2016-sekarang) - Penasehat/Peneliti Ekonomi dan Keuangan Islam, Saudi Arabian Monetary Authority – SAMA, Kerajaan Arab Saudi (2017-2019) - Ketua Dewan Pengawas Syariah PBMT Ventura (2019-sekarang) - Dosen Universitas Darussalam Gontor – Ponorogo (2019 – sekarang)
Sertifikasi Certification	- Head Department of Islamic Economics-Tazkia Islamic Business School, Bogor -Indonesia (2005-2007) - Vice Chairman, Academic & Student Affairs - Tazkia Islamic Business School, Bogor-Indonesia (2006-2008) - Invited Researcher (Fellow Researcher) at Centre for Central banking Education and Studies, Central Bank of Indonesia (PPSK-BI) (2006-2008) - Head of the Institute for Research and Community Empowerment (LPPM) STEI Tazkia (2009-2017) - Member of the Executive Board of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (2011 - present) - Member of Sharia Supervisory Board of Panin Asset Management (2011-2016) - Member of Sharia Supervisory Board of Bank CIMB Niaga Syariah (2013 - present) - Chairman of the Sharia Supervisory Board of BPRS Bogor Tegar Beriman (2016-present) - Advisor / Researcher on Islamic Economics and Finance, Saudi Arabian Monetary Authority - SAMA, Kingdom of Saudi Arabia (2017-2019) - Chairman of the Sharia Supervisory Board of PBMT Ventura (2019-present) - Lecturer at Darussalam Gontor University - Ponorogo (2019 - present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Dewan Pengawas Syariah (DPS) – BPRS. DSN-MUI & Bank Indonesia, Jakarta (2010) - Sharia Supervisory Board certificate - BPRS. DSN-MUI & Bank Indonesia, Jakarta (2010) - Sarjana Ekonomi Islam / Muamalah dari Universitas Djuanda, Indonesia. - Master Ekonomi dan Pembiayaan Islam dari International Islamic University Malaysia - Doktor Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta - Bachelor Degree in Islamic Economy / Muamalah from Universitas Djuanda, Indonesia - Master's Degree in Islamic Economy & Finance from International Islamic University Malaysia - Doctorate degree in Islamic Economy from Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2022, DPS telah melaksanakan rapat sebanyak 24 kali yang dilakukan secara daring dan tatap muka, dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Meetings Attendance

During 2022, the DPS held 24 meetings conducted online and face-to-face, with the attendance rate and meeting agenda as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Presentase Kehadiran Attendance Percentage
Kanny Hidayat, SE., MA	Ketua Chairman	24	24	100%
Dr. Yulizar D. Sanrego, MEc	Anggota Member	24	24	100%

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

No	Tanggal Date	Agenda
1	10-Jan-21	Lanjutan review standar draft dokumen legal syariah -SKU Continued review of sharia legal document draft standards -SKU
2	7-Feb-21	1. Konversi Kredit Nasabah ke Pembiayaan Syariah. 2. Diskusi Awal Asuransi Syariah 3. Usulan Penetapan Sample Review Kepatuhan Syariah Q1-2022 1. Conversion of Customer Loans to Sharia Financing. 2. Preliminary Discussion on Sharia Insurance 3. Proposed Establishment of Q1-2022 Shariah Compliance Review Sample
3	18-Feb-22	Trade Finance Syariah Sharia Trade Finance
4	10-Mar-22	Akad Funding Treasury Syariah Sharia Treasury Funding Agreement
5	17-Mar-22	1. Asuransi Syariah 2. Wakalah Bil Istismar dalam Funding Treasury Syariah 1. Sharia Insurance 2. Wakalah Bil Istismar in Sharia Treasury Funding
6	12-Apr-22	1. Diskusi Asuransi Syariah 2. Diskusi dengan Auditor Eksternal 1. Discussion of Sharia Insurance 2. Discussion with External Auditor
7	13-Mei-22 13-May-22	1. Biaya Administrasi Syariah 2. Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah 1. Sharia Administration Fees 2. Restructuring Customer Financing
8	16-Mei-22 16-May-22	Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Restructuring of Customer Financing
9	18-Mei-22 18-May-22	Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Restructuring of Customer Financing
10	27-Mei-22 27-May-22	1. Ratifikasi Persetujuan Biaya Administrasi Pembiayaan Syariah 2. Ratifikasi Persetujuan Sample Uji Petik Review Kepatuhan Syariah periode kuartal 2 2022 3. Pelepasan Sebagian Jaminan yang menjadi Asset/Objek Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) 1. Ratification of the Approval of Sharia Financing Administrative Fees 2. Ratification of the Approval of the Sample Test for the Sharia Compliance Review for the 2nd quarter of 2022 3. Relinquishment of Part of Collateral which becomes Asset/Object of Musyarakah Mutanaqisah Financing (MMQ)
11	13-Jun-22	1. Pembahasan Restrukturisasi Nasabah 2. Summary SPP PEN Syariah 3. Ratifikasi Pembahasan Reasuransi 4. Draft Wa'ad Akad Wakalah bil Istismar 5. Implementasi Akad Wakalah bil Istismar di dalam Keterangan Fund Request 1. Discussion on the Customer Restructuring 2. Summary of SPP PEN Syariah 3. Ratification of Reinsurance Discussion 4. Draft Wa'ad Akad Wakalah bil Istismar 5. Implementation of the Wakalah bil Istismar Agreement in the Fund Request Statement
12	22-Jun-22	1. Usulan skema restrukturisasi Nasabah 2. Penyampaian hasil Uji Petik Nasabah 1. Proposed Customer restructuring scheme 2. Submission of Customer results

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
 SHARIA SUPERVISORY BOARD

No	Tanggal Date	Agenda
13	14-Jul-22	1. Draft Laporan Pengawasan DPS Semester 1 2022 2. Usulan Sample Uji Petik Q3 2022 3. Penyampaian Informasi Hasil Rapat Board of Management:: Memorandum Prosedur Operasional (MPO) tentang Penggunaan akad Wakalah bil Itstismar dalam skema pendanaan Bisnis Syariah dari divisi yang membidangi Treasury 4. Ratifikasi Penetapan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan PMK 208 Tahun 2021
14	8-Agt-22 8-Aug-22	1. Draft DPS Supervisory Report Semester 1 2022 2. Proposal for Q3 2022 Sample Test 3. Submission of Information on the Results of Board of Management meeting:: Memorandum of Operational Procedures (MPO) regarding the Use of the Wakalah bil Itstismar contract in the Sharia Business funding scheme from the division in charge of Treasury 4. Ratification of the Determination of the Chairman of the Sharia Supervisory Board (DPS) based on PMK 208 of 2021
15	16-Agt-22 16-Aug-22	1. Akad Wakalah dalam Pembiayaan MMQ 2. Ratifikasi Denda Dalam Pelunasan Pembiayaan Dipercepat Menggunakan Akad Musyarakah 3. Penggunaan Asuransi Konvensional Dalam Pembiayaan Syariah 4. Pakta Integritas DPS
16	22-Agt-22 22-Aug-22	1. Wakalah Contract in MMQ Financing 2. Ratification of fines in paying off accelerated financing using a musyarakah contract 3. Use of Conventional Insurance in Sharia Financing 4. DPS Integrity Pact
17	7-Sept-22	1. Penjaminan Syariah 2. Auto Purchase Trade Finance Syariah
18	15-Sep-22	1. Sharia Guarantee 2. Auto Purchase Trade Finance Sharia
19	3-Okt-22 3-Oct-22	1. Lanjutan Pembahasan Penjaminan Syariah 2. Skema Asuransi Syariah 3. Hasil Uji Petik Kepatuhan Syariah
20	17-Okt-22 17-Oct-22	1. Continuation of Discussion on Sharia Guarantee 2. Sharia Insurance Scheme 3. Results of the Sharia Compliance Test
21	4-Nov-22	1. Ratifikasi Skema Asuransi Syariah 2. Penyampaian Hasil Uji Petik Kepatuhan Syariah Periode Q3 2022
22	7-Nov-22	1. Ratification of the Sharia Insurance Scheme 2. Submission of the Results of the Sharia Compliance Test for the Q3 2022 Period
23	15-Nov-22	1. Ratifikasi Persetujuan Periode Laporan Hasil Usaha Pembiayaan Musyarakah Nasabah. 2. Draft Dokumentasi Legal Asuransi Syariah. 3. Ta'widh/Ganti Rugi atas Klaim Penjaminan Syariah.
		1. Ratification of Customer Musyarakah Financing Report Period Approval. 2. Draft Sharia Insurance Legal Documentation. 3. Ta'widh / Compensation for Sharia Guarantee Claims.
		1. Restrukturisasi Nasabah 2. Ratifikasi Ketentuan Terkait Klaim Penjaminan Syariah
		1. Customers Restructuring 2. Ratification of Provisions Related to Sharia Guarantee Claims
		1. Penyampaian Draft Dokumen Legal Polis Asuransi Syariah 2. Submission of Draft Sharia Insurance Policy Legal Documents
		1. Lanjutan Penyampaian Draft Dokumen Legal Polis Asuransi Syariah 2. Submission of Draft Sharia Insurance Policy Legal Documents
		1. Pembahasan Skema Transaksi Pembelian Sukuk oleh LPEI pada Project Nexus 2. Discussion of the Sukuk Purchase Transaction Scheme by Indonesia Eximbank on the Nexus Project

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

No	Tanggal Date	Agenda
24	6-Dec-22 6-Dec-22	1. Pembahasan Produk Anjak Piutang Syariah 2. Program Kerja DPS 2023 3. <i>Self-Assessment</i> DPS 4. <i>Update Draft</i> Polis Asuransi Syariah 1. Discussion of Sharia Factoring Products 2. DPS Work Program 2023 3. Sharia Supervisory Board Self-Assessment 4. Update Draft Sharia Insurance Policy

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Setiap semester, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Direktur Eksekutif.

Sharia Supervisory Board Reports

Every semester, the Sharia Supervisory Board submits a Supervisory Report to the Executive Director.

No	Item	Tanggal Pelaporan Reporting Date
1	Laporan DPS semester 2 2021 DPS Repot 2nd Semester of 2021	16 Februari 2022 16 February 2022
2	Laporan DPS semester 1 2022 DPS Report 1st Semester of 2021	07 Juli 2022 07 July 2021

Selama periode tahun 2022, DPS telah melakukan realisasi program kerja antara lain:

1. Melakukan 24 kali rapat yang mayoritas dilakukan secara daring untuk membahas mengenai fitur produk dan skema akad pembiayaan dan penjaminan Syariah, standar dokumen akad pembiayaan syariah, restrukturisasi pembiayaan syariah, profil risiko Syariah, dan lain sebagainya.
2. Menghadiri Pra Ijtima' Sanawi dan Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
3. Melakukan review kepatuhan Syariah melalui metode uji petik sample pembiayaan Syariah sebanyak 9 sample Nasabah.
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif periode:
 - a. Laporan DPS semester 2 tahun 2021
 - b. Laporan DPS semester 1 tahun 2022

During the 2022 period, the Sharia Supervisory Board has realized work programs including:

1. Conducted 24 meetings, the majority of which were conducted online to discuss product features and Sharia financing and guarantee contract schemes, standard Islamic financing contract documents, Islamic financing restructuring, Sharia risk profiles, and so forth.
2. Attended the Pre-Ijtima' Sanawi and Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of the Sharia Supervisory Board for Islamic Financial Institutions organized by the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council.
3. Conducting a review of Sharia compliance through the sample test method of Sharia financing as many as 9 customer samples.
4. Delivering the DPS Supervision Report to the Executive Director for the period:
 - a. DPS report semester 2 of 2021
 - b. DPS report semester 1 of 2022



ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Direktur dalam rangka membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal melalui pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil audit, dengan tugas dan fungsi dari Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit serta tugas dan fungsinya telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan pembentukan Komite Audit, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, tentang Penggunaan Jasa Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Direktur No. 0005/PDD/09/2022 tanggal 6 September 2022. Piagam Komite Audit berfungsi sebagai pedoman dan tata tertib kerja bagi anggota Komite dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawabnya membantu Dewan Direktur.

Komposisi dan Profil Komite Audit

Sepanjang tahun 2022, terjadi 1 (satu) kali perubahan susunan Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0077/KDE/08/2021 tanggal 24

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was established by the Board of Directors to assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors by monitoring and evaluation of the planning, implementation, and follow-up of audit results, with the duties and functions of the Audit Committee regulated in the Audit Committee Charter.

Legal References

The establishment of the Audit Committee and its duties and functions refers to the prevailing regulations, among others:

1. Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Good Corporate Governance of Indonesia Eximbank.
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017, concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities.

Audit Committee Charter

The Audit Committee Charter has been prepared and determined based on the Board of Directors Decree No. 0005/PDD/09/2018 dated 6 September 2022. The Audit Committee Charter serves as a guideline for the Committee's members in performing their roles, duties, and responsibilities to assist the Board of Directors.

Composition and Profile of the Audit Committee

There were 1 (one) change in the composition of the Audit Committee throughout 2022. Based on the Decree of the Executive Directors (KDE) No. 0077/KDE/08/2021 dated

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

Agustus 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Audit LPEI adalah sebagai berikut:

24 August 2021 concerning the Membership of the Audit Committee of Indonesia Eximbank, the composition of the Audit Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Rijani Tirtoso	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee
Peter Umar Abdilla	Anggota Member
Yulida S Marbun	Anggota Member

Selanjutnya, sesuai Keputusan Direktur Eksekutif nomor 0004/KDE/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Keanggotaan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, komposisi anggota Komite Audit hingga berakhirnya tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

Furthermore, according to the Decree of the Executive Director (KDE) No. 0004/KDE/01/2022 dated 7 January 2022 concerning Audit Committee Memberships, the composition of the members of the Audit Committee until the end of the 2021 fiscal year is as follows:

Arus Gunawan

Ketua Komite Audit Merangkap Anggota Dewan Direktur

Chairman of the Audit Committee concurrently Member of the Board of Directors

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0004/KDE/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Keanggotaan Komite Audit Executive Director (KDE) Decree No. 0004/KDE/01/2022 dated 24 August 2021 regarding Audit Committee Membership
Domisili Domicile	Jakarta
Usia / Tempat Tanggal Lahir Age / Place Date of Birth	57 tahun per 31 Desember 2022, Lamongan, 16 Mei 1965 57 years old as of 31 December 2022, Lamongan, 16 May 1965
Riwayat Pendidikan Education	Sarjana Teknik Elektro, Institute Sains dan Teknologi Nasional (1993) Bachelor in Electrical Engineering, Institut Sains dan Teknologi Nasional (1993)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (2021-sekarang) - Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (Maret 2020-Januari 2021) - Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (November 2018-Maret 2020) - Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, Kementerian Perindustrian RI (Desember 2016-November 2018) - Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian RI (Januari 2016-Desember 2016) - Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (2014 – 2016) - Head of Industrial Human Resources Development Agency (2021-present) - Inspector General, Ministry of Industry RI (March 2020-January 2021) - Regional Inspector I, Inspectorate General, Ministry of Industry RI (November 2018-March 2020) - Director of Industrial Area Development I, Ministry of Industry RI (December 2016-November 2018) - Director of Industrial Machinery and Agricultural Machine Tools, Ministry of Industry RI (January 2016-December 2016) - Secretary of the Inspectorate General of the Ministry of Industry (2014 - 2016)

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

Peter Umar Abdilla Anggota Komite Audit Audit Committee Member	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0004/KDE/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Keanggotaan Komite Audit Executive Director (KDE) Decree No. 0004/KDE/01/2022 dated 7 January 2022 regarding Audit Committee Membership
Periode Jabatan Term of Office	9 Agustus 2021 – sekarang 9 August 2021 – present
Umur Age	51 tahun 51 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Pendidikan Education	- DIII Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1992 - Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998 - Magister Sains jurusan Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia tahun 2007 - DIII Accounting at the State College of Accountancy (STAN) in 1992 - Bachelor of Economics majoring in Accounting from the University of Indonesia in 1998 - Master of Science majoring in Islamic Economics from the University of Indonesia in 2007
Pengalaman Kerja Work Experience	- Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (2021 - sekarang) - Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI (1992 – 2021) - Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia (2021) - Anggota Komite Audit PT BNI Syariah (2019 – 2021) - Forensic Accountant pada INT World Bank (2011 - 2012) - Inspector II Inspectorate General of the Ministry of Finance (2021 - present) - Auditor General Inspectorate of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1992 – 2021) - Member of the Audit Committee of PT Bank Syariah Indonesia (2021) - Member of the Audit Committee of PT BNI Syariah (2019 – 2021) - Forensic Accountant at INT World Bank (2011 - 2012)
Yulida S Marbun Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0004/KDE/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Keanggotaan Komite Audit Executive Director Decree (KDE) No. 0004/KDE/01/2022 dated 7 January 2022 concerning the Membership of the Audit Committee
Periode Jabatan Term of Office	18 Februari 2020 – sekarang 18 February 2020 – present
Usia Age	59 tahun 59 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Pendidikan Education	Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan Magister di bidang Ekonomi Manajemen di STIE IBEK pada tahun 2000. Obtained a Bachelor Degree in Agriculture from the Institute of Agriculture Bogor in 1987 and Master of Economic Management at STIE IBEK in 2000.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTORPengalaman Kerja
Work Experience

- Audit Manager/*Department Head* di KP Direktorat Internal Audit 2008 - 2014 (*Vice President*)
- LF Risk Management di Mandiri University - Bank Mandiri 2014-2015 (*Vice President*)
- Regional Business Control Head - Region III Jakarta 1 Bank Mandiri 2015-2019 (*Vice President*)
- Audit Manager/*Department Head* at Head Office Internal Audit Directorate 2008 - 2014 (*Vice President*)
- LF Risk Management at Mandiri University - Bank Mandiri 2014-2015 (*Vice President*)
- Regional Business Control Head - Region III Jakarta 1 Bank Mandiri 2015-2019 (*Vice President*)

Periode dan Masa Jabatan

Pengaturan masa jabatan Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Piagam Komite Audit. Regulasi dan pedoman kerja tersebut menetapkan bahwa masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Direktur. Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dewan Direktur dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Apabila dipandang perlu, Dewan Direktur dapat mengangkat kembali anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur setelah masa kerjanya habis.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan afiliasi. Hubungan dimaksud, terkait dengan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.

Period and Terms of Office

The tenure of the Audit Committee refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee and the Audit Committee Charter. The regulations and guidelines stipulate the Audit Committee's tenure cannot exceed the Board of Directors' term. The Audit Committee may be re-elected only for the next period.

The Board of Directors may terminate member of the Audit Committee who is not a member of the Board of Directors if the concerned member is deemed to not properly perform as stated in the Appointment Decree. If deemed necessary, the Board of Directors may reappoint members of the Audit Committee who are not members of the Board of Directors after their tenure has ended.

Committee Members Independence

All members of the Audit Committee have met all the independence criteria and are able to carry out their duties independently. In carrying out its duties, the Audit Committee cannot be influenced by any party.

All members of the Audit Committee also have no affiliation relationships. The relationships in question are the ones related to finance, stock management and/or family relationship with the Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and/or Shareholders.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

Tugas dan tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, terutama mengacu pada ketetapan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK 208/2021), yang sejalan dengan regulasi lainnya. Pada Pasal 39 PMK 208/2021, disebutkan tugas Komite Audit, yaitu:

1. Membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal melalui pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil audit.
2. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud termasuk:
 - a. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan publik kepada Dewan Direktur;
 - b. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud, paling kurang dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
 - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal dan auditor eksternal dalam rangka pengawasan pada LPEI.
4. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Direktur paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Audit Committee, mainly refer to decree No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank (PMK 208/2021), which is in line with other regulations. Article 39 of PMK 208/2021, states the duties of the Audit Committee:

1. Assisting the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the duties of external auditors and internal auditors through monitoring and evaluating the planning, implementation, and follow-up of audit results.
2. The implementation of the duties as referred to includes:
 - a. providing recommendations regarding the appointment of a public accounting firm to the Board of Directors;
 - b. providing recommendations on the improvement of the internal control system and its implementation.
3. Monitoring and evaluation as intended, at least on:
 - a. the implementation of the duties of the Internal Audit Unit;
 - b. conformity of audit implementation by the public accounting firm with applicable audit standards;
 - c. conformity of financial statements with applicable financial accounting standards;
 - d. implementation of follow-up on the results of the examination of the Internal Audit Working Unit and external auditors in the context of supervision at Indonesia Eximbank.
4. The implementation of the Audit Committee's duties is reported to the Board of Directors at least once every 3 (three) months.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR**Program Pengembangan Komite**

Dalam rangka peningkatan profesionalisme dari Komite Audit, selama tahun 2022, anggota Komite Audit ikut berpartisipasi dalam program pengembangan/pelatihan/seminar sebagai berikut:

- Webinar “When Security Becomes A High Priority” (Katadata Indonesia – 12 Januari 2022)
- “Transformasi Digital UMKM Melalui Platform Metaverse” (Kementrian Perdagangan – 25 Januari 2022)
- “Tranformasi Bank Digital dan Tantangannya” (Indonesia Banking School – 11 Februari 2022)
- “Metaverse Dalam Ekonomi Virtual” (ISED – 23 Februari 2022)
- “Inovasi Keuangan Digital dan Tantangan Penerapan Kebijakannya di Indonesia” (Indonesia Banking School – 25 Februari 2022)
- “Sustainable Finance : Assesmen dan Tantangan yang dihadapi Indonesia” (Indonesia Banking School – 11 Maret 2022)
- “Pengarahan Kepala BPKP kepada Profesi Manajemen Risiko Sektor Publik” (IRMAPA – 19 April 2022)
- “Peran Perempuan Indonesia di Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan” (LPPI – 21 April 2022)
- “Perempuan Tangguh Dalam Ekspor Berkelanjutan” (LPEI – 20 Mei 2022)
- “ESG Trends & Economic Outlook” (LPEI – 29 Juni 2022)

Rapat Komite Audit

Piagam Komite Audit mengatur bahwa rapat Komite Audit wajib diselenggarakan paling kurang sama dengan ketentuan jumlah minimal penyelenggaraan rapat Dewan Direktur, yaitu diselenggarakan berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.

Selama tahun 2022 Komite Audit melangsungkan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, antara lain rapat

Committee Development Program

To enhance the professionalism of the Audit Committee, during 2022, members of the Audit Committee participated in the following development programmes/training/seminars:

- Webinar “When Security Becomes A High Priority” (Katadata Indonesia - 12 January 2022)
- “Digital Transformation of MSMEs through Metaverse Platform” (Ministry of Trade - 25 January 2022)
- “Digital Bank Transformation and its Challenges” (Indonesia Banking School - 11 February 2022)
- “Metaverse in Virtual Economy” (ISED - 23 February 2022)
- “Digital Finance Innovation and Policy Implementation Challenges in Indonesia” (Indonesia Banking School - 25 February 2022)
- “Sustainable Finance: Assessment and Challenges faced by Indonesia” (Indonesia Banking School - 11 March 2022)
- “Briefing the Head of BPKP on the Public Sector Risk Management Profession” (IRMAPA – 19 April 2022)
- The Role of Indonesian Women in the Banking and Financial Service Sector” (LPPI – 21 April 2022)
- Strong Women in sustainable Exports” (Indonesia Eximbank – 20 May 2022)
- “ESG Trends & Economic Outlook” (Indonesia Eximbank – 29 June 2022)

Audit Committee Meetings

The Audit Committee Charter stipulates that the Audit Committee meeting must be held at least the same as the minimum number of meetings of the Board of Directors, which is held periodically at least 1 (one) time a month.

During 2022, the Audit Committee held 24 (twenty four) meetings, including internal Audit Committee meetings

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

internal Komite Audit serta rapat gabungan Komite Audit dengan internal audit dan eksternal audit.

and joint meetings of the Audit Committee with internal audit and external audit.

Berikut ini rincian kegiatan rapat Komite Audit tahun 2022:

The following are the details of the Audit Committee meeting activities in 2022:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Meeting Frequency and Attendance Level

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	% Kehadiran % of Attendance
Arus Gunawan	24	24	100%
Yulida S. Marbun	24	24	100%
Peter Umar Abdila	24	22	92%

Tabel Agenda Rapat Komite Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings			
1	12-Jan-22	Perkenalan dan <i>Hand Over</i> pekerjaan Introductions and Hand Over of work	Seluruh Anggota All Members
2	8-Feb-22	Update Pelaksanaan Komite Audit Audit Committee Implementation Update	Seluruh Anggota All Members
3	16-Feb-22	SKAI <i>to Contribute in Strengthening Line of Defense</i> 2022	Seluruh Anggota All Members
4	23-Feb-22	Rencana Kerja Divisi Kepatuhan 2022 Compliance Division Work Plan 2022	Seluruh Anggota All Members
5	4-Mar-22	Pembahasan penambahan scope of work KAP RSM Discussion on the addition of KAP RSM's scope of work	Seluruh Anggota All Members
6	8-Mar-22	Update Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN) Update on the Implementation of Government Investment in the context of National Economic Recovery (IP PEN)	Seluruh Anggota All Members
7	1-Apr-22	Update Audit Eksternal External Audit Update	Seluruh Anggota All Members
8	27-Apr-22	1. Proses Hapus Buku 2. Draft Final MPO Audit Khusus 3. Update Divisi Kepatuhan 1. Write-off Process 2. Draft Final MPO Special Audit 3. Compliance Division Update	Seluruh Anggota All Members
9	30-May-22	Update Pelaksanaan Komite Audit Audit Committee Implementation Update	Seluruh Anggota All Members
10	8-Jun-22	1. Evaluasi Kinerja KAP RSM tahun buku 2021 2. Rekomendasi KAP RSM tahun 2022. 1. Evaluation of KAP RSM Performance for the 2021 financial year 2. Recommendation of KAP RSM for the year 2022.	Seluruh Anggota All Members

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
11	29-Jun-22	Update dari Divisi Kepatuhan Update from Compliance Division	1. Arus Gunawan 2. Yulida S. Marbun
12	15-Jul-22	Penunjukan KAP Tahun 2022 KAP appointment in 2022	1. Arus Gunawan 2. Yulida S. Marbun
13	29-Jul-22	Update SKAI SKAI Update	Seluruh Anggota All Members
14	24-Aug-22	1. Update pelaksanaan Evaluasi atas Tata Kelola Management Risiko dan Pengendalian pada LPEI oleh Itjen Inspektorat IV. 2. Update Kepatuhan. 1. Update on the implementation of the Evaluation of Risk Management and Control Governance at Indonesia Eximbank by Inspectorate IV. 2. Compliance Update.	Seluruh Anggota All Members
15	16-Sep-22	Update IT Strategic Plan 2021-2024.	Seluruh Anggota All Members
16	31-Oct-22	Update Progress SKAI SKAI Progress Update	Seluruh Anggota All Members
17	28-Nov-22	1. Update aktivitas Fungsi Kepatuhan 2. Update SKAI 1. Update on Compliance Function activities 2. SKAI Update	Seluruh Anggota All Members
18	21-Dec-22	Rencana Kerja Tahun 2023 SKAI dan Compliance Work Plan 2023 SKAI and Compliance	Seluruh Anggota All Members
19	29-Dec-22	Rencana Kerja Komite Audit 2023 Workplan 2023 Audit Committee	Seluruh Anggota All Members
Rapat Komite Audit dengan KAP RSM Audit Committee Meeting with KAP RSM			
1	26-Jan-22	Update Progress Audit Laporan Keuangan tahun 2021 oleh KAP RSM Update on the Audit Progress of the 2021 Financial Statements by KAP RSM	Seluruh Anggota All Members
2	7-Apr-22	Update Progress Meeting KAP RSM KAP RSM Progress Meeting Update	Seluruh Anggota All Members
3	26-Aug-22	Kick Off dengan KAP RSM Kick Off with KAP RSM	Seluruh Anggota All Members
4	28-Oct-22	Pemaparan update pemilihan sample audit oleh KAP RSM An update on the selection of audit samples by KAP RSM	Seluruh Anggota All Members
5	28-Dec-22	Update Progress Audit KAP RSM KAP RSM Audit Progress Update	Seluruh Anggota All Members

Selain itu Komite Audit juga berpartisipasi dalam 12 (dua belas) kali penyelenggaraan rapat gabungan antar Komite Dewan Direktur (joint committee), membahas hal-hal strategis yang perlu dibahas secara lintas Komite.

In addition, the Audit Committee also participated in 12 (twelve) joint committee meetings, discussing strategic matters that need to be discussed across Committees.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
Rapat Join Komite Joint Committee Meeting			
1	2-Feb-22	Pembahasan Transformasi Syariah Sharia Transformation Discussion	- Arus Gunawan - Felia Salim - Rijani Tirtoso - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun
2	18-Feb-22	Pembahasan Laporan Keuangan LPEI Tahun 2021 - KAP RSM Discussion of Indonesia Eximbank Financial Statements for 2021 - KAP RSM	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun - KAP RSM
3	25-May-22	Pemaparan Manajemen Letter Laporan Keuangan tahun 2021 – KAP RSM Management Letter Presentation of 2021 Financial Statements - KAP RSM	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun - KAP RSM
4	31-May-22	- PDD Piagam Komite Audit - PDD Piagam Audit Internal - PDD Piagam KPR - PDD Piagam Komite Penugasan Khusus - PDD Kebijakan Akuntansi - PDD Piagam KRN - PDD Audit Committee Charter - PDD Internal Audit Charter - PDD Mortgage Charter - PDD Special Assignment Committee Charter - PDD Accounting Policy - PDD KRN Charter	- Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun
5	10-Jun-22	Pembahasan RPDD RPDD Discussion	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun
6	16-Jun-22	Pembahasan Enterprise Risk Assesment (ERA) Discussion of Enterprise Risk Assessment (ERA)	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun
7	29-Jun-22	Tanggapan RSEOJK Kewajiban Penyediaan Modal Minimum LPEI Response to RSEOJK Indonesia Eximbank Minimum Capital Adequacy Requirement	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Yulida S. Marbun

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
8	7-Sep-22	- Pembahasan Hasil Audit Itjen atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian / Kepatuhan. - Pembahasan Loan Pipeline. - Pembahasan RJP. - Discussion of Itjen Audit Results on Governance, Risk Management and Control/Compliance. - Discussion of Loan Pipeline. - Discussion of RJP.	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun
9	26-Sep-22	In Organic Strategy Penanganan NPL NPL Handling In Organic Strategy	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun
10	13-Oct-22	- Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Direktur - Pembahasan Hapus Buku - Discussion of Draft Board of Director Regulations - Discussion on Write-off	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun
11	9-Nov-22	- Rencana Asset Swap Securities LPEI (<i>Project Nexus</i>). - Pembahasan Usulan RPDD. - Indonesia Eximbank Asset Swap Securities Plan (Project Nexus). - Discussion on RPDD Proposal.	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun
12	7-Dec-22	Pembahasan Usulan RPDD. Discussion of Proposed RPDD.	- Arus Gunawan - Felia Salim - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiaatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun

Program kerja tahun 2022

Penjelasan tentang program serta obyek dan sasaran pada tahun 2022, dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Work Programs in 2022

The programs as well as the objects and targets in 2022 are described below:

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No.	Program Kerja Tahun 2022 Year 2022 Programs	Obyek Objects	Sasaran Targets
1.	Melakukan Supervisi, Memberikan Konsultasi, dan Melaksanakan Review atas penyusunan dan realisasi atas RKAT dan IKU 2022 LPEI, Internal Audit, dan Kepatuhan. Supervise, provide consultation, and conduct reviews on the preparation and realisation of Indonesia Eximbank's 2022 RKAT and KPI, Internal Audit, and Compliance.	• RKAT dan IKU 2022 LPEI • RKAT dan IKU 2022 Internal Audit • RKAT dan IKU 2022 Compliance • Realisasi RKAT dan IKU • RKAT and IKU 2022 Indonesia Eximbank • RKAT and KPI 2022 Internal Audit • RKAT and IKU 2022 Compliance • Realisation of RKAT and IKU	• Untuk memenuhi kebutuhan LPEI • Untuk memastikan seluruh Rencana Audit sudah tercakup dalam RAT • Untuk memastikan bahwa pelaksanaan GCG telah dilaksanakan sesuai Best Practices • Untuk memastikan bahwa realisasi kinerja LPEI, Internal Audit, dan Compliance telah sesuai RKAT dan IKU serta mengidentifikasi kendala yang ada
			• To fulfil the needs of Indonesia Eximbank • To ensure that the entire Audit Plan has been included in the RAT • To ensure that the implementation of GCG has been implemented according to Best Practices • To ensure that the realisation of Indonesia Eximbank, Internal Audit, and Compliance performance is in accordance with the RKAT and KPI and identify any obstacles
2.	Melakukan Koordinasi dengan pihak eksternal terkait secara berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan LPEI dan strategi pencapaiannya. Coordinate with relevant external parties on an ongoing basis to fulfil Indonesia Eximbank's needs and strategies to achieve them.	Kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> utama Komite Audit a.l. BPK, OJK. Collaboration with key Audit Committee stakeholders including BPK, OJK.	Memenuhi kebutuhan LPEI To fulfil the needs of Indonesia Eximbank
3.	Melakukan Supervisi, Memberikan Konsultasi, dan Melaksanakan Kolaborasi dengan pihak terkait secara <i>detil</i> step-step secara berurutan mulai dari yang paling penting dan <i>urgent (critical milestones)</i> yang harus dipenuhi beserta <i>timeline</i> atau target waktu masing-masing <i>milestones</i> dan strategi pencapaiannya). Supervise, Provide Consultation, and Collaborate with related parties in detail sequential steps starting from the most important and urgent (critical milestones) that must be fulfilled along with the timeline or target time for each milestone and the strategy for achieving it).	Tanggapan dan tindak lanjut temuan Auditor Eksternal (BPK, OJK), Kantor Akuntan Publik, dan Divisi Internal Audit. Responses and follow-up of findings from External Auditors (BPK, OJK), Public Accounting Firm, and Internal Audit Division.	Untuk memastikan seluruh temuan audit telah ditindaklanjuti dan sesuai komitmen. To ensure all audit findings have been followed up and as committed.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No.	Program Kerja Tahun 2022 Year 2022 Programs	Obyek Objects	Sasaran Targets
4.	- Melakukan <i>Review</i> dan Memberikan Konsultasi Konsep GRC & <i>Three Lines Model</i> (d.h. <i>Three lines of Defense</i>) - Melakukan <i>Review</i> dan Memberikan Konsultasi Metodologi <i>Risk Based Audit</i> - Review and Provide Consultation on GRC Concept & Three Lines Model (previously Three lines of Defence) - Reviewed and Consulted on Risk Based Audit Methodology	Penguatan Penerapan Fungsi Audit Internal. Strengthening the Implementation of the Internal Audit Function.	Pemantauan terhadap pengembangan Fungsi Audit Internal sesuai konsep GRC & <i>3-Lines Model</i> dan <i>Risk Based Audit</i> yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit. Monitoring the development of the Internal Audit Function in accordance with the concept of GRC & 3-Lines Model and Risk Based Audit conducted by the Internal Audit Division.
5.	Melakukan Koordinasi Asistensi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam memonitor sistem Pencegahan dan Penindakan (profiling, whistle blowing) Coordinating the Assistance of the Inspectorate General of the Ministry of Finance in monitoring the Prevention and Enforcement system (profiling, whistle blowing).	Kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu tentang sistem Pencegahan dan Penindakan, IT Audit, Data Analytic, dan lainnya. Collaboration with the Inspectorate General of the Ministry of Finance on the Prevention and Enforcement system, IT Audit, Data Analytic, and others.	Memenuhi kebutuhan LPEI To fulfil the needs of Indonesia Eximbank
6.	Melakukan <i>Review</i> dan Memberikan Konsultasi dalam rangka Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko LPEI. Reviewing and Providing Consultation in the Implementation of Indonesia Eximbank's Risk Management Policy.	Peran Konsultansi Komite Audit utk Pengembangan Manajemen Risiko dan Tata Kelola LPEI dan IT. Consultancy Role of Audit Committee for Risk Management and Governance Development of Indonesia Eximbank and IT.	- Risk Appetite Statement (RAS) - Risk Profile LPEI - Implementasi kerangka kerja GRC termasuk ERM yang memadai - Fungsi Organisasi Manajemen Risiko yang efektif dan kapabilitas & kapabilitas SDM yang memadai - Risk Appetite Statement (RAS) - Indonesia Eximbank Risk Profile - Adequate implementation of GRC framework including ERM - Effective Risk Management Organisation function and adequate HR capability & capacity
7.	Melakukan <i>Review</i> dan Memberikan Konsultasi kepada Unit Kepatuhan dalam rangka Implementasi Kebijakan Tata Kelola LPEI. Reviewing and Advising the Compliance Unit in the Implementation of Indonesia Eximbank's Governance Policy.		Kebijakan Tata Kelola LPEI yang komprehensif, antara lain: - TARIF - Implementasi <i>Whistle Blower System</i> - Sistem pengendalian dan pengawasan intern (termasuk sistem / mekanisme monitoring penyaluran fasilitas pembiayaan dalam rangka mendorong ekspor nasional) - Pedoman perilaku etika Indonesia Eximbank's comprehensive governance policies, among others: - TARIF - Implementation of Whistle Blower System - Internal control and supervision system (including system / mechanism for monitoring the distribution of financing facilities in order to encourage national exports) - Code of ethical behaviour

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No.	Program Kerja Tahun 2022 Year 2022 Programs	Obyek Objects	Sasaran Targets
8.	Melakukan Review dan Memberikan Konsultasi kepada unit TSI dalam rangka Implementasi Kebijakan TSI – LPEI. Review and Provide Consultation to TSI unit in the framework of TSI – Indonesia Eximbank Policy Implementation.		- Implementasi <i>Network</i> dan <i>Infrastructure</i> Teknologi Informasi, <i>Application Architecture</i>, <i>Main Issue Data Resume</i>, yang memenuhi standard <i>Best Practices</i> - Implementasi <i>Financial Reporting</i> - PSAK 71 - Implementasi MIS dan Data <i>Governance</i> yang memenuhi standard <i>Best Practices</i> - Implementation of Information Technology Network and Infrastructure, Application Architecture, Main Issue Data Resume, which fulfils Best Practices standards - Implementation of Financial Reporting - PSAK 71 - Implementation of MIS and Data Governance that meets Best Practices standards
9.	Melakukan Review & Memberikan Konsultasi atas penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Divisi Internal Audit dan Divisi Special Audit dan Special Audit tahun 2022. Review and provide consultation on the preparation of the Annual Audit Work Programme of the Internal Audit and Special Audit Division for 2022.	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Divisi Internal Audit dan Divisi Special Audit tahun 2022. Annual Audit Work Programme of Internal Audit Division and Special Audit Division for 2022.	- Untuk memastikan seluruh Rencana Audit telah tercakup dalam RAT dan pelaksanaan investigasi berjalan sesuai ketentuan dan kebijakan. - Audit Charter & Audit Rating, Manual & Prosedur Audit & Special Audit - To ensure that the entire Audit Plan has been included in the RAT and the implementation of investigations is in accordance with the provisions and policies. - Audit Charter & Audit Rating, Audit Manual & Procedures & Special Audit
10.	Mengkoordinasikan kajian dan Penyempurnaan Laporan Pengawasan RKAT Semester II 2021 dan Semester I 2022 (<i>Review & Consulting</i>). Coordinate the review and improvement of the RKAT Supervision Report for Semester II 2021 and Semester I 2022 (<i>Review & Consulting</i>).	- Laporan Pengawasan RKAT Semester II 2021 - Laporan Pengawasan RKAT Semester I 2022 - RKAT Supervision Report Semester II 2021 2022 Semester I RKAT Supervision Report	Laporan Pengawasan RKAT telah sesuai dan tepat waktu. RKAT Monitoring Report is appropriate and timely.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No.	Program Kerja Tahun 2022 Year 2022 Programs	Obyek Objects	Sasaran Targets
11.	Melakukan Review dan Memberikan Konsultasi secara detil tahapan secara berurutan mulai dari yang paling penting dan mendesak (<i>critical milestones</i> yang harus dipenuhi beserta <i>timeline</i> atau target waktu masing-masing <i>milestones</i> dan strategi pencapaiannya) Review and Consult in detail the steps in order starting from the most important and urgent (<i>critical milestones</i> that must be met along with the timeline or target time for each milestone and the strategy for achieving it).	Asurans atas akuntabilitas terhadap pihak - pihak internal LPEI yang terlibat dalam keputusan kredit kepada debitur masalah (<i>post-mortem review</i>) Accountability assurance for internal Indonesia Eximbank parties involved in credit decisions to problem borrowers (post-mortem review)	- Review investigasi untuk menentukan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat mulai dari Proses inisiasi, Proses analisa kredit, Proses Komite dan keputusannya, Proses sebelum <i>disbursement</i> termasuk proses pemenuhan <i>covenant</i> dan proses pengikatan agunan, Proses <i>post-disbursement</i> dan <i>monitoring</i>. - Tercapainya Skenario Relaksasi Pembiayaan PL dan Restrukturisasi Pembiayaan NPL - Tercapainya Skenario Pembiayaan NIA, Penjaminan, Asuransi dan <i>Trade Finance</i> - Review of investigations to determine the accountability of all parties involved from the initiation process, credit analysis process, committee process and decision, pre-disbursement process including covenant fulfilment process and collateral binding process, post-disbursement process and monitoring. - Achievement of PL Financing Relaxation and NPL Financing Restructuring Scenarios - Achievement of NIA, Guarantee, Insurance and Trade Finance Financing Scenarios
12.	Koordinasi pelaksanaan audit laporan keuangan KAP dan evaluasi Kinerja KAP – RSM. Coordination of the audit of KAP financial statements and evaluation of KAP performance - RSM.	- Kinerja KAP – RSM tahun buku 2021 - Pelaksanaan audit KAP tahun buku 2021 dan 2022 - KAP performance - RSM for the 2021 financial year - Implementation of KAP audit for financial year 2021 and 2022	- Memberi evaluasi kinerja KAP – RSM tahun buku 2021 - Melakukan koordinasi dengan KAP terkait pelaksanaan audit laporan keuangan - Evaluate the performance of KAP - RSM for the 2021 financial year - Coordinate with KAP regarding the implementation of financial statement audits
13.	Supervisi & Review: Penyusunan Laporan Pokok-Pokok Kegiatan Komite Audit kepada Dewan Direktur. Supervision & Review: Preparation of the Audit Committee's Main Activity Report to the Board of Directors	Laporan Triwulanan Pokok- Pokok Kegiatan Komite Audit. Quarterly Report on the Principal Activities of the Audit Committee.	Penyusunan kegiatan Komite Audit untuk setiap 3 bulanan kepada Dewan Direktur. Preparation of Audit Committee activities for the Board on a 3-monthly basis.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No.	Program Kerja Tahun 2022 Year 2022 Programs	Obyek Objects	Sasaran Targets
14.	Supervisi & Review : - Rapat Internal Komite Audit - Pemantauan dan Pengawasan yang bersifat periodik dan adhoc terkait pelaksanaan Audit Plan Divisi Internal Audit dan Divisi Special Audit /Laporan Kasus Fraud, dan Compliance - Rapat Joint Committee (KPR, KRN) - Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan Action Plan yang sudah disepakati. Supervision & Review: - Internal Audit Committee Meeting - Periodic and adhoc monitoring and supervision related to the implementation of the Audit Plan of the Internal Audit Division and Special Audit Division / Fraud Case Reports, and Compliance - Joint Committee Meeting (KPR, KRN) - Monitoring and supervision of the implementation of the agreed Action Plan.	Pengaturan Agenda Rapat dari Komite Audit kepada Rapat Dewan Direktur Meeting Agenda Arrangement from Audit Committee to Board of Director Meeting	Rapat menghasilkan rekomendasi perbaikan, dalam hal ini terhadap hasil audit dan tindak lanjut perbaikan sehingga terhindar temuan berulang Meetings produce recommendations for improvement, in this case on audit results and follow-up improvements so as to avoid recurring findings.
15.	Melakukan monitoring Unit Bisnis Syariah dan Special Purpose Vehicle (SPV). Monitoring Sharia Business Unit and Special Purpose Vehicle (SPV).	Memahami dan memonitor Unit Bisnis Syariah dan SPV baik dari aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Understand and monitor the Syariah Business Unit and SPV in terms of governance, risk management and control.	Implementasi aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang optimal dari Unit Bisnis Syariah dan SPV. Optimal implementation of governance, risk management and control aspects of the Syariah Business Unit and SPV.
16.	Pembahasan Rencana Kerja (RKAT) Internal Audit, Kepatuhan, dan Komite Audit tahun 2023. Discussion of Internal Audit, Compliance, and Audit Committee Work Plans (RKAT) for 2023.	Melakukan pembahasan RKAT tahun 2023: - Internal Audit agar memperhatikan aspek risk-based dan current issue - Unit Kepatuhan agar memperhatikan aspek tata kelola dan pengendalian dari manajemen - Komite Audit agar memperhatikan arahan dari Dewan Direktur Discussing the 2023 RKAT: - Internal Audit to pay attention to risk-based aspects and current issues - Compliance Unit to pay attention to the governance and control aspects of management - Audit Committee to pay attention to the direction of the Board of Directors	RKAT Internal Audit, Kepatuhan dan Komite Audit untuk tahun 2023 yang efisien dan efektif dalam mendeliver value added kepada seluruh stakeholder di LPEI. RKAT Internal Audit, Compliance and Audit Committee for 2023 that is efficient and effective in delivering value added to all stakeholders in Indonesia Eximbank.
17.	Melakukan Review Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter). Reviewed the Audit Committee Charter.	Mereviu Piagam Komite Audit untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi, arahan Dewan Direktur maupun praktik terkini. Review the Audit Committee Charter to ensure compliance with regulations, Board directives and current practices.	Piagam Komite Audit yang relevan dan mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit yang optimal. The Audit Committee Charter is relevant and supports the optimal implementation of the Audit Committee's duties.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF
SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTOR

No.	Program Kerja Tahun 2022 Year 2022 Programs	Obyek Objects	Sasaran Targets
18.	- Melakukan fungsi Supervisi dan pelaksanaan Konsultasi lainnya sesuai penugasan dari Dewan Direktur - Memberikan masukan kepada Dewan Direktur - Perform Supervision and other Consultancy functions as assigned by the Board of Directors. - Provide input to the Board of Directors	Tugas-tugas lainnya dari Dewan Direktur sesuai bidang tugas Komite. Other duties of the Board of Directors in accordance with the Committee's field of work.	Memenuhi kebutuhan LPEI To fulfil the needs of Indonesia Eximbank
19.	Mengikuti pelatihan, workshop dan sertifikasi lainnya. Participate in training, workshops and other certifications.	Peningkatan kompetensi dan Profesionalisme anggota Komite. Improving the competence and professionalism of Committee members.	Komite Audit yang profesional. A professional Audit Committee.



Komite Remunerasi dan Nominasi

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Dasar Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sebagaimana tertuang pada Pasal 41 PMK 208/2021 Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi (Komite Charter)

Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI memiliki committee charter sebagai pedoman dan tata tertib kerja Komite yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur nomor 0007/PDD/12/2022 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Komposisi dan Profil Komite

Selama tahun 2022 Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) nomor 0035/KDE/06/2020, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari – 31 Desember 2022

1 January – 31 December 2022 Period

Nama	Jabatan Position	Dasar Basis
Suminto	Ketua Chairman	0035/KDD/12/2020
Kasan	Anggota Member	0035/KDD/12/2020
Wahyu P Wibowo	Anggota Member	0035/KDD/12/2020

Legal References

The Remuneration and Nomination Committee was established based on Article 8 paragraph (1) of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank. As stated in Article 41 of PMK 208/2021, the Remuneration and Nomination Committee has the duties and responsibilities of preparing and providing recommendations to the Board of Directors regarding remuneration and nomination policies, and evaluating the implementation of remuneration and nomination policies.

Remuneration and Nomination Committee Charter

Indonesia Eximbank Remuneration and Nomination Committee has a charter committee as a guideline and working order of the Committee which is stipulated through the Board of Directors Regulation number 0007/PDD/12/2022 concerning the Charter of the Remuneration and Nomination Committee of the Indonesia Eximbank..

Composition and Profile of the Committee

During 2022 the composition of the Remuneration and Nomination Committee members did not change. Based on the Decree of the Executive Director (KDE) number 0035/KDE/06/2020, the composition of the Indonesia Eximbank Remuneration and Nomination Committee is as follows:

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Member Profile

Suminto

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merangkap Anggota Dewan Direktur
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Concurrently Member of the Board of Directors

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 2018 sampai dengan saat ini berdasarkan KMK No.554/KMK.06/2018.
Serve as a Member of the Board of Directors from 2018 to the present based on KMK No. 554 / KMK.06 / 2018.

Profil
Profile Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Direktur di Bab 3 Laporan Tahunan ini.
Profile can be viewed on Sub Chapter of the Board of Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

Kasan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment Menjabat sebagai Anggota sejak tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan KMK No. 274/KMK.06/2020
Served as Member since June 8, 2020 based on KMK No. 274/KMK.06/2020

Profil
Profile Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Direktur di Bab 3 Laporan Tahunan ini.
Profile is presented in the Sub Chapter of the Board of Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

Wahyu P Wibowo

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment Menjabat sebagai Anggota sejak tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan KDE No. 0035/KDE/06/2020
Served as Member since 19 June 2020 based on KDE No. 0035/KDE/06/2020

Domisili
Domicile Jakarta

Usia / Tempat Tanggal Lahir
Age / Place Date of Birth 58 tahun per 31 Desember 2022 , Semarang 15 Agustus 1965
58 years as of 31 December 2022, Semarang 15 August 1965

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Magister Management dari SwissGerman University
- MBA dari Konstanz University of Applied Science Swiss
- Program Kepemimpinan INSEAD (Mei 2016 - Januari 2017)
- Sarjana Sosial Filsafat STF Driyakara Jakarta
- Master in Management from SwissGerman University
- MBA from Konstanz University of Applied Science Switzerland
- INSEAD Leadership Program (May 2016 - January 2017)
- Bachelor of Social Philosophy STF Driyakara Jakarta

Pengalaman Kerja
Work Experience

- *Managing Director, Chief Learning and Development Officer Prudential Life Assurance* (2017 – 2019)
- *Executive Vice President, Head of Human Resources Business Partner and Employee Engagement CIMB Niaga*, (2012 – 2017)
- *Direktur Human Capital, Sinarmas Land* (2010 – 2011)
- *Direktur Human Capital dan Corporate Affairs, Pam Lyonnaise Jaya* (2004 – 2010)
- *Direktur Human Resources dan Legal, Allianz Life Indonesia* (2001 – 2004)
- *Human Resources Manager, Asuransi AXA Indonesia* (2000 – 2001)
- *Managing Director, Chief Learning and Development Officer of Prudential Life Assurance* (2017 – 2019)
- *Executive Vice President, Head of Human Resources Business Partner and Employee Engagement CIMB Niaga*, (2012 – 2017)
- *Director of Human Capital, Sinarmas Land* (2010 – 2011)
- *Director of Human Capital and Corporate Affairs, Pam Lyonnaise Jaya* (2004 – 2010)
- *Director of Human Resources dan Legal, Allianz Life Indonesia* (2001 – 2004)
- *Human Resources Manager, Asuransi AXA Indonesia* (2000 – 2001)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position Tidak Memiliki rangkap jabatan
Do not have concurrent positions

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham.
Has no affiliation relationship, either with the Board of Directors, Managing Director, or Shareholders.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Periode dan Masa Jabatan

Jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Dewan Direktur. Dengan demikian, masa jabatannya adalah 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan sebagai anggota Dewan Direktur.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultan lain kepada LPEI dalam 6 bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Direktur LPEI.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPEI.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:

1. Membantu Dewan Direktur terkait kebijakan remunerasi dan nominasi;
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi;

Period and Tenure

The tenure of the Remuneration and Nomination Committee members refers to the Minister of Finance Decree concerning the Appointment of the Board according to the term as a member of the Board of Directors.

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

The independence of members of the Remuneration and Nomination Committee has been regulated in the Remuneration and Nomination Committee Charter, including:

1. Not a person in a public accountant firm, legal consulting firm or any other party providing audit services, non-audit services and/or other consulting services to the Company in the last 6 months prior to being appointed as a member of the Remuneration and Nomination Committee.
2. Has no family relationship due to marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with the Company's Board of Directors.
3. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Duties and Responsibilities

Based on 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank, the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are as follow:

1. Assist the Board of Directors regarding remuneration and nomination policies;
2. Conduct periodic evaluations of remuneration and nomination policies;

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif;
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Dewan Direktur;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

Suksesi Direksi

Sebagai bagian dari proses regenerasi demi kelangsungan bisnis lembaga, LPEI memiliki kebijakan suksesi Direktur Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0008/PDD/12/2018 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diselaraskan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 2/2009 tentang LPEI.

Kebijakan itu juga mengatur komposisi Direktur Pelaksana yaitu paling banyak 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) di antaranya berasal dari internal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam aturan itu juga ditetapkan bahwa Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif.

Secara rinci, alur suksesi Direksi dapat dilihat dalam simulasi berikut ini.

3. Provide recommendations to the Board of Directors regarding remuneration policies for the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors to be submitted to the Minister;
4. Provide recommendations to the Board of Directors regarding employee remuneration and nomination policies to be submitted to the Executive Director;
5. Prepare and provide recommendations to the Board of Directors regarding the system and procedure for selecting and/or replacing Managing Directors to be submitted to the Board of Directors;
6. Provide recommendations to the Board of Directors regarding members of the Sharia Supervisory Board and independent parties who will become members of the Committee.

Board of Directors Succession

As part of regeneration process for continuity of the Company's business, Indonesia Eximbank has in place a succession policy for Managing Directors, as set out in the Board of Directors Regulation No. 0008/PDD/12/2018 on the Procedures for Proposals, Appointment and Termination of the Managing Directors of Indonesia Eximbank aligned with Article 29 of Law No. 2/2009 on Indonesia Eximbank.

The policy also regulates the composition of the Managing Director, namely a maximum of 5 (five) people and a maximum of 4 (four) of whom come from internal of the Company. The regulation also stipulates that the Managing Director is appointed and dismissed by the Board of Directors at the recommendation of the Executive Director.

In details, the Board of Directors' succession flow is illustrated in the following simulation.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Usulan Tertulis Kandidat Direktur Pelaksana Written Proposal for Executive Director Candidates	Direktur Eksekutif meminta pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi Chief Executive Officer asks for considerations of Remuneration & Nomination Committee	Pengecekan Persyaratan Kandidat Candidate Requirements Check
Dewan Direktur meminta usulan tertulis kandidat Direktur Pelaksana dari Direktur Eksekutif. The Board of Directors requests a written proposal on candidates for Managing Director from the Chief Executive Officer.	- Direktur Eksekutif wajib meminta pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi. - Dalam hal Komite belum terbentuk, maka Direktur Eksekutif dapat meminta pejabat Divisi Sumber Daya Manusia, kecuali menyangkut diri pejabat yang dimaksud. - The Chief Executive Officer is obligated to ask the considerations of the Remuneration and Nomination Committee. - In the event that the Remuneration and Nomination Committee is not yet established, the Executive Director shall refer to the Executive in charge of Human Resources, unless the Officer is also the candidate proposed.	Kandidat Direktur Pelaksana wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. The proposed candidates should fulfil the prevailing requirements.

Uji Kemampuan dan Kepatuhan Fit and Proper Test	Hasil akhir Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatuhan Final Result of Fit and Proper Test	Keputusan Dewan Direktur Board of Directors' Decision
Uji Kemampuan dan Kepatuhan dilakukan oleh Tim dengan materi uji mencakup penilaian administratif dan wawancara Fit and Proper Test by a Team, Involving administrative evaluation and interviews	Berdasarkan hasil akhir, Tim menyampaikan 2 orang calon tertinggi kepada Dewan Direktur Based on the final result of the Fit and Proper Test, the Team proposed 2 (two) highest-scoring candidates to the Board of Directors.	Dewan Direktur menetapkan Direktur Pelaksana terpilih berdasarkan keputusan Dewan Direktur. The Board of Directors assigns the selected Managing Directors by a Decree of the Board of Directors.

Program Pengembangan Komite

Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi ikut berpartisipasi dalam program pengembangan sebagai berikut:

Committee Development Program

Throughout 2022, the Remuneration and Nomination Committee participated in the following development programmes:

Nama	Jenis Pelatihan / Seminar Training / Seminar	Penyelenggara Organizer	Tanggal & Lokasi Penyelenggaraan Date & Location
Suminto	Directorship Program 'High Performance Boards'	Pertamina Training & Consulting	Jakarta, 22 – 25 Maret 2022 Jakarta, 22 – 25 March 2022
Kasan	Directorship Program 'High Performance Boards'	Pertamina Training & Consulting	Jakarta, 22 – 25 Maret 2022 Jakarta, 22 – 25 March 2022
Wahyu P. Wibowo	Leadership Season: Mengungkap yang Belum Terungkap Leadership Season: Uncovering the Unrevealed	LPEI Indonesia Eximbank	Jakarta, 11 Februari 2022 Jakarta, 11 February 2022
	Webinar Green Economy Outlook 2022 "Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan Dalam Mewujudkan Green Economy Green Economy Outlook 2022 Webinar "Indonesia's Policy Direction and Challenges in Realising Green Economy	Bisnis Indonesia	Jakarta, 22 – 23 Februari 2022 Jakarta, 22 – 23 February 2023

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Nama	Jenis Pelatihan / Seminar Training / Seminar	Penyelenggara Organizer	Tanggal & Lokasi Penyelenggaraan Date & Location
	Penerapan GRC Terpadu (Era - New Normal) Integrated GRC Implementation (New Normal Era)	LPEI Indonesia Eximbank	Jakarta, 29 Agustus 2022 Jakarta, 29 August 2022
	Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Concept and Implementation of Islamic Finance Indonesia Eximbank	Karim Consulting Indonesia	Jakarta, 21 Desember 2022 Jakarta, 21 December 2022

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee Meetings

During 2022, the Remuneration and Nomination Committee held 8 (eight) meetings, with the following frequency and attendance rates:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Meeting Frequency and Attendance

Nama Name	Jumlah Rapat Meeting Frequency	Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
Suminto	Ketua Chairman	8	100%
Kasan	Anggota Member	8	100%
Wahyu P Wibowo	Anggota Member	8	100%

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasnsi

Remuneration and Nomination Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda rapat Meeting Agenda	Peserta iParticipant
1	10-Jan-22	Nominasi Anggota KPR dengan masa jabatan 3 tahun sejak 17 Jan 2022 s.d 16 Jan 2025 Nominated Member of Committee with a term of 3 years from 17 Jan 2022 to 16 Jan 2025.	Seluruh Anggota All Members
2	5-Feb-22	Pembaharuan Peraturan Perusahaan LPEI 2022 sd 2024 Renewal of Indonesia Eximbank Company Regulations 2022 to 2024	Seluruh Anggota All Members
3	24-Feb-22	1. <i>Proposal</i> remunerasi pengurus PT IEB Prima Aset 2. Usulan perubahan honorarium Anggota Komite dan Dewan Pengawas Syariah LPEI 1. Proposal for the remuneration of the management of PT IEB Prima Aset 2. Proposed changes to the honorarium of Committee Members and Sharia Supervisory Board of Indonesia Eximbank	Seluruh Anggota All Members
4	23-Mar-22	Update kepegawaian Employment update	Seluruh Anggota All Members
5	7-Apr-22	1. Piagam KRN 2. Penggunaan Surplus Anggaran 1. KRN Charter 2. Utilisation of Budget Surplus	Seluruh Anggota All Members

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

No	Tanggal Date	Agenda rapat Meeting Agenda	Peserta iParticipant
6	27-Jul-22	<i>Headcount and Employee Engagement</i>	Seluruh Anggota All Members
7	20-Dec-22	- Pembentukan Panitia Seleksi Direktur Pelaksana - Laporan SDM s.d Nov 22 dan Fokus SDM 2023	Seluruh Anggota All Members
8	26-Dec-22	- Permohonan Persetujuan Pembentukan Panitia Seleksi Direktur Pelaksana <i>Highlight 2022</i> dan Strategic Plan 2023 - Struktur Organisasi	Seluruh Anggota All Members

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi
Tahun 2022

Pada tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menindaklanjuti keputusan yang ditetapkan dalam rapat Dewan Direktur dengan Direktur Eksekutif, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasilnya telah direkomendasikan kepada Dewan Direktur dan telah menjadi keputusan dan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses bisnis dan operasional sepanjang tahun 2022.

1. Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan mandat dalam hal kajian dan rekomendasi remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan terkait dengan remunerasi anggota komite independen dan Dewan Pengarah Syariah, remunerasi pengurus PT IEB Prima Aset, dan usulan penggunaan surplus anggaran 2021.

a. Remunerasi Anggota Komite Independen

Sesuai dengan catatan kehadiran rapat pada tahun 2022, jumlah kehadiran anggota komite independen tercatat lebih dari 2 kali lipat dari kehadiran sebanyak 12 kali dalam satu tahun. Di samping itu, peninjauan remunerasi anggota independen komite dan DPS terakhir dilakukan

Remuneration and Nomination Committee Activity
Implementation in 2022

In 2022, the Remuneration and Nomination Committee has followed up on the decisions made in the Board of Directors meeting with the Executive Directors, in accordance with its duties and functions. The results have been recommended to the Board of Directors and have become decisions and regulations that guide the implementation of business and operational processes throughout 2022.

1. Remuneration Function

In carrying out its mandate in terms of remuneration review and recommendation, the Remuneration and Nomination Committee has conducted discussions related to the remuneration of independent committee members and Sharia Governing Board, remuneration of PT IEB Prima Aset management, and proposed use of 2021 budget surplus.

a. Remuneration of Independent Committee Members

In accordance with the meeting attendance records in 2022, the number of attendance of independent committee members was more than twice the attendance of 12 times in a year. In addition, the last review of the remuneration of independent committee members and DPS

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

pada awal tahun 2022. Memperhatikan kedua hal tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengusulkan kepada Dewan Direktur untuk menaikkan remunerasi dan memberikan uang kehadiran apabila kehadiran dalam rapat lebih dari yang dipersyaratkan dalam Piagam Komite.

- b. Remunerasi Pengurus IEB Prima Aset
Sebagai tindak lanjut dari pendirian PT IEB Prima Aset sebagai anak perusahaan LPEI, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur untuk diputuskan oleh RUPS PT IEB Prima Aset terkait remunerasi pengurus PT IEB Prima Aset yang terdiri dari Komisaris Utama, Anggota Komisaris, Direktur Utama dan Direktur.
- c. Usulan Penggunaan Surplus Anggaran 2021
Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 260/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kajian dan rekomendasi terkait dengan penggunaan surplus anggaran 2021 untuk Tantiem dan Jasa Produksi untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan.

2. Fungsi Nominasi
Sesuai dengan No. 208/PMK.06/2021 Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan arahan dalam rangka perbaikan penerapan kebijakan pengangkatan organ-organ struktural LPEI. Selama

was conducted in early 2022. Considering these matters, the Remuneration and Nomination Committee has proposed to the Board of Directors to increase the remuneration and provide attendance fees if the attendance at meetings is more than required in the Committee Charter.

- b. Remuneration of IEB Prima Aset Management
As a follow-up to the establishment of PT IEB Prima Aset as a subsidiary of Indonesia Eximbank, the Remuneration and Nomination Committee has conducted a review and provided recommendations to the Board of Directors to be decided by the GMS of PT IEB Prima Aset regarding the remuneration of PT IEB Prima Aset management consisting of President Commissioner, Members of Commissioners, President Director and Directors.
- c. Proposed Use of 2021 Budget Surplus
In accordance with Article 21 of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2009 concerning the Indonesia Eximbank and Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 260/PMK.06/2015 concerning Procedures for Determining the Use of Surplus and Capital Capitalisation of the Indonesia Eximbank, the Remuneration and Nomination Committee has conducted a review and recommendation regarding the use of the 2021 budget surplus for Tantiem and Production Services to be submitted to the Executive Director and subsequently sent to the Minister of Finance.

2. Nomination Function
In accordance with No. 208/PMK.06/2021, the Remuneration and Nomination Committee has provided guidance to improve the implementation of the appointment policy of Indonesia Eximbank's

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

semester I tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kajian dan rekomendasi terkait dengan Struktur Organisasi LPEI yang telah diluncurkan pada tanggal 3 Januari 2022 dan Struktur Organisasi PT IEB Prima Aset, serta proses perpindahan pegawai dari LPEI ke PT EIB Prima Aset. Di samping itu, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses seleksi untuk posisi anggota independen Komite Pemantau Resiko, Head of Regions LPEI dan Head of Restrukturisasi PT IEB Prima Aset. Dalam kekosongan satu posisi Direktur Pelaksana LPEI, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membahas mengenai Pembentukan Panitia Seleksi Direktur Pelaksana serta mengajukan usulan permohonan persetujuan Pembentukan Panitia Seleksi Direktur Pelaksana.

Selain melaksanakan dua fungsi di atas, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian dan analisa terhadap usulan manajemen terkait Peraturan Perusahaan LPEI tahun 2022 – 2024, pembaharuan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi agar sesuai dengan PMK 208/2022 dan *highlight* 2022 dan *Strategic Plan* LPEI 2023 serta pembahasan mengenai *headcount* dan *employee engagement* LPEI.

Beberapa hasil dari pelaksanaan kegiatan Komite dan Remunerasi dan Nominasi yang dilaksanakan pada akhir tahun 2022 masih terus berproses melewati tahun terkait dan menjadi proses yang berkesinambungan ke periode selanjutnya.

structural organs. During the first semester of 2022, the Remuneration and Nomination Committee has conducted reviews and recommendations related to Indonesia Eximbank Organisational Structure which was launched on 3 January 2022 and the Organisational Structure of PT IEB Prima Aset, as well as the process of transferring employees from Indonesia Eximbank to PT EIB Prima Aset. In addition, the Remuneration and Nomination Committee has conducted the selection process for the positions of independent member of the Risk Monitoring Committee, Head of Regions of Indonesia Eximbank and Head of Restructuring of PT IEB Prima Aset. In the vacancy of one position of Managing Director of Indonesia Eximbank, the Remuneration and Nomination Committee has also discussed the Establishment of a Managing Director Selection Committee and submitted a proposal for approval of the Establishment of a Managing Director Selection Committee.

In addition to carrying out the above two functions, the Remuneration and Nomination Committee reviewed and analysed management's proposals related to Indonesia Eximbank's Corporate Regulations for 2022-2024, renewal of the Remuneration and Nomination Committee Charter to comply with PMK 208/2022 and highlights of 2022 and Indonesia Eximbank's Strategic Plan 2023 as well as discussions on Indonesia Eximbank's headcount and employee engagement.

Some of the results of the Committee and Remuneration and Nomination activities carried out at the end of 2022 are still continuing to process through the year and become a continuous process to the next period.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

RISK MONITORING COMMITTEE



Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 40 PMK 208/PMK.06/2021, Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko melalui pemantauan, evaluasi dan pemberian rekomendasi tentang Risiko kegiatan usaha dan operasional LPEI.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Sebagai pedoman dan tata tertib kerja komite, terdapat Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur No. 0006/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Komposisi dan Profil Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2022, terdapat 1 (satu) kali perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) 0092/KDE/11/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Pemantau Risiko LPEI adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Felia Salim	Ketua Chairman
Putu Rahwidhiyasa	Anggota Member

Per 31 Desember 2022, berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) 0005.01/KDE/11/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Legal References

The Risk Monitoring Committee was established based on Article 8 paragraph (1) of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank. As stated in the provisions of Article 40 of PMK 208/PMK.06/2021, the Risk Monitoring Committee is tasked with assisting the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the implementation of Risk Management through monitoring, evaluating and providing recommendations on the risks of Indonesia Eximbank's business activities and operations.

Risk Monitoring Committee Charter

As a guideline and work order of the committee, there is a Risk Monitoring Committee Charter established through Board of Director Regulation No. 0006/PDD/09/2022 concerning the Risk Monitoring Committee Charter of the Indonesian Export Financing Corporation.

Composition and Profile of Risk Management

Throughout 2022, there was 1 (one) change in the composition of the Risk Monitoring Committee membership. Based on the Executive Director Decision (KDE) 0092/KDE/11/2021 dated 1 November 2021 concerning the Membership of the Risk Monitoring Committee of the Indonesia Eximbank, the composition of the Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee is as follows:

As of 31 December 2022, based on Executive Director Decision (KDE) 0005.01/KDE/11/2022 dated 17 January 2022 on the Membership of the Risk Monitoring

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Pemantau Risiko LPEI adalah sebagai berikut:

Committee of the Indonesia Eximbank, the composition of the Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Felia Salim	Ketua Chairman
Putu Rahwidhiyasa	Anggota Member
Benny K. Yudiaatmaja	Anggota Member

Profil Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Profile
Felia Salim

Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap Anggota Dewan Direktur
Chairman of the Risk Monitoring Committee Concurrently Member of the Board of Directors

Dasar Hukum Pengangkatan KMK 522/KMK.06/2018

[Legal Basis of Appointment](#)

Profil
[Profile](#)

Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Direktur di Bab 3 Laporan Tahunan ini.
Profile can be viewed on Sub Chapter of the Board of Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

Putu Rahwidhiyasa

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Dasar Hukum Pengangkatan 0092/KDE/11/2021

[Legal Basis of Appointment](#)

Periode Jabatan 1 November 2021 – sekarang
[Term of Office](#) 1 November 2021 - present

Kewarganegaraan Indonesia
[Nationality](#) Indonesian

Domisili Jakarta
[Domicile](#)

Usia / Tempat Tanggal Lahir 58 tahun per 31 Desember 2022, Jakarta, 13 September 1964
[Age / Place Date of Birth](#) 58 years as of 31 December 2022, Jakarta, 13 September 1964

Riwayat Pendidikan • Sarjana di Institute Pertanian Bogor pada tahun 1986
[Education Background](#) • Magister di the University of Illinois, USA tahun 1995
• Bachelor degree at Bogor Agricultural Institute in 1986
• Masters at the University of Illinois, USA in 1995

Pengalaman Kerja • Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
[Work Experience](#) (KNEKS) (Agustus 2020 s.d. sekarang).
• Berbagai jabatan dan terakhir sebagai Direktur *Risk Management & Compliance*, Bank Syariah Mandiri (2008 - 2020)
• Berbagai jabatan di Bank Mandiri (Februari 1999 – Juli 2020)
• Komisaris Rumah Sakit Puri Cinere (2003 s.d. 2006).
• Komisaris PT Merincorp Securities Indonesia (2001)
• Berbagai jabatan di Bank Ekspor Impor Indonesia dan terakhir sebagai *Manager* di *Initial Public Offering (IPO) Team* (Oktober 1987 sd Januari 1999).

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

- Director of Sharia Business and Entrepreneurship, National Committee for Sharia Economy and Finance (KNEKS) (August 2020 to present).
- Various positions and most recently as Director of Risk Management & Compliance, Bank Syariah Mandiri (2008 - 2020)
- Various positions at Bank Mandiri (February 1999 – July 2020)
- Commissioner of Puri Cinere Hospital (2003 to 2006).
- Commissioner of PT Merincorp Securities Indonesia (2001)
- Various positions in the Export Import Bank of Indonesia and most recently as Manager in the Initial Public Offering (IPO) Team (October 1987 to January 1999).

Benny K. Yudiatmaja

Anggota Komite Pemantau Risiko

Member of the Risk Monitoring Committee

Dasar Hukum Pengangkatan 0005.01/KDE/11/2022
Legal Basis of Appointment

Periode Jabatan 17 Januari 2022 – sekarang
Term of Office 17 January 2022 - present

Kewarganegaraan Indonesia
Nationality Indonesian

Domisili Jakarta
Domicile

Usia / Tempat Tanggal Lahir 54 tahun per 31 Desember 2022, Singaraja, 1 Januari 1968
Age / Place Date of Birth 54 tahun as of 31 Descmber 2022, Singaraja, 1 January 1968

Riwayat Pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991
Educationa Background Magister di Universitas Indonesia pada tahun 2012
Bachelor's degree at Bandung Institute of Technology in 1991
Master's degree at University of Indonesia in 2012

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Anggota Komite Audit Bank Mayapada (2013 – sekarang)
- Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mayapada (2013 – 2022)
- Software Architect, Bank DKI (2020 – sekarang)
- Subject Matter Expert, Inti Copora Teknologi untuk implementyasi NTCS Treasury Bank Mandiri (2022 – sekarang)
- Risk Modelling Lecturer at Masters in Applied Economics Atma Jaya University (2017 – sekarang)
- Treasury Manager, PT Austindo Nusantara Jaya Jakarta (1999 – 2002)
- Market Risk Manager, Rabobank International Indonesia (1998 – 1999)
- Head of Derivatives & Marketing Desk Treasury, Bank Niaga (1997 – 1998)
- Head of Risk Management Department, Bank Niaga (1994 – 1997)
- Berbagai jabatan lainnya.
- Member of Bank Mayapada Audit Committee (2013 - present)
- Member of Bank Mayapada Risk Monitoring Committee (2013 - 2022)
- Software Architect, Bank DKI (2020 - present)
- Subject Matter Expert, Inti Copora Teknologi for Bank Mandiri's NTCS Treasury implementation (2022 - present)
- Risk Modelling Lecturer at Masters in Applied Economics Atma Jaya University (2017 - present)
- Treasury Manager, PT Austindo Nusantara Jaya Jakarta (1999 - 2002)
- Market Risk Manager, Rabobank International Indonesia (1998 - 1999)
- Head of Derivatives & Marketing Desk Treasury, Bank Niaga (1997 - 1998)
- Head of Risk Management Department, Bank Niaga (1994 - 1997)
- Various other positions.

KOMITE PEMANTAU RISIKO RISK MONITORING COMMITTEE

Periode dan Masa Jabatan

Menunjuk Kputusan Direktur Eksekutif Nomor 0005.01/KDE/11/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko LPEI, masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 3 (tiga) tahun, serta dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali apabila menunjukkan kinerja yang baik.

Independensi komite

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau anggota komite lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Dewan Direktur No. 0006/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI, Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko melalui pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi tentang Risiko kegiatan usaha dan operasional LPEI.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang dilaksanakan dengan melakukan:

- pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- pemberikan rekomendasi atas kegiatan usaha dan operasional LPEI;

Period and Tenure

Referring to the Decree of the Executive Director Number 0005.01/KDE/11/2022 dated 17 November 2022 regarding Membership of the Risk Monitoring Committee, the term of office of members of the Risk Monitoring Committee is for 3 (three) years and can be extended for as long as 1 (one) time if it shows good performance.

Independence of the committee

All members of the Risk Monitoring Committee come from independent parties who have no financial, stock management and/or family relationship with the Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and/or other committee members.

Duties and responsibilities

Based on Article 40 of the Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning the Governance Principles, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank and Board of Director Regulation No. 0006/PDD/09/2022 concerning the Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee Charter, the Risk Monitoring Committee has the task of assisting the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the implementation of Risk Management through monitoring, evaluating, and providing recommendations on the Risk of Indonesia Eximbank's business activities and operations.

The implementation of duties and responsibilities is at least carried out by conducting:

- monitoring and evaluation of the conformity between Risk Management policies and policy implementation;
- monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Work Unit;
- providing recommendations on business activities and operations of Indonesia Eximbank;

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

- d. pelaksanaan pelaporan atas tugas-tugas sebagaimana pada huruf a dan b di atas secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali kepada Dewan Direktur; dan
- e. tugas-tugas lain yang sesuai dengan fungsi Komite Pemantau Risiko atas permintaan Dewan Direktur.

- d. reporting on the tasks as in letters a and b above periodically at least 3 (three) months to the Board of Directors; and
- e. other duties in accordance with the functions of the Risk Monitoring Committee at the request of the Board of Directors.

Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2022, anggota Komite Pemantau Risiko tidak berpartisipasi dalam program pengembangan Komite.

Committee Development Program

During 2022, members of the Risk Monitoring Committee did not participate in any development programs.

Rapat Komite, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 25 (dua puluh lima) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Committee Meetings, Frequency and Attendance

During 2022, the Risk Monitoring Committee has held 25 (twenty-five) meetings with the following frequency and level of attendance:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Frequency	Jumlah Total	Persentase Percentage
Felia Salim	Ketua Chairman	25	25	100%
Putu Rahwidhiyasa	Anggota Member	25	20	81%
Benny K. Yudiaatmaja*	Anggota Member	25	23	92%

(*) Masa jabatan efektif sejak 17 Januari 2022 | Effective tenure since 17 January 2022

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	4-Jan-22	Arahan Dari Ketua KPR Untuk Pembuatan Laporan KPR Direction from the Head of Committee for Making Committee Reports	Seluruh Anggota All Members
2	21-Jan-22	Tanggapan OJK atas Penyampaian Laporan Profil Risiko Triwulan III LPEI tahun 2021 OJK's Response to the Submission of Indonesia Eximbank's Third Quarter Risk Profile Report in 2021	Seluruh Anggota All Members
3	26-Jan-22	1. Laporan Profil Risiko TW IV 2021 2. Pembahasan ringkasan eksekutif pada Lap. Pembiayaan Bermasalah TW IV Des 21 3. Rapat Internal KPR 1. Risk Profile Report Q4 2021 2. Discussion on executive summary for Non-Performing Financing Report Q4 Dec 21 3. KPR Internal Meeting	Seluruh Anggota All Members
4	3-Feb-22	Perkenalan Tim SKMR Dengan KPR SKMR Team Introduction with the committee	Seluruh Anggota All Members

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
5	4-Feb-22	Laporan Dewan Direktur Yang Mengetuai KPR Report of the Board of Directors Chairing the committee	1. Felia Salim 2. Benny K
6	8-Feb-22	1. <i>Stress Testing</i> 2. <i>Pembahasan Early Prepayment</i> 1. Stress Testing 2. Early Prepayment Discussion	Seluruh Anggota All Members
7	16-Feb-22	Pembahasan Early prepayment, credit cost, dan LIBOR Discussion on early repayment, cost of credit, and LIBOR	Seluruh Anggota All Members
8	4-Mar-22	Kinerja Keuangan per Februari 2022 Financial Performance as of February 2022	Seluruh Anggota All Members
9	30-Mar-22	Koordinasi Laporan KPR Q1 tahun 2022 Coordination of Q1 Committee Report in 2022	Seluruh Anggota All Members
10	4-Apr-22	Pembahasan Pemenuhan Dokumen Permintaan Audit ITJEN Discussion of Fulfilment of ITJEN Audit Request Documents	Seluruh Anggota All Members
11	7-Apr-22	Rapat KPR dengan SKMR 1. Kebijakan ESG 2. Program Kerja Manajemen Risiko Committee Meeting with SKMR 1. ESG Policy 2. Risk Management Work Programme	Seluruh Anggota All Members
12	13-Apr-22	3. Pembobotan Profil Risiko 4. <i>Portfolio Guideline 2022</i> 5. <i>Update quarter results and year, end projection and assessment on new upcoming POJK asset Quality</i> 3. Risk Profile Weighting 4. 2022 Portfolio Guidelines 5. Update quarter and year results, final projections and assessment of new upcoming POJK Asset Quality	1. Felia Salim 2. Benny K
13	20-Apr-22	Laporan Profil Risiko posisi Q1 th 2022 Risk Profile Report Q1 of 2022	Seluruh Anggota All Members
14	10-May-22	Rapat Internal KPR Pembahasan Manajemen Letter Laporan Keuangan LPEI Tahun 2021 Internal Committee Meeting to Discuss Letter Management of Indonesia Eximbank's Financial Statements for 2021	1. Felia Salim 2. Benny K
15	25-May-22	1. Laporan Tingkat Kesehatan TW I 2. <i>Update Divisi Kepatuhan</i> 3. <i>Update Progress GRC</i> 4. <i>Update Divisi Audit</i> 5. <i>Update key point KPR 20 April 2022</i> 1. Soundness Level Report Q I 2. Compliance Division Update 3. GRC Progress Update 4. Audit Division Update 5. Update on mortgage key points 20 April 2022	Seluruh Anggota All Members
16	25-Jul-22	1. Profil Risiko Q 2 - 2002 2. Risk Appetite Statement 3. Kebijakan ESG 1. Risk Profile Q 2 - 2002 2. Risk Appetite Statement 3. ESG Policy	Seluruh Anggota All Members
17	27-Jul-22	Pembahasan Stress Testing Stress Testing Discussion	Seluruh Anggota All Members

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
18	18-Aug-22	1. Laporan Tingkat Kesehatan Q II 2. Pemaparan Tugas Divisi Hukum 3. Tata Kelola Manajemen kinerja 1. Soundness Level Report TW II 2. Legal Division Task Force Presentation 3. Performance Management Governance	Seluruh Anggota All Members
19	25-Aug-22	Pembahasan Rencana Jangka Panjang LPEI Discussion of Indonesia Eximbank's Long-Term Plan	Seluruh Anggota All Members
20	29-Aug-22	Pembahasan Hasil Evaluasi atas Tata Kelola Manajemen Risiko Discussion of Evaluation Results on Risk Management Governance	Seluruh Anggota All Members
21	15-Sep-22	Pembahasan Usulan Risk Appetite Statement Discussion of Proposed Risk Appetite Statement	1. Felia Salim 2. Benny K
22	16-Sep-22	<i>Committee Meeting</i>	1. Felia Salim 2. Benny K
23	26-Oct-22	1. Pemaparan Penjaminan dan Asuransi 2. Laporan Profil risiko Triwulan III 2022 1. Presentation on Guarantee and Insurance 2. Risk profile report for the third quarter of 2022	Seluruh Anggota All Members
24	28-Nov-23	1. Pemaparan Laporan Tingkat Kesehatan posisi TW III 2022 2. Pemaparan Laporan Portfolio Quality posisi Oktober 2022 1. Presentation of Soundness Level Report as of Q III 2022 2. Presentation of Portfolio Quality Report as of October 2022	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa
25	7-Dec-23	Rapat Internal KPR Committee Internal Meeting	Seluruh Anggota All Members

Program Kerja KPR Tahun 2022

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2022 sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan review dan monitoring dalam rapat internal setiap bulan
2. Melakukan kegiatan supervisi *consulting review* dengan Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko, Divisi Keuangan dan Divisi Treasury dan ALMA secara triwulanan.
3. Diskusi dengan pihak eksternal secara periodik apabila diperlukan.

2022 Committee Work Program

The Risk Monitoring Committee work plan for 2022 is as follows:

1. Conduct review and monitoring activities in internal meetings every month
2. Conducting supervision consulting review activities with the Risk Management Work Unit Division, Finance Division and Treasury Division and ALMA on a quarterly basis.
3. Discussion with external parties periodically if necessary.

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

No.	Kegiatan Activities	Jenis Type	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Koordinasi, Supervisi, Consulting, Review, & Monitoring Coordination, Supervision, Consulting, Review, & Monitoring														
1	Rapat Internal KPR (Rapat setiap bulan) Committee Internal Meeting (Meeting every month)	Review & Monitoring	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Rapat dengan Tim SKMR (Rapat setiap tiga bulan) Meeting with SKMR Team (Meeting every three months)	Supervisi Consulting Review Supervision Consulting Review	1			2			3			4		
3	Rapat dengan Tim Finance (Rapat setiap tiga bulan) Meeting with Finance Team (Meeting every three months)	Supervisi Consulting Review Supervision Consulting Review		1			2			3			4	
4	Rapat dengan Tim ALM & Lainnya (Rapat setiap tiga bulan) Meeting with ALM Team & Others (Meeting every three months)	Supervisi Consulting Review Supervision Consulting Review			1			2			3			4
5	Diskusi dengan pihak eksternal: OJK / KAP (Rapat setiap enam bulan) Discussion with external parties: OJK / KAP (Meeting every six months)	Koordinasi Coordination						1						2
6	Ad-hoc meeting (In case diperlukan) Ad-hoc meeting (In case needed)	Supervisi Consulting Review Supervision Consulting Review			1						2			

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Dalam rangka mendukung program kerja KPR Tahun 2022, KPR telah menyusun kerangka kerja sebagai berikut:

In order to support KPR's 2022 work programme, KPR has developed the following framework:

Capabilities						
Risk	Risk Strategy & Governance	Risk Analytics	Risk Operations	Event Response	Regulatory Compliance	Validation
Skill and Delivery Categories	Keseimbangan antara formulasi strategi, manajemen risiko dan objektif bisnis	Memperkuat analisa risiko sehingga memberi nilai tambah bagi performa lembaga	Meningkatkan proses yang efisien dalam mendukung kinerja bisnis dengan tetap memperhatikan risiko yang terukur	Memiliki pemahaman mengenai <i>risk crisis</i> dan memiliki <i>contingency plan</i> dan <i>action plan</i> yang memadai	Memahami dan menerapkan persyaratan kepatuhan yang diminta regulator	Meyakinkan bahwa strategi, <i>framework</i> manajemen risiko dan kontrolnya diterapkan secara efektif dan efisien
	Balance between strategy formulation, risk management and business objectives	Strengthen risk analysis to add value to institutional performance	Improving efficient processes in supporting business performance while maintaining measurable risks	Understand the risk crisis and have adequate contingency plans and action plans	Understand and implement regulatory compliance requirements	Ensure that the strategy, risk management framework and controls are implemented effectively and efficiently.
	Design Enterprise Risk Management Framework	Dashboard yang terintegrasi untuk melihat parameter risiko dan financial	Metode identifikasi risiko, penetapan mitigasi dan proses monitoring yang robust dan aplikatif	Memiliki <i>Contingency Planning</i> (<i>proses, system, SDM</i>)	Pemahaman mengenai regulasi baru	Menggunakan komite dewan direktur sebagai bagian dari <i>review</i> / validasi penerapan <i>risk framework</i> / strategi
		Integrated dashboard to view risk and financial parameters		Have Contingency Planning (<i>process, system, HR</i>)	Understanding of new regulations	Using board of director committees as part of the review/validation of risk framework/strategy implementation
	Pengkinian terhadap pembobotan / parameter <i>Risk Profile</i>	Parameter untuk melihat dan menilai Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas / Market	Robust and applicable methods of risk identification, mitigation and monitoring processes		Memastikan penerapan kepatuhan dilaksanakan	Pembentukan tim senior kecil untuk melakukan sidak di unit kerja yang bersifat konsultatif
	Update of Risk Profile weights / parameters	Parameters to view and assess Credit Risk, Market Risk, Liquidity / Market Risk			Ensure compliance practices are implemented	Formation of a small senior team to conduct inspections in consultative work units
	Peningkatan <i>Risk Governance</i> dan <i>Awareness</i> secara berkelanjutan	<i>Business trend analysis</i> untuk melihat lebih awal risiko yang dapat terjadi	Memastikan unit manajemen risiko memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai	Memiliki parameter yang terukur dalam merespon saat kondisi krisis (<i>Crisis Management</i>)	Parameter untuk mengukur dan melihat penerapan kepatuhan di seluruh lini	Menguatkan fungsi RCU di unit kerja
	Continuous improvement of Risk Governance and Awareness	Business trend analysis to see early on the risks that could occur	Ensure the risk management unit has adequate capacity and capability	Have measurable parameters in responding during crisis conditions (<i>Crisis Management</i>)		Strengthen the RCU function in the work unit
	Review dari organisasi, kebijakan / SOP yang ada saat ini	<i>Risk Register</i> untuk memetakan risiko operasional	Implementasi ESG secara bertahap		Parameters to measure and see the implementation of compliance across the board	Mengembangkan KRI yang robust
		Risk Register to map operational risks	Gradual implementation of ESG			
Review of current organisation, policies / SOPs	<i>Stress Testing</i> secara berkala	Implementasi GRC <i>framework</i>			Develop a robust KRI	
	Stress Testing on a regular basis	Implementation of GRC framework				
	<i>Lender of Last resort</i>					



ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

EXECUTIVE DIRECTOR SUPPORTING ORGANS

Guna mendukung tugas dan fungsinya, Direktur Eksekutif membentuk komite-komite yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif. Peraturan Direktur Eksekutif mengatur struktur dan keanggotaan komite, tugas dan tata cara pengambilan keputusan. Penunjukan keanggotaan bersifat *ex-officio* sehingga kewenangan pengambilan keputusan melekat kepada jabatan.

Berikut komite-komite di bawah Direktur Eksekutif:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Pengembangan Produk
3. Komite Kebijakan dan Pedoman
4. Komite Assets dan Liabilities Management
5. Komite Teknologi Sistem Informasi
6. Komite Pengadaan
7. Komite Jasa Konsultasi
8. Komite Pembiayaan
9. Komite Sumber Daya Manusia

In performing its duties and functions, the Executive Director establishes the committees stipulated in the Executive Director Regulations. The Executive Director Regulation stipulates the committee's structure and membership, duties and decision-making procedures. Members' appointments are *ex-officio* hence the authority of decision-making is embedded into the position.

Below are the Committees of the Executive Director:

1. Risk Management Committee
2. Product Development Committee
3. Policy and Guidelines Committee
4. Assets and Liabilities Management Committee
5. Information Technology Systems Committee
6. Procurement Committee
7. Advisory Services Committee
8. Financing Committee
9. Human Resources Committee

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMMITTEE



Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0031/PDE/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Tentang Komite Manajemen Risiko. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dilakukan *review* sekaligus simplifikasi struktur dan keanggotaan Komite-komite di bawah Direktur Eksekutif, maka dilakukan pengkinian struktur dan kewenangan Komite Manajemen Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif dan kemudian direvisi menjadi Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0030/PDE/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif.

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- Penyusunan strategi dan program penerapan Manajemen Risiko;
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
- Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*);
- Melakukan evaluasi atas penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak.

Status Keanggotaan dan Status hak Suara

Berikut struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko di LPEI berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0031/PDE/12/2021 tentang Komite Manajemen Risiko yang berlaku sejak 13 Desember 2021 sampai dengan digantikan oleh Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0015/PDE/08/2022 tentang Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif yang berlaku sejak 9 Agustus 2022:

The Risk Management Committee was established based on Executive Director Regulation No. 0031/PDE/12/2021 dated December 13, 2021 concerning the Risk Management Committee. In connection with changes in organizational structure, a review and simplification of the structure and membership of the Committees under the Executive Director was carried out, an update to the structure and authority of the Risk Management Committee was carried out as stipulated in Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 concerning Nine Committees Under the Executive Director and then revision to Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated December 30, 2022 on Nine Committees Under the Executive Director.

The Risk Management Committee is tasked with providing recommendations to the Executive Director, among others, regarding:

- Preparation of strategies and programs for the implementation of Risk Management;
- Improvement or enhancement of Risk Management implementation based on the results of implementation evaluation;
- Justification of matters related to business decisions that deviate from normal procedures (*irregularities*);
- Evaluate the assessment of the Soundness Level of the Subsidiary.

Membership Status and Voting Rights Status

The following is the membership structure of the Risk Management Committee based on Executive Director Regulation No. 0031/PDE/12/2021 concerning Risk Management Committee which is valid from December 13, 2021 until replaced by Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 concerning Nine Committees Under the Executive Director effective from August 9, 2022:

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana Yang Membidangi fungsi Manajemen Risiko Managing Director in charge of the Risk Management function
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice-Chairman concurrently Permanent Member	<i>Head of</i> yang membidangi Manajemen Risiko Head of in charge of Risk Management
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi dari unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Head of Division of the work unit that carries out the Risk Management function
Anggota Members	Anggota Tetap Permanent Members: - Direktur Pelaksana selain ketua; Managing Director other than the Chairman <i>Head of</i> yang membidangi Internal Audit; Head of in charge of Internal Audit <i>Head of</i> yang membidangi Kepatuhan; Head of in charge of Compliance Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members: <i>Head of</i> selain anggota tetap; Head of other than permanent members - Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap; Head of Division/officer at the level of Division Head other than permanent members yang terkait dengan materi pembahasan. related to the discussion material.

Berikut struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko di LPEI berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0015/PDE/08/2022 tentang Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif yang berlaku sejak 9 Agustus 2022 dan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0030/PDE/12/2022 tentang Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif yang berlaku sejak 14 Desember 2022:

The following is the membership structure of the Risk Management Committee based on Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 concerning Nine Committees Under the Executive Director effective as of August 9, 2022 and Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/20 22 concerning Nine Committees Under the Executive Director effective as of December 14, 2022:

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice-Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko Managing Director in charge of Risk Management
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Manajemen Risiko Head of Division in charge of Risk Management
Anggota Members	Anggota Tetap Permanent Members: - Seluruh Direktur Pelaksana; dan All Managing Directors; and <i>Head of</i> yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis; Head of finance and strategic planning Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members: <i>Head of</i> selain anggota tetap; Head of other than permanent members - Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap; Head of Division/officer at the level of Division Head other than permanent members yang terkait dengan materi pembahasan. related to the discussion material. Narasumber Sources: <i>Head of /</i> Kepala Divisi yang membidangi Internal Audit; Head of / Head of Division in charge of Internal Audit <i>Head of /</i> Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan. Head of / Head of Division in charge of compliance.

Tugas dan Wewenang

- Tugas Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:
 - Penyusunan strategi dan program penerapan Manajemen Risiko;
 - Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
 - Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*);
 - Melakukan evaluasi atas penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak.
- Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu.

Kebijakan Pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0030/PDE/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif mengatur tata cara pengambilan

Duties and Authorities

- The duty of the Risk Management Committee is to provide recommendations to the Executive Director, among others, regarding:
 - Preparation of strategies and programs for the implementation of Risk Management;
 - Improvement or enhancement of Risk Management implementation based on the results of implementation evaluation;
 - Justification of matters related to business decisions that deviate from normal procedures (*irregularities*);
 - Evaluate the assessment of the Soundness Level of the Subsidiary.
- Hold Risk Management Committee meetings at least 4 (four) times in 1 year or at any time if deemed necessary.

Decision Making Policy

Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/20 22 dated December 30, 2022 concerning Nine Committees Under the Executive Director that regulates the decisions-

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

keputusan Komite, yaitu:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
- Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - Sekretaris; dan
 - Anggota tetap.
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

making procedures of the Committee, as follows:

- Committee decision making can be done through face-to-face or online meetings.
- The quorum requirement for the Committee decision-making is a minimum of half of members consisting of:
 - Chairman and/or Vice Chairman;
 - Secretary; and
 - Permanent members.
- Meeting decisions must be taken based on deliberation for consensus.
- All decisions of the Committee shall be set forth in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner by the secretary of the committee.

Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 14 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Agenda, Frequency and Attendance of Meetings

Throughout 2022, the Risk Management Committee has held 14 meetings with the following agenda and frequency of attendance:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko
Frequency and Attendance of Risk Management Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	14	11	79
Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Credit & Risk Management	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	14	13	93
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	Anggota Tetap Permanent Member	14	12	86
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota Tetap Permanent Member	14	14	100
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Operasional Managing Director of Finance and Operations	Anggota Tetap Permanent Member	14	14	100

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director for Institutional Relations	Anggota Tetap Permanent Member	14	13	93
Head of Keuangan & Perencanaan Strategis Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	14	13	93

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Meeting Agenda

No	Bulan Month	Agenda
1.	Januari 2022 January 2022	Penetapan Segmentasi dan Komponen Perhitungan CKPN Kolektif tahun 2021 Determination of Segmentation and Components of Collective Allowance for Impairment Losses Calculation in 2021
2.	Januari 2022 January 2022	Laporan Profil Risiko Triwulan IV 2021 Risk Profile Report Quarter IV 2021
3.	Februari 2022 February 2022	Usulan Portfolio Guideline tahun 2022 Proposed Portfolio Guideline for 2022
4.	April 2022	Penyesuaian Pembobotan Profil Risiko Risk Profile Weighting Adjustment
5.	Mei 2022 May 2022	Penyesuaian <i>Threshold</i> Rentabilitas dan Permodalan dalam Laporan Tingkat Kesehatan LPEI Triwulan I 2022 Adjustment of Profitability and Capital Thresholds in Indonesia Eximbank Soundness Level Report for the First Quarter of 2022
6.	Mei 2022 May 2022	Laporan Tingkat Kesehatan LPEI Triwulan I 2022 Indonesia Eximbank Soundness Level Report Quarter I 2022
7.	Juni 2022 June 2022	<i>Konsep Pelaksanaan Enterprise Risk Assessment</i> (ERA) tahun 2022 Enterprise Risk Assessment (ERA) Implementation Concept in 2022
8.	Juli 2022 July 2022	<i>Risk Appetite Statement</i> LPEI 2023 Indonesia Eximbank Risk Appetite Statement 2023
9.	Juli 2022 July 2022	1. Laporan Profil Risiko Triwulan II 2022 2. Hasil <i>Stress Test</i> 1. Risk Profile Report Quarter II 2022 2. Stress Test Results
10.	Agustus 2022 August 2022	Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan II 2022 Soundness Level Report Quarter II 2022
11.	Oktober 2022 October 2022	Laporan Profil Risiko Triwulan III 2022 Risk Profile Report Quarter III 2022
12.	November 2022	Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan III 2022 Soundness Level Report Quarter III 2022
13.	November 2022	Usulan Besaran Presentase Rasio Klaim sebagai Dasar Perhitungan Cadangan Asuransi Proposed Percentage of Claim Ratio as the Basis for Calculating Insurance Reserves
14.	Desember 2022 December 2022	Usulan Komponen Perhitungan CKPN Tahun 2022 Proposed Components of Allowance for Impairment Losses Calculation in 2022



KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

Struktur dan kewenangan Komite Pengembangan Produk dalam pelaksanaan Komite Pengembangan Produk (KPP) periode tahun 2022 ditetapkan dalam:

1. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0033/PDE/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Komite Pengembangan Produk; dan perubahannya;
2. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1; dan perubahannya
3. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 1.

Komite ini bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai persetujuan rancangan peraturan terkait produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan LPEI, penyempurnaan produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan baru; serta penyusunan Standar Pedoman Produk (SPP) dan ketentuan lain yang terkait dengan produk/program bisnis secara *end to end*, termasuk jika diperlukan adanya mekanisme keputusan pembiayaan dengan memperhatikan *target market* dan/atau fitur produk tertentu.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengembangan Produk

Struktur dan keanggotaan Komite Pengembangan Produk sesuai PDE Nomor 0030/PDE/12/2022 adalah sebagai berikut:

The structure and authority of the Product Development Committee in the implementation of the Product Development Committee (KPP) for the 2022 period are stipulated in:

1. Executive Director Regulation No. 0033/PDE/12/2021 dated December 13, 2021 concerning Product Development Committee; and the changes;
2. Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 concerning Standard Operating Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1; and the changes of
3. Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated December 30, 2022 concerning Standard Operating Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 1.

This committee is tasked with providing recommendations to the Executive Director regarding the approval of draft regulations related to business products/programs and Indonesia Eximbank activities, improvement of business products/programs and new activities; as well as the preparation of Product Guideline Standards (SPP) and other provisions related to end-to-end business products/programs, including if it is necessary to have a financing termination mechanism by taking into account the target market and/or certain product features.

Structure and Membership of the Product Development Committee

The structure and membership of the Product Development Committee pursuant to PDE No. 0030/PDE/12/2022 are as follows:

Anggota Members	Kategori A Category A	Kategori B Category B
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk dan/atau Head of yang membidangi pengembangan produk Managing Director in charge of product development and/or Head of in charge of product development

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

Anggota Members	Kategori A Category A	Kategori B Category B
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk dan/atau <i>Head of</i> yang membidangi pengembangan produk Managing Director in charge of product development and/or Head of in charge of product development	–
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development
Anggota Tetap Permanent Members	1. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis; 2. <i>Head of</i> yang membidangi penjaminan & asuransi; 3. <i>Head of</i> yang membidangi wilayah. 1. Managing Director in charge of business development; 2. Head of underwriting & insurance; 3. Head of regional management.	1. Kepala Divisi yang membidangi kebijakan dan pedoman; 2. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko. 1. Head of Division in charge of policies and guidelines; 2. Head of Division in charge of risk management.
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	1. Direktur Pelaksana dan Head of selain anggota tetap; 2. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi bidang bisnis; 3. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi lain. yang terkait dengan materi pembahasan 1. Managing Director and Head of other than permanent members; 2. Head of Division/Division Head level officer for business; 1. Head of Division/official level of another Division Head. related to the subject matter	Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan. Head of Division/Division Head level officer other than permanent members related to the discussion material.
Narasumber Sources	–	1. Head of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit; 2. Head of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan; 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum. 1. Head of/Head of Division in charge of internal audit; 2. Head of/Head of Division in charge of compliance; 3. Head of the Division in charge of law.

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

Anggota Members	Kategori A Category A	Kategori B Category B
Alternate Keanggotaan Komite Alternate Committee Membership		
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – Article 11	Direktur Pelaksana yang membidangi kelembagaan Managing Director in charge of institutional affairs
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations	–
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi kebijakan dan pedoman Head of Division in charge of policies and guidelines	Kepala Divisi yang membidangi kebijakan dan pedoman Head of Division in charge of policies and guidelines

Sedangkan struktur dan keanggotaan Komite Pengembangan Produk sesuai PDE No. 0015/PDE/08/2022 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the structure and membership of the Product Development Committee according to PDE No. 0015/PDE/08/2022 are as follows:

Anggota Members	Kategori A Category A	Kategori B Category B
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk Managing Director in charge of product development
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk Managing Director in charge of product development	–
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development
Anggota Tetap Permanent Members	- Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis; - Head of yang membidangi penjaminan & asuransi; - Head of yang membidangi wilayah. - Managing Director in charge of business development; - Head of underwriting & insurance; - Head of regional management.	- Kepala Divisi yang membidangi kebijakan dan pedoman; - Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko. - Head of Division in charge of policies and guidelines; - Head of Division in charge of risk management.

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	1. Direktur Pelaksana dan Head of selain anggota tetap; 2. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi bidang bisnis; 3. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi lain. yang terkait dengan materi pembahasan 1. Managing Director and Head of other than permanent members; 2. Head of Division/Division Head level officer for business; 3. Head of Division/official level of another Division Head. related to the subject matter	Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan. Head of Division/Division Head level officer other than permanent members related to the discussion material.
Narasumber Sources	–	1. Head of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit; 2. Head of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan; 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum. 1. Head of/Head of Division in charge of internal audit; 2. Head of/Head of Division in charge of compliance; 3. Head of the Division in charge of law.
Alternate Keanggotaan Komite Alternate Committee Membership		
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – Article 11	Direktur Pelaksana yang membidangi kelembagaan Managing Director in charge of institutional affairs
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations	–
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi kebijakan dan pedoman Head of Division in charge of policies and guidelines	Kepala Divisi yang membidangi kebijakan dan pedoman Head of Division in charge of policies and guidelines

Dan sesuai PDE No. 0033/PDE/12/2021 adalah sebagai berikut:

And according to PDE No. 0033/PDE/12/2021 are as follows:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi fungsi pengembangan produk Managing Director in charge of product development function
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan produk Head of Division of the work unit that carries out the product development function

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

Anggota Members	Kategori A Category A	Kategori B Category B
Anggota Tetap Permanent Members	- Direktur Pelaksana selain Ketua; - Head of Credit and Risk - Managing Director other than the Chairman; - Head of Credit and Risk	- Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi kebijakan dan pedoman - Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi internal audit - Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi hukum - Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan - Head of work unit that carries out policy and guideline functions - Head of work unit that carries out internal audit functions - Head of work unit that performs legal functions - Head of work unit that performs compliance functions
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	- Head of selain anggota tetap; - Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap; yang terkait dengan materi pembahasan - Head of other than permanent members; - Head of Division/Division Head level officer other than permanent member; related to the subject matter	Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan. Head of Division/Division Head level officer other than permanent members related to the discussion material.

Tugas dan Wewenang

Tugas Komite Pengembangan Produk adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- Rancangan peraturan terkait produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan LPEI;
- Penyempurnaan produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan LPEI;

Duties and Authorities

The task of the Product Development Committee is to provide recommendations to the Executive Director, among others, regarding:

- Draft regulations related to business products/programs and activities of Indonesia Eximbank;
- Improvement of business products/programs and activities of Indonesia Eximbank;

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

3. penyusunan Standar Pedoman Produk (SPP) dan ketentuan lain yang terkait dengan produk/program bisnis secara *end to end*, termasuk jika diperlukan adanya mekanisme pemutusan pembiayaan dengan memperhatikan *target market* dan/atau fitur produk tertentu.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0030/PDE/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 1, tata cara pengambilan keputusan Komite adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan rapat Komite A dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 - b. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - 1) Setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - a) Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Anggota tetap; dan
 - 2) 1 anggota tidak tetap
 - c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - d. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.
2. Tata cara pelaksanaan rapat Komite B dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 - b. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - 1) Setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Anggota tetap; dan

3. preparation of Product Guideline Standards (SPP) and other provisions related to end-to-end business products/programs, including if it is necessary to have a financing termination mechanism by taking into account the target market and/or certain product features.

Decision Making Procedures

Based on Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated December 30, 2022 concerning Standard Operating Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 1, the procedures for Committee decision-making are as follows:

1. The procedures for conducting Committee A meetings in the framework of decision making are as follows:
 - a. Committee decision making can be done through face-to-face or online meetings.
 - b. The quorum requirement for the Committee decision making is a minimum attendance of:
 - 1) Half of the permanent members consist of:
 - a) Chairman and/or Vice Chairman;
 - b) Secretary;
 - c) Permanent members; and
 - 2) 1 non-permanent member
 - c. Meeting decisions must be taken based on deliberation for consensus.
 - d. All decisions of the Committee shall be set forth in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner by the secretary of the committee.
2. The procedures for conducting Committee B meetings in the framework of decision making are as follows:
 - a. Committee decision making can be done through face-to-face or online meetings.
 - b. The quorum requirement for the Committee decision making is a minimum attendance of:
 - 1) Half of the permanent members consist of:
 - a) Chairman;
 - b) Secretary;
 - c) Permanent members; and

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

- 2) 1 anggota tidak tetap
- c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

- 2) 1 non-permanent member
- c. Meeting decisions must be taken based on deliberation for consensus.
- d. All decisions of the Committee shall be set forth in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner by the secretary of the committee.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Pengembangan Produk telah melakukan 15 kali rapat Komite Pengembangan Produk (tatap muka atau daring) dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2022, the Product Development Committee has conducted 15 Product Development Committee meetings (face-to-face or online) with the following agendas and attendance frequency:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pengembangan Produk

Frequency and Attendance of Product Development Committee Meetings

Nama Name	Jabatan (Sesuai PDE No.0015/PDE/08/2022) Position (According to PDE No.0015/PDE/08/2022)	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	15	13
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	Anggota Tetap Permanent Member	15	15
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota Tetap Permanent Member	15	14
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director for Institutional Relations	Anggota Tetap Permanent Member	15	14
Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Credit & Risk Management	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	15	15
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional Managing Director of Finance & Operations	Anggota Tetap Permanent Member	15	13
Head of Manajemen Risiko & Kredit ¹⁾ Head of Credit & Risk Management ¹⁾	Anggota Tetap Permanent Member	15	1
Head of Wilayah Head of Regional	Anggota Tetap Permanent Member	15	8
Head of Penjaminan & Asuransi Head of Guarantee & Insurance	Anggota Tetap Permanent Member	15	12
Head of Keuangan & Perencanaan Strategis Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	15	5

KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN

POLICY AND GUIDELINES COMMITTEE



Struktur dan kewenangan Komite Kebijakan dan Pedoman sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0032/PDE/12/2022 tanggal 13 Desember 2021 Tentang Komite Kebijakan dan Pedoman Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

The structure and authority of the Policy Committee and Guidelines were previously stipulated in Executive Director Regulation No. 0032/PDE/12/2022 dated December 13, 2021 concerning the Policy Committee and Guidelines of Indonesia Eximbank.

Dengan adanya perubahan dan simplifikasi struktur dan keanggotaan Komite-komite (termasuk Komite Kebijakan dan Pedoman) di bawah Direktur Eksekutif dalam satu Standar Pedoman Operasional, maka dilakukan penyesuaian dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 yang direvisi dengan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 1.

With the changes and simplification of the structure and membership of the Committees (including the Policy and Guideline Committee) under the Executive Director in one Standard Operational Guideline, adjustments were made with the issuance of Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 concerning Standard Operating Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 revised with Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated December 14, 2022 On Standard Operating Guidelines of the Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 1.

Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 1, struktur keanggotaan Komite Kebijakan dan Pedoman ditetapkan sebagai berikut:

Membership Structure and Voting Rights Status

Based on Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated December 14, 2022 concerning Operational Guidelines Standards of Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 1, the membership structure of the Policy and Guideline Committee is established as follows:

Kategori A | Category A

a. Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis | Business-related Policies and Guidelines

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau <i>Head of yang membidangi Kebijakan dan Pedoman</i> Managing Director in charge of Policy and Guidelines and/or Head of Policy in charge of Policy and Guidelines
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Head of Division in charge of Policy and Guidelines
Anggota Members	Anggota Tetap : 1. Direktur Pelaksana yang membidangi pembiayaan; 2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis; 3. Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan; 4. <i>Head of yang membidangi penjaminan & asuransi;</i> 5. <i>Head of yang membidangi keuangan & perencanaan strategis.</i>

KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
POLICY AND GUIDELINES COMMITTEE

Anggota Tidak Tetap :

1. Direktur Pelaksana dan *Head of* selain anggota tetap;
2. Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan.

Narasumber :

1. *Head of* / Kepala Divisi yang membidangi internal audit;
2. *Head of* / Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan;
3. Kepala Divisi yang membidangi hukum;
4. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko.

Permanent Members:

1. Managing Director in charge of financing;
2. Managing Director in charge of business development;
3. Managing Director in charge of institutional relations;
4. Head of underwriting & insurance;
5. Head of finance & strategic planning.

Non-Permanent Members:

1. Managing Director and Head of other than permanent members;
2. Division Head / Division Head level officer other than permanent members related to the subject matter.

Sources:

1. Head of / Head of Division in charge of internal audit;
2. Head of / Head of Division in charge of compliance;
3. Head of the Division in charge of law;
- Head of Division in charge of risk management.

Alternate Komite A – Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis | Alternate Committee A – Business-related Policies and Guidelines

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai dengan PMK 208/PMK.06/2021 – pasal 11 In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development

b. Kebijakan dan Pedoman terkait Non-Bisnis | Non-Business Policies and Guidelines

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau <i>Head of</i> yang membidangi Kebijakan dan Pedoman
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman

KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
POLICY AND GUIDELINES COMMITTEE**Anggota
Members****Anggota Tetap :**

1. Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan dan operasional;
2. Direktur Pelaksana Bidang dan *head of* yang terkait aturan yang diajukan;
3. *Head of* yang membidangi keuangan & perencanaan strategis.

Anggota Tidak Tetap :

1. Direktur Pelaksana dan *Head of* selain anggota tetap
2. Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan.

Narasumber :

1. Head of / Kepala Divisi yang membidangi internal audit
2. Head of / Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan
3. Kepala Divisi yang membidangi hukum
4. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko

Permanent Members:

1. Managing Director in charge of finance and operations;
2. Managing Director of Fields and head of related rules submitted;
3. Head of finance & strategic planning.

Non-Permanent Members:

1. Managing Director and Head of non-permanent members
2. Division Head / Division Head level officer other than permanent members related to the subject matter.

Sources:

1. Head of / Head of Division in charge of internal audit
 2. Head of / Head of Division in charge of compliance
 3. Head of Legal Division
- Head of Division in charge of risk management

Alternate Komite A – Kebijakan dan Pedoman terkait Non-Bisnis | Alternate Committee A – Non-Business-related Policies and Guidelines**Ketua merangkap Anggota Tetap
Chairman concurrently Permanent Member**

Sesuai dengan PMK 208/PMK.06/2022 – pasal 11

**Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap
Vice Chairman concurrently Permanent Member**

Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan

**Sekretaris merangkap Anggota Tetap
Secretary concurrently Permanent Member**

Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk

Kategori B | Category B**Ketua merangkap Anggota Tetap
Chairman concurrently Permanent Member**

Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau *Head of* yang membidangi Kebijakan dan Pedoman
Managing Director in charge of Policy and Guidelines and/or Head of Policy in charge of Policy and Guidelines

**Sekretaris merangkap Anggota Tetap
Secretary concurrently Permanent Member**

Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman
Head of Division in charge of Policy and Guidelines

KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN POLICY AND GUIDELINES COMMITTEE

Anggota Members

Anggota Tetap :

1. Kepala Divisi yang membidangi Manajemen Risiko;
2. Kepala Divisi yang membidangi Kepatuhan;
3. Kepala Divisi yang membidangi Hukum;
4. Kepala Divisi yang membidangi Internal Audit.

Anggota Tidak Tetap :

Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan.

Permanent Members:

1. Head of Division in charge of Risk Management;
2. Head of Division in charge of Compliance;
3. Head of Legal Division;
4. Head of Division in charge of Internal Audit.

Non-Permanent Members:

Division Head / Division Head level officer other than permanent members related to the discussion material.

Alternate Keanggotaan Komite B Kebijakan dan Pedoman | Alternate Membership Committee B Policies and Guidelines

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member

Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan
Managing Director in charge of institutional relations

Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member

Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk
Head of Division in charge of product development

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Komite Kebijakan dan Pedoman antara lain:

- a. Menyetujui rancangan peraturan internal LPEI dan disampaikan kepada Direktur Eksekutif untuk dilakukan penetapannya oleh Direktur Eksekutif atau Dewan Direktur.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk *periodic meeting* ataupun pembahasan temuan audit terkait peraturan.

Kebijakan Pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 1 mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a) Tata cara pelaksanaan rapat **Komite A** dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Duties and Authorities

The duties and authorities of the Policy and Guidelines Committee include:

- α. Approve the draft internal regulations of Indonesia Eximbank and submit it to the Executive Director for determination by the Executive Director or the Board of Directors.
- β. Supervise the implementation of Indonesia Eximbank's internal regulations and formulate solutions to obstacles in the form of periodic meetings or discussion of audit findings related to regulations.

Decision Making Policy

Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated December 14, 2022 concerning Standard Operating Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 1 regulates the procedures for the Committee decision-making, namely:

- a) The procedures for conducting **Committee A** meetings for decision making are as follows:

KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
POLICY AND GUIDELINES COMMITTEE

- 1) pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 - 2) syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - i) setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - a. Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota tetap; dan
 - ii) 1 anggota tidak tetap.
 - 3) keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - 4) seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.
- b) Tata cara pelaksanaan rapat **Komite B** dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
- i. pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 - ii. syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - i) setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - a. Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota tetap; dan
 - ii) 1 anggota tidak tetap.
 - iii. keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - 1) seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.
- 1) Committee decision-making can be done through face-to-face or online meetings.
 - 2) The quorum requirement for the Committee's decision-making quorum is a minimum attendance of:
 - i) Half of the permanent members consist of:
 - a. Chairman and/or Vice Chairman;
 - b. Secretary;
 - c. Permanent members; and
 - ii) 1 non-permanent member.
 - 3) Meeting decisions must be taken based on deliberation for consensus.
 - 4) all decisions of the Committee shall be set forth in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner by the Secretary of the Committee.
- b) The procedures for conducting **Committee B** meetings in the framework of decision making are as follows:
- i. Committee decision-making can be done through face-to-face or online meetings.
 - ii. The quorum requirement for the Committee's decision-making quorum is a minimum attendance of:
 - i) Half of the permanent members consist of:
 - a. Chairman and/or Vice Chairman;
 - b. Secretary;
 - c. Permanent members; and
 - ii) 1 non-permanent member.
 - iii. Meeting decisions must be taken based on deliberation for consensus.
 - 1) All decisions of the Committee shall be set forth in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner by the Secretary of the Committee.

Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Kebijakan dan Pedoman telah melakukan 49 kali rapat Komite Kebijakan dan Pedoman (tatap muka atau daring) dengan agenda perancangan atau pembaruan aturan-aturan internal LPEI. Ada pun frekuensi kehadiran anggota rapat adalah sebagai berikut:

Agenda, Frequency and Attendance Rate of Meetings

Throughout 2022, the Policy and Guidelines Committee has conducted 49 Policy and Guideline Committee meetings (face-to-face or online) with the agenda of drafting or updating Indonesia Eximbank's internal rules. The frequency of attendance of meeting members is as follows:

KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
POLICY AND GUIDELINES COMMITTEE

Nama Name	Jabatan (Sesuai PDE No.0015/ PDE/08/2022) Position (As Per PD No.0015/PDE/08/2022)	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	49	43	100%
Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Credit & Risk Management	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	49	43	100%
Head of Manajemen Risiko & Kredit *) Head of Credit & Risk Management *)	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	49	6	100%
Kepala Divisi Kebijakan & Prosedur Head of Policy & Procedure Division	Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	49	49	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	Anggota Tetap Permanent Member	49	44	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota Tetap Permanent Member	49	45	100%
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director for Institutional Relations	Anggota Tetap Permanent Member	49	45	100%
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional Managing Director of Finance & Operations	Anggota Tetap Permanent Member	49	44	100%
Head of Keuangan & Perencanaan Strategis Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	49	15	100%
Head of Penjaminan & Asuransi Head of Guarantee & Insurance	Anggota Tetap Permanent Member	49	7	100%
Head of Internal Audit Head of Internal Audit	Narasumber Sources	49	45	100%
Head of Kepatuhan, SDM, & Transformasi Lembaga Head of Compliance, HR, & Institution Transformation	Narasumber Sources	49	46	100%
Head of Wilayah Head of Regional	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	49	5	100%
Head of IT & Operation Head of IT & Operation	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	49	3	100%

Komite Assets and Liabilities Management

ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE



Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0026/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya dilakukan perubahan sbb:

- a) Memorandum Prosedur No. MPO.0006/CEO/02/2020 perihal Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan No. MPO.0036.01/CEO/08/2020 perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur No. 0006/CEO/02/2020 perihal Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
- b) Peraturan Direktur Eksekutif No. 0026/PDE/09/2021 tentang Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 7 September 2021 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 8 Februari 2021.
- c) Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite Di Bawah Direktur Eksekutif sesuai PDE No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022.

Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite *Assets & Liabilities Management* adalah sebagai berikut:

1. Periode 1 Januari 2022 s.d 8 Agustus 2022

Sesuai Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0026/PDE/09/2021 tentang Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, struktur dan keanggotaan adalah sebagai berikut:

The Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesia Eximbank was formed based on Executive Director Regulation No. 0026/PDE/05/2019 dated 23 May 2019 on the Assets & Liabilities Management Committee of Indonesia Eximbank, which was subsequently amended as follows:

- a) Procedure Memorandum No. MPO.0006/CEO/02/2020 regarding Amendment to Executive Director Regulation Regarding Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesia Eximbank and No. MPO.0036.01/CEO/08/2020 regarding Extension of Procedure Memorandum No. 0006/CEO/02/2020 regarding the Amendment to the Executive Director's Regulation Regarding the Assets & Liabilities Management Committee of Indonesia Eximbank; and
- b) Executive Director Regulation No. 0026/PDE/09/2021 concerning the Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesia Eximbank which was stipulated on 7 September 2021 and has retroactive effect as of 8 February 2021.
- c) Standard Operating Guidelines of Nine Committees under the Executive Director according to PDE No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022.

Membership Structure and Voting Rights

The structure and membership of the Assets & Liabilities Management Committee are as follows:

1. Period of January 1, 2022 to August 8, 2022

In accordance with the Executive Director Regulation No. 0026/PDE/09/2021 on the Assets & Liabilities Management Committee of Indonesia Eximbank, the structure and membership are as follows:

KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT
ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

Ketua merangkap Anggota Dengan Hak Suara Chairman concurrently Member with Voting Rights	Direktur Pelaksana yang membidangi <i>Finance</i> Managing Director in charge of Finance
Wakil Ketua merangkap Anggota dengan Hak Suara Vice Chairman concurrently Member with Voting Rights	<i>Head of Finance & Strategic Planning</i>
Sekretaris merangkap Anggota Tanpa Hak Suara Secretary concurrently Member Without Voting Rights	Kepala Divisi <i>Middle Office Treasury</i> Head of Treasury Middle Office Division
Anggota Members	Anggota Dengan Hak suara (<i>Voting Member</i>) : 1. Direktur Eksekutif 2. Seluruh Direktur Pelaksana selain Ketua 3. <i>Head of Credit & Risk</i> Anggota Tanpa Hak suara (<i>Non-Voting Member</i>): 1. <i>Head of Penjaminan</i> 2. Kepala Divisi <i>Financial Institution & Treasury</i> <i>Invitee Member:</i> 1. <i>Head of Kepatuhan</i> 2. <i>Head of Internal Audit</i> 3. <i>Head of Operation & IT</i> 4. Kepala Divisi / pejabat setingkat kepala Divisi dari unit kerja yang terundang. Voting Member: 1. Executive Director 2. All Managing Directors other than the Chairman 3. Head of Credit & Risk Non-Voting Member: 1. Head of Guarantee 2. Head of Financial Institution &; Treasury Division <i>Invitee Member:</i> 1. Head of Compliance 2. Head of Internal Audit 3. Head of Operation & IT 4. Division Head / Division head level official of the invited work unit.

2. Periode 9 Agustus 2022 s.d 31 Desember 2022

2. Period of August 9, 2022 to December 31, 2022

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan Managing Director in charge of finance
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengelolaan Aset dan Kewajiban/ <i>Asset & Liabilities Management (ALMA)</i> Head of Division in charge of Asset & Liabilities Management (ALMA)

KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT
ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE**Anggota
Members****Anggota Tetap:**

1. Direktur Pelaksana yang membidangi pembiayaan
2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis
3. Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan
4. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko.
5. *Head of* yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis.

Narasumber :

1. *Head of* yang membidangi penjaminan dan asuransi
2. *Head of* / Kepala Divisi yang membidangi internal audit.
3. *Head of* / Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan.
4. *Head of* / Kepala Divisi yang membidangi operation & IT
5. Kepala Divisi yang membidangi *Financial Institution & Treasury*
6. Kepala Divisi/Pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit kerja yang terundang.

Permanent Members:

1. Managing Director in charge of financing
2. Managing Director in charge of business development
3. Managing Director in charge of institutional relations
4. Managing Director in charge of risk management.
5. Head of finance and strategic planning.

Sources:

1. Head of underwriting and insurance
2. Head of / Head of Division in charge of internal audit.
3. Head of / Head of Division in charge of compliance.
4. Head of / Head of Division in charge of operation & IT
5. Head of Division in charge of Financial Institution & Treasury

Head of Division/Division Head level Officer of the invited work unit.

**Alternate Keanggotaan Komite Assets & Liabilities
Management:****Alternate Membership of Assets & Liabilities
Management Committee:**

Ketua merangkap Anggota Tetap
Chairman concurrently Permanent Member

Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 – Pasal 11
In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – Article 11

Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap
Vice Chairman concurrently Permanent Member

Direktur Pelaksana yang membidangi Membidangi
Manajemen Risiko
Managing Director in charge of Risk Management

Sekretaris merangkap Anggota Tetap
Secretary concurrently Permanent Member

Kepala Divisi yang membidangi *Financial Institution & Treasury*
Head of Division in charge of Financial Institution & Treasury

KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT
ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Periode 1 Januari 2022 s.d 8 Agustus 2022

Tugas Komite *Assets* dan *Liabilities Management* (ALMA) antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko LPEI, sebagai berikut:
 1. Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA;
 2. Mengkaji ulang penetapan suku bunga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA;
 3. Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
 4. Memutuskan strategi pendanaan dan penempatan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
 5. Menetapkan pemberian suku bunga (*pricing*) kepada debitur yang besarnya dibawah *Base Lending Rate* (BLR).
- b. Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities* dengan meimpertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi:
 1. Manajemen Likuiditas
Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen likuiditas dan limit sesuai dengan kebijakan dan strategi ALMA meliputi:
 - Pengelolaan sumber dana yang likuid dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (*cash flow*) dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya;
 - Meminimalkan *idle funds* serta menjaga posisi likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Duties and Responsibilities

1. Period of January 1, 2022 to August 8, 2022

The duties of the Assets and Liabilities Management Committee (ALMA) include:

- a. To determine the risk management policy of Indonesia Eximbank, as follows:
 1. Develop, review and modify the ALMA strategy;
 2. Reviewing the pricing of assets and liabilities to ensure that the pricing can optimize the return on investment, minimize the cost of funds, and maintain the balance sheet structure in accordance with the ALMA strategy;
 3. Delivering information regarding any developments in related provisions and regulations that affect ALMA's strategy and policies;
 4. Decide on the funding strategy and placement of funds from the Indonesia Eximbank; and
 5. Determine the provision of interest rates (*pricing*) to debtors whose amount is below the Base Lending Rate (BLR).
- b. Establish policies, boundaries and strategic guidelines for managing assets and liabilities by considering internal and external conditions including:
 1. Liquidity Management
Establish and evaluate liquidity and limit management policies in accordance with ALMA policies and strategies including:
 - Management of liquid sources of funds with the aim of being able to meet maturing obligations (*cash flow*) and other unexpected funding needs;
 - Minimizing idle funds and maintaining liquidity position in accordance with applicable regulations.

KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT
ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

2. Manajemen Gap

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi (*mismatch*) antara *assets* dan *liabilities* pada neraca khususnya pos-pos pada neraca yang sensitif terhadap tingkat bunga dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih (*net interest income*) sesuai dengan antisipasi arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko yang ditetapkan LPEI.

3. Manajemen Pricing

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan portofolio antara lain melalui kebijakan *pricing assets* dan *liabilities* dengan tujuan mengoptimalkan *interest margin* (*spread*) dengan mempertimbangkan biaya modal, *overhead cost* dan risiko.

4. Manajemen Forex

Menetapkan kebijakan dan pengelolaan kesenjangan posisi (*forex gap*) antara *assets* dan *liabilities* dengan tujuan untuk menjaga tingkat risiko *forex* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Menyelenggarakan rapat Komite Assets & Liabilities Management sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu.

2. Periode 9 Agustus 2022 s.d 31 Desember 2022

Tugas Komite Assets dan Liabilities Management (ALMA) antara lain:

- Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagai berikut:
 - Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA;
 - Mengkaji ulang penetapan suku bunga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya

2. Gap Management

Establish and evaluate policies and strategies for managing the mismatch between assets and liabilities on the balance sheet, especially items on the balance sheet that are sensitive to interest rates with the aim of optimizing net interest income in accordance with the anticipated direction of changes in interest rates with the level of risk determined by Indonesia Eximban.

3. Pricing Management

Establish and evaluate portfolio management policies, among others, through policies on pricing assets and liabilities with the aim of optimizing interest margin (spread) by considering the cost of capital, overhead cost and risk.

4. Forex Management

Establishing policies and managing the forex gap between assets and liabilities with the aim of maintaining the level of forex risk in accordance with applicable regulations.

- c. Holding Assets & Liabilities Management Committee meeting at least once a month or at any time if deemed necessary.

2. Period of August 9, 2022 to December 31, 2022

The duties of the Assets and Liabilities Management Committee (ALMA) include:

- To determine the risk management policy of Indonesia Eximbank, as follows:
 - Develop, review and modify the ALMA strategy;
 - Reviewing the pricing of assets and liabilities to ensure that the pricing can optimize the return on investment, minimize the cost of funds, and maintain the balance sheet

KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT
ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA;

3. Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
 4. Memutuskan strategi pendanaan dan penempatan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
 5. Menetapkan pemberian suku bunga (*pricing*) kepada debitur yang besarnya dibawah *Base Lending Rate* (BLR).
- b. Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities* dengan meimpertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi:
1. Manajemen Likuiditas
Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen likuiditas dan limit sesuai dengan kebijakan dan strategi ALMA meliputi:
 - Pengelolaan sumber dana yang likuid dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (*cash flow*) dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya;
 - Meminimalkan *idle funds* serta menjaga posisi likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Manajemen Gap
Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi (*mismatch*) antara *assets* dan *liabilities* pada neraca khususnya pos-pos pada neraca yang sensitif terhadap tingkat bunga dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih (*net interest income*) sesuai dengan antisipasi arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko yang ditetapkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 3. Manajemen *Pricing*
Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan portofolio antara lain melalui

structure in accordance with the ALMA strategy;

3. Delivering information regarding any developments in related provisions and regulations that affect ALMA's strategy and policies;
 4. Decide on the funding strategy and placement of funds from the Indonesia Eximbank and
 5. Determine the provision of interest rates (*pricing*) to debtors whose amount is below the Base Lending Rate (BLR).
- b. Establish policies, boundaries and strategic guidelines for managing assets and liabilities by considering internal and external conditions including:
1. Liquidity Management
Establish and evaluate liquidity and limit management policies in accordance with ALMA policies and strategies including:
 - Management of liquid sources of funds with the aim of being able to meet maturing obligations (*cash flow*) and other unexpected funding needs;
 - Minimizing idle funds and maintaining liquidity position in accordance with applicable regulations.
 2. Gap Management
Establish and evaluate policies and strategies for managing the mismatch between assets and liabilities on the balance sheet, especially items on the balance sheet that are sensitive to interest rates with the aim of optimizing net interest income in accordance with the anticipated direction of changes in interest rates with the level of risk determined by Indonesia Eximban.
 3. Pricing Management
Establish and evaluate portfolio management policies, among others,

KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT
ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

kebijakan *pricing assets* dan *liabilities* dengan tujuan mengoptimalkan *interest margin (spread)* dengan mempertimbangkan biaya modal, *overhead cost* dan risiko.

4. Manajemen *Forex*

Menetapkan kebijakan dan pengelolaan kesenjangan posisi (*forex gap*) antara *assets* dan *liabilities* dengan tujuan untuk menjaga tingkat risiko *forex* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Menyelenggarakan rapat Komite *Assets & Liabilities Management* sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu.

through policies on pricing assets and liabilities with the aim of optimizing interest margin (spread) by considering the cost of capital, overhead cost and risk.

4. *Forex* Management

Establishing policies and managing the *forex gap* between assets and liabilities with the aim of maintaining the level of *forex* risk in accordance with applicable regulations.

- c. Holding *Assets & Liabilities Management* Committee meeting at least once a month or at any time if deemed necessary.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Periode 1 Januari 2022 s.d 8 Agustus 2022

Tata cara pengambilan keputusan dalam Komite *Assets & Liabilities Management* adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka, daring (*online*) atau secara sirkuler.
- Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - Ketua dan/atau Wakil Ketua,
 - 2 (dua) orang Anggota dengan hak suara yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Anggota yang membidangi *Business*.
 - 1 (satu) orang Anggota yang membidangi *Risk Management*.
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

2. Periode 9 Agustus 2022 s.d 31 Desember 2022

Tata cara pelaksanaan rapat Komite *Assets & Liabilities Management* dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Decision-Making Procedure

1. Period of January 1, 2022 to August 8, 2022

The procedure for making decisions in the *Assets & Liabilities Management* Committee is as follows:

- Committee decisions can be made through face-to-face meetings, online or in a circular manner.
- Committee decision making is considered a quorum if it is attended by at least:
 - Chairman and/or Vice Chairman,
 - 2 (two) Members with voting rights consisting of:
 - 1 (one) Member in charge of *Business*
 - 1 (one) Member in charge of *Risk Management*.
- Meeting decisions must be made based on deliberation for consensus.
- All decisions of the Committee must be stated in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner.

2. Period of August 9, 2022 to December 31, 2022

The procedure for making decisions in the *Assets & Liabilities Management* Committee is as follows:

KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT
ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

- a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (online).
- b. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari :
 - i. Ketua dan/atau Wakil Ketua
 - ii. Sekretaris; dan
 - iii. Anggota Tetap
- c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Seluruh keputusan Komite Wajib dituangkan dalam risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

- a. Committee decisions can be made through face-to-face meetings, online or in a circular manner.
- b. Committee decision making is considered a quorum if it is attended by at least:
 - i. Chairman and/or Vice Chairman
 - ii. Secretary; and
 - iii. Permanent Members
- c. Meeting decisions must be made based on deliberation for consensus.
- d. All decisions of the Committee must be stated in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite *Assets* dan *Liabilities Management* telah melakukan 29 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Meeting Attendance and Frequency

Throughout 2022, the Assets and Liabilities Management Committee has held 29 meetings with the following agenda and attendance frequency:

Jabatan Position	Nama Name	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance	(%)
Ketua merangkap Anggota Dengan Hak Suara Chairman concurrently Member with Voting Rights	Direktur Eksekutif Executive Director	29	28	97%
Wakil Ketua merangkap Anggota dengan Hak Suara Vice Chairman concurrently Member with Voting Rights	Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan Managing Director in charge of Finance	29	26	90%
Sekretaris merangkap Anggota Tanpa Hak Suara Secretary concurrently Member Without Voting Rights	Kepala Divisi yang membidangi pengelolaan Aset dan Kewajiban/ <i>Asset & Liability Management (ALMA)</i> Head of Division in charge of Asset & Liability Management (ALMA)	29	22	76%
Anggota Members	Anggota Tetap Permanent Members			
	1. Direktur Pelaksana yang membidangi pembiayaan Managing Director in charge of financing	29	24	83%
	2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis Managing Director in charge of business development	29	26	90%
	3. Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations	29	22	76%
	4. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen Risiko Managing Director in charge of Risk management	29	26	90%
	5. Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis Head of finance and strategic planning	29	28	97%
	Alternate Sekretaris merangkap Anggota Tetap Alternate Secretary concurrently Permanent Member			
	1. Kepala Divisi Financial Institution & Treasury Head of Financial Institution & Treasury Division	29	26	90%

KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY COMMITTEE



Komite Teknologi Sistem Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. PDE.0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Sembilan Komite Di Bawah Direktur Eksekutif dan Revisi 1 Peraturan Direktur Eksekutif No. PDE.0030/PDE/12/2022. Komite ini bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam menetapkan strategi teknologi dan sistem informasi guna mendukung perkembangan kegiatan usaha dan bisnis LPEI.

The Information Systems Technology Committee was established based on Executive Director Regulation No. PDE.0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 on Nine Committees Under the Executive Director and Revision 1 of Executive Director Regulation No. PDE.0030/PDE/12/2022. This committee is tasked with providing recommendations to the Executive Director in establishing technology and information system strategies to support the development of Indonesia Eximbank's business and business activities.

Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur keanggotaan Komite Teknologi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

Membership Structure and Voting Rights Status

The membership structure of the Information Systems Technology Committee is as follows:

Ketua merangkap Anggota Tetap dengan Hak Suara Chairman concurrently Permanent Member with Voting Rights	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap dengan Hak Suara Vice Chairman concurrently Permanent Member with Voting Rights	Head of Operation & IT
Sekretaris Komite Secretary of the Committee	Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Head of Information Systems Technology Division
Anggota lainnya Other members	Anggota Tetap : - Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan/atau Head of Credit & Risk - Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Operasional - Head of Finance & Strategic Planning Anggota Tidak Tetap : Direktur Pelaksana dan/atau Head of yang terkait materi Narasumber : - Head of Internal Audit - Head of Compliance, HR & TO - Ketua Komite Audit - Ketua Komite Pemantau Risiko - Kepala Divisi/Pejabat setingkat Kepala Divisi dari Unit Kerja terkait Permanent Members: - Managing Director of Risk Management and/or Head of Credit &; Risk - Managing Director of Finance and Operations - Head of Finance & Strategic Planning Non-Permanent Members: Managing Director and/or Head of related material Sources: - Head of Internal Audit - Head of Compliance, HR & TO - Chairman of Audit Committee - Chairman of the Risk Monitoring Committee Head of Division/Division Head level Officer of the relevant Work Unit

KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY COMMITTEE

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait paling sedikit meliputi:

1. Rencana pengembangan TSI yang sejalan dengan kegiatan usaha LPEI.
2. Perumusan peraturan terkait TSI.
3. Kesesuaian proyek TSI yang disetujui dengan rencana pengembangan TSI.
4. Kesesuaian atas pelaksanaan proyek TSI dengan rencana proyek TSI yang disetujui.
5. Kesesuaian TSI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha LPEI.
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi LPEI pada sektor TSI terhadap pencapaian tujuan bisnis LPEI.
7. Pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatan TSI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TSI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya TSI yang dimiliki.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Information Systems Technology Committee (TSI) are providing recommendations to the relevant Executive Director at least including:

1. TSI development plan in line with Indonesia Eximbank's business activities.
2. Formulation of regulations related to TSI.
3. Conformity of the approved TSI project with the TSI development plan.
4. Conformity of the implementation of the TSI project with the approved TSI project plan.
5. TSI's suitability with the needs of management information systems and the needs of Indonesia Eximbank's business activities.
6. The effectiveness of risk mitigation for Indonesia Eximbank's investment in the TSI sector towards the achievement of Indonesia Eximbank's business objectives.
7. Monitoring of TSI performance and TSI improvement efforts.
8. Efforts to solve various TSI-related problems that cannot be resolved by TSI user work units and organizers effectively, efficiently, and on time.
9. Adequacy and allocation of TSI resources.

Decision Making Procedures

The decision-making procedures of the Information Technology and Systems Committee are as follows:

1. Committee decision making can be done through face-to-face or online meetings.
2. Face-to-face meetings can be conducted physically or through teleconferencing, video conferencing or other electronic media means that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
3. The Committee Meeting is chaired by the Chairman, if the Chairman is unable to attend, the meeting is chaired by the Vice Chairman.

KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY COMMITTEE

4. Kuorum rapat dan pengambilan keputusan Komite Teknologi Sistem Informasi adalah paling sedikit dihadiri setengah (1/2) anggota tetap ditambah satu (1) dari anggota tidak tetap dengan kehadiran wajib Ketua atau Wakil Ketua.
5. Rapat Komite yang dihadiri anggota Komite sesuai kuorum diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga (3) kali dalam satu tahun dengan rincian pembahasan sebagai berikut:
 - a. Rapat pertama dengan agenda pembahasan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi untuk satu tahun mendatang termasuk alokasi anggarannya sesuai RKAT;
 - b. Rapat kedua dengan agenda monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi yang disetujui pada rapat pertama beserta realisasi penggunaan anggaran;
 - c. Rapat ketiga dengan agenda laporan hasil realisasi pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi selama tahun berjalan dan realisasi penggunaan anggaran;

Selain rapat sebagaimana tersebut di atas, rapat dapat juga dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite, atau atas permintaan manajemen atau atas usulan unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

6. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari peserta rapat yang memiliki hak suara/ *voting right*. Suara terbanyak diperoleh berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah dalam kuorum rapat.

4. The quorum of meetings and decision-making of the Technology Information Systems Committee shall be attended by at least half (1/2) of the permanent members plus one (1) of the non-permanent members with the mandatory presence of the Chairman or Vice Chairman.
5. Committee meetings attended by Committee members in accordance with the quorum shall be held at least three (3) times in one year with the following discussion details:
 - a. The first meeting with the agenda of discussing the Information System Technology Strategic Plan for the next year including the budget allocation according to the RKAT;
 - b. The second meeting with the agenda of monitoring the implementation of the Information System Technology Strategic Plan approved at the first meeting along with the realization of budget use;
 - c. The third meeting with the agenda of the report on the results of the realization of the implementation of the Information System Technology Strategic Plan during the current year and the realization of budget use;

In addition to the meeting as mentioned above, meetings may also be held at any time when deemed necessary at the request of one or more committee members, or at the request of management or at the proposal of work units related to submitting material to be discussed and coordinating with the Secretary of the Committee.

6. Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus.
7. In the event that consensus deliberation is not reached, the decision is taken by majority vote of the meeting participants who have the most voting rights. The majority of votes are obtained based on affirmative votes of more than 1/2 (one half) part of the number of valid votes in the meeting quorum.

KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY COMMITTEE

8. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh Sekretaris Komite.

8. All decisions of the Committee shall be set forth in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner by the Secretary of the Committee.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Teknologi Sistem Informasi telah melakukan 2 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2022, the Information Systems Technology Committee has held 2 meetings with the following agenda and frequency of attendance:

Tabel Frekuensi & Kehadiran Rapat Komite Teknologi dan Sistem Informasi 2022
Information Technology and Systems Committee Meeting Frequency & Attendance 2022

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	4	4	100%
Head of Operation & IT	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	4	4	100%
Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division	Sekretaris Komite Secretary of the Committee	4	4	100%
Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko Managing Director of Risk Management	Anggota Tetap Permanent Member	4	4	100%
Direktur Pelaksana bidang Keuangan dan Operasional Managing Director of Finance and Operations	Anggota Tetap Permanent Member	4	4	100%
Head of Credit & Risk	Anggota Tetap Permanent Member	0	0	0%
Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	4	4	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	Anggota Tetap tanpa Hak Suara Permanent Member without Voting Rights	4	4	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	4	4	100%
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director for Institutional Relations	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	4	4	100%
Head of Guarantee & Insurance	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	4	4	100%
Head of Region	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	2	2	100%

KOMITE PENGADAAN PROCUREMENT COMMITTEE



Komite Pengadaan dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang SPO Sembilan Komite Dibawah Direktur Eksekutif yang kemudian diperbarui melalui PDE No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

The Procurement Committee was established based on Executive Director Regulation number 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 concerning SPO Nine Committees Under the Executive Director which was later updated through PDE number 0030/PDE/12/2022 dated December 14, 2022.

Struktur dan Keanggotaan

Structure and Membership

Komite Committee	Limit Pengadaan Procurement Limit	Anggota Members
Struktur Keanggotaan Komite I Pengadaan	(limit >Rp1.000.000.000,00)* *) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksiting >Rp1.000.000.000	Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Eksekutif Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan Sekretaris Komite (non anggota): Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan Anggota Tetap: 1. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan/atau Head of Manajemen Risiko dan Kredit 2. Head of yang membidangi keuangan & perencanaan strategis 3. Head of yang membidangi operation & IT 4. Direktur Pelaksana dan/atau Head of Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki head of dan Direktur Pelaksana) Narasumber: 1. Head of / kepala divisi yang membidangi internal audit 2. Head of / kepala divisi yang membidangi Internal kepatuhan 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum 4. Kepala Divisi yang mengusulkan mengenai pengadaan
Membership Structure of Committee I Procurement	(limit >Rp1.000.000.000,00)* *) Accumulated procurement limit including existing work >Rp1,000,000,000	Chairman concurrently Permanent Member: Executive Director Vice Chairman concurrently Permanent Member: Managing Director in charge of procurement Secretary of the Committee (non-member): Head of the Division in charge of Procurement Permanent Members: 1. Managing Director of Risk Management and/or Head of Risk and Credit Management 2. Head of Finance & Strategic Planning 3. Head of operation & IT 4. Managing Director and/or Head of Proposer (preferably the Managing Director of the proposing unit to attend if the proposing unit has a head of and Managing Director) Sources: 1. Head of / head of division in charge of internal audit 2. Head of / Head of Division in charge of Internal Compliance 3. Head of Legal Division 4. Head of Division who proposes procurement

KOMITE PENGADAAN
PROCUREMENT COMMITTEE

Alternate Struktur Keanggotaan Komite I Pengadaan Alternate Membership Structure of Committee I Procurement	(limit >Rp1.000.000.000,00) (limit >Rp1.000.000.000,00)	Ketua merangkap Anggota Tetap: Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 - Pasal 11 Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Sekretaris Komite (non anggota): Kepala Divisi yang membidangi strategic planning Anggota Tetap: 1. Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan dan operasional 2. Kepala Divisi yang berada di bawah Head of finance & strategic planning; 3. Kepala Divisi yang berada di bawah Head of Operation & IT; Chairman and concurrently Permanent Member: In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 - Article 11 Vice Chairman concurrently Permanent Member: Managing Director in charge of institutional relations Committee Secretary (non-member): Head of Division in charge of strategic planning Permanent Members: 1. Managing Director in charge of finance and operations 2. Head of Division under Head of finance & strategic planning; 3. Head of Division under Head of Operation & IT;
Struktur Keanggotaan Komite II Pengadaan	(limit >Rp500.000.000,00 s.d. ~ Rp1.000.000.000,00)* *) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksiting >Rp500.000.000,00 s.d. ~ Rp1.000.000.000,00	Ketua merangkap Anggota Tetap: 1. Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan (dalam hal pengadaan barang/jasa diluar direktoratnya); atau 2. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko (dalam hal pengadaan barang/jasa dibawah direktorat Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan) Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap: 1. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko (dalam hal direktur yang membidangi pengadaaan adalah ketua); atau 2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan (dalam hal direktur yang membidangi manajemen risiko adalah ketua) Sekretaris Komite (non anggota): Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan Anggota Tetap: 1. Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis; 2. Head of yang membidangi Operation & IT 3. Direktur Pelaksana dan/atau Head of Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki head of dan Direktur Pelaksana) Narasumber: 1. Head of / Kepala Divisi yang membidangi internal audit 2. Head of / Kepala Divisi yang membidangi Internal kepatuhan

KOMITE PENGADAAN
PROCUREMENT COMMITTEE

Membership Structure of Procurement Committee II	(limit >Rp500.000.000,00 to Rp. ~ Rp1.000.000.000,00)* *) Accumulated procurement limit including existing work >Rp500,000,000.00 to ~ Rp1,000,000,000.00	Chairman concurrently Permanent Member: 1. Managing Director in charge of procurement (in the case of procurement of goods/services outside its directorate); or 2. Managing Director in charge of risk management and/or Head of risk management (in the case of procurement of goods/ services under the directorate of Managing Director in charge of procurement) Vice Chairman concurrently Permanent Member: 1. Managing Director in charge of risk management and/or Head of charge of risk management (in case the director in charge of procurement is the chairman); or 2. Managing Director in charge of procurement (in case the director in charge of risk management is the chairman) Secretary of the Committee (non-member): Head of the Division in charge of Procurement Permanent Members: 1. Head of finance and strategic planning; 2. Head of Operation & IT 3. Managing Director and/or Head of Proposer (preferably the Managing Director of the proposing unit to attend if the proposing unit has a head of and Managing Director) Sources: 1. Head of / Head of Division in charge of internal audit 2. Head of / Head of Division in charge of Internal compliance
Alternate Keanggotaan Komite II Pengadaan	(limit > Rp500.000.000,00 s.d. ≤ Rp1.000.000.000,00)	Ketua merangkap Anggota Tetap : 1. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/ atau Head of yang membidangi manajemen risiko; atau 2. Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan
Alternate Procurement Committee II Membership	(limit > Rp500,000,000.00 to ≤ Rp1,000,000,000.00)	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap: - Sekretaris Komite (non anggota): Kepala Divisi yang membidangi strategic planning Anggota Tetap: 1. Kepala divisi yang berada dibawah Head of keuangan & perencanaan strategis 2. Kepala divisi yang berada dibawah Head of operation & IT Chairman concurrently Permanent Member: 1. Managing Director in charge of risk management and/or Head of risk management; or 2. Managing Director in charge of institutional relations Vice Chairman concurrently Permanent Member: – Committee Secretary (non-member): Head of Division in charge of strategic planning Permanent Members: 1. Head of division under Head of finance & strategic planning 2. Head of division under Head of operation & IT

KOMITE PENGADAAN
PROCUREMENT COMMITTEE

Struktur Keanggotaan Komite III Pengadaan Membership Structure of Committee III Procurement	(limit > Rp20.000.000,00 s.d. ≤ Rp500.000.000,00)* *) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksiting > Rp20.000.000,00 s.d. ≤ Rp500.000.000,00 (limit > Rp20.000.000,00 to ≤ Rp500.000.000,00)* *) Accumulated procurement limit including existing work > Rp20,000,000.00 to ≤ Rp500,000,000.00	Ketua merangkap Anggota Tetap: Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis Sekretaris Komite (non anggota): Kepala Divisi yang membidangi pengadaan Anggota Tetap: 1. Head of yang membidangi Operation & IT 2. Direktur Pelaksana dan/atau Head of Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki head of dan Direktur Pelaksana) Chairman concurrently Permanent Member: Head of finance and strategic planning Committee Secretary (non-member): Head of Division in charge of procurement Permanent Members: 1. Head of Operation & IT 2. Managing Director and/or Head of Proposer (preferably the Managing Director of the proposing unit to attend if the proposing unit has a head of and Managing Director)
Alternate Keanggotaan Komite III Pengadaan Alternate Membership of Committee III Procurement	(limit > Rp20.000.000,00 s.d. ≤ Rp500.000.000,00) (limit > Rp20.000.000,00 to ≤ Rp500.000.000,00)	Ketua merangkap Anggota Tetap: 2 Kepala Divisi berada dibawah Head of yang sama (diluar kepala divisi pengusul) Sekretaris Komite (non anggota): Kepala Divisi yang membidangi strategic planning Anggota Tetap: 1. Kepala Divisi berada dibawah Head of yang sama (diluar kepala divisi pengusul) 2. Tidak ada alternate karena sebagai owner pengusul Chairman concurrently Permanent Member: 2 Division Heads are under the Head of the same (outside the proposer division head) Committee Secretary (non-member): Head of Division in charge of strategic planning Permanent Members: 1. The Head of Division is under the Head of the same (outside the head of the proposing division) 2. There is no alternate because as the owner of the proposer
Pengadaan ≤ Rp20.000.000,00 Procurement of ≤ Rp20.000.000,00	Untuk Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000,00 tidak termasuk ke dalam kewenangan Komite Pengadaan dan merupakan kewenangan Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah/pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit pengusul. For Procurement with a value of up to Rp20,000,000.00 is not included in the authority of the Procurement Committee and is the authority of the Head of Division/Head of Regional Office/ Division Head level official of the proposing unit.	

KOMITE PENGADAAN
PROCUREMENT COMMITTEE**Tugas dan Wewenang Komite Pengadaan**

1. Memberikan persetujuan prinsip untuk Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mempertimbangkan biaya dan anggaran.
2. Menyetujui Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan yang belum dianggarkan dalam RKAT LPEI, termasuk untuk Pengadaan Mendesak dan/atau Pengadaan Keadaan Darurat, yang mana Komite Pengadaan harus dihadiri oleh Direktur Eksekutif.
3. Menetapkan susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Keputusan Komite Pengadaan.
4. Menyetujui dan menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp250.000.000,00 berikut perubahannya dan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui metode Swakelola.
5. Menyetujui dan menetapkan pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa LPEI atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa LPEI.
6. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait hal-hal yang belum diatur atau terkait deviasi dari Standar Pedoman Operasional pengadaan dan jasa LPEI, sebagai salah satu bahan Direktur Eksekutif untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan *good judgment*, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses Pengambilan Keputusan Komite Pengadaan

1. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Pengadaan. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah dimulai.

Duties and Responsibilities

1. Provide principal approval for the Procurement of Goods/Services in the current year as stipulated in the Annual Work Plan and Budget (RKAT) of the Indonesia Eximbank by considering costs and budget.
2. Approve the procurement of goods/services in the current year that has not been budgeted for in the RKAT, including for Urgent Procurement and/or Emergency Procurement, for which the Procurement Committee must be attended by the Executive Director.
3. Determine the composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services through the Decree of the Procurement Committee;
4. Approve and determine the value of the Self-Estimated Price (HPS) for the Procurement of Goods/Services with a value above Rp250,000,000.00 and the amendments thereto and the value of the Budget Plan for the Procurement of Goods/Services carried out through the self-management method;
5. Approve and determine the winner of the Procurement of Goods/Services proposed by the Goods/Services Procurement Unit or the Goods/Services Procurement Committee.
6. Provide recommendations to the Executive Director regarding matters that have not been regulated or related to deviations from the Standard Operational Guidelines for procurement and services of Indonesia Eximbank, as one of the materials for the Executive Director to make decisions while still paying attention to good judgment, risk mitigation, and not contrary to applicable laws and regulations.

Decision Making Procedures

1. Acting as Committee Secretary is the Head of Work Unit in charge of Procurement function. The function of the Committee Secretary is effective when the process of implementing the Procurement of Goods/Services has begun.

KOMITE PENGADAAN PROCUREMENT COMMITTEE

- Persetujuan izin prinsip Pengadaan Barang/Jasa dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Pengadaan Barang/Jasa.
- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (online).
- Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Komite Pengadaan belum dapat mencapai keputusan maka dapat diajukan ke Rapat Board of Management (RABOM) untuk dimintakan keputusan.
- Ketentuan kuorum dalam pengambilan keputusan pada Komite Pengadaan adalah sebagai berikut:
 - Untuk Komite I dan II, dihadiri oleh setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - Anggota tetap.
 - Untuk Komite III, dihadiri oleh seluruh anggota Komite III.
- Seluruh keputusan Komite ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Kehadiran

Selamatahun2022,KomitePengadaanmenyelenggarakan 106 kali rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Komite Committee	Jumlah Rapat Total Meetings
Komite I Committee I	32
Komite II Committee II	27
Komite III Committee III	47

Seluruh rapat komite di atas hanya dilakukan apabila kuorum rapat telah dipenuhi.

- Approval of the principal permit for the Procurement of Goods/Services can be submitted by the work unit proposing the Procurement of Goods/Services.
- Decision making can be done through face-to-face meetings or online.
- Face-to-face meetings can be conducted physically or through teleconferencing, video conferencing or other electronic media means that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
- Meeting decisions must be taken based on deliberation for consensus, in the event that the Procurement Committee has not been able to reach a decision, it can be submitted to the Board of Management Meeting (RABOM) for a decision.
- The Committee's decision-making is considered a quorum if it is attended by at least:
 - For Committee I and II, attended by more than half of the permanent members consisting of:
 - Chairman and/or Vice Chairman;
 - Permanent members.
 - For Committee III, attended by all members of Committee III.
- All decisions of the Committee shall be administered in a complete and orderly manner by the secretary of the committee.

Meeting Frequency and Attendance

During 2022, the Procurement Committee held 106 meetings with the following information:

All of the above committee meetings are only held when the quorum of the meeting has been met.

KOMITE JASA KONSULTASI

ADVISORY SERVICES COMMITTEE



Komite Jasa Konsultasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0015/PDE/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang SPO Sembilan Komite Dibawah Direktur Eksekutif yang kemudian diperbarui melalui PDE nomor 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

The Advisory Services Committee was established based on Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 concerning SPO Nine Committees Under the Executive Director which was later updated through PDE No. 0030/PDE/12/2022 dated December 14, 2022.

Struktur dan Keanggotaan

Structure and Membership

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director for Institutional Relations
Sekretaris Komite (non anggota) Committee Secretary (non-member)	Kepala Divisi Jasa Konsultasi Head of Advisory Services Division
Anggota Members	1. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan/atau Head of Manajemen Risiko & Kredit 2. Head of Keuangan & Perencanaan Strategis 3. Head of yang membidangi Transformasi Lembaga 1. Managing Director of Risk Management and/or Head of Credit & Risk Management 2. Head of Finance & Strategic Planning 3. Head of Institution Transformation
Narasumber Sources	1. Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis 3. Head of Region 4. Head of Internal Audit 5. Kepala Divisi Reviewer 6. Kepala Divisi dari Unit Kerja terkait 1. Managing Director in charge of Financing. 2. Managing Director in charge of Business Development 3. Head of Region 4. Head of Internal Audit 5. Head of Reviewer Division 6. Head of Division of the relevant Work Unit
Alternate Keanggotaan Komite Jasa Konsultasi Alternate Membership of Advisory Services Committee	Ketua merangkap Anggota Tetap: Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 - Pasal 11 Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap: Direktur Pelaksana yang Membidangi Keuangan dan Operasional Sekretaris Komite (non anggota): 1 (satu) Kepala Divisi dalam 1 (satu) Direktorat yang sama Chairman concurrently Permanent Member: In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 - Article 11 Vice Chairman concurrently Permanent Member: Managing Director in Charge of Finance and Operations Secretary Committee (non-member): 1 (one) Division Head in 1 (one) same Directorate

KOMITE JASA KONSULTASI ADVISORY SERVICES COMMITTEE

Tugas dan Wewenang Komite Jasa Konsultasi:

1. Memberikan persetujuan prinsip untuk Program Jasa Konsultasi pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mempertimbangkan biaya dan anggaran.
2. Menyetujui Program Jasa Konsultasi pada tahun berjalan yang belum dianggarkan dalam RKAT LPEI.
3. Menetapkan susunan Pelaksana Jasa Konsultasi melalui Keputusan Komite Jasa Konsultasi.
4. Menyetujui nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Program Jasa Konsultasi yang dilaksanakan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait hal-hal yang belum diatur atau terkait deviasi dari Standar Pedoman Operasional Jasa Konsultasi LPEI, sebagai salah satu bahan Direktur Eksekutif untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan *good judgment*, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberi keputusan untuk program Jasa Konsultasi, antara lain: a. Desa Devisa; b. Coaching Program for New Exporters (CPNE); c. Program Kemitraan; d. Marketing Handholding; atau e. Kegiatan Rumah Ekspor (Fisik dan Digital)

Proses Pengambilan Keputusan Komite Jasa Konsultasi:

1. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Jasa Konsultasi. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses Program Jasa Konsultasi.
2. Persetujuan izin prinsip Program Jasa Konsultasi dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Jasa Konsultasi.
3. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (online).
4. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Duties and Authorities of the Advisory Services Committee:

1. Provide in-principle approval for the Advisory Services Program in the current year as stipulated in the Annual Work Plan and Budget (RKAT) of Indonesia Eximbank by considering costs and budgets.
2. Approve the Advisory Services Program in the current year that has not been budgeted in the RKAT.
3. Determine the composition of the Advisory Services Executive through the Decision of the Advisory Services Committee.
4. Approve the value of the Budget Plan (RAB) for the Advisory Services Program implemented.
5. Provide recommendations to the Executive Director regarding matters that have not been regulated or related to deviations from the Standard Operational Guidelines for Advisory Services, as one of the materials for the Executive Director to make decisions while still paying attention to good judgment, risk mitigation, and not contrary to applicable laws and regulations.
6. Giving decisions for the Advisory Services program, among others: a. Desa Devisa; b. Coaching Program for New Exporters (CPNE); c. Partnership Program; d. Marketing Handholding; or e. Export House Activities (Physical and Digital)

Advisory Services Committee Decision Making Process:

1. Acting as Secretary of the Committee is the Head of the Work Unit in charge of Advisory Services. The function of the Secretary of the Committee is effective during the Advisory Services Program process.
2. Approval of the principle license of the Advisory Services Program that can be submitted by the work unit proposing the Advisory Service.
3. Committee decision making can be done through face-to-face or online meetings.
4. Face-to-face meetings can be conducted physically or through teleconferencing, video conferencing or other electronic media means that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.

KOMITE JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES COMMITTEE

5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 6. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - a. Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota tetap;
 7. Rapat Komite yang wajib dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Direktur Pelaksana yang Membidangi Manajemen Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun dengan rincian pembahasan sebagai berikut:
 - a. Rapat pertama dengan agenda pembahasan Rencana Strategis Jasa Konsultasi untuk satu tahun mendatang termasuk alokasi anggarannya sesuai RKAT;
 - b. Rapat kedua dengan agenda *monitoring* terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Jasa Konsultasi yang disetujui pada rapat pertama beserta realisasi penggunaan anggaran;
 - c. Rapat ketiga dengan agenda laporan hasil realisasi pelaksanaan Rencana Jasa Konsultasi selama tahun berjalan dan realisasi penggunaan anggaran; selain rapat sebagaimana tersebut di atas, rapat dapat juga dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Komite, atau atas permintaan manajemen atau atas usulan unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.
 8. Seluruh keputusan Komite ditatausahakan dalam bentuk Risalah Rapat secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite
5. Meeting decisions must be taken based on deliberation for consensus.
 6. The quorum requirement for the Committee decision-making is to attend a minimum of half of the permanent members consisting of:
 - a. Chairman and/or Vice Chairman;
 - b. Secretary; and
 - c. Permanent members;
 7. Committee meetings that must be attended by the Chairman and Vice Chairman and Managing Director in Charge of Risk Management are held at least 3 (three) times a year with the following discussion details:
 - a. The first meeting with the agenda of discussing the Strategic Plan of Advisory Services for the following year including the budget allocation according to the RKAT;
 - b. The second meeting with the agenda of monitoring the implementation of the Strategic Plan for Advisory Services approved at the first meeting and the realization of budget use;
 - c. The third meeting with the agenda of the report on the results of the realization of the implementation of the Advisory Services Plan during the current year and the realization of budget use; In addition to meetings as mentioned above, meetings may also be held at any time when deemed necessary at the request of one or more members of the Committee, or at the request of management or at the proposal of work units related to submitting material to be discussed and coordinating with the Secretary of the Committee.
 8. All decisions of the Committee shall be administered in the form of Minutes of Meeting in a complete and orderly manner by the secretary of the committee

Frekuensi Rapat dan Kehadiran

Selama tahun 2022, Komite Jasa Konsultasi menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance

During 2022, the Advisory Services Committee held 5 (five) meetings with the following information:

KOMITE JASA KONSULTASI
ADVISORY SERVICES COMMITTEE

No.	Tanggal Date	Agenda	Kuorum
1	5 Oktober 2022 October 5, 2022	- Persetujuan Desa Devisa Berau - Usulan pengkinian Program Kemitraan - Approval of Berau Desa Devisa - Proposed update of the Partnership Program	Terpenuhi Fulfilled
2	5 Oktober 2022 October 5, 2022	Persetujuan Desa Devisa Jatim Approval of East Java Desa Devisa	Terpenuhi Fulfilled
3	17 November 2022	CPNE Sumut CPNE North Sumatra	Terpenuhi Fulfilled
4	17 November 2022	Persetujuan Desa Devisa Kalbar – BNI Approval of West Kalimantan Desa Devisa – BNI	Terpenuhi Fulfilled
5	17 November 2022	Persetujuan Desa Devisa Bulu Mata Approval of Bulu Mata Desa Devisa	Terpenuhi Fulfilled

Nama Name	Jabatan (Sesuai PDE No.0015/PDE/08/2022) Position (As per PDE No.0015/PDE/08/2022)	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	5	5
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director for Institutional Relations	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	5	5
Kepala Divisi Jasa Konsultasi Head of Advisory Services Division	Sekretaris Komite (non anggota) Committee Secretary (non-member)	5	5
Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Credit & Risk Management	Anggota Tetap Permanent Member	5	5
Head of Manajemen Risiko & Kredit *) Head of Credit & Risk Management *)	Anggota Tetap Permanent Member	0	0
Head of Keuangan & Perencanaan Strategis Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	5	5
Head of Kepatuhan, SDM & Transformasi Head of Compliance, HR & Transformation	Anggota Tetap Permanent Member	5	5

*) Head of Manajemen Risiko & Kredit baru ditunjuk pada 14 Desember 2022

*) New Head of Credit & Risk Management appointed on December 14, 2022

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

Struktur dan kewenangan Komite Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

a. Komite Pembiayaan Bisnis dan Komite Spesial Asset Management segmen Komersial merujuk pada:

- Memorandum Prosedur No. MPO.0015/CEO/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/12/2020 dan Memorandum Prosedur No. MPO.0009/CEO/04/2021.
- MPO 0002/CEO/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Komite Pembiayaan.
- Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif.
- Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Revisi 1.

b. Komite Pembiayaan segmen Penugasan Khusus Ekspor UKM berorientasi ekspor merujuk pada:

- Keputusan Direktur Eksekutif No. 0089/KDE/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor Dalam Rangka Mendukung Sektor UKM Berorientasi Ekspor.
- MPO 0002/CEO/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Komite Pembiayaan.
- Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif.
- Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Revisi 1.

The structure and authority of the Financing Committee are determined as follows:

a. The Business Financing Committee and the Commercial Asset Management Special Committee refer to:

- Memorandum of Procedure No. MPO.0015/CEO/07/2021 dated July 19, 2021 on Amendments to Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2020 and Memorandum of Procedure No. MPO.0009/CEO/04/2021.
- MPO 0002/CEO/03/2022 dated March 24, 2022 concerning the Financing Committee.
- Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 on Standard Operating Guidelines of Nine Committees under the Executive Director.
- Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated December 14, 2022 on Standard Operating Guidelines of Nine Committees under the Executive Director Revision 1.

b. The Financing Committee of the export-oriented SME Export Special Assignment segment refers to:

- Executive Director Decree No. 0089/KDE/10/2021 dated October 26, 2021 on Members of the Export Special Assignment Program Financing Committee in order to Support the Export-Oriented SME Sector.
- MPO 0002/CEO/03/2022 dated March 24, 2022 concerning the Financing Committee.
- Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 concerning Standard Operating Guidelines of Nine Committees under the Executive Director.
- Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated December 14, 2022 on Standard Operating Guidelines of Nine Committees under the Executive Director Revision 1.

KOMITE PEMBIAYAAN FINANCING COMMITTEE

c. Komite Pembiayaan segmen *Supply Chain Financing* merujuk pada:

- Keputusan Direktur Eksekutif No. 0090/KDE/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Anggota Komite Pembiayaan *Supply Chain Financing*.
- MPO 0002/CEO/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Komite Pembiayaan.
- Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif.
- Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Revisi 1.

c. The Financing Committee of the Supply Chain Financing segment refers to:

- Executive Director Decree No. 0090/KDE/10/2021 dated October 26, 2021 concerning Members of the Supply Chain Financing Financing Committee.
- MPO 0002/CEO/03/2022 dated March 24, 2022 concerning the Financing Committee.
- Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 concerning Standard Operating Guidelines of Nine Committees under the Executive Director.
- Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated December 14, 2022 concerning Standard Operating Guidelines of Nine Committees under the Executive Director Revision 1.

Struktur Keanggotaan Komite Pembiayaan

Struktur keanggotaan Komite Pembiayaan terkini tahun 2022 merujuk pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 adalah sebagai berikut:

Komite Pembiayaan – Bisnis (KP Bisnis)

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan Bisnis (termasuk Komite Pembiayaan untuk Penugasan Khusus Ekspor segmen UKM berorientasi ekspor dan Komite Pembiayaan segmen Supply Chain Financing)

Financing Committee Membership Structure

The current membership structure of the Financing Committee in 2022 refers to Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 as follows:

Financing Committee – Business (KP Bisnis)

Structure and Membership of the Business Financing Committee (including the Financing Committee for Export Special Assignments of the export-oriented SME segment and the Financing Committee of the Supply Chain Financing segment)

1. KP Bisnis I | KP Business I

Fungsi Bisnis

- 1) Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan
- 2) Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis
- 3) Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (khusus untuk proposal Bank Line/ NBFi Line)
- 4) Head of yang membidangi Guarantee & Insurance Penjaminan dan Asuransi
- 5) Head of yang membidangi Regions
- 6) Pemegang Limit Individu – Fungsi Bisnis

Fungsi Risiko

- 1) Direktur Eksekutif
- 2) Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
- 3) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional
- 4) Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (selain proposal Bank Line/NBFi Line)
- 5) Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
- 6) Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer I/ Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer II
- 7) Kepala Divisi yang membidangi Reviewer Penjaminan
- 8) Pemegang Limit Individu – Fungsi Risiko

Business Functions	Risk Function
1) Managing Director in charge of Financing	1) Executive Director
2) Managing Director in charge of Business Development	2) Managing Director in charge of Credit and Risk Management
3) Managing Director in charge of Institutional Relations (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	3) Managing Director in charge of Finance and Operations
4) Head of Guarantee & Insurance, Guarantee and Insurance	4) Managing Director in charge of Institutional Relations (other than Bank Line/NBFI Line proposal)
5) Head of yang membidangi Regions	5) Head of Risk and Credit Management
6) Individual Limit Holders – Business Functions	6) Head of Division in charge of Credit Reviewer I / Head of Division in charge of Credit Reviewer II
	7) Head of Division in charge of Assurance Reviewers
	8) Individual Limit Holders – Risk Function

2. KP Bisnis II (Limit > Rp.15 Miliar–Limit KP Bisnis I) | KP Bisnis II (Limit > Rp.15 Billion–Limit KP Bisnis I)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan	1) Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
2) Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis	2) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional
3) Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line)	3) Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (selain proposal Bank Line/NBFI Line)
4) Head of yang membidangi Guarantee & Insurance Penjaminan dan Asuransi	4) Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
5) Head of yang membidangi Regions	5) Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer I/ Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer II
6) Pemegang Limit Individu – Fungsi Bisnis	6) Kepala Divisi yang membidangi Reviewer Penjaminan
	7) Pemegang Limit Individu – Fungsi Risiko

Business Functions	Risk Function
1) Managing Director in charge of Financing	1) Managing Director in charge of Risk and Credit Management
2) Managing Director in charge of Business Development	2) Managing Director in charge of Finance and Operations
3) Managing Director in charge of Institutional Relations (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	3) Managing Director in charge of Institutional Relations (other than Bank Line/NBFI Line proposal)
4) Head of Guarantee & Insurance, Guarantee and Insurance	4) Head of Risk and Credit Management
5) Head of yang membidangi Regions	5) Head of Division in charge of Credit Reviewer I / Head of Division in charge of Credit Reviewer II
6) Individual Limit Holders – Business Functions	6) Head of Division in charge of Assurance Reviewers
	7) Individual Limit Holders – Risk Function

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

3. KP Bisnis III (Limit ≤ Rp.15 Miliar) | KP Bisnis III (Limit ≤ Rp.15 Billion)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Kepala Divisi Unit Kerja Pengusul / Kepala Kantor Wilayah Pengusul 2) Kepala Divisi Unit Kerja Bisnis Selain Pengusul / Kepala Kantor Wilayah selain Pengusul 3) Pemegang Limit Individu - Fungsi Bisnis	1) Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer I/ Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer II 2) Pemegang Limit Individu - Fungsi Risiko 3) Kepala Divisi yang membidangi Reviewer Penjaminan
Business Functions	Risk Function
1) Head of Proposer Work Unit Division / Head of Proposer Regional Office 2) Head of Business Work Unit Division Other Than Proposer / Head of Regional Office Other Than Proposer 3) Individual Limit Holder - Business Functions	1) Head of Division in charge of Credit Reviewer I / Head of Division in charge of Credit Reviewer II 2) Individual Limit Holders - Risk Function 3) Head of Division in charge of Assurance Reviewers

Komite Pembiayaan - Special Asset Management (KP SAM) | Financing Committee - Special Asset Management (KP SAM)

1. KP SAM I (> Rp 500 M) | KP SAM I (> Rp 500 M)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan 2) Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis 3) Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) 4) Head of yang membidangi Guarantee & Insurance 5) Head of yang membidangi Regions	1) Direktur Eksekutif 2) Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit 3) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional 4) Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (selain proposal Bank Line/NBFI Line) 5) Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit 6) Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer I/ Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer II 7) Kepala Divisi yang membidangi Reviewer Penjaminan 8) Pemegang Limit Individu – Fungsi Risiko

Business Functions

- 1) Managing Director in charge of Financing
- 2) Managing Director in charge of Business Development
- 3) Managing Director in charge of Institutional Relations (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)
- 4) Head of yang membidangi Guarantee & Insurance
- 5) Head of yang membidangi Regions

Risk Function

- 1) Executive Director
- 2) Managing Director in charge of Credit and Risk Management
- 3) Managing Director in charge of Finance and Operations
- 4) Managing Director in charge of Institutional Relations (other than Bank Line/NBFI Line proposal)
- 5) Head of Risk and Credit Management
- 6) Head of Division in charge of Credit Reviewer I / Head of Division in charge of Credit Reviewer II
- 7) Head of Division in charge of Assurance Reviewers
- 8) Individual Limit Holders – Risk Function

2. KP SAM II (Limit > Rp.15 Miliar–Limit KP Bisnis I) | KP SAM II (Limit > Rp.15 Billion–Limit KP Bisnis I)**Fungsi Bisnis**

- 1) Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan
- 2) Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis
- 3) Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line)
- 4) Head of yang membidangi Guarantee & Insurance Penjaminan dan Asuransi
- 5) Head of yang membidangi Regions
- 6) Pemegang Limit Individu – Fungsi Bisnis

Fungsi Risiko

- 1) Direktur Pelaksana/Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
- 2) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional
- 3) Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (selain proposal Bank Line/NBFI Line)
- 4) Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
- 5) Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer I/ Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer II
- 6) Kepala Divisi yang membidangi Reviewer Penjaminan
- 7) Pemegang Limit Individu – Fungsi Risiko

Business Functions

- 1) Managing Director in charge of Financing
- 2) Managing Director in charge of Business Development
- 3) Managing Director in charge of Institutional Relations (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)
- 4) Head of Guarantee & Insurance, Guarantee and Insurance
- 5) Head of yang membidangi Regions
- 6) Individual Limit Holders – Business Functions

Risk Function

- 1) Managing Director / Head of in charge of Credit and Risk Management
- 2) Managing Director in charge of Finance and Operations
- 3) Managing Director in charge of Institutional Relations (other than Bank Line/NBFI Line proposal)
- 4) Head of Risk and Credit Management
- 5) Head of Division in charge of Credit Reviewer I / Head of Division in charge of Credit Reviewer II
- 6) Head of Division in charge of Assurance Reviewers
- 7) Individual Limit Holders – Risk Function

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

Tugas dan Wewenang Komite Pembiayaan

1. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal:
 - a. pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan treasury serta Non Bank Financial Institution line, Bank Line, Treasury Line dan Penugasan Khusus termasuk didalamnya penetapan account strategy dan/atau mengubah struktur fasilitas;
 - b. upaya penyelamatan dan/atau penyelesaian aset bermasalah pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan treasury serta Non Bank Financial Institution line, Bank Line, Treasury Line dan Penugasan Khusus;
 - c. pembiayaan nasabah performing financing yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban;
 - d. pengurangan dan/atau penghapusan tunggakan bunga/imbalance hasil pembiayaan, denda/ta'widh, dan/atau biaya lain dalam penyelamatan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah;
 - e. permohonan penghentian perhitungan bunga/ imbalance hasil pembiayaan, denda/ta'widh, dan/ atau biaya lain dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah; dan/atau
 - f. pembayaran klaim.
2. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektibilitas), dalam hal penetapan dilakukan secara manual.
3. Melakukan pengambilan keputusan atas imbalan Pembiayaan terkait Fasilitas Penugasan Khusus apabila tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
4. Menentukan Global Account Manager (GAM), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Nasabah yang memperoleh beberapa jenis fasilitas dari beberapa unit kerja, maka GAM adalah pada Unit Kerja yang mengelola Pembiayaan.
 - b. bagi Nasabah yang memperoleh fasilitas konvensional dan syariah, maka GAM adalah unit kerja yang mengelola fasilitas terbesar.
 - c. penetapan account strategy termasuk limit group exposure diusulkan oleh GAM dan mendapat persetujuan dari KP - Bisnis I.

Duties and Authorities of the Financing Committee

1. Make decisions on proposals of:
 - a. financing, guarantees, insurance, and treasury as well as Non-Bank Financial Institution line, Bank Line, Treasury Line and Special Assignment including establishing account strategy and/or changing the structure of facilities;
 - b. rescue and/or settlement of non-performing assets financing, guarantees, insurance, and treasury as well as Non-Bank Financial Institution line, Bank Line, Treasury Line and Special Assignment;
 - c. financing of performing financing customers who have difficulty paying obligations;
 - d. reduction and/or elimination of arrears of interest/financing yields, fines/ta'widh, and/or other costs in the rescue/settlement of problem financing;
 - e. request termination of the calculation of interest/ yield on financing, fines/ta'widh, and/or other costs in the settlement of Problematic Financing; and/or
 - f. payment of claims.
2. Make decisions on proposals to determine the quality level of earnings assets (collectibility), in the event that the determination is carried out manually.
3. Make decisions on Financing rewards related to Special Assignment Facilities if not determined through a Ministerial Decree.
4. Determine the Global Account Manager (GAM), with the following conditions:
 - a. for Customers who obtain several types of facilities from several work units, GAM is in the Work Unit that manages Financing.
 - b. For customers who obtain conventional and sharia facilities, GAM is the work unit that manages the largest facilities.
 - c. The establishment of account strategy including limit group exposure was proposed by GAM and approved by KP - Bisnis I.

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

- d. dalam hal terdapat anggota Nasabah grup mengajukan fasilitas baru/tambahan, maka keputusan Pembiayaan dilakukan jika tidak mendapat konfirmasi negative dari GAM.
- e. dalam hal salah satu Nasabah dalam 1 (satu) Kelompok (group) termasuk dalam kelolaan PT. IEB PA maka GAM adalah pada PT. IEB PA.
- 5. Melakukan pengambilan keputusan atas pembebanan biaya-biaya (dana talangan/ tagihan lain-lain) yang tidak dapat dipenuhi Nasabah pada waktunya, seperti biaya penutupan asuransi barang agunan, biaya Notaris/ PPAT dan/atau Konsultan Hukum, biaya penilaian agunan, dan biaya-biaya terkait lainnya; yang akan dibebankan pada rekening pinjaman Nasabah (dalam rangka pengamanan LPEI).

Biaya-biaya tersebut dapat dibebankan sepihak oleh LPEI pada pos biaya dan ongkos dan selanjutnya Unit Kerja Pengusul/Pengelola dimaksud harus melakukan penagihan dan penyelesaian kewajiban tersebut kepada Nasabah.

- 6. Penetapan penggunaan KAP, KJPP, Notaris/PPAT, konsultan hukum, konsultan manajemen, balai lelang apabila diperlukan.

Kebijakan Pengambilan Keputusan**A. Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan Bisnis dan Komite *Special Asset Management* segmen Komersial**

- 1. Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan dilakukan melalui rapat tatap muka, baik secara langsung maupun melalui teleconference atau video conference. Keputusan (disposisi dan tanda tangan) dapat diberikan secara langsung melalui dokumen *hardcopy*; *electronic signature*; dan/atau melalui persetujuan *by system*.
- 2. Ketentuan Pengambilan Keputusan oleh Komite Pembiayaan Bisnis:

- d. in the event that there is a member of the group Customer applying for a new/additional facility, then the termination of Financing will be carried out if it does not get negative confirmation from GAM.
- e. in the event that one Customer in 1 (one) Group is included in the management of PT. IEB PA then GAM is at PT. IEB PA.

- 5. Make decisions on the imposition of costs (bailouts/ other receivables) that cannot be met by the Customer in time, such as the closing costs of collateral insurance, Notary/PPAT and/or Legal Consultant fees, collateral assessment fees, and other related costs; which will be charged to the Customer's loan account (in the context of securing Indonesia Eximbank).

These costs can be charged unilaterally by Indonesia Eximbank at the cost and cost post and then the Proposer/Management Work Unit must collect and settle these obligations to the Customer.

- 6. Determination of the use of KAP, KJPP, Notary / PPAT, legal consultants, management consultants, auction houses if necessary.

Decision Making Policy**A. Decision Making Procedures for Business Financing Committee and Special Asset Management Committee for Commercial segment**

- 1. Financing Committee decision making is carried out through face-to-face meetings, either in person or via teleconference or video conference. Decisions (dispositions and signatures) can be given directly through hardcopy documents; electronic signature; and/or through approval by system.
- 2. Terms of Decision Making by the Business Financing Committee:

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

a. Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:

- 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis, dan
- 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana.

b. Kepala Divisi yang membidangi Analisis Risiko Pembiayaan yang melakukan review atas (calon) Nasabah yang diajukan tidak menjadi anggota Komite Pembiayaan.

c. Dalam hal pengambilan keputusan untuk:

- Nasabah baru dan/atau tambahan fasilitas dengan plafon group (one obligor) ekuivalen >Rp1 triliun dan plafon individu ekuivalen >Rp500 miliar, tidak termasuk limit Bank Line dan/atau NBFI Line;
- Penetapan grup limit.
- Nasabah pembiayaan dengan skema *clean* basis atau *negative pledge*;
- Nasabah Program Bisnis;
- Terdapat deviasi dari ketentuan Portfolio Guidelines;
- Pemutusan *Bank Line* dengan kondisi *high risk country*; dan/atau
- Terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Standar Pedoman yang berlaku

Maka diajukan kepada Komite Pembiayaan Bisnis I

d. Pengambilan keputusan oleh Komite Special Asset Management untuk menyetujui atau menolak proposal Pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh anggota komite yang hadir (kuorum).

3. Ketentuan Pengambilan Keputusan oleh Komite Pembiayaan – Special Asset Management (SAM) :

a. Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:

- 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis, dan

a. A decision-making is considered a quorum if at least one is attended by:

- 2 (two) members representing Business Functions, and
- 2 (two) members representing the Risk Function, where one member is the Managing Director.

b. The Head of Division in charge of Financing Risk Analysis who reviews the proposed (prospective) Customer is not a member of the Financing Committee.

c. In terms of decision making to:

- New customers and/or additional facilities with a group ceiling (one obligor) equivalent to >Rp1 trillion and an individual ceiling equivalent to >Rp500 billion, excluding Bank Line and/or NBFI Line limits;
- Limit group assignment.
- Financing customers with a clean basis or negative pledge scheme;
- Business Program Customers;
- Deviations from the provisions of the Portfolio Guidelines;
- Termination of Bank Line with high risk country conditions; and/or
- There are provisions as stipulated in the applicable Standard Guidelines

Then it was submitted to the Business Financing Committee I

d. The decision by the Special Asset Management Committee to approve or reject the Financing proposal is based on the approval of all committee members present (quorum).

3. Provisions for Decision Making by the Financing Committee – Special Asset Management (SAM):

a. A decision-making is considered a quorum if at least one is attended by:

- 2 (two) members representing Business Functions, and

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

- 3 (tiga) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana/Senior Executive Vice President (Head of).
 - b. Pejabat Direktur Pelaksana dari Unit Kerja Pengusul/Pengelola yang terlibat dalam pemberian awal dan/atau tambahan fasilitas tidak menjadi anggota pada saat pengambilan keputusan KP-SAM.
 - c. Kepala Divisi yang membidangi Analisis Risiko Pembiayaan yang melakukan review atas (calon) Nasabah yang diajukan tidak menjadi anggota Komite *Special Asset Management*.
 - d. Dalam hal pengambilan keputusan untuk, antara lain:
 - Nasabah penyelamatan/penyelesaian aset bermasalah dengan plafon group (one obligor) ekuivalen > Rp500 miliar, tidak termasuk limit *Bank Line* dan/atau NBFi Line;
 - Nasabah dengan skema clean basis atau *negative pledge*;
 - Nasabah dengan skema Agunan Yang Diambil Alih (AYDA); dan/atau
 - Terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Standar Pedoman yang berlaku.
 maka diajukan kepada Komite Pembiayaan SAM I
 - e. Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan *Special Asset Management* untuk menyetujui atau menolak proposal Pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh anggota komite yang hadir (kuorum).
4. Masing-masing anggota Komite Pembiayaan saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutuskan atau menolak suatu proposal Pembiayaan.
5. Pemutusan pembiayaan mengacu pada prinsip one obligor.
- 3 (three) members representing the Risk Function, where one member is the Managing Director/Senior Executive Vice President (Head of).
 - b. The Managing Director of the Proposer/ Management Unit involved in the initial and/ or additional provision of facilities is not a member at the time of KP-SAM decision making.
 - c. The Head of Division in charge of Financing Risk Analysis who reviews the proposed (prospective) Customer is not a member of the Special Asset Management Committee.
 - d. In terms of decision making to, inter alia:
 - Customer rescue/settlement of non-performing assets with a group ceiling (one obligor) equivalent to >Rp500 billion, excluding Bank Line and/or NBFi Line limits;
 - Customers with a clean basis or negative pledge scheme;
 - Customers with the Expropriated Collateral (AYDA) scheme; and/or
 - There are provisions as stipulated in the applicable Guideline Standards.
 then submitted to the SAM I Financing Committee
 - e. The decision by the Special Asset Management Financing Committee to approve or reject the Financing proposal is based on the approval of all committee members present (quorum).
4. Each member of the Financing Committee is independent and has the same authority to decide or reject a Financing proposal.
5. Termination of financing refers to the principle of one obligor.

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

6. Dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan sumber pendanaan dan suku bunga/imbal hasil (pricing), harus merujuk pada keputusan Assets & Liabilities Management Committee (ALMA).
 7. Setiap pemutusan Pembiayaan yang dilakukan oleh Komite Pembiayaan dituangkan dalam Memorandum Keputusan Pembiayaan (MKP).
 8. Putusan Pembiayaan dituangkan secara tertulis, tegas, dan jelas dalam MKP yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - Waktu dan tempat pelaksanaan rapat;
 - Keputusan rapat, yang meliputi namun tidak terbatas pada: data informasi Nasabah, total eksposur, rekapitulasi jaminan, rekomendasi struktur pembiayaan yang diberikan, dan sebagainya.
 9. Penandatanganan MKP dilakukan oleh seluruh anggota Komite Pembiayaan yang hadir (kuorum).
 10. Dalam hal terdapat penolakan suatu permohonan Pembiayaan, maka penolakan tersebut diberitahukan kepada (calon) Nasabah oleh Unit Kerja Pengusul/Pengelola dan harus dilaporkan kepada pejabat pemegang kewenangan memutus di Unit Kerja Pengusul/Pengelola serta didokumentasikan secara tertib.
 11. Pada dasarnya, keputusan penolakan yang diambil oleh Komite yang telah dituangkan dalam Memorandum Keputusan Pembiayaan tidak wajib diinformasikan secara tertulis kepada pemohon dan tidak dapat dilakukan banding. Namun demikian, apabila terdapat data atau informasi baru yang positif, maka dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan terdahulu dengan mengikuti tahapan proses pemutusan Pembiayaan.
6. In making decisions related to funding sources and interest/yield rates (pricing), must refer to the decision of the Assets & Liabilities Management Committee (ALMA).
 7. Every termination of Financing carried out by the Financing Committee is stated in the Financing Decision Memorandum (MKP).
 8. The Financing Decision is stated in writing, unequivocally, and clearly in the MKP which at least includes:
 - Time and place of meeting;
 - Meeting decisions, which include but are not limited to: Customer information data, total exposure, recapitulation of guarantees, recommendations for financing structures provided, and so forth.
 9. The signing of the MKP is carried out by all members of the Financing Committee present (quorum).
 10. In the event of rejection of a Financing application, the rejection is notified to the (prospective) Customer by the Proposer/Management Unit and must be reported to the executive holding the authority to decide at the Proposer/Management Unit and documented in an orderly manner.
 11. Basically, the rejection decision taken by the Committee as outlined in the Financing Decision Memorandum does not have to be informed in writing to the applicant and cannot be appealed. However, if there is positive new data or information, it is possible to review the previous decision by following the steps of the Financing termination process.

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

12. Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko menyusun rekapitulasi pelaksanaan Komite Pembiayaan/Komite Special Asset Management kepada Dewan Direktur secara bulanan bersama dalam Laporan Bulanan Manajemen Risiko.

B. Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan Segmen Penugasan Khusus Ekspor sektor UKM berorientasi ekspor**Sebelum 1 April 2022**

1. Pemutusan Program PKE UKM terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite dengan ketentuan 1 (satu) anggota Komite Fungsi Bisnis dan 1 (satu) anggota Komite Fungsi Risiko.
2. Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan Program PKE UKM dapat dilakukan melalui rapat (tatap muka), sirkuler atau media lainnya, antara lain melalui teleconference, video conference atau sarana komunikasi lainnya.
3. Dalam hal penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan Program PKE UKM dilakukan secara sirkuler, maka proses persetujuan harus diserahkan secara berurutan kepada anggota Pembiayaan Program PKE UKM Fungsi Bisnis untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya kepada Komite Pembiayaan Program PKE UKM Fungsi Risiko.
4. Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan Program PKE UKM untuk menyetujui atau menolak Memorandum Analisa Pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh Anggota Komite Pembiayaan Program PKE UKM sesuai struktur dan keanggotaan yang berlaku.

Setelah 1 April 2022

Sesuai dengan tata kerja pengambilan keputusan komite Pembiayaan (poin A)

12. The Unit in charge of Risk Management prepares a recapitulation of the implementation of the Financing Committee/Special Asset Management Committee to the Board of Directors on a monthly basis in the Monthly Risk Management Report.

B. Working Procedures for Decision Making of the Financing Committee for the Export National Interest Account Segment for the export-oriented SME sector**Before April 1, 2022**

1. Decision of the SME NIA Program consists of 2 (two) committee members with the provision that 1 (one) member of the Business Function Committee and 1 (one) member of the Risk Function Committee.
2. Decision making for SME NIA Program Financing Committee can be done through meetings (face-to-face), circular or other media, including through teleconference, video conference or other means of communication.
3. In the event that the meeting of the SME NIA Program Financing Committee is carried out circularly, the approval process must be submitted sequentially to members of the SME NIA Program Financing Business Function for approval and subsequently to the Risk Function SME NIA Program Financing Committee.
4. The decision made by the SME NIA Program Financing Committee to approve or reject the Financing Analysis Memorandum is based on the approval of all Members of the SME NIA Program Financing Committee in accordance with the applicable structure and membership.

After April 1, 2022

In accordance with the working procedures for decision-making of the Financing committee (point A)

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

C. Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan Segmen *Supply Chain Financing*

Sebelum 1 April 2022

1. Pemutusan Pembiayaan SCF terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite dengan ketentuan 1 (satu) anggota Komite Fungsi Bisnis dan 1 (satu) anggota Komite Fungsi Risiko
2. Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan SCF dapat dilakukan melalui rapat (tatap muka), sirkuler atau media lainnya, antara lain melalui teleconference, video conference atau sarana komunikasi lainnya.
3. Dalam hal penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan SCF dilakukan secara sirkuler, maka proses persetujuan harus diserahkan secara berurutan kepada anggota Pembiayaan SCF Fungsi Bisnis untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya kepada Komite Pembiayaan SCF Fungsi Risiko.
4. Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan SCF untuk menyetujui atau menolak Memorandum Analisa Pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh Anggota Komite Pembiayaan SCF sesuai struktur dan keanggotaan yang berlaku.

Setelah 1 April 2022

Sesuai dengan tata kerja pengambilan keputusan komite Pembiayaan (poin A)

C. Decision Making Procedures for the Financing Committee of the Supply Chain Financing Segment

Before April 1, 2022

1. Decision of SCF Financing consists of 2 (two) committee members provided that 1 (one) member of the Business Function Committee and 1 (one) member of the Risk Function Committee
2. SCF Financing Committee decision making can be done through meetings (face-to-face), circular or other media, including through teleconference, video conference or other means of communication.
3. In the event that the SCF Financing Committee meeting is held circularly, the approval process must be submitted sequentially to the members of the SCF Financing Business Function for approval and subsequently to the SCF Financing Risk Function Committee.
4. The decision made by the SCF Financing Committee to approve or reject the Financing Analysis Memorandum is based on the approval of all SCF Financing Committee Members in accordance with the applicable structure and membership.

After April 1, 2022

In accordance with the working procedures for decision-making of the Financing committee (point A)

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Meeting Frequency and Attendance

Tabel Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan Segmen UKM | Meeting Frequency of SME Segment Financing Committee

Keterangan Information	Frekuensi Rapat Meeting Frequency
Komite Pembiayaan Financing Committee	183
Komite Special Asset Management Special Asset Management Committee	149
Komite PKE UKM SME NIA Committee	55
Komite Supply Chain Financing Supply Chain Financing Committee	11
Total	398

KOMITE PEMBIAYAAN
FINANCING COMMITTEE

Tabel Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan Non-UKM | Non-SME Financing Committee Meeting Frequency

Keterangan Information	Frekuensi Rapat Meeting Frequency
Pembiayaan Segmen Korporasi Corporate Segment Financing	126
<i>Special Asset Management</i> Korporasi Corporate Special Asset Management	78
<i>Bank Line Counterparty (Credit Line)</i>	72
Non Bank <i>Financial Institutions Counterparty</i> (Global Line Asuransi)	18
Penjaminan Guarantee	23
Asuransi Insurance	2
Penugasan Khusus Ekspor (NIA) Export National Interest Account (NIA)	4
Total	323



KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES COMMITTEE

Komite Personalia dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Komite Personalia. Komite ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan penyempurnaan terkait pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta strategi penerapan kebijakan SDM sesuai dengan sasaran dan strategi LPEI. Dalam perjalanannya, peraturan ini mengalami perubahan; dan efektif per tanggal 9 Agustus 2022 telah ditetapkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite Di Bawah Direktur Eksekutif; dimana salah satunya mengatur perihal Komite Sumber Daya Manusia. Terdapat beberapa perubahan seperti:

- Penyebutan Komite Personalia berganti menjadi Komite Sumber Daya Manusia.
- Pencabutan dan dinyatakan tidak berlakunya PDE No. 0008/PDE/02/2018 Tentang Komite Personalia LPEI sejak ditetapkannya PDE No. 0015/PDE/08/2022.
- Perubahan susunan struktur dan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia.
- Penetapan alternate keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia.
- Penambahan tugas untuk penetapan strategi mempertahankan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 mengalami perubahan menjadi Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022; adapun perubahan yang dimuat pada peraturan baru tidak terkait dengan Komite Sumber Daya Manusia.

The Personnel Committee was established based on Executive Director Regulation No. 0008/PDE/02/2018 dated February 7, 2018 concerning the Personnel Committee. This committee was formed to provide recommendations to the Executive Director in formulating policies and improvements related to the development and management of human resources (HR) as well as strategies for implementing HR policies in accordance with the objectives and strategies of Indonesia Eximbank. This regulation underwent changes; and effective as of August 9, 2022, Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 on Standard Operating Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director has been established; where one of them regulates the Human Resources Committee. The changes are as follows:

- The Personnel Committee changed to the Human Resources Committee.
- Revocation and declaration of invalidity of PDE No. 0008/PDE/02/2018 on the Personnel Committee of Indonesia Eximbank since the enactment of PDE No. 0015/PDE/08/2022.
- Changes in the structure and membership of the Human Resources Committee.
- Alternate determination of Human Resources Committee membership.
- Additional duties for the establishment of strategies to maintain and develop quality Human Resources.

Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 amended to Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 which was stipulated on December 30, 2022; The changes contained in the new regulation are not related to the Human Resources Committee.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan

Structure and Membership

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Head of yang membidangi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources
Sekretaris Komite (non anggota) Committee Secretary (non-member)	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia yang membidangi Rekrutmen dan Pengembangan Organisasi Head of Human Resources Division in charge of Recruitment and Organization Development
Anggota Members	Anggota Tetap: Seluruh Direktur Pelaksana Narasumber: Head of yang terkait dengan materi pembahasan Permanent Members: All Managing Directors Sources: Head of related to the subject matter

Tugas dan Wewenang

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direktur Eksekutif dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia meliputi:

1. Penetapan strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
2. Menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Sumber Daya Manusia dan memantau serta melaporkan pelaksanaan atas program-program terkait Sumber Daya Manusia yang dijalankan;
3. Memastikan kebijakan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang berlaku;
 - b. kewajaran dengan peers group;
 - c. sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga.
4. Menentukan pengembangan nilai-nilai Lembaga (*corporate values*) sebagai pedoman dalam membentuk budaya Lembaga (*corporate culture*) untuk mencapai visi dan misi LPEI.

Duties and Authorities

The Human Resources Committee was established to assist the Executive Director in terms of Human Resources management including:

1. Establishment of strategies to maintain and develop quality Human Resources;
2. Carry out matters related to Human Resources policies and monitor and report on the implementation of programs related to Human Resources carried out;
3. Ensure that Human Resources policies are implemented by taking into account, among others:
 - a. financial and budgetary conditions as stipulated in applicable regulations;
 - b. fairness with peers group;
 - c. the goals and long-term strategies of the Institution.
4. Determine the development of corporate values as a guideline in shaping corporate culture to achieve the vision and mission of Indonesia Eximbank.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES COMMITTEE

Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum anggota tetap yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. lebih dari 50 (lima puluh) persen Anggota tetap;
5. Seluruh keputusan Komite ditatausahakan dalam bentuk Risalah Rapat secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Decision Making Procedures

1. Committee decision making can be done through face-to-face or online meetings.
2. Face-to-face meetings can be conducted physically or through teleconferencing, video conferencing or other electronic media means that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
3. Meeting decisions must be taken based on deliberation for consensus.
4. The quorum requirement for the decision making Committee is a minimum attendance of permanent members consisting of:
 - a. Head;
 - b. Vice Chairman; and
 - c. more than 50 (fifty) percent of permanent Members;
5. All decisions of the Committee shall be administered in the form of Minutes of Meeting in a complete and orderly manner by the secretary of the committee.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Meeting Frequency and Attendance

No	Tanggal Date	Agenda	Kuorum Quorum
1	19 Agustus 2022 August 19, 2022	Jasa produksi kinerja 2021 Performance production services 2021	Terpenuhi Fulfilled
2	14 September 2022 September 14, 2022	Penyesuaian Remunerasi Remuneration Adjustment	Terpenuhi Fulfilled
3	28 September 2022 September 28, 2022	Penyempurnaan Struktur Organisasi Organizational Structure Improvement	Terpenuhi Fulfilled

SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR

SECRETARY TO THE BOARD OF DIRECTORS

Sekretaris Dewan Direktur berfungsi untuk membantu kelancaran tugas Dewan Direktur, yang meliputi penyusunan dan penetapan kebijakan serta melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pengurusan Lembaga oleh Direktur Eksekutif dan segenap jajarannya.

The Secretary of the Board of Directors has the function to assist the effectiveness of the Board of Directors' duties, including the development and establishment of policies as well as oversight on the Company's management by Executive Director and all elements.

Profil Sekretaris Dewan Direktur

Profile of Secretary of the Board of Directors



T. Dyza R. A. Rochadi

Sekretaris Dewan Direktur
Secretary to the Board of Directors

49 Tahun | Years old
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian
Citizenship Domisili | Domicile: Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
[Appointment Basis](#)

PDD No. 007/PDD/12/2020

Rangkap Jabatan
[Concurrent Position](#)

Merangkap sebagai Kepala Divisi Communication and Stakeholders Engagement
Concurrently serving as Head of the Communication and Stakeholders Engagement Division

Pengalaman Kerja
[Professional Experience](#)

LPEI

- Kepala Divisi Office of the Board (Juli 2020 - masa pelaporan)
- Kepala Divisi Trade Finance (April 2019 – Juni 2020)
- Kepala Divisi Executive Office (Januari 2018 – April 2019)
- Kepala Divisi Internasional (Agustus 2014 – Januari 2018)
- Pj. Kepala Divisi Manajemen Risiko & Perencanaan Strategis (Agustus 2013 - Juli 2014)
- Kepala Departemen MSDM (Januari 2011 - Juli 2013)
- Kepala Departemen SDM (September 2009 – Desember 2011)

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

- Sr. Manager SDM dan Umum (September 2006 - Agustus 2009)
- Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan (November 2003 - September 2006)
- RM Koresponden Bank – International (Juni 2000 – November 2003)
- RM Koresponden Bank (September 1999 - Juni 2000)

PT Bank Nusa International

- Unit Head of Business Development Unit (April 1999 – Agustus 1999)
- Dept. Head Overseas Correspondent Banking (Januari 1999 - April 1999)
- RM of Overseas Correspondent Banking Dept (Mei 1998 - Januari 1999)
- Unit Head of International Banking Unit (Desember 1997 – Mei 1998)
- Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 - Desember 1997)
- Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 - September 1996)

SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR
SECRETARY TO THE BOARD OF DIRECTORS

Indonesia Eximbank

- Head of Division Office of the Board (July 2020 – reporting period)
- Head of the Trade Finance Division (Apr 2019 - June 2020)
- Head of Executive Office Division (January 2018 - April 2019)
- Head of International Division (August 2014 - January 2018)
- Acting Head of Risk Management & Strategic Planning Division (August 2013 - July 2014)
- Head of the Department of HRM (January 2011 - July 2013)
- Head of the HR Department (September 2009 – December 2011)

PT Indonesian Export Bank (Persero)

- Sr. HR and General Manager (September 2006 - August 2009)
- Head of the Department of Institutional Relations (November 2003 - September 2006)
- RM Koresponden Bank - International (June 2000 – November 2003)
- Bank Correspondent RM (September 1999 - June 2000)

PT Bank Nusa International

- Unit Head of Business Development Unit (April 1999 – August 1999)
- Dept. Head Overseas Correspondent Banking (January 1999 -April 1999)
- RM of Overseas Correspondent Banking Dept (May 1998 - January 1999)
- Unit Head of International Banking Unit (December 1997 – May 1998)
- Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 - December 1997)
- Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 - September 1996)

Riwayat Pendidikan Education

- S2 Keuangan dan Perbankan, Universitas Indonesia, Jakarta – Indonesia, Tahun 1999
- S1 Manajemen Keuangan, Universitas Trisakti, Jakarta - Indonesia, Tahun 1995
- Master's Degree in Finance and Banking, University of Indonesia, Jakarta - Indonesia, 1999
- Bachelor of Financial Management, Trisakti University, Jakarta - Indonesia, 1995

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Dewan Direktur memimpin Unit Kerja Office of The Board yang melaksanakan fungsi sekretariat Dewan Direktur dengan tugas dan tanggung jawab:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Direktur;
2. Mencatat dan mengadministrasikan rapat Dewan Direktur;
3. Mengadministrasikan korespondensi dan laporan-laporan Dewan Direktur serta komite-komite yang berada di bawah Dewan Direktur;
4. Menjalankan fungsi penghubung (liaison) antara Dewan Direktur dengan fungsi-fungsi eksekutif LPEI;

Duties and Responsibilities

The Secretary of the Board of Directors leads the Office of the Board Unit which carries out the secretariat functions of the Board of Directors with duties and responsibilities:

1. To carry out activities to support the functions and activities of the Board of Directors;
2. To record and administer the Board of Directors meeting;
3. Administration of the correspondence and reports of the Board of Directors as well as the committees under the Board of Directors;
4. To carry out the liaison function (liaison) between the Board of Directors and the executive functions of Indonesia Eximbank;

SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR
SECRETARY TO THE BOARD OF DIRECTORS

5. Memastikan tata kelola Dewan Direktur sesuai dengan prinsip tata kelola kelembagaan dan memenuhi aturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Direktur.

Laporan Pelaksanaan Tugas

Pada tahun 2021, Sekretaris Dewan Direktur telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mengelola agenda Dewan Direktur dalam bentuk pengaturan penjadwalan, penyediaan materi serta penyusunan dan pendokumentasian risalah rapat;
2. Memastikan tindak lanjut atas setiap arahan Dewan Direktur;
3. Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam agenda Dewan Direktur;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan Dewan Direktur secara tepat waktu;
5. Mengusulkan penyempurnaan regulasi internal terkait tata kerja Dewan Direktur dan tata naskah dinas lembaga;
6. Menjalinkan hubungan dan mewujudkan sinergi antar Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya.

5. Ensure that the governance of the Board of Directors is in accordance with the principles of institutional governance and complies with statutory regulations; and
6. Carry out other duties as determined by the Board of Directors.

Duties Implementation Report

In 2021, the Secretary to the Board of Directors has carried out the following duties:

1. Manage the agenda of the Board of Directors such as scheduling arrangements, provision of materials and preparation and documentation of minutes of meetings;
2. Ensuring follow-up on every direction of the Board of Directors;
3. Carry out protocol functions in the agenda of the Board of Directors;
4. Prepare and submit reports of the Board of Directors in a timely manner;
5. Propose improvements to internal regulations related to the work procedures of the Board of Directors and institutional service manuscripts;
6. Establishing relationships and creating synergies between the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV) and other institutions.



SEKRETARIS LEMBAGA

CORPORATE SECRETARY

LPEI memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung antara organ perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya. Peran ini melekat pada Sekretaris Lembaga LPEI yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direktur Eksekutif serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

Sebagai aspek penting dalam penerapan GCG, Sekretaris Lembaga dibentuk untuk memberi dukungan bagi Manajemen dalam mencapai dan memastikan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundangan serta dalam implementasi keputusan-keputusan Direksi.

Dasar Hukum

LPEI mengangkat Chesna F. Anwar sebagai Sekretaris Lembaga yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif No. 0003/KDE/01/2022.

Profil Sekretaris Lembaga

Corporate Secretary Profile



Chesna F. Anwar

Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan merangkap Sekretaris Lembaga
Managing Director of Institutional Relations concurrently Corporate Secretary

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis

Keputusan Direktur Eksekutif No. 0003/KDE/01/2022
Decree of Executive Director No. 0003/KDE/01/2022

Profil Profile

Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Direktur Pelaksana di Bab 3 Laporan Tahunan ini.

Profile can be viewed on Sub Chapter of the Managing Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

Indonesia Eximbank has in place a corporate secretary function that serves as a link between the company's organ with the external parties including government and non-government institutions, shareholders, as well as other capital market players. The Company's Corporate Secretary is appointed and dismissed based on the Decree of Executive Director, and is directly responsible to the Executive Director.

As an important aspect of GCG implementation, Corporate Secretary is established to assist the Management to achieve and ensure compliance with the statutory and regulatory requirements and in the implementation of the Board of Directors' decisions.

Legal References

Indonesia Eximbank has appointed Chesna F. Anwar as the Corporate Secretary, which has been ratified by the Decree of Executive Director No. 0003/KDE/01/2022.

Struktur Organisasi Sekretariat Lembaga

Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

Organization Structure of Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Executive Director and is directly responsible to the Executive Director.

SEKRETARIS LEMBAGA
CORPORATE SECRETARY**Tugas dan Tanggung Jawab**

Secara khusus, Sekretaris Lembaga memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pemenuhan kepatuhan LPEI terhadap peraturan mengenai persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola yang baik.
- Penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- Penghubung LPEI dengan pemangku kepentingan.
- Penatausahaan serta penumpukan dokumen LPEI.

Pelaksanaan Tugas 2022

Sepanjang tahun 2022 Sekretaris Lembaga melaksanakan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalin komunikasi dengan regulator antara lain dalam bentuk penyampaian laporan secara tepat waktu dan penyelenggaraan pertemuan dengan regulator seperti Kementerian Keuangan dan OJK
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, dalam bentuk 12 Nota Kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga/Bank serta penyelenggaraan kegiatan dan program bersama.
3. Penyusunan Siaran Pers dalam rangka Keterbukaan informasi kepada media dan publik sebanyak 112 siaran pers.
4. Melakukan korespondensi dengan regulator, Kementerian/Lembaga, dan stakeholder terkait.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Lembaga

Pelatihan kepada Sekretaris Lembaga dapat dilihat pada bagian Profil Manajemen di Bab 3.

Duties and Responsibilities

In particular, the Corporate Secretary has the following functions:

- Fulfillment of Indonesia Eximbank's compliance with regulations regarding disclosure requirements in line with the application of Good Governance principles.
- Provision of information required by the Board of Directors and Executive Directors periodically and/or at any time if requested.
- Indonesia Eximbank's liaison with stakeholders.
- Administration and filing of Indonesia Eximbank documents.

Duties Implementation in 2022

During 2022, the Corporate Secretary carried out various activities, as follows:

1. The implementation of activities to establish communication with regulators, among others, in the form of timely submission of reports and holding meetings with regulators such as the Ministry of Finance and OJK.
2. Implementation of activities to establish effective communication with stakeholders, in the form of 12 Memorandums of Understanding with Ministries/Institutions/Banks as well as the implementation of joint activities and programs.
3. Preparation of Press Releases in the context of information disclosure to the media and the public as many as 112 press releases.
4. Conduct correspondence with regulators, Ministries/Institutions, and relevant stakeholders.

Corporate Secretary Competencies Development

The training for Corporate Secretary is presented in the Chapter 3 of Management Profile.



UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Fungsi audit intern di LPEI dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dikepalai oleh Kepala SKAI (Senior Executive Vice President 5) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif, mengacu pada MPO.0038/CEO/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyempurnaan Keenam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI. Satuan kerja tersebut membawahi Divisi Regular Audit & Methodology yang melakukan tugas pelaksanaan audit dan penugasan non-Audit sesuai RAT, dan Divisi Special Audit yang melaksanakan investigasi dan verifikasi untuk keperluan hapus buku, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Divisi.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara konsisten menggunakan pendekatan Risk Based Audit yang menjadi rujukan pelaksanaan fungsi Audit Internal oleh Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO) serta turut mengacu pada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang disusun oleh Institute of Internal Auditor (IIA).

Piagam Audit Internal

LPEI telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman yang memuat tentang tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan fungsi Internal Audit dalam organisasi, sehingga dapat menempatkan fungsi Internal Audit secara independen. Piagam Audit Internal didokumentasikan dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0014/PDE/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022.

The internal audit function in the Company is carried out by the Internal Audit Unit (IAU) that led by the Head of IAU (Senior Executive Vice President 5) and directly responsible to the Executive Director, as referring to the MPO.0038/ CEO/08/2020 dated 31 August 2020 on the Amendment of the Sixth Regulations of Executive Director No. 0065/ PDE/11/2019 on the Company's Organizational Guidelines and Work Procedures. The unit is in charge of Regular Audit & Methodology Division to implement audit and non- audit according to the Annual Audit Plan, and Special Audit Division duties to investigate and verify write-off, with each being led by a Division Head.

On internal supervision, IAU is consistently using the Risk Based Audit approach that become a reference in carrying out internal audit function by the Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO), as well as referring ot the Internal Audit Professional Practices of International Standard developed by the Institute of Internal Auditor (IIA).

Internal Audit Charter

The Company has an Internal Audit Charter as a guideline of the objectives, authorities, responsibilities, and scope of work of the Internal Audit function within the organization, hence to be able to operate independently. The Internal Audit Charter is documented in Executive Director Regulation No. 0014/PDE/08/2022 dated 5 August 2022.

Profil Kepala Audit Internal

Profile of Head of Internal Audit

**I Nyoman Gede Suarja**Kepala Audit Internal
Head of Internal Audit

Usia Age	61
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.PJ.0094/HCH/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Specified Time Work Agreement (PKWT) No. PJ.0094/HCH/12/2021 dated 29 December 2021.
Periode Jabatan Position Period	1 Januari 2022 – sekarang 1 January 2022 - present
Pengalaman Kerja Work Experiences	- Head of Audit, LPEI, Januari 2022 – saat ini. - Chief Executive, PT Bank Mandiri Europe Ltd., April 2016 – Desember 2021. - Managing Director, September 2013 – September 2016. - Head of Audit, Indonesia Eximbank, Januari 2022 – present. - Chief Executive, PT Bank Mandiri Europe Ltd., April 2016 – December 2021. - Managing Director, September 2013 – September 2016.
Riwayat Pendidikan Education	- S2 Manajemen – Universitas Gadjah Mada, 1999 - S1 Ekonomi – Universitas Brawijaya, 1987 - Master of Management – University of Gadjah Mada, 1999 - Bachelor of Economics – University of Brawijaya, 1987
Pelatihan / peningkatan kompetensi Training / competence enhancement	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 – Afridham Secret. Level 5 Risk Management Certification – Afridham Secret.

Jumlah Pegawai Satuan Kerja Internal Audit**Number of Employees of Internal Audit Unit**

Jabatan Position	Jumlah Pegawai Number of Staff
Kepala Satuan Kerja Audit Internal I Head of Internal Audit Unit	1
Kepala Divisi I Division Head	1
Kepala Departemen I Department Head	5
Auditor	9
Total	16

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Internal Audit

Hingga akhir tahun 2020, sebagian Kepala Departemen dan staf telah memiliki kualifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) telah memegang sertifikasi QIA, selebihnya sedang dalam proses sertifikasi QIA dengan target waktu pemenuhan tahun 2021 ataupun sertifikasi lain dibidang Internal Audit yang relevan dengan bidang pekerjaan. Berikut adalah komposisi staf dalam proses pemenuhan sertifikasi QIA.

Internal Audit Qualifications/ Professional

Certification As of the end of 2020, some of Department Heads and staffs have achieved the QIA (Qualified Internal Auditors) qualifications, while the rest are in the process of obtaining the QIA certification with fulfillment target in 2021 or other certifications of Internal Audit that relevant with work fields. The following are composition of staffs that still under the QIA certification fulfillment process.

Nama Sertifikat Certification	Jumlah Total
QIA Lanjutan I I QIA Advance Level I	5
QIA Manajerial I QIA Managerial Level	8

Kedudukan Direktorat Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan unit Audit Internal mengacu pada MPO.0038/CEO/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyempurnaan Keenam Tata Kerja LPEI. Peraturan ini menyatakan bahwa struktur Direktorat Internal Audit berada di bawah supervisi Direktur Eksekutif.

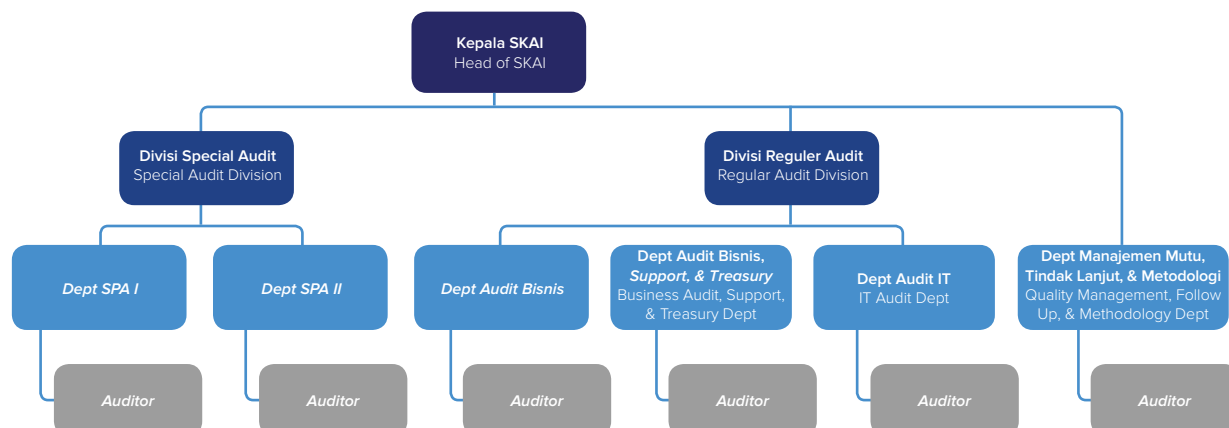
Internal Audit Directorate Composition in the Organization Structure

The Internal Audit unit structure and position refer to MPO.0038/CEO/08/2020 dated 31 August 2020 on the Refinement of the Sixth Work Procedures of Indonesia Eximbank. This regulation states that the structure of Internal Audit Directorate is under the supervision of Executive Director.

Dengan demikian, Direktorat Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Eksekutif. Kendati demikian, Direktorat ini memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Internal.

As such, the Internal Audit Directorate is directly under the Executive Director. Nevertheless, this Directorate has the independency in carrying out its duties in accordance with the Internal Audit Charter.

Struktur Organisasi Direktorat Internal Audit Internal Audit Directorate Organization Structure



Tugas dan Tanggung Jawab

Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh Kepala SKAI dengan jabatan setara Head Of, yang membawahi dua Divisi yaitu Divisi Reguler Audit, Divisi Special Audit dan Departemen Manajemen Mutu, Tindak Lanjut & Metodologi.

- I. Divisi Reguler Audit (RAM) dikepalai oleh Kepala Divisi yang membawahi tiga unit kerja setara departemen, yaitu Departemen Audit Bisnis, Departemen Audit Perbendaharaan & Fungsi Support, dan Departemen Audit TI yang bertugas melakukan pengawasan berupa:
 - i. Fungsi asurans (*assurance*) dilaksanakan melalui pelaksanaan audit untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas *internal control* dan *risk management*, serta menilai kualitas pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Audit yang telah disetujui oleh Direktur Eksekutif.
 - ii. Bersama dengan Departemen Manajemen Mutu, Tindak Lanjut & Metodologi:
 - Melakukan penyusunan Rencana Audit Tahunan unit kerja Satuan Kerja Audit Internal.
 - Melakukan koordinasi dan supervisi dalam pengembangan metodologi dan pengaturan berupa Piagam Audit, Manual Dan Prosedur Operasional, serta penggunaan sistem informasi manajemen audit, merujuk pada standar internasional profesi internal audit dan peraturan eksternal atau best practice yang berlaku.
- II. Divisi Spesial Audit (SPA) mempunyai fungsi melaksanakan audit investigasi dan verifikasi dalam rangka hapus buku sesuai permintaan dari internal maupun eksternal antara lain:
 - i. Menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memastikan permasalahan terkait Debitur disebabkan unsur kelalaian atau kesengajaan (non kerugian bisnis).

Duties and Responsibilities

The Internal Audit Unit is led by the Head of Internal Audit with a position equivalent to Head Of, which oversees two Divisions: the Regular Audit Division, Special Audit Division and the Quality Management, Follow-up & Methodology Department.

- I. The Regular Audit Division (RAM) is headed by the Head of Division who oversees three departmental equivalent work units, namely the Business Audit Department, Treasury & Support Function Audit Department, and IT Audit Department in charge of conducting supervision in the form:
 - i. The assurance function is carried out through the implementation of audits to evaluate the adequacy and effectiveness of internal control and risk management, as well as assessing the quality of performance achievement in accordance with the Audit Plan approved by the Executive Director.
 - ii. Together with the Quality Management, Follow-up & Methodology Department:
 - To prepare the Annual Audit Plan of the Internal Audit Unit.
 - Coordinate and supervise the development of methodologies and arrangements in the form of Audit Charters, Manuals and Operational Procedures, as well as the use of audit management information systems, referring to international standards of the internal audit profession and external regulations or applicable best practices.
- II. The Special Audit Division (SPA) has the function of carrying out investigative and verification audits in the context of book write-offs according to requests from internal and external, among others:
 - i. Following up on BPK recommendations to ensure problems related to debtors are caused by negligence or intentionality (non-business loss).

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

- ii. Menyediakan bukti yang cukup dan memadai untuk keperluan proses hukum, jika ditemukan adanya unsur fraud terkait tidak tertagihnya pinjaman Debitur dengan mempertimbangkan kajian hukum dari Tim Legal.
 - iii. Melakukan verifikasi dalam rangka penghapusbukuan fasilitas macet Debitur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
 - iv. Menindaklanjuti aduan terkait indikasi fraud yang dilakukan oleh unsur internal LPEI.
 - v. Melakukan sosialisasi sebagai lesson learned untuk pembelajaran dan pengetahuan akar permasalahan sebagai landasan perbaikan secara ketentuan maupun proses bisnis (operasional).
- III. Departemen Manajemen Mutu, Tindak Lanjut & Metodologi (QAM) mempunyai fungsi menyiapkan infrastruktur operasional unit kerja Internal Audit sesuai dengan tipe pelaksanaan tugasnya, antara lain:
- i. Melakukan penyusunan Rencana Audit Tahunan unit kerja Satuan Kerja Audit Internal.
 - ii. Melakukan koordinasi dan supervisi dalam pengembangan metodologi dan pengaturan berupa Piagam Audit, Kebijakan, Manual Dan Prosedur Operasional, serta penggunaan Sistem informasi Manajemen Audit, merujuk pada standar internasional profesi internal audit dan peraturan serta best practice yang berlaku.
 - iii. Melakukan kajian atas penerbitan pengaturan baru berupa Kebijakan dan Standar Pedoman baik berupa pengaturan Produk dan Operasional serta Petunjuk Teknis Operasional.
 - iv. Melakukan supervisi sebagai proses pengendalian kualitas pekerjaan Divisi Regular Audit dan Divisi Special Audit disesuaikan dengan pengaturan yang berlaku antara lain Piagam Audit dan Prosedur Internal.
 - v. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemenuhan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan auditor
- ii. Providing sufficient and adequate evidence for the purpose of legal proceedings, if there is an element of fraud related to uncollectible Debtor loans by considering legal studies from the Legal Team.
 - iii. Conduct verification in order to write-off the Debtor's bad debt facility in accordance with the provisions of the Minister of Finance Regulation (PMK).
 - iv. Following up complaints related to indications of fraud committed by internal elements of Indonesia Eximbank.
 - v. Conducting socialisation as lesson learned for learning and root cause knowledge as the basis for improvement in terms of provisions and business processes (operational).
- III. The Quality Management, Follow-up & Methodology (QAM) Department has the function of preparing the operational infrastructure of the Internal Audit work unit in accordance with the type of task implementation, including:
- i. Performing the preparation of the Annual Audit Plan of the Internal Audit Unit
 - ii. Coordinating and supervising the development of methodologies and arrangements in the form of Audit Charters, Policies, Manuals and Operational Procedures, as well as the use of Audit Management Information Systems, referring to international standards of the internal audit profession and applicable regulations and best practices.
 - iii. To review the issuance of new arrangements in the form of Policies and Standard Guidelines in the form of Product and Operational arrangements and Operational Technical Guidelines.
 - iv. Performing supervision as a process of controlling the quality of work of the Regular Audit Division and Special Audit Division in accordance with applicable regulations, including the Audit Charter and Internal Procedures.
 - v. Coordinating the implementation of the fulfilment of follow-up on the results of internal and

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

internal dan eksternal dan mengkomunikasikan secara berkala kepada manajemen.

- vi. Melaksanakan fungsi sebagai Liaison sebagai counterpart dalam kegiatan pemeriksaan eksternal.

external audits and communicating periodically to management.

- vi. Carry out the function as Liaison as a counterpart in external audit activities.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Audit Internal

Sesuai dengan Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2009 Tentang LPEI, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal merupakan kewenangan Direktur Eksekutif.

Appointment & Termination of Head of Internal Audit

In accordance with the Article 31 Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, the appointment and termination of Head of Internal Audit Division is the authority of the Executive Director.

Bagan Pengangkatan dan Pemberhentian**Chart of Appointment and Dismissal**

Direktur Eksekutif Executive Director	Komite Audit Audit Committee	Dewan Direktur Board of Directors
a. Melakukan Fit and Proper b. Menyampaikan ke Anggota Dewan Direktur melalui Komite Audit	Melaporkan kepada Dewan Direktur atas usulan pengangkatan/ pergantian/ Pemberhentian Kepala Audit Internal yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif	Menerima laporan dan memberikan persetujuan atas pengangkatan / perubahan/ Pergantian Ketua Audit.
a. Conduct Fit and Proper b. Submit to Members of the Board of Directors through the Audit Committee	Report to the Board of Directors on the proposal for appointment/ replacement/ termination of Head of Internal Audit submitted by Executive Director	Received the report and approved the appointment/ change of Chairman of Audit Committee

Persyaratan Auditor Internal, baik secara individu, maupun kelompok

Auditor yang profesional memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional yang diperoleh baik melalui pendidikan maupun melalui pengalaman dalam bidang operasional lembaga pembiayaan dan senantiasa bekerja berdasarkan suatu sikap mental dan kode etik yang telah ditetapkan.

Requirements for Internal Auditors, both individually and in groups

Professional auditors have professional knowledge and skills obtained through education and experience in the financial institutions operational and always work based on a mental attitude and established code of ethics.

Pengembangan Kompetensi

Dalam meningkatkan kompetensi pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal, telah dilakukan serangkaian kegiatan berupa pelatihan, seminar dan konferensi taraf nasional dan internasional terkait bidang Internal Audit yang

Competency Development

To enhance of its staffs competencies, the Internal Audit Unit has participated in trainings, national and international seminars and conferences held by IAIB (Auditor Intern Bank Association), IIA (Institute of Internal

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

diadakan oleh IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank), IIA (Intitute of Internal Auditors), YPIA (Yayasan Pengembangan Internal Audit), LPFA (Lembaga Pengembangan Fraud Auditing) maupun lembaga lain yang memberikan pelatihan di bidang teknis seperti Manajemen Risiko oleh Banker Association for Risk Management (BARA), maupun keahlian teknis lainnya terkait analisa laporan keuangan dan pelaksanaan APU PPT. Pelaksanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan tersebut akan meningkatkan kemampuan, wawasan dan teknik Auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Internal Auditor.

Auditors), YPIA (Internal Audit Development Foundation), LPFA (Fraud Auditing Development Institution) and other training institutions that provide technical trainings such as risk management by the Banker Association for Risk Management (BARA), or other technical skills regarding financial statements and implementation of AML CTF. The continuous competency development will improve the capabilities, insights and techniques of the Auditors in conducting duties and responsibilities as the Internal Auditor.

u.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Competence Development

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Worshops	Penyelenggara Organizers
I Nyoman Gede Suarja	29 Agustus 2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - <i>New Normal</i>)	Internal
	21 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	11-Feb-2022	<i>Leadership Season</i> : Mengungkap yang Belum Terungkap <i>Leadership Season: Uncovering the Untold</i>	Internal
	09-Mar-2022	Sosialisasi PMK 208-2021 PMK Socialization 208-2021	Internal
	17-Mar-2022	Kerangka Konseptual & Praktik Terbaik Audit Syariah Conceptual Framework & Best Practices of Sharia Audit	Eksternal
Titiek Litasari	31-Mar-2022	Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Level 4 Risk Management Certification Test and Preparation Class	Internal
	12-Apr-2022	Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Level 4 Risk Management Certification Test and Preparation Class	Eksternal
	29-Jun-2022	<i>ESG Trend & Economy Outlook</i>	Eksternal
	27-Jul-2022	Sosialisasi POJK 9/2022 POJK 9/2022 Socialization	Internal
	29-Aug-2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - <i>New Normal</i>)	Internal
Saeful Hendra	21-Oct-2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	11 Februari 2022	<i>Leadership Season</i> : Mengungkap yang Belum Terungkap	Internal
	27 Juli 2022	Sosialisasi POJK 9/2022 POJK 9/2022 Socialization	Eksternal
	21-22 Oktober-2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshops	Penyelenggara Organizers
Tri Rianto Basuki	25-26 April 2022	<i>Excellent Public Speaking and Business Etiquette Skills</i>	Eksternal
	27 Juli 2022	Sosialisasi POJK 9/2022 POJK 9/2022 Socialization	Eksternal
	29 Agustus 2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - New Normal) Implementation of Integrated GRC (Era - New Normal)	Internal
	25 Oktober 2022	<i>Leading Hybrid Teams with Agile Leadership</i>	Eksternal
Adhyatma Ndaru Suhardono	11 Februari 2022	<i>Leadership Season : Mengungkap yang Belum Terungkap</i> Leadership Season: Uncovering the Untold	Internal
	9 Maret 2022	Sosialisasi PMK 208-2021 PMK Socialization 208-2021	Internal
	27 Juli 2022	Sosialisasi POJK 9/2022 POJK 9/2022 Socialization	Eksternal
	18-19 Agustus 2022	<i>Excellent Public Speaking and Business Etiquette Skills</i> (Agustus)	Eksternal
	21 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Eksternal
	25 Oktober 2022	<i>Leading Hybrid Teams with Agile Leadership</i>	Eksternal
	6 Desember 2022	<i>Fraud Auditing 1</i>	Eksternal
Arnoldy Armyn	11 Februari 2022	<i>Leadership Season : Mengungkap yang Belum Terungkap</i> Leadership Season: Uncovering the Untold	Internal
	9 Maret 2022	Sosialisasi PMK 208-2021 PMK Socialization 208-2021	Internal
	27 Juli 2022	Sosialisasi POJK 9/2022 POJK 9/2022 Socialization	Eksternal
	29 Agustus 2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - New Normal) Implementation of Integrated GRC (Era - New Normal)	Internal
	19 Oktober 2022	<i>Leading Hybrid Teams with Agile Leadership</i>	Eksternal
	20 Oktober 2022	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Refreshment	Eksternal
	21-22 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	26 Oktober 2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas / Sektor Industri : Tekstil Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Textile	Internal

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Worshops	Penyelenggara Organizers
Juli Wibowo	11 Februari 2022	<i>Leadership Season</i> : Mengungkap yang Belum Terungkap Leadership Season: Uncovering the Untold	Internal
	28 Maret–1 April 2022	Audit Forensik & Sertifikasi <i>Certified Forensic Auditor</i> (CFrA) Forensic Audit & Certified Forensic Auditor (CFrA) Certification	Eksternal
	25-26 April 2022	<i>Excellent Public Speaking and Business Etiquette Skills</i>	Eksternal
	27 Juli 2022	Sosialisasi POJK 9/2022 POJK 9/2022 Socialization	Eksternal
	29 Agustus 2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - New Normal) Implementation of Integrated GRC (Era - New Normal)	Internal
	28 September 2022	<i>Leading Hybrid Teams with Agile Leadership</i>	Eksternal
	21-22 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
Rio Martha	11-Feb-2022	<i>Leadership Season</i> : Mengungkap yang Belum Terungkap Leadership Season: Uncovering the Untold	Internal
	09-Mar-2022	Sosialisasi PMK 208-2021 PMK Socialization 208-2021	Internal
	17-Mar-2022	Kerangka Konseptual & Praktik Terbaik Audit Syariah Conceptual Framework & Best Practices of Sharia Audit	Eksternal
	27-Jul-2022	Sosialisasi POJK 9/2022 POJK 9/2022 Socialization	Eksternal
	24-Aug-2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas / Sektor Industri : Kayu dan Olahan Kayu Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Wood and Wood Processing	Internal
	29-Aug-2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - New Normal)	Internal
	19-Sep-2022	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Refreshment	Eksternal
	28-Sep-2022	<i>Leading Hybrid Teams with Agile Leadership</i>	Eksternal
	20-Oct-2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas / Sektor Industri : Tekstil Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Textile	Internal
	21-Oct-2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshops	Penyelenggara Organizers
Agus Imansyah	31 Mei 2022	<i>Emergency Response Plan</i>	Internal
	20-29 Juni 2022	Program Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit (QIA)</i> - Tingkat Manajerial Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program - Managerial Level	Eksternal
	22-Aug-2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Penjaminan	Eksternal
	29-Aug-2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - <i>New Normal</i>)	Internal
	21 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	26-27 Oktober 2022	Think on Your Feet	Eksternal
	24 November 2022	<i>Sharing Knowledge</i> Jasa Konsultasi Advisory Sharing Knowledge	Internal
	22 Desember 2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Asuransi Basic Insurance Sharing Knowledge	Internal
Anggata Mahendra	10 Februari 2022	<i>New Hire Orientation</i>	Internal
	20 April 2022	<i>Product & Proses Bisnis Trade Finance</i> (Fundamental) Product & Business Process Trade Finance (Fundamentals)	Internal
	25 Juli 2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Penjaminan Basic Guarantee Sharing Knowledge	Internal
	9-10 Agustus 2022	<i>Problem Solving & Decision Making</i>	Eksternal
	22 Agustus 2022	Dinamika Pembiayaan Bermasalah Dynamics of Non-Performing Financing	Internal
	29 Agustus 2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - <i>New Normal</i>)	Internal
	20 Oktober 2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas / Sektor Industri : Tekstil Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Textile	Internal
	21-22 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
Dimas Rahmadi Subroto	3-4 November 2022	Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Level 1 Risk Management Preparation and Certification Test Class	Eksternal
	24 Maret 2022	<i>Design Thinking</i>	Eksternal
	29 Juli 2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Penjaminan Guarantee Basic Sharing Knowledge	Internal
	22-23 Agustus 2022	<i>Think on Your Feet</i>	Eksternal
	18 Oktober 2022	<i>Sharing Knowledge</i> Jasa Konsultasi Advisory Sharing Knowledge	Internal
	21 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	22 Desember 2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Asuransi Basic Insurance Sharing Knowledge	Internal

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshops	Penyelenggara Organizers
Endang Pamularsih	12 April 2022	<i>Product & Proses Bisnis Trade Finance</i> (Fundamental) Product & Business Process Trade Finance (Fundamentals)	Internal
	6 Juli 2022	<i>New Hire Orientation</i>	Internal
	18 Juli 2022	Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Level 1 Risk Management Preparation and Certification Test Class	Eksternal
	9 Agustus 2022	<i>Problem Solving & Decision Making</i>	Eksternal
	22- Agustus 2022	Dinamika Pembiayaan Bermasalah Dynamics of Non-Performing Financing	Internal
	29- Agustus 2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - New Normal)	Internal
	30 Agustus 2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Penjaminan Guarantee Basic Sharing Knowledge	Internal
	18 Oktober 2022	<i>Sharing Knowledge</i> Jasa Konsultasi Advisory Sharing Knowledge	Internal
	20 Oktober 2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas / Sektor Industri : Tekstil Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Textile	Internal
	21 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	8 November 2022	<i>Advanced Excel - High-speed Techniques for Complex Data</i>	Eksternal
	12 Desember 2022	<i>Sharing Knowledge Basic Syariah</i> Sharia Basic Sharing Knowledge	Internal
Fariza Anindya	10-11 Maret 2022	<i>Fundamentals of Trade Finance : Payment Methods, Trade Cycle and Working Capital Requirement</i>	Internal
	22 Agustus 2022	Dinamika Pembiayaan Bermasalah Dynamics of Non-Performing Financing	Internal
	29 Agustus 2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - New Normal)	Eksternal
	30 Agustus 2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Penjaminan Guarantee Basic Sharing Knowledge	Internal
	16 September 2022	<i>Sharing Knowledge Basic Syariah</i> Sharia Basic Sharing Knowledge	Internal
	27-28 September 2022	<i>Advanced Excel - High-speed Techniques for Complex Data</i>	Eksternal
	10 Oktober 2022	<i>Strengthening Professional Presence to Enhance Your Career</i>	Eksternal
	20 Oktober 2022	Product Knowledge Komoditas / Sektor Industri : Tekstil Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Textile	Internal
	21-22 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	24 November 2022	<i>Sharing Knowledge</i> Jasa Konsultasi Advisory Sharing Knowledge	Internal

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshops	Penyelenggara Organizers
Putra Buana	10 Februari 2022	<i>New Hire Orientation</i>	Internal
	10-11 Maret 2022	<i>Fundamentals of Trade Finance : Payment Methods, Trade Cycle and Working Capital Requirement</i>	Eksternal
	17 Maret 2022	Kerangka Konseptual & Praktik Terbaik Audit Syariah Conceptual Framework & Best Practices of Sharia Audit	Eksternal
	13 April 2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas / Sektor Industri : Kelapa Sawit Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Palm Oil	Internal
	20 April 2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas / Sektor Industri : Aqua Culture Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Aqua Culture	Internal
	29 Juli 2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Penjaminan Guarantee Basic Sharing Knowledge	Internal
	22 Agustus 2022	Dinamika Pembiayaan Bermasalah Dynamics of Non-Performing Financing	Internal
	29 Agustus 2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - <i>New Normal</i>)	Internal
	22 September 2022	<i>Sharing Knowledge</i> Jasa Konsultasi Advisory Sharing Knowledge	Internal
	29-30 September 2022	<i>Advanced Excel - High-speed Techniques for Complex Data</i>	Eksternal
	21-22 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	26 Oktober 2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas / Sektor Industri : Tekstil Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Textile	Internal
	24-25 November 2022	<i>Think on Your Feet</i>	Eksternal
Sri Anindianti	24-Mar-2022	<i>Design Thinking</i>	Eksternal
	29-Jul-2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Penjaminan Guarantee Basic Sharing Knowledge	Internal
	22-Aug-2022	Dinamika Pembiayaan Bermasalah Dynamics of Non-Performing Financing	Internal
	29-Aug-2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - <i>New Normal</i>)	Internal
	22-Sep-2022	<i>Sharing Knowledge</i> Jasa Konsultasi Advisory Sharing Knowledge	Internal
	11-Oct-2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Syariah	Internal
	20-Oct-2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas/ Sektor Industri : Tekstil Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Textile	Internal
	21-Oct-2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshops	Penyelenggara Organizers
Wisda Prasparani	4 Februari 2022	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Refreshment	Eksternal
	14 Maret 2022	<i>Think on Your Feet</i>	Eksternal
	25 Juli 2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Penjaminan Guarantee Basic Sharing Knowledge	Internal
	11 Oktober 2022	<i>Sharing Knowledge Basic Syariah</i> Sharia Basic Sharing Knowledge	Internal
	21-22 Oktober 2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	8-9 November 2022	<i>Advanced Excel - High-speed Techniques for Complex Data</i>	Eksternal
Yanti Nitra Sianipar	17-Mar-2022	Kerangka Konseptual & Praktik Terbaik Audit Syariah Conceptual Framework & Best Practices of Sharia Audit	Eksternal
	22-Aug-2022	Dinamika Pembiayaan Bermasalah Dynamics of Non-Performing Financing	Internal
	29-Aug-2022	Penerapan GRC Terpadu (Era - <i>New Normal</i>) Implementation of Integrated GRC (Era - New Normal)	Internal
	30-Aug-2022	<i>Sharing Knowledge Basic</i> Penjaminan Guarantee Basic Sharing Knowledge	Internal
	15-Sep-2022	<i>Strengthening Professional Presence to Enhance Your Career</i>	Eksternal
	10-Oct-2022	<i>Advanced Excel - High-speed Techniques for Complex Data</i>	Eksternal
	21-Oct-2022	<i>Directorate Team Buiding 2022</i>	Internal
	26-Oct-2022	<i>Product Knowledge</i> Komoditas / Sektor Industri : Tekstil Product Knowledge Commodity / Industrial Sector : Textile	Internal
	21-Dec-2022	<i>Shaping The Next Star</i>	Eksternal

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal
Tahun 2022

Audit Internal memberikan jasa assurance, konsultasi dan investigasi secara independen dan obyektif yang memberikan nilai tambah bagi LPEI. Ruang lingkup Audit Internal mencakup semua area kegiatan usaha LPEI dan anak usaha LPEI dalam rangka tata kelola terintegrasi untuk memastikan terjaganya kecukupan pengendalian internal, penerapan Manajemen Risiko dan proses good corporate governance (GCG) termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah dalam rangka membantu LPEI mencapai tujuan.

Implementation of Internal Audit Unit Activities in 2022

Internal Audit offers independent, objective assurance, advisory, and investigation services that benefit Indonesia Eximbank. In order to ensure adequate internal control, effective risk management, and good corporate governance (GCG) processes, including adherence to the application of sharia principles, internal audit covers all business activities of Indonesia Eximbank and its subsidiaries within the framework of integrated governance.

Ruang lingkup Audit Internal juga mencakup keandalan, efektivitas, integrasi dari proses dan sistem manajemen informasi. Audit Internal dalam melaksanakan penugasan, berpedoman pada PDD No. 0016/PDD/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Kebijakan Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI dan PDE No. 0027/PDE/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 serta PDE No. 0014/PDE/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Piagam Audit Internal.

Audit Internal juga telah melakukan rapat-rapat dengan Komite Audit sebanyak 15 kali selama tahun 2022 untuk membahas diantaranya mengenai updating progress pelaksanaan audit internal, proses hapus buku, penyempurnaan kebijakan dan manual audit internal.

Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Audit Tahunan (RAT) SKAI 2023 telah disusun dengan mempertimbangkan 5 key inputs yang meliputi Profil Risiko, Sasaran Strategis, Regulasi Eksternal, Arahman Manajemen, serta Hasil Audit Internal dan Eksternal. Selain 5 key inputs tersebut, RAT 2023 juga mempertimbangkan hasil penyusunan roadmap penerapan GRC 2022-2025, realisasi kinerja lembaga, dan pertimbangan lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada 2023 SKAI akan melakukan penugasan Audit atas: Pembiayaan segmen korporasi, Risk Management, IT Project Manajemen, Pengamanan Informasi, Penjaminan dan beberapa audit mandatory. Selain itu SKAI akan melaksanakan aktivitas audit khusus sesuai rekomendasi auditor eksternal, arahan manajemen dan hasil pemeriksaan audit internal. Untuk penugasan verifikasi dalam rangka penghapusbukuan piutang macet akan dilaksanakan guna mendukung RKAT 2024. Adapun kegiatan rutin meliputi monitoring rekomendasi hasil pemeriksaan Auditor Eksternal dan Internal; Liaison Auditor Eksternal; pengembangan SDM, sosialisasi lesson learned; reviu terhadap ketentuan internal; dan quality assurance review akan dilaksanakan secara konsisten. SKAI juga akan melengkapi pengaturan audit dengan petunjuk teknis.

The reliability, effectiveness, and integration of information management procedures and systems are also part of the scope of internal audit. PDD No. 0016/PDD/12/2022 dated 2 December 2022 concerning the Policy for Implementing Indonesia Eximbank's Internal Audit Function and PDE No. 0027/PDE/12/2022 dated 27 December 2022 and PDE No. 0014/PDE/08/2022 dated 5 August 2022 regarding the Internal Audit Charter serve as guidelines for Internal Audit as it carries out its assignments.

A total of 15 sessions between Internal Audit and the Audit Committee were held in 2022. During these meetings, topics included updating the implementation status of internal audit, the write-off procedure, and refining internal audit policies and procedures.

2023 Work Plan

SKAI's 2023 Annual Audit Plan (RAT) has been prepared by considering 5 key inputs which include Risk Profile, Strategic Objectives, External Regulations, Management Direction, and Internal and External Audit Results. In addition to these 5 key inputs, RAT 2023 also considers the results of the preparation of the roadmap for the implementation of GRC 2022-2025, the realization of Institutional performance, and other considerations. Based on the above, in 2023 SKAI will conduct Audit assignments on: Corporate segment financing, Risk Management, IT Project Management, Information Security, Guarantee and several mandatory audits. In addition, SKAI will carry out special audit activities in accordance with external auditor recommendations, management directives and internal audit results. For verification assignments in the context of writing off bad debts, it will be carried out to support the 2024 CTR. The routine activities include monitoring recommendations for the results of External and Internal Auditor examinations; Liaison External Auditor; HR development, socialization of lessons learned; review of internal provisions; and Quality Assurance Reviews will be carried out consistently. SKAI will also supplement the audit arrangements with technical instructions.

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Penerapan Fungsi Pendampingan Audit Eksternal

Pelaksanaan fungsi audit eksternal telah dilakukan terhadap pemeriksaan/monitoring yang dilakukan oleh pihak regulator yaitu:

1. Pemeriksaan tahunan oleh OJK dengan tema pemeriksaan adalah operasional unit kerja Penjaminan dalam rangka Komersial dan PEN.
2. Kegiatan pemeriksaan oleh ItJen Kemenkeu dengan tema IT Assesment.
3. Kegiatan monitoring pelaksanaan program PEN oleh BPKP.

Kegiatan pendampingan untuk auditor eksternal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Audited oleh KAP, telah diserahkan kepada Divisi Finance berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab dan Pendampingan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan LPEI No. BA.0002/IAD/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.

External Audit Assistance Function

The implementation of the external audit function has been carried out on the inspection/monitoring done by the regulator:

1. Annual inspection by OJK theme as the operation of the Guarantee unit in the context of Commercial and PEN.
2. Inspection activities by the Inspectorate General of the Ministry of Finance theme as IT Assessment.
3. Monitoring on the implementation of the PEN program by BPKP.

Assistance for external auditors in preparing the Audited Financial Statements by KAP, have been handed over to the Finance Division based on the Minutes of Handover of Responsibilities and Assistance in the Implementation of Audit for the Company's Financial Statements No. BA.0002/IAD/02/2020 dated 26 February 2020.



Prosedur Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia. Penunjukan audit eksternal dan penentuan biaya dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Penunjukan Kantor Akuntan Publik melalui mekanisme Pengadaan Jasa revidi Audit dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Untuk tahun 2022, LPEI telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan LPEI.

Public Accountant Firm Appointment Procedures

With reference to the Minister of Finance Regulation PMK No. 208/2021 on Governance Principles, Risk management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank. The appointment of an external audit and determination of fees are carried out by the Executive Director with the approval of the Board of Directors. The appointment of Public Accountant Firm is carried out through the mechanism of Services Procurement of Audit review by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

In 2022, Indonesia Eximbank has appointed Public Accountant Firm Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan to audit the Company's financial statements.

Informasi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik

Information on Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms

Nama dan Alamat Name and Address	Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Alamat : Plaza Asia Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Address : Plaza Asia 10th fl., Jl. General Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190
Periode Penugasan Assignment Period	15 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2023 15 August 2022 to 14 August 2023
Informasi Jasa Audit Dan/ Atau Non-Audit Yang Diberikan Audit And/Or Non-Audit Service Information	Melakukan audit umum Indonesia Eximbank tahun buku 2022 yang terdiri dari: - Melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian LPEI dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan bertujuan khusus dimana untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sedangkan untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi, dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga setelah Restrukturisasi dalam Perhitungan CKPN dan informasi penjelasan lainnya. Audit umum tersebut termasuk melakukan: - Reviu pembukuan Kantor Wilayah dan Penugasan Khusus; - Reviu mengenai asumsi-asumsi yang digunakan, data-data yang disiapkan dan digunakan LPEI untuk menentukan nilai discounted future cashflow dalam rangka penentuan cadang kerugian penurunan nilai (CKPN) secara individual; - Reviu atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dalam format laporan publikasi koran. - Melakukan audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

3. Melakukan Jasa pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 sebagai implementasi Standar Audit 600 dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 untuk LPEI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
4. Melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT IEB Prima Aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
5. Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Jasa Non-Audit

1. Melakukan penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Triwulan IV Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022.
2. Melakukan asurans terbatas atas laporan pinjaman industrial *Efficiency and Pollution Control* (IEPC) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Melakukan asurans terbatas atas laporan pinjaman dari the Export Import Bank of China (CHEXIM) posisi 30 September 2022.
4. Melakukan asurans terbatas atas Laporan pelaksanaan investasi pemerintah PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) oleh LPEI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
5. Melakukan reviu atas Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
6. Melakukan reviu atas Internal Control Operation dan Information Technology (IT) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
7. Melakukan reviu atas Informasi Keuangan Penugasan Khusus (PKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
8. Melakukan reviu Laporan Keuangan Divisi Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Conduct a general audit of Indonesia Eximbank for the 2021 financial year. which consists of:

1. Audit on consolidated financial statements of LPEI and subsidiary for the years ended on 31 December 2022, which was drafted based on Financial Accounting Standard in Indonesia, which consisted of consolidated statement of financial position as of December 31, 2022, consolidated profit or loss and other comprehensive income, consolidated changes of equity and consolidated statement of cash flows for the years ended on the said date, and significant accounting policy summary, prepared and presented in special purpose financial reporting framework in which the other elements of the consolidated financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards while the Allowance for Impairment Losses (CKPN) for restructured National Interest Account financing is calculated based on the Letter of the Minister of Finance of the Republic Indonesia, No.S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN and other explanation information. General audit also consist of:
 - a. Review on Regional Office and National Interest Account bookkeeping
 - b. Review of the assumptions used, data prepared and used by LPEI to determine the value of discounted future cashflows in order to determine individual allowance for impairment losses (CKPN).
 - c. Review of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022 in the format of a newspaper publication report.
2. Audit on the compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the years ended on December 31, 2022.

- Audit on Financial Statements Year 2022 as the 600 Audit Standard implementation in the context of auditing of Central Government Financial Report year 2022 for LPEI by the Audit Board of RI (BPK).
- Audit of PT IEB Prima Aset's Financial Statements for the year ended on December 31, 2022 which was prepared based on Indonesian Financial Accounting Standards.
- Audit of the Partnership Program's Financial Statements for the year ended on December 31, 2022 which were prepared based on the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (ETAP)

Non-Audit Services

- Carried out agreed procedures to the Prudential Principles Application Activity Report (KPPK) Quarter IV Year 2022 as of December 31, 2022.
- Carried out limited assurance on Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) loans report position for the years ended on December 31, 2022.
- Carried out limited assurance agreement on Borrowing Facility Report from Export Import Bank of China as of September 30, 2022
- Carried out limited assurance on Government Investment Implementation Report (PEN) to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) by LPEI for the years ended on December 31, 2022.
- Review on Main Performance Indicators Realization Report (IKU) for the years ended on December 31, 2022.
- Review on Internal Control Operation and Information Technology (IT) for the years ended on December 31, 2022.
- Reviewed the Export National Interest Account Financial Statements for the years ended on December 31, 2022.
- Reviewed the LPEI Sharia Financial Statements for the years ended on December 31, 2022.

Biaya jasa (fee) audit dan/ atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku;
audit and non/audit fees for the fiscal year

Biaya jasa audit untuk tahun buku 2022 sebesar Rp4.578.750.000 (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

The audit fee for the 2022 financial year is Rp4,578,750,000 (four billion five hundred seventy eight million seven hundred fifty thousand Rupiah)

KAP dan Nama Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir

Public Accounting Firm and Name of Public Accountant who audited the annual Financial Statements for the last 5 years

No	Tahun Year	Nama KAP Public Accounting Firm	Biaya Jasa (Juta Rp) Fee (in Million Rp)
1	2018	Purwanto, Sungkoro & Surja	3.400
2	2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	4.400
3	2020	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	3.589
4	2021	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	3.832
5	2022	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	4.579

Jasa lain yang diberikan KAP dan Akuntan Publik selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan pada tahun buku terakhir

Other services provided by Public Accounting Firm and Public Accountants other than Audit Services for Annual Financial Statements in the last financial year

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

Lingkup pekerjaan tahun 2022 selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan meliputi:

1. Melakukan penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Triwulan IV Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022.
2. Melakukan asurans terbatas atas laporan pinjaman industrial *Efficiency and Pollution Control (IEPC)* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Melakukan asurans terbatas atas laporan pinjaman dari the Export Import Bank of China (CHEXIM) posisi 30 September 2022.
4. Melakukan asurans terbatas atas Laporan pelaksanaan investasi pemerintah PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) oleh LPEI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
5. Melakukan reviu atas Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
6. Melakukan reviu atas Internal Control Operation dan Information Technology (IT) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
7. Melakukan reviu atas Informasi Keuangan Penugasan Khusus (PKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
8. Melakukan reviu Laporan Keuangan Divisi Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Ketentuan

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

The scope of work in 2022 apart from Annual Financial Report Audit Services includes:

1. Carried out agreed procedures to the Prudential Principles Application Activity Report (KPPK) Quarter IV Year 2022 as of December 31, 2022.
2. Carried out limited assurance on Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) loans report position for the years ended on December 31, 2022.
3. Carried out limited assurance agreement on Borrowing Facility Report from Export Import Bank of China as of September 30, 2022
4. Carried out limited assurance on Government Investment Implementation Report (PEN) to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) by LPEI for the years ended on December 31, 2022.
5. Review on Main Performance Indicators Realization Report (IKU) for the years ended on December 31, 2022.
6. Review on Internal Control Operation and Information Technology (IT) for the years ended on December 31, 2022.
7. Reviewed the Export National Interest Account Financial Statements for the years ended on December 31, 2022.
8. Reviewed the LPEI Sharia Financial Statements for the years ended on December 31, 2022.

The effectiveness of the external audit implementation and the Company's compliance with the provisions

Evaluation of audit services on annual financial information by AP and/or KAP is carried out at least through:

1. Compliance with audit implementation with applicable audit standards;
2. Sufficiency of time for field work;
3. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling test; and
4. Recommendations for improvement offered.

FUNGSI KEPATUHAN COMPLIANCE FUNCTION



Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, ketentuan, dan sistem, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI, termasuk pada ruang lingkup syariah, telah sesuai dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang LPEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan LPEI terhadap komitmen kepada regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan LPEI dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap kegiatan usaha dan kegiatan operasional, serta terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha LPEI.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di LPEI, Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai fungsi dan peran penting yang meliputi:

1. Membantu meningkatkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LPEI;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan berkoordinasi dengan semua tingkatan organisasi dalam memenuhi Fungsi Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan agar kebijakan, prosedur, ketentuan dan sistem, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI telah sesuai dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang LPEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan LPEI terhadap komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada regulator dan/atau otoritas lain yang berwenang; dan
5. Melaksanakan dan memastikan penerapan program APU PPT di LPEI.

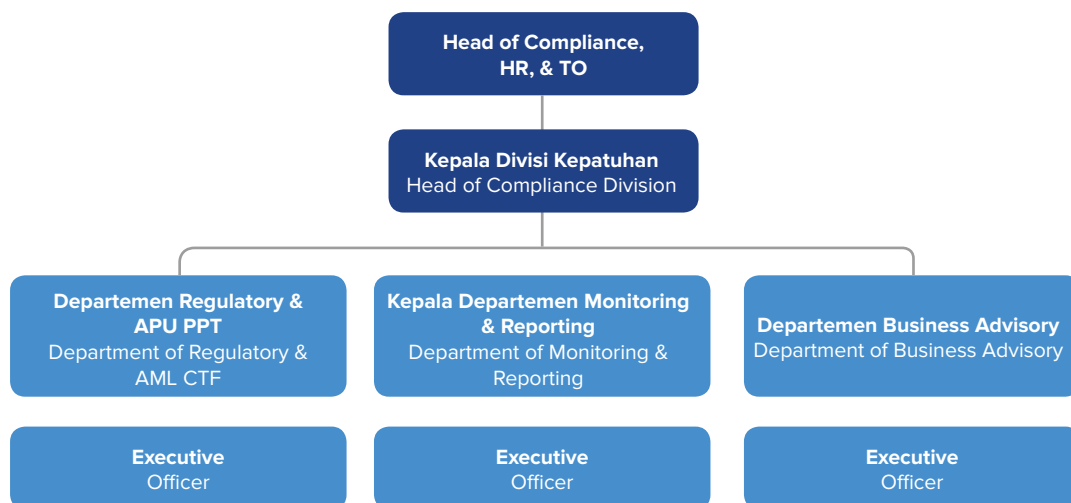
The Compliance Function is a set of actions or steps to make sure that Indonesia Eximbank's policies, practices, provisions, and systems, as well as the business activities it conducts, including those that fall under the purview of sharia, are in accordance with the Law on Indonesia Eximbank and applicable laws and regulations. It also makes sure that Indonesia Eximbank honors its commitments to regulators and/or other designated supervisory authorities.

Compliance Unit

Indonesia Eximbank Compliance Function is carried out by the Compliance Unit which is independent of business activities and operational activities, and is separate from business functions, operational functions and other supporting functions in Indonesia Eximbank's business activities.

In carrying out duties and responsibilities in Indonesia Eximbank, the Compliance Unit has important functions and roles which include:

1. Assisting in improving the Compliance Culture at all levels of Indonesia Eximbank's organization and business activities;
2. Managing Compliance Risk in coordination with all levels of the organization in fulfilling the Compliance Function with applicable laws and regulations;
3. Ensuring that policies, procedures, provisions and systems, as well as business activities carried out by Indonesia Eximbank are in compliance with the Law on Indonesia Eximbank and applicable laws;
4. Ensuring Indonesia Eximbank's compliance with commitments made by Indonesia Eximbank to regulators and/or other competent authorities; and
5. Implement and ensure the implementation of AML CFT program in Indonesia Eximbank.

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION


1. Departemen *Regulatory & APU PPT*

Melakukan pengkajian dan pengujian kepatuhan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku maupun yang akan diberlakukan untuk memastikan pemenuhannya kepada regulator serta koordinasi dalam pengelolaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam aktivitas operasional dan bisnis,

2. Departemen *Business Advisory*

Melakukan pendampingan terhadap unit kerja untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional dan bisnis dalam pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi.

3. Departemen *Monitoring & Reporting*

Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan, budaya kepatuhan dan evaluasi kepatuhan atas aktivitas operasional dan bisnis lembaga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berlandaskan pada prinsip *Good Corporate Governance*, serta melakukan penyusunan dan pelaporan atas pelaksanaan fungsi Kepatuhan.

1. Regulatory & AML/CFT Department

Assessing and testing the institution's compliance with the prevailing and future laws and regulations to ensure compliance with regulators as well as coordinating the management of the implementation of anti-money laundering and terrorism financing prevention programmes in operational and business activities.

2. Business Advisory Department

Providing assistance to work units to ensure compliance of operational and business activities in fulfilment of laws and regulations.

3. Monitoring & Reporting Department

Performing compliance risk management, compliance culture and evaluation of compliance of operational and business activities of the institution with applicable laws and regulations based on the principles of Good Corporate Governance, as well as preparing and reporting on the implementation of the Compliance function.

Profil Kepala Divisi Kepatuhan

Profile of Head of Compliance Division

Nama Name	Thio Sucy
Usia Age	54 tahun 54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	KDE No.0038/KDE/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 efektif sejak tanggal 01 Maret 2021 KDE No.0038/KDE/03/2021 dated 10 March 2021 effective from 1 March 2021
Pengalaman Kerja Work Experience	Memiliki pengalaman dan rekam jejak selama 26 tahun di industri perbankan, karier profesional beliau dimulai di Citibank Indonesia (1994-2009), mengawali karir sebagai <i>Asia Pasific Management Associate</i> di Citibank Indonesia dan meniti karir memimpin beberapa divisi dengan jabatan terakhir sebagai <i>Vice President AMLCO, Compliance</i>. Kemudian, beliau melanjutkan karier dengan bergabung bersama PT Bank Barclays Indonesia dengan menduduki jabatan sebagai <i>Senior Vice President</i>, Kepala Satuan Unit Kerja APU-PPT (2009-2010); Kepala SKAI (2010-2011). Karier beliau berlanjut dengan menjabat sebagai Audit <i>Director</i>, Kepala SKAI di PT Bank ANZ Indonesia (2011-2017), kemudian bergabung dengan PT Bank Commonwealth sebagai <i>Executive Vice President, Head of Enterprise Risk Management (2017-2018), Chief of Compliance (2018)</i> dan Direktur Kepatuhan (2018-2020), sebelum bergabung dengan LPEI dan menjabat di posisi sekarang. Has 26 years of experience and track record in the banking industry, started her professional career in Citibank Indonesia (1994-2009) serving in various positions with the last position as Vice President, Head of AML and Financial Crime Division (2005-2009) then joined PT Bank Barclays Indonesia as Senior Vice President, Head of AML and Financial Crime (2009-2010); Head of Internal Audit (2010- 2011). Next at PT Bank ANZ Indonesia as Audit Director, Head of Internal Audit (2011-2017), then joined PT Bank Commonwealth as Executive Vice President, Head of Enterprise Risk Management (2017-2018), Chief of Compliance (2018) and Director of Compliance (2018-2020), before joining Indonesia Eximbank and serving in the current position.
Riwayat Pendidikan Education	Meraih gelar Bachelor of Business dari University of Technology, Sydney - Australia pada tahun 1994. Bachelor of Business dari University of Technology, Sydney-Australia pada tahun 1994.
Sertifikasi Certification	• <i>Certificate of Competence of Bank Risk Management Level 5 from Banking Professional Certification Body (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP)</i> • <i>International Certificate in Banking Risk and Regulation from Global Association of Risk Professionals (GARP)</i> • <i>Certificate of Competence of Bank Risk Management Level 5 from Banking Professional Certification Body (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP)</i> • <i>International Certificate in Banking Risk and Regulation from Global Association of Risk Professionals (GARP)</i>

FUNGSI KEPATUHAN COMPLIANCE FUNCTION

PROGRAM KERJA FUNGSI KEPATUHAN

Program Kerja dan fokus aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2022

1. Implementasi PMK.208/2021 tentang prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, termasuk pendampingan Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola oleh Pihak Independen.
2. Penyesuaian kebijakan internal LPEI.
3. Pemenuhan komitmen dan pelaporan kepada Regulator.
4. Pelaksanaan dan evaluasi Uji Kepatuhan.
5. Pelaksanaan Uji Petik atas Uji Kepatuhan & APU PPT
6. Pengembangan dan Ketersediaan database informasi secara periodik dalam rangka efektivitas penerapan Program APU PPT.
7. Sosialisasi berkelanjutan dalam rangka penguatan budaya kepatuhan dan peningkatan *awareness* terhadap budaya dan risiko kepatuhan, termasuk penerapan Anti Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS).

Tantangan Fungsi Kepatuhan

Dalam pemenuhan target dan program kerja 2022, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Satuan Kerja Kepatuhan, antara lain:

1. Proses transformasi lembaga yang sedang berlangsung dimana akan terus dilakukan penyesuaian baik dari sisi struktur organisasi, penyempurnaan alur kerja dan sistem teknologi pendukung serta skill set pegawai yang akan terus ditingkatkan seiring dengan penyempurnaan dalam mendukung proses transformasi lembaga.
2. Peningkatan *awareness* akan pentingnya penerapan risiko dan budaya kepatuhan di setiap aktivitas proses dan bisnis di LPEI akan terus dilanjutkan secara berkesinambungan.

COMPLIANCE FUNCTION PROGRAMS

Work Program and focus of activities of the Compliance Work Unit in 2022

1. Implementation of PMK.208/2021 concerning Governance principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles for Indonesian Export Financing Institutions, including assistance with Governance Self Assessment Assessment by Independent Parties.
2. Adjustments to Indonesia Eximbank's internal policies.
3. Fulfillment of commitments and reporting to Regulators.
4. Implementation and evaluation of Compliance Test.
5. Implementation of Sample Test on Compliance Test & APU PPT.
6. Periodic development and availability of information databases in order to effectively implement the APU PPT Program.
7. Continuous socialization in order to strengthen compliance culture and increase awareness of compliance culture and risk, including implementation of Anti-Gratitude and Whistle Blowing System (WBS)

Challenges of the Compliance Function

In fulfilling the 2022 targets and work programmes, several challenges are faced by the Compliance Working Unit, including:

1. The ongoing institutional transformation process where adjustments will continue to be made both in terms of organizational structure, workflow improvements and supporting technology systems as well as employee skill sets that will continue to be improved along with improvements in supporting the institutional transformation process.
2. Increased awareness of the importance of implementing risk and compliance culture in every process and business activity at Indonesia Eximbank will continue on an ongoing basis.

Strategi Fungsi Kepatuhan

Strategi fungsi kepatuhan yang diterapkan pada tahun 2022, antara lain:

1. Berperan aktif dalam melakukan komunikasi dua arah secara berkesinambungan dan bernilai tambah baik secara internal dan eksternal dengan seluruh stakeholders.
2. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan juga sebagai bagian dari model 3 lini, dimana dalam pelaksanaannya sebagai fungsi lini 2 turut serta melakukan koordinasi pelaksanaan fungsi *assurance* lini 2.
3. Peningkatan budaya dan fungsi Kepatuhan, diantaranya melalui pengelolaan serta pelaksanaan secara berkelanjutan atas Whistleblowing System (WBS) LPEI dan Pengendalian Gratifikasi.

Rencana Fungsi Kepatuhan tahun 2022

1. Implementasi PMK 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Turut serta dalam diskusi dan penyusunan kerangka kerja *Governance, Risk, & Compliance* (GRC)
3. Evaluasi Pelaksanaan Uji Kepatuhan (pengkinian ruang lingkup, kriteria, dan monitoring pemenuhan tindak lanjut).
4. Pelaksanaan Uji Petik pelaksanaan *self Assessment* Uji Kepatuhan & APU PPT.
5. Ketersediaan *database* informasi secara periodik dalam rangka efektifitas penerapan Program APU PPT.
6. Peningkatan awareness budaya dan risiko kepatuhan.

Kegiatan dan realisasi / pencapaian kepatuhan tahun 2022

1. Menjadi *lead coordinator* dalam pelaksanaan penilaian *self-assessment* GCG LPEI tahun 2021 dimana hasil penilaian tingkat kecukupan menunjukkan perbaikan pada Nilai Komposit 1,545

Compliance Function Strategy

Implemented compliance function strategies for 2022 include:

1. Be proactive in engaging all stakeholders in ongoing, value-added two-way communication on both an internal and external level.
2. The implementation of the compliance function, which is a line 2 function in the three-line model and assists in coordinating the implementation of the line 2 assurance function.
3. Enhancing the compliance function and culture, notably through the administration and ongoing use of the Gratification Control and Indonesia Eximbank Whistleblowing Systems (WBS).

Compliance Function Plan for 2022

1. Implementation of PMK 208/2021 on Governance Principles, Risk management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank.
2. Participation in the discussion and preparation of Governance, Risk, & Compliance (GRC) frameworks.
3. Evaluation of Compliance Test Implementation (updating the scope, criteria, and monitoring the fulfilment of follow-up).
4. Examination of the implementation of the Compliance Test & AML/CFT self-assessment.
5. Periodic availability of database information in the context of effective implementation of AML/CFT Programme.
6. Increased awareness of compliance culture and risk.

Activities and compliance realization / achievement in 2022

1. Become the lead coordinator in the implementation of the Indonesia Eximbank GCG self-assessment assessment in 2021 where the results of the adequacy level assessment show an improvement

FUNGSI KEPATUHAN COMPLIANCE FUNCTION

(Predikat “Baik”) dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai 1,581, dimana nilai komposit yang lebih rendah berarti hasil yang lebih baik (*lower is better*).

2. Berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap kewajiban pelaporan LPEI kepada pihak eksternal (regulator) dan secara rutin melakukan *reminder* kepada masing-masing PIC Pelaporan baik untuk pelaporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan incidental untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan.
3. Pemenuhan Pelaporan LHKPN 100% dimana LPEI menduduki peringkat ke 4 dari 19 Lembaga secara nasional.
4. Berkontribusi secara aktif terhadap penyusunan ketentuan internal yang dilakukan melalui pemberian kajian/ opini serta keterlibatan dalam rapat/diskusi.
5. Melakukan kajian terhadap regulasi baru yang berdampak kepada LPEI dan pemberian opini dan masukan atas rancangan regulasi eksternal, antara lain Pengawasan dan Tingkat Kesehatan LPEI, Perintah Tertulis, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum LPEI, Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Laporan Bulanan.
6. Melakukan fungsi *advisory* dengan memberikan opini atau rekomendasi terkait produk/ jasa dan proses tentang kesesuaian penerapannya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
7. Pelaksanaan Uji Kepatuhan dan KYC atas pengajuan baru, perpanjangan, dan perubahan *Term and Condition* serta restrukturisasi.
8. Melaksanakan Uji Petik atas pelaksanaan Uji Kepatuhan & APU PPT yang dilakukan oleh Kantor Wilayah untuk periode Triwulan I s.d. III 2022.
9. Berperan aktif melakukan komunikasi berkesinambungan, pendampingan, dan menjembatani komunikasi antara Unit Kerja di LPEI dengan OJK.

in the Composite Score of 1.545 (Predicate “Good”) compared to the previous year with a score of 1.581, where a lower composite score means better results (*lower is better*).

2. Continuously monitoring Indonesia Eximbank’s reporting obligations to external parties (regulators) and routinely reminding each Reporting PIC for monthly, quarterly, semi-annual, annual, and incidental reporting to ensure timeliness of reporting.
3. Compliance with LHKPN Reporting is 100% where Indonesia Eximbank is ranked 4th out of 19 institutions nationally.
4. Actively contributing to the preparation of internal provisions carried out through the provision of studies/ opinions and involvement in meetings/ discussions.
5. Reviewed new regulations affecting Indonesia Eximbank and provided opinions and inputs on draft external regulations, including Supervision and Health Level of Indonesia Eximbank, Written Orders, Minimum Capital Adequacy Obligation of Indonesia Eximbank, Improvement of Financial Literacy and Financial Inclusion for Consumers and Public, Use of Public Accountant Services and Public Accountant Office in Financial Services Activities, and Monthly Reports.
6. Perform advisory functions by providing opinions or recommendations related to products/services and processes on the suitability of their implementation with the prevailing laws and regulations.
7. Implementation of Compliance and KYC Tests on new applications, extensions, and changes to Term and Condition and restructuring.
8. Carry out a Petition Test on the implementation of Compliance & AML/CFT Test conducted by the Regional Office for the period of Quarter I to III 2022.
9. Play an active role in continuous communication, mentoring, and bridging communication between Work Units in Indonesia Eximbank and OJK.

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

10. Pengkinian ketentuan internal Divisi Kepatuhan dimana telah selesai dilakukan terhadap ketentuan untuk LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi. 11. Pemenuhan target pengkinian data nasabah tahun 2022 dan penyampaian rencana pengkinian data nasabah tahun 2023 kepada OJK. 12. Pemenuhan kewajiban pelaporan yang berhubungan dengan penerapan APU PPT seperti SIPESAT, DTTOT, PSPM, SIPENDAR, dan LTKM/STR. 13. Pemenuhan <i>screening</i> terhadap Nasabah baru dan Nasabah eksisting dan pemenuhan Questionnaire AML terhadap permintaan dari Bank Koresponden untuk menilai kebijakan dan praktik penerapan APU PPT di LPEI. 14. Pengembangan dan Ketersediaan database informasi secara periodik dalam rangka efektivitas penerapan Program APU PPT, termasuk inisiasi pengembangan sistem informasi manajemen APU PPT yang terintegrasi. 15. Peningkatan budaya dan fungsi Kepatuhan juga dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Kepatuhan, diantaranya melalui pengelolaan serta pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan atas Whistleblowing System (WBS) LPEI dan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pegawai, pelatihan pada New Hire Orientation (NHO) dan Relationship Manager Development Program (RMDP).	10. Updating the internal provisions of the Compliance Division which has been completed on the provisions for LHKPN and Gratification Control. 11. Fulfilment of the 2022 customer data update target and submission of the 2023 customer data update plan to OJK. 12. Fulfilment of reporting obligations related to AML/CFT implementation such as SIPESAT, DTTOT, PSPM, SIPENDAR, and LTKM/STR. 13. Fulfilment of screening of new and existing customers and fulfilment of AML Questionnaire against requests from Correspondent Banks to assess policies and practices of AML/CFT implementation at Indonesia Eximbank. 14. Development and periodic availability of database information in order to effectively implement AML/CFT Programme, including initiation of the development of an integrated AML/CFT management information system. 15. Improvement of Compliance culture and function is also carried out directly by the Compliance Working Unit, including through the management and implementation of continuous dissemination of the Indonesia Eximbank Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control to all employees, training on New Hire Orientation (NHO) and Relationship Manager Development Program (RMDP).

Rencana Fungsi Kepatuhan tahun 2023

1. Implementasi PMK No.208/PMK.06/2021 tentang prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dengan fokus pada penilaian tata kelola LPEI.
2. Implementasi POJK No.9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI dan SEOJK No.15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.

Compliance Function Plan for 2023

1. Implementation of PMK No.208/PMK.06/2021 on the principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank, with a focus on assessing Indonesia Eximbank governance.
2. Implementation of POJK No.9/POJK.05/2022 on Indonesia Eximbank Supervision and SEOJK No.15/SEOJK.05/2022 on Indonesia Eximbank Health Level Assessment.

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

3. Implementasi dan penerapan <i>Governance, Risk, & Compliance</i> (GRC), yang berlaku. 4. Pemenuhan komitmen dan pelaporan kepada Regulator. 5. Pelaksanaan dan evaluasi Uji Kepatuhan secara berkelanjutan. 6. Pelaksanaan Uji Petik terhadap aktivitas usaha LPEI terkait regulasi dan perundang-undangan. 7. Pelaksanaan <i>advisory</i> dan kajian terhadap ketentuan internal dan inisiatif bisnis/produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Pengembangan sistem informasi manajemen untuk memastikan kelengkapan profil nasabah yang komprehensif guna memahami profil nasabah. 9. Sosialisasi berkelanjutan dalam rangka penguatan Budaya Kepatuhan dan Peningkatan <i>awareness</i> terhadap budaya dan risiko kepatuhan. 10. Pelaksanaan evaluasi/ penilaian atas hasil pelaksanaan evaluasi sosialisasi Tata Kelola yang Baik sebagai peningkatan <i>awareness</i>.	3. Implementation and application of Governance, Risk, & Compliance (GRC), as applicable. 4. Fulfilment of commitments and reporting to Regulators. 5. Implementation and evaluation of Compliance Test on an ongoing basis. 6. Examination of Indonesia Eximbank's business activities related to regulations and legislation. 7. Implementation of advisory and review of internal provisions and business/product initiatives in accordance with laws and regulations. 8. Development of management information system to ensure the completeness of comprehensive customer profile to understand customer profile. 9. Continuous dissemination to strengthen Compliance Culture and increase awareness of compliance culture and risk. 10. Implementation of evaluation/assessment on the results of the implementation of Good Governance dissemination evaluation as an increase in awareness.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT



Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LPEI.

Fungsi Manajemen Risiko secara umum adalah mengelola risiko secara kelembagaan (*enterprise risk management*) dan mengelola risiko secara terintegrasi (*integrated risk management*) antara unit kerja di seluruh jaringan kantor LPEI, termasuk seluruh pejabat dan pegawai LPEI. Pengelolaan risiko baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Fungsi manajemen risiko harus independent terhadap fungsi bisnis dan operasional serta terhadap fungsi pengendalian internal.

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko diantaranya adalah

1. Mengidentifikasi risiko termasuk risiko yang melekat pada kegiatan usaha LPEI
2. Menyusun metode pengukuran risiko
3. Memantau pelaksanaan strategi Manajemen risiko yang telah disusun oleh Dewan Direktur
4. Memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal (stress testing) dan pengujian dengan menggunakan data historis;
5. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
6. Mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
7. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, jika LPEI menggunakan model untuk keperluan internal;
8. Memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan

Risk management is a set of procedures and methodologies used to identify, measure, control, and monitor on risks associated with all Indonesia Eximbank business operations.

Managing risks institutionally (enterprise risk management) and managing risks in an integrative manner (integrated risk management) amongst work units in the entire Indonesia Eximbank office network, including all Indonesia Eximbank officials and employees, is the general role of risk management. Both the normal implementation of business activities and sharia-based principles are considered in the context of risk management. The internal control function, the business and operational functions, and the risk management function must be independent entities.

Authority and Responsibility

The Authorities and Responsibilities of the Risk Management Unit are as follows

1. Identifies risks including those inherent in Indonesia Eximbank 's business activities.
2. Develops risk measurement methods.
3. Monitors the implementation of risk management strategies that have been prepared by the Board of Directors.
4. Monitors the overall risk position, per type of risk, and per type of functional activity, as well as testing using scenarios/assumptions of abnormal conditions (stress testing) and testing using historical data;
5. Periodically reviews the Risk Management process;
6. Reviews the proposed development or expansion of business activities;
7. Evaluates the accuracy of the model and the validity of the data used to measure Risk, if Indonesia Eximbank uses the model for internal purposes;
8. Offers recommendations to the business and operational functions and/or to the Risk Management committee, in accordance with its authority; and

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Eksekutif secara berkala.

9. Prepares and submits risk profile reports to the Executive Director on a regular basis.

Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2022
2022 Risk Management Function Organizational Structure



Fungsi Manajemen Risiko dipimpin oleh Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit dimana Direktur Pelaksana bidang manajemen risiko membawahi Divisi Analisa Risiko Kredit I, Divisi Analisa Risiko Kredit II, Divisi Kebijakan & Prosedur, Divisi Pengembangan Produk, Divisi Manajemen Risiko & Portofolio, serta Pemegang Limit Individu. Masing-masing Divisi memiliki tugas dan tanggung jawab membantu upaya pengelolaan risiko di LPEI secara efektif dan komprehensif.

Divisi Analisa risiko Kredit I dan Divisi Analisa Risiko Kredit II merupakan fungsi unit risiko yang melakukan review dan analisa pengendalian risiko atas portofolio aktivitas bisnis LPEI (pembiayaan, penjaminan, dan asuransi), melakukan pemantauan aktivitas bisnis guna menciptakan pertumbuhan asset yang berkualitas, dan melaksanakan upaya penanganan pembiayaan bermasalah secara optimal. Unit risiko kredit merupakan optimalisasi peran unit risiko dalam implementasi four eyes principle.

Divisi Kebijakan dan Prosedur merupakan unit kerja yang melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur secara berkala sesuai dengan perkembangan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.

The Managing Director of Risk Management & Credit is in charge of the Risk Management function, which includes Individual Limit Holders, Policy & Procedure Division, Product Development Division, Credit Risk Analysis Division I, Credit Risk Analysis Division II, and Risk & Portfolio Management Division. Each Division has obligations and responsibilities in supporting Indonesia Eximbank's risk management initiatives in an effective and comprehensive manner.

Credit Risk Analysis Division I and Credit Risk Analysis Division II are risk unit functions that review and analyse risk control over Indonesia Eximbank's business activity portfolio (financing, guarantee, and insurance), monitor business activities to create quality asset growth, and carry out efforts to handle problematic financing optimally. The credit risk unit is an optimization of the role of the risk unit in the implementation of the four eyes principle.

The Policy and Procedure Division is a work unit that evaluates and updates policies and procedures periodically in accordance with the development of applicable laws and regulations.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Divisi Pengembangan Produk merupakan unit kerja yang melakukan rancangan peraturan terkait produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan LPEI serta melakukan pengembangan/penyempurnaan produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan baru.

Divisi Manajemen Risiko merupakan satuan kerja manajemen risiko yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif di LPEI.

Aktivitas Manajemen Risiko tahun 2022

Pada tahun 2022 aktivitas Manajemen Risiko berfokus kepada:

1. Pengembangan *roadmap* implementasi awal Governance Risk & Compliance (GRC) seperti:
 - a. Framework Manajemen Risiko Operasional
 - b. Pendefinisian kembali Risk Appetite Statement Lembaga
2. Pengembangan metode dan tools manajemen risiko seperti:
 - a. Kaji ulang penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI
 - b. Pengkinian Portfolio Guideline
 - c. New Credit Spreadsheet
 - d. Early Warning Detection Tool
3. Pengkinian dan penyesuaian kebijakan dan produk dengan ketentuan terkini, termasuk Kebijakan Manajemen Risiko.
4. Penajaman mandat Lembaga dalam aktivitas bisnis.

Tantangan Manajemen Risiko di tahun 2022

Pada tahun 2022 setidaknya ada tiga tantangan yang menjadi yakni Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti dunia masih akan bergejolak seiring perang Rusia dan Ukraina serta perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Di samping terdapat kondisi Tiongkok yang menerapkan lockdown setidaknya enam bulan ke depan, tingginya harga energi, dan gangguan rantai pasok.

Product Development Division is a work unit that prepares regulations drafts related to products/business programs and activities of Indonesia Eximbank as well as develops/refines new products/business programs and activities.

Risk Management Division is a risk management work unit established to support the implementation of effective risk management processes and systems at Indonesia Eximbank.

Risk Management Activities in 2022

In 2022, Risk Management activities was focused on:

1. Development of an initial Governance Risk & Compliance (GRC) implementation roadmap such as:
 - a. Operational Risk Management Framework
 - b. Redefining the Institution's Risk Appetite Statement.
2. Development of risk management methods and tools such as:
 - a. Review of Indonesia Eximbank Risk Profile and Health Level assessment
 - b. Portfolio Guideline update
 - c. New Credit Spreadsheet
 - d. Early Warning Detection Tool
3. Updating and aligning policies and products with the latest regulations, including the Risk Management Policy.
4. Refinement of the Institute's mandate in business activities.

Risk Management Challenges in 2022

There were at least three challenges in 2022, including liquidity risk brought on by the fact that the world will continue to be unstable, the trade war between the US and China and the war between Russia and Ukraine. In addition, there are issues in China that will cause supply chain disruptions, high energy prices, and lockdowns for at least the next six months.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Dengan meningkatnya risiko global, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih akan penuh tantangan di tahun depan dan sejumlah negara dihadapkan pada risiko resesi AS dan Eropa.

Risiko makroekonomi seperti kenaikan harga energi, serta kenaikan suku bunga The Fed sangat tinggi akan berimplikasi pada penguatan Dolar yang menekan sejumlah mata uang di berbagai negara termasuk Rupiah.

Lebih lanjut, tantangan Risiko operasional disebabkan oleh cepatnya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti digitalisasi ekonomi dan keuangan, sistem pembayaran dan proses kerja. Ini terutama terjadi selama pandemi Covid-19 karena diterapkan work from home.

Selain itu, terdapat potensi Risiko Strategik yang berkaitan dengan kondisi dalam negeri sehubungan proses politik yang akan berlangsung di Indonesia, serta pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terdapat juga beberapa tantangan yang menjadi perhatian di LPEI seperti *cyber security risk*, perubahan regulasi, dan tuntutan hukum.

Kebijakan dan Implementasi tahun 2022

Kebijakan penerapan manajemen risiko LPEI disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LPEI. Dasar kebijakan penerapan manajemen risiko LPEI adalah:

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana tersebut mencakup pemenuhan kecukupan modal

Global economic development is anticipated to continue difficult next year as a result of increased international dangers, and several nations face the possibility of a US and European recession.

Macroeconomic risks such as rising energy prices, as well as the Fed's very high interest rate hike will have implications for the strengthening of the Dollar which pressures several currencies in various countries including the Rupiah.

Furthermore, operational risk challenges are caused by the rapid digitalization in various aspects of life such as economic and financial digitalization, payment systems and work processes. This is especially the case during the Covid-19 pandemic as work from home is implemented.

In addition, there are potential Strategic Risks related to domestic conditions in relation to the political process that will take place in Indonesia, as well as the relocation of the national capital to the Capital City of the Archipelago (IKN).

There are also several challenges that are of concern at Indonesia Eximbank such as cyber security risk, regulatory changes, and lawsuits.

Policy and Implementation in 2022

The size and complexity of Indonesia Eximbank's business operations, as well as the business objectives and policies, are taken into account while adjusting the risk management implementation policy. Indonesia Eximbank's risk management implementation policy is founded on:

1. Article 17 of Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank
The article explains that in carrying out its duties, Indonesia Eximbank is required to implement the principles of good corporate governance, the principles of risk management, and the principles of know your customer. The application of risk management principles as mentioned above includes

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.016/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.

Kebijakan penerapan manajemen risiko di LPEI setidaknya mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.05/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan LPEI.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05/2022 tanggal 07 September 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Surat Edaran ini mengatur penilaian tingkat Kesehatan LPEI.
5. Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDD tersebut berisi ketentuan manajemen risiko secara umum mencakup kerangka penerapan Manajemen Risiko.
6. Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No. 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional Enterprise Risk Management Manual Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDE tersebut berisi pedoman teknis pelaksanaan manajemen risiko.

Implementasi manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari seluruh insan LPEI sesuai dengan fungsi dan wewenang masing – masing.

the fulfillment of minimum capital adequacy, active supervision, and compliance with market discipline against inherent risks.

2. Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 208/PMK.016/2021 dated 30 December 2021 regarding Indonesia Eximbank Governance, Risk Management and Know-Your-Customer Principles.

Risk management implementation policies at Indonesia Eximbank at least include:

- a. Active oversight of the Board of Directors and the Executive Director.
- b. Adequacy of policies, procedures and determination of risk limits.
- c. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems.
- d. Comprehensive internal control system.
3. Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.05/2022 dated 23 June 2022 on the Supervision of Indonesia Eximbank.
4. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 15/SEOJK.05/2022 dated 07 September 2022 concerning Health Level Assessment of Indonesian Export Financing Institutions. This Circular Letter regulates the assessment of the Health level of Indonesia Eximbank.
5. Board of Director Regulation No. 0017/PDD/12/2022 dated 02 December 2022 concerning Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Export Financing Agency. The PDD contains general risk management provisions including the framework for implementing Risk Management.
6. Executive Director Regulation (PDE) No. 0032/PDE/09/2018 concerning the Enterprise Risk Management Operational Manual of the Indonesia Eximbank. The PDE contains technical guidelines for the implementation of risk management.

The implementation of risk management is the responsibility of all Indonesia Eximbank personnel in accordance with their respective functions and authorities.

MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

Manajemen juga berperan secara aktif untuk memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing – masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Dasar Hukum

Berikut dasar kebijakan dan peraturan yang dijadikan acuan dalam penerapan manajemen risiko

1. Undang – undang Nomor 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.06/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05/2022 tanggal 07 September 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
6. Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Sistem Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen LPEI cukup handal sehingga dapat menghasilkan pelaporan risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Kelengkapan dan integritas data dan informasi dalam laporan Sistem Informasi Manajemen

Management also plays an active role in ensuring an adequate organisational structure, establishing clear duties and responsibilities in each unit, and ensuring the adequacy of the quantity and quality of Human Resources to support the effective implementation of Risk Management.

Legal References

The following are the basic policies and regulatory applied as references in implementing risk management:

1. Law No. 2 of 2009 dated 12 January 2009 on the Indonesia Eximbank,
2. Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 dated 29 May 2020 concerning Guidance and Supervision of Indonesian Export Financing Institutions,
3. Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 dated 30 December 2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank,
4. Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.05/2022 dated 23 June 2022 concerning Supervision of Indonesian Export Financing Institutions,
5. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 15/SEOJK.05/2022 dated 07 September 2022 concerning Assessment of the Health Level of the Indonesia Eximbank,
6. Board of Director Regulation No. 0017/PDD/12/2022 dated 02 December 2022 concerning Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Export Financing Corporation.

Risk Management System

The management information system at Indonesia Eximbank is reliable enough to generate comprehensive and integrated risk reporting. The risk management information system report's completeness and integrity

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Risiko juga cukup memadai dalam menyusun laporan sistem informasi manajemen risiko yang dapat diukur baik kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat dipahami oleh Dewan Direktur, Dewan Pengawas syariah, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan juga Regulator. Laporan sistem informasi manajemen risiko LPEI berupa Laporan Portfolio Quality Report yang dilakukan secara bulanan, serta Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan secara triwulan.

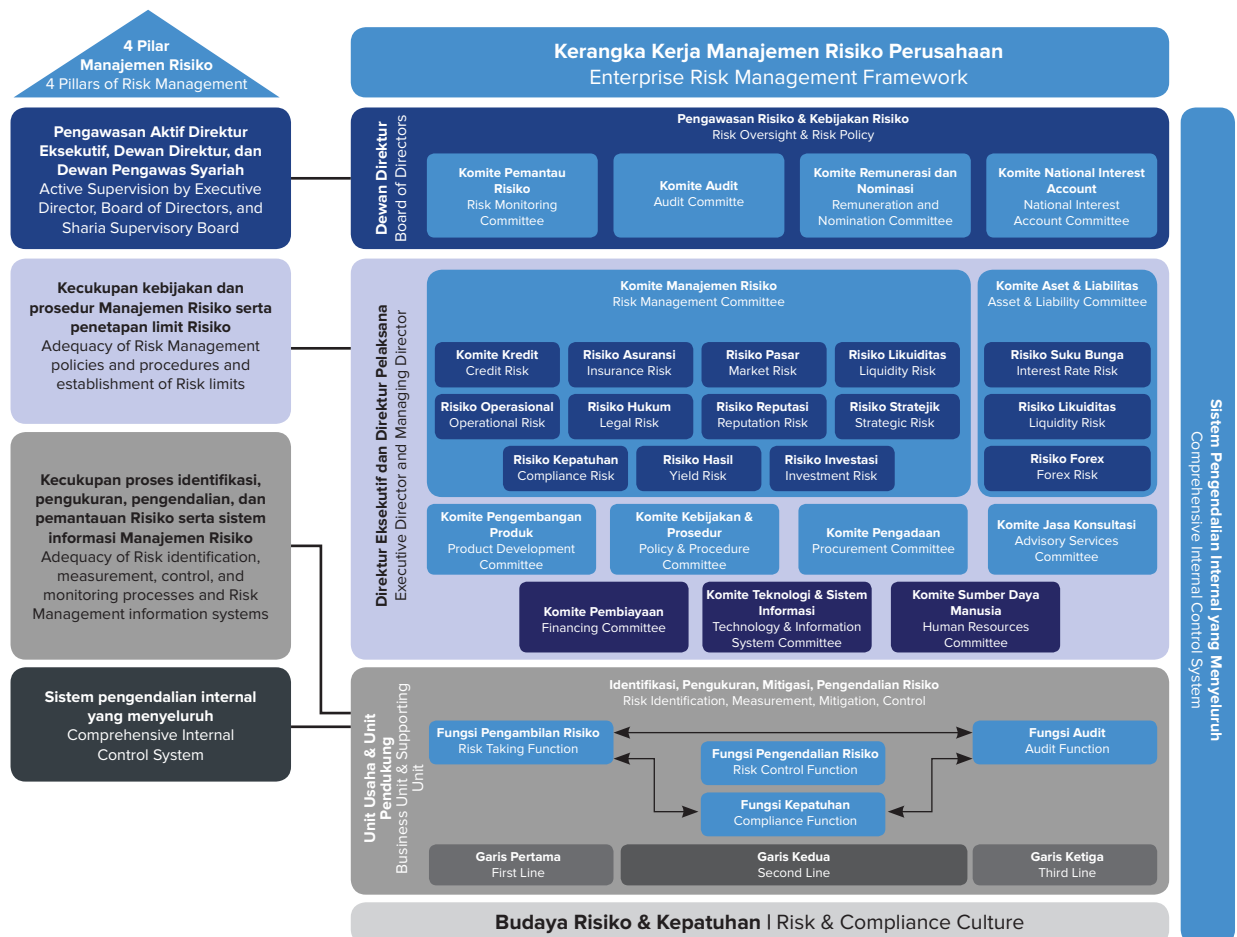
Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Penerapan serta pemahaman tentang Manajemen Risiko LPEI secara enterprise risk (ERM) dipetakan dalam sebuah kerangka kerja sehingga dapat memperkuat kaitan terhadap internalisasi risk culture di LPEI. Adapun ERM framework yang telah disusun sebagai berikut:

of the data and information are also sufficient for developing qualitatively and quantitatively measurable risk management information system reports that can be understood by the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, the Executive Director, the Managing Director, as well as Regulators. The monthly Portfolio Quality Report and the quarterly Risk Profile and Health Level Reports are the two types of reports produced by Indonesia Eximbank's risk management information system.

Risk Management Framework

Implementation on Indonesia Eximbank Risk Management in terms of enterprise risk (ERM) is mapped in a framework to strengthen the link to risk culture internalization at Indonesia Eximbank. The ERM framework is as follows:



MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Kerangka ERM dibagi menjadi 4 (empat) pilar, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pilar 1:

Pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah berfungsi *oversight board* dalam membangun *risk governance* di LPEI.

Pengawasan aktif Direktur Eksekutif dilakukan paling kurang meliputi:

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan;
- b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif;
- c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- e. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- f. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - i. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - ii. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - iii. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

Adapun tataran pelaksanaan pengawasan aktif telah dilakukan melalui berbagai laporan dan rapat rutin sebagai berikut:

ERM framework is divided into 4 (four) pillars, with the following explanation:

Pillar 1:

Active supervision by the Executive Director, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board

Active supervision by the Executive Director, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board serves as an oversight board in building risk governance at Indonesia Eximbank.

Active supervision of the Executive Director includes at least:

- a. be accountable on the implementation of Enterprise Risk Management policies, and risk exposures taken by Indonesia Eximbank as a whole;
- b. evaluating and deciding on transactions and risk limits that require Executive Director approval;
- c. developing Risk Management culture at all levels of the organisation;
- d. ensuring the improvement of competence of human resources related to Risk Management;
- e. ensuring that the Risk Management function has operated independently; and
- f. conducting periodic reviews to ensure:
 - i. the accuracy of the Risk assessment methodology;
 - ii. adequacy of Risk Management information system implementation; and
 - iii. the accuracy of Risk Management policies and procedures as well as the establishment of Risk limits.

The implementation of active supervision was carried out through various reports and regular meetings as follows:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

- Rapat bulanan terkait eksposur risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas
- Penyampaian profil risiko secara triwulan
- Penyampaian penilaian tingkat Kesehatan risiko secara triwulan
- Pengungkapan manajemen risiko secara triwulan
- Rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan aktif Dewan Direktur paling sedikit meliputi:

- Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif,
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Enterprise
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direktur Eksekutif yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Direktur.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Direktur membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite National Interest Account.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pengawasan, Dewan Direktur secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali melakukan Rapat Dewan Direktur. Pengawasan Dewan Dllrektur di bidang manajemen risiko dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Tugas Komite Pemantau Risiko adalah melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan ekspor nasional yang diberikan oleh LPEI.

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling sedikit meliputi:

- Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dan
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif

- Monthly meetings related to credit risk exposure, market risk, and liquidity risk
- Submission of risk profiles on a quarterly basis
- Submission of risk health assessment on a quarterly basis
- Disclosure of risk management on a quarterly basis
- Periodic meetings with the Sharia Supervisory Board

Active supervision of the Board of Directors includes at least:

- Developing written and comprehensive Risk Management policies and strategies,
- Evaluating the accountability of the Executive Director for the implementation of Enterprise Risk Management policies
- Evaluating and deciding on requests from Executive Directors relating to transactions and risk limits that require Board approval.

To support the effective implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors established the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and National Interest Account Committee.

To carry out its duties in supervision, the Board of Directors periodically conducts Board of Director Meetings every 1 (one) month. Supervision of the Board of Directors in risk management is assisted by the Risk Monitoring Committee. The duties of the Risk Monitoring Committee are to periodically assess and provide recommendations on business risks in relation to national export financing provided by Indonesia Eximbank.

Active supervision of the Sharia Supervisory Board at least includes:

- Evaluating the Enterprise Risk Management policy related to the fulfilment of Sharia Principles and
- Evaluating the accountability of the Executive

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Pilar 2:

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang terpadu dan sistematis dituangkan dalam beberapa kebijakan, prosedur dan limit risiko. Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil LPEI.

Untuk mengevaluasi kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, Direktur Eksekutif membentuk 9 komite diantaranya Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite Assets & Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Personalia.

Pilar 3:

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

LPEI melakukan proses Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan terhadap faktor risiko yang melekat pada setiap aktivitas bisnis yang dilakukan.

Pilar 4:

Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh.

LPEI menerapkan strategi model 3 (tiga) lini (*Three Line Model*) dalam sistem pengendalian internal yaitu:

- Lini pertama (1st line), merupakan unit kerja yang berada pada setiap Risk Taking Function.
- Lini kedua (2nd line), merupakan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang terdiri atas:

Director for the implementation of Enterprise Risk Management policies related to the fulfilment of sharia principles.

Pillar 2:

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and establishment of Risk limits.

The principles of integrated and systematic risk management are outlined in several policies, procedures and risk limits. Risk Management procedures and the establishment of risk limits must be adjusted to the level of risk that will be taken by Indonesia Eximbank.

To evaluate the adequacy of risk management policies and procedures and the establishment of risk limits, the Executive Director established 9 committees including the Risk Management Committee, Product Development Committee, Policy and Guidelines Committee, Assets & Liabilities Management Committee, Information System Technology Committee, Procurement Committee, Advisory Services Committee, Financing Committee, and Personnel Committee.

Pillar 3:

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Control and Monitoring Process and Risk Management Information System.

Indonesia Eximbank conducts the process of identification, measurement, control, and monitoring of the risk factors inherent in each business activity.

Pillar 4:

Comprehensive Internal Control System.

Indonesia Eximbank implements the Three Line Model strategy in the internal control system:

- 1st line, which is a working unit located in each Risk Taking Function.
- 2nd line, which is the risk management and compliance function consisting of:

- i. Fungsi Manajemen Risiko yang fokus pada pengembangan metodologi terkait manajemen risiko. Termasuk di dalamnya Fungsi Analisa Risiko Bisnis sebagai *four eye principles* pada level transaksi; dan
- ii. Fungsi Kepatuhan
- c. Lini ketiga (3rd line), merupakan Audit Function sebagai lini terakhir yang berfungsi untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja termasuk berfungsi untuk melakukan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI.

- i. Risk Management Function that focuses on developing methodologies related to risk management. This includes the Business Risk Analysis Function as the four eye principles at the transaction level; and
- ii. Compliance Function
- c. The 3rd line is the Audit Function as the last line with the functions to audit the implementation of activities in all work units, including to independently assess the effectiveness of the implementation of Risk Management and internal control in Indonesia Eximbank.

Risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi tahun 2022

Risks faced and mitigation measures in 2022

RISIKO KREDIT

CREDIT RISK

Risiko kredit adalah risiko ketidakmampuan nasabah atau *counterparties* melakukan pembayaran kembali kepada LPEI.

Credit risk is the possibility that clients or counterparties won't be able to pay Indonesia Eximbank back.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit, mitigasi risiko yang dikembangkan dan dilaksanakan LPEI antara lain:

Risk mitigation strategies created and put into place by Indonesia Eximbank include the following:

- Pengelolaan kredit dilakukan secara 3 Pilar independen (bisnis unit, *credit risk reviewer*, dan *credit operation*)
- Pre-Credit Process/ Pipeline Management
 - Pemilihan target pasar telah melalui manajemen *pipeline* dengan menggunakan *pre-screening tools* melalui Portfolio/ Sector *Guideline* dan *Industry Financing Reference* (IFR).
- Credit Process/ Inisiasi
 - Proses analisis kredit dilakukan secara 4-eyes principle dengan menggunakan *Credit Rating* dan *Scoring System* untuk melakukan pengukuran terhadap risiko kredit. Potensi risiko secara individual dapat diindikasikan melalui hasil peringkat (*rating*) yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur kinerja keuangan debitur serta sebagai peringatan dini (*early warning*) terhadap penurunan kinerja keuangan debitur. Selain itu, proses Keputusan Kredit

- Three independent pillars manage the credit (business unit, credit risk reviewer, and credit operation).
- Pre-Credit Process/ Pipeline Management
- The selection of target markets has gone through pipeline management by using pre-screening tools through Portfolio/ Sector Guideline and Industry Financing Reference (IFR).
- Credit Process/ Initiation
 - The credit analysis process is conducted based on the 4-eyes principle using Credit Rating and Scoring System to measure credit risk. Individual potential risk can be indicated through rating results used as a tool in measuring the debtor's financial performance as well as an early warning of a decline in the debtor's financial performance. In addition, the Credit Decision process is carried out in the Credit Committee involving business and risk functions which are carried

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

dilakukan dalam Komite kredit yang melibatkan fungsi bisnis dan risiko yang dilakukan secara independen oleh masing-masing anggota komite

- *On Disbursement*
Keputusan Komite dilaksanakan melalui verifikasi dan implementasi / pencairan pembiayaan oleh Unit Kerja yang independent dari bisnis dan risiko (*Credit Operation*) serta pengelolaan dokumen terpisah oleh Credit Admin.
- *Post Disbursement*
Setelah pencairan, monitoring portofolio pembiayaan melalui Laporan Portfolio Quality Report (PQR) bulanan oleh Divisi RPM, melakukan EWD (Early Warning Detection) untuk debitur yang berpotensi mengalami pemburukan serta monitoring PDO secara intensif serta pemutakhiran MIS dengan update data core dan dashboard. Monitoring juga dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan rating menjadi *non-investment grade*, agar tidak mengarah menjadi Non-Performing Loan.
- *Credit Recovery*
Untuk penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh unit terpisah dan diputuskan dalam Komite Restrukturisasi, diperkuat dengan terbitnya PMK 144 terkait hapus buku pada tahun 2021.
Dengan proses yang dilakukan sejak pemilihan calon debitur hingga penyelesaian kredit bermasalah, KPMR dalam risiko kredit dinilai memadai
- Secara operasional peraturan / kebijakan terkait kredit telah dilengkapi dengan ketentuan internal tentang Kebijakan Pembiayaan, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Pembiayaan, Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan. Kebijakan, Manual dan Petunjuk Teknis merupakan penyempurnaan dari Kebijakan dan Manual sebelumnya sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas portfolio LPEI.
- Sebagai *tools* tambahan dalam memitigasi risiko kredit ditetapkan Batas Minimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang merupakan batas maksimum pembiayaan untuk setiap individu dan grup, di samping itu BMPP digunakan sebagai salah satu upaya mengelola risiko konsentrasi pembiayaan.

out independently by each committee member.

- *On Disbursement*
The Committee's decision is implemented through verification and implementation / disbursement of financing by a Work Unit that is independent of business and risk (*Credit Operation*) and separate document management by Credit Admin.
- *Post Disbursement*
After disbursement, monitoring of the financing portfolio through monthly Portfolio Quality Report (PQR) by the RPM Division, conducting EWD (Early Warning Detection) for debtors with potential deterioration and intensive PDO monitoring as well as updating the MIS with core and dashboard data updates. Monitoring is also carried out on debtors who have experienced a rating downgrade to non-investment grade, so as not to lead to Non-Performing Loan.
- *Credit Recovery*
The handling of non-performing loans is carried out by a separate unit and decided in the Restructuring Committee, strengthened by the issuance of PMK 144 regarding write-offs in 2021.
With the process carried out from the selection of prospective debtors to the resolution of non-performing loans, KPMR in credit risk is considered adequate.
- Operationally, credit-related regulations / policies have been completed with internal provisions on Financing Policy, Executive Director Regulation on Financing Manual, Technical Guidelines for Financing Operations, and Financing Committee. The Policy, Manual and Technical Guidelines are improvements from previous Policies and Manuals as one of the efforts to continuously improve the quality of Indonesia Eximbank 's portfolio.
- As an additional tool in mitigating credit risk, the Minimum Financing Limit (BMPP) is set, which is the maximum financing limit for each individual and group, in addition BMPP is used as an effort to manage financing concentration risk.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

- LPEI juga memiliki batas limit inhouse sebagai salah satu strategi pengendalian risiko konsentrasi dan menjaga tingkat konsentrasi pembiayaan yang selama ini telah terdiversifikasi cukup baik. Perhitungan inhouse limit merupakan gabungan pembiayaan, retensi sendiri penjaminan, dan retensi sendiri asuransi. Pemberian fasilitas pembiayaan dilarang melebihi inhouse limit (pelanggaran), namun pelampauan inhouse limit akibat perubahan kurs dan/atau perubahan modal LPEI akan dilakukan penurunan outstanding secara bertahap.
- Terkait pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), LPEI telah mengimplementasikan PSAK 71 tentang Instrument Keuangan yang merupakan adopsi dari IFRS 9 yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrument keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. LPEI secara berkala melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui laporan laba rugi (*fair value through profit and loss*).
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif. Transaksi derivatif yang dilakukan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*). Bentuk transaksi derivatif yang dilakukan LPEI umumnya dalam bentuk transaksi spot, forward, futures, dan swap. Dalam melakukan transaksi derivatif, LPEI ditetapkan memiliki maksimum transaksi untuk setiap pihak lawan sebesar 10% dari modal.
- Indonesia Eximbank also has an inhouse limit as one of the strategies to control concentration risk and maintain the level of financing concentration which has been well diversified. The inhouse limit calculation is a combination of financing, guarantee self-retention, and insurance self-retention. The provision of financing facilities is prohibited from exceeding the inhouse limit (breach), but exceeding the inhouse limit due to changes in exchange rates and/or changes in Indonesia Eximbank capital will be carried out a gradual decrease in outstanding.
- Regarding the establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN), Indonesia Eximbank has implemented PSAK 71 on Financial Instruments which is an adoption of IFRS 9 issued by the International Accounting Standard Board (IASB). PSAK 71 regulates changes in requirements related to financial instruments such as classification and measurement, impairment and hedge accounting. Indonesia Eximbank periodically assesses all financial assets for impairment except those classified as fair value through profit and loss.
- As stipulated in the Minister of Finance Regulation, Indonesia Eximbank must apply the prudential principle in managing receivables and/or liabilities arising from derivative transactions. Derivative transactions can only be carried out in the context of hedging. The form of derivative transactions conducted by Indonesia Eximbank is generally in the form of spot, forward, futures, and swap transactions. In conducting derivative transactions, Indonesia Eximbank is determined to have a maximum transaction for each counterparty of 10% of capital.

RISIKO PASAR

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki LPEI.

MARKET RISK

Market risk is the chance of financial loss brought on by changes in market variables like interest rates and exchange rates relative to L Indonesia Eximbank's position.

MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko pasar antara lain dilakukan melalui:

- Pengelolaan risiko pasar di LPEI dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *front office*, *middle office*, dan *back office*.
- Eksposur risiko pasar pada LPEI hanya pada *banking book* hal ini dikarenakan LPEI tidak melakukan transaksional pada trading book, sedangkan trading hanya dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dan bersifat *natural hedge*.
- Dalam memitigasi eksposur risiko pasar dilakukan dengan pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai Limit PDN dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yaitu sebesar 20%. Pemantauan / monitoring eksposur risiko pasar senantiasa dipantau secara harian.
- Untuk melengkapi pemantauan risiko, dilakukan juga *gap management* dan analisa sensitivitas dengan tujuan mengelola risiko pasar sebagai akibat perubahan tingkat bunga dan nilai tukar.
- Selain hal tersebut, LPEI juga menetapkan batas transaksi (limit) khusus untuk transaksi *banking book* mencakup limit *counterparty* dan limit dealer.
- Dalam mendukung infrastruktur pengelolaan risiko pasar, LPEI telah memiliki *Treasury Dealing System* (TDS) dan *market risk management tools*. Sedangkan untuk memperoleh data pasar diperoleh dari *Reuters*, *Bloomberg* dan sumber independen lainnya.
- Secara operasional peraturan/ kebijakan terkait pasar telah dilengkapi dengan Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan Umum Tresuri LPEI, Peraturan Direktur Eksekutif terkait Limit Transaksi Tresuri dan Manual Produk Tresuri.

RISIKO LIKUIDITAS

- Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan memenuhi liabilitas pembayaran pada saat jatuh tempo dalam keadaan normal ataupun tertekan (*distress*). LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang

The following are done to anticipate and control market risk:

- Market risk management at Indonesia Eximbank is divided into 3 (three) parts, namely front office, middle office, and back office.
- Market risk exposure at Indonesia Eximbank is only in the banking book because Indonesia Eximbank does not transact in the trading book, while trading is only carried out in the context of hedging and is a natural hedge.
- The mitigation of market risk exposure is carried out by monitoring the Net Foreign Exchange Position (NOP) in accordance with the NOP Limit in the provisions of the Minister of Finance Regulation which is 20%. Monitoring of market risk exposure is monitored daily.
- To complement risk monitoring, gap management and sensitivity analysis are also conducted with the aim of managing market risk as a result of changes in interest rates and exchange rates.
- Furthermore, Indonesia Eximbank also sets transaction limits (limits) specifically for banking book transactions including counterparty limits and dealer limits.
- In supporting market risk management infrastructure, Indonesia Eximbank has Treasury Dealing System (TDS) and market risk management tools. Meanwhile, market data is obtained from Reuters, Bloomberg, and other independent sources.
- Operationally, market-related regulations/ policies have been completed with the Board of Director's Regulation on Indonesia Eximbank Treasury General Policy, Executive Director's Regulation on Treasury Transaction Limit and Treasury Product Manual.

7.

LIQUIDITY RISK

The risk of being unable to make payments when they are due under normal or difficult conditions is known as liquidity risk. In order to fulfill each financial commitment that has been committed in a timely way and to be able to maintain an acceptable and ideal level of liquidity,

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko likuiditas antara lain dilakukan melalui:

- Pengelolaan risiko Likuiditas melalui *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) untuk ketersediaan atas keseluruhan *reserves* yang dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan.
- Penetapan dan pemantauan limit dilakukan secara berkala oleh Unit Kerja Tresuri.
- Unit Kerja Tresuri melakukan pengelolaan aset yang aman, likuid dan menguntungkan dalam jumlah yang cukup dan dalam komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas.
- Selain melalui ALCO, LPEI juga menyusun skenario likuiditas berdasarkan kondisi yang berbeda (normal, tidak normal, ekstrim) dan proyeksi arus kas harian serta profil maturitas bulanan sehingga dapat ditetapkan *contingency funding plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ekstrim dan menetapkan strategi yang sesuai dan akurat dalam mengantisipasi kondisi likuiditas di masa mendatang.
- LPEI dapat melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia; surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor; surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri; dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan predikat idAAA.
- Selain mitigasi risiko likuiditas yang dilakukan, LPEI juga memiliki *sovereign* status yang membuat risiko inheren LPEI lebih rendah dibandingkan perbankan umumnya.

Indonesia Eximbank manages liquidity risk.

To anticipate and control liquidity risk, among others, is done through:

- Liquidity risk management through the Assets and Liabilities Committee (ALCO) for the availability of overall reserves monitored on a daily, weekly, and monthly basis.
- Limit setting and monitoring is conducted periodically by the Treasury Working Unit.
- The Treasury Working Unit manages safe, liquid, and profitable assets in sufficient amounts and in a composition that is adjusted to business characteristics and liquidity risk profile.
- In addition to ALCO, Indonesia Eximbank also develops liquidity scenarios based on different conditions (normal, abnormal, extreme) and daily cash flow projections as well as monthly maturity profiles so that contingency funding plans can be established to anticipate extreme conditions and establish appropriate and accurate strategies in anticipating future liquidity conditions.
- Indonesia Eximbank can place funds in the form of securities issued by the Government; Bank Indonesia Certificates; securities issued by the government of donor countries; securities issued by multilateral financial institutions; deposits in the form of rupiah or foreign currencies at Bank Indonesia; deposits in domestic banks and/or foreign banks; and/or securities issued by State-Owned Enterprises with idAAA predicates.
- In addition to liquidity risk mitigation, Indonesia Eximbank also has a sovereign status that makes Indonesia Eximbank's inherent risk lower than banking in general.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional antara lain disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kendala eksternal. Risiko operasional sangat berhubungan dengan kelengkapan dan tingkat efektivitas dari sistem, prosedur dan kontrol dalam lingkungan kegiatan usaha serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja usaha LPEI. Penerapan manajemen risiko operasional dilakukan terhadap setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat serta komprehensif.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko operasional antara lain dilakukan melalui:

- *Risk & Control Self-Assessment (RCSA)* tengah dikembangkan sebagai alat pengendalian risiko operasional. Implementasi RCSA akan dilakukan secara bertahap yang dimulai dari identifikasi risiko agar mendapatkan *risk register* yang terkini dan komprehensif. Pengendalian risiko operasional dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab risiko operasional yang mencakup organisasi, sumber daya manusia, data dan informasi, teknologi informasi, proses bisnis, dan faktor eksternal.
- Pengukuran risiko operasional juga dilakukan dalam Profil Risiko Operasional.
- Salah satu tools dalam meminimalisir risiko operasional dalam kondisi darurat atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia yang mengganggu kegiatan usaha yaitu dengan implementasi *Business Continuity Plan/BCP*.
- Saat ini LPEI terus menyempurnakan pendekatan dan framework yang digunakan dalam manajemen risiko operasional, salah satunya adalah dengan pendekatan menggunakan metode workshop secara periodik dalam mengidentifikasi risiko.

OPERATIONAL RISK

Operational risk is brought on by insufficient and/or malfunctioning internal procedures, mistakes done by people, failed systems, or external limitations. The effectiveness and completeness of the systems, procedures, and controls in the business activity environment, as well as the capacity of human resources that can influence Indonesia Eximbank's business performance, are all closely related to operational risk. A precise and thorough risk management system and procedure is used to implement operational risk management on each activity that is carried out in an integrated manner.

To anticipate and control operational risk, among others, is done through:

- Risk & Control Self-Assessment (RCSA) is being developed as an operational risk control tool. RCSA will be carried out in stages starting from risk identification to obtain an up-to-date and comprehensive risk register. Operational risk control is carried out on factors that cause operational risk, including organization, human resources, data and information, information technology, business processes, and external factors.
- Operational risk measurement is also carried out in the Operational Risk Profile.
- One of the tools in minimizing operational risk in emergency or disaster conditions caused by natural factors or human actions that disrupt business activities is the implementation of Business Continuity Plan/BCP.
- Currently, Indonesia Eximbank continues to refine the approach and framework used in operational risk management, one of which is by using the workshop method periodically in identifying risks.

RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko hukum antara lain dilakukan melalui:

- Ekspose Risiko Hukum terkait kelemahan atas perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi LPEI dikendalikan dengan *review* atas perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan secara berkala.
- Pengendalian risiko hukum sudah ditata dengan baik dimana setiap aktivitas bisnis bila dipandang perlu bisa memintakan pendapat/ opini hukum. Pemberian opini hukum atas perjanjian kerja sama antara LPEI dengan pihak lain untuk melindungi kepentingan hukum Lembaga.
- Selain hal tersebut, pembentukan Divisi Hukum guna mengendalikan permasalahan hukum secara *corporate wide* dan pembentukan Divisi Litigasi guna mengendalikan permasalahan hukum debitur.
- Pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai dan dalam hal penanganan perkara-perkara hukum serta pemantauan proses penanganannya dilakukan secara langsung ataupun bekerja sama dengan konsultan hukum.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat LPEI tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kepatuhan antara lain dilakukan melalui:

LEGAL RISK

Legal risk is the risk brought on by lawsuits and/or judicial shortcomings. This risk arises as a result of, among other things, a lack of supporting laws and regulations or flaws in the engagement, such as a failure to comply with the contract's legal requirements or inadequate collateral.

Anticipating and controlling the legal risk, among others, is done through:

- Legal Risk Exposure related to weaknesses in agreements that can cause losses to Indonesia Eximbank is controlled by reviewing agreements with third parties which are carried out periodically.
- Legal risk control has been well organized where every business activity if deemed necessary can ask for legal opinion. Provision of legal opinion on cooperation agreements between Indonesia Eximbank and other parties to protect the legal interests of the Institution.
- In addition, the establishment of Legal Division to control legal issues corporate wide and the establishment of Litigation Division to control debtor's legal issues.
- Implementation of business activities in accordance with applicable laws and regulations and supported by adequate legal documents and in terms of handling legal cases and monitoring the handling process is carried out directly or in collaboration with legal consultants.

COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk associated with Indonesia Eximbank failing to adhere to and/or carry out the relevant laws and regulations.

To anticipate and control compliance risk, among others, is done through:

MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

- Eksposur risiko kepatuhan terdapat dalam pemenuhan aspek kepatuhan dalam proses bisnis yang dikendalikan melalui pemberian opini kepatuhan atas rancangan kebijakan atau ketentuan atas pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- Pemantauan risiko kepatuhan melalui implementasi Pakta Integritas dan pengelolaan dan sosialisasi kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS).
- Untuk melengkapi pengendalian risiko juga dilakukan penerapan Uji Kepatuhan (melalui prosedur secara berkala), Program APU & PPT, dan pengendalian produk baru dan pelaporan serta monitoring penyampaian laporan-laporan secara berkala kepada pihak internal dan eksternal dilakukan tepat waktu.
- Selain itu kajian terhadap kebijakan regulator yang berdampak kepada LPEI dan adanya koordinasi antar unit dalam rangka memastikan kebijakan internal LPEI telah sesuai dengan peraturan regulator.
- Secara operasional telah tersedianya Kebijakan dan Prosedur tentang Fungsi Kepatuhan di LPEI.
- Compliance risk exposure exists in the fulfilment of compliance aspects in business processes that is controlled through the provision of compliance opinions on draft policies or provisions on the development of new products and/or activities.
- Compliance risk monitoring through implementation of Integrity Pact and management and socialization of Whistle Blowing System (WBS) policy.
- To complement risk control, the implementation of Compliance Test (through regular procedures), AML & CFT Programme, and control of new products and reporting as well as monitoring the timely submission of periodic reports to internal and external parties are also carried out.
- In addition, a review of regulatory policies affecting Indonesia Eximbank and coordination between units in order to ensure that Indonesia Eximbank 's internal policies are in accordance with regulatory regulations.
- Operationally, there are Policies and Procedures on Compliance Function at Indonesia Eximbank.

RISIKO ASURANSI

Potensi kegagalan yang dihadapi LPEI dalam memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dana/ penanganan klaim.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko asuransi antara lain dilakukan melalui:

- Pada tataran eksposur risiko secara portofolio, eksposur risiko asuransi senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Manajemen antara lain melalui penyampaian laporan manajemen atas eksposur risiko utama, *Portfolio Quality Report* dan pembahasan melalui forum secara berkala.
- LPEI telah memiliki Sistem *Internal Credit Risk Rating* untuk mendukung infrastruktur pengelolaan risiko asuransi dan *CARE System* sebagai pendukung operasional bisnis Asuransi.

INSURANCE RISK

Indonesia Eximbank may fail to meet its commitments to the insured and policyholders due to inadequate risk selection (*underwriting*), premium determination (*pricing*), use of reinsurance funds, and claim management,

Anticipation and control of insurance risk, among others is done through:

- At the level of risk exposure on a portfolio basis, insurance risk exposure is always monitored and reported regularly to the Management, among others through the submission of management reports on major risk exposures, *Portfolio Quality Report*, and discussions through regular forums.
- Indonesia Eximbank has an *Internal Credit Risk Rating System* to support insurance risk management infrastructure and *CARE System* to support Insurance business operations.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

- Secara operasional peraturan/ kebijakan terkait risiko asuransi telah memiliki ketentuan internal tentang Kebijakan Asuransi, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Asuransi, dan Komite.
- Sebagai tambahan dalam pengendalian risiko asuransi yaitu dengan menjaga komposisi tingkat konsentrasi pertanggungan asuransi pada level sesuai limit yang telah ditentukan dan Kecukupan pencadangan klaim kegiatan asuransi sesuai dengan pembentukan Retensi Sendiri tidak melebihi 2x modal disetor.

Pernyataan Kecukupan Manajemen Risiko

Pernyataan atas kecukupan sistem manajemen risiko di LPEI telah tercermin dan merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko lembaga yang disampaikan secara berkala oleh Direktur Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang meliputi 4 aspek sebagai berikut:

- Aspek I, Tata Kelola Risiko;
- Aspek II, Kerangka Manajemen Risiko;
- Aspek III, Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen; dan
- Aspek IV, Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI.

Adapun hasil penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit berada pada tingkat "Fair" yaitu Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, masih terdapat hal yang membutuhkan perbaikan dan perhatian manajemen.

Analisis penilaian yang dilakukan tidak hanya secara individual tetapi juga secara keseluruhan dengan memperhatikan faktor penyebab (*root cause analysis*),

- Operationally, regulations/ policies related to insurance risk have internal provisions on Insurance Policy, Executive Director Regulation on Insurance Manual, and Committee.
- In addition, insurance risk control is to maintain the composition of the concentration level of insurance coverage at a level in accordance with predetermined limits and the adequacy of insurance activity claim reserves in accordance with the formation of Own Retention not exceeding 2x paid-up capital.

Risk Management Adequacy Statement

The statement regarding the Indonesia Eximbank risk management system's adequacy has been included in the institution's risk profile report, which is periodically submitted to the Financial Services Authority by the Executive Director. It is particularly relevant to the evaluation of the Quality of Risk Management Implementation (KPMR), which includes the following 4 aspects:

- Aspect I, Risk Governance;
- Aspect II, Risk Management Framework
- Aspect III, Risk Management Process, Adequacy of Human Resources, and Adequacy of Management Information System; and
- Aspect IV, Adequacy of Risk Control System, considering the characteristics and complexity of Indonesia Eximbank 's business.

The results of the assessment of the Quality of Risk Management Implementation on a composite basis are at the "Fair" level, namely the Quality of Risk Management Implementation on a composite basis is adequate. Although the minimum requirements are met, there are still things that require improvement and management attention.

The assessment analysis is carried out not only individually but also as a whole by considering the root cause analysis, linkage analysis and the impact of a ratio on other ratios

MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

keterkaitan antar rasio (*linkage analysis*) dan dampak suatu rasio terhadap rasio lain atau kinerja LPEI (*impact analysis*) dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas risiko yang dinilai dalam menentukan peringkat profil risiko. Selain hal tersebut, penilaian rasio juga dilakukan dengan memperhatikan benchmark pada industri/ *peer group*.

Rencana Strategis Manajemen Risiko tahun 2023

Pada tahun 2023, strategi inisiatif manajemen risiko mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Penyempurnaan Risk Appetite Lembaga.
- Mendukung pengembangan bisnis pada sektor-sektor yang meningkatkan developmental impact.
- Implementasi awal framework GRC, termasuk di dalamnya manajemen risiko operasional.
- Meningkatkan fungsi Early Warning Detection.
- Meningkatkan *Risk Awareness* dan *Risk Culture* Lembaga.

or Indonesia Eximbank's performance (impact analysis) by considering the significance and materiality of the risks assessed in determining the risk profile rating. In addition to this, the ratio assessment is also carried out by considering the benchmark in the industry / peer group.

Year 2023 Risk Management Strategic Plan

In 2023, strategic risk management initiatives include the following:

- Refining the Institution's Risk Appetite.
- Support business development in sectors that increase developmental impact.
- Early implementation of GRC framework, including operational risk management.
- Improving Early Warning Detection function.
- Improving Risk Awareness and Risk Culture of the Institution.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM



Sistem Pengendalian Internal di LPEI bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja Lembaga, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, kehandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional, maupun finansial serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Kajian atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dilakukan secara berkala setiap tahun, dengan menggunakan parameter yang diadopsi dari *Framework* Pengendalian Internal dari organisasi COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) yaitu:

- Lingkungan Pengendalian;
- Penilaian Risiko;
- Aktivitas Pengendalian;
- Informasi dan Komunikasi;
- Pemantauan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan rencana, metode, prosedur dan kebijakan yang didesain oleh manajemen sebagai mekanisme pengawasan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan yang memadai atas terlaksananya:

- kepatuhan Manajemen LPEI terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal LPEI;
- kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
- tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan efektivitas budaya Risiko pada organisasi LPEI secara menyeluruh.

The Internal Control System in Indonesia Eximbank aims to support the achievement of the Company's performance objectives, improve value to the stakeholders and assure effectiveness and efficiency of operation, reliability of financial reports, sufficiency of financial and operational controls, and compliance with prevailing laws and regulations.

Internal Control System Framework

Review on the Internal Control System effectiveness is carried out regularly every year, using parameters adopted from the Internal Control Framework of COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) organization, which include:

- Control Environment;
- Risk Assessment;
- Control Activities;
- Information and Communication;
- Monitoring.

Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations

Internal Control System (SPI) is a plan, method, procedure and policy designed by management as a continuous monitoring mechanism to provide adequate assurance on the implementation of:

- compliance of Indonesia Eximbank Management with Risk Management policies and procedures as well as provisions of laws and regulations and internal policies or provisions of Indonesia Eximbank;
- compliance and effectiveness of the Risk Management function in designing and implementing Risk Management strategies and policies;
- the availability of complete, accurate, appropriate, and timely financial and management information;
- effectiveness and efficiency in business and operational activities; and effectiveness of Risk culture in the Indonesia Eximbank organisation as a whole.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sebagai salah satu pelaksanaan pilar penerapan manajemen risiko, LPEI telah menjalankan SPI secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi LPEI, serta memastikan terdapatnya:

1. Kegiatan usaha LPEI yang berjalan secara efisien dan efektif dalam penggunaan aset, maupun sumber daya lainnya dalam rangka melindungi LPEI dari risiko kerugian.
2. Informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan, yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kesesuaian pelaksanaan atas seluruh kegiatan usaha LPEI dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, otoritas pengawas, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal; dan
4. Budaya risiko yang efektif pada organisasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di LPEI secara berkesinambungan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

LPEI melalui Internal Audit melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka terlaksananya kegiatan pemantauan yang efektif sekurang-kurangnya adalah:

- a. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi LPEI;
- b. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
- c. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada LPEI dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;

As one of the pillars of risk management implementation, Indonesia Eximbank has implemented effective ICS in carrying out business and operational activities at all levels of the Indonesia Eximbank organization, and ensuring that:

1. Indonesia Eximbank's efficient and effective business activities in the use of assets, and other resources in order to protect Indonesia Eximbank from risk of losses.
2. Financial, management information that is accurate, complete, timely, and relevant, required to make the right decisions and can be accounted for.
3. Compliance with the implementation of all Indonesia Eximbank's business activities with the stipulations and prevailing laws and regulations, both issued by the Government, the supervisory authority, as well as internal policies, regulations and procedures; and
4. An effective risk culture in the organization as a whole to identify weaknesses and assess deviations early and reassess the fairness of existing policies and procedures in Indonesia Eximbank.

Overview of the Internal Control System Effectiveness

Indonesia Eximbank through Internal Audit conducts continuous monitoring of the overall effectiveness of internal control. The steps taken to carry out effective monitoring activities include:

- a. Ensuring that the monitoring function has been clearly defined and well-structured within Indonesia Eximbank organization;
- b. Establish work units/employees assigned to monitor the effectiveness of internal control;
- c. Determine the appropriate frequency for monitoring activities based on the risks inherent in Indonesia Eximbank and the nature/frequency of changes that occur in operational activities;

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

- d. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi dan *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kajian ulang;
- e. Melakukan kajian ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
- f. Menetapkan informasi/*feedback* dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Tahap prosedur pelaksanaan penilaian atas efektivitas sistem Pengendalian Internal meliputi kegiatan:

1. Proses rekapitulasi atas Self-Assessment Sistem Pengendalian Internal dari seluruh unit kerja LPEI, untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan pengendalian internal di LPEI.
2. Proses *Review* dilakukan oleh Divisi Audit Internal.
3. Prosedur kompilasi dan dokumentasi hasil Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
4. Evaluasi atas *framework* penilaian atas sistem pengendalian internal

Berdasarkan hasil penilaian penerapan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan secara self assesment, LPEI mendapatkan nilai “4,12” yang menunjukkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di LPEI termasuk dalam kategori “Baik”.

- d. Integrating the Internal Control System into operational activities and providing routine reports such as bookkeeping journals, management reviews and reports on approval of exceptions/deviations from established policies and procedures (justifications and irregularities) which will then be reviewed;
- e. Reviewing the documentation and evaluation results of the work unit/employee assigned to carry out monitoring;
- f. Establish information/*feedback* in an appropriate format and frequency.

The stages of the procedure for carrying out an assessment of the effectiveness of the Internal Control system include the following activities:

1. The recapitulation process of the Internal Control System Self Assessment from all Indonesia Eximbank work units, to obtain an overview of the effectiveness of the implementation of internal control at Indonesia Eximbank.
2. The review process is carried out by the Internal Audit Division.
3. Procedure for compiling and documenting the results of the Internal Control System Effectiveness Assessment.
4. Evaluation of the assessment framework for the internal control system

Based on the results of the self-assessment of the implementation of the Internal Control System, Indonesia Eximbank received a score of “4.12” which indicates that the implementation of the Internal Control System at Indonesia Eximbank is in the “Good” category.



JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM & UPAYA PENYELESAIAN OLEH LPEI

LITIGATION & ITS RESOLUTIONS

Total perkara atau permasalahan hukum pada tahun 2022 yang dihadapi LPEI yaitu sejumlah 14 (empat belas) perkara atau permasalahan hukum, diantaranya:

The total cases or legal problems faced by Indonesia Eximbank in 2022 are 14 (fourteen) cases or legal issues, including:

No	Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Tingkat Perkara Case Level	Pemohon (Inisial) Applicant (Initials)	Status Penyelesaian Completion Status
1	Perkara Perdata pada tingkat PN Jakarta Pusat dengan register perkara No.129/pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst Civil Case at the Central Jakarta PN level with case register No.129/pdt. G/2020/Pn.Jkt.Pst	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Pusat) Court of First Phase (District Court Central Jakarta)	JIP	Gugatan ditolak (belum ada pernyataan banding dari Penggugat) The lawsuit was rejected (there has been no statement of appeal from the Plaintiff)
2	Perkara Perdata pada tingkat PN Jakarta Pusat dengan register perkara Perkara No.734/pdt.G/2020/Pn.Jkt.Sel Civil Case at the Central Jakarta PN level with Case Register No.734/pdt. G/2020/Pn.Jkt.Sel	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan) Court of First Phase (District Court Jakarta Selatan)	AM	Gugatan ditolak (belum ada pernyataan banding dari Penggugat) The lawsuit was rejected (there has been no statement of appeal from the Plaintiff)
3	Perkara Perdata pada tingkat PN Klaten dengan register perkara No.100/Pdt.G/2021/PN.Kln Civil Case at the PN Klaten level with case register No.100/Pdt.G/2021/PN.Kln	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Klaten) Court of First Phase (District Court Klaten)	PT. JF	Dalam proses persidangan In court proceedings
4	Perkara Perdata pada tingkat PN Niaga Surabaya dengan register perkara No.8/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2021/PN.Niaga.Sby jo. No.30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby Civil Case at the level of PN Niaga Surabaya with case register No.8/Pdt.Sus-Miscellaneous Lawsuit/2021/ PN. Niaga.Sby jo. No.30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Commerce.Sby	Kasasi (Mahkamah Agung) Cassation (Supreme Court)	1. A 2. FJ 3. Penggugat Intervensi : Intervention Plaintiff: LPEI	Gugatan Intervensi dari LPEI ditolak, dan LPEI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung LPEI's Intervention lawsuit was rejected, and LPEI filed a cassation with the Supreme Court
5	Perkara Perdata pada tingkat PN Semarang dengan register perkara No. 29/Pdt.G/2021 PN Smg Civil Case at the Semarang PN level with case register No. 29/Pdt.G/2021 PN Smg	Pengadilan Tinggi (PT Semarang) High Court (PT Semarang)	PT. BWI	Telah didaftarkan Kontra Memori Banding Registered Counter Memory Appeal
6	Perkara Perdata pada tingkat PN Semarang dengan register perkara No. 30/Pdt.G/2021 PN Smg Civil Case at the Semarang PN level with case register No. 30/Pdt.G/2021 PN Smg	Pengadilan Tinggi (PT Semarang) High Court (PT Semarang)	PT. MWI	Telah didaftarkan Kontra Memori Banding Registered Counter Memory Appeal
7	Perkara Perdata pada tingkat PN Semarang dengan register perkara No. 31/Pdt.G/2021 PN Smg Civil Case at the Semarang PN level with case register No. 31/Pdt.G/2021 PN Smg	Pengadilan Tinggi (PT Semarang) High Court (PT Semarang)	PT. JMI	Telah didaftarkan Kontra Memori Banding Registered Counter Memory Appeal
8	Perkara Perdata pada tingkat PN Semarang dengan register perkara No. 115/Pdt.G/2021 PN Smg Civil Case at the Semarang PN level with case register No. 115/Pdt.G/2021 PN Smg	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang) Court of First Phase (District Court Semarang)	PT MWI	Telah diputus NO (Niet Ontvankelijke) Has been decided NO (Niet Ontvankelijke)
9	Perkara Perdata pada tingkat PN Semarang dengan register perkara No. 301/Pdt.G/2021 PN Smg Civil Case at the Semarang PN level with case register No. 301/Pdt.G/2021 PN Smg	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang) Court of First Phase (District Court Semarang)	1. IM 2. DSM 3. Penggugat Intervensi Intervention Plaintiff: LPEI	Dalam proses persidangan In court proceedings
10	Perkara Perdata pada tingkat PN Semarang dengan register perkara No. 427/Pdt.G/2021 PN Smg Civil Case at the Semarang PN level with case register No. 427/Pdt.G/2021 PN Smg	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang) Court of First Phase (District Court Semarang)	SSL	Gugatan Dicabut Lawsuit Dropped
11	Perkara Perdata pada tingkat PN Semarang dengan register perkara No. 429/Pdt.G/2021 PN Smg Civil Case at the Semarang PN level with case register No. 429/Pdt.G/2021 PN Smg	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang) Court of First Phase (District Court Semarang)	PT. MWI	Dalam proses persidangan In court proceedings

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM & UPAYA PENYELESAIAN OLEH LPEI
LITIGATION & ITS RESOLUTIONS

No	Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Tingkat Perkara Case Level	Pemohon (Inisial) Applicant (Initials)	Status Penyelesaian Completion Status
12	Perkara Perdata pada tingkat PN Semarang dengan register perkara No. 485/Pdt.G/2021 PN Smg Civil Case at the Semarang PN level with case register No. 485/Pdt.G/2021 PN Smg	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang) Court of First Instance (District Court Semarang)	1. PT. JMI 2. PT. MWI 3. PT. BWI	Dalam proses persidangan In court proceedings
13	Perkara Perdata pada tingkat PN Jakarta Selatan dengan register perkara No. 916/Pdt.G/2021 PN Jkt. Sel Civil Case at the South Jakarta PN level with case register No. 916/Pdt.G/2021 PN Jkt. Sel	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan) Court of First Phase (District Court Jakarta Selatan)	1. PT. JMI 2. PT. MWI 3. PT. BWI	Dalam proses persidangan In court proceedings
14	Perkara Perdata pada tingkat PN Jakarta Selatan dengan register perkara No. 901/Pdt.G/2021 PN Jkt Sel Civil Case at the South Jakarta PN level with case register No. 901/Pdt.G/2021 PN Jkt Sel	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan) Court of First Phase (District Court Jakarta Selatan)	1. PT. JMI 2. PT. MWI 3. PT. BWI	Dalam proses persidangan In court proceedings
15	Perkara Perdata pada tingkat PN Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara No. 48/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2021/PN.Niaga Jakarta Pusat Civil Case at the Central Jakarta Commercial Court level with case register No. 48/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2021/ PN. Central Jakarta Commerce	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Niaga Jakarta Pusat) Court of First Phase (District Court Niaga Central Jakarta)	Tim Kurator PT. LTS Curator Team of PT. LTS	Dalam proses persidangan In court proceedings
16	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38602/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Decision No. Put.38602/PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	LPEI kalah atas Dirjen Pajak melalui Putusan MA Reg. Nomor 3551/B/PK/Pjk/2022 tanggal 28 Juli 2022 LPEI lost to the Director General of Taxes through Supreme Court Decision Reg. No. 3551/B/PK/Pjk/2022 dated July 28, 2022
17	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38603/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Decision No. Put.38603/PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	LPEI menang atas Dirjen Pajak melalui Putusan MA Reg. Nomor 3550/B/PK/Pjk/2022 tanggal 28 Juli 2022 LPEI won over the Director General of Taxes through Supreme Court Decision Reg. No. 3550/B/PK/Pjk/2022 dated July 28, 2022
18	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38606/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Decision No. Put.38606/PP/M.I/13/2012 June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Under the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
19	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38607/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Decision No. Put.38607/PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	LPEI menang atas Dirjen Pajak melalui Putusan MA Reg. Nomor 3553/B/PK/Pjk/2022 tanggal 28 Juli 2022 LPEI won over the Director General of Taxes through Supreme Court Decision Reg. No. 3553/B/PK/Pjk/2022 dated July 28, 2022
20	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38612/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tax Court Decision No. Put.38612/PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Under the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
21	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57515/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 Tax Court Decision No. Put.57515/PP/M.IVB/16/2014 dated November 20, 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Under the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM & UPAYA PENYELESAIAN OLEH LPEI LITIGATION & ITS RESOLUTIONS

No	Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Tingkat Perkara Case Level	Pemohon (Inisial) Applicant (Initials)	Status Penyelesaian Completion Status
22	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57516/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 Tax Court Decision No. Put.57516/PP/M.IVB/16/2014 dated November 20, 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Under the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
23	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57518/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 Tax Court Decision No. Put.57518/PP/M.IVB/16/2014 dated November 20, 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Under the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
24	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 5 Maret 2015 Tax Court Decision No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Under the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
25	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59988/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 Tax Court Decision No. Put.59988/PP/M.IVB/16/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Under the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
26	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59990/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 Tax Court Decision No. Put.59990/PP/M.IVB/16/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Under the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia
27	Tindak Pidana Khusus No.Print-13/F.2/Fd.2/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 Special Crime No. Print-13/F.2/Fd.2/06/2021 dated June 24, 2021	Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Directorate of Investigation at the Junior Attorney General for Special Crimes of the Attorney General's Office of RI	-	Saat ini atas perkara tsb telah diputus di tingkat Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Currently, the case has been decided at the Corruption-Criminal Court level in the Central Jakarta District Court.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2022, terdapat sanksi administratif sebagai berikut:

Terhadap permohonan restrukturisasi yang diinput oleh OJK di sistem pengaduan nasabah (APPK), LPEI telah memberikan tanggapan langsung kepada Debitur melalui penasihat hukum LPEI, namun penginputan tanggapan dan penutupan pada sistem APPK melewati batas waktu pemberian tanggapan yang tercantum di APPK. Atas hal tersebut, maka terdapat surat OJK No. S-6/EP.121/2022

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Administrative sanctions in 2022 included the following:

Through Indonesia Eximbank's Legal Counsel, the Company has responded directly to the Debtor regarding the restructuring request that OJK entered in the customer complaint system (APPK), however the time spent entering responses and closing in the APPK system has passed the time limit. Hence there was an OJK letter with the number S-6/EP.121/2022 dated January 7, 2022, in

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM & UPAYA PENYELESAIAN OLEH LPEI
LITIGATION & ITS RESOLUTIONS

tertanggal 7 Januari 2022, dimana disampaikan agar LPEI melakukan penyelesaian pengaduan di APPK sesuai batas waktu yang ditentukan oleh regulasi. Penginputan dan penutupan di APPK telah dilakukan di 6 Januari 2022 dan penyelesaian atas permohonan ini juga telah dijelaskan secara langsung melalui pertemuan dengan Departemen Perlindungan Konsumen OJK.

Laporan hasil evaluasi komite audit telah disampaikan melalui sistem informasi Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik secara tepat waktu, namun untuk penyampaian kepada Pengawas IKNB melebihi 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo penyampaian laporan. Atas hal ini, maka terdapat surat OJK No. S-415/NB.222/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal "Sanksi Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit", berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diselesaikan dengan segera.

which it is stated that Indonesia Eximbank' should handle complaints in APPK in accordance with the regulation's timeframe. On January 6, 2022, the entry and closure in APPK were completed, and the outcome of this request was also directly discussed during a meeting with OJK's Consumer Protection Department.

The audit committee evaluation report was timely filed via the Integrated Electronic Reporting Facility for Issuers and Public Companies' information system, but it was delivered to the IKNB Supervisor more than one day late. A fine of Rp100,000.00 (one hundred thousand rupiah) has been resolved immediately in this case according to OJK letter No. S-415/NB.222/2022 dated September 9, 2022, which is about "Administrative Fines for Delay in Submission of Audit Committee Evaluation Report."



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

INFORMATION ACCESS AND CORPORATE DATA

LPEI menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, oleh karena itu, LPEI menyediakan sarana dan fasilitas yang memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi secara tepat waktu dan akurat menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan kepada regulasi, LPEI juga melakukan pelaporan informasi melalui media surat- menyurat dan *e-reporting* kepada pihak regulator, serta situs Lembaga. Seluruh Informasi dan laporan Lembaga dapat diperoleh melalui sarana yang mudah diakses, diantaranya:

1. Siaran Pers

LPEI secara berkala menerbitkan Siaran Pers sebagai transparansi informasi kepada publik mengenai aksi korporasi penting dan stratejik yang dilakukan LPEI.

2. Media Sosial

LPEI juga aktif memberikan informasi kepada publik melalui akun:

Indonesia Eximbank upholds the principle of transparency and information disclosure, as such, the Company provides means and facilities that enable the stakeholders to obtain timely and accurate information in accordance with the prevailing rules and regulations.

In addition, as its compliance to the regulations, the Company also submits information through correspondence and e-reporting to the regulators, as well as the Company's website. All information and reports of the Institution can be obtained through easily accessible means, among others are:

1. Press Release

Indonesia Eximbank periodically publishes Press Releases as information transparencies to public on the Institution key and strategic corporate actions.

2. Social Media

Indonesia Eximbank also actively provides information to the public through social media accounts of:


[indonesiaeximbank](http://indonesiaeximbank.go.id)

[Indonesia Eximbank](https://www.youtube.com/IndonesiaEximbank)

[indonesiaeximbank](https://www.instagram.com/indonesiaeximbank)

[EximbankID](https://www.facebook.com/EximbankID)

[indonesia-eximbank](https://www.linkedin.com/company/indonesia-eximbank)

3. Intranet

LPEI memiliki portal informasi internal yaitu intranet. Intranet dapat diakses oleh seluruh pegawai untuk membantu menjalankan aktivitas.

3. Intranet

Indonesia Eximbank has an internal information portal, the intranet. To carry out their activities, all employees can access the intranet.



Alamat | Address:

Prosperity Tower Lantai 1 District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12191, Indonesia



Tel. (62 21) 395 03600



Email: corpsec@indonesiaeximbank.go.id



Fax. (62 21) 395 03699



Situs Web: www.indonesiaeximbank.go.id

KODE ETIK CODE OF CONDUCT

LPEI menanamkan nilai-nilai inti dan membangun budaya yang kokoh melalui Pedoman Kode Etik sebagai komitmen untuk meningkatkan integritas karyawan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Kode Etik LPEI mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perseroan, setiap individu di lingkungan Perseroan maupun pihak lain yang berbisnis dengan Perseroan, baik dalam kaitannya dengan etika berbisnis, etika kerja maupun perilaku keseharian. Setiap karyawan dituntut untuk berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Perseroan dalam mewujudkan visi dan misinya.

Indonesia Eximbank instills its core values and builds a strong culture through Code of Conduct as a form of the Company's commitment to enhancing the integrity of each of its employees in applying good corporate governance.

The Company's Code of Conduct governs the matters that are the responsibility of the Company, every individual within the Company as well as other parties who have business relations with the Company, whether in relation to the business ethics, work ethics or daily behaviour. Every employee is required to behave in reflection of the Company's values in realizing its vision and mission.

Dasar Hukum Kode Etik LPEI Code of Conduct Legal Basis



Tujuan Pengaturan Standar Kode Etik Pegawai:

- Menjaga citra, martabat, integritas, kredibilitas dan independensi Pegawai dalam menjalankan tugas.
- Pedoman perilaku kepada Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
- Melindungi Pegawai dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul.
- Mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran.

Purpose of Setting Standards of Employee Code of Conducts:

- Maintain the image, dignity, integrity, credibility and independence of employees in carrying out their duties.
- Code of conducts for employees in carrying out their duties and responsibilities in a professional manner.
- Protect employees from legal and/or reputational risks that may arise.
- Information handling mechanism and process for resolving alleged violations.

KODE ETIK CODE OF CONDUCT

Standar Kode Etik Pegawai

- Pegawai adalah setiap orang yang bekerja atau terikat dalam hubungan kerja dengan LPEI dan oleh karenanya menerima gaji dan penghasilan atau imbalan dalam bentuk lain dari LPEI dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) LPEI.
- Standar Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat seluruh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai LPEI maupun dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat sekitarnya.

Pokok-Pokok Kode Etik

Dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI, seluruh elemen Lembaga wajib menjalankan Kode Etik yang meliputi:

1. Patuh dan taat pada semua ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan pencatatan dengan benar.
3. Menghindarkan diri dari persaingan tidak sehat.
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari konflik kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan para nasabah LPEI.
7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan LPEI terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
8. Tidak menerima gratifikasi, hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi, maupun keluarga.
9. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra profesinya.

Etika Manajemen LPEI:

1. Mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Memenuhi tanggung jawab sebagai Dewan Direktur/ Direktur Pelaksana.
3. Tidak memandang rendah perlunya kepemimpinan/ menghargai kepemimpinan.

Employee Code of Conduct Standards

- Employee is every person that works or binds in work relations with Indonesia Eximbank and as such receive salary and income or remuneration in other forms from the Company and has the Employee Main Number (NIP).
- Code of Conduct Standards is a guideline for behavior, conduct, action, values and norms that are binding all Employees in implementing their duties and functions as the Company's Employee or in daily interactions with the surrounding communities.

Code of Conduct Principles

In carrying out its operational activities, all elements of the Company shall implement Code of Conduct, which includes:

1. Compliance with and adhere to prevailing laws and regulations.
2. Carrying out proper listing.
3. Avoiding unfair competitions.
4. Not abusing authority for personal interests.
5. Avoiding involvement in decision making to avoid conflicts of interest.
6. Maintaining confidentiality of the Institution's customers.
7. Taking into account adverse impacts of each policy set by the Company on economic, social and environmental conditions.
8. Not accepting gratifications, gifts or rewards that enrich his/her personally or family.
9. Not performing actions that can harm the image of his/her profession.

Indonesia Eximbank Management Ethics:

1. Follow the applicable regulations.
2. Fulfilling responsibilities as a Board of Directors/ Managing Director.
3. Not looking down on the need for leadership/ appreciating leadership.

4. Tanggap menyikapi masalah jangka panjang dan tidak menunggu sampai kinerja keuangan memburuk.
5. Menggunakan akal sehat.
6. Menghargai setiap pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam setiap tindakan.
7. Audit budaya tata kelola institusi yang baik.
8. Tidak menempatkan kepentingan pribadi sebagai fokus utama dalam melakukan tugasnya.
9. Melakukan evaluasi kinerja secara objektif.
10. Tidak terlibat kegiatan operasional LPEI yang berada di luar ketentuan.

Pemberlakuan Kode Etik Di Seluruh Level Organisasi

1. Standar kode etik berisi nilai-nilai dasar etika, kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan fungsi selaku pegawai dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan operasional LPEI, maupun dalam pergaulan dengan lingkungan masyarakat.
2. Standar kode etik berlaku mengikat untuk seluruh pegawai LPEI, termasuk di dalamnya Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana.
3. Standar kode etik dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Sosialisasi di bidang kode etik telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 oleh Divisi Kepatuhan bersama Divisi Sumber Daya Manusia. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah LPEI yang meliputi/ melalui:

1. Terlaksananya CBT Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga untuk Pegawai dan Manajemen pada Triwulan I 2021; dan
2. Terlaksananya *Enhancement* CBT Kode Etik, Budaya Kerja Lembaga, dan *Whistle Blowing System* untuk Pegawai dan Manajemen pada Triwulan II 2021, yaitu pada tanggal 27-31 Desember 2021.

4. Respond to long-term problems and do not wait until financial performance deteriorates.
5. Use common sense.
6. Respect every stakeholder in every action.
7. Good institutional governance culture audit.
8. Not putting personal interests as the main focus in carrying out their duties.
9. Conduct an objective performance evaluation.
10. Not involved in Indonesia Eximbank operational activities that are outside the provisions.

Code of Conducts Enforcement in Organization

1. Code of Conduct standards contains basic ethical values, obligations and prohibitions in carrying out duties, obligations and functions as employees in relation to the Company's operational activities and in association with the community.
2. Code of Conduct standards is binding for all employees, including the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors.
3. Code of Conduct standards is carried out without tolerance and exceptions for irregularities and carries sanctions for those who violate them.

Dissemination and Efforts to Enforce the Code of Conduct

Socialization in the field of code of ethics has been carried out throughout 2021 by the Compliance Division together with the Human Resources Division. Socialization is carried out to all employees at the Indonesia Eximbank Head Office and Regional Offices which include/ through:

1. Implementation of the CBT Code of Ethics and Institutional Work Culture for Employees and Management in Quarter I 2021; and
2. Implementation of Enhancement of CBT Code of Ethics, Institutional Work Culture, and Whistle Blowing System for Employees and Management in Quarter II 2021, which is on 27-31 December 2021.

KODE ETIK CODE OF CONDUCT

3. Pelatihan New Hire Orientation (NHO) 2021, Pelatihan *Leaders for Tomorrow* (LFT) dan Program Development DP II

3. New Hire Orientation (NHO) 2021 Training, *Leaders for Tomorrow* (LFT) Training and DP II Development Program

Penerapan dan penegakan kode etik menjadi tanggung jawab unit kerja SDM dan disosialisasikan oleh unit kerja Kepatuhan melalui email kepada seluruh Pegawai.

The implementation and enforcement of the code of ethics is the responsibility of the HR work unit and is socialized by the Compliance work unit via email to all employees.

Mekanisme Laporan Pelanggaran Kode Etik Mechanism of Code of Conduct Violations Report



Jenis Sanksi untuk Setiap Pelanggaran Kode Etik

Segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar pokok-pokok Kode Etik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Eksekutif mengenai Kode Etik merupakan Pelanggaran Kode Etik. Mekanisme pengaduan Pelanggaran Kode Etik baik dari pihak eksternal, maupun internal LPEI mengacu kepada mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*).

Direktur Eksekutif berwenang mengenakan sanksi untuk semua tingkat kepada pegawai, namun dalam pelaksanaannya sebagian wewenang dapat didelegasikan tanpa hak substitusi kepada pejabat sebagai berikut:

- Pegawai pada Kelompok jabatan Kepala Departemen berwenang untuk mengenakan Sanksi Ringan berupa Surat Peringatan Lisan terbatas kepada Pegawai yang merupakan bawahan langsungnya.

Sanctions for Every Code Violation

All employee's remarks, writings or actions that violate code of conduct principles as regulated in the Executive Director's Regulation regarding the Code of Conduct constitute a Violation of the Code of Conduct. The Code of Conduct complaint mechanism from both external and internal parties of Indonesia Eximbank refers to the whistleblowing mechanism.

The Executive Director has the authority to impose sanctions on all levels of employees, but in practice some authority can be delegated without substitution rights to the following executives:

- Employee in the Department Head position group has the authority to impose Minor Sanctions through a limited Oral Warning to Employees under direct subordinates.

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

- Pegawai pada Kelompok jabatan Kepala Divisi berwenang untuk mengenakan Sanksi Ringan berupa Surat Peringatan Pertama hingga Surat Peringatan Ketiga terbatas kepada Pegawai yang berada pada Unit Kerjanya.
- Kepala Divisi SDM berwenang untuk mengenakan semua Sanksi Ringan serta Sanksi Sedang berupa Peringatan Keras Tertulis kepada seluruh Pegawai
- Employee in the Division Head position group has the authority to impose Minor Sanctions through the First Warning Letter up to the Third Warning Letter limited to Employees under his/her Units.
- Head of HR Division has the authority to impose Minor Sanctions and Medium Sanctions through Written Strong Warnings to all Employees.

Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 tidak ada pelanggaran kode etik, dengan demikian tidak ada sanksi yang diberikan.

Code of Conduct Violations and Sanctions in 2022

Throughout 2022 there were no violations of the code of ethics, thus no sanctions were given.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Salah satu aspek penting dalam prinsip tata kelola yang baik adalah mewujudkan partisipasi dari unsur internal maupun eksternal LPEI. Salah satunya adalah penyampaian informasi tentang pelanggaran dan perbuatan yang berpotensi dan/atau bersifat merugikan LPEI.

Berdasarkan informasi tersebut, Direktur Eksekutif dapat segera melakukan tindakan pencegahan (preventif) atau pemulihan secara cepat atas kerugian yang timbul ataupun tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direktur Eksekutif. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan penguatan sistem pengendalian internal yang salah satunya melalui penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) LPEI.

Definisi *Whistleblowing*

Pengungkapan tindakan Pelanggaran atau pengungkapan perbuatan Pelanggaran yang dapat merugikan LPEI yang umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Fungsi *Whistleblowing System*

1. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) adalah pengungkapan yang umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) atas tindakan atau perbuatan pelanggaran yang terindikasi dapat merugikan LPEI baik secara finansial maupun non-finansial.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi Pelapor Pelanggaran untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terjadi di LPEI.
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring mengenai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai LPEI.

Tujuan *Whistleblowing System*

1. Menciptakan Pegawai LPEI yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.

One of the important aspects in good governance principles is realizing the participation of internal and external elements of Indonesia Eximbank. One of them is the delivery of information regarding violations and actions with the potential and/or are detrimental to Indonesia Eximbank.

On this information, the Executive Director can immediately take preventive action or speedy recovery for the losses incurred or other actions deemed necessary by the Executive Director. To realize this condition, it is necessary to strengthen the internal control system, including through the implementation of the Indonesia Eximbank Whistleblowing System (WBS).

Whistleblowing Definition

Disclosure of Frauds or Violations that may be detrimental to the Company that generally carried out confidentially.

Whistleblowing System Function

1. Whistleblowing is a disclosure that is generally carried out in a confidential manner for actions or violations indicated to be detrimental to Indonesia Eximbank financially and non-financially.
2. The Indonesia Eximbank Whistleblowing System can be used as a medium for Whistleblowers to relay information regarding irregularities indicated as a violation that occurred at Indonesia Eximbank.
3. The Indonesia Eximbank Whistleblowing System functions as a means of controlling and monitoring potential violations committed by Indonesia Eximbank employees.

Purpose of Whistleblowing System

1. Building Indonesia Eximbank Employees with high integrity and professionalism.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

2. Memperkuat penerapan prinsip tata kelola LPEI.
3. Memperkuat sistem pengendalian internal LPEI.

Dasar Peraturan

- UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- PDD 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise LPEI.
- PDE No. 0045/PDE/10/2019 Tentang Manual Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI.
- PDE No.0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing system*) LPEI.

Penerapan di LPEI

Sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* merupakan bagian dari upaya pengendalian internal di lingkungan LPEI.

LPEI secara rutin telah melakukan Pelaporan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola Lembaga. Dewan Direktur mengharapkan agar mekanisme *whistleblowing system* yang telah ada dapat berjalan secara optimal dan saling melengkapi fungsi yang dijalankan internal audit.

Jenis-Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, antara lain pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, mark-up, penggunaan narkoba, perusakan barang;
2. Pelanggaran kode etik LPEI, antara lain benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang terlarang;
3. Pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum;
4. Kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan usaha pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa

1. Strengthen the implementation of Indonesia Eximbank governance principles.
2. Strengthening the Indonesia Eximbank internal control system.

Regulation References

- Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank;
- PMK No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Indonesia Eximbank's Know Your Customer Principles.
- PDD 0017/PDD/12/2022 on Indonesia Eximbank Risk Management Enterprise Policy.
- PDE No. 0045/PDE/10/2019 on Operating Manual of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy Practices.
- PDE No.0018/PDE/03/2012 concerning Indonesia Eximbank Whistleblowing System Manual.

Implementation in Indonesia Eximbank

Whistleblowing System is a part of internal control efforts in the Indonesia Eximbank environment.

The Company regularly conducted Reporting on the Good Governance Principles Implementation and conducted an assessment of the institutional governance. The Board of Directors hopes that the existing whistleblowing system mechanism can perform optimally and complement the functions carried out by internal audit.

Violation Types

1. Violation of laws and regulations, such as falsification of signatures, corruption, embezzlement, mark-ups, drug use, destruction of goods;
2. Violation of Indonesia Eximbank code of conduct, such as conflicts of interest, harassment, involvement in prohibited community activities;
3. Violation of generally accepted accounting principles;
4. Fraud in financing, underwriting, insurance and consulting services business activities including

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

konsultasi termasuk kegiatan penyediaan sumber dana bagi LPEI, kegiatan penempatan dana, kegiatan pengadaan barang dan jasa serta kegiatan operasional lainnya;

5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non finansial bagi LPEI;
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja LPEI.

Pelapor Pelanggaran

1. Pegawai LPEI
2. Rekanan LPEI
3. Nasabah LPEI
4. Pihak Terafiliasi LPEI,
5. Mitra LPEI

Unsur Pokok Whistleblowing System

- Terlapor Pelanggaran;
- Pelapor Pelanggaran;
- Direktur Eksekutif;
- Direktur Pelaksana;
- Laporan Pelanggaran;
- Verifikator;
- Investigator.

Pihak yang mengelola pengaduan

Pengelola WBS adalah Kepala Divisi Unit Kerja yang membawahkan fungsi Kepatuhan di LPEI yang bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif melalui Direktur Pelaksana/ Head of/ pejabat yang merupakan atasan Kepala Divisi Unit Kerja yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Pengelola WBS dibantu oleh Petugas WBS LPEI yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian WBS. Penunjukan/ pengangkatan Petugas WBS LPEI tersebut dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Pelaksana atau Head of yang membawahkan fungsi Kepatuhan atas usul dari Pengelola WBS

activities of providing sources of funds for the Company, fund placement activities, procurement of goods and services and other operational activities;

5. Other fraudulent acts that may cause financial or non-financial losses to the Company;
6. Actions that endanger occupational health and safety of the Company.

The Whistleblowers

1. Employees;
2. Vendors;
3. Customers;
4. Affiliated Parties, and;
5. Partners.

Principal Elements of Whistleblowing System

- Reported Violators
- Whistleblowers
- Executive Director
- Managing Director
- Whistleblowing Reports
- Verificators
- Investigators

Whistleblowing Managers

At Indonesia Eximbank, the Head of Division of the Work Unit that performs the Compliance role is the WBS Manager. The WBS Manager reports to the Executive Director through the Managing Director/Head of/ the official who is the Head of Division's superior. The Indonesia Eximbank WBS Officer, who has the necessary ability and integrity to manage the day-to-day operations of the WBS, assists the WBS Manager in carrying out its job. The Executive Director, Managing Director, or Head of the Division Responsible for Compliance Function, with the recommendation of the WBS Manager, appoints the Indonesia Eximbank WBS Officer.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tugas dan tanggung jawab Pengelola WBS sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Mengelola pelaksanaan WBS.
2. Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui WBS
3. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Pusat maupun diluar Kantor Pusat.
4. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS.
5. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektifitas WBS LPEI

Wewenang Pengelola WBS adalah:

1. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan Pengelola WBS.
2. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan tindak lanjut penanganan Laporan yang melibatkan unsur Direktur Pelaksana ke atas.
3. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari Pelapor.
4. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan WBS.

Tugas dan tanggung jawab Petugas WBS sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Membantu pengelolaan pelaksanaan WBS.
2. Melakukan verifikasi awal dan membantu penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui WBS
3. Membantu pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Pusat maupun diluar Kantor Pusat.
4. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS.
5. Melakukan Evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektifitas WBS LPEI.

The following are at least some of the WBS Manager's responsibilities:

1. Overseeing WBS implementation.
2. Coordinating the treatment of reports submitted via WBS that require further action.
3. Working with associated units both inside and outside the head office to coordinate the protection of the whistleblower.
4. Keeping an eye on how WBS handles the settlement of incoming reports.
5. Assessing the WBS Indonesia Eximbank's effectiveness and taking corrective measures.

The WBS Manager's power includes the following:

1. Choosing how to handle reports that fall under his or her purview in terms of follow-up.
2. Make recommendations to the WBS Person in Charge for the processing of reports involving personnel from the Managing Director and higher.
3. Make recommendations to the WBS manager regarding the reporter's request for protection.
4. Carrying out additional tasks that are essential for the WBS execution.

The duties and responsibilities of the WBS Officer are at least as follows:

1. Help with the administration of WBS implementation.
2. Perform preliminary verification and help with follow-up on receiving reports via the WBS.
3. Work with related divisions both inside and outside the head office to help protect the whistleblower.
4. Keeping an eye on how WBS handles the settlement of incoming reports.
5. Assess the effectiveness of the WBS Indonesia Eximbank and take appropriate corrective measures.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Mekanisme Pelaporan

1. Pelapor Pelanggaran dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran melalui sarana yang telah disediakan oleh LPEI.
2. Pelaporan Pelanggaran sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. Nama Pegawai LPEI dan Unit Kerja yang terlibat;
 - b. Jenis perbuatan yang terindikasi adanya Pelanggaran;
 - c. Waktu terjadinya Pelanggaran;
 - d. Lokasi terjadinya Pelanggaran.
3. Pelaporan Pelanggaran harus dilampirkan bukti awal yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya Pelanggaran yang dilakukan. Bukti awal dimaksud antara lain:
 - a. Dokumen-dokumen informasi Pelanggaran;
 - b. Foto-foto kejadian Pelanggaran;
 - c. Rekaman (audio/video);
 - d. Saksi (apabila ada), dan;
 - e. Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

Kebijakan Perlindungan Bagi Pelapor Pelanggaran

1. Pelapor dari unsur Pegawai LPEI yang telah beritikad baik melaporkan dugaan pelanggaran melalui sarana WBS berhak untuk:
 - a) Memperoleh informasi perkembangan laporan WBS; dan
 - b) Memperoleh perlindungan yang antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - Kerahasiaan identitas Pelapor dan laporannya.
 - Perlindungan atas tekanan fisik maupun non fisik, perlindungan penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, diskriminasi, catatan yang merugikan catatan pribadi (personal file record).
 - Perlindungan apabila Pelapor bukan pihak terkait atau tidak terlibat di dalam laporan

Reporting Mechanisms

1. The Whistleblowers can submit the Whistleblowing Report through facilities provided by the Company.
2. The Whistleblowing Report at least contains the following information:
 - a. Name of involved Employee and Work Unit;
 - b. Type of actions that indicate as Violations;
 - c. Time of Violations;
 - d. Location of Violations.
3. The Whistleblowing Report shall be completed with initial evidence that support or explain the possibility of Frauds. The initial evidences are among others:
 - a. Violation information documents;
 - b. Pictures of Violation events;
 - c. Recording (audio/video);
 - d. Witnesses (if any), and;
 - e. Data of information sources for further investigation.

Protection Policy for the Whistleblowers

1. The employee of Indonesia Eximbank who reports alleged violations in good faith through the WBS tool is entitled to:
 - a) Information on the status of the WBS report; and
 - b) Protection, including, but not limited to:
 - Confidentiality of the Whistleblower's identity and report.
 - Protection against pressure, both physical and emotional, from being demoted or demoted in rank, from being treated unfairly, from discrimination, and from records that are harmful to one's personal records (personal file records).
 - Protection in the event that the whistleblower is not associated with, was

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

dugaan pelanggaran atau laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti.

not involved in, or the purported violation report is unfounded.

2. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di LPEI.
Permintaan perlindungan dapat ditolak / dibatalkan oleh LPEI, dalam hal:
 - a) Pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas dan laporannya.
 - b) Laporan yang dibuat oleh Pelapor tidak benar, dan berdasarkan kajian dari Petugas WBS LPEI mempunyai indikasi yang tidak sesuai dengan tujuan WBS.
3. Perlindungan juga berlaku bagi pihak yang melakukan investigasi antara lain Satuan Kerja Internal Audit maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan laporan tindak pelanggaran.

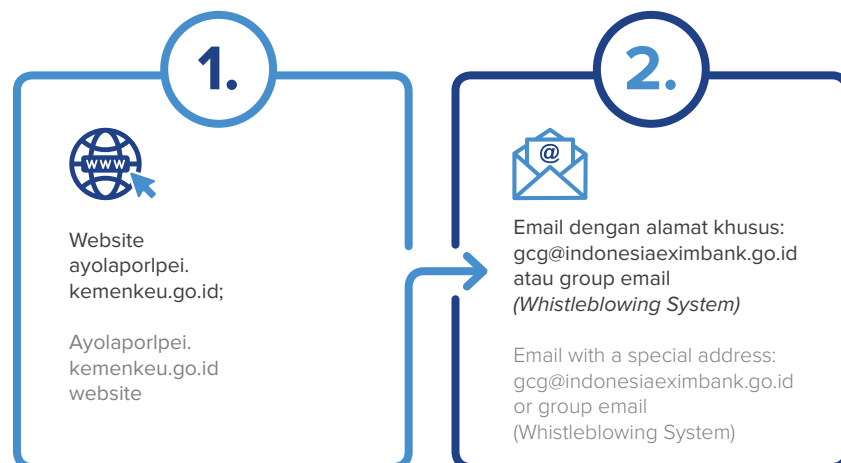
2. The protection is provided while keeping in mind the Indonesia Eximbank -applied confidentiality laws and other relevant regulations.
Indonesia Eximbank has the right to refuse or revoke a protection request if:
 - a) The whistleblower fails to uphold his or her responsibility to keep the identity and contents of the report confidential.
 - b) The report submitted by the whistleblower is false and, according to the Indonesia Eximbank WBS Officer's analysis, contains signals that are at odds with the WBS's goals.
3. Parties conducting investigations, such as the Internal Audit Unit and those who offer information about reports of infractions, are similarly protected.

Sarana Pelaporan Pelanggaran

LPEI telah menyediakan sarana penyampaian pelaporan, baik bagi pihak eksternal, maupun internal. Media atau saluran yang digunakan adalah:

Violation Reporting Media

Indonesia Eximbank has provided a means of submitting reports, both for external and internal parties. The media or channels used are:



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

pelaporan pelanggaran antara lain sebagai berikut:

1. LPEI menyediakan sarana Pelaporan Pelanggaran yang independen, bebas dan rahasia;
2. LPEI memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran;
3. LPEI memberikan perlindungan atas tindakan balasan dari Terlapor. Perlindungan ini mencakup antara lain dalam bentuk perlindungan dari tekanan fisik maupun non fisik, perlindungan penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; catatan yang merugikan dalam file data pribadinya hingga perlindungan atas gugatan hukum dan harta benda.

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran

1. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan oleh Verifikator, dengan supervisi langsung oleh Kepala Unit Kerja Kepatuhan.
2. Untuk menghindari adanya tujuan yang tidak baik dari Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran, maka Verifikator harus melakukan seleksi awal terhadap Laporan Pelanggaran yang diterima.
3. Apabila Pelaporan Pelanggaran tidak dilengkapi dengan bukti awal atau bukti awal yang diberikan tidak berkaitan secara langsung dengan Pelaporan Pelanggaran, maka Pelaporan Pelanggaran tersebut tidak layak untuk diproses lebih lanjut.
4. Tugas dan tanggung jawab Verifikator adalah:
 - a. Mengelola sarana Pelaporan Pelanggaran LPEI.
 - b. Menerima Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
 - c. Meminta bukti awal dari Pelapor Pelanggaran melalui sarana yang tersedia.
 - d. Melakukan analisa awal terhadap Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
 - e. Mengajukan izin prinsip tindak lanjut pemrosesan Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur Pelaksana Bidang.
 - f. Melakukan proses verifikasi Pelaporan Pelanggaran sesuai izin prinsip tindak-lanjut

includes the following:

1. Indonesia Eximbank provides an independent, free and confidential means of Reporting Violations;
2. Indonesia Eximbank provides protection for the confidentiality of the identity of the whistleblower;
3. Indonesia Eximbank provides protection against retaliation from the Reported Party. This protection includes, among others, in the form of protection from physical or non-physical pressure, protection from demotion or rank, unfair dismissal, harassment or discrimination in all its forms; detrimental records in his personal data file to the protection of lawsuits and property.

Whistleblowing System Management

1. The Whistleblowing Report is carried out by Verificators, with direct supervision by the Compliance Unit Head.
2. To prevent any indecent purpose from the Whistleblowing Report submitted by the Whistleblowers, then the Verificators shall carry out initial selection on the received Whistleblowing Report.
3. If the Whistleblowing Report is not submitted with initial evidence or such initial evidence is not directly related with the Whistleblowing Report, then the Report is not feasible for further process.
4. The duties and responsibilities of Verificators are:
 - a. Manage the Company Whistleblowing System.
 - b. Receive the Whistleblowing Report submitted by the Whistleblowers.
 - c. Request initial evidence from the Whistleblowers through available facility.
 - d. Carry out initial analysis on the Whistleblowing Report submitted by the Whistleblowers.
 - e. Propose permission in principle to follow up the Whistleblowing Report process to the Field Managing Director.
 - f. Carry out verification of Whistleblowing Report according to permission in principle of process

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

pemrosesan yang di setujui oleh Direktur Pelaksana Bidang.

- g. Menatausahakan Pelaporan Pelanggaran secara tertib dan aman sehingga aspek kerahasiaan dapat terjaga dengan baik.

follow up approved by the Field Managing Director.

- g. Administer the Whistleblowing Report properly and safely thereby to properly maintain its confidentiality aspect.

Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran

Mekanisme penanganan pelaporan WBS secara umum, adalah sebagai berikut:

1. Terlapor melakukan pelanggaran yang diketahui atau dialami langsung oleh pihak Pelapor Pelanggaran.
2. Pelapor membuat pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor melalui sistem WISE. Laporan yang sudah masuk ke Sistem WISE tersebut akan diverifikasi oleh Unit Kerja Kepatuhan sebagai verifikator.
3. Petugas WBS melakukan verifikasi kelengkapan unsur pengaduan (4W +1 H). Apabila terdapat keterangan yang belum lengkap, maka Petugas WBS memintakan data/keterangan pendukung kepada Pelapor.
4. Apabila data dan keterangan sudah lengkap, maka proses dilanjutkan ke Tahap Investigasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal sebagai Investigator.
 - a. Apabila terlapor merupakan Unsur Manajemen (jabatan Head of ke atas), maka verifikator memintakan persetujuan kepada Direktur Pelaksana/Head of yang membawahkan fungsi Kepatuhan untuk dilanjutkan ke Tahap Investigasi atau Langsung disampaikan kepada Direktur Eksekutif (ketua Dewan Direktur).
 - b. Apabila terlapor adalah unsur Dewan Direktur atau Direktur Pelaksana, maka laporan disampaikan kepada Direktur Eksekutif (untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk dilaporkan kepada Kementerian Keuangan (up. DJKN).

Whistleblowing System Report Handling

In general, the WBS reporting processing mechanism is as follows:

1. The Reported Party violated the law in a way that the Whistleblower knew about or personally experienced.
2. Through the WISE system, the Reporting Party files a complaint about the violations the Reported Party has committed. The Compliance Work Unit, acting as the verifier, will examine the report that has been submitted to the WISE System.
3. The WBS officer verifies the completeness of the complaint elements (4W + 1 H). If there is incomplete information, the WBS Officer requests supporting data/information from the Whistleblower.
4. If the data and information are complete, the process will proceed to the Investigation Stage, which will be carried out by the Internal Audit Unit as the Investigator.
 - a. If the reported person is a Management Element (position Head of and above), then the verifier requests approval from the Managing Director/ Head of who oversees the Compliance function to proceed to the Investigation Stage or directly submitted to the Executive Director (chairman of the Board of Directors).
 - b. If the reported party is an element of the Board of Directors or the Managing Director, then the report is submitted to the Executive Director (for further consideration it can be reported to the Ministry of Finance (up. DJKN).

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

c. Direktur Pelaksana/Head of yang membawahkan fungsi Kepatuhan memberikan catatan tambahan (jika ada) sebelum ke Tahap Investigasi.	c. The Managing Director/Head of who oversees the Compliance function provides additional notes (if any) prior to the Investigation Stage.
5. Satuan Kerja Audit Internal menginvestigasi bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan menindaklanjuti hasil investigasi terhadap terlapor, dengan menginformasikan laporan tersebut “terbukti” atau “tidak terbukti”, sebagai berikut: a. Apabila Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil investigasi diinformasikan dan diserahkan kepada Unit Kepatuhan untuk pemberhentian proses. b. Apabila Terlapor Manajemen LPEI terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil investigasi diserahkan kepada Direktur Eksekutif untuk diberikan keputusan/sanksi terhadap Terlapor. Keputusan/sanksi tersebut akan didisposisikan ke Unit Kerja SDM (melalui Direktur Pelaksana/Head of yang membidangi SDM) untuk ditindaklanjuti. c. Apabila Terlapor bukan Manajemen LPEI terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil investigasi diserahkan kepada Unit Kerja SDM untuk ditindaklanjuti.	5. The Internal Audit Unit investigates evidence of violations committed by the Reported Party and follows up on the results of the investigation on the Reported Party, by informing them that the report is “proven” or “not proven”, as follows: a. If the Reported Party is not proven to have committed a violation, then the results of the investigation will be informed and submitted to the Compliance Unit for termination of the process. b. If the Reported Party is proven to have committed a violation, the results of the investigation will be submitted to the Executive Director to give a decision/sanction against the Reported Party. The decisions/sanctions will be forwarded to the HR Work Unit (through the Managing Director/Head of HR) to be followed up. c. If the Reported Party is not the Management of Indonesia Eximbank proven to have committed a violation, then the results of the investigation are submitted to the HR Unit for follow-up.
6. Untuk terlapor bukan Manajemen LPEI, Unit Kerja SDM menyerahkan proses selanjutnya kepada Komite Etik / Kepegawaian untuk diberikan Keputusan / Sanksi atas Terlapor.	6. For the reported person who is not Indonesia Eximbank Management, the HR Work Unit submits the next process to the Ethics / Personnel Committee to give a Decision / Sanction on the Reported Party.
7. Komite Etik/Kepegawaian mengeluarkan Keputusan/ Sanksi atas Terlapor, dan menyerahkan Keputusan/ sanksi tersebut kepada Unit Kerja SDM untuk ditindaklanjuti	7. The Ethics/Personnel Committee issues Decisions/ Sanctions on the Reported Party, and submits the Decisions/sanctions to the HR Work Unit for follow-up.
8. Unit Kerja SDM menindaklanjuti Keputusan/Sanksi baik yang diberikan oleh Direktur Eksekutif maupun Komite Etik/Kepegawaian. Setelah tindak lanjut atas Keputusan/Sanksi tersebut, Unit Kerja yang bertanggungjawab atas WBS membuat Laporan Penanganan Pelanggaran.	8. The HR Unit follows up on Decisions/Sanctions both those given by the Executive Director and the Ethics/ Performance Committee. After following up on the Decision/Sanction, the Work Unit responsible for the WBS makes a Violation Handling Report.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Disamping uraian di atas, dilakukan penguatan sistem pengendalian internal dengan peluncuran Whistleblowing System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu (Itjen) dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Kemenkeu (Pusintek)). Yang ditindaklanjuti dengan Melakukan Koordinasi Asistensi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentang sistem Pencegahan dan Penindakan (profiling, whistle blowing) dengan membangun front office penerimaan laporan WBS melalui: <https://ayolaporlpei.kemenkeu.go.id/#/>.

Hasil Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2022, tidak terdapat pelaporan pada Whistleblowing System (WBS).

Tindak Lanjut Pengaduan

Selama tahun 2022, tidak terdapat pelaporan pada Whistleblowing System (WBS).

In addition to the description above, the internal control system was strengthened by launching the Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Ministry of Finance (in collaboration with the Inspectorate General of the Ministry of Finance (Itjen) and the Center for Information Systems and Financial Technology of the Ministry of Finance (Pusintek)). Which was followed up by Coordinating the Assistance of the Inspectorate General of the Ministry of Finance regarding the Prevention and Enforcement system (profiling, whistle blowing) by building a front office for receiving WBS reports through: <https://ayolaporlpei.kemenkeu.go.id/#/>.

Complaint Handling Results

During 2022, there were no reports on the Whistleblowing System (WBS).

Follow-up of Complaints

During 2022, there were no reports on the Whistleblowing System (WBS).

PENERAPAN PEDOMAN GCG

GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI			
No	Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Managed in Internal Regulations	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors	a. PDD No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana a. PDD No. 0007/PDD/12/2020 concerning the Working Code Guidelines of the Board of Directors. b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 on The Working Procedures Guidelines of The Managing Director	a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank b. PMK No. 208/PMK.06/2021 on the Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Completeness and implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board and committees and work units that carry out internal control functions	a. PDD No. 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI b. PDE 0030/PDE/12/2022 tentang Sembilan Komite Dibawah Direktur Eksekutif c. PDE No.0033/PDE/08/2019 tentang Komite Pembiayaan LPEI d. PDE 0025/PDE/12/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Pembiayaan e. PDE No. 0008/PDE/02/2018 tentang Komite Personalialia LPEI f. MPO 0018/CEO/08/2021 tentang Perpanjangan dan Perubahan Memorandum Prosedur Nomor 0037/CEO/08/2020 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi LPEI g. PDE 0026/PDE/09/2021 tentang Komite Asset dan Liabilities Management LPEI. h. PDE 0033/PDE/12/2021 Komite Pengembangan Produk i. PDE No. 0032/PDE/12/2021 tentang Komite Kebijakan & Pedoman j. PDE 0031/PDE/12/2021 tentang Komite Manajemen Resiko LPEI. k. PDE 0029/PDE/10/2021 tentang Komite Pengadaan LPEI l. MPO.0086/KDE/12/2020 tentang Komite Etik dan Disiplin Pegawai LPEI m. KDE 0089/KDE/10/2021 tentang komite Pembiayaan Program PKE dalam rangka Mendukung Sektor Usaha UKM Berorientasi Ekspor n. KDE 0090/KDE/10/2021 tentang Komite Pembiayaan Supply Chain Financing o. KDE 0100/KDE/11/2021 tentang Komite Penjaminan Program Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN p. PDD No. 0003/PDD/12/2021 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal LPEI	a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank b. PMK No. 208/PMK.06/2021 on the Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI No Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Managed in Internal Regulations	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
	a. PDD No. 0013/PDD/10/2022 on the Charter of the Sharia Supervisory Board of Indonesia Eximbank b. PDE 0030/PDE/12/2022 on Nine Committees Under the Executive Director c. PDE No.0033/PDE/08/2019 on Indonesia Eximbank Financing Committee d. PDE 0025/PDE/12/2022 on Financing Operational Guidelines Standards e. PDE No. 0008/PDE/02/2018 on Indonesia Eximbank Personnel Committee f. MPO 0018/CEO/08/2021 on Extension and Amendment of Memorandum of Procedure No. 0037/CEO/08/2020 concerning Information System Technology Committee of Indonesia Eximbank g. PDE 0026/PDE/09/2021 on Indonesia Eximbank's Asset and Liabilities Management Committee. h. PDE 0033/PDE/12/2021 on Product Development Committee i. PDE No. 0032/PDE/12/2021 on Policy & Guideline Committee j. PDE 0031/PDE/12/2021 on Indonesia Eximbank's Risk Management Committee. k. PDE 0029/PDE/10/2021 on Indonesia Eximbank's Procurement Committee l. MPO.0086/KDE/12/2020 on the Ethics and Discipline Committee of Indonesia Eximbank Employees m. KDE 0089/KDE/10/2021 on the PKE Program Financing committee to Support the Export-Oriented SME Business Sector n. KDE 0090/KDE/10/2021 on Supply Chain Financing Committee o. KDE 0100/KDE/11/2021 on the Government Guarantee Program Guarantee Committee for Corporate Business Actors in the Context of Implementing the PEN Program p. PDD No. 0003/PDD/12/2021 on Indonesia Eximbank's Internal Control System Policy.	
3 Fungsi Kepatuhan Compliance Function	a. PDD 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI. b. PDE No. 0059/PDE/11/2019 tentang Manual Operasional Piagam Kepatuhan (<i>Compliance Charter</i>) LPEI. a. PDD 0015/PDD/12/2022 on the Policy of Compliance Function and Implementation of AML CTF Program of Indonesia Eximbank. b. PDE No. 0059/PDE/11/2019 on Indonesia Eximbank Compliance Charter Operational Manual.	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. c. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI.

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI		
No	Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Managed in Internal Regulations Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
		a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank b. PMK No. 58/PMK.06/2020 concerning the Guidance and Supervision of Indonesian Export Financing Institutions. c. PMK No. 208/PMK.06/2021 on the Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank d. Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.05/2022 regarding Indonesia Eximbank Supervision.
3.1. LHKPN 3.1. LHKPN	a. PDE 0008/PDE/06/2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Lapor LHKPN. a. PDE 0008/PDE/06/2022 on the Obligation to Submit State Administrator Assets Reports (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials Required to Report LHKPN.	a. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI. d. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. e. Perkom KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. f. Perkom KPK No. 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. a. Law No. 28 of 1999 on Clean and Free State Administrators from Collusion-Corruption-Nepotism. b. Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. c. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. d. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. e. Perkom KPK No. 7 of 2016 on Procedures for Registration, Announcement, and Inspection of State Administrator Assets. f. Perkom KPK No. 2 of 2020 on Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 dated May 31, 2016 on Procedures for Registration, Announcement and Inspection of State Administrator Assets.

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI		Telaah Diatur Dalam Peraturan Internal Managed in Internal Regulations	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
No	Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles		
3.2. Gratifikasi 3.2. Gratification		PDE 0013/PDE/08/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan LPEI. PDE 0013/08/2022 on the Gratification Control in Indonesia Eximbank Environment.	a. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, beserta perubahannya. c. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI. e. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. f. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. g. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI.
			a. Law No. 11 of 1980 on Bribery. b. Law No. 28 of 1999 on Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion and Nepotism, and its amendments. c. Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption with amendments to Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. d. Law No.2 of 2009 on Indonesia Eximbank. e. PMK No. 58/PMK.06/2020 on Development and Supervision of Indonesia Eximbank. f. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. g. Corruption Eradication Commission Regulation No. 02 of 2019 on Gratification Reporting. h. Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank.

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI		
No	Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
3.3. Whistleblowing System	a. PDE No.0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing system</i>) LPEI. b. PDE No.0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> LPEI.	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI. b. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI.
	a. PDE No. 0018/PDE/03/2012 concerning Indonesia Eximbank Whistleblowing System Manual b. PDE No. 0045/PDE/10/2019 concerning Operational Manual for the Implementation of the Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy	a. Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank. a. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. a. Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank.
3.4. Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	a. PDE No. 0005/PDE/01/2018 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian. b. PDD 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI. c. PDE No. 0013/PDE/03/2020 tentang Manual Pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT LPEI Terorisme (APU & PPT) LPEI. d. PDE No. 0027/PDE/11/2020 Tentang Manual Operasional Penerapan Know Your Employee (KYE) LPEI.	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI. b. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. c. Peraturan Kepala PPATK No. 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. d. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. e. Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank f. POJK No. 23/POJK.01/2019 Tanggal 18 September 2019Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan g. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3.4.1. Internal: <i>Know Your Employee</i>		
3.4.2. Eksternal: Nasabah & Rekanan		
3.4. Know Your Customer Principles in the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Program (AML CTF)	a. PDE No. 0005/PDE/01/2018 on Employment System Policy. b. PDD 0015/PDD/12/2022 on the Compliance Function Policy and AML CTF Program Implementation of Indonesia Eximbank. c. PDE No. 0013/PDE/03/2020 on the Implementation Manual of the Indonesia Eximbank Terrorism AML-PPT Program (AML CTF). d. PDE No. 0027/PDE/11/2020 on the Operating Manual of Know Your Employee (KYE) Implementation of Indonesia Eximbank.	
3.4.1. Internal: Know Your Employee		
3.4.2. External: Customers & Partners		

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI		Telaah Diatur Dalam Peraturan Internal Managed in Internal Regulations	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
No	Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles		
			a. Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank. b. PMK No. 143/PMK.010/2009 on Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. c. Regulation of the Head of PPATK No. 02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users With the Potential to Commit Money Laundering. d. POJK No. 12/POJK.01/2017 on the Implementation of the Anti-Money Laundering Program and the Prevention of the Financing of Terrorism in the Financial Services Sector. e. OJK Circular Letter No. 37/SEOJK.05/2017 on Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Non-Bank Financial Industry Sector f. POJK No. 23 /POJK.01/2019 Dated 18 September 2019 on Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector. g. Regulation of the Head of PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 on Categories of Service Users with the Potential to Commit Money Laundering.
3.5	Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan	a. PDD 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI. b. PDE No. 0013/PDE/03/2020 tentang Manual Pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT LPEI Terorisme (APU & PPT) LPEI.	a. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan. b. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
	3.5. Suspicious Financial Transaction Report	a. PDD 0015/PDD/12/2022 on the Compliance Function Policy and Implementaion of AML CTF Program of Indonesia Eximbank. b. PDE No. 0013/PDE/03/2020 on the AML-CTF Program Manual of Indonesia Eximbank	

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI			
No	Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Managed in Internal Regulations	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
			a. Financial Transaction Reporting and Analysis Center Regulation No. 1 of 2021 on Procedures for Submitting Suspicious Financial Transaction Reports, Cash Financial Transactions, and Financial Transactions Fund Transfer From and Abroad Through the GoAML Application for Financial Service Providers. b. POJK No. 12/POJK.01/2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector. c. Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.01/2019 of 2019 Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector
3.6.	Kepatuhan pemenuhan pelaporan kepada eksternal termasuk kepada regulator	PDE No.0067/PDE/12/2019 tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggungjawab Pelaporan LPEI.	a. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI d. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05.2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI
3.6.	Compliance with external reporting including to regulators	PDE No.0067/PDE/12/2019 on Operating Manual for the Determination of Work Units in Charge of Indonesia Eximbank Reporting.	a. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. b. PMK No. 58/PMK.06/2020 on the Development and Supervision of Indonesia Eximbank. c. Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank. d. OJK Circular No. 15/SEOJK.05.2022 on Indonesia Eximbank Soundness Level Assessment.

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI			
No	Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Managed in Internal Regulations	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
	3.7. Kepatuhan penyelesaian advance pegawai 3.7. Compliance with employee advance settlement	PDE No.0036/PDE/10/2018 tentang Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI. PDE No.0036/PDE/10/2018 on the Limit of Authority for Approval of Indonesia Eximbank Budget Use.	a. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI. a. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. b. PMK No. 58/PMK.06/2020 on Development and Supervision of Indonesia Eximbank. c. Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank.
	1.8 Anti Fraud	PDE No. 0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Strategi Anti Fraud LPEI. PDE No. 0045/PDE/10/2019 on Operating Manual of Anti Fraud Strategy of Indonesia Eximbank.	PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
4	Audit Intern & Eksternal Internal Audit	a. PDD No. 0016/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI. b. PDE No. 0027/PDE/12/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Audit Internal. c. PDE No. 0014/PDE/08/2022 tentang Piagam Audit Internal. a. PDD No. 0016/PDD/12/2022 regarding Policy on the Implementation of Internal Audit Function of Indonesia Eximbank. b. PDE No. 0027/PDE/12/2022 on Internal Audit Operational Guideline Standards. c. PDE No. 0014/PDE/08/2022 on Internal Audit Charter.	a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI c. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI e. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05.2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI a. Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank b. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. c. PMK No. 58/PMK.06/2020 on the Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank. d. Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank. e. OJK Circular No. 15/SEOJK.05.2022 on Indonesia Eximbank Soundness Level Assessment.

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI			
No	Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Managed in Internal Regulations	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
5	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern Implementation of risk management including internal control system	a. PDD No. 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise LPEI. b. PDE No. 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional Manajemen Risiko (Enterprise Risk Management Manual) LPEI. c. PDD No. 0003/PDD/12/2021 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal LPEI. a. PDD No. 0017/PDD/12/2022 on Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Eximbank. b. PDE No. 0032/PDE/09/2018 on Indonesia Eximbank Enterprise Risk Management Manual. c. PDD No. 0003/PDD/12/2021 on Internal Control System Policy of Indonesia Eximbank.	a. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI. d. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05.2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI. a. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. b. PMK No. 58/PMK.06/2020 concerning the Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank c. Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank. d. OJK Circular No. 15/SEOJK.05.2022 on Indonesia Eximbank Soundness Level Assessment.
6	Pengadaan barang & jasa Procurement of goods & services	a. PDD No. 0002/PDD/06/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI. b. PDE No. 0021/PDE/10/2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa LPEI. a. PDD No. 0002/PDD/06/2022 on Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Policy. b. PDE No. 0021/PDE/10/2022 on Procurement of Goods/Services of Indonesia Eximbank.	PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
7	Penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Long term plan and annual work plan and budget development	PDE No. 0001.02/PDE/03/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Bisnis dan Rencana Jangka Panjang (RJP) LPEI. PDE No. 0001.02/PDE/03/2022 on the Development of the Annual Work Plan & Budget (RKAT), Business Plan and Corporate Plan (RJP) of Indonesia Eximbank.	a. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI. a. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. b. Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank.

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG GUIDELINES APPLICATION

Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI		Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Managed in Internal Regulations	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
No	Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles		
8	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Transparency of financial and non-financial conditions	a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 tentang Kebijakan Akuntansi LPEI. b. PDE No. 0018/PDE/09/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Standar Akuntansi LPEI. a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 on Indonesia Eximbank Accounting Policies. b. PDE No. 0018/PDE/09/2022 on Indonesia Eximbank Accounting Standard Operating Procedures.	POJK No.75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. POJK No.75/POJK.04/2017 on Responsibilities of the Board of Directors on Financial Statements.
9	Pelaporan internal dan benturan kepentingan Internal reporting and conflicts of interest	PDE No. 0067/PDE/12/2019 tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaporan LPEI. PDE No. 0067/PDE/12/2019 on Operational Manual for the Determination of Work Units in Charge of Indonesia Eximbank Reporting.	a. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI. a. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. b. Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank.



PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS & SERVICES PROCUREMENT

Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, serta Standar Operasional Prosedur No. 0021/PDE/10/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Pengadaan Barang dan Jasa LPEI.

Prinsip Dalam Pengadaan Barang & Jasa

Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa LPEI harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal.
- Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa LPEI harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa LPEI bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- Terbuka, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- Bersaing, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak mengarah untuk

Goods & Services Procurement

Goods and Services Procurement Policy refers to the Board of Directors Regulation (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, and Operational Procedure Standard No. 0021/PDE/10/2022 concerning Goods & Services Procurement Operating Manuals.

Goods and Services Procurement Principles

The principles in the procurement of goods and services are as follows:

- Efficient, which means Indonesia Eximbank Procurement of Goods and Services must be attained using minimum funds and power to achieve quality and targets within the stipulated time or using funds that have been determined to achieve results and targets with maximum quality.
- Effective, which means Indonesia Eximbank Procurement of Goods and Services must be in accordance with the specified needs and targets and provide maximum benefits.
- Transparent, which means that all provisions and information regarding Indonesia Eximbank Procurement of Goods and Services are clear and can be widely known by interested Goods and Services Providers and the general public.
- Open, which means that all interested suppliers of goods and services as well as the general public can participate in the procurement of goods and services.
- Competitive, which means that the procurement of goods and services must be done through fair competition among as many providers of equal goods and services and meet the specified requirements hence goods and services can be offered competitively and there are no interventions that interfere with the creation of market mechanisms in the procurement of goods and services.
- Fair and non-discriminatory, which means providing equal treatment to all prospective Goods and Services Providers and does not lead to benefit certain parties

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS & SERVICES PROCUREMENT

memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun, dengan tetap memperhatikan kepentingan LPEI.

- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Kemandirian berarti suatu keadaan dimana keadaan barang dan jasa dikelola secara profesional dan tidak ada benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- i. Kehati-hatian berarti senantiasa memperhatikan langkah antisipasi untuk menghindari kerugian terhadap lembaga selama proses Pengadaan Barang dan Jasa.
- j. Independen berarti dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan terhindar dari *conflict of interest*.

Metode pengadaan

- a. Metode pemilihan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1. Pelelangan Umum;
 - 2. Pemilihan Langsung;
 - 3. Pengadaan Langsung;
 - 4. Penunjukan Langsung; atau
 - 5. Kontes/Sayembara.
- b. Metode pemilihan untuk pengadaan Jasa Konsultasi dilaksanakan dengan:
 - 1. Seleksi Umum;
 - 2. Seleksi Langsung;
 - 3. Pengadaan Langsung;
 - 4. Penunjukan Langsung; atau
 - 5. Sayembara.

Ketentuan Dalam Pengelolaan Vendor

Ketentuan pengelolaan vendor diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) Nomor No. 0041/PDE/09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa.

in any way and or reason, with due observance to the interests of Indonesia Eximbank.

- g. Accountable, which means must be in accordance with the rules and regulations related to the Procurement of Goods and Services for accountability.
- h. Independence, which is a situation where the condition of goods and services is managed professionally and there is no conflict of interest and influence or pressure from any party.
- i. Prudent, which means to always regard the anticipatory steps to prevent losses to the Company during the process of Goods and Services Procurement.
- j. Independent, which means that the implementation of Goods and Services Procurement shall be carried out with high integrity and free from conflict of interest.

Procurement methods

- a. The selection method for Other Goods and Services Providers can be implemented by:
 - 1. General Auction;
 - 2. Direct Selection;
 - 3. Direct Procurement;
 - 4. Direct Appointment; or
 - 5. Contest/Competition.
- b. Selection method for Consultancy Services can be implemented by:
 - 1. General Selection;
 - 2. Direct Selection;
 - 3. Direct Procurement;
 - 4. Direct Appointment; or
 - 5. Contest.

Vendor Management Stipulations

Vendor management is stipulated in the Executive Director Regulation (PDE) No. 0041/PDE/09/2019 concerning the Goods & Services Procurement Operating Manual.

PENGADAAN BARANG DAN JASA GOODS & SERVICES PROCUREMENT

Kode Etik Di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) No.0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung, maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan semua pihak yang terkait baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan LPEI dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, unit kerja atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan LPEI.
- Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Procurement of Goods and Services Code of Conduct

Pursuant to the Board of Directors (PDD) Regulation No. 0004/PDD/04/2018 regarding Indonesia Eximbank Good and Services Procurement Policy, the Parties engage in Goods and Services Procurement must comply with the following ethics:

- Carry out the tasks in an orderly manner accompanied by a sense of responsibility to achieve the goals, efficiency, and accuracy of the achievement of Procurement of Goods and Services objectives.
- Work professionally and independently and maintain the confidentiality of documents related to the Procurement of Goods and Services, which by their nature must be kept confidential to prevent irregularities in the Procurement of Goods and Services.
- Not influencing each other directly or indirectly resulting in unfair competition.
- Accept and be responsible for all decisions made in accordance with the written agreement of the parties.
- Avoid and prevent conflicts of interest of all parties involved either directly or indirectly in the process of procurement of goods and services.
- Avoid and prevent financial squander and leaks in the procurement of goods and services.
- Avoid and prevent the abuse of authority and/ or collusion for the purpose of personal gain, work units or other parties, which can directly or indirectly harm the Company.
- Do not accept, not offer and do not promise to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates or any form from or to anyone who is known or reasonably suspected in connection with the Procurement of Goods and Services.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS & SERVICES PROCUREMENT**Pelaksanaan Kegiatan**

Sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, Para Pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di LPEI terdiri dari:

- a. Unit Kerja Pengusul Pengadaan;
- b. Unit Kerja Pelaksana Pengadaan;
- c. Panitia Pengadaan; dan
- d. Unit Kerja Pelaksana Pengendalian Biaya.

Sistem Pengawasan

Sesuai Pasal 18 (1) Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI dinyatakan bahwa:

“Direktur Eksekutif wajib melakukan pengawasan terhadap Unit Kerja Pelaksana Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa serta menugaskan Unit Kerja yang membidangi Internal Audit untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku”.

Activity Implementations

In accordance with the Board of Directors (PDD) Regulation No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, the Parties engage in Goods and Services Procurement in Indonesia Eximbank consist of:

- a. Procurement Proposing Unit;
- b. Procurement Implementation Unit;
- c. Procurement Committee; and
- d. Cost Control Implementing Unit.

Supervision System

In accordance with Article 18 (1) Board of Directors Regulation (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy states that:

“The Executive Director shall supervise the Procurement Executing Unit and the Goods and Services Procurement Committee in carrying out the Procurement of Goods and Services and assign the Unit in charge of Internal Audit to conduct supervision in accordance with prevailing regulations”.



PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)

Penerapan Program APU-PPT

Secara umum Divisi Kepatuhan adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di LPEI. Penerapan program APU-PPT berbasis risiko (*risk-based approach*) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam budaya LPEI. Pejabat senior bertanggung jawab untuk memastikan bahwa LPEI memiliki struktur pengendalian internal yang efektif antara lain dibuktikan dengan:

1. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
2. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU-PPT; dan
3. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

Pejabat senior harus menciptakan budaya manajemen risiko dan kepatuhan, memastikan bahwa pegawai taat terhadap kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk membatasi dan mengontrol risiko.

Dasar Regulasi

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Implementation of AML & CTF Program

Compliance Division in general is a working unit responsible in ensuring the practice of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML & CTF) in Indonesia Eximbank. The effective risk-based approach of AML CTF shall be implemented in internal control and internalized within the Company's culture. The senior executives are responsible in ensuring effective internal control structure in Indonesia Eximbank, among others by:

1. Establishing adequate internal policies, procedures and monitoring;
2. Limitation of authority and responsibilities of relevant unit with the AML and CTF program practices; and
3. Independent audit to ensure the effectiveness of AML and CTF programs.

Senior executives shall create a culture of risk management and compliance, ensuring that employees adhere to policies and procedures intended to limit and control risk.

Regulation Base

- a. Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 concerning the Indonesia Eximbank.
- b. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
- c. Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes.
- d. Government of the Republic of Indonesia Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)
IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; f. Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; g. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan; i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 / POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank; l. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; m. Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa	e. Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 61 of 2021 concerning Amendments to Government Regulation No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. f. Regulation of the Minister of Finance No. 58/PMK.06/2020 concerning the Development and Supervision of Indonesian Export Financing Institutions; g. Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles for Indonesian Export Financing Institutions; h. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of the Financing of Terrorism Programs in the Financial Services Sector. i. Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of the Financing of Terrorism Programs in the Financial Services Sector; j. Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.05/2022 concerning Supervision of Indonesian Export Financing Institutions; k. Financial Services Authority Circular Letter No. 37/SEOJK.05/2017 concerning Guidelines for Implementing Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Non-Bank Financial Industry Sector; l. OJK Circular Letter No. 38/SEOJK.01/2017 concerning Guidelines for Participatory Blocking of Customer Funds in the Financial Services Sector whose Identities Are Listed in the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; m. OJK Circular Letter No. 29/SEOJK.01/2019 concerning Amendments to OJK Circular Letter No. 38/SEOJK.01/2017 concerning Guidelines for Participating Blocking of Customer Funds in the

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)

Keuangan yang identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;

- n. Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- o. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- p. Peraturan PPATK No. 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- q. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Financial Services Sector whose Identities are Listed in the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations;

- n. OJK Circular Letter No. 31/SEOJK.01/2019 concerning Guidelines for Immediate Blocking of Customer Funds in the Financial Services Sector whose Identities Are Listed in the List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Funding;
- o. Regulation of the Head of PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users with the Potential to Commit the Crime of Money Laundering;
- p. PPATK Regulation No. 1 of 2021 concerning Procedures for Submission of Reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, and Financial Transactions of Fund Transfers From and to Abroad Through the GOAML Application for Financial Service Providers;
- q. Regulation of the Head of PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 concerning Integrated Service User Information Systems.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan dalam Penerapan APU dan PPT di LPEI

Dalam pelaksanaan penerapan program APU PPT di LPEI, Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan telah dilakukannya proses identifikasi, penilaian, dan pemahaman risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk memastikan terpenuhinya kewajiban untuk:

- a. Mendokumentasikan penilaian risiko APU PPT;
- b. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- c. Mengkinikan penilaian risiko APU PPT secara berkala; dan

Duties and Responsibilities of the Compliance Unit in the Implementation of AML and CFT in Indonesia Eximbank

In implementing the AML CFT program at Indonesia Eximbank, the Compliance Unit is responsible for ensuring that the process of identifying, assessing, and understanding the risks of Money Laundering and/or Terrorism Financing related to customers, countries or geographic areas, products, services, transactions or delivery channels, including ensuring the fulfillment of obligations to:

- a. Document AML CFT risk assessment;
- b. Consider all relevant risk factors before establishing the overall level of risk, as well as the level and type of risk mitigation adequate to be applied;
- c. Updating AML CFT risk assessment periodically; and

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)

- d. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko APU PPT kepada instansi yang berwenang.

Penerapan program APU PPT berbasis risiko (*risk based approach*)

Penerapan program APU PPT berbasis risiko (*risk based approach*) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam budaya LPEI. Pejabat senior bertanggung jawab untuk memastikan bahwa LPEI memiliki struktur pengendalian internal yang efektif antara lain dibuktikan dengan:

- Adanya kebijakan, prosedur, system dan pemantauan internal yang memadai untuk mendukung pelaksanaan di LPEI;
- Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
- Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.
- Menciptakan budaya manajemen risiko dan kepatuhan, tidak terbatas pada pelatihan dan sosialisasi, dan memastikan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan internal dan eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Dalam Penerapan APU dan PPT di LPEI

Dalam pelaksanaan penerapan program APU PPT di LPEI, Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan telah dilakukannya proses identifikasi, penilaian, dan pemahaman risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk memastikan terpenuhinya kewajiban untuk:

- d. Have an adequate mechanism related to the provision of AML CFT risk assessment information to the competent authorities.

AML/CFT program implementation based on risk (*risk based approach*)

Effective implementation of AML/CFT program based on risk (*risk-based approach*) must be implemented in internal control and internalized in Indonesia Eximbank culture. Senior officials are in charge of making sure Indonesia Eximbank has an effective internal control structure, which is demonstrated by, among other things:

- The existence of sufficient policies, procedures, systems, and internal monitoring to support the implementation at Indonesia Eximbank;
- The existence of limits on the authority and responsibility of work units related to the implementation of the AML and CFT program; and
- The independent examination that is done to verify the effectiveness of the AML and CFT program.
- Fostering a culture of risk management and compliance, including employee compliance with internal and external regulations, in addition to training and dissemination.

Duties and Responsibilities of the Compliance Unit in the Implementation of AML/CFT at Indonesia Eximbank

The Compliance Working Unit is in charge of ensuring the identification, assessment, and understanding of the risk of money laundering and/or criminal acts of financing terrorism related to clients, nations or geographic areas, products, services, transactions, or distribution networks (*delivery channels*) as part of the implementation of the AML/CFT program at Indonesia Eximbank. This includes ensuring the fulfillment of obligations to:

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER TERRORISM FINANCING (CTF)

a. Mendokumentasikan penilaian risiko APU PPT; b. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan; c. Mengkinikan penilaian risiko APU PPT secara berkala; dan d. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko APU PPT kepada instansi yang berwenang.	a. Document the AML/CFT risk assessment; b. Take into account all pertinent risk factors when determining the overall level of risk; as well as the appropriate degree and type of risk mitigation to use; c. Regularly update the AML/CFT risk assessment; and d. Have a sufficient mechanism in place for informing the authorized agency of the results of the AML/CFT risk assessment.

TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

FINANCIAL AND NON-FINANCIAL TRANSPARENCY OF THE INSTITUTION



Salah satu transparansi lembaga tercermin dari pelaporan yang dilakukan LPEI kepada pemangku kepentingan secara berkala selama tahun 2022 dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Laporan kepada Kementerian Keuangan
 - a. Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
 - b. Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
 - c. Laporan Pengawasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
 - d. Laporan Pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan Piutang LPEI
 - e. Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN
 - f. Laporan Keuangan Tahunan Audited
 - g. Laporan Penerapan Prinsip Manajemen Risiko
 - h. Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI
2. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - a. Laporan Rencana Bisnis
 - b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis
 - c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
 - d. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah
 - e. Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data Nasabah
 - f. Laporan Penerapan Prinsip Manajemen Risiko
 - g. Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI
 - h. Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan
 - i. Laporan Penugasan Pemerintah kepada LPEI
 - j. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
 - k. Laporan Bulanan

One indicator of the institution's transparency is the periodic reporting made to stakeholders by Indonesia Eximbank in 2022 in line with relevant laws and regulations, among other things:

1. Report to the Ministry of Finance
 - a. Annual Work Plan and Budget (RKAT) Draft Report
 - b. Report on the Realization of the Annual Work Plan and Budget (RKAT)
 - c. Annual Work Plan and Budget (RKAT) Monitoring Report
 - d. Report on the Implementation of Write-off and/or Collection of Indonesia Eximbank Receivables
 - e. PEN Government Investment Implementation Report
 - f. Audited Annual Financial Statements
 - g. Report on the Implementation of Risk Management Principles
 - h. Report on the Implementation of Indonesia Eximbank Good Governance Principles
2. Report to the Financial Services Authority (OJK)
 - a. Business Plan Report
 - b. Business Plan Realization Report
 - c. Business Plan Monitoring Report
 - d. Customer Data Updating Activity Plan Report
 - e. Customer Data Updating Activity Realization Report
 - f. Report on the Implementation of Risk Management Principles
 - g. Report on the Implementation of Indonesia Eximbank Good Governance Principles
 - h. Health Level Self-Assessment Report
 - i. Report on Government Assignment to Indonesia Eximbank
 - j. Sustainable Finance Action Plan Report
 - k. Monthly Report

TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA FINANCIAL AND NON-FINANCIAL TRANSPARENCY OF THE INSTITUTION

3. Laporan kepada Bank Indonesia (BI) a. Laporan Rencana Utang Luar Negeri b. Laporan Utang Luar Negeri c. Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) d. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan BI RTGS e. Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi	3. Report to Bank Indonesia (BI) a. Foreign Debt Plan Report b. Foreign Debt Report c. Foreign Exchange Traffic (LLD) Report d. BI RTGS Compliance Assessment Report e. KPPK Report that has gone through the Attestation Procedure
4. Laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	4. Report to the Corruption Eradication Commission (KPK) a. State Organizer Wealth Report (LHKPN)

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES



LPEI telah memiliki beberapa kebijakan terkait pencegahan korupsi, antara lain kebijakan mengenai:

There are several policies regarding corruption prevention in Indonesia Eximbank:

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

REPORT OF STATE OF OFFICIALS WEALTH (LHKPN)

Dasar Peraturan

Regulatory References

- Eksternal
 1. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
 4. Surat Edaran No. SE-08/01/10/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN Setelah Diberlakukannya Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 5. Pasal 57 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 Tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Internal
 1. Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/06/2022 tentang Pencabutan Peraturan Dewan Direktur Nomor 0001/PDD/07/2017 Tanggal 21 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat LPEI.
 2. Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0008/PDE/06/2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Laporan LHKPN.

- External
 1. Act No. 28 of 1999 concerning Clean and Free State Administrators.
 2. Act No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
 3. KPK Regulation No. 2 of 2020 concerning the Amendments to KPK Regulation No. 7 of 2016 concerning the Procedures of Registration, Announcement, and Examination of State Administrators' Assets.
 4. Circular No. SE-08/01/10/2016 Regarding Technical Instructions for Submission and Management of LHKPN After the Enactment of KPK Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Administrators' Assets.
 5. Article 57 and appendix of Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank.
- Internal
 1. Board of Directors Regulation No. 0003/PDD/06/2022 on the Revocation of Board of Directors Regulation No. 0001/PDD/07/2017 dated July 21, 2017 on the Obligation to Submit State Officials' Asset Reports for Indonesia Eximbank Officials.
 2. Executive Directors Regulation No. 0008/PDE/06/2022 on the Obligation to Submit the State Organizer's Asset Report (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials Required to Report LHKPN.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

Penerapan di LPEI

Monitoring dan koordinasi atas pelaksanaan dan penerapan LHKPN di LPEI menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemantauan dan reminder kepada seluruh Wajib Laporkan LHKPN LPEI kepada seluruh Kepala Divisi, Head of, Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif, dan Dewan Direktur untuk mengisi formulir e-Filing LHKPN.
2. Penunjukkan sebagai petugas Admin Instansi KPK.
3. Penginputan dokumen e-Filing melalui sistem e-LHKPN dan menyampaikan surat kepada KPK perihal rekapitulasi Wajib Laporkan LHKPN LPEI.
4. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN dengan jumlah peserta sebanyak 35 pejabat wajib laporkan LHKPN dan pembicara/pemateri langsung dari KPK.

PELATIHAN / SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Sebagai upaya untuk mewujudkan budaya anti korupsi, anti penyuapan dan menanamkan nilai-nilai integritas, selama tahun 2022 LPEI telah menyelenggarakan beberapa pelatihan/sosialisasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN KPK dengan pembicara/pemateri langsung dari KPK
2. Penyampaian materi Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS) pada sesi pelatihan New Hire Orientation (NHO), Relationship Manager Development Program (RMDP), dan persiapan sertifikasi manajemen risiko.
3. Melaksanakan Sosialisasi Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS) kepada seluruh pegawai LPEI.
4. Mengikuti e-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK kepada seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan.

Implementation in Indonesia Eximbank

The Compliance Working Unit is in charge of overseeing and coordinating LHKPN's implementation and application at Indonesia Eximbank, with the following implementations:

1. Monitoring and reminding all Indonesia Eximbank LHKPN Mandatory Reporters to complete the LHKPN e-Filing form. This applies to all Division Heads, Head of, Managing Directors, Executive Directors, and Board of Directors.
2. Appointment as an administrator for KPK Agency.
3. Using the e-LHKPN system to input documents for electronic filing and sending a letter to the KPK with a summary of the Indonesia Eximbank LHKPN Mandatory Reporters.
4. Arranging for 35 participants, including speakers and presenters from the KPK, to socialize and receive technical assistance on how to complete the E-LHKPN Application.

ANTI CORRUPTION TRAINING / DISSEMINATION

In 2022, Indonesia Eximbank performed the following training/socialization programs to establish integrity values and foster a culture of anti-corruption and anti-bribery:

1. Conducted dissemination and technical guidance on how to fill in the KPK E-LHKPN Application with speakers / presenters directly from the KPK.
2. Submission of Gratification and *Whistleblowing System* (WBS) material at the New Hire Orientation (NHO) training session, Relationship Manager Development Program (RMDP), and risk management certification preparation.
3. Conducting Gratification and *Whistleblowing System* (WBS) Socialization to all Indonesia Eximbank employees.
4. Participated in e-learning on Gratification Understanding Improvement from KPK to all employees of the Compliance Working Unit.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

5. Mengikuti Bimbingan teknis Aplikasi GOL KPK modul Program Pengendalian Gratifikasi kepada UPG.
6. Mengikuti webinar Anti Bribery Management System yang diselenggarakan oleh OJK kepada pegawai Satuan Kerja Kepatuhan
7. Melakukan diseminasi pesan Anti Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS) melalui screensaver kepada seluruh pegawai LPEI.
8. Melakukan diseminasi pesan Anti Gratifikasi melalui flyer dan email blast kepada seluruh pegawai LPEI.

5. Following the technical guidance of the KPK GOL Application in the Gratification Control Program module to the UPG.
6. Participated in the Anti Bribery Management System webinar organized by OJK for employees of the Compliance Working Unit.
7. Disseminating Anti Gratification and Whistleblowing System (WBS) messages through screensavers to all Indonesia Eximbank employees.
8. Disseminating Anti Gratification messages through flyers and email blasts to all Indonesia Eximbank employees.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dasar Peraturan

- Eksternal
 1. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. Peraturan KPK no. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
 3. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 Tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Internal
 1. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0013/PDE/08/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan LPEI.
 2. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0042/PDE/09/2019 tentang Pakta Integritas LPEI.

Penerapan di LPEI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI senantiasa berupaya untuk melaksanakan tata kelola yang baik sebagai salah satu upaya untuk mendukung

GRATIFICATION CONTROL

Regulatory References

- External
 1. Act No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes with amendments to Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes
 2. KPK Regulation no. 2 of 2019 on Gratification Reporting.
 3. Attachment to Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesia Eximbank.
- Internal
 1. Executive Director Regulation No. 0013/PDE/08/2022 concerning Gratification Control within Indonesia Eximbank.
 2. Executive Director Regulation No. 0042/PDE/09/2019 concerning Indonesia Eximbank Integrity Pact.

Implementation in Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank constantly aims to adopt good governance as part of its business operations in an effort to promote the administration of a state free from corruption,

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. LPEI telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan.

Penerapan pengendalian Gratifikasi secara berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik diatur sebagai berikut:

1. Sosialisasi Berkelanjutan

Dalam rangka penguatan budaya Kepatuhan dan peningkatan *awareness*, UPG melakukan sosialisasi kepada jajaran LPEI secara berkelanjutan dalam bentuk namun tidak terbatas pada sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka/daring dengan pembicara/pemateri bersumber dari eksternal maupun oleh UPG sendiri.

Sosialisasi Gratifikasi disampaikan pada beberapa pelatihan antara lain New Hire Orientation (NHO), Relationship Manager Development Program (RMDP), maupun sosialisasi khusus dengan peserta seluruh jajaran LPEI. Selain itu sosialisasi Gratifikasi juga disampaikan dalam bentuk email blast, flyer, dan screen saver.

2. Penandatanganan Pakta Integritas

Pakta Integritas merupakan pernyataan seluruh jajaran LPEI untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan LPEI dengan cara tidak meminta atau menerima Gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap setahun sekali. Selain itu, Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh pegawai LPEI (selain Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana) pada saat pertama kali bekerja di LPEI.

3. Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan

collusion, and nepotism. A Gratification Control Unit (UPG) has been established by Indonesia Eximbank and is a part of the Compliance Work Unit.

The following rules govern the continual application of gratification control in the context of developing good governance:

1. Sustained Dissemination

UPG engages in outreach to Indonesia Eximbank workers, including but not limited to face-to-face/online dissemination with speakers from external sources as well as UPG, to enhance the Compliance culture and raise awareness.

Several trainings, including New Hire Orientation (NHO), Relationship Manager Development Program (RMDP), and unique socializing involving participants from all levels of Indonesia Eximbank, gave gratification socialization. Additionally, email blasts, pamphlets, and screen savers were used to spread gratification socialization.

2. The Integrity Pact Signing

The Integrity Pact is an agreement made by all levels of Indonesia Eximbank to uphold morals and integrity, safeguard and maintain Indonesia Eximbank's reputation, credibility, and interests by refraining from soliciting or accepting gifts from individuals or organizations with conflicts of interest. The Board of Directors and the Managing Director sign the Integrity Pact at the appointed time and sign it again once a year. All Indonesia Eximbank workers (apart from the board of directors and managing director) agreed to the Integrity Pact when they started working.

3. Distribution of circular letters to Indonesia Eximbank employees, partners, partners, customers, and

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah LPEI terutama terkait hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Natal).

4. Pelaporan Gratifikasi

Jajaran LPEI wajib melakukan penolakan atas Gratifikasi yang dianggap suap dan/atau yang melampaui batas nilai kewajaran yang ditetapkan pada kesempatan pertama dan melaporkannya kepada UPG atau langsung kepada KPK. Selama tahun 2022, terdapat sebanyak 7 (tujuh) laporan Gratifikasi yang diterima oleh UPG.

Pelaporan Gratifikasi di LPEI dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:

- Pelaporan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
- Pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Penerapan Berkesinambungan

- Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan Internal terkait gratifikasi secara berkala dengan menyesuaikan terhadap aturan eksternal.
- Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari penerima gratifikasi.
- Menyampaikan laporan gratifikasi secara berkala kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
- Mengadministrasikan laporan gratifikasi secara tertib.
- Penginputan rencana dan realisasi kerja UPG pada sistem Gratifikasi Online (GOL) KPK.
- Pelaksanaan e-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK kepada seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan.

debtors outlining the ban on asking for, receiving, and disbursing gratuities of any kind to/from Indonesia Eximbank employees, partners, vendors, partners, and customers, particularly in relation to religious holidays (Eid and Christmas).

4. Gratification Reporting

Indonesia Eximbank officials are required to decline Gratification that is considered a bribe and/or which exceeds the established reasonable value limit at the first opportunity and report it to UPG or directly to the KPK. During 2022, there were 7 (seven) Gratification reports received by UPG.

Reporting of Gratification at Indonesia Eximbank is carried out through 2 (two) mechanisms, namely:

- Reporting through the Gratification Control Unit (UPG)
- Reporting to the Corruption Eradication Commission.

5. Sustained Application

- Compile and/or evaluate internal provisions regarding gratification periodically by adjusting to external regulations.
- Receive a gratification report along with the completeness of the documents from the recipient of the gratuity.
- Deliver periodic gratification reports to the Director in charge of the Compliance function.
- Administering gratification reports in an orderly manner.
- Inputting UPG work plans and realizations into the KPK's Online Gratification system (GOL).
- Implementation of e-learning to Increase Understanding of Gratification from KPK to all employees of the Compliance Work Unit.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD LPEI

Dasar Peraturan

- Eksternal
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Internal
PDE No. 0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Strategi *Anti-Fraud* LPEI.

Penerapan di LPEI

LPEI telah menerapkan Strategi *Anti-Fraud* yang diatur dalam PDE No. 0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Penerapan Strategi *Anti-Fraud* LPEI. Implementasi strategi *Anti-Fraud* LPEI melibatkan seluruh unit kerja dengan fungsi sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

- Fungsi Koordinasi
Fungsi Koordinasi dalam penerapan strategi *anti-fraud* dijalankan oleh Unit Pengendali Fraud, dalam hal ini adalah Unit Kerja Internal Audit.
- Fungsi Pencegahan
Fungsi Pencegahan terdiri dari 3 hal sub fungsi sebagai berikut:
 - Anti-fraud awareness*, dilakukan oleh seluruh unit kerja LPEI.
 - Identifikasi kerawanan, dilakukan oleh seluruh unit kerja LPEI.
 - Know Your Employee*, dilakukan oleh seluruh kepala divisi dan pejabat setingkat kepala kantor wilayah di LPEI.
- Fungsi Deteksi
Fungsi Deteksi terdiri dari 3 hal sub fungsi sebagai berikut:
 - Whistle blowing*, dilakukan oleh Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi.

INDONESIA EXIMBANK ANTI-FRAUD STRATEGY

Regulatory References

- External
Minister of Finance of RI Regulation No. 208/PMK.06/2021 on Indonesia Eximbank Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer.
- Internal
PDE No. 0045/PDE/10/2019 concerning Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy Operating Manual.

Implementation in Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank has implemented the Anti-Fraud Strategy set out in PDE No. 0045/PDE/10/2019 concerning the Operating Manual of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy. Indonesia Eximbank anti-fraud strategy involves all units with functions in accordance with their authorities, which are:

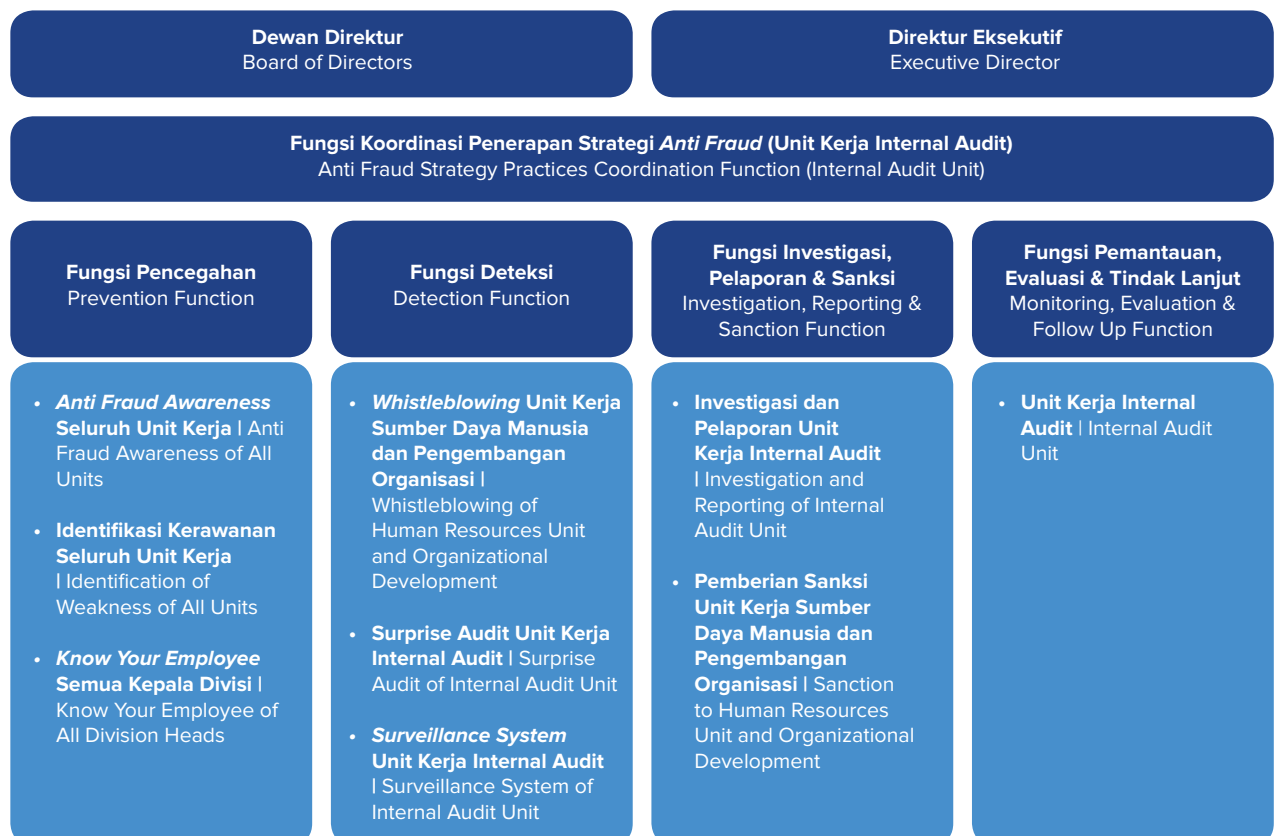
- Coordination function
The Coordination Function in implementing anti-fraud strategy is carried out by Fraud Control Unit, in this case the Internal Audit Unit.
- Prevention Function
The Prevention Function consists of 3 sub-functions as follows:
 - Anti-fraud awareness, carried out by all Indonesia Eximbank units.
 - Identification of vulnerability, carried out by all Indonesia Eximbank units.
 - Know Your Employee, carried out by all division heads and executives at the regional office level in Indonesia Eximbank.
- Detection function
The Detection Function consists of 3 terms of sub functions as follows:
 - Whistleblowing, conducted by Human Resources and Organizational Development Unit.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

- *Surprise Audit*, dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit.
 - *Surveillance System*, dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit.
- d. Fungsi Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Fungsi Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi dilakukan oleh Unit Kerja yaitu:
- Fungsi Investigasi dan Pelaporan, dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit.
 - Fungsi Pemberian Sanksi, dilakukan oleh Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi.
- e. Fungsi Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Fungsi ini dilakukan langsung oleh Unit Kerja Internal Audit.
- *Surprise Audit*, conducted by Internal Audit Unit.
 - *Surveillance System*, conducted by Internal Audit Unit.
- d. Investigation, Reporting and Sanction Functions
The Investigation, Reporting and Sanction Functions are carried out by the following Units:
- Investigation and Reporting Functions, carried out by Internal Audit Unit.
 - Sanction Function, carried out by Human Resources and Organizational Development Unit.
- e. Monitoring, Evaluation and Follow-up Functions
This function is carried out directly by Internal Audit Unit.

Berikut adalah bagan organisasi, fungsi, dan tanggung jawab dalam penerapan strategi *anti-fraud* LPEI:

Diagram of organization, functions, and responsibilities in Indonesia Eximbank anti-fraud strategy implementation:



KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI ANTI CORRUPTION POLICY & PROCEDURES

Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian risiko terjadinya *fraud*, wajib dilakukan dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

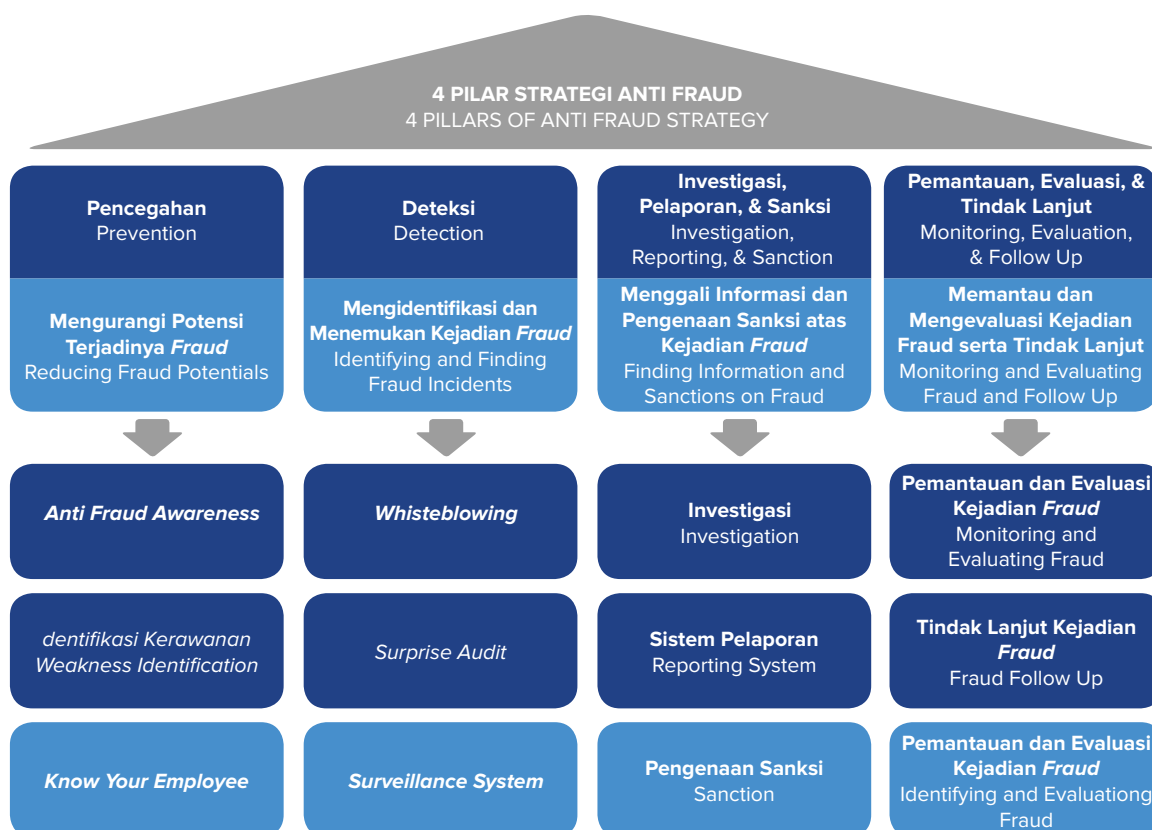
1. Pengawasan Aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif
2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban
3. Pengendalian dan Pemantauan

Penerapan strategi anti fraud dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) pilar yang tercermin dalam *framework* di bawah ini:

Implementation of Risk Management in the context of controlling the risk of fraud, must be carried out by strengthening several aspects, including the following:

1. Active Oversight of the Board of Directors and Executive Directors
2. Organizational Structure and Accountability
3. Control and Monitoring

The implementation of the anti-fraud strategy is carried out based on 4 (four) pillars which are reflected in the framework below:



Sumber: PDE No.0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Penerapan Strategi *Anti Fraud* LPEI:

Source: PDE No.0045/PDE/10/2019 concerning Operational Manual for the Implementation of the Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy:

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI

SHARE BUY BACK AND BOND BUY BACK



Hingga berakhirnya tahun buku 2021, LPEI tidak melakukan kegiatan *buy back* obligasi. Sedangkan *buy back* saham, Lembaga bukan merupakan perusahaan publik dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia Eximbank did not exercise any bond buyback as of the end of fiscal year 2021, while on share buyback, the Company is not a publicly listed company and all of its shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA

INSTITUTION'S STRATEGIC PLAN



Di tengah kondisi perekonomian global dan nasional yang dinamis selama 2022, LPEI senantiasa tetap fokus dalam menjalankan mandat *Enabling Export* dan *Empowering Nation*. Selain itu, di waktu yang bersamaan, LPEI juga terus berupaya memperbaiki kondisi bisnis maupun kinerja keuangan agar optimal dalam mendorong peningkatan ekspor nasional yang kokoh dan berkelanjutan serta bermanfaat luas.

Dalam melaksanakan mandat *Enabling Export* dan *Empowering Nation*, LPEI telah melakukan revitalisasi dengan menerapkan lima *key guiding principles* yaitu:

1. Pertumbuhan bisnis yang progresif melalui ekosistem ekspor.
2. Menyelesaikan isu terkait *Loan to Asset Ratio* (LAR) dan meningkatkan kualitas aset.
3. Berinvestasi pada keterampilan dan kemampuan di masa depan.
4. Memperkuat peran LPEI sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Terus memperkuat *Balance Sheet*.

Amidst the dynamic global and national economic conditions during 2022, Indonesia Eximbank remains focused on carrying out its mandate of *Enabling Export* and *Empowering the Nation*. At the same time, Indonesia Eximbank also strives to improve business conditions and financial performance by promoting towards strong and sustainable national exports with extensive benefits.

In carrying out the mandate of *Enabling Export* and *Empowering the Nation*, Indonesia Eximbank has revitalized by implementing five key guiding principles:

1. Progressive business growth through the export ecosystem.
2. Resolving issues related to *Loan to Asset Ratio* (LAR) and improving asset quality.
3. Investing in skills and abilities in the future.
4. Strengthening the role of Indonesia Eximbank as a *Special Mission Vehicle* (SMV) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
5. Continue to strengthen the *Balance Sheet*.



PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

DISTRIBUTION OF FUND TO RELATED PARTIES AND LARGE EXPOSURES

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, LPEI tidak memiliki transaksi dengan pihak terkait. Namun LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selama tahun 2022, LPEI tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Laporan BMPP secara berkala telah dilaporkan kepada regulator sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2009 dan POJK 040/POJK.05/2015.

In its business activity implementation, Indonesia Eximbank does not render any transaction with relevant parties. However, Indonesia Eximbank performs transaction with related parties namely parties under the ownership and/or management relations. All transactions with related parties have been implemented in accordance with the prevailing policies. During 2022, Indonesia Eximbank did not violate or exceed the Legal Lending Limit (LLL). The Legal Lending Limit report is periodically submitted to the regulators according to the Finance Minister Regulation No. 140/PMK.010/2009 and POJ K 040/ POJK.05/2015.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEPENTINGAN POLITIK

FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES AND POLITICAL INTERESTS



Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial di LPEI dilakukan dalam bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipaparkan pada bagian CSR di Laporan Tahunan ini.

Pemberian Dana Untuk Kepentingan Politik

Selama tahun 2022, LPEI tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

Funding for Social Activities

Funding for Social Activities in Indonesia Eximbank is acted in the form of Corporate Social Responsibility (CSR) which is presented in the CSR section of this Annual Report.

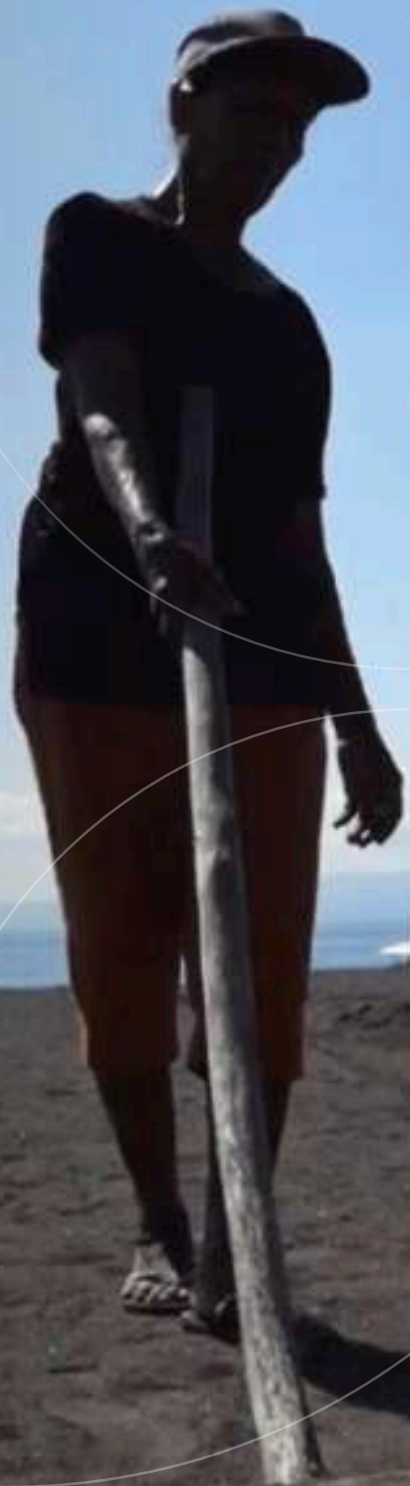
Funding for Political Purposes

Indonesia Eximbank did not fund any political activities in 2022.



LAPORAN
KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY
REPORT

06







IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY PERFORMANCE OVERVIEW

ASPEK EKONOMI ECONOMIC ASPECTS

LPEI mencatatkan kinerja ekonomi yang selaras dengan kondisi usaha.
Indonesia Eximbank recorded economic performance in line with business conditions.



Total Aset
turun

5,9%

menjadi sebesar

Rp83,82 triliun

Total assets decreased
5.9% to Rp83.82 trillion.



Pembiayaan,
Piutang Penjaminan
& Asuransi - Neto
turun

0,4%

menjadi

Rp66,32 triliun

Financing, Guarantee
& Insurance Receivable -
Nett decreased 0.4% to
Rp66.32 trillion.



Pembiayaan
UKM Ekspor
mencapai

Rp14,74 triliun

SME Export Financing
reached Rp14.74 trillion



Total Pendapatan
turun

12,9%

menjadi sebesar

Rp3,71 triliun

Total revenue
decreased 12.9% to
Rp3.71 trillion.



Rugi bersih
tercatat sebesar

Rp3,12 triliun

Net loss amounted to
Rp3.12 trillion



Rugi komprehensif
tercatat sebesar

Rp3,14 triliun

Comprehensive loss
amounted to Rp3.14 trillion.



Distribusi Perolehan Nilai
Ekonomi naik

0,3%

menjadi
sebesar

Rp3,89 triliun

The distribution of Economic Value Gain increased 0.3% to Rp3.89 trillion.

ASPEK EKONOMI ECONOMIC ASPECTS



Merealisasikan berbagai program edukasi produk dan jasa layanan LPEI.

Realizing various educational programs for the Institution's products and services.



LPEI menerima 1 aduan dari pelanggan, memproses dan menyelesaikan aduan tersebut.

Indonesia Eximbank receives 1 complaint from a customer, processes and resolves the complaint.

ASPEK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL ASPECTS

Menyelesaikan penyusunan dan menerbitkan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan serta Standar Pedoman Operasional Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mencakup Kegiatan Usaha maupun kegiatan Kelembagaan LPEI.

Complete the preparation and issuance of Sustainable Finance Policy and Standard Operating Guidelines for the Implementation of Sustainable Finance covering Business Activities and Institutional activities of Indonesia Eximbank.

Meresmikan Kebijakan ESG Kelembagaan sebagai pengganti Kebijakan "Green Office Lifestyle".

Inaugurated the Institutional ESG Policy as a replacement for the "Green Office Lifestyle" Policy.

Merealisasikan pelatihan keuangan berkelanjutan dengan para nara sumber yang berkompeten di bidangnya

Realizing sustainable finance training with competent resource persons in their fields

Mempertahankan intensitas konsumsi energi listrik di kisaran 0,20 GJoule/M² ditengah meningkatnya kegiatan operasional.

Maintaining the intensity of electrical energy consumption in the range of 0.20 GJoule/M² amidst increasing operational activities.

Mempertahankan Intensitas Emisi GRK listrik di kisaran 0,05 ton CO₂/M² ditengah meningkatnya kegiatan operasional.

Maintaining Electricity GHG Emission Intensity in the range of 0.05 tons CO₂/M²

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY PERFORMANCE OVERVIEW

ASPEK PEMBERDAYAAN KOMUNITAS COMMUNITY EMPOWERMENT ASPECTS

Merealisasikan empat kelompok besar program-program CSR.

Realizing four major groups of CSR programs.

Memberdayakan kompetensi masyarakat melalui pengembangan Desa Devisa.

Empowering community competence through the development of Desa Devisa.

Membina dan mengembangkan eksportir melalui program CPNE

Fostering and developing exporters through the CPNE program.



Menyalurkan bantuan sosial dalam kerangka penanganan pandemi dan bencana alam senilai Rp171,45 juta.

Distributing social assistance within the framework of handling pandemics and natural disasters valued at Rp171.45 million.

Merealisasikan investasi sosial dalam rangka program CSR senilai total Rp2,61 miliar.

Realizing social investment in the framework of CSR programs amounted to Rp2.61 billion.

ASPEK PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA COMMUNITY EMPOWERMENT ASPECTS

Merekrut 53 orang pegawai baru, dan memproses pemutusan hubungan kerja terhadap 71 orang pegawai karena berbagai sebab.

Recruited 53 new employees, and processed the termination of 71 employees for various reasons.



Mengelola total **549 orang pegawai** di tahun 2022.

Manage a total of 549 employees in 2022.

Menyelenggarakan 4 kelompok program pelatihan dan pengembangan pegawai.

Organizing 4 groups of employee training and development programs.

Rata-rata **man-days pelatihan per tahun** adalah **6,96 man-days** pelatihan/karyawan.

The average man-days of training per year is 6.96 man-days of training/employee.



KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN

FRAMEWORK AND STRATEGY



KOMITMEN [GRI 2-23, 3-3]

Dalam menjalankan aktivitasnya LPEI berkomitmen penuh untuk memperhatikan keseimbangan kinerja aspek sosial dan lingkungan, selain aspek ekonomi. LPEI menyadari bahwa risiko pembiayaan dan reputasi dapat timbul dari aktivitas proyek yang mengancam kelestarian lingkungan. Kegiatan LPEI berupa penyaluran pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang ramah lingkungan akan dapat membantu LPEI menurunkan risiko-risiko dimaksud terhadap para pelaku ekspor dan membantu memastikan keberlangsungan usaha dengan baik sehingga akan berdampak pada perkembangan ekspor Indonesia di masa mendatang.

Komitmen LPEI tersebut selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan skala global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), program-program yang dijalankan senantiasa mengutamakan terciptanya keseimbangan manfaat pada aspek sosial, terjaganya lingkungan, dan terjaminnya pertumbuhan usaha.

Pencapaian keseimbangan kinerja pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan diupayakan melalui pemenuhan harapan para pemangku kepentingan sesuai sumber daya yang tersedia. Untuk itu, LPEI juga memperhatikan dengan cermat harapan para pemangku kepentingan melalui pengelolaan hubungan yang bermartabat dan berkualitas.

Komitmen Terhadap SDGs [GRI 2-24]

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI selalu fokus dan sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang No.2 tahun 2009, yaitu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta Koperasi dalam mengembangkan produknya melalui kegiatan bimbingan jasa konsultasi untuk meningkatkan kapasitas baik dari sisi penguatan Sumber Daya Manusia serta produknya. Dalam pelaksanaannya LPEI bersinergi baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan melibatkan filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pakar yang sesuai dibidangnya.

COMMITMENT [GRI 2-23, 3-3]

In conducting its operations, the Institution is fully committed to balancing social and environmental aspects with economic aspects. Indonesia Eximbank is aware that project activities that threaten environmental sustainability can pose financing and reputational risks. The Institution's activities of financing, guarantees, insurance, and environmentally friendly advisory services shall be able to assist the Institution in mitigating these risks to exporters and ensuring business continuity, thereby influencing the future growth of Indonesian exports.

The Institution's commitment is in line with the concept of global scale sustainable development in Sustainable Development Goals (SDGs), the programs carried out always prioritize the creation of a balance of benefits in social aspects, environmental protection, and guaranteed business growth.

By meeting stakeholder expectations in accordance with available resources, performance balance in economic, social, and environmental aspects is sought after. As a result, Indonesia Eximbank pays close attention to the expectations of stakeholders through respectful and effective relationship management.

Commitment to SDGs [GRI 2-24]

In conducting its business activities, Indonesia Eximbank is always focused on and in concordance with the mandate contained in Law No. 2 of 2009, namely promoting the development of micro, small, and medium enterprises and cooperatives in developing their products through advisory service guidance activities to increase capacity in terms of both strengthening Human Resources and their products. By involving philanthropy, businesses, academics, and subject matter experts in its implementation, Indonesia Eximbank creates synergy at the national, provincial, and district/city levels.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disusun Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan berbagai tujuan keberlanjutan yang disampaikan dalam rumusan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan serta pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Komitmen Terhadap ESG

Sebagai salah satu Lembaga yang dibentuk pemerintah RI dalam upaya mendukung dan menciptakan pelaku usaha baru yang berdaya saing tinggi, LPEI melakukan kegiatan pelatihan/*capacity building* bagi pelaku usaha baik yang baru merintis usaha, yang sudah berjalan namun tidak berkelanjutan untuk dapat menjadi pelaku usaha baru yang tangguh dan berkesinambungan sejalan dengan isu lingkungan, sosial, dan Tata Kelola Perusahaan melalui kegiatan *Coaching Program for New Exporter* (CPNE), Rumah Ekspor serta *business matching*.

Target LPEI

Target LPEI ke depan adalah untuk menjadi lembaga perpanjangan tangan Pemerintah yang unggul, mandiri serta kredibel, dengan memiliki kapasitas serta fundamental keuangan yang sehat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekspor nasional secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan ekosistem ekspor.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengkalibrasi ulang model bisnis saat ini dan menyesuaikan kapabilitas operasional, risiko, teknologi, dan sumber daya manusia untuk dapat mendukung model bisnis baru yang lebih fokus. Adapun *value proposition* yang diusung oleh LPEI ke depannya sebagai berikut:

1. *Beyond finance*

Menyediakan produk-produk yang lebih spesifik dengan kelebihan/fitur yang hanya dimiliki oleh LPEI dan dapat bersinergi dengan ekosistem ekspor lainnya.

This is consistent with what is stated in the National Action Plan (RAN) of the Sustainable Development Goals (SDGs) prepared by the Government of Indonesia to realize various sustainability goals conveyed in the formulation of Sustainable Development Goals (SDGs), namely development that maintains the continuous improvement of people's economic welfare and development that maintains the sustainability of people's social lives.

Commitment to ESG

Indonesia Eximbank, an institution founded by the Indonesian government to foster and develop new, highly competitive businesses, offers training and capacity-building programs to support businesses that are starting out or struggling to become sustainable. These programs, including the Coaching Program for New Exporter (CPNE), Export House, and business matching, aim to create strong, sustainable businesses that prioritize environmental, social, and Corporate Governance issues.

Indonesia Eximbank Targets

The Institution aims to establish itself as a reliable and independent government-affiliated organization in the future. It seeks to achieve this by developing a robust financial foundation and building its capacity, with the goal of promoting sustainable national export growth through close collaboration with the export ecosystem.

Hence, there is a need to realign the existing business model and adapt operational capabilities, risks, technology, and human resources to support a new, more targeted business approach. Indonesia Eximbank's envisioned value proposition for the future is as follows:

1. *Beyond finance*

Providing more specific products with advantages/features that are only owned by Indonesia Eximbank and can synergize with other export ecosystems.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

- Menjadi pusat informasi ekspor dan *hub* yang dapat mengatasi hambatan *trade* dengan berkolaborasi dengan ekosistem ekspor seperti K/L dan exim banks lain.
 - Mengembangkan komoditas unggulan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor baik UKM maupun korporasi.
 - Meningkatkan peran sebagai *enhancer* melalui fasilitas asuransi dan penjaminan dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan lain.
2. *Developmental Impact*
Memberikan peningkatan *developmental impact* yang signifikan dan mampu menjadi *top of mind* dari pihak di dalam ekosistem ekspor serta *financially self sufficient*.
- Mendukung sektor yang memiliki dampak pembangunan yang tinggi
 - Memperkuat peran LPEI sebagai pemberi informasi, pendukung, dan *financial intermediary*
 - Berkolaborasi dengan platform digital untuk meningkatkan jangkauan fasilitas ke UMKM berorientasi ekspor
 - Menjajaki potensi ekspor di sektor-sektor bukan unggulan.
3. *Sustainability*
Memastikan keberlanjutan atas produk-produk atau program yang dilaksanakan ke depannya dan memiliki kebermanfaatan bagi ekosistem ekspor.
- Mengintegrasikan aspek ESG ke dalam lini Bisnis LPEI
 - Mengembangkan produk dan layanan yang mendukung ESG
 - Mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan keberpihakan dalam pemilihan portofolio
 - *Encourage renewable projects*
 - Mendorong dan membantu nasabah untuk memperoleh *green certification*
- Become an export information center and hub that can overcome trade barriers by collaborating with export ecosystems such as Ministries/ Institutions and other exim banks.
 - Developing excellent commodities designed in accordance with the needs of the export market, both SMEs and corporations.
 - Increase the role as an enhancer through insurance and guarantee facilities by collaborating with other financial institutions.
2. *Developmental Impact*
Providing a significant increase in developmental impact and being able to be top of mind from parties in the export ecosystem and financially self-sufficient.
- Supporting sectors that have a high development impact
 - Strengthening the Institution's role as an informer, supporter, and financial intermediary
 - Collaborate with digital platforms to increase the reach of facilities to export-oriented MSMEs
 - Exploring export potential in non-superior sectors.
3. *Sustainability*
Ensuring the sustainability of products or programs implemented in the future and having benefits for the export ecosystem.
- Integrating ESG aspects into Indonesia Eximbank's Business lines
 - Develop products and services that support ESG
 - Consider aspects of environmental, social, and partiality sustainability in portfolio selection
 - Promote renewable projects
 - Enforce and assist customers to obtain green certification

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

PENDEKATAN KEBERLANJUTAN [GRI 3-3]

Landasan pencapaian tujuan keberlanjutan adalah terpenuhinya harapan para pemangku kepentingan. Untuk itu, LPEI mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan menganalisis seberapa penting topik-topik keberlanjutan yang akan dikembangkan. Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk diantaranya dampak potensial yang mungkin dialami dan ditimbulkan oleh kegiatan operasional, juga *benefit* yang ditimbulkannya, selain mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan dalam mempengaruhi pencapaian target kerja LPEI.

Mengingat bidang usaha LPEI adalah memberikan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi untuk meningkatkan ekspor nasional, maka dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan secara nyata yang dapat dilakukan adalah kemampuan LPEI dalam merancang, menerapkan dan mengawasi implementasi kebijakan pemberian jasa-jasa dimaksud yang ramah lingkungan. Dalam artian, kemampuan LPEI untuk menyeleksi dan mengawasi para nasabah/klienya agar senantiasa mematuhi peraturan perundangan di bidang lingkungan dan sosial. Kemampuan dimaksud direpresentasikan pada dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun, diterapkan dan dievaluasi secara berkala.

SASARAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

[GRI 3-3]

Saat ini, hampir seluruh negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan SDGs dalam merancang program-program pembangunan di masing-masing negaranya. SDGs terdiri atas 17 rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan skala global yang akan diterapkan dalam kurun waktu 2016-2030, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.

SUSTAINABILITY APPROACH [GRI 3-3]

The cornerstone of achieving sustainability goals is the fulfillment of stakeholder expectations. To that end, Indonesia Eximbank identifies stakeholders and analyzes how important sustainability topics will be developed. Stakeholder identification is carried out by considering several aspects, including the potential impacts that may be experienced and caused by operational activities, as well as the benefits they cause, in addition to considering the ability of stakeholders to influence the achievement of Indonesia Eximbank's work targets.

Given that Indonesia Eximbank's business sector is to provide financing, guarantee, insurance and advisory services to enhance national exports, the support for achieving sustainability goals in real terms that can be done is Indonesia Eximbank's ability to design, implement and supervise the implementation of policies for providing these services that are environmentally friendly. In a sense, Indonesia Eximbank's ability to select and supervise its customers/clients to always comply with laws and regulations in the environmental and social aspects. These capabilities are represented in the Sustainable Finance Action Plan document which is prepared, implemented and evaluated periodically.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

[GRI 3-3]

Currently, almost all countries that join the United Nations have agreed to apply the concept of sustainable development SDGs in designing development programs in their respective countries. The SDGs consist of 17 formulations of global sustainable development goals that will be implemented in the period 2016-2030, as illustrated in the following illustration.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang diantaranya berisi peta jalan program-program yang akan dijalankan Indonesia guna memastikan keberhasilan program penurunan emisi GRK hingga sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% jika mendapatkan dukungan masyarakat global, di akhir tahun 2030 mendatang, dibandingkan dengan kondisi bisnis seperti biasanya. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK 51/2017) merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk memastikan pencapaian target tersebut.

Rumusan SDGs disebut juga Paris Agreement yang lahir dari kesepakatan negara-negara anggota PBB melalui *Cooperation of Parties* (COP) ke 21 di Paris tersebut, kemudian dipantau pelaksanaannya melalui pertemuan reguler yang dikoordinasikan oleh The United

To demonstrate its commitment towards attaining these objectives, the Indonesian government has launched a National Action Plan (NAP) for Sustainable Development Goals (SDGs). The plan is overseen by the National Development Planning Agency (Bappenas) and includes a program roadmap that outlines Indonesia's efforts to achieve a 29% reduction in GHG emissions through its own initiatives and a 41% reduction by 2030 with the support of the international community, compared to the usual business conditions. The issuance of Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies (POJK 51/2017) is one of the efforts taken to ensure the achievement of these targets.

The SDGs, also known as the Paris Agreement, were developed by the member states of the United Nations during the 21st Conference of Parties (COP) in Paris. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) oversees the agreement's implementation

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pada forum COP terakhir, yakni COP 27 yang diselenggarakan di Mesir, telah disepakati mekanisme pemberian bantuan dana bagi negara-negara yang terdampak bencana akibat perubahan iklim selain bantuan dana bagi program perbaikan kondisi lingkungan di negara-negara berkembang.

STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI [GRI 2-22]

Sebagai sebuah entitas yang dimiliki oleh Pemerintah LPEI mendukung penuh komitmen Pemerintah Indonesia dalam *Paris Agreement* tersebut, dengan berupaya keras menerapkan berbagai aturan agar nasabah/klien menaati dan menjalankan ketentuan dalam pemberian fasilitas pinjaman, penjaminan, asuransi maupun konsultasi kegiatan ekspor, yang ditetapkan LPEI dengan mempertimbangkan pemenuhan aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) yang selaras dengan pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs tersebut. LPEI juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip kegiatan operasional ramah lingkungan.

Untuk memastikan maksimalnya dukungan LPEI terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan tersebut, sesuai bidang usahanya, Lembaga menyusun strategi dukungan pencapaian keberlanjutan dalam bentuk penerapan Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana diuraikan pada bahasan berikut.

Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan [OJK F.1]

LPEI meyakini pentingnya upaya meningkatkan kapasitas organisasi sebagai prasyarat suksesnya pelaksanaan program-program keuangan berkelanjutan guna mendukung tercapainya berbagai tujuan keberlanjutan. Oleh karenanya, sejak awal pelaksanaan program-program RAKB, Lembaga merancang dan merealisasikan berbagai program pelatihan spesifik maupun sosialisasi guna memperkenalkan konsep-konsep keuangan berkelanjutan maupun tujuan keberlanjutan sehingga segera terbentuk budaya keberlanjutan di seluruh jajaran.

through regular meetings. During the recent COP 27 forum held in Egypt, a mechanism was established to provide financial assistance for countries affected by climate change-related disasters and to fund environmental improvement programs in developing nations.

SUSTAINABILITY STRATEGY [GRI 2-22]

Indonesia Eximbank, being a government-owned entity, is fully committed to supporting the Government of Indonesia's Paris Agreement pledge. To achieve this, Indonesia Eximbank endeavors to enforce various regulations to ensure that its customers comply with the provisions in loan, guarantee, insurance, and advisory facilities for export activities. These provisions are set by Indonesia Eximbank while taking into account the fulfillment of environmental, social, and governance (ESG) aspects that align with the SDGs. Additionally, Indonesia Eximbank aims to implement eco-friendly operational practices.

To enhance Indonesia Eximbank's support towards achieving sustainability goals, the Institution has devised a strategy to promote sustainable finance implementation, aligning with its line of business, as described in the following discussion.

Activities to Build a Culture of Sustainability [OJK F.1]

Indonesia Eximbank recognizes that enhancing organizational capacity is vital for successful implementation of sustainable finance programs that support various sustainability goals. As a result, since the onset of RAKB program implementation, the Institution has developed specific training programs and awareness campaigns to introduce sustainable finance concepts and sustainability goals. These efforts aim to foster a culture of sustainability across all levels of the organization.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

LPEI mengembangkan struktur organisasi serta melengkapinya dengan berbagai aturan serta petunjuk pelaksanaan yang relevan, sehingga seluruh jajaran, terutama yang bertanggung jawab langsung bagi keberhasilan pelaksanaan program, memahami tugasnya dengan sebaik-baiknya. Agar budaya keberlanjutan semakin cepat berkembang di seluruh jajaran, LPEI bahkan telah menetapkan pernyataan visi dan misi keberlanjutan. Pernyataan visi dan misi keberlanjutan menegaskan posisi dan komitmen Lembaga dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan keberlanjutan.

Adapun program pelatihan keberlanjutan yang diberikan, diselenggarakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak eksternal yang kompeten dibidangnya. Program-program tersebut senantiasa dikomunikasikan ke seluruh jajaran. Berbagai upaya tersebut diyakini akan membuat seluruh jajaran memiliki budaya keberlanjutan, dimana seluruh aktivitas yang dijalankan senantiasa bermuara pada upaya menyeimbangkan kinerja aspek ekonomi dengan aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang berkualitas.

Berbagai aktivitas pengembangan kapasitas organisasi dan pengembangan budaya keberlanjutan tersebut akan terus dievaluasi dan dilakukan perbaikan, dimana rencana pelaksanaan perbaikannya menjadi bagian dari program-program yang disampaikan dalam RAKB.

Pengelolaan Hubungan Dengan Para Pemangku Kepentingan [GRI 2-29] [OJK E.4]

Tujuan akhir dari penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya tercapainya berbagai target perbaikan kondisi lingkungan, sosial maupun membaiknya tata Kelola, melainkan terpenuhinya harapan para pemangku kepentingan. Untuk itu, LPEI melakukan identifikasi pemangku kepentingan di seluruh wilayah operasional, menggali harapan mereka dan mengelola hubungan interaksi timbal balik yang baik dengan mereka. Identifikasi dilakukan dengan mengacu kepada definisi di PMK 208, "Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha LPEI."

Indonesia Eximbank structures its organizational framework and augments it with pertinent regulations and implementation guidelines to ensure that all personnel, particularly those responsible for the successful execution of the program, comprehend their responsibilities thoroughly. Furthermore, to expedite the development of a sustainability culture across all levels, Indonesia Eximbank has established a sustainability vision and mission statement. This statement reinforces the Institution's position and commitment towards supporting the attainment of diverse sustainability goals.

The sustainability training program that Indonesia Eximbank provides is conducted in collaboration with several external parties with expertise in their respective fields. These programs are regularly communicated to all levels. It is hoped that these initiatives will instill a culture of sustainability, where all actions taken strive to strike a balance between economic performance and social, environmental, and quality governance aspects.

Various organizational capacity building activities and the development of a culture of sustainability will continue to be evaluated and improved, where the improvement implementation plan becomes part of the programs delivered in the RAKB.

Management of Relationships with Stakeholders [GRI 2-29] [OJK E.4]

The ultimate goal of implementing sustainable finance is not only the achievement of various targets for improving environmental, social and improved governance conditions, but also the fulfillment of stakeholder expectations. To that end, Indonesia Eximbank identifies stakeholders in all operational areas, explores their expectations and manages good mutual interaction relationships with them. Identification is carried out by referring to the definition in PMK 208, "Stakeholders are all parties who have an interest directly or indirectly in Indonesia Eximbank's business activities."

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Identifikasi pemangku kepentingan prioritas lembaga, sesuai definisi tersebut, diperoleh melalui asesmen pemangku kepentingan berdasarkan tiga kriteria yang berkaitan erat dengan keberlanjutan lembaga: keabsahan (*legitimacy*), kedekatan fisik (*proximity*) dan urgensi (*urgency*).

The identification of the institution's priority stakeholders, according to the definition, is obtained through stakeholder assessment based on three criteria that are closely related to the sustainability of the institution: legitimacy, physical proximity and urgency.

Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan yang dijalankan, terdapat 8 (delapan) kelompok Pemangku Kepentingan yang utama secara umum memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan LPEI, antara lain: Pemegang Saham, Investor Surat Berharga, Karyawan, Nasabah/Debitur, Masyarakat/Pemerintah Daerah, Pemasok, Regulator dan Media. LPEI menjalin komunikasi intensif dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan tersebut, menyerap fokus perhatian mereka dan menampung aspirasi mereka dalam merancang program-program pengembangan usaha, termasuk dalam memilah program yang dijalankan dalam RAKB.

Based on the identification of stakeholders, there are 8 (eight) main stakeholder groups that generally have a direct influence on Indonesia Eximbank's sustainability, including: Shareholders, Securities Investors, Employees, Customers/Debtors, Communities/Local Governments, Suppliers, Regulators and Media. Indonesia Eximbank established intensive communication with each stakeholder group, absorbing their focus of attention and accommodating their aspirations in designing business development programs, including in sorting out programs carried out in RAKB.

Pembinaan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan [GRI 2-29] [OJK E.4]

Relationship Development with Stakeholders [GRI 2-29] [OJK E.4]

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Fokus Perhatian Focus Attention	Metode & Frekuensi Pelibatan Method & Frequency of Engagement	Tujuan Purpose
Pemegang Saham	- Perkembangan nilai aset. - Penentuan RKAT - Pencapaian KPI - Pelaksanaan Hak-hak pemegang saham - Pertanggung-jawaban kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial Lembaga	Pelaporan (Laporan Kinerja Triwulanan, Laporan Realisasi Triwulanan, Laporan Keuangan Tahunan-Audited, Laporan Pengawasan Dewan Direktur. Hal-hal lain yang bersifat penting).	Pembinaan dan pengawasan. Coaching and supervision.
Shareholder	- The development of asset values. - RKAT Determination - KPI Achievement - Exercise of shareholder rights - Accountability for the economic, environmental and social performance of the institution	Reporting (Quarterly Performance Report, Quarterly Realization Report, Annual Financial Report-Audited, Supervisory Report of the Board of Directors. Others of an important nature).	
Investor Surat Berharga Securities Investor	- Perkembangan nilai aset. - Pencapaian target kinerja - Pertanggung-jawaban kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial Lembaga - The development of asset values. - Achievement of performance targets - Accountability for the economic, environmental and social performance of the institution	- Investor meeting - Publikasi melalui website Publication through the website	Keterbukaan informasi Information disclosure

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Fokus Perhatian Focus Attention	Metode & Frekuensi Pelibatan Method & Frequency of Engagement	Tujuan Purpose
Pegawai Employees	- Pemenuhan hak-hak pegawai - Kesetaraan kesempatan - Proses rekrutmen - Pengembangan karier - Paket remunerasi yang memadai dan bersaing - Penyelesaian Pengaduan - Fulfillment of employee rights - Equality of opportunity - Recruitment process - Career development - Adequate and competitive remuneration package - Complaint Resolution	Survei <i>employee engagement</i> secara berkala Regular employee engagement surveys	Sarana perbaikan pelaksanaan sistem kepegawaian dan meningkatkan kepuasan Pegawai dan pemenuhan aspek K3 Means of improving the implementation of the personnel system and increasing employee satisfaction and fulfillment of OHS aspects
Nasabah/Debitur Customer/Debtor	- Kualitas Produk - Kualitas Layanan - Product Quality - Quality of Service	Pertemuan berkala <i>Focus Group Discussion</i> Periodic meetings Focus Group Discussion	- Menampung dan menyelesaikan keluhan nasabah, - Mengidentifikasi kepuasan nasabah dan peningkatan kualitas layanan, - Pembinaan dan peningkatan hubungan bisnis dan edukasi layanan lembaga. - Accommodating and resolving customer complaints, - Identify customer satisfaction and improve service quality, - Coaching and improving business relations and educating institution services.
Masyarakat, LSM dan Pemerintah Daerah Communities, NGOs and Local Government	- Dampak dan kinerja lingkungan. - Informasi mengenai kegiatan Lembaga - Kontribusi Lembaga terhadap pembangunan daerah sekitar - Environmental impact and performance. - Information on the activities of the Institution - The Institution's contribution to the development of the surrounding area	- Musrenbang - Pertemuan dengan tokoh masyarakat - Sarana Pengaduan Masyarakat - Musrenbang - Meetings with community leaders - Community Complaint Facility	- Kerjasama strategis dalam rangka tanggung jawab sosial. - Partisipasi pada pelestarian lingkungan - Sosialisasi kebijakan dan program CSR. - Strategic cooperation for social responsibility. - Participation in environmental conservation - Dissemination of CSR policies and programs.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Fokus Perhatian Focus Attention	Metode & Frekuensi Pelibatan Method & Frequency of Engagement	Tujuan Purpose
Regulator	- Pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial. - Kepatuhan terhadap regulasi. - Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat - Management of economic, environmental and social impacts. - Regulatory compliance. - Community Assistance and Empowerment	- Komunikasi berkala - Konsultasi berkala - Periodic communication - Periodic consultations	- Memantau pemenuhan regulasi dari regulator - Pemantauan, pendampingan dan penyampaian pemenuhan pelaporan kepada regulator (seperti laporan wajib kepada OJK, pelaporan LHKPN kepada KPK, Gratifikasi kepada KPK melalui sistem GOL dan pelaporan kepada PPATK) - Pendampingan atas forum-forum diskusi mengenai pembahasan rancangan peraturan terkait Lembaga dan mengikuti sosialisasi peraturan yang diselenggarakan oleh Regulator - Monitor regulatory compliance from regulators - Monitoring, mentoring and submission of reporting fulfillment to regulators (such as mandatory reports to OJK, LHKPN reporting to the KPK, Gratification to the KPK through the GOL system and reporting to PPATK) - Assistance in discussion forums regarding the discussion of draft regulations related to the Institution and following the socialization of regulations organized by the Regulator
Media	- Menyampaikan informasi terkait kinerja Lembaga ke masyarakat luas. - Hubungan harmonis seluruh pihak - Sosialisasi dan penyaluran dana pembangunan - Convey information related to the performance of the Institution to the wider community. - Harmonious relationship of all parties - Socialization and distribution of development funds	- Media <i>Monitoring</i> harian - Media <i>Gathering</i> - Siaran Pers - Sesuai kebutuhan - Daily Media Monitoring - Media Gathering - Press Release - As needed	- Pemantauan, - Pemberian Informasi kinerja Lembaga - Monitoring - Provision of Information on Institution performance

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY**Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan**

Agar penerapan program-program dalam RAKB berjalan dengan baik dan memberi hasil optimal sesuai dengan kompetensi sumber daya yang tersedia, LPEI menetapkan beberapa prioritas program yang harus segera dilaksanakan. LPEI menetapkan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan pedoman teknis POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal Lembaga. Dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, yang tercantum dalam *Road Map* Aksi Keuangan Berkelanjutan LPEI tahun 2021-2025. Adapun prioritas program LPEI untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pertama – Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Keuangan Berkelanjutan
2. Prioritas Kedua – Perluasan sektor Nasabah LPEI yang memperhatikan aspek ESG.
3. Prioritas Ketiga – Pengklasifikasian 50 Nasabah dalam Menerapkan Aspek ESG
4. Prioritas Keempat – Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

PENGUATAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Dalam rangka memastikan optimalnya hasil-hasil dari pelaksanaan beragam program yang tercantum dalam RKAB, Lembaga menetapkan beberapa Pejabat atau Unit Kerja di lingkup Lembaga untuk juga bertugas mengawasi, menjalankan dan mengevaluasi penerapan program-program keuangan berkelanjutan, seperti dijelaskan pada uraian berikut.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan [GRI 2-12, 2-13, 2-14] [OJK E.1]

Lembaga telah menetapkan pembagian tugas dan wewenang beberapa Pejabat dan Unit Kerja sebagai penanggung jawab pelaksanaan keuangan berkelanjutan sebagai berikut.

Sustainable Finance Implementation Priorities

In order for the implementation of programs in RAKB to run well and provide optimal results in accordance with the competence of available resources, Indonesia Eximbank sets several program priorities that must be implemented immediately. Indonesia Eximbank sets priorities for the implementation of sustainable finance in accordance with POJK technical guidelines No.51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies and takes into account external and internal factors of the Institution. In implementing sustainable finance, which is listed in Indonesia Eximbank's Sustainable Finance Action Road Map for 2021-2025. Indonesia Eximbank program priorities in 2023 are as follows:

1. First Priority – Capacity Building of Human Resources (HR) on Sustainable Finance
2. Second Priority – Expansion of Indonesia Eximbank's Customer sector that pays attention to ESG aspects.
3. Third Priority – Classifying 50 Customers in Implementing ESG Aspects
4. Fourth Priority – Program Implementation Evaluation System

STRENGTHENING SUSTAINABILITY GOVERNANCE

To ensure optimal results from the implementation of various programs listed in the RKAB, the Institution establishes several Executives or Work Units within the Institution to also be tasked with supervising, managing and evaluating the implementation of sustainable finance programs, as described in the following description.

Person in Charge of Sustainable Finance Action [GRI 2-12, 2-13, 2-14] [OJK E.1]

The institution has determined the division of duties and authorities of several Executives and Work Units as responsible for the implementation of sustainable finance as follows.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Penanggungjawab Program Aksi Keuangan Berkelanjutan
Person in charge of the Sustainable Finance Action Program

Pejabat atau Unit Kerja Executives or Work Units	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
Dewan Direktur [GRI 2-11] Board of Directors [GRI 2-11]	- Menyetujui Kebijakan terkait Keuangan Berkelanjutan. - Melakukan pengawasan terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI - Menyetujui RAKB tahun berjalan. - Approve Policies related to Sustainable Finance. - Supervise the implementation of Sustainable Finance in Indonesia Eximbank - Approve the current year's RAKB.
Direktur Eksekutif LPEI Executive Director	- Menetapkan ketentuan pengelolaan dan penerapan aspek ESG untuk lingkup Kelembagaan dan Kegiatan Usaha. - Menetapkan struktur organisasi (satuan kerja) termasuk kewenangan dan tanggung jawab terkait pengelolaan dan penerapan ESG. - Memantau kepatuhan dan memberikan arahan perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan ESG dalam lingkup Kelembagaan dan Kegiatan Usaha. - Establish provisions for the management and application of ESG aspects for the scope of Institutions and Business Activities. - Establish the organizational structure (work unit) including authority and responsibility related to ESG management and implementation. - Monitor compliance and provide direction for improving ESG management and implementation within the scope of Institutions and Business Activities.
Direktur Pelaksana Managing Director	Membantu Direktur Eksekutif dalam pelaksanaan kegiatan ESG Kelembagaan dan Kegiatan Usaha Assist the Executive Director in the implementation of Institutions ESG activities and Business Activities
Unit yang membidangi <i>policy & procedure</i> Unit in charge of policy & procedure	- Menyusun rancangan peraturan internal untuk menunjang pengelolaan dan penerapan ESG di LPEI. - Melakukan pengkinian peraturan internal LPEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan pedoman ESG memenuhi ketentuan terkait lingkungan dan sosial. - Drafting internal regulations to support the management and implementation of ESG in Indonesia Eximbank. - Updating the Institution's internal regulations in accordance with applicable regulations, ensuring that ESG guidelines meet environmental and social related requirements.
Unit Kerja yang membidangi Sumber Daya Manusia Work Unit in charge of Human Resources	- Melakukan identifikasi kebutuhan spesifik keahlian dan juga pelatihan terkait dengan satuan kerja pengelola dan penerapan ESG. - Memastikan kecukupan pelatihan dan pembinaan pengelola lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan kepada pegawai LPEI. - Membuat program pelatihan dan pembinaan pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan kepada pegawai LPEI. - Identify specific needs for expertise and also training related to the ESG management and implementation of work unit. - Ensure adequate training and coaching of environmental, occupational health and safety, and employment managers to employees. - Create training programs and guidance on environmental management, occupational health and safety, and employment for employees.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Pejabat atau Unit Kerja Executives or Work Units	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
Unit Kerja yang mengkoordinasikan ESG Kelembagaan dan berkolaborasi antara unit kerja yang membidangi umum, sumber daya manusia, <i>transformation office and culture, operations, IT, dan komunikasi lembaga</i> Work Unit that coordinates Institutional ESG and collaborates between work units in charge of general, human resources, transformation office and culture, operations, IT, and institutional communication	1. Membuat program aktivitas Kelembagaan dalam rangka memenuhi ketentuan pedoman ESG Kelembagaan terkait lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan. 2. Melakukan identifikasi kesesuaian pedoman ESG Kelembagaan terhadap komitmen, budaya dan etika LPEI 3. Melakukan sosialisasi kepada setiap unit di LPEI atas pedoman ESG Kelembagaan. 4. Melaksanakan program aktivitas terkait ESG Kelembagaan. 5. Melakukan pelaporan kepada Direktur Eksekutif mengenai realisasi hasil implementasi ESG Kelembagaan secara semesteran. 1. Create institutional activity programs in order to meet the provisions of Institutional ESG guidelines related to the environment, occupational health and safety, and employment. 2. Identify the conformity of Institutional ESG guidelines to Indonesia Eximbank's commitment, culture and ethics 3. Conducting socialization to each unit in Indonesia Eximbank based on Institutional ESG guidelines. 4. Implement activities programs related to Institutional ESG. 5. Reporting to the Executive Director regarding the realization of the results of Institutional ESG implementation on a semi-annual basis.
Unit Kerja yang membidangi ESG Kegiatan Usaha dan berkolaborasi antara unit kerja yang membidangi bisnis termasuk jasa konsultasi, portofolio manajemen, dan komunikasi lembaga	1. Melakukan identifikasi kesesuaian antara penerapan dengan pedoman ESG Kegiatan Usaha LPEI (Nasabah/ sektor). 2. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait di LPEI dan nasabah tertentu atas pedoman ESG Kegiatan Usaha. 3. Melakukan pemantauan dan pendampingan dalam pengelolaan dan penerapan ESG Kegiatan Usaha. 4. Melakukan pelaporan kepada manajemen mengenai realisasi hasil implementasi ESG Kegiatan Usaha secara triwulanan. 5. Menyusun RAKB untuk mendapatkan persetujuan Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang selanjutnya disampaikan kepada regulator. 6. Menyusun Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) untuk mendapatkan persetujuan Direktur Eksekutif yang selanjutnya dilaporkan kepada regulator.
Work Unit in charge of ESG Business Activities and collaborate between work units in charge of business including advisory services, portfolio management, and institution's communication	1. Identify the suitability between the implementation and the ESG guidelines for Indonesia Eximbank Business Activities (Customer/sector). 2. Conducting socialization to related work units at Indonesia Eximbank and certain customers based on ESG guidelines for Business Activities. 3. Monitoring and assisting in the management and implementation of ESG Business Activities. 4. Reporting to management regarding the realization of the results of ESG implementation of Business Activities on a quarterly basis. 5. Prepare the RAKB to obtain approval from the Executive Director and Board of Directors which is then submitted to the regulator. 6. Prepare a Sustainability Report to obtain approval from the Executive Director which is then reported to the regulator.

Peningkatan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan [OJK E.2]

Lembaga meyakini program-program dalam RAKB tidak akan berjalan optimal tanpa didukung ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

Improving Sustainable Finance Competency [OJK E.2]

The Institution believes that programs in RAKB will not run optimally without the support of the availability of human resources who have qualified competencies. Therefore,

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

mumpuni. Oleh karenanya sepanjang tahun 2022 LPEI terus melakukan pelatihan bagi pegawai, baik mengenai *hard skill* maupun *soft skill*. Sampai dengan posisi 30 September 2022, LPEI merealisasikan pelatihan sebanyak 162 pelatihan dengan tipe pelatihan eksternal sebanyak 93 pelatihan dan pelatihan internal sebanyak 69 pelatihan, yang mana 8 diantaranya terkait dengan ESG/Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

throughout 2022, Indonesia Eximbank continues to conduct training for employees, both on hard skills and soft skills. As of September 30, 2022, Indonesia Eximbank has realized 162 trainings with 93 external training types and 69 internal trainings, of which 8 are related to ESG/ Sustainable Finance as follows:

Daftar Pelatihan/ Workshop/ Sharing Session/ Diskusi terkait ESG
List of Training/ Workshop/ Sharing Session/ Discussion related to ESG

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Place and Date of Implementation	Kegiatan Activities	Peserta Participants
Jakarta, 22 Januari / January 2022	Webinar <i>Institute</i> berjudul <i>The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services</i> , penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Webinar on <i>Institute</i> themed <i>The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services</i> , organized by Financial Services Authority (OJK)	Pegawai LPEI Jumlah 1 Peserta LPEI Employees 1 Participant
Jakarta, 22-23 Februari / February 2022	Webinar <i>Green Economy Outlook 2022</i> "Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan Dalam Mewujudkan <i>Green Economy</i> ", penyelenggara Bisnis Indonesia Webinar on <i>Green Economy Outlook 2022</i> "Indonesia's Policy Direction and Challenges in Realizing the Green Economy of Indonesian Business Operators"	Pegawai LPEI Jumlah 1 Peserta LPEI Employees 1 Participant
Jakarta, 24 Februari / February 2022	<i>The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy</i> , Penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy, organized by Financial Services Authority (OJK)	Pegawai LPEI Jumlah 1 Peserta LPEI Employees 1 Participant
Jakarta, 18 Maret / March 2022	<i>Sharing Session terkait Sustainable Finance</i> , oleh Standard Chartered Bank Sharing Session related to Sustainable Finance, by Standard Chartered Bank	Manajemen dan Pegawai LPEI (secara online) LPEI Management and Employees Participant (online)
Jakarta, 29 Juni / June 2022	<i>ESG Trend & Economy Outlook</i> , penyelenggara Moody's ESG Trend & Economy Outlook, organized by Moody's	Dewan Direktur, dan Manajemen LPEI, Serta Undangan SMV Jumlah 76 Peserta LPEI Board of Directors, and Management, and SMV Invitees of 76 Participants
Jakarta, 04 & 14 Juli / July 2022	<i>The Principle of ESG & Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Assessment Fundamentals</i> , penyelenggara Moody's The Principle of ESG & Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Assessment Fundamentals, organized by Moody's	Pegawai LPEI Jumlah 3 Peserta Tersertifikasi 2 Peserta LPEI Employees 3 Participants 2 Certified Participants

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Place and Date of Implementation	Kegiatan Activities	Peserta Participants
Jakarta, 27 Juli / July 2022	Navigating Supply Chain ESG and Climate Risk in APAC, penyelenggara Moody's Navigating Supply Chain ESG and Climate Risk in APAC, organized by Moody's	Pegawai LPEI Jumlah 2 Peserta LPEI Employees 2 Participants
Jakarta, 20 – 21 September 2022	Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sesuai Ketentuan Regulator, penyelenggara Infobank Inst Implementation of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) in accordance with the Provisions of Regulator, organized by Infobank Inst	Pegawai LPEI Jumlah 7 Peserta LPEI Employees 7 Participants

Peningkatan Awareness Terkait Penerapan Gratifikasi dan WBS

Selain pelatihan kompetensi keuangan berkelanjutan tersebut diatas, LPEI juga merealisasikan berbagai program penguatan praktik tata kelola, sebagai berikut.

Increased Awareness Related to the Application of Gratification and WBS

In addition to the sustainable finance competency training mentioned above, Indonesia Eximbank also realizes various programs to strengthen governance practices, as follows.

No.	Pelatihan/ Sosialisasi Training / Socialization	Waktu Pelaksanaan Date
1	Budaya Kepatuhan (termasuk Gratifikasi & WBS), Fungsi Kepatuhan dan APU PPT kepada Kanwil/ Cabang Compliance Culture (including Gratification & WBS), Compliance Function and AML CFT to Regional Offices/Branches	5,11, & 13 Januari January 2022
2	<i>Relationship Manager Development Program (RMDP)</i>	19 Januari January 2022
3	<i>New Hire Orientation (NHO)</i> kepada pegawai baru LPEI New Hire Orientation (NHO) to new employees of Indonesia Eximbank	10 Februari February, 6 Juli July & 30 Oktober October 2022
4	Pembekalan peserta Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 terkait modul <i>Good Corporate Governance</i> , Penerapan Fungsi Kepatuhan, Kode Etik, Pengendalian Gratifikasi, dan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> Training of Level 4 Risk Management Certification participants related to the Good Corporate Governance module, Implementation of Compliance Functions, Code of Ethics, Gratification Control, and Whistle Blowing System (WBS)	31 Maret March 2022
5	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi & WBS kepada seluruh Pegawai LPEI Socialization of Gratification Control & WBS to all Indonesia Eximbank Employees	29 Agustus August 2022

Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Keuangan Berkelanjutan
[GRI 2-24] [OJK E.3]

LPEI mewaspadai adanya risiko-risiko yang muncul dari ketidakberhasilan penerapan program-program keuangan berkelanjutan. Tidak berjalannya program-program

Sustainable Finance Risk Management and Mitigation
[GRI 2-24] [OJK E.3]

Indonesia Eximbank is aware of the risks arising from the unsuccessful implementation of sustainable finance programs. The non-implementation of programs in RAKB

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

dalam RAKB dapat memberi dampak kepada sejumlah risiko yang selama ini dikelola. Adapun pemetaan risiko terhadap penerapan RAKB, antara lain :

can have an impact on a number of risks that have been managed. The risk mapping for the implementation of RAKB, among others:

Jenis dan Potensi Risiko Terkait RAKB
Types and Potential Risks Related to RAKB

Jenis Risiko Types of Risks	Potensi Risiko Potential Risks	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Kredit Credit Risk	Nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai yang disyaratkan dalam perjanjian pembiayaan terkait dengan pemenuhan covenant yang terkait dengan implementasi ESG. The Customer fails to fulfill its obligations as required in the financing agreement related to the fulfillment of covenants related to ESG implementation.	Dilakukan pemantauan dan pembinaan kepada Nasabah Monitoring and coaching to Customers
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	- Sanksi Administratif berupa teguran atau peringatan tertulis bagi LPEI yang tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan - Berpotensi memengaruhi nilai tingkat kesehatan tetapan LPEI - Administrative sanctions in the form of a written reprimand or warning for Indonesia Eximbank that does not implement Sustainable Finance Action - Potentially affect health level value set Indonesia Eximbank	Menerapkan rencana prioritas yang sudah ditetapkan Apply a predefined priority plan
Risiko Strategik Strategic Risk	- Pencapaian kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak terpenuhi sesuai target yang ditetapkan - Pencapaian kinerja penyaluran kredit kepada proyek Kategori Berkelanjutan tidak terpenuhi sesuai target yang ditetapkan - The performance achievement of the Sustainable Finance Action Plan was not met according to the set target - The achievement of loan disbursement performance to Sustainable Category projects was not met according to the set target	Pembatasan sektor–sektor dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan prioritas internal dan eksternal serta kondisi pasar global termasuk negara tujuan ekspor Restrictions on sectors are carried out gradually by considering internal and external priorities as well as global market conditions including export destination countries
Risiko Reputasi Reputational Risk	- Pendapat publik bahwa LPEI tidak memiliki kepedulian terhadap isu ekonomi berkelanjutan dan isu lingkungan hidup (jika LPEI tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan) - Reputasi yang menurun dimata regulator dikarenakan LPEI yang tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan - Public opinion that Indonesia Eximbank does not have concern for sustainable economic issues and environmental issues (if Indonesia Eximbank does not implement Sustainable Finance Actions) - The declining reputation with regulators is due to Indonesia Eximbank not implementing Sustainable Finance Action	Diperlukan komunikasi dan publikasi yang intensif terkait penerapan aspek ESG dalam Keuangan Berkelanjutan kepada <i>stakeholder</i> Intensive communication and publication related to the implementation of ESG aspects in Sustainable Finance to stakeholders is needed

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY**Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJK E5]**

Sejak awal penyusunan program dan kemudian diikuti dengan penerapannya, LPEI telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dasar yang harus diatasi dalam menerapkan program-program dalam RAKB, meliputi:

- Kurangnya pemahaman jajaran internal mengenai aspek keberlanjutan dan prinsip Keuangan Berkelanjutan.
- Masih belum tingginya kesadaran para pemangku kepentingan, terutama calon nasabah dan mitra kerja Lembaga akan pentingnya mempertimbangkan aspek ESG bagi kelestarian lingkungan dan bagi berlangsungnya kegiatan usaha yang berkelanjutan.
- Masih perlunya penyusunan kelengkapan dan sosialisasi pemberlakuan, prosedur *monitoring* dan evaluasi kebijakan terkait ESG di seluruh jenjang aktivitas LPEI.

RAKB LPEI 2021 - 2025

Sebagai perwujudan rangkaian aktivitas Implementasi Keuangan Berkelanjutan tersebut, LPEI telah menyelesaikan RAKB 2021-2025 sebagai acuan dalam menjalankan berbagai program dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan, melalui kegiatan usaha yang dijalankan LPEI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2009.

Visi dan Misi Keberlanjutan LPEI

LPEI telah menetapkan Visi dan Misi Keberlanjutan, sebagai berikut:

**Visi
Vision**

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

To become an excellent and credible Eximbank in promoting highly competitive national exports at the global level by taking into account environmental and social aspects.

Issues with the Implementation of Sustainable Finance [OJK E5]

Since the beginning of the program preparation and then followed by its implementation, Indonesia Eximbank has identified various basic issues that must be overcome in implementing programs in RAKB, including:

- Lack of understanding of internal levels regarding sustainability aspects and Sustainable Finance principles.
- There is still not a high awareness of stakeholders, particularly prospective customers and partners of the Institution on the importance of considering ESG aspects for environmental sustainability and for sustainable business activities.
- There is still a need for the preparation of completeness and socialization of the implementation, monitoring procedures and evaluation of policies related to ESG at all levels of Indonesia Eximbank activities.

RAKB 2021 - 2025

As a manifestation of the series of Sustainable Finance Implementation activities, Indonesia Eximbank has completed RAKB 2021-2025 as a reference in carrying out various support programs for achieving sustainability goals, through business activities carried out by Indonesia Eximbank as stipulated in the Company's Articles of Association, which are in accordance with the mandate of Law No. 2 of 2009.

Sustainability Vision and Mission

Indonesia Eximbank has established the Vision and Mission of Sustainability, as follows:

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Misi
Mission

1. Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
 2. Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.
 3. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing serta ramah lingkungan.
1. Promoting the sustainability of a favorable business climate for sustainable national export growth by taking into account environmental and social aspects.
 2. Providing quality national export financing services and advisory services as a solution to Indonesia's export needs.
 3. Improve the ability of businesses, including small and medium enterprises, to manufacture excellent export-oriented products that are competitive and environmentally friendly.

Tujuan RAKB LPEI

Tujuan Penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam lingkup Kelembagaan LPEI adalah:

- a. LPEI memiliki Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang selaras dengan komitmen nasional dan menjadi landasan untuk menerapkan aspek ESG dalam kegiatan Kelembagaan;
- b. LPEI memiliki personel yang mempunyai kapasitas, kepedulian dan kompeten dalam hal penilaian terhadap aspek ESG;
- c. Merancang dan menetapkan kerangka kebijakan lingkungan hidup dan sosial untuk Lembaga serta internalisasi ESG dalam struktur organisasi LPEI;
- d. Integrasi dan adopsi peraturan Nasional dan Internasional terkait Keuangan Berkelanjutan dan aspek ESG secara bertahap; dan
- e. Merancang dan menerapkan program pengukuran, pelaporan dan verifikasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk lingkup Kelembagaan.

Sedangkan tujuan program penerapan keuangan berkelanjutan untuk lingkup Kegiatan Usaha LPEI adalah:

- a. LPEI memiliki dokumen *Environmental, Social and Governance* (ESG) untuk lingkup Kegiatan Usaha;

Purpose of RAKB

The objectives of the implementation of Sustainable Finance within the scope of the Institutional are:

- a. Indonesia Eximbank has a Sustainable Finance Policy that is in line with national commitments and becomes the basis for implementing ESG aspects in its Institutional Activities;
- b. Indonesia Eximbank has personnel who have the capacity, care and competence in terms of assessment of ESG aspects;
- c. Design and establish environmental and social policy framework for the Institution, as well as internalization of ESG in organizational structure;
- d. Gradual integration and adoption of National and International regulations related to Sustainable Finance and ESG aspects; and
- e. Design and implement programs for measuring, reporting and verifying the successful implementation of Sustainable Finance implementation activities for the scope of Institutional.

Meanwhile, the objectives of the sustainable finance implementation program for the scope of Indonesia Eximbank's Business Activities are:

- a. Indonesia Eximbank has Environmental, Social and Governance (ESG) documents for the scope of Business Activities;

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

- b. Adopsi aspek lingkungan hidup dan Sosial dalam proses pembiayaan LPEI untuk Kegiatan Usaha;
- c. LPEI memiliki personel yang berkompeten dalam menilai aspek perlindungan lingkungan dan sosial;
- d. Merancang dan menetapkan kerangka kebijakan lingkungan hidup dan sosial untuk Kegiatan Usaha serta Sosialisasi ESG untuk para debitur dan calon debitur;
- e. Integrasi dan adopsi peraturan Nasional dan Internasional dan menyepakati program lingkungan hidup dan sosial di lingkup Kegiatan Usaha pada periode berikutnya; dan
- f. Merancang dan menerapkan program pengukuran, pelaporan dan verifikasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan di lingkup Kegiatan Usaha.

Strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan rencana aksi keuangan berkelanjutan tersebut adalah:

- a. Penyusunan kebijakan, manual, sistem dan prosedur terkait penerapan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
- b. Penyesuaian struktur organisasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia terkait pengelolaan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
- c. Pelaksanaan integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan dan/atau pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

Pencapaian Penerapan RAKB 2022

Untuk tahun 2022, LPEI berhasil merealisasikan berbagai program dalam RAKB tahun pelaporan, sebagai kelanjutan pelaksanaan program persiapan penerapan aksi keuangan berkelanjutan di tahun sebelumnya. Beberapa program RAKB yang telah berhasil dilaksanakan di tahun 2022, sebagai bagian dari implementasi RAKB 2021-2025 adalah sebagai berikut.

- b. Adoption of environmental and social aspects in Indonesia Eximbank's financing process for Business Activities;
- c. Indonesia Eximbank has competent personnel in assessing environmental and social protection aspects;
- d. Designing and establishing an environmental and social policy framework for Business Activities and ESG Socialization for debtors and prospective debtors;
- e. Integration and adoption of National and International regulations and agreeing on environmental and social programs within the scope of Business Activities in the next period; and
- f. Design and implement programs for measuring, reporting and verifying the successful implementation of sustainable finance implementation activities within the scope of Business Activities.

The strategies implemented to achieve the objectives of the sustainable finance action plan are:

- a. Preparation of policies, manuals, systems and procedures related to the implementation of sustainable finance action plans;
- b. Adjustment of organizational structure and fulfillment of human resource needs related to the management of sustainable finance action plans;
- c. Implementation of integration of social and environmental aspects into risk management and increasing the growth of financing portfolios and/or in environmentally sound business activities.

Achievement of RAKB 2022 Implementation

For 2022, Indonesia Eximbank has succeeded in realizing various programs in the RAKB reporting year, as a continuation of the implementation of the preparation program for the sustainable finance actions implemented in the previous year. Some of the RAKB programs that have been successfully implemented in 2022, as part of the implementation of RAKB 2021-2025 are as follows.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

No.	Aktivitas Activity	Pencapaian Achievement
	Tersusunnya laporan pelaksanaan ESMS kepada OJK (laporan periode 2021) Compilation of ESMS implementation report to OJK (2021 period report)	LPEI telah menyampaikan Laporan Keberlanjutan tahun 2021 secara tepat waktu sebagai bagian dari Laporan Tahunan LPEI. Indonesia Eximbank has submitted its 2021 Sustainability Report in a timely manner as part of its Annual Report.
	Terlaksananya <i>workshop</i> , sosialisasi, dan pelatihan ESMS untuk lingkup kelembagaan secara berkelanjutan Implementation of workshops, socialization, and training of ESMS for the institutional scope in a sustainable manner	- LPEI telah menunjuk perwakilan pegawai untuk mengikuti seminar Taksonomi Hijau Indonesia pada bulan Januari 2022. - Manajemen dan Pegawai LPEI telah mengikuti <i>Sharing Session</i> mengenai <i>Sustainable Finance</i> yang diselenggarakan oleh Standard Chartered Bank pada tanggal 18 Maret 2022. - Meluncurkan program XWoW (<i>Eximbank New Way of Working</i>) untuk bekerja secara <i>hybrid</i> dan digital guna mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor, efisiensi penggunaan energi listrik kantor, sehingga tercipta cara kerja modern dengan fleksibilitas ruang dan waktu melalui pengoptimalan teknologi pada bulan Juli 2022. - Indonesia Eximbank has appointed employee representatives to attend the Indonesian Green Taxonomy seminar in January 2022. - Indonesia Eximbank Management and Employees have participated in a <i>Sharing Session</i> on Sustainable Finance organized by Standard Chartered Bank on March 18, 2022. - Launched the XWoW (<i>Eximbank New Way of Working</i>) program to work hybrid and digital to optimize office facilities and infrastructure, efficient use of office electrical energy, to create a modern way of working with space and time flexibility through technology optimization in July 2022.
	Pembentukan satuan/unit kerja yang kompeten dalam menjalankan ESMS Establishment of competent work units in performing ESMS	Telah dibentuk Departemen Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang membidangi ESG, guna mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI. The Department of Environment, Social and Governance in charge of ESG has been established, to support the implementation of Sustainable Finance in Indonesia Eximbank.
	Terlaksananya <i>workshop</i> sosialisasi dan pelatihan ESMS untuk Kegiatan Usaha Implementation of socialization workshops and ESMS training for Business Activities	- LPEI telah melaksanakan <i>event</i> bertemakan <i>ESG Trends & Economic Outlook</i> (29 Juni 2022), - Pegawai perwakilan LPEI telah mengikuti pelatihan yang bekerjasama dengan Moody's Analytics pada bulan Juni dan Juli 2022 sebagai berikut: - The Principles of ESG; - Assessing & Managing ESG Risks; dan - Integrating ESG in Credit Assessment; - Perwakilan pegawai LPEI telah mengikuti pelatihan Penerapan RAKB sesuai Ketentuan Regulator yang diselenggarakan oleh Infobank Institute pada tanggal 20 s/d 21 September 2022. - Indonesia Eximbank has held an event themed ESG Trends & Economic Outlook (June 29, 2022, - Indonesia Eximbank representative employees have attended training in collaboration with Moody's Analytics in June and July 2022 as follows: - The Principles of ESG; - Assessing & Managing ESG Risks; and - Integrating ESG in Credit Assessment; - Representatives of Indonesia Eximbank employees have attended training on the Implementation of RAKB in accordance with Regulatory Regulations organized by Infobank Institute on September 20 to 21, 2022.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

No.	Aktivitas Activity	Pencapaian Achievement
	Tersedianya dokumen kebijakan, yang mengacu pada peraturan nasional maupun internasional terkait pengelolaan lingkungan Availability of policy documents, which refer to national and international regulations related to environmental management	Telah ditetapkan Peraturan Dewan Direktur No. 0012/10/PDD/2022 tentang Kebijakan Keuangan Berkelanjutan tanggal 24 Oktober 2022 sebagai dasar hukum penerapan keuangan berkelanjutan di LPEI. Board of Directors Regulation No. 0012/10/PDD/2022 on Sustainable Finance Policy dated October 24, 2022 has been established as the legal basis for the implementation of sustainable finance in Indonesia Eximbank.
	Tersedianya dokumen manual, SOP yang mengacu pada peraturan nasional maupun internasional terkait pengelolaan lingkungan Availability of manual documents, SOPs that refer to national and international regulations related to environmental management	Telah disusun dan disetujui Standar Pedoman Operasional (SPO) untuk mengintegrasikan penerapan ESG ke dalam kegiatan usaha LPEI berupa <i>general guidelines</i> pada syarat dan ketentuan umum pembiayaan. Standard Operating Guidelines have been prepared and approved to integrate the implementation of ESG into Indonesia Eximbank's business activities in the form of general guidelines on the basic terms and conditions of financing.
	Terlaksananya kegiatan publikasi pelaksanaan ESMS di LPEI Implementation of publication activities for the implementation of ESMS at Indonesia Eximbank	Telah dilakukan Publikasi pelaksanaan ESG pada kegiatan <i>ESG Trends dan Economic Outlook</i> dengan judul: "LPEI Perkuat Komitmen Dorong Ekspor Nasional Berkelanjutan" di website LPEI dan ipol.id pada tanggal 29 Juni 2022. ESG implementation publication on ESG Trends and Economic Outlook activities has been carried out with the title: "Indonesia Eximbank Strengthens Commitment to Promote Sustainable National Exports" on the Indonesia Eximbank website and ipol.id on June 29, 2022.
	Tersusunnya laporan internal pemantauan penerapan ESMS secara semesteran Compilation of internal reports monitoring the implementation of ESMS on a semi-annual basis	Telah disampaikan laporan terkait profil sektor usaha dalam penerapan ESG dan pembuatan kebijakan keuangan keberlanjutan pada: - Rapat Komite Pemantau Risiko (tanggal 7 April & 25 Juli 2022); - Rapat <i>Board of Management</i> (tanggal 28 Juni & 13 September 2022); dan - Rapat <i>Joint Committee</i> (tanggal 13 Oktober 2022). A report has been submitted related to the profile of the business sector in the implementation of ESG and sustainability financial policy making on: - Risk Monitoring Committee Meeting (7 April & 25 July 2022); - Board of Management Meeting (June 28 & September 13, 2022); and - Joint Committee Meeting (October 13, 2022).
	Pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi dengan penerapan aspek ESMS Implementation of advisory services activities with the application of ESMS aspects	Telah ditetapkan <i>pilot project</i> terkait dengan penerapan ESG dalam proyek <i>Shrimp-Carbon Aqua Culture (SECURE)</i> di Berau di Kalimantan Timur. A pilot project has been established related to the implementation of ESG in the Shrimp-Carbon Aqua Culture (SECURE) project in Berau in East Kalimantan.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

No.	Aktivitas Activity	Pencapaian Achievement
	Penetapan Sektor usaha dan nasabah yang akan menjadi <i>pilot project</i> penerapan ESMS kegiatan usaha	Telah ditetapkan 7 (tujuh) sektor usaha sebagai prioritas penerapan ESG yaitu, Batubara, Kelapa Sawit, Hasil Kayu, Tekstil, Pertanian dan Bahan Pangan, Perikanan dan Hasil Laut, serta Energi.
	Pelaksanaan <i>pilot project</i> ESMS terhadap nasabah yang telah ditetapkan	Dari sektor-sektor tersebut telah ditetapkan 2 (dua) Nasabah utama di sektor Kelapa Sawit dan sektor Perikanan dan Hasil Laut sebagai <i>pilot project</i> kegiatan usaha.
	Determination of business sectors and customers who will become pilot projects for the implementation of ESMS business activities	7 (seven) business sectors have been determined as priorities for ESG implementation, namely, Coal, Palm Oil, Wood Products, Textile, Agriculture and Foodstuffs, Fisheries and Marine Products, and Energy.
	Implementation of ESMS pilot projects for predetermined customers	From these sectors, 2 (two) main customers have been established, namely in the palm oil sector and in the fisheries and marine products sector (Fisheries and Marine Products sector) as business activity pilot projects.
	Penerapan <i>due diligence</i> Application of due diligence	Dilakukan <i>due diligence</i> terhadap kesiapan Lembaga dalam menerapkan ESG Kelembagaan dan ESG Kegiatan Usaha melalui pengisian kuesioner. Due diligence is carried out on the readiness of the Institution in implementing Institutional ESG and Business Activity ESG through filling out questionnaires.
	Laporan tingkat pemenuhan atas perbaikan penerapan ESMS sesuai tanggapan dari OJK (jika ada) Report on the level of fulfillment of improvements in ESMS implementation according to responses from OJK (if any)	N/A

Program RAKB 2023

Untuk tahun 2023 ini, LPEI telah menetapkan 13 aktivitas rencana kerja, lengkap dengan uraian tujuan dan indikator pencapaian, yang dijabarkan dengan lengkap dalam dokumen RAKB 2023 LPEI. Namun demikian terdapat 4 kegiatan prioritas yang akan dijalankan dengan 4 indikator keberhasilan yang dapat disampaikan dalam Laporan ini, seperti disampaikan pada tabel berikut:

2023 RAKB Program

For 2023, Indonesia Eximbank has established 13 work plan activities, complete with a description of goals and achievement indicators, which are fully described in Indonesia Eximbank's RAKB 2023 document. However, there are 4 priority activities that will be carried out with 4 success indicators that can be conveyed in this Report, as presented in the following table:

Kegiatan Prioritas dan Indikator Keberhasilan RAKB 2023

Priority Activities and Success Indicators of RAKB 2023

Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Target	Indikator Keberhasilan Success Indicators
1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia tentang keuangan berkelanjutan; Capacity building of Human Resources on sustainable finance;	1. Minimal 90% dari pegawai LPEI telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait ESG & Minimal 4x pelaksanaan Edukasi kepada masyarakat. At least 90% of Indonesia Eximbank employees have attended socialization and training related to ESG & at least 4x the implementation of education to the community.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Target	Indikator Keberhasilan Success Indicators
2. Perluasan sektoral dari Nasabah LPEI yang memperhatikan aspek ESG; Sectoral expansion of Indonesia Eximbank Customers who pay attention to ESG aspects;	2. Terdapat perluasan dari 7 (tujuh) sektor yang terkait dengan ESG menjadi 10 (sepuluh) sektor. There is an expansion from 7 (seven) sectors related to ESG to 10 (ten) sectors.
3. Pengklasifikasian 50 Nasabah/ mitra usaha dalam menerapkan aspek ESG; Classifying 50 Customers/ business partners in implementing ESG aspects;	3. Minimal 50 Nasabah/ mitra usaha LPEI sudah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori <i>enforcement</i> tahapan penerapan ESG. At least 50 Indonesia Eximbank customers/business partners can be classified into three categories of enforcement stages of ESG implementation
4. Evaluasi atas penerapan aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan dengan kuesioner baik internal maupun eksternal. Evaluation of the implementation of Sustainable Finance actions for the current year with questionnaires both internal and external.	4. Tersedianya <i>feedback</i> dan perbaikan atas penerapan Keuangan Berkelanjutan. Availability of feedback and improvements on the implementation of Sustainable Finance.

Program-Program dalam RAKB 2021- 2025

LPEI telah menyusun program-program kegiatan dalam *Roadmap* RAKB 2021-2024. Pada *Roadmap* RAKB 5 tahunan tersebut pada intinya LPEI menetapkan 6 Sasaran Strategis, diikuti dengan penetapan 15 Indikator Keberhasilan yang dijalankan dalam kurun waktu 2021-2025, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.

Programs in RAKB 2021- 2025

Indonesia Eximbank has prepared activity programs in the RAKB Roadmap 2021-2024. In the 5-year RAKB Roadmap, in essence, Indonesia Eximbank sets 6 Strategic Goals, followed by the establishment of 15 Success Indicators carried out in the period 2021-2025, as stated in the following table.

Roadmap Ringkas Penerapan RAKB LPEI 2021 –2025**Brief Roadmap for the Implementation of RAKB 2021 –2025**

Sasaran Strategis Strategic Goals	Indikator Keberhasilan Success Indicators
1. Tersusunnya Kebijakan, Manual, SOP, atas penerapan Keuangan Berkelanjutan Preparation of Policies, Manuals, SOPs, on the implementation of Sustainable Finance	1) Tersedianya dokumen kebijakan, manual, SOP yang mengacu pada peraturan nasional maupun internasional terkait pengelolaan lingkungan. Availability of policy documents, manuals, SOPs that refer to national and international regulations related to environmental management.
2. Tersedianya kapasitas sumber daya manusia untuk menjalankan Keuangan Berkelanjutan Availability of human resource capacity to manage Sustainable Finance	2) Terlaksananya pembentukan satuan kerja/unit kerja yang kompeten dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan. Implementation of the establishment of units/work units that are competent in carrying out Sustainable Finance. 3) Terlaksananya <i>workshop</i> sosialisasi dan pelatihan Keuangan Berkelanjutan untuk lingkup kelembagaan. Implementation of socialization workshops and training on Sustainable Finance for the institutional scope. 4) Terlaksananya <i>workshop</i> sosialisasi dan pelatihan Keuangan Berkelanjutan untuk Kegiatan Usaha. Implementation of socialization workshops and training on Sustainable Finance for Business Activities.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Sasaran Strategis Strategic Goals	Indikator Keberhasilan Success Indicators
3. Terbangunnya proses pemenuhan aspek lingkungan dan sosial baik di dalam lingkup kelembagaan dan Kegiatan Usaha Establishment of the process of fulfilling environmental and social aspects both within the scope of institutions and business activities	5) Terlaksananya kegiatan publikasi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di LPEI. Implementation of publication activities on the implementation of Sustainable Finance at Indonesia Eximbank. 6) Tersusunnya laporan internal pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan secara semesteran. Compilation of internal reports monitoring the implementation of Sustainable Finance on a semi-annual basis. 7) Penetapan sektor usaha yang akan menjadi <i>pilot project</i> Kegiatan Usaha dengan memperhatikan aspek ESG. Determination of business sectors that will become pilot projects for Business Activities by taking into account ESG aspects. 8) Pelaksanaan Jasa konsultasi dengan penekanan aspek ESG. Implementation of advisory services with emphasis on ESG aspects. 9) Penerapan <i>due diligence</i> serta perluasan sektoral. Application of due diligence and sectoral expansion. 10) Tersusunnya laporan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan kepada OJK. Compilation of Sustainable Finance implementation report to OJK. 11) Laporan tingkat pemenuhan atas perbaikan penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai tanggapan dari OJK. Report on the level of fulfillment of improvements in the implementation of Sustainable Finance according to the response from OJK. 12) Evaluasi atas penerapan Keuangan Berkelanjutan LPEI (Kelembagaan dan Kegiatan Usaha). Evaluation of the implementation of Sustainable Finance (Institutional and Business Activities).
4. Terlaksananya peningkatan kapasitas LPEI untuk pemenuhan aspek lingkungan dan sosial mengikuti standar internasional The implementation of capacity building of Indonesia Eximbank to fulfill environmental and social aspects following international standards	13) Terlaksananya kegiatan pelatihan, <i>workshop</i> tentang isu – isu lingkungan dan sosial secara berkesinambungan. Implementation of training activities, workshops on environmental and social issues on an ongoing basis.
5. Terlaksananya Keuangan Berkelanjutan secara penuh dan terintegrasi dalam proses bisnis LPEI Implementation of Sustainable Finance in full and integrated in Indonesia Eximbank business processes	14) Terpenuhinya pengakuan dari OJK tentang pemenuhan LPEI terhadap prinsip penerapan keuangan berkelanjutan. Fulfillment of recognition from OJK regarding Indonesia Eximbank fulfillment of the principles of implementing sustainable finance.
6. Terpenuhinya pengakuan dari OJK tentang pemenuhan LPEI terhadap prinsip penerapan keuangan berkelanjutan Fulfillment of recognition from OJK regarding Indonesia Eximbank fulfillment of sustainable finance principles practices	15) Terlaksananya akselerasi penyaluran pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi terhadap Kegiatan Usaha berkelanjutan. Acceleration of financing, guarantees, insurance and advisory services for sustainable business activities.

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND STRATEGY

Melalui implementasi langkah-langkah strategis dalam RAKB tersebut, LPEI mendukung terwujudnya manfaat jangka panjang berupa terjadinya perbaikan kondisi lingkungan dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan dari kegiatan usaha pembiayaan, penjaminan, asuransi maupun konsultasi kegiatan ekspor yang dijalankannya.

Through the implementation of strategic measures in the RAKB, Indonesia Eximbank fosters the realization of long-term benefits by improving environmental conditions and the welfare of all stakeholders from its financing, guarantee, insurance and export advisory business activities.



KINERJA EKONOMI

ECONOMIC PERFORMANCE



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN [GRI 3-3]

LPEI berkomitmen penuh untuk mewujudkan Visi serta Misi Lembaga dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, LPEI menyusun strategi pengembangan usaha, termasuk strategi pencapaian tujuan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Bisnis Perusahaan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Tujuan dari pelaksanaan Visi dan Misi serta penyusunan strategi tersebut adalah optimalnya kinerja pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara berimbang.

LPEI menerapkan berbagai inisiatif strategis serta menjalankan berbagai upaya antisipatif guna memastikan tercapainya Visi dan Misi Lembaga, selain tercapainya pertumbuhan skala usaha yang sehat sekaligus berkesinambungan, sesuai kondisi yang dihadapi. Mulai tahun 2022, LPEI telah melakukan revitalisasi dengan menerapkan lima *key guiding principles* yaitu:

1. Pertumbuhan bisnis yang progresif melalui ekosistem ekspor.
2. Menyelesaikan isu terkait *Loan to Asset Ratio* (LAR) dan meningkatkan kualitas aset.
3. Berinvestasi pada keterampilan dan kemampuan di masa depan.
4. Memperkuat peran LPEI sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Terus memperkuat *Balance Sheet*.

Untuk mewujudkan mandat dan penerapan kelima *key guiding principles* tersebut selama 2022, LPEI juga telah menyusun dan mengimplementasikan enam strategi bisnis utama dengan titik berat pada penguatan bisnis dan kualitas aset, yakni:

1. Pertumbuhan bisnis yang kuat dengan meningkatkan kinerja *good bank* untuk menjaga kinerja keuangan secara berkelanjutan.
2. Strategi pendanaan dan treasury yang kuat dengan memastikan mendapat sumber pendanaan yang kompetitif serta pemanfaatan likuiditas secara optimal.

COMMITMENTS AND POLICIES [GRI 3-3]

Indonesia Eximbank is deeply committed to achieving its Vision and Mission. Consequently, the Institution formulates business development strategies, which encompass sustainability goals, as detailed in the Business Plan and Sustainable Finance Action Plan (RAKB) documents. These strategies aim to ensure that the Vision and Mission are executed efficiently, leading to a balanced performance across social, economic, and environmental domains.

Indonesia Eximbank undertakes multiple strategic initiatives and anticipatory measures to guarantee the realization of its Vision and Mission. These endeavors, in conjunction with prevailing conditions, aim to achieve a sound and sustainable expansion of the business scale. Starting in 2022, Indonesia Eximbank has revitalized by implementing five key guiding principles, namely:

1. Progressive business growth through the export ecosystem.
2. Resolving issues related to Loan to Asset Ratio (LAR) and improving asset quality.
3. Invest in future skills and abilities.
4. Strengthening the Institution's role as a Special Mission Vehicle (SMV) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
5. Continue to strengthen the Balance Sheet.

To realize the mandate and implementation of the five key guiding principles during 2022, Indonesia Eximbank has also developed and implemented six main business strategies with an emphasis on strengthening business and asset quality, as follows:

1. Strong business growth by improving good bank performance to maintain sustainable financial performance.
2. Strong funding and treasury strategy by ensuring competitive funding sources and optimal liquidity utilization.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

3. *Collection* yang ketat dan mempercepat peningkatan kualitas aset dengan optimalisasi restrukturisasi, *collection*, litigasi, tindakan hukum dan hapus buku.
4. Menjadi perintis dalam melaksanakan inisiatif ekspor pemerintah dengan secara aktif menerapkan strategi inisiatif ekspor pemerintah.
5. Memberdayakan peran LPEI dalam ekosistem melalui kolaborasi dan *multiple channeling* guna menciptakan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta mengikutsertakan ESG (*Environmental, Social and Governance*) agar dapat membuka lebih banyak peluang untuk kemajuan ekspor Indonesia.
6. Perbaiki *Balance Sheet* dengan optimalisasi aset treasury dan alokasi modal.

LPEI juga mengaplikasikan tiga strategi bisnis yang bersifat sebagai *key enablers* yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (GRC) yang modern dan kuat. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat fondasi LPEI dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian serta mitigasi risiko hukum.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan struktur organisasi serta kemampuan sumber daya manusia sekaligus menanamkan budaya Lembaga.
3. Mengubah kemampuan dan infrastruktur IT untuk mendukung kebutuhan bisnis di masa depan.

Uraian selengkapnya mengenai *Key Guiding Principles*, enam Strategi Bisnis Utama dan tiga *strategy key enablers* dapat dilihat pada Bab “Diskusi dan Analisis Manajemen”.

RINGKASAN KINERJA ASPEK EKONOMI LPEI TAHUN 2022

Di tahun 2022, total aset LPEI turun 5,9% menjadi Rp83,82 triliun dari Rp89,04 triliun di tahun sebelumnya, terutama dikontribusikan oleh Penempatan pada Bank sebesar 24,5% menjadi sebesar Rp 12,6 triliun dari Rp 16,6 di tahun

3. Strict collection and accelerate asset quality improvement by optimizing restructuring, collection, litigation, legal action and write-off.
4. To be a pioneer in implementing government export initiatives by actively implementing the government's export initiative strategy.
5. Empowering its role in the ecosystem through collaboration and multiple channeling to create broad and sustainable benefits for the community, as well as involving ESG (Environmental, Social and Governance) in order to open more opportunities for the advancement of Indonesia's exports.
6. Balance Sheet improvement with optimization of treasury assets and capital allocation.

Indonesia Eximbank also applies three business strategies that are key enablers, as follows:

1. Improve modern and robust governance, risk management and compliance (GRC). This is important to strengthen Indonesia Eximbank's foundation in promoting sustainable business growth by prioritizing aspects of compliance and prudence as well as mitigating legal risks.
2. Improve and optimize the organizational structure and human resource capabilities while instilling the culture of the Institution.
3. Transform IT capabilities and infrastructure to support future business needs.

A complete description of the Key Guiding Principles, six Key Business Strategies and three strategy key enablers is presented in the Chapter “Management Discussion and Analysis”.

SUMMARY OF INDONESIA EXIMBANK'S ECONOMIC ASPECTS PERFORMANCE IN 2022

In 2022, Indonesia Eximbank's total assets decreased 5.9% to Rp83.82 trillion from Rp89.04 trillion in the previous year, mainly contributed by the decline in the placements with Bank by 24.5% to Rp12.6 trillion from Rp16.6 trillion

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

sebelumnya. Selain itu, juga dikontribusikan oleh karena adanya penurunan *outstanding* Total Pembiayaan, Piutang Asuransi dan Penjaminan sebesar 0,4% menjadi sebesar Rp66,32 miliar dari Rp66,56 miliar di tahun sebelumnya.

Kondisi perekonomian global yang kurang kondusif akibat terjadinya ketegangan geopolitik di Eropa yang memacu terjadinya krisis energi dan inflasi global yang meningkat, membuat LPEI mencatatkan penurunan kualitas aset. Kendati LPEI menunjukkan komitmen untuk melaksanakan manajemen risiko pembiayaan dengan baik, serta tetap menerapkan penerapan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan prinsip GCG, LPEI tidak dapat menghindari dampak negatif kondisi perekonomian global tersebut, sehingga rasio NPF-bruto (*Non-Performing Finance/NPF, NPL-gross*) secara konsolidasi di tahun 2022 memburuk menjadi sebesar 26,61% dari 21,03% di tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada rasio NPF-neto juga secara konsolidasi di tahun 2022 memburuk menjadi sebesar 10,39% dari posisi sebesar 7,12% di tahun 2021.

LPEI mencatatkan total pendapatan bunga dan usaha syariah pada tahun pelaporan sebesar Rp3,71 triliun, turun 12,9% dari tahun 2021 yang sebesar Rp4,26 triliun. Sebaliknya, memburuknya perekonomian global membuat LPEI mencatatkan kenaikan Beban Pembentukan CKPN hingga 717,7% menjadi sebesar Rp2,11 triliun dari Rp257,75 miliar di tahun sebelumnya. Namun demikian, LPEI berhasil menurunkan beban bunga sebesar 4,0%.

Pada akhirnya secara keseluruhan, LPEI mencatatkan rugi bersih tahun berjalan 2022 sebesar Rp3,11 triliun dari posisi mencatatkan laba bersih tahun 2021 yang sebesar Rp387,40 miliar.

Pembahasan lebih mendetail mengenai kinerja keuangan tersebut dapat dilihat pada uraian Bab Diskusi dan Analisis Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Adapun ringkasan perubahan posisi neraca dan tabel rugi laba LPEI di tahun 2020 & 2021 adalah sebagai berikut.

in the previous year. In addition, it was also contributed by a decrease in outstanding Total Financing, Insurance Receivables and Guarantees by 0.4% to Rp66.32 billion from Rp66.56 billion in the previous year.

Global economic conditions are less conducive due to geopolitical tensions in Europe which spurred the energy crisis and rising global inflation, making the Institution to record a decline in asset quality. Despite Indonesia Eximbank showing commitment to implement prudent financing risk management, while still implementing prudential principles and implementing GCG principles, the Institution cannot avoid the negative impact of global economic conditions, resulting in a consolidated NPF-gross ratio in 2022 worsening to 26.61% from 21.03% in the previous year. Similarly, the NPF-net ratio also deteriorated to 10.39% in 2022 from 7.12% in 2021.

Indonesia Eximbank recorded total interest income and income from sharia in the reporting year of Rp3.71 trillion, decreased 12.9% from 2021 of Rp4.26 trillion. Conversely, the deteriorating global economy enabled Indonesia Eximbank to record an increase in Allowance for Impairment Losses Formation Expenses by 717.7% to Rp2.11 trillion from Rp257.75 billion in the previous year. Nevertheless, LPEI managed to reduce interest expenses by 4.0%.

Subsequently, overall, Indonesia Eximbank recorded a net loss for the current year 2022 of Rp3.11 trillion from recording a net profit in 2021 of Rp387.40 billion.

A more detailed discussion of financial performance is presented in the description of the Management Discussion and Analysis Chapter in this Annual Report.

The summary of changes in Indonesia Eximbank's balance sheet position and profit loss in 2020 & 2021 are as follows.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Ringkasan Kinerja Ekonomi LPEI 2021-2022

Economic Performance Summary 2021-2022

Uraian Description	2021	2022	Perubahan Growth	
			Nominal	%
Ringkasan Neraca (Rp Miliar) Balance Sheet Summary (Rp Billion)				
Total Aset Total Assets	89.041	83.816	(5.225)	(5,9%)
Total Pembiayaan, Piutang Asuransi dan Penjaminan Total Financing, Insurance Receivables and Guarantee	66.559	66.324	(235)	(0,4%)
Total Efek yang Diterbitkan – Net Total Marketable Securities - Net	27.712	25.291	(2.422)	(8,7%)
Total Pinjaman Diterima Total Loans	28.800	29.297	497	1,7%
Total Liabilitas Total Liabilities	58.921	56.948	(1.973)	(3,3%)
Jumlah Ekuitas Total Equity	30.120	26.868	(3.252)	(10,8%)
Ringkasan Laba Rugi (Rp Juta) Profit or Loss Summary (Rp Million)				
Total Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah Total Sharia Interest Income and Operating	4.264	3.712	(552)	(12,9%)
Beban Bunga Interest Expense	(3.057)	(2.936)	121	(4,0%)
Total Pendapatan Operasional Lainnya Total Other Operating Income	215	186	(29)	(13,6%)
Total Beban Operasional Lainnya Total Other Operating Expenses	(759)	(762)	(4)	0,5%
Pembentukan CKPN Formation of Allowance for Impairment Losses	(258)	(2.108)	(1.850)	717,7%
Laba (Rugi) Operasional Operating Profit (Loss)	405	(1.909)	(2.314)	(571,2%)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	409	(1.892)	(2.301)	(562,6%)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	387	(3.115)	(3.502)	(904,0%)
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year	402	(3.141)	(3.544)	(880,9%)

KEGIATAN OPERASIONAL MENURUT SEGMENT
USAHA

Secara umum kegiatan usaha LPEI Terbagi ke dalam 3 lini usah, yakni: Segmen Pembiayaan, Segmen Penjaminan dan Segmen Asuransi. Segmen Pembiayaan merupakan segmen usaha dengan kontribusi terbesar, baik terhadap total aset maupun terhadap total pendapatan.

Namun demikian, sebagaimana telah disinggung pada uraian Bab – Analisa dan Pembahasan Manajemen, berdasarkan kegiatan operasional spesifik yang dijalankan, kegiatan usaha LPEI dapat dibagi lagi ke dalam 7 kelompok besar, yakni:

OPERATIONAL ACTIVITIES BY BUSINESS
SEGMENT

In general, Indonesia Eximbank's business activities are divided into 3 Business Lines, namely: Financing Segment, Guarantee Segment and Insurance Segment. The Financing segment is the business segment with the largest contribution, both to total assets and to total revenue.

However, as mentioned in the description of the Chapter – Management Analysis and Discussion, based on the specific operational activities carried out, Indonesia Eximbank's business activities can be further divided into 7 major groups, namely:

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

- Penugasan Khusus
- Pembiayaan
- Jasa Konsultasi
- Pengelolaan Tresuri
- Penjaminan
- Asuransi
- Trade Finance

Penugasan Khusus [GRI 201-4]

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Penugasan Khusus atau *National Interest Account* (NIA) adalah program strategis bagi LPEI, suatu penugasan khusus yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor (*financing, insurance, guarantee*) atas transaksi atau proyek kepada pelaku ekspor yang sulit mendapat pembiayaan dari bank/lembaga keuangan komersial atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional.

Hal ini dilakukan melalui pemberian pembiayaan ekspor bagi pelaku usaha ekspor dalam melakukan penetrasi barang/jasa dari Indonesia ke pasar non-tradisional dan/atau memiliki *country risk* yang tinggi namun dianggap perlu oleh Pemerintah guna menunjang ekspor nasional serta penugasan khusus terkait ekspor barang/jasa dan pengembangan sektor pariwisata, sektor UKM dan/atau industri tertentu yang memiliki peranan besar bagi perekonomian nasional, dan mendorong tumbuhnya eksportir baru yang berkelanjutan.

Pada tahun 2022, Pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau NIA berfokus pada pelaksanaan 7 (tujuh) program PKE, yakni: PKE Industri Penerbangan, PKE Pariwisata Mandalika/MDK, PKE Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor, PKE Trade Finance/TFC, PKE Kawasan/KWS, PKE Alat Transportasi/ATP dan PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas/DPSP.

- National Interest Account
- Financing
- Advisory Services
- Treasury Management
- Guarantee
- Insurance
- Trade Finance

National Interest Accounts [GRI 201-4]

In accordance with the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 183/PMK.08/2021 dated December 14, 2021 on the National Interest Accounts to Indonesia Eximbank, the Special Assignment or National Interest Account (NIA) is a strategic program for Indonesia Eximbank, authorized by the government to provide export financing (including financing, insurance, and guarantees) for transactions or projects that are challenging for exporters to obtain from banks or commercial financial institutions. These transactions or projects are commercially challenging to execute, but are considered essential by the Government to support national export policy.

This is done by providing export financing to support export businesses in penetrating non-traditional markets and/or high-risk countries that are essential to national exports. This includes special assignments related to the export of goods and services, the development of the tourism and SME sectors, and specific industries that play a significant role in the national economy. Additionally, we aim to promote the growth of new, sustainable exporters.

In 2022, the implementation of the Export Special Assignment (PKE) or NIA focuses on the implementation of 7 (seven) PKE programs, namely: Aviation Industry PKE, Mandalika Tourism PKE/MDK, Export Small and Medium Enterprises (SMEs) PKE, Trade Finance/TFC PKE, PKE Regional/KWS, PKE Transportation Equipment/ATP and PKE Super Priority Tourism Destination/DPSP.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Untuk menjalankan program PKE, LPEI mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Indonesia, dalam bentuk Kontribusi Modal Pemerintah (KPM) ataupun Penyertaan Modal Negara (PMN). Jumlah KPM/PMN yang dialokasikan untuk masing-masing program PKE, serta ringkasan perkembangan penyalurannya di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- 1. PKE Kawasan (KWS)** – Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp1,6 triliun dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2023. Realisasi *disbursement* selama tahun 2022 adalah sebesar Rp1,52 triliun.
- 2. PKE Mandalika (MDK)** – Dana yang dialokasikan total sejumlah Rp1,6 triliun dengan jangka waktu penugasan diperpanjang hingga Desember 2024. Realisasi *disbursement* selama tahun 2022 adalah sebesar Rp52,65 miliar.
- 3. PKE UKM** - Dana PMN yang dialokasikan adalah sebesar Rp1 triliun untuk seluruh sektor ekonomi/komoditas dengan maksimal imbalan pembiayaan sebesar 6% p.a. Realisasi *disbursement* selama tahun 2022 adalah sebesar Rp360,84 miliar.
- 4. PKE GIA** - Dana PMN yang dialokasikan sebesar Rp1 triliun untuk penguatan sektor ekonomi transportasi dan pergudangan. Pada tanggal 06 Oktober 2020 telah ditandatangani Perjanjian Kredit untuk nasabah LPEI terkait dengan dukungan pembiayaan modal kerja dengan plafon pembiayaan sebesar Rp1 triliun.
- 5. PKE TFC** - Alokasi dana PMN untuk PKE *Trade Finance* sebesar Rp1 triliun dengan jangka waktu penugasan hingga 31 Desember 2022. Realisasi *disbursement* selama tahun 2022 adalah sebesar Rp2,02 triliun.
- 6. PKE ATP** - Alokasi dana PMN untuk PKE Alat Transportasi ini sebesar Rp1,5 triliun dengan jangka waktu penugasan 5 (lima) tahun hingga 31 Desember 2026. Telah diterbitkan Penjaminan atas 1 pelaku usaha (terjamin) sebesar USD4,22 Juta.
- 7. PKE DPSP** - Alokasi dana PMN untuk PKE ini sebesar Rp500 miliar dengan jangka waktu penugasan hingga Desember 2024.

To manage the PKE program, Indonesia Eximbank receives financial support from the Government of Indonesia, through Government Capital Contribution (KPM) or State Capital Participation (PMN). The number of KPM/PMN allocated for each PKE program, as well as a summary of the development of its distribution in 2022 were as follows.

- 1. PKE Kawasan (KWS)** – The funds allocated for this activity reached Rp1.6 trillion with an assignment period until December 2023. The realization of disbursements during 2022 was Rp1.52 trillion.
- 2. PKE Mandalika (MDK)** – Total funds allocated was Rp1.6 trillion with the assignment period extended until December 2024. The realization of disbursements during 2022 was Rp52.65 billion.
- 3. PKE UKM** - PMN funds allocated was Rp1 trillion for all economic/commodity sectors with a maximum financing reward of 6% p.a. The realization of disbursements during 2022 was Rp360.84 billion.
- 4. PKE GIA** - PMN funds allocated was Rp1 trillion to strengthen the transportation and warehousing economic sector. On October 6, 2020, a Credit Agreement was signed for Indonesia Eximbank's customer related to working capital financing support with a financing ceiling of Rp1 trillion.
- 5. PKE TFC** - The allocation of PMN funds for PKE Trade Finance of Rp1 trillion with an assignment period until December 31, 2022. The realization of disbursements during 2022 was Rp2.02 trillion.
- 6. PKE ATP** - The allocation of PMN funds for PKE Transportation Equipment of Rp1.5 trillion with an assignment period of 5 (five) years until December 31, 2026. A guarantee has been issued for 1 business practitioner (guaranteed) of USD4.22 million.
- 7. PKE DPSP** - The allocation of PMN funds for this PKE was Rp500 billion with an assignment period until December 2024.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Seluruh dana dukungan dari Pemerintah Indonesia tersebut telah disalurkan sebagaimana ditetapkan pada surat keputusan Menteri Keuangan dalam pemberian KPM maupun PMN dimaksud. Penjelasan lengkap mengenai Program Penugasan Khusus PKE maupun Penugasan Umum dimaksud dapat dilihat pada uraian "Analisa dan Pembahasan Manajemen".

Pembiayaan [FS6]

LPEI sebagai *Special Mission Vehicle* dapat memberikan pembiayaan yang tidak dimasuki oleh perbankan atau lembaga keuangan komersial lainnya (*fill the market gap*) maupun bekerja sama dengan perbankan maupun lembaga keuangan untuk melakukan pembiayaan sindikasi terhadap proyek-proyek berorientasi ekspor. Selain pembiayaan dalam bentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi kepada eksportir, LPEI dapat pula memberikan pembiayaan kepada pihak pembeli di luar negeri dalam rangka mengimpor barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*Buyer's Credit*).

Sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan nasional dan pembangunan industri berorientasi ekspor, LPEI merealisasikan dukungan pembiayaan pada berbagai sektor ekonomi. Secara umum LPEI memberikan dukungan pembiayaan terhadap tidak kurang dari 10 sektor ekonomi. Namun demikian, LPEI lebih memfokuskan pemberian pembiayaan pada sektor-sektor berorientasi ekspor yang memiliki *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya, dan khususnya, menghasilkan devisa bagi ketahanan neraca pembayaran nasional. Sektor-sektor ekonomi dimaksud adalah:

- Perindustrian
- Jasa-jasa Dunia Usaha
- Perdagangan, Restoran dan Hotel
- Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian
- Pertambangan
- Pengangkutan, Pergudangan, Telekomunikasi
- Konstruksi
- Listrik, Gas dan Air
- Jasa-jasa sosial/masyarakat
- Lain-lain

All support funds from the Government of Indonesia have been distributed as stipulated in the decree of the Minister of Finance in granting the KPM and PMN. A complete explanation of the PKE National Interest Account Program and the General Assignment is presented in the section of "Management Analysis and Discussion".

Financing [FS6]

As a *Special Mission Vehicle*, Indonesia Eximbank is capable of filling the market gap by providing financing that is not available through banks or other commercial financial institutions. We also collaborate with banks and financial institutions to syndicate financing for export-oriented projects. In addition to financing through working capital loans and investment loans to exporters, Indonesia Eximbank also provides financing to overseas buyers for import goods and services produced in Indonesia (*Buyer's Credit*).

As a form of contribution to national development and export-oriented industrial development, Indonesia Eximbank realizes financing support in various economic sectors. In general, Indonesia Eximbank provides financing support to no less than 10 economic sectors. Nevertheless, Indonesia Financial Fund focuses more on export-oriented sectors that have a large multiplier effect on national economic growth in general, and in particular, generate foreign exchange for the resilience of the national balance of payments. The economic sectors are as follows:

- Industry
- Business Services
- Trade, Restaurants and Hotels
- Agriculture, Hunting and Agricultural Facilities
- Mining
- Freight, Warehousing, Telecommunications
- Construction
- Electricity, Gas and Water
- Social/community services
- Others

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Disamping menurut sektor ekonomi, Segmen Pembiayaan LPEI dapat dibagi menurut kelompok usaha, yakni: Korporasi dan UMKM. Juga dibagi menurut jenis fasilitas pembiayaan, yakni: Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah. Hampir seluruh Pembiayaan Syariah tertuju pada pembiayaan korporasi, khususnya untuk mendukung kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Adapun rincian saldo pembiayaan menurut sektor ekonomi, kelompok usaha maupun fasilitas pembiayaan telah disampaikan pada uraian “Diskusi dan Analisis Manajemen – Segmen Usaha”

- **Dukungan Pembiayaan Ramah Lingkungan**
[FS1, FS3, FS5, FS8]

LPEI menyadari bahwa seiring dengan semakin meningkatnya keprihatinan masyarakat global akan gejala perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca (GRK), sebagai salah satu lembaga pembiayaan khusus bagi kegiatan ekspor dan impor, Lembaga memiliki kewajiban untuk mendukung upaya perbaikan kondisi lingkungan. Cara yang dapat ditempuh adalah menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan, yakni menetapkan persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dukungan pembiayaan dari LPEI.

Bagi para calon nasabah maupun nasabah berorientasi ekspor yang dapat memenuhi bahkan melebihi ketentuan kepatuhan dimaksud, yakni mereka yang mampu menunjukkan bahwa kegiatan usahanya justru memberi manfaat positif bagi perbaikan lingkungan, maka proses pengajuan dukungan pembiayaannya akan mendapatkan prioritas untuk direalisasikan. Contoh industri dimaksud, seperti misalnya: industri energi terbarukan seperti produksi panel surya, baterai listrik dan sejenisnya; bio solar; transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik; maupun komoditas yang telah memiliki sertifikasi pemenuhan aspek ESG sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor.

Besides according to economic sector, Indonesia Eximbank Financing Segment can be divided according to business groups, namely: Corporations and MSMEs. Also divided according to the type of financing facilities, namely: Conventional Financing and Sharia Financing. Almost all Sharia financing is focused on corporate financing, particularly to support oil palm plantation activities.

The details of financing balances by economic sector, business group and financing facilities are presented in the section of “Management Discussion and Analysis – Business Segment”

- **Green Financing Support**
[FS1, FS3, FS5, FS8]

Indonesia Eximbank acknowledges the growing global concern regarding climate change symptoms resulting from greenhouse gas (GHG) emissions. As a special financing institution for import and export activities, we recognize our responsibility to support efforts to improve environmental conditions. To achieve this, we have implemented Sustainable Finance Action, which mandates compliance with environmental laws and regulations for customers seeking financial support from Indonesia Eximbank.

Prospective customers and export-oriented businesses that meet or exceed our compliance requirements, demonstrating positive impacts on environmental improvement, will be prioritized for financing support. These include industries such as renewable energy (e.g. solar panels, electric batteries), bio-solar, environmentally friendly transportation (e.g. electric vehicles), and commodities with ESG certification aligned with the requirements of export destinations.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

LPEI sendiri telah memiliki ketentuan internal dan komitmen pengelolaan ESG yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut mencakup:

1. Integrasi pertimbangan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam aktivitas pembiayaan untuk mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola secara efektif.
2. Keterlibatan dan dialog dengan debitur/ calon debitur dengan bekerja bersama dalam perbaikan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk debitur/ calon debitur.
3. Upaya terus menerus terhadap peluang untuk meminimalkan dampak dari pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap operasi, produk, dan layanan LPEI.
4. Pengecualian debitur/ calon debitur yang kegiatan bisnisnya sesuai dengan *Black List Activities*. LPEI telah membuat kriteria sebagai bagian dari pedoman Pembiayaan yang Bertanggung Jawab dalam mengelola risiko-risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pedoman ini menjadi referensi dan pertimbangan dalam proses pemberian keputusan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip utama pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola.

LPEI juga telah menerapkan penyaluran pembiayaan pada organisasi ramah lingkungan, seperti pelaku industri berorientasi ekspor yang bergerak dalam energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta organisasi yang melakukan konsep berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan LST tersebut, di tahun pelaporan LPEI telah menyelesaikan penyusunan Kebijakan tentang Keuangan Berkelanjutan sesuai Peraturan Dewan Direktur No. 0012/10/PDD/2022 tentang Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Standar Pedoman Operasional Penerapan Keuangan Berkelanjutan berdasarkan

Indonesia Eximbank has internal provisions and commitments to ESG management that have been integrated into the process of providing financial products and services provided. The implementation of the policy includes:

1. Integration of environmental, social, and governance management considerations into financing activities to effectively manage environmental, social, and governance risks.
2. Involvement and dialogue with debtors/ prospective debtors by working together in improving environmental, social, and governance management for debtors/prospective debtors.
3. Continuous efforts towards opportunities to minimize the impact of environmental, social, and governance management on Indonesia Eximbank's operations, products, and services.
4. Exclusion of debtors/prospective debtors whose business activities are in accordance with Black List Activities. Indonesia Eximbank has created criteria as part of its Responsible Financing guidelines in managing environmental, social, and governance risks. This guideline becomes a reference and consideration in the process of making financing decisions based on the main principles of environmental, social, and governance management.

Indonesia Eximbank has implemented financing to environmentally friendly organizations, such as export-oriented industry players engaged in renewable energy, environmentally friendly transportation, and organizations that carry out sustainable concepts.

To strengthen the implementation of ESG policy, in the reporting year Indonesia Eximbank has completed the preparation of Policy on Sustainable Finance in accordance with Board of Directors Regulation No. 0012/10/PDD/2022 on Sustainable Finance Policy of Indonesia Eximbank and Standard Operational Guidelines for Sustainable Finance Implementation based on Executive Director Regulation No. 0031/

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Peraturan Direktur Eksekutif No. 0031/PDE/12/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Keuangan Berkelanjutan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Penyelesaian penyusunan Kebijakan dan pedoman tersebut menjadi prioritas pertama bagi terlaksananya RAKB Lembaga. Kebijakan ESG dimaksud kelak akan didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten dan memahami konsep keuangan berkelanjutan, keberadaan unit penanggung jawab penerapan dan pelaporan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan termasuk penerbitan laporan penerapan ESG secara berkala baik secara internal maupun dalam Laporan Keberlanjutan.

- **Pembiayaan Korporasi**

Pembiayaan kepada korporasi yang merupakan salah satu katalis bagi perekonomian menjadi primadona utama produk LPEI dan penyumbang pendapatan dengan menargetkan pelaku ekspor yaitu perusahaan-perusahaan korporasi yang melakukan kegiatan ekspor langsung (*direct export*) maupun secara tidak langsung (*indirect export*).

Sebagian dari portofolio pembiayaan korporasi tersebut adalah untuk mendukung pengembangan perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit, yang sejak beberapa tahun terakhir mendapatkan sorotan dari negara-negara kawasan Eropa terkait dengan isu kelestarian lingkungan. Oleh karenanya dalam proses *due-diligent* pembiayaan industri pengolahan kelapa sawit, LPEI mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan/atau *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO).

LPEI juga melakukan diversifikasi pembiayaan kepada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dan industri baterai seiring dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya aspek ESG.

LPEI juga menerapkan ketentuan untuk dapat melakukan inspeksi ketaatan debitur terhadap

PDE/12/2022 on Standard Operational Guidelines for the Implementation of Sustainable Finance of Indonesia Eximbank. The completion of the preparation of these policies and guidelines is the first priority for the implementation of the Institution's RAKB. The ESG policy will be supported by the availability of competent human resources who understand the concept of sustainable finance, the existence of a unit responsible for the implementation and reporting of the implementation of Sustainable Finance including the issuance of periodic ESG implementation reports both internally and in the Sustainability Report.

- **Corporate Financing**

Financing to corporations, which is one of the catalysts for the economy, is the main prima donna of Indonesia Eximbank products and a contributor to revenue by targeting exporters, namely corporate companies that carry out direct export and indirect export activities.

Part of the corporate financing portfolio is to support the development of plantations and the palm oil manufacturing industry, which has in recent years received attention from European countries related to environmental sustainability issues. As such, in the due-diligent process of financing the palm oil processing industry, Indonesia Eximbank requires compliance with the provisions of the Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) and/or Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Indonesia Eximbank also diversified financing to the New Renewable Energy (EBT) sector and battery industry in line with increasing awareness of the importance of ESG aspects.

Indonesia Eximbank has established provisions for inspecting debtor compliance with loan clauses,

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

ketentuan klausul pinjaman yang mencakup berbagai peraturan perundangan di bidang lingkungan terkait. Manakala terdapat praktik yang belum memenuhi ketentuan dimaksud, LPEI membuka kerjasama dengan debitur untuk mencari jalan agar berbagai ketentuan pada aspek sosial-lingkungan tersebut akhirnya dapat dipenuhi dan ditaati. [FS5]

- **Pembiayaan Segmen UKM Berorientasi Ekspor (UKME)**

Pada dasarnya LPEI menerapkan ketentuan pembiayaan untuk bagi pelaku industri yang telah masuk kelompok usaha menengah mengacu pada ketentuan yang diterapkan pada pembiayaan segmen korporasi. Oleh karenanya, Pembiayaan UKM kini berganti menjadi Pembiayaan *Supply Chain* dengan fokus usaha Pembiayaan Plasma dan pembiayaan *Supply Chain*.

Pembiayaan plasma adalah pembiayaan yang diberikan kepada UKM plasma khususnya berupa pembiayaan plasma petani kelapa sawit yang tergabung dalam koperasi binaan perusahaan inti. Plasma tersebut telah menjadi debitur LPEI atau perusahaan inti dengan kategori *big name company*.

Sementara itu, pembiayaan *supply chain* (SCF) adalah pembiayaan kepada *supplier* dari prinsipal yang telah menjadi debitur LPEI atau prinsipal dengan kategori *big name company*.

Namun demikian pada proses penilaian kelayakan pembiayaan kelompok ini, LPEI tetap aktif bertindak sebagai *agent of development*, agar para debitur dapat memenuhi seluruh regulasi di bidang lingkungan yang berlaku, sehingga produknya dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor. [FS5, FS7]

Di tahun 2022, LPEI berfokus pada pembiayaan plasma sawit, grup besar dan SCF, dimana LPEI menargetkan pembiayaan plasma dan *supply chain* kepada perusahaan inti dan prinsipal yang memiliki kategori *big name* dan debitur eksisting LPEI.

which include compliance with environmental laws and regulations. In instances where non-compliance is identified, we work collaboratively with debtors to find ways to fulfill socio-environmental provisions and ensure compliance. [FS5]

- **Export-Oriented SME Segment Financing**

Basically, Indonesia Eximbank applies financing for industry players who have entered the medium business group referring to the provisions applied to corporate segment financing. As such, SME Financing has now changed to Supply Chain Financing with a focus on Plasma Financing and Supply Chain financing.

Plasma financing is provided to plasma SMEs, particularly in the form of plasma financing for oil palm farmers who are members of cooperatives fostered by core companies. The plasma has become a debtor of Indonesia Eximbank or a core company with the big-name company category.

Meanwhile, supply chain financing (SCF) is financing to suppliers from principals who have become Indonesia Eximbank debtors or principals with the big-name company category.

However, in assessing the financing feasibility of this group, Indonesia Eximbank takes an active role as a development agent, supporting debtors in compliance with all relevant environmental regulations to ensure their products are accepted in export destination countries. [FS5, FS7]

In 2022, Indonesia Eximbank has set its focus on palm plasma financing, large groups, and SCF. Our target for plasma and supply chain financing includes core companies, principals with established reputations, and our existing debtors.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Implementasi strategi tersebut di tahun 2022 terbukti efektif, sehingga LPEI mampu memberikan pembiayaan kepada petani plasma dengan total pemberian fasilitas sebesar Rp300 miliar. Selain itu, LPEI juga memberikan *Supply Chain Line* sebesar Rp1 triliun (Segmen Korporasi) dan sebesar Rp 20 miliar (Segmen UKM).

Dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi dari para pelaku usaha dari kelompok UKM, LPEI juga tetap melanjutkan program Desa Devisa. Program Desa Devisa merupakan program pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah, yang memiliki sumber daya alam maupun potensi lainnya, yang memiliki nilai jual tinggi di pasar ekspor. Untuk tahun 2022, LPEI mendukung pengembangan Desa Devisa di 6 daerah potensial, sebagai berikut.

The implementation of this strategy in 2022 has proven effective, Indonesia Eximbank was able to provide financing to palm oil plasmas with a total facility of Rp300 billion. In addition, Indonesia Eximbank also provided Supply Chain amounting to Rp 1 trillion (Corporate Segment) and amounting to Rp 20 billion (SME Segment).

Indonesia Eximbank is committed to developing the economic potential of SMEs through the continuation of our Desa Devisa program. This community empowerment initiative focuses on regions with natural resources and other exportable potentials. In 2022, we support the development of Desa Devisa in 6 potential areas, including:

Tabel Pemberdayaan UMKM – Program Desa Devisa 2022
MSMEs Empowerment – Desa Devisa Program 2022

Jenis Kegiatan Types of Activities	Jumlah UKM Yang Diberdayakan Number of Empowered SMEs	Nilai Ekonomi Economic Value
Desa Devisa Klaster Kopi Coffee Cluster Desa Devisa	Cakupan 82 Desa dengan melibatkan 7.541 petani kopi, pendampingan dimulai pada Maret-April 2022. Covering 82 villages involving 7,541 coffee farmers, assistance began in March-April 2022.	Potensi ekspor dengan negara tujuan Belanda dan Amerika sebesar 50 ton pada 2023. Export potential with Netherlands and United States destination countries is 50 tons in 2023.
Desa Devisa Klaster Lada Hitam Black Pepper Cluster Desa Devisa	Cakupan 6 Desa dengan melibatkan 505 petani lada, pendampingan dimulai pada Juni 2022. Covering 6 villages involving 505 pepper farmers, assistance began in June 2022.	Telah melakukan <i>indirect</i> ekspor ke India, Kenya, Australia, dan Jerman. Has conducted indirect exports to India, Kenya, Australia, and Germany.
Desa Devisa Klaster Gula Semut Sugar Cluster Desa Devisa	Cakupan 12 Desa dengan melibatkan 1.888 petani dan penderes, pendampingan dimulai pada Juni 2022. Covering 12 villages involving 1,888 farmers and penderes, assistance began in June 2022.	Telah melakukan <i>indirect</i> ekspor ke Amerika Serikat, Jerman dan Inggris. Has carried out indirect exports to the United States, Germany and the United Kingdom.
Desa Devisa Klaster Udang Situbondo Situbondo Shrimp Cluster Desa Devisa	Cakupan 6 Desa dengan melibatkan 80 petambak udang, pendampingan dimulai pada Juli 2022. Covering 6 villages involving 80 shrimp farmers, assistance began in July 2022.	Telah melakukan <i>indirect</i> ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. Has carried out indirect exports to the United States and Japan.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Jenis Kegiatan Types of Activities	Jumlah UKM Yang Diberdayakan Number of Empowered SMEs	Nilai Ekonomi Economic Value
Desa Devisa Jawa Timur East Java Desa Devisa	Cakupan 36 Desa dengan melibatkan 3.335 petani dan pengrajin, pendampingan dimulai pada November 2022. Covering 36 villages involving 3,335 farmers and craftsmen, mentoring began in November 2022.	Telah melakukan <i>indirect</i> ekspor ke Malaysia, Jepang, Australia, Tiongkok dan Brazil. Has conducted indirect exports to Malaysia, Japan, Australia, China and Brazil.
Desa Devisa Joint SMV Joint SMV Desa Devisa	Cakupan 2 Desa dengan melibatkan 76 petambak dan pengelola <i>mangrove</i> , pendampingan dimulai pada Desember 2022. Covering 2 villages involving 76 farmers and mangrove executors, assistance began in December 2022.	Terdapat potensi <i>indirect</i> ekspor ke beberapa negara tujuan di Asia. There is potential for indirect exports to several destination countries in Asia.

• **Pembiayaan Syariah**

Tujuan dan fungsi pembiayaan syariah yaitu untuk menjalankan mandat sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 2009. Melalui pembiayaan syariah LPEI menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia berorientasi ekspor yang memiliki keunggulan baik komparatif maupun kompetitif.

Outstanding pembiayaan syariah di tahun 2022 mencapai nilai sebesar Rp12,47 triliun, sedikit meningkat dari posisi tahun 2021 yang mencapai Rp12,43 triliun. Adapun profil nasabah berdasarkan jenis industri mayoritas yakni diatas 57% terdiri dari sektor perkebunan, pengolahan, perdagangan Sawit & CPO, sisanya dari perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan, pertambangan serta jasa angkutan dan galangan kapal.

Jasa Konsultasi

Jasa Konsultasi yang diberikan LPEI adalah kegiatan yang ditujukan kepada pihak terkait untuk memberi bantuan dan mengatasi hambatan dalam rangka Ekspor serta penyediaan Pembiayaan Ekspor Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KD PEN), pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa jasa konsultasi diberikan dalam bentuk konsultasi,

• **Sharia Financing**

The purpose and function of sharia financing is to carry out the mandate in accordance with Law No. 2 of 2009. Through sharia financing, Indonesia Eximbank presents its commitment to develop an export-oriented sharia economy in Indonesia that has both comparative and competitive advantages.

Outstanding sharia financing in 2022 reached a value of Rp12.47 trillion, a slight increase from the position in 2021 which reached Rp12.43 trillion. The majority of customer profiles based on industry type are above 57% consisting of the plantation, manufacturing, palm oil & CPO trading sectors, the rest from plantations and processing of plantation products, mining as well as transportation services and shipyards.

Advisory Services

Indonesia Eximbank provides Advisory Services to affiliated parties, with the objective of providing support and resolving issues related to Export and National Export Financing. According to the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 43 of 2019, which outlines the Basic Policy of National Export Financing (KD PEN), Article 22, paragraph (1) specifies that these services encompass various forms of consultation, capacity

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

pemberdayaan, pengembangan kapasitas, advokasi, dan/atau jasa konsultasi lainnya yang termasuk didalamnya kegiatan dari pendampingan calon eksportir baru.

Adapun hasil yang diharapkan dari jasa konsultasi ini adalah pelaksanaan mandat dan penguatan persepsi lembaga, pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang berkelanjutan, dan meningkatkan *Developmental impact*.

Untuk mencapai hasil tersebut, LPEI menyelenggarakan berbagai program pelatihan, seperti:

- Pameran TEI dan IFEX dilakukan virtual.
- Pelatihan Ekspor (CPNE, Tematik, Alumni *Gathering*) menjadi *online*.
- Perluasan akses pasar melalui *Platform E-Commerce Global*.
- Pemetaan dan Pelatihan Desa Devisa dilakukan secara *online*.

Untuk tahun 2022, LPEI berhasil menyelenggarakan 24 pelatihan (2021: 21 pelatihan) *Coaching Program for New Exporter* (CPNE). Sementara untuk program Desa Devisa, berhasil diselenggarakan 6 program (2021: 23 program) Desa Devisa, baik melibatkan koperasi, UKM maupun pelaku bisnis lainnya.

Pengelolaan Tresuri

Sejak tahun 2021, LPEI telah mendapatkan dukungan likuiditas valuta asing dari hasil pinjaman bilateral dan sindikasi sebesar USD510 juta serta termasuk didalamnya mendapatkan *Stand By Facility* sebesar USD175 juta. Selain itu LPEI juga mendapatkan dukungan likuiditas rupiah dengan total sebesar Rp12,83 triliun serta termasuk didalamnya berupa *Stand By Facility* sebesar Rp3 triliun. Penyertaan Modal Negara untuk meningkatkan Pembiayaan Ekspor Nasional dengan total sebesar Rp5 triliun.

Divisi Financial Institution and Treasury, sebagai pengelola Tresuri LPEI terbagi menjadi 3 (tiga) Departemen yaitu: (1) *Dealing Room* (2) *Financial Institution*, dan (3) *Pendanaan*.

building, empowerment, advocacy, and other advisory activities, including mentoring for potential new exporters.

The expected results of this advisory service are the implementation of mandates and strengthening institutional perceptions, sustainable National Export (PEN) financing, and increasing Developmental impact.

To achieve these results, Indonesia Eximbank organizes various training programs, such as:

- Virtual TEI and IFEX exhibitions.
- Online Export Training (CPNE, Thematic, Alumni *Gathering*).
- Expansion of market access through Global E-Commerce Platform.
- Online Desa Devisa Mapping and Training.

In 2022, Indonesia Eximbank successfully held 24 trainings for Coaching Program for New Exporter (CPNE) (2021: 21 training). Meanwhile, for the Desa Devisa program, 6 programs (2021: 23 programs) have been successfully held, both involving cooperatives, SMEs and other business communities.

Treasury Management

Since 2021, Indonesia Eximbank has received foreign exchange liquidity support from bilateral and syndicated loans of USD510 million and includes a Stand by Facility of USD175 million. In addition, Indonesia Eximbank also received rupiah liquidity support totaling Rp12.83 trillion and included a Stand by Facility of Rp3 trillion. State Capital Participation to increase National Export Financing with a total of Rp5 trillion.

The Financial Institution and Treasury Division, as Indonesia Eximbank Treasury manager, is divided into 3 (three) Departments, namely: (1) *Dealing Room*, (2) *Financial Institution*, and (3) *Funding*.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Penjaminan dan Asuransi

Total nilai portofolio LPEI pada segmen bisnis Penjaminan untuk tahun 2022 adalah senilai Rp12,4 triliun atau turun 5,3% dari total portofolio Penjaminan sebesar Rp13,1 triliun di tahun 2021.

Nasabah penjaminan maupun asuransi pada umumnya adalah korporasi, baik bergerak di bidang industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan, konstruksi maupun perbankan/ keuangan. Pada umumnya terdapat 3 jenis asuransi yang diberikan yakni *Trade Credit Insurance*, *Marine Cargo Insurance* dan *Overseas Investment Insurance*. Pada umumnya pelaksanaan *due-diligent* terhadap penjaminan maupun asuransi pertanggungjawaban yang diajukan telah dilakukan dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko LST, sekalipun pengelolaan portofolionya belum menerapkan sistem ESG yang masih dalam tahap penyusunan.

Trade Finance

LPEI memberikan fasilitas Trade Finance kepada pelaku usaha berupa *Pre Shipment Financing* untuk melakukan pembelian bahan baku dan *post shipment financing* untuk percepatan perputaran piutang sehingga dapat cepat berproduksi kembali.

Uraian selengkapnya mengenai perkembangan pengelolaan, strategi pengembangan maupun kinerja segmen bisnis Penjaminan, bisnis Asuransi, bersama dengan segmen Jasa Konsultasi, Pengelolaan Treasuri, dan *Trade Finance*, dapat dilihat pada Bab “Diskusi dan Analisis Manajemen – Sub Bab Segmen Bisnis”

Portofolio Terkait Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola [FS10]

LPEI belum menjalankan peninjauan pemenuhan mitigasi risiko LST terhadap seluruh eksposur portofolio segmen Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi yang dikelola secara berkala, mengingat sistem dan kebijakan ESMS sebagai landasan pengelolaan mitigasi risiko LST dimaksud masih dalam proses penyusunan dan

Guarantee and Insurance

The total value of Indonesia Eximbank’s portfolio in the Guarantee business segment for 2022 was Rp12.4 trillion, decreased by 5.3% from the total Guarantee portfolio of Rp13.1 trillion in 2021.

Insurance and Guarantee customers are generally corporations, both engaged in the manufacturing, trading, transportation, construction and banking/financial industries. In general, there are 3 types of insurance provided, namely Trade Credit Insurance, Marine Cargo Insurance and Overseas Investment Insurance. In general, the due-diligent implementation of the proposed guarantee and insurance coverage has been carried out by implementing ESG risk management policies, even though the portfolio management has not implemented the ESG system which is still in the preparation stage.

Trade Finance

Indonesia Eximbank provides Trade Finance facilities to businesses, through Pre Shipment Financing for procuring raw materials, and Post Shipment Financing to expedite receivables turnover, enabling them to swiftly reproduce.

A complete description of the management development, development strategy and performance of the Guarantee business segment, Insurance business, and the Advisory Services, Treasury Management, and Trade Finance segments, is presented in the Chapter “Management Discussion and Analysis – Business Segment Sub-Chapter”

Environmental, Social and Governance Related Portfolio [FS10]

Indonesia Eximbank has not yet reviewed the fulfillment of ESG risk mitigation for all portfolio exposures in the Financing, Guarantee, and Insurance segments, which are regularly managed. This is because the ESMS system and policy, which serve as the foundation for managing ESG risk mitigation, are still being prepared and developed.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

pengembangan. Namun demikian, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, LPEI telah menjalankan kriteria mitigasi dimaksud terhadap nasabah yang bergerak pada sektor industri yang memiliki risiko tinggi terhadap aspek LST. Sektor industri dimaksud diantaranya adalah sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, sektor industri pengolahan hasil tambang, sektor kehutanan dan sektor pengolahan lainnya.

Sebagai langkah mitigasi, dalam pelaksanaan *due-diligence* pemberian fasilitas pembiayaan maupun penjaminan ekspor, LPEI menerapkan kelengkapan perizinan termasuk ketentuan AMDAL nasabah atau calon nasabah dimaksud. Bagi pembiayaan dan/atau penjaminan dari nasabah yang bergerak di sektor perkebunan sawit dan sejenisnya, LPEI mensyaratkan kepemilikan sertifikat ISPO dan/atau RSPO agar pengelolaan perkebunan maupun produksi kelapa sawit yang dijalankan dapat memenuhi kriteria manajemen kebun yang *sustainable*.

Sebagaimana disampaikan dalam RKAB 2021-2025, untuk tahun 2022, LPEI menjalankan dua kegiatan Prioritas Pertama berkaitan dengan kelengkapan pedoman pengelolaan keuangan berkelanjutan, yakni:

1. Penyusunan pedoman atau regulasi di LPEI mengenai pengelolaan keuangan berkelanjutan.
2. Tersusunnya rencana pemenuhan peraturan lingkungan dan sosial menurut standar nasional dan internasional dalam hierarki peraturan LPEI.

DISTRIBUSI NILAI EKONOMI [GRI 201-1]

Selaras dengan berlanjutnya upaya penyehatan portofolio yang dijalankan di tahun 2022, sehubungan masih berlanjutnya kondisi pandemi COVID-19 serta memburuknya perekonomian global yang membuat kegiatan ekspor terganggu, LPEI mencatatkan penurunan total nilai ekonomi yang diterima, menjadi sebesar Rp3,91 triliun, turun 12,7% dari nilai sebesar Rp4,48 triliun di tahun sebelumnya.

However, as previously mentioned, Indonesia Eximbank has implemented mitigation criteria for customers operating in high-risk ESG sectors within the industrial sector. These sectors encompass the manufacturing of plantation and palm oil products, mining products, forestry, and other manufacturing industries.

To mitigate risks, Indonesia Eximbank employs a *due-diligence* process for providing financing facilities and export guarantees that involves assessing the customer's or prospective customer's licensing compliance, including AMDAL provisions. For customers involved in oil palm plantation and similar sectors, Indonesia Eximbank mandates possession of ISPO and/or RSPO certificates, ensuring that plantation management and oil palm production meet sustainable plantation management criteria.

As stated in the RKAB 2021-2025, for 2022, Indonesia Eximbank carries out two First Priority activities related to the completeness of sustainable finance management guidelines, namely:

1. Preparation of guidelines or regulations in Indonesia Eximbank on sustainable finance management.
2. Preparation of plans for compliance with environmental and social regulations according to national and international standards in the Indonesia Eximbank regulatory hierarchy.

ECONOMIC VALUE DISTRIBUTION [GRI 201-1]

In line with the continued portfolio restructuring efforts carried out in 2022, due to the continuing conditions of the COVID-19 pandemic and the deteriorating global economy that disrupted export activities, Indonesia Eximbank posted a decrease in total economic value generated to Rp3.91 trillion, decreased 12.7% from Rp4.48 trillion in the previous year.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Sekalipun mencatatkan penurunan total nilai perolehan ekonomi, LPEI tetap mencatatkan kenaikan jumlah distribusi perolehan nilai ekonomi. Total nilai ekonomi yang didistribusikan di tahun 2022 adalah sebesar Rp3,89 triliun, naik 0,3% dari nilai sebesar Rp3,88 triliun di tahun sebelumnya.

LPEI mendistribusikan perolehan pendapatan operasional kepada pemilik properti yang disewa, penyedia jasa *leasing* kendaraan, *fee* untuk sistem TI yang digunakan dan berbagai biaya operasional lain, dengan total senilai Rp184,33 miliar di tahun 2022, naik 3,0% dari sebesar Rp178,92 miliar di tahun 2021.

LPEI juga mendistribusikan biaya dana kepada pemangku kepentingan lain, yakni para penyandang dana, yang menempatkan dana dalam bentuk efek-efek yang diterbitkan maupun pinjaman lainnya sebesar Rp2,94 triliun untuk tahun 2022, turun 4,0% dari Rp3,06 triliun di tahun 2021.

LPEI membagikan nilai perolehan sebesar Rp578,16 miliar, naik 23,7% dari Rp467,31 miliar kepada para karyawan sebagai wujud komitmen untuk menyejahterakan serta menghargai kerja keras mereka.

LPEI tetap konsisten merealisasikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan, pajak badan maupun penerimaan bukan pajak kepada negara. Pada tahun 2022, nilai pembayaran tersebut adalah sebesar Rp162,97 miliar, naik 4,1% dari tahun 2021 yang sebesar Rp156,53 miliar. LPEI juga membayar bagian laba Pemerintah di tahun 2022 sebesar Rp23,63 miliar.

Secara keseluruhan, di tahun 2022 LPEI mencatatkan distribusi nilai perolehan ekonomi sebesar Rp3,89 triliun kepada para pemangku kepentingan. Namun demikian, LPEI masih dapat menyisihkan sejumlah nilai perolehan ekonomi yang ditahan untuk mendukung pengembangan usaha dimasa mendatang, sebesar Rp26,64 miliar, turun 95,6% dari sebesar Rp607,46 miliar di tahun sebelumnya, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Despite a decrease in total economic value generated, Indonesia Eximbank was able to post an increase in total distribution of economic gains. Total economic value distributed in 2022 was Rp3.89 trillion, up 0.3% from Rp3.88 trillion in the previous year.

Indonesia Eximbank distributes operating income to leased property owners, vehicle leasing service providers, fees for IT systems and various other operating costs, totaling Rp184.33 billion in 2022, rose by 3.0% from Rp178.92 billion in 2021.

Indonesia Eximbank also distributes fund costs to other stakeholders, namely funders, who place funds in the form of issued securities and other loans amounting to Rp2.94 trillion for 2022, decreased 4.0% from Rp3.06 trillion in 2021.

Indonesia Eximbank distributed the acquisition value of Rp578.16 billion, rose by 23.7% from Rp467.31 billion to employees as a form of commitment to prosperity and appreciation of their hard work.

Indonesia Eximbank continues to consistently realize the obligation to pay income tax, corporate tax and non-tax revenue to the state. In 2022, the payment value was Rp162.97 billion, an increase of 4.1% from 2021 of Rp156.53 billion. Indonesia Eximbank also paid the Government's profit share in 2022 of Rp23.63 billion.

Overall, in 2022, Indonesia Eximbank recorded a distribution of economic acquisition value of Rp3.89 trillion to stakeholders. Nevertheless, Indonesia Eximbank was still able to set aside a number of retained economic gains to support business development in the future, amounting to Rp26.64 billion, decreased 95.6% from Rp607.46 billion in the previous year, as shown in the following table.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE**Tabel Distribusi Perolehan Nilai Ekonomi** [GRI 201-1]**Economic Value Acquisition Distribution** [GRI 201-1]

Uraian Description	2021	2022	Perubahan Growth	
	Rp Miliar Billion		Nominal	%
Nilai Ekonomi Langsung yang Diterima Direct Economic Value Generated				
Pendapatan Bunga Interest Income	3.342,78	3.116,96	(226)	-6,8%
Penugasan Umum General Assignment	2.932,55	2.711,98	(221)	-7,5%
Penugasan Khusus National Interest Accounts	410,23	404,98	(5)	-1,3%
Pendapatan Syariah - Penugasan Umum Sharia Revenue - General Assignment	920,74	594,59	(326)	-35,4%
Pendapatan usaha dari ujah Operating income from ujah	0,00	0,31		
Pendapatan operasional lainnya – bersih Other operating income - net	215,42	186,21	(29)	-13,6%
Pendapatan Bukan Operasional Non-Operating Income	3,94	16,42	12	316,4%
Hasil penjualan aset tetap Proceeds from the sale of fixed assets	0,88	0,01	(1)	-99,0%
Jumlah nilai ekonomi langsung diterima Total direct economic value generated	4.483,76	3.914,19	(570)	-12,7%
Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan Direct Economic Value Distributed				
Beban Umum, Administrasi dan Beban Lain-lain General, Administrative and Other Expenses	178,92	184,33	5	3,0%
Gaji dan Tunjangan Salaries and Benefits	467,31	578,16	111	23,7%
Biaya Bunga Interest Charges	3.057,22	2.936,11	(121)	-4,0%
Pembayaran Bagian Laba Pemerintah Payment of Government Profit Share	13,57	23,63	10	74,1%
Pembayaran kepada Pemerintah (PPh, PPn dan PnPB) Payment to the Government (PPh, PPn and PnPB)	156,52	162,97	6	4,1%
Penyaluran dana CSR bagi masyarakat * Distribution of CSR funds to the community	2,76	2,61	(0)	-15,4%
Jumlah nilai ekonomi langsung didistribusikan Total direct economic value distributed	3.876,29	3.887,54	11	0,3%
Jumlah Nilai Ekonomi Ditahan Total Retained Economic Value	607,46	26,64	(581)	-95,6%

**MENDUKUNG KETAHANAN PEREKONOMIAN
NASIONAL BERSAMA PARA MITRA KERJA**

LPEI melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh mitra pemasok atau para vendor, baik untuk vendor barang, produk teknologi informasi maupun vendor jasa, seperti jasa sistim operasi. Hal tersebut karena keyakinan LPEI bahwa terjaminnya kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah bergantung juga pada kualitas barang dan jasa dari para mitra kerja.

Evaluasi dilakukan terhadap aspek kemampuan keuangan, ketenagakerjaan, maupun aspek kualitas barang dan jasa yang diberikan selama periode tertentu. LPEI memiliki

**SUPPORTING NATIONAL ECONOMIC
RESILIENCE WITH PARTNERS**

Indonesia Eximbank performs periodic assessments on all supplier partners or vendors, including those providing goods, information technology products, and services like operating system services. This is because Indonesia Eximbank recognizes that the guaranteed quality of services provided to customers relies on the quality of goods and services provided by partners.

The assessment covers financial capability, employment, and the quality of goods and services provided over a specific period. Indonesia Eximbank maintains a list of

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

daftar rekanan vendor dan pemasok barang maupun jasa yang telah terbukti memiliki rekam jejak yang baik dan yang terbukti memiliki rekam jejak kurang memuaskan. Dalam menjalin kerjasama dengan para vendor tersebut, LPEI mensyaratkan pernyataan tidak ada benturan kepentingan dan larangan memberi/menjanjikan untuk memberi sesuatu kepada manajemen dan karyawan yang terkait maupun tidak terkait. [GRI 2-6]

Selain itu, dalam kaitannya dengan komitmen pelestarian lingkungan, LPEI juga menghimbau seluruh suplier rekanan untuk memiliki kemampuan mengelola dan minimalisir dampak lingkungan di dalam kegiatan masing-masing mitra *suplier*. LPEI berencana menerapkan sistem ESG dalam seleksi maupun penilaian/pengelolaan kinerja para suplier atau pemasok/vendor [GRI 308-1]

Kebijakan Pengadaan

Dalam melaksanakan hubungan dengan para Penyedia Barang/Jasa, LPEI menerapkan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, mengacu pada Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, serta Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No. 0021/PDE/10/2022 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang dan Jasa.

Seluruh jajaran karyawan LPEI berpegang teguh pada 10 prinsip dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dari para pemasok, yakni:

1. Efisien
2. Efektif
3. Transparan
4. Terbuka
5. Bersaing
6. Tidak Diskriminatif
7. Akuntabel
8. Kemandirian
9. Kehati-hatian, dan
10. Independen.

vendor partners and suppliers who have demonstrated a positive track record, as well as those who have proven unsatisfactory. In working with these vendors, Indonesia Eximbank mandates a conflict-of-interest statement and prohibits any gifts or promises to management and related or unrelated employees. [GRI 2-6]

Moreover, in relation to the commitment to environmental conservation, Indonesia Eximbank also urges all partner suppliers to have the ability to manage and minimize environmental impacts in the activities of each supplier partner. Indonesia Eximbank plans to implement the ESG system in the selection and assessment/ management of the performance of suppliers or vendors. [GRI 308-1]

Procurement Policy

In carrying out relations with Goods/Services Providers, Indonesia Eximbank applies the Goods and Services Procurement Policy, referring to Board of Directors Regulation (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 on Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, and Executive Director Regulation (PDE) No. 0021/PDE/10/2022 on Operational Manual for Procurement of Goods and Services.

All levels of Indonesia Eximbank employees adhere to 10 principles in meeting the needs of goods and services from suppliers, namely:

1. Efficient
2. Effective
3. Transparent
4. Open
5. Compete
6. Non-discriminatory
7. Accountable
8. Independence
9. Prudence, and
10. Independent.

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Penjelasan selengkapnya mengenai Kebijakan, Prinsip Pengadaan maupun Metode Pengadaan, tersebut diuraikan pada Bab “Tata Kelola Perusahaan – Pengadaan Barang dan Jasa”.

Dengan memperhatikan seluruh ketentuan tersebut, di tahun 2022, LPEI merealisasikan pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau 100% merupakan pengadaan untuk pemasok lokal. [GRI 204-1]

KONTRIBUSI UNTUK NEGARA

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPEI pada umumnya menghasilkan 2 jenis kontribusi untuk negara, yakni kontribusi finansial langsung maupun tidak langsung, dan kontribusi non-finansial.

Kontribusi finansial langsung disampaikan dalam bentuk pembayaran pajak pendapatan badan, pungutan pajak penghasilan, penghasilan bukan pajak maupun pembayaran bagian laba bagi Pemerintah, yang untuk tahun operasional 2022 nilainya mencapai Rp162,97 miliar, dalam bentuk Pajak Badan maupun Pajak Penghasilan miliar (2021: Rp156,53 miliar), sementara sejumlah Rp23,63 miliar lainnya merupakan bagian laba Pemerintah (2021: Rp13,57 miliar).

Adapun kontribusi finansial tidak langsung adalah berupa terealisasinya fungsi intermediari dukungan kegiatan ekspor impor yang LPEI jalankan. Sehingga para nasabah pelaku usaha dari segmen korporasi maupun UKM yang sebelumnya belum mendapatkan akses bantuan pembiayaan, penjaminan, konsultasi maupun asuransi terhadap risiko gagal bayar dari kegiatan ekspor – impor yang dijalankan, kini dan seterusnya mendapatkan dukungan beragam jasa dukungan ekspor dimaksud dalam mengembangkan usahanya agar produknya mendapatkan akses di pasar global. Berkembangnya skala ekonomi para pelaku bisnis tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pembayaran pajak kepada negara.

Khusus pada peran intermediari dalam mendukung kegiatan ekspor ini, LPEI berpegang pada ketentuan

A complete explanation of the Policy, Procurement Principles and Procurement Methods is described in the Chapter “Corporate Governance – Procurement of Goods and Services”.

By taking into account all these provisions, in 2022, Indonesia Eximbank realizes the procurement of goods and services, all of which or 100% are procurement for local suppliers. [GRI 204-1]

CONTRIBUTION TO THE STATE

Indonesia Eximbank’s business activities generally deliver 2 types of contributions to the state, namely direct and indirect financial contributions, and non-financial contributions.

Direct financial contributions are conveyed in the form of corporate income tax payments, income tax levies, non-tax income and profit share payments for the Government, which for the 2022 operational year reached Rp162.97 billion, in the form of Corporate Tax and Income Tax billion (2021: Rp156.53 billion), while another Rp23.63 billion is portion of Government profits (2021: Rp13, 57 billion).

Indonesia Eximbank’s financial contribution is indirectly realized through its intermediary function of supporting export-import activities. This provides corporate and SME customers who previously lacked access to financing, guarantees, advisory, and insurance assistance with various export support services that aid in expanding their businesses and gaining access to global markets while mitigating default risks. The resulting economies of scale for these businesses will ultimately increase tax revenue for the state.

Specifically on the role of intermediary in supporting this export activity, Indonesia Eximbank adheres to the

KINERJA EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang menegaskan bahwa dengan dicabutnya izin usaha PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), maka seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) beralih kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Sebagai salah satu implementasi amanat yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 2/2009 tersebut, LPEI menjalankan peran intermediari dalam mendorong meningkatnya aktivitas ekspor dari para pelaku usaha di Indonesia, baik dari segmen korporasi maupun UKM, baik dilakukan secara mandiri maupun dalam kerangka sindikasi/kerjasama dengan lembaga keuangan perbankan lain di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sementara kontribusi non-finansial yang dihadirkan adalah berupa tersedianya berbagai infrastruktur dasar sebagai realisasi pelaksanaan program tanggung jawab perusahaan yang dijalankan oleh LPEI, selain kehadiran berbagai infrastruktur pendukung kegiatan ekspor, seperti kantor cabang, infrastruktur ekspor berbasis digital dan sebagainya.

provisions of Law No. 2 of 2009 dated January 12, 2009 on Indonesia Eximbank, which confirms that with the revocation of the business license of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), all assets and liabilities as well as legal rights and obligations of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) transfer to the Indonesia Eximbank.

Indonesia Eximbank fulfills its mandate, as set out in Law No. 2 of 2009, by serving as an intermediary to promote increased export activities for Indonesian businesses, including both corporate and SME segments. This is accomplished through independent efforts, as well as syndication or cooperation with other domestic and international banking institutions.

Meanwhile, Indonesia Eximbank provides a non-financial contribution by making various basic infrastructures available as part of its corporate responsibility programs. This includes the provision of supporting infrastructures for export activities, such as branch offices, digital-based export infrastructure, and more.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN [GRI 3-3]

Komitmen [OJK F.17] [GRI 3-3]

LPEI menjadikan kepuasan nasabah terhadap produk dan layanan Lembaga sebagai indikator keberhasilan dalam melayani nasabah secara profesional dan sepenuh hati. LPEI juga menjadikan kepuasan nasabah sebagai parameter utama dalam mengukur kualitas layanan, mengingat nasabah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang sangat signifikan perannya dalam menentukan keberlangsungan dan kemajuan bisnis Lembaga.

Oleh karenanya LPEI menunjukkan komitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah lebih dari sekedar menjalankan kewajiban pemenuhan tanggung jawabnya terhadap nasabah, dan mengerahkan seluruh jajaran pegawai mulai level Manajemen hingga jajaran pegawai di seluruh cabang Lembaga agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik saat berinteraksi dengan nasabah.

Selain memberikan layanan terbaik kepada para nasabah, LPEI juga menunjukkan komitmen untuk menyediakan produk-produk layanan pembiayaan, penjaminan maupun asuransi ekspor yang lengkap, memadai dan didukung teknologi informasi terkini demi memastikan akurasi eksekusi maupun pencatatan transaksi.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, LPEI menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip penerapan *Good Corporate Governance* yang tertuang dalam Tata cara penanganan pengaduan nasabah yang ditetapkan LPEI mengacu kepada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0070/PDE/12/2012 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, serta disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018

COMMITMENTS AND POLICIES [GRI 3-3]

Commitment [OJK F.17] [GRI 3-3]

Indonesia Eximbank regards customer satisfaction with its products and services as a an indicator of its success in providing professional and dedicated customer service. The Institution also considers customer satisfaction as the main parameter in measuring service quality, considering that customers are one of the stakeholders whose role is very significant in determining the sustainability and progress of the Institution's business.

As such, Indonesia Eximbank is fully committed to delivering superior service to all its customers, going beyond merely fulfilling its obligations to them. The institution mobilizes all employees, from management to branch staff, to consistently provide the highest level of service in every customer interaction.

Apart from delivering excellent customer service, Indonesia Eximbank demonstrates a commitment to furnishing comprehensive and reliable support that is backed by cutting-edge information technology, to ensure accuracy of execution and recording of transactions.

To realize this commitment, Indonesia Eximbank provides an effective and efficient customer complaint resolution mechanism in accordance with the principles of Good Corporate Governance implementation as stated in the procedures for handling customer complaints determined by Indonesia Eximbank referring to Executive Director Regulation No. 0070/PDE/12/2012 on Standard Operating Procedure (SOP) Settlement of Customer Complaints of Indonesia Eximbank, and in accordance with OJK Regulation No. 18/POJK.07/2018 on Consumer Complaint

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS

tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan OJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dasar Hukum Pengaduan Nasabah [GRI 3-3]

- POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Nasabah di Sektor Jasa Keuangan;
- POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Nasabah di Sektor Jasa Keuangan ; dan
- POJK No. 13/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Nasabah dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Implementasi kebijakan mengenai produk dan layanan diatur dalam ketentuan internal atas bisnis LPEI termasuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan produk lainnya baik secara konvensional maupun Syariah. Selain itu, LPEI juga telah memiliki ketentuan internal terkait penyelesaian pengaduan nasabah.

Ketentuan terkait produk diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif (PDE), dimana saat ini terdapat 8 Standar Pedoman Produk LPEI dan 1 Standar Pedoman Produk Pembiayaan Ekspor Nasional.

Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah [GRI 3-3]

Penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan melalui penerapan kebijakan sebagai berikut:

- Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Services in the Financial Services Sector, OJK Circular No. 17/SEOJK.07/2018 on Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector. OJK Regulation No. 6/POJK.07/2022 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, and OJK Regulation No. 31/POJK.07/2020 on the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority.

Legal References of Customer Complaints [GRI 3-3]

- POJK No. 18/POJK.07/2018 on Customer Complaint Services in the Financial Services Sector;
- POJK No. 6/POJK.07/2022 concerning Protection and Community in the Financial Services Sector;
- SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 on Guidelines for the Implementation of Customer Complaint Services in the Financial Services Sector; and
- POJK No. 13/POJK.07/2020 concerning the Implementation of Customer and Community Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority.

The implementation of policies on products and services is regulated in the internal provisions of its business including financing, guarantees, insurance, and other products both conventionally and Sharia. The Institution also has internal provisions related to the resolution of customer complaints.

Provisions on products are regulated in the Executive Director Regulation (PDE), where currently there are 8 Product Guideline Standards and 1 National Export Financing Product Guideline Standard.

Customer Complaint Resolution Policy [GRI 3-3]

Settlement of customer complaints is carried out through the application of the following policies:

- OJK Regulation No. 18/POJK.07/2018 on Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector
- OJK Circular No. 17/SEOJK.07/2018 on Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS

- Peraturan Direktur Eksekutif No. 0070/PDE/12/2012 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Kebijakan Terkait Produk [GRI 3-3]

- Kebijakan/ketentuan terkait produk diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif (PDE), dimana saat ini terdapat 32 PDE terkait produk LPEI dan 1 Standar Pedoman Produk Pembiayaan Ekspor Nasional.

- Executive Director Regulation No. 0070/PDE/12/2012 on *Standard Operating Procedure* (SOP) for Settlement of Customer Complaints of Indonesia Eximbank

Product Related Policy [GRI 3-3]

- Policy/provisions related to products are regulated in the Executive Director Regulation (PDE), where currently there are 32 PDEs related to LPEI products and 1 National Export Financing Product Guideline Standard.

INISIATIF STRATEGIS DI TAHUN 2022**Inisiatif Strategis Terkait Produk** [OJK F-26, F.29]

Di tahun 2022, sebagai bagian dari realisasi RKAT, LPEI menjalankan berbagai inisiatif strategis menyangkut produk dalam rangka memastikan keamanan produk, meliputi: [FS15]

- Simplifikasi dan *improvement* ketentuan produk dalam bentuk Standar Pedoman Produk (SPP), yakni SPP Pembiayaan, SPP Penjaminan, SPP Asuransi, SPP Penugasan Khusus dan SPP Tresuri.
- Pengembangan produk dalam bentuk SPP *Trade Finance*, SPP Pembiayaan Ekspor berdasarkan Prinsip Syariah (mencakup akad terkait fasilitas pembiayaan, *trade finance*, penjaminan dan asuransi) serta SPP Jasa Konsultasi.
- Penyempurnaan Buku Tarif.

Penentuan nama produk disesuaikan dengan kegiatan usaha yang ditetapkan dalam UU No. 2 tahun 2009, antara lain produk pembiayaan, penjaminan, asuransi, jasa konsultasi, dan treasury. Selain itu juga disesuaikan dengan jenis bisnisnya. Selama tahun 2022, tidak ada produk atau jasa yang ditarik kembali. [OJK F.29]

Inisiatif Strategis Terkait Layanan

Untuk meningkatkan keterjangkauan layanan termasuk meningkatkan akses produk LPEI beserta produk dan layanan secara lengkap, LPEI menjalankan berbagai kegiatan, meliputi:

STRATEGIC INITIATIVES IN 2022**Strategic Initiatives Related to Products** [OJK F-26, F.29]

In 2022, as part of the realization of RKAT, Indonesia Eximbank carries out various strategic initiatives related to products to ensure product safety, including: [FS15]

- Simplification and improvement of product provisions in the form of Product Guideline Standards (SPP), namely Financing SPP, Guarantee SPP, Insurance SPP, Special Assignment SPP and Treasury SPP.
- Product development in the form of SPP Trade Finance, SPP Export Finance based on Sharia Principles (including contracts related to financing facilities, trade finance, guarantees and insurance) and SPP Advisory Services.
- Tariff Book Improvements.

The determination of product names is adjusted to the business activities stipulated in Law No. 2 of 2009, including financing, guarantee, insurance, advisory services, and treasury products. In addition, it is also adjusted to the type of business. During 2022, no products or services were recalled. [OJK F.29]

Service-Related Strategic Initiatives

To improve service affordability, including increasing access to its products and complete products and services, Indonesia Eximbank carries out various activities:

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS

- Publikasi melalui media sosial yang dimiliki LPEI, antara lain website, instagram, twitter, facebook, dan youtube yang dilakukan secara berkesinambungan.
- Publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui corporate event yang dilakukan oleh LPEI.
- Pameran-pameran yang diikuti oleh LPEI.
- Kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perbankan/ Lembaga Keuangan Non Bank.

Informasi dan Keamanan Produk [OJK F.27]

Sesuai dengan SPO Penyusunan Peraturan, LPEI menetapkan bahwa dalam rangka memastikan keamanan suatu produk, terdapat tahapan-tahapan yang melibatkan unit kerja Bisnis, *Risk*, *Reviewer* dan unit kerja terkait serta diusulkan ke Komite Pengembangan Produk untuk selanjutnya mendapatkan penetapan dari Direktur Eksekutif.

LPEI menjalankan analisa risiko usulan produk berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi seluruh risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan LPEI maupun konsumen. Adapun kelompok-kelompok risiko relevan yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Kelompok risiko bisnis meliputi risiko asuransi dan risiko strategis;
- Kelompok risiko finansial meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko investasi (khusus untuk produk Syariah) dan risiko imbal hasil (khusus untuk produk Syariah);
- Kelompok risiko *governance* meliputi: risiko kepatuhan; risiko hukum; dan risiko reputasi; dan
- Risiko relevan yang melekat pada produk dan aktivitas baru, wajib diungkapkan kepada nasabah LPEI yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh nasabah tersebut.

LPEI menjalankan seluruh tahapan kebijakan peluncuran produk/jasa tersebut untuk menunjukkan komitmen dalam memenuhi seluruh aturan perundangan yang berlaku.

- Publications through social media, including websites, Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube are carried out on an ongoing basis.
- Publication through mass media both print and electronic.
- Socialization to businesses through corporate events conducted by Indonesia Eximbank.
- Exhibitions participated by Indonesia Eximbank.
- Cooperation with Ministries/ Institutions/ Banking/ Non-Bank Financial Institutions.

Product Information and Safety [OJK F.27]

In accordance with the SPO Drafting Regulations, Indonesia Eximbank stipulates that in order to ensure the safety of a product, there are stages involving Business, Risk, Reviewer and related work units and proposed to the Product Development Committee to subsequently obtain determination from the Executive Director.

Indonesia Eximbank conducts a risk analysis of product proposals in coordination with the work unit in charge of risk management to identify all risks inherent in the development or expansion of business activities, both related to Indonesia Eximbank and consumers. The relevant risk groups considered are as follows:

- Business risk groups include insurance risks and strategic risks;
- Financial risk groups include: credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, investment risk (specifically for Sharia products) and yield risk (specifically for Sharia products);
- The governance risk group includes: compliance risk; legal risk; and reputational risk; and
- The relevant risks attached to new products and activities must be disclosed to Indonesia Eximbank customers as stated in a document signed by the customer.

Indonesia Eximbank upholds its commitment to comply with all applicable laws and regulations by conducting all phases of the product/service launch policy. In the

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS

Sehingga dalam tahun pelaporan, LPEI tidak pernah mencatatkan adanya insiden pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang disampaikan regulator, baik terkait pengembangan produk maupun terkait aspek sosial dan lingkungan. [GRI 419-1]

Untuk menginformasikan peran dan fungsi LPEI beserta produk dan layanan secara lengkap, LPEI menjalankan berbagai kegiatan, meliputi:

1. Publikasi melalui media sosial yang dimiliki LPEI, antara lain *website, instagram, twitter, facebook*, dan *youtube* yang dilakukan secara berkesinambungan.
2. Publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui *corporate event* yang dilakukan oleh LPEI.
4. Pameran-pameran yang diikuti oleh LPEI.

Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Khusus

Sebagai bagian dari realisasi Program Prioritas dalam RAKB, dimana LPEI bertekad menyusun, menerapkan dan melengkapi sistem ESMS terkait dengan aspek LST dalam pemberian layanan pembiayaan, penjaminan maupun permohonan penutupan asuransi risiko kegiatan ekspor, Lembaga berencana mensosialisasikan berbagai kebijakan khusus dimaksud dimasa mendatang.

Dampak Produk dan Jasa [OJK F.23, F.28]

Kegiatan usaha LPEI tidak memberikan dampak negatif baik terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Berbagai produk dan layanan jasa yang diberikan justru menghadirkan berbagai *benefit* terhadap masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- Terciptanya Eksportir baru dan UMKM *scaling-up* untuk menjadi *bankable* melalui program CPNE dan *Marketing Handholding*;
- Terciptanya komunitas yang berorientasi ekspor melalui program Desa Devisa;
- Terpenuhinya informasi, edukasi, pembiayaan dan *Community Development* Desa Devisa kepada para pelaku usaha khususnya UMKM termasuk komunitas

reporting year, the institution recorded zero incidents of regulatory violations related to product development or social and environmental factors, demonstrating its adherence to regulatory requirements. [GRI 419-1]

To inform its roles and functions including its complete products and services, Indonesia Eximbank carries out various activities, including:

1. Publications through social media, including websites, Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube are carried out on an ongoing basis.
2. Publication through mass media both print and electronic.
3. Socialization to businesses through corporate events conducted by Indonesia Eximbank.
4. Exhibitions participated by Indonesia Eximbank.

Preparation and Dissemination of Special Policies

As part of the realization of the Priority Program in RAKB, where Indonesia Eximbank is determined to compile, implement and complete the ESMS system related to ESG aspects in providing financing services, guarantees and applications for the closure of export risk insurance, the Institution plans to socialize various specific policies in the future.

Impact of Products and Services [OJK F.23, F.28]

Indonesia Eximbank's business activities do not have a negative impact on social life. Various products and services provided actually present various benefits to the community, including the following:

- The creation of new exporters and scaling-up MSMEs to become bankable through CPNE and Marketing Handholding programs;
- The creation of an export-oriented community through the Desa Devisa program;
- Fulfillment of information, education, financing and Community Development of Desa Devisa to businesses, particularly MSMEs, including

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS

yang memiliki produk unggulan berorientasi Ekspor melalui Rumah Ekspor;

- Terciptanya ekspor berkelanjutan melalui fasilitasi akses pembiayaan, penjaminan dan asuransi, dengan berkolaborasi bersama Lembaga Keuangan lainnya.

Edukasi Produk dan Jasa Layanan LPEI [FS16]

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, di tahun 2022 LPEI kembali memberikan edukasi mengenai produk dan jasa yang diberikan melalui berbagai kegiatan, yang dikoordinasikan oleh Divisi Jasa Konsultasi. Beberapa kegiatan yang dijalankan di tahun 2022, mencakup diantaranya:

- Rumah Ekspor
- *Marketing Handholding*
- Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) secara *online*.
- Pelatihan ekspor (*Coaching Program for New Exporter*, Tematik, Alumni *Gathering*, IWAPI) secara *online*.
- Perluasan akses pasar melalui platform e-commerce global.
- Program Kemitraan
- Pemetaan dan pelatihan Desa Devisa secara *online*.
- Penguatan kolaborasi dengan K/L dan SMV

PENGEMBANGAN PRODUK/AKTIVITAS BARU

Mengacu pada pemenuhan kebutuhan para nasabah dan menyesuaikan dengan perkembangan transaksi lintas negara, serta dilaksanakan dengan merujuk pada SPO Produk dan Aktivitas Baru, LPEI merealisasikan beberapa inovasi produk dan layanan baru selama tahun 2022. Beberapa inovasi yang diluncurkan LPEI pada tahun tersebut sebagai berikut:

- Produk *Trade Finance* yakni *Auto Purchase LC* / SKBDN Intra LPEI;
- Produk Kerjasama Ekosistem melalui Perbankan Nasional dan *Policy Lending*;
- Produk Jasa Konsultasi antara lain Rumah Ekspor dan Desa Devisa;
- Dukungan LPEI terhadap program/produk Penugasan Khusus.

communities that have excellent export-oriented products through Export Houses;

- The creation of sustainable exports by facilitating access to financing, guarantees and insurance, in collaboration with other Financial Institutions.

Product and Service Education [FS16]

As a form of responsibility to all stakeholders, in 2022 Indonesia Eximbank again provides education on products and services provided through various activities, which are coordinated by the Advisory Services Division. Some of the activities carried out in 2022 include:

- Export House
- Marketing Handholding
- Trade Expo Indonesia (TEI) exhibition *online*.
- Export training (*Coaching Program for New Exporter*, Thematic, Alumni *Gathering*, IWAPI) *online*.
- Expansion of market access through global e-commerce platforms.
- Partnership Program
- Online Desa Devisa mapping and training.
- Strengthening collaboration with Ministries/ Institutions and SMV

NEW PRODUCT DEVELOPMENT/ACTIVITIES

Referring to meeting customer needs and adjusting to the development of cross-border transactions, and carried out by referring to SPO New Products and Activities, Indonesia Eximbank realized several new product and service innovations during 2022. Some of the innovations launched during the year are as follows:

- Trade Finance products are *Auto Purchase LC* / SKBDN Intra LPEI;
- Ecosystem Cooperation Products through National Banking and *Policy Lending*;
- Advisory Service Products include Export Houses and Desa Devisa;
- Support for Special Assignment programs/products.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS**Perluasan dan Pengembangan Produk**

Pada Tahun 2022, LPEI melanjutkan perluasan program atas eksisting produk dan/atau pengembangan produk baru diantaranya:

- Penyempurnaan Ketentuan Produk sesuai kebutuhan Bisnis LPEI antara lain meliputi *Trade Finance*, Asuransi, prinsip syariah dan lainnya;
- Penyempurnaan dan/atau pengembangan produk baru untuk meningkatkan nilai jual antara lain produk pembiayaan, penjaminan, asuransi, *Trade Finance*, syariah sesuai kebutuhan Bisnis LPEI.
- Program Penugasan Khusus LPEI:
 - a. PKE dalam Rangka Mendukung Industri Alat Transportasi (sesuai KMK Nomor 406/KMK.08/2021);
 - b. PKE Pembiayaan dalam rangka mendukung sektor usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor (sesuai dengan KMK Nomor 409/KMK.08/2021);
 - c. PKE dalam Rangka Mendorong Ekspor ke Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah;
 - d. PKE Penyediaan Fasilitas Trade Finance dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (sesuai KMK Nomor 410/KMK.08/2021);
 - e. Program Penugasan Khusus Lainnya yang diamanatkan kepada LPEI sesuai ketentuan yang mendasari dalam tahun berjalan;
 - f. Program Penugasan Khusus sesuai RPKM Penugasan Khusus Kepada LPEI yang akan segera disahkan.

PRIVASI NASABAH [GRI 418-1]

LPEI menempatkan privasi nasabah sebagai salah satu prioritas layanannya. Sebagai bagian dari pelaku industri keuangan/perbankan nasional, LPEI tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun oleh Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga lainnya dalam melindungi privasi data nasabah.

Product Expansion and Development

In 2022, Indonesia Eximbank continues to expand its existing product program and/or new product development, as follows:

- Improvement of Product Terms according to Business needs, including Trade Finance, Insurance, sharia principles and others;
- Improvement and/or development of new products to increase selling value, including financing, guarantee, insurance, Trade Finance, sharia products according to Business needs.
- Indonesia Eximbank National Interest Account Program:
 - a. PKE to Support the Transportation Equipment Industry (according to KMK No. 406/KMK.08/2021);
 - b. PKE Financing to support the export-oriented small and medium enterprises sector (in accordance with KMK No. 409/KMK.08/2021);
 -
 - c. PKE in to promote exports to Africa, South Asia and the Middle East;
 - d. PKE of Trade Finance Facilities to support National Economic Recovery (in accordance with KMK No. 410/KMK.08/2021);
 - e. Other National Interest Account Programs mandated to Indonesia Eximbank in accordance with the underlying provisions in the current year;
 - f. National Interest Account Programs in accordance with RPKM Special Assignment to Indonesia Eximbank which will be ratified soon.

CUSTOMER PRIVACY [GRI 418-1]

Indonesia Eximbank places customer privacy as one of its service priorities. As part of the national financial/banking industry players, Indonesia Eximbank complies with the prevailing laws and regulations in Indonesia, both issued by the Financial Services Authority, Bank Indonesia and by the Government through Ministries and other institutions in protecting customer data privacy.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS

PENANGANAN PENGADUAN NASABAH

Dalam rangka menampung dan menangani pengaduan nasabah terhadap kualitas layanan maupun produk yang disediakan, LPEI menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan yang dapat ditujukan kepada Sekretaris LPEI melalui:



Email :
corpsec@indonesiaeximbank.go.id



Telephone :
(021) 3950-3600

HANDLING CUSTOMER COMPLAINTS

To accommodate and handle customer complaints regarding the quality of services and products provided, Indonesia Eximbank provides channels to submit complaints that can be addressed to the Secretary of Indonesia Eximbank through:



Corporate Secretary:
Prosperity Tower, Lantai 1 District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Indonesia
Kode Pos 12190

Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan bersama-sama dengan unit-unit terkait, baik dalam langkah penyelesaian pengaduan maupun perbaikan dari sisi proses, prosedur maupun produk dan layanan yang diberikan.

Jumlah Pengaduan Nasabah dan Tahapan Penanganan

[OJK F.24] [GRI 417-2, 417-3, 418-1]

Sebagai langkah mitigasi adanya ketidakpuasan nasabah yang berujung ke pengaduan, LPEI memberikan edukasi dan menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan melalui sarana komunikasi resmi yang tersedia, antara lain: informasi langsung oleh *relationship manager*, telpon, surat, email, *website*, brosur, media sosial, dan media massa. Nasabah dapat melakukan komunikasi dengan LPEI untuk menyampaikan informasi, permohonan, hingga aduan melalui media komunikasi tersebut.

Mengikuti aturan OJK, nasabah juga dapat menyampaikan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dikelola oleh OJK.

Tahapan penanganan pengaduan nasabah:

Handling and settlement of customer complaints is carried out together with related units, both in the steps of resolving complaints and improving in terms of processes, procedures and products and services provided.

Number of Customer Complaints and Stages of Handling

[OJK F.24] [GRI 417-2, 417-3, 418-1]

As a measure to mitigate customer dissatisfaction that leads to complaints, Indonesia Eximbank provides education and conveys information about products and services through official communication means available, including: direct information by relationship managers, telephone, letters, emails, websites, brochures, social media, and mass media. Customers can communicate with Indonesia Eximbank to submit information, requests, and complaints through these communication media.

Following OJK regulations, customers can also submit complaints through the Consumer Protection Portal Application (APPK) managed by OJK.

Stages of handling customer complaints:

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS

Keterangan:

1. Nasabah menyampaikan pengaduan kepada LPEI melalui saluran yang disediakan yaitu surat, telepon, email, media sosial, media massa atau datang secara langsung. Pengaduan yang masuk dikelola oleh Unit Kerja yang memiliki fungsi sebagai Koordinator Penanganan Pengaduan.
2. Aduan yang masuk disampaikan kepada unit kerja terkait apabila memerlukan penyelesaian lebih lanjut yang akan melibatkan unit kerja terkait.
3. Penyampaian solusi penyelesaian kepada Nasabah. Pengaduan akan ditutup apabila nasabah menerima solusi yang ditawarkan. Apabila nasabah tidak menerima solusi yang ditawarkan, nasabah dapat menggunakan mediator untuk penyelesaian pengaduan (*external dispute resolution*).
4. Penyampaian progres penyelesaian kepada OJK selaku regulator

Jumlah pengaduan

Sepanjang tahun 2022, berdasarkan catatan dari pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen (APPK), terdapat satu surat yang ditujukan kepada LPEI yaitu surat permohonan atas fasilitas yang dimiliki LPEI.

Information:

1. Customers submit complaints to Indonesia Eximbank through the channels provided, namely letter, telephone, email, social media, mass media or come in person. Incoming complaints are managed by the Work Unit which has a function as a Complaint Handling Coordinator.
2. Incoming complaints are submitted to the relevant work unit if further resolution is required which will involve the related work unit.
3. Delivery of settlement solutions to Customers. Complaints will be closed if the customer accepts the solution offered. If the customer does not accept the solution offered, the customer can use a mediator for external dispute resolution.
4. Submission of settlement progress to OJK as the regulator

Number of complaints

Throughout 2022, based on records from complaints submitted through the Consumer Complaint Portal Application (APPK), there was one letter addressed to Indonesia Eximbank, namely a letter requesting Indonesia Eximbank's facilities.

Keterangan Information	2021	2022
Pengaduan yang masuk Incoming complaints	6	1
Status		
Terselesaikan Resolved	5	1
Sedang dalam proses In progress	1*	0

*Pengaduan diterima pada akhir tahun | Complaints received at the end of the year

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS

Sepanjang periode pelaporan di tahun 2022, juga tidak ditemukan pengaduan berkaitan dengan kebocoran kerahasiaan/privasi pelanggan dan hilangnya data nasabah/pelanggan.

KETERBUKAAN INFORMASI PRODUK DAN JASA

[GRI 417-1, 417-2, 417-3]

LPEI menjamin kelayakan berbagai produk dan layanan yang disediakan, selain menjamin bahwa seluruh produk telah mematuhi seluruh perundang-undangan serta peraturan yang ditentukan oleh pihak regulator terkait.

LPEI senantiasa berupaya untuk selalu memberikan informasi yang jelas, akurat, transparan, dan lengkap melalui pemberian label di tiap produk dan layanan LPEI yang disediakan. Selain itu, seluruh kegiatan operasi dan usaha yang dijalankan diawasi oleh OJK dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan baik oleh OJK; termasuk persyaratan pelabelan dan informasi produk dan jasa yang dimiliki.

Informasi rinci mengenai produk dan layanan LPEI dapat diakses melalui situs LPEI (<http://www.indonesiaeximbank.go.id/>)

Sepanjang periode pelaporan di tahun 2022, tidak ditemukan pelanggaran terkait informasi produk dan jasa maupun komunikasi pemasaran, baik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [GRI 417-2, 417-3]

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN [GRI 419-1]

LPEI tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun oleh Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga lainnya.

Throughout the reporting period in 2022, there were also no complaints related to leakage of customer confidentiality/privacy and loss of customer/ customer data.

PRODUCT AND SERVICE INFORMATION

DISCLOSURE [GRI 417-1, 417-2, 417-3]

Indonesia Eximbank guarantees the feasibility of various products and services provided, in addition to guaranteeing that all products comply with all laws and regulations determined by the relevant regulators.

Indonesia Eximbank strives to always provide clear, accurate, transparent, and complete information through labeling in each product and service provided. In addition, all operations and business activities carried out are supervised by OJK and comply with regulations issued by both OJK; including labeling requirements and information on products and services owned.

Detailed information about Indonesia Eximbank products and services can be accessed through its website (<http://www.indonesiaeximbank.go.id/>)

Throughout the reporting period in 2022, no violations were found related to product and service information or marketing communications, both causing losses to customers and violations of applicable laws and regulations. [GRI 417-2, 417-3]

REGULATORY AND REGULATORY COMPLIANCE

[GRI 419-1]

Indonesia Eximbank complies with the prevailing laws and regulations in Indonesia, both issued by the Financial Services Authority, Bank Indonesia and by the Government through other Ministries and Institutions.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH
RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS, SERVICES AND CUSTOMERS

Beberapa aspek kepatuhan Kami yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

- **Prinsip Kehati-hatian**

Sebagai salah satu pelaku industri jasa keuangan non bank, LPEI menetapkan dan menerapkan kebijakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan program-program pelaksanaannya. Termasuk dalam hal ini adalah Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Penerapan Strategi *Anti-Fraud*, Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dan peraturan pendukungnya.

- **Perkara yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Dewan Direktur maupun Direktur Pelaksana**

Sepanjang tahun 2022 tidak ada perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI.

- **Sanksi Regulator**

Selama tahun 2022 terdapat 2 sanksi administratif yang disampaikan kepada LPEI, yaitu 1 peringatan tertulis dan 1 sanksi denda dan telah selesai di tindaklanjuti pada kesempatan pertama..

SURVEI KEPUASAN NASABAH [OJK F.30]

Pada tahun pelaporan LPEI tidak melakukan survei kepuasan nasabah.

Some aspects of our compliance that are prioritized are as follows:

- **Prudential Principles**

As one of the practitioners in the non-bank financial services industry, Indonesia Eximbank establishes and implements policies in the application of prudential principles in its business activities and implementation programs. This includes the Code of Ethics and Work Culture of the Institution, the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML-CFT) Program, the Implementation of Anti-Fraud Strategies, the Whistleblowing System and supporting regulations.

- **Cases Involving the Board of Commissioners and the Board of Directors and Managing Directors**

Throughout 2022, there have been no legal cases involving the Board of Commissioners, Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank.

- **Regulatory Sanctions**

During 2022, there were 2 administrative sanctions submitted to Indonesia Eximbank, namely 1 written warning and 1 fine sanction and have been completed at the first opportunity.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY [OJK F.30]

In the reporting year, Indonesia Eximbank did not conduct a customer satisfaction survey.

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE



Hampir seluruh negara di dunia saat ini menempatkan isu pelestarian dan perbaikan kondisi lingkungan sebagai salah satu topik pembangunan yang harus dikerjakan bersama-sama dengan segera. Isu lingkungan menjadi bagian penting dari rumusan pembangunan berkelanjutan skala global - *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi kesepakatan negara-negara di seluruh dunia tersebut dalam Paris COP 21 yang dilaksanakan pada tahun 2015. Pada forum COP 27 yang diselenggarakan di Mesir, bulan November 2022, disepakati mekanisme pemberian bantuan dana bagi negara-negara yang terdampak bencana akibat perubahan iklim selain bantuan dana bagi program perbaikan kondisi lingkungan di negara-negara berkembang.

Pemerintah Indonesia menegaskan tekadnya untuk mengurangi emisi CO₂ dalam pengelolaan pembangunan ekonominya hingga sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau hingga 41% jika mendapatkan bantuan internasional di tahun 2030 mendatang. Kesepakatan COP 27 tersebut dengan menegaskan perlunya realisasi implementasi, kerjasama dan langkah nyata.

Oleh karena penanganan isu lingkungan dan cuaca ekstrem ini memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, LPEI sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki cabang di beberapa wilayah Indonesia dengan nasabahnya adalah korporasi maupun pelaku usaha UKM berorientasi ekspor yang harus dapat mengikuti dinamika masyarakat global, menunjukkan tekadnya untuk turut berpartisipasi mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan tersebut.

KOMITMEN [GRI 3-3]

Sebagai sebuah lembaga keuangan khusus, kegiatan usaha LPEI sebenarnya relatif tidak membawa dampak lingkungan yang signifikan. Kendati demikian, LPEI berkomitmen penuh untuk bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya, mendukung pencapaian

Today, nearly all countries around the globe consider the preservation and enhancement of environmental conditions to be a crucial developmental topic that demands immediate action. Environmental issues are an important part of the formulation of sustainable development on a global scale - Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia is one of the countries that has ratified the agreement of countries around the world in Paris COP 21 held in 2015. At the COP 27 forum held in Egypt, in November 2022, mechanism for providing financial assistance for countries affected by disasters due to climate change was agreed in addition to financial assistance for programs to improve environmental conditions in developing countries.

The Indonesian government is resolute in its commitment to decrease CO₂ emissions in its economic development management by 29% through its own endeavors or up to 41% with international support by 2030. The COP 27 agreement emphasizes the necessity for implementation, collaboration, and tangible measures to be taken.

As environmental concerns and extreme weather require the participation of all segments of society, Indonesia Eximbank - as a financial institution with branches across various regions of Indonesia and whose customers include export-oriented SMEs and corporations that must keep up with global dynamics - is committed to contributing to the achievement of sustainability goals.

COMMITMENT [GRI 3-3]

As a specialized financial institution, its business activities actually have relatively no significant environmental impact. Nevertheless, Indonesia Eximbank is fully committed to, jointly with other financial institutions, support the achievement of various sustainability goals in

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

berbagai tujuan keberlanjutan di bidang lingkungan dalam SDGs.

Ada 3 (tiga) pendekatan utama yang kami jalankan untuk mendukung pencapaian beragam tujuan keberlanjutan di bidang lingkungan. Pertama, melalui pemberlakuan kebijakan pembiayaan, penjaminan dan penutupan pertanggungan risiko kegiatan ekspor yang ramah lingkungan, Kedua melalui implementasi pendanaan ramah lingkungan dan Ketiga, melalui implementasi kebijakan operasional ramah lingkungan, yakni *Green Office* LPEI.

Dalam rangka mewujudkan dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan tersebut LPEI telah menyusun dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021-2025, yang disusun sebagai perwujudan tingginya komitmen Lembaga dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan.

Kebijakan [GRI 3-3, 2-23]

LPEI berkomitmen untuk mewujudkan pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan dan penutupan asuransi ramah lingkungan melalui penerapan kebijakan ketentuan internal dan komitmen pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan. Dalam rangka melengkapi kebijakan dimaksud, Pada akhir tahun 2022 LPEI telah menuntaskan penyusunan dan memberlakukan Kebijakan *Environmental, Social & Governance (ESG)*, sebelumnya dinamakan *Environmental and Social Management System (ESMS)* dan Manual Operasional ESG. Penyusunan Kebijakan ESG menjadi prioritas pertama bagi terlaksananya RKAB Lembaga. Perubahan terminologi ESMS menjadi ESG tersebut telah disampaikan kepada OJK.

Sementara untuk mewujudkan komitmen penyelenggaraan kegiatan operasional yang ramah lingkungan, LPEI menerapkan Program *Green Office* LPEI, selanjutnya dinamakan ESG Kelembagaan. Sehubungan dengan perubahan terminologi tersebut, di bulan

the environmental sector within the SDGs.

There are 3 (three) main approaches that we carry out to support the achievement of various sustainability goals in the environmental aspect. First, through the implementation of financing policies, guarantees and closing risk coverage for environmentally friendly export activities, second through environmentally friendly funding and third, through environmentally friendly operational policies, namely the Indonesia Eximbank Green Office.

To realize support for the achievement of sustainability goals, Indonesia Eximbank has prepared a Sustainable Finance Action Plan (RAKB) 2021-2025 documents, which is prepared as a manifestation of the high commitment of the Institution in supporting the achievement of sustainability goals.

Policy [GRI 3-3, 2-23]

Indonesia Eximbank is committed to realizing the provision of environmentally friendly financing, guarantee and closing insurance facilities through the implementation of internal provisions policies and environmental, social and governance (ESG) management commitments that have been integrated into the process of providing financial products and services. In order to complement the policy, at the end of 2022, Indonesia Eximbank has completed the preparation and enactment of ESG Policy, previously called the Environmental and Social Management System (ESMS) and the ESG Operational Manual. ESG Policy Formulation is the first priority for the implementation of the Institution's RKAB. The change in ESMS terminology to ESG has been submitted to OJK.

Meanwhile, to realize the commitment to implement environmentally friendly operational activities, Indonesia Eximbank implements the Indonesia Eximbank Green Office Program, hereinafter named Institutional ESG. In connection with the change in terminology, in December

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Desember tahun 2022 LPEI telah menerbitkan PDE (Peraturan Direktur Eksekutif) terkait hal tersebut.

Program *Green Office* telah dilaksanakan sejak tahun 2012, merupakan implementasi atas PDE No. 0024/PDE/04/2012 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai. Dalam pelaksanaannya, Divisi SDM dan Umum bertindak sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana kantor, termasuk penghematan penggunaan energi listrik, air dan kertas. Dalam rangka turut serta mewujudkan program pelestarian lingkungan, Divisi SDM dan Umum melakukan himbauan secara berkala untuk menerapkan program ini.

LPEI menjalankan program *green office* pada setiap kegiatan operasional di lingkungan kerja. Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan fokus dari program *green office* tersebut.

SUSTAINABLE FINANCING DAN SUSTAINABLE FUNDING

LPEI bertekad menerapkan konsep Keuangan Berkelanjutan secara utuh guna menunjukkan komitmen dukungannya terhadap upaya pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs, baik pada aspek lingkungan maupun pada aspek sosial, dengan memperkuat integrasi lingkungan, sosial dan tata kelola yang telah dirintis selama ini dalam mempertimbangkan permohonan pembiayaan, penjaminan maupun penutupan asuransi risiko kegiatan ekspor impor produk dan jasa para nasabah.

Oleh karenanya, dalam dokumen RAKB yang telah disampaikan kepada OJK, LPEI menegaskan prioritas penyusunan, sosialisasi dan implementasi sistem dan kebijakan ESG dan rancangan Manual Operasional ESG. Melalui penerapan ESG yang menyatu dengan ketentuan internal serta komitmen pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan selama ini, LPEI akan dapat:

2022 Indonesia Eximbank has issued a PDE (Executive Director Regulation) related to this matter.

The Green Office program has been implemented since 2012, is an implementation of PDE No. 0024/PDE/04/2012 on Management of Facilities and Infrastructure of Indonesia Eximbank to serve as guidelines for all employees. In its implementation, the Human Resources and General Affairs Division acts as a unit responsible for the management of office facilities and infrastructure, including saving the consumption of electricity, water and paper. To participate in realizing the environmental conservation program, the Human Resources and General Affairs Division periodically appeals to implement this program.

Indonesia Eximbank runs a green office program in every operational activity in the work environment. The effectiveness and efficiency of energy and material consumption is the focus of the green office program.

SUSTAINABLE FINANCING AND SUSTAINABLE FUNDING

Indonesia Eximbank is resolved to apply the concept of Sustainable Finance comprehensively, demonstrating its commitment to support the achievement of SDGs, encompassing both environmental and social aspects. The Institution strengthens the integration of environmental, social, and governance considerations, which have already been pioneered, in assessing applications for financing, guaranteeing, and closing risk insurance for its customers' import-export activities.

Consequently, in the RAKB document submitted to OJK, Indonesia Eximbank highlights the importance of prioritizing the development, dissemination, and implementation of ESG systems and policies, including the drafting of an ESG Operational Manual. By integrating ESG commitments into the process of providing financial products and services, along with internal regulations, Indonesia Eximbank will be able to:

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

1. Memiliki Kebijakan Khusus Penerapan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Kelembagaan maupun Kegiatan Usaha.
2. Menetapkan klausul dan *covenant* aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam proses asesmen atau *due dilligent* maupun dalam perjanjian pembiayaan, penjaminan dan penutupan asuransi ekspor – impor para nasabah.
3. Menerapkan proses *monitoring* ketaatan dan kepatuhan nasabah korporasi terhadap ketentuan dan *covenant* aspek lingkungan dan sosial.
4. Memiliki dan mengelola portofolio “Hijau dan Sustainable” yang selaras dengan tujuan keberlanjutan SDGs pada aspek lingkungan maupun sosial.

Dengan merintis dan memiliki portofolio “Hijau dan Sustainable” LPEI bercita-cita untuk menerbitkan “Obligasi Hijau atau *Green Bond*” guna mendukung tekad Lembaga untuk menjadi lembaga keuangan pendukung kegiatan ekspor dan impor yang beroperasi dengan menjunjung tinggi pencapaian tujuan keberlanjutan, yang juga berarti mendukung komitmen Pemerintah RI memenuhi target-targetnya sebagaimana disampaikan dalam *Paris Agreement*.

Saat ini, LPEI telah memiliki portofolio syariah yang juga didukung dengan penerbitan Obligasi Syariah, dengan sasaran nasabah korporasi maupun nasabah UKM yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kepemilikan dan pengelolaan portofolio “Hijau dan Sustainable” yang diproses melalui penerapan ketentuan pemenuhan aspek LST, didukung dengan ketersediaan sumber dana “Hijau atau *Green Bond*” dan dikelola dengan menerapkan kebijakan *Green Office*, wujud dari Sustainable Financing dan Sustainable Funding yang dituju LPEI. Kondisi tersebut juga merupakan wujud dari penerapan konsep LST. LPEI senantiasa berpedoman pada 8 prinsip keuangan berkelanjutan dari OJK, yakni: prinsip investasi yang bertanggung jawab, prinsip strategi

1. Have a Special Policy for the Application of Environmental, Social and Institutional Governance Aspects and Business Activities.
2. Establish clauses and covenants on environmental, social and governance aspects in the assessment process or due diligence, as well as in financing agreements, guarantees and closing of export-import insurance for customers.
3. Implement a process of monitoring the adherence and compliance of corporate customers with environmental and social aspects provisions and covenants.
4. Own and manage a “Green and Sustainable” portfolio that is aligned with SDGs sustainability goals on environmental and social aspects.

By pioneering and having a “Green and Sustainable” portfolio, Indonesia Eximbank aspires to issue “Green Bond” to support the Institution’s determination to become a financial institution supporting export and import activities that operates by upholding the achievement of sustainability goals, which also means supporting the commitment of the Government of Indonesia to meet its targets as stated in the *Paris Agreement*.

Currently, Indonesia Eximbank has a sharia portfolio which is also supported by the issuance of Sharia Bonds, targeting corporate and SME customers who apply sharia principles in carrying out their business activities.

The ownership and management of the “Green and Sustainable” portfolio, which is processed through the implementation of provisions to fulfill ESG aspects, is supported by the availability of “Green Bond” funding sources and is managed by implementing *Green Office* policies, a form of Sustainable Financing and Sustainable Funding aimed at Indonesia Eximbank. This condition is also a manifestation of the application of the ESG concept. Indonesia Eximbank is always guided by 8 principles of sustainable finance from OJK, namely:

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata Kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas serta prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Pengelolaan Risiko LST Pada Produk Pembiayaan [FS3]

LPEI memastikan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usaha oleh debitur yang memanfaatkan pembiayaan dari LPEI, sebagai bagian dari risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola, dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar, dan pelaksanaan prosedur pembiayaan.

LPEI berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, termasuk dalam bidang pembiayaan. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2009, LPEI tidak menyediakan pembiayaan bagi usaha atau kegiatan yang masuk dalam kategori dilarang atas dasar terbukti melanggar hukum lingkungan.

Perlakuan yang sama juga diterapkan bagi perusahaan yang mendapatkan peringkat merah atau hitam dalam daftar Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

PENGEMBANGAN BUDAYA KEBERLANJUTAN [FS4]

LPEI berupaya membangun budaya keberlanjutan, yakni budaya untuk senantiasa peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar bagi seluruh jajaran karyawan. Dalam rangka mengembangkan budaya keberlanjutan tersebut, LPEI telah mengidentifikasi dan menetapkan langkah-langkah implementasi, sebagai berikut:

1. Fokus Upaya Pengembangan Budaya Keberlanjutan Merubah perilaku pegawai untuk mengambil peran sederhana namun efektif guna menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan yang akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan.

principles of responsible investment, principles of sustainable business strategies and practices, principles of social and environmental risk management, principles of governance, principles of informative communication, principles of inclusiveness, principles of priority leading sector development and principles of coordination and collaboration.

ESG Risk Management in Financing Products [FS3]

Indonesia Eximbank ensures that the management of social and environmental risks that can arise from business activities by debtors who utilize financing from the Institution, as part of ESG risks, is carried out in accordance with policies, standards, and implementation of financing procedures.

Indonesia Eximbank adheres to applicable regulations, including in the financing aspect. Based on Law No. 2 of 2009, Indonesia Eximbank does not provide financing for businesses or activities that fall into the prohibited category on the basis of proven violations of environmental laws.

The same treatment is also applied to companies that get a red or black rating in the list of the Company Performance Rating Assessment Program (PROPER) released by the Ministry of Environment.

SUSTAINABILITY CULTURE DEVELOPMENT [FS4]

Indonesia Eximbank strives to build a culture of sustainability, which is a culture to always care about the conditions of the surrounding environment for all levels of employees. In order to develop the sustainability culture, Indonesia Eximbank has identified and established implementation steps, as follows:

1. Focus on Sustainability Culture Development Efforts Change employee behavior to take a simple but effective role to foster concern for the environment that will have a positive impact on the company.

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

2. Wujud Komitmen

Memberlakukan penerapan *Green Office Lifestyle Culture* melalui surat edaran SE.0008/CEO/05/2021, di lingkungan area perkantoran, melingkupi seluruh jajaran manajemen dan pegawai dan lingkungan LPEI, untuk bersama-sama melaksanakan *save energy, save paper, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint*, dan *green the event*.

3. Dasar Pedoman

Pelaksanaan *Green Office Lifestyle Culture*. Program ini, sejak akhir tahun 2022 menjadi ESG Kelembagaan yang dipertegas dengan terbitnya PDE terkait hal tersebut.

4. Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi

- Beberapa pegawai masih belum menyadari pentingnya *green office*.
- Perlunya sosialisasi dan dorongan untuk menyukkseskan kegiatan *green office*.
- Kondisi pandemi yang membuat *green office* terutama terkait dengan aspek *reduce carbon* belum bisa maksimal karena organisasi cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi saat *commute*.
- Perlunya ditingkatkan komitmen baik dari pimpinan maupun seluruh insan LPEI dalam menjalankan *green office lifestyle* sebagai budaya dan nilai dari organisasi.
- LPEI belum mengalokasikan biaya investasi awal untuk *green office* seperti lampu hemat energi, investasi pelatihan, dll.

5. Progres Pelaksanaan

- LPEI telah melaksanakan seluruh program yang dicanangkan selama tahun 2021, dan akan terus dilanjutkan kembali pada tahun 2022.
- LPEI juga berkomitmen untuk menambah program baru yang belum dilaksanakan pada tahun 2022.

2. Commitment

Enforcing the implementation of *Green Office Lifestyle Culture* through circular SE.0008/CEO/05/2021, in the office area, covering all levels of management and employees and the environment of the Institution, to jointly implement *save energy, save paper, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint*, and *green the event*.

3. Basic Guidelines

Implementation of *Green Office Lifestyle Culture*. This program, since the end of 2022, has become an Institutional ESG which is reinforced by the issuance of PDE related to this matter.

4. Identify the challenges

- Some employees still do not realize the importance of green offices.
- The need for socialization and enforcement to succeed green office activities.
- Pandemic conditions that make green offices, particularly related to aspects of reducing carbon, cannot be maximized because organizations tend to use private vehicles when commuting.
- The need to increase commitment from both the leadership and all personnel in running a green office lifestyle as a culture and value of the organization.
- Indonesia Eximbank has not budgeted initial investment costs for green offices such as energy-saving lights, training investment, etc.

5. Implementation Progress

- Indonesia Eximbank has implemented all programs launched during 2021, and will continue again in 2022.
- Indonesia Eximbank is also committed to adding new programs that have not been implemented in 2022.

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

6. Kaitan dengan SDGs

- *Good health and well-being*
- *Climate Action*

Realisasi Program Green Office Lifestyle Culture

Inisiatif *Green Office lifestyle culture* berfokus pada upaya merubah perilaku pegawai agar mereka mengambil peran sederhana namun efektif guna menumbuhkan tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Inisiatif ini dijalankan LPEI pada lingkup internal maupun eksternal.

Pada lingkup internal, untuk tahun 2022, LPEI berfokus pada empat program, yakni: *save paper, save energy, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint*, dan *green the event*.

Sementara inisiatif eksternal yang dijalankan di tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan meliputi berbagai kegiatan berikut:

6. Link to SDGs

- *Good health and well-being*
- *Climate Action*

Green Office Lifestyle Culture Program Realization

The Green Office lifestyle culture initiative aims to instill a sense of environmental responsibility in employees, encouraging them to adopt simple yet effective habits that can positively impact the company. This initiative is carried out by Indonesia Eximbank internally and externally.

Internally, for 2022, Indonesia Eximbank focuses on four programs, namely: *save paper, save energy, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint*, and *green the event*.

Meanwhile, external initiatives carried out in 2022 to support the achievement of sustainability goals include the following activities:

Kegiatan Activities	Keterangan Information	Tanggal Date
Partisipasi G20 Jakarta G20 Jakarta Participation	LPEI Berpartisipasi dalam kegiatan G20 di Jakarta Indonesia Eximbank Participates in G20 activities in Jakarta	15-18 Februari February 15-18
Kolaborasi dengan Kemendes PDTT Collaboration with Kemendes PDTT	Kolaborasi tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama tentang program pemberdayaan dan pengembangan desa berorientasi ekspor di seluruh Indonesia. The collaboration is outlined in a joint agreement on export-oriented village empowerment and development programs throughout Indonesia.	9 Maret March 9
Bersinergi dengan Bank BSI Synergize with Bank BSI	Kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dituangkan dalam nota kesepahaman mengenai penyediaan dan pemanfaatan layanan & produk perbankan syariah dan perjanjian kerja sama akad pembiayaan wholesale yang akan digunakan untuk mendukung pembiayaan ekspor dengan skema syariah yang dilakukan LPEI. Cooperation with Bank Syariah Indonesia (BSI) as outlined in a memorandum of understanding regarding the provision and utilization of sharia banking services & products and a wholesale financing agreement that will be used to support export financing with sharia schemes carried out by Indonesia Eximbank.	31 Maret March 31

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Kegiatan Activities	Keterangan Information	Tanggal Date
Webinar Perempuan Tangguh Dalam Ekspor Berkelanjutan. Road to W20: Setara Bangkit Bersama Webinar on Resilient Women in Sustainable Exports. Road to W20: Together Rising Equally	LPEI bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan lembaga pemerintah terkait serta komunitas UMKM Berorientasi Ekspor untuk mengembangkan potensi perempuan Indonesia dalam kegiatan ekspor yang berkelanjutan dengan tujuan #SetaraBangkitBersama. Indonesia Eximbank synergizes with the Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs and related government agencies as well as the Export-Oriented MSME community to develop the potential of Indonesian women in sustainable export activities with the aim of #SetaraBangkitBersama.	20 Mei May 20
Partisipasi dalam acara W20 Summit, Sumatera Utara Participation in W20 Summit, North Sumatra	Berkolaborasi dengan LPEI, XL Axiata, UN Women, Program Together Digital, Gobi Partners dan Ozora Yaktrapaktaja serta Wanwir Femina, W20 Summit Indonesia menyelenggarakan Business Mentorship for Women-owned Micro, Small, and Medium Enterprises. In collaboration with Indonesia Eximbank, XL Axiata, UN Women, Together Digital Program, Gobi Partners and Ozora Yaktrapaktaja and Wanwir Femina, W20 Summit Indonesia held a Business Mentorship for Women-owned Micro, Small, and Medium Enterprises.	19 Juli July 19
Trade Expo Indonesia	LPEI berpartisipasi dalam Pameran Internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2022. Indonesia Eximbank participates in the International Trade Expo Indonesia (TEI) 2022.	19-23 Okt Oct 19-23
Partisipasi G20 Bali G20 Bali Participation	LPEI bersama 10 mitra binaan terpilih turut serta dalam kegiatan G20 Bali. Indonesia Eximbank together with 10 selected fostered partners participated in G20 Bali activities.	10 Nov Nov 10
Joint Event TJSL SMV Kemenkeu	Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu berkolaborasi, berupaya menciptakan manfaat dan dampak yang lebih luas di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. The Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV) collaborates, striving to create wider benefits and impacts in the social, economic, and environmental fields.	16 Des Dec 16

PROGRAM GREEN OFFICE LPEI

Komitmen Lembaga untuk senantiasa menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan Program *Green Office* LPEI, mencakup:

1. Penerapan *Smart Spending* di Lingkungan LPEI yang disosialisasikan secara *online* melalui email, *screen saver* maupun media digital lainnya.
2. Memaksimalkan penggunaan *online training*.

GREEN OFFICE PROGRAM

The Institution's commitment to always implement environmentally friendly operational activities is realized through the preparation and implementation of the Green Office Program, as follows:

1. Smart Spending practices in the Indonesia Eximbank Environment, socialized online via email, screen saver and other digital media.
2. Maximize the use of online training.

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

3. Efisiensi penggunaan kertas dilakukan dengan penerapan *double side print*, tidak mencetak dokumen *draft* dan penggunaan *digital signature*, namun tetap memperhatikan aspek fungsi, peruntukan dan kerahasiaan dokumen.
4. Mengoptimalkan utilisasi ruang kantor dengan peluncuran program XWoW atau *Eximbank New Way of Working*, termasuk memberikan pilihan untuk bekerja secara *hybrid* bagi pegawai LPEI.
5. Efisiensi penggunaan listrik dilakukan dengan mematikan perangkat dan peralatan listrik seperti membatasi penggunaan peralatan listrik, komputer, printer dan alat elektronik lainnya apabila telah selesai bekerja/meninggalkan kantor, mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
6. Efisiensi penggunaan air dilakukan dengan memastikan keran air dalam kondisi mati apabila telah selesai digunakan.

Konsistensi dalam menjalankan kegiatan operasional ramah lingkungan tersebut membuahkan hasil, dimana sepanjang tahun 2022, LPEI tidak menerima satupun pengaduan terkait isu lingkungan dan tidak menerima denda dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan terkait lingkungan. [GRI 307-1]

Digitalisasi Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan

Sebagai bagian dari penerapan Program *Green Office*, LPEI menjalankan inisiatif digitalisasi untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas operasional lembaga, baik dalam rangka menyediakan produk dan layanan keuangan maupun pada proses bisnis internal. LPEI menerapkan pemanfaatan platform digital untuk layanan sumber daya manusia dengan HRIS (*Human Resource Information System*), aplikasi *GreatDay*, CBT (*Computer Based Training*) Kode Etik untuk *e-learning* dan lain-lain, guna mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan energi, air, dan kertas karena pegawai tidak perlu lagi menggunakan kertas untuk aplikasi kepersonaliaan. LPEI secara berkala juga akan meningkatkan kapabilitas

3. The efficiency of paper consumption is carried out by applying double side print, not printing draft documents and the use of digital signatures, but still paying attention to aspects of function, designation and confidentiality of documents.
4. Optimizing office space utilization with the launch of the XWoW or Eximbank New Way of Working program, including providing the option to hybrid work for employees.
5. Efficient consumption of electricity is done by turning off electrical devices and equipment, such as limiting the use of electrical equipment, computers, printers and other electronic devices when finished working/ leaving the office, including turning off lights in rooms that are not used.
6. Efficient consumption of water is done by ensuring that the faucet is turned off when it is no longer needed.

Consistency in carrying out environmentally friendly operational activities has resulted in the outcomes, where throughout 2022, Indonesia Eximbank has not received any complaint related to environmental issues and has not received fines or non-monetary sanctions for non-compliance with laws and regulations related to the environment. [GRI 307-1]

Digitalization to Reduce Environmental Impact

As part of the implementation of the Green Office Program, Indonesia Eximbank carries out digitalization initiatives to reduce the environmental impact of its operational activities, both in providing financial products and services, as well as on internal business processes. Indonesia Eximbank implements the use of digital platforms for human resource services with HRIS (Human Resource Information System), *GreatDay* application, CBT (Computer Based Training) Code of Ethics for *e-learning* and others, to reduce the environmental impact of the consumption of energy, water, and paper as employees no longer need to use paper for personnel applications. Indonesia Eximbank will also periodically improve

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

layanan dengan melaksanakan pemrosesan transaksi *end-to-end* secara *paperless* sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Pada tahun 2022, LPEI telah melakukan pembangunan *new datacenter*, dimana pembangunan *datacenter* tersebut mengacu pada standar *international uptime institute Tier III* dan dibangun dengan konsep *smart* dan *green technology* seperti penggunaan *palm vein scanning* untuk *security access* pada *main room* serta penggunaan *motion sensor* dan pencahayaan *LED* untuk efisiensi penggunaan listrik pada ruangan *datacenter*.

Selain itu, dengan dukungan *new datacenter* tersebut, LPEI merealisasikan berbagai inisiatif sebagai wujud implementasi green office, mencakup:

- a. Pengurangan penggunaan kertas (*paperless policy*) untuk mendukung environment kerja yang ramah lingkungan melalui pengembangan sistem yang menggunakan konsep digital seperti *New Expense System*, *E-Learning*, *E-Sign* dan lainnya.
- b. Penyediaan *infrastructure* dan tools pendukung konsep kerja *hybrid (WFA)*, sehingga dapat secara signifikan mengurangi kebutuhan jumlah ruang kerja dan kebutuhan energi.
- c. *Inisiatif* untuk penggunaan *technology cloud* yaitu *Infrastructure as a Service (IaaS)* dan *Software as a Service (SaaS)* untuk beberapa aplikasi seperti *e-Learning (X-Learn)* dan *HRIS* sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan penggunaan energi untuk operasional *datacenter*.

Penghematan Energi [OJK F.5, F.11, F.12], [GRI 302-1, 302-2, 302-4]

LPEI hanya menggunakan dua jenis sumber energi untuk mendukung kegiatan operasional, yakni tenaga listrik yang seluruhnya dipasok oleh PLN, dan BBM untuk kendaraan operasional dalam rangka mendukung mobilitas pegawai dalam menjalin interaksi tatap muka dengan para nasabah, maupun calon nasabah.

service capabilities by carrying out paperless end-to-end transaction processing in accordance with customer needs.

In 2022, Indonesia Eximbank has carried out the construction of a new datacenter, which refers to international uptime institute Tier III standards and is built with smart and green technology concepts, such as the use of palm vein scanning for security access in the main room and the use of motion sensors and LED lighting for efficient use of electricity in datacenter rooms.

In addition, with the support of the new datacenter, Indonesia Eximbank realizes various initiatives as a form of green office implementation, as follows:

- a. Reducing paper consumption (*paperless policy*) to support an environmentally friendly work environment through the development of systems that use digital concepts, such as New Expense System, E-Learning, E-Sign and others.
- b. Provision of infrastructure and tools supporting the hybrid work concept (WFA), to significantly reduce the need for the number of workspaces and energy needs.
- c. Initiatives for the use of cloud technology are Infrastructure as a Service (IaaS) and Software as a Service (SaaS) for several applications, such as e-Learning (X-Learn) and HRIS, to reduce the need for energy use for datacenter operations.

Energy Saving [OJK F.5, F.11, F.12], [GRI 302-1, 302-2, 302-4]

Indonesia Eximbank only uses two types of energy sources to support operational activities, namely electricity which is entirely supplied by PLN, and fuel for operational vehicles to support employee mobility in establishing face-to-face interactions with customers, as well as prospective customers.

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Sebagai bagian dari penerapan inisiatif Green Office, LPEI berupaya mengelola konsumsi listrik dari PLN dengan menerapkan berbagai upaya, mencakup:

- Memberikan himbauan agar seluruh karyawan mematikan dan melepas peralatan elektronik pribadi saat pulang kantor.
- Menghimbau kepada karyawan yang terakhir pulang untuk mematikan lampu dan AC saat mereka telah selesai bertugas di Kantor.
- Menginstruksikan karyawan *outsourcing* (*Office Boy/Office Girl* dan *Security*) untuk mematikan Lampu dan AC untuk area kerja yang sudah kosong.
- Penggunaan fasilitas rapat dengan *video conference* yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- Penggunaan fasilitas *webinar* untuk pelatihan/ sosialisasi, dan lain sebagainya.

As part of the implementation of the Green Office initiative, Indonesia Eximbank seeks to manage electricity consumption from PLN by implementing various efforts, as follows:

- Mandate all employees to turn off and remove personal electronic equipment when returning home from work.
- Appeal to the last employees to go home to turn off the lights and air conditioners when they have finished their duties in the Office.
- Instruct outsourced employees (*Office Boy/Office Girl* and *Security*) to turn off lights and air conditioners for work areas that are already vacant.
- Use of meeting facilities with video conferencing that is carried out effectively and efficiently.
- Use of webinar facilities for training/socialization, and

Tabel Konsumsi Energi | Energy Consumption [GRI 302-1, 302-3, 302-4]

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2022	Selisih Change
Konsumsi Listrik Electricity Consumption	KWh	1.074.823	1.100.879	26.056
Konsumsi Listrik Electricity Consumption	G Joule	3.869	3.963	94
Total Konsumsi Energi Total Energy Consumption	G Joule	3.869	3.963	94
Luas Ruangan Room Size	M2	19.484	19.484	-
Intensitas Konsumsi Energi Listrik Electrical Energy Consumption Intensity	GJoule/M2	0,20	0,20	0,00

Catatan: | Note:

Luas Ruangan hanya mencantumkan luas ruangan di Kantor Pusat, lengkap dengan data konsumsi listrik PLN di Kantor Pusat | Room Size only lists the area of the room at the Head Office, complete with data on PLN electricity consumption at the Head Office

Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca

LPEI berupaya berpartisipasi untuk mengurangi emisi CO₂ atau Karbon dioksida atau Gas Rumah Kaca (GRK), yang berasal dari pembakaran langsung bahan bakar fosil untuk BBM transportasi dan dari penggunaan listrik. Caranya adalah dengan melakukan upaya penghematan atau efisiensi penggunaan energi seperti disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan data pengelolaan atau konsumsi energi tersebut diatas, LPEI mencatatkan besaran emisi CO₂ yang dihasilkan, sebagaimana ditampilkan dalam tabel-tabel berikut.

Greenhouse Gas Emission Management

Indonesia Eximbank seeks to participate in reducing CO₂ emissions of Carbon dioxide or Greenhouse Gas (GHG), which comes from direct combustion of fossil fuels for transportation fuel and from electricity consumption. The method is to make efforts to save or efficient consumption of energy as mentioned earlier.

Based on the data on energy management or consumption mentioned above, Indonesia Eximbank records the amount of CO₂ emissions produced, as shown in the following tables.

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCETabel Emisi CO₂ | Emission CO₂ [GRI 305-1, 305-2, 305-4, 305-5]

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2022	Selisih Change
Emisi Tak Langsung dari Listrik Indirect Emissions from Electricity	Ton CO ₂ eq	931,48	954,07	23
Luas Ruang Room Size	M ²	19.484	19.484	-
Intensitas Emisi Konsumsi Listrik Electricity Consumption Emission Intensity	Ton CO₂eq/M²	0,05	0,05	0,00

Pengelolaan Konsumsi Air [OJK F.8]

LPEI berupaya menjalankan gerakan “gunakan air secukupnya” untuk pemakaian air di toilet, mushalla, untuk mesin pendingin udara dan beberapa aktivitas lainnya. LPEI bahkan berupaya menghemat konsumsi air minum, sekaligus mengurangi sampah plastik dengan menerapkan inisiatif:

- Menggunakan alat makan dan/atau minum pribadi dan menghindari penggunaan alat makan dan/ atau minum sekali pakai, khususnya untuk yang berbahan tidak ramah lingkungan.
- Menyediakan *Pitcher* dan gelas minum untuk kegiatan *meeting*, atau karyawan diminta membawa botol minum (*tumbler*) sendiri dalam setiap rapat dan kegiatan kantor.

LPEI tidak menampilkan data jumlah galon AMDK yang dikonsumsi, namun menampilkan total biaya pengadaan air minum dimaksud. Untuk tahun 2022 total biaya pengadaan air minum galon adalah sebesar Rp94,99 juta, meningkat dari sebesar Rp57,2 juta ditahun sebelumnya. Peningkatan lebih disebabkan oleh naiknya intensitas kegiatan di Kantor Pusat LPEI, mengiringi pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan semakin longgarnya penerapan kebijakan PPKM.

Pengurangan Konsumsi Kertas

Guna mengurangi penggunaan kertas, LPEI mendorong pemanfaatan perangkat elektronik untuk menggantikan penggunaan kertas. LPEI juga mendorong dilakukannya kegiatan tanpa kertas (*paperless*) dalam mempersiapkan proposal-proposal pembiayaan, penjaminan maupun penutupan asuransi.

Water Consumption Management [OJK F.8]

Indonesia Eximbank strives to carry out the movement of “use enough water” for water use in toilets, prayer rooms, for air conditioning machines and several other activities. Indonesia Eximbank even seeks to save drinking water consumption, while reducing plastic waste by implementing initiatives:

- Use personal cutlery and/or drinking utensils and avoid using disposable cutlery and/or drink, especially for those made from environmentally unfriendly materials.
- Provide pitchers and drinking glasses for meeting activities, or employees are asked to bring their own tumblers in every meeting and office activity.

Indonesia Eximbank does not display data on the number of gallons of AMDK consumed, but displays the total cost of the drinking water procurement. For 2022, the total cost of procuring gallon drinking water was Rp94.99 million, an increase from Rp57.2 million in the previous year. The increase was due to the increasing intensity of activities at Indonesia Eximbank Head Office, accompanied by increasing national economic growth and lessening implementation of PPKM policy.

Reducing Paper Consumption

To reduce paper consumption, Indonesia Eximbank enforces the use of electronic devices to replace paper consumption. Indonesia Eximbank also mandates paperless activities in preparing proposals for financing, guaranteeing and closing insurance.

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

LPEI mendukung gerakan melindungi hutan dengan meningkatkan kesadaran para karyawan untuk tidak menggunakan kertas secara berlebihan melalui intensifikasi program digitalisasi dan perluasan inisiatif *paperless*. Selain itu, inisiatif operasional sederhana juga tetap diterapkan, seperti:

- Memilah kertas yang masih layak pakai dan menyiapkan box penyimpanan di area mesin printer.
- Memberikan himbauan di area mesin printer untuk sebisa mungkin menggunakan kertas bekas layak pakai untuk mencetak dokumen *draft*.
- Memberikan himbauan untuk menggunakan dokumen digital, seperti pengiriman surat/ undangan melalui surel/media daring.

Penggunaan kertas untuk Kantor Pusat selama tahun 2022 dan perbandingannya dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Volume Penggunaan Kertas | Paper Consumption Volume

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2022
Volume Penggunaan Kertas Paper Consumption Volume	Lembar Sheets	1.541.183	2.316.258

Sementara itu, untuk mengurangi limbah *toner* dari penggunaan printer, LPEI menerapkan kebijakan pembaharuan terhadap sistem printer yang digunakan dengan teknologi yang terupdate, yang memungkinkan sistim isi ulang tinta *toner*.

Biaya Pemeliharaan Lingkungan [OJK F.4]

Sampai akhir tahun 2022, LPEI belum melakukan perhitungan dan dokumentasi penggunaan dana operasional untuk program-program partisipasi pelestarian lingkungan yang dijalankan.

Indonesia Eximbank supports the movement to protect forests by raising awareness among employees not to use paper excessively through intensification of digitalization programs and expansion of paperless initiatives. In addition, simple operational initiatives are also still implemented, such as:

- Sorting out paper that is still suitable for use and preparing storage boxes in the printer machine area.
- Provide an appeal in the printer area to use waste paper as much as possible to print draft documents.
- Provide an appeal to use digital documents, such as sending letters/invitations via email/ online media.

Paper consumption for the Head Office during 2022 and its comparison with 2021 is presented in the following table:

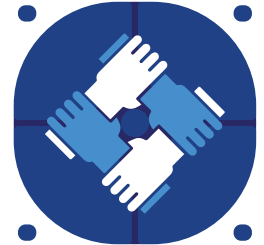
Meanwhile, to reduce toner waste from the use of printers, Indonesia Eximbank implements an update policy on printer systems used with updated technology, which allows toner ink refill systems.

Environmental Conservation Costs [OJK F.4]

Until the end of 2022, Indonesia Eximbank has not calculated and documented the use of operational funds for environmental conservation participation programs.

KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PERFORMANCE



KOMITMEN, DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN [GRI 2-23, 3-3]

LPEI konsisten menunjukkan komitmen penuh untuk melaksanakan CSR guna menyeimbangkan kinerja hasil kegiatan usaha dan kinerja pengembangan masyarakat. Komitmen tersebut merupakan wujud bentuk tekad LPEI untuk menyeimbangkan kinerja keberlanjutan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, serta sebagai bentuk pelaksanaan mandat yang diemban oleh LPEI.

Sebagai Lembaga yang terus bertumbuh dan beroperasi di Indonesia, LPEI berkomitmen penuh dan terus berupaya agar keberadaannya memberikan pengaruh positif dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh LPEI melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR).

Dasar Hukum

LPEI menjalankan kegiatan CSR – Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.06/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lampiran Poin G. II. No. 72 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk mendukung keberlanjutan operasional LPEI.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.04/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6 poin d dan Pasal 5 mengenai informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

COMMITMENT, LEGAL BASIS AND POLICY [GRI 2-23, 3-3]

Indonesia Eximbank is steadfast in its commitment to implementing CSR, aiming to balance the performance of its business activities with community development. This commitment reflects the Institution's determination to achieve sustainable performance in economic, social, and environmental aspects, while fulfilling its mandate.

As an institution that continues to grow and operate in Indonesia, Indonesia Eximbank is fully committed and continues to strive to ensure its existence has a positive influence and benefits for stakeholders, particularly the people of Indonesia. This is done through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).

Legal Basis

Indonesia Eximbank carries out CSR activities – Community Development and Empowerment by referring to several applicable laws and regulations, as follows:

1. Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021 dated December 30, 2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. Appendix Points G. II. No. 72 on the implementation of social responsibility to support the sustainability of Indonesia Eximbank's operations.
2. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.04/2015 dated June 26, 2015 on Issuers or Public Company Website, Article 6-point d and Article 5 on Corporate Social Responsibility information.
3. Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies.

KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PERFORMANCE

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI.

Kebijakan [GRI 2-24]

Selain diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif mengenai ESG Kelembagaan, perhatian LPEI terhadap aspek sosial dalam hal ini Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui program kemitraan, yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur (PDD) Nomor 0004/PDD/06/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Program Kemitraan ini disalurkan dalam rangka pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap oleh Mitra Binaan untuk meningkatkan produksi dan penjualan, serta membiayai pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan hal – hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan dalam rangka menunjang ekspor dan juga untuk melakukan kajian/ penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan.

VISI DAN MISI CSR LPEI
Visi CSR LPEI

Turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fundamental ekonomi berbasis ekspor sesuai dengan visi dan misi Lembaga.

Misi CSR LPEI

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui capacity building guna menyejahterakan masyarakat Indonesia.
2. Meningkatkan sinergi antar Lembaga dalam memajukan ekonomi berbasis UKM berorientasi ekspor.
3. Menghantar pelaku UKM untuk melakukan ekspor.

4. Financial Services Authority Circular (SEOJK) 16/SEOJK.04/2021 on the Format and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.
5. Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.05/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank.

Policy [GRI 2-24]

In addition to being regulated in the Executive Director's Regulation on Institutional ESG, Indonesia Eximbank's attention to social aspects, in this case, community development and empowerment is realized through partnership programs, which are regulated in the Board of Directors Regulation (PDD) No. 0004/PDD/06/2020 concerning Fund Management Policy for the Ex-PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Partnership Program.

This Partnership Program is channeled in the context of providing loans to finance working capital and/or purchase of fixed assets by Fostered Partners to increase production and sales, as well as finance education, training, marketing, promotion and other matters related to increasing the productivity of Fostered Partners in order to support exports, as well as to conduct studies/research related to the partnership program.

INDONESIA EXIMBANK CSR VISION AND MISSION
CSR Vision

To take an active role in advancing Indonesia through community empowerment and export-based economic fundamentals development in accordance with the vision and mission of the Institution.

CSR Mission

1. To enhance skills and knowledge through capacity building in order to improve the welfare of Indonesians.
2. To increase inter-institution synergy in advancing an export-oriented SME economy.
3. To mentor SMEs in exporting activities.

KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PERFORMANCE**PENYUSUNAN PROGRAM** [OJK F.23], [GRI-413-1]

LPEI merancang program CSR dengan terlebih dahulu menjalin komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan, agar mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan, sekaligus untuk menggali potensi yang dapat dioptimalkan. [GRI 413-1]

Sesuai dengan moto (*tagline*) program CSR LPEI yaitu “Sahabat Ekspor”, program CSR ini diharapkan dapat mendukung strategi bisnis LPEI yaitu mampu menyiapkan pelaku usaha UKM menjadi eksportir yang tangguh dan beretika, serta senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan melalui kepedulian terhadap pelestarian alam.

LPEI juga memperhatikan situasi dan kondisi terkini yang dihadapi seluruh komponen masyarakat, dan pemerintah, yakni semakin melandainya tingkat penyebaran COVID-19, dan bersama seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk menjadikan momentum meningkatnya kembali mobilitas warga, menguatnya kembali konsumsi masyarakat serta bangkitnya kembali industri pariwisata, dengan menggalakkan program-program pemberdayaan sebagai salah satu kegiatan utama dari program CSR Lembaga di tahun 2022.

Tujuan Pelaksanaan Program CSR LPEI

Penyelenggaraan Program CSR - LPEI bertujuan untuk memberikan dampak positif guna memajukan kondisi sosial serta tingkat kesejahteraan komunitas dan masyarakat sekitar dengan pelaksanaan program tepat guna, dan berdampak jangka panjang dengan mengembangkan program yang berkesinambungan. Sejalan dengan komitmen Lembaga untuk senantiasa berada di tengah komunitas serta tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Realisasi Program CSR – LPEI adalah wujud komitmen Lembaga untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan komunitas, lingkungan, dan pemangku kepentingan yang terhubung baik secara lokal, nasional maupun global, selain sebagai perwujudan misi korporasi LPEI.

PROGRAM PREPARATION [OJK F.23], [GRI-413-1]

Indonesia Eximbank designs CSR programs by initiating extensive communication with stakeholders to gain a comprehensive understanding of their needs and identify potential areas for optimization. [GRI 413-1]

Aligned with the tagline “Friends of Export,” the Indonesia Eximbank CSR program is designed to reinforce its business strategy of empowering SMEs to become robust and ethical exporters while promoting environmental balance through nature conservation.

Indonesia Eximbank takes into account the prevailing situation and challenges faced by all sectors of society, including the government, such as the escalating spread of COVID-19. In collaboration with stakeholders, the institution has agreed to seize the opportunity to boost citizen mobility, promote public consumption, and revive the tourism industry. To this end, the Institution’s CSR program in 2022 will focus on promoting empowerment programs as a primary activity.

Objectives of CSR Program Implementation

Indonesia Eximbank CSR Programs implementation aims to provide a positive contribution to enhancing social conditions and improving the well-being of communities by implementing suitable programs that have lasting impacts through the development of sustainable initiatives. This aligns with the Institution’s commitment to be in the community and grow and develop together.

Indonesia Eximbank CSR Program realization is a manifestation of the Institution’s commitment to build harmonious and sustainable relationships with the community, environment, and stakeholders who are locally, nationally and globally connected, in addition to being a manifestation of its corporate mission.

KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PERFORMANCE

REALISASI PROGRAM [OJK F.25]

Dalam merancang dan menjalankan CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, LPEI selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Sebagaimana dijalankan di tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2022, LPEI terus melanjutkan program pengembangan Desa Devisa yang merupakan rangkaian kegiatan berbasis *community development*. Tujuan strategis dari program tersebut adalah untuk memperbesar akses masyarakat mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik, dibandingkan sebelum adanya kegiatan serta dapat menghasilkan devisa.

Secara keseluruhan terdapat tiga kelompok kegiatan CSR yang dijalankan oleh LPEI, sebagai berikut:

1. Kegiatan berbasis *community development* yang berkaitan erat dengan dukungan pencapaian SDGs selama tahun 2022, sebagai berikut:

PROGRAM REALIZATION [OJK F.25]

In designing and implementing CSR initiatives related to social and community development, Indonesia Eximbank prioritizes the needs of the community to ensure that the efforts are targeted and provide maximum benefit.

Similar to previous years, Indonesia Eximbank continues the Desa Devisa development program in 2022. This program comprises community-based activities with the strategic goal of improving socio-economic and cultural conditions, compared to prior to activity, as well as generating foreign exchange by enhancing community access to resources.

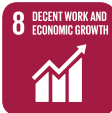
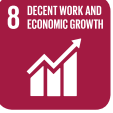
In total, there are three groups of CSR activities carried out by Indonesia Eximbank, as follows:

1. Community development-based activities that are closely related to supporting the achievement of SDGs during 2022, as follows:

Program CSR yang Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs
CSR programs that Support the Achievement of SDGs

Jenis Kegiatan Types of Activities	SDGs	Penjelasan Explanation	Capaian Achievements
Desa Devisa Klaster Kopi Coffee Cluster Desa Devisa		Cakupan 82 Desa dengan melibatkan 7.541 petani kopi, pendampingan dimulai pada Maret-April 2022. Covering 82 villages involving 7,541 coffee farmers, assistance began in March-April 2022.	Terdapat potensi ekspor dengan negara tujuan Belanda dan Amerika sebesar 50 ton pada 2023. There is a potential export with Netherlands and United States destination countries of 50 tons in 2023.
Desa Devisa Klaster Lada Hitam Black Pepper Cluster Desa Devisa		Cakupan 6 Desa dengan melibatkan 505 petani lada, pendampingan dimulai pada Juni 2022. Covering 6 villages involving 505 pepper farmers, assistance began in June 2022.	Telah melakukan <i>indirect</i> ekspor ke India, Kenya, Australia, dan Jerman. Has conducted indirect exports to India, Kenya, Australia, and Germany.

KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PERFORMANCE

Jenis Kegiatan Types of Activities	SDGs	Penjelasan Explanation	Capaian Achievements
Desa Devisa Klaster Gula Semut Sugar Cluster Desa Devisa	 	Cakupan 12 Desa dengan melibatkan 1.888 petani dan penderes, pendampingan dimulai pada Juni 2022. Covering 12 villages involving 1,888 farmers and penderes, assistance began in June 2022.	Telah melakukan <i>indirect</i> ekspor ke Amerika Serikat, Jerman dan Inggris. Has conducted indirect exports to the United States, Germany and the United Kingdom.
Desa Devisa Klaster Udang Shrimp Cluster Desa Devisa	 	Cakupan 6 Desa dengan melibatkan 80 petambak udang, pendampingan dimulai pada Juli 2022. Covering 6 villages involving 80 shrimp farmers, assistance began in July 2022.	Telah melakukan <i>indirect</i> ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. Has conducted indirect exports to the United States and Japan.
Desa Devisa Jawa Timur East Java Desa Devisa	   	Cakupan 36 Desa dengan melibatkan 3.335 petani dan pengrajin, pendampingan dimulai pada November 2022. Covering 36 villages involving 3,335 farmers and craftsmen, mentoring began in November 2022.	Telah melakukan <i>indirect</i> ekspor ke Malaysia, Jepang, Australia, Tiongkok dan Brazil. Has conducted indirect exports to Malaysia, Japan, Australia, China and Brazil.
Desa Devisa Joint SMV Joint Desa Devisa SMV	    	Cakupan 2 Desa dengan melibatkan 76 petambak dan pengelola mangrove, pendampingan dimulai pada Desember 2022. Covering 2 villages involving 76 farmers and mangrove planters, assistance began in December 2022.	Terdapat potensi <i>indirect</i> ekspor ke beberapa negara tujuan di Asia. There is potential for indirect exports to several destination countries in Asia.

2. Program CSR yang Mendukung ESG

2. ESG-enabled CSR programs

Jenis kegiatan Types of Activities	ESG	Pelaksanaan Date	Capaian Peserta Participants
CPNE Semarang	ESG	24 – 25 Feb	188 Peserta/ Participants
		24- 25 Mar	30 Peserta/ Participants
CPNE Jakarta	ESG	13-Jul	102 Peserta/ Participants
		30-Aug	150 Peserta/ Participants
		4 Nov	20 Peserta/ Participants
CPNE Aceh	ESG	28 – 29 Mar	150 Peserta/ Participants
		11 Aug	
		7 - 8 Des	

KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PERFORMANCE

Jenis kegiatan Types of Activities	ESG	Pelaksanaan Date	Capaian Peserta Participants
CPNE Lampung	ESG	23-25 Aug 23-Nov 6 - 8 Des	60 Peserta/ Participants
CPNE Bandung	ESG	8 – 10 Jun 26 - 28 Jul 4 - 6 Okt	93 Peserta/ Participants
CPNE Surabaya	ESG - Reguler	30 Mar - 1 Apr 25 – 27 Mei/May 29 Jun - 1 Ju	82 Peserta/ Participants
	ESG - Tematik	23 -25 Aug 13 - 15 Sep 11 -13 Okt	100 Peserta/ Participants
CPNE Banten	ESG	2-3 Nov 8 Nov	60 Peserta/ Participants
Total Peserta Total Participants			1.035 Peserta/ Participants

Selama pandemi sejak tahun 2020 hingga akhir 2022, LPEI telah berhasil memberikan edukasi melalui program CPNE kepada 1.222 pelaku UMKM berorientasi ekspor yang berasal dari berbagai kota di Indonesia antara lain Makassar, Manado, Denpasar, Demak, Kendal, Bandung hingga Aceh. Melalui program CPNE, LPEI telah berhasil melahirkan 161 eksportir baru yang berasal dari berbagai sektor usaha, yaitu kelapa dan turunannya, makanan dan minuman, *fashion*, *furniture* dan *craft*, *home decor*, kecantikan, pengolahan ikan, rempah- rempah, alas kaki, serta komoditas pinang, ubi, dan sayuran.

- Program CSR dalam bentuk pemberian dukungan dan bantuan sosial, bekerjasama dengan yayasan/ mitra lembaga dan dikoordinasikan oleh Divisi *Communication and Stakeholder Engagement*. Kegiatan CSR bantuan sosial dimaksud terdiri atas 16 kegiatan, sebagai berikut.

During the pandemic from 2020 to the end of 2022, Indonesia Eximbank has succeeded in providing education through the CPNE program to 1,222 export-oriented MSME players from various cities in Indonesia, including Makassar, Manado, Denpasar, Demak, Kendal, Bandung to Aceh. Through the CPNE program, Indonesia Eximbank has succeeded in creating 161 new exporters from various business sectors, namely coconut and its derivatives, food and beverages, fashion, furniture and craft, home décor, beauty, fish processing, spices, footwear, as well as areca nut, sweet potato, and vegetable commodities.

- CSR programs in the form of providing support and social assistance, in collaboration with foundations/institutional partners and coordinated by the Communication and Stakeholder Engagement Division. The CSR activities of social assistance consist of 16 activities, as follows.

KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PERFORMANCE**Tabel Program CSR – Dukungan dan Bantuan Sosial**
CSR Program – Social Support and Assistance

No	Waktu Pelaksanaan Date	Yayasan/Mitra Lembaga Foundation/Partner	Jenis Kegiatan Types of Activities	Nominal (Rp)	Lokasi Location
	April	CV Ternak Barokah	Bantuan Hewan Qurban Sacrificial Animal Grants	41.450.000	Jakarta
	April	Dewan Kemakmuran Masjid Al Amin	Donasi Kegiatan Ramadhan Masjid Al Amin Donation of Ramadan Activities of Masjid Al Amin	15.000.000	Jakarta
	April	Dewan Masjid Al Amanah	Donasi Kegiatan Ramadhan Masjid Al Amanah Donation of Ramadan Activities of Masjid Al Amanah	15.000.000	Jakarta
	Juli	Yayasan Giri Raharja Sukabumi	Pemberian Hewan Qurban berupa satu ekor sapi Giving Sacrificial Animals in the form of one cow	50.000.000	Sukabumi
	Oktober	PT. HMP Konsultan Indonesia	Dukungan kegiatan pelatihan petani rumput laut Support for seaweed farmer training activities	50.000.000	Makassar
	November	Ketua RT 02, RW 07, Kp Tegallega	Bantuan penanggulangan bencana Gempa Cianjur Cianjur Earthquake disaster relief assistance		Kampung Tegallega Cianjur

4. Perbaikan Sarana dan Prasarana Sosial [GRI 203-1]

Salah satu wujud penyaluran program CSR bidang sosial dan kemasyarakatan yang LPEI realisasikan adalah berupa perbaikan sarana dan prasarana sosial dalam bentuk antara lain: Perbaikan sarana dan prasarana maupun pengadaan fasilitas umum lainnya.

Perbaikan sarana dan prasarana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk satu paket dengan pelaksanaan Program Desa Devisa untuk Eco Wisata, bekerja sama dengan SMV/*Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan lainnya. Tujuannya selain meningkatkan produktivitas masyarakat, juga membuat wisatawan yang berkunjung ke kawasan pelaksanaan Program Desa Wisata, mendapatkan akomodasi yang memadai dan mendapatkan kondisi sarana prasarana setempat yang nyaman serta turut melestarikan lingkungan hidup.

4. Improvement of Social Facilities and Infrastructure [GRI 203-1]

One form of CSR program distribution in the social and community sector that the Institution realizes is by improving social facilities and infrastructure through, among others: Improvement of facilities and infrastructure, as well as the procurement of other public facilities.

The improvement of facilities and infrastructure is carried out in the form of a package with the implementation of the Desa Devisa Program for Eco Tourism, in collaboration with other SMV/*Special Mission Vehicles* of Ministry of Finance. The primary objective is to enhance community productivity while also ensuring that tourists who visit the Tourism Village Program implementation area have access to adequate accommodation and comfortable local infrastructure, all while promoting environmental conservation.

KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PERFORMANCE

INVESTASI SOSIAL CSR

Adapun total investasi sosial sepanjang 2022 yang direalisasikan untuk pelaksanaan program-program CSR Pengembangan Sosial Kemasyarakatan adalah sebesar Rp2.612,79 juta (2021: Rp2.756,98 juta). Adapun rincian jumlah investasi Sosial CSR Pengembangan Sosial Kemasyarakatan menurut kelompok program adalah sebagai berikut:

CSR SOCIAL INVESTMENT

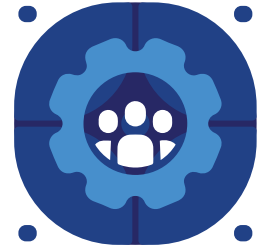
The total social investment throughout 2022 realized for the implementation of CSR programs for Social Community Development was Rp2,612.79 million (2021: Rp2,756.98 million). The details of total Social CSR investment in Social Community Development according to the program group are as follows:

Tabel Realisasi Investasi Sosial | Social Investment Realization

Kelompok Kegiatan Group Activities	Frekuensi Kegiatan	Dana Investasi Sosial (Rp Juta)
Pelatihan Community Development - Yang Mendukung SDGs Community Development Training - Supports for SDGs	6	1.452,79
Pelatihan CSR dalam Rangka Mendukung ESG CSR Training in Support of ESG	24	1.160,00
Program CSR Dukungan dan Bantuan Sosial CSR Support and Social Assistance Programs	5	171,45
Total Dana Investasi Sosial Total Social Investment Fund	35	2.612,79

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN [GRI 2-23, 3-3]

LPEI memandang sumber daya manusia (SDM) atau para pegawai sebagai aset yang paling berharga dengan peran sentralnya dalam mendukung keberhasilan meraih nilai tambah untuk para pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Para pegawai merupakan salah satu pemangku kepentingan dan partner usaha yang strategis dengan kedudukan sentral sebagai ujung tombak dan penentu keberhasilan Lembaga mewujudkan visi dan melaksanakan misinya.

Oleh karenanya, LPEI berkomitmen penuh menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan, remunerasi yang kompetitif, serta kesempatan untuk pengembangan pribadi dan karir bagi para pegawai.

Tujuan utama pengelolaan SDM adalah memberi kesempatan bagi para pegawai untuk berkembang sesuai potensi terbaik yang dimiliki, memberi ruang kepada mereka untuk mencatatkan kinerja terbaik untuk mendukung pengembangan skala usaha yang berkualitas.

KEBIJAKAN UMUM [GRI 3-3]

Kebijakan umum pengelolaan SDM Lembaga adalah persamaan hak dan kesetaraan kesempatan dalam mengembangkan kompetensi, menjalani penilaian kinerja dan peningkatan jenjang karir dan dalam menerima paket remunerasi sesuai kinerjanya.

Kebijakan Khusus [GRI 2-24, 3-3]

LPEI memiliki dan memberlakukan berbagai kebijakan khusus di bidang pengelolaan SDM yang diterapkan dalam rangka mengatur hal-hal yang spesifik berkaitan dengan SDM, sebagai berikut:

- PDE No. 0001/PDE/03/2022 mengatur tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian LPEI
- PDE No. 0028/PDE/05/2019 mengatur tentang Penerimaan Pegawai LPEI

COMMITMENTS AND POLICIES [GRI 2-23, 3-3]

Indonesia Eximbank views human resources (HR) or employees as the most valuable assets with its central role in supporting the success of achieving added value for shareholders, customers and other stakeholders. Employees are one of the stakeholders and strategic business partners with a central position as the spearhead and determinant of the Institution's success in realizing its vision and implementing its mission.

As such, Indonesia Eximbank is fully committed to providing a conducive and pleasant work environment, competitive remuneration, and opportunities for personal and career development for employees.

The main purpose of HR management is to provide opportunities for employees to develop according to their best potential, giving space for them to record the best performance to support the development of quality business scale.

GENERAL POLICY [GRI 3-3]

The general policy of the Institution's HR management is equal rights and equal opportunities in developing competencies, undergoing performance assessments and improving career paths and in receiving remuneration packages according to their performance.

Special Policy [GRI 2-24, 3-3]

Indonesia Eximbank has and enforces various specific policies in HR management that are applied to regulate specific matters related to HR, as follows:

- PDE No. 0001/PDE/03/2022 regulates the Institution Personnel System Policy
- PDE No. 0028/PDE/05/2019 regulates the Recruitment of Institution Employees

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

- c. PDE No. 0024/PDE/10/2022 mengatur tentang Mutasi Pegawai LPEI
- d. PDE No. 0023/PDE/07/2021 mengatur tentang Program Magang/Praktik Kerja, Detasering (*Secondment*) dan Pertukaran Pegawai LPEI
- e. PDE No. 0042/PDE/09/2019 mengatur tentang Manual Operasional Pakta Integritas
- f. PDE No. 0009/PDE/07/2022 mengatur tentang Waktu Kerja Pegawai LPEI
- g. PDE No. 0052/PDE/11/2019 mengatur tentang Golongan Jabatan
- h. PDE No. 0055/PDE/11/2019 mengatur tentang Remunerasi Pegawai LPEI dan KDE No. 0158/KDE/11/2019 mengatur tentang Penetapan Remunerasi Pegawai LPEI
- i. PDE No. 0019/PDE/09/2022 mengatur tentang Perjalanan Dinas Pegawai LPEI
- q. PDE No.0014/PDE/05/2015 mengatur tentang Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI
- k. PDE No.0028/PDE/12/2020 mengatur tentang Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi Atas Pelanggaran
- l. PDE No.0058.01/PDE/11/2019 mengatur tentang Pensiun Pegawai LPEI

- c. PDE No. 0024/PDE/10/2022 regulates the Mutation of Institution Employees
- d. PDE No. 0023/PDE/07/2021 regulates the Internship/ Work Practice Program, Detasering (*Secondment*) and Exchange of Institution Employees
- e. PDE No. 0042/PDE/09/2019 regulates the Operational Manual of the Integrity Pact
- f. PDE No. 0009/PDE/07/2022 regulates the Working Time of Institution Employees
- g. PDE No. 0052/PDE/11/2019 regulates Position Groups
- h. PDE No. 0055/PDE/11/2019 regulates the Remuneration of Institution Employees and KDE No. 0158/KDE/11/2019 regulates the Determination of Remuneration of Institution Employees
- i. PDE No. 0019/PDE/09/2022 regulates the Official Travel of Institution Employees
- j. PDE No.0014/PDE/05/2015 regulates the Institution Employee Training and Development Program
- k. PDE No.0028/PDE/12/2020 regulates Enforcement of Discipline and Determination of Sanctions for Violations
- l. PDE No.0058.01/PDE/11/2019 regulates the Pension of Institution Employees

Kesetaraan dalam Pengelolaan SDM [OJK F.18],[GRI 405-1]

Inisiatif Lembaga untuk mendorong lingkungan kerja yang inklusif, atau yang kemudian dikenal sebagai *Diversity*, *Equity*, dan *Inclusivity* (DEI), terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kami percaya bahwa organisasi dengan budaya inklusif 2x lebih mungkin untuk mencapai target keuangan, 8x lebih mungkin mencapai hasil bisnis yang lebih baik, serta 6x lebih *agile* dan inovatif. Hal ini dikarenakan anggota tim yang inklusif dan beragam melihat pengalaman kerja mereka secara lebih positif dan merasa mereka bekerja lebih keras karenanya.

Di LPEI, kami bekerja setiap hari untuk memfasilitasi terbukanya akses bagi pelaku usaha ekspor dalam meningkatkan daya saing di tingkat global, melalui pembiayaan ekspor dan jasa konsultasi. Hal ini berarti bahwa semua pengusaha yang berorientasi ekspor dapat

Equality in HR Management [OJK F.18],[GRI 405-1]

The Institution's initiatives to foster inclusive work environments, known as Diversity, Equity, and Inclusivity (DEI), have progressed significantly in recent years. Research suggests that organizations with an inclusive culture are twice as likely to achieve financial targets, eight times more likely to achieve better business outcomes, and six times more agile and innovative. This is because team members who work in diverse and inclusive environments view their experiences more positively and are more motivated to work harder.

At Indonesia Eximbank, we work every day to facilitate open access for export businesses to increase competitiveness at the global level, through export financing and advisory services. This means that all export-oriented entrepreneurs can take advantage of

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

memanfaatkan layanan LPEI untuk mengembangkan usaha dan inovasi mereka. Artinya, mereka memiliki akses informasi yang adil dan lengkap yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Keragaman, kesetaraan dan inklusi penting tidak hanya bagi misi Lembaga namun juga bagi Pegawai LPEI. Dalam beberapa tahun terakhir, Lembaga telah memulai transformasinya yang salah satunya agar semua Pegawai dapat merasakan dirinya 'yang utuh' untuk bekerja, membuat prestasi, meningkatkan *career experience*, termasuk menjadi salah satu yang terpilih dalam *senior leadership*.

Kami telah membangun upaya-upaya dan kemajuan atas keragaman dan perwakilan di antara para *leaders* kami, terutama dalam mencetak pemimpin-pemimpin perempuan dari 17.9% di tahun 2019 menjadi 33% di tahun 2022. Begitu pula dengan kesempatan karir bagi teman-teman disabilitas yang semuanya menjadi bagian dari Lembaga. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan peluang karir dapat diakses oleh semua.

Saat ini, LPEI memiliki komposisi 60% pria dan 40% perempuan. Dalam hal pergerakan karir struktural bagi pegawai perempuan, dirasakan menantang dan masih sangat *male-dominated* dengan komposisi perempuan dalam jabatan struktural 33% dan pria dalam jabatan struktural sebesar 67%. Keberagaman lain dapat dilihat dari distribusi pemeluk agama Islam (83.8%), Kristen Protestan (9.1%), Katolik (4.7%), Hindu (1.8%) dan Budha (0.5%) sementara penyandang disabilitas yang dikelola masih kurang dari 2%. Namun data-data ini telah menunjukkan bahwa peluang untuk mendorong lingkungan kerja yang inklusif dengan mengimplementasikan nilai inti DEI sangat besar dengan meyakini bahwa setiap orang berhak untuk dihargai, didengarkan, dan dihormati. Setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang setara tanpa adanya perlakuan diskriminasi, itulah sebabnya Lembaga terus mengupayakan lingkungan kerja yang inklusif bagi semua pegawainya, dan tentunya kesadaran ini dimulai dari para *Leaders* (level manajerial).

Indonesia Eximbank's services to develop their business and innovation. This means that they have access to fair and complete information that suits the needs of business practitioners.

Diversity, equity, and inclusion are critical not only to Indonesia Eximbank's mission but also to its employees. In recent years, the Institution has embarked on a transformational journey to enable all employees to feel fully engaged in their work, achieve their goals, enhance their career experiences, and aspire to be part of the senior leadership team.

We have built on our efforts and progress on diversity and representation among our leaders, particularly in producing female leaders from 17.9% in 2019 to 33% in 2022. Similarly, career opportunities for individuals with disabilities who are all part of the Institution. This reflects efforts to ensure career opportunities are accessible to all.

Currently, Indonesia Eximbank has a composition of 60% male and 40% female employees. In terms of structural career movements for female employees, it is considered challenging and still very male-dominated with the composition of female in structural positions at 33% and male in structural positions at 67%. Other diversity can be seen from the distribution of Muslims (83.8%), Protestant Christians (9.1%), Catholics (4.7%), Hindus (1.8%) and Buddhists (0.5%) while individual with disabilities are still less than 2%. However, these data have shown that the opportunities to foster an inclusive work environment by implementing core DEI values are enormous by believing that everyone deserves to be valued, listened to, and respected. Every individual has equal rights and opportunities without discrimination, which is why the Institution continues to strive for an inclusive work environment for all its employees, and of course this awareness starts from the Leaders (managerial level).

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Pengisian beberapa jenjang jabatan juga menunjukkan pemberlakuan konsep kesetaraan kesempatan, yakni dengan relatif terjaganya proporsi pegawai perempuan dan pegawai laki-laki. Hal tersebut tampak pada komposisi jajaran manajemen puncak, dan komposisi pegawai menurut jenjang jabatan berikut. Adapun data demografi pegawai menurut usia, tingkat pendidikan, status ketenagakerjaan, lokasi kerja, masa kerja dan sebagainya dapat dilihat pada bagian “Profil Perusahaan”. [GRI 405-1]

The appointment of several levels of positions highlights our commitment to the principle of equal opportunity, as demonstrated by the relatively balanced proportion of female and male employees. This is evident in the composition of our top management team and employees’ composition by position. The employee’s demographic data according to age, education level, employment status, work location, length of service and so forth are presented in the “Company Profile” section. [GRI 405-1]

Demografi Karyawan Berdasarkan Gender (orang) [GRI 2-7, 405-1]

Employee Demographics by Gender (people) [GRI 2-7, 405-1]

Jenis Kelamin Gender	2021		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
Laki-laki Male	338	59,6%	327	59.6%
Perempuan Female	229	40,4%	222	40.4%
Jumlah Total	567	100,0%	549	100,0%

Komposisi Jabatan Manajemen Puncak Berdasarkan Umur & Gender [GRI 405-1]

Composition of Top Management Positions by Age & Gender [GRI 405-1]

Usia Age	2021				2022			
	L	P	Jumlah	Komposisi	L	P	Jumlah	Komposisi
	Male	Female	Total	Composition	Male	Female	Total	Composition
31 hingga 40 Tahun 31 to 40 Years old	-	-	-	%	-	-	-	-
Diatas 40 Tahun Above 40 Years old	8	3	11	100%	7	3	10	100%
Jumlah Total	8	3	11	100 %	7	4	10	100%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Gender [GRI 2-8, 405-1]

Employee Composition by Position Level and Gender [GRI 2-8, 405-1]

Level	2021				2022			
	L	P	L	P	L	P	L	P
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Senior Executive Vice President	4	2	6	1,06 %	5	2	7	1.2%
Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah Head of Division/Head of Regional Office	34	17	51	8,99 %	29	15	44	8.01%
Kepala Departemen Head of Department	83	35	118	20,81 %	78	35	113	20.5%
Eksekutif Executive	144	81	225	39,68 %	146	87	232	42.2%
Pelaksana Executor	73	93	166	29,28 %	68	83	149	28.08%

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Level	2021				2022			
	L	P	L	P	L	P	L	P
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Pegawai MPP MPP Employees	1	0	1	0,18%	1	0	1	0,01%
Jumlah Total	339	228	567	100,0%	327	222	549	100%

Dalam rangka meningkatkan *awareness Leaders*, kami mengadakan kegiatan *inspirational session* yang berbasis bukti dari Perusahaan lain, dimana sesi ini diadakan secara *hybrid* pada hari Rabu, 30 November 2022 lalu yang berlokasi di Xynergy lantai 1, Kantor Pusat Indonesia Eximbank. Sesi ini dihadiri oleh hampir seluruh Kepala Divisi dan Kepala Departemen baik yang berlokasi di Jakarta maupun di luar kota Jakarta.

In order to increase awareness of Leaders, we held an evidence-based inspirational session from other companies, where this session was held in a hybrid manner on Wednesday, November 30, 2022 located at Xynergy 1st floor, Indonesia Eximbank Head Office. This session was attended by almost all Division Heads and Department Heads both located in Jakarta and outside the city of Jakarta.



HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN BERMARTABAT [GRI 2-30]

LPEI mewujudkan komitmen untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan menerapkan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing para pegawai. Hubungan industrial di LPEI dilandasi oleh semangat para pihak untuk memberikan yang terbaik bagi pegawai maupun Lembaga. LPEI membina hubungan industrial yang efektif melalui pemahaman mendalam terhadap harapan para pegawai dan menunjukkan komitmen penuh terhadap penerapan berbagai kesepakatan yang melandasi hubungan kerjasama dengan jajaran insan Lembaga. Dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis tersebut, LPEI menjamin hak pegawai untuk menyampaikan pendapat secara transparan.

Hubungan industrial di LPEI dibangun dan dikembangkan dengan mengacu pada prinsip kesetaraan, kewajaran,



HARMONIOUS AND DIGNIFIED INDUSTRIAL RELATIONS [GRI 2-30]

Indonesia Eximbank embodies its commitment to establish harmonious relations by applying the principle of mutual respect for each other's rights and obligations of employees. Industrial relations are based on the spirit of the parties to provide the best for employees and institutions. Indonesia Eximbank fosters effective industrial relations through a deep understanding of the expectations of employees and demonstrates full commitment to the implementation of various agreements that underlie cooperative relations with the ranks of the Institution's personnel. In realizing harmonious industrial relations, Indonesia Eximbank guarantees the right of employees to express opinions transparently.

Industrial relations at Indonesia Eximbank are built and developed by referring to the principles of equality,

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan di dalam Peraturan Perusahaan LPEI (secara internal disebut Peraturan Direktur Eksekutif tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian) yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

Seluruh (100%) pegawai LPEI terjamin hak dan kewajibannya dalam Peraturan Perusahaan dimaksud. [GRI 2-30]

Melalui pemberlakuan Peraturan Perusahaan tersebut, LPEI mengatur secara lengkap pemenuhan hak dan kewajiban, juga pola hubungan pegawai dan Manajemen Lembaga, termasuk apabila terjadi perselisihan atau sengketa hubungan kerja diantara kedua pihak. Sesuai dengan Peraturan Perusahaan tersebut, jika terdapat kasus-kasus terkait dengan ketenagakerjaan, penyelesaiannya dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengutamakan penyelesaian secara bipartit/internal perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pengembangan Lingkungan Kerja yang Kondusif [OJK F.21, GRI 407-1]

LPEI berupaya mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif, yang salah satunya diwujudkan melalui komunikasi timbal balik yang efektif bersama para pegawai, juga melalui penerapan hubungan industrial yang bermartabat. Berbagai sarana komunikasi yang disediakan dalam rangka mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif, juga penerapan berbagai kebijakan dalam rangka membangun hubungan industrial yang bermartabat dalam kerangka *social co-creation*, mencakup diantaranya:

1. Menerapkan proses seleksi sesuai dengan budaya kerja LPEI, standar kompetensi, standar kesehatan dan standar remunerasi.

fairness, a sense of justice and human values. These principles are embodied in the Institution Regulation (internally called the Executive Director Regulation on Personnel System Policy) which is registered and ratified by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia through the Decree of the Director General of Industrial Relations Development and Labor Social Security No. Kep. 284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 dated February 20, 2020.

All (100%) employees are guaranteed their rights and obligations in the Institution Regulation. [GRI 2-30]

Through the enactment of the Institution Regulation, Indonesia Eximbank regulates the complete fulfillment of rights and obligations, as well as the pattern of employee relations and Institution Management, including in the event of a dispute or employment relationship dispute between the two parties. In accordance with the Institution Regulation, if there are cases related to employment, the settlement is carried out through a process in accordance with statutory provisions by prioritizing bipartite/internal institution settlement without involving third parties.

Development of a Favorable Work Environment [OJK F.21, GRI 407-1]

Indonesia Eximbank strives to develop a favorable work environment, one of which is realized through effective mutual communication with employees, as well as through the implementation of dignified industrial relations. Various means of communication are provided to develop a favorable work environment, as well as the implementation of various policies to build dignified industrial relations within the framework of social co-creation, as follows:

1. Implement a selection process in accordance with the Institution's work culture, competency standards, health standards and remuneration standards.

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

2. <i>Welcoming</i> Pegawai Baru melalui email dan memberikan informasi awal mengenai LPEI, bisnis LPEI, <i>Buddy</i> dan HRBP-nya. 3. Menginformasikan Pegawai Baru melalui email HR <i>Information</i>. 4. Menyambut Pegawai Baru pada hari pertama <i>on-board</i> dan memastikan yang bersangkutan mendapatkan layanan pemeriksaan antigen sebelum beraktivitas di Kantor. 5. Memastikan ketersediaan fasilitas kerja di hari pertama. 6. Memberikan HR <i>Briefing session</i> agar Pegawai Baru memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan prosedur Kepegawaian serta bagaimana proses penilaian kinerja selama masa percobaan dan masa kontrak (bila ada) termasuk tips-tips selama masa transisi. 7. Memastikan <i>handover</i> Pegawai Baru kepada <i>Buddy</i> dan Atasannya berjalan dengan baik termasuk mengingatkan agar dapat membantu Pegawai Baru selama masa transisi. 8. Memastikan Pegawai Baru memiliki nomor kontak HRBP sebagai first solution atas masalah Kepegawaian. 9. Mendorong <i>Community Minded at Work</i> dengan memperkenalkan Pegawai Baru pada lingkungan kantor dan fasilitas kantor (termasuk <i>Gym Room</i> dan Komunitas <i>Hobby</i> Pegawai) serta memperkenalkan Pegawai Baru kepada Pegawai-pegawai yang ada. 10. Memastikan seluruh Pegawai telah menyelesaikan <i>New Hire Orientation Program</i>, menerima <i>certificate</i> Pakta Integritas dan Budaya Kerja yang dikelola oleh Tim HRD. 11. Memastikan Pegawai mengetahui <i>Whistle Blower System</i> yang dikelola oleh Tim KPT. 12. Menyebarkan keterbukaan atas segala informasi terkait dengan Kepegawaian pada kanal-kanal informasi internal seperti email, internal portal, <i>Great Day</i> dan <i>WhatsApp Group</i>. 13. Memastikan kesempatan terbuka bagi seluruh Pegawai untuk mendapatkan <i>self development</i> melalui program terstruktur (pelatihan dan	2. Welcoming New Employees via email and providing initial information about Indonesia Eximbank, its business, Buddy and HRBP. 3. Inform New Employees via HR Information email. 4. Welcome New Employees on the first day of on-board and ensure that they receive antigen screening services before doing activities in the Office. 5. Ensure the availability of work facilities on the first day. 6. Provide HR Briefing sessions for New Employees to have knowledge and understanding of Personnel processes and procedures and on the performance appraisal process during the probationary period and contract period (if any) including tips during the transition period. 7. Ensure that New Employee's handover to Buddy and his Superior goes well including reminder to help New Employee during the transition period. 8. Ensure New Employees have an HRBP contact number as the first solution to staffing issues. 9. Promote Community Minded at Work by introducing New Employees to the office environment and office facilities (including Gym Room and Employee Hobby Community) and introducing New Employees to existing ones. 10. Ensure that all employees have completed the New Hire Orientation Program, received a certificate of Integrity Pact and Work Culture managed by the HRD Team. 11. Ensure that employees know the Whistle Blower System managed by the KPT Team. 12. Disseminate disclosure of all information related to Personnel on internal information channels such as email, internal portal, Great Day and WhatsApp Group. 13. Ensure opportunities are open for all employees to get self-development through structured programs (training and development and mentoring) and also

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

pengembangan serta *Mentoring*) dan juga tidak terstruktur melalui program webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Tim TFO

14. Memastikan Pegawai telah melengkapi Rencana Kinerja Individu-nya melalui metode *1 on 1 session* atau diskusi dengan Atasannya sehingga membangun keterbukaan dan komitmen kedua belah pihak.
15. Menyediakan retensi program terutama bagi Pegawai bertalenta atau yang berada di *Position At Risk (critical)*.
16. Memberikan kesempatan terbuka bagi Pegawai-pegawai yang ingin meningkatkan kinerjanya melalui program *Performance Improvement Plan* dan *Mentoring* yang dikelola oleh Tim HRD. Dalam program ini, Pegawai memiliki kesempatan untuk *Speak Up* mengenai karir dan aspirasinya.
17. Memberikan kesempatan jalur karir melalui skema *promotion from within (promotion dan internal job posting)*.
18. Mendorong terjadi *Collaboration at Work* melalui pembentukan *Task Force* dalam beberapa *project* lintas Divisi.
19. Selama pandemi, menerapkan *hybrid working arrangement* dimana Pegawai tetap bisa melakukan kerja produktif dari Rumah dan dari Kantor dengan pengaturan jadwal hari kerja sehingga Pegawai merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.
20. Memberikan perhatian khusus bagi Pegawai yang terkonfirmasi *positive Covid*, yang sedang sakit atau yang sedang berduka.
21. Mendorong Pegawai untuk berpartisipasi dalam penerapan *Green Office* seperti membawa tanaman di tempat kerja dan mengikuti lomba-lomba yang ada.
22. Menyelenggarakan *Employee Engagement Survey* agar bisa menangkap isu-isu sosial di lingkungan kerja, termasuk memperkuat peran HRBP sebagai partner bisnis dan Pegawai.

Pengembangan lingkungan kerja yang kondusif tersebut membuat LPEI tidak mencatatkan adanya perkara Hubungan Industrial dengan para karyawan yang harus diselesaikan.

unstructured through webinars organized by the TFO Team.

14. Ensure that employees have completed their Individual Performance Plan through the 1 on 1 session method or discussion with their superiors to build openness and commitment from both parties.
15. Provide program retention, especially for talented employees or those in a Position At Risk (critical).
16. Provide open opportunities for employees who aim to improve their performance through the Performance Improvement Plan and Mentoring programs managed by the HRD Team. In this program, employees have the opportunity to speak up about their careers and aspirations.
17. Provide career path opportunities through promotion from within schemes (promotion and internal job posting).
18. Promote Collaboration at Work through the establishment of Task Forces in several cross-Division projects.
19. During the pandemic, implementing a hybrid working arrangement where employees can still do productive work from home and from the office by setting a workday schedule for employees to feel safe and comfortable in their activities.
20. Pay special attention to employees who are confirmed positive for Covid, who are sick or who are grieving.
21. Mandate employees to participate in the implementation of Green Office such as bringing plants at work and participating in existing competitions.
22. Conducting an Employee Engagement Survey to capture social issues in the work environment, including strengthening the role of HRBP as a business partner and employee.

Due to the establishment of a positive work environment, Indonesia Eximbank has not had any unresolved industrial relations cases with its employees.

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT**STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DI TAHUN 2022**

Transform, Empower, Engage adalah tiga kata kunci panduan strategi dan manajemen sumber daya manusia di tahun 2022 yang penuh tantangan, namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah manajemen dalam melakukan penyempurnaan demi peningkatan kapabilitas dan kapasitas dari insan-insan LPEI.

Transform yang telah dilakukan LPEI didukung oleh adanya preferensi kerja para kaum millennial, yang mengambil porsi 78% dari jumlah pegawai LPEI dan dengan kondisi Pandemi Covid-19 menjadikan katalisator bagi transformasi era baru dalam mekanisme kerja di LPEI. Hal ini terlihat dari adanya perubahan pendekatan birokratik menuju *agile* (lincah) dan dari *"ticking-the-box based"* ke *add-value based*. Transformasi mekanisme kerja tersebut ke depannya diharapkan menjadi budaya kerja dan DNA bagi seluruh pegawai LPEI. Meski berada di tahap awal, hal tersebut telah dimulai dan memiliki pijakan yang kuat berkat dukungan dari Kementerian Keuangan, jajaran manajemen, serta keinginan yang kuat dari seluruh pegawai untuk melakukan perubahan.

Empower. Melalui Pembaharuan Nilai Budaya Lembaga yang sejalan dengan Visi Misi Lembaga, diharapkan Nilai Budaya APIK dapat dijadikan sebagai panduan cara perilaku setiap insan LPEI. Selain melakukan internalisasi budaya kerja, LPEI juga turut aktif dalam membekali pegawai dengan kompetensi teknis dan manajerial sebagai upaya untuk memastikan dan meningkatkan kesiapan pegawai apabila sewaktu-waktu ditunjuk oleh Manajemen untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Upaya akselerasi terhadap kompetensi pegawai juga dilakukan melalui berbagai program, yaitu LFT, RMDP, serta pelaksanaan program manajemen talenta yang menyeluruh.

Engage. Keterlibatan pegawai adalah faktor kunci dalam kesuksesan sebuah organisasi. *The more engaged, the more productive*. Membangun keterlibatan dengan semangat *noble purpose* di tengah tantangan-tantangan besar LPEI di tahun 2022 memerlukan usaha yang keras

HR DEVELOPMENT STRATEGY IN 2022

Transform, Empower, Engage are the three keywords guiding strategy and human resource management in 2022 which is full of challenges, but this does not deter management from making improvements to improve the capabilities and capacities of Indonesia Eximbank employees.

Transform that has been carried out by Indonesia Eximbank is supported by the work preferences of millennials, who account for 78% of total employees and the Covid-19 pandemic become a catalyst for the transformation of a new era in the working mechanism at Indonesia Eximbank. This can be seen from the change in bureaucratic approach towards agile and from *"ticking-the-box based"* to *add-value based*. The transformation of the work mechanism in the future is expected to become a work culture and DNA for all employees. Although it is in its early stages, it has begun and has a strong foothold due to the support of the Ministry of Finance, management, and the strong aspiration of all employees to make changes.

Empower. Through the Renewal of Institutional Cultural Values in line with the Vision and Mission of the Institution, it is hoped that APIK Cultural Values can be used as a guide for the behavior of every employee. In addition to internalizing work culture, Indonesia Eximbank also actively participates in equipping employees with technical and managerial competencies as an effort to ensure and improve employee readiness if at any time appointed by Management to carry out higher duties and responsibilities. Efforts to accelerate employee competence are also carried out through various programs, namely LFT, RMDP, and the implementation of a comprehensive talent management program.

Engage. Employee engagement is a key factor in the success of an organization. The more engaged, the more productive. Building engagement with a spirit of noble purpose in the midst of the Institution's big challenges in 2022 requires hard efforts from management and

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

dari manajemen dan seluruh pegawai. *Engagement level* telah mengalami kenaikan, walaupun masih di bawah rata-rata industri di Indonesia. Namun demikian, tingkat *turn over* yang tinggi di tahun 2022, yaitu sebesar 12,99%, dimana 7,69% diantaranya merupakan *regretted turn over* menjadi sebuah pengingat bagi LPEI untuk secara terus menerus membangun dan meningkatkan *engagement* pegawai melalui berbagai program dan kebijakan kepegawaian.

Fokus Pengembangan SDM di Tahun 2022

Pengembangan SDM mengacu pada kegiatan pengembangan organisasi yang dilakukan oleh Pegawai untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi fungsional, pengembangan dan karir pegawai. Kerangka kerja pengembangan dan pelatihan dilakukan berdasarkan RKAT dan Training Need Analysis unit kerja.

Adapun pada tahun 2022 fokus pengembangan SDM sebagai strategi mendukung arah dan kebijakan Lembaga adalah sebagai berikut :

- Penguatan di *Three Lines of Defenses- building Risk knowledge and Awareness*, sebagai bagian dari upaya membangun budaya *risk awareness* yang kuat diberikan kepada pegawai melalui pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko dan *New Hire Orientation Program* bagi pegawai baru;
- Peningkatan analisa pada sektor industri unggulan;
- Peningkatan analisa keuangan;
- Peningkatan *know your product* dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan peningkatan pengetahuan dalam bidang asuransi, penjaminan, bidang *trade* dan bidang syariah;
- Peningkatan keahlian melalui sertifikasi keahlian dibidang kerjanya masing-masing, antara lain Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, Sertifikasi Auditor, Sertifikasi *Trade*, Sertifikasi Teknologi Informasi, Sertifikasi Kepatuhan, Sertifikasi GRCP, Sertifikasi ESG, Sertifikasi Asuransi, Sertifikasi Penjaminan, Sertifikasi SPPUR dan Sertifikasi *Human Resources*.

all employees. The engagement level has increased, although it is still below the industry average in Indonesia. However, the high turnover rate in 2022, which is 12.99%, of which 7.69% is regretted turn over, is a reminder for Indonesia Eximbank to continuously build and improve employee engagement through various personnel programs and policies.

Focus on Human Resource Development in 2022

HR development refers to organizational development activities carried out by employees to maintain or improve functional competencies, employee development and career. The development and training framework is carried out based on the CTR and Training Need Analysis work units.

As for 2022, the focus of HR development as a strategy to support the direction and policies of the Institution is as follows:

- Strengthening in the Three Lines of Defenses-building Risk knowledge and Awareness, as part of efforts to build a strong risk awareness culture given to employees through the implementation of Risk Management Certification and New Hire Orientation Program for new employees;
- Improving analysis in leading industrial sectors;
- Improving financial analysis;
- Increasing know your product is carried out by holding knowledge enhancement activities in the areas of insurance, guarantees, trade and sharia;
- Improving expertise through certification of expertise in their respective fields of work, including Goods and Services Procurement Certification, Auditor Certification, Trade Certification, Information Technology Certification, Compliance Certification, GRCP Certification, ESG Certification, Insurance Certification, Assurance Certification, SPPUR Certification and Human Resources Certification.

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

- Pelaksanaan *succession management* melalui program *talent management* dan *management trainee*.

REKRUTMEN & TURNOVER KARYAWAN [GRI 401-1]

Dasar Kebijakan penerimaan pegawai atau rekrutmen yang dilakukan selama tahun 2022 masih mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0028/PDE/05/2019 tentang Penerimaan Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Adapun pelaksanaannya secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

STAFFING PEGAWAI

Pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan dengan memegang teguh prinsip *transparency* dan *fairness*. Mekanisme pengisian kebutuhan pegawai dilaksanakan secara bertahap sebagai upaya untuk memperoleh *the right man at the right position*, dimana langkah yang dilakukan mencakup pemetaan kebutuhan pegawai, pencarian kandidat (*sourcing*), rekrutmen dan seleksi, hingga *onboarding*.

Tingginya angka *turnover* di tahun 2022 memberikan *challenge* kepada LPEI dalam upaya pemenuhan kebutuhan pegawai. Hingga Desember 2022 terdapat kekosongan posisi struktural sebesar 6,3%. Untuk itu berbagai inisiatif perlu dilakukan oleh LPEI agar dapat mempertahankan pegawai (*retain*) dan menahan laju *turn over*, serta menarik (*attract*) *talent* terbaik di *market* untuk dapat bergabung dan berkontribusi di LPEI.

A. Pemetaan Kebutuhan Pegawai

Untuk menjaga efektivitas organisasi dan produktivitas pegawai, penambahan jumlah pegawai diperhitungkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan prioritas pengisian serta beban kerja pada masing-masing posisi. Pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja ditargetkan tidak mengalami peningkatan atau tetap sebesar 579 pegawai, namun dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu,

- Implementation of *succession management* through *talent management* and *management trainee* programs.

EMPLOYEE RECRUITMENT & TURNOVER [GRI 401-1]

The basis of the recruitment policy carried out during 2022 still refers to the Executive Director Regulation No. 0028/PDE/05/2019 on Employee Acceptance of Indonesia Eximbank.

The implementation in general can be explained as follows:

EMPLOYEE STAFFING

Meeting the needs of employees is carried out by upholding the principles of *transparency* and *fairness*. The mechanism for filling employee needs is carried out gradually as an effort to obtain the right man at the right position, where the steps taken include mapping employee needs, candidate search (*sourcing*), recruitment and selection, to *onboarding*.

The high turnover rate in 2022 provides challenges to Indonesia Eximbank in an effort to meet employee needs. As of December 2022, there is a structural vacancy of 6.3%. For this reason, various initiatives need to be carried out by Indonesia Eximbank in order to retain employees and withstand the pace of turnover, as well as attract the best talents in the market to be able to join and contribute to Indonesia Eximbank.

A. Employee Requirements Mapping

To maintain organizational effectiveness and employee productivity, the increase in the number of employees is calculated comprehensively by considering the priority of recruiting and workload in each position. In 2022, the number of employees is targeted not to increase or remain at 579 employees, however more qualified. As such, the allocation of distribution of the number of employees needs to be

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

alokasi distribusi jumlah pegawai perlu dilakukan dengan tepat dan memperhatikan skala prioritas, serta diselaraskan dengan program pengembangan kapabilitas pegawai. Kegiatan terkait perencanaan tenaga kerja yang dilakukan antara lain:

- Penyusunan *draft manpower planning* 2022.
- Pembahasan MPP dan *headcount* terkait dengan RKAT 2022;
- Alokasi distribusi *headcount* per Direktorat dan Unit Kerja.

Pembahasan MPP 2022 dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan kapasitas tenaga kerja yang memadai untuk pencapaian target lembaga. Hasil pembahasan tersebut akan dijadikan referensi oleh LPEI dalam menentukan alokasi distribusi pegawai yang akan diberikan kepada masing-masing unit kerja.

Pemetaan kebutuhan pegawai tidak hanya dilakukan terhadap fungsi yang bersifat *core* dan tidak dapat dialihdayakan, tetapi juga dilakukan kepada fungsi *non core* yang dapat dialihdayakan.

B. Pencarian Kandidat (*Sourcing*)

Pemenuhan kebutuhan pegawai diperoleh baik dari kandidat internal, maupun eksternal LPEI. Pengisian posisi dari *sourcing* internal dilakukan baik sebagai tindak lanjut atas implementasi manajemen talenta, maupun melalui mekanisme *internal job posting*. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan dari *sourcing* eksternal dilakukan dengan berkolaborasi bersama tim *Communication and Stakeholders Engagement* yang akan memberikan *support* dari sisi desain dan publikasi untuk memastikan bahwa seluruh pengumuman lowongan kerja yang disampaikan kepada pihak eksternal telah sesuai dengan *corporate identity* LPEI. Untuk memastikan LPEI memperoleh *sourcing* eksternal terbaik di *market*, proses *sourcing* dilakukan melalui beberapa *channel*, mulai dari memasang iklan lowongan

done appropriately and pay attention to the priority scale, and be aligned with the employee capability development program. Activities related to workforce planning are as follows:

- Preparation of draft manpower planning 2022.
- MPP and headcount discussions related to the 2022 CTR;
- Allocation of headcount distribution per Directorate and Work Unit.

The MPP 2022 discussion was carried out with the aim of ensuring the availability of adequate manpower capacity for the achievement of institutional targets. The results of the discussion will be used as a reference by Indonesia Eximbank in determining the allocation of employee distribution to be given to each work unit.

Mapping employee needs is not only carried out on core functions that cannot be outsourced, but also carried out on non-core functions that can be outsourced.

B. Candidate Search (*Sourcing*)

Fulfillment of employee needs is obtained both from internal and external candidates of Indonesia Eximbank. Filling positions from internal sourcing is carried out both as a follow-up to the implementation of talent management, as well as through internal job posting mechanisms. Meanwhile, meeting the needs of external sourcing is carried out by collaborating with the Communication and Stakeholders Engagement team who will provide support in terms of design and publication to ensure that all job announcements submitted to external parties are in accordance with Indonesia Eximbank's corporate identity. To ensure Indonesia Eximbank obtains the best external sourcing in the market, the sourcing process is carried out through several channels, ranging from placing job advertisements on job

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

kerja pada media pencarian kerja, hingga aktivasi kampanye rekrutmen di beberapa kanal komunikasi *online*.

C. Rekrutmen & Seleksi

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi dilakukan dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan berkeadilan. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan dan sumber pemenuhan.

1. Rekrutmen Eksternal

Rekrutmen eksternal merupakan proses pemenuhan pegawai melalui kandidat eksternal baik *professional hire regular* maupun dari Tenaga Alih Daya atau Peserta *Internship* yang mengikuti proses seleksi. Terdapat data kompilasi seluruh posisi yang berhasil direkrut (sudah bergabung di hari pertama) selama 2022 berdasarkan proses seleksi baik dari permintaan tahun 2021 maupun dari tahun 2022.

Proses seleksi yang dijalani ditujukan untuk memilih dan menyaring kandidat terbaik yang memenuhi kualifikasi jabatan yang ditetapkan. Untuk kandidat posisi organik, tahapannya mulai dari Wawancara HR dan *User, assessment, medical test, employee checking* dan *offering*. Selama kegiatan seleksi, recruiter melakukan koordinasi dan penjadwalan dengan Unit Kerja, Penyedia Jasa *Assessment*, Penyedia Jasa Tes Kesehatan, *pihak pemberi referensi, Screening* dari pelamar-pelamar yang masuk (*active candidates*) maupun *screening* dari kandidat-kandidat yang *diapproach* secara langsung (*passive candidates*).

Sementara untuk proses seleksi Tenaga Alih Daya (TAD) atau Staff Ahli, dilakukan wawancara

search media, to activating recruitment campaigns on several online communication channels.

C. Recruitment & Selection

The recruitment and selection are carried out by applying the principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Therefore, the recruitment and selection process are carried out through several stages and fulfillment sources.

1. External Recruitment

External recruitment is a process of fulfilling employees through external candidates, both regular professional hires and from Outsourced Personnel or Internship Participants who follow the selection process. There is a compilation data of all positions successfully recruited (already joined on the first day) during 2022 based on the selection process both from 2021 and from 2022.

The selection process is aimed at selecting and screening the best candidates who meet the qualifications for the specified position. For organic position candidates, the stages start from HR and User Interviews, assessment, medical tests, employee checking and offering. During the selection activity, recruiters coordinate and schedule with Work Units, Assessment Service Providers, Health Test Service Providers, referees, screening of active candidates and screening of candidates who are approached directly (passive candidates).

Meanwhile, for the selection process for Outsourced Personnel (TAD) or Expert Staff,

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

kandidat, proses pemesanan Perjanjian kepada tim HRS (Koperasi), baik untuk Perjanjian Kerja bagi TAD dan Perjanjian Kerjasama bagi Staff Ahli.

2. Rekrutmen Internal

Pemenuhan pegawai bersumber dari kandidat internal atau yang dikenal dengan rekrutmen internal adalah proses pengisian posisi yang kosong/terbuka dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) internal Lembaga. Rekrutmen ini bisa dilakukan dengan metode mutasi pegawai seperti namun tidak terbatas pada tiga cara, yaitu promosi, rotasi dan demosi.

Rekrutmen internal dengan promosi memiliki kelebihan, diantaranya adalah meningkatkan motivasi dan *engagement* pegawai, menghemat biaya rekrutmen, mempersingkat waktu perekrutan, dan tidak membutuhkan proses adaptasi. Dalam hal pengelolaan rekrutmen internal, LPEI selalu berupaya untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya, dengan tetap memperhatikan kebutuhan Lembaga. Untuk menjaga objektivitas terhadap penempatan pegawai, kebijakan terkait mutasi pegawai secara terus menerus di-review efektivitasnya dan dilakukan penyempurnaan apabila diperlukan.

Pada tahun 2022 telah dilakukan *update* terhadap ketentuan mutasi pegawai agar kebijakan mutasi pegawai tetap relevan dengan kondisi LPEI saat ini, dan agar pergerakan karier pegawai terus terlaksana. Untuk setiap posisi yang memungkinkan adanya promosi, maka dilakukan alternative pertama yakni dengan mencari kandidat dari sumber *Talent Pool*, kemudian, apabila tidak didapatkan kesesuaian maka tim rekrutmen bekerjasama dengan tim HRBP melakukan pencarian melalui mekanisme *Internal Job Posting*.

candidate interviews are conducted, the process of ordering Agreements to the HRS (Cooperative) team, both for Work Agreements for TAD and Cooperation Agreements for Expert Staff.

2. Internal Recruitment

Fulfillment of employees sourced from internal candidates or known as internal recruitment is the process of filling vacant/ open positions by utilizing the Institution's internal human resources (HR). This recruitment can be done by employee mutation methods such as but not limited to three ways, namely promotion, rotation and demotion.

Internal recruitment with promotion has advantages, including increasing employee motivation and engagement, saving recruitment costs, shortening recruitment time, and not requiring an adaptation process. In terms of internal recruitment management, Indonesia Eximbank strives to place employees in accordance with their competence, while still paying attention to the needs of the Institution. To maintain objectivity towards employee placement, policies related to employee mutation are continuously reviewed for effectiveness and made improvements if necessary.

In 2022, an update has been made to the employee mutation provisions that enables the employee mutation policy to remain relevant to the current condition of Indonesia Eximbank, and employee career movements may continue to be carried out. For each position that allows promotion, the first alternative is to find candidates from the Talent Pool source, then, if no suitability is obtained, the recruitment team in collaboration with the HRBP team searches through the Internal Job Posting mechanism.

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Proses seleksi bagi kandidat internal dilakukan melalui proses *asesmen*, *interview*, maupun presentasi *business case* bagi pegawai yang menjadi kandidat internal pada posisi manajerial. Seluruh keputusan seleksi bagi kandidat internal dilakukan melalui Komite Kepegawaian yang beranggotakan *Head Of*, Direktur Pelaksana, maupun Direktur Eksekutif sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan mutasi.

The selection process for internal candidates is carried out through an assessment process, interviews, and business case presentations for employees who are internal candidates for managerial positions. All selection decisions for internal candidates are carried out through the Personnel Committee consisting of the Head Of, Managing Director, and Executive Director in accordance with the limits of authority stipulated in the mutation provisions.

Melalui proses seleksi tersebut, selama tahun 2022, LPEI melakukan rekrutmen calon pegawai yang telah memiliki pengalaman, melalui program *Leader For Tomorrow* (LFT). Program LFT ini khusus dirancang sesuai kebutuhan dalam rangka mempersiapkan putra putri terbaik bangsa sebagai penerus pemimpin yang tangguh dan mempunyai nilai-nilai budaya LPEI.

Through this selection process, during 2022, Indonesia Eximbank recruits prospective employees who already have experience, through the Leader For Tomorrow (LFT) program. This LFT program is specifically designed as needed to prepare the nation's best sons and daughters as successors to strong leaders and have Indonesia Eximbank cultural values.

Realisasi rekrutmen pegawai pada tahun 2022 adalah sejumlah **53** orang (2021: 56 orang), untuk mencapai target jumlah pegawai tahun 2022 sebesar **549** pegawai atau beratur turun **5,2%** jumlah 579 orang pegawai pada tahun sebelumnya. Selain rekrutmen reguler dimaksud, pada tahun 2022 LPEI telah merekrut mengangkat peserta *Leaders for Tomorrow* (LFT) angkatan 1 (15 orang) sebagai pegawai di bulan Januari 2022; sementara untuk yang angkatan 2 (20 orang) masih menjalani program selama tahun 2022. Dengan demikian, diharapkan terdapat akumulasi jumlah peserta LFT angkatan 1 dan angkatan 2 yang dapat menjadi *headcount* pegawai LPEI pada tahun 2023 sebanyak 35 orang.

The realization of employee recruitment in 2022 is 53 personnel (2021: 56 personnel), to achieve the target number of employees in 2022 of 549 employees or queue down 5.2% to the number of 579 employees in the previous year. In addition to the regular recruitment, in 2022 Indonesia Eximbank has recruited Leaders for Tomorrow (LFT) batch 1 participants (15 personnel) as employees in January 2022; while batch 2 (20 personnel) are still undergoing the program during 2022. Thus, it is expected that there will be an accumulation of the number of LFT batch 1 and batch 2 participants who can become the headcount of Indonesia Eximbank employees in 2023 as many as 35 personnel.

Rekrutmen Menurut Usia dan Gender [GRI 401-1]

Recruitment by Age and Gender [GRI 401-1]

Kelompok Usia Age	2021		2022	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
< 30 Tahun Years old	9	2	12	10
30 - 50 Tahun Years old	15	16	13	10
> 50 Tahun Years old	9	5	5	3
Jumlah	56		53	

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Selain menjalankan proses rekrutmen, di tahun 2022, LPEI juga memproses keluarnya sejumlah pegawai dengan berbagai sebab. Terdapat 71 orang (2021: 45 orang) pegawai yang memutuskan untuk keluar dari LPEI. Alasan berhentinya hubungan kerja dari para pegawai tersebut beragam. Usia pegawai umumnya juga masih dalam usia produktif pada saat mengajukan pengunduran diri untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Lembaga, sebagaimana tampak pada tabel-tabel berikut.

In addition to carrying out the recruitment process, in 2022, Indonesia Eximbank also processed the outgoing of a number of employees for various reasons. There were 71 personnel (2021: 45 personnel) of executives who decided to leave Indonesia Eximbank. The reasons for the termination of employment relations of these employees vary. The age of employees is generally still in productive age at the time of submitting resignation to terminate the employment relationship with the Institution, as shown in the following tables.

Turn-over menurut Usia dan Jenis Kelamin – 2021 dan 2022 [GRI 401-1]

Turn-over by Age and Gender – 2021 and 2022 [GRI 401-1]

Kelompok Usia Age	2021		2022	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
<25 tahun years	0	0	0	0
25-30 tahun years	4	2	5	8
31-35 tahun years	8	2	9	6
36-40 tahun years	4	2	4	4
41-45 tahun years	5	2	7	3
46-50 tahun years	3	1	3	1
≥ 51 tahun years	9	3	14	7
Total	45		71	

Jumlah dan Alasan Pengunduran Diri [GRI 401-1]

Number and Reasons for Resignation [GRI 401-1]

Alasan Reason	2021	2022
Kontrak Berakhir / Diberhentikan Contract Expired/Terminated	3	9
Mengundurkan Diri Resigned	25	43
Meninggal Dunia Passed-away	0	0
Pensiun Dini Early Retirement	0	18
Pensiun Karir Retirement Career	17	1
Total	45	71

Salah satu penyebab turunnya jumlah pegawai di tahun 2022 adalah karena tingginya tingkat *turn over*, yaitu sebesar 13,0%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 7,9%. *Turn over* pegawai didominasi oleh *regrettable turn over* sebesar 7,69%,

One of the reasons for the decline in the number of employees in 2022 is due to the high turnover rate, which is 13.0%. This figure has increased from 2021 which was 7.9%. Employee turnover is dominated by regrettable turnover of 7.69%, where based on the results of exit

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

dimana berdasarkan hasil *exit interview* diperoleh gambaran, alasan utama pengunduran diri adalah karena adanya peluang karir dan remunerasi yang lebih baik di tempat lain.

Untuk memberikan daya tawar yang lebih baik, LPEI kemudian melaksanakan upaya-upaya pemenuhan posisi yang dibuka melalui metode rekrutmen internal terutama dengan adanya kesempatan promosi dan rotasi; selain daripada upaya-upaya untuk meningkatkan remunerasi yang lebih baik secara internal dan kesempatan lainnya untuk mendapatkan fleksibilitas dalam bekerja hingga kesempatan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi (khusus *talent pool*).

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
[OJK F.22], [GRI 404-1, 404-2]

LPEI menegaskan bahwa setiap pegawai berhak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya, baik dibidang *soft skill* maupun *technical skill* dalam rangka memastikan diperolehnya sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni di bidangnya.

Program-program yang dilaksanakan fokus dalam membangun kesadaran akan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, penguatan pemahaman terhadap bisnis dan proses bisnis Lembaga, serta peningkatan kompetensi baik teknis maupun non-teknis yang sesuai dengan kebutuhan Lembaga. Kegiatan pelatihan dan pengembangan selama tahun 2022 dilakukan dengan cara *in-class* (baik *online* maupun *offline*), belajar mandiri (*self-paced learning/e-learning*), ataupun bimbingan (*coaching/mentoring*).

Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI dilaksanakan berlandaskan model sebagai berikut:

interviews provided an illustration, which the main reason for resignation is because of career opportunities and better remuneration elsewhere.

To provide better bargaining power, Indonesia Eximbank then implements efforts to fulfill positions through internal recruitment methods primarily with promotion and rotation opportunities; in addition to efforts to increase better remuneration internally and other opportunities to get flexibility in working to the opportunity to continue education to a higher level (specifically talent pool).

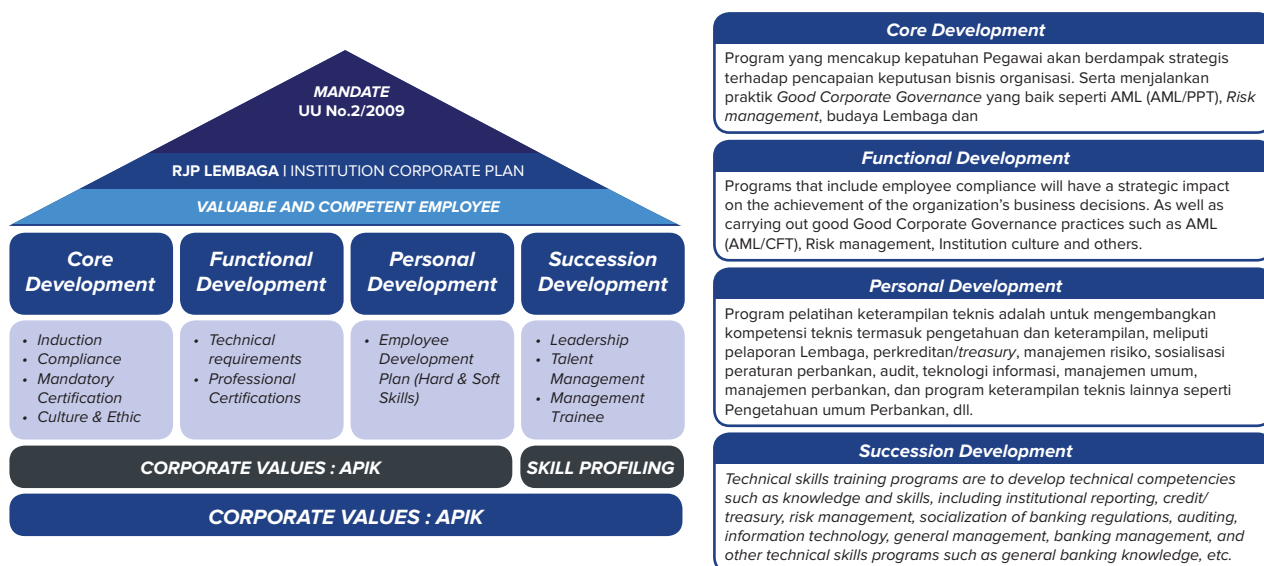
EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT [OJK F.22], [GRI 404-1, 404-2]

Indonesia Eximbank affirms that every employee has the right to receive education and training to improve and develop their competencies, both in the area of soft skills and technical skills to ensure the acquisition of excellent and qualified human resources in their fields.

The programs implemented focus on building awareness of risk management and good governance, strengthening understanding of the Institution's business and business processes, and increasing both technical and non-technical competencies in accordance with the needs of the Institution. Training and development activities during 2022 are carried out by *in-class* (both online and offline), self-paced learning (e-learning), or guidance (coaching/mentoring).

Indonesia Eximbank Employee Training and Development Program is carried out based on the following model:

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT



Untuk tahun 2022, tercatat sejumlah 571 orang (2021: 580 orang) pegawai telah mengikuti kegiatan pelatihan. Dengan demikian, di luar dari pegawai yang *on-board* pada akhir tahun 2022, dapat dikatakan seluruh pegawai telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. *Training mandays* pada tahun 2022 adalah 6,96, yang artinya rata-rata waktu yang dihabiskan satu orang pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan adalah selama 6,96 hari.

Rata-rata mandays pelatihan per pegawai adalah sebagai berikut. [GRI 404-1]

For 2022, a total of 571 employees (2021: 580 personnel) have participated in training activities. Thus, apart from employees who are *on-board* at the end of 2022, it can be said that all employees have had the opportunity to attend training. Training mandays in 2022 were 6.96, which means that the average time spent by one employee participating in training activities is 6.96 days.

The average training mandays per employee are as follows. [GRI 404-1]

Keterangan Information	2021	2022
Rata-rata Mandays Pelatihan per Tahun per Karyawan Average Training Mandays per Year per Employee	4,28	6,96

Selama tahun 2022, kegiatan pengembangan yang diberikan kepada pegawai terdiri atas 3 program Pilar Pengembangan SDM, sebagai berikut:

- Core Development
Program yang mencakup kepatuhan Pegawai akan berdampak strategis terhadap pencapaian

During 2022, the development activities provided to employees consist of 3 HR Development Pillar programs, as follows:

- Core Development
Programs that include employee compliance will have a strategic impact on the achievement of the

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

keputusan bisnis organisasi. Serta menjalankan praktik tata Kelola yang baik seperti AML/PPT, manajemen risiko, nilai-nilai budaya Lembaga, sertifikasi *mandatory* (sertifikasi kompetensi wajib pegawai dan sertifikasi kompetensi bidang kerja yang diatur oleh Lembaga Pemerintah, Kementerian dan Lembaga lainnya yang terkait dengan pengawasan dan supervisi LPEI dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

- *Functional Development*

Program pelatihan keterampilan teknis dapat berupa pelatihan maupun sertifikasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi teknis termasuk pengetahuan dan keterampilan, meliputi pelaporan Lembaga, perkreditan/treasury, manajemen risiko, sosialisasi peraturan perbankan, audit, teknologi informasi, manajemen umum, manajemen perbankan, dan program keterampilan teknis lainnya seperti pengetahuan umum perbankan dan lainnya.

- *Personal Development*

Jenis pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan *Personal Capabilities* dan perilaku untuk meningkatkan perilaku Lembaga yang diinginkan akan mencakup analisis masalah dan pengambilan keputusan, keterampilan hubungan pelanggan, keterampilan presentasi dan keterampilan komunikasi dan program kemahiran non-teknis lainnya dan didasarkan pada hasil penilaian kinerja dan kebutuhan Pegawai dengan Rencana Pengembangan Karyawan.

Adapun realisasi kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

organization's business decisions. As well as carrying out good governance practices such as AML/CFT, risk management, institutional cultural values, mandatory certification (compulsory competency certification of employees and competency certification in the area of work regulated by Government Institutions, Ministries and other institutions related to the supervision and supervision of Indonesia Eximbank by referring to the Indonesian National Work Competency Standard (SKKNI) and Framework Indonesian National Qualification (KKNI).

- Functional Development

Technical skills training programs can be in the form of professional training or certification to develop technical competencies including knowledge and skills, including institutional reporting, credit/treasury, risk management, socialization of banking regulations, auditing, information technology, general management, banking management, and other technical skills programs such as general banking knowledge and others.

- Personal Development

This type of training intended to develop Personal Capabilities and behaviors to improve the desired behavior of the Institution that include problem analysis and decision making, customer relations skills, presentation skills and communication skills and other non-technical proficiency programs and is based on the results of performance appraisals and needs of Employees with an Employee Development Plan.

The realization of employee training and development activities during 2022 is as follows:

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Pilar Pillars	Program Programs	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Total Participants
Core Development	Induction Program (NHO)	3	35
	Sertifikasi I Certification		
	i. Sertifikasi Manajemen Risiko I Risk Management Certification	19	136
	ii. SPPUR - Setelmen Pembayaran Transaksi Trade Finance I SPPUR - Trade Finance Transaction Payment Settlement	1	3
	iii. Sertifikasi HR BNSP I HR BNSP Certification	1	1
	Kepatuhan I Compliance		
	i. Refreshment Nilai- Nilai Budaya Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LPEI I Refreshment of Cultural Values and Code of Ethics and Code of Conduct of Indonesia Eximbank Employees	1	572
	ii. Cara APIK Melawan Fraud & Money Laundering I How to Fight Fraud & Money Laundering	1	471
Functional Development	Technical Skill Mandatory Produk dan Bisnis Sesuai Mandat I Mandatory Technical Skills for Products and Business According to Mandate		
	i. Bisnis Syariah I Sharia Business	10	161
	ii. Asuransi I Insurance	8	142
	iii. Penjaminan I Guarantee	12	250
	iv. Trade Finance	6	91
	v. Jasa Konsultasi I Advisory Services	4	98
	Pelatihan Sektor Industri dan Komoditas (Sawit, Aqua Culture, Nikel, Kayu, Chemical, Tekstil) I Industrial and Commodity Sector Training (Palm Oil, Aqua Culture, Nickel, Wood, Chemical, Textile)	14	1,161
	Sertifikasi Profesi I Professional Certification		
	i. Certificate for Specialist in Demand Guarantee (CSDG)	2	8
	ii. Certificate in Supply Chain Finance (CSCF)	1	1
	iii. Audit Forensik & Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFRA)	1	1
	iv. Certificate in Trade Finance Compliance (CTFC)	1	3
	v. Certificate for Documentary Credit Specialists (CDCS)	1	1
	vi. Certificate in International Trade and Finance (CITF)	1	1
	vii. Certified Human Resource Professional Executive (CHRPE 4.0)	1	1
	viii. Certified Total Reward Professional (CTRP)	1	1
	ix. Sertifikasi Kemenaker Petugas P3K (Basic First Aid) I Basic First Aid Officer of Kemenaker Certification	1	2
	x. Sertifikasi IT I IT Certification	5	24
	xi. Sertifikat Kepatuhan I Compliance Certification	2	4
	xii. Certified Professional Talent Management	2	3
	xiii. Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) - Tingkat Manajerial I Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program - Managerial Level	1	1
	xiv. Sertifikasi General Banking I General Banking Certification	1	14
	xv. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lev 1 I Government Procurement Certification Lev 1	3	4
	xvi. Sertifikasi Asuransi I Insurance Certification	1	5
Personal Development	Technical Skill	75	1,881
	Soft Skill	30	536
Other Program	Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN I Procedures for Filling E-LHKPN Application	1	26
	Sosialisasi NED, Panjiva dan Perpustakaan I Socialization of NED, Panjiva and Library	1	134
	Team Building	1	493

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT**A. Induction Program (New Hire Orientation)**

Selama tahun 2022, program orientasi pegawai baru telah dilakukan sebanyak **3** (tiga) kali, dengan jumlah peserta adalah 35 orang peserta. Adapun modul yang diberikan dalam kegiatan orientasi pada dasarnya sama dengan yang diberikan pada tahun sebelumnya, sebagai berikut:

No	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizers	Tanggal Date	Jumlah Peserta Total Participants
1	New Hire Orientation (Februari/February)	LPEI Indonesia Eximbank	01-Feb-22	17
2	New Hire Orientation (Juli/July)	LPEI Indonesia Eximbank	06-Jul-22	12
3	New Hire Orientation (Oktober/October)	LPEI Indonesia Eximbank	31-Oct-22	6

B. Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, pegawai diberikan pembekalan pengetahuan terkait Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui program penyegaran Budaya Lembaga dan Kode Etik, program peningkatan kesadaran risiko (*risk awareness*), serta pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko. Selama tahun 2022 pelaksanaan Kelas Persiapan dan Ujian serta Program Penyegaran (*refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Total
Sertifikasi dan Ujian Certifications and Exams	18	9	-	2	1	30
Program Penyegaran Refresher Program	22	1	68	11	2	104

C. Sertifikasi Profesional

Tahun 2022, LPEI mengikut sertakan banya pegawai dalam program sertifikasi profesi guna meningkatkan daya saing pegawai. Adapun sertifikasi profesi yang sudah dilaksanakan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program Programs	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Total Participants
Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Competency of Level-1 Government Procurement of Goods/Services Certification	1	1
Cisco Certified Network Associate (CCNA)	1	1
Certificate in Supply Chain Finance (CSCF)	1	1
Certificate in Trade Finance Compliance (CTCF)	1	1

A. Induction Program (New Hire Orientation)

During 2022, the new employee orientation program has been carried out 3 (three) times, with the number of participants being 35 participants. The modules given in the orientation activities are basically the same as those given in the previous year, as follows:

B. Risk Management and Corporate Governance

To support the implementation of Good Corporate Governance, employees are provided with knowledge related to Compliance and Risk Management through institutional culture refresher programs and codes of ethics, risk awareness improvement programs, and the implementation of Risk Management Certification. During 2022, the implementation of the Preparation and Exam Class and Risk Management Certification Refreshment Program are as follows:

C. Professional Certification

In 2022, Indonesia Eximbank included many employees in the professional certification program to improve employee competitiveness. The professional certifications that have been carried out in 2022 were as follows:

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Program Programs	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Total Participants
<i>Certified Professional Talent Management</i>	1	1
<i>Certified Human Resources Program Executive 4.0</i>	1	1
<i>Certified Total Rewards Professional (CTRP)</i>	1	1
Sertifikasi <i>General Banking</i> Level 1	1	14
Sertifikasi Kepatuhan Level 1 Level 1 Compliance Certification	1	3
Program Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit (QIA)</i> – Tingkat Manajerial <i>Qualified Internal Audit (QIA)</i> Certification Program – Managerial Level	1	1
<i>Certified General Insurance</i>	1	3
<i>Certified Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Assessment Fundamentals</i>	1	2
<i>GRC Professional (GRCP) Certification</i>	1	1
Sertifikasi Kemenaker Petugas P3K (<i>Basic First Aid</i>) Ministry of Manpower Certification for P3K (<i>Basic First Aid</i>) Officers	1	2
SPPUR – Setelmen Pembayaran Transaksi <i>Trade Finance</i> SPPUR – Trade Finance Transaction Payment Settlement	1	3

D. Peningkatan Kompetensi Dalam Rangka Pertumbuhan Bisnis

1. Sertifikasi *Credit Skill*
Program Sertifikasi *Credit Skill* merupakan program berkelanjutan dari tahun 2020. Dalam Sertifikasi *Credit Skill* terdapat 4 (empat) level yang harus diselesaikan peserta, yaitu Business Lending Fundamental (Level 1), *Financial Accounting for Lenders* (Level 2), *Commercial Loans to Business/Small Business* (Level 3) dan *Minimizing Problem Loans* (Level 4).
2. Program Development DP II
Program Development pada Direktorat DP II ditujukan untuk meningkatkan produktivitas Team Leader (TL) dan Relationship Manager (RM) melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan *salesmanship*.

E. Program Pengembangan Manajemen Talenta dan Suksesi

1. Manajemen Talenta
Pada tahun 2022, telah dilakukan *talent mapping* yang dikelompokkan berdasarkan aspek Kinerja dan Kompetensi.
 - Kinerja dinilai berdasarkan hasil Penilaian Kinerja dimana nilai yang digunakan adalah

D. Competency Improvement in the Framework of Business Growth

1. Credit Skill Certification
The Credit Skill Certification Program is an ongoing program since 2020. In the Credit Skill Certification, there are 4 (four) levels that must be completed by participants, namely Business Lending Fundamental (Level 1), Financial Accounting for Lenders (Level 2), Commercial Loans to Business/Small Business (Level 3) and Minimizing Problem Loans (Level 4).
2. Program Development DP II
The Development Program at the DP II Directorate is aimed at increasing the productivity of Team Leaders (TL) and Relationship Managers (RM) through increasing knowledge and salesmanship skills.

E. Talent Management and Succession Development Program

1. Talent Management
In 2022, talent mapping has been carried out which is grouped based on Performance and Competency aspects.
 - Performance is assessed based on the results of Performance Appraisal where the value used is the average of the last

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir. Namun jika Pegawai belum memiliki nilai selama 3 tahun, maka yang digunakan adalah nilai rata-rata penilaian yang dimiliki. Nilai rata-rata ini kemudian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu *High*, *Medium*, dan *Low*.

- Kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu.
- Adapun kompetensi yang perlu dimiliki oleh pegawai LPEI adalah sebagai berikut:

3 (three) years. However, if the employee has not had a grade for 3 years, then the average value of the assessment is used. This average value is then divided into 3 categories, namely High, Medium, and Low.

- Competence is a blend of knowledge, skills, and behaviors that must be possessed by a person occupying a particular position.
- The competencies that need to be possessed by employees are as follows:

Kompetensi Inti Core Competence	Kompetensi Fungsional Functional Competence	Kompetensi Teknis Technical Competence
• <i>Organizational Commitment</i> • <i>Integrity</i> • <i>Customer Oriented</i> • <i>Professionalism</i> • <i>Teamwork</i>	• <i>Analytical & Conceptual Thinking</i> • <i>Achievement Orientation</i> • <i>Relationship Building</i> • <i>Information Seeking</i> • <i>Organizational Awareness</i> • <i>Developing Others</i> • <i>Detail Orientation</i> • <i>Communication Skill</i> • <i>Conflict Management</i>	• <i>Strategic Management</i> • <i>Marketing & Customer Service</i> • <i>Financing, Accounting & Investment</i> • <i>Insurance & Actuary</i> • <i>Legal, Compliance, Audit & Risk Management</i> • <i>Human Capital</i> • <i>Business Support</i> • <i>Information Technology</i>

Untuk aspek Kompetensi dinilai berdasarkan hasil *assessment* terakhir yang dimiliki oleh pegawai. Hasil *assessment* ini dibagi menjadi 3, yaitu *Star*, *Performer*, dan *High Potential*. Hasil *talent mapping* yang dilakukan pada tahun 2022, pegawai yang termasuk kedalam kategori *Talent* adalah sebanyak 50 orang (2021: 81 orang), baik dari kelompok jabatan Kepala Divisi, Kepala Departemen, Eksekutif dan Pelaksana.

For the Competency aspect, the assessment is based on the results of the last assessment of employees. The results of this assessment are divided into 3, namely Star, Performer, and High Potential. The results of talent mapping conducted in 2022 for employees in the Talent category were 50 personnel (2021: 81 personnel), both from the position groups of Division Heads, Department Heads, Executives and Administrators.

Hasil Assesment Kategori Talent – 2022

Talent Category Assessment Results – 2022

The developments that have been given

Kategori Talent Talent Category	Jumlah Talent Number of Talents
<i>Star</i>	25
<i>Performer</i>	5
<i>High Potential</i>	20
Total	50

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Pengembangan yang telah diberikan kepada Talent selama tahun 2022 diantaranya adalah *Leadership, Communication Skill, Presentation Skill*, serta penguatan keterampilan teknis. Selain kepada *Talent*, program pengembangan juga diberikan kepada pegawai yang masuk dalam kategori *Under Performer*, dalam bentuk *coaching* dan/atau *mentoring*.

to Talent during 2022 include Leadership, Communication Skills, Presentation Skills, and strengthening technical skills. In addition to Talent, development programs are also given to employees who fall into the Under Performer category, in the form of coaching and/or mentoring.

2. Management Trainee: Leader For Tomorrow (LFT) dan Relationship Manager Development Program.

Untuk tahun 2022, LPEI menyelenggarakan 2 (dua) kali termin LFT dan 1 (satu) kali Relationship Manager Development Program dengan jumlah peserta total 55 orang karyawan, seperti tampak pada tabel berikut:

2. Management Trainee: Leader For Tomorrow (LFT) dan Relationship Manager Development Program.

For 2022, Indonesia Eximbank held 2 (two) LFT terms and 1 (one) Relationship Manager Development Program with a total of 55 employees, as shown in the following table:

Nama Program Program name	Periode Program Program Period	Jumlah Peserta	Kelulusan Peserta
<i>Leader For Tomorrow</i> (LFT) Angkatan I/Batch I	18 Januari 2021 – 17 Juli 2022 January 18, 2021 – July 17, 2022	15	14
<i>Leader For Tomorrow</i> (LFT) Angkatan II/Batch II	5 Juli 2021 - 4 Januari 2023 July 5, 2021 – January 4, 2023	20	19
<i>Relationship Manager Development Program</i> (RMDP)	17 Januari 2022 – 16 Juli 2023 January 17, 2022 – July 16, 2023	20	<i>On Going</i>

F. Pelatihan Keuangan Berkelanjutan [FS4] [OJK E.2, F.1]

Selain pengembangan kompetensi tersebut diatas, LPEI juga merealisasikan pengembangan kompetensi jajaran pegawai untuk mendukung implementasi program aksi keuangan berkelanjutan. Pelatihan Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sesuai Ketentuan Regulator diikuti oleh 7 orang peserta pada tanggal 20 – 21 September 2022.

F. Sustainable Finance Training [FS4] [OJK E.2, F.1]

Apart from the competency development mentioned above, Indonesia Eximbank also realizes the competency development of employees to support the implementation of sustainable finance action programs. The Training on the Implementation of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) in accordance with Regulatory Regulations was attended by 7 participants on 20 – 21 September 2022.

Selain pelatihan spesifik mengenai RAKB tersebut, LPEI mengirimkan tidak kurang dari 86 orang pegawai maupun jajaran manajemen untuk berpartisipasi pada berbagai program peningkatan kompetensi SDM pada aspek keuangan berkelanjutan di tahun 2022, mencakup diantaranya:

In addition to the specific training on RAKB, Indonesia Eximbank sent no less than 86 employees and management to participate in various HR competency improvement programs in sustainable finance aspects in 2022, including:

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

- Webinar Institute berjudul *The Impact of ESG on the performance of the Financial Services Industry*, penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan,
- Webinar *Green Economy Outlook 2022* “Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan Dalam Mewujudkan *Green Economy*”, penyelenggara Bisnis Indonesia;
- *The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy* – diselenggarakan oleh OJK.
- *ESG Trend & Economy Outlook* – oleh Moody’s.
- *The Principle of ESG & Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Assessment Fundamentals* – oleh Moody’s.
- *Navigating Supply Chain ESG dan Climate Risk in APAC*, oleh Moody’s
- *ESG integration into Credit & Sustainable Finance*, oleh Moody’s

- Webinar on Institute of The Impact of ESG on the performance of the Financial Services Industry, held by Financial Services Authority,
- Webinar on Green Economy Outlook 2022 “Indonesia’s Policy Direction and Challenges in Realizing Green Economy”, Indonesian Business organizers;
- The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy – held by OJK.
- ESG Trend & Economy Outlook – held by Moody’s.
- The Principle of ESG & Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Assessment Fundamentals – by Moody’s.
- Navigating Supply Chain ESG dan Climate Risk in APAC, by Moody’s
- ESG integration into Credit & Sustainable Finance, by Moody’s

Biaya Program Pelatihan dan Pengembangan SDM

Anggaran tahun 2022 yang disediakan untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan adalah sebesar Rp16,80 miliar (2021: Rp18,00 miliar). Hingga akhir tahun 2022, penyerapan anggaran adalah 107% (2021: 91%) atau senilai Rp17,97 miliar (2021: Rp16,49 miliar). Realisasi anggaran tahun 2022 lebih besar dari rencana, dikarenakan adanya tambahan program implementasi nilai-nilai budaya Lembaga yang baru yang tidak dianggarkan sebelumnya pada penyusunan anggaran tahun 2022.

HR Training and Development Program Budget

The 2022 budget provided for training and development activities was Rp16.80 billion (2021: Rp18.00 billion). Until the end of 2022, budget absorption was 107% (2021: 91%) or Rp17.97 billion (2021: Rp16.49 billion). The realization of the 2022 budget is greater than planned, due to the addition of a new program of implementation of the Institution’s cultural values that were not previously budgeted in the preparation of the 2022 budget.

PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR

Dalam rangka memastikan dijalankannya proses penilaian kinerja yang *fair*, adil dan transparan, telah dikeluarkan Internal Memo dari Kepala Divisi HRBP, Pengembangan Organisasi & Rekrutmen kepada Seluruh Kepala Unit Kerja untuk dilakukannya Pelaksanaan Performance Review Tahun 2022 dengan berdasarkan pada:

- Peraturan Direktur Eksekutif No. 0051/PDE/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta perubahannya pada Peraturan

PERFORMANCE APPRAISAL AND CAREER DEVELOPMENT

To ensure the implementation of a fair, equal and transparent performance appraisal process, an Internal Memo has been issued from the Head of HRBP, Organization Development & Recruitment Division to all Work Unit Heads for the implementation of the 2022 Performance Review based on:

- Executive Director Regulation No. 0051/PDE/2012 dated October 2, 2012 concerning the Work Performance Appraisal System for Employees of Indonesia Eximbank along with its amendments to

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Direktur Eksekutif No. 0024/PDE/07/2018.

- Dengan berubahnya Corporate Values, maka terkait dengan implementasi budaya kerja lembaga yang baru mengacu pada PDE No. 0010/PDE/07/2022 tentang Nilai-Nilai Budaya LPEI, terdapat penyesuaian terhadap penilaian perilaku Pegawai yang tertuang di dalam form penilaian prestasi kerja Pegawai.

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

A. Manajemen Kinerja

Pelaksanaan manajemen kinerja dilakukan secara *end to end* melalui HRIS, mulai dari perencanaan, *monitoring*, hingga evaluasi. Data pencapaian kinerja kemudian dikombinasikan dengan data kompetensi pegawai untuk selanjutnya pegawai dikategorikan berdasarkan kelas *talent*-nya. Pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi diikutsertakan dalam *talent development program*, sementara pegawai yang masuk dalam kategori kinerja dan kompetensi rendah diikutsertakan dalam *performance improvement program*.

Beberapa hal yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam pengelolaan manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi pengisian RKI melalui *system*;
2. Pengisian RKI melalui HRIS;
3. Penetapan *rating* kinerja periode 2021, yang ditindaklanjuti dengan pemetaan pegawai berdasarkan klasifikasi *talent*;
4. Pelaksanaan *mid year review*;
5. Pelaksanaan *Talent Development Program* dan *Performance Improvement Plan*;
6. Perubahan nilai perilaku kerja dari TRUST menjadi APIK;
7. Sosialisasi pengisian *performance evaluation* periode 2022 dengan kompetensi perilaku kerja APIK;
8. Pelaksanaan *performance evaluation* periode 2022.

Executive Director Regulation No. 0024/PDE/07/2018.

- With the change in Corporate Values, related to the implementation of the new institutional work culture referring to PDE No. 0010/PDE/07/2022 concerning Indonesia Eximbank Cultural Values, adjustments are made to the assessment of employee behavior contained in the employee performance assessment form.

The implementation is as follows.

A. Performance Management

The implementation of performance management is carried out *end to end* through HRIS, starting from planning, monitoring, to evaluation. Performance achievement data is then combined with employee competency data for further employees to be categorized based on their talent class. Employees who have high competence and performance are included in the talent development program, while employees who fall into the performance and low competency categories are included in the performance improvement program.

The following are some of the actions taken in 2022 to manage performance management:

1. Implementation of socialization of RKI filling through the system;
2. RKI charging through HRIS;
3. Determination of performance ratings for the 2021 period, which is followed up by mapping employees based on talent classification;
4. Implementation of mid-year review;
5. Implementation of the Talent Development Program and Performance Improvement Plan;
6. Change in the value of work behavior from TRUST to APIK;
7. Socialization of filling in the performance evaluation for the 2022 period with the competence of APIK work behavior;
8. Implementation of performance evaluation for the 2022 period.

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT**B. Performance Review**

Performance review dilakukan sebagai sarana *coaching* dan *mentoring*, diskusi pencapaian kinerja individu, dan rencana pengembangan pribadi pegawai. Hasil *performance review* bagi pegawai akan berpengaruh antara lain pada besaran jasa produksi, kenaikan gaji, kesempatan promosi, kesempatan memperoleh pelatihan khusus, dan pinjaman pegawai. Adapun skema distribusi normal penilaian pegawai LPEI berdasarkan pencapaian kinerja lembaga adalah sebagai berikut:

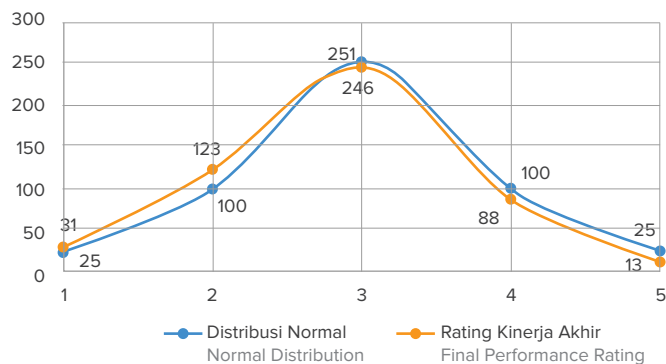
Nilai Pencapaian Lembaga Institution Achievement Value	Kurang Baik Not Good	Cukup Baik Moderate	Baik Good	Memuaskan Satisfactory	Istimewa Exceptional
>100%	5%	10%	50%	30%	5%
80% < X < 100% *)	5%	20%	50%	20%	5%
70% < X < 80%	22%	52%	17%	5%	4%
< 70%	27%	56%	12%	3%	2%

Selanjutnya terhadap hasil penilaian kinerja yang telah dilaksanakan, dilakukan kalibrasi sesuai dengan target lembaga. Dari hasil kalibrasi, total *headcount* pegawai yang berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 501 orang, dengan rincian sebagai berikut:

B. Performance Review

Performance reviews are conducted as a means of coaching and mentoring, discussion of individual performance achievements, and employee personal development plans. The results of performance reviews for employees will affect among others the amount of production services, salary increases, promotion opportunities, opportunities to obtain special training, and employee loans. The normal distribution scheme for the assessment of employees based on the achievement of institutional performance is as follows:

Furthermore, the results of the performance appraisal that have been carried out are calibrated in accordance with the Institution's targets. From the calibration results, the total headcount of employees who managed to collect values was 501 personnel, with the following details:

Sebaran Normal dan Rating Kinerja Akhir**Normal Distribution and Final Performance Rating**

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Kelompok PA PA Group	Range Nilai Range of Scores	Jumlah Total	Persentase Percentage
Istimewa (1) Exceptional (1)	>115	31	6%
Memuaskan (2) Satisfactory (2)	$105 \leq X \leq 115$	123	25%
Baik (3) Good (3)	$95 \leq X < 105$	246	49%
Cukup (4) Moderate (4)	$85 \leq X < 95$	88	18%
Kurang (5) Not Good (5)	< 85	13	3%
Total		501	100%

Selama tahun 2022, seluruh pegawai (100%) telah dinilai kinerjanya dengan dukungan implementasi Human Resources Information System. [GRI 404-3]

During 2022, all employees (100%) have been assessed for their performance with the support of the Human Resources Information System. [GRI 404-3]

Pengembangan Jenjang Karir

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif, dengan salah satu tugasnya adalah pengangkatan dan pemberhentian Pegawai.

Career Development

In accordance with article 29 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 concerning the Indonesia Eximbank, the Institution's operational activities are carried out by the Executive Director, with one of duties being the appointment and dismissal of employees.

Dalam implementasinya, selama Pegawai bekerja di LPEI, terjadi pergerakan karir atau mutasi, baik berupa perubahan Kelompok Jabatan maupun perubahan Golongan Jabatan.

In its implementation, during the employee's work at Indonesia Eximbank, a career movement or mutation is available, both in the form of changes in Position Group and changes in Position Class.

Seiring dengan dinamika organisasi dan dalam upaya untuk menciptakan kebijakan pengembangan karir Pegawai yang berkinerja tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada yakni PDE No. 0054/PDE/11/2019 tentang Mutasi Pegawai yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Standar Pedoman Sumber Daya Manusia No. 0024/PDE/10/2022 tentang Mutasi Pegawai yang telah ditetapkan dan diberlakukan sejak 27 Oktober 2022.

Along with organizational dynamics and in an effort to create a career development policy for high-performing employees, it is necessary to make adjustments to the existing policy, namely PDE No. 0054/PDE/11/2019 concerning Employee Mutation which was later revoked and declared no longer valid and replaced with Human Resources Guideline Standard No. 0024/PDE/10/2022 on Employee Mutation which has been established and enforced since October 27, 2022.

Tujuan penyesuaian ini adalah untuk mengatur kriteria dan mekanisme pergerakan karir Pegawai, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap dengan ruang lingkup yang mencakup namun tidak terbatas pada rangkap jabatan, pejabat *alternate*, promosi, demosi, progresi, regresi dan rotasi.

The purpose of this adjustment is to regulate the criteria and mechanisms for employee career movements, both temporary and permanent with a scope that includes but is not limited to concurrent positions, alternate officials, promotions, demotions, progressions, regressions and rotations.

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Penerapan mutasi ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kinerja LPEI melalui penempatan orang yang tepat pada Jabatan yang tepat dengan mengacu pada kompetensi dan kualifikasi jabatan dengan mendorong pengembangan karir Pegawai dari sumber daya internal sebagai bentuk *rewards* dan retensi kepada Pegawai yang berkinerja tinggi.

Dalam pelaksanaannya, tentu LPEI memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan organisasi, kinerja dan kompetensi Pegawai, kesesuaian terhadap kualifikasi jabatan yang mencakup pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, kepangkatan Pegawai dan pendidikan khusus (sertifikasi), termasuk namun tidak terbatas pada keahlian khusus atau spesialisasi Jabatan, memperhatikan masa Jabatan Pegawai; dan yang terutama adalah implementasi manajemen talenta.

Terdapat 2 (dua) jenis mutasi, yakni:

1. Mutasi bersifat tetap dalam bentuk:
 - Promosi, yaitu perubahan jabatan pegawai dari kelompok jabatan yang lebih rendah ke kelompok jabatan yang lebih tinggi
 - Progresi, yaitu perubahan golongan pegawai (*personal grading*) dari golongan pegawai yang lebih rendah ke golongan pegawai yang lebih tinggi
 - Demosi yaitu perubahan jabatan pegawai dari kelompok jabatan yang lebih tinggi ke kelompok jabatan yang lebih rendah
 - Regresi yaitu perubahan golongan pegawai (*personal grading*) dari golongan pegawai yang lebih tinggi ke golongan pegawai yang lebih rendah
 - Rotasi yaitu perubahan jabatan pegawai dalam kelompok jabatan yang sama
2. Mutasi bersifat sementara diatur dengan tujuan untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh kekosongan pemangku jabatan definitif karena berhalangan hadir oleh sebab tertentu, termasuk

The application of this mutation certainly aims to improve Indonesia Eximbank's performance through the placement of the right person in the right position by referring to the competence and qualifications of the position by enforcing employee career development from internal resources as a form of rewards and retention to high-performing employees.

In its implementation, of course, Indonesia Eximbank pays attention to the principles of organizational needs, employee performance and competence, suitability to position qualifications which include work experience, educational background, employee rank and special education (certification), including but not limited to special skills or position specialization, paying attention to the tenure of employees; and the main thing is the implementation of talent management.

There are 2 (two) types of mutations, as follows:

1. Mutations are fixed in the form of:
 - Promotion, which is the change of employee position from a lower position group to a higher position group
 - Progression, namely the change in the class of employees (*personal grading*) from a lower class of employees to a higher class of employees
 - Demotion is the change of position of employees from a higher position group to a lower position group
 - Regression is the change in employee class (*personal grading*) from a higher employee group to a lower employee group
 - Rotation is a change in the position of employees in the same position group
2. Mutations are temporary arranged with the aim of filling vacancies caused by the vacancy of definitive office holders due to inability to attend for certain reasons, including but not limited to official travel,

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

namun tidak terbatas pada perjalanan dinas, cuti, mengikuti program pelatihan, maupun karena sakit.

Keputusan pelaksanaan mutasi dilakukan melalui matriks kewenangan mutasi yang dibuat berdasarkan kelompok jabatan dan dituangkan ke dalam Surat Keputusan dengan ketentuan:

1. Apabila kewenangan memutus mutasi berada pada Direktur Eksekutif dan/atau Dewan Direktur, Keputusan Mutasi akan dituangkan dalam Keputusan Direktur Eksekutif;
2. Apabila kewenangan memutus mutasi berada pada pejabat di bawah Direktur Eksekutif, Keputusan Mutasi akan dituangkan dalam Keputusan Direktur Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Eksekutif.

REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN [OJK F.20], [GRI 401-2, 202-1]

LPEI memberikan remunerasi kepada para pegawai berdasarkan peran dan tanggung jawab, masa kerja dan penilaian kinerja berupa gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Adapun paket remunerasi pegawai LPEI diberikan dengan dasar kebijakan sebagai berikut:

1. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah terkait
2. UU 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Perusahaan LPEI yang disahkan oleh Disnaker melalui SK Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000/220401004/B/IV/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan LPEI
4. Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0055/PDE/11/2019 tentang Remunerasi Pegawai
5. Keputusan Direktur Eksekutif Nomor 0158/KDE/11/2019 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai

Struktur remunerasi pegawai LPEI dikaji ulang secara berkala untuk disesuaikan dengan situasi di pasar sehingga dapat terus bersaing dan memenuhi peraturan-

leave, participating in training programs, or due to illness.

The decision on the implementation of mutation is carried out through a matrix of mutation authority made based on position groups and stated in the Decree with the following conditions:

1. If the authority to decide the mutation lies with the Executive Director and/or the Board of Directors, the Mutation Decision will be stated in the Executive Director's Decree;
2. If the authority to decide the mutation rests with an officer under the Executive Director, the Mutation Decision will be stated in the Managing Director's Decree with a copy to the Executive Director.

REMUNERATION AND WELFARE [OJK F.20], [GRI 401-2, 202-1]

Indonesia Eximbank provides remuneration to employees based on roles and responsibilities, length of service and performance appraisal in the form of basic salary, benefits, and other facilities. The remuneration package for employees is given on the basis of the following policies:

1. Law 11 of 2020 concerning Job Creation and related Government Regulations
2. Law 13 of 2002 concerning Manpower
3. Institution Regulation ratified by Disnaker through the Decree of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia No. KEP.4/HI.00.00/00.0000/220401004/B/IV/2022 on the Ratification of the Institution Regulations
4. Executive Director Regulation No. 0055/PDE/11/2019 on Employee Remuneration
5. Executive Director Decree No. 0158/KDE/11/2019 on Determination of Employee Remuneration

The remuneration structure of Indonesia Eximbank employees is reviewed regularly to be adjusted to the situation in the market to enable them to continue to

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

peraturan yang berlaku. Struktur remunerasi LPEI juga senantiasa mematuhi peraturan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR).

LPEI juga menerapkan kesamaan dalam menetapkan struktur remunerasi, tanpa membedakan gender. Sehingga tidak ada perbedaan signifikan pada gaji pokok antara pegawai laki-laki dengan pegawai perempuan pada level jabatan yang sama. [GRI 405-2]

compete and comply with applicable regulations. Indonesia Eximbank's remuneration structure also always complies with regulations related to the Provincial Minimum Wage (UMP) and Regional Minimum Wage (UMR).

Indonesia Eximbank also applies equality in establishing the remuneration structure, regardless of gender. Hence, there is no significant difference in basic salary between male and female employees at the same position level. [GRI 405-2]

Tabel Perbandingan Standar Upah Karyawan Terendah Terhadap UMR, 2022
Comparison of Lowest Employee Wage Standards Against UMR, 2022

Area Operasional Operational Area	Provinsi/Daerah Province/Region	Upah Minimum Provinsi/Regional Provincial/Regional Minimum Wage	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Lowest Level Employee Benefits	Perbandingan Comparison
Jakarta	DKI Jakarta	4.641.854	7.500.000	1,62
Medan	Sumatera Utara	2.522.609	13.833.083	5,48
Surabaya	Jawa Timur	1.891.567	13.104.713	6,93
Makassar	Sulawesi Selatan	3.165.876	9.386.999	2,97
Surakarta	Jawa Tengah	1.812.935	13.392.062	7,39
Balikpapan	Kalimantan Timur	3.014.497	13.460.540	4,47
Batam	Kepulauan Riau	3.050.172	12.954.140	4,25
Denpasar	Bali	2.516.971	12.674.986	5,04

Adapun komponen remunerasi dan fasilitas yang LPEI sediakan adalah sebagai berikut:

1. Kompensasi Tetap;
2. Penghasilan lainnya;
3. Manfaat; dan
4. Fasilitas.

Terdapat perbedaan paket remunerasi pegawai LPEI dengan pegawai *outsourcing* (Tenaga Alih Daya). Hal ini dikarenakan pegawai TAD secara de jure adalah pegawai Koperasi LPEI sementara pegawai tetap adalah pegawai LPEI yang masing-masing mengikuti ketentuan remunerasi institusi yang menaunginya.

Secara umum LPEI telah menerapkan kebijakan *Performance Rewards* dalam memberikan remunerasi pegawai. Namun demikian LPEI juga menyediakan skema

The components of remuneration and facilities provided by Indonesia Eximbank are as follows:

1. fixed compensation;
2. Other income;
3. Benefit; and
4. Facilities.

There are differences in the remuneration package of Indonesia Eximbank employees with outsourced personnel. This is because outsourced personnel are de jure employees of the Indonesia Eximbank Cooperative while permanent employees are employees of Indonesia Eximbank, each of which follows the remuneration provisions of the institution under it.

In general, Indonesia Eximbank has implemented a Performance Rewards policy in providing employee

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

remunerasi dan *benefit* lain yang berbentuk *variable pay* untuk mendukung pencapaian bisnis bagi pegawai tetap dan pegawai kontrak sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut: [GRI 401-2]

remuneration. However, Indonesia Eximbank also provides remuneration schemes and other benefits in the form of variable pay to support business achievements for permanent employees and contract employees as illustrated in the following table: [GRI 401-2]

Paket Remunerasi LPEI [GRI 401-2]

Indonesia Eximbank Remuneration Package [GRI 401-2]

Remunerasi dan Manfaat bagi Karyawan Remuneration and Benefits for Employees	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Kontrak Contract Employees
Upah & Gaji Wages & Salary	✓	✓
Tunjangan Frontline Frontline Allowance	✓	✓
Tunjangan Cuti Leave Allowance	✓	✓
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	✓	✓
Penghargaan loyalitas Loyalty rewards	✓	X
Upah Lembur & Makan Lembur Overtime Pay & Overtime Meal	✓	✓
Program Insentif Incentive Program	✓	✓
Tunjangan Haji dan Umrah Hajj and Umrah Allowance	✓	✓
Tunjangan daerah & penugasan Regional allowances & assignments	✓	✓
Santunan Pernikahan/ Kelahiran/ Kematian Marriage/ Birth/ Death Compensation	✓	✓
Bantuan Biaya Pendidikan Anak Child Education Fee Assistance	✓	✓
Kecelakaan Kerja Work Accidents	✓	✓
Asuransi Kematian di Tempat Kerja & Luar Tempat Kerja Workplace & Outside Workplace Death Insurance	✓	✓
Asuransi Kesehatan Bagi Karyawan Health Insurance for Employees	✓	✓
Asuransi Kesehatan bagi Pasangan Karyawan Health Insurance for Spouse of Employee	✓	✓
Asuransi Kesehatan bagi Anak Karyawan Health Insurance for Children of Employees	✓	✓
Hak Cuti Leave Entitlement	✓	✓
Cuti Melahirkan Maternity Leave	✓	✓
Cuti Haid Menstrual Leave	✓	✓
Cuti karena Keguguran untuk Wanita Leave for Miscarriage for Women	✓	✓
Cuti untuk Pria karena Kelahiran Anak Paternity Leave	✓	✓
Cuti Ibadah Religious Leave	✓	✓
izin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Gaji Unpaid Leave	✓	X
Program Pembiayaan Karyawan untuk Rumah dan atau Kendaraan Employee Financing Program for Home and/or Vehicle	✓	X
Dana Pensiun Pension Fund	✓	X
Pesangon Severance	✓	X

Sebagai wujud penerapan kebijakan *Performance Reward*, pada tahun 2022 LPEI melakukan penyesuaian Gaji Pokok pegawai rata-rata sebesar 4,84% yang diberikan kepada 486 pegawai yang *eligible*, yaitu yang telah memiliki *performance appraisal* (PA) tahun 2021. Kenaikan gaji dilakukan pada bulan Oktober 2022 dan

As a form of implementing the Performance Reward policy, in 2022 Indonesia Eximbank made an adjustment to the average employee Base Salary of 4.84% which was given to 486 eligible employees, namely those who already had a performance appraisal (PA) in 2021. The salary increase was made in October 2022 and is effective from

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2022. Formulasi kenaikan Gaji Pokok tersebut dilakukan berdasarkan matriks antara nilai PA tahun 2021 dan posisi *percentile* Gaji Pokok pegawai secara internal. Perincian pegawai yang memperoleh kenaikan Gaji Pokok tahun 2022 yaitu:

- 274 pegawai memperoleh kenaikan Gaji Pokok di atas rata-rata.
- 135 pegawai memperoleh kenaikan Gaji Pokok sesuai rata-rata.
- 63 pegawai memperoleh kenaikan Gaji Pokok di bawa rata-rata.
- 14 pegawai tidak memperoleh kenaikan Gaji Pokok karena hasil PA di kategori 'Kurang' atau karena posisi *percentile* Gaji Pokok secara internal sudah berada di posisi P-100 (maksimal).

Pada tahun 2022 LPEI membagikan Jasa Produksi Tahun 2021, yang diputuskan oleh Komite Personalia melalui Risalah Rapat *Board of Management* LPEI Nomor MR.0021/CEO/08/2022 pada tanggal 9 Agustus 2022. Pembagian Jasa Produksi Pegawai tahun 2021 berdasarkan Kelompok Prestasi Kerja Pegawai (PA) tahun 2021 dengan faktor pengali Gaji Pokok terhadap posisi Gaji Pokok per 31 Desember 2021. Adapun total Jasa Produksi Tahun 2021 yang dialokasikan untuk dibagikan kepada para pegawai adalah sebesar Rp11.247.165.746.

Cuti Melahirkan [GRI 401-3]

LPEI memberikan hak cuti melahirkan bagi pegawai perempuan selama 3 (tiga) bulan dan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk kembali bekerja dan menempati posisi kerja sebelumnya. Cuti yang diambil pegawai tersebut tidak memengaruhi posisi dan remunerasinya setelah kembali bekerja. Cuti melahirkan diperoleh tanpa mengurangi hak cuti tahunan maupun hak cuti besar Pegawai yang bersangkutan. Namun pengambilan hak cuti besar dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah cuti melahirkan.

Selama tahun 2022, pegawai perempuan yang mengajukan cuti melahirkan ada 12 orang (2021: 22 orang)

September 1, 2022. The formulation of the Basic Salary increase is based on a matrix between the PA value in 2021 and the percentile position of the employee's Base Salary internally. Details of employees who received a Basic Salary increase in 2022 are:

- 274 employees earned an above-average increase in Base Salary.
- 135 employees received an increase in Basic Salary according to the average.
- 63 employees earned an increase in basic salary brought to average.
- 14 employees did not receive a Base Salary increase because the PA results were in the 'Less' category or because the Base Salary percentile position internally was already in the P-100 (maximum) position.

In 2022, Indonesia Eximbank distributed Production Services for 2021, which was decided by the Personnel Committee through the Minutes of Meeting of the Board of Management of Indonesia Eximbank No. MR.0021/CEO/08/2022 on August 9, 2022. Distribution of Employee Production Services in 2021 based on the Employee Work Performance Group (PA) in 2021 with the factor of Multiplier of Base Salary against Basic Salary positions as of December 31, 2021. The total Production Services in 2021 allocated to be distributed to employees was Rp11,247,165,746.

Maternity Leave [GRI 401-3]

Indonesia Eximbank provides maternity leave rights for female employees for 3 (three) months and provides flexibility for them to return to work and occupy their previous work positions. The leave taken by the employee does not affect position and remuneration after returning to work. Maternity leave is obtained without prejudice to annual leave entitlements or major leave entitlements of the employee concerned. However, taking large leave entitlements can be done no earlier than 1 (one) year after maternity leave.

During 2022, 12 female employees applied for maternity leave (2021: 22 people) and 11 of them were able to

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

dan 11 diantaranya sudah dapat kembali bekerja di tahun 2022, sementara 1 orang Kembali masuk kerja pada bulan Januari 2023, setelah menyelesaikan periode cutinya. Artinya 100% pegawai telah bekerja kembali setelah pelaksanaan cuti. LPEI belum menerapkan cuti parental atau cuti ayah untuk pegawai laki-laki.

PENSIUN DAN PERSIAPAN PENSIUN

[GRI 201-3, 404-2]

LPEI menyelenggarakan pelatihan berwirausaha serta Program Masa Persiapan Pensiun sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Kegiatan pelatihan berwirausaha tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesiapan mental pegawai dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada saat pensiun serta memberikan motivasi untuk tetap optimis, memiliki paradigma yang positif sebagai pensiunan serta dapat mengelola waktu yang tersedia untuk tetap hidup dengan semangat.

Program Masa Persiapan merupakan program yang tidak mewajibkan pegawai untuk berada di lingkungan kerja namun tetap mendapatkan upah dan *benefit* sebagai pegawai, yang dapat diambil oleh pegawai yang menginginkannya. Program tersebut diberikan untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan sebelum usia pensiun.

Selama tahun 2022, tidak terdapat pegawai yang mengikuti program pelatihan persiapan masa pensiun. Adapun program pelatihan persiapan masa pensiun telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, dengan akumulasi peserta selama periode 2014 – 2022 adalah sejumlah 28 orang pegawai. [GRI 201-3, 404-2]

Selain pelatihan menjelang pensiun, sebagai persiapan pensiun, LPEI juga mengikutsertakan pegawai dalam program pensiun yaitu program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, setiap pegawai akan

return to work in 2022, while 1 person returned to work in January 2023, after completing their leave period. This means that 100% of employees have returned to work after the implementation of leave. Indonesia Eximbank has not implemented parental leave or paternity leave for male employees.

RETIREMENT AND ITS PREPARATION

[GRI 201-3, 404-2]

Indonesia Eximbank organizes entrepreneurial training and the Retirement Preparation Program as a form of appreciation and concern for employees who are about to retire. The entrepreneurial training activity is aimed at improving the mental readiness of employees in facing changes that occur at retirement and providing motivation to remain optimistic, have a positive paradigm as a retiree and be able to manage the time available to stay alive with enthusiasm.

The Preparatory Period Program is a program that does not require employees to be in the work environment but still gets wages and benefits as employees, which can be taken by employees who want it. The program is given for a minimum period of 3 (three) months and a maximum of 6 (six) months before retirement age.

During 2022, no employees participated in the retirement preparation training program. The retirement preparation training program has been implemented in recent years, with the accumulation of participants during the period 2014 – 2022 was 28 employees. [GRI 201-3, 404-2]

In addition to training before retirement, as preparation for retirement, Indonesia Eximbank also involves employees in pension programs, namely the Financial Institution Pension Fund (DPLK) program and the BPJS Employment Pension Security Program (JP). Thus, every employee will

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

mendapat manfaat (dana) pensiun pada saat memasuki usia purna bakti yang dapat mereka gunakan sebagai modal berwirausaha maupun melakukan kegiatan produktif lainnya di masa pensiunnya.

Seluruh pegawai tetap didaftarkan program pensiun antara lain :

- Dana Pensiun yang dikelola DPLK
- BPJS Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan

LPEI berkontribusi bagi pembayaran premi iuran program pensiun tersebut, dengan besaran sebagai berikut. [GRI 201-3]

get pension benefits (funds) when entering retirement age which they can use as entrepreneurial capital or carry out other productive activities in retirement.

All permanent employees are registered for the pension program, including:

- Pension Fund managed by DPLK
- BPJS Pension by BPJS Employment

Indonesia Eximbank contributes to the payment of premium contributions to the pension plan, with the following amounts. [GRI 201-3]

Program Pensiun Pension Plan	Iuran Lembaga Institution Dues	Iuran Pegawai Employee Dues
BPJS Jaminan Pensiun BPJS Pension Insurance	3% Gaji 3% Salary	0% Gaji 0% Salary
Iuran Dana Pensiun (DPLK) Pension Fund Contribution (DPLK)	6% Gaji 6% Salary	4% Gaji 4% Salary

DIGITALISASI PENGELOLAAN SDM

Sebagai respons terhadap berkembangnya wacana era Industri 4.0, LPEI secara bertahap telah melakukan pembaharuan pada sistem kerja SDM menuju ke arah digitalisasi. LPEI menerapkan pembaharuan dan pengalihan fungsi tugas manual menjadi digital dengan memaksimalkan fungsi *Employee Self Service*, beberapa diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan absensi digital dengan menggunakan aplikasi *Employee Self Service*. Hal ini dilakukan untuk mendukung fleksibilitas kerja pegawai di era pandemi COVID-19 dalam rangka menunjang efektivitas dan produktivitas pegawai. Absensi secara digital juga mampu melakukan perekaman lokasi secara otomatis.
2. Pembaharuan database kepegawaian menjadi digital pada *Employee Self Service*. Data umum kepegawaian LPEI saat ini dapat diakses secara real time dan dapat diakses dari mana saja, sehingga proses pelaporan kepegawaian yang dibutuhkan menjadi lebih mudah, cepat dan akurat.

DIGITIZATION OF HR MANAGEMENT

In response to the development of the discourse of the Industry 4.0 era, Indonesia Eximbank has gradually updated the HR work system towards digitalization. Indonesia Eximbank implements the renewal and transfer of manual task functions to digital by maximizing the *Employee Self Service* function, some of which are:

1. Implementation of digital attendance using the *Employee Self Service* application. This is done to support employee work flexibility in the era of the COVID-19 pandemic to support employee effectiveness and productivity. Digital attendance is also capable of recording location automatically.
2. Updating the staffing database to digital in *Employee Self Service*. Indonesia Eximbank's general personnel data can now be accessed in real time and can be accessed from anywhere, to enable the required personnel reporting process to become easier, faster and more accurate.

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

3. Pelaksanaan pelatihan daring. LPEI juga telah mengaplikasikan kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi dengan memberikan pelatihan daring kepada pegawai. Laporan keikutsertaan pegawai pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan juga dapat diakomodir secara otomatis pada website *Employee Self Service*, sehingga memberikan kemudahan dan keakuratan secara bersamaan.
4. Pelaksanaan proses klaim pegawai secara digital. Pembaharuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas pegawai saat melakukan pengajuan klaim fasilitas pegawai. Pegawai dapat melakukan pengajuan klaim secara mandiri serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan mengakses *website* maupun aplikasi *Employee Self Service*.

3. Implementation of online training. Indonesia Eximbank has also applied the convenience offered by digitalization by providing online training to employees. Reports on employee participation in trainings held can also be accommodated automatically on the Employee Self Service website, thus providing convenience and accuracy at the same time.
4. Implementation of the employee claims process digitally. This update is intended to increase employee flexibility when submitting employee facility claims. Employees can submit claims independently and can be done anywhere and anytime by accessing the Employee Self Service website or application.

PENGEMBANGAN HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM (HRIS)

Sepanjang tahun 2022, LPEI juga telah melakukan *enhancement* HRIS sebagai kelanjutan pembangunan otomasi sistem kepegawaian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. *Enhancement* HRIS ini dilakukan karena adanya kebutuhan *improvement* dari Divisi HR Services & People Development dan Divisi HRBP & Recruitment pada Aplikasi HRIS guna keperluan otomasi HR Processes termasuk korespondensi kepegawaian, pinjaman, pembukuan dan lainnya, serta keperluan dalam penyempurnaan terhadap HR Reports termasuk HR Dashboards, Salary Reports, hasil survey, serta penyempurnaan data *Employee Informations*.

Adapun *enhancement* HRIS dimulai pada bulan Juni 2022 dan *go live* pada bulan September 2022. Ruang lingkup *enhancement* HRIS tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan *interface* dari Payroll Journal HRIS ke Core Banking (UBS).
2. Pembuatan *custom Loan Request*.
3. *Enhancement Monthly Salary Report*.
4. Kustomisasi menu Career Transition sebagai *drafting* surat KDE Mutasi Pegawai.
5. Kustomisasi menu *Employee Resume*.

HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM (HRIS) DEVELOPMENT

Throughout 2022, Indonesia Eximbank has also carried out HRIS enhancements as a continuation of the development of personnel system automation that has been carried out in the previous year. The HRIS enhancement is carried out because of the need for improvement from the HR Services & People Development Division and HRBP & Recruitment Division in the HRIS Application for the purposes of HR Processes automation including personnel correspondence, loans, bookkeeping and others, as well as the need for improvements to HR Reports including HR Dashboards, Salary Reports, survey results, and improvements to Employee Information data.

The HRIS enhancement began in June 2022 and went live in September 2022. The scope of HRIS enhancement in 2022 is as follows:

1. Creation of interface from Payroll Journal HRIS to Core Banking (UBS).
2. Creating a custom Loan Request.
3. Enhancement of Monthly Salary Report.
4. Customize the Career Transition menu as a drafting of the Employee Mutation of KDE letter.
5. Customize the Employee Resume menu.

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

6. *Enhancement* pengajuan cuti pegawai yang dikoneksikan dengan klaim tunjangan cuti tahunan.
7. *Enhancement employee search* dengan penambahan nama Divisi dan Departemen.
8. Pembuatan *Letter Template* dalam rangka otomasi korespondensi di HR.
9. *Enhancement* modul *Employee Information* dengan penambahan *Job Description*.
10. *Enhancement* hasil *Survey* dan digunakan untuk pelaksanaan *Exit Interview Form* bagi pegawai yang keluar dari LPEI.
11. *Dashboard* Divisi HR Services & People Development.

Sejak diselesaikannya *enhancement* HRIS dimaksud, dirasakan manfaat langsung oleh user/admin user karena memberikan percepatan terhadap *service level agreement* (SLA) proses HR, antara lain:

1. Perbaikan *service level agreement* (SLA) penyelesaian input jurnal pembukuan pada UBS.
2. Perbaikan SLA penyelesaian administrasi pinjaman.
3. Perbaikan SLA untuk pemenuhan resume kepegawaian untuk pelaporan internal/eksternal.
4. Perbaikan SLA untuk permintaan *job description* posisi pegawai.
5. Perbaikan proses bisnis pengajuan tunjangan cuti pegawai, yang diintegrasikan dengan jumlah cuti yang akan diambil.
6. Perbaikan SLA permohonan informasi detail kepegawaian, dibagi berdasarkan divisi dan departemen.
7. Perbaikan SLA pelaporan jumlah partisipan pelatihan.
8. Perbaikan SLA pelaporan progres pengisian *Performance Appraisal* dan hasil final *Performance Appraisal* yang ditampilkan berdasarkan Divisi maupun lembaga.
9. Perbaikan SLA pemenuhan kebutuhan surat-surat kepegawaian.

PENGHARGAAN PENGELOLAAN SDM

Pada bulan Agustus 2022 lalu, LPEI berpartisipasi dalam kompetisi *Stellar Workplace Award* yang diadakan

6. *Enhancement* applied for employee leave connected to claims for annual leave allowances.
7. *Enhancement* of employee search with the addition of Division and Department names.
8. Making *Letter Template* in order to automate correspondence in HR.
9. *Enhancement* of *Employee Information* module with the addition of *Job Description*.
10. *Enhancement* of survey results and used for the implementation of *Exit Interview Form* for employees who leave LPEI.
11. *Dashboard* of HR Services & People Development Division.

Since the completion of the HRIS enhancement, direct benefits have been felt by the user/admin user as it accelerates the service level agreement (SLA) of the HR process, as follows:

1. Improvement of service level agreement (SLA) for the completion of bookkeeping journal input at UBS.
2. Improvement of loan administration settlement SLA.
3. SLA improvement for employment resume fulfillment for internal/external reporting.
4. SLA improvements for employee position job description requests.
5. Improvement of the business process of applying for employee leave benefits, which is integrated with the amount of leave to be taken.
6. SLA revision of requests for detailed personnel information, divided by division and department.
7. Improved SLA reporting on the number of trainees.
8. SLA improvements to reporting the progress of filling out *Performance Appraisal* and final *Performance Appraisal* results displayed by Division and institution.
9. Improvement of SLA to meet the needs of employment letters.

HR MANAGEMENT AWARD

In August 2022, Indonesia Eximbank participated in the *Stellar Workplace Award* competition held by an

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCE COMPETENCIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

oleh lembaga independen yaitu Kontan Business & Investment Media bersama One GML. Adapun tujuan keikutsertaan pada kompetisi ini adalah mengevaluasi dan mengidentifikasi organisasi sebagai tempat kerja idaman serta pegawai dengan keterikatan kuat dan juga mengidentifikasi *people digital readiness*.

Dari 27 Perusahaan yang mengikuti kompetisi ini, LPEI mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang menunjukkan komitmen yang luar biasa melalui bukti penerapan program-program HR & *Engagement* yang ditujukan untuk pertumbuhan dan *sustainability* Lembaga. Hasil yang membanggakan bagi Indonesia Eximbank adalah pada kesempatan tahun 2022 mendapat 2 penghargaan sebagai pengakuan industri kepada Lembaga yaitu:

1. *Stellar Workplace Recognition In Employee Commitment*
2. *Stellar Workplace Recognition In Employee Satisfaction*

Kedua penghargaan diterima langsung oleh Head of Kepatuhan, SDM dan Transformasi Lembaga pada tanggal 29 September 2022 bertempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

independent institution, Kontan Business & Investment Media with One GML. The purpose of participation in this competition is to evaluate and identify the organization as a dream workplace and employees with strong attachments and also identify people digital readiness.

Of the 27 companies that participated in this competition, Indonesia Eximbank received recognition as an organization that showed extraordinary commitment through evidence of the implementation of HR & Engagement programs aimed at the growth and sustainability of the Institution. A proud result for Indonesia Eximbank is that on the occasion of 2022 it received 2 awards as industry recognition to the Institution, namely:

1. Stellar Workplace Recognition In Employee Commitment
2. Stellar Workplace Recognition In Employee Satisfaction

Both awards were received directly by the Head of Compliance, HR and Institutional Transformation on September 29, 2022 at the JS Luwansa Hotel, Jakarta.

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [OJK F.21]

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS [OJK F.21]



Komitmen dan Kebijakan [GRI 3-3]

LPEI berkomitmen penuh untuk memenuhi ketentuan Pemerintah melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bagi para pegawai. LPEI juga berkomitmen penuh untuk memenuhi ketentuan Pemerintah mengenai kesehatan kerja pegawai pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang No.24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban setiap entitas usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional usaha berbasis K3 bagi pegawai.

LPEI menempatkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian penting dari pengelolaan ketenagakerjaan sebagai wujud mitigasi risiko yang mungkin muncul dari ketenagakerjaan. LPEI menerapkan prinsip K3 yang berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan LPEI guna memberikan perlindungan bagi setiap Pegawai guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pegawai akan mengikuti secara penuh upaya pencegahan kecelakaan yang ditetapkan oleh LPEI guna mencegah potensi timbulnya kecelakaan kerja pada saat bekerja sehingga tercipta keselamatan kerja yang aman dan kondusif di lingkungan kerja baik terhadap proses produksi maupun hubungan kerja sama terhadap rekan sekerja serta perlindungan terhadap peralatan kerja.

Pembentukan P2K3 [GRI 403-1]

LPEI belum memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai wadah kerjasama antara manajemen dan pegawai untuk mengembangkan saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Aspek K3 di LPEI menjadi tanggung jawab Divisi Sumber

Commitments and Policies [GRI 3-3]

Indonesia Eximbank is fully committed to comply with Government regulations through Law No. 13 of 2003 on Manpower, and Law No. 1 of 1970 on Work Safety for employees. Indonesia Eximbank is also fully committed to comply with Government regulations regarding employee occupational health in the Social Security Organizing Agency (BPJS) program through Law No. 24 of 2011 and Government Regulation No. 50 of 2012 on the Implementation of Occupational Safety and Health Management System which regulates the obligations of each business entity in carrying out OHS-based business operations for employees.

Indonesia Eximbank places the Occupational Health and Safety (OHS) aspect as an important part of employment management as a form of risk mitigation that may arise from employment. Indonesia Eximbank applies the principles of OHS to all employees within the Institution to provide protection for each employee to realize optimal work productivity.

In carrying out their work, employees shall fully follow the accident prevention efforts set by Indonesia Eximbank to prevent potential work accidents while working so as to create safe and favorable work safety in the work environment both for the production process and cooperative relations with colleagues and protection of work equipment.

Establishment of P2K3 [GRI 403-1]

Indonesia Eximbank does not yet have an Occupational Safety and Health Advisory Committee (P2K3) as a forum for cooperation between management and employees to develop mutual understanding and effective participation in the implementation of OHS. The OHS aspect in

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [OJK F.21 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS [OJK F.21]

Daya Manusia, yang menjalankan tugas pengelolaan dan pemenuhan aspek K3 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Namun demikian, untuk memenuhi komitmen pengelolaan aspek K3, LPEI menjalankan panduan “Office Tower Safety Guide” yang dikeluarkan oleh pihak K3/HSE Pengelola Gedung Prosperity, dimana dalam panduan tersebut disebutkan dan diatur langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi keadaan darurat di area Gedung Prosperity.

Untuk menjalankan program-program K3 sesuai dengan panduan dimaksud dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terdapat beberapa orang pegawai LPEI yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Eksekutif untuk menjadi petugas *Floor Warden* apabila terjadi keadaan darurat di Kantor Pusat LPEI Gedung Prosperity.

Program dan Kegiatan Terkait Aspek K3

[GRI 403-5]

Lokasi kerja Kantor Pusat LPEI merupakan area kerja perkantoran yang dikelola oleh Pihak Pengelola Gedung, sehingga seperti telah disampaikan, Kantor Pusat LPEI Gedung Prosperity mengikuti ketentuan dan panduan Building yang tertuang pada “Office Tower Safety Guide” yang dikeluarkan oleh pihak K3/HSE Pengelola Gedung Prosperity. Program dan langkah-langkah penanganan K3 di Kantor Pusat LPEI saat ini masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Pihak Pengelola Gedung Prosperity, namun secara internal Pihak LPEI menyiapkan/ menyediakan perlengkapan seperti, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Tabung Oksigen, *Medical Kit*, Obat-obatan, Kursi Roda yang dapat digunakan untuk penanganan di lingkungan kerja LPEI apabila terjadi kondisi darurat.

Sarana dan prasarana penunjang serta kebijakan yang disediakan dan disiapkan dalam praktik kesehatan dan keselamatan di LPEI, antara lain:

Indonesia Eximbank is the responsibility of the Human Resources Division, which carries out the task of managing and fulfilling the OHS aspect by referring to the Minister of Manpower Regulation No.PER.04/MEN/1987 on the Occupational Safety and Health Advisory Committee and Procedures for Appointing Work Safety Experts.

However, to fulfill the commitment to manage the OHS aspect, Indonesia Eximbank runs the “Office Tower Safety Guide” issued by the OHS/HSE Prosperity Building Manager, where the guidelines are mentioned and regulated with anticipatory steps in dealing with emergencies in the Prosperity Building area.

To carry out OHS programs in accordance with these guidelines and in line with the provisions of applicable laws and regulations, several Indonesia Eximbank employees are appointed through the Executive Director’s Decree to become Floor Warden officers in the event of an emergency at Indonesia Eximbank Head Office Prosperity Building.

Programs and Activities Related to OHS Aspects

[GRI 403-5]

The work location of Indonesia Eximbank Head Office is an office work area managed by the Building Manager, so as already mentioned, Indonesia Eximbank Head Office Prosperity Building follows the provisions and guidelines of Building contained in the “Office Tower Safety Guide” issued by the OHS/HSE Prosperity Building Manager. The program and measures for handling OHS at Indonesia Eximbank Head Office currently still follow the provisions regulated by the Prosperity Building Management, but internally Indonesia Eximbank prepares/provides equipment such as Light Fire Extinguishers (APAR), Oxygen Cylinders, Medical Kits, Medicines, Wheelchairs that can be used for handling in the Indonesia Eximbank work environment in the event of an emergency.

Supporting facilities and infrastructure as well as policies provided and prepared in health and safety practices at Indonesia Eximbank, among others:

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [OJK F.21]
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS [OJK F.21]

- Memperkuat *Disaster Recovery Center* (DRC) guna mengantisipasi jika terjadi bencana atau kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional bisnis, sehingga keberlangsungan bisnis LPEI tetap terjaga.
- Melakukan kegiatan latihan evakuasi secara berkala bersama-sama dengan *building management* guna mengantisipasi kondisi darurat/bencana, sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja.
- Menyediakan fasilitas ruangan khusus laktasi/*nursery room* diperuntukkan bagi kenyamanan pegawai perempuan yang menyusui.
- Menyediakan fasilitas perangkat medis antara lain kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tabung oksigen, kursi roda dan obat-obatan umum untuk mengantisipasi kondisi darurat pegawai di lingkungan kerja LPEI.
- Menerapkan langkah pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan kerja termasuk larangan merokok di tempat-tempat yang dilarang untuk merokok yang ditentukan oleh LPEI dan *building management*.
- Memberikan dukungan kepada pegawai dalam meningkatkan kesehatan dengan memfasilitasi kegiatan olah raga.
- Memberikan istirahat sakit tanpa mengurangi hak-hak pegawai.
- Melakukan pelatihan rutin:
 1. Pelatihan tim tanggap darurat bencana.
 2. Simulasi tim tanggap darurat.
 3. Kampanye sadar dan siap melaksanakan *Business Continuity Plan* pada kondisi darurat bencana.
- Strengthening the Disaster Recovery Center (DRC) to anticipate if a disaster or condition occurs that can cause disruption to business operations, hence Indonesia Eximbank's business continuity is maintained.
- Conduct periodic evacuation drills together with building management to anticipate emergencies/disasters, so as to minimize the risk of work accidents.
- Providing special lactation room/nursery room facilities intended for the comfort of female employees who breastfeed.
- Providing medical equipment facilities including First Aid kits in Accidents (P3K), oxygen cylinders, wheelchairs and general medicines to anticipate employee emergencies in the Indonesia Eximbank work environment.
- Implement rare fire hazard prevention in the work environment including smoking ban in places that are prohibited for smoking determined by Indonesia Eximbank and building management.
- Provide support to employees in improving health by facilitating sports activities.
- Provide sick rest without prejudice to employee rights.
- Conduct regular training:
 1. Training of disaster emergency response teams.
 2. Emergency response team simulation.
 3. Campaign aware and ready to implement Business Continuity Plan in disaster emergencies.

Pada tahun 2022 LPEI mengadakan pelatihan *Emergency Response Team* yang diikuti oleh seluruh pegawai yang ditugaskan sebagai *Floor Warden* serta mengikutsertakan 2 perwakilan pegawai dari Departemen Umum untuk mengikuti Sertifikasi Kemenaker Petugas P3K (*Basic First Aid*).

In 2022, Indonesia Eximbank held an Emergency Response Team training, which was attended by all employees assigned as Floor Warden and included 2 employee representatives from the General Department to take part in the Ministry of Manpower Certification for P3K (Basic First Aid) Officers.

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [OJK F.21 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS [OJK F.21]

No	Nama Pelatihan Training	Lokasi Pelaksanaan Location	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta Total Participants
1	Emergency Response Team	Jakarta	31 Mei 2022 May 31, 2022	16
2	Sertifikasi Kemenaker Petugas P3K (<i>Basic First Aid</i>) Ministry of Manpower Certification for P3K (Basic First Aid) Officers	Jakarta	13 - 15 Juni 2022 June 13-15, 2022	2

Pelatihan Emergency Response Team bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya perencanaan tanggap darurat atau ERP untuk bencana kebakaran, huru hara, gempa bumi dan lain sebagainya sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pengendaliannya, mengatur tata cara pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat dan memastikan tindakan pengendalian telah sesuai dengan prosedur ERP secara benar.

Selain pelatihan aspek K3 secara internal tersebut, Pada 22 Desember 2022 dilakukan Latihan Evakuasi General di Area Kantor Pusat LPEI Gedung Prosperity yang dihelat oleh pihak Pengelola Gedung, Pelatihan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapsiagaan District 8 serta kesiapan seluruh *tenant* khususnya di Prosperity Tower, dalam menghadapi keadaan darurat bencana dan untuk memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan kepada pengguna Gedung dan pengunjung dalam Kawasan Prosperity Tower.

Sedangkan untuk Sertifikasi Kemnaker Petugas P3K merupakan program sertifikasi untuk Pertolongan Pertama Kecelakaan (P3K) dengan menekankan kepada dasar-dasar kesehatan kerja, dasar pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pedoman penyediaan fasilitas P3K, bahaya dan penanganan terhadap keracunan, kejang, paparan bahan kimia, tindakan pertolongan pertama pada gangguan lokal (cedera pendarahan, luka bakar, patah tulang), tindakan pertolongan pada gangguan pernapasan, tindakan pertolongan pada gangguan peredaran darah, CPR, prosedur evakuasi dan pengangkutan korban, serta lain sebagainya.

Seluruh program kegiatan terkait aspek K3 tersebut merupakan bagian dari implementasi mitigasi risiko

The Emergency Response Team training aims to coordinate emergency response planning or ERP efforts for fire, riot, earthquake and others, so as to achieve efficiency and effectiveness in control, regulate procedures for implementing emergency management and ensure control measures are in accordance with ERP procedures correctly.

In addition to the training on OHS aspects internally, on December 22, 2022, a General Evacuation Exercise was carried out in the Indonesia Eximbank Head Office Area of the Prosperity Building held by the Building Management, The training was carried out as part of an effort to ensure District 8 preparedness and the readiness of all tenants, especially in the Prosperity Tower, in facing disaster emergencies and to provide security and safety protection to Building users and visitors within the Prosperity Tower Area.

As for the P3K Officer Certification Ministry of Health is a certification program for Accident First Aid (P3K) by emphasizing the basics of occupational health, the basis of First Aid in Accidents (P3K), guidelines for the provision of P3K facilities, hazards and handling of poisoning, seizures, chemical exposure, first aid measures in local disorders (bleeding injuries, burns, fractures), respiratory aid measures, relief measures for circulatory disorders, CPR, evacuation procedures and transportation of victims, and so forth.

All activity programs related to OHS aspects are part of the implementation of operational risk mitigation and

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [OJK F.21
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS [OJK F.21]

operasional dan risiko reputasi yang terdampak dari faktor internal dan eksternal dengan tujuan agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikelola dengan baik dan tepat.

Kesehatan Kerja [GRI 403-8]

Seluruh pegawai LPEI memperoleh perlindungan kesehatan melalui program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, berlaku bagi seluruh pegawai dan keluarganya. Selain program jaminan kesehatan dimaksud, LPEI juga memberikan manfaat kesehatan sesuai dengan kebutuhan terkini pegawai melalui penyedia jasa asuransi kesehatan yang ditunjuk LPEI. Pada tahun 2022, LPEI menunjuk PT. Asuransi Astra Life sebagai penyedia jasa asuransi kesehatan LPEI. Dengan asuransi kesehatan dimaksud, setiap pegawai berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai tingkat manfaat asuransi. Dalam rangka meringankan beban pegawai, premi asuransi kesehatan menjadi sepenuhnya tanggungan Lembaga.

Pemeriksaan kesehatan tahunan kepada pegawai yang diselenggarakan bekerjasama dengan klinik kesehatan yang bekerja sama dengan LPEI. Pemeriksaan kesehatan dilakukan 1 kali setahun bagi pegawai dengan usia 40 tahun ke atas dan 2 tahun sekali bagi pegawai dengan usia di bawah 40 tahun.

reputation risk affected by internal and external factors with the aim that occupational safety and health aspects can be managed properly and appropriately.

Occupational Health [GRI 403-8]

All Indonesia Eximbank employees receive health protection through the health insurance program organized by BPJS Kesehatan, valid for all employees and their families. In addition to the health insurance program, Indonesia Eximbank also provides health benefits in accordance with the current needs of employees through health insurance service providers appointed by Indonesia Eximbank. In 2022, Indonesia Eximbank appointed PT Asuransi Astra Life as a provider of its health insurance services. With health insurance, every employee is entitled to reimbursement of treatment and treatment costs for diseases suffered according to the level of insurance benefits. In order to ease the burden on employees, health insurance premiums become fully borne by the Institution.

Annual medical examinations to employees held in collaboration with health clinics. Medical examination is carried out once a year for employees under the age of 40 years and over and once every 2 years for employees under the age of 40 years.

MITIGASI DAN PENANGANAN KONDISI PANDEMI COVID-19 DI LPEI**MITIGATION AND HANDLING OF COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS IN INDONESIA EXIMBANK**

Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada akhir kuartal 1 tahun 2021 masih terus berlangsung sampai akhir tahun 2022. Oleh karena itu, sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yaitu menjalankan Kebijakan *Business Continuity Plan* (BCP) pada kondisi *disaster*, LPEI masih terus melakukan berbagai upaya dan program mitigasi risiko akan dampak COVID-19 di lingkungan kerja LPEI dalam rangka menjaga keberlangsungan bisnis dan operasional Lembaga.

The COVID-19 pandemic, which began at the end of Q1 of 2021, continues until the end of 2022. As one of the manifestations of the implementation of risk management within Indonesia Eximbank, namely by implementing the Business Continuity Plan (BCP) Policy in disaster conditions, Indonesia Eximbank continues to carry out various efforts and risk mitigation programs for the impact of COVID-19 in its work environment in order to maintain the continuity of business and operations of the Institution.

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [OJK F.21 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS [OJK F.21]

Penanganan dan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan di lingkungan kerja LPEI sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Organisasi

Gugus Tugas (Satuan Kerja) Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Eksekutif Nomor 0067/KDE/07/2021 tentang Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Lingkungan LPEI tanggal 8 Juli 2021 masih terus melakukan tugas dan tanggungjawabnya pada sepanjang tahun 2022 terutama apabila terdapat kondisi eksternal dan internal terkait COVID-19 yang perlu mendapatkan perhatian dan keputusan tertentu.

Gugus Tugas dimaksud adalah sebagai berikut:

The handling and control of COVID-19 carried out in Indonesia Eximbank's work environment throughout 2022 were as follows:

a. Organization

The Task Force for COVID-19 Mitigation and Prevention established through the Executive Director's Decree No. 0067/KDE/07/2021 concerning the COVID-19 Task Force in Indonesia Eximbank Environment dated July 8, 2021 continues to carry out its duties and responsibilities throughout 2022, particularly if there are external and internal conditions related to COVID-19 that need certain attention and decisions.

The Task Force is as follows:

Penanggungjawab Person in Charge	Direktur Eksekutif dan Seluruh Direktur Pelaksana
Ketua Chairman	Chesna F. Anwar
Wakil Ketua I Vice Chairman I	Agus Windiarto
Wakil Ketua II Deputy Chairman II	T. Wahyu P. Wibowo
Wakil Ketua III Deputy Chairman III	Paul S. Hasjim
Anggota Members	
1. Fungsi Operation & IT Operation & IT Functions	Paul S. Hasjim Christiati E. Sianipar Yudi Imandapurba Herdiansyah Hamid
2. Fungsi Komunikasi & Manajemen Communication & Management Functions	Agus Windiarto Saur Maria Sidabutar T. Dyza R.A Rochadi Yanti Sudjarwo
3. Fungsi Penanganan SDM HR Handling Function	T. Wahyu P. Wibowo Noviana Rahatmi Susi Rebeka Siagian Ayu Triana
4. Fungsi Umum General Functions	Agus Windiarto Anwar Harsono Hendi Wibawa Priyo Basuki Wibowo

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [OJK F.21]
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS [OJK F.21]

b. Infrastruktur

Memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19 dengan menjaga kebersihan infrastruktur di lingkungan kerja LPEI melalui penyemprotan *disinfectant* secara rutin dan penyediaan alat sanitasi.

c. Pengaturan Kerja

Dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kerja LPEI, diberlakukan operasional terbatas di mana mekanisme diatur sedemikian rupa mengikuti ketentuan pemerintah tentang besaran kapasitas pegawai yang diperkenankan masuk kantor (WFO) dan yang bekerja di rumah (WFH).

e. Pelayanan Kesehatan

1. Pelaksanaan *booster* vaksinasi COVID-19 kepada seluruh pegawai dan keluarga di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran di seluruh Indonesia yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak Kementerian Keuangan RI pada bulan April 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang bersifat mandiri menggunakan Vaksin Gotong Royong dari Biofarma yang pelaksanaannya dilakukan sepanjang tahun 2022 hingga bulan Agustus 2022. Sampai dengan Agustus 2022, pencapaian program pemberian vaksinasi untuk seluruh insan LPEI (termasuk manajemen, pegawai, staf ahli beserta keluarga) adalah 100%;
2. Kegiatan deteksi COVID-19 secara berkala dilakukan untuk seluruh manajemen dan pegawai LPEI yang dilaksanakan setiap hari Senin setiap minggunya atau secara mandiri melalui mekanisme *reimbursement* maupun bekerjasama dengan *platform* kesehatan Halodoc. Total pelaksanaan deteksi COVID-19 sepanjang tahun 2022 di lingkungan LPEI adalah sebanyak 3,447 test;

b. Infrastructure

Providing protection and comfort in order to prevent the spread and transmission of COVID-19 by maintaining the cleanliness of infrastructure in Indonesia Eximbank's work environment through regular spraying of disinfectants and the provision of sanitation equipment.

d. Work Arrangements

In order to prevent the transmission of COVID-19 in Indonesia Eximbank's work environment, limited operations are implemented where the mechanism is regulated in such a way as to follow government regulations regarding the capacity of employees who are allowed to enter the office (WFO) and those who work at home (WFH).

d. Service

1. The implementation of the COVID-19 vaccination booster for all employees and families at Head Offices, Regional Offices, Branch Offices and Marketing Offices throughout Indonesia was carried out in collaboration with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in April 2022, the Financial Services Authority (OJK) or those who are independent using the Gotong Royong Vaccine from Biofarma whose implementation is carried out throughout 2022 until August 2022. As of August 2022, the achievement of the vaccination program for all Indonesia Eximbank personnel (including management, employees, expert staff and their families) was 100%;
2. Regular COVID-19 detection activities are carried out for all management and employees of Indonesia Eximbank which are carried out every Monday every week or independently through a reimbursement mechanism or in collaboration with the Halodoc health platform. The total implementation of COVID-19 detection throughout 2022 in the Indonesia Eximbank's environment was 3,447 tests;

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [OJK F.21
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS [OJK F.21]

3. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai LPEI beserta keluarganya diberikan melalui Asuransi kesehatan yang meliputi rawat jalan dan rawat inap termasuk di dalamnya kasus terinfeksi oleh COVID-19;
 4. Untuk peningkatan daya tahan tubuh terhadap penyakit selama masa pandemi, maka disiapkan paket multivitamin dalam rangka pencegahan dan multivitamin bagi yang terinfeksi COVID-19 kepada seluruh pegawai melalui *platform* Halodoc.
- e. Pemantauan Pegawai serta Keluarga
- Adapun kegiatan pemantauan pegawai beserta keluarga telah dilakukan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Kegiatan pemantauan yang dilakukan adalah:
1. Membantu/memberikan kemudahan dalam pencarian/pengurusan Rumah Sakit melalui surat jaminan atau pengurusan dengan pihak asuransi kesehatan yang bekerjasama dengan LPEI;
 2. Mengirimkan obat/suplemen yang membantu untuk mengurangi gejala yang diderita;
 3. Mengirimkan atensi berupa *hampers* buah-buahan dan vitamin;
 4. Pengecekan perkembangan kesehatan melalui komunikasi WA (24/7).
- f. Laporan dan Komunikasi Pegawai
- Dalam rangka komunikasi lembaga dan pegawai selama pandemi covid-19, hal-hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Penerbitan Surat Edaran sebagai sarana komunikasi kepada seluruh jajaran LPEI terkait kebijakan manajemen di lingkungan kerja LPEI yang selalu disesuaikan terhadap kondisi terkini COVID-19;
 2. Pemantauan Status COVID-19 di lingkungan kerja LPEI;
 3. Laporan status COVID-19 secara rutin kepada *stakeholder* dan *shareholders* LPEI secara *daily basis*.
5. Health facilities for all Indonesia Eximbank's employees and their families are provided through health insurance which includes outpatient and inpatient including cases infected by COVID-19;
 6. To increase the body's resistance to disease during the pandemic, multivitamin packages were prepared for prevention and multivitamins for those infected with COVID-19 for all employees through the Halodoc platform.
- e. Employee and Family Monitoring
- Monitoring activities for employees and their families have been carried out in order to overcome COVID-19. The monitoring activities are:
1. Assist/provide convenience in searching/managing hospitals through letters of guarantee or management with health insurance in collaboration with Indonesia Eximbank;
 2. Send drugs/supplements that help to reduce symptoms;
 3. Send attention in the form of fruit hampers and vitamins;
 4. Checking of health development through WA communication (24/7).
- g. Employee Reports and Communications
- On the communication between the Institution and employees during the COVID-19 pandemic, the followings are action that have been taken:
1. Issuance of Circular Letter as a means of communication to all levels of Indonesia Eximbank regarding management policies in its work environment, which are always adjusted to the latest conditions of COVID-19;
 2. COVID-19 Status Monitoring in Indonesia Eximbank's work environment;
 3. Regular COVID-19 status reports to Indonesia Eximbank's stakeholders and shareholders on a daily basis.

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

ABOUT SUSTAINABILITY REPORT



Laporan Keberlanjutan, atau “Laporan” Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI” atau “Lembaga”) tahun 2022 merupakan Laporan ke-dua dari Lembaga. Melalui Laporan ini, para pembaca mendapatkan gambaran mengenai tantangan yang harus diatasi dan upaya yang dilakukan dalam mengelola kesinambungan usaha, sekaligus upaya yang dilakukan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, selain partisipasi LPEI dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan.

Pada laporan ini diungkapkan apa yang telah dilakukan LPEI dalam meminimalisir dampak operasional terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial sekitar, juga menjelaskan apa yang telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan manfaat dan kinerjanya, baik pada aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial bagi negara dan perekonomian nasional secara berimbang. Sehingga setelah membaca Laporan ini, LPEI berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memahami komitmen dukungan Lembaga terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan. Pembaca juga dapat menilai sampai sejauh mana LPEI berkontribusi langsung dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Melalui Laporan ini LPEI menyampaikan informasi mengenai kondisi faktual mengenai program pengembangan yang dijalankan dan pendekatan yang dilakukan dalam menghadapi dan mengantisipasi segala bentuk peluang, risiko, serta tantangan yang terkait dengan keberlanjutan bisnis. LPEI merancang dan menjalankan program pengembangan berlandaskan pada konsep *triple bottom line* dengan mempertimbangkan faktor sebab-akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk kondisi lingkungan sekitar.

LPEI berharap Laporan ini bisa menjadi rujukan bagi segenap pemangku kepentingan dalam memahami dan mengetahui pelaksanaan kinerja keberlanjutan yang dijalankan. Selain edisi cetak, dengan pertimbangan

The 2022 Sustainability Report, or “Report” of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank” or the “Institution”) is the second Report of the Institution. Through this Report, readers get an overview of the challenges that must be overcome and the efforts made in managing business sustainability, as well as the efforts made to meet the expectations of stakeholders, in addition to Indonesia Eximbank’s participation in supporting the achievement of sustainability goals.

This report discloses Indonesia Eximbank efforts in minimizing operational impacts on the economy, environment, and social surroundings, as well as explaining what has been implemented to optimize its benefits and performance, both in economic, environmental and social aspects for the country and national economy in a balanced manner. As such, after reading this Report, Indonesia Eximbank hopes that all stakeholders can understand the commitment of the Institution’s support to achieving sustainability goals. Readers can also assess the extent to which Indonesia Eximbank contributes directly to and supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Through this report, Indonesia Eximbank conveys information on factual conditions regarding the development program carried out and the approach taken in facing and anticipating all forms of opportunities, risks, and challenges related to business sustainability. Indonesia Eximbank designs and runs development programs based on the triple bottom line concept by considering causal factors for all stakeholders, including environmental conditions.

Indonesia Eximbank hopes that this report can be a reference for all stakeholders in understanding and knowing the implementation of its sustainability performance. In addition to the print edition, with

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

untuk menghemat penggunaan kertas, Laporan yang sama dapat diakses melalui situs LPEI, yakni www.Indonesiaeximbank.go.id

PEDOMAN, STANDAR LAPORAN & ASSURANCE

[OJK G.1] [GRI 2-5]

Laporan Keberlanjutan LPEI ini disusun dengan mengakomodir 2 (dua) standar, yaitu Lampiran II SE OJK No.16.04/2021 atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta praktik pelaporan *Standar Global Reporting Initiative* (GRI) yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh GRI untuk mengembangkan standar laporan keberlanjutan.

consideration to save paper usage, the same report can be accessed through the Indonesia Eximbank website, namely www.Indonesiaeximbank.go.id

GUIDELINES, REPORT & ASSURANCE STANDARDS [OJK G.1] [GRI 2-5]

Indonesia Eximbank Sustainability Report is prepared by accommodating 2 (two) standards, namely Annex II SEOJK No. 16.04/2021 or Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, as well as reporting practices of Global Reporting Initiative (GRI) Standards issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) – an agency established by GRI to develop sustainability reporting standards.

Acuan Pelaporan Keberlanjutan LPEI | Indonesia Eximbank Sustainability Reporting Reference

Lampiran II SE OJK No.16.04/2021 Pedoman Teknis Laporan Keberlanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	Standar Global Reporting Initiative (GRI) – Universal Standard 2021 dan <i>Spesifik Financial Disclosure</i> , yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB)

LPEI mengadopsi kedua standar pelaporan ini dengan tujuan:

1. Menunjukkan kepatuhan Lembaga terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Menunjukkan kemampuan Lembaga mengikuti rujukan berskala internasional bagi penyusunan laporan keberlanjutan agar dapat dibaca, diterima dan dimengerti secara global.

Indonesia Eximbank adopts these two reporting standards with the aim of:

1. Demonstrate the Institution's compliance with applicable laws and regulations in Indonesia.
2. Demonstrate the ability of the Institution to follow international references for the preparation of sustainability reports to ensure it can be read, accepted and understood globally.

LPEI tetap menerapkan prinsip materialitas dalam menyampaikan isu-isu keberlanjutan yang penting bagi para pemangku kepentingan dan dalam menjalankan kegiatan usaha. Lembaga menyajikan indikator *disclosure* GRI Universa Standard yang diaplikasikan pada setiap halaman yang relevan.

Indonesia Eximbank continues to apply the principle of materiality in conveying important sustainability issues for stakeholders and in carrying out business activities. The institution presents GRI Universal Standard disclosure indicators that are applied to each relevant page.

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

Sebagai wujud kepedulian dan komitmen LPEI sebagai lembaga intermediari, serta agar dapat menunjukkan peran besar Lembaga dalam berpartisipasi menangani isu-isu sosial dan lingkungan, pada Laporan edisi Kedua ini, Lembaga juga menyertakan pencantuman indeks *GRI-Spesifik Financial Disclosure*. Daftar Indeks Universal Standard 2021 termasuk *GRI-Spesifik Financial Disclosure* yang diterapkan, serta indeks SEOJK 16.4/2021 atau Indeks Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tersedia pada bagian Lampiran Laporan ini. [GRI 3-1]

Pada penyusunan Laporan ini, LPEI masih belum menggunakan jasa penjamin (*assurance*), namun demikian untuk menjamin kredibilitas dan kualitas informasi yang tercantum dalam laporan ini, seluruh isi, data dan penjelasan yang disajikan telah melalui tahap verifikasi internal. [GRI 2-5]

PERIODE DAN SIKLUS LAPORAN

Laporan Keberlanjutan kedua yang disampaikan dalam satu buku dengan Laporan Tahunan ini memuat berbagai realisasi program keberlanjutan yang dilakukan sebagai kelanjutan dari program serupa yang telah disampaikan pada laporan sebelumnya. Data kuantitatif yang disampaikan ditetapkan berdasarkan pilihan topik material dalam perbandingan dua tahun terakhir. Adapun periode program yang dilaporkan adalah mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, sementara siklus pelaporan adalah setahun sekali, dengan Laporan periode sebelumnya terbit pada bulan Mei 2022. [GRI 2-3]

Sesuai dengan ketentuan SE-OJK 16.04/2021 Laporan Keberlanjutan ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan LPEI, dengan konten khusus mengenai program-program Tanggung Jawab Sosial yang dilaksanakan di tahun pelaporan, dan disampaikan dalam format sebagaimana ketentuan rujukan dimaksud.

Tidak ada penyajian ulang atas data tahun yang lalu, juga tidak ada perubahan signifikan terhadap kegiatan bisnis maupun pengelolaan Lembaga selama tahun pelaporan.

As a manifestation of Indonesia Eximbank's concern and commitment as an intermediary institution, as well as to show the great role of the Institution in participating in addressing social and environmental issues, in this Second edition of the Report, the Institution also includes the inclusion of the GRI-Specific Financial Disclosure index. The list of Universal Standard Index 2021 with GRI-Specific Financial Disclosure applied in this Report, as well as SEOJK index 16.4/2021 or OJK Regulation Index No. 51/POJK.03/2017 are presented in the Appendix to this Report. [GRI 3-1]

In the preparation of this report, Indonesia Eximbank still has not used assurance services, however, to ensure the credibility and quality of the information contained in this report, all contents, data and explanations presented have gone through the internal verification stage. [GRI 2-5]

REPORT PERIODS AND CYCLES

The second Sustainability Report presented in one book with this Annual Report contains various realizations of sustainability programs carried out as a continuation of similar programs that have been submitted in previous reports. The quantitative data submitted are determined based on the choice of material topics in the comparison of the last two years. The reported program period is from January 1, 2022 to December 31, 2022, while the reporting cycle is once a year, with the previous period report published in May 2022. [GRI 2-3]

In accordance with the provisions of SEOJK 16.04/2021, this Sustainability Report is part of Indonesia Eximbank Annual Report, with special content regarding Social Responsibility programs implemented in the reporting year, and submitted in the format as the reference provisions.

There was no restatement of the previous year's data, nor were there any significant changes to the Institution's business activities or management during the reporting

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

Begitu pula tidak terdapat perubahan signifikan atas ruang lingkup dan *boundary* dalam periode pelaporan. [GRI 2-4]

RUANG LINGKUP (BOUNDARY) DAN BATASAN LAPORAN [102-45]

Laporan Keberlanjutan Lembaga ini berfokus menguraikan kinerja operasional LPEI, serta segala perkembangan dan perubahan yang terjadi selama tahun 2022. Informasi dan data kinerja keberlanjutan yang disajikan dalam laporan ini mencakup uraian kinerja keuangan, kinerja sosial dan kinerja lingkungan LPEI semata, mengingat Lembaga tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi. [GRI 2-2]

Seluruh data keuangan dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia (Rp), kecuali dinyatakan lain dalam Laporan. Dalam melaporkan data keuangan, LPEI menggunakan teknik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Indonesia. Sedangkan untuk data keberlanjutan, digunakan teknik pengukuran data yang berlaku secara internasional.

Data pendukung upaya pelestarian lingkungan yang diterapkan dan disampaikan, terbatas pada aktivitas operasional Kantor Pusat di Jakarta, dengan pertimbangan ruang lingkup wilayah kerja LPEI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan belum adanya keseragaman perhitungan sehingga belum dapat memaparkan penggunaan energi, konsumsi bahan bakar, konsumsi air maupun konsumsi kertas secara menyeluruh. LPEI tidak memantau, mengendalikan dan melaporkan aktivitas para mitra usaha diluar interaksinya dengan Lembaga.

PENETAPAN KONTEN LAPORAN [GRI 3-1]

LPEI menetapkan isi Laporan dengan menerapkan 4 (empat) tahapan penentuan topik material sesuai GRI Universal Standard, yaitu:

year. Similarly, there were no significant changes to the scope and boundaries in the reporting period. [GRI 2-4]

REPORT BOUNDARIES AND LIMITATIONS

[102-45]

The Institution's Sustainability Report focuses on outlining its operational performance, as well as all developments and changes that occurred during 2022. The information and sustainability performance data presented in this report include a description of financial performance, social performance and environmental performance only, considering that the Institution does not have subsidiaries or associated entities. [GRI 2-2]

All financial data is expressed in units of Indonesian Rupiah (Rp), unless otherwise stated in the Report. In reporting financial data, Indonesia Eximbank uses techniques based on the Indonesian Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK"). As for sustainability data, internationally applicable data measurement techniques are used.

The supporting data for environmental conservation efforts applied and submitted are limited to the operational activities of the Head Office in Jakarta, considering the scope of Indonesia Eximbank's working areas spread across various regions of Indonesia and the absence of uniform calculations hence it cannot describe energy consumption, fuel consumption, water consumption and paper consumption as a whole. Indonesia Eximbank does not monitor, control and report the activities of business partners outside of their interaction with the Institution.

REPORT CONTENT ASSIGNMENT [GRI 3-1]

Indonesia Eximbank determines the content of the Report by applying 4 (four) stages of determining material topics according to the GRI Universal Standard, as follows:

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORT**1. Mengerti Konteks Kegiatan Usaha**

Lembaga memulai proses penyusunan laporan dengan memahami hubungan kegiatan usaha dengan konteks keberlanjutan, pemangku kepentingan terkait serta mengenali informasi kritis untuk mengidentifikasi potensi dampak kegiatan usaha.

2. Identifikasi Potensi dan Dampak Aktual

Lembaga mengidentifikasi dampak aktual maupun potensial kegiatan usaha yang dijalankan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, sosial maupun SDM.

3. Menilai Signifikansi Dampak

Lembaga menilai dan memilah seluruh dampak aktual maupun potensial yang teridentifikasi dan memutuskan mana yang memiliki dampak terbesar, untuk kemudian ditetapkan sebagai topik material.

4. Memprioritaskan Dampak Paling Signifikan

Lembaga kemudian menetapkan topik-topik material untuk dilaporkan, berdasarkan penilaian signifikansi dampak yang ditimbulkan.

Penerapan empat tahapan penentuan isi Laporan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada 8 (delapan) prinsip dasar penyusunan sesuai GRI Universal Standard, yaitu:

1. Accuracy (Akurasi)

Lembaga melaporkan informasi dengan benar, akurat dan cukup detail sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian dampak kegiatan usaha.

2. Balance (Berimbang)

Lembaga menyajikan informasi dengan tanpa bias dan dapat merepresentasikan keseimbangan penggambaran dampak positif maupun negatif kegiatan yang dilakukan.

1. Understand the Context of Business Activities

The Institution begins the report preparation process by understanding the relationship of business activities with the context of sustainability, relevant stakeholders and recognizing critical information to identify potential impacts of business activities.

2. Identify Potential and Actual Impact

The Institution identifies the actual and potential impacts of business activities on economic, environmental, social and human resource aspects.

3. Assess the Significance of the Impact

The Institution assesses and sorts all actual and potential impacts identified and decides which have the greatest impact, to then be determined as material topics.

4. Prioritize the Most Significant Impact

The Institution then assigns material topics to report, based on an assessment of the significance of the impact.

The application of the four stages of determining the contents of the Report is carried out by referring to 8 (eight) basic principles of preparation in accordance with the GRI Universal Standard, as follows:

1. Accuracy

The Institution reports information correctly, accurately and in sufficient detail to enable an impact assessment of business activities.

2. Balance

The Institution presents information without bias and can represent a balance of portrayal of positive and negative impacts of its activities.

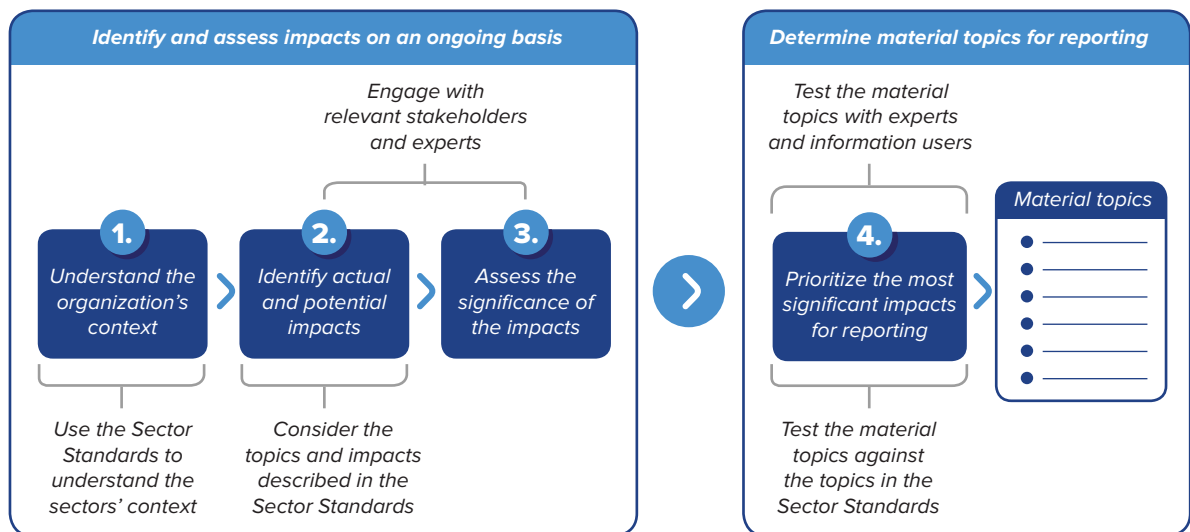
TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

3. *Clarity* (Jelas)
Lembaga menyajikan informasi yang mudah diakses dan mudah dimengerti.
4. *Comparability* (Dapat diperbandingkan)
Lembaga memilah, mengumpulkan dan menyajikan informasi secara konsisten sehingga memungkinkan dilakukannya analisa perubahan dampak kegiatan setiap saat termasuk perbandingan dampaknya terhadap organisasi sejenis lainnya.
5. *Completeness* (Kelengkapan)
Lembaga menyajikan informasi yang memadai sehingga memungkinkan dilakukannya asesmen dampak kegiatan selama periode pelaporan.
6. *Sustainability context* (Konteks keberlanjutan)
Laporan mengungkapkan kinerja Lembaga dan dampak kegiatannya pada aspek-aspek utama keberlanjutan, meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
7. *Timeliness* (Ketepatan waktu)
Lembaga melaporkan kinerja keberlanjutan secara berkala dan tepat waktu sehingga memungkinkan pembaca membuat keputusan sesuai kebutuhan.
8. *Verifiability* (Dapat diferivikasi)
Lembaga mengumpulkan, mencatat, memilah dan menganalisa seluruh informasi dengan seksama sehingga kualitas informasi yang disajikan dapat diperiksa.

Keempat tahapan penetapan konten sesuai prinsip-prinsip dasar penyusunan Laporan Keberlanjutan tersebut digambarkan dalam Bagan Alur Proses Penetapan Topik Material Laporan sebagai berikut. [\[GRI 3-1\]](#)

3. *Clarity*
The institution presents accessible and understandable information.
4. *Comparability*
The Institution sorts, collects and presents information consistently to enable analysis of changes in the impact of activities at any time including comparison of the impact on other similar organizations.
5. *Completeness*
The Institution provides adequate information to enable impact assessment of activities during the reporting period.
6. *Sustainability context*
The report reveals the performance of the Institution and the impact of its activities on key aspects of sustainability, including environmental, social, and economic aspects.
7. *Timeliness*
The Institution reports on sustainability performance regularly and in a timely manner, allowing readers to make informed decisions.
8. *Verifiability*
The Institution collects, records, sorts and analyzes all information carefully to enable verification of the quality of information presented.

The four stages of content determination according to the basic principles of preparing the Sustainability Report are depicted in the Material Topic Determination Process Report Flow Chart, as follows. [\[GRI 3-1\]](#)

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORTBagan Alur Proses Penentuan Topik Material Laporan Keberlanjutan | Bagan Alur Proses Penentuan Topik Material
Laporan Keberlanjutan**DAMPAK SIGNIFIKAN DAN UJI MATERIALITAS**

[GRI 3-2]

LPEI melakukan kajian dampak material dengan membentuk grup diskusi internal guna membahas dampak operasional terhadap para pemangku kepentingan utama, serta mempertimbangkan masukan dari beberapa pihak eksternal maupun melalui interaksi dengan masyarakat sekitar, untuk menetapkan topik-topik yang dilaporkan.

Melalui diskusi tersebut Lembaga melakukan uji materialitas terhadap sejumlah topik material yang diperkirakan layak disampaikan dalam laporan termasuk *boundary*-nya. Lembaga kemudian menilai topik material dimaksud dengan menetapkan beberapa informasi material yang berada pada kategori 'tinggi' dan beberapa informasi lainnya berada pada kategori 'sedang' maupun 'rendah', sebagaimana digambarkan dalam diagram materialitas berikut.

SIGNIFICANT IMPACT AND MATERIALITY TEST

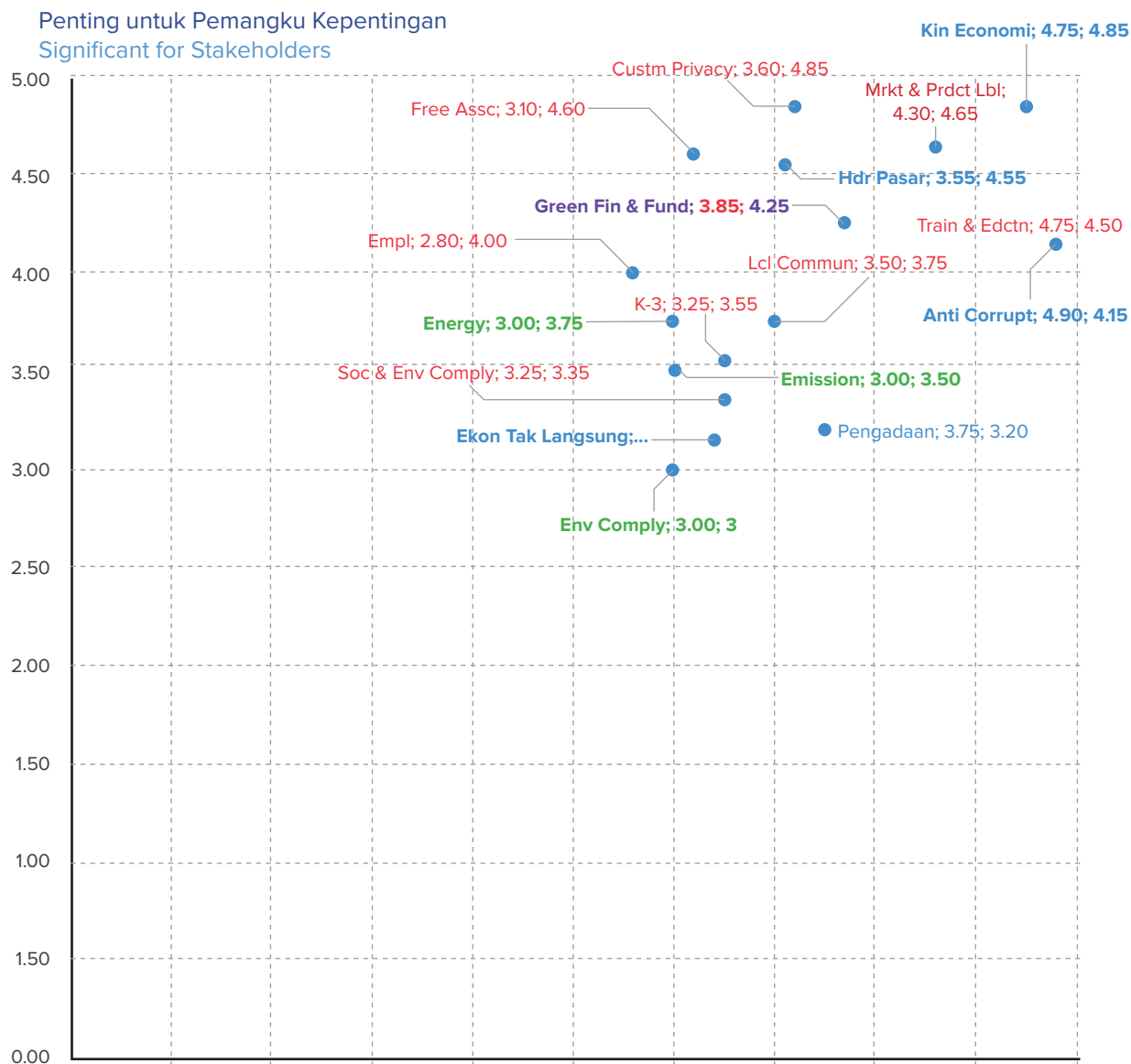
[GRI 3-2]

Indonesia Eximbank conducts material impact assessments by establishing internal discussion groups to discuss operational impacts on key stakeholders, as well as considering input from several external parties as well as through interaction with the surrounding community, to determine the topics reported.

Through the discussion, the Institution conducted a materiality test on a number of material topics that were estimated to be worthy of being conveyed in the report, including the boundary. The Institution then assesses the material topic by assigning some material information to the 'high' category and some other information to the 'medium' and 'low' categories, as illustrated in the following materiality diagram.

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

Diagram Matriks Materialitas [GRI 3-2] | Materiality Matrix Diagram [GRI 3-2]



Terdapat 17 kelompok topik material yang memenuhi kriteria dampak paling material terhadap kinerja keberlanjutan LPEI. Lembaga kemudian menetapkan tidak kurang 45 indeks *disclosure* dari topik material dimaksud, sebagai berikut.

There are 17 groups of material topics that meet the criteria for the most material impact on Indonesia Eximbank's sustainability performance. The Institution then established no less than 45 disclosure indices of the material topic, as follows.

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORTDaftar Topik Material dan *Boundary* | *Material Aspects and Boundary* [102-47]

No	Topik Material Material Topics	Alasan Materialitas Reasons for Materiality	Indeks Disclosure Disclosure Index		Boundary	
			SEOJK 16.04/2021 Atau/or POJK 51/2017	GRI Standard	Di dalam LPEI Internal	Diluar LPEI External
EKONOMI ECONOMICS						
1	Kinerja Keuangan / Ekonomi	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F2, F3	201-1, 201-3 201-4		
2	Kehadiran Pasar	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.20	202-1		
3	Dampak ekonomi tak langsung	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.23	203-1		
4	Praktik Pengadaan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F2, F3	204-1		
5	Anti Korupsi	Berdampak signifikan pada pembangunan dan pada reputasi Lembaga Significant impact on development and on the reputation of the Institution	F.1	205-2, 205-3		
LINGKUNGAN ENVIRONMENT						
6	Energi	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.6 & F.7	302-1, 302-4		
7	Emisi	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.11	305-1, 305-2		
8	Kepatuhan Lingkungan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F.16	307-1, 308-1		
SOSIAL SOCIAL						
9	Kepegawaian	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan bagi kesinambungan usaha Significant impact on stakeholders and for business continuity	F.18	401-1, 401-2		
10	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.21	403-1, 403-5 403-8		
11	Pelatihan dan Pendidikan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan bagi kesinambungan usaha Significant impact on stakeholders and for business continuity	F.18	404-1, 404-2 404-3		
12	Kebebasan Berserikat atau Peraturan Perusahaan atau PKB	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F.21	405-1, 405-2, 407-1		

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

No	Topik Material Material Topics	Alasan Materialitas Reasons for Materiality	Indeks Disclosure Disclosure Index		Boundary	
			SEOJK 16.04/2021 Atau/or POJK 51/2017	GRI Standard	Di dalam LPEI Internal	Diluar LPEI External
13	Masyarakat Lokal	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F23, F.24, F.25	413-1		
14	Pemasaran dan Label Produk	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F.26, F.27	417-1, 417-2, 417-3		
15	Privasi Pelanggan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.28, F.30	418-1		
16	Kepatuhan terhadap Regulasi Sosial & Lingkungan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F.16, F.24	419-1		
FINANCIAL SERVICE SECTOR						
17	Pembiayaan Berkelanjutan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan, keberlanjutan dan pada reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders, sustainability and on the reputation of the Institution	FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6, FS7, FS8, FS10, FS15, FS16,			

KEANDALAN LAPORAN DAN UMPAN BALIK

Seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini telah melalui proses verifikasi internal LPEI sehingga dapat diandalkan untuk proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Untuk tahun ini, LPEI masih belum melakukan proses verifikasi oleh pihak eksternal namun ke depannya, Lembaga berkomitmen untuk melibatkan pihak eksternal dalam proses verifikasi untuk meningkatkan kehandalan laporan keberlanjutan.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas laporan kedepan, Lembaga mengharapkan umpan balik dari para pembaca, sebagai sarana perbaikan kualitas laporan. Umpan balik dari pembaca dapat disampaikan melalui kontak berikut ini:

RELIABILITY OF REPORTS AND FEEDBACK

All information disclosed in this report has gone through Indonesia Eximbank's internal verification process, hence it can be relied upon for the evaluation and decision-making process. For this year, Indonesia Eximbank still has not carried out a verification process by external parties, however in the future, the Institution is committed to engaging external parties in the verification process to improve the reliability of sustainability reports.

Furthermore, in order to improve the quality of future reports, the Institution expects feedback from readers, as a means of improving the quality of reports. Feedback from readers can be submitted through the following contact:

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN
ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

KONTAK [GRI 2-3]

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut atau pertanyaan-pertanyaan tentang Laporan ini, silahkan menghubungi:

CONTACT [GRI 2-3]

If you need further information or questions about this Report, please contact:

Corporate Secretary

Indonesia Eximbank – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower Lantai 1 – District 8

Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta - 12190

Telp : +62 21 395 03600

Fax : +62 21 395 03699

Email : corpsec@indonesiaeximbank.go.id

Web : www.indonesiaeximbank.go.id

INDEKS GRI STANDARD 2021

GRI STANDARD 2021 INDEX

GRI – Standard	KETERBUKAAN DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul Titles	
DISCLOSURE UMUM GENERAL DISCLOSURES			
43266-267,545GRI 2 : Pengungkapan Umum General Disclosures - 2021	Profil Organisasi Organization Profile		
	2-1	Informasi mengenai organisasi Organizational details	68
	2-2	Entitas organisasi yang termasuk dalam laporan keberlanjutan Entities included in the organization's sustainability reporting	662
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan titik kontak Reporting period, frequency and contact point	661,669
	2-4	Penyajian kembali informasi Restatements of information	662
	2-5	Assurance oleh Pihak Eksternal External assurance	611
	Aktivitas dan Karyawan Activities and Employees		
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain and other business relationships	578
	2-7	Karyawan Employees	616
	2-8	Pekerja yang bukan merupakan karyawan Workers who are not employees	616
	Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition	258-259
	2-10	Nominasi dan seleksi badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	264-265
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	264-265
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	266-267, 545
	2-13	Pendelegasian wewenang untuk tanggung jawab mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	266-267, 545
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	266-267, 545
	2-15	Konflik kepentingan Conflicts of interest	244,278
	2-16	Mengomunikasikan hal-hal kritis Communication of critical concerns	281-304
	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	264-265, 270
	2-18	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	312-315
	2-19	Kebijakan remunerasi Remuneration policies	316
	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	316-317
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	317-318

GRI – Standard	KETERBUKAAN DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul Titles	
Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan Strategy Policy and Implementation			
	2-22	Pernyataan mengenai strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	535
	2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	243-244, 446, 535, 593, 605, 613
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan dalam organisasi Embedding policy commitments	243-245, 450, 535, 549, 606, 613
	2-25	Proses remediasi dampak negatif Processes to remediate negative impacts	460-461, 585
	2-26	Mekanisme untuk saran dan masalah etika Mechanisms for seeking advice and raising concerns	483, 485-486
	2-27	Kepatuhan hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	243-245
	2-28	Keanggotaan Asosiasi Membership associations	70
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement			
	2-29	Pendekatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Approach to stakeholder engagement	541-544
	2-30	Kesepakatan perundingan kolektif Collective bargaining agreements	617
DISCLOSURE TOPIK SPESIFIK DISCLOSURE OF SPECIFIC TOPICS			
DAMPAK EKONOMI ECONOMIC IMPACTS			
201 Kinerja Ekonomi Economics Performance			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	560
GRI 201: Kinerja Ekonomi Economic Performance 2016	201-1	Distribusi Perolehan Ekonomi Economic Earnings Distribution	575-577
	201-3	Kewajiban Program Pensiun Manfaat Pasti Dan Program Pensiun Lainnya	646
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Financial assistance received from the government	564
202 Kehadiran Pasar Market Presence			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	613
GRI 202: Kehadiran Pasar Market Presence 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional Ratios of Standard Entry Level Wage by Gender compared to Local Minimum Wage	642
203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	605
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan layanan dukungan Infrastructure investment and support services	611

INDEKS GRI STANDARD 2021
GRI STANDARD 2021 INDEX

GRI – Standard	KETERBUKAAN DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul Titles	
204 Praktik Pengadaan Procurement Practice			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	560
GRI 204: Praktik Pengadaan Procurement Practice 2016	204-1	Proporsi Pengeluaran untuk Pemasok Lokal Proportion of Spending on Local Suppliers	579
205 Anti Korupsi Anti-Corruption			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	230, 488
GRI 205: Anti Korupsi Anti-Corruption 2016	205-2	Komunikasi dan pelatihan anti korupsi Anti-corruption communication and trainings	519, 520-521, 524-526
	205-3	Kasus korupsi dan penindakan kasus korupsi Corruption cases and its prosecution	497
DAMPAK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL IMPACTS			
302 Energi Energy			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	592
GRI 302: Energi Energy 2016	302-1	Konsumsi energi organisasi Organizational energy consumption	601
	302-4	Pengurangan konsumsi energi Energy consumption reduction	601
305 Emisi Emissions			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	592
GRI 305: Emisi Emissions 2016	305-1	Emisi yang Dihasilkan Perusahaan (Scope 1) Direct (Scope 1) GHG Emissions	603
	305-2	Emisi dari energi tidak langsung (Scope 2) Energy Indirect (Scope 2) GHG Emissions	603
307 Kepatuhan Lingkungan Environmental Compliance			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	592

GRI – Standard	KETERBUKAAN DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul Titles	
GRI 307: Kepatuhan Lingkungan Environmental Compliance 2016	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup Non-compliance with environmental laws and regulations	600
308 Penilaian Lingkungan Pemasok Supplier Environmental Assessment			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	560, 592
GRI: 308: Penilaian Lingkungan Pemasok Supplier Environmental Assessment 2016	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	578
DAMPAK SOSIAL SOCIAL IMPACTS			
401 Kepegawaian Employment			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	613
GRI 401: Kepegawaian Employment 2016	401-1	Perekrutan Karyawan Baru dan Pergantian (Turn-over) Karyawan New Employee Recruitment and Turn Over	623
	401-2	Benefit yang didapat karyawan permanen, kontrak, dsb Benefits provided to full-time payment employees, contract employee, other types of employment	642
403 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health & Safety			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	651
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health & Safety 2018	403-1	Sistem manajemen K3 OHS management system	651
	403-5	Pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja Worker training on occupational health and safety	652
	403-8	Karyawan yang diberikan perlindungan oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja Workers covered by an occupational health and safety management system	655
404 Pelatihan dan Pendidikan Trainings and Education			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	613

INDEKS GRI STANDARD 2021
GRI STANDARD 2021 INDEX

GRI – Standard	KETERBUKAAN DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul Titles	
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan Trainings and Education 2016	404-1	Rerata jam pelatihan karyawan, menurut gender dan jenjang jabatan Average employees training hours, based on gender and position level	629
	404-2	Program peningkatan kompetensi karyawan, dan program pra jabatan Employee competence program, and pre-position program	629
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	640
405 Keanekaragaman dan Kesempatan Setara Diversity and Equal Opportunities			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	613
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara Diversity and Equal Opportunities 2016	405-1	Komposisi karyawan menurut level jabatan dan <i>gender</i> Employee composition based on position and gender	614, 616
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	643
407 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif Freedom of Association and Collective Bargaining			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	613
GRI 408: Pekerja Anak Child Labor 2016	407-1	Operasi dan pemasok dimana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko	618
413 Masyarakat Lokal Local Community			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	605
GRI 413: Masyarakat Lokal Local Community 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan Program Pengembangan Komunitas	607
417 Pemasaran dan Pelabelan Marketing and Labeling			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	581, 582
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan Marketing and Labeling 2016	417-1	Persyaratan untuk Pelabelan dan Informasi produk dan jasa Requirements for product and service information and labeling	590
	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling	588, 590
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran Incidents of non-compliance concerning marketing communications	588, 590

GRI – Standard	KETERBUKAAN DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul Titles	
418 Privasi Pelanggan Customers Privacy			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	581, 582
GRI 418: Privasi Pelanggan Customers Privacy 2016	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	587, 588
419 Kepatuhan Sosial Ekonomi Social Economic Compliance			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	581, 582
GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi Social Economic Compliance 2016	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	585
Green Funding & Lending – Indicator of Financial Services Specific Supplement			
GRI 3: Pendekatan Manajemen Management Approach 2021	3-3	Manajemen Topik Material Managements of Material Topic	560, 581, 582
	FS1	Kebijakan khusus penerapan aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan usaha Policies with specific environmental and social components applied to business lines.	567
	FS3	Prosedur monitoring ketaatan debitur dalam mematuhi ketentuan peraturan perundangan aspek sosial lingkungan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Processes for monitoring clients' implementation of and compliance with environmental and social requirements included in agreements or transactions.	567
	FS4	Proses peningkatan kompetensi karyawan untuk menerapkan aturan/ perundangan terkait sosial dan lingkungan yang berlaku Process(es) for improving staff competency to implement the environmental and social policies and procedures as applied to business lines.	596
	FS5	Interaksi / kerjasama dengan debitur/investor/partner bisnis dalam mengatasi dampak/peluang aspek sosial dan lingkungan Interactions with clients/investees/business partners regarding environmental and social risks and opportunities.	567
	FS6	Prosentase portofolio bisnis dibagi menurut wilayah, ukuran (misal: Micro/ SME/Besar), dan sektor Percentage of the portfolio for business lines by specific region, size (e.g. micro/SME/ large) and by sector.	566
	FS7	Nilai portofolio produk dan jasa yang dirancang untuk mendukung kegiatan sosial dibagi menurut segmen bisnis Monetary value of products and services designed to deliver a specific social benefit for each business line broken down by purpose.	570

INDEKS GRI STANDARD 2021
GRI STANDARD 2021 INDEX

GRI – Standard	KETERBUKAAN DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul Titles	
	FS8	Jumlah produk dan jasa pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pembiayaan terkait lingkungan yang spesifik Monetary value of products and services designed to deliver a specific environmental benefit.	567
	FS10	Prosentase dan jumlah perusahaan dalam portofolio Bank yang memiliki kewajiban dan aktif berinteraksi dalam menjawab isu-isu terkait risiko maupun aspek sosial dan lingkungan. Percentage and number of companies held in the institution's portfolio with which the reporting organization has interacted on environmental or social issues.	574
	FS15	Kebijakan mengenai produk dan layanan yang adil dan wajar Policies for the fair design and sale of financial products and services.	583
	FS16	Inisiatif untuk mengadakan dan mendukung kegiatan literasi keuangan atau pembiayaan khusus Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary.	586

DAFTAR INDEKS REFERENSI POJK 51/2017

POJK 51/2017 INDEX REFERENCES



No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation Sustainability Strategy	540
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights		
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi Economic Performance Highlights	533
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance Highlights	533
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial Social Performance Highlights	534
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Value of Sustainability	80
C.2	Alamat Perusahaan Company's Address	68
C.3	Skala Perusahaan Scale Enterprises	68
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, services and business activities	75-76
C.5	Keanggotaan Pada Asosiasi Member of Association	70
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan Change of Significant Organization	662
Penjelasan Direksi Directors Statement		
D.1	Penjelasan Direksi Directors Statement	53
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan Management of Sustainable Finance Implementation	545
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan berkelanjutan Competency Development related Sustainable Finance	547, 636
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan Risk Assessment for Sustainable Finance Implementation	549
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	541
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan Challenges of Sustainable Financial Implementation	551
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Building A Culture of Sustainability	636
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of performance targets and production, portfolios, financial targets, or investment, revenue and profit and loss	229
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek Yang Sejalan Comparison of performance targets and production, portfolios, financial targets, or investment on Financial Instruments or projects in line with Sustainable Finance Implementation.	574
Kinerja Lingkungan Environmental Performance		
	Umum General	604
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Costs	
	Aspek Material Material Aspects	
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan The Use of Environmentally Friendly Materials	n.a
	Aspek Energi Energy Aspects	
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi Yang Digunakan The number and the intensity of energy use	601
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan The efforts and achievements made energy efficiency including the use of renewable energy sources	n.a

DAFTAR INDEKS REFERENSI POJK 51/2017
POJK 51/2017 INDEX REFERENCES

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Aspek Air Water Aspects		
F.8	Penggunaan Air Water Consumption	603
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspects		
F.9	Dampak Dari Wilayah Operasional Yang Dekat atau Berada Di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati The impact of operational areas near or in the area of conservation or biodiversity	n.a
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity conservation efforts	n.a
Aspek Emisi Emission Aspects		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi Yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya The number and intensity of emissions produced by type	601
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi Yang Dilakukan The efforts and achievement of emission reductions undertaken	601
Aspek Limbah Dan Efluen Aspect of Waste and Effluents		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen Yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis The amount of waste and effluent generated by type	n.a
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and effluent management mechanism	n.a
F.15	Tumpahan Yang Terjadi (Jika Ada) Spill that occurred (if any)	n.a
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Aspect of environmental complaints		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Diterima Dan Diselesaikan The number and material environmental complaints received and resolved.	n.a
Kinerja Sosial Social Performance		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik Untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa Yang Setara Kepada Konsumen The Company's commitment to deliver products and/or services equivalent to the consumer.	581
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspects		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equality of employment opportunities	614
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	n.a
F.20	Upah Minimum Regional The Minimum Wage	642
F.21	Lingkungan Bekerja Yang Layak Dan Aman Environmental work decent and safe	618
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Training and Competency Development for Employees	629

DAFTAR INDEKS REFERENSI POJK 51/2017
POJK 51/2017 INDEX REFERENCES

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Aspek Masyarakat Community Aspects		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impacts to Local Communities	585, 607
F.24	Pengaduan Masyarakat Public complaints	588
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental Social Responsibility Activities (TJSL)	608
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility on the development of Sustainable Finance products and/or services:		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan Innovation and development of Sustainable Finance products and/or services	583
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan Customer Safety	584
F.28	Dampak Produk/Jasa Impact of Products/Services	585
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali The number of products recalled	583
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Survey of customer satisfaction	591
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen, Jika Ada Written verification from independent parties (if any)	660
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Form	678
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to previous year's sustainability report feedback	680
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 POJK 51/2017 Index List of Disclosures in Accordance with POJK 51/2017 POJK 51/2017 Index	677



LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENT

07





**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
Beserta Laporan Auditor Independen**

***LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY***

***Consolidated Financial Statements
December 31, 2022 and 2021
For the Years Ended
With Independent Auditor's Report***

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA****LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY**

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	696	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain Konsolidasian	700	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	707	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	716	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	728	Notes to the Consolidated Financial Statements
Informasi Tambahan:		Additional Information:
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	Lampiran I/ Appendix I	Statements of Financial Position of Parent Entity
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain Entitas Induk	Lampiran II/ Appendix II	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of Parent Entity
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	Lampiran III/ Appendix III	Statements of Changes in Equity of Parent Entity
Laporan Arus Kas Entitas Induk	Lampiran IV/ Appendix IV	Statements of Cash Flows of Parent Entity



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower, Lantai 1
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 395 03600
Fax. : (62 21) 395 03699
www.indonesiaeximbank.go.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**

Nomor : BS. 0067/CEO/03/2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : Rijani Tirtoso
Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1,
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Alamat Rumah : Manggarai Utara V D No.20
RT 005 RW 001
Manggarai, Tebet
Jakarta Selatan

Nomor Telepon : +6221 395 03600
Jabatan : Direktur Eksekutif
- Nama** : Agus Windiarto
Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1,
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Alamat Rumah : Jl. Hang Lekiu II No.10A
RT 008 RW 004
Gunung, Kebayoran Baru
Jakarta 12190 - Indonesia

Nomor Telepon : +6221 395 03600
Jabatan : Direktur Pelaksana
Bidang Keuangan & Operasional

menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" atau "LPEI") dan Entitas Anak;

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS OF
AND FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND SUBSIDIARY**

Number : BS. 0067/CEO/03/2023

We, the undersigned:

- Name** : Rijani Tirtoso
Office address : Prosperity Tower, 1st Floor,
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Residential address : Manggarai Utara V D No. 20
RT 005 RW 001
Manggarai, Tebet
Jakarta Selatan

Telephone : +6221 395 03600
Title : Executive Director
- Name** : Agus Windiarto
Office address : Prosperity Tower, 1st Floor,
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Residential address : Jl. Hang Lekiu II No.10A
RT 008 RW 004
Gunung, Kebayoran Baru
Jakarta 12190 - Indonesia

Telephone : +6221 395 03600
Title : Managing Director
of Finance & Operation

declare that:

- We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" or "LPEI") and Subsidiary;

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**

Nomor : BS.0067/CEO/03/2023

2. Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus sebagai berikut:

- a. Untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN.

- b. Untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian LPEI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam LPEI dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS OF
AND FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND SUBSIDIARY**

Number : BS.0067 /CEO/03/2023

2. The consolidated financial statements of LPEI and Subsidiaries for the year ended December 31, 2022 have been prepared and presented in accordance with fair presentation of special purpose financial reporting framework as follows:

- a. For the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured National Interest Account financing, calculated using the assumption of the discount rate that is equal to the interest rate after the restructuring.

Allowance for Impairment Losses (CKPN) of financing for National Interest Account given to PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) is calculated using the assumption of the discount rate determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through letter No. S-194/MK.08/2023 concerning the Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN.

- b. The other elements of the consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The consolidated financial statements of LPEI for the year ended December 31, 2021 are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. All information in the consolidated financial statements of LPEI and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. The consolidated financial statements of LPEI and Subsidiary do not contain any material incorrect information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. We are responsible for LPEI and Subsidiary's internal control system.

This is our declaration, which has been made truthfully.



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**

Nomor : BS. 0067/CEO/03/2023

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS OF
AND FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND SUBSIDIARY**

Number : BS. 0067/CEO/03/2023

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of Board of Directors

Jakarta, 24 Maret / March 24, 2023



Rijani Tirtoso
Direktur Eksekutif/
Executive Director

Agus Windiarto
Direktur Pelaksana
Bidang Keuangan & Operasional/
Managing Director
of Finance & Operation



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00198/2.1030/AU.6/09/1298-2/1/III/2023

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

Pemegang Saham, Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana/
The Shareholder, Board of Directors, and Managing Directors

www.rsm.id

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dengan menggunakan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan pada Catatan 2b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijabarkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap LPEI dan entitas anaknya berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2022, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statements as described in Note 2b of the accompanying consolidated financial statements.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and its subsidiary as of December 31, 2022, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statements as described in Note 2b to the accompanying consolidated financial statements.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of LPEI and its subsidiary in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

konsolidasian di Indonesia, kami telah memenuhi tanggung jawab etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Atas Hal - hal**1. Basis Akuntansi**

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2b, 2o, dan 9h.14 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, yang menjelaskan tentang dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian LPEI dan entitas anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Sebagai akibatnya, laporan keuangan konsolidasian terlampir belum tentu cocok untuk tujuan lain.

Catatan 9h.14 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir mengungkapkan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2022 apabila CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diperbandingkan dengan yang dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan.

2. Dampak Pandemi

Kami membawa perhatian ke Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia yang terkena dampak dari pandemi global dan di Indonesia karena virus corona. Resolusi kondisi ekonomi ini tergantung pada tindakan Pemerintah dan Otoritas yang berada di luar kendali LPEI. Oleh karena itu, pada saat ini dampak masa depan terhadap LPEI belum dapat diperkirakan.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters**1. Basis of Accounting**

As disclosed in Note 2b, 2o, 9h.14 to the accompanying consolidated financial statements, which explains the basis for the preparation of LPEI and its subsidiary consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2022 prepared in accordance with the conditions set forth in the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number S-194/MK.08/2023 concerning the Determination of the Use of Discount Rates Assumptions Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of Allowance for Impairment Losses (CKPN). CKPN for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is calculated using the assumption of the discount rate set by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Meanwhile, other elements of the consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. As a result, the accompanying consolidated financial statements may not be suitable for other purposes.

Note 9h.14 to the accompanying consolidated financial statements disclose the impact to the consolidated financial statements for the 2022 financial year if the CKPN for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is calculated in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards compared to those calculated based on the Letter of the Minister of Finance.

2. Impact of Pandemic

We draw attention to Note 41 to the accompanying consolidated financial statements which explains the condition of the Indonesian economy affected by the global and local pandemic due to the corona virus. The resolution of this economic conditions depends on the actions of the Government and the Authority which are beyond LPEI's controls. Therefore, the future impact on LPEI cannot be estimated at this time.

Our opinion is not modified with respect to such matters.



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Pembiayaan yang Diberikan, dan Pembiayaan dan Piutang Syariah

Pada tanggal 31 Desember 2022, total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp72.163.056 juta. LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan yang diberikan tersebut sebesar Rp15.597.559 juta. Pada tanggal 31 Desember 2022, total pembiayaan dan piutang syariah sebesar Rp11.472.947 juta dan LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.285.390 juta.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, cadangan kerugian penurunan nilai atas Pembiayaan yang diberikan ditentukan berdasarkan kerangka kerugian kredit ekspektasian (KKE) yang memperhitungkan informasi bersifat perkiraan masa depan untuk mencerminkan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Sementara itu, untuk pembiayaan dan piutang syariah, cadangan kerugian penurunan nilai dihitung berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan kebijakan akuntansi LPEI pada Catatan 2o.

Kami fokus pada area ini karena total pembiayaan yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah mewakili 99,78% dari total aset LPEI, dan total cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk nilainya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian LPEI, serta dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, LPEI menerapkan model yang bergantung pada data internal dan eksternal serta membutuhkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Allowance for Impairment Losses of Financing, and Sharia Financing and Receivables

As of December 31, 2022, total financing amounted to Rp72,163,056 million. LPEI has provided allowance for impairment losses of financing amounted to Rp15,597,559 million. As of December 31, 2022, total sharia financing and receivables amounted to Rp11,472,947 million and LPEI has provided allowance for impairment losses amounted to Rp2,285,390 million.

Based on Indonesian Financial Accounting Standards, the allowance for impairment of loans is determined based on the expected credit loss (ECL) framework which consider forward-looking information to reflect estimated future economic conditions. Meanwhile, allowance for impairment losses of sharia financing and receivables is calculated based on related Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) LPEI policy in Note 2o.

We focused on this area as the total loans, sharia financing and receivables represent 99.78% of the total assets of the Bank, and total allowance for impairment losses is significant to LPEI consolidated financial statements, and in calculating the allowance for impairment losses, LPEI utilises models which are reliant on internal and external data and involves subjective management judgement and is subject to a high degree of estimation uncertainty.



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai antara lain:

- Menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai;
- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren adalah kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menentukan dan mempersiapkan model tersebut;
- Mengestimasi skenario perkiraan makroekonomi masa depan;
- Mengidentifikasi dan menentukan penyesuaian *post model* atas model KKE;
- Mengestimasi proyeksi arus kas masa depan dalam menghitung KKE individual; dan
- Menentukan beberapa skenario probabilitas tertimbang dalam menghitung KKE individual.

Lebih lanjut, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah meningkatkan ketidakpastian estimasi ini dan tingkat pertimbangan yang diperlukan untuk digunakan dalam mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pengungkapan LPEI mengenai cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah dijelaskan pada Catatan 2.o dan 9 atas laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana Audit Kami Merespons Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

1. Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah. Pengendalian tersebut meliputi:
 - Reviu dan persetujuan atas informasi bersifat perkiraan masa depan yang digunakan dalam model KKE;
 - Penggunaan elemen data penting yang andal dan akurat dalam model KKE;
 - Reviu dan persetujuan atas hasil KKE, termasuk penyesuaian model setelahnya yang diterapkan;
2. Kami memeriksa pemodelan dan menilai kewajaran pertimbangan dan asumsi utama yang dibuat oleh manajemen dalam model dan parameter yang digunakan.

The significant judgements involved in determining the allowance for impairment losses include the following:

- *Determining whether a significant increase in credit risk has occurred or objective evidence of impairment was identified;*
- *Developing appropriate collective assessment models used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgement is applied in determining and preparing the models.*
- *Estimating forward-looking macroeconomic scenarios;*
- *Identifying and determining post model adjustments to the ECL model;*
- *Estimating future cash flow projection in the calculation of individual ECL; and*
- *Determining probability-weighted scenarios in assessing individual ECL.*

Further the prolonged COVID-19 pandemic has increased the uncertainty of these estimates and degree of judgement required to be exercised in estimating the allowance or impairment losses.

LPEI disclosures regarding allowance for impairment losses of financing, and sharia financing and receivables are described in Notes 2o and 9 to the consolidated financial statements.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matters

We have performed the following audit procedures to address this key audit matters:

1. *We understood and tested the relevant controls over allowance for impairment losses of financing, sharia financing and receivables. These controls include:*
 - *Review and approval of forward-looking information used in the ECL model;*
 - *Use of reliable and accurate critical data elements in the ECL model;*
 - *Review and approval of the ECL results, including post model adjustments applied;*
2. *We examined the modelling and assessed the reasonableness of key judgements and assumptions made by management in the model and parameters used.*



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

3. Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan kolektibilitas pembiayaan yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen pembiayaan yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah. Kami memeriksa sampel pembiayaan yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah, yang diidentifikasi oleh LPEI memiliki kualitas pembiayaan yang lebih rendah, pembiayaan yang direstrukturisasi, debitur yang terkena dampak COVID- 19 dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.
4. Kami menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung secara individual dengan memeriksa baik jumlah dan waktu dari arus kas masa depan yang digunakan oleh LPEI dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan jadwal pembayaran kembali dengan perjanjian pinjaman dan memeriksa ketepatan penggunaan faktor diskonto.
5. Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE kolektif, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan; (ii) evaluasi prakiraan makroekonomi Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum tentang prospek makroekonomi Indonesia; dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam model dengan data aktual yang tersedia di LPEI dan menguji keakuratan perhitungan KKE kolektif.
6. Kami menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang syariah berdasarkan persentase tertentu untuk masing-masing kualitas pembiayaan dan piutang syariah dan menguji keakuratan perhitungannya.
3. *We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over the collectability of financing, sharia financing and receivables and examining the financing files on a sampling basis. We examined sampled financing, sharia financing and receivables identified by LPEI as having lower credit quality, restructured financing, debtors impacted by COVID-19 and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*
4. *We assessed the adequacy of individual allowance for impairment losses by examining both the quantity and timing of future cash flows used by LPEI in the allowance for impairment loss calculation, testing the probability-weighted scenarios used in preparing the cash flows, including comparing the repayment schedule to the credit agreement and checking the appropriateness of discount factor used.*
5. *We assessed and tested the methodologies and significant modelling assumptions inherent within the collective ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in the calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook; and (iii) testing the completeness and accuracy of data used in the model with the actual data available within LPEI and accuracy the calculation of the collective ECL.*
6. *We assessed the adequacy of allowance for impairment losses of sharia financing and receivables based on specific percentage for each collectability and tested the accuracy of the calculation.*

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Hal lain

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.4/2022, LPEI sebagai emiten wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, LPEI menyusun laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan pada Catatan tersebut. Sementara itu, laporan keuangan konsolidasian LPEI tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang disajikan sebagai informasi komparatif, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Other matter

Based on the Financial Services Authority Regulation No 14/POJK.4/2022, LPEI as an Issuer obliged to prepare periodic financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard as regulated in Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Company". As described in Note 2b to the accompanying consolidated financial statements, LPEI has prepared the consolidated financial statements as of December 31, 2022 and for the year then ended in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statement as described in the above Note. Meanwhile, LPEI's consolidated financial statements as of and for the year ended 2021, which presented as comparative information, is prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan diatas, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan LPEI dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi LPEI atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian LPEI.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with the basis for preparation as described above, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing LPEI ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate LPEI or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing LPEI consolidated financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal LPEI.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan LPEI tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam LPEI untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian LPEI. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of LPEI internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on LPEI ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause LPEI to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within LPEI to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of audit of LPEI consolidated financial statement. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine such matter that was of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe the matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Bimo Iman Santoso

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1298/
Public Accountant License Number: AP.1298

Jakarta, 24 Maret 2023/March 24, 2023



00196

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

ASET	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,		
		2022	2021	
Kas	2a,2e	38	65	ASSETS Cash
Giro pada Bank Indonesia	2a,2e,2f,4	426	2,318	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	2a,2d,2e,2f			Current accounts with banks
Penugasan Umum	2ag,5,39	149,586	105,565	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1)	(9)	Allowance for impairment losses
		149,585	105,556	
Penugasan Khusus		31,061	568,550	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
		31,061	568,550	
		180,646	674,106	
Penempatan pada bank	2a,2d,2e,2g			Placements with banks
Penugasan Umum	2ag,6,39	2,180,664	4,799,155	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9)	(946)	Allowance for impairment losses
		2,180,655	4,798,209	
Penugasan Khusus		10,380,100	11,842,000	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai		(500)	(1,263)	Allowance for impairment losses
		10,379,600	11,840,737	
		12,560,255	16,638,946	
Efek-efek	2a,2d,2e,2h,7	1,970,120	560,050	Securities
Tagihan derivatif	2a,2d,2e,2j 2ag,3,8a	--	6	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya				Financing and receivables, financing and sharia receivables and other receivables
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang syariah Penugasan Umum				Financing and receivables, and financing and sharia receivables General Assignment
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2a,2d,2e,2k,2l			
Cadangan kerugian penurunan nilai	2ag,3,9,39	68,673,657	68,583,154	Financing and Receivables Allowance for impairment losses
		(15,548,824)	(14,851,827)	
		53,124,833	53,731,327	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	2a,2d,2e,2k			Financing and sharia receivables
Cadangan penyisihan aset produktif	2m,3,9,39	11,469,720	12,431,504	Allowance for doubtful accounts
		(2,285,350)	(2,696,204)	
		9,184,370	9,735,300	
Penugasan Khusus	2a,2d,2e			National Interest Account
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2l,9,39	3,489,399	2,948,504	Financing and receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(48,735)	(400,152)	Allowance for impairment losses
		3,440,664	2,548,352	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan		3,227	--	Financing and sharia receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(40)	--	Allowance for doubtful accounts
		3,187	--	
Total - neto		65,753,054	66,014,979	Total - net

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these
consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,		
		2022	2021	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
Piutang lainnya				Other receivables
Piutang pembiayaan garansi	2a,2d,2e,2k,2l 2ag,3,9i	325,532	298,034	Guarantee financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(43,865)	(40,159)	Allowance for impairment losses
		<u>281,667</u>	<u>257,875</u>	
Pajak dibayar dimuka	2a,2ah,3,15a	865	76,671	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	2a, 2v,12	15,129	15,782	Prepaid expenses
Piutang asuransi dan penjaminan	2a,2e,2p,2q,10a	288,989	285,656	Insurance and guarantee receivables
Aset reasuransi	2a,2r,2ag,10b	3,544	2,615	Reinsurance assets
Tagihan akseptasi	2a,2e,2d,2s			Acceptances receivable
Penugasan Umum	2ag,11,39	147,569	460,540	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai		(231)	(1,910)	Allowance for impairment losses
		<u>147,338</u>	<u>458,630</u>	
Penugasan Khusus		3,592	--	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai		(13)	--	Allowance for impairment losses
		<u>3,579</u>	<u>--</u>	
		<u>150,917</u>	<u>458,630</u>	
Aset tetap				Premises and equipment
Harga perolehan	2a,2t,3,13	1,525,478	1,525,187	Cost
Akumulasi penyusutan		(527,643)	(421,762)	Accumulated depreciation
		<u>997,835</u>	<u>1,103,425</u>	
Aset pajak tangguhan - neto	2a,2ah,3,15d,42 2a	1,552,978	2,767,613	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	2u,14	59,289	182,184	Other assets
TOTAL ASET		<u>83,815,752</u>	<u>89,040,921</u>	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,		
		2022	2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2a,2d,2w	46,046	32,570	Current liabilities
Liabilitas akseptasi	2a,2d, 2e,2s			Acceptances payable
Penugasan Umum	2ag,11,39	147,569	460,540	General Assignment
Penugasan Khusus		3,592	--	National Interest Account
		<u>151,161</u>	<u>460,540</u>	
Utang pajak	2a,2ah,15b	11,267	12,950	Taxes payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	2a,2d,2x	25,311,700	27,743,500	Debt securities issued
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	2ag,16,39	(21,028)	(31,111)	Unamortized debt issuance cost
		<u>25,290,672</u>	<u>27,712,389</u>	
Liabilitas derivatif	2a,2j,2ag,8b	56	--	Derivatives payable
Pinjaman yang diterima	2a,2d,2e,2y,17,39	29,297,065	28,799,571	Fund borrowings
Utang asuransi	2a,2e,2q	6,306	4,055	Insurance payable
Utang penjaminan	2a,2e,2p	61,715	62,363	Guarantee payable
Liabilitas asuransi	2a,2d,2q,2ag,10c	7,961	6,390	Insurance liabilities
Estimasi klaim penjaminan	2a,2p,2ag,18b	478,657	392,559	Estimated guarantee claim
Liabilitas imbalan kerja	2a,2af,3,29,39	144,514	157,675	Liability for employee benefits
Liabilitas sewa	2a,2e,2t,19	5,553	10,980	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	2a,2d,2t,2ag,20	1,446,534	1,268,501	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS		<u>56,947,507</u>	<u>58,920,543</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Kontribusi modal Pemerintah				Government capital contribution
Penugasan Umum	2a,21	23,589,123	23,640,939	General Assignment
Penugasan Khusus	2a,21	14,013,308	13,700,000	National Interest Account
		<u>37,602,431</u>	<u>37,340,939</u>	
(Kerugian)/Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan	2a,7	(3,391)	26,462	Unrealized (loss)/gain of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2a,2af,29	122,598	119,529	Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya:				Appropriated:
Cadangan umum	2a,22	322,161	322,161	General reserve
Cadangan tujuan	2a,22	758,235	758,235	Specific reserve
		<u>1,080,396</u>	<u>1,080,396</u>	
Belum ditentukan penggunaannya		(11,933,790)	(8,446,949)	Unappropriated
		<u>26,868,244</u>	<u>30,120,377</u>	
Kepentingan non-pengendali		1	1	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		<u>26,868,245</u>	<u>30,120,378</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>83,815,752</u>	<u>89,040,921</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, 2022	2021	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan bunga dan usaha syariah				Interest income and income from sharia
Pendapatan bunga	2a,2aa,23	2,711,977	2,932,550	Interest income
Penugasan Umum		404,978	410,231	General Assignment
Penugasan Khusus		3,116,955	3,342,781	National Interest Account
Usaha syariah	2a,2ad,23	594,439	920,739	Sharia
Penugasan Umum		148	--	General Assignment
Penugasan Khusus		594,587	920,739	National Interest Account
Jumlah pendapatan bunga dan usaha syariah		3,711,542	4,263,520	Total interest income and income from sharia
Pendapatan usaha dari Ujrah	24	309	--	Income from Ujrah
Beban bunga	2a,2aa,2ad,25	(2,936,114)	(3,057,215)	Interest expense
PENDAPATAN BUNGA DAN USAHA SYARIAH - NETO		775,737	1,206,305	INTEREST INCOME AND INCOME FROM SHARIA - NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan dari asuransi	2a,2ae,10d	23,129	12,357	Income from insurance
Pendapatan dari asuransi	2a,2ae,10d	(10,053)	(7,568)	Income from insurance
Premi reasuransi		13,076	4,789	Reinsurance premiums
Pendapatan dari asuransi - neto				Income from insurance - net
Kenaikan pada liabilitas asuransi	2a,2q,2ae, 10h	(1,444)	(3,190)	Increase in insurance liabilities
Kenaikan pada aset reasuransi	2a,2r,2ae,10g	903	1,348	Increase in reinsurance assets
Beban klaim asuransi dan lainnya	2a,2q,2ae,10e	(994)	(1,074)	Claim expense from insurance and other
Pendapatan dari penjaminan	2a,2p,10f	115,552	79,353	Income from guarantee
(Kerugian)/Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2a,2ag	(35,302)	24,715	(Loss)/Gain on foreign exchange transactions - net
Provisi dan komisi selain dari pembiayaan dan piutang	2a, 2ab	51,176	71,443	Non financing and receivables related fees and commission
Lain-lain		43,247	38,036	Others
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - NETO		186,214	215,420	TOTAL OTHER OPERATING INCOME - NET

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these
consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,		
		2022	2021	
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	2a,2o,9,26	(2,107,596)	(257,752)	Provision for impairment losses on financial assets
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	2a,2p,18b	(652)	(114)	Provision for impairment losses on estimated guarantee claim
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	2a,3,28	(468,623)	(467,309)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	2a,27	(270,380)	(269,077)	General and administrative
Lain-lain		(23,485)	(22,377)	Others
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(762,488)	(758,763)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
(RUGI)/LABA OPERASIONAL PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO		(1,908,785)	405,096	(LOSS)/PROFIT FROM OPERATIONS NON-OPERATING INCOME - NET
(RUGI)/LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		(1,892,365)	409,039	(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	2a,2ah,15c	(1,222,189)	(21,643)	TAX EXPENSE
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		(3,114,554)	387,396	(LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				OTHER COMPREHENSIVE INCOME TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto		(38,273)	(16,657)	Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income- net
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2a,2ah,15d	8,420 (29,853)	3,663 (12,994)	Tax related to components of other comprehensive income
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				OTHER COMPREHENSIVE INCOME NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	2a,2af,29	3,935	35,749	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2a,2ah,15d	(866)	(7,865)	Tax related to components of other comprehensive income
		3,069	27,884	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these
consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,		
		2022	2021	
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK		(26,784)	14,890	OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME - NET OF TAX
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(3,141,338)	402,286	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME FOR THE YEAR
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:				(Loss)/Profit For The Year Attributable to:
Pemilik entitas induk		(3,114,554)	387,396	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		--	--	Non-controlling interest
Jumlah		(3,114,554)	387,396	Total
Jumlah (Rugi)/Penghasilan Komprehensif yang diatribusikan kepada:				Total Comprehensive (Loss)/ Income
Pemilik entitas induk		(3,141,338)	402,286	For the Year Attributable To :
Kepentingan non-pengendali		--	--	Equity holders of the parent entity
Jumlah		(3,141,338)	402,286	Non-controlling interest Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

Keuntungan/(kerugian) Yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ Unrealized gain/(loss) from increase in the fair value of financial assets in group at fair value through other comprehensive income net of deferred tax										Pengukuran kembali kewajiban imbalan pensiun, setelah pajak		Saldo laba/Retained earnings		Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling Interest		Total ekuitas/ Total Equity	
Catatan/ Notes	contribution	income net of deferred tax	net of deferred tax	119,529	322,161	Saldo laba/Retained earnings		Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Total/ Total	1	30,120,378						
						Total ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Cadangan tujuan/ Specific reserve										
	37,240,939	26,462				759,235	(8,446,949)		30,120,377		30,120,378						
Saldo per 31 Desember 2021																	
Perencanaan Negara Bukan Pajak berdasarkan UU No. 2 tahun 2009																	
Kapitalisasi Modal Berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	2a,21,22	-	-	-	(67,164)	-	-	-	(67,164)	-	(67,164)						
Bagian laba pemerintah UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	2a,21,22	261,492	-	-	(261,492)	-	-	-	-	-	-						
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	2a,22	-	-	-	-	-	(23,631)	-	(23,631)	-	(23,631)						
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak tangguhan	2a,21,7,15d	-	-	-	-	-	-	-	(29,853)	-	(29,853)						
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pensiun, setelah pajak tangguhan	2a,2a1,15d,29	-	-	3,069	-	-	-	-	3,069	-	3,069						
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	759,235	(11,933,790)	-	26,989,244	1	26,989,245						
	37,602,431	(3,391)		122,598	322,161												
Saldo per 31 Desember 2022																	
Balance as of December 31, 2021																	
Impact of transitional adjustment on Government's not-tax revenue based on Law No.2 year 2009 article 20 paragraph 2 Capitalization based on Law No.2 year 2019 article 20 paragraph Government's profit share Allocation for general reserve Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income- net of deferred tax Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax Loss for the year																	
Balance as of December 31, 2022																	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	Kontribusi modal/ Government capital contribution	Keuntungan/(kerugian) Yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ Unrealized gain/(loss) from Increase in the fair value of financial assets in group at fair value through other comprehensive income net of deferred tax	39,456	91,645	Cadangan umum/ General reserve	322,161	Cadangan tujuan/ Specific reserve	758,235	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	(8,561,224)	Total	24,796,549	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Total ekuitas/ Total Equity	24,796,549
Saldo per 31 Desember 2020		32,146,276														
Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	2a.21.22	--	--	--	--	(43,962)	--	(20,926)	--	--	--	(64,888)	--	--	(64,888)	
Kapitalisasi Modal berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	2a.21.22	194,663	--	--	--	(131,885)	--	(62,778)	--	--	--	(13,570)	--	--	(13,570)	
Bagian laba pemerintah Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	2a.21	--	--	--	--	175,847	--	83,704	--	(259,551)	--	--	--	--	--	
Modal tambahan																
Penghasilan Umum	2a.21	2,500,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,500,000	--	--	2,500,000	
Penghasilan Khusus	2a.21	2,500,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,500,000	--	--	2,500,000	
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	2a.21, 7.15d	--	--	(12,994)	--	--	--	--	--	--	--	(12,994)	--	--	(12,994)	
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2a.2a, 15d, 29	--	--	--	27,884	--	--	--	--	--	--	27,884	--	--	27,884	
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	
Laba tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	387,396	--	387,396	--	--	387,396	
Saldo per 31 Desember 2021		37,340,939	26,462	119,529	--	322,161	758,235	(8,446,949)	30,120,377	1	30,120,378					

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

Saldo as of December 31, 2020																
Impact of transitional adjustment on Government's notional revenue based on Law No 2 year 2009 article 20 paragraph 2																
Capitalization based on Law No 2 year 2019																
Government's profit share																
Allocation for general reserve and specific reserve																
Additional capital																
General Assignment																
National Interest Account																
Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income - net																
Reassessment of defined benefit obligation, net of deferred tax																
Capital subscription from non-controlling interest																
Income for the year																
Balance as of December 31, 2021																

The accompanying notes form integral part of these
consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	3,105,347	3,342,781	Interest, fees and commissions received
Pendapatan usaha syariah	594,896	920,739	Sharia income
Pendapatan operasional lainnya - neto	221,516	224,895	Other operating income - net
Klaim atas kelebihan pembayaran pajak	75,806	91,639	Claims for tax refund
Beban operasional lainnya - neto	(649,360)	(613,603)	Other operating expenses - net
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya	(2,301,480)	(3,042,626)	Interest and other financing charges
Pendapatan bukan operasional - neto	16,411	3,071	Non-operating income - net
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1,063,136	926,896	Cash flows from operations before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi (Kenaikan)/penurunan aset operasi:			Changes in operating assets and liabilities (Increase)/decrease in operating assets:
Tagihan derivatif	6	(6)	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang	(2,681,616)	3,519,321	Financing and receivables
Pembiayaan/piutang syariah	958,557	2,930,610	Sharia financing/receivables
Biaya dibayar dimuka	653	(3,714)	Prepaid expenses
Piutang asuransi dan penjaminan	(27,125)	(251,025)	Insurance and guarantee receivables
Aset reasuransi	(929)	(1,331)	Reinsurance assets
Tagihan akseptasi	310,295	99,787	Acceptances receivable
Aset lain-lain	7,514	40,345	Other assets
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:			Increase/(decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	13,476	(5,366)	Current liabilities
Liabilitas akseptasi	(309,379)	(102,187)	Acceptances payable
Utang pajak	(1,683)	1,286	Taxes payable
Liabilitas derivatif	56	--	Derivatives payable
Utang asuransi	2,251	1,492	Insurances payable
Utang penjaminan	(648)	61,803	Guarantee payable
Liabilitas asuransi	1,571	3,160	Insurance liabilities
Estimasi klaim penjaminan	86,098	351,430	Estimated guarantee claim
Liabilitas imbalan kerja	(9,226)	(24,878)	Liability for employee benefits
Liabilitas lain-lain	215,048	(81,494)	Other liabilities
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(371,945)	7,466,129	Net cash (used in)/provided by operating activities

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOW (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,	
		2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil penjualan aset tetap		9	875
Pembelian efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		(1,476,856)	(4,657)
Perolehan aset tetap	2a,13	(11,549)	(44,745)
Penjualan efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		28,513	--
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi		(1,459,883)	(48,527)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman yang diterima		70,215,181	38,343,278
Pembayaran pinjaman yang diterima		(69,717,687)	(38,143,480)
Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo		(3,089,300)	(8,781,000)
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali		--	1
Pembayaran liabilitas sewa	19	(6,047)	(3,857)
Pembayaran ke pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak	22	(87,164)	(64,888)
Pembayaran bagian laba pemerintah	22	(23,631)	(13,570)
Penerimaan kontribusi modal dari Pemerintah Republik Indonesia			
Penugasan Umum	2a,21	--	2,500,000
Penugasan Khusus	2a,21	--	2,500,000
Kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan		(2,708,648)	(3,663,516)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas		(35,302)	24,715
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(4,575,778)	3,778,801
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		17,317,653	13,538,852
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		12,741,875	17,317,653
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES			
Proceeds from sale of premises and equipment			
Purchase of marketable securities at fair value through other comprehensive income			
Acquisitions of premises			
Selling of marketable securities at fair value through other comprehensive income			
Net cash used in investing activities			
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES			
Proceeds from fund borrowings			
Payments of fund borrowings			
Payments for matured debt securities issued			
Capital subscription from non-controlling interest			
Payments of lease liability			
Payments for government as Government non Tax Revenue			
Payments government's profit share			
Contributed capital received from Government of the Republic of Indonesia			
General Assignment			
National Interest Account			
Net cash used in financing activities			
Foreign exchange effect related to cash and cash equivalents			
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND EQUIVALENTS			
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR			
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR			

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOW (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,		
		2022	2021	
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:
Kas		38	65	Cash
				Current account
Giro pada Bank Indonesia	2a,4	426	2,318	with Bank Indonesia
Giro pada bank	2a,5	180,647	674,115	Current accounts with banks
Penempatan pada bank - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2a,6	12,560,764	16,641,155	Placements with banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Total kas dan setara kas		12,741,875	17,317,653	Total cash and cash equivalents
Tambahan informasi arus kas disajikan pada Catatan 44.				Additional information cashflow presented in Note 44

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these
consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum**1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia didirikan dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("BEI") yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan. Pendirian Bank ditetapkan dengan akta No. 49 tanggal 25 Juni 1999 oleh notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-13130.HT.01.01-TH.99 tanggal 19 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6652.

BEI memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/12/KEP.GBI/1999 tanggal 18 Agustus 1999 dan beroperasi secara komersial sejak tanggal 10 September 1999. Berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 tanggal 24 April 2000, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Pada tanggal 21 September 2007, BEI telah mendapat izin usaha syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/1494/DPbs.

Pemegang saham telah menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar BEI tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha BEI berdasarkan (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Mei 2003 yang diaktakan dengan akta No. 45 tanggal 21 Mei 2003 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 tanggal 23 Mei 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 2 September 2003, Tambahan No. 7838.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General**1.a. Establishment and Formation of LPEI**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia was established under the name PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("BEI") which established based on Government Regulation No. 37 of 1999 dated May 25, 1999, regarding the State Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia in the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Banking Sector. The establishment of the Bank was notarized under deed No. 49 dated June 25, 1999 of notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The deed of establishment approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-13130.HT.01.01-TH.99 dated July 19, 1999 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1999, Supplement No. 6652.

BEI has a business license to conduct commercial banking activities based on the Decision Letter No. 1/12/KEP.GBI/1999 dated August 18, 1999 of the Governor of Bank Indonesia and started commercial operations on September 10, 1999. The Bank obtained its status as a foreign exchange bank based on the Decision Letter of the Deputy Governor of Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 dated April 24, 2000.

On September 21, 2007, the BEI obtained its sharia business license from the Bank Indonesia through Decision Letter No. 9/1494/DPbs.

The stockholder approved the revision of article 3 of the BEI's Articles of Association concerning the BEI's objectives and scope of activities based on (i) Shareholder's Extraordinary General Meeting held on May 19, 2003 as provided in the deed No. 45 dated May 21, 2003 of notary Imas Fatimah, S.H., which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 dated May 23, 2003 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 70 dated September 2, 2003, Supplement No. 7838.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)
1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Maret 2007 yang diaktakan dengan Akta No. 15 tanggal 10 Mei 2007 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-05624.HT.01.04- TH.2007 tanggal 21 Mei 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7655.

Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2008, yang diaktakan dengan Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 2008 oleh notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-73679.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2003, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar BEI, maksud dan tujuan BEI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pembiayaan perdagangan ekspor impor melalui pemberian pinjaman/pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi serta jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan perdagangan luar negeri, penerus pinjaman pemerintah, termasuk menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk giro, simpanan berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memperoleh pinjaman dan menerbitkan efek-efek, baik di dalam maupun di luar negeri, serta melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

1. General (continued)
1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

and (ii) Stockholder's Extraordinary General Meeting held on March 22, 2007 as provided in the Deed No. 15 dated May 10, 2007 of notary Imas Fatimah, S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W7-05624.HT.01.04- TH.2007 dated May 21, 2007 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 61 dated July 31, 2007, Supplement No. 7655.

In the Stockholder's Extraordinary General Meeting held on July 18, 2008 as mentioned in Deed No. 2 dated August 1, 2008 of notary Sutjipto, S.H., M.Kn. which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-73679.AH.01.02.Year 2008 dated October 14, 2008, the stockholders approved the entire changes in the Bank's Articles of Association to conform with Law No. 19 Year 2003, Law No. 40 Year 2007 and Government Regulation No. 45 Year 2005.

According to article 3 of the BEI's Articles of Association, the BEI's objectives and scope are to execute and provide assistance to the government in the implementation of its policies and programs in the economic sector and in the national development in general, particularly in export and import trade financing through the disbursement/financing of trade financing and providing guarantees/insurance as well as providing consultations on foreign trade financing, the disbursement of two-step financing from the government, including collecting third-parties funds in the form of demand deposits, time deposits or other forms, obtaining borrowings and issuing securities in the local or foreign markets, and conducting sharia banking activities.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)**1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)**

Pada tanggal 12 Januari 2009, Gubernur Bank Indonesia telah mencabut izin usaha BEI sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan menegaskan bahwa dengan dicabutnya izin usaha BEI, maka seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) beralih kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI (Note 1d).

Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI Pasal 48 menyebutkan bahwa paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, LPEI mulai beroperasi, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa tanggal 1 September 2009 sebagai tanggal mulai beroperasinya LPEI. Pada saat mulai beroperasinya LPEI, maka BEI dinyatakan bubar dan seketika itu pula seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI dan pegawai BEI tersebut beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI dan pegawai LPEI.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BEI yang diaktakan No. 16 tanggal 31 Agustus 2009 oleh Notaris Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., pemegang saham memutuskan diantaranya:

- Mengalihkan seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI.
- Mengalihkan semua pegawai BEI menjadi pegawai LPEI termasuk namun tidak terbatas pada masa kerja, penghargaan masa kerja, dan jasa produksi pegawai yang telah dibiayakan sampai dengan 31 Agustus 2009.
- Pembubaran BEI tanpa likuidasi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)**1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)**

On 12 January 2009, the Governor of Bank Indonesia revoked the BEI business license as a follow-up to the issuance of Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Institution and confirmed that with the revocation of the BEI business license, all assets and liabilities as well as legal rights and obligations of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) transferred to the Indonesian Export Financing Institution ("LPEI") as stipulated in Law No. 2 of 2009 dated January 12, 2009 concerning LPEI (Note 1d).

Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 about LPEI Article 48 states maximum of 9 (nine) months since the Law was promulgated, LPEI started to operate, so that based on Decree of the Financial Minister No. 336/KMK.06/2009 dated August 24, 2009, the Government of Republic of Indonesia decided that September 1, 2009 is the start of operation date of LPEI. When LPEI started to operate, the BEI was dissolved and effective immediately, all legal assets and liabilities as well as rights and obligations of BEI employees become the legal assets and liabilities, as well as the rights and obligations of employees of LPEI.

Based on the decision statement of the BEI Stockholder's Extraordinary General Meeting as mentioned in the deed No. 16 dated August 31, 2009 of notary Ms. Anne Meyanne Alwie, S.H., the stockholders decided among others to:

- Transfer all the assets and liabilities, rights and obligations legal of the BEI to become the legal assets and liabilities and rights and obligations legal of LPEI.
- Transfer all of the BEI's employees to become employees of LPEI including but not limited to the working period, employee benefits and employee production service that had been expensed up to August 31, 2009.
- The Dissolve the BEI without liquidation.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)
1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

LPEI akan lebih berfokus dalam menjalankan kegiatan usaha berupa pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi dalam rangka ekspor. Keberadaan LPEI juga akan memberikan garansi atas berbagai risiko yang selama ini tidak diberikan oleh bank komersial. Pihak asing akan lebih mempunyai keyakinan atas LPEI karena LPEI merupakan bagian dari Pemerintah dan dibentuk berdasarkan atas undang-undang (*sovereign*). LPEI juga bisa mengatur *prudential norm*-nya sendiri. Selain itu, struktur organisasi LPEI yang menggunakan *One Board System* tentu akan bisa mengefektifkan pengambilan keputusan.

Kegiatan usaha LPEI adalah:

- a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Penjaminan yang meliputi: penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor;
- c. Asuransi ekspor yang meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor;
- d. Bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

1. General (continued)
1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

LPEI will be more focused on running the business activities of financing, guarantees, insurance, and consulting services in order to export. The presence of LPEI also will provide warranty for a variety of risk that has not been granted by commercial banks. Foreign parties will have more confidence in LPEI because LPEI is part of the Government and was formed based on law (sovereign). LPEI can also set the prudential norm of his own. In addition, the structure of LPEI use One Board System would be effective for decision making.

LPEI business activities are:

- a. Provides local and international financing and receivable under the conventional and Syariah principles;*
- b. Guarantee that includes: underwriting for Indonesian exporters for payment received from the buyer of goods/services overseas, guarantee for importers of goods/services from Indonesia to overseas for the payment of which has been given, which provides a guarantee for bank financing on export transactions to Indonesian exporters, as well as guarantee in order to tender related to the implementation of the project in whole or in part which is supporting export activity;*
- c. Export insurances cover the risk of failure on export, failure to pay, the investment by insurance Indonesian companies abroad, and/or political risk insurance in a country's export destination;*
- d. Provides guidance and consulting services to banks, financial institutions, exporters, manufacturers of export goods, especially micro, small, medium, and cooperatives to help overcome the barriers faced by banks/financial institutions in providing financing to exporters with commercial potential and/or important to the economic development of Indonesia.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

Untuk membiayai kegiatan dalam melaksanakan Penugasan Umum, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:

- a. Penerbitan surat berharga;
- b. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik di dalam maupun luar negeri;
- c. Hibah;
- d. Penempatan dana oleh Bank Indonesia.

Penugasan Khusus atau *National Interest Account* (NIA) adalah penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Penugasan Khusus kepada LPEI bertujuan untuk membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial yang enggan atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko, namun harus memenuhi kriteria meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)

Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI dapat memberikan pembiayaan atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional/Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Penugasan khusus ini menjadi strategis karena bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

To finance its activities in order to conduct the General Assignment, LPEI can obtain funds derived from:

- a. Issuance of securities;
- b. Short-term loan, medium-term, and/or long-term Indonesia government, foreign governments, multilateral institutions, banks and financial institutions and finance loans, both at domestic and abroad;
- c. Grant;
- d. Placement of funds by Bank Indonesia.

The Special Assignment or National Interest Account (NIA) was assigned from government to LPEI to provide export financing for transactions or projects that is difficult to be implemented commercially, but its required by the government to support the government policies or export program.

This NIA assignment to LPEI aims to help in providing finance to the area that is not accessible by banks or commercial financial institutions that are reluctant or do not have the capacity in terms of competitive financing and the ability to absorb risks, it must meet the criteria to enhance competitiveness and value-added Indonesian products, support the growth of the domestic industry and has the potential for improvement and long-term export development.

1.b. National Interest Account (NIA)

Based on the mandate of Law No. 2 Year 2009, LPEI is able to provide financing for the transaction or project that is commercially difficult to implement, but is considered necessary by the Government to support a national export policy or program/National Interest Account (NIA). This special assignment becomes strategic because it aims to improve the competitiveness and value-added products of Indonesia, supporting the growth of the domestic industry, and has the potential for improvement and long-term export development.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)
1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (lanjutan)

Kegiatan usaha LPEI dalam rangka Penugasan Khusus dapat diberikan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang meliputi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Di tahun 2015, LPEI telah mendapatkan penugasan PKE dari Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2015 yang telah dua kali diubah yaitu pada tahun 2017 dengan PMK No. 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2017 dan pada tahun 2021, dengan PMK No. 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2021. Pelaksanaan atas mandat tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Pada tahun 2015, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 1156/KMK.08/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Produk Gerbong Penumpang Kereta Api. KMK No. 1231/KMK.08/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015 yang diubah berdasarkan KMK No. 167/KMK.08/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1231/KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015.

1. General (continued)
**1.b. National Interest Account (NIA)
(continued)**

The business activities of LPEI in the framework of NIA can be administered either through conventional or based on sharia principles that include financing, guarantees and insurance to both legal entities and other entities including individuals who live inside or outside the territory of the Republic Indonesia.

In 2015, LPEI has obtained a NIA assignment from the Government through the Regulation of Minister of Finance (PMK) No. 134/PMK.08/2015 on National Interest Account Assignment To Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia issued on July 14, 2015 which has been amended twice In 2017, with PMK No. 198/PMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI dated December 21, 2017 and In 2021, with PMK No. 183/PMK.08/2021 regarding National Interest Account Assignment to LPEI dated December 14, 2021. The implementation of the mandate is set out in Decree of the Minister of Finance (KMK).

In 2015, has been issued Decree of Minister of Finance (KMK) No. 1156/KMK.08/2015 dated November 13, 2015 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Product. KMK No. 1231/KMK.08/2015 dated December 8, 2015 on Special Assignment To LPEI Economic Policy Package To Support Government in 2015 which amended based on KMK No. 167/KMK.08/2016 dated March 8, 2016 on the Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 1231/KMK.08/2015 on Special Assignment to LPEI to Support Government Economic Policy Package year 2015.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Pada tahun 2017, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Gerbong Penumpang Kereta Api yang ditetapkan tanggal 12 Mei 2017 dengan negara tujuan ke Bangladesh yang sudah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 513/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Kereta Penumpang dan Gerbong Barang Kereta Api dengan Negara tujuan ke Bangladesh dan Srilanka yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan alokasi dana.

LPEI juga mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang ditetapkan tanggal 5 September 2017 dengan negara tujuan ke Thailand, Nepal, Uni Emirat Arab, dan negara- negara di kawasan Afrika yang tidak diembargo Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 512/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana.

1. General (continued)**1.b. National Interest Account (NIA)
(continued)**

In 2017, has been issued Decree of Minister of Finance (KMK) No. 374/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products dated on May 12, 2017 with Bangladesh and has been amended based on the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 513/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 374/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products with Bangladesh and Srilanka as the country of destination and has term of assignment until December 31, 2020 taking into account the allocation of funds.

LPEI has obtained a special assignment from the Government through the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 649/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Aircrafts dated on September 5, 2017 with the countries of destination Thailand, Nepal, United Arab Emirates, and countries in the African region that are not in the embargo of the United Nations and have been amended based on Decree of Minister of Finance (KMK) No. 512/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 649/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Aircraft Export Financing which has an assignment period until December 31, 2020 taking into account the availability of fund allocation.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)
**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Pada tahun 2019 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 01/KMK.08/2019 tanggal 2 Januari 2019 sebagai Addendum KMK No.787/KMK.08/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 685/KMK.08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 387/KMK.08/2022 tanggal 23 September 2022 sebagai Addendum Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 685/KMK.08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI dalam rangka Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pada tahun 2020, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 409/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2025.

Pada tahun 2020, juga telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 428/KMK.08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2021.

1. General (continued)
1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

In 2019, has been issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 01/KMK.08/2019 dated January 2, 2019 regarding Changes of KMK No. 787/KMK.08/2017 dated November 6, 2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing Exports to Africa, South Asia, and the Middle East and issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 685/KMK.08/2019 dated August 27, 2019 and have been amended based on the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 387/KMK.08/2022 dated September 23, 2022 regarding changes of the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 685/KMK.08/2019 dated August 27, 2019 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to developing Mandalika Special Economic Zone Tourism.

In 2020, has been issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 372/KMK.08/2020 dated August 11, 2020 and has been updated based on the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 409/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 revision of Decree of KMK No. 372/KMK.08/2020 dated August 11, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Export Oriented Small and Medium Enterprises Sector, with a term of assignment period until December 31, 2025.

In 2020, also has been issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 428/KMK.08/2020 dated September 23, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Indonesian Aviation Industry, with a term of assignment period until December 31, 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Serta di 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020 yang telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 410/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas KMK No. 526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Fasilitas *Trade Finance* dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tahun 2021, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 406/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor dalam Rangka Mendukung Industri Alat Transportasi dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2026.

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK/08/2021 tentang penugasan khusus kepada LPEI, perlu dibentuk komite penugasan khusus.

Dalam rangka pelaksanaan tugas komite, Ketua komite membentuk tim teknis, Komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kementerian Keuangan.

Dalam rangka memperoleh masukan terkait kebijakan kementerian sektor sesuai surat keputusan Menteri Keuangan No. 191/KMK.08/2016, dibentuk kelompok advsori yang merupakan perwakilan dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.08/2020, tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2020, masa kerja komite dan kelompok Advsori ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)**1.b. National Interest Account (NIA)
(continued)**

In 2020, has been issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 526/KMK.08/2020 dated November 18, 2020 and has been amended based on the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 410/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 revision of KMK No. 526/KMK.08/2020 dated November 18, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Trade Finance Facilities in Order to Support National Economic Recovery, with a term of assignment period until December 31, 2022.

In 2021, has been issued the Decree of the Minister of Finance (KMK) No. 406/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 regarding Special Assignment to LPEI to Provide Export Financing in Order to Support the Transportation Equipment Industry with an assignment period until December 31, 2026.

According to Article 9 Minister of Finance Regulation No. 183/PMK/08/2021 on special assignment to the LPEI, committees for NIA need to be established.

In order to execute the task of the committee, the Chairman of the committee formed a technical team, the Committee which is responsible and report on performance of its duties to the Ministry of Finance.

In order to obtain feedback regarding the appropriate sector ministry policy decision in accordance with the Minister of Finance decision No. 191/KMK.08/2016, Advisory Group comprising representatives of the Ministries/Non-ministries Government Organization has been formed.

Based on the decision of the Minister of Finance No. 66/KMK.08/2020, about establishing committess for NIA in 2020, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2020 until December 31, 2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.36/KMK.08/2021, tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2021, ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Peraturan Menteri Keuangan No.183/PMK.08/2021 tentang LPEI juga memuat tata cara pengajuan usul program ekspor nasional dari kementerian dan lembaga, sumber dana, denda, provisi penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian, pembentukan komite penugasan khusus ekspor, dan pembayaran.

Pada tahun 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 272/KMK.08/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Pengembangan Infrastruktur Marina dan Penunjang Pariwisata Pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2024.

Kegiatan usaha LPEI dalam Penugasan Khusus:

- a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Penjaminan yang meliputi Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa diluar negeri, penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyedia pembiayaan transaksi yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia;
- c. Asuransi yang meliputi asuransi atas risiko gagal bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi risiko politik.

Untuk membiayai kegiatannya dalam rangka penugasan khusus, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara berupa penyertaan modal negara yang diakui dalam ekuitas LPEI sebagaimana penambahan modal dan/atau bentuk lain yang diatur dalam peraturan menteri;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)**1.b. National Interest Account (NIA)
(continued)**

Based on the decision of the Minister of Finance No. 36/KMK.08/2021, about establishing committess for NIA in 2021, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2021 until December 31, 2021.

Minister of Finance Regulation No. 183/PMK.08/2021 on LPEI also includes procedure of filing a national export program proposals of ministries and agencies, sources of funds, fines, underwriting fees, insurance premiums, indemnities, committees, and special assignments export payments.

In 2022, the Decree of the Minister of Finance (KMK) No. 272/KMK.08/2022 dated July 5, 2022 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Developing Marina Infrastructure and Tourism Support in Super Priority Tourism Destinations with an assignment period until December 31, 2024.

LPEI's business activities in NIA include the following:

- a. Provides conventional and sharia financing both domestic and overseas;
- b. Guarantees for Indonesian exporters on payments received from the buyer of goods and/or services abroad, guarantee for banks that become partners in providing financing transactions that have been provided to the Indonesian exporters;
- c. Insurance that cover against payment default, insurance on the investments made by the Indonesian company in overseas, and/or insurance on political risk.

To finance its activities in the framework of a special assignment (National Interest Account), LPEI can obtain funds from:

- a. State budget of revenues and expenditures in the form of equity participation which is recognized in LPEI's equity as additional capital and/or other forms stipulated in the ministerial regulations;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

- b. Bagian kapitalisasi modal LPEI untuk Dana Penugasan Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha pelaksanaan Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI guna mendukung program ekspor nasional pada tanggal 31 Desember 2020, Negara Republik Indonesia telah menyetorkan penambahan penyertaan modal negara masing-masing sebesar Rp6.000.000 untuk LPEI. Modal tersebut sebesar Rp1.000.000 efektif diterima pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Rp5.000.000 efektif diterima pada 30 Desember 2020.

Dana dalam rekening Penugasan Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Penugasan Khusus. Pendanaan program Penugasan Khusus dibatasi paling banyak sebesar akumulasi dana Penugasan Khusus, setelah memperhitungkan seluruh biaya terkait. Biaya terkait program Penugasan Khusus meliputi biaya dana, cadangan kerugian penurunan nilai, dan biaya operasional lain yang dibebankan oleh LPEI.

1.c. Jaringan Kantor

Kantor Grup berlokasi di Prosperity Tower, District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta - 12190. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, LPEI mempunyai tiga kantor wilayah yaitu Kantor Wilayah I yang membawahi Wilayah Jakarta, Kantor Cabang Medan, dan Kantor Pemasaran Batam; Kantor Wilayah II membawahi Kantor Cabang Surakarta dan Kantor Pemasaran Balikpapan; dan Kantor Wilayah III membawahi Kantor Cabang Makassar dan Kantor Pemasaran Denpasar.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)**1.b. National Interest Account (NIA)
(continued)**

- b. Part of capitalization of LPEI's equity for NIA stipulated in the requirements of law;
- c. Other legitimate sources in accordance with the requirements of law.

In strengthening the capital structure and increase the capacity of business for the implementation of NIA to export financing to support export programs nationwide, December 31, 2020, the Republic of Indonesia has injected additional equity participation amounting to Rp6,000,000 to LPEI, respectively. The capital injection Rp1,000,000 was received on August 18, 2020 and Rp5,000,000 was received on December 30, 2020, respectively.

The funds available under NIA bank account can only be used for the implementation of NIA program. Financing for NIA program is limited to the accumulated funds of NIA, after taking into account all of the related costs. The cost of NIA includes cost of fund, allowance for impairment, and operational expense charge by LPEI.

1.c. Office Network

Group office is located at the Prosperity Tower, District 8, Jenderal Sudirman Street Lot 52-53, Jakarta - 12190. As of December 31, 2022 and 2021, LPEI has three regional offices which are Regional Office I covers Jakarta, Medan Branch, and Batam Marketing Office; Regional Office II covers Surakarta Branch Office and Balikpapan Marketing, and Office Regional Office III covers Makassar Branch and Denpasar Marketing Office.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)
**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai**

Susunan Dewan Direktur LPEI pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah
sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif *)	Rijani Tirtoso	Daniel James Rompas
Anggota Dewan Direktur **)	Kasan	Kasan
Anggota Dewan Direktur ***)	Arus Gunawan	Arus Gunawan
Anggota Dewan Direktur ****)	Suminto	Suminto
Anggota Dewan Direktur *****)	Felia Salim	Felia Salim
Anggota Dewan Direktur *****)	D. James Rompas	Rijani Tirtoso

*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan No. 552/KMK.06/2021 tentang
Penetapan Ketua Dewan Direktur
Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal
31 Desember 2021, menetapkan Rijani
Tirtoso sebagai Ketua Dewan Direktur
Merangkap Direktur Eksekutif LPEI
berlaku efektif setelah 5 hari kerja sejak
tanggal ditetapkan dengan masa jabatan
sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
menggantikan Daniel James Rompas
yang telah menjabat sejak 23 Desember
2019 berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No.933/KMK.06/2019.

**) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan No. 274/KMK.06/2020 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Dewan Direktur Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal
5 Juni 2020, mengangkat Kasan sebagai
anggota dewan direktur sejak
5 Juni 2020 dengan masa jabatan sampai
dengan tanggal 31 Agustus 2023.

1. General (continued)
**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees**

The composition of the Board of Directors of
LPEI as of December 31, 2022 and 2021, are
as follows:

			<i>Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director *)</i>
			<i>Member of Board of Directors **)</i>
			<i>Member of Board of Directors ***)</i>
			<i>Member of Board of Directors ****)</i>
			<i>Member of Board of Directors *****)</i>
			<i>Member of Board of Directors *****)</i>

*) Based on Minister of Finance Decision
Letter No.552/KMK.06/2021 regarding
Appointment of the Chairman of the
Board of Directors concurrently as
Executive Director Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia dated
December 31, 2021, appointed Rijani
Tirtoso as Chairman of the Board of
Directors and concurrently as Executive
Director LPEI, effective after 5 working
days from the date of appointment with a
tenure up to August 31, 2024 replacing
Daniel James Rompas who has served
since December 23, 2019 based on the
Decree of the Minister of Finance
No.933/KMK.06/2019.

**) Based on Minister of Finance Decision
Letter No. 274/KMK.06/2020 regarding
Termination and Appointment of
Members of the Board of Directors of
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
dated June 5, 2020, Kasan was
appointed as a member of the board of
directors since June 5, 2020 for a tenure
up to August 31, 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

***) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 19 November 2020, mengangkat Arus Gunawan sebagai anggota dewan direktur sejak 19 November 2020 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

****) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.06/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 14 Agustus 2018, mengangkat Suminto sebagai anggota dewan direktur sejak 1 September 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

*****) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 25 Juli 2018, mengangkat Felia Salim sebagai anggota dewan direktur sejak 25 Juli 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

***) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 530/KMK.06/2020 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated November 19, 2020, Arus Gunawan was appointed as a member of the board of directors since November 19, 2020 for a tenure of 5 (five) years.

****) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 554/KMK.06/2018 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated August 14, 2018, Suminto was appointed as a member of the board of directors since September 1, 2018 for a tenure of 5 (five) years.

*****) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 522/KMK.06/2018 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated July 25, 2018, Felia Salim was appointed as a member of the board of directors since July 25, 2018 for a tenure of 5 (five) years.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

*****Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 934/KMK.06/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 23 Desember 2019, mengangkat Rijani Tirtoso sebagai anggota dewan direktur sejak 23 Desember 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2021 tentang Penetapan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Desember 2021, menetapkan Daniel James Rompas kembali menjadi anggota Dewan Direktur LPEI berlaku efektif setelah 5 hari kerja sejak tanggal ditetapkan dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Susunan Direktur Pelaksana LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

*****Based on Minister of Finance Decision Letter No. 934/KMK.06/2019 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 23, 2019, Rijani Tirtoso was appointed as a member of the board of directors since December 23, 2019 for a tenure up to December 23, 2024. Based on Minister of Finance Decision Letter No. 522/KMK.06/2021 regarding Appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 31, 2021, appointed Daniel James Rompas return to being a member of the LPEI Board of Directors effective after 5 working days from the date of appointment with a tenure up to August 31, 2024.

The Managing Directors of LPEI as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan *)	Dikdik Yustandi	Managing Director of Financing *)
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis **)	Maqin U. Norhadi	Managing Director of Business Development **)
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional ***)	Agus Windiarto	Managing Director of Finance & Operations ***)
Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit ****)	Agus Windiarto	Act. Managing Director of Credit & Risk Management ****)
Plh. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit *****)	Titiek Setiyowati	Act. Managing Director of Credit & Risk Management *****)
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan *****)	Chesna F. Anwar	Managing Director of Institutional Relations *****)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

**31 Desember/
December 31, 2021**

Direktur Pelaksana I *)
Direktur Pelaksana II **)
Direktur Pelaksana III ***)
Direktur Pelaksana IV ****)
Direktur Pelaksana V *****)

Dikdik Yustandi
Maqin U. Norhadi
Agus Windiarto
Henry Sihotang
Chesna F. Anwar

Managing Director I *)
Managing Director II **)
Managing Director III ***)
Managing Director IV ****)
Managing Director V *****)

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0010/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Dikdik Yustandi sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

**) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0004/KDD/04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Maqin U. Norhadi sebagai Direktur Pelaksana dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

***) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0012/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Agus Windiarto sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

1. General (continued)**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

*) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0010/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Dikdik Yustandi was assigned as Managing Director since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.

**) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0004/KDD/04/2021 dated April 12, 2021 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Maqin U. Norhadi was assigned as Managing Director for his term until August 31, 2024.

***) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0012/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Agus Windiarto was assigned as Managing Director since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)
**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

****) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0013/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Henry Sihotang sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0002/KDD/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Pemberhentian Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memberhentikan dengan hormat Henry Sitohang sebagai Direktur Pelaksana.

****) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0003/KDD/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Perangkapan Jabatan, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Direktur Pelaksana menetapkan Agus Windiarto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaksana dan perangkapan jabatan Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko & Kredit dengan masa jabatan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko & kredit atau selambat-lambatnya 5 April 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)
**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

****) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0013/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Henry Sihotang was assigned as Managing Director since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024. Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0002/KDD/12/2022 dated December 2, 2022 regarding Dismissal of the Managing Director of the Indonesian Export Financing Agency honorably dismissed Henry Sitohang as Managing Director.

****) Based on the Decree of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0003/KDD/12/2022 dated December 13, 2022 concerning Concurrent Positions, Task Executor and Daily Executor of the Managing Director assigned Agus Windiarto as Acting Director (Plt) of Managing Director and concurrent positions as Managing Director of Credit & Risk Management with a term of office from the date set until Appointment of the Managing Director of Credit & Risk Management or no later than April 5, 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

*****) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0003/KDD/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Perangkatan Jabatan, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Direktur Pelaksana menetapkan Titiek Setiyowati sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko & Kredit dengan masa jabatan sejak ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko & Kredit atau selambat-lambatnya 5 April 2023.

*****) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0014/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Chesna Fizetty Anwar sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

Peranan dan tanggung jawab pembedangan Manajemen LPEI berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif No.0009/KDE/02/2022 tentang Pembedangan Direktur Pelaksana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Prosedur No. MPO.0029/CEO/11/2021 tanggal 25 November 2021 dan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mulai berlaku tanggal 3 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

*****) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0003/KDD/12/2022 dated December 13, 2022 regarding Multiple Positions, Acting Duties and Daily Executor The Managing Director stipulates Titiek Setiyowati as the Daily Executor (Act) of the Managing Director of Credit & Risk Management with a term of office from the appointment until the appointment of the Managing Director Credit & Risk Management or no later than April 5, 2023.

*****) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0014/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Chesna Fizetty Anwar was assigned as Managing Director since September 1, 2019 for her term until August 31, 2024.

The roles and responsibilities of Management of LPEI based on the Board of Executive Directors Decision Letter No. 0009/KDE/02/2022 regarding structure of Managing Director which is an inseparable part of Memorandum of Procedure No. MPO.0029/CEO/11/2021 dated November 25, 2021 and Executive Director Regulation No. 0065/PDE/11/2019 regarding the Guidelines and Work Procedures of the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, which came into force on January 3, 2022, are as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)
**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

- Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan, Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis, Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan, Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko, Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional, *Head of* Kepatuhan, SDM, & Transformasi Organisasi, *Head of Audit* (Ketua SKAI) HR & TO dan *Head of* Internal Audit.
- Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan membawahi *Head of* Wilayah, Divisi BUMN, Divisi UMKM, Divisi Korporasi I, dan Divisi Korporasi II.
- Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis membawahi, *Head of* Penjaminan & Asuransi, Divisi Syariah, Divisi Transaksi Perdagangan Internasional, Divisi Program Investasi Pemerintah dan Divisi Penugasan Khusus.
- Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional membawahi *Head of* Operasional & TI, *Head of* Keuangan & Perencanaan Strategis, dan Divisi Pengadaan & Umum.
- Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit membawahi *Head of* Manajemen Risiko & Kredit.
- Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan membawahi Divisi Jasa Konsultasi, Divisi Riset & Pengembangan, Divisi Institusi Finansial & Tresuri, Divisi Strategi Komunikasi & Hubungan Kelembagaan, Divisi Sekretariat Lembaga, Divisi Hukum, dan Fungsional Narasumber Lembaga.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)
**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

- *Executive Director is responsible for Managing Director of Financing, Managing Director of Business Development, Managing Director of Institutional Relations, Managing Director of Risk Management, Managing Director of Finance & Operations, Head of Compliance, SDM & Transformasi organisasi, HR & TO and Head of Internal Audit.*
- *Director of Financing is responsible for Head of Region, State Owned Enterprise Division, Small & Medium Enterprise Division, Corporate I Division, and Corporate II Division.*
- *Director of Business Development is responsible for Head of Guarantee & Insurance, Sharia Division, International Trade Finance Division, Government Investment Program Division, and Special Mandate Division.*
- *Director of Finance & Operations is responsible for Head of Operations & IT, Head of Finance & Strategic Planning, and Procurement and GA Division.*
- *Director of Credit & Risk Management is responsible for Head of Credit & Risk Management.*
- *Director of Institutional Relations is responsible for Advisory Services Division, IEB Institute Division, Financial Institution & Treasury Division, Communication & Stakeholder Engagement Division, Corporate Secretary Division, Corporate Legal Division, and Knowledge Retainer Specialist.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

- *Head of Penjaminan & Asuransi* membawahi Divisi Penjaminan dan Divisi Asuransi.
- *Head of Operasional & TI* membawahi Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Operasional.
- *Head of Keuangan & Perencanaan Strategis* membawahi Divisi Keuangan, Divisi Strategi dan Perencanaan Lembaga, Divisi Manajemen Aset & Kewajiban, dan Fungsional Hubungan Investor & Internasional.
- *Head of Kepatuhan, SDM & Transformasi Organisasi* membawahi Divisi HRBP, Pengembangan Organisasi & Rekrutmen, Divisi *HR Service* & Pengembangan SDM, Divisi Transformasi & Budaya Lembaga, dan Divisi Kepatuhan.
- *Head of Audit* (Ketua SKAI) membawahi Divisi Reguler Audit, Divisi Audit Khusus, dan Departemen Pengendalian Mutu, dan Tindak Lanjut & Metodologi Audit.
- *Head of Wilayah* membawahi Kantor Wilayah I, Kantor Wilayah II, Kantor Wilayah III, dan Fungsional *Special Mention*.
- *Head of Manajemen Risiko & Kredit* membawahi Divisi Analisa Risiko Kredit I, Divisi Analisa Risiko Kredit II, Divisi Kebijakan dan Prosedur, Divisi Pengembangan Produk, Divisi Manajemen Risiko & Portofolio, dan Pemegang Limit Individu.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

- *Head of Guarantee & Insurance* is responsible for Guarantee Division and Insurance Division.
- *Head of Operations & IT* is responsible for Technology Information Division and Operations Division.
- *Head of Finance & Strategic Planning* is responsible for Finance Division, Strategic & Corporate Planning Division, Assets & Liabilities Management Division, and Investor & International Relationship Specialist.
- *Head of Compliance, HR & TO* is responsible for HRBP, OD & Recruitment Division, HR Services & People Development Division, Transformation Office & Culture Division, and Compliance Division.
- *Head of Audit* is responsible for Regular Audit Division, Special Audit Division, and QA, and Follow Up & Methodology Department.
- *Head of Region* is responsible for Regional Office I, Regional Office II, Regional Office III, and Special Mention Specialist.
- *Head of Credit & Risk Management* is responsible for Credit Reviewer I Division, Credit Reviewer II Division, Policy & Procedure Division, Product Development Division, Risk & Portfolio Management Division, and Individual Limit Owner.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)
**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Direktur No. 0004/KDE/01/2022 tanggal
7 Januari 2022 dan Surat Keputusan Dewan
Direktur No.0077/KDE/08/2021 tanggal
24 Agustus 2021, susunan Komite Audit LPEI
pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Ketua	Arus Gunawan	Rijani Tirtoso	Chairman
Anggota	Yulida S. Marbun	Yulida S. Marbun	Member
Anggota	Peter Umar Abdilla A.	Peter Umar Abdilla A.	Member

Kepala Satuan Audit Internal LPEI pada
tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah
sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2020	
Ketua Satuan Kerja Audit Internal	I Nyoman Gede Suarja	Agung Waluyo	Head of Internal Audit

Berdasarkan Memorandum Prosedur
No.MPO.0003/KDE/01/2022 tanggal 3 Januari
2022 dan Memorandum Prosedur
No.MPO.0035/CEO/07/2020 tanggal 1 Juli
2020, Sekretaris LPEI pada tanggal
31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai
berikut:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Sekretaris LPEI	Chesna F. Anwar	Agus Windiarso	LPEI's Secretary

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Eksekutif No.0044/KDE/07/2020 tanggal
27 Juli 2020, susunan Dewan Pengawas
Syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember
2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Ketua	Kanny Hidayat	Kanny Hidayat	Chairman
Anggota	Yulizar D. Sanrego	Yulizar D. Sanrego	Member

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas
Syariah tersebut berdasarkan rekomendasi
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia melalui surat No. U-453/DSN-
MUI/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

1. General (continued)
**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

LPEI's Audit Committee as December 31,
2022 and 2021 based on the Board of
Directors' Decision Letter No. 0004/KDE/01/
2022 dated January 7, 2022 and on the Board
of Directors' Decision Letter No.0077/KDE/08/
2021 dated August 24, 2021, is composed of
the following:

LPEI's Head of Internal Audit as of December
31, 2022 and 2021 is as follows:

Based on the Memorandum of Procedure
No.MPO.0003/KDE/01/2022 dated January 3,
2022 and the Memorandum of Procedure
No.MPO.0035/CEO/07/2020 dated July 1,
2020, LPEI's secretary as of December 31,
2022 and 2021 is as follows:

Based on the Executive Director Decision
Letters No.0044/KDE/07/2020 dated July 27,
2020, the composition of Sharia Supervisory
Board as of December 31, 2022 and 2021 is
as follows:

The appointment of member of the Sharia
Supervisory Board based on the
recommendation of the National Sharia Board
of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI)
by the letter No. U-453/DSN-MUI/XII/2012
dated December 12, 2012.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

Jumlah pegawai tetap LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah 516 dan 526 (tidak diaudit).

**1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan
Medium Term Notes dan penawaran umum
Sukuk Mudharabah**

LPEI telah menerbitkan obligasi, *Medium Term Notes* dan Sukuk Mudharabah sejak tahun 2003 sampai dengan 31 Desember 2022. Berikut adalah rincian obligasi, *Medium Term Notes* dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sampai 31 Desember 2022:

i. Obligasi

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Name of Bonds
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap III - 2016 Seri D	1,038,000	22 November/ November 2023	Tetap/Fixed - 8.50%	IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds III - 2016 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri D	1,007,000	23 Februari/ February 2024	Tetap/Fixed - 9.20%	IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri E	1,266,000	23 Februari/ February 2027	Tetap/Fixed - 9.40%	IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series E
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap V - 2017 Seri C	1,786,000	15 Agustus/ August 2024	Tetap/Fixed - 8.25%	IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap VI - 2018 Seri B	1,650,000	14 Februari/ February 2023	Tetap/Fixed - 6.70%	IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds III - 2018 Series B
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap VI - 2018 Seri C	206,000	14 Februari/ February 2025	Tetap/Fixed - 6.90%	IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds III - 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap I - 2018 Seri C	1,756,000	6 Juni/ June 2025	Tetap/Fixed - 8.30%	IEB Phase I Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap II - 2018 Seri C	275,700	5 September / September 2023	Tetap/Fixed - 8.40%	IEB Phase II Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap II - 2018 Seri D	1,324,000	5 September / September 2025	Tetap/Fixed - 8.75%	IEB Phase II Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap III - 2018 Seri C	28,000	8 November/ November 2023	Tetap/Fixed - 9.25%	IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap III - 2018 Seri D	380,000	8 Nopember/ November 2025	Tetap/Fixed - 9.75%	IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series D

1. General (continued)**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

As of December 31, 2022 and 2021, LPEI had 516 and 526 permanent employees, respectively (unaudited).

**1.e. Public offerings of the bonds, issuance of
Medium Term Notes and public offerings
of the Sukuk Mudharabah**

LPEI issued bonds, *Medium Term Notes* and Sukuk Mudharabah from 2003 until December 31, 2022. Below are the details of bonds issued, *Medium Term Notes* and Sukuk Mudharabah which have not yet matured until December 31, 2022:

i. Bonds

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)
**1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan
Medium Term Notes dan penawaran umum
Sukuk Mudharabah (lanjutan)**
i. Obligasi (lanjutan)

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri C	1,523,000	23 April/ April 2024	Tetap/Fixed - 8.90%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri D	278,000	23 April/ April 2026	Tetap/Fixed - 9.25%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri E	349,000	23 April/ April 2029	Tetap/Fixed - 9.50%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri F	625,000	23 April/ April 2034	Tetap/Fixed - 9.80%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri C	330,000	9 Juli/ July 2024	Tetap/Fixed - 8.70%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri D	737,000	9 Juli/ July 2026	Tetap/Fixed - 9.20%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri C	6,000	3 September/ September 2024	Tetap/Fixed - 8.10%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri D	714,500	3 September/ September 2026	Tetap/Fixed - 8.50%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri C	25,500	29 Oktober/ October 2024	Tetap/Fixed - 8.10%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri D	112,000	29 Oktober/ October 2026	Tetap/Fixed - 8.50%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri E	219,750	29 Oktober/ October 2029	Tetap/Fixed - 8.75%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VIII - 2019 Seri B	1,551,000	6 Desember/ December 2024	Tetap/Fixed - 7.90%
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VIII - 2019 Seri C	22,500	6 Desember/ December 2026	Tetap/Fixed - 8.20%
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020	48,000	8 Juli/ July 2023	Tetap/Fixed - 7.60%
Total ekuivalen Rp	17,292,950		

1. General (continued)
**1.e. Public offerings of the bonds, issuance of
Medium Term Notes and public offerings
of the Sukuk Mudharabah (continued)**
i. Bonds (continued)

Name of Bonds	
IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C	
IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D	
IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series E	
IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series F	
IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C	
IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D	
IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C	
IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D	
IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C	
IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D	
IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series E	
IEB Phase VIII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B	
IEB Phase VIII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C	
Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020	
Total equivalent in Rp	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)**1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan
Medium Term Notes dan penawaran umum
Sukuk Mudharabah (lanjutan)****ii. Medium term notes**

Nama Medium Term Notes	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Name of Medium Term Notes
Euro Medium Term Note (EMTN) Programme IEB - 2017 (USD500,000,000)	7,783,750	6 April/ April 2024	Tetap/Fixed 3.875%	IEB Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017 (USD500,000,000)
Total ekuivalen Rp	7,783,750			Total equivalent Rp

iii. Sukuk mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Name of Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018 Seri C	14,000	8 November/ November 2023	9.25%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series C
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018 Seri D	155,000	8 November/ November 2025	9.75%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series D
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019 Seri C	66,000	23 April/ April 2024	8.90%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series C
Total ekuivalen Rp	235,000			Total equivalent Rp

Seluruh penerbitan obligasi, penerbitan
Medium Term Notes dan penerbitan Sukuk
Mudharabah tersebut telah terdaftar
berdasarkan surat terlampir:

i. Obligasi

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Nomor surat/ Letter number	Tanggal/ Date	Tempat terdaftar/ Register
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap III - 2016/ IEB Phase III Shelf - Registration Offering Bonds III - 2016	S-07248/BEI.PP3/11-2016	23 Nopember 2016/ November 2016	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap IV - 2017/ IEB Phase IV Shelf - Registration Offering Bonds III - 2017	S-01060/BEI.PP3/02-2017	24 Februari 2017/ February 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap V - 2017/ IEB Phase V Shelf - Registration Offering Bonds III - 2017	S-04415/BEI.PP3/08-2017	16 Agustus 2017/ August 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap VI - 2018/			

1. General (continued)**1.e. Public offerings of the bonds, issuance of
Medium Term Notes and public offerings
of the Sukuk Mudharabah (continued)****ii. Medium term notes****iii. Sukuk mudharabah**

All the offerings of the above bonds, issuance
of the Medium Term Notes and the offering of
the Sukuk Mudharabah have been registered
based on letters as follows:

i. Bonds

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)**1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan
Medium Term Notes dan penawaran umum
Sukuk Mudharabah (lanjutan)****iii. Sukuk mudharabah**

Nama Sukuk Mudharabah/ Name of Sukuk Mudharabah	Nomor surat/ Letter number	Tanggal/ Date	Tempat terdaftar/ Register
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018/ Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018	S-03393/BEI.PP3/06-2018	7 Juni 2018/ June 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018/ Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018	S-06570/BEI.PP3/11-2018	9 November 2018/ November 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019/ Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019	S-21441/BEI.PP3/04-2019	24 April 2019/ April 2019	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange

1.f. Entitas Anak

LPEI mempunyai kepemilikan langsung pada
Entitas Anak berikut:

Nama Perusahaan/ Company Name	Kegiatan Usaha/ Business Activity	Tahun Mulai Beroperasi/ Year Started Operations
PT IEB Prima Aset	Jasa Konsultasi/ Consulting Services	2021

PT IEB Prima Aset (IEBPA)

IEBPA didirikan berdasarkan Akta Notaris
No. 154 tanggal 17 Desember 2021.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. S-1097/MK.06/2021
pada tanggal 6 Desember 2021, ruang
lingkup IEBPA khususnya dalam rangka
percepatan penanganan aset bermasalah dan
perbaikan struktur neraca.

1. General (continued)**1.e. Public offerings of the bonds, issuance of
Medium Term Notes and public offerings
of the Sukuk Mudharabah (continued)****iii. Sukuk mudharabah****1.f. Its subsidiary**

LPEI has direct ownership in the following Its
subsidiary:

31 Desember/December 31, 2021 dan/and 2022	
Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset/ Total Assets
99.99%	41,343

PT IEB Prima Aset (IEBPA)

IEBPA was established based on Notarial
Deed No. 154 dated December 17, 2021.

In accordance with the Letter of the Minister
of Finance of the Republic of Indonesia No.
S-1097/MK.06/2021 dated December 6,
2021, the scope of IEBPA in particular in
order to accelerate the handling of
problematic assets and improvement of
balance sheet structure.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)**1.f. Entitas Anak (lanjutan)**

Pada bulan Desember 2021 LPEI memberikan setoran modal awal kepada IEBPA sebesar Rp49.999. Modal saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0081370.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021.

Kantor pusat IEBPA berlokasi di Prosperity Tower Lantai 33, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta – 12190.

Dasar Pembentukan PT IEB Prima Aset

Dalam rangka mengatasi tingginya angka aset bermasalah yang lebih komprehensif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah mengkaji beberapa opsi yang tersedia. Berdasarkan kajian tersebut disimpulkan, pembentukan PT IEB Prima Aset, entitas anak, sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang mengelola aset bermasalah sebagai opsi yang paling efektif untuk mengatasi pembiayaan/piutang bermasalah LPEI. Kajian atas perlunya entitas anak dilakukan bersama dengan konsultan bisnis (Deloitte) dan konsultan hukum (Tumbuan and partner) termasuk memastikan bahwa pendirian entitas anak ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur LPEI.

Landasan pembentukan entitas anak mengacu pada:

1. UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 14 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang: a. menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional; b. melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional; c. melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan d. melakukan penyertaan modal. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri.

1. General (continued)**1.f. Its subsidiary (continued)**

In December 2021 LPEI provided an initial capital deposit to IEBPA of Rp49,999. The share capital has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0081370.AH.01.01.Year of 2021 dated on December 20, 2021.

IEBPA head office is located in Prosperity Tower 33rd Floor, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta – 12190.

Basis for Establishment of PT IEB Prima Aset

In order to more comprehensively address the high number of non-performing assets, the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) has reviewed several available options. Based on this study, it was concluded that the establishment of PT IEB Prima Aset, its subsidiary, as a *Special Purpose Vehicle* (SPV) which manages non-performing assets is the most effective option to overcome LPEI's non-performing financing/receivables. A study on the need for a its subsidiary is carried out together with a business consultant (Deloitte) and a legal consultant (Tumbuan and partners) including ensuring that the establishment of a its subsidiary does not conflict with the Law governing LPEI.

The establishment basis of a its subsidiary refers to:

1. Law No. 2 of 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Article 14 (1) In order to carry out the tasks as referred to in Article 13, LPEI is authorized to: a. establish a National Export Financing scheme; b. restructure the National Export Financing; c. carry out reinsurance of the implemented insurance as referred to in Article 8; and d. make equity participation. (2) Equity participation as referred to in paragraph (1) letter d may only be made to a legal entity or other entity required to carry out LPEI duties with the approval of Minister.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)**1.f. Entitas Anak (lanjutan)**

2. PP No. 43/2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional Pasal 16 ayat (2) Selain kegiatan menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melaksanakan kegiatan berupa:
 - a. menyediakan jasa konsultasi;
 - b. melakukan restrukturisasi PEN;
 - c. melakukan reasuransi;
 - d. melakukan penyertaan modal; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 ayat (1) Penyertaan modal dilakukan dengan persetujuan Menteri, dan ayat (2) Penyertaan modal dapat dilakukan kepada badan hukum dalam negeri dan badan hukum luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selanjutnya, rencana pembentukan entitas anak ini telah dicantumkan pada RKAT LPEI tahun 2021 yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan No. S-121/MK.06/2021 pada tanggal 15 Februari 2021.
4. Dengan pertimbangan perlu segera dilakukan upaya penyelesaian kondisi NPL dan perbaikan kualitas aset, LPEI telah mendapat dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk pembentukan entitas anak seperti yang disampaikan melalui surat nomor: S-86/KN/2021 pada tanggal 17 Juni 2021. Pada surat tersebut juga dinyatakan bahwa mengacu pada amanat Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang LPEI, dalam hal membentuk badan hukum dan melakukan penyertaan modal, maka agar mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

1. General (continued)**1.f. Its subsidiary (continued)**

2. PP No. 43/2019 regarding Basic Policy of National Export Financing Article 16 paragraph (2) In addition to providing facilities as referred to in paragraph (1), LPEI may carry out activities in the form of:
 - a. provide consulting services;
 - b. carry out restructuring of PEN;
 - c. carry out reinsurance;
 - d. make equity participation; and/or
 - e. carry out other activities that support the functions, duties, and authorities of LPEI as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations. Article 25 paragraph (1) states that Equity participation is carried out with the approval of Minister, and paragraph (2) Equity participation may be made to domestic legal entities and foreign legal entities in accordance with the provisions of laws and regulations.
3. Furthermore, the plan for the establishment of a its subsidiary has been included in the RKAT of LPEI 2021 which has received approval from Minister of Finance through the letter of Minister of Finance No. S-121/MK.06/2021 dated February 15, 2021.
4. Considering the need to immediately resolve the NPL condition and improve asset quality, LPEI has received full support from the Directorate General of State Assets (DJKN) for the establishment of a its subsidiary as submitted by the letter number: S-86/KN/2021 dated June 17, 2021. The letter also stated that referring to the mandate of Article 14 of Law No. 2 of 2009 concerning LPEI, in terms of establishing a legal entity and making equity participation, then to submit to Minister of Finance for approval and set forth in the Annual Work Plan and Budget.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)
1.f. Entitas Anak (lanjutan)

5. Menteri Keuangan melalui surat nomor: S-1097/MK/06/2021 pada tanggal 6 Desember 2021 menyetujui permohonan penyertaan modal oleh LPEI dalam rangka pembentukan entitas anak.
6. Entitas anak, yang selanjutnya disebut PT IEB Prima Aset berdiri pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset disingkat PT IEBPA No. 154 tanggal 17 Desember 2021 dengan modal dasar Rp50.000 dengan jumlah saham beredar 50.000 lembar yang dimiliki oleh LPEI sebesar 49.999 lembar saham (99,99%) dan Koperasi Konsumen Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar 1 lembar saham (0,01%). Pengesahan dari Menkumham tanggal 20 Desember 2021 dengan No. AHU-0081370.AH.01.01. Tahun 2021.
7. Sesuai dengan Akta Pendirian PT IEBPA pada pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha, sebagaimana tercantum pada ayat 1 mengenai maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor. Pada ayat 2 mengenai kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)
1.f. Its subsidiary (continued)

5. Minister of Finance by the letter number: S-1097/MK/06/2021 dated December 6, 2021 approved the application for equity participation by LPEI in the context of establishing a its subsidiary.
6. The its subsidiary, hereinafter referred to as PT IEB Prima Aset was established on December 17, 2021 based on Deed of Establishment of the Limited Company PT IEB Prima Aset for the sake brevity as PT IEBPA No. 154 dated December 17, 2021 with the authorized capital of Rp50,000 with a total outstanding share of 50,000 The shares owned by LPEI is amounting to 49,999 shares (99.99%) and the Consumer Cooperative of Employees of the LPEI owns 1 share (0.01%). Ratification from Minister of Law and Human Rights was on December 20, 2021 with No. AHU-0081370.AH.01.01. Year 2021.
7. In accordance with the Deed of Establishment of PT IEBPA Article 3 concerning Aim and Objective as well as Business Activities, as set forth in paragraph 1 the aim and objective of PT IEBPA is to engage in the field of consulting, including consulting on export-oriented activities. Paragraph 2 concerning the business activities include the following:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)**1.f. Entitas Anak (lanjutan)**

- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), meliputi: Bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan - masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur
 - b. Pemberian jasa hukum terkait aset, dan
 - c. Kegiatan lain sesuai maksud dan tujuan LPEI.
8. Sampai dengan 31 Desember 2022, PT IEBPA adalah sebagai konsultasi manajemen dan dalam kegiatannya tidak ada pengalihan aset dari LPEI ke PT IEBPA.
 9. Pembentukan entitas anak sebagaimana diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)**1.f. Its subsidiary (continued)**

- a. Other Management Consulting Activities (KBLI 70209), including: Assistance with advice, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; planning scheduling and controlling production. The provision of these business services may include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consulting for agronomists and agricultural economists in agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget control procedures, providing advice and assistance to businesses and public services in planning, organizing, efficiency and control, management information and others. Including infrastructure investment study services.
 - b. Provision of legal services related to assets, and
 - c. Other activities according to the purposes and objectives of LPEI.
8. Until December 31, 2022, PT IEBPA is a management consultancy and in its activities there is no transfer of assets from LPEI to PT IEBPA.
 9. Establishment of a its subsidiary as above is in accordance with the applicable provisions.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
2.a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian LPEI tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang dijelaskan pada Catatan 2b di bawah ini.

Laporan keuangan LPEI tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi.

Per tanggal 31 Desember 2022, atas pembiayaan diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN (Catatan 46).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Summary of Significant Accounting Policies
2.a. Statement of compliances

LPEI's consolidated financial statements as of December 31, 2022 and for the year ended on that date have been prepared and presented in accordance with the basis for preparation of the financial statements as described in Note 2b below.

LPEI's financial statements as of December 31, 2021 and for the year ended on that date have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Accountants Association (IAI).

2.b. Basis of measurement and preparation of the financial statements

The consolidated financial statements of LPEI and its Subsidiary for the year ended December 31, 2022 have been prepared and presented in accordance with fair presentation of special purpose financial reporting framework as follows

1. *For the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured National Interest Account financing, calculated using the assumption of the discount rate that is equal to the interest rate after the restructuring.*

As per December 31, 2022, for financing that has been provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is calculated using the assumption of the discount rate determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through letter No. S-194/MK.08/2023 concerning the Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN (Note 46).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan
laporan keuangan (lanjutan)**

2. Untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terlampir dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.05/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan LPEI.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.4/2022, LPEI sebagai emiten wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Sebagaimana dijelaskan di atas, LPEI menyusun laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut hanya sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan di atas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.b. Basis of measurement and preparation of
the financial statements (continued)**

2. The other elements of the consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement and Interpretation which published by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), and Regulations from the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies" included in the Appendix of the Decision of the Chairman of BAPEPAM - LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, Regulation of Financial Minister (PMK) No. 161/PMK.010/2010 regarding changes of No. 140/PMK.010/2009 regarding Development and Supervision of LPEI and PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, and Regulation of Financial Service Authority (POJK) No. 9/POJK.05/2022 dated June 23, 2022 regarding Supervision of LPEI.

Based on the Financial Services Authority Regulation No 14/POJK.4/2022, LPEI as an Issuer obliged to prepare periodic financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard as regulated in Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Company". As described above, LPEI has prepared the consolidated financial statements as of December 31, 2022 and for the year then ended only in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statement as described above.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2b. Dasar pengukuran dan penyusunan
laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terlampir dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2b. Basis of measurement and preparation of
the financial statements (continued)**

The consolidated financial statements of LPEI and its Subsidiary for the year ended December 31, 2021 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia, which include the Statement and Interpretation which published by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), and Regulations from the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies" included in the Appendix of the Decision of the Chairman of BAPEPAM - LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, Regulation of Financial Minister (PMK) No. 140/PMK.010/2009 about Development and Supervision of LPEI, PMK No. 161/PMK.010/2010 regarding changes of No. 140/PMK.010/2009 regarding Development and Supervision of LPEI and PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, and Regulation of Financial Service Authority (POJK) No. 40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI.

The consolidated financial statements are prepared and presented based on business continuity assumptions and on an accrual basis, except for consolidated cash flow statements. The basis for measurement in the preparation of these consolidated financial statements is the concept of historical value, unless accounting standards require fair value measurement.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2b. Dasar pengukuran dan penyusunan
laporan keuangan (lanjutan)**

Untuk unit syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip perbankan syariah, laporan keuangannya disajikan sesuai dengan PSAK 101 (Revisi 2022) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 (Revisi 2019) "Akuntansi Murabahah", PSAK 104 "Akuntansi Istishna", PSAK 105 "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106 "Akuntansi Musyarakah", PSAK 107 (Revisi 2021) "Akuntansi Ijarah", PSAK 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK 111 "Akuntansi Wa'd", dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank dan penempatan pada bank yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional. Angka-angka disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2b. Basis of measurement and preparation of
the financial statements (continued)**

For the sharia business unit which operates based on the shariah banking principles, the presentation of the financial statement is in accordance to PSAK 101 (Revised 2022) "Presentation of Sharia Financial Statements", PSAK 102 (Revised 2019) "Accounting for Murabahah", PSAK 104 "Accounting for Istishna", PSAK 105 "Accounting for Mudharabah", PSAK 106 "Accounting for Musyarakah", PSAK 107 (Revised 2021) "Accounting for Ijarah", PSAK 110 (Revised 2020) "Sukuk Accounting", PSAK 111 "Wa'd Accounting", and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) established by Bank Indonesia and the Indonesian Institute of Accountants.

The statement of cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks and placements with banks maturing within 3 (three) months from the date of acquisition, provided they are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used for the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp), which is LPEI's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan
keuangan (lanjutan)**

LPEI menyajikan laporan posisi keuangan sesuai tingkat likuiditas. Suatu analisis mengenai pemulihan (aset) atau penyelesaian (liabilitas) dalam dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (lancar) dan lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (tidak lancar) disajikan di dalam Catatan 43.

Termasuk di dalam laporan keuangan konsolidasian LPEI adalah penyajian aset, liabilitas, modal, laba dan rugi yang berasal dari Penugasan Khusus sesuai surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. S-368/KN/2017 tanggal 16 Februari 2017.

2.b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Grup yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh LPEI.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh LPEI, yakni terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana LPEI memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah LPEI mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset, dan liabilitas dari Grup yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh LPEI. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
**2b. Basis of measurement and preparation of
the financial statements (continued)**

LPEI presents its statement of financial position based on liquidity level. An analysis regarding recovery (asset) or settlement (liability) within twelve (12) months after the reporting date (current) and more than twelve (12) months after the reporting date (non-current) is presented in Note 43.

Included in the consolidated financial statements of LPEI is the presentation of assets, liabilities, capital, profits and losses derived from Special Assignment accordance with the letter issued by the Directorate General of State No. S-368/KN/2017 dated February 16, 2017.

2.b. Consolidation principal

The consolidated financial statements include the financial statements of Group whose majority shares are owned or controlled by the LPEI.

A its subsidiary is an entity controlled by the LPEI, is exposed, or has rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that LPEI has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether LPEI controls another entity.

Group financial statements incorporate the results, cash flows, assets, and liabilities of Group which, directly and indirectly, is controlled by LPEI. Its subsidiary are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)**

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup anak kehilangan pengendalian, maka Grup akan:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.c. Consolidation principal (continued)**

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All transactions, balances, income, expenses, and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a its subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the its subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If subsidiary Group loses control, so Group will:

- Derecognise the assets (including *goodwill*) and liabilities of the its subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
- Derecognise the carrying amount of any non-controlling interests in the former its subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to non-controlling);

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)**

- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.d. Pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Grup telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2022, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi terkait kontrak yang merugi - biaya memenuhi kontrak. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan terkait imbalan dalam pengujian 10 persen untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): "Sewa". Penyesuaian ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.c. Consolidation principal (continued)**

- Recognise the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event, or circumstances that resulted in the loss of control;
- Recognise any investment retained in the former its subsidiary at fair value at the date when control is lost;
- Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the its subsidiary; and
- Recognize any resulting difference as a gain or loss in profit and loss attributable to the parent entity.

**2.d. New and revised statements
interpretations of financial accounting
standards effective in the current year**

As of January 1, 2022, Group have implemented revised accounting standards that are relevant to consolidated financial statements, which are as follows:

- PSAK 22 Amendment: Business Combination of Reference to Conceptual Framework;
- Amendment PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets related to onerous contracts – onerous costs of fulfilling the contract. This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is onerous;
- PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments related to the consideration in the 10 percent test for the termination of financial liabilities. The amendment clarify the costs that are included in the entity when assessing whether the terms of a new or modified financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability.
- PSAK 73 (Annual Improvement 2020): "Lease". This amendment clarifies the measurement by the lease and the recording of changes in the lease term regarding "rental properties repair".

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.d. Pernyataan dan interpretasi standar
akuntansi baru dan revisi yang berlaku
efektif pada tahun berjalan (lanjutan)**

Penerapan standar akuntansi baru ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2.e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.d. New and revised statements
interpretations of financial accounting
standards effective in the current year
(continued)**

Implementation of new accounting standards has no significant impact to the consolidated financial statements.

2.e. Transactions with related parties

In these financial statements, the term related parties is used as defined in PSAK 7 regarding "Related Party Disclosures", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has joint control or control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the reporting entity are member of the same the Bank (which means that each parent, subsidiaries, and fellow subsidiaries is related to the others);
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a Bank, of which the other entity is a member);
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

- v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);
- vii. orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelaporan.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, kecuali dengan personel manajemen kunci, dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan LPEI akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik local, nasional, maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 39.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.e. Transactions with related parties
(continued)**

- v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
- viii. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaction with related parties, except for key management personnel is conducted under terms and conditions similar with third party transactions. The transactions to be conducted by LPEI will be in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions", when the transactions are conducted.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled, or significant influence by a government. Government refers to government agencies and similar bodies whether local, national, or international.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to consolidated financial statements and the details are presented in Note 39.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

Aset keuangan Grup terdiri dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank, efek-efek, tagihan derivatif, pembiayaan dan piutang syariah, piutang pembiayaan garansi, piutang asuransi dan penjaminan, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain (bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan).

Liabilitas keuangan LPEI terdiri dari liabilitas segera, liabilitas akseptasi, efek-efek utang yang diterbitkan, liabilitas terkait dengan transaksi liabilitas derivatif, pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha, dan liabilitas lain-lain (bunga yang masih harus dibayar, tantiem, dan jasa produksi, kewajiban kepada penjamin ulang).

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Grup menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah instrumen keuangan memenuhi pengujian (*Solely Payment of Principal and Interest*) SPPI.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian pembiayaan biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Grup menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan, dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

2.f. Financial assets and financial liabilities

Group adopted PSAK 71, "Financial Instruments"

Group financial assets consist of current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks, placements with banks, securities, derivative receivables, financing and sharia receivables, guarantee financing receivables, insurance and guarantee receivables, acceptances receivable, and other assets (accrued interest receivables and refundable deposits).

LPEI's financial liabilities consist of current liabilities, acceptances payable, securities issued, derivative payables, debt, fund borrowings, insurance payables, guarantee payables, liability related to reverse repos, lease liabilities, and other liabilities (accrued interest payable, tantiem and accrued bonus, liabilities to reguarantor).

SPPI Test

As a first step of its classification process, Group assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the (*Solely Payment of Principal and Interest*) SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

The most significant elements of interest within a lending arrangement are typically the consideration for the time value of money and financing risk. To make the SPPI assessment, Group applies judgement and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(i) Klasifikasi**

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada FVPL.

Penilaian model bisnis

Grup menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Grup mengelola kelompok aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Grup tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumen nya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Grup.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(i) Classification**

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are SPPI on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured at FVPL.

Business model assessment

Group determines its business model at the level that best reflects how it manages Group of financial assets to achieve its business objective.

Group business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular how the way those risks are managed;*
- *How managers of the business are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);*
- *The expected frequency, value, and timing of sales, are also important aspects of Group assessment.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(i) Klasifikasi (lanjutan)**Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Grup tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Grup mengukur aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual.
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (SPPI).

b. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Grup mengukur aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)****(i) Classification (continued)**Business model assessment (continued)

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from original expectations, Group does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

Group classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

a. Financial assets measured at amortized cost

Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows.
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

b. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

Group measures financial assets at FVOCI when both of the following conditions are met:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**
(i) Klasifikasi (lanjutan)

- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

c. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup menerapkan kategori aset keuangan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi kriteria sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Grup untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki Grup untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)
2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)
(i) Classification (continued)

- Financial assets are managed to collect the contractual cash flows and sell the assets; and
- The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).

c. Financial assets measured at fair value through profit or loss. Group applies the category of financial assets based on fair value through profit or loss if it does not meet the criteria as amortized cost or fair value through other comprehensive income.

Financial liabilities are classified into the following categories:

a. Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss consist of two sub-categories, financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by Group as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term, or if it is part of portfolio of identified financial instrument that are managed together pattern of short term profit taking.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(i) Klasifikasi (lanjutan)**

- b. Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(i) Classification (continued)**

- b. Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost are financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon the recognition liability.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71 / Category as defined by PSAK 71		Golongan (ditentukan oleh LPEI)/ Class (as determined by LPEI)
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Tagihan derivatif/ <i>derivative receivables</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortised cost</i>	Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
		Giro pada bank-bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
		Penempatan pada bank Indonesia dan bank-bank lain/ <i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
		Tagihan akseptasi/ <i>Acceptances receivables</i>
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	Pembiayaan, piutang pembiayaan garansi, tagihan akseptasi/ <i>Financing receivables, guarantee financing receivables, acceptances receivable</i>
		Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>
	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>	Liabilitas derivatif/ <i>Derivative payables</i>
		Liabilitas segera/ <i>Obligation due immediately</i>
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/ <i>Securities sold under agreements to repurchase</i>
		Liabilitas akseptasi/ <i>Acceptable payables</i>
		Efek-efek yang diterbitkan/ <i>Marketable securities issued</i>
		Pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha/ <i>Fund Borrowings, insurance payables, guarantee payables, lease liabilities</i>
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas lain-lain/ <i>Other liabilities</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**
(ii) Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya diamortisasi instrumen utang dan alokasi pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif yang mendiskonto penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya pada poin-poin yang dibayar atau diterima yang membentuk bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) sepanjang umur ekonomis yang diharapkan dari instrumen utang, atau (jika lebih tepat) periode yang lebih singkat, dengan jumlah tercatat neto pada pengakuan awal.

(iii) Pengakuan awal

Grup pada awalnya mengakui kredit yang diberikan serta simpanan diukur pada nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*) diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurang (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**
(ii) Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate exactly that discounts estimated future cash receipts (including all fees on points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or (where appropriate) a shorter period, to the net carrying amount on the initial recognition.

(iii) Initial recognition

Group initially recognizes loans and deposits at fair value on the date of origination.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which Group commits to purchase or sell the asset.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

At the first confession, a financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/minus (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial asset or issue of financial liability.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(iii) Pengakuan awal (lanjutan)**

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

- Aset Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(iii) Initial recognition (continued)**

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially.

Such transactions costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

(iv) Subsequent measurement

After initial recognition, the Group measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) Amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss.

- Financial Assets at amortized cost Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

- (iv) Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

- a) aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b) aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

Grup dalam suatu periode pelaporan menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan metode bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan, pada periode pelaporan selanjutnya, menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit dan perbaikan tersebut secara objektif dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah persyaratan yang tercantum dalam poin (b) paragraf di atas diterapkan (misalnya perbaikan peringkat kredit peminjam).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

- (iv) Subsequent measurement (continued)

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

- a) financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, Group applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.
- b) financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, Group applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.

Group in a reporting period calculates interest income by applying the effective interest method on the acquisition cost of amortized financial assets, in the next reporting period, calculating interest income by applying an effective interest rate on the gross carrying amount if the credit risk of the financial instrument improves so that the financial assets no longer experience impairment of credit value and improvement can be objectively related to an event that occurs after the requirements listed in point (b) of the above paragraph are applied (for example an improvement in the borrower's credit rating).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)**

- Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, kecuali:

- a. bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif diakui dalam laba rugi, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- b. keuntungan atau kerugian penurunan nilai; atau
- c. Keuntungan atau kerugian selisih kurs.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Khusus untuk aset keuangan berbentuk instrumen ekuitas, jumlah yang disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya tidak selanjutnya dialihkan ke laba rugi. Akan tetapi, Grup dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif pada ekuitas.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Aset dinilai pada nilai wajar. Seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi, kecuali instrumen lindung nilai yang ditetapkan kedalam hubungan lindung nilai tertentu.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(iv) Subsequent measurement (continued)**

- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

Gains or losses of financial assets measured at fair value through other comprehensive income are recognized in other comprehensive income until the financial assets are derecognized or reclassified, except:

- a. interest calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss, the amount recognized in profit or loss is equal to the amount to be recognized in profit or loss if the financial asset is measured at amortized cost;
- b. impairment gains or losses; or
- c. Foreign exchange gains or losses.

When a financial asset is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Specifically for financial assets in the form of equity instruments, the amounts presented in other comprehensive income are not subsequently transferred to profit or loss. However, Group can transfer cumulative gains or losses on equity.

- Financial assets measured at fair value through profit or loss
Assets are valued at fair value. All gains and losses arising from changes in fair value are recognized in profit or loss, except for hedging instruments that are designated in certain hedging relationships.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)**

Grup menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Kebijakan akuntansi terkait pencadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dapat mengacu pada Catatan 2o.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan, yang diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut; (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan; (ii) Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(v) Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(iv) Subsequent measurement (continued)**

Group applies an impairment requirement for financial assets measured at amortized cost and financial assets in the form of debt instruments that are measured at fair value through other comprehensive income.

The accounting policy related to the allowance for impairment losses for financial asset can be seen on Note 2o.

After initial recognition, Group measures financial liabilities, are classified into the following categories at; (i) Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as financial liabilities such upon initial recognition and those classified as held for trading and; (ii) Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

(v) Derecognition

Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any rights or liabilities in transferred financial assets that is created or retained by the Group is recognized as a separate asset or liability.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(v) Penghentian Pengakuan (lanjutan)**

Dalam transaksi dimana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Grup menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Grup dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

a. Penghentian pengakuan atas modifikasi substansial atas syarat dan ketentuan

Jika modifikasi atas aset keuangan tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, maka Grup akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan modifikasian pada tanggal modifikasi. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(v) Derecognition (continued)**

In transactions in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Group derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Group continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

a. Derecognition due to substantial modification of terms and condition

If the modification of the financial asset does not result in the termination of recognition of the financial asset, Group will record the financial asset as the modified financial asset at the date of modification. The difference between the gross carrying amount of the initial financial assets and the fair value of the modified assets is recognized in profit or loss. The income or transaction costs incurred in connection with the modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(v) Penghentian Pengakuan (lanjutan)**

b. Penghentian pengakuan selain
modifikasi substansial
Aset keuangan dihentikan
pengakuannya jika:

- hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Grup menghapusbukkan aset keuangan dan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Grup menentukan bahwa kemungkinan tertagihnya aset keuangan tersebut relatif kecil. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti kemungkinan tertagihnya piutang dari debitur, telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur. Jumlah hari lewat jatuh tempo yang digunakan untuk memicu penghapusan pembiayaan tanpa jaminan dalam portofolio ritel ditentukan berdasarkan pengalaman akun masa lalu yang menunjukkan ketika suatu akun mencapai jumlah hari lewat jatuh tempo tertentu, maka probabilitas pengembalian dari akun tersebut mendekati nol.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(v) Derecognition (continued)**

b. Derecognition other than for
substantial modification
Financial assets are derecognized if:

- the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to third parties under a 'pass-through' arrangement; and either (a) Group has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or (b) Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.

Group writes off a financial asset and any related impairment losses, when Group determines that the collectibility of financial assets is relatively remote. This decision is reached after considering information such as recoverability of the amount due from borrowers, the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure. The days past due used to trigger write off of unsecured financing in retail portfolio are broadly driven by past experiences which shows that once an account reaches the certain number of days past due, the probability of recovery is almost zero.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(v) Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Pembiayaan dan piutang atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pembiayaan dan piutang atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Ketika pembiayaan dan piutang tidak dapat dilunasi, maka akan dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kemudian atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Melanjutkan keterlibatan yang diambil dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer adalah diukur dari nilai minimum tercatat awal dari aset dan jumlah maksimum pertimbangan bahwa Grup diminta untuk membayar kembali.

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(v) Derecognition (continued)**

Financing and receivables or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between Group and the borrowers has ceased to exist. When financing and receivables are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses.

Subsequent recoveries from financing previously written off are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

When Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of Group continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that has taken the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that Group could be required to repay.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(v) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Perbedaan antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dan imbalan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi.

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar tidak diakui untuk aset yang dicatat berdasarkan perolehan diamortisasi;
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi untuk aset yang diklasifikasikan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain untuk aset yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dan penghasilan komprehensif lain harus diakui pada laba rugi.

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(v) Derecognition (continued)

Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled, or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference between the carrying value of the original financial liability and the consideration paid is recognized in profit or loss.

(vi) Income and expense recognition

- a. Gains and losses arising from changes in fair value are not recognized for assets recorded at amortized cost;
- b. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in the of profit and loss for assets classified in the group of financial assets measured at fair value through profit or loss;
- c. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income for assets classified as fair value through other comprehensive income.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity and other comprehensive income are must recognized in the statement of profit or loss.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(vii) Reklasifikasi aset keuangan**

Reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki dilakukan jika adanya perubahan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Grup seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Grup akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis Grup harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

- perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar).
- hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan.
- pengalihan aset keuangan antara bagian dari Grup dengan model bisnis berbeda.

(viii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(vii) Reclassification of financial assets**

Reclassification of owned financial assets is made if there is a change in the business model for managing financial assets and is not allowed to reclassify financial liabilities.

Changes in the business model must have a significant impact on the Group operational activities, such as acquiring, releasing, or ending a line of business. In addition, it is necessary to prove these changes to external parties.

The Group will reclassify all financial assets affected by changes in business models. Changes in the objectives of the Group business model should take effect before the reclassification date.

What is not a change in the business model are:

- change in intention relating to a particular financial asset (even in situations of significant changes in market conditions).*
- the temporary loss of certain markets for financial assets.*
- transfers of financial assets between parts of the Group with different business models.*

(viii) Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is currently an enforceable legal rights to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(viii) Saling hapus (lanjutan)

Hak yang berkekuatan hukum berarti:

- a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang; dan
- b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
 - i. kegiatan bisnis normal;
 - ii. kondisi kegagalan usaha; dan
 - iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(ix) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(x) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai pasar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(viii) Offsetting (continued)

This means that the right to set off:

- a. must not be contingent on a future event; and*
- b. must be legally enforceable in all of the following circumstances:*
 - i. the normal course of business;*
 - ii. the event of default; and*
 - iii. the event of insolvency or bankruptcy.*

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

(ix) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, and minus any reduction for impairment.

(x) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) or quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg and Reuters on the measurement date.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)****(x) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Selain itu, untuk tujuan pelaporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat *input* untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi *input* pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:

- Tingkat 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Tingkat 2 adalah *input*, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Tingkat 3 adalah *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Grup menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Grup mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Grup mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)****(x) Fair value measurement (continued)**

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

If a market for a financial instrument is not active, Group establishes fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis. Group uses its own credit risk spreads in determining the fair value for its derivative liabilities and all other liabilities for which it has elected the fair value option.

When Group credit spread widens, Group recognizes a gain on these liabilities because the value of the liabilities has decreased. When Group credit spread becomes narrow, Group recognizes a loss on these liabilities because the value of the liabilities has increased.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**
(x) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. *Input* yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Grup menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif. Beberapa input dari model ini tidak berasal dari data yang dapat diobservasi di pasar dan dengan demikian merupakan hasil estimasi berdasarkan asumsi tertentu.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Grup. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko pembiayaan *counterparties*.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**
(x) Fair value measurement (continued)

Group uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, Group uses internally developed model which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, *unlisted debt securities* (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become liquid. Some of the inputs to these models may not be market observable and are therefore estimated based on assumptions.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimate or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that Group holds. Therefore, valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risks, liquidity risk and counterparties credit risk.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(x) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-review dan disesuaikan, jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada Grup dan debitur ditentukan menggunakan nilai kini berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas pembiayaan dan piutang, likuiditas, dan biaya.

Aset keuangan, *long position*, liabilitas keuangan, dan *short position* diukur dengan harga penutupan. Dimana Grup memiliki posisi aset dan liabilitas yang risiko pasarnya saling hapus, maka dapat digunakan nilai tengah dari nilai pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(x) Fair value measurement (continued)

Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

In cases when the fair value of *unlisted equity instruments* cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair values of financing and receivables as well as liability to Group and debtors are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, by considering quality of financing and receivables, liquidity, and costs.

Financial assets, *long positions*, financial liabilities, and *short positions* are measured at closing price. Where Group has assets and liabilities positions with off setting market risk, middle market prices are used to measure the off-setting risk positions and a bid or ask price adjustment is applied to the net open positions as appropriate.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**
(xi) Perbedaan hari pertama

Pada saat nilai transaksi berbeda dengan nilai wajar dari transaksi pasar lainnya yang dapat diobservasi saat ini atas instrumen yang sama atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan variabel data dari pasar yang dapat diobservasi. Grup secara langsung mengakui perbedaan antara nilai transaksi dan nilai wajar ("1 hari" keuntungan atau kerugian) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika nilai wajar ditentukan berdasarkan data yang tidak dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai transaksi dan nilai model hanya dapat diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat data menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut tidak diakui lagi.

2.g. Giro pada Bank Indonesia dan bank

Giro pada Bank Indonesia dan bank diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Giro pada Bank Indonesia dan bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2.h. Penempatan pada bank

Penempatan pada bank adalah penanaman dana pada bank berupa penempatan pada pasar uang (*interbank call money*) dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Penempatan pada bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies
(continued)**
**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**
(xi) Day 1 (one) difference

When the transaction price differs from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets. Group immediately recognizes the difference between the transaction price and fair value (a 'Day 1' profit or loss) in the statement of profit or loss and Other comprehensive income. In cases where fair value is determined using data which is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the inputs become observable or when the instrument is derecognized.

2.g. Current accounts with Bank Indonesia and banks

Current accounts with Bank Indonesia and banks are classified as amortized cost. The current accounts with Bank Indonesia and banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

2.h. Placements with banks

Placements with banks represent funds in banks in the form of interbank call money and time deposits.

Placements with banks are classified as amortized cost. The placements with banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2.i. Efek-efek

Efek-efek terdiri atas efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, berupa Obligasi Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan obligasi korporasi.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

Setelah pengakuan awal, efek-efek diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.
2. Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs diakui pada laba rugi.

2.j. Sukuk

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

LPEI menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Sukuk diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi), yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

2.i. Securities

Securities consist of securities traded on the stock exchanges and in the money market, in the form of bonds of the Republic of Indonesia, Certificates of Bank Indonesia (SBI), and corporate bonds.

Securities are initially measured at fair value.

After the initial recognition, the securities are classified as fair value through other comprehensive income.

The valuation of securities is stated based on the classification as follows:

1. Gains and losses from changes in fair value are recognized directly in the statement of profit or loss other comprehensive income.
2. Interest income is recognized in profit or loss using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses are recognized in profit or loss.

2.j. Sukuk

Sharia securities is a proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in sharia money market and/or sharia capital market, such as sharia bonds (sukuk) and other securities based on syariah principles.

LPEI defined the classification of investment in marketable securities, especially sukuk, based on business model in accordance with PSAK 110 (Revised 2020) on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) Sukuk measured at cost are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2.j. Sukuk (lanjutan)

- 2) Sukuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.
- 3) Sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.

2.k. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, LPEI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing dan swap mata uang asing untuk mengelola eksposur pada risiko pasar, seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lain yang memiliki karakteristik atau model penentuan harga serupa.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

2.j. Sukuk (continued)

- 2) Sukuk measured at fair value through profit and loss are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year statements of profit or loss and other comprehensive income.
- 3) Sukuk measured at fair value through other comprehensive income. Securities are presented at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.

2.k. Derivative financial instruments

In the normal course of business, LPEI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts and foreign currency swaps to manage exposures on market risks, such as currency risk and interest rate risk.

All derivative instruments are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, price valuation or broker quoted price on other instruments with similar characteristics or price model.

The fair value of derivative instruments are determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.k. Tagihan wesel ekspor**

Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan dan disajikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijamin oleh LPEI. Tagihan wesel ekspor dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2.l. Pembiayaan dan piutang

Pembiayaan dan piutang yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan.

Pembiayaan dan piutang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Pembiayaan dan piutang yang diberikan pada awalnya diukur menggunakan metode EIR dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang timbul pada saat akuisisi serta biaya/fee transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Cadangan kerugian atas penurunan nilai dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan kerugian kredit ekspektasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2o.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.k. Export bills receivable**

Export bills receivable are classified and presented as amortized cost. Export bills receivable are negotiated export bills discounted and negotiated by LPEI. Export bills receivable are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.

2.l. Financing and receivables

Financing and receivables represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents thereof, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities.

Financing and receivables are classified as amortized cost.

Financing and receivables provided are measured at amortized cost using EIR method less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and cost/fee that are an integral part of the EIR. The amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Allowance for impairment losses is carried out using the expected credit loss calculation method as disclosed in Note 2o.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.m. Pembiayaan dan piutang berdasarkan
prinsip syariah**

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan/ piutang tersebut meliputi piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah.

Piutang murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga pembelian dan margin yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual dan dibuat secara eksplisit (dinyatakan dalam akad pembiayaan). Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, LPEI melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari debitur.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
2.m. Sharia financing and receivables

Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar forms of receivables arising from transactions carried out based on the sale and purchase arrangements and profit sharing between LPEI and borrowers for a certain period of time. The financing/receivables consist of murabahah receivables and mudharabah financing.

Murabahah receivable is a transaction carried out based on sales and purchase agreement whereby the price and the profit margin are agreed by the buyer and seller and are disclosed explicitly (stated on the financing agreement). Murabahah may or may not be carried out based on a certain order to purchase goods. Under Murabahah, based on a certain order, the purchase will be realized by LPEI after the order is received.

Murabahah receivable is initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method less any allowance for impairment losses.

Musyarakah financing is a partnership contract between fund owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct business through partnership. All parties share profits based on a predetermined ratio, while the loss will be distributed proportionately based on the capital contribution. At statement of financial position date, musyarakah financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for possible losses based on the management's review on the musyarakah financing collectibility at the end of the year.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2.n. Pinjaman qardh

Pinjaman qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh dapat disertai dengan wakalah.

Wakalah digunakan dalam hal nasabah mewakilkan kepada LPEI untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen nasabah dan menagih piutang kepada *buyer*. Atas jasa tersebut, LPEI dapat memperoleh ujah yang diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian. LPEI menetapkan cadangan kerugian qardh berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai

Aset keuangan

LPEI mencatat cadangan kerugian kredit ekpektasian (*expected loss*) atas instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 71 sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang berupa instrumen utang yang diklasifikasikan dalam biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
 - a. Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan disajikan di dalam laba rugi sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

2.n. Funds of qardh

Funds of qardh are borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh can be combined with wakalah.

Wakalah is used in the event that the customer represents LPEI to manage customer documents and collect receivables from the buyer. For these services, LPEI can obtain ujah which is recognized proportionally during the period.

Funds of qardh are recognized at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. LPEI provides allowance for possible losses on qardh based on the review of quality of the individual outstanding balances.

2.o. Allowance for impairment losses

Financial asset

LPEI recognize the allowance for expected credit loss (expected loss) for all financial instruments in accordance with PSAK 71 as follows:

1. *Financial assets in the form of debt instruments that are classified as amortized cost or fair value through other comprehensive income.*
 - a. *Impairment loss for financial asset under the classification of amortized cost are recognized as a deduction from the asset's carrying value and is presented as "allowance for impairment losses" in profit or loss and other comprehensive income.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**
Aset keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan yang berupa instrumen utang yang diklasifikasikan dalam biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan).
 - b. Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan sebagai “*unrealized gain or loss*”, (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian) dan diakui di laba rugi sebagai “Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.
2. Komitmen pinjaman atau kelonggaran tarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan (*committed*)
 - a. Penurunan nilai atas komitmen pinjaman diakui sebagai provisi pada komponen liabilitas bank yang dicatat secara terpisah dari aset pinjaman yang terkait sebagai “Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Komitmen Pinjaman”, kecuali LPEI tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah.
 - b. Dalam kondisi tersebut, penurunan nilai atas komitmen pinjaman dan aset pinjaman diakui bersama sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan.
3. Kontrak penjaminan keuangan yang termasuk dalam PSAK 71 dan tidak diukur dalam nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
**2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**
Financial asset (continued)

1. Financial assets in the form of debt instruments that are classified as amortized cost or fair value through other comprehensive income (continued).
 - b. Allowance for impairment of financial assets (other than equity instruments) under the classification of fair value through other comprehensive income are recognized as addition to other comprehensive income in the statement of financial position as “*unrealized gain or loss*”, (which will consolidated value of a financial asset in the financial statement) and recognized in profit or loss as “*Allowance for impairment losses*”.
2. Committed loan commitment or undisbursed loan (*committed*)
 - a. Impairment loss for loan commitments are recognized as provision in liability separate from its related loan asset as “*Expected Credit Loss Provision on Loan Commitments*”, unless an event has caused LPEI to not be able to identify both components separately.
 - b. In such condition, impairment loss for loan commitment and financial asset are recognized together as deduction to a financial asset carrying value in the statement of financial position.
3. Financial guarantee contracts included in PSAK 71 and not measured at fair value through profit or loss.

There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

LPEI mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- i. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- ii. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

LPEI mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Dalam mengevaluasi hal tersebut, LPEI menetapkan kriteria berikut:

1. Tahap 1

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya seluruh hal berikut, yaitu:

- a. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari;
- b. Instrumen keuangan memiliki peringkat kolektabilitas 1 atau 2; dan
- c. Tidak direstrukturisasi (berdasarkan informasi *flag* restrukturisasi di sistem).

Pada tahap ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

2. Tahap 2

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 89 hari.

Pada tahapan ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*lifetime*).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**Allowance for impairment losses on financial assets

LPEI measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:

- i. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
- ii. Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

LPEI evaluates whether there is significant increase in credit risk or objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

In assessing those matters, LPEI applies the criteria as follows:

1. Stage 1

At the evaluation date, credit risk on financial instruments does not increase significantly since initial recognition, which can be proven by the occurrence of all of the following, namely:

- a. Does not have past due obligation not more than 30 days;
- b. The financial instrument has a collectability rating 1 or 2; and
- c. Not restructured (based on restructuring flag information in the system).

At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of an expected 12 months credit loss.

2. Stage 2

At the evaluation date, credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition, when there is past due obligation of 31 days to 89 days.

At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of the expected credit losses over its lifetime.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset
keuangan (lanjutan)

3. Tahap 3

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai,
aset keuangan mengalami penurunan nilai
yang dapat dibuktikan dengan terjadinya
salah satu dari 3 (tiga) hal berikut, yaitu:

- a. Terdapat tunggakan lebih dari 89 hari;
atau
- b. Instrumen keuangan memiliki peringkat
kolektibilitas 3, 4, atau 5; atau
- c. Terdapat restrukturisasi atas aset
keuangan (berdasarkan informasi flag
restrukturisasi di sistem).

Pada tahap ini, LPEI akan mengukur
penyisihan kerugian untuk instrumen
keuangan sejumlah kerugian kredit
ekspektasian sepanjang umurnya.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi
probabilitas tertimbang dari kerugian kredit
yang diukur sebagai berikut:

i. Penilaian secara individual**1) Kriteria individual**

LPEI mengevaluasi penurunan nilai
secara individual jika LPEI memiliki
informasi yang wajar dan didukung untuk
mengukur kerugian kredit ekspektasian
sepanjang umurnya secara individual dan
aset keuangan memiliki kriteria sebagai
berikut:

- a. Aset keuangan dikategorikan sebagai
non-performing financing; atau
- b. Aset keuangan yang mengalami
restrukturisasi; atau
- c. Terdapat bukti objektif penurunan nilai.

LPEI juga dapat menetapkan aset
keuangan untuk dievaluasi secara
individual meskipun aset keuangan
dimaksud belum memiliki kriteria untuk
dievaluasi secara individual, apabila dinilai
oleh manajemen akan menghasilkan
kerugian kredit ekspektasi yang lebih
akurat apabila dinilai secara individual.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**

Allowance for impairment losses on financial
assets (continued)

3. Stage 3

At the evaluation date, there is objective
evidence that the financial asset is
impaired, which can be proven by the
occurrence of one of 3 (three) the following:

- b. Past day obligation for more than 89
days has occurred; or
- c. The financial instrument has a
collectability rating of 3, 4, or 5; or
- d. Restructured financial instrument (based
on restructuring flag information in the
system).

At this stage, LPEI will measure the
allowance for losses for financial
instruments at the amount of the expected
credit losses over their lifetime.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the
weighted probability of a credit loss measured
as follows:

i. Individual assessment**1) Individual criteria**

LPEI evaluates impairment individually if
LPEI has reasonable and supportable
information to measure the lifetime
expected credit losses on an individual
instrument and the financial assets have
the following criteria:

- a. The financial asset is categorized as
non-performing financing
- b. The financial asset is restructured; or
- c. There is objective evidence that the
financial asset is impaired.

LPEI can also assign certain financial
assets to be evaluated individually even
though the said criteria has not been met,
if the management has determined that
the individual method will result in a more
accurate expected credit loss.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

- 2) Evaluasi penurunan nilai
Evaluasi penurunan nilai secara individual didasarkan pada konsep estimasi jumlah probabilitas tertimbang kerugian aset keuangan. Konsep tersebut menggunakan pembobotan masing-masing dari 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario pesimis. Setiap skenario menghasilkan nilai kini arus kas yang didiskontokan menggunakan EIR, dimana arus kas tersebut didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgement*.

Dalam membuat estimasi *recoverable amount* pada arus kas, metode individual didasarkan pada 2 (dua) konsep yaitu:

- (1) *Discounted Cashflow* berdasarkan estimasi arus kas masa depan; dan
- (2) *Expected Collateral* berdasarkan estimasi penjualan agunan dengan mempertimbangkan nilai wajar dan jangka waktu penjualan agunan di masa depan. Selisih estimasi jumlah probabilitas tertimbang dengan jumlah *outstanding* aset keuangan mencerminkan jumlah kerugian kredit ekspektasian secara individual.

Skenario proyeksi ekonomi ini disusun dengan melihat proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia pada tahun 2023 dari sejumlah *contributor/forecaster*. Setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proyeksi yaitu (1) inflasi; (2) resesi ekonomi; dan (3) tingkat pengetatan kebijakan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**

- 2) *Impairment evaluation*
Individual impairment evaluation is based on the concept of an estimated weighted probability of loss of financial assets. This concept uses the weighting of each of the 3 (three) scenarios, namely optimistic scenario, moderate scenario, and pessimistic scenario. Each scenario results in fair value of cashflow discounted using EIR, where the cashflow is based on readily available information and experienced credit judgement.

In estimating cashflow based on recoverable amount, the individual method is based on 2 (two) concept, consisting of:

- (1) The Discounted Cashflow which is based on estimated future cashflow; and*
- (2) The Expected Collateral which is based on estimated sale of collateral taking into consideration the fair value of the collateral and length of sale in the future. The difference between the estimated weighted average amount against the financial asset outstanding reflects the individual expected credit loss.*

This economic projection scenario is derived from GDP Indonesia's growth projection in 2023 from numbers of contributors/forecasters. At least 3 factors are assumed to influence the economic projection consisting of (1) inflation; (2) economic recession; and (3) policy tightening.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**
a. Optimis

Pada skenario Optimis diasumsikan:

- (1) Inflasi yang lebih rendah mendorong perlambatan pengetatan kebijakan moneter dan, dalam beberapa kasus, penurunan suku bunga, serta terdapat tekanan terhadap konsumsi rumah tangga, bisnis, dan pasar mereda;
- (2) Jepang menjadi harapan pertumbuhan dari sisi negara maju. didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan dan *rebound* produksi mobil; dan
- (3) Tekanan harga turun di tengah meredanya tekanan rantai pasokan dan gangguan pasar komoditas yang lebih terurai, serta Inflasi negara-negara yang mereda akan mendorong pelonggaran kebijakan suku bunga hingga mendorong pemangkasan suku bunga.

b. Moderat

Pada skenario Moderat diasumsikan:

- (1) Ekspektasi Inflasi yang berkurang memungkinkan kebijakan moneter yang tidak terlalu ketat, serta penurunan harga minyak akan mendukung pemulihan ekonomi negara-negara dunia;
- (2) PDB global akan melemah dalam jangka pendek, namun kemudian *rebound* seiring ekspektasi inflasi berkurang dan kebijakan suku bunga melonggar;
- (3) Disrupsi pasar akibat perang dan keterbatasan energi tetap menjadi sumber tekanan serta potensi inflasi yang lebih lemah memungkinkan dukungan kebijakan moneter yang lebih longgar.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
**2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**
a. Optimistic

The Optimistic scenario is assumed that:

- (1) Lower inflation will cause slower monetary tightening policy and, in a few cases, decrease in interest rate. Other factors regarding inflation includes easing of domestic household pressure, business, and market.
- (2) Japan is expected to grow within developed countries. Supported by sustainable policies and vehicle production rebound; and
- (3) Lower pressure on pricing of supply chain and evenly spread commodity market pressure, other factors include lower inflation will promote easing of interest rate policy to interest rate cuts.

b. Moderate

The Moderate scenario is assumed that:

- (1) Reduce in expected inflation which may enable a not so tight monetary policy, other factors regarding policy includes decrease in oil prices causing recovery in the world's economy;
- (2) Slowing of world's GDP in the short tem followed by economic rebound along with reduced inflation expectation and the untightening of interest rate policy;
- (3) Market disruption due to war and energy crisis will be the source of pressure, along with looser monetary policy due to potential weakening of inflation.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)****c. Pesimis**

Pada skenario pesimis diasumsikan:

- (1) Ekspektasi inflasi jangka panjang meningkat secara global, mendorong inflasi inti terus meningkat, serta ekspektasi inflasi melampaui target bank sentral dan masih tetap tinggi untuk jangka waktu yang belum diketahui. Permintaan melambat karena pendapatan riil yang dapat dibelanjakan semakin terbatas.
- (2) Inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter yang cepat menggerus pendapatan riil rumah tangga, serta *yield* obligasi melonjak, harga saham/ekuitas jatuh, dan pasar properti terus melemah.
- (3) Pengetatan kebijakan *The Fed* dan global secara agresif berlanjut hingga akhir tahun 2023 sebagai respons Inflasi yang masih tinggi sepanjang tahun 2023.

Untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi.

Per tanggal 31 Desember 2022 LPEI menghitung CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, menggunakan metode arus kas yang didiskontokan dengan tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah restrukturisasi, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN (Catatan 46).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.o. Allowance for impairment losses
(continued)****c. Pessimistic**

The Pessimistic scenario is assumed that:

- (1) Increase in long term expected global inflation, causing a boost in core inflation, other factors include expected inflation beyond Central Bank's target in an unknown time frame. Demand is slowing as real disposable income becomes increasingly limited.
- (2) High inflation and tight monetary policy impacting household income. Other factors include sharp increase in obligation yield, fall of stock/equity prices, and diminishing property prices.
- (3) Continuous aggressive monetary tightening by The Fed in 2023 as a respond to high inflation in 2023.

For the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured National Interest Account financing, calculated using the assumption of the discount rate that is equal to the interest rate after the restructuring.

As of December 31, 2022 LPEI calculate the CKPN on financing for National Interest Account given to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, using the discounted cash flow method with a discount rate equal to the interest rate after restructuring according to the Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in Calculation of CKPN (Note 46).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

ii. Penilaian secara kolektif

1) Kriteria kolektif

LPEI mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif jika aset keuangan memiliki kesamaan dalam karakteristik risiko kredit aset keuangan dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. LPEI mengevaluasi pencadangan secara kolektif untuk aset keuangan yang memiliki hari tunggakan kurang dari 90 hari untuk dan bukan merupakan *non-performing financing*.

Secara garis besar, seluruh portofolio pembiayaan yang evaluasi penurunan nilainya tidak dihitung menggunakan metode individual, akan dievaluasi menggunakan metode kolektif.

- 2) Evaluasi penurunan nilai
Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD), dan *exposure at default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

- a. *Probability of default* (PD)
Probability of default mencerminkan estimasi kemungkinan suatu debitur gagal bayar pada rentang waktu tertentu.

PD dihitung untuk setiap *bucket* pada setiap segmen yang telah ditetapkan melalui kesamaan karakteristik risiko kredit.

Dalam menghasilkan PD, LPEI menggunakan 3 tahapan perhitungan, yaitu: (1) *PD through the cycle*; (2) *PD forward looking*; dan (3) *PD point in time* melalui proses *scaling*.

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**

ii. Collective assessment

1) Collective criteria

LPEI evaluates impairment collectively if the financial assets share the same credit risk characteristics of the financial assets with the aim of facilitation analysis designed which allows a significant increase in credit risk to be identified in a timely manner. LPEI evaluates the financial assets collectively if the financial asset has past due obligation of less than 90 days and is not categorized as non-performing financing.

In general, all financing portfolios for which impairment evaluation is not calculated using the individual method will be evaluated using the collective method.

- 2) Impairment evaluation
The evaluation of collective impairment is based on the concepts of *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD), and *exposure at default* (EAD) which take into account past, current, and future information.

- a. *Probability of default* (PD)
Probability of default reflects the estimated probability of a debtor defaulting over a certain period of time.

PD is calculated for each bucket in each segment that reflects similarity in credit risk characteristic.

In calculating the PD, LPEI uses 3 calculation phases, namely: (1) *PD through the cycle*; (2) *PD forward looking*; and (3) *PD point in time* through a scaling process.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)****a. Probability of default (PD) (lanjutan)**

Dalam 3 tahapan ini, LPEI menggunakan metode vasicek, *roll rate transition matrix*, dan pendekatan lainnya yang lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan regulator.

Metode vasicek adalah metode penentuan PD menggunakan formula korelasi aset yang telah ditentukan oleh *Basel Committee* digunakan untuk aset keuangan yang termasuk dalam portofolio treasury, diantaranya giro pada Bank Indonesia dan Bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, serta efek-efek.

Metode *roll rate transition matrix* menggunakan transisi historis *bucket* PD. *Bucket* PD yang digunakan dalam perhitungan historis adalah sebagai berikut:

1. *Bucket* 1: 0 day past due (DPD)
2. *Bucket* 2: 1 – 30 DPD
3. *Bucket* 3: 31 – 60 DPD
4. *Bucket* 4: 61 – 89 DPD
5. *Bucket* 5: > 89 DPD, atau restrukturisasi aset keuangan (*flag* restrukturisasi), atau berada di kolektibilitas 3, 4, atau 5.

PD dilakukan *forward looking macroeconomic adjustment* untuk menentukan *forward looking PD* berdasarkan hubungan historis antara makroekonomi dengan nilai PD LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.o. Allowance for impairment losses
(continued)****a. Probability of default (PD) (continued)**

In these 3 stages, LPEI uses the vasicek method, *roll rate transition matrix*, and other approaches that is deemed more appropriate and is not contradictory with the regulation.

The vasicek method is a method of determining PD using the asset correlation formula that has been determined by the Basel Committee, is used for financial assets that are included in treasury portfolios, namely current accounts with Bank Indonesia and other Banks, placement with Bank Indonesia and other Banks, and securities.

The roll rate transition matrix method uses the historical transition bucket PD. PD buckets used in historical calculations are as follows:

1. *Bucket* 1: 0 day past due (DPD)
2. *Bucket* 2: 1 – 30 DPD
3. *Bucket* 3: 31 – 60 DPD
4. *Bucket* 4: 61 – 89 DPD
5. *Bucket* 5: > 89 DPD, or restructured financial assets (*restructuring flag*), or has a collectability rating of 3, 4, or 5.

A forward looking macroeconomic adjustment is made to the PD to determine the forward looking PD based on the historical relationship between the macroeconomic and LPEI PD value.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

- b. *Loss given default (LGD)*
Loss given default (LGD) merupakan estimasi kerugian dengan menghitung *recovery* yang didapatkan setelah debitur tersebut *default*. *Recovery date* dihitung mempertimbangkan *time value of money* dari pengembalian kewajiban yang telah *default*. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *time value of money* adalah *effective interest rate (EIR)*.

LGD dihitung dengan mempertimbangkan *forward looking adjustment* berdasarkan hubungan historis antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI. Jika tidak terdapat hubungan antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI, maka LPEI dapat tidak menggunakan *forward looking* dalam penentuan nilai LGD.

- c. *Exposure at default (EAD)*
Dalam menentukan nilai EAD dari setiap debitur, LPEI mempertimbangkan *expected lifetime*. EAD menggambarkan *exposure* yang akan ditanggung LPEI jika terdapat debitur yang *default*.

Expected lifetime adalah pendekatan yang mempelajari *behaviour* dari tingkat penyelesaian fasilitas (lunas atau *write off*) debitur dibandingkan dengan jadwal penyelesaian fasilitas.

- d. *Expected credit loss (ECL)*
Secara umum, formula untuk menghitung ECL secara kolektif adalah perkalian antara PD, LGD, dan EAD.

Dalam menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai kolektif, LPEI menggunakan nilai *outstanding* aset keuangan dari yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.o. Allowance for impairment losses (continued)

- b. *Loss given default (LGD)*
Loss given default (LGD) is the estimated loss by calculating the *recoverable amount* through collateral after the debtor has defaulted. The *recovery date* is calculated by considering the *time value of money* from the repayment of the defaulted obligation. The interest rate used to calculate the *time value of money* is the *effective interest rate (EIR)*.

LGD is calculated by considering *forward looking adjustments* based on the *historical relationship* between macroeconomics and the LPEI LGD value. If there is no macroeconomic relationship with the LPEI LGD value, then the LPEI may not use *forward looking* in determining the LGD value.

- c. *Exposure at default (EAD)*
In determining the EAD value of each debtor, LPEI considers the *expected lifetime*. EAD describes the *exposure* that will be borne by LPEI if a debtor has defaulted.

The *expected lifetime* is an approach that studies the behavior of the debtor's facility settlement rate (paid off or written off) compared to the facility completion schedule.

- d. *Expected credit loss (ECL)*
In general, the formula for calculating ECL collectively is the multiplication of PD, LGD, and EAD.

In calculating the amount of collective impairment loss, LPEI uses the *outstanding value* of collectively assessed financial assets.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai masing-masing *stage* sesuai pada karakteristik *staging*. Metode perhitungan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

- Tahap 1: kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
- Tahap 2: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya
- Tahap 3: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah porsi aset keuangan yang mungkin akan *default* dalam 12 bulan ke depan.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah ekspektasi kerugian yang merupakan hasil dari kejadian *default* selama umur aset keuangan atau sesuai dengan sisa tenor fasilitas.

Faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian adalah suku bunga efektif (EIR).

Probabilitas rata-rata tertimbang (*probability weighted*) dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan LPEI yang mencakup skenario optimis, normal, dan pesimis.

Total rata-rata tertimbang (*weighted*) atas estimasi *cashflow* dimaksud menjadi pengurang atas nilai tercatat aset keuangan, yang dimana selisihnya akan menjadi cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

The impairment loss is calculated based on the criteria of respective stages according to the criteria stated above. The calculation method for respective stages are as follows:

- Stage 1: 12-months expected credit loss (ECL)
- Stage 2: Lifetime ECL
- Stage 3: Lifetime ECL

The 12-months ECL is the portion of the financial asset possibly defaulting within the next 12 months.

The ECL lifetime is the expected credit loss that result from default events over the expected life of the financial asset or according to the remaining tenor of the facility.

The discount factor used to calculate ECL is effective interest rate (EIR).

The probability weighted calculation of ECL is determined by LPEI which consists of optimistic, normal, and pessimistic scenarios.

The total weighted cash flow estimation is deducted from the financial asset's carrying amount, where the difference between the weighted average cashflow estimation to the carrying value of the financial asset will result in the impairment loss of the financial assets.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Estimasi dan asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang berdasarkan PSAK 71 diungkapkan dalam Catatan 3b.2.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dan individual dihitung berdasarkan PSAK 102 "Akuntansi Murabahah" dan ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Aset Keuangan yang Direstrukturasikan

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- i. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- ii. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
**2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**

The estimates and assumptions used to calculate allowance for impairment losses on financing and receivables based on PSAK 71 are disclosed in Note 3b.2.

Allowance for impairment losses on murabahah receivables that are assessed collectively and individually is calculated based on PSAK 102 "Murabahah Accounting" and ISAK 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- i. If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.
- ii. If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit, atau tagihan oleh LPEI dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**Deteriorating Financial Assets

At each reporting date, LPEI assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Objective evidence that financial assets are impaired can include default or delinquency by a debtor, restructuring of a loan, or receivable by LPEI on terms that the LPEI would not otherwise consider if the debtor is not experiencing financial difficulties, indications that a borrower or issuer will enter bankruptcy, the disappearance of an active market for a security due to financial difficulties, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers or issuers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan komitmen pinjaman, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- ii. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian, penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**

Credit-impaired Financial Assets (*Purchased or originated credit impaired financial assets – POCI*)

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- i. Financial assets measured at amortized cost and loan commitments, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- ii. Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**Penerimaan kembali atas aset keuangan yang
telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Aset keuangan syariah

Untuk aset keuangan unit usaha Pembiayaan Syariah, kecuali transaksi murabahah, LPEI Syariah menerapkan POJK No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset
non-keuangan

LPEI menerapkan PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset", yang menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan LPEI agar aset dicatat tidak melebihi jumlah aset yang dapat dipulihkan.

PSAK ini juga yang menentukan kapan LPEI membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan mungkin mengalami penurunan nilai. Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, LPEI membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Recoveries of written-off financial assets are recognized as operational income other than interest income.

Sharia financial assets

For the financial assets of the business unit that is engaged in Sharia Financing, except for Murabahah transactions, LPEI Sharia applies POJK No. 9/POJK.05/2022 on Supervising and Monitoring of LPEI for determination of impairment loss.

Allowance for impairment losses on non-
financial assets

LPEI applied PSAK 48 "Impairment of Asset", that states the procedures applicable for LPEI so that the amount of assets recorded do not exceed the assets recoverable amount.

The PSAK also states that when LPEI is able to offset the loss from impairment and the disclosures needed.

At each reporting date, LPEI assesses whether there is any indication that its non-financial assets may be impaired. When an indicator of impairment exists or when an annual impairment testing for an asset is required, LPEI makes a formal estimate of recoverable amount.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset
non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) setelah dikurangi besarnya biaya pelepasan dibandingkan dengan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individu, kecuali aset tersebut menghasilkan arus kas masuk yang tidak tergantung lagi dari aset yang lain atau kumpulan aset, yang dalam hal jumlah terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) melebihi jumlah terpulihkan, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan.

Dalam menilai nilai pakai suatu aset, estimasi terhadap arus kas dipulihkan di masa depan akan didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan risiko spesifik aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada tahun yang bersangkutan, kecuali aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, dalam hal ini kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan langsung ke dalam selisih penilaian kembali aset bersangkutan.

Penelaahan dilakukan pada setiap tanggal pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai sebelumnya mungkin tidak lagi ada atau telah menurun. Apabila terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan akan diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui akan dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak kerugian penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, nilai tercatat aset akan ditingkatkan sejumlah nilai terpulihkan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**

Allowance for impairment losses on non-
financial assets (continued)

Recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets, in which case the recoverable amount is assessed as part of the CGU to which it belongs. Where the carrying amount of an asset (or CGU) exceeds its recoverable amount, the asset (or CGU) is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use of assets, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset (or CGU).

An impairment loss is charged to operations on the year in which it arises, unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is charged to the revaluation increment of the said asset.

An assesment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset
non-keuangan (lanjutan)

Perhitungan cadangan klaim atas aktivitas penjaminan telah dihitung sesuai dengan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0036/PDE/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang perhitungan cadangan klaim atas aktivitas penjaminan dan telah berdasarkan perhitungan aktuaris.

2.p. Kontrak penjaminan

Kontrak penjaminan yang memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan yang tercantum dalam PSAK 71 dicatat dalam kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK 71.

Kontrak penjaminan yang tidak memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan dalam PSAK 71, dicatat berdasarkan PSAK 57.

Piutang yang timbul dari proses penyelesaian klaim dari kontrak garansi dengan menggunakan akta pengakuan utang dicatat sebagai aset keuangan apabila memenuhi definisi aset keuangan sesuai PSAK 71 jika probabilitas keterlambatan tinggi.

Liabilitas yang timbul dari kontrak penjaminan keuangan diakui sebesar nilai wajar pada saat pengakuan awal. Jika kontrak jaminan keuangan diterbitkan untuk pihak yang tidak berelasi dalam suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*) yang berdiri sendiri, nilai wajarnya pada saat dimulainya transaksi kemungkinan sama dengan *guarantee fee* yang diterima, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Setelah pengakuan awal, jumlah di dalam liabilitas kontrak jaminan keuangan diukur pada jumlah yang lebih tinggi antara jumlah yang diakui provisi dan jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi amortisasi kumulatif (jika sesuai).

Liabilitas yang timbul atas suatu klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan akan dicatat sebagai utang klaim. Pendapatan *fee* kontrak penjaminan keuangan diakui sebagai pendapatan selama periode penjaminan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses
(continued)**

Allowance for impairment losses on non-
financial assets (continued)

The calculation of estimated guarantee claim was calculated based on Regulation of Director Executive No. 0036/PDE/12/2015 dated December 29, 2015 regarding the calculation of estimated guarantee claim and based on actuary calculation.

2.p. Guarantee contracts

Guarantee contracts that meets the definition of financial guarantee contracts laid out in PSAK 71 is recorded as financial guarantee contract based on PSAK 71.

Guarantee contracts that do not meet the definition of financial guarantee contracts under PSAK 71, are recorded for under PSAK 57.

Receivables resulting from guarantee contracts claim which is settled with debentures are recorded as financial assets if they meet the definition of financial asset following PSAK 71 if estimated that the likelihood of collection is high.

Liabilities arising from financial guarantee contracts are recognized at fair value at initial recognition. If the financial guarantee contract was issued to an unrelated party in a stand-alone arm's length transaction, its fair value at inception is likely to guarantee fee received, unless there is evidence to the contrary. After initial recognition, the amount of financial guarantee contract liabilities are measured at the higher of the provision amount recognized and amount initially recognized less cumulative amortization (when appropriate).

Liabilities incurred on claims approved but have not been paid are recorded as claims payable. Guarantee fees from financial guarantee contracts are recognized as revenue over the period of the guarantee.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.q. Piutang asuransi, liabilitas asuransi, dan
utang asuransi**

Piutang asuransi merupakan tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker dan perusahaan asuransi (*ceding company*) pada tanggal pelaporan keuangan.

Liabilitas asuransi meliputi estimasi klaim, dan premi belum merupakan pendapatan, serta pendapatan premi ditangguhkan. Estimasi klaim adalah estimasi jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang dilaporkan masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (*IBNR*).

Cadangan yang terkait dengan klaim dilaporkan masih dalam proses penyelesaian menunjukkan biaya akhir atas klaim yang dilaporkan, namun belum disetujui pada tanggal pelaporan.

IBNR adalah bagian dari klaim dimana kejadian yang diasuransikan telah terjadi namun asuradur belum memperoleh pemberitahuan atas klaim. Walaupun asuradur belum diberitahu mengenai klaim tersebut sebelum akhir tahun buku, pencadangan biaya atas klaim tersebut diperlukan untuk memenuhi konsep kehati-hatian dan konsep penandingan (*matching concept*).

Utang asuransi terdiri dari utang premi reasuransi, utang komisi, dan utang klaim.

Utang premi termasuk diantaranya adalah:

- Kewajiban pembayaran premi kepada reasuradur, sebagai akibat adanya transaksi reasuransi yang dilakukan dengan pihak reasuradur.
- Kewajiban pembayaran premi kepada koasuransi.

Utang klaim merupakan klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada tertanggung dari transaksi asuransi langsung atau koasuransi.

Utang klaim diakui saat klaim disetujui untuk dibayar.

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.q. Insurance receivables, insurance liabilities,
and insurance payables**

Insurance receivables represent premium charges due from the insured/agent/broker and insurer (ceding company) as of the reporting date.

Insurance liabilities include estimated claims, and unearned premiums, and deferred premium income. Estimated claims are based on the estimated ultimate cost of all claims incurred but not settled, including claims incurred but not reported (IBNR).

Reserves associated with claims reported but have not been settled represents the ultimate cost of claims that were reported, but is yet to be approved as of the reporting date.

IBNR is the element of claims where the insured event has occurred but where the insurer has yet to be notified of a claim. Although the insurer has not yet been notified of these claims before the end of the financial year, the cost of these claims are provided to comply with both the prudence and the matching concept.

Insurance payables consist of reinsurance premium payables, commission payables, and claims payables.

Premium payables includes:

- *Premium payment obligations to the reinsurer, as a result of reinsurance transactions with reinsurers.*
- *Premium payment obligations due to coinsurers.*

Claims payable is represents claims agreed but have not been paid to the insured arising from either direct insurance or coinsurance.

Claims payable is recognized when the claim is approved for payment.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.q. Piutang asuransi, liabilitas asuransi, dan
utang asuransi (lanjutan)**

Utang klaim dihentikan pengakuannya saat kewajiban telah berakhir, dilepaskan, atau dibatalkan.

2.r. Aset reasuransi

Aset reasuransi adalah nilai hak kontraktual *neto cedant* dalam perjanjian reasuransi. Aset reasuransi terdiri dari estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, porsi reasuransi atas liabilitas premi asuransi, dan porsi reasuransi atas klaim yang disetujui untuk dibayar (piutang reasuransi). Aset reasuransi diukur secara konsisten dengan jumlah yang terkait dengan asuransi yang mendasari sesuai dengan jangka waktu kontrak reasuransi.

Setiap tanggal pelaporan, LPEI mengevaluasi apakah aset reasuransi mengalami penurunan nilai. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika terdapat bukti objektif yang menunjukkan adanya kemungkinan besar LPEI tidak mendapatkan jumlah yang tertagih kepada reasuradur. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2.s. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.q. Insurance receivables, insurance
liabilities, and insurance payables
(continued)**

Claims payable is derecognized when the obligation expires, is discharged, or cancelled.

2.r. Reinsurance assets

Reinsurance assets is a cedant's net contractual rights under a reinsurance contract. Reinsurance assets is consist of estimated reinsurance reimbursement for claims that are still in the process of completion, estimated reinsurance reimbursement for claims incurred but not yet reported, the portion of reinsurance premiums on liability insurance, and reinsurance portion of claims approved for payment (reinsurance receivables). Reinsurance assets are measured consistently with the amounts associated with the underlying insurance in accordance with the terms of the reinsurance contract.

At each reporting date, LPEI assesses whether reinsurance assets are impaired. Reinsurance assets are impaired if objective evidence is available to suggest that it is probable that LPEI will not be able to collect the amounts due from reinsurers. The impairment loss is recognized as an expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2.s. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable is stated net of allowance for impairment losses.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.t. Aset tetap, Aset Hak Guna, dan Liabilitas
Sewa**

Harga perolehan awal atas aset tetap terdiri dari harga beli dan semua biaya langsung yang dapat diatribusikan untuk membuat aset dalam kondisi siap pakai dan berlokasi di tempat yang digunakan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu dikapitalisasi sebagai biaya penggantian atas jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan aset ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut.

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Gedung	20	5%	Building
Peralatan dan perlengkapan kantor	5	20%	Office furniture and fixtures
Kendaraan bermotor	5	20%	Motor vehicles

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.t. Fixed assets, Right-of-Use-Assets, and
Lease Liability**

The initial cost of premises and equipment consists of its purchase price and any directly attributable costs of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss.

When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income upon occurrence.

At each statement of financial position date, the assets' residual values, useful lives, and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

Depreciation is calculated on a straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows.

Construction in progress is stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate premises and equipment account when the construction is substantially completed and the asset constructed is ready for its intended use.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.t. Aset tetap, Aset Hak Guna, dan Liabilitas
Sewa (lanjutan)**

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

LPEI mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Beban keuangan dicatat dalam laba rugi. Aset hak guna (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa LPEI akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.t. Fixed Assets, Right-of-Use-Assets, and
Lease Liability (continued)**

When premises and equipment are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in statement of profit or loss.

Right-of-use-Assets and Lease Liabilities

LPEI recognized a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. Meanwhile, rights of use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs, and lease payments made on or before the start date of the lease, less rental incentives received.

Finance expense is recorded in profit or loss. Right of used assets (presented under fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that LPEI will obtain ownership by the end of the lease term.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.u. Aset yang diambil alih

Aset yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan, maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI dan diselesaikan melalui penjualan. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan. LPEI memiliki kebijakan untuk selalu berusaha menjual AYDA untuk menyelesaikan sisa kewajiban debitur.

AYDA diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realisable value*), yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

LPEI membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas AYDA berdasarkan kualitas atas aset, yaitu:

- 1) 15% (lima belas persen) untuk kualitas kurang lancar, yaitu dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- 2) 50% (lima puluh persen) untuk kualitas aset diragukan, yaitu dimiliki lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- 3) 100% untuk kualitas aset macet, yaitu dimiliki lebih dari 5 tahun.

Biaya pemeliharaan atas AYDA yang terjadi setelah pengambilalihan atau akuisisi aset dibebankan sebagai laba/rugi pada saat terjadinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset yang diambil alih diakui sebagai laba/rugi periode berjalan.

2.v. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar dimuka, diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.u. Foreclosed Assets

Foreclosed assets represent assets acquired by LPEI, both from auction and non-auction based on voluntary transfer by the debtors or based on debtors' approval to sell the collateral where the debtors could not fulfill their obligations to LPEI and is settled through a sale. Foreclosed assets represent loan collateral acquired in settlement of loans. LPEI has policy to sell foreclosed assets to settle debtors' liabilities.

Foreclosed assets are recognised at their net realisable value. Net realisable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated cost of liquidating the foreclosed assets.

The allowance for impairment made on foreclosed assets is based on its asset quality:

- 1) 15% (fifteen percent) for substandard assets, which are owned for more than 1 (one) year up to 3 (three) years;*
- 2) 50% (fifty percent) for doubtful assets, which are owned for more than 3 (three) years up to 5 (five) years;*
- 3) 100% (one hundred percent) for non performing assests, which are owned for more than 5 (five) years.*

Maintenance costs of foreclosed assets subsequent to the foreclosure or acquisition of the assets are charged as current year profit/loss as incurred. Gains or losses from sale of foreclosed assets are charged as current period profit/loss as incurred.

2.v. Prepaid expenses

Prepaid expenses, are amortized over its benefited periods using the straight-line method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.w. Liabilitas segera**

Liabilitas segera merupakan liabilitas LPEI kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan.

2.x. Efek-efek utang yang diterbitkan

Efek-efek utang yang diterbitkan terdiri dari surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh LPEI berupa obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Obligasi yang diterbitkan disajikan sebesar nilai tercatat dengan biaya perolehan yang belum diamortisasi.

Beban yang berkaitan dengan penerbitan obligasi diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

2.y. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.w. Current liabilities**

Current liabilities represent LPEI's obligations to outside parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Current Liabilities are recorded at amortized cost. This account is classified as financial liabilities.

2.x. Debt securities issued

Debt securities issued consist of obligations of LPEI in the form of bonds traded in the capital market. Bonds are stated at their carrying value, net of unamortized cost.

Expenses related to bonds issuance are recognized as discount, directly deducted from the net proceeds of the bonds issuance and amortized over the term of the bonds using the effective interest method.

2.y. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received from banks or other parties with repayment obligation based on the borrowing agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
2.z. Provisi

Provisi diakui jika LPEI memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi tidak diakui.

2.aa. Pendapatan dan beban bunga

Sebelum terjadinya penurunan nilai (tahap 1 & 2), pendapatan bunga dihitung menggunakan metode EIR yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (tahap 3 atau POCI) dilakukan dengan menerapkan EIR atas jumlah tercatat neto aset keuangan, yaitu jumlah *outstanding* setelah dikurangi dengan kerugian akibat penurunan nilai untuk:

- a. Aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk (POCI)
Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit (*risk adjusted effective interest rate*) atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b. Tahap 3
Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan, yaitu nilai yang telah dikurangi kerugian akibat penurunan nilai.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)
2.z. Provision

Provisions are recognized when LPEI has current liability (both legal or constructive) as a result of past events with high profitability of settlement by outflow of resources with economic benefits and a reliable estimate of the amount of liability can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If there is no probable outflow of resources to settle these liabilities, provision is not recognized.

2.aa. Interest income and expense

Prior to impairment (stage 1 & 2), interest income is calculated using the EIR method, namely by applying an effective interest rate on the gross carrying amount of financial assets except for financial assets purchased or originating from credit impaired financial assets.

Interest income on impaired financial assets (stage 3 or POCI) is calculated by applying EIR to the net carrying amount of financial assets, namely the outstanding amount after deducting losses due to impairment for:

- a. Financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets (POCI)
For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate that is adjusted to credit risk (*risk adjusted effective interest rate*) on the amortized cost of financial assets since initial disclosure.
- b. Stage 3
For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate on the amortized cost of financial assets in the reporting period, namely the value that has been reduced by losses due to impairment.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.aa. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)**

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (*stage 3* atau *POCI*) dilakukan dengan menerapkan EIR atas jumlah tercatat neto aset keuangan, yaitu jumlah *outstanding* setelah dikurangi dengan kerugian akibat penurunan nilai.

Pendapatan bunga selanjutnya diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai atau yang disebut dengan *unwinding interest*.

2.ab. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan piutang, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan ini mencakup provisi dan komisi.

Pendapatan atau komponen pendapatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

2.ac. Pendapatan asuransi lainnya

LPEI mengakui pendapatan asuransi seperti komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi dan pendapatan lainnya sebagai pendapatan asuransi lainnya.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.aa. Interest income and expense (continued)**

Interest income on impaired financial assets (stage 3 or POCI) is calculated by applying EIR to the net carrying amount of financial assets, namely the outstanding amount after deducting losses due to impairment.

Interest income is subsequently recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in measuring impairment losses or what is known as unwinding interest.

2.ab. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to financing and receivables activities, or fees and commissions income which relate to a specific period are amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income. These fees include provision and commission.

Fees or component of fees that are not linked to loan financing activities or to a certain period and/or in regards to a service performed, is directly recognized as income when performance obligations are met and is accounted as other operational income.

2.ac. Other insurance income

LPEI recognized insurance income such as commission received from reinsurance transaction and other income as other insurance income.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus
secara syariah**

Pendapatan usaha syariah merupakan pendapatan margin murabahah, dan pembiayaan musyarakah serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Beban bonus secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan margin murabahah diakui menggunakan metode suku bunga efektif dengan mempertimbangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan/piutang syariah dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada debitur penyimpan dana dan LPEI dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana debitur dan LPEI yang dipakai dalam piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk debitur tersebut kemudian dibagikan ke nasabah sebagai "shahibul maal" dan LPEI sebagai "mudharib" sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana LPEI, seluruhnya menjadi milik LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
**2.ad. Sharia profit sharing income and bonus
expenses**

Sharia income represents margin income from murabahah, and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on an accrual basis except for income derived from profit sharing. Sharia bonus expenses consist of bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Murabahah margin is recognized using the effective interest rate method taking into consideration directly attributable transaction costs.

Total margin income and profit sharing on the sharia financing/receivables transactions and from other earning assets to be distributed to debtors of fund owners and LPEI are computed based on the proportion of funds from the debtors and LPEI used to finance the murabahah receivables and mudharabah and musyarakah financing and other earning assets.

The total available margin and profit sharing are distributed to debtors as "shahibul maal" (owner of funds) and to LPEI as "mudharib" (fund manager) in accordance with a pre-determined ratio (nisbah).

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which use LPEI's funds belong to LPEI as a whole.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.ae. Pengakuan pendapatan dan beban
asuransi pendapatan premi**

Premi yang diterima dari kontrak asuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis bersama diakui sebesar pada bagian kepemilikan premi LPEI.

Premi yang diterima dari kontrak jangka pendek asuransi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan secara individual ke masa pertanggungsaan.

Bagian tahun berjalan atas premi dari kontrak jangka panjang asuransi dicatat dengan cara yang sama seperti yang diterima untuk jangka pendek. Bagian premi tahun-tahun berikutnya ditangguhkan.

Premi yang belum merupakan pendapatan adalah proporsi dari premi dalam satu tahun yang berhubungan dengan periode risiko setelah tanggal pelaporan. Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara pro rata harian. Proporsi yang timbul dari periode berikutnya ditangguhkan sebagai cadangan premi yang belum merupakan pendapatan.

LPEI mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungsaan kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak reasuransi yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan.

Pendapatan premi menunjukkan jumlah premi bruto dan premi reasuransi. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.ae. Insurance revenue and expense
recognition premium income**

Premium received from insurance contracts are recognized as income during the policy period (contracts) in proportion to the insurance coverage provided. Premiums from coinsurance policy is recognized based on LPEI's proportionate share of the premium.

Premium received from short-term insurance contracts are deferred and recognized as income on an individual basis over the coverage period.

Current portion of premium received from long-term insurance contracts are accounted for in the same manner as those received for short-term insurance contract. Portion for following years is deferred.

Unearned premium are those proportions of premiums written in a year relate to periods of risk after the reporting date. Unearned premiums are calculated on a daily pro rata basis. The proportion attributable to subsequent periods is deferred as a provision for unearned premiums.

LPEI reinsures part of its total accepted risk with other insurance and reinsurance companies. Premiums paid or share in premium on prospective reinsurance contracts are recognized over the remaining period of the reinsurance contracts based on the coverage provided.

Premium income represents gross premium and reinsurance premiums. Reinsurance premium is presented as deduction from gross premium.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

**2.ae. Pengakuan pendapatan dan beban
asuransi Pendapatan premi (lanjutan)**

Beban klaim

Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim penjaminan, klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (estimasi klaim) ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim masih dalam proses di tanggal pelaporan, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan estimasi klaim diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi klaim adalah selisih antara estimasi klaim tahun berjalan dan tahun lalu.

Beban klaim menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan (penurunan) estimasi klaim. Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

Estimasi klaim yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari satu tahun setelah akhir periode harus memperhitungkan pengaruh nilai waktu uang. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim sebagai hasil dari proses penelaahan lebih lanjut diakui berdasarkan perbedaan antara periode berjalan dan periode kewajiban klaim sebelumnya.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2.ae. Insurance revenue and expense
recognition Premium income (continued)**

Claim expenses

Claims consist of settled claims, guarantee claims, outstanding claims including claims incurred but not yet reported, and claim settlement expenses. Claims are recognized as expenses when the liabilities to cover claims have been incurred. Subrogated rights are recognized as deduction from claim expenses upon realization.

Claims in process (estimated claims) are computed based on estimated loss from claims that are still in process at reporting date, including claims incurred but not yet reported. Changes in estimated claims are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income at the time of change. Increase (decrease) in estimated claims represents the difference between the balance of estimated claims in the current year and prior year.

Claim expenses represent gross claims, reinsurance claims, and increase (decrease) in estimated claims. Reinsurance claims are presented as deduction from gross claims.

Estimated claims that are expected to be settled for more than one year after the end of the period must take into account the effect of time value of money. Changes in the estimated claims liabilities as a result of further review process are recognized based on the the difference between the current period and the prior period claims liability.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.af. Program dana pensiun dan imbalan kerja**Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus, dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh pegawai pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetap. Kontribusi LPEI adalah sebesar 6%, sedangkan kontribusi pegawai adalah sebesar 4% yang dihitung berdasarkan penghasilan dasar bulanan pegawai. Kontribusi LPEI terhadap dana pensiun dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

LPEI diwajibkan menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Cipta Kerja No. 11/2020, karena UU Cipta Kerja menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja adalah program imbalan pasti.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Manfaat pascakerja diperoleh dan diakui sebagai biaya ketika layanan telah diberikan oleh karyawan LPEI yang memenuhi syarat. Manfaat tersebut ditentukan berdasarkan peraturan LPEI dan persyaratan minimum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang "Undang-undang Cipta Kerja" sejak tahun 2021, mana yang lebih tinggi.

Manfaat pasca kerja dan tunjangan karyawan jangka panjang lainnya ditentukan secara aktuarial menggunakan Metode Kredit Unit Proyeksi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.af. Pension plan and employee benefits**Short-term employee benefits

Short-term employee benefit such as wages, social security contribution, short-term leave, bonuses, and other non-monetary benefit are recognized over the service rendered. Short-term employee benefit is measured using undiscounted amount.

Defined benefit pension

A defined benefit pension plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement, usually depends on one or more factors such as age, years of service, and compensation.

LPEI has a defined benefit pension plan covering all of its permanent employees. LPEI and the employees' contributions are computed at 6% and 4%, respectively, of the employees' monthly basic salaries. LPEI's contributions to the retirement plan are recognized as expense when incurred.

LPEI is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Job Creation Law No. 11/2020. Because, the Job Creation Law determines a certain formula to calculate the minimum amount of pension benefits, basically, the pension program based on the Job Creation Law is a defined benefit program.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified LPEI employees. The benefits are determined based on the LPEI's regulations and the minimum requirements of Law No. 11 year 2020 regarding "Undang-undang Cipta Kerja" since 2021, whichever is higher.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
**2.af. Program dana pensiun dan imbalan kerja
(lanjutan)**
Program imbalan pasti dan imbalan kerja
jangka panjang lainnya

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset)
imbalan pasti neto, yang diakui sebagai
penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (ii) Imbal hasil atas aset program tidak
termasuk jumlah yang dimasukkan dalam
bunga neto atas liabilitas (aset);
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset,
tidak termasuk jumlah yang dimasukkan
dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset)
imbalan pasti neto, yang diakui sebagai
penghasilan komprehensif lain tidak
direklasifikasi ke laba rugi pada periode
berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas
biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas
(aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran
kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto
langsung diakui pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian
periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada
tanggal yang lebih awal antara ketika
amandemen atau kurtailmen program terjadi,
dan ketika biaya restrukturisasi atau
pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu
yang belum vested tidak lagi dapat
ditangguhkan dan diakui selama periode
vesting masa depan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
**2.af. Pension plan and employee benefits
(continued)**
Defined benefit plan and other long-term
employee benefits

Remeasurement of net defined benefit
liabilities(assets), which is recognized as other
comprehensive income, consist of:

- (i) Actuarial gains and losses;
- (ii) Return on plan assets excluding amounts
that included in net interest on liabilities
(assets);
- (iii) The changes in the impact of the asset
ceiling, excluding amounts that included
in net interest on liabilities (assets).

Remeasurement of net defined benefit
liabilities (assets), which is recognized as
other comprehensive income are not
reclassified to profit or loss in subsequent
periods.

For other long-term employee benefits over
the current service cost, net interest on net
defined benefit liabilities (assets), and the
remeasurement of net defined benefit liability
(asset) obligations are recognized
immediately in the current consolidated
statement of profit or loss and other
comprehensive income.

All past service costs are recognised at the
earlier of when the amendment or curtailment
occurs, and when the related restructuring or
termination costs are recognized, as a result,
unvested past service cost can no longer be
deferred and recognised over the future
vesting period.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.ag. Transaksi dan saldo dalam mata uang
asing**

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *Spot Reuters* pada pukul 16.00 WIB. *Reuters* adalah salah satu sumber kurs penutupan yang diakui oleh Bank Indonesia dan PSAK.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)****2.ag. Foreign currency transactions and
balances**

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the exchange rates prevailing at the time of the transaction. At financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah at the Reuters' spot exchange rates at 04.00 PM (West Indonesian local time). Reuters is one of the recognized sources of closing rate by Bank of Indonesia and PSAK.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into rupiah using the exchange rate at the end of the year.

As of December 31, 2022 and 2021, the exchange rates used are as follows:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Dolar Amerika Serikat	15,568	14,253	United States Dollars
Euro Eropa	16,582	16,112	European Euro
100 Yen Jepang	11,781	12,377	100 Japanese Yen
Dolar Singapura	11,593	10,555	Singapore Dollars

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
2.ah. Pajak Penghasilan

Pajak kini merupakan estimasi utang atau pengembalian pajak yang dihitung atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak.

Utang atau restitusi pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas, kecuali perbedaan yang dikenakan pajak final. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada periode aset atau liabilitas tersebut direalisasi atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan-peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**
2.ah. Income Tax

Current tax is the expected tax payable or refundable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments.

Current tax payable or refundable is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases, except those differences that are subject to final tax. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences while deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the period when the assets or liabilities are realized or settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rate are credited or charged to current year statement of profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)****2.ah. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode posisi keuangan, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan antara aset dan liabilitas menurut pajak dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan.

2.ai. Informasi segmen

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana LPEI terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana LPEI beroperasi.

LPEI menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari LPEI:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara *regular* oleh pengambil keputusan operasional LPEI untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

LPEI hanya beroperasi dalam usaha perbankan konvensional dan syariah dan hanya beroperasi di Indonesia tanpa cabang. Sehingga, LPEI tidak menyajikan informasi pelaporan segmen berdasarkan wilayah geografis operasi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies
(continued)****2.ah. Income Tax (continued)**

Deferred tax assets and liabilities are presented on a mutually deleted basis in the financial statements, except for deferred tax assets and liabilities for different entities according to the current presentation of tax assets and liabilities.

Deferred income tax is calculated using the financial position method, on all temporary differences at the statement of financial position date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

2.ai. Segment information

Segment information is disclosed to enable users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which LPEI is involved in and the economic environment where LPEI operates.

LPEI determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

An operating segment is a component of LPEI:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the LPEI's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

LPEI only operates in the the business of conventional banking and sharia and only operates in Indonesia without any branches. Therefore, LPEI cannot present reporting information segment by the operation geographical area.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**
2.ai. Informasi Segmen (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset, dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan
a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan
1. Usaha yang berkelanjutan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi LPEI, manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan LPEI untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa LPEI memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. Nilai wajar atas instrumen keuangan

Apabila nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang tercatat pada posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies
(continued)**
2.ai. Segment Information (continued)

Income, costs, outcome, assets, and liabilities segment include items that directly attributable to a certain segment and also matters that can be allocated with the basis appropriate to specified segment.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions
a. Significant accounting judgments
1. Going concern

In the process of implementing LPEI's accounting policies, management has exercised judgments and estimates in determining the amounts recognized in the financial statements.

The management has assessed LPEI's ability to continue as a going concern and believes that LPEI has the resources to continue its business in the future. In addition, management was not aware of any material uncertainty which may cast significant doubt to LPEI's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

2. Fair value of financial instruments

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the financial position is not available in an active market, the fair value is determined using various valuation techniques including the use of statistical mathematical model.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**
**a. Pertimbangan akuntansi yang
signifikan (lanjutan)**
2. Nilai wajar atas instrumen keuangan

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang dapat diobservasi. Bila data pasar yang dapat diobservasi tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi yang diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan seperti model umpan balik likuiditas dan volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto jangka panjang, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

3. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

LPEI menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi LPEI seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

4. Klasifikasi produk asuransi dan penjaminan

Produk LPEI berupa "Penjaminan Indonesia Eximbank" dan "Penjaminan Kepabebean" dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK 57 karena produk-produk tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK 71 dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai kontrak asuransi berdasarkan PSAK 62 disebabkan tidak terdapat risiko asuransi yang signifikan.

"Asuransi Proteksi Piutang Dagang" dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK 28 dan PSAK 62 karena merupakan kontrak asuransi dan LPEI telah mencatat produk tersebut sebagai kontrak asuransi dan memiliki intensi meneruskan perlakuan tersebut.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**
**a. Significant accounting judgments
(continued)**
2. Fair value of financial instruments

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. Considerations include considerations such as liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment, and the level of default assumption.

3. Classification of financial assets and liabilities

LPEI specifies certain classification of assets and liabilities with consideration whether the definition specified by the PSAK 71 is fulfilled. Therefore, financial assets and liabilities have been recognized in accordance with the accounting policies of LPEI stated in Note 2e.

4. Classification of insurance products and guarantees

LPEI's "Indonesia Eximbank Guarantee" and "Customs Guarantee" products are accounted for in accordance with PSAK 57 as they are not financial guarantee contract under PSAK 71 and do not qualify as insurance contract under PSAK 62 due to the lack of significant insurance risk.

"Accounts Receivable Protection Insurance" is recorded in accordance with PSAK 28 and PSAK 62 because it is an insurance contract and LPEI has recorded the product as insurance contract and intended to continue such accounting treatment.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**
**a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan
(lanjutan)**
5. Penilaian mata uang fungsional

Manajemen menggunakan pertimbangan-nya untuk menentukan mata uang fungsional LPEI yang dapat merepresentasikan secara benar efek ekonomi dari transaksi yang mendasarinya, peristiwa, dan kondisi yang relevan dengan LPEI.

Dalam pembuatan pertimbangan tersebut, LPEI memperhatikan hal-hal berikut:

- a. mata uang yang sangat mempengaruhi harga jual untuk instrumen keuangan dan jasa-jasa (ini sering kali menjadi mata uang yang digunakan, yaitu mata uang dimana harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa didenominasi dan direalisasikan);
- b. mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- c. mata uang dimana penerimaan dari kegiatan operasi biasanya didapatkan.

6. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan

Pandemi Global Virus Corona (Covid-19) menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan memengaruhi pertimbangan LPEI dalam menyusun laporan keuangan dan berdampak pada penerapan PSAK 71 instrumen keuangan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**
**a. Significant accounting judgments
(continued)**
5. Assessment of functional currency

The management uses its judgment to determine LPEI's functional currency which faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events, and conditions that are relevant to LPEI.

In making this judgment, LPEI considers the following:

- a. the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
- b. the currency in which funds from financing activities are generated; and
- c. the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

6. Impact of Covid-19 Pandemic on the adoption of PSAK 71 Financial Instruments

The Global Corona Virus pandemic (Covid-19) raises global and domestic economic uncertainties and significantly influences LPEI's considerations in preparing financial statements and has an impact on the adoption of PSAK 71 financial instruments.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)****a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan
(lanjutan)****6. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap
penerapan PSAK 71 Instrumen
Keuangan**

Mengacu pada POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 serta panduan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia tentang dampak pandemi Covid-19 maka LPEI:

- Mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak Covid-19.
- Menerapkan skema restrukturisasi mengacu pada hasil asesmen yang akurat disesuaikan dengan profil debitur dengan jangka waktu selamanya 1 (satu) tahun dan hanya diberikan pada debitur-debitur yang benar-benar terdampak Covid-19.
- Melakukan identifikasi dan *monitoring* secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi atau dampak Covid-19 berakhir.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)****a. Significant accounting judgments
(continued)****6. Impact of Covid-19 Pandemic on the
adoption of PSAK 71 Financial
Instruments**

Referring to POJK No. 17/POJK.03/2021 concerning the Second Amendment to the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a *Countercyclical* Policy for the Impact of the Spread of *Coronavirus Disease* 2019 and guidelines for the Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants regarding the impact of the Covid-19 pandemic, LPEI:

- *Identifying debtors who have been performing well but have decreased their performance due to Covid-19.*
- *Implementing a restructuring scheme refers to the results of the assessment which are accurately adjusted to the debtor profile with a period of maximum of 1 (one) year and is only given to debtors who are truly affected by Covid-19.*
- *Identifying and monitoring on an ongoing basis as well as being prepared to continue forming the CKPN if debtors who have obtained the restructuring facility perform well initially, are expected to decrease due to Covid-19 impact, and cannot recover after the restructuring or Covid-19 damage ends.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. LPEI mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali LPEI. Perubahan tersebut dicerminkan dalam estimasi dan asumsi terkait pada saat terjadinya.

1. Metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap

Untuk kepentingan perhitungan penyusutan, nilai sisa untuk semua aset tetap, kecuali ada catatan lain untuk aset tertentu, harus lebih besar dari Rp1 (nilai penuh). LPEI melakukan peninjauan kembali atas nilai sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan yang ditetapkan untuk setiap aset tetap minimum pada setiap akhir tahun buku. Taksiran masa manfaat dari aset tetap diungkapkan dalam Catatan 2t.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis untuk gedung dan peralatan dan perabotan, masing-masing adalah 20 tahun dan 5 tahun.

Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana LPEI menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 13 untuk nilai buku atas aset tetap LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

b. Estimates and assumptions

Future main assumption and main source of other uncertainty estimates on the reporting date which might have significant risk of material adjustment to the recorded asset and liabilities for the coming period are disclosed below. LPEI based its assumptions and estimates on the provided parameter during the preparation of financial statements. The assumptions and situations regarding the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of LPEI. Such changes are reflected in the estimates and assumptions when they occur.

1. Depreciation method and useful lives of premises and equipment

For depreciation calculation purposes, the residual value for all fixed assets, unless there is another note for a particular asset, must be greater than \$1 (full value). LPEI reviews the residual value, useful life, and depreciation method set for each minimum fixed asset at the end of each financial year. The estimated useful life of fixed assets is disclosed in Note 2t.

Fixed asset are depreciated using the straight-line method based on the economic useful life. Management estimates that the useful life of building and premises and equipment, are 20 years and 5 years, respectively.

This is the expected average useful life in the industry where LPEI operates. Changes in the level of usage and technology development may affect the economic useful life and also the residual value of the assets and therefore, and future depreciation costs may be revised. Refer to Note 13 for book value of LPEI's premises and equipment as of December 31, 2022 and 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

**2. Cadangan kerugian penurunan nilai
atas pembiayaan dan piutang**

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 2o.

Komponen cadangan kerugian penurunan nilai debitor tertentu dalam total cadangan kerugian penurunan nilai berlaku pada tagihan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai tunai arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas ini, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari debitor dan nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diterima dengan lebih dari satu skenario. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kinerjanya dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali secara independen disetujui oleh Departemen Analisis Risiko dan Kredit Reviewer.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada portofolio tagihan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai tagihan dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

**b. Estimates and assumptions
(continued)**

**2. Allowance for impairment losses on
financing and receivables**

Financial assets accounted for at amortized cost are evaluated for impairment on a basis described in Note 2o.

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to claims evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral received in more than one scenario. Impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimate of cash flows considered recoverable are independently approved by the Risk Analysis and Credit Reviewer Department.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of claims with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired claims, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective loan loss allowances, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations, and economic factors.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)****b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)****3. Imbalan pascakerja dan imbalan kerja
jangka panjang lainnya**

Ketepatan dari cadangan ini tergantung pada seberapa tepat estimasi arus kas masa depan untuk menentukan cadangan individual serta asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja serta imbalan jangka panjang lainnya, tergantung pada pemilihan asumsi-asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaria untuk menghitung estimasi tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri pegawai tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan LPEI langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara, LPEI berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Lihat Catatan 29 untuk nilai tercatat atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada 31 Desember 2022 dan 2021.

4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

LPEI menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK 71 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK 71 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)****b. Estimates and assumptions (continued)****3. Post-employment benefit and other
long term employee benefits**

The accuracy of the allowances depends on how well the estimated future cash flows are determined for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The determination liabilities post employment benefit and also other long term employee benefits depend on the assumptions used by the actuary in calculating the estimation. Those assumptions include discount rate, annual salary increases rate, annual resignation rate, level of disability, retirement age, and mortality rate. Difference in the actual result and assumption of LPEI is recognized in the profit or loss by the time of occurrence. While, LPEI believes that the assumptions are fair and appropriate, there could be a significant difference between the actual result or change in estimation on the pension and employee benefit and net employee benefit expense. See Note 29 for carrying amount of estimated liability on employee benefit as of December 31, 2022 and 2021.

**4. Impairment of equity securities
classified as fair value through other
comprehensive income**

LPEI review their financial assets at fair value through other comprehensive income under PSAK 71 which required to recognise the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. PSAK 71 incorporates forward-looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)****b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)****4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang
diakui pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain
(lanjutan)**

Dalam melakukan peninjauan penurunan
nilai, penilaian manajemen berikut
diperlukan:

- i. Penentuan apakah aset mengalami
penurunan nilai berdasarkan indikator
tertentu seperti kesulitan keuangan
debitur dan penurunan kualitas kredit;
dan
- ii. Penentuan umur kredit ekspektasian
yang mencerminkan:
 - a. Jumlah yang tidak bisa dan
probabilitas tertimbang yang
ditentukan dengan mengevaluasi
kemungkinan dari berbagai hasil;
 - b. Nilai waktu dari uang; dan
 - c. Informasi yang masuk akal dan
dapat didukung yang tersedia
tanpa biaya atau usaha yang
tidak semestinya pada tanggal
pelaporan tentang peristiwa masa
lalu, kondisi saat ini, dan
perkiraan kondisi ekonomi masa
depan.

Nilai tercatat efek-efek ekuitas pada nilai
wajar melalui penghasilan komprehensif
lain serta cadangan kerugian penurunan
nilai diungkapkan dalam Catatan 7.

5. Penurunan nilai aset non-keuangan

Dalam mengidentifikasi terdapat atau
tidaknya penurunan nilai aset, LPEI
mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. terdapat bukti mengenai keusangan
atau kerusakan fisik aset;
2. perubahan signifikan yang bersifat
merugikan sehubungan dengan cara
penggunaan aset;
3. terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi
aset tidak memenuhi harapan atau
lebih buruk dari yang diharapkan;
4. arus kas sesungguhnya secara
material lebih kecil dari arus kas
taksiran, sebelum perhitungan
diskonto.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)****b. Estimates and assumptions (continued)****4. Impairment of equity securities
classified as fair value through other
comprehensive income (continued)**

*In carrying out the impairment review, the
following management's judgements are
required:*

- i. *Determination whether the assets is
impaired based on certain indicators
such as financial difficulties of the
debtor's and deterioration of the credit
quality of the debtor's; and*
- ii. *Determination of expected credit life
that reflect:*
 - a. *An unbiased and probability-
weighted amount that is
determined by evaluating a range
of possible outcomes;*
 - b. *The time value of money; and*
 - c. *Reasonable and supportable
information that is available
without undue cost or effort at the
reporting date about past events,
current conditions, and forecasts
of future economic conditions.*

*The carrying value of fair value through
other comprehensive income equity
securities and allowance for impairment
losses are disclosed in Note 7.*

5. Impairment of non-financial assets

*In assessing the possibility of impairment
of non-financial assets, LPEI considers
these factors:*

1. *evidence of obsolescence or physical
damage on assets;*
2. *significant changes which might
negatively affect the use of the
assets;*
3. *evidence that the assets economical
performance is worse than expected;*
4. *the cash flow which is materially less
than expected cash flow, before any
discount.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**
b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)
6. Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

LPEI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Mengacu kepada Catatan 15d tentang aset pajak tangguhan.

7. Estimasi Klaim Penjaminan

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI menelaah kewajibannya atas potensi klaim atas risiko-risiko yang ditanggung LPEI dalam perjanjian penjaminan untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. LPEI mencatat estimasi klaim penjaminan berdasarkan metode tertentu sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hasil aktual yang berbeda dari hasil perhitungan LPEI akan dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa hasil perhitungan tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual akan dapat memengaruhi secara material laba ruginya.

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**
b. Estimates and assumptions (continued)
6. Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

LPEI reviews their deferred tax assets at each statement of financial position date and reduce the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Refer to Note 15d for the deferred tax assets.

7. Estimated Guarantee Claim

At each reporting date, LPEI assess its for potential claim on risks covered by the LPEI under guarantee agreements to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. LPEI records estimated guarantee claim based on a certain method based on accounting standards in Indonesia. Actual results that differ from LPEI's calculation result will be charged to profit or loss for the year. While LPEI believes that its calculation results are reasonable and appropriate, significant differences in the actual results may materially affect its profit and loss.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

8. Liabilitas Asuransi

LPEI mencatat liabilitas asuransi berdasarkan metode perhitungan tertentu yang berlaku umum di Indonesia. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu LPEI. Hasil aktual yang berbeda dari hasil perhitungan LPEI akan dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa hasil perhitungan tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual akan dapat mempengaruhi secara material laba ruginya.

9. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak LPEI sebagai penyewa

LPEI menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika cukup wajar untuk dilakukan.

LPEI memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. LPEI menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta atau keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, LPEI menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan memengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

8. Insurance Liabilities

LPEI records insurance liabilities based on a certain calculation method which generally applied in Indonesia. The main assumption underlying this method is LPEI's past claim experience. Actual results that differ from LPEI's calculation result will be charged to profit or loss for the year. While LPEI believes that its calculation results are reasonable and appropriate, significant differences in the actual results may materially affect its profit and loss.

9. Determining the term of the contract with the option of contract extension and termination LPEI as lessee

The LPEI determines the lease term as the term that cannot be canceled together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be implemented, or any period covered by the option to terminate the lease if it is reasonable to do so.

LPEI has several rental contracts that include options for extension and termination of the lease term. LPEI applies an assessment in evaluating whether it can be ascertained if it will use the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts or circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, LPEI reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

4. Giro pada Bank Indonesia

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah	426	2,318
Total	426	2,318

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, LPEI memiliki saldo giro pada Bank Indonesia untuk keperluan transfer dana *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

4. Current Account with Bank Indonesia

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah	426	2,318
Total	426	2,318

As of December 31, 2022 and 2021, LPEI has current account with Bank Indonesia for *Real Time Gross Settlement (RTGS)* transfer of funds.

5. Giro pada Bank
a. Berdasarkan counterparties dan mata uang

	31 Desember/ December 31, 2022	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		31,921
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		8,629
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		2,230
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		724
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		2
		<u>43,506</u>
Pihak ketiga		
PT Bank Jabar Banten Syariah		512
PT Bank Central Asia, Tbk		100
PT Bank CIMB Niaga Tbk		9
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		1
		<u>44,128</u>
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,862,355	28,992
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	712,633	11,094
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	167,531	2,608
		<u>42,694</u>

5. Current Accounts with Banks
a. By counterparties and currencies

	31 Desember/ December 31, 2021	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		
Related parties (Note 39)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		20,765
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		21,120
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		521,798
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		--
		<u>563,683</u>
Third parties		
PT Bank Jabar Banten Syariah		508
PT Bank Central Asia, Tbk		--
PT Bank CIMB Niaga Tbk		10
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		1
		<u>564,202</u>
Foreign currencies		
United States Dollars		
Related parties (Note 39)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	106,341	1,516
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,083,970	43,954
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6,303	90
		<u>45,560</u>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)**a. Berdasarkan counterparties dan mata uang (lanjutan)**

	31 Desember/ December 31, 2022	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
Pihak ketiga		
Standard Chartered		
Bank, New York	4,818,307	75,009
JP Morgan Chase Bank	852,241	13,267
PT Bank KB Bukopin Tbk	118,330	1,842
Citibank, N.A., Jakarta	--	--
The Bank of Tokyo -		
Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta	9,375	146
PT Bank ICBC Indonesia	9,228	144
PT Bank Central Asia Tbk	5,866	91
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4,758	74
PT Bank CIMB Niaga Tbk	950	15
The HSBC Ltd, New York	771	12
		90,600
Euro Eropa		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk	640	11
Pihak ketiga		
Commerzbank Aktiengesellschaft	179,922	2,983
Citibank, N.A., Jakarta	386	6
		2,989
Yen Jepang		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk	120,500	14
Pihak ketiga		
Citibank, N.A., Jakarta	1,314,254	155
Sumitomo Mitsui Banking		
Corporation, Tokyo	--	--
		155
Dolar Singapura		
Pihak ketiga		
Overseas-Chinese		
Banking Corporation		
Bank (OCBC) Ltd., Singapura	4,850	56
		136,519
		180,647
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1)
Total		180,646

5. Current Accounts with Banks (continued)**a. By counterparties and currencies (continued)**

	31 Desember/ December 31, 2021	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
Pihak ketiga		
Standard Chartered		
Bank, New York	1,412,890	20,137
JP Morgan Chase bank	475,728	6,780
PT Bank KB Bukopin Tbk	118,295	1,686
Citibank, N.A., Jakarta	9,375	134
The Bank of Tokyo - Mitsubishi		
UFJ Ltd., Jakarta	9,228	131
PT Bank ICBC Indonesia	5,866	84
PT Bank Central Asia Tbk	4,762	68
PT Bank Pan Indonesia Tbk	--	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	944	13
The HSBC Ltd, New York	1,083,294	15,440
		44,473
Euro Eropa		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk	760	12
Pihak ketiga		
Commerzbank Aktiengesellschaft	13,665	220
Citibank, N.A., Jakarta	387	7
		227
Yen Jepang		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk	26,000	3
Pihak ketiga		
Citibank, N.A., Jakarta	1,314,254	163
Sumitomo Mitsui Banking		
Corporation, Tokyo	156,557,041	19,377
		19,540
Dolar Singapura		
Pihak ketiga		
Overseas-Chinese		
Banking Corporation		
Bank (OCBC) Ltd., Singapura	9,332	98
		109,913
		674,115
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9)
Total		674,106

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)**a. Berdasarkan counterparties dan mata uang (lanjutan)**

Termasuk dalam giro pada bank adalah giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pihak berelasi (Catatan 39) sehubungan dengan Penugasan Khusus. Pemanfaatan jumlah tersebut dibatasi untuk Program NIA, sebesar Rp31.061 dan Rp568.550 masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021.

b. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	674,115	--	--	674,115
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	--	--	--	--
Aset baru	162,937	--	--	162,937
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(662,271)	--	--	(662,271)
Penyesuaian mata uang asing	5,866	--	--	5,866
Saldo akhir	180,647	--	--	180,647

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Foreign exchange adjustment
Ending balance

	31 Desember / December 31, 2021			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	5,521,119	--	--	5,521,119
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(4,854,499)	--	--	(4,854,499)
Aset baru	8,489	--	--	8,489
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(347)	--	--	(347)
Penyesuaian mata uang asing	(647)	--	--	(647)
Saldo akhir	674,115	--	--	674,115

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Foreign exchange adjustment
Ending balance

5. Current Accounts with Banks (continued)**a. By counterparties and currencies (continued)**

Included in current accounts with banks is current account in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, a related party (Note 39) in relation with National Interest Account. The utilization of such amount is restricted for NIA Program, amounting to Rp31,061 and Rp568,550 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

b. By collectibility and allowance for impairment losses

The movements in the gross carrying amount are as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)**b. Berdasarkan kolektibilitas dan
cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai
dibentuk terhadap saldo giro pada bank
lain, sebagai berikut:

31 Desember / December 31, 2022			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	9	--	9
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	--	--	--
Aset baru	1	--	1
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(10)	--	(10)
Total pembalikan tahun berjalan	(9)	--	(9)
Penyesuaian mata uang asing	1	--	1
Saldo akhir	1	--	1

31 Desember / December 31, 2021			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	276	--	276
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(276)	--	(276)
Aset baru	9	--	9
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--
Total pembalikan tahun berjalan	(267)	--	(267)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--
Saldo akhir	9	--	9

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total reverse current year

Foreign exchange adjustment
Ending balance

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total reverse current year

Foreign exchange adjustment
Ending balance

LPEI melakukan penilaian giro pada bank secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

5. Current Accounts with Banks (continued)**b. By collectibility and allowance for
impairment losses (continued)**

Allowance for impairment losses is
provided for balance of current account
with other bank, as follows:

LPEI assesses current accounts with banks collectively by considering qualitative and quantitative information and analysis, based on historical experience and credit assessments including future information.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets are disclosed in Note 32.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)

**c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun
untuk giro pada bank**

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah	0.00% - 2.00%	0.00% - 2.00%

Giro pada bank dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Euro Eropa, Yen Jepang, dan Dolar Singapura tidak memperoleh bunga.

**d. Giro pada bank yang digunakan
sebagai jaminan**

Tidak terdapat giro pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada 31 Desember 2022 dan 2021.

5. Current Accounts with Banks (continued)

**c. The range of annual interest rates for
current accounts with banks**

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah	0.00% - 2.00%	0.00% - 2.00%

The current accounts with banks denominated in United States Dollars, European Euro, Japanese Yen, and Singapore Dollars do not bear interest.

**d. Current accounts with banks pledged
as collateral**

There were no current accounts with banks pledged as collateral as of December 31, 2022 and 2021.

6. Penempatan pada Bank

**a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan
counterparties**

	31 Desember/ December 31, 2022	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		
Deposito berjangka		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		3,556,100
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		1,324,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		40,727
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		--
		4,920,827
Pihak ketiga		
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk		3,750,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk		194,000
PT Bank DKI		950,000
PT Bank Mega Tbk		800,000
PT BPD Jambi		--
		5,694,000
		10,614,827

6. Placements with Banks

a. By currencies, type, and counterparties

	31 Desember/ December 31, 2021	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		
Time deposit		
Related parties (Note 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		4,136,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		4,201,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		40,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		1,295,000
		9,672,000
Third parties		
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk		2,210,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk		625,000
PT Bank DKI		--
PT Bank Mega Tbk		--
PT BPD Jambi		400,000
		3,235,000
		12,907,000

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)**a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan
counterparties (lanjutan)**

	31 Desember/ December 31, 2022	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Dolar Amerika Serikat		
Deposito berjangka		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,000,000	31,135
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--
PT Bank Raya Indonesia Tbk	--	--
		<u>31,135</u>
Pihak ketiga		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	36,000,000	560,430
PT Bank UOB Buana Tbk	30,000,000	467,025
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	--	--
PT Bank Mega Tbk	--	--
PT Bank CTBC Indonesia	--	--
		<u>1,027,455</u>
Call Money		
Pihak ketiga		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	57,000,000	887,347
		<u>887,347</u>
		1,945,937
		(509)
Cadangan kerugian penurunan nilai		
Total		<u><u>12,560,255</u></u>

Termasuk dalam penempatan pada bank merupakan penempatan sehubungan dengan Penugasan Khusus. Berikut adalah rincian pada 31 Desember 2022 dan 2021:

6. Placements with Banks (continued)**a. By currencies, type, and counterparties
(continued)**

	31 Desember/ December 31, 2021	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
United States Dollars		
Time deposit		
Related parties (Note 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	70,000,000	997,675
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5,000,000	71,263
		<u>1,068,938</u>
Third parties		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--
PT Bank UOB Buana Tbk	--	--
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	95,000,000	1,353,988
PT Bank Mega Tbk	53,000,000	755,382
PT Bank CTBC Indonesia	20,000,000	285,050
		<u>2,394,420</u>
Call Money		
Third parties		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	19,000,000	270,797
		<u>270,797</u>
		3,734,155
		(2,209)
Allowance for impairment losses		
Total		<u><u>16,638,946</u></u>

Included in placements with banks is placement in relation with National Interest Account. The details as of December 31, 2022 and 2021, are as follows:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Program NIA		
Deposito berjangka		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,556,100	4,136,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,324,000	4,201,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	1,295,000
	<u>4,880,100</u>	<u>9,632,000</u>
Pihak ketiga		
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	3,750,000	2,210,000
PT Bank DKI	950,000	--
PT Bank Mega Tbk	800,000	--
	<u>5,500,000</u>	<u>2,210,000</u>
	10,380,100	11,842,000
Cadangan kerugian penurunan nilai	(500)	(1,263)
Total	<u><u>10,379,600</u></u>	<u><u>11,840,737</u></u>

Allowance for
impairment losses

Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)

b. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo

Klasifikasi jangka waktu penempatan pada bank berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah		
Sampai dengan 1 bulan	10,614,827	4,201,000
Sampai dengan 3 bulan	--	8,706,000
Dolar Amerika Serikat		
Sampai dengan 1 bulan	1,945,937	3,306,581
Sampai dengan 3 bulan	--	427,574
	12,560,764	16,641,155
Cadangan kerugian penurunan nilai	(509)	(2,209)
Total	12,560,255	16,638,946

c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk penempatan pada bank

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah		
Deposito berjangka	3.50% - 6.50%	2.30% - 3.50%
Dolar Amerika Serikat		
Deposito berjangka	3.00 - 3.60%	0.20% - 1.00%
Call Money	4.32%	0.05%

d. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	16,641,155	--	--	16,641,155
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--
Aset baru	12,520,038	--	--	12,520,038
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(16,601,155)	--	--	(16,601,155)
Penyesuaian mata uang asing	726	--	--	726
Saldo akhir	12,560,764	--	--	12,560,764

6. Placements with Banks (continued)

b. By remaining period to maturity

The details of placements with banks classified as to remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah		
Up to 1 month	10,614,827	4,201,000
Up to 3 month	--	8,706,000
United States Dollars		
Up to 1 month	1,945,937	3,306,581
Up to 3 month	--	427,574
	12,560,764	16,641,155
Allowance for impairment losses	(509)	(2,209)
Total	12,560,255	16,638,946

c. The range of annual interest rates for placement with banks

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah		
Time deposit	3.50% - 6.50%	2.30% - 3.50%
United States Dollar		
Time deposit	3.00 - 3.60%	0.20% - 1.00%
Call Money	4.32%	0.05%

d. By collectibility and allowance for impairment losses

The movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Beginning balance	16,641,155	--	--	16,641,155
Transfer to stage 1 -	--	--	--	--
Transfer to stage 2 -	--	--	--	--
Transfer to stage 3 -	--	--	--	--
Transfer within stages	--	--	--	--
Net remeasurement of carrying value	--	--	--	--
New assets originated	12,520,038	--	--	12,520,038
Asset derecognized or repaid	(16,601,155)	--	--	(16,601,155)
Foreign exchange adjustment	726	--	--	726
Ending balance	12,560,764	--	--	12,560,764

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)**d. Berdasarkan kolektibilitas dan
cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

	31 Desember/December 31, 2021			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	7,998,721	--	--	7,998,721
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	3,252,900	--	--	3,252,900
Aset baru	6,094,155	--	--	6,094,155
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(704,621)	--	--	(704,621)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
Saldo akhir	16,641,155	--	--	16,641,155

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Foreign exchange adjustment
Ending balance

Cadangan kerugian penurunan nilai
dibentuk terhadap saldo penempatan pada
bank, sebagai berikut:

6. Placements with Banks (continued)**d. By collectibility and allowance for
impairment losses (continued)**

	31 Desember/December 31, 2021			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	7,998,721	--	--	7,998,721
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	3,252,900	--	--	3,252,900
Aset baru	6,094,155	--	--	6,094,155
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(704,621)	--	--	(704,621)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
Saldo akhir	16,641,155	--	--	16,641,155

Allowance for impairment losses is
provided for balance of placement with
banks, as follows:

	31 Desember/December 31, 2022			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	2,209	--	--	2,209
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--
Aset baru	509	--	--	509
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(2,296)	--	--	(2,296)
Total pembalikan tahun berjalan	(1,787)	--	--	(1,787)
Penyesuaian mata uang asing	87	--	--	87
Saldo akhir	509	--	--	509

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total reverse current year

Foreign exchange adjustment
Ending balance

	31 Desember/December 31, 2021			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	18,053	--	--	18,053
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	8	--	--	8
Aset baru	2,209	--	--	2,209
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(18,053)	--	--	(18,053)
Total pembalikan tahun berjalan	(15,836)	--	--	(15,836)
Penyesuaian mata uang asing	(8)	--	--	(8)
Saldo akhir	2,209	--	--	2,209

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total reverse current year

Foreign exchange adjustment
Ending balance

LPEI melakukan penilaian terhadap
penempatan pada bank secara kolektif
dengan menggunakan informasi dan
analisis kualitatif dan kuantitatif
berdasarkan pengalaman historis dan
penilaian kredit termasuk informasi masa
depan.

LPEI evaluates bank placements
collectively using qualitative and
quantitative information and analysis
based on historical experience and credit
assessment including future information.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)

d. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

e. Penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada 31 Desember 2022 dan 2021.

6. Placements with Banks (continued)

d. By collectibility and allowance for impairment losses (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 32.

e. Placements with banks pledged as collateral

There are no placements with banks pledged as collateral as of December 31, 2022 and 2021.

7. Efek-Efek

a. Berdasarkan mata uang, tujuan, dan jenis

Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Pihak berelasi (Catatan 39)

Rupiah

Green Bond

FR0081

FR0059

FR0070

FR0077

FR0056

FR0084

FR0086

FR0078

FR0080

FR0082

FR0083

FR0064

FR0063

31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
720,000	728,784	--	--
252,130	251,961	29,458	31,268
212,309	214,668	--	--
98,367	97,945	--	--
71,147	71,592	19,434	21,091
53,429	53,327	--	--
51,453	51,256	--	--
39,153	39,164	--	--
36,807	37,713	37,025	38,962
34,664	35,802	34,662	36,407
29,240	30,061	29,190	30,938
19,920	20,593	19,919	20,910
19,181	19,547	19,061	20,331
9,929	10,002	9,743	10,255
1,647,729	1,662,415	198,492	210,162

Fair value through other comprehensive income Related parties (Note 39)

Rupiah

Green Bond

FR0081

FR0059

FR0070

FR0077

FR0056

FR0084

FR0086

FR0078

FR0080

FR0082

FR0083

FR0064

FR0063

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek (lanjutan)**a. Berdasarkan mata uang, tujuan, dan jenis (lanjutan)**

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021	
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Dolar Amerika Serikat				
Indon 29 New	62,693	57,209	57,449	61,573
Indon 23 New	46,701	46,469	42,728	43,666
Indon 25	46,791	46,061	42,877	46,018
Indon 27 New	46,600	45,068	42,645	46,873
Indon 28 New	38,834	38,107	35,541	39,699
Indon 49 New	38,699	29,917	35,426	37,543
Indon 28	30,852	29,500	28,200	30,750
Indois 24 New	15,568	15,374	14,253	15,251
Indon 22 New	--	--	28,513	28,515
	326,738	307,705	327,632	349,888
Total	1,974,467	1,970,120	526,124	560,050

United States Dollar
Indon 29 New
Indon 23 New
Indon 25
Indon 27 New
Indon 28 New
Indon 49 New
Indon 28
Indois 24 New
Indon 22 New

Total

Efek-efek berdasarkan mata uang adalah
sebagai berikut:

Securities based on currencies are as
follows:

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Pihak berelasi (Catatan 39)				
Rupiah				
Obligasi Pemerintah	--	933,631	--	210,162
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	728,784	--	--
	--	1,662,415	--	210,162
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi Pemerintah	19,765,861	307,705	24,549,202	349,888
Total	19,765,861	1,970,120	24,549,202	560,050

Fair value through other comprehensive income Related party (Note 39)
Rupiah
Government Bonds
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

United States Dollar
Government Bonds
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, tujuan, dan jenis (lanjutan)

Mutasi keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek dicatat sebagai bagian komponen ekuitas, sehingga LPEI mengakui keuntungan/(kerugian) periode berjalan atas perubahan nilai wajar efek-efek, sedangkan penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan/(kerugian) sudah termasuk dalam laba rugi.

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Saldo Awal	26,462	39,456
Perubahan nilai wajar	(38,275)	(16,657)
Perubahan nilai wajar yang di reklasifikasi ke laba rugi	2	--
Dampak pajak tangguhan	8,420	3,663
Saldo Akhir	(3,391)	26,462

Harga pasar efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya berkisar antara 76,87%-107,75% dan 100,03%-111,42% dari nilai nominal masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

7. Securities (continued)

a. By currency, purpose, and type (continued)

Movements of unrealized gains/(losses) resulting from the increase/(decrease) in fair value of marketable securities is recorded as part of the equity component, and LPEI recognized current period gain/(losses) from changes in fair value of marketable securities, whereas reclassification adjustment on gains/(losses) are included in profit or loss.

Beginning balance
Changes in fair value
Changes in fair value
reclassified to profit or loss
Deferred tax impact

The market values of the fair value through other comprehensive income securities as of December 31, 2022 and 2021 ranged from 76.87%-107.75% and 100.03%-111.42% respectively, of the nominal amount.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek (lanjutan)**a. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo, dan suku bunga**

Penerbit	Jenis/ Types	31 Desember/ December 31, 2022		Issuer
		Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku bunga kontrak per tahun/ Contractual interest rate per annum	
Pemerintah Negara Republik Indonesia				The Government of the Republic of Indonesia
FR0056	Obligasi/Bond	15 September/ September 15, 2026	8.375% tetap/fixed	FR0056
FR0059	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2027	7.00% tetap/fixed	FR0059
FR0063	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2023	5.625% tetap/fixed	FR0063
FR0064	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2028	6.125% tetap/fixed	FR0064
FR0070	Obligasi/Bond	15 Maret/ March 15, 2024	8.375% tetap/fixed	FR0070
FR0077	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2024	8.125% tetap/fixed	FR0077
FR0078	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2029	8.25% tetap/fixed	FR0078
FR0080	Obligasi/Bond	15 Juni/ June 15, 2035	7.50% tetap/fixed	FR0080
FR0081	Obligasi/Bond	15 Juni/ June 15, 2025	6.50% tetap/fixed	FR0081
FR0082	Obligasi/Bond	15 September/ September 15, 2030	7.00% tetap/fixed	FR0082
FR0083	Obligasi/Bond	15 April/ April 15, 2040	7.50% tetap/fixed	FR0083
FR0084	Obligasi/Bond	15 Februari/ February 15, 2026	7.25% tetap/fixed	FR0084
FR0086	Obligasi/Bond	15 April/ April 15, 2026	5.50% tetap/fixed	FR0086
Indois 24 New	Obligasi/Bond	20 Agustus/ August 20, 2024	3.90% tetap/fixed	Indois 24 New
Indon 23 New	Obligasi/Bond	11 Januari/ January 11, 2023	2.95% tetap/fixed	Indon 23 New
Indon 25	Obligasi/Bond	15 Januari/ January 15, 2025	4.125% tetap/fixed	Indon 25
Indon 28	Obligasi/Bond	11 Januari/ January 11, 2028	3.50% tetap/fixed	Indon 28
Indon 27 New	Obligasi/Bond	18 Juli/ July 18, 2027	3.85% tetap/fixed	Indon 27 New
Indon 28 New	Obligasi/Bond	24 April/ April 24, 2028	4.10% tetap/fixed	Indon 28 New
Indon 29 New	Obligasi/Bond	18 September/ September 18, 2029	3.40% tetap/fixed	Indon 29 New
Indon 49 New	Obligasi/Bond	30 Oktober/ October 30, 2049	3.70% tetap/fixed	Indon 49 New
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Green Bond	Obligasi/Bond	21 Juni/ June 21, 2025	6.35% tetap/fixed	Green Bond

7. Securities (continued)**a. Based on issuer, maturity, and interest rate**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek (lanjutan)

**b. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo, dan
suku bunga (lanjutan)**

7. Securities (continued)

**b. Based on issuer, maturity, and interest
rate (continued)**

31 Desember/ December 31, 2021				
Penerbit	Jenis/ Types	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku bunga kontrak per tahun/ Contractual interest rate per annum	Issuer
Pemerintah Negara Republik Indonesia				The Government of the Republic of Indonesia
FR0063	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2023	5.625% tetap/fixed	FR0063
FR0064	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2028	6.125% tetap/fixed	FR0064
FR0077	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2024	8.125% tetap/fixed	FR0077
FR0078	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2029	8.25% tetap/fixed	FR0078
FR0080	Obligasi/Bond	15 Juni/ June 15, 2035	7.50% tetap/fixed	FR0080
FR0081	Obligasi/Bond	15 Juni/ June 15, 2025	6.50% tetap/fixed	FR0081
FR0082	Obligasi/Bond	15 September/ September 15, 2030	7.00% tetap/fixed	FR0082
FR0083	Obligasi/Bond	15 April/ April 15, 2040	7.50% tetap/fixed	FR0083
Indois 24 New	Obligasi/Bond	20 Agustus/ August 20, 2024	3.90% tetap/fixed	Indois 24 New
Indon 23 New	Obligasi/Bond	11 Januari/ January 11, 2023	2.95% tetap/fixed	Indon 23 New
Indon 22 New	Obligasi/Bond	08 Januari/ January 08, 2022	3.70% tetap/fixed	Indon 23 New
Indon 25	Obligasi/Bond	15 Januari/ January 15, 2025	4.125% tetap/fixed	Indon 25
Indon 28	Obligasi/Bond	11 Januari/ January 11, 2028	3.50% tetap/fixed	Indon 28
Indon 27 New	Obligasi/Bond	18 Juli/ July 18, 2027	3.85% tetap/fixed	Indon 27 New
Indon 28 New	Obligasi/Bond	24 April/ April 24, 2028	4.10% tetap/fixed	Indon 28 New
Indon 29 New	Obligasi/Bond	18 September/ September 18, 2029	3.40% tetap/fixed	Indon 29 New
Indon 49 New	Obligasi/Bond	30 Oct/ October 30, 2049	3.70% tetap/fixed	Indon 49 New

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek (lanjutan)**c. Berdasarkan peringkat**

Efek-efek yang dimiliki oleh LPEI memiliki peringkat "BBB" berdasarkan penilaian S&P pada 31 Desember 2022 dan 2021.

d. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Sampai dengan 5 tahun	1,701,171	196,063	Up to 5 years
Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	182,637	269,127	More than 5 to 10 years
Lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun	86,312	94,860	More than 10 to 15 years
Total	1,970,120	560,050	Total

e. Berdasarkan efek Pemerintah dan bukan Pemerintah

Efek-efek yang dimiliki oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Efek pemerintah	1,241,336	560,050	Government securities
Bukan efek pemerintah	728,784	--	Non government securities
Total	1,970,120	560,050	Total

f. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai

Seluruh efek-efek pada 31 Desember 2022 dan 2021 tidak mengalami penurunan nilai dan tergolong lancar.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah nihil.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

7. Securities (continued)**c. By rating**

Securities held by LPEI were rated "BBB" by S&P as of December 31, 2022 and 2021.

d. By remaining period to maturity

The details of securities classified as to remaining period to maturity are as follows:

e. By Government and non-Government securities

Securities held by LPEI as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

f. By collectibility and allowance for impairment losses

All securities as of December 31, 2022 and 2021 are not impaired and are classified as current.

Allowance for impairment losses on marketable securities as of December 31, 2022 and 2021 are nil, respectively.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 32.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek (lanjutan)
g. Efek-efek yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat efek-efek yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

7. Securities (continued)
g. Securities pledged as collateral

There are no securities pledged as collateral as of December 31, 2022 and 2021.

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

LPEI menghadapi risiko pasar atas perubahan nilai tukar mata uang dan menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola risiko tersebut. LPEI melakukan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka mata uang asing (*forward* dan *swap*) dengan beberapa *counterparties* yang memungkinkan LPEI atau pihak lain untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perjanjian *swap* mata uang merupakan kontrak antara dua pihak untuk pertukaran arus kas berdasarkan nilai nosional dan nilai tukar yang ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan, kontrak berjangka *forward* mata uang asing merupakan perjanjian untuk menjual sejumlah mata uang tertentu kepada pihak lain atau untuk membeli sejumlah mata uang tertentu dari pihak lain pada suatu tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Transaksi derivatif tersebut menimbulkan risiko pasar dan risiko kredit. Risiko pasar dari transaksi derivatif timbul sebagai akibat dari adanya fluktuasi nilai instrumen derivatif yang disebabkan adanya fluktuasi kurs mata uang asing, sedangkan risiko kredit timbul dalam hal pihak lain tidak dapat memenuhi liabilitasnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kepada LPEI.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat instrumen derivatif LPEI yang memenuhi syarat sebagai transaksi lindung nilai untuk keperluan akuntansi. Oleh sebab itu, seluruh keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar dari transaksi derivatif ini diakui dalam laba rugi.

8. Derivative Receivables and Payables

LPEI faces market risk with respect to changes in foreign currency exchange rates and thus, LPEI uses derivative instruments to manage this risk. LPEI enters into derivative transactions in the form of foreign currency forward contracts (forward and swap) with certain counterparties that allow LPEI to reduce the risk of fluctuations in foreign currency exchange rates.

Currency swap contract is a contract between two parties to exchange series of cash flows based on a predetermined notional value and exchange value. While, foreign currency forward contract is a covenant to sell a certain amount of currencies to other parties or to buy a certain amount of currencies from other parties in the future at a predetermined price.

Such derivative transactions result in market risk and credit risk. Market risk from derivative transactions arises as a result of fluctuation in the value of derivative instruments due to foreign currency fluctuation, while credit risk arises when the other parties fail to fulfill their obligations stated in the contracts with LPEI.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no derivatives which qualify as hedging instruments for accounting purposes. Therefore, all gains or losses resulting from fair value changes from these derivative transactions are recognized in profit or loss.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)**a. Tagihan derivatif**

Pada tanggal 31 Desember 2022, LPEI tidak memiliki tagihan derivatif.

Rincian tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021	Nilai nosional mata uang asing/ <i>Notional amount in foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	Tanggal Jatuh Tempo/ <i>Maturity date</i>	Nilai wajar tagihan derivatif/ <i>Fair value of derivative receivables</i>	December 31, 2021
Mata uang asing					<i>Foreign currencies</i>
Dolar Amerika Serikat					<i>United States Dollars</i>
Swap Beli					<i>Swap Bought</i>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank Pan		29 Desember/ <i>December 29, 2021</i>	3 Januari/ <i>January 3, 2022</i>	6	<i>PT Bank Pan</i>
Indonesia Tbk	2,110,000			6	<i>Indonesia Tbk</i>
Total tagihan derivatif				6	Total derivative receivables

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

8. Derivative Receivables and Payables (continued)**a. Derivative receivables**

As of December 31, 2022, there is no derivatives receivables.

The derivative receivable details as of December 31, 2021, are as follows:

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets are disclosed in Note 32.

b. Liabilitas derivatif

Rincian liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022	Nilai nosional mata uang asing/ <i>Notional amount in foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	Tanggal Jatuh Tempo/ <i>Maturity date</i>	Nilai wajar liabilitas derivatif/ <i>Fair value of derivative payables</i>	December 31, 2022
Mata uang asing					<i>Foreign currencies</i>
Dolar Amerika Serikat					<i>United States Dollars</i>
Swap Beli					<i>Swap Bought</i>
Pihak ketiga					<i>Third party</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3,000,000	28 Desember/ <i>December 28, 2022</i>	30 Januari/ <i>January 30, 2023</i>	56	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
Total liabilitas derivatif				56	Total derivatives liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2021, LPEI tidak memiliki liabilitas derivatif.

b. Derivative payables

The derivative payables details as of December 31, 2022 are as follows:

As of December 31, 2021, there is no derivatives payables.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya**

**a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan
kolektibilitas**

Informasi mengenai Pembiayaan dan
Piutang, Pembiayaan dan Piutang
Syariah, dan Piutang Lainnya berdasarkan
jenis dan mata uang adalah sebagai
berikut:

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables**

a. By type, currency, and collectability

Information related Financing and
Receivables, Sharia Financing and
Receivables, and Other Receivables
based on type and currency are as
follows:

31 Desember 2022	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	December 31, 2022
Rupiah							Rupiah
Modal kerja	9,180,562	6,533,593	1,694,445	518,775	6,852,919	24,780,294	Working capital
Investasi	14,803,227	4,170,982	1,374,570	--	3,532,873	23,881,652	Investment
Konsumsi	137,544	--	--	--	--	137,544	Consumption
	<u>24,121,333</u>	<u>10,704,575</u>	<u>3,069,015</u>	<u>518,775</u>	<u>10,385,792</u>	<u>48,799,490</u>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Modal kerja	8,445,060	5,568,390	770,600	1,354,804	3,039,649	19,178,503	Working capital
Investasi	9,103,616	3,433,977	1,110,227	73,078	1,937,112	15,658,010	Investment
	<u>17,548,676</u>	<u>9,002,367</u>	<u>1,880,827</u>	<u>1,427,882</u>	<u>4,976,761</u>	<u>34,836,513</u>	
Total	<u>41,670,009</u>	<u>19,706,942</u>	<u>4,949,842</u>	<u>1,946,657</u>	<u>15,362,553</u>	<u>83,636,003</u>	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(524,562)	(3,786,963)	(1,629,374)	(785,287)	(11,156,763)	(17,882,949)	Allowance for impairment losses
Neto	<u>41,145,447</u>	<u>15,919,979</u>	<u>3,320,468</u>	<u>1,161,370</u>	<u>4,205,790</u>	<u>65,753,054</u>	Net

31 Desember 2021	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	December 31, 2021
Rupiah							Rupiah
Modal kerja	8,562,296	7,616,170	1,445,250	301,675	6,394,106	24,319,497	Working capital
Investasi	16,313,595	6,096,410	189,687	158,704	2,204,558	24,962,954	Investment
Konsumsi	127,979	--	--	--	--	127,979	Consumption
	<u>25,003,870</u>	<u>13,712,580</u>	<u>1,634,937</u>	<u>460,379</u>	<u>8,598,664</u>	<u>49,410,430</u>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Modal kerja	8,818,864	6,820,782	122,153	193,543	4,780,134	20,735,476	Working capital
Investasi	7,954,128	3,991,649	79,743	--	1,791,736	13,817,256	Investment
	<u>16,772,992</u>	<u>10,812,431</u>	<u>201,896</u>	<u>193,543</u>	<u>6,571,870</u>	<u>34,552,732</u>	
Total	<u>41,776,862</u>	<u>24,525,011</u>	<u>1,836,833</u>	<u>653,922</u>	<u>15,170,534</u>	<u>83,963,162</u>	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(898,505)	(5,367,732)	(363,087)	(196,980)	(11,121,879)	(17,948,183)	Allowance for impairment losses
Neto	<u>40,878,357</u>	<u>19,157,279</u>	<u>1,473,746</u>	<u>456,942</u>	<u>4,048,655</u>	<u>66,014,979</u>	Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan
kolektibilitas (lanjutan)**

Informasi mengenai Pembiayaan dan
Piutang, Pembiayaan dan Piutang
Syariah, dan Piutang Lainnya berdasarkan
kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Cadangan/ Allowance	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Cadangan/ Allowance
Individual	46,027,319	15,828,240	38,513,094	15,300,363
Kolektif:				
Lancar	31,979,785	378,707	39,728,750	471,460
Dalam perhatian khusus	2,211,775	9,316	2,260,907	155,506
Kurang lancar	617,580	97,393	1,328,249	239,268
Diragukan	274,150	41,251	11,397	4,990
Macet	2,525,394	1,528,042	2,120,765	1,776,596
Total	83,636,003	17,882,949	83,963,162	17,948,183

Termasuk dalam pembiayaan dan piutang masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 2021 piutang kepada bank dengan kategori lancar masing-masing sebesar nihil dan Rp4.302. Pembiayaan tersebut diklasifikasikan lancar dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif masing-masing nihil.

**b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata
uang, dan kolektibilitas**

Perincian pembiayaan dan piutang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah	--	48,799,490	--	49,410,430
Dolar Amerika Serikat	2,237,771,810	34,836,513	2,424,327,835	34,552,732
Total		83,636,003		83,963,162
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(17,882,949)		(17,948,183)
Neto		65,753,054		66,014,979

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****a. By type, currency, and collectability
(continued)**

Information related Financing and
Receivables, Sharia Financing and
Receivables, and Other Receivables based
on collectability are as follows:

Financing and receivables as of December 31, 2022 and 2021 include financing and receivables to banks amounting to nil and Rp4,302, respectively. These are classified as current and subjected to collective impairment resulting to impairment loss of nil, respectively.

**b. By economic sector, currency, and
collectibility**

Financing and receivables based on
currencies are as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**
**b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata
uang, dan kolektibilitas (lanjutan)**

Perincian pembiayaan dan piutang
berdasarkan sektor ekonomi adalah
sebagai berikut:

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**
**b. By economic sector, currency, and
collectability (continued)**

Financing and receivables based on sector
are as follows:

31 Desember 2022	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	December 31, 2022
Rupiah							Rupiah
Perindustrian	6,441,120	7,718,277	2,353,090	274,149	4,449,440	21,236,076	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	5,470,001	1,374,305	548,777	--	3,126,938	10,520,021	Agriculture, hunting and agriculture services
Konstruksi	2,013,991	17,441	--	--	68,175	2,099,607	Construction
Listrik, gas dan air	873,294	434,818	--	--	--	1,308,112	Electricity, gas and water
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	3,244,521	563,476	126,004	--	162,700	4,096,701	Transportation, warehousing and communication
Perdagangan, restoran dan hotel	475,081	--	41,144	244,626	1,093,669	1,854,520	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	2,096,272	--	--	--	444,168	2,540,440	Business services
Pertambangan	3,236,822	469,861	--	--	1,030,902	4,737,585	Mining
Jasa-jasa sosial/masyarakat	130,919	--	--	--	9,800	140,719	Social, services/society
Lain-lain	139,312	126,397	--	--	--	265,709	Others
	<u>24,121,333</u>	<u>10,704,575</u>	<u>3,069,015</u>	<u>518,775</u>	<u>10,385,792</u>	<u>48,799,490</u>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Perindustrian	8,131,027	4,694,461	1,854,393	988,467	2,339,112	18,007,460	Manufacturing
Pertambangan	4,329,602	2,594,238	--	--	495,512	7,419,352	Mining
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	1,550,353	1,177,144	26,434	--	653,363	3,407,294	Agriculture, hunting and agriculture services
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	459,759	409,111	--	--	314,197	1,183,067	Transportation, warehousing and communication
Konstruksi	834,078	41,681	--	--	342,750	1,218,509	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	734,585	85,732	--	439,415	145,024	1,404,756	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	312,893	--	--	--	679,019	991,912	Business services
Listrik, gas dan air	947,401	--	--	--	--	947,401	Electricity, gas and water
Jasa-jasa sosial/masyarakat	248,978	--	--	--	7,784	256,762	Social, services/society
	<u>17,548,676</u>	<u>9,002,367</u>	<u>1,880,827</u>	<u>1,427,882</u>	<u>4,976,761</u>	<u>34,836,513</u>	
Total	41,670,009	19,706,942	4,949,842	1,946,657	15,362,553	83,636,003	Total
Cadangan Kerugian							Allowance for
Penurunan Nilai	(524,562)	(3,786,963)	(1,629,374)	(785,287)	(11,156,763)	(17,882,949)	Impairment Losses
Neto	<u>41,145,447</u>	<u>15,919,979</u>	<u>3,320,468</u>	<u>1,161,370</u>	<u>4,205,790</u>	<u>65,753,054</u>	Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata
uang, dan kolektibilitas (lanjutan)****9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****b. By economic sector, currency, and
collectability (continued)**

31 Desember 2021	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	December 31, 2021
Rupiah							Rupiah
Perindustrian	4,529,787	9,530,104	1,316,382	22,424	3,955,017	19,353,714	Manufacturing
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	7,521,663	2,502,982	--	437,955	1,453,719	11,916,319	Agriculture, hunting, and agriculture services
Pengangkutan, pergudangan, dan telekomunikasi	3,557,187	706,256	--	--	182,136	4,445,579	Transportation, warehousing, and communication
Listrik, gas, dan air	3,318,241	439,418	--	--	--	3,757,659	Electricity, gas, and water
Jasa dunia usaha	2,551,524	--	--	--	445,900	2,997,424	Business services
Konstruksi	2,335,617	18,296	--	--	72,589	2,426,502	Construction
Perdagangan, restoran, dan hotel	535,526	39,359	--	--	1,746,077	2,320,962	Trading, restaurants, and hotels
Pertambangan	197,904	452,926	318,555	--	733,426	1,702,811	Mining
Jasa-jasa sosial/masyarakat	330,024	23,239	--	--	9,800	363,063	Social services/society
Lain-lain	126,397	--	--	--	--	126,397	Others
	<u>25,003,870</u>	<u>13,712,580</u>	<u>1,634,937</u>	<u>460,379</u>	<u>8,598,664</u>	<u>49,410,430</u>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Perindustrian	8,156,181	7,337,084	113,938	--	4,057,932	19,665,135	Manufacturing
Pertambangan	1,961,279	2,416,697	87,958	--	370,704	4,836,638	Mining
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	2,451,923	812,951	--	193,543	407,122	3,865,539	Agriculture, hunting, and agriculture services
Konstruksi	1,224,547	38,275	--	--	318,562	1,581,384	Construction
Jasa dunia usaha	846,584	--	--	--	626,365	1,472,949	Business services
Perdagangan, restoran, dan hotel	694,237	50,109	--	--	496,402	1,240,748	Trading, restaurants, and hotels
Pengangkutan, pergudangan, dan telekomunikasi	501,268	157,315	--	--	287,657	946,240	Transportation, warehousing, and communication
Listrik, gas, dan air	492,264	--	--	--	--	492,264	Electricity, gas, and water
Jasa-jasa sosial/masyarakat	444,709	--	--	--	7,126	451,835	Social services/society
Lain-lain	--	--	--	--	--	--	Others
	<u>16,772,992</u>	<u>10,812,431</u>	<u>201,896</u>	<u>193,543</u>	<u>6,571,870</u>	<u>34,552,732</u>	
Total	41,776,862	24,525,011	1,836,833	653,922	15,170,534	83,963,162	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(898,505)	(5,367,732)	(363,087)	(196,980)	(11,121,879)	(17,948,183)	Allowance for Impairment Losses
Neto	<u>40,878,357</u>	<u>19,157,279</u>	<u>1,473,746</u>	<u>456,942</u>	<u>4,048,655</u>	<u>66,014,979</u>	Net

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, lain-lain termasuk pembiayaan kepada karyawan.

As of December 31, 2022 and 2021, others include employee financing.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

**c. Berdasarkan pihak-pihak, jenis, dan
mata uang**

c. By parties, type, and currency

	31 Desember / December 31 ,		
	2022	2021	
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Modal kerja	7,073,007	5,854,866	Working capital
Investasi	6,455,970	8,461,396	Investment
Konsumsi	9,263	11,981	Consumption
	<u>13,538,240</u>	<u>14,328,243</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Modal kerja	17,707,287	18,464,631	Working capital
Investasi	17,425,682	16,501,558	Investment
Konsumsi	128,281	115,998	Consumption
	<u>35,261,250</u>	<u>35,082,187</u>	
Total Rupiah	<u>48,799,490</u>	<u>49,410,430</u>	Rupiah Total
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Modal kerja	323,920	333,381	Working capital
Investasi	904,646	420,727	Investment
	<u>1,228,566</u>	<u>754,108</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Modal kerja	18,854,583	20,402,095	Working capital
Investasi	14,753,364	13,396,529	Investment
	<u>33,607,947</u>	<u>33,798,624</u>	
Total Dolar Amerika Serikat	<u>34,836,513</u>	<u>34,552,732</u>	United States Dollar Total
Total	83,636,003	83,963,162	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,882,949)	(17,948,183)	Allowance for impairment losses
Neto	<u>65,753,054</u>	<u>66,014,979</u>	Net

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember / December 31 ,		
	2022	2021	
Rupiah			Rupiah
Sampai dengan 1 tahun	7,553,023	8,645,286	Up to 1 year
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	4,790,712	4,202,447	More than 1 up to 3 years
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	6,768,753	4,837,372	More than 3 up to 5 years
Lebih dari 5 tahun	29,687,002	31,725,325	More than 5 years
	<u>48,799,490</u>	<u>49,410,430</u>	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollars
Sampai dengan 1 tahun	7,077,343	6,239,945	Up to 1 year
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	2,733,428	2,479,698	More than 1 up to 3 years
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	6,704,902	4,868,262	More than 3 up to 5 years
Lebih dari 5 tahun	18,320,840	20,964,827	More than 5 years
	<u>34,836,513</u>	<u>34,552,732</u>	
Total	83,636,003	83,963,162	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,882,949)	(17,948,183)	Allowance for impairment losses
Neto	<u>65,753,054</u>	<u>66,014,979</u>	Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****e. Berdasarkan periode sisa jatuh tempo**

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	12,179,107	12,264,565
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	7,314,575	4,046,820
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	7,973,338	9,765,754
Lebih dari 5 tahun	21,332,470	23,333,291
	<u>48,799,490</u>	<u>49,410,430</u>
Dolar Amerika Serikat		
Sampai dengan 1 tahun	11,559,971	8,496,747
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	4,987,651	7,377,058
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	6,701,866	4,990,451
Lebih dari 5 tahun	11,587,025	13,688,476
	<u>34,836,513</u>	<u>34,552,732</u>
Total	83,636,003	83,963,162
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,882,949)	(17,948,183)
Neto	<u>65,753,054</u>	<u>66,014,979</u>

f. Pembiayaan/piutang syariah

Rincian pembiayaan/piutang syariah pada
31 Desember 2022 dan 2021 adalah
sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Piutang <i>Murabahah</i>	1,603,302	1,657,211
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	9,866,174	10,774,293
<i>Qardh</i>	3,471	--
Total	<u>11,472,947</u>	<u>12,431,504</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,285,390)	(2,696,204)
Neto	<u>9,187,557</u>	<u>9,735,300</u>

**g. Pembiayaan dan piutang Penugasan
Khusus**

LPEI memiliki Penugasan Khusus untuk
melakukan pembiayaan ekspor
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No. 183/PMK.08/2021 yang
ditetapkan tanggal 14 Desember 2021 dan
mencabut (PMK) No. 198/PMK.08/2017
tentang Penugasan Khusus LPEI. Rincian
pembiayaan dan piutang Penugasan
Khusus pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Pembiayaan dan piutang konvensional	3,489,399	2,948,504
Pembiayaan dan piutang syariah	3,227	--
Jumlah	<u>3,492,626</u>	<u>2,948,504</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(48,775)	(400,152)
Neto	<u>3,443,851</u>	<u>2,548,352</u>

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****e. By remaining period to maturity**

Rupiah	
Up to 1 year	
More than 1 up to 3 years	
More than 3 up to 5 years	
More than 5 years	
United States Dollars	
Up to 1 year	
More than 1 up to 3 years	
More than 3 up to 5 years	
More than 5 years	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

f. Sharia financing/receivables

As of December 31, 2022 and 2021, the
details of sharia financing/receivables are
as follows:

<i>Murabahah</i> receivables	
<i>Musyarakah</i> financing	
<i>Qardh</i>	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

**g. Financing and receivables National
Interest Account**

LPEI has National Interest Account (NIA)
for export financing according to PMK
No. 183/PMK.08/2021 dated December
14, 2021 and revoked PMK No.
198/PMK.08/2017 regarding NIA for LPEI.
As of December 31, 2022 and 2021, the
details of NIA financing and receivables,
are as follows:

Financing and receivables conventional	
Financing and receivables sharia	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

**g. Pembiayaan dan piutang Penugasan
Khusus (lanjutan)**

Kolektibilitas pada seluruh pembiayaan
dan piutang Penugasan Khusus pada 31
Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai
berikut:

	31 Desember/December 31	
	2022	2021
Lancar	3,485,629	2,948,504
Kurang lancar	6,997	--
Jumlah	3,492,626	2,948,504
Cadangan kerugian penurunan nilai	(48,775)	(400,152)
Neto	3,443,851	2,548,352

Rincian pembiayaan dan piutang
Penugasan Khusus berdasarkan jenis dan
mata uang pada tanggal-tanggal 31
Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai
berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rupiah		
Modal kerja	1,581,643	1,421,445
Investasi	1,325,651	1,218,005
	2,907,294	2,639,450
Dolar Amerika Serikat		
Modal kerja	585,332	309,054
Total	3,492,626	2,948,504
Cadangan kerugian penurunan nilai	(48,775)	(400,152)
Neto	3,443,851	2,548,352

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

**g. Financing and receivables National
Interest Account (continued)**

The collectibility for all of NIA financing and
receivables as of December 31, 2022 and
2021, are as follows:

Current
Substandard
Total
Allowance for impairment losses
Net

The details of NIA financing and
receivables by type and currency as of
December 31, 2022 and 2021, are as
follows:

Rupiah
Working capital
Investment
United States Dollars
Working capital
Total
Allowance for impairment losses
Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****g. Pembiayaan dan piutang Penugasan
Khusus (lanjutan)**

Rincian pembiayaan dan piutang
Penugasan Khusus berdasarkan mata
uang dan sektor ekonomi pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Rupiah		
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	92,012	45,170
Perdagangan, restoran dan hotel	58,260	54,109
Perindustrian	654,719	490,947
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	994,943	994,404
Jasa dunia usaha	1,107,360	1,054,820
	2,907,294	2,639,450
Dolar Amerika Serikat		
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	35,625	31,472
Perdagangan, restoran dan hotel	186,009	92,968
Perindustrian	342,014	184,614
Konstruksi	21,684	--
	585,332	309,054
Total	3,492,626	2,948,504
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(48,775)	(400,152)
Neto	3,443,851	2,548,352

Suku bunga yang digunakan untuk seluruh
pembiayaan dan piutang Penugasan
Khusus berkisar antara 0,10%-9,50% dan
1,10%-9,50% pada tanggal-tanggal
31 Desember 2022 dan 2021. Seluruh
pembiayaan dan piutang Penugasan
Khusus yang diberikan telah dibentuk
cadangan kerugian penurunan nilai dengan
menggunakan metode individual dan
kolektif.

h. Informasi signifikan lainnya

1. Kisaran suku bunga per tahun untuk
pembiayaan dan piutang dalam Rupiah
dan Dolar Amerika Serikat adalah
sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Suku bunga kontrak		
Rupiah	0.00% - 14.50%	0.00% - 14.50%
Dolar Amerika Serikat	0.00% - 10.75%	0.00% - 10.75%
Suku bunga efektif		
Rupiah	0.00% - 23.57%	0.00% - 20.06%
Dolar Amerika Serikat	0.00% - 20.09%	0.00% - 13.07%

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****g. Financing and receivables National
Interest Account (continued)**

The details of NIA financing and
receivables by currency and economic
sectors as of December 31, 2022 and
2021, are as follows:

Rupiah	
Agriculture, hunting, and agriculture services	
Trading, restaurants and hotel Industry	
Transportation, warehousing, and communication Business services	
United States Dollar	
Agriculture, hunting, and agriculture services	
Trading, restaurants and hotel Industry	
Construction	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

Interest rate for all NIA financing and
receivables ranged from 0.10%-9.50%
and 1.10%-9.50%, as of December 31,
2022 and 2021, respectively. Allowance
method for impairment losses for NIA
financing and receivables are individual
and collective.

h. Other significant information

1. Range of annual interest rates for
financing and receivables in Rupiah
and United States Dollars are as
follows:

Contractual interest rate	
Rupiah	
United States Dollars	
Effective interest rate	
Rupiah	
United States Dollars	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

2. Pembiayaan dan piutang dijamin dengan surat sanggup (*promissory note*), agunan yang diikat dengan hak tanggungan, piutang dagang, dan persediaan yang diikat secara fidusia (*"cessie"*) dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh LPEI.
3. Jumlah pembiayaan dan piutang dalam bentuk sindikasi adalah sebesar Rp22.214.901 dan Rp26.368.453 masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 2021. Keikutsertaan LPEI berkisar antara 4,17% sampai dengan 65,77% dan 4,17% sampai dengan 84,24% dari jumlah pembiayaan dan piutang sindikasi, masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 2021. Risiko atas pembiayaan dan piutang sindikasi ditanggung secara proporsional oleh bank-bank peserta.
4. Pinjaman pegawai adalah pinjaman yang diberikan kepada pegawai dengan tingkat bunga sebesar 0% dan 4% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Jumlah pinjaman pegawai adalah sebesar Rp137.544 dan Rp127.979 masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 2021. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) diamortisasi sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan *Effective Interest Rate* (EIR).

Besarnya biaya tersebut pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.622 dan Rp3.739 yang dibukukan sebagai bagian dari beban gaji dan tunjangan (Catatan 28).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

**h. Other significant information
(continued)**

2. Financing and receivables are secured by promissory notes, registered mortgages, trade receivables, and inventories pledged under a fiduciary transfer of ownership (*"cessie"*) and by other guarantees generally accepted by LPEI.
3. Total syndicated financing and receivables amounted to Rp22,214,901 and Rp26,368,453, as of December 31, 2022 and 2021, respectively. LPEI's share in syndicated financing and receivables ranged from 4.17% to 65.77% and 4.17% to 84.24% of the total syndicated financing and receivables as of December 31, 2022 and 2021, respectively. Risks from syndicated financing and receivables are shared proportionately among the participating banks.
4. Loans to employees which carry interest rates of 0% and 4% per annum are intended for the acquisition of houses, vehicles, and other necessities with terms ranging from 1 (one) year to 20 (twenty) years. Total loan to employees amounted to Rp137,544 and Rp127,979 as of December 31, 2022 and 2021, respectively. The loan principal and interest payments are collected through monthly payroll deductions.

The difference between the employee loan's interest rates and the *Base Lending Rate* (BLR) is amortized over of the term of the loan using *Effective Interest Rate* (EIR).

For the years ended December 31, 2022 and 2021, amortization of the difference amounted to Rp5,622 and Rp3,739, respectively, which is recorded as part of salaries and benefit expenses (Note 28).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

5. Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang diserahkan oleh LPEI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat pemberian pembiayaan dan piutang, baik kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga, yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPP.

6. Analisis atas perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****h. Other significant information
(continued)**

5. Based on the Legal Lending Limit (LLL) reports submitted by LPEI to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as of December 31, 2022 and 2021, there were no financing and receivables, either to related parties or third parties, that breached or exceeded the LLL requirement.

6. The changes in the allowance for impairment losses on financing and receivables are as follows:

31 Desember/December 31, 2022					
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo awal	1,429,066	51,595	13,771,318	2,696,204	17,948,183
- Pindah ke tahap 1	--	--	--	--	--
- Pindah ke tahap 2	(96)	96	--	--	--
- Pindah ke tahap 3	(203,624)	(29,514)	233,138	--	--
Total perpindahan antar tahapan	(203,720)	(29,418)	233,138	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(305,779)	(13,291)	2,678,247	(477,460)	1,881,717
Aset baru	153,047	--	300,911	13,307	467,265
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(339,521)	--	(1,424)	(23,053)	(363,998)
Total pembalikan tahun berjalan	(492,253)	(13,291)	2,977,734	(487,206)	1,984,984
Penghapusbukuan	--	--	(2,677,039)	--	(2,677,039)
Penyesuaian mata uang asing	(188,750)	(28,774)	767,953	76,392	626,821
Saldo akhir	544,343	(19,888)	15,073,104	2,285,390	17,882,949

31 Desember/December 31, 2021					
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo awal	1,530,797	248,393	13,825,768	2,067,206	17,672,164
- Perubahan ke tahap 1	2,498	(2,498)	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	(95)	27,111	(27,016)	--	--
- Perubahan ke tahap 3	(176,244)	(90,117)	266,361	--	--
Total perpindahan antar tahapan	(173,841)	(65,504)	239,345	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(398,347)	(11,851)	541,136	1,064,794	1,195,732
Aset baru	853,063	12,076	--	--	865,139
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(393,361)	(131,545)	(862,943)	(451,022)	(1,838,871)
Total pembalikan tahun berjalan	61,355	(131,320)	(321,807)	613,772	222,000
Penghapusbukuan	--	--	(14,000)	--	(14,000)
Penyesuaian mata uang asing	10,755	26	28,012	15,226	54,019
Saldo akhir	1,429,066	51,595	13,771,318	2,696,204	17,934,183

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

**9. Financing and Receivables, Sharia Financing
and Receivables, and Other Receivables
(continued)**

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

h. Other significant information (continued)

Perubahan nilai tercatat bruto
pembiayaan yang diberikan selama
tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The changer in gross carrying amount
on loans during the year are as follow:

31 Desember/December, 31 2022						
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total		
Saldo awal	39,366,913	307,212	31,857,533	12,431,504	83,963,162	Balance, beginning of the year
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to stage 1 -
- Perubahan ke tahap 2	(86,808)	86,808	--	--	--	Transfer to stage 2 -
- Perubahan ke tahap 3	(3,663,691)	(76,658)	3,740,349	--	--	Transfer to stage 3 -
Total perpindahan antar tahapan	(3,750,499)	10,150	3,740,349	--	--	Total transfer within stages
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(5,120,080)	(178,148)	1,374,192	(284,153)	(4,208,189)	Net remeasurement of carrying value
Aset baru	19,526,043	--	800,202	1,132,898	21,459,143	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(15,163,881)	--	(1,577)	(2,033,609)	(17,199,067)	Asset derecognized or repaid
Penghapusbukuan	--	--	(2,677,039)	--	(2,677,039)	Write-offs
Penyesuaian mata uang asing	726,719	16,248	1,328,719	226,307	2,297,993	Foreign exchange adjustment
Saldo akhir	35,585,215	155,462	36,422,379	11,472,947	83,636,003	Ending balance

31 Desember/December 31, 2021						
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total		
Saldo awal	43,454,065	1,451,857	30,140,037	15,362,114	90,408,073	Balance, beginning of the year
- Perubahan ke tahap 1	6,292	(6,292)	--	--	--	Transfer to stage 1 -
- Perubahan ke tahap 2	(26,812)	53,828	(27,016)	--	--	Transfer to stage 2 -
- Perubahan ke tahap 3	(631,353)	(225,189)	856,542	--	--	Transfer to stage 3 -
Total perpindahan antar tahapan	(651,873)	(177,653)	829,526	--	--	Total transfer within stages
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(2,544,091)	(3,931)	(120,927)	(528,589)	(3,197,538)	Net remeasurement of carrying value
Aset baru	20,489,641	153,961	(18,362,824)	6,243,982	8,524,760	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(21,561,818)	(1,117,022)	19,057,837	(8,673,363)	(12,294,366)	Asset derecognized or repaid
Penghapusbukuan	--	--	(14,000)	--	--	Write-offs
Penyesuaian mata uang asing	180,989	--	313,884	27,360	522,233	Foreign exchange adjustment
Saldo akhir	39,366,913	307,212	31,843,533	12,431,504	83,963,162	Balance, end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah
cadangan kerugian penurunan nilai
yang dibentuk cukup untuk menutup
kerugian yang mungkin timbul akibat
tidak tertagihnya pembiayaan dan
piutang, pembiayaan dan piutang
syariah, dan piutang lainnya.

Management believes that the
allowance for impairment losses is
adequate to cover possible losses
arising from on uncollectible financing
and receivables, financing and
receivables sharia, and other receivable.

Tabel di bawah ini menunjukkan
rekonsiliasi dari cadangan kerugian
penurunan nilai pembiayaan
berdasarkan kelompok untuk
tahun-tahun yang berakhir pada
31 Desember 2022 dan 2021:

The table below shows the reconciliation
of allowance for impairment losses for
financing by class for the years ended
December 31, 2022 and 2021:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****9. Financing and Receivables, and Financing
and Sharia Receivables, and Other
Receivables (continued)****h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)****h. Other significant information (continued)**

31 Desember/ December 31, 2022					
Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumption	Total		
Saldo awal per 1 Januari	12,392,015	5,556,006	162	17,948,183	Beginning balance as of January 1
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 26)	1,087,853	896,833	298	1,984,984	Provision for impairment losses during the year (Note 26)
Penghapusbukuan	(2,539,543)	(137,496)	--	(2,677,039)	Written-offs
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	407,150	219,671	--	626,821	Foreign exchange translation adjustment
Saldo per 31 Desember 2022	11,347,475	6,535,014	460	17,882,949	Balance as of December 31, 2022
Mengalami penurunan nilai secara individual	10,531,048	5,297,192	--	15,828,240	Individual impairment
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	816,427	1,237,822	460	2,054,709	Collective impairment
Saldo per 31 Desember 2022	11,347,475	6,535,014	460	17,882,949	Balance as of December 31, 2022
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	29,435,314	16,592,004	--	46,027,319	Gross amount of financing determined to be individually impaired

31 Desember/ December 31, 2021					
Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumption	Total		
Saldo awal per 1 Januari	12,703,587	4,968,128	449	17,672,164	Beginning balance as of January 1
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 25)	(336,232)	558,519	(287)	222,000	Provision for impairment losses during the year (Note 25)
Penghapusbukuan	(14,000)	--	--	(14,000)	Written-offs
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	38,660	29,359	--	68,019	Foreign exchange translation adjustment
Saldo per 31 Desember 2021	12,378,015	5,556,006	162	17,934,183	Balance as of December 31, 2021
Mengalami penurunan nilai secara individual	11,374,577	3,925,785	--	15,300,362	Individual impairment
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	1,017,438	1,630,221	162	2,647,821	Collective impairment
Saldo per 31 Desember 2021	12,392,015	5,556,006	162	17,948,183	Balance as of December 31, 2021
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	27,070,270	11,442,824	--	38,513,094	Gross amount of financing determined to be individually impaired

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**
h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

7. Jumlah pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp46.027.319 dan Rp38.513.094 yang terdiri dari pembiayaan dan piutang dalam Rupiah masing-masing sebesar Rp29.426.349 dan Rp21.802.060 dan pembiayaan dan piutang dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar Rp16.600.970 dan Rp16.711.034.

LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai/bermasalah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.828.240 dan Rp15.300.363.

8. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi oleh LPEI adalah Rp48.417.257 dan Rp47.356.443, serta cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang tersebut, telah dibentuk oleh LPEI masing-masing sebesar Rp14.304.164 dan Rp14.321.830. Skema restrukturisasi kredit meliputi perpanjangan dan penjadwalan kembali jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit, dan skema restrukturisasi lain.

**9. Financing and Receivables, and Financing
and Sharia Receivables, and Other
Receivables (continued)**
h. Other significant information (continued)

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 32.

7. As of December 31, 2022 and 2021, gross carrying amounts of total impaired financing and receivables amounted to Rp46,027,319 and Rp38,513,094, respectively, which consist of financing and receivables in Rupiah of Rp29,426,349 and Rp21,802,060, respectively, and financing and receivables in United States Dollars of Rp16,600,970 and Rp16,600,034, respectively

LPEI has provided allowance for impairment losses on the impaired/non-performing financing and receivables amounting to Rp15,828,240 and Rp15,300,363 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

8. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balance of financing and receivables which are restructured amounted to Rp48,417,257 and Rp47,356,443, respectively, and the related allowance for impairment losses provided by LPEI amounted to Rp14,304,164 and Rp14,321,830, respectively. Financing restructuring involves extension and rescheduling of loan maturity date, reduction of interest rate, and other restructuring scheme.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

a. Pembiayaan dan piutang yang
direstrukturisasi berdasarkan
kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Lancar	10,873,571	12,984,098
Dalam perhatian khusus	19,706,941	19,002,167
Kurang lancar	4,923,408	1,512,532
Diragukan	1,946,657	653,922
Macet	10,966,680	13,203,724
Total	48,417,257	47,356,443
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,304,164)	(14,321,830)
Neto	34,113,093	33,034,613

Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Total
Allowance for
impairment losses
Net

b. Pembiayaan dan piutang yang
direstrukturisasi berdasarkan jenis dan
kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	Dalam perhatian khusus/ Special mention Kurang lancar/ Substandard Diragukan/ Doubtful Macet/ Loss						
31 Desember 2022	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	December 31, 2022
Modal kerja	3,309,016	12,101,983	2,438,612	1,873,579	6,660,477	26,383,667	Working capital
Investasi	7,564,555	7,604,958	2,484,796	73,078	4,306,203	22,033,590	Investment
Total	10,873,571	19,706,941	4,923,408	1,946,657	10,966,680	48,417,257	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(210,807)	(3,786,963)	(1,612,073)	(785,287)	(7,909,034)	(14,304,164)	Allowance for impairment losses
Neto	10,662,764	15,919,978	3,311,335	1,161,370	3,057,646	34,113,093	Net

	Dalam perhatian khusus/ Special mention Kurang lancar/ Substandard Diragukan/ Doubtful Macet/ Loss						
31 Desember 2021	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	December 31, 2021
Modal kerja	2,342,029	11,380,677	1,448,047	495,218	9,728,342	25,394,313	Working capital
Investasi	10,642,069	7,621,490	64,485	158,704	3,475,382	21,962,130	Investment
Total	12,984,098	19,002,167	1,512,532	653,922	13,203,724	47,356,443	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(188,476)	(3,916,938)	(294,915)	(196,980)	(9,724,521)	(14,321,830)	Allowance for impairment losses
Neto	12,795,622	15,085,229	1,217,617	456,942	3,479,203	33,034,613	Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

9. Per tanggal 23 Juni 2022, OJK telah menerbitkan POJK No.9 tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menggantikan POJK No. 40 tahun 2015.

Dimana berdasarkan Pasal 55 No. 3, LPEI wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa membaik dengan menjaga agar nilai pembiayaan bermasalah berada pada level yang terkendali.

Pada tahun 2021, LPEI masih mengacu kepada POJK No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan "LPEI, yang menyebutkan bahwa LPEI dilarang memiliki Pembiayaan dengan kategori kualitas Pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF) setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, lebih dari 5% (lima persen) dari total Pembiayaan".

Rasio pembiayaan dan piutang yang diklasifikasikan NPF/NPL adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rasio NPF bruto	26.61%	21.03%
Rasio NPF neto	10.39%	7.12%

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****h. Other significant information
(continued)**

9. As of June 23, 2022, OJK has issued POJK No. 9 of 2022 concerning Supervision of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia which replaces POJK No. 40 of 2015.

Where based on Article 55 No. 3, LPEI is obliged to assess, monitor, and take the necessary steps so that asset quality always improves by keeping the value of non-performing financing at a controlled level.

In 2021, LPEI still refers to POJK No. 40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of "LPEI, states that LPEI is not allowed to have Financing with a Non-Performing Financing (NPF) category less allowance for impairment losses, more than 5% (five percent) of the total Financing".

Financing and receivables ratios classified as NPF/NPL are as follows:

Gross NPF ratio
Net NPF ratio

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan 2021, ikhtisar pembiayaan dan piutang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

	Pembiayaan dan piutang bermasalah/ Non-performing financing and receivables	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses
Rupiah		
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	3,675,715	1,953,395
Perdagangan, restoran dan hotel	1,379,439	951,435
Perindustrian	7,076,679	4,053,294
Pertambangan	1,030,902	753,691
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	288,704	135,506
Konstruksi	68,175	37,439
Jasa dunia usaha	444,168	432,644
Jasa-jasa sosial/masyarakat	9,800	2,549
	13,973,582	8,319,953
Dolar Amerika Serikat		
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	679,797	510,647
Perdagangan, restoran dan hotel	584,439	320,993
Perindustrian	5,181,972	2,834,990
Pertambangan	495,512	332,508
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	314,197	225,956
Konstruksi	342,750	342,750
Jasa dunia usaha	679,019	679,019
Jasa-jasa sosial/masyarakat	7,784	4,608
	8,285,470	5,251,471
Total	22,259,052	13,571,424

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****h. Other significant information
(continued)**

As of December 31, 2022 and 2021, a summary of non-performing financing and receivables based on economic sector and related allowance for impairment losses based on PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, is as follows:

December 31, 2022

Rupiah
Agriculture, hunting, and agriculture services
Trading, restaurants and hotel
Industry
Mining
Transportation, warehousing, and communication
Construction
Business services
Social services/society
United States Dollar
Agriculture, hunting, and agriculture services
Trading, restaurants and hotel
Industry
Mining
Transportation, warehousing, dan communication
Construction
Business services
Social services/society
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

31 Desember 2021

	Pembiayaan dan piutang bermasalah/ <i>Non-performing financing and receivables</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>
Rupiah		
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	1,891,674	1,082,466
Perdagangan, restoran, dan hotel	1,746,077	1,062,892
Perindustrian	5,293,823	3,179,968
Pertambangan	1,051,981	663,717
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	182,136	125,312
Konstruksi	72,589	33,279
Jasa dunia usaha	445,900	426,186
Jasa-jasa sosial/masyarakat	9,800	9,800
	<u>10,693,980</u>	<u>6,583,620</u>
Dolar Amerika Serikat		
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	600,665	451,954
Perdagangan, restoran, dan hotel	496,402	309,634
Perindustrian	4,171,870	3,038,828
Pertambangan	458,662	343,444
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	287,657	214,043
Konstruksi	318,562	318,562
Jasa dunia usaha	626,365	414,736
Jasa-jasa sosial/masyarakat	7,126	7,126
	<u>6,967,309</u>	<u>5,098,327</u>
Total	<u>17,661,289</u>	<u>11,681,947</u>

10. Penghapusbukuan kredit macet

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, LPEI melaksanakan penghapusbukuan kredit macet masing-masing sebesar Rp2.677.039 dan Rp14.000. Adapun kriteria debitur yang dapat dihapusbukukan meliputi:

- Fasilitas kredit telah digolongkan macet;
- Fasilitas kredit telah dibentuk dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 100% (seratus persen) dari pokok kredit macetnya;
- Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan penyelamatan, tetapi tidak berhasil;

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

**h. Other significant information
(continued)**

December 31, 2021

	Rupiah
Agriculture, hunting, and agriculture services	
Trading, restaurants, and hotel Industry	
Mining	
Transportation, warehousing, and communication	
Construction	
Business services	
Social services/society	
United States Dollar	
Agriculture, hunting, and agriculture services	
Trading, restaurants, and hotel Industry	
Mining	
Transportation, warehousing, and communication	
Construction	
Business services	
Social services/society	
Total	

10. Writing off bad credit

In the periods ending December 31, 2022 and 2021, LPEI has written off bad loans amounting to Rp2,677,039 and Rp14,000, respectively. The criteria for debtors that can be written off include:

- The credit facility has been classified as loss;
- The credit facility has been established with an allowance for impairment losses (CKPN) of 100% (one hundred percent) of the principal for bad loans;
- Several attempts at collection and rescue have been made, but didn't work;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

- d. Usaha debitur sudah tidak memiliki prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar; dan
- e. Hapus buku dilakukan terhadap seluruh kewajiban kredatnya, termasuk yang berasal dari *non-cash loan* sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kredatnya (*partial write-off*).
11. Kredit yang dihapusbukukan dicatat di ekstra-komtabel. LPEI terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit yang telah dihapusbukukan. Kredit ekstra-komtabel ini tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Ikhtisar mutasi kredit ekstra-komtabel untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31		
	2022	2021	
Saldo awal per 1 Januari	37,800	23,800	Beginning balance as of January 1
Penghapusbukuan tahun berjalan	2,677,039	14,000	Written-off current year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan (<i>cash recoveries</i>)	(32,010)	--	Receipt of credit that has been
Lain-lain	108,667	--	Written-off Others
Saldo akhir	2,791,496	37,800	Ending balance

Lain-lain merupakan selisih kurs karena penjabaran mata uang asing dan pencatatan kembali aset yang telah dihapusbuku dan lainnya.

12. Rasio pembiayaan dan piutang usaha kecil dan menengah terhadap total pembiayaan dan piutang LPEI yang mana tidak termasuk pembiayaan yang merupakan Penugasan Khusus pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar 17,17% dan 17,14%.

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****h. Other significant information
(continued)**

- d. The debtor's business has no prospects or the debtor's performance is poor or there is no ability to pay; and
- e. Write-offs are carried out on all of its credit obligations, including those originating from non-cash loans so that write-offs may not be made on a portion of its credit (*partial write-off*).
11. Write-off credits are recorded in the extra-committable. LPEI continues to make efforts to collect written-off loans. These extra-comtable credits are not presented in the consolidated statements of financial position. The summary of movements of extra-comtable credit for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Others represent exchange differences due to translation of foreign currencies and re-recording of assets that have been written off and others.

12. The ratio of small medium enterprises financing and receivables to total financing and receivables of LPEI, which does not include loan under National Interest Account as of December 31, 2022 and 2021, are 17.17% and 17.14%, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

13. LPEI memiliki pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp87.756 dan Rp121.204. Fasilitas KURBE merupakan bentuk pembiayaan yang disediakan oleh LPEI untuk para pelaku usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. KURBE diluncurkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro, kecil, dan UMKM yang berorientasi ekspor dalam memperoleh akses pendanaan yang murah. LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan KURBE per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp65.911 dan Rp71.373.

14. Pembiayaan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang No. 02. Tahun 2009 tentang LPEI, LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung Program Ekspor Nasional atas biaya Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai hal-hal yang terkait dengan penugasan khusus pelaksanaan Program Ekspor Nasional diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK No. 198/2017) yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan PMK No. 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK No. 183/2021).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

**h. Other significant information
(continued)**

13. LPEI has financing under Credit Export related to SME (KURBE) as of December 31, 2022 and 2021, amounting to Rp87,756 and Rp121,204, respectively. KURBE facility is a form of financing provided by LPEI for micro, small, and medium enterprises (SMEs) which are export-oriented. KURBE is launched to help the export-oriented micro, small, and SMEs in gaining access to low cost financing. LPEI has provided allowance for impairment losses on financing to KURBE amounting to Rp65,911 and Rp71,373, as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

14. Financing to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Based on the provision of Article 18 of Law No. 02. Year 2009 concerning LPEI may carry out special assignments from the Government to support the National Export Program at the Government's expense. Further provisions regarding matters related to special assignments for the implementation of the National Export Program are regulated by Regulation of Minister of Finance No. 198/PMK.08/2017 concerning Special Assignments to the LPEI (PMK No. 198/2017) which currently has been revoked and substituted with PMK No. 183/PMK.08/2021 concerning Special Assignment to the Indonesian Export Financing Institution (PMK No. 183/2021).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 44 tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI menerima PMN sebesar Rp2.500.000 dengan alokasi Rp1.500.000 untuk melaksanakan Penugasan Umum (peningkatan kapasitas usaha) dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) melalui Surat No. S-427/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 menyampaikan usulan Program PKE Industri Penerbangan dan Komite PKE yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian sebagai anggota tetap melakukan penilaian melalui beberapa Rapat Teknis dan melaksanakan Rapat Pleno untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan atas usulan program PKE Industri Penerbangan yang telah disampaikan oleh KBUMN.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 428/KMK/08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk mendukung Industri Penerbangan Indonesia, LPEI ditugaskan untuk menyediakan pembiayaan ekspor dengan alokasi Dana Penugasan Khusus (DPK) sebesar Rp1.000.000 sesuai ketentuan pelaksanaan yang tercantum dalam KMK tersebut. Adapun jangka waktu penugasan atas PKE Industri Penerbangan ini telah berakhir di 31 Desember 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****h. Other significant information
(continued)**

Through Government Regulation No. 44 year 2019 regarding Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Equity of the Indonesian Export Financing Institution, LPEI receives State Equity Participation in the amount of Rp2,500,000 with the allocation of Rp1,500,000 to carry out General Assignment (increasing of business capacity) and Rp1,000,000 to carry out the Export Special Assignment (PKE) program.

Ministry of State-Owned Enterprises by the Letter No. S-427/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 conveyed the proposed PKE Program for Aviation Industry and PKE Committee consisting of representatives of Ministry of Finance, Ministry of Trade, and Ministry of Industry as permanent members to conduct an assessment through several Technical Meetings and carry out Plenary Meetings to prepare recommendations that will be submitted to the Minister of Finance on the proposed PKE program for Aviation Industry that has been submitted by Ministry of State-Owned Enterprises.

Through Decree of Minister of Finance No. 428/KMK/08/2020 dated September 23, 2020 concerning Special Assignment to LPEI to support the Indonesian Aviation Industry, LPEI is assigned to provide export financing with the allocation of the Special Assignment Fund of Rp1,000,000 in accordance with the implementation provisions contained in the Decree of Minister of Finance. The assignment period for this Aviation Industry PKE has ended on December 31, 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**
h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melalui Surat No. GARUDA/JKDZ/24610/2020 tanggal 25 September 2020 menyampaikan permohonan pembiayaan modal kerja PKE kepada LPEI. Terhadap permohonan GIAA tersebut, LPEI melakukan evaluasi pembiayaan berdasarkan *Feasibility Study* (FS) yang disusun oleh pihak independen.

LPEI dan GIAA melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 19 tanggal 06 Oktober 2020 di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito di Jakarta, dengan limit pembiayaan sebesar Rp1.000.000 dan tujuan penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMKE) PKE untuk pembayaran *past-due* kepada *lessors* dalam rangka penurunan biaya sewa atau manfaat lainnya, pembayaran kepada *lessors* untuk pencabutan *grounding notice* pesawat serta pembiayaan *direct costs* atas biaya-biaya operasional sebagai berikut: (1) biaya sewa pesawat kepada *lessor*; (2) biaya bahan bakar untuk rute internasional atau pengisian bahan bakar di luar wilayah Republik Indonesia; (3) biaya pelayanan pesawat dan bandara atas rute internasional; dan (4) biaya perawatan pesawat.

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**
**h. Other significant information
(continued)**

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) by the Letter No. GARUDA/JKDZ/24610/2020 dated September 25, 2020 submitted an application for PKE working capital financing to LPEI. With respect to the GIAA application, LPEI conducted a financing evaluation based on the *Feasibility Study* (FS) prepared by an independent party.

LPEI and GIAA signed the Deed of Export Working Capital Credit Agreement No. 19 dated October 6, 2020 in presence of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito in Jakarta, with a financing limit of Rp1,000,000 and the purpose of using the Working Capital Credit of National Interest Account facility for past-due payments to lessors in order to reduce rental costs or other benefits, payments to lessors for revocation of aircraft grounding notices as well as direct costs financing for costs operational as follows: (1) aircraft rental costs to lessors; (2) fuel costs for international routes or refueling outside the territory of the Republic of Indonesia; (3) the cost of aircraft and airport services on international routes; and (4) aircraft maintenance costs.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Per 20 Juni 2022, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan Homologasi atas PKPU dan Restrukturisasi GIAA berdasarkan Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara GIAA dengan Para Kreditornya; dan menghukum GIAA dan seluruh krediturnya serta pihak-pihak yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 untuk tunduk dan mematuhi, serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

Per 31 Desember 2022, GIAA memiliki Fasilitas KMKE PKE dengan pembiayaan sebesar Rp994.000 sesuai dengan tujuan penggunaan dan melaksanakan kegiatan monitoring pemenuhan *covenant* debitur. LPEI telah melakukan kegiatan monitoring baik *onsite* dengan melakukan *site visit* ke lokasi usaha dan *offsite* berupa penyampaian laporan-laporan kepada Komite PKE.

Pelaksanaan pemberian KMKE PKE kepada GIAA pada tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan PMK No. 198/2017 (yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan PMK No. 183/2021) dan ketentuan dalam KMK No. 428/KMK/08/2020.

Per tanggal 31 Desember 2022 LPEI menghitung CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode arus kas yang didiskontokan dengan tingkat diskonto sebesar 0,1% (tingkat suku bunga setelah restrukturisasi) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN (Catatan 46).

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

**h. Other significant information
(continued)**

As of June 20, 2022, the Central Jakarta Commercial Court has decided on the Homologation of PKPU and GIAA Restructuring based on Decision No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst by stating san and legally binding Settlement Agreement dated June 17, 2022 between GIAA and its Creditors; and punish GIAA and all of its creditors as well as the parties mentioned in the Settlement Agreement dated June 17, 2022 to comply with, and implement the contents of the Settlement Agreement.

As of December 31, 2022, GIAA has the Working Capital Credit of National Interest Account Facility with outstanding in the amount of Rp994,000 in accordance with the intended use and carried out monitoring activities for the fulfillment of debtor covenants. LPEI has carried out monitoring activities both onsite by conducting site visits to business locations and offsite in the form of submitting reports to the National Interest Account Committee.

The implementation of the granting of the Working Capital Credit of National Interest Account to GIAA in 2020 was in accordance with PMK No. 198/2017 (which has now been revoked and substituted with PMK No. 183/2021) and the provisions in Decree of Minister of Finance No. 428/KMK/08/2020.

As of December 31, 2022, LPEI calculate CKPN on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk using the discounted cash flow method at a discount rate of 0.1% (interest rate after restructuring) based on a Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN (Note 46)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**
h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah 3,94% (tingkat suku bunga sebelum restrukturisasi).

Perbandingan hasil perhitungan CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan/Description	Perhitungan CKPN berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia/ Calculation of CKPN based on the Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia	Perhitungan CKPN berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia / Calculation of CKPN based on the Indonesian Financial Accounting Standards
Metode / Methodology	Arus kas yang didiskontokan / Discounted cash flow	Arus kas yang didiskontokan / Discounted cash flow
Asumsi tingkat diskonto / Discount rate assumptions	0.10%	3.94%
Laporan posisi keuangan/ Statements of financial position		
Jumlah/ Total CKPN	10,413	558,839
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Statement of profit or loss and other comprehensive income		
(Pemulihan) Pembentukan beban CKPN / (Recovery of) Provision of CKPN expense	(359,308)	189,118

Per 31 Desember 2022, LPEI mengakui CKPN pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan pemulihan beban CKPN pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp10.413 dan Rp359.308.

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)
h. Other significant information (continued)

According to the Indonesian Financial Accounting Standards, the discount rate assumption used in calculating the Allowance for Impairment Losses on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is 3.94% (interest rate before restructuring).

Comparison of the results of CKPN calculation on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as of December 31, 2022 based on the Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and Indonesian Financial Accounting Standards is as follows:

As of December 31, 2022, LPEI recognised CKPN on the statement of consolidated financial position and recovery of CKPN expense on the statement of consolidated profit or loss and other comprehensive income on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp10,413 and Rp359,308, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****i. Piutang Pembiayaan Garansi**

Analisis atas perubahan nilai tercatat bruto
piutang pembiayaan garansi adalah
sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2022			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	298,034	--	298,034
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--
Aset baru	--	--	--
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--
Penyesuaian mata uang asing	27,498	--	27,498
Saldo akhir	325,532	--	325,532

31 Desember/ December 31, 2021			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	303,054	--	303,054
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--
Aset baru	--	--	--
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	--	--	--
Penyesuaian mata uang asing	(5,020)	--	(5,020)
Saldo, akhir tahun	298,034	--	298,034

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****i. Guarantee Financing Receivables**

An analysis of the movement in the gross
carrying amount on financing guarantee are
as follows:

Beginning balance
Transfer within stages
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Foreign exchange adjustment
Ending balance

Beginning balance
Transfer within stages
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total (reverse)/addition current year
Foreign exchange adjustment
Balance, end of year

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**
i. Piutang Pembiayaan Garansi (lanjutan)

Analisis atas Perubahan cadangan
kerugian penurunan nilai piutang
pembiayaan garansi adalah sebagai
berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	40,159	--	--	40,159
Perpindahan antar tahapan				
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--
Aset baru	--	--	--	--
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	--	--	--	--
Penyesuaian mata uang asing	3,706	--	--	3,706
Saldo akhir	43,865	--	--	43,865

Beginning balance
Transfer within stages
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total (reverse)/addition current year

Foreign exchange adjustment
Ending balance

	31 Desember/ December 31, 2021			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	7,242	--	--	7,242
Perpindahan antar tahapan				
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	32,780	--	--	32,780
Aset baru	--	--	--	--
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	32,780	--	--	32,780
Penyesuaian mata uang asing	137	--	--	137
Saldo akhir	40,159	--	--	40,159

Beginning balance
Transfer within stages
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total (reverse)/addition current year

Foreign exchange adjustment
Ending balance

Seluruh piutang pembiayaan garansi
diklasifikasikan kolektibilitas 2 dan tahap 1
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022
dan 2021.

All financing guarantee as of December 31,
2022 and 2021 are classified as collectibility
2 and stage 1.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****i. Piutang Pembiayaan Garansi (lanjutan)**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah, dan piutang lainnya.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

Piutang pembiayaan garansi adalah pembayaran klaim oleh LPEI kepada PT Pertamina (Persero) atas *Refund Guarantee* sebesar USD22,654,767, dimana LPEI bertindak sebagai penjamin atas Bank Garansi yang diterbitkan untuk nasabah Konsorsium PT Anggrek Hitam dan PT High Speed Shipyard ("HSS") sebesar USD22,665,347 yang diterbitkan dari tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018. Konsorsium HSS telah gagal melaksanakan pekerjaan atas penyelesaian pembuatan kapal yang dipesan oleh PT Pertamina (Persero) secara tepat waktu, yaitu melewati tenggat waktu maksimal penyelesaian yang telah disepakati bersama pada tanggal 31 Juli 2018.

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****i. Guarantee Financing Receivables
(continued)**

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from on uncollectible financing and receivables, sharia financing and receivables, and other receivable.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 32.

Guarantee financing receivables are claims payments by LPEI to PT Pertamina (Persero) for a Refund Guarantee of USD22,654,767, where LPEI acts as guarantor of Bank Guarantees issued to Consortium customers PT Anggrek Hitam and PT High Speed Shipyard ("HSS") amounting USD22,665,347 issued from November 1, 2017 to August 24, 2018. The HSS Consortium has failed to carry out work on the completion of shipbuilding ordered by PT Pertamina (Persero) on time, i.e. past the maximum agreed deadline for completion on July 31, 2018.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)****i. Piutang Pembiayaan Garansi (lanjutan)**

Pembayaran klaim kepada PT Pertamina (Persero) tersebut di atas berasal dari porsi retensi (yang menjadi bagian) LPEI atas klaim sebesar USD6,089,430, serta *cash collateral* sebesar USD1,743,757, dan sisanya ditanggung oleh Penjamin Ulang (*Reguarantor*), yaitu konsorsium PT Asuransi Central Asia, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia melalui skema penjaminan ulang dan kontra-bank garansi sebesar USD14,684,563.

Sehubungan dengan *recovery* atas klaim yang telah dibayarkan LPEI tersebut, HSS telah menandatangani Perjanjian Pengakuan utang sebesar USD21,548,796 dengan LPEI pada tanggal 5 November 2018, dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019 yang diperpanjang sampai 30 September 2023.

Sesuai perjanjian kerjasama penutupan asuransi dan perjanjian pembagian pertanggungan penjaminan atas pembayaran yang diterima oleh LPEI dari HSS, LPEI akan mengembalikannya kepada para Penjamin Ulang sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing Penjamin Ulang. LPEI mencatat liabilitas kepada Penjamin Ulang sebesar USD14,684,562.84 dan USD14,821,580.38 atau ekuivalen dengan Rp228.602 dan Rp211.244 masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 2021 atas porsi risiko yang ditanggung oleh Penjamin Ulang tersebut. Termasuk dalam jumlah liabilitas kepada Penjamin Ulang tersebut adalah bagian dari pengenaan denda yang menjadi porsi Penjamin Ulang sebesar USD137,017 dan USD73,422 masing-masing 31 Desember 2022 dan 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)****i. Guarantee Financing Receivables
(continued)**

The payment of claims to PT Pertamina (Persero) above originates from the own retention portion (which is part of) LPEI claims amounting to USD6,089,430, and cash collateral amounting to USD1,743,757, and the balance reinsured by the Reinsurer (*Reguarantor*), namely PT Asuransi Central Asia Consortium, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, and PT Asuransi Kredit Indonesia through a re-guarantee scheme and counter-bank guarantee amounting to USD14,684,563.

Due to the recovery of claims that was paid by LPEI, HSS has signed a Debt Recognition Agreement amounting to USD21,548,796 with LPEI on November 5, 2018, with maturity date on September 30, 2019 which has been extended up to September 30, 2023.

Referring to co-insurance agreement and co-guarantee agreement for payments received by LPEI from HSS, LPEI will share it to the Re-guarantor a portion of the risk covered by each Re-guarantor. LPEI records the reinsurance liability to the Re-Guarantee amounting to USD14,684,562.84 and USD14,821,580.38 or equivalent with Rp228,602 and Rp211,244 for the portion of the risk borne by the Reinsurer as of December 31, 2022 and 2021, respectively. Included in the obligations amount of the Re-guarantor is part of a fine which is the Re-Guarantee portion amounting to USD137,017 and USD73,422 as of December 31, 2022 and 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

10. Asuransi dan Penjaminan**10. Insurance and Guarantee****a. Piutang asuransi dan penjaminan****a. Insurance and guarantee receivables**

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Rupiah			Rupiah
Piutang proteksi piutang dagang	194	241	Trade receivable protection receivables
Piutang asuransi kegagalan ekspor	65	46	Export failure insurance receivables
Piutang asuransi properti	13	35	Property insurance receivables
Piutang asuransi teknik	--	6	Engineering insurance receivables
Piutang penjaminan-PEN	281,637	281,470	Guarantee receivables - PEN
	<u>281,909</u>	<u>281,798</u>	
Mata uang asing			Foreign currency
Piutang penjaminan-PEN	6,974	3,745	Guarantee receivables - PEN
Piutang proteksi piutang dagang	103	109	Trade receivable protection receivables
Piutang asuransi properti	3	4	Export failure insurance receivables
	<u>7,080</u>	<u>3,858</u>	
Total - neto	<u>288,989</u>	<u>285,656</u>	Total - net

b. Aset reasuransi**b. Reinsurance assets**

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan			Unearned premium income
Rupiah			Rupiah
Proteksi piutang dagang	111	240	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	31	11	Failure on export insurance
Mata uang asing			Foreign currency
Proteksi piutang dagang	2,353	2,200	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	--	12	Failure on export insurance
	<u>2,495</u>	<u>2,463</u>	
Estimasi klaim reasuransi			Estimated reinsurance claim
Rupiah			Rupiah
Proteksi piutang dagang	67	114	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	48	10	Failure on export insurance
Mata uang asing			Foreign currency
Proteksi piutang dagang	934	--	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	--	28	Failure on export insurance
	<u>1,049</u>	<u>152</u>	
Total	<u>3,544</u>	<u>2,615</u>	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

b. Aset reasuransi (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa estimasi klaim asuransi yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset reasuransi tersebut.

c. Liabilitas asuransi

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan		
Rupiah		
Proteksi piutang dagang	210	298
Asuransi kegagalan ekspor	60	16
Mata uang asing		
Proteksi piutang dagang	4,677	3,438
Asuransi kegagalan ekspor	96	17
	<u>5,043</u>	<u>3,769</u>
Estimasi klaim asuransi		
Rupiah		
Proteksi piutang dagang	200	351
Asuransi kegagalan ekspor	43	26
Mata uang asing		
Proteksi piutang dagang	2,563	2,180
Asuransi kegagalan ekspor	112	64
	<u>2,918</u>	<u>2,621</u>
Total	<u>7,961</u>	<u>6,390</u>

d. Pendapatan asuransi - neto

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Pendapatan asuransi - bruto		
Rupiah		
Pendapatan premi bruto	1,854	982
Pendapatan komisi	308	245
Pendapatan asuransi lainnya	99	185
	<u>2,261</u>	<u>1,412</u>
Mata uang asing		
Pendapatan premi bruto	17,193	8,650
Pendapatan komisi	2,649	1,848
Pendapatan asuransi lainnya	1,026	447
	<u>20,868</u>	<u>10,945</u>
	<u>23,129</u>	<u>12,357</u>
Premi reasuransi		
Rupiah		
Premi reasuransi	(1,187)	(1,072)
Mata uang asing		
Premi reasuransi	(8,866)	(6,496)
	<u>(10,053)</u>	<u>(7,568)</u>
Pendapatan dari asuransi - neto	<u>13,076</u>	<u>4,789</u>

10. Insurance and Guarantee (continued)

b. Reinsurance assets (continued)

Management believes that the estimated reinsurance claims provided is adequate to cover losses on the reinsurance assets.

c. Insurance liabilities

Unearned premium income	
Rupiah	
Trade receivable protection	
Failure on export insurance	
Foreign currency	
Trade receivable protection	
Failure on export insurance	
Estimated insurance claim	
Rupiah	
Trade receivable protection	
Failure on export insurance	
Foreign currency	
Trade receivable protection	
Failure on export insurance	
Total	

d. Income from insurance – net

Income from insurance - gross	
Rupiah	
Gross written premiums	
Commission income	
Other insurance income	
Foreign currency	
Gross written premiums	
Commission income	
Other insurance income	
Reinsurance premiums	
Rupiah	
Reinsurance premiums	
Foreign currency	
Reinsurance premiums	
Income from insurance - net	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)**10. Insurance and Guarantee (continued)****e. Beban klaim bruto asuransi dan beban
asuransi lainnya****e. Gross claim expense from insurance
and other insurance expenses**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Beban klaim			Claim expense
Rupiah			Rupiah
Klaim reasuransi	1	5	Reinsurance claims
Beban klaim bruto	-	(8)	Gross claim expense
	1	(3)	
Mata uang asing			Foreign currency
Klaim reasuransi	-	513	Reinsurance claims
Beban klaim bruto	-	(790)	Gross claim expense
	-	(277)	
Subtotal beban klaim	1	(280)	Subtotal claim expense
Beban asuransi lainnya			Other insurance expense
Rupiah	(104)	(150)	Rupiah
Mata uang asing	(891)	(644)	Foreign currency
Subtotal beban asuransi lainnya	(995)	(794)	Subtotal Other insurance expense
Beban klaim asuransi dan lainnya	(994)	(1,074)	Claim and other insurance expense

f. Pendapatan penjaminan**f. Income from guarantee**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Rupiah	51,017	31,012	Rupiah
Mata uang asing	64,535	48,341	Foreign currency
Total	115,552	79,353	Total

**g. Kenaikan/(penurunan)
reasuransi - neto**

pada aset

**g. Increase/(decrease) in
assets – net**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Rupiah	(54)	194	Rupiah
Mata uang asing	957	1,154	Foreign currency
Total	903	1,348	Total

**h. (Kenaikan)/penurunan pada liabilitas
asuransi****h. (Increase)/decrease in
insurance liabilities**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Rupiah	177	(286)	Rupiah
Mata uang asing	(1,621)	(2,904)	Foreign currency
Total	(1,444)	(3,190)	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)
i. Informasi signifikan lainnya
**Program Penjaminan Pemerintah dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional**

Dampak dari Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU No. 2/2020). Pasal 11 Lampiran UU No. 2/2020 mengatur bahwa salah satu program yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan Pemerintah.

10. Insurance and Guarantee (continued)
i. Other significant information
**Government Guarantee Program in the
Context of National Economic Recovery**

The impact of the Covid-19 Pandemic that has emerged in Indonesia since March 2020 has made the Government stipulated a Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability which has been approved by the House of Representatives (DPR) to be later ratified as Law No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law (Law No. 2/2020). Article 11 of Attachment to Law No. 2/2020 stipulates that one of the programs that can be carried out for national economic recovery is a guarantee activity with a scheme set by the Government.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)**i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)****Program Penjaminan Pemerintah dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
(lanjutan)**

Skema penjaminan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No 2/2020 pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP No 23/2020) yang telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 23/2020 (PP No 43/2020), dimana Pasal 18 ayat (1) PP No 43/2020 mengatur bahwa dalam pelaksanaan penjaminan oleh Pemerintah, Pemerintah dapat menugaskan LPEI dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk melakukan Penjaminan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penjaminan sebagaimana dimaksud pada PP No. 43/2020 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan (PMK No. 98/2020) yang telah diubah kedua kali dengan PMK No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 (PMK No. 27/2022). Pasal 6 PMK No 98/2020 mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah, Menteri menugaskan LPEI untuk memberikan Penjaminan Pemerintah serta dapat menugaskan LPEI untuk melakukan Penjaminan Bersama dengan PT PII. Saat ini LPEI dan PT PII melalui PMK No. 27/PMK.08/2022 yang merupakan addendum dari PMK No. 98/PMK.08/2020 ditunjuk kembali menjadi badan usaha penjaminan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sampai dengan Desember 2022.

10. Insurance and Guarantee (continued)**i. Other significant information (continued)****Government Guarantee Program in the
Context of National Economic Recovery
(continued)**

The implementation of the guarantee scheme as stated in Law No. 2/2020 is further regulated in Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in order to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and Saving the National Economy (Government Regulation No 23/2020) which has been amended by Government Regulation No. 43 of 2020 concerning Amendment to Government Regulation No. 23/2020 (Government Regulation No 43/2020), where Article 18 paragraph (1) of Government Regulation No. 43/2020 regulates that in the implementation of guarantee by Government, the Government may assign LPEI and/or PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) to carry out Guarantee.

Further provision regarding Guarantee Procedures as referred to in Government Regulation No. 43/2020 is regulated by Regulation of Minister of Finance No. 98/PMK.08/2020 regarding Government Guarantee Procedures for Corporate Business Players through Guarantee Business Entity (Regulation of Minister of Finance No. 98/2020) which has been amended two times by PMK No. 27/PMK.08/2022 concerning the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation of Minister of Finance No. 98/2020 (Regulation of Minister of Finance No 27/2022). Article 6 of Regulation of Minister of Finance No 98/2020 regulates that in order to implement Government Guarantee, the Minister assigns LPEI to provide Government Guarantee and may assign LPEI to carry out Joint Guarantee with PT PII. Currently LPEI and PT PII through PMK No. 27/PMK.08/2022 which was addendum from PMK No. 98/PMK.08/2020 were reappointed to support the National Economic Recovery program until December 2022.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)
i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)
**Program Penjaminan Pemerintah dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
(lanjutan)**

Penugasan atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 599/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada LPEI dalam Melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program PEN (KMK No. 599/2020).

Berdasarkan KMK No. 599/2020 tersebut, LPEI ditugaskan untuk memberikan penjaminan pemerintah kepada pelaku usaha dengan kriteria yang memenuhi strategi pembiayaan ekspor nasional. LPEI dapat memberikan penjaminan kepada pelaku usaha yang kriteria pelaku usahanya tidak dapat dijamin LPEI secara sendiri dan/atau kapasitas penjaminan LPEI mendekati batas maksimal sesuai peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan penjaminan bersama dengan PT PII, dengan ketentuan LPEI menanggung porsi retensi paling tinggi sebesar 49%. Pada pelaksanaannya atas Penjaminan bersama, LPEI menanggung porsi retensi sebesar 20%.

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah oleh LPEI, pasal 11 PMK No. 98/2020 mengatur bahwa Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan berupa *loss limit*, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) *loss limit*. Dukungan berupa *loss limit* ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah pada kondisi tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah melalui Menteri dan LPEI.

10. Insurance and Guarantee (continued)
**i. Other significant information
(continued)**
**Government Guarantee Program in the
Context of National Economic Recovery
(continued)**

The assignment for the implementation of Government Guarantee is then stipulated in Decree of Minister of Finance No. 599/KMK.08/2020 concerning Assignment to LPEI in Implementing Government Guarantees for Corporate Business Players in the Implementation of PEN Program (KMK No. 599/2020).

Based on the KMK No. 599/2020, LPEI assigned to provide government guarantee to business players with criteria that meet the national export financing strategy. LPEI may provide guarantees to business players whose criteria for business actors cannot be guaranteed by LPEI itself and/or guarantee capacity of LPEI approaching the maximum limit in accordance with the laws and regulations by way of joint guarantee with PT PII, provided that LPEI bears the highest retention portion of 49%. In the implementation of Joint Guarantee, LPEI bears the retention portion of 20%.

In the context of implementing Government Guarantees by LPEI, Article 11 of PMK No. 98/2020 stipulates that the Government through Minister may provide support in the form of loss limits, State Equity Participation (PMN), and Payment Guarantee Service Fees (IJP) loss limits. Support in the form of loss limits is intended to limit the risk of LPEI in carrying out Government Guarantee assignments under certain conditions stipulated in the cooperation agreement between the Government through Minister and LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)**i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)****Program Penjaminan Pemerintah dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
(lanjutan)**

Lebih lanjut dukungan *loss limit* diatur dalam perjanjian kerjasama No. PRJ-291/PR/2020 dan 314/PKS/07/2020 antara Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) dengan LPEI bahwa dukungan *loss limit* diberikan dengan *threshold loss limit* sebesar 85% dari akumulasi IJP yang diterima.

Sebagai Penjamin dalam pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, LPEI telah menerima PMN sebesar Rp5.000.000. Penyertaan modal negara ini merupakan bagian dari dana penugasan khusus dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha penjaminan LPEI dan sebagai likuiditas yang dapat digunakan untuk pembayaran ketika terjadi klaim. Tujuan penggunaan PMN tersebut akan ditetapkan kembali ketika pertanggunggunaan Penjaminan Pemerintah telah berakhir. Pelaksanaan program Penjaminan Pemerintah berakhir pada tanggal 17 Desember 2022 dengan masa pertanggunggunaan Penjaminan Pemerintah akan berlangsung sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
<i>Outstanding</i> Penjaminan		
Penjaminan Sendiri oleh LPEI	2,291,574	3,284,405
Penjaminan bersama PT PII	1,405,675	1,556,993
Total	3,697,249	4,841,398

Program Penjaminan Pemerintah yang dilakukan oleh LPEI, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Insurance and Guarantee (continued)**i. Other significant information (continued)****Government Guarantee Program in the
Context of National Economic Recovery
(continued)**

Furthermore, *loss limit* support is regulated in the cooperation agreement No. PRJ-291/PR/2020 and 314/PKS/07/2020 between the Ministry of Finance through the Director General of Risk Financing Management (DJPPR) and LPEI that *loss limit* support is provided with a *threshold loss limit* of 85% of accumulated IJP received.

As a guarantor in the implementation of government guarantees, LPEI has received a PMN in the amount of Rp5,000,000. This state equity participation is part of the special assignment fund in carrying out Government Guarantee assignments with the aim of increasing the LPEI guarantee business capacity and as liquidity that can be used for payments when claims occur. The purpose of using the State Equity Participation will be redefined when the Government Guarantee coverage has ended. The implementation of the Government Guarantee program ends on December 17, 2022 with the period of coverage of the Government Guarantee will last until December 15, 2024.

<i>Guarantee Outstanding</i>
<i>Self-Guarantee by LPEI</i>
<i>Joint Guarantee with PT PII</i>
Total

The Government Guarantee Program implemented out by LPEI, is in accordance with applicable regulations.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

a. Berdasarkan mata uang, jatuh tempo, dan hubungan

Perincian tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang, jatuh tempo, dan hubungan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021	
	Tagihan akseptasi/ Acceptances receivable	Liabilitas akseptasi/ Acceptances payable	Tagihan akseptasi/ Acceptances receivable	Liabilitas akseptasi/ Acceptances payable
Rupiah				
Pihak berelasi (Catatan 39)				
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	--	--	654	654
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	--	--	2,306	2,306
Pihak ketiga				
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	--	--	53,275	53,275
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	3,425	3,425	244,636	244,636
	<u>3,425</u>	<u>3,425</u>	<u>300,871</u>	<u>300,871</u>
Dolar Amerika Serikat				
Pihak ketiga				
Sampai dengan 1 bulan	3,592	3,592	5,387	5,387
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	80,031	80,031	16,255	16,255
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	64,113	64,113	138,027	138,027
	<u>147,736</u>	<u>147,736</u>	<u>159,669</u>	<u>159,669</u>
Total	151,161	151,161	460,540	460,540
Cadangan kerugian penurunan nilai	(244)	--	(1,910)	--
Neto	<u>150,917</u>	<u>151,161</u>	<u>458,630</u>	<u>460,540</u>

Perincian tagihan akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional Amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional Amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		3,425		300,871
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	9,490,006	147,736	11,202,917	159,669
Total		151,161		460,540
Cadangan kerugian penurunan nilai		(244)		(1,910)
Neto		<u>150,917</u>		<u>458,630</u>

11. Acceptances Receivable and Payable

a. By currency, maturity, and relationship

Acceptance's receivable and payable based on currencies, maturity, and relationship are as follows:

Rupiah	
Related parties (Note 39)	
More than 1 up to 3 months	
More than 3 up to 6 months	
Third parties	
More than 1 up to 3 months	
More than 3 up to 6 months	
United States Dollars	
Third parties	
Up to 1 month	
More than 1 up to 3 months	
More than 3 up to 6 months	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

Acceptances receivable based on currencies are as follows:

Rupiah	
Foreign currencies	
United States Dollar	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)**b. Tagihan dan liabilitas akseptasi
Penugasan Khusus**

Tagihan dan liabilitas akseptasi
Penugasan Khusus per 31 Desember
2022 dan 2021 masing-masing adalah
Rp3.592 dan nihil.

**c. Berdasarkan kolektibilitas dan
cadangan kerugian penurunan nilai**

Analisis atas perubahan nilai tercatat
bruto tagihan akseptasi adalah sebagai
berikut:

31 Desember/December 31, 2022			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	460,540	--	460,540
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--
Aset baru	151,161	--	151,161
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(460,540)	--	(460,540)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--
Saldo akhir	151,161	--	151,161

31 Desember/December 31, 2021			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	562,727	--	562,727
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--
Aset baru	460,540	--	460,540
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(562,727)	--	(562,727)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--
Saldo akhir	460,540	--	460,540

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Foreign exchange adjustment
Ending balance

Berikut adalah rekonsiliasi cadangan
kerugian penurunan nilai pada tagihan
akseptasi:

**11. Acceptances Receivable and Payable
(continued)****b. Acceptances receivable and payable -
National Interest Account**

Acceptances receivable and payable -
National Interest Account as of December
31, 2022 and 2021, are Rp3,592 and nil,
respectively.

**c. By collectibility and allowance for
impairment losses**

An analysis of the movement in the gross
carrying amount of acceptances receivable
is as follows:

The following is a reconciliation of
allowance for impairment losses on
acceptance receivables:

31 Desember/December 31, 2022			
Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total
Saldo awal	1,910	--	1,910
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--
Aset baru	244	--	244
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(1,910)	--	(1,910)
Total pembalikan tahun berjalan	(1,666)	--	(1,666)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--
Saldo akhir	244	--	244

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total reverse current year

Foreign exchange adjustment
Ending balance

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)

**11. Acceptances Receivable and Payable
(continued)**

**c. Berdasarkan kolektibilitas dan
cadangan kerugian penurunan nilai**

**c. By collectibility and allowance for
impairment losses**

31 Desember/December 31, 2021					
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total		
Saldo awal	4,310	--	--	4,310	Beginning balance
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	Transfer to stage 1 -
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	Transfer to stage 2 -
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	Transfer to stage 3 -
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	Transfer within stages
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--	Net remeasurement of carrying value
Aset baru	1,910	--	--	1,910	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(4,322)	--	--	(4,322)	Asset derecognized or repaid
Total pembalikan tahun berjalan	(2,412)	--	--	(2,412)	Total reverse current year
Penyesuaian mata uang asing	12	--	--	12	Foreign exchange adjustment
Saldo akhir	1,910	--	--	1,910	Ending balance

Manajemen LPEI berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai tagihan akseptasi.

LPEI management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover any possible impairment on acceptance receivables.

12. Biaya Dibayar di Muka

12. Prepaid Expenses

31 Desember / December 31,			
	2022	2021	
Sistem	6,846	5,027	System
Asuransi	7,617	9,812	Insurance
Profesional	351	310	Professional
Telekomunikasi	243	279	Telecommunication
Sewa	72	354	Rent
Total	15,129	15,782	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

13. Aset Tetap**13. Premises and Equipment**

	31 Desember/ December 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Acquisition
Gedung	1,148,616	--	--	--	1,148,616	Building
Peralatan dan perlengkapan kantor	307,661	2,676	(60)	23,828	334,105	Office furnitures and fixtures
Kendaraan bermotor	7,351	--	--	--	7,351	Motor vehicles
	<u>1,463,628</u>	<u>2,676</u>	<u>(60)</u>	<u>23,828</u>	<u>1,490,072</u>	
Aset dalam penyelesaian	39,554	4,208	(3,386)	(23,828)	16,548	Construction in progress
Aset hak guna						Right of use asset
Gedung	16,177	5,851	(8,061)	--	13,967	Building
Kendaraan bermotor	5,828	405	(1,342)	--	4,891	Motor vehicles
Total	<u>1,525,187</u>	<u>13,140</u>	<u>(12,849)</u>	<u>--</u>	<u>1,525,478</u>	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Gedung	186,650	57,431	--	--	244,081	Building
Peralatan dan perlengkapan kantor	223,749	45,750	(60)	--	269,439	Office furnitures and fixtures
Kendaraan bermotor	744	1,446	--	--	2,190	Motor vehicles
	<u>411,143</u>	<u>104,627</u>	<u>(60)</u>	<u>--</u>	<u>515,710</u>	
Aset hak guna						Right of use asset
Gedung	8,367	3,842	(3,599)	--	8,610	Building
Kendaraan bermotor	2,252	1,071	--	--	3,323	Motor vehicles
	<u>421,762</u>	<u>109,540</u>	<u>(3,659)</u>	<u>--</u>	<u>527,643</u>	
Nilai buku	<u><u>1,103,425</u></u>				<u><u>997,835</u></u>	Book value

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

13. Aset Tetap (lanjutan)

13. Premises and Equipment (continued)

31 Desember/ December 31, 2021							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		Cost
Harga perolehan							Direct ownership
Pemilikan langsung							Building
Gedung	1,148,616	--	--	--	1,148,616		Office furnitures
Peralatan dan perlengkapan kantor	346,975	2,620	(50,653)	8,719	307,661		and fixtures
Kendaraan bermotor	216	7,200	(65)	--	7,351		Motor vehicles
	<u>1,495,807</u>	<u>9,820</u>	<u>(50,718)</u>	<u>8,719</u>	<u>1,463,628</u>		
Aset dalam penyelesaian	13,348	34,925	--	(8,719)	39,554		Construction in progress
Aset hak guna							Right of use asset
Gedung	14,980	1,727	(530)	--	16,177		Building
Kendaraan bermotor	8,260	--	(2,432)	--	5,828		Motor vehicles
Total	<u>1,532,395</u>	<u>46,472</u>	<u>(53,680)</u>	<u>--</u>	<u>1,525,187</u>		Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung							Direct ownership
Gedung	129,219	57,431	--	--	186,650		Building
Peralatan dan perlengkapan kantor	230,326	44,056	(50,633)	--	223,749		Office furnitures and fixtures
Kendaraan bermotor	194	615	(65)	--	744		Motor vehicles
	<u>359,739</u>	<u>102,102</u>	<u>(50,698)</u>	<u>--</u>	<u>411,143</u>		
Aset hak guna							Right of use asset
Gedung	3,385	5,046	(64)	--	8,367		Building
Kendaraan bermotor	2,923	1,222	(1,893)	--	2,252		Motor vehicles
	<u>366,047</u>	<u>108,370</u>	<u>(52,655)</u>	<u>--</u>	<u>421,762</u>		
Nilai buku	<u><u>1,166,348</u></u>				<u><u>1,103,425</u></u>		Book value

Beban penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, adalah masing-masing sebesar Rp109.540 dan Rp108.370 (Catatan 27).

The depreciation expense for the years ended December 31, 2022 and 2021, amounted to Rp109,540 and Rp108,370, respectively (Note 27).

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Details of construction in progress as of December 31, 2022 and 2021, are as follows:

31 Desember/ December 31, 2022					
	Total	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion		
Aset dalam penyelesaian	<u>16,548</u>	95.97%	Juni/ June 2023		Construction in progress
31 Desember/ December 31, 2021					
	Total	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion		
Aset dalam penyelesaian	<u>39,554</u>	68.14%	Desember/December 2022		Construction in progress

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

13. Aset Tetap (lanjutan)

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp114.750 dan Rp86.368.

Selama tahun 2022 dan 2021, LPEI telah melakukan penjualan aset tetap dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp60 dan Rp50.718.

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan pihak ketiga. Pada 31 Desember 2022 dan 2021, LPEI menggunakan PT Asuransi Sinarmas dengan nilai pertanggungan sebesar Nihil dan Rp241, PT Asuransi Central Asia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp7.315 dan Rp215.760, PT Askindo dengan nilai pertanggungan sebesar Rp147.149 dan Nihil, dan PT BRI Asuransi Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar nihil dan Rp6.480. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2022 dan 2021.

LPEI menyewa beberapa aset termasuk gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan. Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki LPEI adalah 2,5 tahun. LPEI juga memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah. LPEI menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

Beban sewa jangka pendek untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang termasuk pengecualian dalam PSAK 73 masing-masing sebesar Rp22.829 dan Rp25.211.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

13. Premises and Equipment (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp114,750 and Rp86,368.

During the year 2022 and 2021, LPEI has sold fixed asset with acquisition cost amounting to Rp60 and Rp50,718.

Premises and equipment are covered by insurance against fire and other risks under certain package policies issued by third parties. As of December 31, 2022 and 2021, LPEI has obtained insurance coverage from PT Asuransi Sinarmas with sum insured amounting to nil and Rp241, PT Asuransi Central Asia with sum insured amounting to Rp7,315 and Rp215,760, PT Askindo with sum insured amounting Rp147,149 and Nil, and PT BRI Asuransi Indonesia with sum insured amounting to nil and Rp6,480. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses arising from insured premises and equipment.

Based on Management's assessment, there are no events or changes in circumstances which may indicate any impairment in the value of premises and equipment as of December 31, 2022 and 2021.

LPEI leases several assets including office buildings, official houses, and vehicles. The average lease period based on the contracts held by LPEI is 2.5 years. LPEI also has certain leases with lease terms of 12 months or less and leases of low value assets. LPEI applies exemptions a license for short term leases and low value leases for these leases.

Short-term rental expenses for the years ended December 31, 2022 and 2021 which include exception in PSAK 73 amounted to Rp22,829 and Rp25,211, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

14. Aset Lain-lain

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Rupiah		
Bunga yang masih akan diterima:		
Penempatan pada bank	22,417	18,831
Efek-efek	10,535	1,967
Uang muka	10,011	12,453
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp149.399 dan Rp22.410 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	2,712	126,989
Uang jaminan	880	1,040
Lain-lain	4,703	6,563
	<u>51,258</u>	<u>167,843</u>
Mata uang asing		
Bunga yang masih akan diterima:		
Penempatan pada bank	418	815
Efek-efek	4,235	4,384
Uang muka	575	4
Lain-lain	2,803	9,138
	<u>8,031</u>	<u>14,341</u>
Total	<u>59,289</u>	<u>182,184</u>

14. Other Assets

Rupiah
Accrued interest receivable:
Placements with banks
Securities
Advances
Foreclosed assets, net of allowance for impairment losses of Rp149,399 and Rp22,410 as of December 31, 2022 and 2021
Refundable deposits
Others
Foreign currencies
Accrued interest receivable:
Placements with banks
Securities
Advances
Others
Total

15. Perpajakan
a. Pajak di bayar di muka

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Pajak penghasilan badan		
Tahun 2020	--	75,806
Tahun 2021	865	865
Total	<u>865</u>	<u>76,671</u>

15. Taxes
a. Prepaid taxes

Corporate income tax
Year 2020
Year 2021
Total

b. Utang pajak

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
PPh Pasal 21	5,988	7,814
PPh Pasal 22	1	99
PPh Pasal 23	154	302
PPh Pasal 26	4,769	2,923
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	353	1,798
PPh Pasal 4(2)	2	14
Total	<u>11,267</u>	<u>12,950</u>

b. Taxes payable

Income Tax Article 21
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23
Income Tax Article 26
Value Added Tax (VAT)
Income Tax Article 4(2)
Total

c. (Beban)/manfaat pajak

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Pajak tangguhan	(1,222,189)	(21,643)
Beban pajak	<u>(1,222,189)</u>	<u>(21,643)</u>

c. Tax (expense)/benefit

Deferred tax
Tax expense

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)**c. (Beban)/manfaat pajak (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum beban pajak, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
(Rugi)/Laba sebelum beban pajak	(1.892.365)	409.039
Perbedaan waktu:		
Penyisihan/(pembalikan)		
cadangan kerugian penurunan		
nilai aset produktif untuk		
pembiayaan dan piutang dan		
pembiayaan/piutang syariah	(956.499)	139.882
Penyisihan imbalan kerja	(9.226)	10.871
Penyusutan aset tetap	10.269	8.167
Estimasi klaim asuransi	297	1.241
Estimasi klaim penjaminan	651	96
Penyisihan/cadangan		
kerugian piutang		
pembiayaan garansi	3.705	32.917
Penyisihan/cadangan		
kerugian piutang		
tresuri	(1.665)	(16.110)
Penyisihan/cadangan		
kerugian piutang		
akseptasi	(1.707)	(2.400)
Penyisihan/cadangan		
kerugian piutang PEN	--	22.409
Penyisihan/cadangan		
kerugian piutang AYDA	126.989	--
	(827.186)	197.073
Perbedaan tetap:		
Kenikmatan pegawai	26.603	33.452
Hubungan masyarakat	3.719	3.125
Aktivitas karyawan	387	599
Jamuan dan representasi	1.014	1.037
Lain-lain	16.553	10.931
	48.276	49.144
Penghasilan yang sudah		
dikenakan pajak final	(299.464)	(315.164)
(Rugi)/laba fiskal sebelum		
kompensasi rugi fiskal	(2.970.739)	340.092
Rugi fiskal yang dikompensasi	--	(340.092)
(Rugi)/laba fiskal		
setelah kompensasi rugi fiskal	(2.970.739)	--
Beban pajak kini	--	--
Dikurangi pajak penghasilan		
dibayar dimuka Pasal 23	--	(865)
Lebih bayar tahun berjalan	--	(865)
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya		
Tahun 2018	--	(309.885)
Tahun 2019	(4.740.685)	(4.770.892)
Tahun 2020	(334.775)	(348.917)
Tahun 2022	(2.970.739)	--
Akumulasi rugi fiskal	(8.046.199)	(5.429.694)

15. Taxes (continued)**c. Tax (expense)/benefit (continued)**

A reconciliation between (loss)/profit before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2022 and 2021, are as follows:

(Loss)/Profit before tax expense
Timing differences:
Provision for/(reversal of)
impairment losses
on earning assets
for financing and receivables
and sharia financing/receivables
Provision for employee benefits
Depreciation of premises and equipment
Estimated insurance claim
Estimated guarantee claim
Provision for/allowance for
financing receivables
impairment guarantee
Provision for/allowance for
impairment
treasury receivables
Provision for/allowance for
impairment
acceptance
Provision for/allowance for
impairment PEN receivables
Provision for/allowance for
impairment AYDA receivables
Permanent differences:
Employees' benefits in kind
Public relationship
Employee activities
Representation and entertainment
Others
Income subject to final tax
Fiscal (loss)/profit
before fiscal loss compensation
Compensated fiscal loss
Fiscal (loss)/profit
after fiscal loss compensation
Current tax expense
Less prepaid taxes
Article 23
Overpayment current year

Accumulated prior year's fiscal loss
Year 2018
Year 2019
Year 2020
Year 2022
Accumulated fiscal loss

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)

c. (Beban)/manfaat pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak bulan Desember 2021 sebesar Rp865 merupakan kelebihan pembayaran pajak tahun 2021 yang belum diterima.

Tarif pajak penghasilan LPEI menggunakan tarif pajak tunggal 22% untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan No. 07 tahun 2021.

Pajak atas laba sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba dalam jumlah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
(Rugi)/laba sebelum beban pajak	(1,892,365)	409,039
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	416,320	(89,989)
Pengaruh pajak atas beda tetap		

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2021 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan LPEI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). LPEI telah melaporkan SPT tahun 2021 kepada KPP pada tanggal 28 April 2022.

15. Taxes (continued)

c. Tax (expense)/benefit (continued)

Claims for excess tax refund as of December 2021 amounting to Rp865 are 2021 tax over payment which has not been received.

LPEI's income tax rate is calculated using single tax rate of 22% for the fiscal years ended December 31, 2022 and 2021, based on Tax Harmonization Law No. 07 Year 2021.

The tax on profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits as follows:

(Loss)/profit before tax expense
Corporate income tax based on
the prevailing tax rate
Effect of tax on permanent

Estimated taxable income in 2021 is consistent with Annual Tax Return (SPT) for corporate income tax reported by LPEI to Tax Office (KPP). LPEI has reported its SPT fiscal year 2021 to the tax office on April 28, 2022.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)**d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto**

	31 Desember/ December 31, 2022				
	1 Januari/ January 1	Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charged to profit or loss	Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive (loss) income	31 Desember/ December 31	
Liabilitas atas imbalan kerja	34,689	(2,029)	(866)	31,794	Liability for employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	1,676,073	(210,430)	--	1,465,643	Allowance for impairment losses on earning assets
Estimasi klaim penjaminan	1,964	143	--	2,107	Estimated guarantee claim
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	(7,465)	--	8,420	955	Unrealized gain on available-for-sale securities - net
Estimasi klaim asuransi	577	65	--	642	Estimated insurance claim
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain - lain	1,761	--	--	1,761	Allowance for impairment losses on other receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	8,835	815	--	9,650	Allowance for impairment losses on guarantee receivables
Aset tetap	5,132	2,260	--	7,392	Premises and equipment
Rugi fiskal	1,040,210	(1,040,210)	--	--	Fiscal loss
Cadangan kerugian penurunan nilai treasury	487	(375)	--	112	Allowance for impairment losses on treasury
Cadangan kerugian penurunan nilai akseptasi	420	(366)	--	54	Allowance for impairment losses on acceptance
Cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	4,930	27,938	--	32,868	Allowance for impairment losses on AYDA
Neto	2,767,613	(1,222,189)	7,554	1,552,978	Net

	31 Desember/ December 31, 2021					
	1 Januari/ January 1	Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charged to profit or loss	Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive (loss) income	Penyesuaian tarif pajak dari 20% ke 22% Tax rates adjustments from 20% to 22%	31 Desember/ December 31	
Liabilitas atas imbalan kerja	36,512	2,391	(7,865)	3,651	34,689	Liability for employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	1,645,300	30,773	--	--	1,676,073	Allowance for impairment losses on earning assets
Estimasi klaim penjaminan	1,943	21	--	--	1,964	Estimated guarantee claim
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	(11,128)	--	3,663	--	(7,465)	Unrealized gain on available-for-sale securities - net
Estimasi klaim asuransi	304	273	--	--	577	Estimated insurance claim
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain - lain	1,761	--	--	--	1,761	Allowance for impairment losses on other receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	1,593	7,242	--	--	8,835	Allowance for impairment losses on guarantee receivables
Aset tetap	3,335	1,797	--	--	5,132	Premises and equipment
Rugi fiskal	1,108,858	(157,354)	--	88,706	1,040,210	Fiscal loss
Cadangan kerugian penurunan nilai treasury	4,032	(3,545)	--	--	487	Allowance for impairment losses on treasury
Cadangan kerugian penurunan nilai akseptasi	948	(528)	--	--	420	Allowance for impairment losses on acceptance
Cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	--	4,930	--	--	4,930	Allowance for impairment losses on AYDA
Neto	2,793,458	(114,000)	(4,202)	92,357	2,767,613	Net

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan seluruhnya dapat dipulihkan.

Management believes that the deferred tax assets are fully realizable.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)
e. Pemeriksaan pajak
Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
**1. Surat keputusan DJP PPh 25/29 tahun
pajak 2010**

LPEI mengajukan permohonan restitusi lebih bayar tahun pajak 2010 sebesar Rp124.075. Dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00013/406/10/093/12 tanggal 26 April 2012, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan pengembalian kepada LPEI sebesar Rp52.240.

Selisih antara permohonan restitusi lebih bayar tahun pajak 2010 dengan SKP disebabkan karena koreksi cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang tahun pajak 2010 sebesar Rp71.835.

LPEI telah mengajukan permohonan keberatan dan banding sebesar Rp71.835 terkait cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang yang diperbolehkan untuk dibiayakan.

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI menerima Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPh Badan Tahun 2010 No. Put.59987/PP/M.IVB/15/ 2015 yang diumumkan tanggal 5 Maret 2015. Pengadilan Pajak Republik Indonesia mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPLB PPh Badan Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Surat / Letter Number	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan/ Tax Assessment Letter canceled by Tax Court	Dana yang dikembalikan/ Tax Refund	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number
Put.59987/PP/M.IVB/15/2015	SKPLB PPh Badan Tahun 2010 Nomor 00013/406/10/093/12	75,508	Put.59987/PP/M.IVB/15/2015

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan Putusan Pengadilan Pajak atas SKPLB PPh Badan tahun 2010 sebesar Rp75.508 (sebelumnya LPEI mencatat klaim atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp71.835). Selisih sebesar Rp3.673, diakui sebagai penghasilan lain-lain.

15. Taxes (continued)
e. Tax assesment
Claims for tax refund
**1. DGT decision letter Income Tax
Article 25/29 fiscal year 2010**

LPEI submitted the overpayment tax refund for fiscal year 2010 amounting to Rp124,075. In the Tax Assesment overpaid Letter No. 00013/406/10/093/12 dated April 26, 2012, the Directorate General of Taxation has decided the tax refund to LPEI amounting to Rp52,240.

The difference in the overpayment of tax refund for fiscal year 2010 with SKP is due to the correction of allowance of impairment losses financing and receivables in fiscal year 2010 amounting to Rp71,835.

LPEI has filed the tax objection and tax appeal amounting to Rp71,835 regarding the correction of allowance of impairment losses financing and receivables.

On March 30, 2015, LPEI has received copies of the Tax Court decision on corporate income tax year 2010 No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 which was pronounced on March 5, 2015. Tax Court Republic of Indonesia granted the appeal of LPEI entirely on corporate income tax disputes in 2010, with details as follows:

On April 27, 2015, LPEI has received a refund from the state treasury in respect of the Tax Court Decision on overpayment of 2010 Corporate Income Tax amounting to Rp75,508 (previously LPEI recorded Tax Return Claim amounting to Rp71,835). The difference of Rp3,673, has been recognized as other income.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)****Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)****1. Surat keputusan DJP PPh 25/29
tahun pajak 2010 (lanjutan)**

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPh Badan tahun 2010 yang terdiri dari:

Nomor Surat / Letter Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assessment Letter cancelled by Tax Court	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number
MPK-2119T/PAN.Wk/2016	S- 3566/PJ.07/2015	SKPLB PPh tahun 2010 No. 00013/406/10/093/12	59990/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2016.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan 31 Desember 2022, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Putusan Pengadilan Pajak PPh Badan tahun 2010.

**2. Surat keputusan DJP PPN tahun
pajak 2010**

Pada tanggal 26 April 2012, LPEI telah menerima beberapa SKP dan STP PPN dengan total seluruhnya sebesar Rp34.283 dengan rincian sebagai berikut:

15. Taxes (continued)**e. Tax assesment (continued)****Claims for tax refund (continued)****1. DGT decision letter Income Tax
Article 25/29 fiscal year 2010
(continued)**

On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of Corporate Income Tax 2010 submitted by Directorate General of Taxes are:

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016.

Until the date of completion of the financial statement as of December 31, 2022, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of Corporate Income Tax 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

**2. DGT decision letter VAT fiscal year
2010**

On April 26, 2012, LPEI has received several TALs and TCL of VAT amounting to Rp34,283 as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)**

**2. Surat keputusan DJP PPN tahun
pajak 2010 (lanjutan)**

	<u>Pokok/ Principal (Rp)</u>	<u>Denda/ Penalty (Rp)</u>
Tahun pajak 2010		
SKP PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	7,201	3,457
SKP PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	5,433	2,608
SKP PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	7,772	3,731
STP PPN Masa Januari 2010 No. 00037/107/10/093/12	--	1,440
STP PPN Masa Februari 2010 No. 00038/107/10/093/12	--	1,087
STP PPN Masa Maret 2010 No. 00039/107/10/093/12	--	1,554
Total	20,406	13,877

LPEI mengajukan keberatan dan banding atas penetapan SKPKB PPN tahun pajak 2010, karena atas pendapatan bunga dari pemberian pinjaman kepada debitur tidak terutang PPN sesuai UU PPN No. 18 tahun 2000.

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI menerima Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPN masa pajak Januari 2010, Februari 2010, dan Maret 2010 dengan putusan mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPKB PPN masa Januari sampai dengan Maret 2010 dengan rincian sebagai berikut:

<u>Nomor keputusan Pengadilan pajak</u>	<u>Surat Ketetapan yang dibatalkan/ Tax Assesment Letter canceled by Tax Court</u>	<u>Dana yang dikembalikan/ Tax Refund</u>	<u>Tax court decision number</u>
59988/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	10,658	59988/PP/M.IVB/16/2014
59989/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	8,041	59989/PP/M.IVB/16/2014
59990/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	11,503	59990/PP/M.IVB/16/2014
Total		30,202	Total

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

**2. DGT decision letter VAT fiscal year
2010 (continued)**

	<u>Pokok/ Principal (Rp)</u>	<u>Denda/ Penalty (Rp)</u>
Fiscal year 2010		
TAL PPN January 2010 No. 00068/207/10/093/12	7,201	3,457
TAL PPN February 2010 No. 00069/207/10/093/12	5,433	2,608
TAL PPN March 2010 No. 00070/207/10/093/12	7,772	3,731
TCL PPN January 2010 No. 00037/107/10/093/12	--	1,440
TCL PPN February 2010 No. 00038/107/10/093/12	--	1,087
TCL PPN March 2010 No. 00039/107/10/093/12	--	1,554
Total	20,406	13,877

LPEI appealed against the assesment of underpayment of VAT in fiscal year 2010, because the interest income from financing and receivables to debtors is not subject to VAT according to VAT Law No. 18 year 2000.

On March 30, 2015, LPEI has received the Tax Court decision on the dispute for VAT tax period in January 2010, February 2010, and March 2010 with the decision to approve entirely the appeal of LPEI on the tax Assesment over the period from January to March 2010 with the following details:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)****Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)****2. Surat keputusan DJP PPN tahun
pajak 2010 (lanjutan)**

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan pembatalan SKPKB PPN masa Januari sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp30.202.

Sehubungan perkara sengketa pajak PPN masa Januari 2010, Februari 2010, dan Maret 2010 telah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan pasal 34 Putusan Menteri Keuangan nomor PMK.8/PMK.03/2013 maka, atas STP PPN secara otomatis akan dibatalkan secara jabatan oleh Kantor Pajak.

Pada tanggal 17 September 2015, LPEI menerima Surat Keputusan Pembatalan STP secara jabatan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Surat / Letter Number	Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan Pengadilan Pajak/ (Tax Assesment Letter canceled by Tax Court)	Jumlah nominal/ Nominal amount	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number
Kep 1673/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09/2015	STP PPN Masa Januari 2010 No. 00037/107/10/093/12	1,440	59988/PP/M.IVB/16/2014
Kep-1674/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Februari 2010 No. 00038/107/10/093/12	1,087	59989/PP/M.IVB/16/2014
Kep-1675/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Maret 2010 No. 00039/107/10/093/12	1,554	59990/PP/M.IVB/16/2014
		4,081	

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN tahun 2010 yang terdiri dari:

Nomor Surat / Letter Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax court decision Number
MPK-2116T/PAN.WK/2016	S- 3563/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	59987/PP/M.IVB/15/2015

15. Taxes (continued)**e. Tax assesment (continued)****Claims for tax refund (continued)****2. DGT decision letter VAT fiscal year
2010 (continued)**

On April 27, 2015, the LPEI has received a refund from the state treasury in respect of the cancellation of SKPKB OON the tax Assesment period from January to March 2010 amounting to Rp30,202.

In respect of past VAT tax dispute case in January 2010, February 2010, and March 2010 had been granted entirely by the Tax Court, then in accordance with article 34 of Decision of the Minister of Finance number PMK.8/PMK.03/2013, the sanction (STP) of Value Added Tax automatically canceled by the office of the Tax Office.

On September 17, 2015, LPEI has received a Letter of Cancellation of STP from Directorate General of Taxation with the following details:

On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case in 2010 of VAT. The Judicial Review from Directorate General of Tax consists of:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)****Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)****2. Surat keputusan DJP PPN tahun
pajak 2010 (lanjutan)**

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2016. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak atas kasus sengketa pajak PPh Badan dan PPN tahun 2010 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 4 September 2017, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Februari 2010.

Nomor Surat / Letter Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation
MPK-2118/PAN/2017	S- 3573/PJ.07/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

Pada tanggal 20 Mei 2021, LPEI menerima Putusan Mahkamah Agung No. 477/B/PK/Pjk/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang memutuskan menolak Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak No. Put-59989/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Februari 2010.

15. Taxes (continued)**e. Tax assesment (continued)****Claims for tax refund (continued)****2. DGT decision letter VAT fiscal year
2010 (continued)**

In connection with the above Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum over memory reconsideration which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016. Until the date of the finalization of this financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case of Corporate Income Tax and VAT in 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

On September 4, 2017, LPEI has received letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of VAT for Period February 2010.

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/ Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court
SKPKB PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12

Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number
59989/PP/M.IVB/16/2015

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.

On May 20, 2021 LPEI received Indonesia Supreme Court Decision No. 477/B/PK/Pjk/2021 dated March 18, 2021 and the Supreme Court has decided to refuse Judicial Review Directorate General of Taxation No. Put- 59989/PP/M.IVB/16/2015 dated March 5, 2015 regarding Tax Assesments Letter of VAT for the period Februari 2010.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)****Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)****2. Surat keputusan DJP PPN tahun
pajak 2010 (lanjutan)**

Pada tanggal 28 Januari 2019, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Januari 2010.

Nomor Surat / Letter Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assessment Letter cancelled by Tax Court	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number
MPK-2117/PAN.WK/2019	S- 3574/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	59988/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak terhadap sengketa PPN Masa Januari dan Maret 2010.

**3. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan
Tahun 2019**

SPT Tahunan PPh badan tahun 2019 yang dilaporkan oleh LPEI adalah SPT lebih bayar pajak penghasilan Badan.

Pada tanggal 10 Agustus 2020, LPEI menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2019 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tanggal 20 April 2021, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan permohonan lebih bayar LPEI tahun Pajak 2019 sebesar Rp93.267.

15. Taxes (continued)**e. Tax assesment (continued)****Claims for tax refund (continued)****2. DGT decision letter VAT fiscal year
2010 (continued)**

On January 28, 2019, LPEI received a letter from the Tax Court regarding the Notice of Review Application and Submission of Review Memory on the January 2010 VAT tax dispute case.

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.

Until the date of completion of the consolidated financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of VAT January and March 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

**3. The Result of 2019 Corporate
Income Tax**

The 2019 corporate income tax reported by LPEI is an overpayment of corporate income tax.

On August 10, 2020, LPEI received Tax Audit Warrant for all types of tax for the 2019 tax year from the Directorate General of Taxes.

Based on the Tax Overpayment Assesment Letter dated April 20, 2021, The Directorate General of Taxation approved LPEI's Claim 2019 for the tax overpayment amounting Rp93,267.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)****Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)****3. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan
Tahun 2019 (lanjutan)**

Namun demikian, pengembalian atas lebih bayar tersebut dikurangi dengan pembayaran kurang bayar pajak PPh Pasal 23, PPh 26, dan PPN Barang dan Jasa atas barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dengan jumlah pengurangan total Rp203. Sehingga jumlah uang yang dikembalikan ke LPEI adalah sebesar Rp93.064. Sedangkan, hasil pemeriksaan pajak tahun 2019 atas PPh Pasal 21, 22, 4 (2), PPN, dan PPN Pemungut adalah SKP Nihil.

Pada tanggal 19 Mei 2021, LPEI menerima transfer dari kas negara atas pengembalian pajak PPh Badan tahun 2019 sebesar Rp93.062 setelah dikurangi utang pajak yang belum dibayar.

Hasil Pemeriksaan pajak PPh Badan Tahun 2019 dan Rugi fiskal tahun 2019 yang diakui Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

	Pengembalian Pajak/ Tax Return	Rugi Fiskal/ Fiscal Loss
Tahun Pajak 2019		
SKPLB PPh Badan		
No. 00021/406/19/093/21	93,267	(4,770,892)
Total	93,267	(4,770,892)

**4. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan
Tahun 2020**

SPT Tahunan PPh badan tahun 2020 yang dilaporkan LPEI adalah SPT Lebih Bayar PPh Badan.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 29 Desember 2021, LPEI menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2020 dari Direktorat Jenderal Pajak.

15. Taxes (continued)**e. Tax assesment (continued)****Claims for tax refund (continued)****3. The Result of 2019 Corporate
Income Tax (continued)**

However, the tax overpayment was offset by the underpayment of tax articles 23, 26 and VAT on taxable intangible goods and services out of custom area with a total reduction Rp203. So the amount transferred to LPEI Rp93,064. Whereas the results of 2019 tax audits article 21, 22, 4(2), VAT, and VAT Collecting Tax are Zero Tax Assesment Letter.

On May 19, 2021, LPEI received transfer from Government Treasury for 2019 Corporate Income Tax refund amounting to Rp93,062 after deducting the unpaid tax debt.

The result of 2019 Tax Overpayment Assesment Letter Corporate Income Tax and 2019 Fiscal Loss recognized by Directorate General of Taxation as follow:

Fiscal Year 2019
TAL Tax Return
No. 00021/406/19/093/21
Total

**4. The Result of 2020 Corporate Income
Tax**

Annual notification letter of corporate income tax year 2020 corporate income tax return reported by LPEI is an overpayment of corporate income tax.

Based on these, on December 29, 2021, LPEI received Tax Audit Letter for all types of tax for the 2020 tax year from the Directorate General of Taxes.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)****Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)****4. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan
Tahun 2020 (lanjutan)**

Melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tanggal 18 Mei 2022, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan permohonan lebih bayar LPEI tahun Pajak 2020 sebesar Rp75.806. Namun demikian pengembalian atas lebih bayar tersebut dikurangi dengan pembayaran kurang bayar pajak PPh pasal 22, pasal 23, final pasal 4 ayat (2) dan PPN Barang dan Jasa atas barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dengan jumlah pengurangan total Rp93 sehingga jumlah uang yang dikembalikan ke LPEI adalah sebesar Rp75.713. Sedangkan hasil pemeriksaan pajak tahun 2020 atas PPh pasal 21, 21 Final, 26, dan PPN Pemungut adalah SKP Nihil.

Pada tanggal 24 Juni 2022, LPEI menerima transfer dari kas negara atas pengembalian pajak PPh Badan tahun 2020 sebesar Rp75.713 setelah dikurangi utang pajak yang belum dibayar.

Hasil Pemeriksaan pajak PPh Badan Tahun 2020 dan Rugi fiskal tahun 2020 yang diakui Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

	Pengembalian Pajak/ Tax Return	Rugi Fiskal/ Fiscal Loss
Tahun Pajak 2020		
SKPLB PPh Badan		
No. 00037/406/20/093/22	75,806	(334,775)
Total	75,806	(334,775)

15. Taxes (continued)**e. Tax assesment (continued)****Claims for tax refund (continued)****4. The Result of 2020 Corporate Income
Tax (continued)**

Based on the Tax Overpayment Assesment Letter dated May 18, 2022, The Directorate General of Taxation approved LPEI's Claim 2020 for the tax overpayment amounting Rp75,806. However, the tax overpayment was offset by the underpayment of income tax article 22, article 23, article final 4(2) and VAT on taxable intangible goods and services out of custom area with a total reduction of Rp93 so the amount transferred to LPEI Rp75,713. Whereas the results of 2020 tax audits article 21, 21 Final, 26, and VAT Collecting Tax are Zero Tax Assesment Letter.

On June 24, 2022, LPEI received transfer from Government Treasury for 2020 Corporate Income Tax refund amounting to Rp75,713 after deducting the unpaid tax debt.

The result of 2020 Tax Overpayment Assesment Letter Corporate Income Tax and 2020 Fiscal Loss recognized by Directorate General of Taxation as follow:

Fiscal Year 2020
TAL Tax Return
No. 00037/406/20/093/22
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)**

**5. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan
Tahun 2021**

SPT Tahunan PPh badan tahun 2021 yang dilaporkan LPEI adalah SPT Lebih Bayar PPh Badan.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2022, LPEI menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dengan No:S-881/KPP.1904/2022 untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2021 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan 31 Desember 2022, LPEI belum menerima Putusan Pemeriksaan Pajak 2021 oleh Direktorat Jenderal Pajak.

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

5. The Result of 2021 Corporate Income Tax

The 2021 corporate income tax return reported by LPEI is an overpayment of corporate income tax.

Based on this, on August 25, 2022, LPEI received Tax Audit Letter for all types of tax No: S-881/KPP.1904/2022 for the 2021 tax year from from the Directorate General of Taxes.

Until the date of completion of the financial statement as of December 31, 2022, LPEI has not received Tax Audit Letter for all types of tax proposed by the Directorate General of Taxes

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan tempat terdaftar adalah sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued

The details of debt securities issued based on listed country location are as follows:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Dalam Negeri			Domestic
Rupiah	17,514,428	20,597,711	Rupiah
Luar negeri			Overseas
Dolar Amerika Serikat	7,776,244	7,114,678	United States Dolar
Total	25,290,672	27,712,389	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan
berdasarkan jenis dan mata uang adalah
sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

The details of debt securities issued based on
type and currency are as follows:

Nilai nominal Rupiah	31 Desember / December 31,		Nominal value Rupiah
	2022	2021	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016 Seri D	1,038,000	1,038,000	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV - 2017 Seri C	--	748,000	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series C
Seri D	1,007,000	1,007,000	Series D
Seri E	1,266,000	1,266,000	Series E
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017 Seri B	--	436,000	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series B
Seri C	1,786,000	1,786,000	Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018 Seri B	1,650,000	1,650,000	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series B
Seri C	206,000	206,000	Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018 Seri B	35,000	35,000	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B
Seri C	1,756,000	1,756,000	Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II - 2018 Seri C	275,700	275,700	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C
Seri D	1,324,000	1,324,000	Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018 Seri C	28,000	28,000	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C
Seri D	380,000	380,000	Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019 Seri B	--	935,000	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Seri C	1,523,000	1,523,000	Series C
Seri D	278,000	278,000	Series D
Seri E	349,000	349,000	Series E
Seri F	625,000	625,000	Series F
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019 Seri B	--	621,000	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Seri C	330,000	330,000	Series C
Seri D	737,000	737,000	Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019 Seri B	--	15,000	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Seri C	6,000	6,000	Series C
Seri D	714,500	714,500	Series D

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

16. Debt Securities Issued (continued)

	31 Desember/December 31		
	2022	2021	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			Indonesia Eximbank Phase VII
Eximbank IV Tahap VII - 2019			Shelf Registration Offering IV - 2019
Seri B	--	101,300	Series B
Seri C	25,500	25,500	Series C
Seri D	112,000	112,000	Series D
Seri E	219,750	219,750	Series E
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			Indonesia Eximbank Phase VIII
Eximbank IV Tahap VIII - 2019			Shelf Registration Offering IV - 2019
Seri A	--	88,000	Series A
Seri B	1,551,000	1,551,000	Series B
Seri C	22,500	22,500	Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			Indonesia Eximbank Phase I
Eximbank V Tahap I - 2020	48,000	48,000	Shelf Registration Offering V - 2020
	<u>17,292,950</u>	<u>20,237,250</u>	
Dikurangi:			Less:
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(13,522)	(19,539)	Unamortized bonds issuance cost
	<u>(13,522)</u>	<u>(19,539)</u>	
	<u>17,279,428</u>	<u>20,217,711</u>	
Sukuk Mudharabah			Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan			Sukuk Mudharabah Phase II
Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018			Shelf Registration Offering I - 2018
Seri C	14,000	14,000	Series C
Seri D	155,000	155,000	Series D
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan			Sukuk Mudharabah Phase III
Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019			Shelf Registration Offering I - 2019
Seri B	--	145,000	Series B
Seri C	66,000	66,000	Series C
	<u>235,000</u>	<u>380,000</u>	
Total Rupiah	17,514,428	20,597,711	Total Rupiah
Dolar Amerika Serikat			United States Dollars
Obligasi berkelanjutan			Continuous bonds
EMTN Program IEB - 2017			IEB EMTN Programme - 2017
(USD500,000,000)	7,783,750	7,126,250	(USD500,000,000)
Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(2,742)	(4,160)	Unamortized bonds discount
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(4,764)	(7,412)	Unamortized bonds issuance cost
	<u>(7,506)</u>	<u>(11,572)</u>	
Total Dolar Amerika Serikat	7,776,244	7,114,678	Total United States Dollars
Neto	25,290,672	27,712,389	Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan
berdasarkan pihak-pihak:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Pihak berelasi (Catatan 39)		
Obligasi	4,967,000	4,995,000
Sukuk Mudharabah	75,000	75,000
	<u>5,042,000</u>	<u>5,070,000</u>
Pihak ketiga		
Obligasi	12,325,950	15,242,250
Sukuk Mudharabah	160,000	305,000
European Medium Term Notes (EMTN)	7,783,750	7,126,250
	<u>20,269,700</u>	<u>22,673,500</u>
Total	<u>25,311,700</u>	<u>27,743,500</u>
Dikurangi:		
Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(2,742)	(4,160)
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(18,286)	(26,951)
	<u>(21,028)</u>	<u>(31,111)</u>
Neto	<u>25,290,672</u>	<u>27,712,389</u>

16. Debt Securities Issued (continued)

The details of debt securities issued based on
parties:

Related parties (Note 39)	
Bonds	
Sukuk Mudharabah	
Third parties	
Bonds	
Sukuk Mudharabah	
European Medium Term Notes (EMTN)	
Total	
Less:	
Unamortized bonds discount	
Unamortized bonds issuance cost	
Net	

**a. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap III 2016**

Pada bulan November 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.532.000 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Indonesia Eximbank Phase III Shelf
Registration Offering III 2016**

In November 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 with a face value of Rp2,532,000, with details as follows:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rupiah	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016				Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri A	672,000	2 Desember/ December 2017	7.15% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri B	540,000	22 November/ November 2019	7.85% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri C	282,000	22 November/ November 2021	8.20% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri D	1,038,000	22 November/ November 2023	8.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series D

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

**a. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap III 2016 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 November 2016. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 2 Desember 2017, 22 November 2019, dan 22 November 2021.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III – 2016 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 sebesar Rp4.093 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

**a. Indonesia Eximbank Phase III Shelf
Registration Offering III 2016
(continued)**

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on November 23, 2016. Interest is payable quarterly starting on February 22, 2017.

IEB Phase III Shelf Registration Offering III 2016 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on December 2, 2017, November 22, 2019, and November 22, 2021, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 were used to III-2016 finance earning productive assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 amounting to Rp4,093 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****b. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap IV 2017**

Pada bulan Februari 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp5.221.000, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV - 2017				Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A	861,000	3 Maret/ March 2018	7.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri B	1,339,000	23 Februari/ February 2020	8.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri C	748,000	23 Februari/ February 2022	8.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri D	1,007,000	23 Februari/ February 2024	9.20% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri E	1,266,000	23 Februari/ February 2027	9.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series E

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A, B, dan C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Maret 2018, 23 Februari 2020, dan 23 Februari 2022.

16. Debt Securities Issued (continued)**b. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf
Registration Offering III 2017**

In February 2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp5,221,000, with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on February 24, 2017. Interest is payable quarterly starting on May 23, 2017.

IEB Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on March 3, 2018, February 23, 2020, and February 23, 2022, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**
**b. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap IV 2017 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 sebesar Rp6.556 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**c. Euro Medium-Term Note (EMTN)
Programme Indonesia Eximbank 2017**

Pada bulan April 2017, LPEI menerbitkan Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank – 2017 dengan nilai nominal sebesar USD500,000,000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017	USD500,000,000	6 April/ April 2024	3.87% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017

EMTN Programme Indonesia Eximbank – 2017 ini merupakan bagian dari Euro Medium Term Note (EMTN) Programme dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar USD1,500,000,000.

16. Debt Securities Issued (continued)
**b. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf
Registration Offering III 2017
(continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp6,556 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**c. Indonesia Eximbank Euro Medium-
Term Note (EMTN) Programme 2017**

In April 2017, LPEI issued the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme 2017 with a face value of USD500,000,000 with details as follows:

The Indonesia Eximbank EMTN Programme – 2017 is part of the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme with fixed interest rate and targeted funds to be raised amounted to USD1,500,000,000.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****c. Euro Medium-Term Note (EMTN)
Programme Indonesia Eximbank 2017
(lanjutan)**

Jadwal pembayaran bunga adalah semesteran dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017. EMTN Programme Indonesia Eximbank – 2017 tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Penerbitan EMTN Indonesia Eximbank – 2017 telah dinyatakan efektif mulai tanggal 7 April 2017.

Bertindak sebagai wali amanat EMTN Programme Indonesia Eximbank 2017 adalah *The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited*. Bertindak sebagai *Join Lead Managers (JLM)* emisi *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017* adalah *The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited*, *Overseas Chinese Banking Corporation* dan *Mitsubishi UFJ Securities International*. Penerimaan neto dari penerbitan EMTN Programme Indonesia Eximbank 2017 digunakan untuk membayar utang yang telah ada, pembiayaan operasional dan produktif, dan untuk kegunaan umum LPEI.

LPEI mencatat beban emisi EMTN Programme Indonesia Eximbank-2017 sebesar USD1,405,097 dan diskonto sebesar USD860,000 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi EMTN Programme Indonesia Eximbank – 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, EMTN Programme Indonesia Eximbank 2017 memiliki peringkat “BBB” dari Fitch dan “Baa2” dari Moody’s Investor Inc.

16. Debt Securities Issued (continued)**c. Indonesia Eximbank Euro Medium-Term
Note (EMTN) Programme 2017
(continued)**

Interest is payable semi-annually starting on October 6, 2017. The Indonesia Eximbank EMTN Programme-2017 is listed in the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The offering of the Indonesia Eximbank EMTN Programme – 2017 was declared effective since April 7, 2017.

The trustee for the Indonesia Eximbank EMTN -2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. The Join Lead Managers (JLM) for the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme – 2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited, Overseas Chinese Banking Corporation, and Mitsubishi UFJ Securities International. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank EMTN Programme – 2017 were used to refinance existing debt, finance its operations and earning assets, and for its general LPEI purposes.

LPEI recorded the issuance cost and discount on Indonesia Eximbank EMTN Programme 2017 amounting to USD1,405,097 and USD860,000, respectively, as a deduction from the proceeds of the Indonesia EMTN Programme – 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

As of December 31, 2022 and 2021, Indonesia Eximbank EMTN Programme 2017 were rated “BBB” by Fitch and “Baa2” by Moody’s Investor Inc.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

**d. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap V 2017**

Pada bulan Agustus 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.222.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017				Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri A	1,000,000	15 Agustus/ August 2020	7.60% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri B	436,000	15 Agustus/ August 2022	7.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri C	1,786,000	15 Agustus/ August 2024	8.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series C

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 15 November 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V – 2017 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Agustus 2020 dan 15 Agustus 2022.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V-2017 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

16. Debt Securities Issued (continued)

**d. Indonesia Eximbank Phase V Shelf
Registration Offering III 2017**

In August 2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp3,222,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on August 16, 2017. Interest is payable quarterly starting on November 15, 2017.

IEB Phase V Shelf Registration Offering III – 2017 Series A and B was fully paid upon maturity on August 15, 2020 and August 15, 2022, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****d. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap V 2017 (lanjutan)**

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 sebesar Rp4.333 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap VI 2018**

Pada bulan Februari 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.466.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018				Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri A	610,000	14 Februari/ February 2021	6.35% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri B	1,650,000	14 Februari/ February 2023	6.70% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri C	206,000	14 Februari/ February 2025	6.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series C

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 14 Februari 2021.

16. Debt Securities Issued (continued)**d. Indonesia Eximbank Phase V Shelf
Registration Offering III 2017
(continued)**

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp4,333 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**e. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf
Registration Offering III 2018**

In February 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 with a face value of Rp2,466,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on February 15, 2018. Interest is payable quarterly starting on May 14, 2018.

IEB Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 Series A was fully paid upon maturity on February 14, 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

**e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap VI 2018 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 sebesar Rp3.783 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Selama periode efektif PUB III, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VI dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp21.772.000 adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp2.228.000 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp24.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB III pada Laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018.

**f. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap I 2018**

Pada bulan Juni 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.729.000 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

**e. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf
Registration Offering III 2018
(continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 amounting to Rp3,783 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

During the Shelf Registration Offering Bond III period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VI with total funds raised amounting to Rp21,772,000, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp2,228,000 from target funds amounting to Rp24,000,000. In order to comply with OJK Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond III on LPEI's official Website and Indonesian Stock Exchange's (IDX) official Website LPEI on February 28, 2018.

**f. Indonesia Eximbank Phase I Shelf
Registration Offering IV 2018**

In June 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,729,000 with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****f. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap I 2018 (lanjutan)**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018				Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri A	938,000	6 Juni/ June 2021	7.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri B	35,000	6 Juni/ June 2023	7.70% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri C	1,756,000	6 Juni/ June 2025	8.30% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 September 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Juni 2021.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 sebesar Rp4.749, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)**f. Indonesia Eximbank Phase I Shelf
Registration Offering IV 2018
(continued)**

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on June 7, 2018. Interest is payable quarterly starting on September 6, 2018.

IEB Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 Series A was fully paid upon maturity on June 6, 2021.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp4,749, as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****g. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap II 2018**

Pada bulan September 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.514.100 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II - 2018				Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A	724,400	15 September/ September 2019	7.00% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri B	190,000	5 September/ September 2021	7.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri C	275,700	5 September / September 2023	8.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri D	1,324,000	5 September / September 2025	8.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 September 2019 dan 5 September 2021.

16. Debt Securities Issued (continued)**g. Indonesia Eximbank Phase II Shelf
Registration Offering IV 2018**

In September 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,514,100 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on September 6, 2018. Interest is payable quarterly starting on December 5, 2018.

IEB Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on September 15, 2019 and September 5, 2021 respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****g. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap II 2018 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 sebesar Rp3.912 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**h. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap III 2018**

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.004.000 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)**g. Indonesia Eximbank Phase II Shelf
Registration Offering IV 2018
(continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp3,912 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**h. Indonesia Eximbank Phase III Shelf
Registration Offering IV 2018**

In November 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp1,004,000 with details as follows:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018			Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri A	515,000	18 November/ November 2019	8.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri B	81,000	8 November/ November 2021	8.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri C	28,000	8 November/ November 2023	9.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri D	380,000	8 November/ November 2025	9.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

**h. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap III 2018 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 November 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III – 2018 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019 dan 8 November 2021.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 sebesar Rp2.996 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap II Tahun 2018 ("Sukuk Mudharabah Berkelanjutan") sebesar Rp630.500, dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

**h. Indonesia Eximbank Phase III Shelf
Registration Offering IV 2018
(continued)**

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on November 9, 2018. Interest is payable quarterly starting on February 8, 2019.

IEB Phase III Shelf Registration Offering IV – 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on November 18, 2019, and November 8, 2021, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp2,996 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

On November 2018, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II Year 2018 ("Shelf Sukuk Mudharabah") amounting to Rp630,500, with detail as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap II 2018**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Bagi hasil per tahun/ Profit sharing per annum
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018			
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri A	211,500	18 November/ November 2019	8.25%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri B	250,000	8 November/ November 2021	8.75%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri C	14,000	8 November/ November 2023	9.25%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri D	155,000	8 November/ November 2025	9.75%

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 43,42% dengan indikatif bagi hasil setara 8,25% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 46,05% dengan indikatif bagi hasil setara 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 48,68% dengan indikatif bagi hasil setara 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri D adalah sebesar 51,32% dengan indikatif bagi hasil setara 9,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia

16. Debt Securities Issued (continued)**i. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Sukuk Mudharabah I 2018**

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018
Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series A
Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series B
Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series C
Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series D

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 43.42% with profit sharing indicative equivalent at 8.25% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 46.05% with profit sharing indicative equivalent at 8.75% per annum, with 3 (three) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 48.68% with profit sharing indicative equivalent at 9.25% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series D at 51.32% with profit sharing indicative equivalent at 9.75% per annum with 7 (seven) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. This Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

**i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap II 2018
(lanjutan)**

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah seri A, B, C, dan D akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir pada tanggal jatuh tempo pokok masing-masing Sukuk Mudharabah yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019, dan 8 November 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI, baik barang bergerak, maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah, sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap II Tahun 2018.

16. Debt Securities Issued (continued)

**i. Indonesia Eximbank Phase II Shelf
Sukuk Mudharabah I 2018 (continued)**

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah Series A, B, C, and D will be paid on February 8, 2019, while the last profit sharing income payment on due date of each Sukuk Mudharabah and also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on November 18, 2019, and November 8, 2021, respectively.

As of December 31, 2022 and 2021, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as outlined in the Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II – 2018.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****j. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap IV 2019**

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.857.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019				Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri A	147,000	03 Mei/ May 2020	7.35% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri B	935,000	23 April/ April 2022	8.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri C	1,523,000	23 April/ April 2024	8.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri D	278,000	23 April/ April 2026	9.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri E	349,000	23 April/ April 2029	9.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri F	625,000	23 April/ April 2034	9.80% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series F

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV – 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020 dan 23 April 2022.

16. Debt Securities Issued (continued)**j. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf
Registration Offering IV 2019**

In April 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp3,857,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on April 24, 2019. Interest is payable quarterly starting on July 23, 2019.

IEB Phase IV Shelf Registration Offering IV – 2019 Series A and B were fully paid upon maturity on May 3, 2020, and April, 23, 2022, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****j. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap IV 2019 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 sebesar Rp7.525 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap III 2019**

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp441.000, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Bagi hasil per tahun/ Profit sharing per annum	Obligasi/ Bonds
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019				Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri A	230,000	03 Mei/ May 2020	7.35%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri B	145,000	23 April/ April 2022	8.40%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri C	66,000	23 April/ April 2024	8.90%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series C

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

16. Debt Securities Issued (continued)**j. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp7,525 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**k. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia
Eximbank Phase III 2019**

On April 2019, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III Year 2019 ("Sukuk Mudharabah") amounting to Rp441,000, with detail as follows:

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap III 2019
(lanjutan)**

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 38,68% dengan indikatif bagi hasil setara 7,35% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 44,21% dengan indikatif bagi hasil setara 8,40% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 46,84% dengan indikatif bagi hasil setara 8,90% per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah berkelanjutan seri A, B, dan C akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah berkelanjutan terakhir pada tanggal jatuh tempo pokok masing-masing Sukuk Mudharabah yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020 dan 23 April 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Debt Securities Issued (continued)**k. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia
Eximbank Phase III 2019 (continued)**

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 38.68% with profit sharing indicative equivalent at 7.35% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 44.21% with profit sharing indicative equivalent at 8.40% per annum with 3 (three) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 46.84% with profit sharing indicative equivalent at 8.90% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. This Shelf Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Shelf Sukuk Mudharabah Series A, B, and C will be paid on July 23, 2019, while the last profit sharing income payment on due date of each Shelf Sukuk Mudharabah and also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 Series A and B were fully paid upon maturity on May 3, 2020, and April, 23, 2022, respectively.

As of December 31, 2022 and 2021, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap III 2019
(lanjutan)**

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019.

**l. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap V 2019**

Pada bulan Juli 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019				Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A	312,000	19 Juli/ July 2020	7.45% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri B	621,000	9 Juli/ July 2022	8.45% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri C	330,000	9 Juli/ July 2024	8.70% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri D	737,000	9 Juli/ July 2026	9.20% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2019.

16. Debt Securities Issued (continued)**k. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia
Eximbank Phase III 2019 (continued)**

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as outlined in the Self Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III – 2019.

**l. Indonesia Eximbank Phase V Shelf
Registration Offering IV 2019**

In July 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp2,000,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on July 10, 2019. Interest is payable quarterly starting on October 9, 2019.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****l. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap V 2019 (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 19 Juli 2020, dan 9 Juli 2022.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 sebesar Rp3.594 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VI 2019**

Pada bulan September 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.018.500 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019				Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A	283,000	13 September/ September 2020	7.00% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri B	15,000	3 September/ September 2022	7.80% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri C	6,000	3 September/ September 2024	8.10% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri D	714,500	3 September / September 2026	8.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D

16. Debt Securities Issued (continued)**l. Indonesia Eximbank Phase V Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

IEB Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 Series A and B was fully paid upon maturity on July 19, 2020, and July 9, 2022, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,594 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**m. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf
Registration Offering IV 2019**

In September 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,018,500 with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

**m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VI 2019 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 13 September 2020 dan 3 September 2022.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 sebesar Rp3.040 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

**m. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on September 4, 2019. Interest is payable quarterly starting on December 3, 2019.

IEB Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 Series A and B was fully paid upon maturity on September 13, 2020 and September 3, 2020, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,040 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****n. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VII 2019**

Pada bulan Oktober 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.058.550, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019				Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A	600,000	9 November/ November 2020	7.00% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri B	101,300	29 Oktober/ October 2022	7.80% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri C	25,500	29 Oktober/ October 2024	8.10% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri D	112,000	29 Oktober/ October 2026	8.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri E	219,750	29 Oktober/ October 2029	8.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 November 2020 dan 29 Oktober 2022.

16. Debt Securities Issued (continued)**n. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf
Registration Offering IV 2019**

In October 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,058,550, with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on October 30, 2019. The interest payment is quarterly and the first payment was made on January 29, 2020.

Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 Series A and B were fully paid upon maturity on November 9, 2020, and October 29, 2022, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****n. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VII 2019 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 sebesar Rp4.238 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**o. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VIII 2019**

Pada bulan Desember 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.661.500 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019				Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri A	88,000	6 Desember/ December 2022	7.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri B	1,551,000	6 Desember/ December 2024	7.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri C	22,500	6 Desember/ December 2026	8.20% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C

16. Debt Securities Issued (continued)**n. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV-2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp4,238 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**o. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf
Registration Offering IV 2019**

In December 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,661,500 with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****o. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Desember 2022.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII – 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 sebesar Rp3.323, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Debt Securities Issued (continued)**o. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on December 9, 2019. The interest payment schedule is quarterly and the first payment was made on March 6, 2020.

IEB Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 Series A was fully paid upon maturity on December 6, 2022.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV – 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,323 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 and over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****o. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)**

Selama periode efektif PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VIII serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap IV dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp17.564.150, adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp14.435.850 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp32.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I pada laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020.

**p. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank V Tahap I 2020**

Pada bulan Juli 2020, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp48.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020				Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020	48,000	8 Juli/ July 2023	7.60% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp22.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

16. Debt Securities Issued (continued)**o. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

During the Shelf Registration Offering Bond IV and Sukuk Mudharabah I period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VIII and Shelf Sukuk Mudharabah Phase I to Phase IV with total funds raised amounting to Rp17,564,150, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp14,435,850 from target funds amounting to Rp32,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond IV and Sukuk Mudharabah I on LPEI's official website and Indonesia Stock Exchange official Website on March 27, 2020.

**p. Indonesia Eximbank Phase I Shelf
Registration Offering V 2020**

In July 2020, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 with a face value of Rp48,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering V with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp22,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**p. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank V Tahap I 2020 (lanjutan)**

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2020. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I – 2020 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 sebesar Rp905 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Selama periode efektif PUB Obligasi V dan PUB Sukuk Mudharabah II, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp148.000, adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp23.852.000 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp24.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan berakhirnya PUB Obligasi V dan PUB Sukuk Mudharabah II pada laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022.

16. Debt Securities Issued (continued)**p. Indonesia Eximbank Phase I Shelf
Registration Offering V 2020
(continued)**

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on July 9, 2020. The interest payment schedule is quarterly and the first payment was made on October 8, 2020.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V – 2020 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 amounting to Rp905 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

During the Shelf Registration Offering Bond V and Sukuk Mudharabah II period, LPEI has issued Bond Phase I and Shelf Sukuk Mudharabah Phase I with total funds raised amounting to Rp148,000, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp23,852,000 from target funds amounting to Rp24,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI has announced the end of Shelf Registration Offering Bond V and Sukuk Mudharabah II on LPEI's official website and Indonesia Stock Exchange's official website on June 30, 2022.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**p. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank V Tahap I 2020 (lanjutan)**

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan seluruh Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Obligasi-obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan kondisi pembatasan

Pada tanggal 31 Desember 2022 LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan, kecuali pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI) (POJK No. 40) Pasal 14 ayat (2) perihal pemenuhan terhadap rasio *Non Performing Financing* (NPF) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan yang melampaui ketentuan yang berlaku yaitu di atas 5%.

16. Debt Securities Issued (continued)**p. Indonesia Eximbank Phase I Shelf
Registration Offering V 2020
(continued)**

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering .

Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2022 and 2021.

The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

Terms and required covenants

As of December 31, 2022 LPEI has complied with all the terms and required covenants,

As of December 31, 2021, LPEI has complied with all the terms and required covenants, except for the fulfillment of the Financial Services Authority Regulations (POJK No.40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI) (POJK No. 40) Article 14 paragraph (2) concerning the fulfillment of Non Performing Financing (NPF) net of allowance for impairment losses on financing ratio that exceeds the prevailing provision, i.e. above 5%.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)****Persyaratan dan kondisi pembatasan
(lanjutan)**

Atas pelampauan tersebut, sesuai dengan POJK No. 40 Pasal 71, LPEI wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran ketentuan NPF bersih oleh OJK.

Sehubungan dengan pemenuhan terhadap POJK tersebut, LPEI telah menyampaikan Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) ke OJK melalui surat LPEI kepada OJK pada tanggal 18 Februari 2022 dengan surat No. BS.0061/MDI/02/2022 dan 18 Maret 2022 dengan surat No.BS.0123/CEO/03/2022 serta melalui surat terkait Penyampaian Data dan Dokumen terkait Tindak Lanjut Pembahasan Pembiayaan Bermasalah (NPF), kepada OJK pada tanggal 24 Maret 2022 dengan surat No.BS.0124/CEO/03/2022. Atas surat-surat tersebut, OJK menyatakan tidak keberatan atas rencana pemenuhan ketentuan mengenai rasio NPF bersih yang disampaikan oleh LPEI untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) POJK No. 40 tersebut (Catatan 9h.9).

Pada tanggal 31 Desember 2022, LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan.

16. Debt Securities Issued (continued)**Terms and required covenants
(continued)**

For the excess over prevailing provision, in accordance with POJK No. 40 Article 71, LPEI must submit action plan no later than 1 (one) month from the date of OJK determine the incompliance of NPF net.

In relation with the requirement of POJK, LPEI has submitted action plan in fulfilling the compliance with the Non Performing Financing (NPF) requirement to OJK through letter from LPEI to OJK on February 18, 2022 No. BS.0061/MDI/02/2022 and March 18, 2022, No.BS.0123/CEO/03/2022 regarding Fulfillment of Non Performing Financing (NPF), also through letter on March 24, 2022, No.BS.0124/CEO/03/2022 regarding Submission of Data and Documents related to Follow-Up Discussions on Non-Performing Financing. Through those letters, OJK has communicated that it has no objection to the action plan in fulfilling the compliance with NPF net ratio that LPEI submitted in order to comply with the requirement of Article 14 paragraph (2) POJK No. 40 (Note 9h.9)

As of December 31, 2022, LPEI has fulfilled all the required restrictions and conditions.

17. Pinjaman yang Diterima**17. Fund Borrowings**

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Pinjaman			Borrowings
Sindikasi	8,474,260	15,912,055	Syndicated
Bilateral	19,329,517	12,887,516	Bilateral
Pinjaman Syirkah	1,493,288	--	Syirkah Fund
Total	29,297,065	28,799,571	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Di bawah ini adalah rincian pinjaman yang
diterima berdasarkan pemberi pinjaman:

Pinjaman Sindikasi

31 Desember/ December 31, 2022				
Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)				
		Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat				
Pihak ketiga Facility agent				
Commerzbank	99,280,127	1,545,543	20 Mei/ May 20, 2021	20 Mei/ May 20, 2024
SMBC SGP	197,775,079	3,078,864	16 November/ November 16, 2022	15 November/ November 15, 2024
SMBC SGP	247,300,674	3,849,853	20 September/ September 20, 2022	19 September/ September 19, 2025
		6,928,717		
Total		8,474,260		

17. Fund Borrowings (continued)

Below are the details of fund borrowings
based on the lenders:

Borrowings - Syndicated

31 Desember/ December 31, 2021				
Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)				
		Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat				
Facility agent				
MUFG Bank. Ltd.	348,900,450	4,972,704	24 Mei/ May 24, 2018	24 Mei/ May 24, 2023
MUFG Bank. Ltd.	69,776,662	994,492	23 Agustus/ August 23, 2018	24 Mei/ May 24, 2023
		5,967,196		
CTBC Bank Co., Ltd., Singapore	499,183,839	7,114,618	23 Mei/ May 23, 2019	23 Juni/ June 23, 2022
CTBC Bank Co., Ltd., Singapore	99,826,019	1,422,770	1 Juli/ July 1, 2019	23 Juni/ June 23, 2022
		8,537,388		
Commerzbank	98,752,596	1,407,471	20 Mei/ May 20, 2021	20 Mei/ May 20, 2024
Total		15,912,055		

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)**17. Fund Borrowings (continued)****Pinjaman Bilateral****Borrowings – Bilateral**

		31 Desember/ December 31, 2022			
Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)		Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	
Rupiah					Rupiah
Pihak ketiga					Third parties
PT Bank Central Asia Tbk		2,000,000	21 September/ September 21, 2021	21 September/ September 21, 2023	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk		1,000,000	28 Desember/ December 28, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	PT Bank Central Asia Tbk
		<u>3,000,000</u>			
PT ANZ Indonesia		150,000	28 Desember/ December 28, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	PT ANZ Indonesia
PT Bank UOB Indonesia Tbk		2,500,000	29 Desember/ December 29, 2022	5 Januari/ January 5, 2023	PT Bank UOB Indonesia Tbk
Total mata uang Rupiah		<u>5,650,000</u>			Total Rupiah
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Pihak ketiga					Third parties
PT Bank ICBC Indonesia	129,146,501	2,010,488	19 November/ November 19, 2020	17 November/ November 17, 2023	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	148,154,801	2,306,400	29 September/ September 29, 2020	29 September/ September 29, 2025	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	98,705,889	1,536,604	19 November/ November 19, 2020	19 November/ November 19, 2025	PT Bank ICBC Indonesia
		<u>5,853,492</u>			
China Eximbank	199,337,597	3,103,188	21 Oktober/ October 21, 2020	20 Oktober/ October 20, 2023	China Eximbank
Standard Chartered Bank, Jakarta	100,000,000	1,556,750	20 Mei/ May 20, 2022	19 Mei/ May 19, 2023	Standard Chartered Bank, Jakarta
Standard Chartered Bank, Jakarta	199,994,033	3,113,407	22 Juni/ June 22, 2022	22 Juni/ June 22, 2023	Standard Chartered Bank, Jakarta
		<u>4,670,157</u>			
Total Dolar Amerika Serikat		<u>13,626,837</u>			Total Dollar
Euro Eropa					European Euro
Pihak berelasi (Catatan 39)					Related parties (Note 39)
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	603,344	10,004	4 Juli/ July 4, 2008	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	756,313	12,541	23 Desember/ December 23, 2010	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	454,151	7,531	30 Desember/ December 30, 2010	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	772,989	12,817	9 Maret/ March 9, 2011	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	590,202	9,787	4 Mei/ May 4, 2011	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
		<u>52,680</u>			
Total Euro Eropa		<u>52,680</u>			Total European Euro
Total mata uang asing		<u>13,679,517</u>			Total foreign currency
Total Pinjaman Bilateral		<u>19,329,517</u>			Total Bilateral Borrowings

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)**Pinjaman Syirkah**

31 Desember/ December 31, 2022				
Rupiah	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Pihak berelasi (Catatan 39)				Rupiah Related parties (Note 39)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		1,493,288	27 Juni/ June 27, 2022	27 Juni/ June 27, 2024
		<u>1,493,288</u>		PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 31 Desember 2021 LPEI tidak memiliki pinjaman syirkah.

As of December 31, 2021, there is no syirkah fund.

Pinjaman Sindikasi

Dibawah ini adalah rincian masing-masing fasilitas pinjaman yang diperoleh:

a. Pinjaman sindikasi dengan facility agent MUFG Bank, Ltd.

Pada tanggal 15 Mei 2018, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi dari bank-bank asing dan lokal sebesar USD950,000,000, pada tanggal 23 Juli 2018 diamandemen dan dilakukan peningkatan jumlah pinjaman menjadi sebesar USD1,150,000,000 yang terbagi menjadi *Tranche A* sebesar USD395,000,000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2019 dan telah dilunasi. *Tranche B* sebesar USD335,000,000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2021 dan telah dilunasi, dan *Tranche C* sebesar USD420,000,000 yang telah dilunasi pada tanggal 28 April 2022. Bank yang bertindak sebagai *facility agent* adalah MUFG Bank Ltd. dengan rincian per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Borrowings Syndicated

Below are the details of each loan facility obtained:

a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent

On May 15, 2018, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD950,000,000, with foreign and local banks and was amended and increasing the loan amounted to USD1,150,000,000 on July 23, 2018 which was divided into *Tranche A* amounting USD395,000,000 which already matured on July 3, 2019 and already full paid. *Tranche B* amounting USD335,000,000 which already matured on May 24, 2021 and already full paid, and *Tranche C* amounting USD420,000,000 which has been repaid on April 28, 2022. Bank acting as the facility agent is MUFG Bank Ltd. with the details as of December 31, 2021 are as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)
Pinjaman Sindikasi (lanjutan)
**a. Pinjaman sindikasi dengan facility
agent MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)**
Tranche C

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)
Bank peserta:	
• National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura	46,000,000
• Shinsei Bank. Limited	30,000,000
• United Overseas Bank Limited, Singapore	30,000,000
• First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.	
- Cabang Singapura	25,000,000
• Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Cabang Offshore Banking	25,000,000
• CTBC Bank Co., Ltd., Singapore	19,000,000
• DZ Bank Ag. Deutsche Zentral	
- Genossenschaftsbank, Cabang Singapura	19,000,000
• The Chugoku Bank Ltd., Cabang Hong Kong	19,000,000
• The Juyo Bank Ltd.	19,000,000
• The Hachijuni Bank Ltd.	14,500,000
• KGI Bank, Taipei	14,250,000
• Land Bank of Taiwan, Cabang Offshore Banking	14,250,000
• The Hyakugo Bank Ltd.	14,250,000
• E.SUN Commercial Bank, Ltd, Cabang Singapura	11,500,000
• The Export-Import Bank of The Republic Of China, Taipei	11,500,000
• PT Bank Mizuho Indonesia	10,000,000
• Bank of Kaohsiung, Cabang Offshore Banking	9,750,000
• Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura	9,750,000
• Taishin International Bank Co. Ltd., Taipei	9,750,000
• Taiwan Business Bank, Cabang Offshore Banking	9,750,000
• The Shizuoka Bank, Cabang Hong Kong	9,750,000
• Bank of Taiwan, Cabang Singapura	9,500,000
• The Gunma Bank Ltd.	9,500,000
• The Iyo Bank Ltd.	9,500,000
• Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore	8,000,000
• Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	5,000,000
• MUFG Bank. Ltd., Jakarta	5,000,000
• The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd., Cabang Offshore Banking	2,500,000
	420,000,000

17. Fund Borrowings (continued)
Borrowings Syndicated (continued)
**a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd.
as facility agent (continued)**
Tranche C

Composition of the syndicate
Participant banks:
National Bank of Kuwait S.A.K.P., •
Singapore Branch
Shinsei Bank Limited •
United Overseas Bank Limited, Singapore •
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. •
-Singapore Branch
Mega International Commercial •
Bank Co. Ltd., Offshore Banking Branch
CTBC Bank Co., Ltd., Singapore •
DZ Bank Ag. Deutsche Zentral •
- Genossenschaftsbank, Singapore Branch
The Chugoku Bank Ltd., Hong Kong Branch •
The Juyo Bank Ltd. •
The Hachijuni Bank Ltd. •
KGI Bank, Taipei •
Land Bank of Taiwan, Offshore •
Banking Branch
The Hyakugo Bank Ltd. •
E.SUN Commercial Bank, Ltd., •
Singapore Branch
The Export-Import Bank of •
The Republic Of China, Taipei
PT Bank Mizuho Indonesia •
Bank of Kaohsiung, Offshore •
Banking Branch
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., •
Singapore Branch
Taishin International Bank Co. Ltd., Taipei •
Taiwan Business Bank, •
Offshore Banking Branch
The Shizuoka Bank, •
Hong Kong Branch
Bank of Taiwan, Singapore Branch •
The Gunma Bank Ltd. •
The Iyo Bank Ltd. •
Oversea-Chinese Banking Corporation •
Limited, Singapore
Australia and New Zealand Banking. •
Group Limited, Singapore
MUFG Bank. Ltd., Jakarta •
The Shanghai Commercial & Savings •
Bank Ltd., Offshore Banking Branch

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)**Pinjaman Sindikasi (lanjutan)****a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)**

Tingkat kisaran suku bunga sebesar LIBOR ditambah margin tertentu untuk *Tranche C* pada tanggal 31 Desember 2021.

b. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* CTBC Bank Co., Ltd, Singapura

Pada tanggal 15 Mei 2019, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi dari bank-bank asing sebesar USD900,000,000 yang terbagi menjadi *Tranche A* sebesar USD600,000,000 yang telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 23 Juni 2022, dan *Tranche B* sebesar USD300,000,000 yang telah dilunasi pada tanggal 17 Desember 2020. Bank yang bertindak sebagai *facility agent* adalah CTBC Bank Co. Ltd, dengan rincian per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tranche A**Komposisi sindikasi**

Bank peserta:
China Development Bank,
Kantor Cabang Hong Kong
Industrial and Commercial Bank of China
Limited, Kantor Cabang Singapura
The Norinchukin Bank, Kantor Cabang
Singapura
National Bank of Kuwait S.A.K.P., Kantor
Cabang Singapura
CTBC Bank Co Ltd, Singapura
State Bank of India, Cabang Singapura
Standard Chartered Bank
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited,
Kantor Cabang Singapura
Australia and New Zealand Banking
Group Limited, Singapura
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Kantor
Cabang Singapura
Mizuho Bank, Ltd., Kantor Cabang
Singapura
DZ Bank Ag. Deutsche Zentral
Genossenschaftsbank, Cabang
Singapore
Shinsei Bank, Limited

**Jumlah fasilitas/
Facility amount
(USD)**

65,000,000
65,000,000
65,000,000
50,000,000
28,343,750
34,156,250
33,750,000
30,000,000
24,156,250
24,156,250
24,156,250
22,500,000
20,000,000

17. Fund Borrowings (continued)**Borrowings Syndicated (continued)****a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as *facility agent* (continued)**

The syndicated loan bear interest rate of LIBOR plus a certain margin for *Tranche C* as of December 31, 2021.

b. Syndicated loan with CTBC Bank Co., Ltd, Singapore as *facility agent*

On May 15, 2019, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD900,000,000 with foreign banks which was divided into *Tranche A* amounting USD600,000,000 which has been mature and repaid on June 23, 2022, and *Tranche B* amounting USD300,000,000 which has been repaid on December 17, 2020. Bank acting as the *facility agent* is CTBC Bank Co. Ltd., with the details as of December 31, 2021, are as follows:

Tranche A**Composition of the syndicate**

Participant banks:
China Development
Bank, Hong Kong Branch
Industrial and Commercial Bank of
China Limited, Singapore Branch
The Norinchukin Bank, Singapore Branch
National Bank of Kuwait S.A.K.P.,
Singapore Branch
CTBC Bank Co Ltd, Singapore
State Bank of India, Singapore Branch
Standard Chartered Bank
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited,
Singapore Branch
Australia and New Zealand Banking Group
Limited, Singapore
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Singapore Branch
Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch
DZ Bank Ag. Deutsche Zentral
Genossenschaftsbank, Singapore Branch
Shinsei Bank, Limited

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**Pinjaman Sindikasi (lanjutan)****b. Pinjaman sindikasi dengan facility
agent CTBC Bank Co., Ltd. (lanjutan)****Tranche A**

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)
MUFG Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	18,312,500
United Overseas Bank Limited	17,468,750
The Export-Import Bank of The Republic of China	15,000,000
The Hyakugo Bank, Ltd.	15,000,000
Cathay United Bank	10,000,000
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.	10,000,000
Eastspring Investments SICAV-FIS-Asia Pacific Loan Fund	5,000,000
The Gunma Bank, Ltd.	5,000,000
The Hokkoku Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	5,000,000
Kexim Bank (UK) Limited	5,000,000
Industrial Bank of Korea, Cabang London	5,000,000
Industrial Bank of Korea A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited Hong Kong Branch	3,000,000
	600,000,000

Tingkat kisaran suku bunga sebesar
LIBOR ditambah margin tertentu untuk
Tranche A pada tanggal
31 Desember 2021.

c. Commerzbank AG

Pada tanggal 29 Januari 2021, LPEI
menandatangani perjanjian fasilitas
sindikasi dengan bank-bank asing
sebesar USD300,000,000.

Pada tanggal 20 Mei 2021, LPEI
melakukan penarikan sebesar
USD100,000,000, dan akan jatuh tempo
pada tanggal 20 Mei 2024. Bank yang
bertindak sebagai *facility agent* adalah
Commerzbank AG, dengan rincian per
tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
sebagai berikut:

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)
Bank peserta: Commerzbank AG Frankfurt	80,000,000
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd	20,000,000
	100,000,000

17. Fund Borrowings (continued)**Borrowings Syndicated (continued)****b. Syndicated loan with CTBC Bank Co.,
Ltd. as facility agent (continued)****Tranche A**

Composition of the syndicate
MUFG Bank, Ltd., Singapore Branch
United Overseas Bank Limited
The Export-Import Bank of The Republic of China
The Hyakugo Bank, Ltd.
Cathay United Bank
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.
Eastspring Investments SICAV-FIS-Asia Pacific Loan Fund
The Gunma Bank, Ltd.
The Hokkoku Bank, Ltd., Singapore Branch
Kexim Bank (UK) Limited
Industrial Bank of Korea, Cabang London
Industrial Bank of Korea A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited Hong Kong Branch

The interest rate range is LIBOR plus a
certain margin for *Tranche A* on
December 31, 2021.

c. Commerzbank AG

On January 29, 2021, LPEI signed a
syndicated loan facility amounting to
USD300,000,000 with foreign banks.

On May 20, 2021, LPEI has withdrawal
amounted to USD100,000,000, and will
be matured on May 20, 2024. Bank
acting as the *facility agent* is
Commerzbank AG, with the details as of
December 31, 2022 and 2021, are as
follows:

Composition of the syndicate
Participant banks: Commerzbank AG Frankfurt
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)**Pinjaman Sindikasi (lanjutan)****c. Commerzbank AG (lanjutan)**

Tingkat kisaran suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah margin tertentu pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

d. Pinjaman sindikasi dengan facility agent Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (SMBC SGP)

Pada tanggal 16 Agustus 2022, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi dari bank-bank asing sebesar USD450,000,000 yang terbagi menjadi Tranche A sebesar USD200,000,000 dan Tranche B sebesar USD250,000,000. Bank yang bertindak sebagai facility agent adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura (SMBC SGP). Pada tanggal 20 September 2022, LPEI melakukan penarikan Tranche B sebesar USD250,000,000, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2025. Pada tanggal 16 November 2022, LPEI melakukan penarikan Tranche A sebesar USD200,000,000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2024, dengan rincian per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tranche A

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)
Bank peserta:	
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch	44,460,925
United Overseas Bank Limited	44,460,926
Taipei Fubon Commercial Co., Ltd. Singapore Branch	13,333,333
Fubon Bank (Hong Kong) Limited	8,888,890
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan With Limited Liability) Hong Kong Branch	4,400,000
The Export- Import Bank Of The Republic Of China	5,720,000
AfrAsia Bank Limited	6,675,000
The Korea Development Bank, Singapore Branch	17,600,000
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch	10,000,000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch	44,460,926
	200,000,000

17. Fund Borrowings (continued)**Borrowings Syndicated (continued)****c. Commerzbank AG (continued)**

The interest rate range is LIBOR (3 months) plus a certain margin on December 31, 2022 and 2021.

d. Syndicated loan with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch as facility agent (SMBC SGP)

On August 16, 2022, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD450,000,000 with foreign banks which was divided into Tranche A amounting USD200,000,000 and Tranche B amounting USD250,000,000. Bank acting as the facility agent is Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (SMBC SGP). On September 20, 2022, LPEI has withdrawal Tranche B amounted to USD250,000,000, and will be matured on September 19, 2025. On November 16, 2022, LPEI has withdrawal Tranche A amounted to USD200,000,00, and will be matured on November 15, 2024 with the details as of December 31, 2022 are as follows:

Tranche A

Composition of the syndicate
Participant banks:
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch
United Overseas Bank Limited
Taipei Fubon Commercial Co., Ltd. Singapore Branch
Fubon Bank (Hong Kong) Limited
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan With Limited Liability) Hong Kong Branch
The Export- Import Bank Of The Republic Of China
AfrAsia Bank Limited
The Korea Development Bank, Singapore Branch
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

d. Pinjaman sindikasi dengan facility agent Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura (lanjutan)

Tranche B

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)
Bank peserta:	
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan With Limited Liability) Hong Kong Branch	5,600,000
The Export- Import Bank Of The Republic Of China AfrAsia Bank Limited	7,280,000
AfrAsia Bank Limited	22,400,000
The Korea Development Bank, Singapore Branch	8,325,000
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch	20,000,000
The Hachijuni Bank, Ltd.	30,000,000
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Singapore Branch	1,680,000
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch	42,312,408
United Overseas Bank Limited	42,312,407
Taipei Fubon Commercial Co., Ltd. Singapore Branch	16,666,667
Fubon Bank (Hong Kong) Limited	11,111,111
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch	42,312,407
	250,000,000

Tingkat kisaran suku bunga sebesar margin tertentu ditambah dengan referensi suku bunga tertentu untuk Tranche A dan B pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

e. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan-Perjanjian Peminjaman atas Fasilitas Kredit dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

LPEI memperoleh fasilitas kredit dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1169/DP3/2004 tanggal 30 Juni 2004. Pinjaman ini berasal dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) melalui Pemerintah dengan jumlah maksimum sebesar EUR4,500,000 yang digunakan untuk pembiayaan efisiensi industri dan kontrol fase II terhadap polusi di Indonesia. Jangka waktu pinjaman adalah empat puluh tahun sampai dengan 30 Juni 2044, termasuk masa tenggang sepuluh tahun atas pembayaran pokok. Tingkat suku bunga tetap per tahun adalah 1,25%.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Syndicated (continued)

d. Syndicated loan with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch as facility agent (continued)

Tranche B

Composition of the syndicate	Participant banks:
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan With Limited Liability) Hong Kong Branch	The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan With Limited Liability) Hong Kong Branch
The Export- Import Bank Of The Republic Of China AfrAsia Bank Limited	The Export- Import Bank Of The Republic Of China AfrAsia Bank Limited
AfrAsia Bank Limited	AfrAsia Bank Limited
The Korea Development Bank, Singapore Branch	The Korea Development Bank, Singapore Branch
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch	The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch
The Hachijuni Bank, Ltd.	The Hachijuni Bank, Ltd.
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Singapore Branch	The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Singapore Branch
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch	Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch
United Overseas Bank Limited	United Overseas Bank Limited
Taipei Fubon Commercial Co., Ltd. Singapore Branch	Taipei Fubon Commercial Co., Ltd. Singapore Branch
Fubon Bank (Hong Kong) Limited	Fubon Bank (Hong Kong) Limited
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch

The interest rate range is a certain margin plus a certain interest rate reference for Tranche A and B as of December 31, 2022 and 2021.

e. Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance Its subsidiary Loan Agreement on Credit Facility from Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

LPEI obtained a credit facility from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance based on Its subsidiary Loan Agreement No. SLA-1169/DP3/2004 dated June 30, 2004. This loan was granted by Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) through the Government with a maximum amount of EUR4,500,000 that is intended to be used for financing industrial efficiency and pollution control phase II in Indonesia. The facility has a term of forty years up to June 30, 2044, including a grace period of ten years for the principal payments. The loan has a fixed interest rate of 1.25%.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)**Pinjaman Bilateral (lanjutan)****e. Pemerintah Republik Indonesia melalui
Kementerian Keuangan-Perjanjian
Penerusan Pinjaman atas Fasilitas
Kredit dari Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) (lanjutan)**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, LPEI memiliki saldo pinjaman masing-masing sebesar EUR3,176,999 dan EUR3,324,000.

Tidak terdapat aset yang dijaminkan oleh LPEI atas seluruh pinjaman yang diterima di atas.

f. China Eximbank

Pada tanggal 25 September 2020, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan China Eximbank sebesar USD200,000,000.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD200,000,000 dari China Eximbank, dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2023.

g. PT Bank ICBC Indonesia

Pada tanggal 24 September 2020, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman *Bilateral Committed Loan Credit* dengan PT Bank ICBC Indonesia sebesar USD380,000,000.

Pada tanggal 29 September 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD150,000,000 dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2025.

Pada tanggal 19 November 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100,000,000 dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2025.

17. Fund Borrowings (continued)**Borrowings Bilateral (continued)****e. Government of the Republic of
Indonesia through the Ministry of
Finance Its subsidiary Loan Agreement
on Credit Facility from Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) (continued)**

As of December 31, 2022 and 2021, LPEI has a total outstanding borrowings of EUR3,176,999 and EUR3,324,000, respectively.

There are no assets pledged as collateral by LPEI for all of the above fund borrowings.

f. China Eximbank

On September 25, 2020, LPEI signed a Facility Agreement from China Eximbank amounting to USD200,000,000.

On October 21, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD200,000,000 from China Eximbank, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on October 20, 2023.

g. PT Bank ICBC Indonesia

On September 24, 2020, LPEI signed a *Bilateral Committed Loan Credit* from PT Bank ICBC Indonesia amounting to USD380,000,000.

On September 29, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD150,000,000 from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on September 29, 2025.

On November 19, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on November 19, 2025.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)
Pinjaman Bilateral (lanjutan)
g. PT Bank ICBC Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 19 November 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD130,000,000 dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2023.

h. Standard Chartered Bank Indonesia

Pada tanggal 18 Mei 2021, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan Standard Chartered Bank Indonesia sebesar USD100,000,000.

Pada tanggal 21 Mei 2021, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100,000,000 dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tetap dan telah dilunasi pada tanggal 20 Mei 2022.

Pada tanggal 28 April 2022, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan Standard Chartered Bank Indonesia sebesar USD300,000,000.

Pada tanggal 20 Mei 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100,000,000 dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga *Term* SOFR (3 bulan) ditambah margin tertentu yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2023.

17. Fund Borrowings (continued)
Borrowings Bilateral (continued)
g. PT Bank ICBC Indonesia (continued)

On November 19, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD130,000,000 from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on November 17, 2023.

h. Standard Chartered Bank Indonesia

On May 18, 2021, LPEI signed a Facility Agreement from Standard Chartered Bank Indonesia amounting to USD100,000,000.

On May 21, 2021, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 from Standard Chartered Bank Indonesia with fixed interest rate and already paid on May 20, 2022.

On April 28, 2022, LPEI signed a Facility Agreement from Standard Chartered Bank Indonesia amounting to USD300,000,000.

On May 20, 2022, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 from Standard Chartered Bank Indonesia which bear interest rate at *Term* SOFR (3 months) plus certain margin and will be matured on May 19, 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)**Pinjaman Bilateral (lanjutan)****h. Standard Chartered Bank Indonesia
(lanjutan)**

Pada tanggal 22 Juni 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar USD200,000,000 dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga Term SOFR (3 bulan) ditambah margin tertentu yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2023.

i. PT ANZ Indonesia

Pada tanggal 10 Juni 2022, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan PT Bank ANZ Indonesia sebesar USD50.000.000.

Pada tanggal 28 Desember 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp150.000 dari PT ANZ Indonesia, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2023.

j. PT Bank Danamon Indonesia

Pada tanggal 16 Maret 2021 LPEI menandatangani Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan kemudian pada tanggal 20 April 2021, LPEI menandatangani perjanjian kredit *uncommitted* dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp1.575.000.

Pada tanggal 31 Desember 2021, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp1.250.000 dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR ditambah margin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2022.

17. Fund Borrowings (continued)**Borrowings Bilateral (continued)****h. Standard Chartered Bank Indonesia
(continued)**

On June 22, 2022, LPEI has withdrawal amounted to USD200,000,000 from Standard Chartered Bank Indonesia which bear interest rate at Term SOFR (3 months) plus certain margin and will be matured on June 22, 2023.

i. PT ANZ Indonesia

On June 10, 2022, LPEI signed a Facility Agreement from PT Bank ANZ Indonesia amounting to USD50,000,000 (full amount).

On December 28, 2022, LPEI has withdrawal amounted to Rp150,000 from PT ANZ Indonesia, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 4, 2023.

j. PT Bank Danamon Indonesia

On March 16, 2021 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement and later on April 20, 2021, LPEI signed a committed credit agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to Rp1,575,000.

On December 31, 2021, LPEI has withdrawal amounted to Rp1,250,000 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, which bear interest rate at JIBOR plus a certain margin and will be mature on January 6, 2022.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

j. PT Bank Danamon Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 14 April 2022 LPEI menandatangani Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp1.075.000 dan sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 29 Agustus 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50,000,000 dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 31 Oktober 2022.

k. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 22 Juni 2021 LPEI menandatangani Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp3.000.000.

Pada tanggal 21 September 2021, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR (tiga bulan) ditambah margin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 September 2023.

Pada tanggal 25 Juli 2022 LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.500.000, Rp500.000, Rp1.000.000 dan Rp1.500.000.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

j. PT Bank Danamon Indonesia (continued)

On April, 14, 2022 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to Rp1,075,000. and Rp1,500,000.

On August 29, 2022, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, which bear interest rate at a certain margin and which has been repaid on October 31, 2022.

k. PT Bank Central Asia Tbk

On June, 22, 2021 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk amounting to Rp3,000,000.

On September 21, 2021, LPEI has withdrawal amounted to Rp2,000,000, from PT Bank Central Asia Tbk, which bear interest rate at JIBOR (three months) plus a certain margin and will be mature on September 21, 2023.

On July 25, 2022 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk amounting Rp1,500,000, Rp500,000, Rp1,000,000 and Rp1,500,000.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)**Pinjaman Bilateral (lanjutan)****k. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)**

Pada tanggal 1 Desember 2022 LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan total sebesar Rp6.500.000.

Pada tanggal 28 Desember 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2023.

l. PT Bank UOB Indonesia Tbk

Pada tanggal 14 April 2022 LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp2.000.000 dan Rp500.000. Pada tanggal 23 September 2022 LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp2.500.000.

Pada tanggal 29 Desember 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp2.500.000 dari PT Bank UOB Indonesia, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2023.

17. Fund Borrowings (continued)**Borrowings Bilateral (continued)****k. PT Bank Central Asia Tbk (continued)**

On December 1, 2022 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk amounting to Rp6,500,000.

On December 28, 2022, LPEI has withdrawal amounted to Rp1,000,000 from PT Bank Central Asia Tbk, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 4, 2023.

l. PT Bank UOB Indonesia Tbk

On April 14, 2022 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank UOB Indonesia amounting Rp2,000,000 and Rp500,000. On September 23, 2022 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank UOB Indonesia amounting Rp2,500,000.

On December 29, 2022, LPEI has withdrawal amounted to Rp2,500,000 from PT Bank UOB Indonesia, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 5, 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)**Pinjaman Bilateral (lanjutan)****Pinjaman Syirkah****m. PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

Pada tanggal 31 Maret 2022, LPEI telah menandatangani perjanjian kredit *uncommitted* dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp3.000.000.

Pada tanggal 27 Juni 2022, LPEI melakukan penarikan pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp1.500.000, dengan tingkat margin bagi hasil tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2024.

Persyaratan dan kondisi pembatasan

Pada tanggal 31 Desember 2022 LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan,

Pada tanggal 31 Desember 2021, LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan, kecuali pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI) (POJK No. 40) Pasal 14 ayat (2) perihal pemenuhan terhadap rasio *Non Performing Financing* (NPF) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan yang melampaui ketentuan yang berlaku yaitu di atas 5%. Atas pelanggaran tersebut, sesuai dengan POJK No. 40 Pasal 71, LPEI wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran ketentuan NPF bersih oleh OJK.

17. Fund Borrowings (continued)**Borrowings Bilateral (continued)****Syirkah Fund****m. PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

On March 31, 2022, LPEI signed a *uncommitted credit agreement* with PT Bank Syariah Indonesia Tbk amounting Rp3,000,000.

On June 27, 2022, LPEI has withdrawal borrowing from PT Bank Syariah Indonesia Tbk amounted to Rp1,500,000, which bear profit sharing margin at a certain margin and will be mature on June 27, 2024.

Terms and required covenants

As of December 31, 2022 LPEI has complied with all the terms and required covenants,

As of December 31, 2021, LPEI has complied with all the terms and required covenants, except for the fulfillment of the Financial Services Authority Regulations (POJK No.40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI (POJK No. 40) Article 14 paragraph (2) concerning the fulfillment of *Non Performing Financing* (NPF) net of allowance for impairment losses on financing ratio that exceeds the prevailing provision, i.e. above 5%. For the excess over prevailing provision, in accordance with POJK No. 40 Article 71, LPEI must submit action plan no later than 1 (one) month from the date of OJK determine the incompliance of NPF net.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)**Pinjaman Bilateral (lanjutan)****Persyaratan dan kondisi pembatasan
(lanjutan)**

Sehubungan dengan pemenuhan terhadap POJK tersebut, LPEI telah menyampaikan Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) ke OJK melalui surat LPEI kepada OJK pada tanggal 18 Februari 2022 dengan surat No. BS.0061/MDI/02/2022 dan 18 Maret 2022 dengan surat No.BS.0123/CEO/03/2022 serta melalui surat terkait Penyampaian Data dan Dokumen terkait Tindak Lanjut Pembahasan Pembiayaan Bermasalah (NPF) kepada OJK pada tanggal 24 Maret 2022 dengan surat No.BS.0124/CEO/03/2022. Atas surat-surat tersebut, OJK menyatakan tidak keberatan atas rencana pemenuhan ketentuan mengenai rasio NPF bersih yang disampaikan oleh LPEI untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) POJK No. 40 tersebut.

Sehubungan dengan pelampauan NPF bersih di atas 5% (POJK Nomor 40 Pasal 14 ayat 2) dan penyampaian rencana pemenuhan (POJK Nomor 40 Pasal 71), LPEI telah melakukan serangkaian diskusi dengan para kreditur, terkait pinjaman yang diterima oleh LPEI.

Pada tanggal 31 Desember 2022, LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan.

Selanjutnya, LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disampaikan kepada OJK tersebut dan melaporkan perkembangan rencana pemenuhan secara periodik kepada OJK (Catatan 9h.9).

Per tanggal 23 Juni 2022, OJK telah menerbitkan POJK No.9 tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menggantikan POJK No.40 tahun 2015.

17. Fund Borrowings (continued)***Borrowings Bilateral (continued)*****Terms and required covenants (continued)**

In relation with the requirement of POJK, LPEI has submitted action plan in fulfilling the compliance with the Non Performing Financing (NPF) requirement to OJK through letter from LPEI to OJK on February 18, 2022 No. BS.0061/MDI/02/2022 and March 18, 2022, No.BS.0123/CEO/03/2022 regarding Fulfillment of Non Performing Financing (NPF), also through letter on March 24, 2022, No.BS.0124/CEO/03/2022 regarding Submission of Data and Documents related to Follow-Up Discussions on Non-Performing Financing. Through those letters, OJK has communicated that it has no objection to the action plan in fulfilling the compliance with NPF net ratio that LPEI submitted in order to comply with the requirement of Article 14 paragraph 2 POJK No. 40.

In relation to the excess of NPF net ratio over 5% (POJK No. 40 Article 14 paragraph 2) and submission of action plan (POJK No. 40 article 71), LPEI has conduct series of discussion with lenders, related to the borrowings by LPEI.

As of December 31, 2022, LPEI has fulfilled all the required restrictions and conditions.

Furthermore, LPEI must implement the action plan that has been submitted to OJK and submit progress report of the action plan periodically for OJK (Note 9h.9).

As of June 23, 2022, OJK has issued POJK No. 9 of 2022 concerning Supervision of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia which replaces POJK No. 40 of 2015.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi
a. Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi
18. Estimated Losses on Commitments and Contingencies
a. The estimated losses on commitments and contingencies

31 Desember/ December 31, 2022							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Rupiah							Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,031,216	--	--	--	--	1,031,216	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	368,830	--	--	--	--	368,830	Bank guarantee
Penjaminan kredit - PEN	--	1,000,000	--	--	--	1,000,000	Credit guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	--	--	--	Outstanding irrevocable L/C
	1,400,046	1,000,000	--	--	--	2,400,046	
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	560,234	3,598	958	--	58,079	622,869	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	1,014,606	5,214	--	--	--	1,019,820	Bank guarantee
Penjaminan kredit - PEN	1,786,550	--	--	--	--	1,786,550	Credit guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	4,727	--	--	--	--	4,727	Outstanding irrevocable L/C
	3,366,117	8,812	958	--	58,079	3,433,966	
Total mata uang Rupiah	4,766,163	1,008,812	958	--	58,079	5,834,012	Total Indonesia Rupiah
Mata uang asing							Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	257,807	--	--	--	--	257,807	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	99,088	1,074,158	--	--	--	1,173,246	Bank guarantee
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	43,806	--	--	--	--	43,806	Outstanding irrevocable L/C
	400,701	1,074,158	--	--	--	1,474,859	
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,167,744	25,256	--	--	536	1,193,536	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	5,963,898	--	--	--	--	5,963,898	Bank guarantee
Penjaminan Kredit - PEN	910,699	--	--	--	--	910,699	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	334,381	--	--	--	--	334,381	Outstanding irrevocable L/C
	8,376,722	25,256	--	--	536	8,402,514	
Sub Total	8,777,423	1,099,414	--	--	536	9,877,373	Sub Total
Mata uang asing							Foreign currencies
Yen Jepang							Japanese Yen
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	20,605	--	--	--	--	20,605	Bank guarantee
Sub Total	20,605	--	--	--	--	20,605	Sub Total
Euro Eropa							European Euro
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Bank garansi	750	--	--	--	--	750	Bank guarantee
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	11,167	--	--	--	--	11,167	Outstanding irrevocable L/C
	11,917	--	--	--	--	11,917	
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	184,408	--	--	--	--	184,408	Bank guarantee
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	990	--	--	--	--	990	Outstanding irrevocable L/C
	185,398	--	--	--	--	185,398	
Sub Total	197,315	--	--	--	--	197,315	Sub Total
Total mata uang asing	8,995,343	1,099,414	--	--	536	10,095,293	Total foreign currencies
Total	13,761,506	2,108,226	958	-	58,615	15,929,305	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan
Kontinjensi (lanjutan)****a. Estimasi kerugian atas komitmen dan
kontinjensi (lanjutan)****18. Estimated Losses on Commitments and
Contingencies (continued)****a. The estimated losses on commitments
and contingencies (continued)**

31 Desember/ December 31, 2021							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Rupiah							Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,550,691	--	--	--	--	1,550,691	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	223,835	--	--	--	--	223,835	Bank guarantee
Penjaminan kredit - PEN	1,078,000	--	--	--	--	1,078,000	Credit guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	7,652	--	--	--	--	7,652	Outstanding irrevocable L/C
	2,860,178	--	--	--	--	2,860,178	
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	634,570	124,067	--	--	58,455	817,092	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	1,247,252	--	--	--	--	1,247,252	Bank guarantee
Penjaminan kredit - PEN	2,817,315	--	--	--	--	2,817,315	Credit guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	168,766	--	--	--	--	168,766	Outstanding irrevocable L/C
	4,867,903	124,067	--	--	58,455	5,050,425	
Total mata uang Rupiah	7,728,081	124,067	--	--	58,455	7,910,603	Total Indonesia Rupiah
Mata uang asing							Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	205,390	--	--	--	--	205,390	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	1,006,817	983,423	--	--	--	1,990,240	Bank guarantee
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	82,535	--	--	--	--	82,535	Outstanding irrevocable L/C
	1,294,742	983,423	--	--	--	2,278,165	
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,581,218	62,220	--	--	491	1,643,929	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	4,635,728	--	--	--	--	4,635,728	Bank guarantee
Penjaminan Kredit - PEN	946,081	--	--	--	--	946,081	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	119,695	--	--	--	--	119,695	Outstanding irrevocable L/C
	7,282,722	62,220	--	--	491	7,345,433	
Sub Total	8,577,464	1,045,643	--	--	491	9,623,598	Sub Total
Mata uang asing							Foreign currencies
Yen Jepang							Japanese Yen
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	17,857	--	--	--	--	17,857	Bank guarantee
Sub Total	17,857	--	--	--	--	17,857	Sub Total
Euro Eropa							European Euro
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Bank garansi	729	--	--	--	--	729	Bank guarantee
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	448	--	--	--	--	448	Outstanding irrevocable L/C
	1,177	--	--	--	--	1,177	
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	179,190	--	--	--	--	179,190	Bank guarantee
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	--	--	--	Outstanding irrevocable L/C
	179,190	--	--	--	--	179,190	
Sub Total	180,367	--	--	--	--	180,367	Sub Total
Total mata uang asing	8,775,688	1,045,643	--	--	491	9,821,822	Total foreign currencies
Total	16,503,769	1,169,710	--	--	58,946	17,732,425	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan
Kontinjensi (lanjutan)****b. Perubahan estimasi klaim penjaminan**

Perubahan estimasi klaim penjaminan
adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, 2022		
	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Total
Saldo awal	387,871	4,688	392,559
Pembentukan tahun berjalan penjaminan	(146)	798	652
Pembentukan cadangan <i>stop loss</i> penjaminan - PEN	85,445	--	85,445
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	1	1
Saldo akhir	473,170	5,487	478,657

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, 2022		
	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Total
Saldo awal	34,051	7,078	41,129
Pembentukan tahun berjalan penjaminan	427	(313)	114
Pembentukan cadangan <i>stop loss</i> penjaminan - PEN	353,393	(2,071)	351,322
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	(6)	(6)
Saldo akhir	387,871	4,688	392,559

Beginning balance
Addition during the year
of guarantee
Addition stop loss
guarantee - PEN
Foreign currency translation
during the year
Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa estimasi
klaim penjaminan yang dibentuk adalah
cukup untuk menutup kemungkinan
kerugian klaim penjaminan.

Informasi mengenai klasifikasi aset
keuangan yang tidak mengalami
penurunan nilai dan mengalami penurunan
nilai diungkapkan pada Catatan 32.

**18. Estimated Losses on Commitments and
Contingencies (continued)****b. Changes in estimated guarantee claims**

The changes in estimated guarantee
claims are as follows:

Management believes that the estimated
guarantee claims as provided is adequate
to cover losses on guarantee claim.

Information with respect to classification of
not impaired and impaired financial assets
is disclosed in Note 32.

19. Liabilitas Sewa

Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh
tempo pembayaran pada 31 Desember 2022
dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh tempo		
Sampai dengan 1 tahun	2,921	7,706
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	2,632	2,657
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	--	617
Total	5,553	10,980

19. Lease Liabilities

Detail of lease liabilities based on maturity
payment as of December 31, 2022 and 2021
are as follows:

Detail of lease liabilities
based on maturity
Up to 1 year
More than 1 up to 3 years
More than 3 up to 5 years
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

19. Liabilitas Sewa (lanjutan)

Semua liabilitas utang sewa didenominasi dalam Rupiah yang dibayar setiap bulan dalam suatu jumlah tetap.

Berikut adalah rincian liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Rincian liabilitas sewa	Saldo awal 1 Januari 2022/ Beginning balance January 1, 2022	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	(Pengurangan) Liabilitas Sewa/ Deduction of lease liabilities	Beban bunga liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran sewa/ Payments of lease liabilities	Saldo, 31 Desember 2022/ Balance, December 31, 2022	Detail of lease liabilities
Kendaraan bermotor	3,886	336	(1,342)	165	(1,244)	1,801	Vehicles
Bangunan	7,094	1,255	--	206	(4,803)	3,752	Building
Total	10,980	1,591	(1,342)	371	(6,047)	5,553	Total

Rincian liabilitas sewa	Saldo awal 1 Januari 2021/ Beginning balance January 1, 2021	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	(Pengurangan) Liabilitas Sewa/ Deduction of lease liabilities	Beban bunga liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran sewa/ Payments of lease liabilities	Saldo, 31 Desember 2021/ Balance, December 31, 2021	Detail of lease liabilities
Kendaraan bermotor	5,544	1,006	--	413	(3,077)	3,886	Vehicles
Bangunan	9,293	1,678	--	661	(4,538)	7,094	Building
Total	14,837	2,684	--	1,074	(7,615)	10,980	Total

19. Lease Liabilities (continued)

All the lease liabilities are denominated in Rupiah, payable every month at fixed amounts.

Following is the details of lease liabilities as of December 31, 2022 and 2021:

20. Liabilitas Lain-lain**20. Other Liabilities**

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Rupiah			Rupiah
Bunga yang masih harus dibayar	188,618	237,012	Accrued interest payable
Rekening penampungan	184,055	203,478	Suspense accounts
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	72,169	110,241	Collateral for L/C and bank guarantee opening
Tantiem dan jasa produksi	16,701	27,009	Tantiem and accrued bonus
Lain-lain	100,386	77,038	Others
	561,929	654,778	
Mata uang asing			Foreign currencies
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	370,406	220,690	Collateral for L/C and bank guarantee opening
Bunga yang masih harus dibayar	178,436	93,027	Accrued interest payable
Rekening penampungan	101,527	87,882	Suspense accounts
Lain-lain	234,236	212,124	Others
	884,605	613,723	
Total	1,446,534	1,268,501	Total

Termasuk dalam rekening penampungan adalah rekening yang digunakan oleh debitur untuk melakukan pembayaran pokok kembali maupun bunga atas pembiayaan dan piutang.

The suspense accounts include accounts used by debtors for the repayment of principal and interest of financing and receivables.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

21. Kontribusi Modal Pemerintah

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa modal awal LPEI berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Selanjutnya, berdasarkan pasal 19 ayat (2) dari undang-undang di atas, dinyatakan bahwa modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan surat Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal Permintaan Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Modal Awal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa saldo laba yang ditahan termasuk dalam pengertian seluruh kekayaan negara yang tertanam di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Dengan demikian, modal saham dan saldo laba direklasifikasi sebagai Kontribusi Modal Pemerintah yang sebelumnya dalam bentuk modal saham, cadangan umum, cadangan tujuan, dan belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp3.000.000, Rp1.088.094, Rp140.470, dan Rp93.022.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000.000. Dalam hal modal LPEI berkurang dari Rp4.000.000, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 22 Desember 2010, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000. Dengan demikian, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp6.321.586.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

21. Government Capital Contribution

Based on the explanation on article 19 paragraph (1) Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, it was stated that LPEI's initial capital is composed of all shares of the state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Furthermore, based on article 19 paragraph (2) of above mentioned law, the paid up capital as specified in paragraph (1) here of, shall be the state's treasury and is separated and undivided into shares. Based on the letter of the Head of Legal Department of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 dated February 3, 2010 regarding Request for Legal Review Related Legal to the Initial Capital of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, retained earnings included all state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Therefore, the share capital and retained earnings were reclassified as Government Contributed Capital which were previously in the form of capital stocks, general reserve, specific reserve, and unappropriated retained earnings amounting to Rp3,000,000, Rp1,088,094, Rp140,470, and Rp93,022, respectively.

Based on Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI's initial capital shall be at least Rp4,000,000. In the event that LPEI's capital becomes less than Rp4,000,000, the Government shall cover such deficiency from the State Budget based on the applicable mechanism. LPEI's additional capital to cover such capital deficiency shall be determined by Government Regulation.

On December 22, 2010, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia which amounted to Rp2,000,000. As of December 31, 2013 and 2012, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp6,321,586.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan, Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, perencanaan investasi pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/Lembaga dan untuk tahun anggaran 2014. LPEI telah melakukan permohonan PMN sebesar Rp1.000.000. Permohonan tersebut telah masuk ke dalam nota APBN tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000.

Berdasarkan perencanaan pemerintah, maka pada tanggal 30 Desember 2014, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp1.000.000.

Untuk memperkuat struktur permodalan dan berdasarkan pada UU No. 2 tahun 2009, atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal, 75% telah dilakukan kapitalisasi modal sebesar Rp54.370 dan 25% sebagai penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp18.123. LPEI telah menyetorkan ke Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp18.123 pada bulan Agustus 2014.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2014, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp7.375.956.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**21. Government Capital Contribution
(continued)**

Based on the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 247/PMK.02/2012 on Procedures for Planning, Determination, Allocation, and Implementation Document Legalization of State General Treasury, the government plans to increase the Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia (PMN) to State Owned Company/Institutions for the year 2014. Hence, LPEI has made a request for PMN amounting to Rp1,000,000. The request has been incorporated in APBN year 2014.

Based on Government Regulation No. 86 year 2014 dated October 17, 2014 regarding the Capital Contribution from the State's Treasury into The Capital of LPEI, stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000.

Based on the above government plan on December 30, 2014, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp1,000,000.

To strengthen the capital structure and based on Law No. 2 of 2009, the excess of the general reserve and the reserve accumulation of interest has exceeded 25% of the capital, 75% has been capitalized amounting to Rp54,370 and 25% as non-tax revenue amounting to Rp18,123. LPEI has deposited to the Government of the Republic of Indonesia at Rp18,123 in August 2014.

Therefore, as of December 31, 2014, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp7,375,956.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000. Penambahan penyertaan modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 26 November 2015.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 tanggal 12 November 2015, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2013 dan 2014, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2013 dan 2014 sebesar Rp554.586 dan Rp798.046.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp4.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2016.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan LPEI berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015, ditetapkan bahwa dalam hal akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal awal LPEI, kelebihanannya 75% digunakan untuk kapitalisasi modal, dan 25% sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**21. Government Capital Contribution
(continued)**

Based on Government Regulation No. 67 year 2015 dated August 20, 2015 regarding the Capital Contribution from the state's treasury into the capital of Indonesia Eximbank, stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000. This increase in capital was received and recorded effectively by LPEI on November 26, 2015.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 dated November 12, 2015, on the Establishment of share capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2013 and 2014, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2013 and 2014 surplus amounting to Rp554,586 and Rp798,046.

Based on Government Regulation No. 81 year 2016 dated December 30, 2016 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp4,000,000. The increase in capital is composed of Rp2,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 31, 2016.

In order to strengthen LPEI's capital structure, pursuant to Article 20 paragraph (2) of Law No. 2 of 2009 dated January 12, 2009 of LPEI and Ministry of Finance No. 260/PMK.06/2015, if the accumulated general and specific reserves has exceeded 25% of the initial capital of LPEI, the excess of 75% is used for the capitalization of capital, and 25% as Tax State Revenue (non-tax).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 463/KMK.06/2016 tanggal 15 Juni 2016, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2015, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2015 sebesar Rp963.600.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp3.200.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.200.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 30 Desember 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 788/KMK.06/2017 tanggal 6 November 2017, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2016, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2016 sebesar Rp951.998.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 620/KMK.06/2018 tanggal 24 September 2018, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2017, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2017 sebesar Rp686.211.

**21. Government Capital Contribution
(continued)**

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 463/KMK.06/2016 dated June 15, 2016, on the Establishment of Share Capitalization for LPEI derived from surplus in year 2015, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2015 surplus amounting to Rp963,600.

Based on Government Regulation No. 55 year 2017 dated December 28, 2017 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI, stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp3,200,000. The increase in capital is composed of Rp1,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,200,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2017.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 788/KMK.06/2017 dated November 6, 2017, on the Establishment of Share Capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2016, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2016 surplus amounting to Rp951,998.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 620/KMK.06/2018 dated September 24, 2018, on the Establishment of Share Capitalization for LPEI derived from surplus in year 2017, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2017 surplus amounting to Rp686,211.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp2.500.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.500.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 28 Juni 2019.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-838/MK.06/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2018 dan Penetapan Penggunaan Surplus Usaha Tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2018 sebesar Rp115.879.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp4.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal Rp4.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 12 Agustus 2020 dan Rp1.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 18 Agustus 2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**21. Government Capital Contribution
(continued)**

Based on Government Regulation No. 44 year 2019 dated June 26, 2019 regarding Government of Indonesia's capital Contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp2,500,000. The increase in capital is composed of Rp1,500,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on June 28, 2019.

According to the Letter of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-838/MK.06/2019 dated November 22, 2019, on Accountability of LPEI Financial Report of 2018, Determination of Business from Surplus in Year 2018, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2018 surplus amounted to Rp115,879.

Based on Government Regulation No. 40 year 2020 dated July 21, 2020 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI, stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is composed of Rp4,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection amounting Rp4,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 12, 2020 and Rp1,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 18, 2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud digunakan untuk Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 30 Desember 2020.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-688/MK.06/2021 tanggal 3 Agustus 2021, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2020, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2020 sebesar Rp194.663.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 117 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2.500.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan sebesar Rp2.500.000 digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-688/MK.06/2021, dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2020, terdapat PNBPN yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp 64.888 dan Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2020 sebesar Rp194.663. LPEI telah menyetorkan PNBPN tersebut pada bulan Agustus 2021.

**21. Government Capital Contribution
(continued)**

Based on Government Regulation No. 78 year 2020 dated December 30, 2020 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI, stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is to carry Implementation of The National Economic Recovery Program. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2020.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-688/MK.06/2021 dated August 3, 2021, on Accountability of LPEI Financial Report of 2020, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2020 surplus amounted to Rp194,663.

Based on Government Regulation No. 117 year 2021 dated December 15, 2021 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its Capital Contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is composed of Rp2,500,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,500,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 29, 2021 and December 30, 2021.

Based on the Letter of the Minister of Finance No. S 688/MK.06/2021, regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2020, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp64,888 and the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2020 surplus amounted to Rp194,663. LPEI has deposited the non-tax revenues in August 2021.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-662/MK.06/2022 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2021, terdapat PNBPN yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp 87.164 dan Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2021 sebesar Rp261.492. LPEI telah menyetorkan PNBPN tersebut pada bulan Agustus 2022.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI adalah sebesar Rp37.602.431 dan Rp37.340.939.

22. Pembagian Laba Tahun Berjalan

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015, surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, dan bagian laba Pemerintah. Persentase alokasi surplus ditetapkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus dan jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus. Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-662/MK.06/2022 tanggal 14 Agustus 2022, Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2021 sebesar Rp387.396 untuk alokasi cadangan umum dan tujuan sebesar Rp348.656, jasa produksi sebesar Rp15.108, dan bagian laba Pemerintah sebesar Rp23.631.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on the Letter of the Minister of Finance No. S-662/MK.06/2022 regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2021, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp87,164. and the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2021 surplus amounted to Rp261,492. LPEI has deposited the non-tax revenues in August 2022.

As of December 31, 2022 and 2021, the capital contribution from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp37,602,431 and Rp37,340,939, respectively.

22. Distribution of Income for the Current Year

According to article 21 of Republic of Indonesia Law No. 2 Year 2009 regarding LPEI and Regulation of the Minister of Finance No. 260/PMK.06/2015, the surplus gained by LPEI in 1 (one) year operation shall be used for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, and the Government's profit share. The surplus allocation percentage shall be determined as follows: general reserve and special purpose reserve shall be 90% (ninety percent) of the surplus and performance bonus and tantiem and the Government's profit share shall be 10% (ten percent) of the surplus. The percentage amount for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, including Government's profit share shall be determined by the Ministry of Finance.

According to the Letter of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-662/MK.06/2022 dated August 14, 2022, the Ministry of Finance determined the business surplus for the year ended 2021 amounting to Rp387,396 for the allocation of general and special purpose reserve amounting to Rp348,656, bonus amounting to Rp15,108, and Government's profit share amounting to Rp23,631.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

22. Pembagian Laba Tahun Berjalan (lanjutan)

Jasa produksi, tantiem, dan bagian laba Pemerintah tahun buku 2021 telah dibayarkan pada bulan Agustus 2022.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-688/MK.06/2021 tanggal 3 Agustus 2021, Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2020 sebesar Rp259.550 untuk alokasi cadangan tujuan sebesar Rp83.704 serta cadangan umum sebesar Rp175.847, jasa produksi sebesar Rp11.247, tantiem sebesar Rp4.022, dan bagian laba Pemerintah sebesar Rp13.570.

Jasa produksi, tantiem, serta bagian laba Pemerintah tahun buku 2020 telah dibayarkan pada bulan Agustus 2021.

22. Distribution of Income for the Current Year (continued)

Bonus, tantiem, and Government's profit share for 2021 were paid in August 2022.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-688/MK.06/2021 dated August 3, 2021, the Ministry of Finance determined the business surplus for the year ended 2020 amounting to Rp259,550 for the allocation of special purpose reserve amounting to Rp83,704 and general reserve amounting to Rp175,847, bonus amounting to Rp11,247, tantiem amounting to Rp4,022, and Government's profit share amounting to Rp13,570.

Bonus, tantiem, and Government's profit share for 2020 were paid in August 2021.

23. Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah**23. Interest Income and Income From Sharia**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Penugasan Umum			General Assignment
Pembiayaan dan piutang			Financing and receivables
Modal kerja	1,225,072	1,349,265	Working capital
Investasi	1,422,521	1,519,035	Investment
Konsumsi	9,906	8,759	Consumption
Pendapatan Usaha Syariah	594,439	920,739	Income from sharia
Penempatan pada bank			Placements with banks
Deposito berjangka	11,879	26,902	Time deposit
Call money	15,950	1,972	Call money
Efek-efek, Obligasi Pemerintah	25,967	26,176	Securities, Government bonds
Giro pada bank	682	441	Current accounts with banks
	<u>3,306,416</u>	<u>3,853,289</u>	
Penugasan Khusus			National Interest Account
Deposito berjangka	268,294	317,269	Time deposit
Pembiayaan dan piutang			Financing and receivables
Modal kerja	33,385	48,240	Working capital
Investasi	60,108	42,430	Investment
Pendapatan Usaha Syariah	148	--	Income from sharia
Efek-efek, Obligasi Pemerintah	42,830	--	Securities, Government bonds
Giro pada bank	361	2,292	Current account with banks
	<u>405,126</u>	<u>410,231</u>	
Total	<u>3,711,542</u>	<u>4,263,520</u>	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**23. Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah
(lanjutan)**

Berikut adalah rincian pendapatan bunga berdasarkan klasifikasi aset keuangan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Biaya perolehan diamortisasi		
Pembiayaan dan piutang	3,345,579	3,888,468
Penempatan pada bank	296,123	346,143
Giro pada bank	1,043	2,733
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Efek-efek	68,797	26,176
Total	3,711,542	4,263,520

**23. Interest Income and Income From Sharia
(continued)**

Following is the details of interest income according to the classification of financial assets for years ended December 31, 2022 and 2021:

Amortised cost
Financing and receivables
Placements with banks
Current accounts with banks
Fair value through
other comprehensive income
Securities
Total

24. Pendapatan Usaha Dari Ujrah

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, pendapatan usaha dari ujrah adalah sebesar Rp309 dan Rp Nihil.

24. Income From Ujrah

For the years ended December 31, 2022 and 2021, income from ujrah were amounted to Rp309 and Rp Nil, respectively.

25. Beban Bunga

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Rupiah		
Efek-efek utang yang diterbitkan	1,573,687	1,991,065
Pinjaman yang diterima	238,206	6,506
	1,811,893	1,997,571
Mata uang asing		
Efek-efek utang yang diterbitkan	325,016	362,717
Pinjaman yang diterima	799,205	696,927
	1,124,221	1,059,644
Total	2,936,114	3,057,215

25. Interest Expense

Interest expense was derived from:

Rupiah
Debt securities issued
Fund borrowing

Foreign currency
Debt securities issued
Fund borrowing
Total

**26. Pembentukan (Pembalikan) Kerugian
Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non
Keuangan**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Giro pada bank (Catatan 5b)	(9)	(267)
Penempatan pada bank (Catatan 6d)	(1,786)	(15,836)
Pembiayaan dan piutang, dan		
Pembiayaan dan		
piutang syariah (Catatan 9h)	1,984,984	222,000
Tagihan akseptasi (Catatan 11c)	(2,582)	(2,412)
Piutang pembiayaan		
garansi (Catatan 9i)	--	32,780
Piutang asuransi (Catatan 10a)	--	(923)
Agunan yang diambil alih (Catatan 14)	126,989	22,410
Total	2,107,596	257,752

**26. Provision (Reversal) for Impairment Losses
on Financial Assets and Non Financial Asset**

Current accounts with banks (Note 5b)
Placements with banks (Note 6d)
Financing and receivables
and sharia financing and
receivables (Note 9h)
Acceptance receivables (Note 11c)
Guarantee financing
receivables (Note 9i)
Insurance receivables (Note 10a)
Foreclosed assets (Note 14)
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

27. Beban Umum dan Administrasi**27. General and Administrative Expenses**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	109,540	108,370	Depreciation of premises and equipment (Note 13)
Jasa profesional	74,861	66,985	Professional services
Sewa	22,829	25,211	Rent
Perbaikan dan pemeliharaan	17,252	18,959	Repairs and maintenance
Komunikasi	10,058	10,882	Communications
Perjalanan dinas	8,838	6,395	Travelling
Iklan dan promosi	6,885	4,592	Advertising and promotions
Listrik dan air	3,265	3,221	Electricity and water
Corporate social responsibilities	2,975	4,163	Corporate social responsibilities
Biaya berlangganan	2,581	3,104	Subscription cost
Percetakan dan perlengkapan kantor	1,813	1,967	Printing and office supplies
Kegiatan perusahaan	1,299	722	Corporate activities
Aktivitas pegawai	387	600	Employee activities
Lain-lain	7,797	13,906	Others
Total	270,380	269,077	Total

Termasuk dalam lain-lain adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk transportasi, beban bunga atas liabilitas sewa, donasi, asuransi atas kendaraan dinas, dan bea materai.

Included in others are expenses disbursed for transportation, interest expense of lease liabilities, donation, insurance on official vehicles, and stamp duty.

28. Beban Gaji dan Tunjangan**28. Salaries and Benefits**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Beban gaji dan tunjangan	263,163	277,171	Salaries and benefits expenses
Manfaat lain-lain	69,757	42,561	Other benefits
Tunjangan hari raya	36,753	35,324	Religion holiday benefits
Pendidikan dan pelatihan	18,557	17,174	Training and education
Tunjangan kesehatan	21,314	22,320	Medical allowance
Asuransi	19,707	17,502	Insurance
Imbalan kerja (Catatan 29)	10,407	21,178	Employee benefits (Note 29)
Lain-lain	28,965	34,079	Others
Total	468,623	467,309	Total

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan adalah beban atas perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) sebesar Rp5.622 dan Rp3.739 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 9h).

Included in salaries and benefits expenses is the amount expensed arising from the difference between the employee loan's interest rates and the *Base Lending Rate* (BLR) which amounted to Rp5,622 and Rp3,739 for the year ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 9h).

Termasuk dalam lain-lain adalah honorarium atas staf ahli Dewan Direktur.

Included in others are honorarium for technical assistance of the Board of Directors.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

28. Beban Gaji dan Tunjangan (lanjutan)

Rincian gaji, tunjangan, serta jasa produksi dan tantiem atas Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2022					
Jumlah Pegawai/ Number of Employees	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowances	Bonus dan Tantiem/ Bonuses and Tantiem	Total	
Dewan Direktur	5	5,293	6,117	--	11,410
Direktur Pelaksana	6	11,591	14,304	--	25,895
Komite Audit	2	760	51	--	811
Komite Pemantau Risiko	2	750	50	--	800
Dewan Pengawas Syariah	2	683	45	--	728
Wakil Ketua Eksekutif Senior	6	6,693	10,365	838	17,896
Total	23	25,770	30,932	838	57,540

Board of Directors

Managing Directors

Audit Committee

Risk Management Committee

Sharia Supervisory Board

Senior Executive Vice President

Total

31 Desember/
December 31, 2021

Jumlah Pegawai/ Number of Employees	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowances	Bonus dan Tantiem/ Bonuses and Tantiem	Total	
Dewan Direktur	5	5,276	6,909	1,004	13,189
Direktur Pelaksana	6	11,376	13,950	2,894	28,220
Komite Audit	2	593	32	--	625
Komite Pemantau Risiko	2	559	35	--	594
Dewan Pengawas Syariah	2	630	40	--	670
Wakil Ketua Eksekutif Senior	6	6,826	11,028	746	18,600
Total	23	25,260	31,994	4,644	61,898

Board of Directors

Managing Directors

Audit Committee

Risk Management Committee

Sharia Supervisory Board

Senior Executive Vice President

Total

29. Liabilitas Imbalan Kerja

Berdasarkan kebijakan LPEI, pegawai memperoleh tunjangan dan manfaat selain gaji berupa tunjangan hari raya (THR), penggantian biaya pengobatan, tunjangan kematian, tunjangan cuti, masa persiapan pensiun, penghargaan masa bakti, dana pensiun, jasa produksi, asuransi, dan manfaat lainnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

29. Liability For Employee Benefits

Under LPEI's policy, in addition to salaries, the employees are entitled to allowances and benefits, which are religion holiday benefits (THR), medical reimbursements, death allowances, leave allowances, pension preparation period, long service award, pension plan, bonus, insurance, and other benefits based on Job Creation Law No. 11/2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**Pensiun iuran pasti**

LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. Jumlah kontribusi LPEI untuk dana pensiun adalah sebesar 6,00% dari gaji pokok pegawai yang disajikan sebagai bagian dari "beban gaji dan tunjangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah kontribusi LPEI adalah sebesar Rp3.826 dan Rp3.777 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Pensiun manfaat pasti

LPEI menyiapkan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan Peraturan Pemerintah RI No.35/2021 yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta imbalan kerja atas long-service award.

LPEI memberikan imbalan tersebut mana yang lebih tinggi antara Peraturan Perusahaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020.

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal tertanggal 9 Januari 2023 dan 3 Januari 2022, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021:

Penyisihan imbalan kerja

Penyisihan imbalan kerja terdiri dari:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Program imbalan pascakerja	63,403	80,613
Imbalan jangka panjang lainnya	79,381	75,749
Program PKWT	1,730	1,313
Saldo akhir	144,514	157,675

Program imbalan pascakerja terdiri dari program pesangon dan program kesehatan pensiun. Program imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari program masa persiapan pensiun, program penghargaan masa kerja, dan program cuti besar berimbalan.

**29. Liability For Employee Benefits
(continued)****Defined contribution plan**

LPEI implements a defined contribution plan covering all of their permanent employees, which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. LPEI's contribution to the pension plan retirement fund is 6.00% of the employees' basic salaries and is presented as part of "salaries and benefits" in the statements of profit or loss and other comprehensive income. LPEI's contributions were amounted to Rp3,826 and Rp3,777 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

Defined benefit plan

LPEI has provided allowance for employee long-service and post-employment benefits in accordance with Job Creation Law No.11/2020 and Government Regulation of The Republic of Indonesia No.35/2021 which include severance fee, service pay benefits, and compensation fees as well as employee benefit long-service award.

LPEI has provided the benefits whichever is higher between Collective Labor Agreement with Job Creation Law No.11/2020.

Liability for employee benefits is computed by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal dated January 9, 2023 and January 3, 2022 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively:

Provision for employee benefits

The provision for employee benefits consist of:

Post-employment benefit plan
Other long-term employee benefit
PKWT Program
Ending balance

Post-employment benefit plan consist of severance cost and pension healthcare. Other long-term employee benefit consist of period prior to pension, long service pay, and long service leave.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Penyisihan imbalan kerja (lanjutan)

Beban yang diakui di laba rugi untuk imbalan kerja adalah:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Program imbalan pascakerja	1,822	28,757
Imbalan jangka panjang lainnya	7,848	(8,902)
Program PKWT	737	1,323
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	10,407	21,178

Beban yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan klasifikasi akun adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Beban gaji dan tunjangan (Catatan 28)	10,407	21,178
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - kerugian/(laba) aktuarial	(3,935)	(35,749)
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	6,472	(14,571)

Program imbalan pascakerja

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Tingkat diskonto pertahun	7.40%	7.50%
Tingkat kenaikan Gaji per tahun	4.00%	4.00%
Tingkat pengunduran diri pertahun untuk pegawai di bawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3.50%	3.50%
Tingkat kematian	TMI Tahun 2019	TMI Tahun 2019
Usia pensiun	56 tahun/years	56 tahun/years
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan	17.35	18.49

**29. Liability For Employee Benefits
(continued)**

**Provision for employee benefits
(continued)**

The expense recognized in the profit or loss for the employee benefits are as follows:

Post-employment benefit plan
Other long-term employee benefit
PKWT program
Expense recognized in the
statement of profit or loss

The expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income based on account classification are as follows:

Salaries and benefits expense (Note 28)
Remeasurement of liability
for employee benefits -
actuarial loss/(gains)
Expense recognized in the
consolidated statement
of profit or loss and
other comprehensive income

Post-employment benefit plan

The following are the significant items disclosed in the actuarial reports:

Annual discount rates
Increase rates
Annual salary
Annual resignation rates
for employee before
the age of 30 and will
decrease until 0% at the age of 46
Mortality rate
Retirement age
Average remaining
working periods

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**Program imbalan pascakerja (lanjutan)**

- a. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Biaya jasa kini dan jasa lalu	(716)	8,450
Biaya bunga	5,496	6,500
Beban pesangon	13,085	--
(Keuntungan) / kerugian aktuarial	(8,241)	13,807
Dampak perubahan metode atribusi	(7,802)	--
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian	1,822	28,757
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto:		
Keuntungan aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	772	(19,114)
Keuntungan aktuarial dari penyesuaian sebelumnya	(4,707)	(16,634)
Keuntungan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(3,935)	(35,748)
Total beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(2,113)	(6,991)

- b. Perubahan cadangan penyisihan adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Saldo awal	80,613	91,461
Penambahan tahun berjalan	1,822	28,757
Nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(3,935)	(35,749)
Pembayaran tahun berjalan	(15,097)	(3,856)
Saldo akhir	63,403	80,613

- c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Saldo awal tahun	80,613	91,461
Biaya jasa kini	10,126	11,858
(Kurtailmen) / Settlement	(8,242)	13,806
Biaya jasa lalu	(10,842)	(3,408)
Biaya bunga	5,497	6,500
Dampak perubahan metode atribusi	(7,802)	--
Beban pesangon	13,085	--
Pembayaran tahun berjalan	(15,097)	(3,856)
Pengukuran kembali kerugian aktuarial:		
Kerugian aktuarial dari penyesuaian perubahan metode atribusi	--	--
Keuntungan aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	772	(19,114)
Keuntungan aktuarial dari penyesuaian sebelumnya	(4,707)	(16,634)
Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan kerja	63,403	80,613

29. Liability For Employee Benefits (continued)**Post-employment benefit plan (continued)**

- a. Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for employee benefit plan follows:

Current and past service cost
Interest cost
Termination cost
Actuarial (gain) / loss
Impact on changes in attribution method
Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss
Remeasurement of the net liability for employee benefits:
Actuarial gains from changes in financial assumption
Actuarial gains from experience adjustments
Gain recognized in other comprehensive income
Total expense recognized in the the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

- b. The movements in the allowance are as follows:

Beginning balance
Addition during the year
Amount recognized in other comprehensive income
Payment during the year
Ending balance

- c. The movements for the present value of employee benefit are as follows:

Balance at beginning of the year
Current service cost
(Curtailment) / Settlement
Past service cost
Interest cost
Impact on changes in attribution method
Termination Cost
Payment during the year
Remeasurement of actuarial losses:
Actuarial loss from changes in attribution method
Actuarial gain from changes in financial assumption
Actuarial gain from experience adjustments
Ending balance present value of employee benefit liabilities

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pascakerja (lanjutan)

d. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko
tingkat diskonto (tidak diaudit):

31 Desember/ December 31, 2022			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	6,516	-1%	1,316
+1%	(5,597)	+1%	(885)
31 Desember/ December 31, 2021			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	14,624	-1%	618
+1%	(16,269)	+1%	(673)

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko
tingkat kenaikan gaji (tidak diaudit)

29. Liability for Employee Benefits (continued)

Post-employment benefit plan (continued)

d. Sensitivity analysis for discount rate risk
(unaudited):

31 Desember/ December 31, 2022			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	6,516	-1%	1,316
+1%	(5,597)	+1%	(885)
31 Desember/ December 31, 2021			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	14,624	-1%	618
+1%	(16,269)	+1%	(673)

e. Sensitivity analysis for salary increase risk
(unaudited)

31 Desember/ December 31, 2022			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	(7,897)	-1%	(1,285)
+1%	9,063	+1%	1,780
31 Desember/ December 31, 2021			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	(16,896)	-1%	(711)
+1%	15,163	+1%	651

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**Program imbalan pascakerja (lanjutan)**

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

- f. Jatuh tempo dari liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2022						
Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/Amount Benefit Payment for Pension	Jumlah Pembayaran Manfaat MPP/Amount Benefit Payment for MPP	Pembayaran Manfaat OLTEB/Amount of Benefit Payment for OLTEB	Pembayaran Manfaat Kesehatan/Amount of Benefit Payment for Healthcare	Pembayaran Manfaat PKWT/Amount of Benefit Payment for PKWT	Total	
Di bawah 1 tahun	1,721	933	4,521	196	1,811	9,182
Antara 1 - 2 tahun	4,142	3,980	8,492	108	335	17,057
Antara 2 - 3 tahun	11,771	4,862	6,594	138	93	23,458
Antara 3 - 4 tahun	4,476	3,574	9,342	289	--	17,681
Antara 4 - 5 tahun	10,695	5,402	6,047	395	--	22,539
Di atas 5 tahun	431,092	268,334	169,178	200,947	--	1,069,551

Below 1 year
Within 1 - 2 years
Within 2 - 3 years
Within 3 - 4 years
Within 4 - 5 years
Up 5 years

31 Desember/ December 31, 2021						
Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/Amount Benefit Payment for Pension	Jumlah Pembayaran Manfaat MPP/Amount Benefit Payment for MPP	Pembayaran Manfaat OLTEB/Amount of Benefit Payment for OLTEB	Pembayaran Manfaat Kesehatan/Amount of Benefit Payment for Healthcare	Pembayaran Manfaat PKWT/Amount of Benefit Payment for PKWT	Total	
Di bawah 1 tahun	4,666	--	3,787	192	1,795	10,440
Antara 1 - 2 tahun	7,995	--	4,331	464	227	13,017
Antara 2 - 3 tahun	9,488	--	8,872	416	--	18,776
Antara 3 - 4 tahun	16,971	--	7,224	623	--	24,818
Antara 4 - 5 tahun	12,614	--	10,357	576	--	23,547
Di atas 5 tahun	711,624	--	169,239	14,700	--	895,563

Below 1 year
Within 1 - 2 years
Within 2 - 3 years
Within 3 - 4 years
Within 4 - 5 years
Up 5 years

Rata-rata durasi dari liabilitas imbalan pasca-kerja adalah 17,35 dan 18,49 tahun pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

29. Liability for Employee Benefits (continued)**Post-employment benefit plan (continued)**

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

- f. The maturity of the obligation for post-employment benefits as of December 31, 2022 and 2021 is as follows:

The average of duration of the obligation for post employment benefits is 17.35 and 18.49 for the years as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**Imbalan jangka panjang lainnya**

Imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari *Long-Service Award (LSA)*, masa persiapan pensiun, pemberian logam mulia, dan *long leave (LL)*.

Asumsi-asumsi yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungan imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Tingkat diskonto tahunan	7.40%	7.10%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	4.00%	4.00%
Tingkat pengunduran diri tahunan untuk pegawai dibawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3.50%	3.50%
Tingkat kematian	TMI Tahun 2019	TMI Tahun 2019
Usia pensiun	56 tahun/years	56 tahun/years
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan	11.73	12.03

a. Beban imbalan jangka panjang lainnya yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Biaya jasa kini dan jasa lalu	11,699	12,819
Biaya bunga	5,347	6,157
(Keuntungan) / kerugian aktuarial	(9,198)	(27,878)
Pendapatan/(beban) yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian	7,848	(8,902)

b. Perubahan penyisihan adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Saldo awal	75,749	91,092
Penambahan tahun berjalan	7,848	(8,902)
Pembayaran tahun berjalan	(4,216)	(6,441)
Saldo akhir	79,381	75,749

29. Liability For Employee Benefits (continued)**Other long-term benefits**

Other long-term benefits consist of Long-Service Award (LSA), pre-retirement period, gold granting, and long leave (LL).

The assumptions used by the actuary for other long-term benefits calculation are as follows:

	31 Desember / December 31,
	2022
Tingkat diskonto tahunan	7.10%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	4.00%
Tingkat pengunduran diri tahunan untuk pegawai sebelum usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3.50%
Tingkat kematian	TMI Tahun 2019
Usia pensiun	56 tahun/years
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan	12.03

a. Other long term benefit plan expense recognized in profit or loss are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
	2022
Biaya jasa kini dan jasa lalu	12,819
Biaya bunga	6,157
(Keuntungan) / kerugian aktuarial	(27,878)
Pendapatan/(beban) yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian	(8,902)

b. The movements in the provision are as follows:

	31 Desember / December 31,
	2022
Saldo awal	91,092
Penambahan tahun berjalan	(8,902)
Pembayaran tahun berjalan	(6,441)
Saldo akhir	75,749

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)**

- c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Saldo awal tahun	75,749	91,092
Biaya jasa kini	11,699	12,819
(Kurtailmen) / Settlement	(5,149)	(16,041)
Biaya bunga	5,347	6,157
Pembayaran tahun berjalan	(4,216)	(6,441)
Pengukuran kembali kerugian aktuarial:		
Keuntungan aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	(304)	(4,742)
Keuntungan aktuarial dari penyesuaian sebelumnya	(3,745)	(7,095)
Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan kerja	79,381	75,749

- d. Saldo imbalan kerja untuk posisi 31 Desember 2022 dan posisi selama empat tahun sebelumnya:

	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019	2018
Nilai kini dari liabilitas imbalan kerja	(144,514)	(157,675)	(182,553)	(292,329)	(231,274)
Penyesuaian asumsi pada liabilitas program	8,452	23,729	53,501	15,015	20,669

- e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (tidak diaudit)

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas atas nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini dengan asumsi perubahan atas tingkat diskonto:

31 Desember/ December 31, 2022			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	6,315	-1%	1,032
1%	(5,543)	1%	(768)
31 Desember/ December 31, 2021			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	3,154	-1%	150
1%	(2,823)	1%	(131)

29. Liability For Employee Benefits (continued)**Other long-term benefits (continued)**

- c. The movements for the present value of other long term benefit plan are as follows:

Balance at beginning of the year
Current service cost
(Curtailment) / Settlement
Interest cost
Payment during the year
Remeasurement of actuarial losses:
Actuarial gain from changes in financial assumption
Actuarial gain from experience adjustments
Ending balance present value of employee benefit liabilities

- d. Balance of employee benefits as of December 31, 2022 and previous four years are as follows:

Present value of employee benefit obligation
Experience adjustments on plan liabilities

- e. Sensitivity analysis for discount rate risk (unaudited)

The tables below show the sensitivity analysis of the present value of employee benefit liabilities and current service cost in the assumed changes in the discount rate:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

f. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko
kenaikan gaji (tidak diaudit):

31 Desember/ December 31, 2022			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	(5,762)	-1%	(822)
1%	6,466	1%	1,080
31 Desember/ December 31, 2021			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	(2,929)	-1%	(136)
1%	3,221	1%	154

30. Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan kontinjensi LPEI adalah
sebagai berikut:

30. Commitments and Contingencies

LPEI's commitments and contingencies are as
follows:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
KOMITMEN			COMMITMENTS
Liabilitas komitmen			Commitment liabilities
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,031,216	1,550,691	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	7,652	Outstanding irrevocable L/C
	1,031,216	1,558,343	
Pihak ketiga			Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	622,869	817,092	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	4,727	168,766	Outstanding irrevocable L/C
	627,596	985,858	
Total Rupiah	1,658,812	2,544,201	Total Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	257,807	205,390	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	54,973	82,983	Outstanding irrevocable L/C
	312,780	288,373	
Pihak ketiga			Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,193,536	1,643,929	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	335,371	119,695	Outstanding irrevocable L/C
	1,528,907	1,763,624	
Total mata uang asing	1,841,687	2,051,997	Total foreign currencies
Total liabilitas komitmen	3,500,499	4,596,198	Total commitment liabilities
Komitmen	(3,500,499)	(4,596,198)	Commitments

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

30. Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)**30. Commitments
(continued)****and Contingencies**

	31 Desember/December 31		
	2022	2021	
KONTINJENSI			CONTINGENCIES
Tagihan kontinjensi			Contingent receivables
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Pendapatan bunga kredit bermasalah	238,804	204,015	Interest income on non-performing loans
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan bunga kredit bermasalah	4,776,499	4,377,810	Interest income on non-performing loans
Mata uang asing			Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Pendapatan bunga kredit bermasalah	152,762	130,413	Interest income on non-performing loans
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan bunga kredit bermasalah	2,228,920	1,879,527	Interest income on non-performing loans
Total tagihan kontinjensi	7,396,985	6,591,765	Total contingent receivables
Liabilitas kontinjensi			Contingent liabilities
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Penjaminan kredit - PEN	1,000,000	1,078,000	Credit guarantee - PEN
Asuransi kegagalan ekspor	400,000	--	Failure on export insurance
Bank garansi	368,830	223,835	Bank guarantee
	1,768,830	1,301,835	
Pihak ketiga			Third parties
Penjaminan kredit - PEN	1,786,550	2,817,315	Credit guarantee - PEN
Bank garansi	1,019,820	1,247,252	Bank guarantee
Asuransi kegagalan ekspor	649,769	643,548	Failure on export insurance
Proteksi piutang dagang	221,380	251,313	Receivable protection
	3,677,519	4,959,428	
Mata uang asing			Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Bank garansi	1,173,996	1,990,968	Bank guarantee
Asuransi kegagalan ekspor	420,323	9,997	Failure on export insurance
Proteksi piutang dagang	26,776	--	Receivable protection
Pihak ketiga			Third parties
Asuransi kegagalan ekspor	10,511,176	6,025,056	Failure on export insurance
Bank garansi	6,168,911	4,832,775	Bank guarantee
Proteksi piutang dagang	4,553,277	4,008,495	Receivable protection
Penjaminan kredit - PEN	910,699	946,081	Credit guarantee - PEN
	23,765,158	17,813,372	
Total liabilitas kontinjensi	29,211,507	24,074,635	Total contingent liabilities
Kontinjensi - neto	(21,814,522)	(17,482,870)	Contingencies - net

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 32.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

31. Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dilakukan berdasarkan Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI dengan mencakup pemenuhan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat. Penerapan ini dilaksanakan melalui (i) implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional sehingga manajemen risiko mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas operasionalnya dan (ii) pengelolaan permodalan agar mampu menyerap risiko yang dihadapi LPEI.

Pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 208/PMK.06/2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI, bentuk penerapannya paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Sasaran Penerapan Manajemen Risiko LPEI adalah untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko yang antara lain berfungsi sebagai penyaring dan pemberi peringatan dini (*early warning system*) Lembaga dalam melaksanakan kegiatan usaha.

LPEI menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, kriteria, kompleksitas, serta kemampuan mengelola risiko yang baik yang diharapkan tidak hanya meningkatkan *stakeholder value*, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi kerugian yang mungkin dihadapi di masa mendatang, memelihara tingkat *risk-adjusted-return* yang optimal dan membantu dalam proses pengambilan keputusan usaha secara tepat.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

31. Risk Management

LPEI implements risk management in accordance with Article 17 Law No. 2 Year 2009 about LPEI Article 17 which encompasses the fulfillment of capital adequacy, active supervision, and compliance of market discipline against inherent risk. This implementation is realized in the form of (i) risk management implementation in each and every operational activity so that risk management becomes an inseparable part of every operational activity and (ii) capital management in order to be able to absorb risks that LPEI faces.

The process and system of effective risk management are being carried out in accordance to the Regulation of the Minister of Finance No. 208/PMK.06/2021 regarding Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles, in which the forms of application at the very least include:

1. Active monitoring by the Board of Directors and Managing Directors;
2. Adequate policies, procedures, and indetermining risk barrier;
3. Adequate process in identifying, measuring, monitoring, risk control, and system information of risk management; and
4. Comprehensive internal control system.

The target of LPEI Risk Management Implementation is to maintain and/or improve the health status of LPEI by applying the precautionary principle and risk management which, among other things. Function as a filter and early warning system for institutions in carrying out business activities.

LPEI applied effective risk management which aligned with target, policy, criteria, complexity, and good risk mitigation, which expected to increase stakeholder value and provide a good prediction of potential loss in the upcoming future. This also expected to maintain optimum risk-adjusted-return and also helping on making a good decision.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

31. Manajemen Risiko (lanjutan)

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, risiko yang dihadapi LPEI juga berkembang secara luas, antara lain mencakup risiko kredit, risiko asuransi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko investasi serta risiko imbal hasil khusus untuk Unit Usaha Syariah. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dibanding jenis risiko lainnya. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI, termasuk di dalamnya risiko penjaminan.

Pada tahun 2022, LPEI tengah berproses dalam menata kembali kebijakan manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan penerapan kerangka manajemen risiko yang sesuai dengan POJK No. 9/POJK.05/2022, khususnya pada cakupan jenis risiko, *Risk Appetite Statement*, pengkinian *three lines model*, alat dan metodologi pengukuran, menjalankan *Early Warning Detection* berkala terhadap portofolio pembiayaan yang berpotensi mengalami pemburukan, melakukan pengkinian *Industry Financing Reference* dan *Portfolio Guideline*, hingga inisiatif pengembangan Manajemen Risiko Operasional dalam rangka mendukung *Enterprise Risk Management Framework*. Pengelolaan risiko juga termasuk pengelolaan risiko penugasan khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI.

Penerapan manajemen risiko dicerminkan dari hasil penilaian profil risiko LPEI yang mencakup penilaian risiko inheren, yaitu penilaian atas risiko yang melekat (*inherent*) pada pelaksanaan kegiatan usaha LPEI, yang mencakup pembiayaan, penjaminan dan asuransi, dan penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencakup seluruh pilar-pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana penerapan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko akan menghasilkan Profil Risiko secara komposit. Profil risiko LPEI merupakan salah satu faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0001/PDD/11/2012 tentang Pedoman Tingkat Kesehatan LPEI.

31. Risk Management (continued)

In line with the development of business activities, LPEI also deal with higher risk. This risk are including credit risk, insurance risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, and investment risk as well as risk of return specifically for Sharia Business Units. Credit risk is the most significant among others. Credit risk is a risk that occurred because of the failure of the debtor, which causes not fulfilled to pay off debt.

In 2022, LPEI is in the process of reorganizing risk management policies, risk management processes, and the implementation of a risk management framework in accordance with POJK No. 9/POJK.05/2022, especially in the scope of risk types, Risk Appetite Statement, updating three lines models, measurement tools and methodologies, running periodic Early Warning Detection of financing portfolios that have the potential to experience aggravation, updating the Industry Financing Reference and Portfolio Guidelines, to initiatives to develop Operational Risk Management in order to support the Enterprise Risk Management Framework. Risk management also includes risk management of special assignments through the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 183/PMK.08/2021 concerning Special Assignments to LPEI.

Risk management implementation also reflected in LPEI risk profile assesment that consist of inherent risk assessment of inherent risks (inherent) in the implementation of LPEI business activities. Activity that include financing activity, guarantee and insurance, and an assesment of the Quality of Implementation of Risk Management (KPMR) which includes all pillars of risk management implementation in accordance with the Financial Services Authority Regulations. The result of inherent risk assesment and risk control management implementation quality assesment will produce a composite Risk Profile. The LPEI's risk profile which is one of the factors in Risk Based LPEI Rating as stipulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0001/PDD/11/2012 concerning LPEI Risk Based LPEI Rating Guidelines.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

31. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dalam kerangka manajemen risiko terpadu (*enterprise risk management*), LPEI menerapkan konsep *three lines of defense*, yakni:

- Lini pertama (*First line*) merupakan unit kerja yang berada pada setiap *risk-taking function* yang mana merupakan unit kerja pemilik risiko (*risk owners*) yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pencapaian kegiatan usaha dan pelaksanaan mandat LPEI serta unit kerja yang merupakan pendukung langsung dari unit kerja pemilik risiko (*risk owner*) tersebut. Lini pertama melakukan *self-assurance* berupa menerapkan budaya kepatuhan dan budaya peduli risiko pada setiap kegiatan yang dilakukan.
- Lini kedua (*Second line*) merupakan fungsi Manajemen Risiko yang fokus pada pengembangan metodologi terkait manajemen risiko, termasuk di dalamnya fungsi Analisa Risiko Bisnis sebagai *four eyes principles* pada level transaksi, dan fungsi kepatuhan. Lini kedua memiliki peran antara lain pemantauan, pemberian advis, pengujian, analisis, pengaturan, dan pelaporan tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
- Lini ketiga (*Third line*) merupakan Audit Function yang berfungsi melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja termasuk berfungsi untuk melakukan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI. Lini ketiga memiliki peran antara lain memberikan *assurance* dan melakukan evaluasi yang independen dan objektif terhadap pengendalian internal, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Manajemen Risiko dalam Kondisi COVID-19

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap tingkat risiko yang dihadapi LPEI walaupun tidak secara signifikan. Hal ini tercermin dalam hasil penilaian Profil Risiko LPEI posisi triwulan I 2022 menunjukkan peringkat komposit 3 (PK-3) atau sama bila dibandingkan dengan Tingkat Kesehatan LPEI posisi triwulan IV 2021.

31. Risk Management (continued)

In the organizational structure to enterprise risk management. LPEI has implemented the concept of three lines of defense:

- The first line is a work unit that is in every risk-taking function which is a risk owner work unit that is directly responsible for the achievement of business activities and the implementation of the LPEI mandate as well as a work unit that is a direct supporter of the risk owner's work unit. The first line of self-assurance is to implement a culture of compliance and a culture of risk care in every activity carried out.
- The second line is a Risk Management function that focuses on developing methodologies related to risk management, including the Business Risk Analysis function as four eyes principles at the transaction level, and the compliance function. The second line has roles including monitoring, advising, testing, analysis, regulation, and reporting on matters related to risk management and compliance.
- The third line is an Audit Function that functions to audit the implementation of activities in all work units, including functioning to independently assess the effectiveness of the implementation of Risk Management and internal control in LPEI. The third line has a role, including providing assurance and conducting an independent and objective evaluation of internal control, and governance implementation and risk management.

Risk Management During Covid-19 Pandemic

The Covid-19 pandemic has affected the level of risk that LPEI faced, albeit not significantly. This is reflected in the outcome of LPEI's Risk Profile assessment as of 31 March 2022, which resulted in Rank 3 (PK-3) or relatively stable compared to the results of LPEI's Soundness Level (TK) assessment as of 31 December 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

31. Manajemen Risiko (lanjutan)**Manajemen Risiko dalam Kondisi
COVID-19 (lanjutan)**

Dari segi kebijakan, LPEI telah menyusun regulasi terkait debitur terdampak pandemi Covid-19 melalui Peraturan Direktur Eksekutif No. 0012/PDE/04/2021 tentang Manual Operasional Tindak Lanjut Pengelolaan Nasabah terdampak COVID-19.

Regulasi ini disusun sesuai dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang "Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank" yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang "Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank" serta sebagai pedoman dan panduan bagi unit-unit kerja terkait dalam penetapan tindak lanjut bagi debitur LPEI yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tetap memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

Kebijakan ini mengatur kriteria sektor usaha dan debitur yang terdampak penyebaran Covid-19, kriteria restrukturisasi debitur terdampak Covid-19, bentuk restrukturisasi pembiayaan, penetapan kualitas pembiayaan bagi debitur terdampak Covid-19, dan ketentuan lain terkait tindak lanjut pengelolaan debitur terdampak Covid-19. Pengambilan keputusan atas restrukturisasi dilakukan oleh Komite Pembiayaan dan dengan mekanisme proses persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, diharapkan debitur-debitur terdampak penyebaran Covid-19 dapat terbantu dan kualitas portofolio tetap terjaga.

31. Risk Management (continued)**Risk Management During Covid-19
Pandemic (continued)**

In terms of policy, LPEI has established a regulation regarding debtors being impacted with the Covid-19 pandemic by ratifying the Regulation of the Executive Director No. 0012/PDE/04/2021 about Follow-Up Actions to Manage Debtors Affected by COVID-19.

This regulation was prepared in accordance with the issuance of the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.05/2020 concerning "Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Nonbank Financial Service Institutions" which has been amended by Financial Services Authority Regulation No. 58/POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.05/2020 concerning "Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Nonbank Financial Services Institutions" as well as guidelines for related work units in determining follow-up for LPEI debtors affected by the Covid-19 pandemic, so that in the implementation of these activities they continue to meet the principles of good corporate governance, the application of risk management, and the principle of knowing customers.

This policy states the criteria of which economic sectors and debtors are categorized of being impacted by Covid-19, restructuring criteria of impacted debtors, forms of restructuring, stipulation of impacted debtors' loan qualities, and other related regulations regarding the management of debtors being impacted by the Covid-19 pandemic. All decision making processes are carried out by the Financing Committee in accordance to the applicable regulations. By ratifying this policy, debtors being impacted by the Covid-19 pandemic could hopefully be eased of their burdens and its portfolio quality could be maintain.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

31. Manajemen Risiko (lanjutan)**Manajemen Risiko dalam Kondisi COVID-19 (lanjutan)**

Terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, LPEI telah melakukan kajian maupun *backtesting* pada beberapa alat pengukuran risiko, yaitu pelaksanaan *Stress Testing* secara berkala. LPEI telah melakukan *backtesting* terhadap *forward looking model* PD yang telah diimplementasikan saat ini serta permodelan kembali atas komponen historis dan *forward looking* untuk perhitungan ECL (PD, LGD, dan EAD) untuk mengakomodasi dampak pandemi Covid-19.

32. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI, termasuk di dalamnya risiko penjaminan. Jenis risiko ini merupakan risiko terbesar yang dihadapi LPEI. LPEI menerapkan manajemen risiko kredit melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko kredit baik secara individual maupun secara portofolio. Pembiayaan posisi 31 Desember 2022 memiliki rasio NPF Gross sebesar 26,61% meningkat terhadap posisi 31 Desember 2021 sebelumnya yang sebesar 21,03%. Rasio NPF Net posisi 31 Desember 2022 sebesar 10,39% naik terhadap posisi 31 Desember 2021 yang sebesar 7,12%. Pengelolaan risiko kredit diantaranya dilakukan dengan pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima untuk individu debitur, pengelolaan limit pada batasan geografis tertentu, pengelolaan limit konsentrasi per industry, dan sektor ekonomi tertentu. Penetapan limit juga dilakukan melalui penggolongan risiko kredit (*rating*) per individual debitur. *Rating* risiko kredit dikinikan secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko kredit akibat ekspansi pembiayaan dan penentuan tindak lanjut perbaikan. Penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulator, namun merupakan suatu tuntutan manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktik di lembaga keuangan, sehingga diharapkan mampu mendorong kegiatan usaha LPEI.

31. Risk Management (continued)**Risk Management During The Covid-19 Pandemic (continued)**

Still on the topic of the ongoing Covid-19 pandemic, LPEI has conducted studies and *backtesting* processes on several risk measurement tools, including conducting *Stress Testing* practices regularly. LPEI has performed *back-testing* on the current *forward looking PD model* and re-modeling of the historical and forward looking ECL components (i.e., PD, LGD, and EAD) to accommodate the impact of the Covid-19 pandemic.

32. Credit Risk

Credit risk is defined as the risk of the inability of debtors or counterparties to fulfill its obligation to LPEI (counterparties default). This type of risk is the biggest risk which is faced by LPEI. LPEI implements credit risk management through the stages of identification, measurement, control, and monitoring of credit risk either individually or as a portfolio. Financing position December 31, 2022 has a Gross NPF ratio at 26.61%, which increased from the December 31, 2021 position of 21.03%. Net NPF ratio of December 31, 2022 was 10.39%, a increase from December 31, 2021 position at 7.12%. Credit risk management implemented by managing risk exposure at acceptable limit for individual debtors, specific geographic boundaries, concentration limit per industry, and economic sectors. Set-up limit is also done through the classification of credit risk (*rating*) per individual debtor. Credit risk ratings are periodically updated to estimate potential losses (as credit risk) as a result of financing expansion and determining follow-up improvement. Credit risk management is not only intended to comply with regulator, but also Management's intention to implement credit risk management system at the optimum risk and return and commonly practiced in financial institutions, so that is expected to encourage LPEI's business activities.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

Proses analisa dan persetujuan pembiayaan diawali dengan proses pengenalan calon debitur melalui penilaian tingkat risiko masing-masing calon debitur dengan menggunakan IEB *Credit Risk Rating System* untuk pembiayaan korporasi. Hasil *rating* dimaksud dipergunakan pula untuk penerapan *risk-based pricing* dalam *Asset Liabilities Committee (ALCO)*.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh unit bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak pembiayaan dimaksud diberikan sampai dengan pelunasannya. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas pembiayaan untuk mencegah terjadinya *Non-Performing Loan (NPL)* termasuk memantau ada atau tidaknya bukti objektif penurunan nilai serta perhitungan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) baik secara kolektif maupun secara individual.

Melalui penerapan *Early Warning Detection (EWD)* terhadap kondisi perkembangan debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk mendukung pembiayaan ekspor nasional.

Pengelolaan risiko kredit di LPEI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan LPEI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundangan-undangan termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

- a. Analisis eksposur maksimum risiko kredit dengan mempertimbangkan dampak keuangan dari agunan dan peningkatan kredit lainnya.

32. Credit Risk (continued)

Loan analysis and approval process begins with the introduction of the applicants through risk evaluation of each prospective debtor by using the IEB Credit Risk Rating System for corporate funding. Rating result is also used by the Asset Liabilities Committee (ALCO) to set risk-based pricing.

In granting its financing, the business unit has considered credit risk since loan being drawdowned up until the said facility is settled. Monitoring of loan quality is conducted periodically to prevent non-performing loans (NPL), including to monitor any objective evidence of impairment, as well as to calculate the allowance for impairment losses, both collectively and individually.

Through the implementation of Early Warning Detection (EWD) in monitoring debtors, therefore effective credit risk management can minimize the risk of losses and optimize the use of capital to support national export financing.

The purpose of LPEI's credit risk management is to manage the possible losses on loan and other financial contracts default at minimum level, both as individual and as loan portfolio. Besides, credit risk management also intended to comply with regulations including the Regulation of the Minister of Finance and Financial Services Authority.

- a. *Analysis of maximum exposure to credit risk considering the financial effect of collateral and other credit enhancement.*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan LPEI selain pembiayaan dan piutang merupakan eksposur maksimum risiko kredit per tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Pembiayaan dan piutang LPEI dijamin dengan agunan (misalnya piutang, persediaan, mesin, dan lain-lain). LPEI menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa depan untuk tujuan penurunan jika pembiayaan dan piutang bersifat *collateral dependent* dan penyitaan agunan kemungkinan besar terjadi berdasarkan perjanjian.

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang diserahkan oleh debitur dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada LPEI sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau adendumnya.

Objek agunan yang dibiayai berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan dan fungsi agunan berupa objek yang dibiayai tersebut tidak hanya sebagai bukti penggunaan pembiayaan, keseriusan/kesungguhan debitur atau calon debitur, tetapi juga sebagai faktor pengurang risiko pembiayaan dikemudian hari jika fasilitas pembiayaan yang diberikan tersebut mengalami macet.

Untuk meminimalkan risiko, LPEI mengutamakan untuk memperoleh aset tetap sebagai agunan.

Manajemen meyakini kemampuan LPEI untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pembiayaan dan piutang berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- LPEI telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses pembiayaan dan piutang yang mencakup seluruh aspek pemberian pembiayaan dan piutang yang dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan dan piutang harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.

32. Credit Risk (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the carrying value of LPEI's financial assets other than financing and receivables represents the maximum exposure to credit risk.

LPEI's financing and receivables are secured by collateral (e.g. receivables, inventories, machineries, and etc.). LPEI uses the fair value of collateral as a basis of future cash flows for impairment purposes if financing and receivables are collateral dependent and foreclosure of collateral is most likely to occur based on the agreement.

Collateral is the right and power over tangible and/or intangible assets submitted by the debtor and/or a third party as owner of the collateral to LPEI as a second way out to ensure repayment of a debt of the debtor, if financing cannot be paid based on receipt of the financing agreement time or its addendum.

Object of financed collateral are follows moveable and immoveable goods funded by financing and function of object collateral not only as evidence of financing, seriousness/earnestness debtor, but also as a risk-reducing financing in the future if the financing facilities cannot be paid.

To minimize the risk, LPEI prioritizes to acquire fixed assets as collateral.

Management believes on LPEI's ability to control and sustain minimal exposure on credit risk of LPEI resulting from its financing and receivables based on the following:

- LPEI has written financing and receivables policy and manual procedures that covers all aspects of LPEI's lending activities. At all times, the financing and receivables must adhere to the requirements of LPEI's policy.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

Manajemen meyakini kemampuan LPEI untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pembiayaan dan piutang berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- LPEI telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui “early warning system” dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh pembiayaan dan piutang diberikan dengan agunan, kecuali untuk jenis pembiayaan dan piutang tertentu seperti fasilitas antar bank (pinjaman yang diberikan).

b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

1) Sektor geografis, neto cadangan kerugian penurunan nilai

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit LPEI pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung pembiayaan dan piutang lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

31 Desember/ December 31, 2022									
Dalam Negeri/Domestic									
DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total	
Giro pada Bank Indonesia	426	--	--	--	--	--	--	426	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	88,818	512	--	--	--	--	91,316	180,646	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	7,923,192	3,749,725	--	--	--	--	887,338	12,560,255	Placements with banks
Efek-efek	1,970,120	--	--	--	--	--	--	1,970,120	Securities
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang									Financing and receivables
Modal kerja	12,072,218	3,659,303	4,528,160	7,941,506	1,935,572	1,132,726	1,163,310	32,432,795	Working capital
Investasi	16,378,594	3,342,222	789,274	1,870,148	4,690,822	4,027,930	1,956,994	33,183,175	Investment
Konsumsi	134,340	2,744	--	--	--	--	--	137,084	Consumption
Piutang pembiayaan garansi	281,667	--	--	--	--	--	--	281,667	Guarantee financing receivables
Piutang asuransi dan penjaminan	288,989	--	--	--	--	--	--	288,989	Insurance and guarantee receivables
Tagihan akseptasi	122,739	2,156	3,578	22,444	--	--	--	150,917	Acceptances receivable
Aset lain-lain neto *)	38,485	--	--	--	--	--	--	38,485	Other assets - net *)
Neto	39,299,588	10,756,662	5,321,012	9,834,098	6,626,394	5,160,656	3,120,304	1,105,845	81,224,559

31 Desember/ December 31, 2021									
Dalam Negeri/Domestic									
DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total	
Giro pada Bank Indonesia	2,318	--	--	--	--	--	--	2,318	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	626,993	508	--	--	--	--	46,605	674,106	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	12,404,768	3,563,390	--	399,996	--	--	270,792	16,638,946	Placements with banks
Efek-efek	560,050	--	--	--	--	--	--	560,050	Securities
Tagihan derivatif	6	--	--	--	--	--	--	6	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang									Financing and receivables
Modal kerja	11,065,064	3,362,640	4,458,804	8,679,027	2,444,139	1,439,169	815,165	398,950	Working capital
Investasi	15,498,535	2,490,825	1,158,057	2,308,917	3,969,991	5,613,456	1,699,974	484,449	Investment
Konsumsi	125,582	2,235	--	--	--	--	--	127,817	Consumption
Piutang pembiayaan garansi	257,875	--	--	--	--	--	--	257,875	Guarantee financing receivables
Piutang asuransi dan penjaminan	285,656	--	--	--	--	--	--	285,656	Insurance and guarantee receivables
Tagihan akseptasi	387,901	37,366	--	33,363	--	--	--	458,630	Acceptances receivable
Aset lain-lain neto *)	55,191	--	--	--	--	--	--	55,191	Other assets - net *)
Neto	41,269,939	9,456,964	5,616,861	11,021,307	6,814,126	7,052,625	2,515,139	1,200,796	84,947,757

*) Aset keuangan dalam “aset lain-lain” terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under “other assets” consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

- 1) Sektor geografis, neto cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif gross adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2022									
Dalam Negeri/Domestic									
DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total	
Bank garansi	5,140,784	2,415,477	2,498	93,260	926,774	9,543	143,221	8,731,557	Bank guarantee
Penjaminan Kredit PEN	1,211,250	714,350	--	1,597,999	5,000	25,000	--	3,697,249	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	255,014	77,479	4,309	58,269	--	--	--	395,071	Outstanding irrevocable L/C
Total	6,607,048	3,207,306	6,807	1,749,528	931,774	34,543	143,650	12,823,877	Total
Estimasi klaim Penjaminan								(478,657)	Estimated Guarantee claim
Total								12,345,220	Total

31 Desember/ December 31, 2021									
Dalam Negeri/Domestic									
DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total	
Bank garansi	4,819,334	2,226,763	2,287	2,368	874,290	46,087	33,854	289,848	8,294,831
Penjaminan Kredit PEN	2,588,694	505,565	155,000	985,593	19,010	300,000	287,534	--	4,841,396
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	56,446	35,424	5,033	164,682	--	117,511	--	--	379,096
Total	7,464,474	2,767,752	162,320	1,152,643	893,300	463,598	321,388	289,848	13,515,323
Estimasi klaim Penjaminan								(392,559)	Estimated Guarantee claim
Total								13,122,764	Total

- 2) Jenis counterparties
Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit LPEI pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung pembiayaan dan piutang lainnya), yang dikategorikan berdasarkan jenis counterparties pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

- 2) Type of counterparties
The following tables provide the details of LPEI's credit risk exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or financing and receivables support), as categorized based on type of counterparties as of December 31, 2022 and 2021:

31 Desember/ December 31, 2022						
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	426	--	--	--	426	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	--	180,646	--	--	180,646	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	--	12,560,255	--	--	12,560,255	Placements with banks
Efek-efek	1,970,120	--	--	--	1,970,120	Securities
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang						Financing and receivables
Modal kerja	7,172,705	--	21,361	25,197,798	40,931	Working capital
Investasi	7,193,950	--	73,454	25,914,615	1,156	Investment
Konsumsi	--	--	--	137,084	137,084	Consumption
Piutang pembiayaan garansi	--	--	281,667	--	281,667	Guarantee financing receivables
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	288,989	--	288,989	Insurance and guarantee receivables
Tagihan akseptasi	--	--	150,917	--	150,917	Acceptances receivable
Aset lain-lain *)	--	--	38,485	--	38,485	Other assets *)
Neto	16,337,201	12,740,901	94,815	51,872,471	179,171	81,224,559

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)**2) Jenis counterparties (lanjutan)**

31 Desember/ December 31, 2021							
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total		
Giro pada							Current account with
Bank Indonesia	426	--	--	--	426		Bank Indonesia
Giro pada bank	--	180,646	--	--	180,646		Current accounts with banks
Penempatan pada							Placements with
bank	--	12,560,255	--	--	12,560,255		banks
Efek-efek	1,970,120	--	--	--	1,970,120		Securities
Tagihan derivatif	--	--	--	--	0		Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang							Financing and receivables
Modal kerja	7,172,705	--	21,361	25,197,798	40,931	32,432,795	Working capital
Investasi	7,193,950	--	73,454	25,914,615	1,156	33,183,175	Investment
Konsumsi	--	--	--	--	137,084	137,084	Consumption
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	281,667	--	281,667	Guarantee financing receivables
Piutang asuransi dan							Insurance and guarantee
penjaminan	--	--	--	288,989	--	288,989	receivables
Tagihan akseptasi	--	--	--	150,917	--	150,917	Acceptances receivable
Aset lain-lain *)	--	--	--	55,191	--	55,191	Other assets *)
Neto	16,337,201	12,740,901	94,815	51,889,177	179,171	81,241,265	Net

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit LPEI yang dikategorikan berdasarkan jenis counterparties terhadap rekening administratif:

The following tables provide the details of LPEI's credit risk exposure as categorized based on type of counterparties to administrative accounts items:

31 Desember/ December 31, 2022							
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total		
Bank garansi	--	--	8,731,557	--	8,731,557		Bank Guarantee
Penjaminan Kredit PEN	--	--	3,697,249	--	3,697,249		Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C							
yang tidak dapat dibatalkan	--	--	395,071	--	395,071		Outstanding irrevocable L/C
Total	--	--	12,823,877	--	12,823,877		Total
Estimasi klaim penjaminan					(478,657)		Estimated guarantee claim
Neto					12,345,220		Net

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

2) Jenis counterparties (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2021					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total
Bank garansi	--	--	--	8,294,831	--	8,294,831
Penjaminan Kredit PEN	--	--	--	4,841,396	--	4,841,396
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	379,096	--	379,096
Total	--	--	--	13,515,323	--	13,515,323
Estimasi klaim penjaminan Neto					(392,559)	13,122,764

3) Sektor industri

Tabel di bawah menggambarkan rincian
eksposur kredit pada nilai tercatat yang
dikategorikan berdasarkan sektor
industry:

32. Credit Risk (continued)

2) Type of counterparties (continued)

3) Industrial sectors

The following tables provide details of
LPEI's credit exposures at their carrying
amounts as categorized by industrial
sectors:

	31 Desember/ December 31, 2022										
	Industri tekstil/ Textile industry	Industri minyak kelapa sawit/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan- kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengang- kutan umum- laut/ General transport sea	Industri cumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengang- kutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertam- bangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	426	426
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180,646	180,646
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,560,255	12,560,255
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,970,120	1,970,120
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pembiayaan dan piutang											
Pembayaran	4,099,698	1,912,549	1,454,079	77,753	252,140	984,529	595,027	1,091,453	1,219,050	20,746,517	32,432,795
Modal kerja	803,002	1,802,146	6,510,926	1,575,036	79,902	1,150,742	37,481	1,495,696	3,095,032	16,633,212	33,183,175
Investasi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	137,084	137,084
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Piutang pembiayaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	281,667	281,667
garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Piutang asuransi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	288,989	288,989
dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	147,339	150,917
Tagihan akseptasi	3,578	--	--	--	--	--	--	--	--	38,485	38,485
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Neto	4,906,278	3,714,695	7,965,005	1,652,789	332,042	2,135,271	632,508	2,587,149	4,314,082	52,984,740	81,224,559

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang
masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest
receivables and refundable deposits.

*For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)*

The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts as categorized by industrial sectors to administrative accounts items:

31 Desember/ December 31, 2022											
Industri tekstil/ Textile industry	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengangkutan umum-laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengangkutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertambangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total	
Bank garansi	--	--	1,582,024	--	3,141	--	1,821,952	289,587	5,034,853	8,731,557	Bank guarantee
Penjaminan Kredit PEN	54,486	155,675	--	--	--	--	100,000	--	3,387,088	3,697,249	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	4,309	--	--	--	247,880	--	142,882	395,071	Outstanding Irrevocable L/C
Total	54,486	159,984	1,582,024	--	3,141	--	2,169,832	289,587	8,564,823	12,823,877	Total
Estimasi klaim penjaminan									(478,657)		Estimated guarantee claim
Neto									12,345,220		Net

31 Desember/ December 31, 2021											
Industri tekstil/ Textile industry	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengangkutan umum-laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengangkutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertambangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total	
Bank garansi	--	--	1,522,462	--	5,346	--	1,576,325	161,280	5,029,418	8,294,831	Bank guarantee
Penjaminan Kredit PEN	49,884	19,911	--	--	1,000,000	71,263	120,000	300,000	3,280,338	4,841,396	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	5,033	--	--	--	--	--	117,511	256,552	379,096	Outstanding Irrevocable L/C
Total	49,884	24,944	1,522,462	--	1,005,346	71,263	1,696,325	578,791	8,566,308	13,515,323	Total
Estimasi klaim penjaminan									(392,559)		Estimated guarantee claim
Neto									13,122,764		Net

The following tables provide details of LPEI's credit risk exposures by economic sectors:

31 Desember/ December 31, 2022								
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	426	426
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	180,646	180,646
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	12,560,255	12,560,255
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	1,970,120	1,970,120
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--
Pembiayaan dan piutang Pembiayaan								
Modal kerja	17,167,072	2,850,470	583,392	1,140,240	6,435,642	1,647,359	819,784	32,432,795
Investasi	12,017,092	8,310,916	1,787,745	3,410,736	5,962,575	310,738	369,743	33,183,175
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	137,084	137,084
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	281,667	281,667
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	288,989	288,989
Tagihan akseptasi	28,178	--	--	--	--	--	122,739	150,917
Aset lain-lain neto *)	--	--	--	--	--	--	38,485	38,485
Neto	29,212,342	11,161,386	2,371,137	4,550,976	12,398,217	1,958,097	16,769,938	81,224,559

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

4) Sektor ekonomi (lanjutan)

31 Desember/ December 31, 2021								
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	2,318	2,318
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	674,106	674,106
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	16,638,946	16,638,946
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	560,050	560,050
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	6	6
Pembiayaan dan piutang								
Pembayaran								
Modal kerja	18,485,756	2,786,638	1,409,249	803,088	5,590,254	1,798,659	347,162	32,662,958
Investasi	10,237,528	11,019,242	2,146,996	3,616,967	3,276,290	338,230	443,769	33,224,204
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	127,817	127,817
Piutang pembiayaan								
garansi	--	--	--	--	--	--	257,875	257,875
Piutang asuransi								
dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	285,656	285,656
Tagihan akseptansi	293,993	23,999	--	--	--	2,936	137,702	458,630
Aset lain-lain neto *)	--	--	--	--	--	--	55,191	55,191
Neto	<u>29,017,277</u>	<u>13,829,879</u>	<u>3,556,245</u>	<u>4,420,055</u>	<u>8,866,544</u>	<u>2,136,889</u>	<u>19,530,598</u>	<u>84,947,767</u>

Current account with
Bank Indonesia
Current accounts with banks
Placements with Banks
Securities
Derivative receivable
Financing and receivables
Financing
Working Capital
Investment
Consumption
Guarantee financing
Receivables
Insurance and guarantee
receivables
Acceptances receivable
Other assets - net *)
Net

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

Tabel berikut ini menyajikan rincian eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif berdasarkan sektor ekonomi terhadap rekening administratif:

The following tables provide details of LPEI's credit risk exposures relating to administrative accounts items by economic sectors to administrative accounts:

31 Desember/ December 31, 2022								
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total
Bank garansi	1,158,895	--	2,290,541	1,730,749	1,160,069	530,086	1,415,913	8,731,557
Penjaminan Kredit PEN	1,782,349	300,000	340,000	--	--	437,100	837,800	3,697,249
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	349,864	--	--	--	--	44,217	990	395,071
Total	<u>3,291,108</u>	<u>300,000</u>	<u>2,630,541</u>	<u>1,730,749</u>	<u>1,160,069</u>	<u>1,011,403</u>	<u>2,254,703</u>	<u>12,823,877</u>
Estimasi klaim Penjaminan								(478,657)
Total								<u>12,345,220</u>

31 Desember/ December 31, 2021								
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total
Bank garansi	1,006,503	--	2,298,897	1,814,854	795,552	416,544	1,521,040	8,294,831
Penjaminan Kredit PEN	1,459,307	127,549	196,500	1,100,000	399,768	563,600	994,672	4,841,396
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	230,149	11,787	--	--	117,511	11,997	7,652	379,096
Total	<u>2,695,959</u>	<u>139,336</u>	<u>2,495,397</u>	<u>2,914,854</u>	<u>1,312,831</u>	<u>992,141</u>	<u>2,515,323</u>	<u>13,515,323</u>
Estimasi klaim Penjaminan								(392,559)
Total								<u>13,122,764</u>

Bank guarantee
Credit Guarantee - PEN
Outstanding irrevocable L/C
Total
Estimated Guarantee claim
Total

Bank guarantee
Credit Guarantee - PEN
Outstanding irrevocable L/C
Total
Estimated Guarantee claim
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)**5) Kualitas kredit dari aset keuangan**

Informasi kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2022							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Tingkat sub standar/ <i>Sub-standard grade</i>	Tidak diperingkat/ <i>Unrated</i>			
Giro pada							
Bank Indonesia	--	426	--	--	--	--	426
Giro pada bank	102,112	78,534	--	--	--	--	180,646
Penempatan pada bank	11,672,917	887,338	--	--	--	--	12,560,255
Efek-efek	--	1,970,120	--	--	--	--	1,970,120
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--
Pembiayaan dan piutang							
Pembiayaan							
Modal kerja	375,098	10,521,768	741,338	1,570,797	62,209	19,161,585	32,432,795
Investasi	1,104,127	8,313,353	1,552,463	9,285,816	901,703	12,025,713	33,183,175
Konsumsi	--	--	--	137,084	--	--	137,084
Piutang penjaminan garansi	--	--	--	281,667	--	--	281,667
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	288,989	--	--	288,989
Tagihan akseptasi	--	150,917	--	--	--	--	150,917
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	38,485	--	--	38,485
Neto	13,254,254	21,922,456	2,293,801	11,602,838	963,912	31,187,298	81,224,559
31 Desember/ December 31, 2021							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Tingkat sub standar/ <i>Sub-standard grade</i>	Tidak diperingkat/ <i>Unrated</i>			
Giro pada							
Bank Indonesia	--	2,318	--	--	--	--	2,318
Giro pada bank	633,346	40,760	--	--	--	--	674,106
Penempatan pada bank	15,683,825	955,121	--	--	--	--	16,638,946
Efek-efek	--	560,050	--	--	--	--	560,050
Tagihan derivatif	--	6	--	--	--	--	6
Pembiayaan dan piutang							
Pembiayaan							
Modal kerja	452,425	11,308,955	838,382	4,276,968	482,517	15,303,711	32,662,958
Investasi	548,894	12,344,866	2,374,128	10,041,475	369,876	7,544,965	33,224,204
Konsumsi	--	--	--	127,817	--	--	127,817
Piutang penjaminan garansi	--	--	--	257,875	--	--	257,875
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	285,656	--	--	285,656
Tagihan akseptasi	--	458,630	--	--	--	--	458,630
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	55,191	--	--	55,191
Neto	17,318,490	25,670,706	3,212,510	15,044,982	852,393	22,848,676	84,947,757

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan
(lanjutan)

Kualitas kredit aset keuangan LPEI dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat eksternal dan internal.

Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan sistem peringkat IEB *Credit Rating System*. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala dan peringkat risiko debitur individual divalidasi untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit berdasarkan sistem peringkat IEB *Credit Rating System* dinilai sebagai berikut:

- Tingkat tinggi

Luar biasa

Debitur diberi peringkat luar biasa (nilai 'AAA') jika memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat. Debitur 'AAA' dinilai dapat memiliki sebuah kualitas *outlook* kualitas kredit yang tinggi dalam segala kondisi ekonomi. 'AAA' adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada debitur berdasarkan IEB *Credit Rating System*.

- Tingkat standar

Kuat

Debitur yang diberi peringkat kuat (nilai 'AA') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat dan probabilitas yang rendah pinjamannya akan gagal bayar. Terdapat perbedaan yang kecil antara debitur dengan peringkat 'AA' dan debitur dengan nilai tertinggi.

Baik

Debitur yang diberi peringkat baik (nilai 'A') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang kuat. Walaupun probabilitas gagal bayar rendah, debitur dengan peringkat 'A' dinilai lebih rentan terhadap efek yang merugikan perubahan kondisi ekonomi.

32. Credit Risk (continued)

5) Credit quality of financial assets
(continued)

The credit quality of LPEI's financial assets is assessed and managed using external and internal ratings.

The credit quality is monitored using IEB *Credit Rating System*. The rating system is assessed and updated regularly and individual borrower risk rating is validated to maintain accuracy and consistency of risk rating. The credit quality and the corresponding IEB *Credit Rating System* grade are as follows:

- High grade

Outstanding

A debtor given an outstanding outlook (rated 'AAA') if it has an extremely strong *debt service capacity*. 'AAA' rated debtors are viewed to possess a high credit quality outlook under all economic conditions. 'AAA' is the highest rating provided to a borrower under the IEB *Credit Rating System*.

- Standard grade

Strong

A debtor given a strong outlook (rated 'AA') is deemed to have a very strong *debt service capacity* and a low probability of going into default. An 'AA' rated debtor differs from the highest rated debtors in a small degree.

Good

A debtor given a good outlook (rated 'A') is deemed to have a strong *debt service capacity*. While the probability of default is low, 'A' rated debtors are more susceptible to the adverse effects of changes in economic conditions.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan
(lanjutan)

Rata-rata

Debitur yang diberi peringkat rata-rata (nilai 'BBB') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang memadai. Namun, kondisi ekonomi yang buruk atau perubahan keadaan yang akan cenderung membuat *debt service capacity* melemah.

• **Tingkat sub standar**

Dapat diterima

Debitur diberi peringkat rata-rata (nilai 'BB') adalah debitur yang dalam jangka pendek dianggap lebih tidak rentan daripada debitur pada peringkat yang lebih rendah lain. Namun, debitur ini menghadapi ketidakpastian yang besar dan terpapar kondisi bisnis yang rugi, kondisi keuangan, atau kondisi ekonomi yang dapat menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

Risiko tinggi

Debitur diberi peringkat berisiko tinggi (nilai 'BB-' sampai 'B+') adalah debitur yang dianggap kurang rentan daripada debitur dengan peringkat yang lebih rendah lain. Namun, kondisi bisnis yang merugikan, kondisi keuangan, atau kondisi ekonomi kemungkinan akan menurunkan kemampuan debitur atau menurunkan kesediaan debitur untuk memenuhi komitmen keuangannya.

Dalam perhatian

Eksposur kredit bagi debitur diberi peringkat dalam perhatian (nilai 'B') adalah debitur yang untuk sementara waktu dianggap tidak berisiko tetapi kinerja debitur telah melemah dan kecuali tren berubah, dapat menyebabkan kerugian.

32. Credit Risk (continued)

5) Credit quality of financial assets
(continued)

Average

A debtor given an average outlook (rated 'BBB') is deemed to have an adequate debt service capacity. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened debt service capacity.

• **Sub-standard grade**

Acceptable

A debtor given an acceptable outlook (rated 'BB') is deemed to be less vulnerable in the near term than other lower rated debtors. However, it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business, financial, or economic conditions which could lead to the debtor being unable to meet its financial obligations.

High risk

A borrower given a high risk outlook (rated 'BB-' to 'B+') is deemed to be less vulnerable than lower rated debtors. However, adverse business, financial, or economic conditions will likely impair the debtors capacity or willingness to meet its financial commitments.

Watch list

Credit exposures for a debtor given a watch list outlook (rated 'B') is deemed to be not at risk for the moment but the debtor's performance has already weakened and unless present trends are reversed, could lead to losses.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan
(lanjutan)

- Tidak diperingkat

Aset keuangan yang tidak diperingkat adalah aset yang tidak dinilai dengan Sistem Penilaian IEB atau *provider* peringkat kredit eksternal.

Transaksi tresuri
Untuk memastikan kualitas portofolio investasi LPEI, LPEI menggunakan peringkat kredit eksternal.

6) Efek-efek

Cadangan kerugian penurunan nilai terkait dengan akun ini disebabkan karena investasi divisi Syariah LPEI yang tidak dihitung dan dilaporkan menurut PSAK 55 (Revisi 2014).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh efek-efek tidak mengalami penurunan nilai dan tergolong lancar sehingga tidak terdapat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai terkait akun tersebut.

7) Pembiayaan, piutang, dan piutang pembiayaan garansi

Aset keuangan yang signifikan dianalisa berdasarkan bukti objektif secara individual per debitur. Selanjutnya nasabah signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan secara individual berdasarkan arus kas masing-masing debitur, sedangkan debitur yang tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

32. Credit Risk (continued)

5) Credit quality of financial assets
(continued)

- Unrated

Unrated financial assets are those who have not been assessed under the IEB Rating System or by external rating agencies.

Treasury transaction
To ensure the quality of LPEI's investment portfolio, LPEI uses the credit risk rating of external provider.

6) Securities

The allowance for impairment losses related to this account pertains to the investment of LPEI's Sharia division that is not measured and reported under PSAK 55 (Revised 2014).

As of December 31, 2022 and 2021, all securities are not impaired and are classified as current and there is no allowance for impairment losses related to this account.

7) Financing, receivables, and guarantee financing receivables

Individually significant financial asset is analyzed if objective evidence of impairment exist. For significant debtors with objective evidence of impairment and the allowance for impairment losses is calculated individually based on the cash flow while for debtors with no objective evidence of impairment dan the allowance for impairment losses is calculated collectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)**7) Pembiayaan dan piutang dan piutang
pembiayaan garansi (lanjutan)**

Ikhtisar pembiayaan dan piutang yang
diberikan dan piutang pembiayaan
garansi adalah sebagai berikut:

32. Credit Risk (continued)**7) Financing and receivables and guarantee
financing receivables (continued)**

Financing and receivables and guarantee
financing receivables are summarized as
as follows:

31 Desember/ December 31, 2022				
Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired			Total
	Individual	Kolektif/ Collective		
Rupiah				
Perindustrian	4,506,053	10,866,264	125,861	15,498,178
Pertanian	4,362,813	3,456,798	630,326	8,449,937
Jasa dunia usaha	2,047,177	17,318	--	2,064,495
Perdagangan, restoran, dan hote	496,000	414,663	--	910,663
Pengangkutan	2,207,234	1,484,192	--	3,691,426
Konstruksi	1,955,170	53,270	--	2,008,440
Pertambangan	1,080,662	3,830,249	163,682	5,074,593
Lain-lain	249,118	139,899	--	389,017
Total Rupiah	16,904,227	20,262,653	919,869	38,086,749
Mata uang asing				
Perindustrian	7,254,066	6,431,919	--	13,685,985
Pertanian	2,369,548	341,902	--	2,711,450
Jasa dunia usaha	306,642	--	--	306,642
Perdagangan, restoran, dan hote	702,575	344,859	--	1,047,434
Pengangkutan	358,366	501,184	--	859,550
Konstruksi	760,797	33,230	--	794,027
Pertambangan	5,110,868	2,135,272	77,483	7,323,623
Lain-lain	798,667	138,927	--	937,594
Total mata uang asing	17,661,529	9,927,293	77,483	27,666,305
Total	34,565,756	30,189,946	997,352	65,753,054

Rupiah	
Manufacturing	
Agriculture	
Business services	
Trading, restaurants, and hotels	
Transportation	
Construction	
Mining	
Others	
Total Rupiah	
Foreign currencies	
Manufacturing	
Agriculture	
Business services	
Trading, restaurants, and hotels	
Transportation	
Construction	
Mining	
Others	
Total foreign currencies	
Total	

31 Desember/ December 31, 2021				
Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired			Total
	Individual	Kolektif/ Collective		
Rupiah				
Perindustrian	5,224,185	8,544,927	286,366	14,055,478
Pertanian	8,397,587	1,776,717	270,859	10,445,163
Jasa dunia usaha	2,486,736	28,406	--	2,515,142
Perdagangan, restoran, dan hote	543,293	683,185	--	1,226,478
Pengangkutan	3,137,134	600,235	--	3,737,369
Konstruksi	2,300,337	54,126	--	2,354,463
Pertambangan	3,485,368	1,021,572	39,822	4,546,762
Lain-lain	351,230	123,282	--	474,512
Total Rupiah	25,925,870	12,832,450	597,047	39,355,367
Mata uang asing				
Perindustrian	8,438,839	6,228,967	--	14,667,806
Pertanian	3,158,580	202,137	--	3,360,717
Jasa dunia usaha	829,474	211,629	--	1,041,103
Perdagangan, restoran, dan hote	693,697	216,714	--	910,411
Pengangkutan	173,694	508,992	--	682,686
Konstruksi	1,202,492	30,378	--	1,232,870
Pertambangan	2,299,421	1,989,029	31,333	4,319,783
Lain-lain	444,236	--	--	444,236
Total mata uang asing	17,240,433	9,387,846	31,333	26,659,612
Total	43,166,303	22,220,296	628,380	66,014,979

Rupiah	
Manufacturing	
Agriculture	
Business services	
Trading, restaurants, and hotels	
Transportation	
Construction	
Mining	
Others	
Total Rupiah	
Foreign currencies	
Manufacturing	
Agriculture	
Business services	
Trading, restaurants, and hotels	
Transportation	
Construction	
Mining	
Others	
Total foreign currencies	
Total	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

- 8) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

32. Credit Risk (continued)

- 8) The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2022 and 2021:

		31 Desember/ December 31, 2022				
		Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	31 sampai 90 hari/ 31 to 90 days	Total		
Modal kerja		4,703	57,506	62,209	Working capital	
Investasi		732,965	168,738	901,703	Investment	
Neto		737,668	226,244	963,912	Net	
		31 Desember/ December 31, 2021				
		Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	31 sampai 90 hari/ 31 to 90 days	Total		
Modal kerja		99,318	383,199	482,517	Working capital	
Investasi		369,876	--	369,876	Investment	
Neto		469,194	383,199	852,393	Net	

9) Komitmen dan Kontinjensi

9) Commitments and contingencies

		31 Desember/December 31,			
		2022	2021		
Rupiah				Rupiah	
Bank garansi		1,388,650	1,471,087	Bank guarantee	
Penjaminan Kredit PEN		2,786,550	3,895,315	Credit Guarantee - PEN	
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan		4,727	176,417	Outstanding irrevocable L/C	
		4,179,927	5,542,819		
Mata uang asing				Foreign currencies	
Bank garansi		7,342,907	6,823,743	Bank guarantee	
Penjaminan Kredit PEN		910,699	946,081	Credit Guarantee - PEN	
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan		390,344	202,679	Outstanding irrevocable L/C	
		8,643,950	7,972,503		
Total		12,823,877	13,515,322	Total	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

33. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan LPEI untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LPEI. LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk membatasi risiko ini, manajemen telah mengatur diversifikasi sumber dana selain dasar modal intinya, mengelola aset yang terkait likuiditas dan memonitor arus kas dan likuiditas masa depan setiap hari. Hal ini menggabungkan penilaian atas arus kas yang masa depan dan ketersediaan jaminan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk mengamankan dana tambahan jika diperlukan.

LPEI telah merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan jatuh tempo antara aset dan liabilitas, diantaranya:

- Menjaga stabilitas dan kontinuitas sumber dan dengan melakukan pengelolaan Aset-Liabilitas secara hati-hati dan terencana.
- Menjaga ketersediaan fasilitas pinjaman *money market line* dari berbagai bank, baik di dalam maupun di luar negeri.

**Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa
Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan
Undiscounted Cash flows**

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi LPEI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi kelebihan atau kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk resulting from LPEI's inability to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting LPEI's activities and financial condition. LPEI manages liquidity risk in order to fulfill every financial obligation that has been agreed in a timely manner, and can maintain an adequate and optimal level of liquidity.

To limit this risk, management has arranged diversified funding sources in addition to its core capital base, manages assets with liquidity in mind, and monitors future cash flows and liquidity on a daily basis. This incorporates an assesment of expected cash flows and the availability of high grade collateral which could be used to secure additional funding if required.

LPEI has planned step to overcome the maturity gap between assets and liabilities, among others by:

- *Maintaining the stability and continuity of funding sources by managing the Assets-Liabilities carefully and proper planning.*
- *Maintaining the sufficiency of money market line credit facility from several banks, either on-shore or off-shore.*

**Analysis of Assets and Liabilities by
Remaining Contractual Maturity based on
the Undiscounted Cash flows**

The potential liquidity risk that LPEI may be exposed in the future is measured through Liquidity Gap Analysis, which is the projection of excess or shortage of liquidity base on maturity of assets and liabilities, after taking into account the need for business expansion. This information is also used as a base consideration when planning and managing liquidity as well as business expansion plan. By implementing effective liquidity management, it is expected to minimize liquidity risk at LPEI.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan Undiscounted Cash flows (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan-neto dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*).

33. Liquidity Risk (continued)

Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows (continued)

The tables below present the mapping of net financial assets and liabilities undiscounted cash flows in a specific timescale (*maturity bucket*) based on remaining period until maturity.

31 Desember/December 31, 2022															
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total							
Aset Keuangan									Financial Assets						
Giro pada Bank Indonesia	426	--	--	--	--	--	--	426	Current account with Bank Indonesia						
Giro pada bank	180,646	--	--	--	--	--	--	180,646	Current accounts with Bank						
Penempatan pada Bank	12,520,005	--	--	--	--	--	--	12,520,005	Placements with Bank						
Efek-efek	51,165	19,967	57,085	71,877	620,813	509,388	583,684	1,913,979	Securities						
Tagihan akseptasi	47,141	88,077	15,549	--	--	--	--	150,767	Acceptances receivable						
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	Derivatives receivable						
Pembiayaan dan piutang	--	--	--	--	--	--	--	--	Financing and receivables						
Modal Kerja	7,978,436	4,549,725	4,913,120	3,165,498	5,878,321	4,972,164	19,558,609	51,015,873	Working Capital						
Investasi	1,524,326	334,942	388,581	1,438,620	6,820,794	16,979,853	25,076,921	52,564,037	Investment						
Konsumsi	19	105	144	675	5,214	17,998	196,428	220,583	Consumption						
Piutang asuransi dan penjaminan	288,989	--	--	--	--	--	--	288,989	Insurance and guarantee receivables						
Aset lain-lain - neto *)	38,485	--	--	--	--	--	--	38,485	Other assets *)						
Sub total	22,629,638	4,992,816	5,374,479	4,676,670	13,325,142	22,479,403	45,415,642	118,893,790	Sub total						
Liabilitas Keuangan									Financial Liabilities						
Liabilitas segera	46,024	--	--	--	--	--	--	46,024	Current liabilities						
Liabilitas akseptasi	47,141	88,077	15,549	--	--	--	--	150,767	Acceptances payable						
Liabilitas derivatif	56	--	--	--	--	--	--	56	Derivatives payable						
Efek-efek hutang yang diterbitkan	392,517	2,640,529	1,715,905	4,320,397	23,888,840	4,831,964	3,025,372	40,815,524	Debt securities issued						
Pinjaman yang diterima	3,650,000	--	4,660,262	7,122,809	14,325,505	--	121,143	29,879,719	Fund borrowings						
Utang asuransi dan penjaminan	68,021	--	--	--	--	--	--	68,021	Insurance and guarantee payables						
Liabilitas asuransi	7,961	--	--	--	--	--	--	7,961	Insurance liabilities						
Liabilitas lain-lain**	612,357	--	--	--	--	--	--	612,357	Other liabilities**						
Sub total	4,824,077	2,728,606	6,391,716	11,443,206	38,214,345	4,831,964	3,146,515	71,580,429	Sub total						
Maturity gap	17,805,561	2,264,210	(1,017,237)	(6,766,536)	(24,889,203)	17,647,439	42,269,127	47,313,361	Maturity gap						
31 Desember/December 31, 2021															
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total							
Aset Keuangan									Financial Assets						
Giro pada Bank Indonesia	2,318	--	--	--	--	--	--	2,318	Current account with Bank Indonesia						
Giro pada bank	674,115	--	--	--	--	--	--	674,115	Current accounts with Bank						
Penempatan pada Bank	7,474,897	8,790,802	345,000	--	--	--	--	16,610,699	Placements with Bank						
Efek-efek	34,174	4,601	15,099	25,602	182,994	150,770	700,595	1,113,835	Securities						
Tagihan akseptasi	128,391	230,035	103,347	--	--	--	--	461,773	Acceptances receivable						
Tagihan derivatif	6	--	--	--	--	--	--	6	Derivatives receivable						
Pembiayaan dan piutang	--	--	--	--	--	--	--	--	Financing and receivables						
Modal Kerja	4,181,523	3,548,464	3,325,220	4,067,290	6,779,131	6,250,739	22,992,249	51,144,616	Working Capital						
Investasi	16,852	9,266	120,728	666,679	6,740,993	10,501,854	30,904,629	48,961,001	Investment						
Konsumsi	16	73	56	610	6,616	12,175	166,560	186,106	Consumption						
Piutang asuransi dan penjaminan	285,656	--	--	--	--	--	--	285,656	Insurance and guarantee receivables						
Aset lain-lain - neto *)	55,191	--	--	--	--	--	--	55,191	Other assets *)						
Sub total	12,853,139	12,583,241	3,909,450	4,760,181	13,709,734	16,915,538	54,764,033	119,495,316	Sub total						
Liabilitas Keuangan									Financial Liabilities						
Liabilitas segera	32,570	--	--	--	--	--	--	32,570	Current liabilities						
Liabilitas akseptasi	128,391	230,035	103,347	--	--	--	--	461,773	Acceptances payable						
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	Derivatives payable						
Efek-efek hutang yang diterbitkan	543,613	1,891,293	2,955,342	4,547,810	26,903,602	9,036,882	4,768,404	50,646,946	Debt securities issued						
Pinjaman yang diterima	1,250,000	--	10,152,341	--	14,854,298	4,062,642	176,501	30,495,782	Fund borrowings						
Utang asuransi dan penjaminan	66,418	--	--	--	--	--	--	66,418	Insurance and guarantee payables						
Liabilitas asuransi	3,769	--	--	--	--	--	--	3,769	Insurance liabilities						
Liabilitas lain-lain**	1,057,255	--	--	--	--	--	--	1,057,255	Other liabilities**						
Sub total	3,082,016	2,121,328	13,211,030	4,547,810	41,757,900	13,099,524	4,944,905	82,764,513	Sub total						
Maturity gap	9,771,123	10,461,913	(9,301,580)	212,371	(28,048,166)	3,816,014	49,819,128	36,730,803	Maturity gap						

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang..

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.
**) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability or reguarantor.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Likuiditas (lanjutan)**Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa
Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan
Undiscounted Cash flows (lanjutan)**

31 Desember/December 31, 2022									
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
Liabilitas komitmen dan kontinjensi									Commitment and contingent liabilities
Bank garansi	424,491	1,492,938	1,810,456	1,949,664	4,545,641	1,594,274	806,288	12,623,752	Bank guarantee
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	75,924	250,614	--	65,269	2,916	--	--	394,723	Outstanding irrevocable L/C
Total	500,415	1,743,552	1,810,456	2,014,933	4,548,557	1,594,274	806,288	13,018,475	Total

31 Desember/December 31, 2021									
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
Liabilitas komitmen dan kontinjensi									Commitment and contingent liabilities
Bank garansi	435,875	1,009,171	2,054,721	2,385,601	5,188,559	1,851,155	785,437	13,710,519	Bank guarantee
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	205,556	153,506	6,794	14,678	--	--	--	380,534	Outstanding irrevocable L/C
Total	641,431	1,162,677	2,061,515	2,400,279	5,188,559	1,851,155	785,437	14,091,053	Total

Untuk aset keuangan, analisis pengelompokan jatuh tempo didasarkan pada sisa periode dari akhir periode pelaporan ke tanggal jatuh tempo kontraktual atau jika lebih awal tanggal perkiraan aset akan direalisasi.

Untuk liabilitas keuangan, analisis jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang lebih awal dimana LPEI disyaratkan untuk membayar.

Termasuk di tabel di atas adalah arus kas bunga dan pokok. Sepanjang bunga adalah suku bunga mengambang, jumlah yang tidak didiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskonto ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

Tabel selanjutnya menyajikan mengenai pemetaan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*).

33. Liquidity Risk (continued)**Analysis of Assets and Liabilities by
Remaining Contractual Maturity based on
the Undiscounted Cash flows (continued)**

For financial assets, the analysis into maturity buckets is based on the remaining period from the end of the reporting period to the contractual maturity date or if earlier the expected date the assets will be realized.

For financial liabilities, the maturity analysis is based on the earliest date on which LPEI may be required to pay.

The tables above include both interest and principal cash flows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial instruments, the undiscounted amount is translated by the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

The following tables present the mapping of commitment and contingent liabilities in a specific timescale (*maturity bucket*) based on remaining maturity.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas dan/atau rekening administratif termasuk Transaksi Derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Eksposur risiko pasar pada LPEI hanya pada *banking book* karena LPEI tidak melakukan transaksional pada *trading book*, sedangkan trading hanya dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dan bersifat *natural hedge*.

LPEI telah memiliki sistem aplikasi treasury untuk mengukur risiko pasar (*Opics Plus*) yang merupakan sistem terintegrasi, dan digunakan oleh *front office*, *middle office*, dan *back office* untuk fungsi portofolio *treasury*. Saat ini penggunaan sistem ini belum dioptimalkan karena masih terkendala ketersediaan data dan terbatas pada portofolio *treasury*.

Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, LPEI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi khusus untuk transaksi *banking book* antara lain limit nominal transaksi *dealer* dan limit *counterparty*. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan nilai tukar mata uang dan perubahan suku bunga.

(i) Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya gap posisi valuta asing yang dimiliki LPEI yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN) LPEI baik secara keseluruhan ataupun laporan posisi keuangan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* dan *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022 dan No. 40/POJK.05/2015.

34. Market Risk

Market risk is risk to the position of assets, liabilities, equity and/or administrative accounts including Derivative Transactions due to changes in overall market conditions. Market risk exposure to LPEI is only in the banking book because LPEI does not make transactions on the trading book, while trading is only carried out in the context of hedging and is a natural hedge.

LPEI has a treasury application system to measure market risk (*Opics Plus*) which is an integrated system, and is used by front office, middle office, and back office for treasury portfolios functions. Currently the use of this system is yet to be optimized because it is still constrained by data availability and is limited to treasury portfolios.

In addition to monitoring instrument risk exposure, LPEI also monitors market risk limits and transaction limits specifically for banking book transactions, including nominal limits for dealer transactions and counterparty limits. Monitoring is carried out on a daily basis so as to accelerate the provision of up-to-date information that supports decision-making by line officials and management in a timely manner.

Included in the market risk is the risk of the changes of financial instruments price due to the changes in market factors, such as exchange rate and interest rate changes.

(i) Currency risk

Exchange rate risk is the risk of foreign exchange positions gap held by LPEI and reflected in Net Open Position (NOP) either on or off balance sheet. Included in the NOP is trading book and banking book.

As of December 31, 2022 and 2021, the calculation of Net Open Position (NOP) is based on the Regulation of the Financial Services Authority No. 9/POJK.05/2022 and No. 40/POJK.05/2015.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar (lanjutan)**(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)**

PDN untuk laporan posisi keuangan adalah selisih neto jumlah aset dan jumlah liabilitas dalam setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

PDN secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih neto antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih neto dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

Berdasarkan peraturan tersebut, LPEI wajib memelihara rasio PDN secara keseluruhan dan laporan posisi keuangan setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal.

Berikut ini adalah Posisi Devisa Neto LPEI:

	31 Desember/December 31, 2022		
	Aset/ Assets	Kewajiban/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
Keseluruhan			
(Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)			
Dolar Amerika Serikat	30,883,186	31,354,495	471,309
Euro Eropa	64,902	66,044	1,142
Yen Jepang	169	147	22
Dolar Singapura	56	1	55
Total			472,528
Laporan Posisi keuangan			
Dolar Amerika Serikat	30,505,000	30,926,506	421,506
Euro Eropa	3,000	53,887	50,887
Yen Jepang	169	147	22
Dolar Singapura	56	1	55
Total			472,470
Modal (Catatan 21)			27,229,719
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan)			1.74%
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			1.74%

34. Market Risk (continued)**(i) Currency risk (continued)**

The NOP for the statement of financial position is the net difference of total assets and total liabilities in each foreign currency which are stated in Rupiah.

The overall NOP is the total of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency which are stated in Rupiah.

Based on the regulation, LPEI has to maintain the overall NOP at a maximum of 20% of the total capital.

The following is LPEI's Net Open Position:

Overall
(Statement of Financial Position and Administrative Accounts)
United States Dollars
European Euro
Japanese Yen
Singapore Dollars
Total
Statement of Financial Position
United States Dollars
European Euro
Japanese Yen
Singapore Dollars
Total
Capital (Note 21)
Net Open Position Ratio (Statement of financial position)
Overall Net Open Position Ratio

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2021			
	Aset/ Assets	Kewajiban/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
Keseluruhan			
(Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)			
Dolar Amerika Serikat	31,503,347	33,629,880	2,126,533
Euro Eropa	35,109	56,956	21,847
Yen Jepang	19,543	158	19,385
Dolar Singapura	98	1	97
Total			2,167,862
Laporan Posisi keuangan			
Dolar Amerika Serikat	31,302,417	33,394,959	2,092,542
Euro Eropa	664	56,508	55,844
Yen Jepang	19,543	158	19,385
Dolar Singapura	98	1	97
Total			2,167,868
Modal (Catatan 21)			30,655,652
Rasio Posisi Devisa Neto			7.07%
(Laporan posisi keuangan)			
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			7.07%

Tabel berikut ini menunjukkan rincian sensitivitas perubahan eksposur LPEI atas perubahan nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas hanya termasuk pos moneter yang didenominasi dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode atas perubahan nilai tukar mata uang asing yang relevan. Persentase kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian LPEI atas perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing setelah memperhatikan kondisi ekonomi saat ini.

34. Market Risk (continued)

(i) Currency risk (continued)

31 Desember/December 31, 2021			
	Aset/ Assets	Kewajiban/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
Keseluruhan			
(Statement of Financial Position and Administrative Accounts)			
Dolar Amerika Serikat	31,503,347	33,629,880	2,126,533
Euro Eropa	35,109	56,956	21,847
Yen Jepang	19,543	158	19,385
Dolar Singapura	98	1	97
Total			2,167,862
Laporan Posisi keuangan			
Dolar Amerika Serikat	31,302,417	33,394,959	2,092,542
Euro Eropa	664	56,508	55,844
Yen Jepang	19,543	158	19,385
Dolar Singapura	98	1	97
Total			2,167,868
Modal (Catatan 21)			30,655,652
Rasio Posisi Devisa Neto			7.07%
(Laporan posisi keuangan)			
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			7.07%

The following tables detail the sensitivity of LPEI's exposure to changes in foreign exchange rate. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a change in the relevant foreign currency rates. The percentage increase or decrease represents LPEI's assesment of the reasonably possible change in the relevant foreign exchange rates after considering the current economic conditions.

31 Desember/December 31, 2022								
	USD		EUR		JPY		SGD	
	1.90%	-1.90%	3.39%	-3.39%	3.70%	-3.70%	2.34%	-2.34%
Aset Keuangan								
Financial Assets								
Current accounts								
Giro pada bank	555	(555)	92	(92)	10	(10)	1	(1)
with banks								
Efek-efek	1,651	(1,651)	--	--	--	--	--	--
Securities								
Tagihan akseptasi	763	(763)	--	--	--	--	--	--
Acceptances receivable								
Financing and receivables								
Pembiayaan dan piutang	174,959	(174,959)	--	--	--	--	--	--
receivables								
Piutang asuransi	37	(37)	--	--	--	--	--	--
Insurance receivables								
Aset reasuransi	18	(18)	--	--	--	--	--	--
Reinsurance assets								
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--
Guarantee financing receivables								
Aset lain-lain - bersih *)	18	(18)	--	--	--	--	--	--
Other assets - net *)								
Total - neto	178,001	(178,001)	92	(92)	10	(10)	1	(1)
Total - net								
Financial Liabilities								
Liabilities								
Liabilitas akseptasi	(763)	763	--	--	--	--	--	--
Acceptances payable								
Efek-efek utang	--	--	--	--	--	--	--	--
Debt securities								
yang diterbitkan	(41,544)	41,544	--	--	--	--	--	--
issued								
Pinjaman yang diterima	(122,319)	122,319	(1,639)	1,639	--	--	--	--
Fund borrowings								
Liabilitas asuransi	(31)	31	--	--	--	--	--	--
Insurance liabilities								
Liabilitas lain-lain-bersih **)	(1,318)	1,318	(3)	3	(8)	8	--	--
Other liabilities-net ** *)								
Total - neto	(165,975)	165,975	(1,642)	1,642	(8)	8	--	--
Total - net								

Financial Assets
Current accounts
with banks
Securities
Acceptances receivable
Financing and
receivables
Insurance receivables
Reinsurance assets
Guarantee financing
receivables
Other assets - net *)
Total - net

Financial Liabilities
Acceptances payable
Debt securities
issued
Fund borrowings
Insurance liabilities
Other liabilities-net **)
Total - net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar (lanjutan)**(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)**

31 Desember / December 31, 2021									
USD		EUR		JPY		SGD			
4.16%	-4.16%	6.41%	-6.41%	5.69%	-5.69%	4.54%	-4.54%		
Aset Keuangan								Financial Assets	
								<i>Current accounts</i>	
Giro pada bank	3,747	(3,747)	15	(15)	1,112	(1,112)	4	(4)	<i>with banks</i>
Efek-efek	14,099	(14,099)	--	--	--	--	--	--	<i>Securities</i>
Tagihan akseptasi	6,638	(6,638)	--	--	--	--	--	--	<i>Acceptances receivable</i>
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Derivatives receivable</i>
								<i>Financing and</i>	
Pembiayaan dan piutang	1,175,933	(1,175,933)	--	--	--	--	--	--	<i>receivables</i>
Piutang asuransi	148	(148)	20	(20)	--	--	--	--	<i>Insurance receivables</i>
Aset reasuransi	88	(88)	7	(7)	--	--	--	--	<i>Reinsurance assets</i>
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Guarantee financing receivables</i>
Aset lain-lain - bersih *)	380	(380)	--	--	--	--	--	--	<i>Other assets - net *)</i>
Total - neto	1,201,033	(1,201,033)	42	(42)	1,112	(1,112)	4	(4)	<i>Total - net</i>
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities	
Liabilitas akseptasi	(6,638)	6,638	--	--	--	--	--	--	<i>Acceptances payable</i>
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Derivatives payable</i>
Efek-efek utang	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Debt securities</i>
yang diterbitkan	(298,774)	298,774	--	--	--	--	--	--	<i>issued</i>
Pinjaman yang diterima	(1,078,430)	1,078,430	(3,478)	3,478	--	--	--	--	<i>Fund borrowings</i>
Liabilitas asuransi	(225)	225	(19)	19	--	--	--	--	<i>Insurance liabilities</i>
Liabilitas lain-lain	--	--	--	--	--	--	--	--	
- bersih **)	(5,652)	5,652	(1)	1	(8)	8	--	--	<i>Other liabilities - net **)</i>
Total - neto	(1,389,719)	1,389,719	(3,498)	3,498	(8)	8	--	--	<i>Total - net</i>

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.

(ii) Risiko suku bunga

LPEI terekspos risiko tingkat suku bunga karena meminjamkan dananya atas dasar bunga tetap dan mengambang. LPEI menerapkan kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas untuk memastikan eksposur atas fluktuasi suku bunga dalam batasan yang dapat diterima.

Tabel berikut ini merangkum perbedaan sensitivitas tingkat suku bunga LPEI. Tabel menunjukkan penyesuaian nilai kontraktual untuk setiap kategori aset liabilitas dan item rekening administratif pada pembukuan LPEI. Posisi negatif gap (short position) muncul ketika liabilitas menyesuaikan nilai lebih cepat atau pada proporsi yang lebih besar daripada aset sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga menurun. Posisi positif gap (long position) muncul ketika aset menyesuaikan nilai lebih cepat atau berada pada proporsi yang lebih besar daripada liabilitas sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga meningkat.

(ii) Interest rate risk

LPEI is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. LPEI follows a prudent policy on managing its assets and liabilities to ensure that exposure to fluctuations in interest rates are kept within acceptable limits.

The following tables summarize the interest rate sensitivity gap of LPEI. The tables show the contractual repricing for each category of asset liability and administrative accounts items in LPEI's book. A liability (or negative) gap position exists when liabilities reprice more quickly or in greater proportion than assets during a given period and tends to benefit net interest income in a declining interest rate environment. An asset (or positive) gap position exists when assets reprice more quickly or in greater proportion than liabilities during a given period and tends to benefit net interest income in a rising interest rate environment.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Syarat penyesuaian nilai kontraktual tidak merefleksikan dampak potensial dari pembayaran kembali awal atau penarikan. Posisi dapat tidak merepresentasikan posisi pada periode tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan besar pada posisi dapat dibuat saat terjadi perubahan potensi pasar. Sebagai tambahan, variasi signifikan pada sensitivitas tingkat suku bunga dapat muncul pada periode penyesuaian nilai dan diantara mata uang dimana LPEI memiliki posisi tingkat suku bunga.

34. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

Contractual repricing terms do not reflect the potential impact of early repayment or withdrawal. Positions may not be reflective of those in subsequent periods. changes in positions can be made promptly as market outlooks change. In addition, significant variations in interest rate sensitivity may exist within the repricing periods presented and among the currencies in which LPEI has interest rate positions.

31 Desember/December 31, 2022								
Suku bunga mengambang/Floating interest rate								
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Less than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total		
Aset Keuangan							Financial Assets	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	426	426	Current account with Bank Indonesia	
Giro pada bank	180,646	--	--	--	--	180,646	Current accounts with banks	
Penempatan pada bank	--	--	--	12,560,255	--	12,560,255	Placements with banks	
Efek-efek	--	--	--	1,970,120	--	1,970,120	Securities	
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	Derivatives receivable	
Pembiayaan dan piutang							Financing and receivables	
Modal kerja	9,086,681	7,594,662	15,751,452	--	--	32,432,795	Working capital	
Investasi	662,746	1,596,207	30,924,222	--	--	33,183,175	Investment	
Konsumsi	--	--	--	131,487	5,597	137,084	Consumption	
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	281,667	281,667	Guarantee financing receivables	
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	288,989	288,989	Insurance and guarantee receivables	
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	150,917	150,917	Acceptances receivable	
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	38,485	38,485	Other assets *)	
Total aset keuangan	9,930,073	9,190,869	46,675,674	14,661,862	766,081	81,224,559	Total financial assets	
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Liabilitas segera	--	--	--	--	46,046	46,046	Current liabilities	
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	151,161	151,161	Acceptances payable	
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	56	56	Derivatives payable	
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	25,290,672	--	25,290,672	Debt securities issued	
Pinjaman yang diterima	--	--	--	29,297,065	--	29,297,065	Fund borrowings	
Utang asuransi	--	--	--	--	6,306	6,306	Insurance payable	
Utang penjaminan	--	--	--	--	61,715	61,715	Guarantee payable	
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	612,357	612,357	Other liabilities**)	
Total liabilitas keuangan	--	--	--	54,587,738	877,641	55,465,378	Total financial liabilities	
Interest Gap	9,930,073	9,190,869	46,675,674	(39,925,876)	(111,560)	25,759,181	Interest Gap	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar (lanjutan)**(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)**

31 Desember / December 31, 2021						
	Suku bunga mengambang/Floating interest rate					Total
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Less than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	
Aset Keuangan						
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	2,318	2,318
Giro pada bank	674,115	--	--	--	--	674,115
Penempatan pada bank	--	--	--	16,641,155	--	16,641,155
Efek-efek	--	--	--	560,050	--	560,050
Tagihan derivatif	--	--	--	--	6	6
Pembiayaan dan piutang						
Modal kerja	8,575,360	6,694,854	17,392,744	--	--	32,662,958
Investasi	40,775	904,023	32,279,406	--	--	33,224,204
Konsumsi	--	--	--	122,070	5,747	127,817
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	285,656	285,656
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	460,540	460,540
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	55,191	55,191
Total aset keuangan	9,290,250	7,598,877	49,672,150	17,323,275	809,458	84,694,010
Liabilitas Keuangan						
Liabilitas segera	--	--	--	--	32,430	32,430
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	460,540	460,540
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	27,712,389	--	27,712,389
Pinjaman yang diterima	1,250,000	9,961,451	17,588,120	--	--	28,799,571
Utang asuransi	--	--	--	--	4,055	4,055
Utang penjaminan	--	--	--	--	62,363	62,363
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	1,057,255	1,057,255
Total liabilitas keuangan	1,250,000	9,961,451	17,588,120	27,712,389	1,616,643	58,128,603
Interest Gap	8,040,250	(2,362,574)	32,084,030	(10,389,114)	(807,185)	26,565,407

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

Tabel di bawah ini menunjukkan suku bunga efektif dari mata uang utama untuk instrumen keuangan moneter yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

34. Market Risk (continued)**(ii) Interest rate risk (continued)**

31 Desember / December 31, 2021						
	Suku bunga mengambang/Floating interest rate					Total
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Less than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	
Financial Assets						
Current account with Bank Indonesia	--	--	--	--	2,318	2,318
Current accounts with banks	674,115	--	--	--	--	674,115
Placements with banks	--	--	--	16,641,155	--	16,641,155
Securities	--	--	--	560,050	--	560,050
Derivatives receivable	--	--	--	--	6	6
Financing and receivables						
Working capital	8,575,360	6,694,854	17,392,744	--	--	32,662,958
Investment	40,775	904,023	32,279,406	--	--	33,224,204
Consumption	--	--	--	122,070	5,747	127,817
Guarantee financing receivables	--	--	--	--	--	--
Insurance and guarantee receivables	--	--	--	--	285,656	285,656
Acceptances receivable	--	--	--	--	460,540	460,540
Other assets *)	--	--	--	--	55,191	55,191
Total financial assets	9,290,250	7,598,877	49,672,150	17,323,275	809,458	84,694,010
Financial Liabilities						
Current liabilities	--	--	--	--	32,430	32,430
Acceptances payable	--	--	--	--	460,540	460,540
Debt securities issued	--	--	--	27,712,389	--	27,712,389
Fund borrowings	1,250,000	9,961,451	17,588,120	--	--	28,799,571
Insurance payable	--	--	--	--	4,055	4,055
Guarantee payable	--	--	--	--	62,363	62,363
Other liabilities **)	--	--	--	--	1,057,255	1,057,255
Total financial liabilities	1,250,000	9,961,451	17,588,120	27,712,389	1,616,643	58,128,603
Interest Gap	8,040,250	(2,362,574)	32,084,030	(10,389,114)	(807,185)	26,565,407

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to guarantor.

The tables below summarize the effective interest rate by major currencies for monetary financial instruments not carried at fair value through profit or loss.

31 Desember/December 31, 2022					
Suku Bunga Efektif/ Effective Interest Rate			Suku Bunga Kontraktual/ Contractual Interest Rate		
	Mata uang asing/ Foreign Currency		Mata uang asing/ Foreign Currency		
	Rupiah %		Rupiah %		
ASSET					
Giro pada bank	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	3.50 - 6.50	3.00 - 4.32	3.50 - 6.50	3.00 - 4.32	Placements with banks
Efek-efek	5.50 - 8.38	2.95 - 4.13	5.50 - 8.38	2.95 - 4.13	Securities
Pembiayaan dan piutang	0.00 - 14.50	0.00 - 10.75	0.00 - 14.50	0.00 - 10.75	Financing and receivables
LIABILITAS					
Efek-efek utang yang diterbitkan	6.70 - 9.80	3.88	6.70 - 9.80	3.88	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	4.65 - 5.78	1.25 - 4.91	4.65 - 5.78	1.25 - 4.91	Fund borrowings

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2021			
	Suku Bunga Efektif/ Effective Interest Rate		Suku Bunga Kontraktual/ Contractual Interest Rate	
	Mata uang asing/ Foreign Currency		Mata uang asing/ Foreign Currency	
	Rupiah %	%	Rupiah %	%
ASET				
Giro pada bank	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
Penempatan pada bank	2.40 - 3.65	0.04 - 1.00	2.40 - 3.65	0.04 - 1.00
Efek-efek	5.63 - 8.25	2.95 - 4.13	5.63 - 8.25	2.95 - 4.13
Pembiayaan dan piutang	(3.73) - 20.06	0.00 - 13.07	0.00 - 14.50	0.00 - 7.35
LIABILITAS				
Efek-efek utang yang diterbitkan	6.70 - 9.80	3.88	6.70 - 9.80	3.88
Pinjaman yang diterima	3.55 - 4.65	0.75 - 3.03	3.55 - 4.65	0.75 - 3.03

Tabel selanjutnya menunjukkan rincian sensitivitas laba dan ekuitas LPEI terhadap perubahan tingkat suku bunga. Analisis disusun dengan menggunakan asumsi atas saldo instrumen keuangan dengan bunga mengambang pada tanggal pelaporan telah beredar sepanjang tahun, dengan memperhatikan pergerakan aktual atas pokok selama tahun berjalan. Basis poin kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian manajemen atas perubahan yang mungkin terjadi atas suku bunga yang relevan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Tingkat sensitivitas yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio banking book. Pada analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan suku bunga untuk *portofolio banking book* dengan basis IDR+/47bp, USD+/-148bp, EUR +/-250bp, JPY +/-44bp dan SGD +/-108bp pada tanggal 31 Desember 2022 dan IDR+/30bp, USD+/-78 bp, EUR +/-0,02 bp, JPY +/-5,5 bp dan SGD +/-72 bp pada tanggal 31 Desember 2021.

34. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

The following tables detail the sensitivity of LPEI's profit and equity to changes in interest rate. The analysis is prepared assuming the amount of floating rate financial instrument outstanding at the reporting date was outstanding for the whole year, taking into account actual principal movements during the year. The basis point increase and decrease represents the management's assesment of the reasonably possible change in the relevant interest rates after considering the current economic conditions.

The level of sensitivity that is used to analyze possible changes in interest rates which affect the profit and loss portfolio of banking book. Sensitivity analysis using assumptions of interest rates changes for banking book portfolio with base IDR+/47bp, USD+/-148bp, EUR +/-250bp, JPY +/-44bp and SGD +/-108bp as of December 31, 2022 and IDR+/30bp, USD+/-78 bp, EUR +/-0,02 bp, JPY +/-5,5 bp dan SGD +/-72 bp as of December 31, 2021.

	31 Desember/December 31, 2022					
	Efek pada laba rugi/ Impact to profit or loss					
	IDR		USD		Lain-lain/Others	
	+30bp	-30bp	+78 bp	-78bp		
Aset Keuangan						
Penempatan pada bank	71,904	(71,904)	36,276	(36,276)	564	(564)
Efek-efek	(39,581)	41,231	(2,242,682)	2,674,495	--	--
Pembiayaan dan piutang	235,281	(235,281)	537,207	(537,207)	--	--
Neto	267,604	(265,954)	(1,669,199)	2,101,012	564	(564)

Financial Assets
Placements with banks
Securities
Financing and receivables
Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2021					
Efek pada laba rugi/ Impact to profit or loss					
IDR		IDR		Lain-lain/Others	
+17bp	-17bp	+17bp	-17bp		
Aset Keuangan					
Penempatan					
pada bank	56,366	(56,366)	72,819	12	(12)
Efek-efek	(4,876)	5,046	(1,299,112)	--	--
Pembiayaan dan					
piutang	152,380	(152,380)	277,619	--	--
Neto	<u>203,870</u>	<u>(203,700)</u>	<u>(948,674)</u>	<u>12</u>	<u>(12)</u>

Financial Assets
Placements
with banks
Securities
Financing and
receivables
Net

34. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

35. Risiko Operasional

Identifikasi dan analisa risiko operasional dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses dan sistem informasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi dan permodalan LPEI. Kerangka kerja identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor-faktor penyebab (*causes*), kejadian (*event*) dan akibat (*impact*).

Secara rutin telah dilakukan proses identifikasi Risiko Operasional secara umum melalui penilaian profil risiko triwulanan. Telah dilakukan pula pengikinan *risk register* yang telah mengacu pada struktur organisasi terbaru, dan dilakukan identifikasi risiko-risiko lain pada unit kerja secara berkala.

Proses pengukuran risiko operasional selain dilakukan secara manual dan telah mulai dilakukan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA) sehingga lebih persisi dalam mengukur risiko operasional pada masing-masing divisi dan proses operasional. Pengukuran RCSA dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Saat ini LPEI mulai melakukan pengukuran RCSA secara kualitatif. Kedepannya RCSA akan dilakukan secara kuantitatif untuk mengukur seberapa besar dampak dan kemungkinan kejadian operasional sehingga dapat dibangun mitigasi yang lebih baik dan tepat. Untuk kemudian dilakukan mitigasi agar dapat menurunkan risiko operasional lembaga melalui peningkatan tata kelola atas seluruh proses transaksi yang berjalan.

35. Operational Risk

Operational risk is identified and analyzed through risk factor inherent in all business activities, products, process, and information system, either external or internal factor, that might cause negative impact on objectives and equity of LPEI. The framework of operational risk identification is based on cause, event, and impact.

Identification of Operational Risk in general has been carried out through the quarterly assessment of risk profile. Risk register referring to the latest organizational structure has also been updated, along with the identification of other risks in each working unit periodically.

The process of measuring operational risk is not only done manually and has begun to carry out Risk Control and Self Assessment (RCSA) so that it is more precise in measuring operational risks in each division and operational process. RCSA measurements are carried out qualitatively and quantitatively. Currently, LPEI has begun to measure RCSA qualitatively. In the future, RCSA will be carried out quantitatively to measure how much impact and possibility of operational events so that better and appropriate mitigation can be built. Mitigation is then carried out in order to reduce the operational risk of the institution through improved governance of the entire transaction process.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

36. Risiko Asuransi

Risiko utama yang dihadapi LPEI dalam kontrak asuransi adalah klaim aktual dan pembayaran manfaat atau waktu terkait dengan hal tersebut, berbeda dengan yang diperkirakan. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi klaim, besarnya klaim, manfaat klaim yang dibayarkan dan perkembangan selanjutnya atas klaim jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan LPEI adalah untuk memastikan terdapat cadangan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.

Aktivitas pengelolaan risiko asuransi LPEI dilakukan pada tingkat transaksi dan portofolio. Pada tingkatan transaksi, LPEI membuat batasan risiko atas jumlah yang diasuransikan. Pada tingkatan portofolio, LPEI memastikan bahwa strategi besarnya asuransi dalam sektor ekonomi/industri merefleksikan seluruh struktur ekonomi/industri nasional. Sebagai tambahan, LPEI juga mengalihkan risiko asuransi kepada pihak lain melalui reasuransi atau koasuransi.

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

36. Insurance Risk

The principal risk that LPEI faces under insurance contracts is that the actual claims and benefit payments or the timing thereof, differ from expectations. This is influenced by the frequency of claims, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, LPEI's objective is to ensure that sufficient reserves are available to cover these liabilities.

LPEI's insurance risk management activities are carried out on a transaction and portfolio level. At the transaction level, LPEI establishes risk limits on the the insured amount. At the portfolio level, LPEI ensures that insurance coverage strategy in the economic/industry sector reflects the overall national economic/ industry structure. Additionally, LPEI also transfers insurance risk to other parties through the use of reinsurance or coinsurance.

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The tables below summarize the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities. The fair values disclosed are based on relevant information available and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)****37. Fair Value of Financial Assets and
Liabilities (continued)**

	31 Desember/ December 31, 2022	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset Keuangan		
Giro pada Bank Indonesia	426	426
Giro pada bank	180,647	180,647
Penempatan pada bank	12,560,764	12,560,764
Efek-efek	1,970,120	1,970,120
Tagihan akseptasi	151,161	151,161
Pembiayaan dan piutang		
Modal kerja	43,958,797	33,427,749
Investasi	39,539,662	33,193,413
Konsumsi	137,544	127,061
Piutang asuransi	288,989	288,989
Aset lain-lain*)	38,485	38,485
	98,826,595	81,938,815
Liabilitas Keuangan		
Liabilitas segera	46,046	46,046
Liabilitas akseptasi	151,161	151,161
Efek-efek utang yang diterbitkan	25,290,672	22,585,908
Liabilitas derivatif	56	56
Pinjaman yang diterima	29,297,065	34,613,657
Utang asuransi	6,306	6,306
Utang penjaminan	61,715	61,715
Liabilitas lain-lain**)	612,357	612,357
	55,465,378	58,077,206

Financial Assets
Current account with Bank Indonesia
Current accounts with banks
Placements with banks
Securities
Acceptances receivable
Financing and receivables
Working capital
Investment
Consumption
Insurance receivables
Other assets*)

Financial Liabilities
Current liabilities
Acceptances payable
Debt securities issued
Derivatives payables
Fund borrowings
Insurance payable
Guarantee payable
Other liabilities**)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

**37. Fair Value of Financial Assets and
Liabilities (continued)**

	31 Desember/ December 31, 2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Giro pada Bank Indonesia	2,318	2,318	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	674,115	674,115	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	16,641,155	16,641,155	Placements with banks
Efek-efek	560,050	560,050	Securities
Tagihan akseptasi	460,540	460,540	Acceptances receivable
Tagihan derivatif	6	6	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang			Financing and receivables
Modal kerja	45,054,973	33,680,397	Working capital
Investasi	38,780,210	34,210,708	Investment
Konsumsi	127,979	120,356	Consumption
Piutang asuransi	285,656	285,656	Insurance receivables
Aset lain-lain*)	55,191	55,191	Other assets*)
	102,642,193	86,690,492	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Liabilitas segera	32,570	32,570	Current liabilities
Liabilitas akseptasi	460,540	460,540	Acceptances payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	27,712,389	25,400,783	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	28,799,571	36,342,516	Fund borrowings
Utang asuransi	4,055	4,055	Insurance payable
Utang penjaminan	62,363	62,363	Guarantee payable
Liabilitas lain-lain**)	1,057,255	1,057,255	Other liabilities**)
	58,128,743	63,360,082	

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to guarantor.

Metode dan asumsi yang digunakan oleh LPEI dalam mengestimasi nilai wajar dari instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

The methods and assumptions used by LPEI in estimating the fair value of the financial instruments are as follows:

(i) Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank dengan suku bunga tetap, kas, piutang pembiayaan garansi, tagihan dan liabilitas akseptasi, piutang asuransi, aset reasuransi, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas asuransi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun.

(i) The carrying value of fixed rate current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks, fixed rates placements with banks, cash, guarantee financing receivable, acceptances receivables and payable, insurances receivable, reinsurance assets, insurances payable, guarantee payable, insurance liabilities and other assets were the reasonable approximation of its fair values since the maturity is below one year.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

- (ii) Pembiayaan dan piutang LPEI secara umum terdiri dari pembiayaan dan piutang yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Pembiayaan dan piutang yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari pembiayaan dan piutang yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh LPEI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.
- (iii) Nilai wajar atas instrumen derivatif yang didapatkan dari teknik penilaian dengan menggunakan masukan yang dapat diamati di pasar terutama adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.
- (iv) Estimasi nilai wajar liabilitas segera adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.
- (v) Nilai wajar untuk efek-efek ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.
- (vi) Nilai wajar agregat untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan tingkat bunga tetap didasarkan pada arus kas diskonto model yang menggunakan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya. Untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan suku bunga mengambang nilai tercatat mendekati nilai wajarnya.

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

- (ii) *Financing and receivables of LPEI generally consists of financing and receivables granted at floating rate and fixed rate. Financing and receivables granted are stated at carrying amount. The fair value of financing and credit extended show discounted value of the estimated future cash flows expected to be received by LPEI. These discounted cash flows use market rates to determine fair value.*
- (iii) *The fair values of derivative instruments are obtained from valuation techniques by using inputs that can be observed in the market such as interest rate and foreign currency exchange rate.*
- (iv) *The estimated fair values of current liabilities are the amounts repayable on demand.*
- (v) *The fair values of securities are based on the market prices (broker)/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.*
- (vi) *The aggregate fair values for debt securities issued and fund borrowings with fixed interest rate are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity. For debt securities issued and fund borrowings with floating interest rate the carrying value approximates its fair value.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

Tabel berikut menunjukkan suatu analisa instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki:

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the hierarchy:

	31 Desember/ December 31, 2022			
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar				Financial assets measured at fair value
Aset keuangan pada FVTOCI				Financial assets at FVTOCI
Efek-efek	1,970,120	--	--	Securities
	1,970,120	--	--	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Giro pada				Current account with
Bank Indonesia	--	426	--	Bank Indonesia
Giro pada bank	--	180,647	--	Current account with bank
Penempatan pada bank	--	12,560,764	--	Placement with bank
Tagihan akseptasi	--	151,161	--	Acceptances receivable
Pembiayaan dan piutang				Financing and receivables
Modal kerja	--	14,523,483	18,904,266	Working capital
Investasi	--	21,898,600	11,294,813	Investment
Konsumsi	--	127,061	--	Consumption
Piutang asuransi	--	288,989	--	Insurance receivables
Aset lain-lain*)	--	38,485	--	Other assets*)
	--	49,769,616	30,199,079	
Total	1,970,120	49,769,616	30,199,079	Total
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar				Liabilities measured at fair value
Liabilitas derivatif	--	56	--	Derivatives payable
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan				Liabilities for which fair value are disclosed
Liabilitas segera	--	46,046	--	Current liabilities
Liabilitas akseptasi	--	151,161	--	Acceptances payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	22,585,908	--	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	--	34,613,657	--	Fund borrowings
Utang asuransi	--	6,306	--	Insurance payable
Utang penjaminan	--	61,715	--	Guarantess payable
Liabilitas lain-lain**)	--	612,357	--	Other liabilities**)
	--	58,077,206	--	
Total	--	58,077,262	--	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)****37. Fair Value of Financial Assets and
Liabilities (continued)**

	31 Desember/ December 31, 2021		
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar			
Aset keuangan pada FVTOCI			
Efek-efek	560,050	--	--
Aset keuangan pada FVTPL			
Tagihan derivatif	--	6	--
	<u>560,050</u>	<u>6</u>	<u>--</u>
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan			
Giro pada			
Bank Indonesia	--	2,318	--
Giro pada bank	--	674,115	--
Penempatan pada bank	--	16,641,155	--
Tagihan akseptasi	--	460,540	--
Pembiayaan dan piutang			
Modal kerja	--	17,984,704	15,695,693
Investasi	--	26,693,669	7,517,039
Konsumsi	--	120,356	--
Piutang asuransi	--	285,656	--
Aset lain-lain*)	--	55,191	--
	<u>--</u>	<u>62,917,704</u>	<u>23,212,732</u>
Total	<u>560,050</u>	<u>62,917,710</u>	<u>23,212,732</u>
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar			
Liabilitas derivatif	--	--	--
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan			
Liabilitas segera	--	32,570	--
Liabilitas akseptasi	--	460,540	--
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	25,400,783	--
Pinjaman yang diterima	--	36,342,516	--
Utang asuransi	--	4,055	--
Utang penjaminan	--	62,363	--
Liabilitas lain-lain**)	--	1,057,255	--
	<u>--</u>	<u>63,360,082</u>	<u>--</u>
Total	<u>--</u>	<u>63,360,082</u>	<u>--</u>

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima, dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

Tidak terdapat perpindahan level untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Financial assets measured at fair value
Financial assets at FVTOCI
Securities
Financial assets at FVTPL
Derivatives receivable

Assets for which fair value are disclosed
Current account with Bank Indonesia
Current account with bank
Placement with bank
Acceptances receivable
Financing and receivables
Working capital
Investment
Consumption
Insurance receivables
Other assets*)

Total
Liabilities measured at fair value
Derivatives payable

Liabilities for which fair value are disclosed
Current liabilities
Acceptances payable
Debt securities issued
Fund borrowings
Insurance payable
Guarantess payable
Other liabilities**)

Total

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to guarantor.

There were no transfers between levels for the years ended December 31, 2022 and 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**38. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum**

Manajemen modal

Tujuan utama dari kebijakan LPEI atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan LPEI memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi ekspansi usaha LPEI dan memenuhi ketentuan kecukupan permodalan oleh regulator. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) merupakan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Perhitungan rasio KPM LPEI (entitas induk) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK/010/2009 Pasal 58, dimana LPEI wajib memelihara rasio kecukupan Modal paling rendah sebesar 8,00%.

38. Minimum Required Capital Adequacy Ratio

Capital management

The main purpose of LPEI's policy on capital management policies is to ensure that LPEI has strong capital to support expansive business strategy and to comply with provisions from the regulator. The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of capital of risk weight asset (RWA).

The CAR calculation of LPEI (parent only) as of December 31, 2022 and 2021, are based on Minister of Finance Regulation No. 140/PMK/010/2009 Article 58, wherein LPEI is required to maintain the capital adequacy ratio of at least 8.00%.

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
ATMR (tanpa memperhitungkan risiko pasar)	82,799,897	80,525,727	Risk Weighted Assets (RWA) (without market risk charge)
ATMR (dengan memperhitungkan risiko pasar)	83,272,425	82,693,589	RWA (with market risk charge)
Modal			Capital
Modal inti	26,745,646	29,807,150	Core capital
Modal pelengkap	524,562	898,504	Supplementary capital
Penyertaan Modal	(40,490)	(50,003)	Equity Investment
Total modal	27,229,718	30,655,651	Total capital
Rasio KPM (tanpa memperhitungkan risiko pasar)	32.89%	38.07%	CAR (without market risk charge)
Rasio KPM (dengan memperhitungkan risiko pasar)	32.70%	37.07%	CAR (with market risk charge)
Rasio KPM minimum	8.00%	8.00%	Minimum CAR

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, LPEI telah memenuhi ketentuan rasio KPM.

As of December 31, 2022 and 2021, LPEI has complied with the required capital adequacy ratio.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**38. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum (lanjutan)**

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum LPEI secara konsolidasian dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah 32,74% dan 37,19%

**38. Minimum Required Capital Adequacy Ratio
(continued)**

LPEI's minimum capital adequacy ratio on a consolidated basis as at December 31, 2022 and 2021 after considering credit and market risk is 32.74% and 37.19%.

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan normal usaha, LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

**39. Information of Transaction With Related
Parties**

In the normal course of business, LPEI enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the terms and conditions agreed by the parties.

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
1. Personel manajemen kunci/ Key management personnel	Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit, dewan pengawas syariah dan kepala divisi/Board of directors, managing directors, audit committee, sharia supervisory board and head of divisions	Pembiayaan dan piutang dan penyisihan imbalan kerja/ Financing and receivables, provision for employee benefits
2. Kementerian Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic Indonesia Through the Ministry of Finance	Pemilik/ Owner	Efek-efek dan pinjaman yang diterima/Securities and fund borrowings
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ Controlling through the Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank dan penempatan pada bank /Current account with banks and placements with banks
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ Controlling through the Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank, penempatan pada bank dan efek-efek /Current account with banks, placements with banks and securities
5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ Controlling through the Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank, penempatan pada bank dan pinjaman yang diterima/ Current account with banks, placements with banks and fund borrowings
6. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ Controlling through the Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank, Penempatan pada bank/ Current account with banks and placements with banks
7. PT Bank Raya Indonesia Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ Controlling through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan pada bank/ Placements with banks
8. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ Controlling through the Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank, pinjaman yang diterima/ Current account with banks and fund borrowings

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**
**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
9.PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
10.PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
11. PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
12. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
13.PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
14. PT PAL Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
15. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
16. PT Pindad (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
17. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
18. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
19. PT Nindya Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)****39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
20. PT INKA Multi Solusi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
21. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
22. PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
23. PT Angkasa Pura II (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
24. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
25. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
26. PT Petro Jordan Abadi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
27. PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
28. PT Industri Kereta Api (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
29. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
30. PT Nusantara Turbin dan Propulsi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
31. PT Permodalan Nasional Madani	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
32. PT Pejagan Pemalang Tol Road	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**
**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
33.PT Kimia Farma Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
34.PT Jasamarga Pandaan Malang	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
35.PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
36.PT Jasamarga Manado Bitung	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
37.PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
38.PT Indah Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
39. PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
40.PT Sinergi Gula Nusantara	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
41.PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
42. PT Wijaya Karya Beton Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)****ASET****a. Giro pada bank (Catatan 5a)**

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11,843	565,767
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	37,621	22,636
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	34,529	20,855
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	2,230	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2	--
Total	86,225	609,258

b. Penempatan pada bank (Catatan 6a)

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,587,235	4,136,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,324,000	4,201,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40,727	40,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	2,292,675
PT Bank Raya Indonesia	--	71,263
Total	4,951,962	10,740,938

c. Efek-efek (Catatan 7a)

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia	1,241,336	560,050
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	728,784	--
Total	1,970,120	560,050

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)****ASSETS****a. Current accounts with banks (Note 5a)**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	565,767
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22,636
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20,855
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--
Total	609,258

b. Placements with Banks (Note 6a)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,136,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,201,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,292,675
PT Bank Raya Indonesia	71,263
Total	10,740,938

c. Securities (Note 7a)

The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance	560,050
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--
Total	560,050

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

ASET (lanjutan)

d. Pembiayaan dan piutang (Catatan 9c)

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
PT Pertamina (Persero)	3,012,181	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1,344,642	3,318,241
PT Angkasa Pura II (Persero)	1,173,592	1,300,514
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1,157,165	1,142,149
Pengembangan Pariwisata Indonesia	1,106,186	1,053,394
PT Garuda Indonesia (Persero)	994,942	994,403
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	801,165	805,961
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	752,721	651,710
PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	558,225	621,978
PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	513,368	808,284
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	478,683	472,016
PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	343,893	362,072
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	314,848	71,104
PT PAL Indonesia (Persero)	310,752	291,526
PT Pembangunan Perumahan Presisi (Persero) Tbk	301,078	--
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	280,032	296,912
PT Sinergi Gula Nusantara	261,252	--
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	252,993	284,180
PT Jasamarga Manado Bitung	240,433	214,152
PT Petro Jordan Abadi	174,138	181,395
PT Wijaya Karya Beton Tbk	141,711	--
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	110,517	177,045
PT Pindad (Persero)	51,994	134,850
PT Inka Multi Solusi	42,795	88,676
PT Indah Karya (Persero)	20,991	21,078
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	14,581	6,083
PT Nusantara Turbin dan Propulsi	2,665	12,987
PT Nindya Karya (Persero)	--	110,150
PT Sarinah (Persero)	--	--
PT Pejagan Pemalang Tol Road	--	806,569
PT Jasamarga Pandaan Malang	--	444,155
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	--	120,208
PT Industri Kereta Api (Persero)	--	117,550
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	--	100,782
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	--	60,245
Personel manajemen kunci	9,263	11,982
Total	14,766,806	15,082,351
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(390,626)	(420,992)
Neto	14,376,180	14,661,359

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

ASSETS (continued)

d. Financing and receivables (Note 9c)

PT Pertamina (Persero)	--	PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3,318,241	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)	1,300,514	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1,142,149	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Pengembangan Pariwisata Indonesia	1,053,394	Pengembangan Pariwisata Indonesia
PT Garuda Indonesia (Persero)	994,403	PT Garuda Indonesia (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	805,961	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	651,710	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	621,978	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)
PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	808,284	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	472,016	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	362,072	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	71,104	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT PAL Indonesia (Persero)	291,526	PT PAL Indonesia (Persero)
PT Pembangunan Perumahan Presisi (Persero) Tbk	--	PT Pembangunan Perumahan Presisi (Persero) Tbk
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	296,912	PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Sinergi Gula Nusantara	--	PT Sinergi Gula Nusantara
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	284,180	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Jasamarga Manado Bitung	214,152	PT Jasamarga Manado Bitung
PT Petro Jordan Abadi	181,395	PT Petro Jordan Abadi
PT Wijaya Karya Beton Tbk	--	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	177,045	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Pindad (Persero)	134,850	PT Pindad (Persero)
PT Inka Multi Solusi	88,676	PT Inka Multi Solusi
PT Indah Karya (Persero)	21,078	PT Indah Karya (Persero)
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	6,083	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Nusantara Turbin dan Propulsi	12,987	PT Nusantara Turbin dan Propulsi
PT Nindya Karya (Persero)	110,150	PT Nindya Karya (Persero)
PT Sarinah (Persero)	--	Sarinah (Persero)
PT Pejagan Pemalang Tol Road	806,569	PT Pejagan Pemalang Tol Road
PT Jasamarga Pandaan Malang	444,155	PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	120,208	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Industri Kereta Api (Persero)	117,550	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	100,782	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	60,245	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
Key management personnel	11,982	Key management personnel
Total	15,082,351	Total
Less allowance for impairment losses	(420,992)	Less allowance for impairment losses
Net	14,661,359	Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)****LIABILITAS****e. Pinjaman yang diterima (Catatan 17)**

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kementerian keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia	1,493,288	--
	52,680	53,557
Total	1,545,968	53,557

f. Penyisihan imbalan kerja

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Personel manajemen kunci	40,533	47,386

**g. Fasilitas pinjaman kepada debitur yang
belum digunakan (Catatan 30)**

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Entitas dan lembaga Pemerintah	1,289,023	1,756,081

**h. Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan
(Catatan 30)**

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Entitas dan lembaga Pemerintah	54,973	90,635

**i. Pendapatan Bunga Kredit Bermasalah
(Catatan 30)**

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Entitas dan lembaga Pemerintah	391,566	334,428

j. Bank garansi (Catatan 30)

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Entitas dan lembaga Pemerintah	1,542,826	2,214,803

k. Proteksi piutang dagang (Catatan 30)

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Entitas dan lembaga Pemerintah	26,776	--

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)****LIABILITIES****e. Fund borrowings (Note 17)**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Government of the Republic
Indonesia through Ministry
of Finance
Total

f. Provision for employee benefits

Key management personnel

g. Unused loan facilities to debtors (Note 30)**h. Outstanding irrevocable L/C (Note 30)****i. Interest income on non-performing loans
(Note 30)****j. Bank guarantee (Note 30)****k. Receivable protection (Note 30)**

Government entities and institutions

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

LIABILITAS (lanjutan)

l. Tagihan dan liabilitas akseptasi (Catatan
11a)

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Entitas dan lembaga Pemerintah	--	2,960

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

LIABILITIES (continued)

l. Acceptances payable and receivable (Note
11a)

Government entities and institutions

m. Efek-efek utang yang diterbitkan (Catatan
16)

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Entitas dan lembaga Pemerintah	5,042,000	5,070,000

m. Debt securities issued (Note 16)

Government entities and institutions

Suku bunga untuk pembiayaan dan
piutang dalam Rupiah dan Dolar Amerika
Serikat dengan pihak berelasi adalah
sebagai berikut:

Interest rate for financing and receivables
in Rupiah and United States Dollar with
related parties are as follow:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Suku bunga kontrak		
Rupiah	0.00 - 10.30	0.00 - 10.30
Dolar Amerika Serikat	4.00 - 7.49	2.90 - 6.20
Suku bunga efektif		
Rupiah	0.00 - 10.35	3.44 - 17.47
Dolar Amerika Serikat	5.46 - 7.47	2.93 - 6.42

Contractual interest rate

Rupiah

United States Dollar

Effective interest rate

Rupiah

United States Dollar

Persentase saldo dengan pihak-pihak
berelasi terhadap total aset dan liabilitas
LPEI adalah sebagai berikut:

Percentage of balances with related
parties to total assets and liabilities of LPEI
are as follows:

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
Aset		
Giro pada bank	0.10%	0.67%
Penempatan pada bank	5.91%	12.01%
Efek-efek	2.35%	0.63%
Pembiayaan dan piutang	16.98%	16.46%
Total	25.34%	29.77%
Liabilitas		
Pinjaman yang diterima	2.71%	0.09%
Penyisihan imbalan kerja	0.07%	0.08%
Efek-efek utang yang diterbitkan	8.85%	8.61%
Total	11.63%	8.78%

Asset
Current accounts with banks
Placements with banks

Securities

Financing and receivables

Total

Liabilities

Fund borrowings

Liability for employee benefits

Debt securities issued

Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)****n. Informasi signifikan lainnya**

Pelaksanaan Program Investasi
Pemerintah dalam Rangka Program
Pemulihan Ekonomi Nasional

Dampak dari Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU No 2/2020).

Pelaksanaan Program Investasi
Pemerintah dalam Rangka Program
Pemulihan Ekonomi Nasional.

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)****n. Other significant information**

*Implementation of Government Investment
Program in the Context of the National
Economic Recovery Program*

The impact of the Covid-19 Pandemic that has emerged in Indonesia since March 2020 has made the Government stipulated Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability which has been approved by the House of Representatives (DPR) to be later ratified as Law No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law (Law No 2/2020).

*Implementation of Government Investment
Program in the Context of the National
Economic Recovery Program.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**n. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Salah satu program pemulihan ekonomi nasional yakni melalui Program Investasi Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 Lampiran UU No 2/2020 pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP No 23/2020) yang telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23/2020 (PP No 43/2020).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada PP 43/2020 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK No.118/2020) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK No. 189/2021).

Penugasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.06/2020 tentang Penugasan Kepada LPEI sebagai Pelaksana Investasi untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (KMK No. 545/2020).

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)**n. Other significant information (continued)**

One of the national economic recovery programs is through the Government Investment Program as stated in Article 11 of Attachment of Law No. 2/2020 whose implementation is further regulated in Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in order to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and Saving the National Economy (Government Regulation No 23/2020) which has been amended by Government Regulation No. 43 of 2020 concerning Amendment to Government Regulation No. 23/2020 (Government Regulation No 43/2020).

Further provisions regarding Government Investment Procedures as referred to in PP 43/2020 are regulated by Regulation of Minister of Finance No. 118/PMK.06/2020 concerning Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program (PMK No.118/2020) and Regulation of Minister of Finance Number 189/PMK.06/2021 concerning to amendment to Regulation of Minister of Finance No 118/PMK.06/2020 concerning Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program (PMK No. 189/2021).

The assignment for the implementation of Government Investment was then stipulated in the Decree of Minister of Finance No. 545/KMK.06/2020 concerning Assignment to LPEI as Investment Executor to Implement Government Investment in the Framework of the National Economic Recovery Program for the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (KMK No. 545/2020).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)****n. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Pada 28 Desember 2020, telah ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dan LPEI tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-16/KN/2020 dan No.595/PKS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 (Perjanjian Pelaksanaan Investasi) serta Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 75 tanggal 28 Desember 2020 antara LPEI dengan PTPN, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta (Perjanjian Pemberian Dana Investasi).

Berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Investasi dan Perjanjian Pemberian Dana Investasi, limit Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) kepada PTPN sebesar Rp4.000.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan belanja modal perkebunan dan pabrik serta modal kerja untuk komoditas sawit dan tebu. Jangka waktu pemberian IP PEN ditetapkan selama 10 tahun atau sampai dengan tahun 2030 termasuk *grace period* selama 7 tahun.

Di tahun 2022, LPEI selaku Pelaksana Investasi telah melakukan kegiatan penyaluran dana IP PEN sebesar Rp2.950.000, termasuk melaksanakan kegiatan *monitoring* baik *onsite* dengan melakukan *site visit* ke lokasi perkebunan dan pabrik PTPN yang dibiayai IP PEN, serta *monitoring offsite* yang telah dilaporkan kepada Pemberi Investasi antara lain: Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahun, Laporan Tahunan, dan Laporan realisasi pencapaian *Key Achievement Indicator*.

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)****n. Other significant information (continued)**

On December 28, 2020, an Investment Implementation Agreement was signed between the Ministry of Finance and LPEI regarding the Implementation of Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-16/KN/2020 and No. 595/PKS/12/2020 dated December 28, 2020 (Investment Implementation Agreement) and the Investment Fund Provision Agreement by the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the form of a subordinated loan in the context of the National Economic Recovery Program No. 75 dated December 28, 2020 between LPEI and PTPN, which was made before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta (Investment Fund Provision Agreement).

Based on the Investment Implementation Agreement and the Investment Fund Provision Agreement, the limit of Government Investment PEN (IP PEN) to PTPN is in the amount of Rp4,000,000 which is used to finance capital expenditures for plantations and factories as well as working capital for oil palm and sugar cane commodities. The period of granting of the IP PEN is set for 10 years or up to 2030 including a grace period of 7 years.

In 2022, LPEI as the Investment Executor has carried out the distribution of IP PEN funds of Rp2,950,000, including carrying out monitoring activities both onsite by conducting site visits to PTPN plantation and mill locations financed by IP PEN, as well as offsite monitoring that has been reported to the Investment Provider, among others: Monthly Reports, Mid-Year Reports, Annual Reports, and Key Achievement Indicator realization reports.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)****n. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Pelaksanaan kegiatan penyaluran dana dan *monitoring* IP PEN selama tahun 2022 dan 2021 telah sesuai dengan ketentuan di dalam PMK No. 118/PMK/2020, PMK No.189/PMK.06/2021, KMK No.545/KMK.06/2020, Perjanjian Pelaksanaan Investasi, dan Perjanjian Pemberian Dana Investasi.

40. Informasi Tambahan

Rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap total aset produktif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah 14,87% dan 12,40%.

41. Perkembangan Kondisi Ekonomi di Indonesia

Sejak awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona". Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pengaruh dari ketidakpastian yang ada pada aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada saat ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Pengaruh tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat diketahui dan dapat diperkirakan jumlahnya.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)****n. Other significant information (continued)**

Implementation of fund distribution activities and monitoring of IP PEN during 2022 and 2021 has complied with the provisions in Regulation of Minister PMK of Finance No. 118/PMK/2020, Regulation of Minister of Finance No. 189/PMK.06/2021, KMK No.545/KMK.06/2020, the Investment Implementation Agreement, and the Investment Fund Provision Agreement.

40. Additional Information

As of December 31, 2022 and 2021, the non-performing assets to total earning assets ratios were 14.87% and 12.40%, respectively.

41. Indonesia's Economic Condition

Since early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic may had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

The resolution of Indonesia economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the authority, an action that is beyond the Bank control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders. The effects of this uncertainty on the assets and liabilities reported in the statement of financial position cannot be presently determined. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**41. Perkembangan Kondisi Ekonomi di
Indonesia (lanjutan)**

Bank telah melakukan evaluasi terhadap dampak penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) termasuk dampak terhadap laporan keuangan Bank. *Stress test* terhadap aset keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan berbagai skenario untuk mengetahui signifikansi dampak yang ditimbulkan dan menentukan langkah serta strategi yang tepat untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.

Dalam rangka memitigasi dampak negatif yang disebabkan dari pandemi Covid-19 dan sebagai bentuk implementasi *Business Continuity Plan* (BCP), Bank telah melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, antara lain dengan membentuk gugus tugas untuk penanganan dampak penyebaran Covid-19 di internal Bank khususnya terkait operasional Bank. Penerapan protokol kesehatan yang telah dilakukan antara lain seperti membatasi jumlah antrian, pengukuran suhu tubuh kepada karyawan dan nasabah, menyediakan peralatan penunjang untuk karyawan yang bertatap muka langsung dengan nasabah, menerapkan kebijakan *split operation* dalam batasan yang wajar dan sesuai dengan ketentuan dari otoritas. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Bank dan untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah, Bank telah memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19 kepada seluruh karyawan. Bank memiliki *backup site* yang dapat digunakan apabila terjadi penutupan sementara Satuan Kerja yang terdampak dari penyebaran Covid-19, sehingga transaksi perbankan tidak mengalami kendala yang signifikan. Pengetesan dengan metode PCR dan *Rapid test* dilakukan kepada karyawan yang kontak erat dengan karyawan positif Covid-19.

**41. Indonesia's Economic Condition
(continued)**

The Bank has evaluated the impact of the spread of *Corona Virus Disease* (Covid-19) including the impact on the Bank's financial statements. *Stress tests* on financial assets are carried out regularly every month using various scenarios to determine the significance of the impact and determine the appropriate steps and strategies to anticipate the resulting impacts.

In order to mitigate the negative impacts caused by the Covid-19 pandemic and implementation of the *Business Continuity Plan* (BCP), Bank has made efforts to prevent the spread of Covid-19, such as establish a task force to handle the impact of the spread of Covid-19 on internal Bank especially related to Bank operations. The implementation of health protocols that have been carried out includes limiting the number of queues, measuring body temperature for employees and customers, providing equipment for front liner employees, and implementing a *split operation* policy within reasonable limits and based on the provisions of the authorities. In order to prevent the spread of Covid-19 within internal Bank and to support the Covid-19 vaccination program organized by the government, Bank has facilitated the Covid-19 vaccination all employees. The Bank has a *back-up site* that can be used in the event of a temporary closure of the Work Unit affected by the spread of Covid-19, so that banking transactions do not encounter significant problems. Testing with the PCR method and the *Rapid test* were carried out on employees who were close contact with positive Covid-19 employees.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

41. Perkembangan Kondisi Ekonomi di Indonesia (lanjutan)

Selain antisipasi terhadap risiko operasional yang berpotensi terjadi sebagai akibat dari penyebaran Covid-19, Bank telah melakukan antisipasi terhadap risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang disebabkan karena penyebaran Covid-19, antara lain menyusun kebijakan internal Bank yang berkaitan dengan Stimulus Perekonomian Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan otoritas dan pemerintah. Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid-19. Mengurangi intensitas tatap muka dalam proses permohonan fasilitas kredit dengan menyediakan media elektronik untuk permohonan fasilitas kredit. Risiko likuiditas sebagai akibat dari meningkatnya volume restrukturisasi kredit dengan penundaan pembayaran pokok masih dapat diantisipasi dengan baik oleh Bank. Selama masa pandemi Covid-19 ini, ekspansi kredit tetap dilakukan dengan hati-hati dan menghindari sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19 atau sektor yang menurut *risk appetite* Bank perlu dihindari.

42. Informasi Segmen Usaha

Informasi segmen berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

41. Indonesia's Economic Condition (continued)

In addition to anticipating operational risks that could potentially occur as a result of the spread of Covid-19, Bank has anticipated credit risk, market risk, and liquidity risk caused by the spread of Covid-19, such as formulating Bank internal policies related to the National Economic Stimulus and National Economic Recovery in accordance with the authority and government. Restructuring was given to debtors who were affected by the spread of Covid-19. Reducing the face-to-face intensity of the credit application process by providing electronic media. Liquidity risk as a result of the increasing volume of credit restructuring with postponement of principal payments (grace period) had been anticipated by the Bank. During this time of the Covid-19 pandemic, credit expansion was still carried out carefully and avoided sectors affected by the Covid-19 pandemic or sectors that according to the Bank's risk appetite should be avoided.

42. Business Segment Information

Segment information based on business type is as follows:

		31 Desember/December 31, 2022							
		Penugasan Umum/ General Assignment		Penugasan Khusus/ National Interest Account		Entitas anak/ Subsidiary	Eliminasi/ Elimination	Total	
		Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia				
Pendapatan segmen		2,711,128	594,748	404,978	148	849	--	3,711,851	Segment income
Beban segmen		(2,396,842)	(539,272)	--	--	--	--	(2,936,114)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto		314,286	55,476	404,978	148	849	--	775,737	Segment income - net
Pendapatan operasional lainnya		(296,383)	425,938	56,659	--	--	--	186,214	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan		(2,947,166)	487,246	352,324	--	--	--	(2,107,596)	Provision for impairment losses on financial assets
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan		(488)	--	(164)	--	--	--	(652)	Provision for impairment losses on estimated guarantee claim
Beban operasional lainnya		(734,277)	(8,703)	(9,146)	--	(10,362)	--	(762,488)	Other operating expenses
Laba operasional		(3,664,028)	959,957	804,651	148	(9,513)	--	(1,908,785)	Income from operations
Pendapatan bukan operasional - neto		6,654	--	253	--	--	9,513	16,420	Non-operating income - net
Pendapatan (Beban) pajak		--	--	--	--	--	--	(1,222,189)	Tax Income (expense)
Laba tahun berjalan		--	--	--	--	--	--	(3,114,554)	Income for the year
Aset		58,997,445	9,187,863	15,627,317	3,187	41,343	(41,403)	83,815,752	Assets
Liabilitas		49,843,106	6,427,906	673,499	3,057	852	(913)	56,947,507	Liabilities

		31 Desember/December 31, 2021							
		Penugasan Umum/ General Assignment		Penugasan Khusus/ National Interest Account		Entitas anak/ Subsidiary	Eliminasi/ Elimination	Total	
		Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia				
Pendapatan segmen		2,932,545	920,739	410,231	--	5	--	4,263,520	Segment income
Beban segmen		--	--	--	--	(1)	--	(3,057,215)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto		2,932,545	920,739	410,231	--	4	--	1,206,305	Segment income - net
Pendapatan operasional lainnya		--	--	--	--	--	--	215,420	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan		701,377	(613,772)	(345,357)	--	--	--	(257,752)	Provision for impairment losses on financial assets
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan		--	--	--	--	--	--	(114)	Provision for impairment losses on estimated guarantee claim
Beban operasional lainnya		--	--	--	--	--	--	(758,763)	Other operating expenses
Laba operasional		3,633,922	306,967	64,874	--	4	--	405,096	Income from operations
Pendapatan bukan operasional - neto		--	--	--	--	--	--	3,943	Non-operating income - net
Pendapatan (Beban) pajak		--	--	--	--	--	--	(21,643)	Tax Income (expense)
Laba tahun berjalan		--	--	--	--	--	--	387,396	Income for the year
Aset		95,698,063	9,736,441	15,257,271	--	50,006	(31,700,860)	89,040,921	Assets
Liabilitas		74,676,154	13,518,419	11,320,914	--	(32,226,948)	(32,226,948)	58,920,543	Liabilities

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

43. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas**43. Maturity Analysis of Assets and Liabilities**

	31 Desember/ December 31, 2022			31 Desember/ December 31, 2021			
	Jatuh tempo dalam satu tahun/ One year And below	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ Due beyond one year	Total	Jatuh tempo dalam satu tahun/ One year And below	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ Due beyond one year	Total	
Aset Keuangan							Financial Assets
Giro pada							Current accounts with
Bank Indonesia	426	--	426	2,318	--	2,318	Bank Indonesia
Giro pada bank	180,647	--	180,647	674,115	--	674,115	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	12,560,764	--	12,560,764	16,641,155	--	16,641,155	Placements with banks
Efek-efek	56,471	1,913,649	1,970,120	28,515	531,535	560,050	Securities
Tagihan akseptasi	151,161	--	151,161	460,540	--	460,540	Acceptances receivable
Tagihan derivatif	--	--	--	6	--	6	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang syariah	23,739,078	59,896,925	83,636,003	20,761,312	63,201,850	83,963,162	Financing and sharia receivables
Piutang pembiayaan garansi lainnya	325,532	--	325,532	298,034	--	298,034	Other guarantee receivables
Piutang asuransi dan penjaminan	288,989	--	288,989	285,656	--	285,656	Insurance and guarantee receivables
Aset lain-lain	38,485	--	38,485	156,983	--	156,983	Other assets
Total aset keuangan	37,341,553	61,810,574	99,152,127	39,308,634	63,733,385	103,042,019	Total financial assets
Aset Non Keuangan							Non-financial Assets
Kas	38	--	38	65	--	65	Cash
Biaya dibayar dimuka	--	15,129	15,129	--	15,782	15,782	Prepaid expenses
Klaim atas kelebihan pembayaran Pajak	--	865	865	--	76,671	76,671	Claim for tax refund
Aset pajak tangguhan-neto	--	1,552,978	1,552,978	--	2,767,613	2,767,613	Deferred tax assets-net
Aset tetap	--	1,525,478	1,525,478	--	1,525,187	1,525,187	Premises and equipment
Aset reasuransi	3,544	--	3,544	2,615	--	2,615	Reinsurance assets
Aset lain-lain	20,804	--	20,804	25,201	--	25,201	Other assets
Total aset non keuangan	24,386	3,094,450	3,118,836	27,881	4,385,253	4,413,134	Total non-financial assets
	37,365,939	64,905,024	102,270,963	39,336,515	68,118,638	107,455,153	
Akumulasi penyusutan			(527,643)			(421,762)	Accumulated depreciation
Cadangan kerugian penurunan nilai			(17,927,568)			(17,992,470)	Allowance for impairment losses
Total			83,815,752			89,040,921	Total
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Liabilitas segera	46,046	--	46,046	32,570	--	32,570	Current liabilities
Efek-efek utang yang diterbitkan	3,087,899	22,202,773	25,290,672	3,088,395	24,623,994	27,712,389	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	15,433,833	13,863,232	29,297,065	11,211,450	17,588,121	28,799,571	Fund borrowings
Liabilitas akseptasi	151,161	--	151,161	460,540	--	460,540	Acceptances payable
Liabilitas derivatif	56	--	56	--	--	--	Derivatives payable
Utang asuransi	6,306	--	6,306	4,055	--	4,055	Insurance payable
Utang penjaminan	61,715	--	61,715	62,363	--	62,363	Guarantee payable
Liabilitas sewa guna usaha	2,921	2,632	5,553	7,706	3,274	10,980	Lease payable
Liabilitas lain-lain	612,357	--	612,357	357,048	--	357,048	Other liabilities
Total liabilitas keuangan	19,402,294	36,068,637	55,470,931	15,224,127	42,215,389	57,439,516	Total financial liabilities
Liabilitas Non Keuangan							Non-financial Liabilities
Utang pajak	11,267	--	11,267	12,950	--	12,950	Taxes payable
Penyisihan imbalan kerja	--	144,514	144,514	--	157,675	157,675	Provision for employee benefits
Estimasi klaim	478,657	--	478,657	392,559	--	392,559	Estimated claims
Liabilitas asuransi	7,961	--	7,961	6,390	--	6,390	Insurances liabilities
Liabilitas lain-lain	834,177	--	834,177	911,453	--	911,453	Other liabilities
Total liabilitas non keuangan	1,332,062	144,514	1,476,576	1,323,352	157,675	1,481,027	Total non-financial liabilities
Total	20,734,356	36,213,151	56,947,507	16,547,479	42,373,064	58,920,543	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

44. Tambahan Informasi Arus Kas

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	Arus kas/Cash flow		Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Rate		Perubahan Non Kas/ Non Cash Changes	
	31 Desember/ December 31, 2021	Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah						
Liabilitas sewa	10,980	--	(6,047)	--	620	5,553
Pinjaman yang diterima	28,799,571	70,215,181	(69,717,687)	--	--	29,297,065
Efek-efek yang diterbitkan	27,712,389	--	(3,089,300)	657,500	10,083	25,290,672
Total	56,522,940	70,215,181	(72,813,034)	657,500	10,703	54,593,290

Rupiah
Lease liabilities
Fund borrowing
Debt securities issued
Total

	Arus kas/Cash flow		Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Rate		Perubahan Non Kas/ Non Cash Changes	
	31 Desember/ December 31, 2020	Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember/ December 31, 2021	
Rupiah						
Liabilitas sewa	--	--	--	--	--	--
Liabilitas sewa	14,837	--	(3,857)	--	--	10,980
Pinjaman yang diterima	28,599,773	38,343,278	(38,143,480)	--	--	28,799,571
Efek-efek yang diterbitkan	36,481,044	--	(8,781,000)	8,054	4,291	27,712,389
Total	65,095,654	38,343,278	(46,928,337)	8,054	4,291	56,522,940

Rupiah
Lease liabilities
Lease liabilities
Fund borrowing
Debt securities issued
Total

45. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

45. Accounting Standards and Standard Interpretations which Has Issued But Not Yet Effective

New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates; and
Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**45. Standar Akuntansi dan Interpretasi
Standar yang Telah Disahkan Namun
Belum Berlaku Efektif (lanjutan)****Pernyataan dan Interpretasi Standar
Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku
Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)**

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, LPEI masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

46. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Pada tanggal 6 Maret 2023, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor S-194/MK/08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN. Surat tersebut menyebutkan bahwa perhitungan CKPN dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung dengan menggunakan metode perhitungan arus kas yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga sebesar 0,1%.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**45. Accounting Standards and Standard
Interpretations which Has Issued But Not
Yet Effective (continued)****New and Revised Statements and
Interpretation of Financial Accounting
Standards Effective in the Current Year
(continued)**

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

Until the date of the financial statements is authorized, the LPEI is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards

46. Subsequent Event

On March 6, 2023, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Letter Number S-194/MK/08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumptions Based on Interest Rates After Restructuring in Calculating CKPN. The Letter stated that the calculation of CKPN for financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk using the discounted cash flow method at a discount rate of 0.1%.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

47. Informasi Keuangan Tambahan

Informasi keuangan LPEI (entitas induk) yang terdapat dalam lampiran, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (secara kolektif yang disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

48. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen LPEI pada tanggal 24 Maret 2023.

47. Additional Financial Information

The accompanying financial information of LPEI (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2022 and 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended December 31, 2022 and 2021 (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

48. Completion of The Financial Statements

The management is responsible for the preparation of financial statements which are completed and authorized for issue on March 24, 2023.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 As of December 31, 2022 and 2021
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
ASET			ASSETS
Kas	38	65	Cash
			Current account
Giro pada Bank Indonesia	426	2,318	with Bank Indonesia
Giro pada bank			Current accounts with banks
Penugasan Umum	148,974	95,563	General Assignment
Cadangan kerugian			Allowance for
penurunan nilai	(1)	(9)	impairment losses
	148,973	95,554	
Penugasan Khusus	31,061	568,550	National Interest Account
Cadangan kerugian			Allowance for
penurunan nilai	--	--	impairment losses
	31,061	568,550	
	180,034	664,104	
Penempatan pada bank			Placements with banks
Penugasan Umum	2,139,938	4,759,155	General Assignment
Cadangan kerugian			Allowance for
penurunan nilai	(9)	(946)	impairment losses
	2,139,929	4,758,209	
Penugasan Khusus	10,380,100	11,842,000	National Interest Account
Cadangan kerugian			Allowance for
penurunan nilai	(500)	(1,263)	impairment losses
	10,379,600	11,840,737	
	12,519,529	16,598,946	
Efek-efek	1,970,120	560,050	Securities
Tagihan derivatif	--	6	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang,			Financing and receivables,
pembiayaan dan piutang syariah			financing and sharia receivables
dan piutang lainnya			and other receivables
Pembiayaan dan piutang, dan			Financing and receivables, and
pembiayaan dan piutang syariah			financing and sharia receivables
Penugasan Umum			General Assignment
Pembiayaan dan piutang			
yang diberikan	68,673,657	68,583,154	Financing and Receivables
Cadangan kerugian			Allowance for
penurunan nilai	(15,548,824)	(14,851,827)	impairment losses
	53,124,833	53,731,327	
Pembiayaan dan piutang			Financing and
syariah yang diberikan	11,469,720	12,431,504	sharia receivables
Cadangan penyisihan			Allowance for
aset produktif	(2,285,350)	(2,696,204)	doubtful accounts
	9,184,370	9,735,300	
Penugasan Khusus			National Interest Account
Pembiayaan dan piutang			
yang diberikan	3,489,399	2,948,504	Financing and receivables
Cadangan kerugian			Allowance for
penurunan nilai	(48,735)	(400,152)	impairment losses
	3,440,664	2,548,352	

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
**Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)**

As of December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
ASET (lanjutan)			ASSETS (continued)
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	3,227	--	Financing and sharia receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(40)	--	Allowance for doubtful accounts
	3,187	--	
Total - neto	65,753,054	66,014,979	Total - net
Piutang lainnya			Other receivables
Piutang pembiayaan garansi	325,532	298,034	Guarantee financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(43,865)	(40,159)	Allowance for impairment losses
	281,667	257,875	
Pajak dibayar dimuka	865	76,671	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	15,129	15,782	Prepaid expenses
Piutang asuransi dan penjaminan	288,989	285,656	Insurance and guarantee receivables
Aset reasuransi	3,544	2,615	Reinsurance assets
Tagihan akseptasi			Acceptances receivable
Penugasan Umum	147,569	460,540	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai	(231)	(1,910)	Allowance for impairment losses
	147,338	458,630	
Penugasan Khusus	3,592	--	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13)	--	Allowance for impairment losses
	3,579	--	
	150,917	458,630	
Penyertaan saham - neto	40,490	50,003	Equity investment - net
Aset tetap			Premises and equipment
Harga perolehan	1,525,478	1,525,187	Cost
Akumulasi penyusutan	(527,643)	(421,762)	Accumulated depreciation
	997,835	1,103,425	
Aset pajak tangguhan - neto	1,552,978	2,767,613	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	60,198	182,180	Other assets
TOTAL ASET	83,815,813	89,040,918	TOTAL ASSETS

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
Liabilitas segera	46,046	32,570	Current liabilities
Liabilitas akseptasi			Acceptances payable
Penugasan Umum	147,569	460,540	General Assignment
Penugasan Khusus	3,592	--	National Interest Account
	<u>151,161</u>	<u>460,540</u>	
Utang pajak	11,267	12,950	Taxes payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	25,311,700	27,743,500	Debt securities issued
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(21,028)	(31,111)	Unamortized debt issuance cost
	<u>25,290,672</u>	<u>27,712,389</u>	
Liabilitas derivatif	56	--	Derivatives payable
Pinjaman yang diterima	29,297,065	28,799,571	Fund borrowings
Utang asuransi	6,306	4,055	Insurance payable
Utang penjaminan	61,715	62,363	Guarantee payable
Liabilitas asuransi	7,961	6,390	Insurance liabilities
Estimasi klaim penjaminan	478,657	392,559	Estimated guarantee claim
Liabilitas imbalan kerja	144,514	157,675	Liability for employee benefits
Liabilitas sewa	5,553	10,980	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	1,446,596	1,268,499	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS	<u>56,947,569</u>	<u>58,920,541</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Kontribusi modal Pemerintah			Government capital contribution
Penugasan Umum	23,589,123	23,640,939	General Assignment
Penugasan Khusus	14,013,308	13,700,000	National Interest Account
	<u>37,602,431</u>	<u>37,340,939</u>	
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan	(3,391)	26,462	Unrealized (loss)/gain of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	122,598	119,529	Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax
Saldo laba			Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya:			Appropriated:
Cadangan umum	322,161	322,161	General reserve
Cadangan tujuan	758,235	758,235	Specific reserve
	<u>1,080,396</u>	<u>1,080,396</u>	
Belum ditentukan penggunaannya	(11,933,790)	(8,446,949)	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	<u>26,868,244</u>	<u>30,120,377</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>83,815,813</u>	<u>89,040,918</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

Attachment II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
PENDAPATAN DAN			INCOME AND EXPENSES
BEBAN OPERASIONAL			FROM OPERATIONS
Pendapatan bunga dan usaha syariah			Interest income and income from sharia
Pendapatan bunga			Interest income
Penugasan Umum	2,711,128	2,932,545	General Assignment
Penugasan Khusus	404,978	410,231	National Interest Account
	<u>3,116,106</u>	<u>3,342,776</u>	
Usaha syariah			Income from sharia
Penugasan Umum	594,439	920,739	General Assignment
Penugasan Khusus	148	--	National Interest Account
	<u>594,587</u>	<u>920,739</u>	
Total pendapatan bunga dan usaha syariah	3,710,693	4,263,515	Total interest income and income from sharia
Pendapatan usaha dari Ujrah	309	--	Income from Ujrah
Beban bunga	<u>(2,936,114)</u>	<u>(3,057,214)</u>	Interest expense
PENDAPATAN BUNGA DAN USAHA SYARIAH - NETO	774,888	1,206,301	INTEREST INCOME AND INCOME FROM SHARIA - NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan dari asuransi			Income from insurance
Pendapatan dari asuransi	23,129	12,357	Income from insurance
Premi reasuransi	<u>(10,053)</u>	<u>(7,568)</u>	Reinsurance premiums
Pendapatan dari asuransi - neto	<u>13,076</u>	<u>4,789</u>	Income from insurance - net
Kenaikan pada liabilitas asuransi	(1,444)	(3,190)	Increase in insurance liabilities
Kenaikan pada aset reasuransi	903	1,348	Increase in reinsurance assets
Beban klaim asuransi dan lainnya	(994)	(1,074)	Claim expense from insurance and other
Pendapatan dari penjaminan	115,552	79,353	Income from guarantee
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	(35,302)	24,715	Gain on foreign exchange transactions - net
Provisi dan komisi selain dari pembiayaan dan piutang	51,176	71,443	Non financing and receivables related fees and commission
Lain-lain	<u>43,247</u>	<u>38,036</u>	Others
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - NETO	186,214	215,420	TOTAL OTHER OPERATING INCOME - NET

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

Attachment II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2022 and 2021
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(2,107,596)	(257,752)	Provision for impairment losses on financial assets
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	(652)	(114)	Provision for impairment losses on estimated guarantee claim
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	(458,842)	(467,309)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	(269,823)	(269,077)	General and administrative
Lain-lain	(23,461)	(22,377)	Others
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(752,126)	(758,763)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
(RUGI)/LABA OPERASIONAL	(1,899,272)	405,092	(LOSS)/PROFIT FROM OPERATIONS
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	6,907	3,947	NON-OPERATING INCOME - NET
(RUGI)/LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	(1,892,365)	409,039	(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	(1,222,189)	(21,643)	TAX EXPENSE
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN	(3,114,554)	387,396	(LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI			OTHER COMPREHENSIVE INCOME TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(38,273)	(16,659)	Changes in fair value of financial assets fair value through other comprehensive income- net
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	8,420	3,665	Tax related to components of other comprehensive income
	(29,853)	(12,994)	

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
**Lampiran II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**Attachment II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI			OTHER COMPREHENSIVE INCOME NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	3,935	35,749	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	(866)	(7,865)	Tax related to components of other comprehensive income
	<u>3,069</u>	<u>27,884</u>	
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	<u>(26,784)</u>	<u>14,890</u>	OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME - NET OF TAX
TOTAL (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(3,141,338)</u>	<u>402,286</u>	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME FOR THE YEAR

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN III LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (ENTITAS INDUK) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT III LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (PARENT ENTITY) STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok pada nilai wajar melalui penghasilan komperhensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ Unrealized gain/(loss) from increase in the fair value of financial assets in group at fair value through other comperhensive income net of deferred tax	Kontribusi modal Pemerintah/ Government capital contribution	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan/ Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax	Saldo laba/Retained earnings			Total ekuitas/ Total Equity	
			Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated		Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
			Cadangan umum/ General reserve	Cadangan tujuan/ Specific reserve			
37,340,939	26,462	119,529	322,161	758,235	(8,446,949)	30,120,377	
Saldo per 31 Desember 2021							
Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	--	--	--	(87,164)	--	--	(87,164)
Kapitalisasi Modal berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	261,492	--	--	(261,492)	--	--	--
Bagian laba pemerintah	--	--	--	--	--	(23,631)	(23,631)
Pembentukan cadangan umum	--	--	--	348,656	--	(348,656)	--
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak tangguhan	--	(29,853)	--	--	--	--	--
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	--	--	3,069	--	--	--	3,069
Rugi tahun berjalan	--	--	--	--	--	(3,114,554)	(3,114,554)
Saldo per 31 Desember 2022	37,602,431	(3,391)	122,598	322,161	758,235	(11,933,790)	26,868,244
Balance as of December 31, 2021							
Impact of transitional adjustment on Government's not-tax revenue based on Law No.2 year 2009 article 20 paragraph 2							
Capitalization based on Law No.2 year 2019 article 20 paragraph Government's profit share Allocation for general reserve							
Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income- net of deferred tax							
Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax							
Loss for the year							
Balance as of December 31, 2022							

Balance as of December 31, 2021
Impact of transitional adjustment on Government's not-tax revenue based on Law No.2 year 2009 article 20 paragraph 2
Capitalization based on Law No.2 year 2019 article 20 paragraph Government's profit share
Allocation for general reserve
Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income- net
of deferred tax
Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax
Loss for the year
Balance as of December 31, 2022

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN III LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (ENTITAS INDUK) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT III LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (PARENT ENTITY) STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)

For the Years Ended

December 31, 2022 and 2021

(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ Unrealized gain/(loss) from increase in the fair value of financial assets in group at fair value through other comprehensive income net of deferred tax	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan/ Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax	Saldo laba/Retained earnings		Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Total ekuitas/ Total Equity	
			Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Cadangan umum/ General reserve	Cadangan tujuan/ Specific reserve		
Saldo per 31 Desember 2020	32,146,276	39,456	91,645	322,161	758,235	(8,561,224)	24,796,549
Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	--	--	--	(43,962)	(20,926)	--	(64,888)
Kapitalisasi Modal berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	194,663	--	--	(131,885)	(62,778)	--	--
Bagian laba pemerintah	--	--	--	--	--	(13,570)	(13,570)
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	--	--	--	175,847	83,704	(259,551)	--
Modal tambahan	--	--	--	--	--	--	--
Penghasilan Umum	2,500,000	--	--	--	--	--	2,500,000
Penghasilan Khusus	2,500,000	--	--	--	--	--	2,500,000
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	--	(12,994)	--	--	--	--	(12,994)
setelah pajak tangguhan	--	--	--	--	--	--	--
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	--	--	27,894	--	--	--	27,894
Laba tahun berjalan	--	--	--	--	--	387,396	387,396
Saldo per 31 Desember 2021	37,340,939	26,462	119,529	322,161	758,235	(8,446,949)	30,120,377

Balance as of December 31, 2020

Impact of transitional adjustment on Government's not-tax revenue based on Law No. 2 year 2009

article 20 paragraph 2

Capitalization based on Law No.2 year 2019

article 20 paragraph

Government's profit share

Allocation for general reserve and specific reserve

Additional capital

General Assignment

National Interest Account

Unrealized loss of

financial assets at fair value

through other comprehensive

income - net

of deferred tax

Remeasurement of defined benefit

obligation, net of deferred tax

Income for the year

Balance as of December 31, 2021

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN IV

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

(ENTITAS INDUK)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah

kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT IV

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

(PARENT ENTITY)

STATEMENTS OF CASH FLOW

For the Years Ended

December 31, 2022 and 2021

(Expressed in million Rupiah

unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	3,104,498	3,342,779	Interest, fees and commissions received
Pendapatan usaha syariah	594,896	920,739	Sharia income
Pendapatan operasional lainnya - neto	221,516	224,896	Other operating income - net
Pembayaran pajak penghasilan badan - neto	75,806	91,639	Payments of corporate income tax - net
Beban operasional lainnya - neto	(638,998)	(613,596)	Other operating expenses - net
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya	(2,301,480)	(3,042,626)	Interest and other financing charges
Pendapatan bukan operasional - neto	6,898	3,071	Non-operating income - net
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1,063,136	926,902	Cash flows from operations before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi (Kenaikan)/penurunan aset operasi:			Changes in operating assets and liabilities
Tagihan derivatif	6	(6)	(Increase)/decrease in operating assets: Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang	(2,681,616)	3,519,321	Financing and receivables
Pembiayaan/piutang syariah	958,557	2,930,610	Sharia financing/receivables
Biaya dibayar dimuka	653	(3,714)	Prepaid expenses
Piutang asuransi dan penjaminan	(27,125)	(251,025)	Insurance and guarantee receivables
Aset reasuransi	(929)	(1,331)	Reinsurance assets
Tagihan akseptasi	310,295	99,787	Acceptances receivable
Aset lain-lain	6,601	40,341	Other assets
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:			Increase/(decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	13,476	(5,366)	Current liabilities
Liabilitas akseptasi	(309,379)	(102,187)	Acceptances payable
Utang pajak	(1,683)	1,286	Taxes payable
Liabilitas derivatif	56	--	Derivatives payable
Utang asuransi	2,251	1,492	Insurances payable
Utang penjaminan	(648)	61,803	Guarantee payable
Liabilitas asuransi	1,571	3,160	Insurance liabilities
Estimasi klaim penjaminan	86,098	351,430	Estimated guarantee claim
Liabilitas imbalan kerja	(9,226)	(24,878)	Liability for employee benefits
Liabilitas lain-lain	215,112	(81,494)	Other liabilities
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(372,794)	7,466,131	Net cash (used in)/provided by operating activities

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN IV LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (ENTITAS INDUK)

LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT IV LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (PARENT ENTITY)

STATEMENTS OF CASH FLOW (Continued)

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31,	
	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	9	875
Pembelian efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	(1,476,856)	(4,657)
Penyertaan saham	9,513	(50,003)
Penjualan efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	28,513	
Perolehan aset tetap	(11,549)	(44,745)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(1,450,370)	(98,530)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman yang diterima	70,215,181	38,343,278
Pembayaran pinjaman yang diterima	(69,717,687)	(38,143,480)
Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo	(3,089,300)	(8,781,000)
Pembayaran liabilitas sewa	(6,047)	(3,857)
Pembayaran ke pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak	(87,164)	(64,888)
Pembayaran bagian laba pemerintah	(23,631)	(13,570)
Penerimaan kontribusi modal dari Pemerintah Republik Indonesia		
Penugasan Umum	--	2,500,000
Penugasan Khusus	--	2,500,000
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(2,708,648)	(3,663,517)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(35,302)	24,715
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(4,567,114)	3,728,799
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	17,267,651	13,538,852
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	12,700,537	17,267,651

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Proceeds from sale of premises and equipment
Purchase of marketable securities at fair value through other comprehensive income
Equity investment
Selling of marketable securities at fair value through other comprehensive income
Acquisitions of premises and equipment

Net cash used in investing activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Proceeds from fund borrowings
Payments of fund borrowings
Payments for matured debt securities issued
Payments of lease liability
Payments for government as Government non Tax Revenue
Payments government's profit share
Contributed capital received from Government of the Republic of Indonesia
General Assignment
National Interest Account

Net cash used in financing activities

Foreign exchange effect related to cash and cash equivalents

NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND EQUIVALENTS

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CASH FLOW (Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2022 and 2021
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:			COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:
Kas	38	65	Cash
Giro pada Bank Indonesia	426	2,318	Current account
Giro pada bank	180,035	664,113	with Bank Indonesia
Penempatan pada bank - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	12,520,038	16,601,155	Current accounts with banks
Total kas dan setara kas	12,700,537	17,267,651	Placements with banks - maturing within three months or less since the acquisition date
			Total cash and cash equivalents

